



UNIVERSITAS TERBUKA

SEMINAR NASIONAL

“REFLEKSI PEMBANGUNAN SOSIAL,
EKONOMI DAN POLITIK DI INDONESIA”

- 23 Oktober 2014 -

ISBN : 978-979-011-922-2

Proceeding Seminar Nasional UT

Universitas Terbuka Convention Center (UTCC)

23 Oktober 2014

**Refleksi Pembangunan Sosial, Ekonomi
dan Politik di Indonesia**

Seminar Nasional UT 2014
Refleksi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia

ISBN : 978-979-011-922-2

Welcoming Note

Rektor Universitas Terbuka

**Yang saya hormati
Para Peserta Seminar**

*Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua*

Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Peserta Seminar. Tema yang kami angkat pada Seminar Nasional ini adalah “Refleksi Pembangunan Sosial, Ekonomi Dan Politik Di Indonesia.” Tema ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi terkini di Indonesia khususnya dalam menyikapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015.

Di berbagai diskursus dan media menunjukkan bahwa pembangunan sosial, ekonomi dan politik belum dilakukan secara optimal, hal ini diindikasikan lemahnya tata kelola pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu kita perlu melakukan refleksi bagaimana tata kelola pembangunan sosial, politik dan ekonomi saat ini dan kedepan. Diharapkan dengan refleksi tersebut, kita dapat mengambil langkah perbaikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian kita juga akan siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Seperti kita ketahui, MEA mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang, dimana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Misalnya, mulai dari bidang ketenagakerjaan, investasi, produk, modal, investasi hingga jasa. Ada beberapa keuntungan bagi negara yang sudah siap menyongsong MEA ini, antara lain adalah meningkatkan daya kompetisi dalam persaingan ekonomi antar negara, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antara negara Asia Tenggara. Ketiadaan halangan tarif membuat masyarakat Asean dapat menikmati produk-produk berkualitas secara kompetitif. Namun disisi lain akan menjadi ancaman bagi produk lokal yang tidak mampu bersaing. Hal inilah tentunya harus menjadi perhatian kita semua para akademisi, praktisi maupun birokrasi untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia bersaing di kawasan Asean.

Masalah ekonomi bermuara pada masalah sosial, dan masalah sosial menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN. Masalah sosial yang cukup krusial dalam implementasi masyarakat ekonomi Asean 2015 adalah faktor kemiskinan dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan, lambannya adaptasi dan adopsi teknologi serta inovasi yang mendorong daya saing ekonomi. Faktor kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi seringkali dimanifestasikan dalam bentuk konflik hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha/pemilik perusahaan dalam upaya tuntutan penyesuaian upah. Berbagai tuntutan tersebut cenderung melahirkan ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga berpotensi menghambat implementasi MEA 2015.

Masalah politik, patut dicermati bahwa kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi pemilihan anggota DPRD dan DPR, dan pemilihan presiden. Sampai saat ini hiruk pikuk dampak dari proses demokrasi masih belum selesai. Rakyat Indonesia dituntut untuk secara pandai memilih para pemimpinnya baik legislatif maupun eksekutif yang mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik. Masalah politik ini bila tidak dikelola secara baik

dan bijaksana sangat berpotensi melahirkan ketidakpastian baik dari segi keamanan, sosial dan politik yang berimbas pada masalah ekonomi. Pergantian pemimpin dan kabinet misalnya dari kabinet pro-pasar dan sosial kepada kabinet anti pasar dan pro-sosial semata tentulah merupakan faktor krusial bagi masa depan implementasi MEA 2015.

Sebagai bagian dari kaum intelektual dan terdidik, saya mengajak para peserta Seminar Nasional FISIP-FEKON, untuk dapat memberikan kontribusi dalam Pembangunan Sosial, Ekonomi Dan Politik demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya dan sekali lagi saya sampaikan selamat melaksanakan seminar.

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2014

Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tian Belawati', written in a cursive style.

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D

NIP 19620401 198601 2001

Welcoming Note

Ketua Seminar Nasional UT

Yang saya hormati
Para Peserta Seminar Nasional FEKON-FISIP UT 2014

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

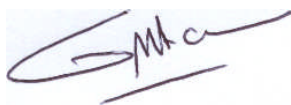
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kelimpahan kasih dan karunia-Nya maka buku program seminar ini bisa diselesaikan. Buku program dari seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka yang bertema "Refleksi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia" merupakan kumpulan abstrak dari makalah yang dipresentasikan pada seminar ini.

Tema sekaligus tujuan utama dari seminar ini didekasikan untuk memberikan kontribusi terhadap langkah perbaikan tatakelola pembangunan sosial, politik dan ekonomi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tujuan seminar ini terinspirasi dari fakta di lapangan bahwa pembangunan sosial, ekonomi dan politik belum dilakukan dengan optimal dikarenakan lemahnya tatakelola pembangunan. Melalui seminar ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi forum diseminasi yang dapat dijadikan masukan bagi peningkatan pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia.

Kami selaku panitia berharap agar partisipasi pada Semnas UT-2014 dapat memberikan pengalaman dan dapat bertukar pikiran dengan sesama peserta, sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan konsep pemikiran dan penelitian dibidang tatakelola pembangunansosial, politik dan ekonomi pada masa mendatang. Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan seminar nasional ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2014
Ketua Seminar



Dr. Ginta Ginting SE., MBA
NIP 19600818 1986032002

**Susunan Acara Seminar Nasional UT 2014
“Refleksi Pembangunan Sosial Ekonomi dan Politik di
Indonesia”**

Kamis, 23 Oktober 2014
Universitas Terbuka Convention Center (UTCC)

Waktu	Aktivitas
07.00 – 08.15	Registrasi
08.15 – 08.30	<i>Welcome Dance</i>
08.30 – 09.00	Pembukaan: 1. Laporan Ketua Panitia: Dr. Ginta Ginting SE, MBA. 2. Pidato Pembukaan oleh Rektor UT: Prof. Dr. TianBelawati, M.Ed, Ph.D
09.00 – 10.00	Key Note Speaker : Prof. Dr. Fasli Djalal (Kepala BKKBN)
10.00 – 11.30	Diskusi Panel Pembicara: 1. Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, SE, M.SC (Direktur INDEF dan Guru Besar FEB Univ. Brawijaya) 2. YudiLatif, MA, Ph.D (Ketua Refform Institute) Moderator: Dr. Sri Sedyaningsih
11.30 – 12.30	Istirahat
12.30 – 14.00	Sesi Paralel 1
14.00 – 16.00	Sesi Paralel 2
16.00 - 16.30	Penutupan

Jadwal Presentasi Peserta

SESI PARALEL 1 RUANG 1 UTCC

MODERATOR : HARYANTO

(Waktu: 12.30 sd 14.00)

Penanggung jawab ruangan = Setyo Kuncoro

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Jamaluddin Hos (RPSEP-01)	Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Reformulasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Bingkai Kemajemukan Dan Otonomi Daerah
2	12.45 - 13.00	Fritz H.S. Damanik (RPSEP-02)	SMA Harapan Mandiri Medan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Menata Dan Menguatkan Institusi Pelayanan Publik Bersendikan Kearifan Lokal
3	13.00 - 13.15	Moh. Waspa Kusuma Budi (RPSEP-03)	STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Menegakkan Netralitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014
4	13.15 - 13.30	Irdatama Santia Anindita (RPSEP-04)	UPBJJ UT Semarang	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
5	13.30 - 13.45	Faurani Santi (RPSEP-05)	Mahasiswa S3 Program Doktor Ekonomi Pertanian- IPB	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Analisis Aliran Perdagangan Pariwisata Internasional Dan Dampaknya Terhadap Pariwisata Indonesia
6	13.45 - 14.00	Sofyan Aripin (RPSEP-06)	Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Analisis Kompetensi Birokrasi Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

SESI PARALEL 1 RUANG 2 UTCC
MODERATOR : SRI SUHARMINI
(Waktu: 12.30 sd 14.00)

Penanggung jawab ruangan =Setyo Kuncoro

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Bunga Aprillia (RPSEP-07)	International Women University	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Ironi Program Hibah Ruang Kelas Baru (RKB) di Provinsi Jawa Barat (Sebuah studi kasus: Program Hibah RKB Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2013-2014 oleh organisasi)
2	12.45 - 13.00	Tedi Ervianto (RPSEP-08)	FISIP Universitas Udayana	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kemiskinan Provinsi Versus Kemiskinan Kabupaten DI BALI
3	13.00 - 13.15	Dudi Wahyudi (RPSEP-09)	Universitas Sebelas Maret	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan pemeriksaan pajak terhadap <i>tax avoidance</i>
4	13.15 - 13.30	Hery Susanto (RPSEP-10)	UPBJJ UT Mataram	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi NTB
5	13.30 - 13.45	Nora Eka Putri (RPSEP-11)	Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kendala dan Strategi Pelaksanaan <i>E-Government</i> dalam Pembangunan Daerah
6	13.45 - 14.00	Agus Joko Purwanto (RPSEP-12)	FISIP UT	Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi: Pengalaman Universitas Terbuka

SESI PARALEL 1 RUANG 3 UTCC
MODERATOR : NILA KUSUMA
(Waktu: 12.30 sd 14.00)

Penanggung jawab ruangan = Setyo Kuncoro

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Joseph M J Renwarin (RPSEP-13)	Kalbis Institute Jakarta	Percepatan Pembangunan Daerah	Indonesia membutuhkan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO)
2	12.45 - 13.00	Fitri Amalia (RPSEP-14)	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Percepatan Pembangunan Daerah	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Banten
3	13.00 - 13.15	Pitri Yandri (RPSEP-15)	Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah(PSDOD) (STIE Ahmad Dahlan Jakarta	Percepatan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Situ/Rawa Di Indonesia: Isu Desentralisasi, Partisipasi Warga, Dan Instrumen Ekonomi
4	13.15 - 13.30	Hascaryo (RPSEP-16)	UPBJJ-UT Semarang	Percepatan Pembangunan Daerah	Kata siapa, Yogyakarta Kota Budaya?
5	13.30 - 13.45	Darmanto (RPSEP-17)	FISIP Universitas Terbuka	Pembangunan Daerah-Lingkungan	Implementasi Kebijakan dalam Governansi Hutan Lindung di Kab. Wonosobo.
6	13.45 - 14.00	Siti Samsiyah (RPSEP-18)	Fisip-Universitas Terbuka	Pembangunan Daerah-Budaya	Reformasi Informasi Sebagai Strategi Membangun <i>Knowledge</i> <i>Society</i>

SESI PARALEL 1 RUANG 4 UTCC

MODERATOR : IRMA

(Waktu: 12.30 sd 14.00)

Penanggung jawab ruangan = Sutartono

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Rini Rahayu Kurniati (RPSEP-19)	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang (UNISMA) Jawa Timur	Marketing dan Manajemen	Analisis Keunggulan Kompetitif melalui CRM (<i>Customer Relationship Marketing</i>) dalam Kepuasan Nasabah Perbankan syariah di Jawa Timur
2	12.45 - 13.00	Siti Sarah (RPSEP-20)	Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang (UNISMA) Jawa Timur	Marketing dan Manajemen	Strategi Ritel Oleh-Oleh dalam Membangun <i>Store Image</i> di Kawasan Wisata Batu Jawa Timur
3	13.00 - 13.15	Siti Nurjanah, Brenda Aurista, Tito Hananta Kusuma (RPSEP-21)	Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis	Marketing dan Manajemen	Analisis Kualitas Layanan Berdasarkan Karakteristik Gender Pada Pelaku Umkm Bidang Usaha Makanan
4	13.15 - 13.30	Tamjuddin, Moh Nasoha (RPSEP-22)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Marketing dan Manajemen	Persepsi mahasiswa UT terhadap Branding UT
5	13.30 - 13.45	Sudrajat, Hendrin Hariati Sawitri Heri Wahyudi (RPSEP-23)	UPBJJ UT Denpasar	Marketing dan Manajemen	Analisis Strategi Promosi UPBJJ-UT DENPASAR
6	13.45 - 14.00	Irma, Rini Dwiyani Hadiwidjaja (RPSEP-24)	FEKON UT	Marketing dan Manajemen	<i>The Effect Of Information System Quality, Perceived Usefulness And Information Quality To End Users' Satisfaction Of Accounting Dry Lab Program At Open University Of Indonesia</i>

SESI PARALEL 1 RUANG 5 UTCC
MODERATOR : HERIYANNI MASITHOH
(Waktu: 12.30 sd 14.00)

Penanggung jawab ruangan = Sutartono

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Taufik Hidayat dan Dewi Saraswati (RPSEP-25)	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Percepatan Pembangunan Daerah	Diskusur Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kegagalan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	12.45 - 13.00	Ari Muliarta Ginting (RPSEP-26)	Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Setjen DPR	Percepatan Pembangunan Daerah	Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia
3	13.00 - 13.15	Sri Nathasya Br Sitepu dan Wendra Hartono (RPSEP-27)	Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra UC Town, CitraLand Surabaya 60219	Percepatan Pembangunan Daerah	Senjata Indonesia Dalam menghadapi AFTA (<i>Asean Free Trade Area</i>) 2015
4	13.15 - 13.30	Antarin Prasanthi Sigit (RPSEP-28)	Mahasiswa program doktoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Percepatan Pembangunan Daerah	Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Responsif Akan Akses Terhadap Keadilan Bagi Kelompok Marginal
5	13.30 - 13.45	Amata Luna Bethari (RPSEP-29)	Magister Ilmu Sosial Universitas Katolik Parahyangan	Percepatan Pembangunan Daerah	Kerjasama Penanggulangan HIV/AIDS, Memungkinkan?
6	13.45 - 14.00	Enny Sri Martini (RPSEP-30)	UPBJJ Palembang	Percepatan Pembangunan Daerah	Merefleksi Pentingnya Dimensi Wilayah Sebagai Faktor Lokasional Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kota Palembang

SESI PARALEL 1 RUANG 6 UTCC

MODERATOR : IRSANTI W

(Waktu: 12.30 sd 14.00)

Penanggung jawab ruangan = Sutartono

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Fransisca Desiana Pranatasari (RPSEP-31)	Universitas Ciputra Surabaya	MSDM dan Manajemen Strategi	Kemampuan Bersaing Instansi Pemerintah Berentrepreneur Melalui Analisis SWOT
2	12.45 - 13.00	Risnashari (RPSEP-32)	UPBJJ-UT Makassar	MSDM dan Manajemen Strategi	Implikasi Faktor Sosial Dan Ekonomi Dalam Peningkatan Prestasi Kerja Staf Edukatif Pada Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
3	13.00 - 13.15	Umi Rusilowati (RPSEP-33)	Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang	MSDM dan Manajemen Strategi	Analisis Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Pada Lemlitbang Pemerintah Pengambil Kebijakan)
4	13.15 - 13.30	Wise Rogate Silalahi (RPSEP-34)	UPBJJ UT Kupang	MSDM dan Manajemen Strategi	Penerapan Prinsip Stratejik Manajemen Dalam Mempertahankan Jumlah Mahasiswa Di UPBJJ-UT Kupang
5	13.30 - 13.45	Timbul Sahala Tua Hutabarat (RPSEP-35)	UT Jurusan Sosiologi	MSDM dan Manajemen Strategi	Budaya Dan Etika Organisasi Publik/Bisnis
6	13.45 - 14.00	Hanif Nurcholis (RPSEP-36)	FISIP Universitas Terbuka	MSDM dan Manajemen Strategi	<i>The Problematic Career Plan of The Lecturers of Universitas Terbuka.</i>

SESI PARALEL 1 RUANG 7 UTCC
MODERATOR : ALI MUKTIYANTO
(Waktu: 12.30 sd 13.45)

Penanggung jawab ruangan = Sutartono

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	12.30 - 12.45	Zulfikar (RPSEP-37)	<i>Accounting spv</i> , PT Florentine Andika Sejahtera	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	<i>Specialty coffee</i> sebagai aset tak berwujud, tinjauan akuntansi
2	12.45 - 13.00	Hendrian dan Rini Dwiyani H. (RPSEP-38)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Identifikasi Permasalahan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Kasus di Tangerang Selatan dan Bogor)
3	13.00 - 13.15	Noorina Hartati (RPSEP-39)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	<i>Intellectual Capital</i> Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur
4	13.15 - 13.30	Ganovar (RPSEP-40)	Puslitbangwas BPKP	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Kajian Tentang Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP: Terkait Dengan Hasil Survei <i>Political Economic Risk</i> <i>Consultancy</i> (PERC)
5	13.30 - 13.45	Ali Muktiyanto, Hilda Rossieta dan Ancella A. Hermawan (RPSEP-41)	Mahasiswa S3 Akuntansi Universitas Indonesia	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Fakto-faktor Utama <i>Good</i> <i>University Governance</i> Pada Program Studi Akuntansi Di Indonesia

SESI PARALEL 2 RUANG 1 UTCC
MODERATOR : NADIA SRI DAMAJANTI
(Waktu: 14.00 sd 15.45)

Penanggung jawab ruangan = Arief Rahman S

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Dwi Wulandari (RPSEP-42)	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang	Ekonomi dan Kelembagaan	Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Harga Saham Di Indonesia Dan Singapura
2	14.15 - 14.30	Rahmad Budi S., Rian Hilmawan dan Rizky Yudaruddin (RPSEP-43)	Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur	Ekonomi dan Kelembagaan	Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal? Dampak Pertambangan Batu Bara di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia
3	14.30 - 14.45	Purwaningdyah Murti Wahyuni dan Siswandaru K (RPSEP-44)	UPBJJ UT Semarang	Ekonomi dan Kelembagaan	Refleksi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
4	14.45 - 15.00	Etty Puji Lestari, Isnina WSU, Tri Kurniawati R (RPSEP-45)	Fakultas Ekonomi Universitas terbuka	Ekonomi dan Kelembagaan	Kebijakan Target Inflasi Sebagai Sasaran Kebijakan Moneter Baru Bank Sentral
5	15.00 - 15.15	Solakhudin (RPSEP-46)	UPBJJ-UT Semarang	Ekonomi dan Kelembagaan	Refleksi Pembangunan Perekonomian Desa Guna Menghidupkan Perekonomian Bangsa
6	15.15 - 15.30	Nadia Sri Damajanti, INBaskara dan Rini Febrianti (RPSEP-47)	Fakultas Ekonomi Universitas terbuka	Ekonomi dan Kelembagaan	Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Peningkatan Kualitas Sumberdaya Insani
7	15.30 - 15.45	Hidir Tresnadi (RPSEP-48)	PTSM-BPPT	Ekonomi dan Kelembagaan	Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah di Kab. Tanah Laut

SESI PARALEL 2 RUANG 2 UTCC
MODERATOR : AMI PUJIWATI
(Waktu: 14.00 sd 15.45)

Penanggung jawab ruangan = Arief Rahman S

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Yusar Sagara (RPSEP-49)	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	MSDM dan Manajemen Strategi	Respon Mahasiswa Tentang Penerapan Pembelajaran Berbasis <i>E-Learning</i> Melalui Pemanfaatan <i>Academic Information System (AIS)</i> Di Lingkungan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan <i>Technology Acceptance Models (TAM)</i>
2	14.15 - 14.30	Irmawaty (RPSEP-50)	Universitas Terbuka	MSDM dan Manajemen Strategi	Peran <i>Human Capital</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi.
3	14.30 - 14.45	Sri Endah Setiarini (RPSEP-51)	SMA Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah	MSDM dan Manajemen Strategi	Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Melalui Kompetensi untuk merefleksi pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia
4	14.45 - 15.00	Joko Rizkie Widokarti (RPSEP-52)	Mahasiswa S3 Universitas Padjajaran	MSDM dan Manajemen Strategi	Mengelola SDM sebagai Katalisator Percepatan Pembangunan Daerah
5	15.00 - 15.15	Nurhadi (RPSEP-53)	Amik	MSDM dan Manajemen Strategi	Pengaruh Analisa Jabatan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Carton Indus Sumberjaya Tangerang .
6	15.15 - 15.30	Wiwin Siswantini Sri Ismulyaty (RPSEP-54)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	MSDM dan Manajemen Strategi	Pengaruh <i>Trust, Risk And Technology Acceptance Models</i> Terhadap Keputusan Nasabah Dengan Minat Nasabah Sebagai Variabel <i>Intervening</i>
7.	15.30 - 15.45	Etty Susanti, Ami Pujiwati, Helmiatin (RPSEP-55)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	MSDM dan Manajemen Strategi	Pengaruh <i>Stressor</i> Terhadap Stres Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Karyawan Universitas Terbuka (UT)

SESI PARALEL 2 RUANG 3 UTCC
MODERATOR :SUTARTONO
(Waktu: 14.00 sd 16.00)

Penanggung jawab ruangan = Arief Rahman S

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Made Wahyu Adhiputra (RPSEP-56)	Universitas Mahendradatta, Bali	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Prinsip Etika Dalam Bisnis Hindu (Fenomena Praktik Bisnis Di Era Globalisasi)
2	14.15 - 14.30	Ratna Nurhayati Seno Wibowo Gumbira (RPSEP-57)	FISIP UT	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kajian Kritis Putusan <i>Judicial Review</i> tentang Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
3	14.30 - 14.45	Adil Mubarak (RPSEP-58)	Universitas Negeri Padang	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Peran Ormas Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Dalam Bidang Pemberdayaan
4	14.45 - 15.00	Purwaningdyah Murti Wahyuni Siswandaru K (RPSEP-59)	UPBJJ UT Semarang	Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Sebagai Pendorong Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
5	15.00 - 15.15	Megafury Apriandhini (RPSEP-60)	Universitas Terbuka	Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Pengawasan Intern BUMD Sebagai Wujud Penyelamatan Aset
6	15.15 - 15.30	Enceng dan Yuli TirtariandiEl Anshori (RPSEP-61)	FISIP UT	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
7	15.30 - 15.45	Herwati Dwi Utami (RPSEP-62)	FISIP-Universitas Terbuka	Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Akses Informasi yang Akurat cepat mudah dan merata mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.
8	15.45 - 16.00	Yanti Hermawati (RPSEP-63)	FISIP-Universitas Terbuka	Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Komunikasi Anggota DPR dan Konstituen; Menjalin Relasi Bukan Transaksi

SESI PARALEL 2 RUANG 4 UTCC
MODERATOR :SUHARTONO
(Waktu: 14.00 sd 15.30)

Penanggung jawab ruangan = Iswahyudi

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Yusmar Ardhi Hidayat (RPSEP-64)	Jurusan Admin, Niaga - Polines	Manajemen Strategi – Sektor UKM	Kajian Efek <i>Multiplier</i> Produk Unggulan Berbasis Kluster UKM Pengolahan Ikan Asap
2	14.15 - 14.30	Eha Saleha dan Yuli Tirtariandi El Anshori (RPSEP-65)	FISIP UT	Manajemen Strategi – Sektor UKM	Kendala Implementasi Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Di Kabupaten Rejang Lebong
3	14.30 - 14.45	Nuraini dan Rizaldi Nasri (RPSEP-66)	Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl KH Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, 15419	Manajemen Strategi – Sektor UKM	Optimalisasi Pembiayaan Syariah Guna Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada LKMS Dan UMKM Di Tangerang Selatan)
4	14.45 - 15.00	Wijanarko (RPSEP-67)	UPBJJ-UT Pontianak	Manajemen Strategi – Sektor UKM	Pemberdayaan Petani Melalui Komunikasi Penyadaran Kritis (Kasus Pemberdayaan Petani Padi Organik Paguyuban Petani Al-Barakah Kabupaten Semarang)
5	15.00 - 15.15	Heri Wahyudi (RPSEP-68)	UPBJJ-UT Denpasar	Manajemen Strategi – Sektor UKM	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. NUSA PERKASA JAYA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
6	15.15 - 15.30	Ginta Ginting (RPSEP-69)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Manajemen Strategi – Sektor UKM	<i>How Can Small Medium Enterprises/SME's Become Sustainable And Respond To Global Demand Corporate Citizen? (Approach To Business Responsibility Movement)</i>

SESI PARALEL 2 RUANG 5
MODERATOR :RINI DWIYANI H
(Waktu: 14.00 sd 15.15)

Penanggung jawab ruangan = Iswahyudi

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Tubagus Ismail (RPSEP-70)	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Kepuasan Klien Dan Kegunaan Laporan Audit Eksternal <i>Stake Holder</i> (Perspektif Klien Audit)
2	14.15 - 14.30	Adhi Irawan, Halim Dedy Perdana, Hanung Triatmoko (RPSEP-71)	Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik <i>Income Smoothing</i> (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia)
3	14.30 - 14.45	Rakhmini Juwita Galuh Tresna Murti (RPSEP-72)	Upbjj-UT Serang, Politeknik LP3i Bandung	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Anggaran Kinerja Di Provinsi Banten
4	14.45 - 15.00	Amelia Rizky Alamanda (RPSEP-73)	Bandung	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Pengaruh Kinerja Zakat Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Bank Umum Syariah Indonesia
5	15.00 - 15.15	Rini Dwiyani H (RPSEP-74)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik	Pengaruh Rasio Kinerja Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Indonesia

SESI PARALEL 2 RUANG 6

MODERATOR : HELMIATIN

(Waktu: 14.00 sd 15.45)

Penanggung jawab ruangan = Lincoln Sirait

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Arif Pujiyono dan Siti Mutmainah (RPSEP-75)	FEB UNDIP Semarang	UKM Dan Kewirausahaan	Strategi Koperasi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia
2	14.15 - 14.30	Harini dan Bambang Mursito (RPSEP-76)	Universitas Sebelas Maret	UKM Dan Kewirausahaan	Koperasi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
3	14.30 - 14.45	Meutia (RPSEP-77)	Fakultas Pertanian - Jurusan Agribisnis Universitas Tirtayasa Banten	UKM Dan Kewirausahaan	Efektifitas Pola Pembiayaan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Klaster Agribisnis Di Propinsi Banten
4	14.45 - 15.00	Tuti Khairani Harahap (RPSEP-78)	Universitas Riau	UKM Dan Kewirausahaan	Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Sarana Interaksi Sosial dan Budaya Masyarakat Pekanbaru
5	15.00 - 15.15	Setyo Kuncoro (RPSEP-79)	FISIP UT	UKM Dan Kewirausahaan	Sukuk Negara Ritel, Potensi, Peluang, Tantangan dan Prospek dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
6	15.15 - 15.30	Yosef Anton Layanan (RPSEP-80)	Program Magister Manajemen, Fak. Pascasarjana. Universitas Katholik Parahyangan	UKM Dan Kewirausahaan	Evaluasi Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk. Cabang Purbaleunyi Bandung
7	15.30 - 15.45	Helmiatin (RPSEP-81)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	UKM Dan Kewirausahaan	<i>Womenpreneurship</i> Di Indonesia

SESI PARALEL 2 RUANG 7

MODERATOR : NASOHA

(Waktu: 14.00 sd 15.45)

Penanggung jawab ruangan = Lincoln Sirait

No	WAKTU	NAMA	INSTITUSI	SUB TEMA	JUDUL
1	14.00 - 14.15	Yasir Riady (RPSEP-82)	UPBJJ-UT Jakarta	Manajemen-Budaya	Membangun Budaya Organisasi dan Kode Etik Pustakawan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme
2	14.15 - 14.30	Gede Umbaran Dipodjoyo (RPSEP-83)	Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta	MSDM dan Manajemen Strategi	Survey Motivasi Kerja Pada Karyawan PT PQR Jakarta
3	14.30 - 14.45	Khalifah Oktarina (RPSEP-84)	Mahasiswa Program Bidikmisi – Ilmu Komunikasi UPBJJ-UT Semarang	Manajemen- Komunikasi	Demokrasi ubah haluan, potret kemunduran bangsa?
4	14.45 - 15.00	Puspa Kapita (RPSEP-85)	Mahasiswa Program Bidikmisi – Ilmu Komunikasi – UPBJJ-UT Semarang	Manajemen- Komunikasi	Sekolah sebagai filter komunikasi budaya
5	15.00 - 15.15	Radeswandri (RPSEP-86)	UPBJJ-UT Pekanbaru	MSDM dan Manajemen Strategi	Implementasi Strategi Promosi Dalam Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Jumlah Mahasiswa pada UPBJJ- UT Pekanbaru
6	15.15 - 15.30	Nasoha (RPSEP-87)	Pasca Sarjana Universitas Terbuka	MSDM dan Manajemen Strategi	Analisis Kesuksesan Sistim <i>Web Based Learning</i>
7	15.30 - 15.45	Deska Manisha (RPSEP-88)	Mahasiswa Program Bidikmisi – Ilmu Komunikasi – UPBJJ-UT Semarang	Manajemen- Komunikasi	Pendidikan etik menjadi target kurikulum 2013
8	15.45 - 16.00	Irmawaty dan Mailani Hamdani (RPSEP-89)	Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka	MSDM dan Manajemen Strategi	Pengaruh <i>Talent Management</i> Terhadap Pengembangan Karir Pegawai Di Universitas Terbuka

Sesi Paralel 1

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Ruang 1, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Haryanto

RPSEP-01

Reformulasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Bingkai Kemajemukan dan Otonomi Daerah

Jamaluddin Hos (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari)

RPSEP-02

Menata dan Memperkuat Institusi Pelayanan Publik Bersendikan Kearifan Lokal

Fritz H.S. Damanik (SMA Harapan Mandiri Medan)

RPSEP-03

Menegakkan Netralitas Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014

Moh. Waspa Kusuma Budi (STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung)

RPSEP-04

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Irdatama Santia Anindita (UPBJJ UT Semarang)

RPSEP-05

Analisis Aliran Perdagangan Pariwisata Internasional dan Dampaknya Terhadap Pariwisata Indonesia

Faurani Santi (Mahasiswa S3 Program Doktor Ekonomi Pertanian-IPB)

RPSEP-06

Analisis Kompetensi Birokrasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Sofyan Aripin (Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 1

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Ruang 2, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Sri Suharmini

RPSEP-07

Ironi Program Hibah Ruang Kelas Baru (RKB) di Provinsi Jawa Barat (Sebuah studi kasus: Program Hibah RKB Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2013-2014 oleh organisasi)

Bunga Aprillia (International Women University)

RPSEP-08

Kemiskinan Provinsi Versus Kemiskinan Kabupaten Di Bali

Tedi Erviantono (FISIP Universitas Udayana)

RPSEP-09

Pengaruh Good Corporate Governance dan pemeriksaan pajak terhadap tax avoidance

Dudi Wahyudi (Universitas Sebelas Maret)

RPSEP-10

Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi NTB

Hery Susanto (UPBJJ UT Mataram)

RPSEP-11

Kendala dan Strategi Pelaksanaan E-Government dalam Pembangunan Daerah

Nora Eka Putri (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang)

RPSEP-12

Reformasi Birokrasi: Pengalaman Universitas Terbuka

Agus Joko Purwanto (FISIP UT)

Sesi Paralel 1

Percepatan Pembangunan Daerah

Ruang 3, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Nila Kusuma

RPSEP-13

Indonesia membutuhkan Chief Executive Officer (CEO)

Joseph M J Renwarin (Kalbis Institute Jakarta)

RPSEP-14

Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Banten

Fitri Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

RPSEP-15

Pengelolaan Situ/Rawa Di Indonesia: Isu Desentralisasi, Partisipasi Warga, Dan Instrumen Ekonomi

Pitri Yandri (Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah(PSDOD)
(STIE Ahmad Dahlan Jakarta)

RPSEP-16

Kata siapa, Yogyakarta Kota Budaya?

Hascaryo (UPBJJ-UT Semarang)

RPSEP-17

Implementasi Kebijakan dalam Governansi Hutan Lindung di Kab. Wonosobo.

Darmanto (FISIP Universitas Terbuka)

RPSEP-18

Reformasi Informasi Sebagai Strategi Membangun Knowledge Society

Siti Samsiyah(FISIP Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 1

Marketing dan Manajemen

Ruang 4, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Irma

RPSEP-19

Analisis Keunggulan Kompetitif melalui CRM (Customer Relationship Marketing) dalam Kepuasan Nasabah Perbankan syariah di Jawa Timur

Rini Rahayu Kurniati (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, UNISMA - Jawa Timur)

RPSEP-20

Strategi Ritel Oleh-Oleh dalam Membangun Store Image di Kawasan Wisata Batu Jawa Timur

Siti Saroh (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, UNISMA -Jawa Timur)

RPSEP-21

Analisis Kualitas Layanan Berdasarkan Karakteristik Gender Pada Pelaku Umkm Bidang Usaha Makanan

Siti Nurjanah, Brenda Aurista, Tito Hananta Kusuma (Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis)

RPSEP-22

Persepsi Mahasiswa UT terhadap Branding UT

Tamjuddin, Moh Nasoha (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-23

Analisis Strategi Promosi UPBJJ-UT DENPASAR

Sudrajat, Hendrin Hariati Sawitri, Heri Wahyudi (UPBJJ UT Denpasar)

RPSEP-24

The Effect Of Information System Quality, Perceived Usefulness And Information Quality To End Users' Satisfaction Of Accounting Dry Lab Program At Open University Of Indonesia

Irma, Rini Dwiyani Hadiwidjaja (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 1

Percepatan Pembangunan Daerah

Ruang 5, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Heriyanni Masithoh

RPSEP-25

Diskursus Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kegagalan Perencanaan Pembangunan Daerah

Taufik Hidayat dan Dewi Saraswati (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

RPSEP-26

Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Ari Mulianta Ginting (Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Setjen DPR)

RPSEP-27

Senjata Indonesia Dalam menghadapi AFTA (Asean Free Trade Area) 2015

Sri Nathasya Br Sitepu, Wendra Hartono (Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra UC Town, Citra Land Surabaya 60219)

RPSEP-28

Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Responsif Akan Akses Terhadap Keadilan Bagi Kelompok Marginal

Antarin Prasanthi Sigit (Mahasiswa Program Doktorat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

RPSEP-29

Kerjasama Penanggulangan HIV/AIDS, Memungkinkan?

Amata Luna Bethari (Magister Ilmu Sosial Universitas Katolik Parahyangan)

RPSEP-30

Merefleksi Pentingnya Dimensi Wilayah Sebagai Faktor Lokasional Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kota Palembang

Enny Sri Martini (UPBJJ UT Palembang)

Sesi Paralel 1

MSDM dan Manajemen Strategi

Ruang 6, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Irsanti W

RPSEP-31

Kemampuan Bersaing Instansi Pemerintah Berentrepreneur Melalui Analisis SWOT

Fransisca Desiana Pranatasari (Universitas Ciputra Surabaya)

RPSEP-32

Implikasi Faktor Sosial Dan Ekonomi Dalam Peningkatan Prestasi Kerja Staf Edukatif Pada Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Risnashari (UPBJJ-UT Makassar)

RPSEP-33

Analisis Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Pada Lemlitbang Pemerintah Pengambil Kebijakan)

Umi Rusilowati (Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang)

RPSEP-34

Penerapan Prinsip Stratejik Manajemen Dalam Mempertahankan Jumlah Mahasiswa Di UPBJJ-UT Kupang

Wise Rogate Silalahi (UPBJJ UT Kupang)

RPSEP-35

Budaya Dan Etika Organisasi Publik/Bisnis

Timbul Sahala Tua Hutabarat (Universitas Terbuka Jurusan Sosiologi)

RPSEP-36

The Problematic Career Plan of The Lecturers of Universitas Terbuka

Hanif Nurcholis (FISIP Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 1

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik

Ruang 7, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 12.30-14.00

Moderator: Ali Muktiyanto

RPSEP-37

Specialty coffee sebagai aset tak berwujud, tinjauan akuntansi

Zulfikar (Accounting Spv, PT Florentine Andika Sejahtera)

RPSEP-38

Identifikasi Permasalahan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Kasus di Tangerang Selatan dan Bogor)

Hendrian dan Rini Dwiyani H. (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-39

Intellectual Capital Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur

Noorina Hartati (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-40

Kajian Tentang Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP: Terkait Dengan Hasil Survei Political Economic Risk Consultancy (PERC)

Ganovar (Puslitbangwas BPKP)

RPSEP-41

Fakto-faktor Utama Good University Governance Pada Program Studi Akuntansi Di Indonesia

Ali Muktiyanto, Hilda Rossieta, Ancella A. Hermawan (Mahasiswa S3 Akuntansi Universitas Indonesia)

Sesi Paralel 2

Ekonomi dan Kelembagaan

Ruang 1, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30

Moderator: Nadia Sri Damajanti

RPSEP-42

Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Harga Saham Di Indonesia Dan Singapura

Dwi Wulandari (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

RPSEP-43

Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Penduduk Lokal? Dampak Pertambangan Batu Bara di Empat Kecamatan Area Kalimantan Timur, Indonesia

Rahmad Budi S., Rian Hilmawan dan Rizky Yударuddin Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

RPSEP-44

Refleksi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Purwaningdyah Murti Wahyuni, Siswandaru K (UPBJJ UT Semarang)

RPSEP-45

Kebijakan Target Inflasi Sebagai Sasaran Kebijakan Moneter Baru Bank Sentral

Etty Puji Lestari, Isnina WSU, Tri Kurniawati R (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-46

Refleksi Pembangunan Perekonomian Desa Guna Menghidupkan Perekonomian Bangsa

Solakhudin (UPBJJ-UT Semarang)

RPSEP-47

Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Peningkatan Kualitas Sumberdaya Insani

Nadia Sri Damajanti, IN Baskara, Rini Febrianti (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-48

Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah di Kab. Tanah Laut

Hidir Tresnadi (PTSM-BPPT)

Sesi Paralel 2

MSDM dan Manajemen Strategi

Ruang 2, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30

Moderator: Ami Pujiwati

RPSEP-49

Respon Mahasiswa Tentang Penerapan Pembelajaran Berbasis *E-Learning* Melalui Pemanfaatan *Academic Information System* (AIS) Di Lingkungan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan *Technology Acceptance Models* (TAM)

Yusar Sagara (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

RPSEP-50

Peran Human Capital Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi

Irmawaty (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-51

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Melalui Kompetensi untuk merefleksi pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia

Sri Endah Setiarini (SMA Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah)

RPSEP-52

Mengelola SDM sebagai Katalisator Percepatan Pembangunan Daerah

Joko Rizkie Widokarti (Mahasiswa S3 Universitas Padjajaran)

RPSEP-53

Pengaruh Analisa Jabatan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Carton Indus Sumberjaya Tangerang

Nurhadi (Amik)

RPSEP-54

Pengaruh *Trust, Risk And Technology Acceptance Models* Terhadap Keputusan Nasabah Dengan Minat Nasabah Sebagai Variabel Intervening

Wiwin Siswantini, Sri Ismulyaty (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

RPSEP-55

Pengaruh Stressor Terhadap Stres Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Karyawan Universitas Terbuka (UT)

Etty Susanti, Ami Pujiwati, Helmiatin (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 2

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Ruang 3, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30

Moderator: Sutartono

RPSEP-56

Prinsip Etika Dalam Bisnis Hindu (Fenomena Praktik Bisnis Di Era Globalisasi)

Made Wahyu Adhiputra (Universitas Mahendradatta, Bali)

RPSEP-57

Kajian Kritis Putusan Judicial Review tentang Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ratna Nurhayati, Seno Wibowo Gumbira (FISIP Universitas Terbuka)

RPSEP-58

Peran Ormas Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Dalam Bidang Pemberdayaan

Adil Mubarak (Universitas Negeri Padang)

RPSEP-59

Reformasi Birokrasi Sebagai Pendorong Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Purwaningdyah Murti Wahyuni, Siswandar K (UPBJJ UT Semarang)

RPSEP-60

Optimalisasi Pengawasan Intern BUMD Sebagai Wujud Penyelamatan Aset

Megafury Apriandhini (Universitas Terbuka)

RPSEP-61

Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Enceng, Yuli Tirtariandi El Anshori (FISIP Universitas Terbuka)

RPSEP-62

Akses Informasi yang Akurat

cepat mudah dan merata mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik

Herwati Dwi Utami (FISIP-Universitas Terbuka)

RPSEP-63

Komunikasi Anggota DPR dan Konstituen; Menjalin Relasi Bukan Transaksi

Yanti Hermawati (FISIP-Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 2

Manajemen Strategi – Sektor UKM

Ruang 4, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30

Moderator: Suhartono

RPSEP-64

Kajian Efek Multiplier Produk Unggulan Berbasis Kluster UKM Pengolahan Ikan Asap

Yusmar Ardhi Hidayat (Jurusan Admin, Niaga – Polines)

RPSEP-65

Kendala Implementasi Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Di Kabupaten Rejang Lebong

Eha Saleha dan Yuli Tirtariandi El Anshori (FISIP UT)

RPSEP-66

Optimalisasi Pembiayaan Syariah Guna Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada LKMS Dan UMKM Di Tangerang Selatan)

Nuraini dan Rifzaldi Nasri (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

RPSEP-67

Pemberdayaan Petani Melalui Komunikasi Penyadaran Kritis (Kasus Pemberdayaan Petani Padi Organik Paguyuban Petani Al-Barakah Kabupaten Semarang)

Wijanarko (UPBJJ-UT Pontianak)

RPSEP-68

Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. NUSA PERKASA JAYA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung

Heri Wahyudi (UPBJJ-UT Denpasar)

RPSEP-69

How Can Small Medium Enterprises/SME's Become Sustainable And Respond To Global Demand Corporate Citizen? (Approach To Business Responsibility Movement)

Ginta Ginting (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 2

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik

Ruang 5, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30

Moderator: Rini Dwiyani H

RPSEP-70

Kepuasan Klien Dan Kegunaan Laporan Audit Eksternal Stake Holder (Perspektif Klien Audit)

Tubagus Ismail (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

RPSEP-71

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Income Smoothing (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia)

Adhi Irawan, Halim Dedy Perdana, Hanung Triatmoko (Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret)

RPSEP-72

Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Anggaran Kinerja Di Provinsi Banten

Rakhmini Juwita, Galuh Tresna Murti (UPBJJ-UT Serang, Politeknik LP3i Bandung)

RPSEP-73

Pengaruh Kinerja Zakat Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Governance Bank Umum Syariah Indonesia

Amelia Rizky Alamanda (Bandung)

RPSEP-74

Pengaruh Rasio Kinerja Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Indonesia

Rini Dwiyani H (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 2

UKM dan Kewirausahaan
Ruang 6, UTCC
Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30
Moderator: Helmiatin

RPSEP-75

Strategi Koperasi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia

Arif Pujiyono, Siti Mutmainah (FEB UNDIP Semarang)

RPSEP-76

Koperasi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

Harini, Bambang Mursito (Universitas Sebelas Maret)

RPSEP-77

Efektifitas Pola Pembiayaan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM Klaster Agribisnis Di Propinsi Banten

Meutia (Fakultas Pertanian - Jurusan Agribisnis Universitas Tirtayasa Banten)

RPSEP-78

Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Sarana Interaksi Sosial dan Budaya Masyarakat Pekanbaru

Tuti Khairani Harahap (Universitas Riau)

RPSEP-79

Sukuk Negara Ritel, Potensi, Peluang, Tantangan dan Prospek dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Setyo Kuncoro (FISIP Univesitas Terbuka)

RPSEP-80

Evaluasi Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk. Cabang Purbaleunyi Bandung

Yosef Anton Layanan (Universitas Katholik Parahyangan)

RPSEP-81

Womenpreneurship Di Indonesia

Helmiatin (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

Sesi Paralel 2

Manajemen-Budaya-MSDM-Manajemen Strategi-Komunikasi

Ruang 7, UTCC

Kamis, 23 Oktober 2014, 14.00-15.30

Moderator: Moh. Nasoha

RPSEP-82

Membangun Budaya Organisasi dan Kode Etik Pustakawan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme

Yasir Riady (UPBJJ-UT Jakarta)

RPSEP-83

Survey Motivasi Kerja Pada Karyawan PT PQR Jakarta

Gede Umbaran Dipodjoyo (Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta)

RPSEP-84

Demokrasi ubah haluan, potret kemunduran bangsa?

Khalifah Oktarina (Mahasiswa Program Bidikimisi – Ilmu Komunikasi UPBJJ-UT Semarang)

RPSEP-85

Sekolah sebagai filter komunikasi budaya

Puspa Kapita (Mahasiswa Program Bidikimisi – Ilmu Komunikasi – UPBJJ-UT Semarang)

RPSEP-86

Implementasi Strategi Promosi Dalam Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Jumlah Mahasiswa pada UPBJJ-UT Pekanbaru

Radeswandri (UPBJJ-UT Pekanbaru)

RPSEP-87

Analisis Kesuksesan Sistem *Web Based Learning*

Moh. Nasoha (Pasca Sarjana Universitas Terbuk

RPSEP-88

Pendidikan etik menjadi target kurikulum 2013

Deska Manisha (Mahasiswa Program Bidikimisi – Ilmu Komunikasi – UPBJJ-UT Semarang)

RPSEP-89

Pengaruh Talent Management Terhadap Pengembangan Karir Pegawai Di Universitas Terbuka

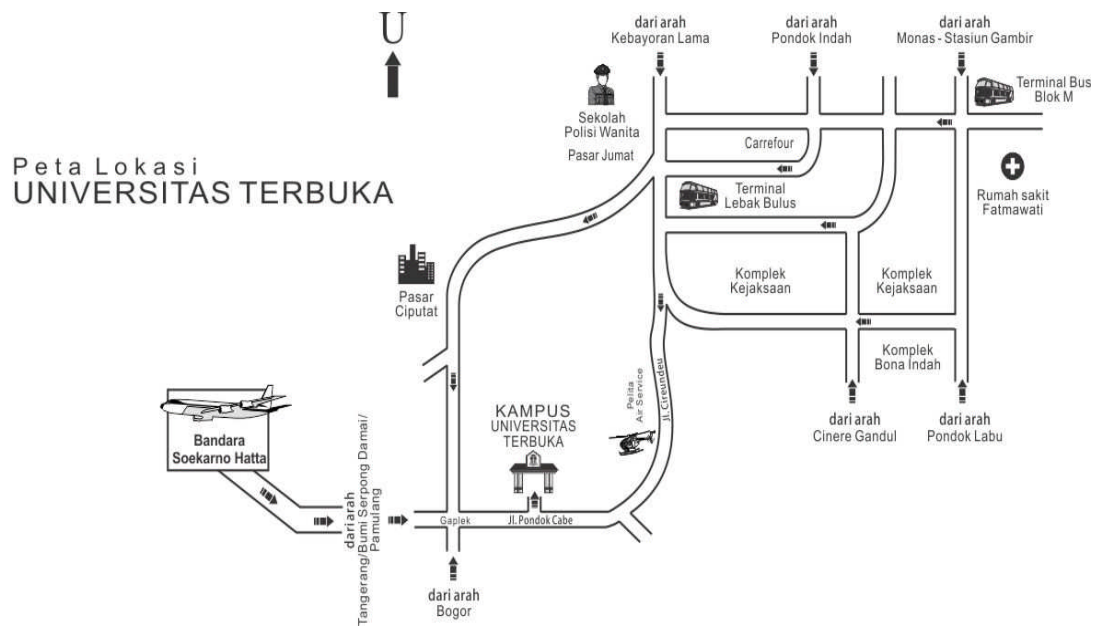
Irmawaty, Mailani Hamdani (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka)

Informasi Tempat Seminar

Universitas Terbuka Convention Center (UTCC)

Alamat: Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15418

Telp: (021) 7490941 (Hunting)



RPSEP-01

REFORMULASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BINGKAI KEMAJEMUKAN DAN OTONOMI DAERAH¹

Jamaluddin Hos

Lektor Kepala pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Halu Oleo Kendari 93232 Sulawesi Tenggara Indonesia

Tel. +62813 4263 2345, E-mail: jhos_mard@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan memberi sumbangan pemikiran dan pandangan mengenai gagasan tentang perlunya menata kembali arah kebijakan pembangunan nasional (layaknya GBHN pada masa Orde Baru) sebagai upaya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional serta relevansi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan arah kebijakan tersebut. Tulisan difokuskan pada aspek sosio-kultural sebagai penopang utama pilar *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai salah satu nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bertumpu pada tantangan pembangunan bangsa di era global, struktur masyarakat Indonesia yang majemuk, dan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai bangsa besar yang memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk, globalisasi harus disikapi dengan peningkatan daya saing dan ketahanan nasional serta tetap mempertahankan identitas dan jati diri bangsa. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah memerlukan sistem koordinasi dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pemerataan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional merupakan tujuan generasional karena tidak mungkin dapat diwujudkan dalam satu atau dua generasi. Sehingga, aspek kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan menjadi sangat penting dan sentral. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, integrasi nasional dan otonomi daerah membutuhkan formulasi, isi, prosedur, teknik, target, dan tahapan-

¹ Disampaikan Pada Seminar Nasional dengan Tema “Refleksi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia”, 23 Oktober 2014 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) Jakarta

tahapan yang jelas. Formulasi yang dimaksud harus dapat dijadikan acuan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai haluan negara. Formulasi tentang arah kebijakan pembangunan nasional ini berupa pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu sehingga harus ditetapkan oleh lembaga negara di luar lembaga eksekutif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kata kunci: perencanaan pembangunan, daya saing bangsa, otonomi daerah, masyarakat majemuk, integrasi nasional.

Abstract

This article aims to contribute to the thinking and view on the importance of reformulating the direction of national development policy (similar to GBHN in the New Order) as an attempt to strengthen Indonesian democracy system in attaining national objective with relevance to People's Consultative Assembly (MPR) as the governing body whose role, function, and mandate is to formulate the direction of national policy. This article is focused on sociocultural aspects, the main foundation of *Bhinneka Tunggal Ika* or *Unity in Diversity* as one of the basic tenets of Indonesian nation and country living, foregrounded on the challenges of nation's development in globalization era, the structure of Indonesian plural society, and the implementation of regional autonomy. As one big nation marked by its plural society, improving its competitiveness and defense while maintaining national identity and character should respond to globalization. Meanwhile, effective coordination and management in the implementation of regional autonomy is needed in order to ensure equal development and attainment of national objective as mandated in the Preliminary of UUD 1945. National objective hence becomes generational objective since it unavoidably requires generations to be realized. Therefore, developmental continuity and sustainability are paramount. Developmental planning, as to enhance nation's competitiveness, national integration, and regional autonomy, requires evident formulation, content, procedure, technique, target, and steps. The given formulation should become reference, both for the central government and the regional government, as national guidance. Since the formulation represents holistic and integrated will of the society, it should be established by People's Consultative Assembly (MPR) as non-executive institution.

Keywords: developmental planning, nation's competitiveness, regional autonomy, plural society, national integration

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dalam segala aspeknya yang dilakukan secara berkelanjutan, dalam rangka merealisasikan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah menjadi konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak lahirnya gerakan reformasi tahun 1998 mengalami berbagai perubahan. Terjadinya reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 membuat MPR tidak lagi memiliki tugas dan wewenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana sebelumnya. GBHN tidak lagi diberlakukan dan agenda pembangunan nasional lebih didasarkan pada visi dan misi pasangan presididen dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Pada kenyataannya, meskipun telah dijalankan lebih dari satu dasawarsa, gerakan reformasi belum juga melahirkan kesejahteraan rakyat. Bahkan wajah persada negeri ini makin terlihat muram dan suram, yang memperlihatkan adanya disorientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini oleh banyak pihak dianggap sebagai akibat tidak jelasnya arah pembangunan nasional. Tampaknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai penjabaran visi dan misi presiden dan wakil presiden serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang selama ini dijalankan sebagai pengganti GBHN tidak memadai dijadikan acuan utama pembangunan nasional.

Sementara itu kematangan moral politik dan kesiapan sumber daya manusia penyelenggara pemerintah daerah belum memadai yang berakibat pada pemahaman terhadap maksud, tujuan dan hakekat otonomi daerah belum sesuai harapan. Munculnya arogansi daerah dalam bentuk berbagai pembangkangan terhadap kebijakan tingkat

pemerintahan di atasnya jelas tidak menguntungkan bangsa sebagai satu kesatuan sosial dan politik.

Kondisi ini melahirkan gagasan tentang perlunya menata kembali arah kebijakan pembangunan nasional (layaknya GBHN pada masa Orde Baru) sebagai upaya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tulisan ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan mengenai gagasan tersebut serta relevansi MPR sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan GBHN. Tulisan difokuskan pada aspek sosio-kultural sebagai penopang utama pilar *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bertumpu pada tantangan pembangunan bangsa di era global, struktur masyarakat Indonesia yang majemuk, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Globalisasi dan Identitas Nasional

Salah satu implikasi yang cukup signifikan dari revolusi informasi adalah fenomena globalisasi yang semakin intens. Globalisasi telah menjadi gelombang besar yang tak terhindarkan dan telah memacu perubahan sosial dalam berbagai level (lokal, nasional, regional dan global) menjadi sangat dinamis. Hampir seluruh bangsa di dunia mengalami *borderless state* sebagai akibat dari arus informasi yang tersebar cepat dari dan ke berbagai belahan dunia. Hubungan antar-bangsa dan antarbudaya semakin intensif melalui berbagai media tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Anthony Giddens (2000) bahkan mendeskripsikan fenomena globalisasi sebagai dunia yang sedang lari tunggang langgang (*the runaway world*) untuk menggambarkan bahwa perubahan sosial yang bergerak di muka bumi ini terjadi serba cepat dan sulit diprediksi. Perubahan sosial terjadi di sebuah pelosok bumi berpengaruh secara signifikan pada belahan bumi lainnya, sementara sistem yang dibangun di sebuah negara belum tentu memadai untuk mengakomodasi perubahan sosial yang serba cepat tersebut. Akibatnya, krisis terjadi secara beruntun di banyak negara yang memiliki infrastruktur yang lemah. Nilai-nilai agama dan budaya seringkali juga terlambat mengantisipasi perubahan sosial yang semakin cepat.

Menurut Immanuel Wallerstein, ketimpangan sistem dunia telah melahirkan dua kelompok Negara yang berbeda secara ekstrim, yaitu *the centre countries* dan *the peripheral countries* (Budiman, 1995). *The centre countries* adalah negara-negara industri maju yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, seperti negara-negara

Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang. Sedangkan yang masuk kategori *the peripheral countries* adalah sebagian besar negara-negara miskin dan baru berkembang yang lazim disebut sebagai negara dunia ketiga. Tata hubungan ekonomi internasional yang tidak berimbang, *the peripheral countries* seringkali menjadi sub-ordinat bagi negara-negara industri maju. Fenomena ini telah menyebabkan akumulasi modal terpusat pada negara-negara kaya (*the centre countries*) dan menjelma menjadi kekuatan kapitalisme global.

Salah satu implikasi logis perkembangan kapitalisme global adalah terciptanya pasar bebas. Akibatnya, mobilitas dan distribusi barang/jasa, termasuk mobilitas manusia, gagasan, ideologi serta pemikiran menjadi bebas tanpa kendala oleh batas-batas territorial antar-negara. Perdagangan bebas sejatinya sangat efektif dan efisien bagi kehidupan manusia di muka bumi yang semakin mengglobal ini. Akan tetapi, bagi negara-negara yang tidak memiliki kesiapan modal dan keunggulan sumberdaya manusia, perdagangan bebas justru akan melululantakkan sistem perekonomian mereka. Globalisasi dan perdangan bebas hanya mengakui dan mensyaratkan adanya daya saing yang tinggi.

Ditinjau dari aspek kultural, globalisasi sebagaimana digambarkan di atas sejatinya disikapi dengan peningkatan kesadaran akan identitas nasional. Pengalaman menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi memang nyaris tidak mungkin dihindarkan oleh bangsa manapun. Selain itu, pengaruh kebudayaan bangsa lain dapat menjadi daya pendorong kemajuan bangsa itu sendiri. Tetapi menerima begitu saja tanpa memilah dan memilih atau menyaring mana-mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang merusak, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan karakter dan nilai-nilai budaya asli bangsa, mana yang positif mana yang negatif bagi kemajuan bangsa, niscaya penerimaan kebudayaan bangsa semacam itu bakal mendatangkan malapetaka (Sudharto, 2011). Sebab dapat berakibat pada memudarnya identitas nasional.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia sudah biasa mengalami kontak budaya dengan negara luar. Tapi dalam era globalisasi ini kontak budaya terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya dekulturasi, maladaptasi dan disrupsi kultural. Bagi bangsa Indonesia, tekanan globalisasi harus dihadapi dengan arif, kerja keras, dan disiplin keras agar dapat dihindari lunturnya inti identitas nasional (Jacob, 2002).

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada sejumlah ciri yang melekat pada diri bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Wujud identitas

nasional dapat berupa bahasa Indonesia, ideologi Pancasila, lambang Garuda, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta kebudayaan yang bisa diterima secara nasional. Identitas nasional tidak saja menjadi identitas sebuah bangsa sebagai satu kesatuan, akan tetapi juga menjadi identitas bagi seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, di era globalisasi saat ini kesadaran akan identitas nasional semakin diperlukan dalam proses interaksi sosial baik antarwarga maupun antarnegara. Identitas nasional perlu terus dijaga, dipertahankan dan dikembangkan lagi beberapa bentuk identitas yang baru dan bisa diterima oleh segenap warga bangsa, terutama dalam upaya peningkatan daya saing bangsa.

Mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga eksistensi bangsa Indonesia agar menjadi negara yang modern tanpa kehilangan jati diri. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan serta mencerminkan nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*). Sistem perencanaan pembangunan yang dimaksud harus berdasarkan kajian mendalam dan obyektif dari semua elemen bangsa berdasarkan kondisi riil dan kepentingan seluruh bangsa karena diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dasar bagi setiap kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Kemajemukan dan Integrasi Nasional

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar, baik dilihat dari luas wilayah maupun dilihat dari jumlah penduduk. Dilihat dari segi luas wilayah, Indonesia membentang dari 6⁰08' LU hingga 11⁰15' LS, dan dari 94⁰45' BT hingga 141⁰05' BT yang di dalamnya terdiri dari sekitar 17.508 pulau (Latif, dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014: 1). Dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia termasuk urutan ke-4 negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Menurut data terakhir yang dikutip dari Departemen Perdagangan AS (6/3/2014) Indonesia masih berada di posisi ke-4 berpenduduk terbanyak di dunia dan berada di atas Brazil dengan jumlah penduduk 253.609.643 jiwa (<http://finance.detik.com/>)

Sebagai negara besar yang bercirikan nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia dihuni oleh 1.128 suku bangsa dan lebih 700 bahasa daerah (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014: 185). Menurut Nasikun (1989:30), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri utama: (1) secara

horizontal ditandai adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat-istiadat serta kedaerahan; (2) secara vertikal, ditandai adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Struktur masyarakat seperti ini secara konseptual dikenal sebagai masyarakat majemuk. Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia menghadapi persoalan mendasar dalam membangun integrasi nasional, yaitu sulitnya mencari keseimbangan antara pengakuan adanya keberagaman dan pembangunan rasa kesatuan dari keberagaman itu.

Sejarah mencatat bahwa kemajemukan bangsa Indonesia telah ada sejak sejak lama dan menjadi entitas yang membanggakan (Sudharto, 2011). Indonesia sebagai komunitas politik dan sosial lahir dari gagasan bersama yang berakar dari kesepakatan berbagai komponen masyarakat yang berbeda. Gagasan bersama inilah yang mempertautkan warga masyarakat yang majemuk itu menjadi satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Meskipun demikian, sebagaimana umumnya sebuah bangunan, bangsa Indonesia juga terdiri dari sejumlah kelompok kesatuan sosial yang diikat oleh kesamaan etnisitas, sistem kepercayaan dan kesamaan lainnya (Sairin, 2002: 64). Kemajemukan tetap menjadi ciri masyarakat Indonesia, kendati masyarakatnya telah terikat pada satu kesatuan politik.

Selain teritorial dan kesamaan tujuan, terbentuknya suatu kesatuan sosial sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan topangan dari berbagai unsur yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan unsur itulah yang secara fungsional menjadi penyangga bagi kukuhnya struktur masyarakat (Sairin, 2002: 61). Elemen-elemen kultural yang demikian majemuk tidaklah selalu terpisah secara kaku, bahkan seperti dikatakan Peter Blau kemungkinan terjadi *cross cutting affiliation*, sehingga dalam realitasnya terdapat orang-orang yang berbeda etnis, tapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan yang sama (Nugroho, 2001 : 103). Dengan demikian, struktur masyarakat Indonesia yang majemuk secara konseptual tidak bisa dipahami sebagai ancaman kesatuan sosial yang perlu dihindari, tetapi sebaliknya perlu dipahami sebagai potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Harus diakui pula, bahwa meskipun kemajemukan secara konseptual dapat menjadi potensi untuk membangun kesatuan sosial, namun dalam realitasnya dapat pula menjadi sumber disintegrasi sosial. Sebagai negara berkembang yang memiliki masyarakat majemuk dan sedang membangun demokrasi, Nazaruddin Syamsuddin mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, adanya pembelahan horizontal masyarakat yang berakar pada perbedaan suku,

ras, agama dan geografi. Kedua, adanya pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan antara elite dan massa; latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional dan pedesaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal konfigurasi etnik, agama dan geografi, Indonesia bukan suatu negeri yang terpadu dengan ketat. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil, dengan keragaman etnik yang luar biasa (Bahar, 1996:13).

Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah kemajemukan yang bersifat kompleks dan tersegmentasi. Bersifat kompleks karena di samping keragaman eksternal juga terdapat keragaman internal. Artinya, dalam suatu kelompok etnik atau suatu kelompok agama tertentu masih kita menemukan keragaman secara internal. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga bersifat tersegmentasi, karena suatu kelompok etnik tertentu identik dengan agama tertentu, bermukim di suatu wilayah tertentu. Orang Bali, identik dengan agama Hindu, tinggalnya di Pulau Bali. Karena bersifat kompleks dan tersegmentasi, maka peluang untuk terjadinya disintegrasi nasional menjadi cukup besar. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu belajar dari perpecahan yang terjadi pada negara lain seperti Yugoslavia, Cekoslowakia dan Uni Sovyet. Sejarah pembinaan rasa persatuan dan kesatuan (*unity and diversity*) di bawah slogan “Bhinneka Tunggal Ika” memang telah mengalami pasang surut dan telah menimbulkan pengorbanan bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Berbagai masalah sosial politik yang kompleks telah timbul dan menjadi problem yang panjang mengiringi perjalanan bangsa sampai saat ini. Kesenjangan sosial ekonomi antarkelompok dan ketidakadilan yang memicu bagi lahirnya berbagai konflik sosial baik secara horizontal maupun secara vertikal menjadi isyarat bahwa wawasan kebangsaan dan kemajemukan tidak lagi menjadi landasan dasar yang absah dalam pengelolaan negara, termasuk dalam proses pembangunan nasional.

Mewujudkan kemajemukan sebagai energi pemersatu, dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat mengikat setiap warga masyarakat yang berbeda dalam sebuah sistem yang selama ini dikenal sebagai kebudayaan nasional. Salah satu fungsi kebudayaan nasional menurut Koentjaraningrat (1981) adalah sebagai sistem gagasan dan simbol yang dipakai oleh segenap warga negara yang berbeda untuk saling berkomunikasi sehingga dapat memperkuat solidaritas. Pengembangan budaya nasional sebagai perekat sosial menjadi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan tetap

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Olehnya itu, pengembangan budaya nasional perlu dilakukan secara terencana, terus menerus, berkesinambungan dan keberlanjutan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang dirangsang oleh gerakan reformasi tahun 1998 merupakan upaya konstitusional untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan antara pembangunan nasional yang terpusat dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antardaerah. Dengan demikian, masalah pokok dalam otonomi daerah adalah proses pemberdayaan daerah secara keseluruhan dalam rangka menopang kemandirian dalam kebersamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah dipandang sebagai sistem yang memungkinkan daerah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi terbaik yang dimiliki daerah dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budaya di daerah yang bersangkutan (Hos, 2008).

Sudah lebih dari satu dasawarsa otonomi daerah dan desentralisasi dijalankan. Program ini diharapkan bisa menjadikan tata kelola pemerintahan daerah lebih maju, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Namun program yang sedari awal ditanggapi positif oleh berbagai kalangan, ternyata belum berjalan sebagaimana diharapkan. Bahkan otonomi daerah ternyata melahirkan oligarki lokal dan elitisme. Otonomi daerah gagal membangun akuntabilitas keterwakilan dan mandatnya, baik dalam hubungan pusat – daerah maupun pengelolaan pemerintahan daerah (Hasan: 2007). Banyak indikasi yang menunjukkan, bahwa tata kelola pemerintahan di daerah masih bermasalah. Akibatnya, kinerja aparatur pemerintah daerah tidak bisa optimal, terutama dalam pelayanan publik (Hos, 2011).

Sementara itu, terungkapnya berbagai korupsi di daerah, meningkatnya angka kemiskinan, terjadinya berbagai konflik politik sebagai buah pertarungan elit pada pilkada, politisasi birokrasi, serta marak dan meningkatnya penggundulan hutan di daerah merupakan sederetan indikasi yang menunjukkan kegagalan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan maksud penerapannya. Jika kita mengacu pada paradigma baru pemerintahan yang bertitik-tolak pada kedaulatan rakyat, keterbukaan sistem pemerintahan dan pemberdayaan rakyat, penyelenggaraan otonomi daerah selama ini jelas diwarnai berbagai penerapan yang

tidak konsisten. Sehingga sejak diterapkannya otonomi daerah, terdapat banyak kesenjangan antara konsep teoretis ideal otonomi daerah dengan dunia nyata.

Beban kewenangan yang sangat luas yang dimiliki daerah otonom saat ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (Bake, 2011). Besarnya tanggung jawab daerah yang tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah berimplikasi pada sulitnya mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik secara maksimal.

Pada kenyataannya, otonomi daerah acapkali dimaknai sebagai “otonomi pemerintah daerah” dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti karena mereka tetap diposisikan sebagai komoditas oleh segelintir elit-birokrat yang lebih mengedepankan kekuasaan daripada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampak secara jelas dari perilaku birokrasi-lokal yang cenderung mempergemuk dan mengembangkan struktur organisasi kelembagaan daerah tanpa memperhatikan potensi, kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Sedarmayanti, 2005:vi). Menggelembungnya struktur organisasi kelembagaan daerah, dalam kenyataannya justru menciptakan “meja birokratisme” dan inefisiensi yang pada akhirnya menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Mental masyarakat dan pemerintah pada umumnya juga belum berubah. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama masalah keuangan masih sangat tinggi. Pemerintah daerah umumnya masih berorientasi untuk mendapatkan dana pembangunan dari pusat, membelanjakan dana tersebut, tanpa memikirkan bagaimana mengelola dana hingga memperoleh keuntungan, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan (Chalid, 2006:9.7).

Menurut Sukardi Hasan (2007), terdapat tiga alasan utama otonomi daerah saat ini dinggap “gagal” memenuhi tujuannya. *Pertama*, perilaku para elit penyelenggara pemerintahan daerah tetap memakai paradigma lama yaitu paradigma orde baru. Maka yang muncul bukannya sikap melayani pemenuhan distribusi keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Tapi, justru “memperdaya” rakyat dalam pemenuhan kepentingan raja-raja kecil dalam bingkai otonomi daerah.

Kedua, adanya kesenjangan yang cukup lebar antara perubahan pada tataran konseptual dengan perubahan pada tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah. *Ketiga*, terjadinya perselingkuhan antara elit penguasa dan elit masyarakat yang pada akhirnya menjadi hambatan utama tumbuhnya partisipasi masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat terjegal oleh dominasi elit penguasa dan masyarakat.

Otonomi daerah yang secara konseptual-normatif dianggap “sangat ideal” dalam memenuhi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, ternyata dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Berdasar pada uraian di atas, terdapat beberapa agenda pemugaran otonomi daerah agar dapat memenuhi maksud dan tujuan penerapannya. *Pertama*, keharusan merekonstruksi pemahaman otonomi daerah yang selama ini lebih bermuatan politik ketimbang pemenuhan hak-hak kesejahteraan rakyat. *Kedua*, perlu upaya merehabilitasi mental penyelenggara pemerintahan daerah agar senantiasa memposisikan diri sebagai pelayan publik dan bukan penguasa serta raja-raja kecil yang selalu menuntut pelayanan dari rakyat. Diperlukan perubahan paradigma secara radikal dan komprehensif terhadap birokrasi pemerintahan di daerah. Sebab birokrasi yang ideal dan dapat memenuhi tujuan otonomi daerah, terutama dalam memberikan pelayanan publik secara optimal hanyalah birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pengguna jasa. *Ketiga*, perlu penataan kelembagaan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Agenda pemugaran otonomi daerah ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah, akan tetapi harus menjadi komeitmen bersama dalam sebuah rumusan formulasi kebijakan yang bersifat nasional, terencana, dan mengikat seluruh elemen penyelenggara negara sesuai dengan aturan dasar atau hukum dasar di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Relevansi Reformulasi Arah Kebijakan Pembangunan

Menyikapi fenomena globalisasi yang semakin intens, kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang majemuk, serta pelaksanaan otonomi daerah yang belum sesuai harapan sebagaimana digambarkan di atas, diperlukan payung hukum yang mengikat bagi seluruh jajaran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan pembangunan. Nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara

sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini harus tercermin dalam setiap kebijakan negara dan pemerintahan, termasuk tercermin dalam setiap rencana pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

RPJMN dan RPJPN yang selama ini dijalankan mendapat banyak tanggapan kritis karena dianggap tidak representatif sebagai pengganti GBHN, atau tidak efektif dijadikan sebagai haluan atau panduan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketidaksinkronan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antardaerah, serta antarsektor merupakan fenomena yang ditengarai sebagai bukti ketidakefektifan tersebut.

Kehadiran rumusan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi haluan negara untuk meluruskan arah kiblat pembangunan nasional agar tetap sesuai Pancasila dan tetap menjaga serta melestarikan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang tengah mengembangkan demokrasi. Diakui atau tidak, demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan yang dikembangkan pasca Orde Baru cenderung bersifat liberal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meski ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, undang-undang itu belum tentu menjadi acuan dan jaminan bagi Presiden dalam menata arah pembangunan. Visi dan misi Presiden belum tentu selaras dengan arah rencana pembangunan jangka panjang dan sulit terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional. Hal ini disebabkan karena pergantian Presiden selalu diikuti dengan pergantian visi dan misi. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat daerah di mana setiap kepala daerah menetapkan arah pembangunan daerah berdasarkan visi-misinya masing-masing. Di samping itu, juga tidak ada mekanisme pertanggungjawaban presiden atau kepala daerah kepada rakyat yang telah meilihnya secara langsung.

Menurut Hajriyanto, sampai saat ini negara dan pemerintah belum bisa mewujudkan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan nasional merupakan tujuan generasional karena tidak mungkin dapat diwujudkan dalam satu atau dua generasi. Oleh sebab itu, aspek kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan menjadi sangat penting dan sentral, baik kesinambungan secara kronologis maupun diakronis. Kesinambungan kronologis adalah kesinambungan dari masa ke masa, dari kepemimpinan satu ke

kepemimpinan selanjutnya. Sedangkan, kesinambungan diakronis atau vertikal adalah konsistensi antara pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten (<http://www.mpr.go.id/>).

Realitas sosial bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Haluan negara semacam GBHN harus dirumuskan kembali dengan penyesuaian kebutuhan negara saat ini. Artinya, dalam perumusan arah kebijakan pembangunan nasional tentunya tidak sama dengan GBHN pada masa Orde Baru tetapi dalam perumusannya dilakukan oleh MPR RI sebagai representasi wakil rakyat yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Arah kebijakan pembangunan berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil presiden yang tertuang dalam RPJMN yang selama ini dijalankan tidak tepat sebagai arah kebijakan pembangunan nasional karena merupakan cerminan kepentingan politik golongan tertentu dan bukan pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.

Penutup

Mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga eksistensi bangsa Indonesia agar menjadi negara yang modern tanpa harus kehilangan jati diri. Globalisasi yang telah menjadi gelombang besar yang tak terhindarkan, perlu disikapi secara positif sebagai tantangan sekaligus peluang meningkatkan daya saing bangsa tanpa menghilangkan identitas nasional. Membangun integrasi nasional di atas kemajemukan serta pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat memerlukan sistem koordinasi dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pemerataan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, integrasi nasional dan otonomi daerah membutuhkan formulasi, isi, prosedur, teknik, target, dan tahapan-tahapan yang jelas. Formulasi yang dimaksud harus dapat dijadikan acuan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai haluan negara. Formulasi tentang arah kebijakan pembangunan nasional ini berupa pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu sehingga harus ditetapkan oleh lembaga negara di luar lembaga eksekutif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk menjamin implementasi nilai-nilai Pancasila serta terwujudnya tujuan

nasional, peran dan fungsi MPR, khususnya dalam penetapan GBHN dapat dikembalikan. Di samping karena MPR saat ini bertugas memasyarakatkan nilai-nilai dasar sebagai konsensus dalam berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), juga karena MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD sehingga mencerminkan keterwakilan semua golongan dan kepentingan daerah. Arah kebijakan pembangunan berdasarkan visi dan misi presiden dan wakil presiden tidak tepat sebagai arah kebijakan pembangunan nasional karena merupakan cerminan kepentingan politik golongan tertentu.

Daftar Pustaka

- Bahar, Saafroedin, 1996: *Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bake, Jamal, 2011: *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia; Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Desain Tata Kelola Kepemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 11 Maret 2011.
- Budiman, Arief, 1995: *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chalid, Pheni, 2006: *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Giddens, Anthony, 2000: *The Third Way*, Gramedia, Jakarta.
- Hasan, Sukardi, 2007: "Memugar Kembali Citra Desentralisasi", *Media Indonesia*, 5 Nopember 2007
- Hos, Jamaluddin, 2008: "Otonomi Daerah: Antara Cita dan Fakta" dalam Gunawan, dkk (Ed.), *Otonomi Daerah – Pemekaran Wilayah: Antara Idealitas & Realitas*, FISIP Universitas Haluoleo Press.
- _____, 2011: "Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan Dalam Rangka Pasar Tunggal Asean 2015", Prosiding Seminar Nasional *Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015*, Jombang 1 Oktober 2011
- <http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar>, diakses 29 September 2014
- <http://www.mpr.go.id/berita/read/2012/04/23/10622/reformulasi-gbhn-perlu-kajian-akademis-dan-objektif>, diakses 28 September 2014
- Jacob, T, 2002: *Menghadapi Tantangan Budaya Globalistis Seraya Membina Masyarakat Beradab*, Orasi Kebudayaan pada Seminar Menata Kapasitas Masyarakat Madani, Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1981: *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Nasikun, 1989: Sistem Sosial Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.

Nugroho, Heru 2001 : *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, 2012: *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Sairin, Syafri, 2002: *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sedarmayanti, dkk (ed.), 2005: “Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kinerja dan Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Era Baru Pemerintahan” dalam Sobandi, Baban (dkk): *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Humaniora. Bandung.

Sudharto, 2011: *Multikulturalisme dalam Perspektif Empat Pilar Kebangsaan*, Makalah Disampaikan dalam Rangka Seminar yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, di Ungaran Semarang, 7 Juli 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

MENATA DAN MENGUATKAN INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK BERSENDIKAN KEARIFAN LOKAL

FRITZ H.S. DAMANIK

(SMA Harapan Mandiri / E-mail : fritzdamanik@yahoo.co.id)

Abstrak

Fungsi pelayanan publik, secara mendasar, harus diemban oleh setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, maupun badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Demi memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menerima manfaatnya, maka upaya pembenahan pun terus dilakukan hingga membuahkan perbaikan. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencatat peningkatan rata-rata nilai integritas instansi pusat menjadi 7,37 (dibanding tahun 2012 pada level 6,37). Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, semua pihak tak boleh lekas berpuas diri. Penataan dan penguatan pelayanan publik perlu terus digulirkan demi terwujudnya kelayakan sistem penyelenggaraan, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, menuju kemajuan Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya, sungguh tepat bila berpaling pada kearifan lokal Indonesia untuk mewujudkan praktek terbaik (*best practices*) pelayanan publik. Dalam masyarakat multikultural Indonesia, sesungguhnya tidaklah sulit menemukan berbagai kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat. Kearifan lokal dapat ditemui dalam tarian, nyanyian, pepatah, petuah, atau semboyan kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal acap pula dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan. Untuk mengawali penataan dan penguatan pelayanan publik, misalnya, dapat mempedomani kearifan lokal Jawa Tengah (*'tanggap, tatag, tanggon'* yang bermakna peka, tahan uji, dapat diandalkan) atau Bali (*'awan aradin becik arata'* yang artinya setiap manusia haruslah jujur, adil, dan bijaksana dalam kehidupannya). Tentunya, masih banyak lagi kearifan lokal inti etos kerja (*core local wisdom of work ethics*) maupun inti kebaikan (*core local wisdom of kindness*) yang dapat direvitalisasi.

Kata kunci : pelayanan publik, penataan, penguatan, kearifan lokal

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik di Indonesia, saat ini, dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Tim Simpul Demokrasi (2010) menyebut adanya sejumlah masalah dalam pelayanan publik di Indonesia, yakni :

- 1) Adanya kultur organisasi yang lebih berorientasi vertikal-paternalistik (atau dikenal dengan prinsip "*asal Bapak senang*") dibanding kultur horizontal yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

- 2) Beragam ketidakpastian (ketidakpastian pihak yang bertanggung jawab, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian waktu penyelesaian) yang merugikan masyarakat.
- 3) Pelaku pelayanan publik (birokrat) pada tingkat atas acap memiliki kewenangan yang sangat besar, sehingga mendorong munculnya tindak penyimpangan (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
- 4) Pelaku pelayanan publik (birokrat) pada tingkat bawah lazimnya mempunyai kewenangan yang terbatas, sehingga sulit untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- 5) Rendahnya kemampuan pelaku pelayanan publik (birokrat) untuk merespon aspirasi masyarakat dan potensi krisis secara kreatif.

Dalam Laporan Tahunan 2013, Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mencatat 5.173 laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik di sepenjuru wilayah Indonesia. Pelayanan Pemerintah Daerah dianggap terburuk (45,02%), disusul Kepolisian (12,91%) dan Instansi Kementerian (10,05%). Adapun substansi laporan masyarakat, antara lain, penundaan berlarut (25,40%), penyimpangan prosedur (18,07%), tidak memberikan pelayanan (13,67%), penyalahgunaan wewenang (13,30%), permintaan uang, barang, dan jasa (9,24%), serta tidak kompeten (6,19%).

Namun, berbagai upaya yang terus dilakukan untuk membenahi dan menguatkan pelayanan publik perlahan mulai membuahkan hasil. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencatat peningkatan rata-rata nilai integritas instansi pusat menjadi 7,37 (dibanding tahun 2012 pada level 6,37). Instansi pusat dengan indeks integritas tertinggi ialah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kesehatan. Sedangkan Pemerintah Daerah berintegritas baik diraih oleh Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Surabaya (Jawa Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara).

Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, hendaknya semua pihak tidak lekas berpuas diri. Penataan dan penguatan harus terus digulirkan demi terwujudnya kelayakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, menuju kemajuan Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya, sungguh tepat bila berpaling pada kearifan lokal Indonesia untuk memastikan terwujudnya praktek terbaik (*best practices*) pelayanan publik.

B. TELAHAH LITERATUR

1. Pelayanan Publik

Sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Istilah pelayanan publik (*public services*) dapat pula dipersamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat.

Fungsi pelayanan publik sejatinya merupakan salah satu fungsi fundamental yang harus diemban setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, maupun lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Secara lebih terperinci, dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah ditetapkan pengelompokan berikut :

- *Kelompok Pelayanan Administratif*, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya.
- *Kelompok Pelayanan Barang*, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- *Kelompok Pelayanan Jasa*, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Adapun keseluruhan pelayanan publik dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa prinsip, antara lain :

1) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2) Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;

- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3) Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5) Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6) Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan.

7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, serta pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

8) Kemudahan Akses

Tempat/lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, sekaligus dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

2. Kearifan Lokal

Sebagai bangsa yang terlahir atas dasar kesepakatan berbagai nilai, baik yang bersifat sentripetal (pusat) maupun sentrifugal (daerah), Indonesia sungguh beruntung karena telah dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan beragam kearifan lokal yang dapat dijadikan pegangan hidup, penguat ketahanan budaya, sekaligus pendorong untuk mencapai kemajuan serta keunggulan seutuhnya. Menurut Robert Sibarani (2012), kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Jika hendak berfokus pada nilai budaya, maka kearifan lokal dapat pula didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan guna mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Dalam masyarakat multikultural Indonesia, sesungguhnya tidaklah sulit menemukan berbagai kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat. Kearifan lokal dapat ditemui dalam tarian, nyanyian, pepatah, petuah, atau pun semboyan kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal acap dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (Nasruddin, 2011). Kearifan lokal biasanya tercermin pula pada kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama maupun nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat (komunitas) bersangkutan. Nilai-nilai tersebut umumnya dijadikan pegangan, bahkan bagian hidup yang tak terpisahkan, hingga dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari.

Lebih lanjut, Robert Sibarani (2012) menyebut bahwa berdasarkan maknanya, kearifan lokal dapat dibedakan atas :

1) Kearifan lokal inti etos kerja (*core local wisdom of work ethics*)

Sekian banyak kearifan lokal Indonesia mengingatkan pentingnya senantiasa memacu semangat bekerja demi tercapainya kesejahteraan yang dicita-citakan bersama.

2) Kearifan lokal inti kebaikan (*core local wisdom of kindness*)

Kearifan lokal inti kebaikan menganjurkan kepada seluruh manusia agar senantiasa jujur, lurus hati, berbudi, terpuji, santun, rendah hati, setia, gemar memberi pertolongan, murah hati, berpikiran positif, dan tak lalai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika sungguh dipedomani, kearifan lokal ini diyakini akan menciptakan kerukunan, keamanan, dan kenyamanan yang mendukung upaya-upaya pencapaian kesejahteraan dalam kehidupan.

C. PEMBAHASAN

Untuk menata dan menguatkan pelayanan publik sejatinya haruslah dimulai dari upaya penetapan standar pelayanan. Dalam hal ini, masyarakat perlu dilibatkan secara konkret agar tercapai kesepakatan yang memungkinkan penyelenggara layanan menangkap aspirasi masyarakat sehingga mampu memberikan kepastian, sekaligus meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pun diharapkan akan bersedia memberi dukungan bagi penerapan standar tersebut dan tidak mempengaruhi penyelenggara layanan untuk memberi keistimewaan maupun perlakuan berbeda.

Penataan dan penguatan pelayanan publik memang menuntut para penyelenggara untuk selalu membuka diri dalam pergaulan sebagaimana diingatkan oleh kearifan lokal Lampung (*nemui nyapur*). Selain dilibatkan dalam penetapan standar pelayanan, pergaulan dengan segenap lapisan masyarakat pun dapat dimanfaatkan guna menumbuhkan rasa percaya, saling memahami, saling mendukung, juga kesamaan nilai, sehingga memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Bagaimana pun, kearifan lokal Bali telah menegaskan bahwa lebih baik punya banyak sahabat karib daripada kaya harta benda (*melahan sugih sawitra saihang teken sugih arta berana*).

Yang terpenting, semua hendaknya diawali niat baik sesuai kearifan lokal Sulawesi Selatan berbunyi '*paddioloowi niak madeceng ri temmakdupana iyamanenna*' (awali dengan niat baik sebelum melaksanakan suatu pekerjaan). Adapun sebagai tujuan akhir, meminjam kearifan lokal Kalimantan Selatan, adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkontribusi pada terwujudnya kerukunan, kedamaian, juga saling setia (*salapik sakaguringan, sabantal sakalang gulu*).

Berlanjut kemudian pada kearifan lokal Sumatera Utara yang menyatakan '*adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa, adat hidup berkaum bangsa, tolong*

menolong rasa merasa'. Kearifan lokal ini sesungguhnya sangat bermakna merekatkan solidaritas antar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bila benar-benar dipedomani, maka kegairahan untuk menggulirkan reformasi birokrasi demi terwujudnya praktek terbaik (*best practices*) pelayanan publik dipastikan meningkat karena dirasa bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kemajuan dalam pelayanan publik akan dipandang sebagai kemajuan bersama dan dapat dimanfaatkan demi mengangkat harkat sesama. Sebaliknya, kemunduran harus dihindari karena merugikan semua orang.

Secara lebih kokret, misalnya, kemudahan dalam pengurusan dokumen resmi (perizinan) diyakini akan menggairahkan semangat berwirausaha sehingga memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengenai kewirausahaan tersebut hendaknya didorong agar senantiasa berupaya memanfaatkan kelimpahan sumber daya lokal (contohnya buah-buahan, sayuran, atau sampah/limbah) maupun pengetahuan lokal (misalnya pembuatan jamu dari berbagai tanaman berkhasiat obat) demi menggapai keberdayaan secara ekonomi. Hal mana telah diingatkan oleh kearifan lokal Aceh (*'teugoh teuga ta ibadat, tahareukat yoh goh matee'* yang artinya manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan mencari rezeki halal) dan Bali (*'dija ada langite endep'* yang artinya di mana pun tidak ada langit yang rendah, sehingga setiap manusia hendaknya tekun dan ulet bekerja sehingga dapat mencapai kemakmuran setinggi langit).

Lazimnya upaya mencapai kemajuan, penataan dan penguatan menuju terwujudnya praktek terbaik (*best practices*) pelayanan publik tentunya takkan mungkin terjadi bila tak didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Ini sudah diingatkan sejak dahulu oleh kearifan lokal Yogyakarta. Mencari pengetahuan itu adalah keharusan bagi setiap orang. Pencarian pengetahuan harus dijalani dengan usaha keras agar dapat dicapai hasil memuaskan (*ngèlmu iku kelakoné kanthi laku*).

Dalam upaya pencarian pengetahuan, jajaran penyelenggara pelayanan publik Indonesia bisa bercermin pada pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dahulu mencapai format birokrasi yang mapan melayani, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mampu meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Tak perlu meniru. Cukup mempelajari keunggulan dan etos kerja agar dapat merumuskan wujud pelayanan publik yang didambakan masyarakat Indonesia. Namun, niscaya dibutuhkan kerja keras dan upaya pantang menyerah sesuai kearifan lokal Jawa Barat (*'ulah kumeok*

memeh dipacok’ yang artinya jangan mundur sebelum berupaya keras) atau pun Kalimantan Selatan (*‘haram manyarah waja sampai ka putting*’ yang artinya pantang menyerah dan selalu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas).

Selain itu, kepada segenap jajaran penyelenggara pelayanan publik semestinya ditumbuhkan budaya kerja yang mengacu pada sejumlah kearifan lokal inti kebaikan (*core local wisdom of kindness*), yakni :

- a. *Udep saree, matee sahid* (kearifan lokal Aceh yang bermakna ‘hidup penuh kehormatan, mati membela kebenaran’).
- b. *Pantun hangoluan, tois hamagoan* (kearifan lokal Batak Toba yang berarti ‘kesopansantunan sumber kehidupan, kesombongan sumber kehancuran’).
- c. *Paras-paros sapa naya* (kearifan lokal Bali yang bermakna ‘dapat saling memberi dan menerima sesuai dengan kata dan perbuatan’).
- d. *Nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun* (kearifan lokal Jawa Barat yang berpadanan dengan ‘konsisten; yang salah harus disalahkan, yang benar hendaknya dibenarkan’).
- e. *Tanggap, tatag, tanggon* (kearifan lokal Jawa Tengah yang berarti ‘peka, tahan uji, dapat diandalkan’).
- f. *Aja milik barang kang melok, aja mangro mundak kendo* (kearifan lokal Jawa Timur yang menuntut agar ‘jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak indah, jangan berpikir mendua agar semangat tidak padam’).
- g. *Aja dumeh kuwasa, tumindake daksura lan daksia marang sapadapada* (kearifan lokal Yogyakarta yang mengingatkan manusia agar ‘janganlah merasa berkuasa, sombong, dan bertindak semena-mena terhadap sesama’).

Pada akhirnya, penataan dan penguatan pelayanan publik juga membutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang reformis. Pemimpin tersebut haruslah sosok yang mampu menginspirasi dan mendorong perubahan ke arah lebih baik, serta konsisten mengarahkan jajarannya untuk senantiasa berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa kearifan lokal yang dapat dijadikan panduan oleh pemimpin, di antaranya :

1. *‘Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman’*

Pepatah Jawa ini mengingatkan agar pemimpin tidak terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Seorang pemimpin hendaknya selalu mengingat bahwa kedudukannya

merupakan amanah yang dipercayakan masyarakat. Oleh karenanya, haruslah sepenuh hati melayani masyarakat. Tak perlu berlarut memikirkan pencitraan maupun upaya-upaya melanggengkan kekuasaan.

2. '*Awan aradin becik arata*'

Kearifan lokal Bali ini bermakna bahwa pemimpin haruslah berlaku jujur dan adil. Jujur artinya senantiasa menjaga kesesuaian antara ucapan dengan tindakannya serta terbuka mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pun kegagalan dalam penataan dan penguatan pelayanan publik kepada masyarakat. Adil bermakna mampu mengambil posisi yang tidak memihak serta bertindak sebagai pengayom bagi semua.

3. '*Patik dohot uhum*'

Menegakkan hukum dan kebenaran. Inilah yang dituntut oleh kearifan lokal Batak Toba di atas. Dalam hal ini, pemimpin harus senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar pelayanan publik dan tak gentar oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menuntut perlakuan istimewa.

D. KESIMPULAN

Perlahan dan bertahap, penataan dan penguatan pelayanan publik diyakini akan mampu mewujudkan kemajuan Indonesia seutuhnya. Memang, proses tadi takkan mudah, sebab berbagai tantangan akan selalu mengintai. Tapi, seperti diingatkan oleh kearifan lokal masyarakat Banten bahwa '*ari hidup mah jih palataran babalean bae*' (hidup memang penuh dengan cobaan juga rintangan). Itulah sebabnya, manusia haruslah berusaha terus-menerus hingga menghasilkan kebaikan, sesuai pesan kearifan lokal Jawa Barat berbunyi '*cai karacak ninggang batu laun-laun jadi dekok*'. Semoga saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Holidin, Defny. 2013, **REFORMASI BIROKRASI DALAM PRAKTIK**. Jakarta : Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Reformasi Birokrasi.
- Nasruddin. 2011, **KEARIFAN LOKAL DI TENGAH MODERNISASI**. Jakarta : Pusat

Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Santosa, Iman Budhi. 2009, **KUMPULAN PERIBAHASA INDONESIA : Dari Aceh Sampai Papua**. Yogyakarta : IndonesiaTera.

Sibarani, Robert. 2012, **KEARIFAN LOKAL : Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan**. Jakarta : Asosiasi Tradisi Lisan.

Tim Simpul Demokrasi. 2010, **REFORMASI BIROKRASI DAN DEMOKRATISASI KEBIJAKAN PUBLIK**. Malang : Averroes Press.

RPSEP-03

MENEGAKKAN NETRALITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014²

Moh. Waspa Kusuma Budi³
STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung
E-mail: waspabudi@yahoo.com

Abstrak

Ada dua pandangan dalam studi mengenai birokrasi. Pandangan pertama menempatkan birokrasi pada posisi netral dari politik, sedangkan pandangan kedua, menempatkan birokrasi pada posisi yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik. Namun demikian di era pemilu kepala daerah secara langsung, birokrasi telah ditarik masuk kedalam ruang politik praktis. Hal ini terjadi pula pada pemilihan kepala daerah, gubernur/ wakil gubernur Lampung, birokrasi menjadi “primadona” bagi semua pasangan calon untuk meraup suara. Apalagi dari 4 (empat) pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Lampung adalah pejabat yang masih aktif menduduki jabatan publik yang sangat strategis. Dalam kasus ini birokrasi rasanya sangatlah muskil untuk bisa netral dari kepentingan politik. Hal ini lebih disebabkan, walaupun tidak sama seperti TNI dan POLRI, namun birokrasi juga memiliki “jalur komando” yang sistimatis dan terstruktur.

Untuk itu diperlukan pemikiran kritis menempatkan birokrasi pada jalur yang lurus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian, birokrasi agar “kembali kejalan yang lurus”, menempatkan aparat birokrasi pada posisi dan fungsi sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan latar belakang afiliasi politik manapun. Sehingga upaya menegakkan netralitas birokrasi pemerintah daerah dari pengaruh politik praktis pemilihan kepala daerah 5 (lima) tahunan bisa tercapai dengan baik. Birokrasi harus didorong menjadi lebih profesional, mandiri, serta kuat dalam memegang jati diri nilai-nilai sebagai aparatur sipil negara. Semoga.

Kata Kunci: Netralitas Birokrasi, Pemerintah Daerah, Pilkada (Pilgub)

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah berjalan hampir 10 (sepuluh) tahun, dimulai tahun 2005-2014 telah memberikan dampak positif terutama dalam meningkatnya demokrasi politik lokal. Namun disamping dampak positif yang

² *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis ke 30 Universitas Terbuka, dengan Sub Tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”, Pada Tanggal 23 Oktober 2014 di Universitas Terbuka Covention Center (UTCC), Pondok Cabe Tangerang Selatan.*

³ *Dosen Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Dharma Wacana Metro Lampung*

ditimbulkan, dalam perjalanannya pilkada langsung juga memberikan dampak negatif berupa konstelasi netralitas birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Apalagi dalam pilkada gubernur Lampung yang dilaksanakan bertepatan dengan pemilu legislatif 9 April 2014 lalu juga diikuti oleh pasangan calon gubernur/ wakil gubernur yang masih menduduki jabatan strategis. Menurut KPU Lampung (2014), diantara calon yang masih menduduki jabatan strategis ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Berlian Thihang) sebagai calon gubernur, Bupati Lampung Barat (Muchlis Basri) sebagai calon wakil gubernur, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (Bahtiar Basri) sebagai calon wakil gubernur, Walikota Bandar Lampung (Herman HN.) sebagai calon gubernur dan Walikota Metro (Lukman Hakim) sebagai calon wakil gubernur. Adapun calon tersebut disamping menduduki jabatan strategis namun juga masih aktif sebagai pegawai negeri sipil (PNS) diatas adalah Berlian Thihang dan Herman HN., yang keduanya sebagai calon gubernur.

Perkembangan birokrasi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika demokrasi politik disuatu negara. Ketika suatu negara berlaku sistem otoriter, maka birokrasi akan menganut tipe dan karakter yang cenderung otoriter; namun sebaliknya apabila suatu negara berlaku sistem demokrasi, perilaku birokrasi juga akan memiliki kecenderungan budaya demokrasi. Seperti apa yang dicontohkan oleh Thoha (2005) bahwa perjalanan panjang kehidupan birokrasi di Indonesia ini selalu saja ditandai oleh dominannya aspek politis dibawah komando penguasa negara.

Dalam kondisi ini, birokrasi tidak lagi akrab dan ramah dengan kehidupan masyarakat, namun justru menjaga jarak dengan masyarakat sekelilingnya. Performance birokrasi yang kental dengan aspek-aspek politis inilah yang pada gilirannya melahirkan *stigma* “politisasi birokrasi”. Untuk itu Kebijakan penempatan jabatan birokrasi pemerintah daerah semestinya harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk membentuk sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, tanggap dan cekatan (*quick and responsive*), terbuka dan bertanggung jawab (*transparent and accountable*), membuka seluas mungkin partisipasi publik (*inclusive and democratic*).

Seperti dikemukakan oleh **Isran Noor** (2012: 103-104) dalam bukunya **Politik Otonomi Daerah untuk penguatan NKRI**, merupakan keniscayaan bahwa Apikasi sangatlah mendukung Aparatur Sipil Negara (aparatur birokrasi) yang memiliki profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Hal ini disebabkan Aparatur Sipil Negara disertai tugas untuk melaksanakan

tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Upaya ini bisa ditempuh apabila dalam menjalankan tugasnya aparatur birokrasi bisa terhindar dari pengaruh politik manapun.

Di dalam perkembangan konsep administrasi negara, aparat birokrasi merupakan pelayan publik yang semestinya harus netral dari pengaruh aliran politik manapun. Dari beberapa ahli administrasi negara terjadi dua kutub berbeda. Satu sisi menghendaki bahwa birokrasi harus netral dari politik, disisi yang lain bahwa birokrasi sangat sulit untuk dihindarkan dari politik, karena justru birokrasi sering memiliki relasi dengan politik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara jabatan politik oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta jabatan administrasi para birokrat karier, secara empirik ternyata saling “berkepentingan” dan saling “membutuhkan” satu dengan yang lainnya, sehingga transaksi politik antar keduanya tidak bisa dihindarkan. Hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan “ketakutan” para birokrat selanjutnya ketika terpilihnya kepala daerah melalui pilkada langsung adalah perombakan pengisian jabatan birokrasi pemerintah daerah.

B. TELAAH LITERATUR

1. Konsep Birokrasi Pemerintah

Birokrasi berasal dari bahasa Yunani, *kratein* yang memiliki arti mengatur. Dalam bahasa Perancis, kata birokrasi disinonimkan dengan kata *bureau* yang memiliki arti kantor. Menurut Rourke dalam Azhari (2011: 59) bahwa birokrasi adalah system administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam system hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dan dijalankan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan yang lainnya, oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Hegel memiliki pandangan mengenai 3 (tiga) kelompok dalam masyarakat, yaitu (1) kelompok kepentingan khusus (*particular interest*), yang diwakili oleh kelompok para pengusaha dan kelompok profesional, (2) kelompok kepentingan umum (*general interest*)

yang diwakili oleh negara dan (3) kelompok birokrasi. Menurut pandangan Hegel dalam Azhari (2011: 60) birokrasi semestinya menjadi kelompok penengah di antara kelompok *particular* dan negara, sehingga birokrasi seharusnya berada pada posisi yang netral.

Pada perkembangan yang lain, mengkaji teori birokrasi tidak bisa dilepaskan dari dunia politik dan berbagai perkembangan paradigma administrasi publik, khususnya salah satu paradigma administrasi publik yang digambarkan sebagai ilmu politik. Dari alasan ini maka birokrasi sering tampil dalam wajah yang berbeda, bisa berwajah baik atau positif dan bisa berwajah jelek atau negative. Penampilan wajah birokrasi akan dipengaruhi oleh lingkungan aspek sosial, politik termasuk didalamnya adalah demokrasi.

Mengkaji perkembangan teori birokrasi tidak bisa dilepaskan dari karya Weber tentang tipe ideal birokrasi yang rasional. Menurut Weber yang dikutip Martin Albrow (1996) dan Thoha (2005,) tipe ideal birokrasi rasional itu berisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Jabatan-jabatan disusun dalam hirarki dari atas kebawah dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil;
- 2) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain;
- 3) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif;
- 4) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif;
- 5) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak;
- 6) Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin;
- 7) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dengan *resources* instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
- 8) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya;
- 9) Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa

memutuskan untuk keluar dari jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.

Selanjutnya dalam birokrasi, telah mengalami perkembangan paradigma, seperti dikemukakan oleh Barzelay dan Armajani (1997:496) bahwa perubahan dari paradigma klasik ala Weber ke paradigma post-bureaucratic dapat digambarkan melalui ciri-ciri sebagai berikut: (1) paradigma birokratik menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasi, dan kontrol, maka paradigma post-birokratik menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk serta keterikatan terhadap norma; (2) paradigma birokratik mengutamakan fungsi, otoritas dan struktur, maka paradigma post-birokratik mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir; (3) paradigma birokratik menilai biaya, menekankan tanggung jawab (*responsibility*) maka paradigma post birokratik menekankan pemberian nilai bagi masyarakat; (4) paradigma birokratik mengutamakan ketaatan pada aturan dan prosedur, maka paradigma post birokratik menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan; (5) ketika paradigma birokratik mengutamakan beroperasinya sistem-sistem administrasi, maka post birokratik menekankan pemisahan antara pelayanan dengan control, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil dan memperkaya umpan balik.

2. Relasi Birokrasi dan Politik : Birokrasi sebagai Instrumen Politik

Menurut Carino (1994) hubungan antara pejabat politik (*political leadership*) dan birokrasi merupakan suatu hubungan yang konstan (*ajeg*) antara fungsi control dan dominasi. Dalam hubungan seperti ini maka akan senantiasa timbul persoalan, siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Masih menurut Carino dalam Thoha (2005), persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan klasik sebagai perwujudan dikotomi politik dan administrasi. Kemudian timbul dua bentuk alternatif solusi yang utama, yakni apakah birokrasi sebagai subordinasi dari politik (*executive ascendancy*) atau birokrasi sejajar dengan politik (*bureaucratic sublation, atau attempt at co-equality with the executive*).

Pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi-fungsi politik atas administrasi. Menurut Wilson (1987), slogan

klasik pernah juga ditawarkan bahwa manakala fungsi politik berakhir, maka fungsi administrasi itu mulai (*when politic end, administration begin*). Slogan ini mengartikan bahwa birokrasi pemerintah sebagai mesin pelaksana kebijakan politik dibuat oleh pejabat politik. Sedangkan menurut Kirwan (1987), dikotomi antara politik dan administrasi ini juga diakibatkan karena adanya kesalahan perubahan referensi dari fungsi ke struktur, dari perbedaan antara pembuatan kebijakan (*policy making*) dan pelaksana (*implementation*) antara pejabat politik dan pejabat karier birokrasi.

Dalam berbagai literature dijelaskan adanya hubungan antara birokrasi dan politik dengan mengambil berbagai macam bentuk. Secara khusus, model-model hubungan tersebut dalam studi administrasi publik dijelaskan dengan konsep patologi birokrasi. Model yang cukup terkenal antara lain adalah model Parkinson, Model Orwell dan Jackson. Dikutip oleh Kumorotomo dan Widyaningrum (edt.) (2010, 155) dalam bukunya Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali, Model Parkinson banyak dipakai untuk menganalisis birokrasi rezim orde baru berkuasa. Argumennya sederhana, rezim ini membutuhkan birokrasi sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk maksud tersebut, birokrasi harus dikembangkan dengan cara memperlebar struktur organisasi dan mempertajam hirarki melalui penciptaan sebanyak mungkin unit-unit organisasi.

Masih menurut Kumorotomo dan Widyaningrum (2010, 156), model berikutnya adalah model Orwell menganalisis rezim Orba melalui keberadaan militer dan Golongan Karya sebagai partai politik, serta birokrasi sebagai alat kekuasaan yang efektif untuk merekrut masa yang pro pada pemerintah yang berkuasa dan sekaligus menjadikan sebagai alat untuk mengontrol rakyat. Model selanjutnya adalah model Jackson juga menunjukkan kemiripan dengan model Orwell. Perbedaannya terutama pada indentifikasi Jackson terhadap kemampuan birokrasi untuk mengasingkan publik dari proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, birokrasi menjadi organisasi yang immune terhadap tuntutan dan kebutuhan publik. Model-model diatas menunjukkan birokrasi tidak pernah bisa lepas dari system politik di mana dia berada.

Model yang dinilai lebih rasional karena memanfaatkan dasar pemikiran kelompok Weberian, misalnya model yang dikemukakan Dunleavy dan O'Leary (1987). Menurut Kumorotomo dan Widyaningrum (2010, 157), bahwa kedua penulis tersebut diatas menawarkan sejumlah model yang bertujuan agar birokrasi tetap bekerja secara professional dan terhindar dari intervensi politik yang berlebihan. **Model pertama**

yang disebut sebagai “model Perwakilan Konstitusional” yang membedakan antara pejabat politik (*elected official*) dengan pejabat karier (*appointed official*). **Model kedua** adalah “Pluralis” yang mengibaratkan birokrasi seolah-olah sebagai actor yang memiliki kepentingan di antara berbagai kelompok kepentingan lainnya. **Model ketiga** adalah “otonom tetapi demokratis” yang menjelaskan adanya policy networks dalam formulasi kebijakan. **Model keempat** adalah “New Right” yang melibatkan adanya kecenderungan birokrasi tidak efisien dan tumbuh tanpa alasan jelas. Penyebabnya adalah kehadiran partai politik. Menurut pendukung kelompok ini kehadiran parpol sebagai sebuah kejahatan karena kehadirannya membuat efisiensi pemerintahan terganggu.

3. Menuju Netralitas Birokrasi

Dalam perkembangan awal konsep birokrasi, mengenai netralitas birokrasi sudah menjadi perdebatan para pakar, misalnya Polemik antara Karl Marx dan Hegel yang menyoroti konsep netralitas birokrasi. Dari polemic antara Karl Marx dan Hegel inilah netralitas birokrasi sudah ramai dibahas. Seperti dikemukakan oleh Batinggi (1999), bahwa dari polemik pendapat antara Karl Marx dan Hegel dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hegel menghendaki kenetralan birokrasi. Sedangkan Marx yang terkenal dengan teori kelasnya menyatakan dengan tegas bahwa birokrasi tidak netral dan harus memihak, yakni memihak pada kelas yang dominan.

Pada konteks yang lain, yang tidak berbau Marxis, Woodrow Wilson dalam Thoha (2005) juga menyoroti tentang kenetralan birokrasi. Birokrasi pemerintah menurut Wilson berfungsi melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada di luar kajian politik.

Konsep ini kemudian diikuti oleh sarjana politik Goodnow dalam Batinggi (1999) yang menyatakan bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lainnya yaitu fungsi pokok politik dan administrasi. Fungsi politik berarti pemerintah membuat dan merumuskan kebijakan –kebijakan, sementara fungsi administrasi berarti pemerintah tinggal melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam perspektif lainnya, netralitas birokrasi dikemukakan oleh Francis Rourke dalam Batinggi (1999). Dia mengatakan walaupun birokrasi pada mulanya hanya berfungsi untuk melaksanakan kebijakan politik, akan tetapi birokrasi bisa berperan membuat kebijakan politik. Menurut Rourke, netralitas birokrasi dari politik adalah

hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan alternative program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik.

4. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian yang paling sederhana mengenai demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ‘demos’ dan kratos’ yang berarti ‘pemerintahan oleh rakyat’. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimulai dari pemilu anggota legislative (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota), pemilu anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah hingga pemilu kepala desa. Sehingga dikatakan oleh Marijan (2006: 32) bahwa demokrasi bukanlah konsep yang statis, tetapi secara histories berevolusi.

Dari pandangan mengenai demokraasi itu, Robert Dahl (1971: 2) menyampaikan delapan criteria demokrasi, antara lain: (1) adanya hak untuk memilih, (2) hak untuk dipilih, (3) hak para pemimpin politik untuk bersaing mempebutkan dukungan dan suara, (4) adanya pemilu yang bebas dan fair, (5) kebebasan berorganisasi, (6) kebebasan berekspresi, (7) terdapatnya sumber-sumber informasi alternative, dan (8) adanya institusi pembuatan kebijakan-kebijakan publik yang bergantung pada suara dan ekspresi-ekspresi pilihan lainnya. Selanjutnya dalam kerangka yang lebih empiris lagi, oleh Robert Dahl (1971:4) delapan criteria itu dikerucutkan kedalam dua dimensi teoritis demokratisasi, yaitu dimensi kompetisi dan dimensi inklusivitas.

C. PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dilakukan pembahasan melalui sub bab sebagai berikut (1) pelaksanaan Pilkada Lampung: perseteruan antara KPUD vs Gubernur Lampung; (2) menegakkan netralitas birokrasi dalam pilkada Gubernur dan wakil gubernur Lampung; (4) selamat datang Gubernur dan wakil Gubernur terpilih periode 2014-2019, M. Ridho Ficardo dan Bahtiar Basri.

1. Pelaksanaan Pilkada Lampung: Perseteruan KPUD vs Gubernur Lampung

Di dalam penetapan rencana pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung sejak awal telah terjadi “perseteruan” atau lebih tepat dinamakan perbedaan pandangan antara Gubernur Lampung, Syahrudin ZP., dengan KPUD

Lampung. Rencana pelaksanaan Pilgub Lampung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sempat tertunda hingga 4 (empat) kali yang akhirnya baru dapat dilaksanakan serentak bersama dengan pemilu anggota legislative, tanggal 9 April 2014. Ketika KPUD Lampung sudah menetapkan pilgub akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013, namun Gubernur Lampung Syahudin ZP., ternyata tidak menganggarkan pilgub ini dalam APBD Lampung. Demikian ketika KPUD menjadwalkan ulang pelaksanaan pilgub akan digelar pada tanggal 2 Oktober hingga tertunda lagi menjadi 3 Desember 2013, Gubernur Lampung Syahrudin ZP., tetap saja tidak bersedia menganggarkan dana pilgub Lampung dalam APBD Perubahan tahun 2013.

Gubernur Syahrudin ZP., beralasan tidak bersedia menganggarkan dana pilgub Lampung karena Gubernur memang tidak ingin pilgub Lampung dilaksanakan pada tahun 2013, karena masa baktinya baru akan habis tanggal 2 Juni 2014. Sebaliknya mengapa KPUD Lampung menjadwalkan pilgub Lampung akan dilaksanakan pada tahun 2013 seperti tersebut diatas hingga tertunda sampai tiga kali ?. KPUD Lampung beralasan atas terbitnya Surat Edaran Kemendagri bahwa tidak ada pilkada Provinsi maupun Pilkada Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2014, karena pada tahun tersebut akan dilaksanakan untuk pemilu anggota legislative pada tanggal 9 April 2014 dan pemilu presiden pada tanggal 7 Juli 2014.

Pada awal penetapan jadwal pilgub yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013, telah muncul 5 (lima) pasangan **bakal calon** yang mempromosikan dan melakukan sosialisasi ketengah masyarakat Lampung melalui alat peraga berupa spanduk, baner, baliho yang tersebar diseluruh wilayah Lampung.

Namun sehubungan penantian yang cukup melelahkan bagi masyarakat, menunggu pilgub Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 namun terus tertunda, akhirnya salah satu pasangan bakal calon Independen yakni Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim menyatakan mengundurkan diri. Kelima pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lampung serta parpol yang akan mengusungnya dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1.
PARPOL PENGUSUNG BAKAL CALON DALAM PILKADA GUBERNUR
LAMPUNG

NO.	NAMA CALON	PARPOL PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
1.	BERLIAN TIHANG (Sekda Propinsi Lampung) MUKHLIS BASRI (Bupati Lampung Barat dan Ketua DPC PDIP Lampung Barat)	PDIP PPP PKB	11 Kursi 5 Kursi <u>3 Kursi</u> 19 Kursi
2.	MOH. RIDHO FICARDO (Ketua DPD Partai Demokrat Lampung) BACHTIAR BASRI (Bupati Tulang Bawang Barat)	Partai Demokrat PKS PKPB PDK 12 Partai Non Parlemen.	14 Kursi 7 Kursi 4 Kursi <u>2 Kursi</u> 27 Kursi
3.	HERMAN HN. (Walikota Bandar Lampung) ZAINUDIN HASAN (Pengusaha Nasional)	PAN 4 Partai Non-parlemen	9 kursi
4.	ALZIR DIANIS TABRANI (Ketua DPD Golkar Lampung) LUKMAN HAKIM (Walikota Metro dan Ketua Ormas Nasdem Lampung)	Partai Golkar Partai Hanura	11 Kursi <u>6 Kursi</u> 17 Kursi
5.	AMALSYAH TARMIZI (Mantan Komandan Korem Lampung) GUNADI IBRAHIM (Ketua DPD Partai Gerindra Lampung)	Partai Gerindra 4 Partai Non-parlemen Calon Independen	3 Kursi

Sumber: KPU Lampung, 2013.

Setelah mengalami penundaan hingga 3 (tiga) kali pada tahun 2013, akhirnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan pemilu anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Dari 4 (empat) pasangan calon, akhirnya pilkada ini dimenangkan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri dalam satu putaran. Menurut perhitungan manual yang dilakukan oleh KPUD Lampung, secara berurutan pasangan M. Ridho Ficardo-Bahtiar Basri memperoleh 1.816.533 suara (44,81 %), disusul urutan kedua perolehan suara Herman HN.-Zainudin Hasan memperoleh 1.342.763 suara (33,12 %). Sedangkan urutan perolehan ketiga adalah Berlian Tihang-Mukhlis Basri memperoleh 606.560 suara (14,96 %), sedangkan urutan keempat atau terakhir adalah M. Alzir Dianis Tabrani-Lukman Hakim yang

memperoleh 288.272 suara (7,11 %). Selengkapnya hasil perolehan suara dapat dilihat pada table 2 dibawah ini.

Tabel 2.
HASIL PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
9 APRIL 2014 (BARENG DENGAN PILEG)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON DAN PARPOL PENDUKUNG	SMRC *) ⁴ RISET	RAKATA**) ⁵ INSTITUTE	KPU***) ⁶ LAMPUNG
1.	Berlihan Tihang-Mukhlis Basri (BERLIANMU) (PDIP, PKB, PPP)	15,07 % 610.957	14,87 % 602.849	14,96 % 606.560 Suara
2.	M. Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri (RIDHO BERBAKTI) (PD, PKS, PKPB, PDK)	44,74 % 1.813.817	44, 67 % 1.810.980	44,81 % 1.816.533 Suara
3.	Herman HN.-Zainudin Hasan (MANZADA) (PAN, 4 Parpol Non-parlemen)	33,11% 1.342.322	33,40 % 1.354.078	33,12 % 1.342.763 Suara
4.	M. Alzier Dianis Thabranie- Lukman Hakim (AMAN) (P Golkar, P Hanura)	7,08 % 287.032	7,06 % 286.221	7,11 % 288.272 Suara
Jumlah		4.054.128 100,00 %	4.054.128 100,00 %	4.054.128 100,06 %

Sumber: KPUD Lampung, Pilgub diadakan tanggal 9 April berbarengan dengan Pemilu Legislatif

2. Menegakkan Netralitas Birokrasi dalam Pilgub

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004⁷ tentang Pemerintahan Daerah dan Amandemen Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008⁸ tentang Pemerintahan Daerah, seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu mengundurkan diri. Pemberlakuan pengunduran diri hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan structural eselonisasi. Jadi pengunduran diri hanya pada jabatan strukturalnya, bukan pada status pegawai negerinya.

Kelemahan ini adalah pada pelibatan aparat birokrasi pegawai negeri sipil dalam setiap tahapan pilkada, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Namun setelah

⁴ Survey SMRC pada tanggal 9-10 April 2014;

⁵ Survey Rakata Institute pada tanggal 9-10 April 2014; Sampel 300 TPS di 14 Kabupaten/ Kota, Margin Error 1,2 %, Tingkat Kepercayaan 95 %, dan Partisipasi Pemilih 78,08 %.

⁶ Rapat Pleno Penghitungan Suara KPU Lampung, 17 April 2014, Berdasarkan Berita Acara Nomor: IV/2014 BA, Menetapkan M. Ridho Ficardo dan Bahtiar Basri sebagai pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur Lampung Terpilih, yang kemudian dilantik pada hari Senin 2 Juni 2014.

⁷ Pasangan calon kepala daerah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

⁸ Disamping pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, juga memunculkan calon Independen.

ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), persyaratan calon yang berasal dari pegawai negeri sipil akan lebih berat karena harus mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Sehingga seorang PNS yang mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah diharuskan mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri di KPUD dan pengunduran dirinya bersifat tetap sehingga tidak bisa ditarik kembali.

Ketentuan ini seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain sebagai berikut:

Pasal 119, Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/ walikota, dan wakil bupati/ wakil walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS** sejak mendaftar sebagai calon.

Pasal 123 ayat (3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/ walikota dan wakil bupati/ wakil walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS** sejak mendaftar sebagai calon.

Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara ini memang bertujuan agar PNS bisa lebih professional dan tidak terlibat lebih jauh dari politik praktis, sehingga PNS benar-benar netral yang hanya berpihak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa ada garis tegas antara karier birokrasi dan karier politik. Dipersilahkan kepada Aparatur Sipil Negara dari unsur PNS untuk memilih diantara dua pilihan, yakni ketika memilih “setia” pada jabatan birokrasi maka PNS tidak boleh masuk dalam ruang politik praktis sebagai calon dalam pilkada. Sebaliknya ketika PNS hendak berubah haluan ingin mengejar dalam jabatan politik maka konsekuensinya harus mengundurkan diri dari PNS ketika mencalonkan diri dalam pilkada.

3. Selamat Datang Gubernur Terpilih Periode 2014-2019, M. RIDHO FICARDO dan Wakil Gubernur, Bachtiar Basri.

Penantian yang cukup lama dan melelahkan masyarakat Provinsi Lampung terhadap terpilihnya gubernur baru berakhir ketika M. Ridho Ficardo dan Bachtiar

Basri, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih pada perhelatan pilkada Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden RI pada tanggal 2 Juni 2014, maka sejak inilah tampuk kepemimpinan Lampung telah beralih dari Syahrudin ZP., kepada M. Rido Ficardo.

Gubernur baru Provinsi Lampung memiliki tantangan yang cukup berat dalam upaya mamajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Disamping Lampung masuk kedalam salah satu dari 10 (sepuluh) provinsi termiskin di Indonesia, terdapat proyek besar yang hingga kini belum selesai, yakni pembangunan Kota Baru. Proyek besar Kota Baru ini merupakan gagasan Gubernur Lampung Syahrudin untuk memindahkan pusat perkantoran Gubernur dan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Lampung, yang sebelumnya berada di Teluk Betung dipindahkan ke wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan. Gagasan ini memang sangat monumental, disamping bertujuan mengurangi tingkat kemacetan dan kepadatan di Ibukota Provinsi ini, juga bisa menciptakan pusat perkembangan baru.

Namun belum genap satu bulan Gubernur M. Ridho Ficardo dilantik sebagai gubernur Lampung, justru memberi pernyataan bahwa proyek Kota Baru untuk sementara dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Penghentian ini apakah lebih disebabkan oleh kepentingan politik semata karena proyek Kota Baru merupakan gagasan Gubenrut Syahrudin atau karena menyangkut pendanaan yang sangat besar. Namun yang lebih penting bagi masyarakat lampung adalah sangat berharap banyak agar masyarakat Lampung lebih sejahtera, aman dan meningkat dalam “memikmati” hasil-hasil pembangunan. Semoga.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan bahwa upaya mengembalikan jati diri aparat birokrasi agar netral dalam pilkada benar-benar tidaklah mudah dan belum berjalan secara efektif. Aparat birokrasi masih menjadi “primadona” kepentingan politik untuk mendulang suara dalam kemenangan pilkada Lampung. Upaya menegakkan netralitas birokrasi dalam pilkada ini lebih rumit lagi karena dalam kasus Lampung, diikuti oleh pasangan calon yang masih menduduki jabatan strategis, baik jabatan di Provinsi sebagai Sekretaris Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Walikota. Pejabat stretegis ini dengan leluasa bisa menggunakan jabatannya dalam upaya memobilisasi aparat birokrasi yang menjadi bawahanya. Untuk itu

diperlukan peraturan-peraturan yang lebih operasional untuk menghindari atau mencegah politisasi birokrasi yang lebih sistematis dan massif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin (Terjemahan)., 1996. *Birokrasi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Azhari, 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Batinggi, A., 1999. “*Manajemen Pelayanan Umum*, Materi Pokok IPEM-4429 Universitas Terbuka.
- Budi, Moh. Waspa Kusuma, 2010. *Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, STISIPOL Dharma Wacana Metro, Metro.
- Budi, Moh. Waspa Kusuma, 2013. *Akuntabilitas Kepala Daerah Dipersimpangan Jalan (Dari Pilkada Langsung Menuju Pilkada oleh DPRD)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, Fisip Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. (Dapat diakses on-line di www.semnas.fisip.ut.ac.id)
- Dwiyanto, A., dkk. (2003) *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Dwiyanto, A., dkk (2007). *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Hadna, Agus Heruanto, 2010. *Simbiosis Mutualisme antara Birokrasi dan Politik di Daerah*, PT. Gava Media, Yogyakarta. Dalam Wahyudi Kumorotomo, Dkk. 2010. *Reformasi Aparatur Negara di Tinjau Kembali*, PT. Gava Media, Yogyakarta.
- Ismail, 2009. *Politisasi Birokrasi*, Penerbit Ash- Shiddiqy Press, Malang.
- Istianto, Bambang, 2011. *Demokratisasi Birokrasi*, Penerbit STIAMI, Jakarta.
- Kirwan, Kent A., 1987. “Woodrow Wilson and the Study of Public Administration- Respond to Van Riper,” in *Administration and Society*, 18 P. 389-401.
- Kumorotomo, Wahyudi., dan Ambar Widyaningrum, 2010. *Reformasi Aparatur Negara di Tinjau Kembali*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung, 2006. *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung)*, Penerbit atas Kerjasama Pustaka Eureka dan PusDeHam, Surabaya.
- Thoha, Miftah, 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wilson, Woodrow, 1987. “The study of Public Administration” in *Political Science Quarterly*., 2 June 1887., P.1997-222.
- Zauhar, Soesilo, 2001. *Administrasi Publik*, UM. Press, Malang.

RPSEP-04

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

Irdatama Santia Anindita
Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi UPBJJ UT Semarang
e-mail:ut-semarang@ut.ac.id

Abstrak

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dicanangkan sejak Era Reformasi, tetapi mengalami kelambatan, sehingga dicanangkan kembali pada tahun 2004 sebagai reformasi gelombang II. Namun Grand Desain Reformasi Birokrasi (GDRB) baru dibuat pada tahun 2010 dan diharapkan berhasil sampai tahun 2025. Sedangkan *road map*-nya telah dibuat untuk setiap lima tahun sekali. Untuk periode pertama, dicanangkan tahun 2010-2014 (pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono).

Seperti yang kita ketahui tahun 2014 hampir habis, pemerintahan SBY pun akan segera turun namun perubahan perilaku birokrasi (reformasi birokrasi) belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ada hanyalah semakin banyak ditemukan para pejabat yang tersandung kasus korupsi, dan pelayanan kepada masyarakat, baik di pusat maupun daerah masih belum menunjukkan kinerja yang optimal, meskipun pemekaran wilayah (desentralisasi) telah direalisasikan. Dan semakin banyak aturan-aturan yang bertumpang tindih yang mengakibatkan berbelit-belitnya birokrasi di Negara kita ini. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di kementerian agama ; untuk mengurus surat nikah saja sangat susah dan berbelit-belit, dan juga masalah di pemberangkatan haji atau umroh juga sangat rawan sekali dengan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kementerian.

Program-program pencapaian reformasi birokrasi telah disediakan, aturan-aturan dan standar kinerja pun telah ditetapkan, namun masih banyak ditemukan pemerintahan di daerah maupun pusat yang belum mampu mewujudkannya dengan baik.

Oleh karena itu lewat tulisan ini saya ingin mengungkapkan mengapa reformasi birokrasi diperlukan, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat reformasi birokrasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan :

- a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan;
- b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan;
- c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik; dan
- d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif.

Abstrak

Governance Reforms in Indonesia has been proposed since the Reform Era, but is experiencing a delay, so it launched back in 2004 as the second wave of reform. But Grand Design Reforms Bureaucracy (GDRB) new was made in 2010 and are expected to work until 2025, while hisroad-map has been created for every five years. For the first period, was declared the year 2010-2014 (Mr. Susilo Bambang Yudhoyono's administration).

As we all know 2014 is almost gone, the SBY administration will soon go down but changes the behavior of the bureaucracy (bureaucratic reform) have not indicated modifier to a better direction. There is only more and more discovered that officials stumbled corruption cases, and service to the community, both at central and local levels still do not show optimal performance, although regional divisions (decentralization) has been realized. And the more the rules resulting overlap-belitnya convoluted bureaucracy in our country. One example is what happened in the ministry of religion; to take care of a marriage certificate alone is very difficult and complicated, and also problem sin Hajj or Umrah departure also very vulnerable once the criminal acts of corruption committed by unscrupulous ministry.

Achievement programs bureaucratic reform has been provided, the rules and performance standards had been set, but still commonly found in local and central government were not able to make it happen properly.

Therefore, through this article I want to reveal why bureaucratic reforms are needed, the factors that constrain bureaucratic reform and some of the issues related to:

- a) Structuring Strengthening Organizations, Strengthening supervisory function and the Role of the Representative;

- b) Structuring Regulation Legislation and Judiciary Independence;
- c) Arrangement of Human Resource Management System for Administrative, Professional and Government Reform Integrity in public service; and
- d) Strong Civil Society and Participatory.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip good governance : professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Seperti halnya di Indonesia, Indonesia adalah Negara demokratis yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sangat menjaga nilai-nilai moralitas. Indonesia juga merupakan Negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan beberapa kali mengalami transisi kepemimpinan yang berdampak pada sistem dan aturan yang berlaku.

Lewat tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa Sub Tema antara lain:

- a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan;
- b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan;
- c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik; dan
- d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif.

Dimensi reformasi birokrasi tidak saja sekedar perubahan format institusi, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita mewujudkan good governance benar-benar akan tercapai.

B. Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Penulis menggunakan beberapa metode diantaranya :

1. Metode tela'ah buku / studi pustaka, yakni penulis mencari pokok bahasan dari buku sumber yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.
2. Internet, yakni media jaringan komunikasi dan informasi dalam sebuah wahana software (*web*) yang terdapat dalam aplikasi komputer.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Birokrasi dan Reformasi Birokrasi dalam sebuah Pemerintahan

Dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita sering mendengar istilah “birokrasi”, terutama dalam membahas soal pemerintahan dan negara. Terdapat beberapa definisi mengenai makna dari kata birokrasi, diantaranya :

1. Menurut Tjokroamidjoyo *birokrasi* adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
2. Menurut Max Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (*superordinat*) mempraktekkan kontrol atas bawahan (*subordinat*). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.”Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.

Menurut teori liberal bahwa birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian, maka birokrasi pemerintah itu bukan hanya didominasi oleh para birokrat saja, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik (Carino, 1994). Demikian pula sebaliknya bahwa di dalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pemimpin politik saja melainkan ada juga pimpinan birokrasi karier yang profesional.

Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit *bureaumania* seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat

status quo mengkooptasi (kerja sama) masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung kemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai aktor *public services* yang netral dan adil, dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi, sehingga terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara.

Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup di dalamnya penguatan masyarakat sipil (*civil society*), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Menurut Prof. Prijono, "Tujuan utama reformasi birokrasi yaitu menghasilkan pelayanan publik yang responsif, tidak memihak dan profesional yang bertujuan mengurangi rendahnya kepercayaan terhadap peran pemerintah dalam memenuhi dan melayani kepentingan masyarakat". Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. Reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembusukan politik, termasuk buruknya kinerja birokrasi.

Dikarenakan keadaan birokrasi Indonesia yang masih kacau balau pasca orde baru, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di setiap lembaga birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat dan warga negara perlu mengetahui apa itu reformasi birokrasi, selain itu juga agar masyarakat dapat mengetahui seberapa efektif reformasi birokrasi yang sudah berjalan di lembaga-lembaga birokrasi Indonesia sampai saat ini.

Reformasi birokrasi, adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).

Bercermin kepada masa orde baru yang sangat kacau balau maka kita harus melakukan beberapa perubahan terhadap tata kelola pemerintahan dan harus melakukan reformasi demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip good governance : professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara itu perlu melakukan beberapa tahap yaitu :

a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan;

Dalam hal ini Negara kita masih sangat lemah dan banyak kekurangan, banyak organisasi maupun lembaga-lembaga yang tugasnya melakukan pengawasan atau penyampai aspirasi dari masyarakat namun lembaga-lemba tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akhir-akhir ini kita sering melihat para Dewan yang terhormat yang mempunyai tugas mengemban amanat dari masyarakat malah banyak yang tersandung kasus korupsi, skandal dll. Itu menandakan bahwa organisasi yang bertugas untuk pengawasan dan perwakilan rakyat tidak bekerja secara professional, mereka hanya menebar janji-janji saat kampanye dan lupa saat sudah duduk di kursi Dewan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang baik harus lebih pintar dalam memilih pemimpin agar nasib Negara kita ini menjadi lebih baik.

b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan; Undang-undang merupakan landasan hukum yang digunakan di Negara kita ini. Banyak sudah UU dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun banyak juga dari peraturan-peraturan tersebut yang dilanggar. Malah ada juga yang mengatakan “Peraturan Dibuat Untuk Dilanggar”, ini jelas sangat keliru, maka dari itu lembaga peradilan berperan sangat penting dalam hal ini untuk membuat efek jera kepada orang-orang yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebaliknya, lembaga-lembaga peradilan malah menyalahgunakan wewenangnya untuk memenangkan orang yang membayarnya. Kita lihat saja hakim MK akil mochtar yang notabene hakim agung yang seharusnya menjadi ujung tombak keadilan di Indonesia ini malah terjerat dalam kasus suap. Hal ini

jelas sangat memalukan di mata publik maupun dunia, dengan adanya kasus seperti ini jelas kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia menjadi hilang.

- c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik;
Kita sering melihat di sekitar kita masalah KKN, siapa dia yang punya keluarga pejabat pasti dia bisa masuk dalam pemerintahan dengan mudah. Hal ini menandakan bahwa pemerintahan kita di isi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kualitas, untuk itu kita harus melakukan penataan sistem manajemen SDM dan aparatur pemerintahan agar orang-orang yang ada dalam pemerintahan mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
- d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif.
Ketika semua tatanan Negara sudah tertata rapi maka masyarakat Indonesia akan lebih mandiri dan akan lebih pintar dalam menilai kinerja pemerintahan, dan masyarakat pun akan berperan aktif dalam mengawal pemerintahan.

Pengertian Tata Pemerintahan yang Baik (*GOOD GOVERNANCE*)

Arti Good governance

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negaradan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga *good governance*, dengan demikian, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.”

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Membangun *Good Governance*

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar Negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat.

D. Kesimpulan

Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik). Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan birokrasi dan pelakunya (birokrat), antara lain seperti di bawah ini :

1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat).
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik alih-alih sebagai agen pembaharu (*agent of change*) pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (*rigid*) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif.

Dari pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Struktur

yang desentralistis diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (*capability*), memiliki loyalitas kepentingan (*competency*), dan memiliki keterkaitan kepentingan (*consistency* atau *coherency*).

E. PENUTUP

Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintah di pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan ini harus terus diupayakan. Oleh karena adanya tuntutan yang mendesak dan harus dilakukan untuk mendorong proses percepatan reformasi birokrasi, upaya-upaya khusus di bidang kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan redefinisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan *standard operating procedure* atau SOP.
2. Melakukan penerapan audit institusi.
3. Di bidang ketatalaksanaan perlu dipertimbangkan sistem rekrutmen dan promosi pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya dan dapat diberhentikan jika bekerja secara buruk sebagaimana yang berlaku di lingkungan swasta.

Selanjutnya, usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memerhatikan tiga hal pokok di bawah ini :

1. Peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah.
2. Peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah.
3. Peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dapat terwujud apabila semua lapisan masyarakat turut berperan serta dalam upaya pemberharuan diberbagai bidang khususnya dalam bidang pelayanan (birokrasi) pemerintah, karena birokrasi pemerintah merupakan proses interaksi / hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta langkah awal dalam mencapai kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang.

Dan yang terakhir, untuk mendorong perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat pula diupayakan kepada peningkatan pengawasan terhadap aparaturnegara. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit internal maupun audit eksternal.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Bacaan :

Toha, Miftah. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

CONTOH MAKALAH REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.doc

B. Referensi Lain :

www.google.com

www.wikipedia/reformasi-birokrasi.com

<http://yosefkoton.blogspot.com/2006/08/birokrasi-oleh-yosef-p.html>

<http://setabasri01.blogspot.com/2009/05/pengantar.html>

<http://www.find-docs.com/reformasi-birokrasi-pemerintahan-indonesia.html>

<http://www.find-docs.com/tata-pemerintahan-indonesia.html>

**ANALISIS ALIRAN PERDAGANGAN PARIWISATA
INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PARIWISATA INDONESIA**

**Analysis of International Tourism Trade Flows and
The Impact to Indonesian Tourism**

Faurani Santi¹

¹Mahasiswa S3 Program Doktor Mayor Ekonomi Pertanian-IPB
Dosen Ekonomi dan Manajemen Universitas Pelita Harapan, Karawaci,
Tangerang

Email : fsingagerda@gmail.com

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2012 kontribusi pariwisata nasional terhadap PDB adalah 13,9 persen. Adapun sebagai suatu kegiatan ekonomi, pariwisata Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi di dalam negeri maupun internasional yang dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata (*supply-demand side*), oleh karena itu studi ini dilakukan analisis mengenai faktor-faktor penentu aliran perdagangan barang/jasa pariwisata Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan pariwisata Indonesia (sisi permintaan dan penawaran).

Adapun hasil estimasi dengan menggunakan model Gravity menunjukkan bahwa GDP per kapita negara wisatawan, harga pariwisata Indonesia, harga pariwisata negara lain, nilai tukar, investasi (fisik) pariwisata Indonesia, nilai perdagangan (*inflow/outflow*) barang jasa pariwisata Indonesia periode sebelumnya, dan faktor non-ekonomi seperti populasi negara wisatawan dan keamanan di Indonesia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai perdagangan (*inflow/outflow*) barang/jasa pariwisata Indonesia. Sedangkan pada metode *Panel Least Square* akan dianalisa dampak aliran investasi, perdagangan barang/jasa pariwisata terhadap permintaan dan penawaran pariwisata Indonesia, dan hasil yang diperoleh sebagai berikut: (1) kunjungan wisatawan, konsumsi wisatawan per kunjungan sangat berdampak terhadap permintaan pariwisata Indonesia dimana pendapatan per kapita negara asal wisatawan, *outflow/inflow* barang/jasa pariwisata, harga riil pariwisata Indonesia, nilai tukar riil, biaya transportasi, krisis ekonomi, *travel warning* Indonesia dan negara pesaing adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kunjungan wisatawan, dan konsumsi wisatawan tersebut, (2) total penyediaan barang/jasa pariwisata, total belanja pemerintah dan total penawaran investasi pariwisata sangat berdampak terhadap penawaran pariwisata Indonesia dimana hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti pendapatan nasional, *inflow/outflow* barang/jasa pariwisata, nilai tukar riil, harga riil pariwisata Indonesia, penyediaan investasi dari sektor pertanian yang digunakan dalam pariwisata, belanja pemerintah, krisis ekonomi, maupun faktor keamanan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penawaran pariwisata Indonesia, dan (3) meningkatnya daya saing pariwisata tidak diikuti dengan

peningkatan nilai ekspor (*outflow*) barang/jasa pariwisata Indonesia akibat masih tingginya tingkat kebocoran ekonomi dalam transaksi perdagangan barang/jasa pariwisata Indonesia.

Kata kunci : *inflow, outflow, permintaan dan penawaran pariwisata, faktor penentu, dan dampak*

Abstract

Tourism is one of the most significant contributors to the Indonesia economy of growth and trade, with share of national tourism to GDP is 13.9 percent (BPS RI, 2012), through foreign exchange earnings as revenue from tourist consumption. As an economic activity, tourism in Indonesia influenced by various factors economic and non - economic domestically and internationally that can influence the development of tourism (supply - demand side), therefore, this study conducted an analysis of the determinants of flow trade in goods / services the Indonesian tourism and its impact on the development of Indonesian tourism (demand and supply).

Using the Gravity model, the estimation results indicated that some economic factors such as economic distance, GDP per capita tourist countries, the price of Indonesian tourism in tourists countries, tourism competitor prices, exchange rates, investments (physical) Indonesian tourism, and inflow/outflow of tourism goods and services in previous period, and non- economic factors e.g. population, and travel warning affected the outflow and inflow of Indonesian tourism goods and services. While the Panel Least Square method will analyze the impact of international trade flows to the tourism demand and supply in Indonesia, and the results obtained as follows: (1) amount of visits by foreign tourists, and foreign tourists consumption per visit are the most impact to demand side of tourism in Indonesia, where per capita income of tourists country, price of Indonesian tourism, value of the inflow/outflow of goods/services, transportation cost of the Indonesian tourism are factors that affect the amount of tourist arrivals, and tourist consumption as components of tourism Indonesian tourism demand, (2) total of goods/services of the Indonesian tourism affect the supply side of Indonesian tourism. The estimation showed that total government spending, and total investment supply in Indonesian tourism has obtained least influenced to the supply of Indonesia tourism, and (3) the increasing of tourism competitiveness is not followed by an increasing value of exports (outflow) of goods/services the Indonesian tourism due to the high level of economic leakage in commercial transactions of goods / services of Indonesian tourism.

Keywords: inflow, outflow, demand-supply sides of tourism, determinant factors, and impact

JEL Classification: F04, H08, L84

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012 *share* pariwisata nasional sebesar 13,9 persen terhadap total Produk Domestik Bruto dan tentu saja dengan besarnya kontribusi sektor tersebut berguna bagi pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penerimaan devisa yang diterima dari besarnya konsumsi yang dikeluarkan oleh para wisatawan dan transaksi perdagangan barang dan jasa nasional.

Dalam perkembangannya, kegiatan pariwisata juga ikut mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui proses pembentukan permintaan baik konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa (karena selama berwisata wisatawan akan melakukan belanjanya), sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*tourism final demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *final demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*investment derived demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan tersebut maka kegiatan penyediaan barang/jasa merupakan aktivitas yang perlu dilakukan (*supply side*).

Sebagaimana diketahui bahwa pariwisata tidak hanya mencakup kegiatan didalam negeri/domestik saja akan tetapi juga mencakup kegiatan pariwisata internasional yang melibatkan dua atau lebih negara. Ini berarti dalam kegiatan pariwisata memunculkan adanya perpindahan barang/jasa, modal dan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, yang pada akhirnya menimbulkan aliran barang/jasa, investasi modal, maupun dan tenaga kerja, dengan kata lain pariwisata merupakan bagian dari suatu kegiatan ekonomi dalam perekonomian terbuka yang menciptakan interaksi antara permintaan terhadap layanan dan produk wisata dengan penyediaan layanan dan produk wisata (penawaran pariwisata) antara penduduk yang berbeda secara geografis, ekonomi, budaya, maupun social.

Adapun perkembangan kunjungan wisatawan, konsumsi dan perdagangan Pariwisata Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kontribusi dan Perkembangan Investasi dan Perdagangan Pariwisata Indonesia

Variabel	2011	2012	Perubahan (persen)
GDP (persen)	13.8	13.9	10
Devisa yang diperoleh (triliun rupiah)	7.43	8.6	13.6
Kunjungan wisatawan (juta orang)	7,25	7,67	5.47
Konsumsi Wisatawan:			
Inbound	7618	8994	18.1
Wisnus	160.89	172.85	7.43

Perdagangan (miliar USD):			
Ekspor (<i>outflow</i>)	134.54	127.17	-5.81
Impor (<i>inflow</i>)	7.953	8.324	4.66

Sumber: BPS RI, Kemenpraf, dan Kementrian Perdagangan , 2013

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan selama periode tahun 2011-2012 sebesar 10 persen yang diikuti dengan peningkatan konsumsi barang/jasa pariwisata Indonesia sebesar 18.1 persen untuk kegiatan *inbound* pariwisata dan 7.43 persen untuk kegiatan konsumsi wisnus yang dikategorikan sebagai aktivitas pariwisata yang menimbulkan permintaan terhadap barang/jasa pariwisata. Sedangkan perkembangan perkembangan ekspor di sektor pariwisata adalah selama tahun 2011-2012 pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode tersebut nilai ekspor dari sektor pariwisata mengalami penurunan sebesar 5.81 persen, sebaliknya untuk impor justru mengalami peningkatan sebesar 4 .66 persen.

Beberapa faktor yang terlibat didalam kegiatan transaksi barang/jasa pariwisata seperti mata uang (sebagai alat pembayaran/pertukaran), penduduk, *income*/pendapatan masyarakat (sebagai indikator kemampuan berkonsumsi), selera, harga, jarak wilayah/negara asal ke wilayah/negara tujuan tempat berwisata, biaya-biaya (ongkos), barang-barang lain (baik barang komplemen maupun barang substitusi), maupun faktor-faktor lain yang sifatnya tidak tetap seperti kondisi alam, keamanan, politik, dan lain-lain, hal ini menunjukkan bahwa faktor/unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan transaksi pariwisata tersebut perlu menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun pelaku pariwisata (wisatawan, atau penyedia wisata). Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata; maka peranan penyediaan barang/jasa pariwisata harus terus ditingkatkan salah satunya adalah dengan berbagai kebijakan yang mendukung adanya peningkatan daya saing produk pariwisata.

Adapun daya saing produk pariwisata yang dimiliki oleh suatu negara merupakan salah satu indikator meningkatnya kinerja di sektor ini dan berdasarkan data World Economic Forum 2011, produk sektor pariwisata di Indonesia menempati peringkat 29 dari 139 negara, ini berarti daya saing produk pariwisata Indonesia cukup mampu bersaing di pasar internasional. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan besarnya barang/jasa yang masuk (*inflow*) ke Indonesia, nilai ekspor (*outflow*) barang/jasa pariwisata masih relatif lebih kecil, sehingga tidak dapat dipungkiri apabila

selama periode 2011-2012 nilai perdagangan pariwisata Indonesia mengalami defisit sebesar 1.2 persen. Kondisi itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku kebijakan dalam meningkatkan kinerja perdagangan di sektor pariwisata Indonesia, dengan kata lain upaya meningkatkan kinerja perdagangan pariwisata Indonesia ke depan perlu didukung oleh kebijakan pemerintah (makro maupun mikro) yang memadai sehingga mampu meningkatkan kinerja pariwisata secara keseluruhan.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diajukan:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aliran perdagangan barang/jasa pariwisata internasional di Indonesia
2. Bagaimanakah dampak aliran barang/jasa pariwisata internasional terhadap sisi permintaan dan penawaran pariwisata di Indonesia.
3. Bagaimanakah dampak perkembangan pariwisata internasional terhadap perdagangan barang/jasa dan daya saing produk pariwisata Indonesia?

Teori Permintaan dan Penawaran

Konsep permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta (Qd) dengan harga (P) berbagai tingkat harga. Hukum permintaan (*law of demand*) menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain tetap (*ceteris paribus*) apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat.

Penawaran akan suatu komoditas barang dan jasa di berbagai tingkat harga ditentukan oleh banyak faktor antara lain: harga komoditas itu sendiri dan harga komoditas lain, biaya produksi, tujuan produsen, teknologi, musim, dan lain-lain. Pada umumnya semakin tinggi harga suatu komoditas, makin banyak jumlah komoditas tersebut yang akan ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya makin rendah harga suatu komoditas makin sedikit jumlah yang ditawarkan oleh para penjual.

Permintaan Pariwisata

Pendekatan ekonomi dalam permintaan suatu barang/jasa memungkinkan adanya interaksi antara harga dan jumlah barang/jasa yang akan dikonsumsi serta variabel-variabel lainnya. Adapun munculnya permintaan terhadap kegiatan wisata antara disebabkan oleh 2 hal yaitu : *Effective/Actual demand*, merupakan permintaan yang berasal dari sejumlah wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata, dan *Supressed demand*, yaitu permintaan yang jumlahnya berasal dari struktur jumlah

penduduk/populasi suatu negara terdiri dari: a) *potential demand* yang merupakan potensi permintaan pariwisata dari suatu negara dimana perubahan dari permintaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dimasa yang akan datang seperti perubahan nilai tukar, b) *deferred demand*, merupakan permintaan besarnya dipengaruhi oleh adanya kondisi penawaran di daerah tujuan wisata seperti layanan/fasilitas wisata, c) tidak adanya permintaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan pariwisata menurut Tribe (2005) dan Bull (1995) adalah: 1) elastisitas permintaan pariwisata, 2) Pendapatan, 3) harga barang itu sendiri dan barang lain (substitusi), 4) keamanan, 5) kenyamanan dan ketersediaan fasilitas dan layanan wisata, 6) kemudahan, seperti: Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) BVKS, pemberlakuan Visa on Arrival (VoA), frekuensi Penerbangan Internasional yang Singgah di Indonesia, dan 7) kondisi ekonomi internasional, seperti: krisis ekonomi, nilai tukar, populasi dunia, pendapatan per kapita masyarakat negara lain, pajak/subsidi, dan lain-lain.

Penawaran Pariwisata

Penawaran pariwisata juga mencakup semua bentuk daya tarik wisata (*tourist attractions*), semua bentuk kemudahan untuk memperlancar perjalanan (*accessibilities*) dan semua bentuk fasilitas dan pelayanan (*facilities and services*) yang tersedia pada suatu daerah tujuan wisata sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berkunjung. Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya penawaran pariwisata suatu negara antara lain: 1. Elastisitas harga penawaran pariwisata, 2. Biaya-biaya, 3. Perubahan teknologi yang digunakan, 4. Infrastruktur dan fasilitas pendukung baik dari sektor pariwisata maupun sektor lain (non-pariwisata), 5. lain-lain; seperti: ketersediaan barang/jasa pariwisata yang akan dikonsumsi, infrastuktur (investasi fisik), bahkan kemudahan-kemudahan masuk dan keluarnya barang/jasa kebutuhan pariwisata.

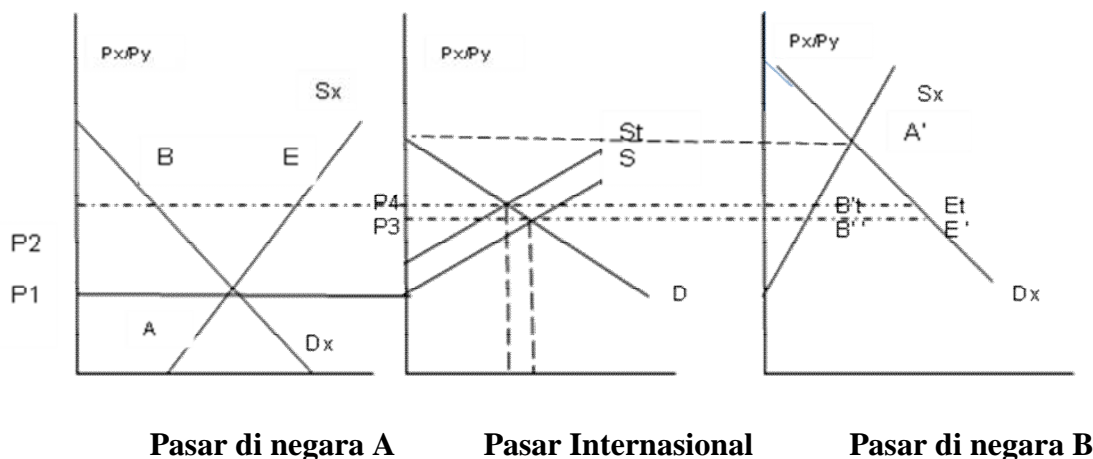
Aliran Barang/Jasa Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan bentuk dari perekonomian terbuka yang mana terdapat terdapat dua tingkat harga umum yaitu harga umum yang berlaku didalam negeri dan tingkat harga yang berlaku diluar negeri. Pengaruh dari adanya harga luar negeri ini terhadap proses ekonomi makro khususnya terletak pada timbulnya kemungkinan bagi

pelaku-pelaku ekonomi untuk memilih apakah mereka akan membeli atau menjual dipasar luar negeri atau pasar dalam negeri.

Sebagaimana bentuk perekonomian terbuka lainnya, komoditas barang/jasa pariwisata merupakan jenis kegiatan yang melihat adanya hubungan pertukaran komoditas antar negara. Bahkan teori Heckser-Ohlin menyatakan bahwa terjadinya transaksi pertukaran antar negara dikarenakan adanya perbedaan kepemilikan faktor-faktor produksi dalam tiap negara. Mengenai perdagangan internasional dirumuskan berdasar konsep keunggulan komparatif yang bersumber dari perbedaan dalam kepemilikan faktor produksi. Dalam teori ini bahwa negara dicirikan oleh bawaan faktor yang berbeda sedang fungsi produksi disemua negara sama. Dengan menggunakan asumsi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan fungsi produksi yang sama dan bawaan faktor yang berbeda antar negara. Ini berarti suatu negara cenderung untuk mengekspor komoditas yang relatif intensif dalam menggunakan fungsi yang relatif banyak dimiliki, dan dalam waktu yang bersamaan.

Adanya unsur keterbatasan atau perbedaan ketersediaan sumber daya yang dimiliki setiap negara, merupakan faktor utama dari munculnya spesialisasi. prinsip ini merupakan dasar berkembangnya ekonomi perdagangan dan keuangan internasional. Kondisi tersebut menggiring setiap negara melakukan ekspor dan impor. Ekspor pariwisata adalah suatu kegiatan ekonomi menjual produk dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor pariwisata adalah suatu kegiatan membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Ekspor dan impor sangat penting untuk membentuk dan mengendalikan neraca perdagangan disuatu negara. Impor harus dibiayai dengan nilai yang sama dari ekspor untuk mempertahankan ekuilibrium neraca perdagangan. Oleh karena itu negara harus melakukan ekspor untuk membiayai impor yang dibayarkan dengan mata uang asing (Hady, 2004).



untuk komoditi	internasional pada	untuk komoditi
pariwisata X	komoditi pariwisata X	pariwisata X
	dengan biaya produksi	

Gambar 1. Kurva aliran barang/jasa pariwisata

Sumber: Salvatore, 1996 dan Oktaviani , 2009

Ekonomi terbuka mengisyaratkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang yang diproduksi didalam negeri dan diluar negeri. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pendapatan yang masuk kesektor perusahaan. Dengan demikian permintaan agregat akan meningkat dengan adanya kegiatan ekspor dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri dan akan menimbulkan aliran pembayaran keluar negeri. Aliran keluar negeri akan menurunkan pendapatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada besarnya ekspor dikurangi impor. Fungsi impor sangat dipengaruhi oleh oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi pula impor. Besarnya impor suatu negara selain dipengaruhi pendapatan nasional, juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Harga pariwisata

Harga pariwisata merupakan harga yang terbentuk dalam kegiatan/aktivitas pariwisata, dimana dengan adanya interaksi antara permintaan dan penawaran wisata akan membentuk harga keseimbangan pariwisata (Bull, 1995). Terbentuknya harga keseimbangan dalam pasar pariwisata dilatabelakangi oleh adanya perbedaan geografi dan persepsi dari produk wisata yang diminta dan yang tersedia antar wilayah (tujuan wisata dan asal wisatawan).

Adapun metode penentuan harga pariwisata di Indonesia diambil berdasarkan data yang diperoleh dari Passenger Exit Survey (PES) yang dilakukan oleh Kemenpraf setiap dua tahun, data Survey *inbound/outbound* tourism yang dilakukan secara berkala setiap bulan, data harian keimigrasian (E/D card). Adapun survey mengenai tujuan, lama tinggal, dan rata-rata pengeluaran wisatawan selama berkunjung yang dicatat dalam PES merupakan suatu data rujukan dan menjadi standar bagi penentuan harga pariwisata di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Secara umum, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan panel Gravity dan *Panel Least Square (PLS)*. Model panel Gravity dipakai dalam melihat bagaimana aliran barang /jasa pariwisata Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi aliran-aliran tersebut. Sedangkan metode PLS akan digunakan untuk melihat dampak aliran perdagangan barang/jasa pariwisata Indonesia terhadap sisi permintaan dan penawaran pariwisata internasional di Indonesia. Adapun model aliran Perdagangan Barang/Jasa Pariwisata Indonesia adalah:

1. Model aliran keluar barang/jasa (outflow) pariwisata Indonesia

$$L_n OF_{jt} = \beta_0 + \beta_1 LnDIST_{jt} + \beta_2 LnGDPC_{jt} + \beta_3 LnPOP_{jt} + \beta_4 LnEXCH_{jt} + \beta_5 LnPrice_{jt} + \beta_6 LnPrts + \beta_7 LnOF_{jt-1} + \beta_8 D1_t + \varepsilon_{ij}$$

2. Model Aliran Masuk (*inflow*) Barang/jasa pariwisata Indonesia

$$L_n IF_{jt} = \beta_0 + \beta_1 LnDIST_{jt} + \beta_2 LnGDPC_{jt} + \beta_3 LnEXCH_{jt} + \beta_5 LnPrice_{jt} + \beta_6 LnIF_{jt-1} + \beta_7 LnFDI_{jt} + \beta_8 D:$$

Keterangan:

- GDP = GDP per kapita Indonesia pada tahun ke-t (Juta USD/populasi)
- GDP_j = GDP per kapita negara asal wisman pada tahun ke-t (juta USD/populasi)
- POP_j = Jumlah penduduk (populasi) negara asal wisman (Juta)
- F = Harga pariwisata Indonesia di negara wisman (USD)
- P = Harga pariwisata negara pesaing di negara asal wisatawan (USD/unit)
- $EXCH$ = Nilai tukar (rupiah/mata uang negara wisatawan)
- $DIST$ = Jarak ekonomi antara negara Indonesia dan negara wisatawan (Km/GDPjt)
- OF = *Outflow* barang/jasa pariwisata dari Indonesia ke negara j (USD)
- OF_{jt-1} = *Lag outflow* (juta USD)
- IF = *Inflow* barang/jasa pariwisata dari negara asal wisman (USD)
- IF_{jt-1} = *Lag inflow* (juta USD)
- D = *Travel warning* Indonesia

Sedangkan untuk menganalisis dampak aliran perdagangan barang/jasa pariwisata internasional terhadap pariwisata Indonesia (*supply-demand side*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Permintaan Pariwisata Indonesia

1. Kunjungan Wisatawan

$$TA_{it} = aa_0 + aa_1YC_{jt} + aa_2OF_{jt} \\ + aa_3IF_{jt} + aa_4P_{jt} + aa_5ER_{jt} + aa_6D1TRC_{it} + aa_7D1_{it} + aa_8D2_{it} \\ + \mu_{1t}$$

2. Konsumsi Wisatawan

$$TE_{it} = ba_0 + ba_1YC_{jt} + ba_2OF_{jt} + ba_3IF_{jt} + ba_4P_{jt} + ba_5ER_{jt} + ba_6D1_{it} \\ + ba_7D2_{it} + ba_8D3_{kt} + \mu_{2t}$$

Sehingga:

$$TD_{it} = da_0 + da_1TA_{it} + da_2TE_{it} + da_3P_{it} + da_4YC_{jt} + \mu_{3t}$$

II. Penawaran Pariwisata Indonesia

1. Total barang/jasa pariwisata yang tersedia untuk dikonsumsi

$$T_{INA} = eb_0 + eb_1Y_{INA_t} + eb_2OF_{jt} + eb_3IF_{jt} \\ + eb_4ER_{jt} + eb_5P_{it} + eb_6GT_{INA_t} + eb_7D1_{it} + eb_8D2_{it} + eb_9D3_{kt} \\ + \mu_{10t}$$

2. Pengeluaran Pemerintah untuk pariwisata:

$$GT_{INA} = fb_0 + fb_1Y_{INA_t} + fb_2ER_{jt} \\ + fb_3P_{it} + fb_4IF_{jt} + fb_5OF_{jt} + fb_6D1_{it} + fb_7D2_{it} + fb_8D3_{kt} \\ + \mu_{12t}$$

3. Investasi dan Pembentukan Barang Modal Pariwisata:

$$IT_{INA} = gb_0 + gb_1Y_{INA_t} + gb_2ER_{jt} \\ + gb_3P_{it} + gb_4OF_{jt} + gb_5IF_{jt} + gb_6CT_{INA_t} + gb_7GT_{INA_t} \\ + gb_8D1_{it} + gb_9D2_{it} + gb_{10}D3_{kt} + \mu_{13t}$$

Sehingga:

$$TS_{it} = hb_0 + hb_1CT_{INA_t} + hb_2GT_{INA_t} + hb_3IT_{INA_t} + hb_4Y_{INA_t} + \mu_{14t}$$

Keterangan:

= Total Permintaan Pariwisata Indonesia tahun ke t

	=	Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tahun ke-t
	=	Jumlah konsumsi wisman di Indonesia tahun ke-t
	=	Aliran barang/jasa keluar dari Indonesia ke negara asal wisman tahun ke-t
	=	Aliran barang/jasa yang masuk dari negara asal wisman ke Indonesia tahun ke-t
	=	Total Penawaran Pariwisata Indonesia
C	=	Penyediaan barang/jasa pariwisata Indonesia tahun ke-t
FD	=	Investasi yang tersedia pada pariwisata Indonesia tahun ke-t
G	=	Belanja pemerintah Indonesia di sector pariwisata Indonesia tahun ke-t
	=	Pendapatan per kapita negara asal wisman tahun ke-t
	=	Harga pariwisata Indonesia di negara asal wisman tahun ke-t
	=	Nilai tukar rupiah terhadap USD
	=	Biaya transportasi di Indonesia tahun ke-t
	=	Suku bunga di Indonesia tahun ke-t
	=	<i>Dummy</i> krisis ekonomi Indonesia tahun ke-t
	=	<i>Dummy travel warning</i> Indonesia tahun ke-t
	=	<i>Dummy travel warning</i> negara pesaing tahun ke-t

Analisis Inflow-Outflow Barang/Jasa Pariwisata Indonesia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam model aliran keluar (*outflow*) barang dan jasa pariwisata Indonesia (tabel 2) variabel jarak ekonomi, GDP perkapita negara wisman, harga pariwisata Indonesia di negara asal wisman, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing asal wisman, populasi negara asal wisman, *outflow* pariwisata tahun sebelumnya, dan *travel warning* di Indonesia merupakan variabel yang berpengaruh dominan dengan besarnya pengaruh 83.2 persen.

Hubungan negatif antara GDP per kapita negara asal wisman terhadap *outflow* barang/jasa pariwisata Indonesia menunjukkan dengan adanya kenaikan GDP per kapita

negara asal wisman justru menurunkan *outflow* barang/jasa pariwisata Indonesia. Secara empiris dapat dijelaskan bahwa seharusnya dengan kenaikan GDP per kapita negara asal wisman justru akan menaikkan *outflow* barang/jasa. Salah satu faktor penyebab dari kondisi ini adalah adanya kecenderungan terjadinya *leakage*/ kebocoran ekspor yang umumnya banyak terjadi di transaksi perdagangan internasional (khususnya di sektor pariwisata) di negara-negara berkembang. Adapun penyebabnya adalah penggunaan barang/jasa yang terstandarisasi secara internasional yang memicu besarnya impor/pengadaan barang/jasa pariwisata. Pada kebanyakan fasilitas fisik dan prasarana pariwisata di negara-negara berkembang adalah berupa jenis investasi dengan system waralaba/*franchise* yang merupakan jaringan investasi/penanaman modal dari luar negeri, yang mana konsekwensi pada model waralaba ini adalah penggunaan barang/jasa yang terstandarisasi secara internasional.

Hasil estimasi tabel 2 menunjukkan hubungan antara *outflow* barang dan jasa pariwisata Indonesia dengan harga pariwisata Indonesia di negara-negara asal wisman berhubungan positif, yang berarti bahwa jika harga pariwisata Indonesia di negara-negara asal wisman naik sebesar 1 persen maka besarnya nilai *outflow* pariwisata akan naik sebesar koefisien peubahnya. Sebaliknya dengan harga pariwisata negara pesaing, yang mana dari hasil estimasi diperoleh adanya hubungan negatif antara harga pariwisata negara pesaing terhadap *outflow* barang/jasa pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia masih merupakan substitusi dari pariwisata negara lain, sehingga harga yang terbentuk pun berupa harga substitusi. Dengan kata lain apabila harga negara pesaing terdekat meningkat, maka wisatawan cenderung akan memilih produk pariwisata Indonesia. Sebaliknya pada saat harga pariwisata Indonesia meningkat maka wisatawan akan cenderung memilih barang/jasa dari negara lain.

Sedangkan hubungan antara nilai tukar rupiah terhadap besarnya *outflow* pariwisata adalah bersifat negatif artinya jika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 1 persen akan meningkatkan besarnya nilai *outflow* pariwisata sebesar koefisien perubahannya. Jatuhnya mata uang domestik terhadap mata uang asing menyebabkan barang-barang yang berasal dari luar negeri (impor) akan lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang di dalam negeri, dan ini juga yang mendorong terjadinya peningkatan pada *outflow* barang dan jasa.

Adapun besarnya populasi terhadap *outflow* barang/jasa menunjukkan bahwa semakin besarnya populasi suatu negara merupakan potensi market/pasar bagi suatu barang dan jasa, bahkan menurut Alguacil (2002) populasi yang besar merupakan suatu potensi

bagi suatu negara dalam melakukan penetrasi pasar ke luar negeri. Ini berarti besarnya potensi pasar/market yang dimiliki oleh suatu negara menjadi latar belakang bagi suatu perusahaan negara lain untuk masuk ke tersebut. Sedangkan hubungan antara *outflow* dengan *travel warning* pariwisata Indonesia dari hasil estimasi, dinyatakan sebagai hubungan yang positif menunjukkan bahwa adanya *travel warning* tidak mempengaruhi besarnya *inflow/outflow* pariwisata.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel jarak ekonomi antara Indonesia dengan negara asal wisman menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap nilai *outflow* barang dan jasa pariwisata ini berarti dengan semakin bertambahnya jarak ekonomi (aksesabilitas dan mobilitas barang/jasa yang keluar) antara Indonesia ke negara asal wisman menaikkan besarnya nilai *outflow* barang/jasa pariwisata Indonesia. Sedangkan model *inflow* pariwisata Indonesia, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa variabel jarak, GDP per-kapita negara wisman, investasi fisik yang tersedia, dan *inflow* barang dan jasa pariwisata Indonesia pada tahun sebelumnya merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap aliran masuk barang/jasa pariwisata Indonesia dengan besarnya pengaruh 70 persen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar merupakan suatu faktor yang patut diperhitungkan karena nilai tukar akan berdampak terhadap besarnya nilai barang dan jasa pariwisata yang masuk ke Indonesia dimana saat mata uang domestic mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, maka harga-harga barang dari luar negeri (impor) menjadi lebih mahal dibanding dengan barang dalam negeri. Adapun kondisi tersebut dinyatakan dengan hasil estimasi yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara nilai tukar dan *inflow* barang/jasa pariwisata Indonesia.

Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 hasil estimasi aliran perdagangan barang/jasa pariwisata internasional sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Estimasi Gravity Model Aliran Keluar-Masuk (*Outflow-Inflow*) Barang/Jasa Pariwisata Indonesia

Model	Variabel	Koefisien	t-stat	Prob.	Adj. R-square
Aliran Keluar (outflow) barang/jasa pariwisata Indonesia	Jarak ekonomi	-0.517714***	-3.8923	0.0002	0.832
	GDP perkapita negara wisatawan	-4.94085***	-3.0094	0.0032	
	Populasi negara wisatawan	1.088042**	0.8976	0.3711	
	Nilai tukar	-1.861213***	-4.1692	0.0001	
	Harga pariwisata Indonesia	-0.456932***	-3.1997	0.0017	
	Harga pariwisata negara pesaing	1.35468***	2.7765	0.0063	
	<i>Outflow</i> periode sebelumnya	0.078847***	3.0279	0.0030	
	<i>Travel warning</i> Indonesia	-0.036554	-0.4023	0.6881	
Aliran Masuk (inflow) barang/jasa pariwisata Indonesia	Jarak ekonomi	-0.136168***	-4.2675	0.0000	0.7
	GDP per kapita negara wisatawan	0.425335***	10.3699	0.0000	
	Harga pariwisata Indonesia	0.698331***	17.0012	0.0000	
	<i>Harga pariwisata negara</i>	-0.0833***	5.3615	0.0000	
	<i>Inflow</i> periode sebelumnya	0.298913***	19.0436	0.0000	
	Investasi (fisik) pariwisata	-0.0083*	-0.5472	0.0852	
	<i>Travel warning*</i>	0.127017*	1.5879	0.1147	

Sumber: data diolah (2014)

Analisis Permintaan dan Penawaran Pariwisata Indonesia

Analisis Permintaan Pariwisata

1. Hasil estimasi persamaan jumlah kunjungan wisatawan (TAit) pada tabel 3 dampak aliran permintaan barang/jasa pariwisata Indonesia yang dibawa wisatawan ke luar (*outflow*) dan aliran masuk barang/jasa pariwisata (*inflow*) terhadap besarnya kunjungan wisman diperoleh berdasarkan hasil estimasi adalah positif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan besarnya *outflow/inflow* barang/jasa pariwisata dari Indonesia ke luar negeri sebesar 1 persen akan menaikkan jumlah kunjungan wisman yang masuk ke Indonesia sebesar koefisien perubahannya. Besarnya aliran permintaan barang/jasa pariwisata yang masuk/keluar tentu saja berdampak pada besarnya jumlah kunjungan wisman, karena dalam kegiatan pariwisata baik barang maupun jasa merupakan komoditas yang dikonsumsi dan diperlukan oleh wisman selama melakukan aktivitas wisata seperti makanan, akomodasi, transportasi, *souvenir*, maupun barang-barang lain yang dibawa masuk (*impor*) maupun keluar (*ekspor*).

Hasil estimasi menunjukkan hubungan yang negatif antara variabel nilai tukar dan harga pariwisata Indonesia terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing (depresiasi mata uang domestik) akan berdampak terhadap pariwisata melalui transmisi harga. Dimana, pada saat mata uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, maka harga-harga barang di dalam

negeri cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga-harga barang luar negeri termasuk harga pariwisata selanjutnya memicu besarnya permintaan akan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, karena dirasakan harga pariwisata Indonesia jauh lebih murah dibandingkan harga pariwisata negara lain. Begitu juga dengan adanya kenaikan harga pariwisata Indonesia di negara-negara asal wisman terhadap besarnya kunjungan wisman akan mempengaruhi daya saing pariwisata Indonesia, jika daya saing (harga) menurun maka harga pariwisata Indonesia dianggap mahal dibanding negara lain.

Secara keseluruhan hasil estimasi menunjukkan dampak ke-delapan faktor tersebut terhadap jumlah kunjungan wisman (TAit) adalah sebesar 99 persen. Hasil estimasi tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dengan besarnya pengaruh terhadap besarnya kunjungan wisman dan sisanya yaitu sebesar 1 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar pengamatan. Selain itu juga, hasil estimasi juga dapat diidentifikasi bahwa faktor, *outflow* barang/jasa pariwisata, *inflow* barang/jasa pariwisata, harga pariwisata, nilai tukar, GDP per kapita, krisis ekonomi, biaya transportasi, *travel warning* merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi besarnya jumlah kunjungan wisman internasional ke Indonesia, sebaliknya besarnya penyediaan investasi pariwisata Indonesia, dan nilai tukar merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap besarnya kunjungan wisman.

2. Hasil estimasi persamaan konsumsi wisman per kunjungan (TEit) menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkan dari faktor harga pariwisata, nilai tukar domestik terhadap nilai tukar asing, *outflow* barang/jasa pariwisata, krisis ekonomi, dan *travel warning* Indonesia. Secara empiris tabel 3 menunjukkan bahwa hubungan antara harga pariwisata dan nilai tukar terhadap pengeluaran/konsumsi wisman per kunjungan adalah negatif. Ini berarti jika harga pariwisata Indonesia naik maka konsumsi wisman akan menurun. Hubungan negatif antara harga pariwisata dan nilai tukar terhadap konsumsi wisman menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan harga dan apresiasi nilai tukar menyebabkan harga pariwisata Indonesia cenderung mahal dan akan mempengaruhi besarnya konsumsi yang akan dikeluarkan oleh wisatawan.

Selain itu juga hasil estimasi pada tabel 3 didapat dampak negatif antara konsumsi wisman per kunjungan terhadap *outflow* barang/jasa pariwisata. Hubungan antara *outflow* barang/jasa pariwisata terhadap besarnya konsumsi wisman per kunjungan menunjukkan besarnya jumlah barang/jasa yang digunakan/dikonsumsi wisman selama di Indonesia baik itu yang berasal dan dibawa dari negaranya saat berkunjung ke Indonesia (*inflow*) maupun barang-barang lokal yang dibeli dan dibawa oleh wisman

ke negara asalnya (*outflow*). Ini berarti pada saat konsumsi meningkat (sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat), maka kebutuhan akan barang-barang baik yang diperoleh di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri (impor) cenderung meningkat, dan sebaliknya pada saat tingkat konsumsi masyarakat menurun kecenderungan untuk mengalokasikan pengeluarannya kepada barang/jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor juga menurun.

Secara keseluruhan dampak ke-delapan faktor tersebut (tabel 3) terhadap besarnya konsumsi wisman per kunjungan adalah sebesar 99 persen yang menunjukkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap besarnya konsumsi wisman per kunjungan, sedangkan sisanya yaitu sebesar 1 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar pengamatan. Selain itu juga hasil estimasi mengidentifikasi bahwa faktor GDP perkapita, *outflow* barang/jasa pariwisata, *inflow* barang/jasa pariwisata, harga pariwisata, nilai tukar, *travel warning* Indonesia, dan *travel warning* negara pesaing merupakan faktor-faktor yang menentukan besarnya jumlah kunjungan wisman internasional ke Indonesia.

3. Hasil estimasi tabel 3 menunjukkan bahwa faktor jumlah kunjungan wisman, konsumsi wisman per kunjungan, harga pariwisata Indonesia, dan pendapatan per kapita negara asal wisman merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi besarnya dominan terhadap total permintaan pariwisata Indonesia (TDit) dengan besarnya pengaruh 99 persen. Ini berarti faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan perkembangan permintaan pariwisata Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan negara (devisa masuk) dari sektor pariwisata. Adapun secara ringkas hasil estimasi penerimaan pariwisata dapat ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil estimasi permintaan pariwisata Indonesia

Model	Variabel	Koefisien	Pr > t	Adj. R
Jumlah Kunjungan Wisatawan inbound dan wisnus (TA)	GDP Perkapita negara asal wisatawan	0.00544**	0.0407	0.99872
	<i>Outflow</i> barang/jasa pariwisata	-0.0301**	0.0323	
	<i>Inflow</i> barang/jasa pariwisata	0.07205*	0.0880	
	Harga riil Pariwisata Indonesia	-0.2673**	0.0484	
	Nilai Tukar riil	-0.0063	0.9851	
	Biaya transportasi	-0.0117*	0.0923	
	Krisis Ekonomi	-0.0003*	0.0907	
	<i>Travel Warning</i> Indonesia	-0.0205**	0.0158	
Konsumsi wisatawan dan wisnus per kunjungan (TE)	GDP Perkapita negara asal wisatawan	0.1703*	0.0663	0.99141
	<i>Outflow</i> barang/jasa pariwisata	0.05243*	0.0574	
	<i>Inflow</i> barang/jasa pariwisata	0.24469***	0.0000	
	Harga riil pariwisata Indonesia	-0.626***	0.0000	
	Nilai Tukar riil	-0.5864*	0.1032	
	Krisis Ekonomi	-0.0479	0.2215	
	<i>Travel Warning</i> Indonesia	-0.063**	0.0323	
	<i>Travel warning</i> negara pesaing	0.08766*	0.0630	
Total Permintaan Pariwisata Indonesia (TD)	Kunjungan wisatawan	1.02922***	0.0000	0.99816
	Konsumsi wisatawan	0.05682***	0.0000	
	Pendapatan Per kapita negara asal wisatawan	0.00025**	0.0126	
	Harga Pariwisata Indonesia	0.00066*	0.1074	

Keterangan: (***) $\alpha \leq 0.01$, (**) $\alpha = 0.01-0.05$, (*) $\alpha = 0.05-0.15$

Sumber: data diolah (2014)

Analisis Penawaran Pariwisata.

1. Model persamaan aliran konsumsi barang/jasa pariwisata Indonesia (CT_INA), dimana secara keseluruhan diperoleh besarnya koefisien determinasi (Adj *r-square*) sebesar 99 persen yang menunjukkan dampak faktor-faktor endogen/penjelas seperti GDP Indonesia, *inflow* barang/jasa pariwisata Indonesia, *outflow* barang jasa pariwisata Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara asal wisman, harga Pariwisata Indonesia, belanja pemerintah sektor pariwisata, krisis ekonomi Indonesia, *travel warning* Indonesia, dan *travel warning* negara lain, terhadap total konsumsi barang/jasa pariwisata Indonesia (CT_INAt) dan sisanya yaitu sebesar 1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pengamatan.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi total konsumsi pariwisata Indonesia adalah faktor *outflow* barang/jasa pariwisata, nilai tukar rupiah terhadap USD, harga pariwisata Indonesia, krisis ekonomi, dan *travel warning* negara pesaing merupakan faktor-faktor yang cukup mempengaruhi total penyediaan barang/jasa pariwisata

Indonesia. Sedangkan pendapatan nasional, dan *inflow* barang/jasa pariwisata adalah faktor-faktor yang sangat menentukan besarnya penyediaan barang/jasa pariwisata Indonesia.

Dampak aliran masuk barang/jasa pariwisata (*inflow*) secara empiris dinyatakan sebagai dampak yang positif yang berarti jika terjadi kenaikan *inflow* sebesar 1 persen akan menaikkan tingkat konsumsi sebesar koefisien perubahannya dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional yang diperoleh dari sektor pariwisata. Bahkan menurut Thapa (2005) kondisi semacam ini merupakan sangat berpotensi terhadap kebocoran devisa (*leakage*), sedangkan menurut Sinclair dan Sutcliffe (1998) *multiplier income* di sektor pariwisata perlu mempertimbangkan tingkat kebocoran yang dihasilkan termasuk dalam hal ini penggunaan barang-barang impor (barang produksi/*intermediate goods* yang masuk maupun *final goods* yang dibawa oleh wisman).

Hubungan antara aliran keluar barang/jasa pariwisata (*outflow*) dengan total penyediaan barang/jasa pariwisata Indonesia adalah positif yang berarti jika terjadi kenaikan *inflow* sebesar 1 persen akan menaikkan *inflow* barang/jasa pariwisata sebesar koefisien perubahannya. *Outflow* barang/jasa pariwisata tentu saja akan mempengaruhi besarnya konsumsi karena dengan meningkatnya permintaan akan barang/jasa yang akan dikonsumsi dan dibawa keluar oleh wisman dan akan berdampak pada peningkatan konsumsi bahan baku dalam upaya memenuhi kebutuhan proses produksi industri pariwisata yang menghasilkan komoditas pariwisata (Thapa, 2005).

Hubungan antara nilai tukar terhadap total penyediaan barang/jasa pariwisata secara empiris dinyatakan sebagai hubungan yang berlawanan (negatif). Ini berarti pada saat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 1 persen akan meningkatkan besarnya total penyediaan barang/jasa pariwisata Indonesia sebesar koefisien perubahannya. Secara teoritis hubungan negatif antara nilai tukar dan total penyediaan barang/jasa pariwisata menunjukkan bahwa nilai tukar sebagai instrument pembayaran dalam transaksi barang/jasa di sektor pariwisata menentukan besar kecilnya barang/jasa yang akan dikonsumsi. Berdasarkan teori *Purchasing Power Parity*, nilai tukar akan menentukan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis komoditi termasuk komoditi barang/jasa impor (Hady, 2004). Hal ini dapat diartikan bahwa dengan menguatnya/melemahnya mata uang domestik (rupiah) akan berpengaruh terhadap terhadap total penyediaan barang/jasa pariwisata.

2. Pada model persamaan total belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia (GT_INAt) diperoleh secara keseluruhan dampak faktor-faktor seperti pendapatan (GDP), total aliran masuk dan keluar barang/jasa pariwisata Indonesia (*inflow dan outflow*), nilai tukar, harga pariwisata Indonesia, krisis ekonomi, *travel warning* Indonesia, dan *travel warning* negara pesaing terhadap total belanja pemerintah sektor pariwisata Indonesia adalah sebesar 70 persen, dan sisanya yaitu 30 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar pengamatan.

Faktor *outflow* barang/jasa pariwisata Indonesia, penyediaan investasi dari sektor pertanian untuk pariwisata Indonesia, dan krisis ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia, selain itu juga faktor pendapatan (GDP), nilai tukar, *outflow* barang/jasa pariwisata Indonesia, harga pariwisata Indonesia, dan krisis ekonomi Indonesia merupakan faktor-faktor yang cukup menentukan besarnya total belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia. Sedangkan faktor pendapatan nasional, harga pariwisata Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap USD merupakan faktor-faktor yang cukup menentukan besar/kecilnya nya belanja pemerintah di sektor pariwisata, sebaliknya *travel warning* Indonesia dan negara pesaing, dan *inflow* barang/jasa pariwisata Indonesia adalah faktor yang tidak menentukan besar kecilnya belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia.

Hasil estimasi pada tabel 4 menunjukkan hubungan antara *outflow/inflow* barang/jasa pariwisata Indonesia dengan total belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia yang menunjukkan hubungan yang negatif. Ini berarti apabila *outflow/inflow* barang/jasa pariwisata meningkat sebesar 1 persen akan menurunkan besarnya total belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia sebesar koefisien perubahannya.

3. Model persamaan yang ke-tiga dalam persamaan penawaran pariwisata Indonesia adalah model persamaan total investasi dan pembentukan modal di sektor pariwisata Indonesia (FDI_INAt), yang mana dalam model ini diperoleh besarnya koefisien determinasi (Adj. *r-square*) faktor-faktor penjelas terhadap total investasi dan pembentukan modal sektor pariwisata Indonesia sebesar 43 persen. Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi variabel pengeluaran investasi sektor pariwisata Indonesia tersebut adalah faktor GDP, nilai tukar, *outflow* barang/jasa pariwisata, harga pariwisata Indonesia, dan krisis ekonomi adalah faktor-faktor yang menentukan besarnya investasi yang disediakan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. Sedangkan faktor-faktor seperti total penyediaan investasi barang/jasa pariwisata, *inflow*

barang/jasa pariwisata Indonesia, total penyediaan barang/jasa pariwisata Indonesia, *travel warning* Indonesia dan negara pesaing merupakan faktor-faktor yang tidak menentukan besarnya total penyediaan investasi pariwisata Indonesia.

Dampak aliran barang/jasa pariwisata Indonesia baik yang keluar (*outflow*) terhadap total pengeluaran investasi pariwisata Indonesia terletak pada besarnya/jumlah barang/jasa yang masuk/keluar sebagai barang/jasa konsumsi dan dibawa dari negara wisman ke Indonesia maupaun barang/jasa yang dikonsumsi di dalam negeri oleh wisman dan dibawa ke negara asalnya. Dampak *outflow* tersebut akan memberikan efek induksi (Mason, 2003) terhadap besarnya pengeluaran investasi pemerintah di sektor pariwisata, karena dengan meningkatnya konsumsi wisman tentu saja perlu diikuti dengan peningkatan *output* yang diproduksi oleh sektor-sektor produksi ekonomi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung sektor pariwisata (seperti sektor pertanian, komunikasi), dan dalam rangka mendukung sektor-sektor tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai dan ini berarti perlu adanya peningkatan pengeluaran investasi dalam membangun infastruktur dan fasilitas pendukung.

Hasil estimasi pada tabel 4 juga menunjukkan hubungan yang negatif terhadap harga pariwisata dan nilai tukar, kondisi ini secara empiris menunjukkan bahwa dengan menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan termasuk investasi. Fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing yang stabil akan sangat mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri. Terjadinya apresiasi kurs rupiah terhadap dolar misalnya, akan memberikan dampak terhadap perkembangan pemasaran produk Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal persaingan harga. Apabila hal ini terjadi, secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap defisit neraca perdagangan. Seterusnya, akan berpengaruh pula kepada neraca pembayaran Indonesia. Dan dengan memburuknya neraca pembayaran tentu akan berpengaruh terhadap cadangan devisa. Berkurangnya cadangan devisa akan mengurangi kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Tabel 4 Hasil estimasi penawaran pariwisata Indonesia

Model	Variabel	Koefisien	Pr > t	Adj. R
Penyediaan Barang/Jasa Pariwisata Indonesia (CT_INA)	Pendapatan Nasional	0.417175***	0.0000	0.997646
	<i>Outflow</i> barang/jasa pariwisata	0.055233*	0.0683	
	<i>Inflow</i> barang/jasa pariwisata	0.133109***	0.0000	
	Nilai tukar rupiah terhadap USD	-0.253566***	0.0024	
	Harga riil pariwisata Indonesia	-0.038596**	0.0205	
	Belanja pemerintah sektor pariwisata	0.312601	0.4831	
	Krisis ekonomi Indonesia	0.008845***	0.0078	
	<i>Travel warning</i> Indonesia	0.006183	0.7853	
	<i>Travel warning</i> negara pesaing	-0.072092***	0.0616	
Total Belanja Pemerintah di Sektor Pariwisata Indonesia (GT_INA)	Pendapatan Nasional	-0.000773**	0.0101	0.705017
	Harga riil pariwisata Indonesia	0.001471*	0.0648	
	Nilai Tukar rupiah terhadap USD	-0.001236**	0.0381	
	<i>Inflow</i> barang/jasa pariwisata	-0.000144	0.674	
	<i>Outflow</i> barang/jasa pariwisata	-0.00099***	0.0002	
	Krisis ekonomi Indonesia	-0.000299*	0.0551	
	<i>Travel warning</i> Indonesia	-0.000214	0.3979	
	<i>Travel warning</i> negara pesaing	0.000127	0.7430	
Total Penyediaan Investasi (fisik) Pariwisata Indonesia (FDI_INA)	Pendapatan Nasional	0.137306*	0.0602	0.436153
	Nilai Tukar rupiah terhadap USD	-0.470781*	0.1121	
	Harga riil pariwisata Indonesia	-0.225593	0.4366	
	<i>Outflow</i> barang/jasa pariwisata	0.264916*	0.1242	
	<i>Inflow</i> barang/jasa pariwisata	0.125215	0.5703	
	Total Penyediaan Barang/Jasa Pariwisata Indonesia	0.928882*	0.0586	
	Total Belanja Pemerintah di sektor pariwisata Indonesia	4.101951	0.2056	
	Suku bunga	-0.999483*	0.1512	
	Krisis ekonomi Indonesia	-0.203203	0.2666	
	<i>Travel warning</i> Indonesia	0.898461*	0.1112	
Total Pernawaran Pariwisata Indonesia (TS)	Pendapatan Nasional	0.325592***	0.0000	0.604813
	Total Penyediaan Barang/Jasa Pariwisata Indonesia	0.268404***	0.0000	
	Total Belanja Pemerintah di sektor pariwisata Indonesia	1.962121**	0.0290	
	Total Penyediaan Barang/Jasa Pariwisata Indonesia	0.057995**	0.0100	

Keterangan: (***) $\alpha \leq 0.01$, (**) $\alpha = 0.01-0.05$, (*) $\alpha = 0.05-0.15$

Sumber: data diolah, 2014

4. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa faktor total penyediaan barang/jasa pariwisata, total penyediaan investasi pariwisata Indonesia, total belanja pemerintah disektor pariwisata Indonesia dan pendapatan nasional Indonesia (GDP) adalah faktor-faktor yang menentukan besarnya total penawaran pariwisata Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

penyediaan barang/jasa, total investasi, total belanja pemerintah, dan GDP Indonesia merupakan faktor-faktor yang menentukan perkembangan (besar kecilnya) penawaran pariwisata Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran keluarannya barang dan jasa pariwisata (*outflow*) secara dominan adalah variabel jarak ekonomi antara Indonesia dengan negara asal wisman, populasi negara asal wisman, nilai tukar, harga pariwisata Indonesia di negara-negara asal wisman, dan nilai aliran (*outflow*) barang dan jasa pada tahun sebelumnya, dengan besarnya 83.2 persen variasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perkembangan aliran keluar (*outflow*) barang/jasa pariwisata Indonesia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran masuknya barang dan jasa pariwisata (*inflow*) secara dominan adalah variabel jarak ekonomi, GDP Indonesia, dan aliran barang dan jasa (*inflow*) pariwisata yang masuk ke Indonesia tahun sebelumnya, harga pariwisata Indonesia, dan *travel warning* negara pesaing dengan 70 persen variasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perkembangan aliran barang dan jasa (*inflow*) pariwisata Indonesia. Adapun dampak negatif kenaikan GDP per kapita negara asal wisman terhadap kegiatan arus barang dan jasa pariwisata tersebut menunjukkan adanya kebocoran ekonomi (*economy leakage*) yang pada dasarnya kebocoran yang timbul terutama terjadi kebocoran impor (*import leakage*)
3. Faktor GDP per kapita negara asal wisman, *outflow/inflow* barang/jasa pariwisata Indonesia, harga pariwisata Indonesia, dan *travel warning* Indonesia merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisman, konsumsi wisman per kunjungan dan permintaan pariwisata Indonesia dengan variasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap permintaan pariwisata Indonesia sebesar 99 persen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti daya saing pproduk, harga pariwisata negara pesaing, tarif yang dikenakan, maupun subsidi.
4. Faktor pendapatan nasional Indonesia, *outflow/inflow* barang/jasa pariwisata, nilai tukar rupiah merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi total penyediaan barang/jasa pariwisata Indonesia, total belanja pemerintah di sektor pariwisata Indonesia, total penyediaan investasi pariwisata, dan total penawaran pariwisata

Indonesia dengan besarnya variasi pengaruh faktor-faktor penjelas tersebut terhadap penawaran pariwisata Indonesia sebesar 60 persen, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti daya saing infrastruktur, harga pariwisata negara pesaing, besarnya pajak maupun subsidi.

5. Naik turunnya perkembangan di sektor pariwisata (*demand –supply side*) sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara (baik dalam negeri maupun internasional), selain itu juga kebijakan stabilitas ekonomi makro yang berkaitan dengan perdagangan barang/jasa, GDP asal wisman, dan GDP per kapita negara asal wisman juga sangat berdampak terhadap perkembangan pariwisata nasional.
6. Membaiknya daya saing produk pariwisata Indonesia (menurut Laporan World Economic Forum tahun 2011 berada pada peringkat ke-29 dari 140 negara yang dinilai) namun tidak diikuti dengan peningkatan *outflow* (ekspor) barang/jasa. Hal ini menunjukkan masih besarnya tingkat kebocoran (*economy leakage*) yang ditimbulkan dari transaksi perdagangan barang/jasa pariwisata akibat masih dominannya aturan standarisasi pada barang/jasa pariwisata yang harus disediakan oleh penyedia layanan wisata dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan asing.

Sedangkan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dirumuskan sebelumnya, maka diberikan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Meningkatkan volume perdagangan produk barang/jasa pariwisata Indonesia, melalui upaya-upaya seperti: peningkatan kerjasama dan promosi dagang, peningkatan kualitas produk pariwisata, perbaikan dan pembangunan infrastuktur , peningkatan stabilitas dan jaminan keamanan yang mendukung kegiatan perdagangan barang/jasa pariwisata, serta dukungan kebijakan pemerintah (pusat maupun daerah) yang memudahkan terjadinya arus barang/jasa pariwisata.
2. Peningkatan perdagangan barang/jasa pariwisata perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing baik kualitas, harga yang kompetitif, teknologi yang digunakan, dan inovasi yang dihasilkan, maupun dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memudahkan transaksi arus barang/jasa, dan kebijakan fiskal baik pajak maupun belanja pemerintah yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.
3. Meningkatkan daya saing produk dan layanan pariwisata Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan volume perdagangan barang/jasa pariwisata agar dapat bersaing dengan barang/jasa yang berstandar internasional yang digunakan/dikonsumsi oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata.

Daftar Pustaka

Antariksa, B. 2010. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia. Prosiding Pertemuan Diklat Pariwisata tingkat Lanjutan Tahun 2010; Jakarta, 29 Juli 2010. Jakarta: Pusdiklat Kemenbudpar.

Archer, Brian & Cooper. 1994. *The Positive and Negative Impacts of Tourism*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Deardoff, A. 1998. Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Works in a Neo Classical World?. National Bureau Economic Research. Working Paper no. 5377. In *The Regionalization of the World Economy*, University of Chicago Press

Dornbusch R., Fischer, dan Startz R. 2004. *Macroeconomics*. 9th edition. McGraw-Hill, Boston

Dunning, JH. 1980. *Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests*. Reading University. England

Durbarry, R. 2006. *Tourism Expenditure in UK: Analysis of Competitiveness Using Gravity Based Model*. Nottingham University Business School. England

Hanafiah, M.H. 2011. *Trade and Tourism Demand: A case of Malaysia*. International Conference on Business and Economic Research. Malaysia

Krugman P, dan Maurice O. 2004. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Edisi Kelima. Jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mankiw, N.G. 2004. *Macroeconomics*. Harvard University. Worth Publisher Inc.

Mankiw, N.G., Romer, dan D. Weil. 2002. *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics

Mason, P. 2003. *Tourism Impacts, Planning and Management*. Oxford

Nicholson, W. 2005. *Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions*. Ninth Edition. Canada: Thomson South-western.

Pusat Data dan Informasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2011. *Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas)*. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Jakarta

Salvatore, D. 1996. *Ekonomi Internasional*. Munandar H, penerjemah; Sumiharti Y, editor. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: *International Economics*.

Sanso, Marcos, et al, 1999. Bilateral Trade Flows, The Gravity Equation and Functional Form, *Journal International Trade* Vol. 75 No. 2

Sutcliffe. 1988. The Estimation of Keynesian Income Multipliers at The Sub-national Level. *Applied Economics Journal* 20(11), 1435-1444.

Sugiyarto G, Blake A, Sinclair MT. 2003. Economic Impact of Tourism and Globalisation in Indonesia. *Annuals of Tourism Research*, 30 (3). Hlm 683-701.

Tantowi, A. 2009. Determinants of Tourism Demand in Indonesia: A Panel Data Analys [Tesis]. Yokohoma, Jepang: Yokohama National University.

Thapa, K. (2005). Challenges and Opprtunities of Village Tourism in Sirubari. B.Sc Thesis, School of Environmental Management and Sustainable Development, Pokhara University, Kathmandu

UNWTO 2009. *Tourism Highlights 2009 Edition* . <http://www.unwto.org> diunduh tanggal 21 April 2010

UNWTO. 2011. *Tourism Highlights 2011 Edition*. <http://www.unwto.org> diunduh tanggal 2 November 2011].

Wagner, JE. 1997. Estimating the Economic Impacts of Tourism. *Annuals of Tourism Research* 24 . hlm 592-608.

Widjaja, A. 2000. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia: Suatu Pendekatan Makroekonometrika [Disertasi]. Bogor: IPB.

World Economic Forum. 2011. *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011*. Geneva, Switzerland. <http://www.weforum.org> diunduh pada tanggal 25 Februari 2012

RPSEP-06

ANALISIS KOMPETENSI BIROKRASI DALAM UNDANG- UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Sofjan Aripin*)

Email: Sofjan19@gmail.com

Abstrak

Reformasi administrasi atau birokrasi merupakan keharusan untuk menjawab bahwa administrasi adalah dinamik, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek dan berkembang. Permasalahan public ditak pernah berhenti dan terus berubah, reformasi merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menjalankan amanah yang diberikan pada birokrat. Permasalahan kompetensi cukup mengemuka bagi birokrat public dengan dasar permasalahan budaya kerja bersifat KKN dan rendahnya kompetensi. Kompetensi pada Negara berkembang khususnya sanagat sulit untuk dimulai apalagi menyangkut kompetensi individu (internal birokrat), langkah awal melalui pemaksaan (kebijakan) akan membiasakan birokrat berkerja menjadi profesional dan berakar menjadi budaya birokrasi profesional. Kata kunci: birokrasi, kompetensi, profesional.

PENDAHULUAN

Kepercayaan (trust) merupakan mandat utama bagi birokrasi dalam mengemban dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang dimandatkan oleh masyarakat melalui perwakilan masyarakat di parlemen, sebagaimana di tegaskan oleh Pfiffner and Presthus, (1960:4) "*Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by reprehensive political bodies*". Administrator(birokrasi) mempunyai tugas secara melaksanakan setiap kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat (DPR) yang diamanatkan untuk diimplementasikan secara nyata terhadap masyarakatnya. Modal kepercayaan masyarakat inilah yang menjadi taruhan bagi birokrasi untuk dapat atau tidaknya layanan kepada masyarakat terimplementasi.

Berbagai penyakit yang menghinggapi birokrasi telah melunturkan peran birokrasi sebagai pelayan masyarakat dengan berbagai indikasi yang timbul dan dilakukan oleh birokrat, seperti korupsi, inefisiensi pengelolaan anggaran, praktek transaksi jabatan, sebagaimana ditegaskan Prasojo(2014) bahwa secara global, masyarakat semakin kehilangan Kepercayaan (*trust*) kepada Pemerintah dan kepercayaan masyarakat telah

menjadi topik utama dalam berbagai pembahasan para pemimpin, akademisi dan lembaga masyarakat

Permasalahan kepercayaan tersebut menunjukkan kelemahan birokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya akan integritas dan komitmennya bahwa amanah yang dijalkannya telah disalah gunakan dan melupakan bahwa amanah ini adalah amanah rakyat. Integritas dan komitmen akan terbangun dengan baik pada setiap unsur birokrasi dengan memelihara, menjaga, dan mengembangkan kompetensinya untuk memeberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kompetensi birokrasi atau pegawai aparatur sipil Negara dalam pengembangan kariernya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang(UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Paragraf 4 Pengembangan Karier Pasal 69,

- (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Menyimak UU tersebut, khususnya pasal 69, khususnya ayat 3 dikaitkan dengan kompetensi pegawai ASN dalam membentuk integritas dan moralitas birokrasi akan menjadikan daya dukung birokrasi yang handal.

Perlu dikritisi, control, dan secara nyata kompetensi birokrasi dalam kaitanya dengan capaian kinerja yang masih lemah, bukan hanya capaian kinerja anggaran saja tapi menyangkut layanan langsung kepada masyarakat local, nasional, regional (khususnya masyarakat ekonomi ASEAN 2015), maupun secara global.

REFORMASI ADMINISTRASI/BIROKRASI

Langkah awal dalam peningkatan kompetensi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dalam membangun integritas dan komitemenya adalah perubahan birokrasi secara kelembagaan maupun individu secara sistematis, procedural, dan masip oleh seluruh unsure kelembagaan Negara (legislative, eksekutif, dan yudikatif) secara konsisten, sebagaimana dijelaskan oleh *John D. Montgomery (1967) dalam Prasajo 2014*, “*Administrative reform is a political process designed to adjust the relationships between a bureaucracy and other elements in society, or within the bureaucracy itself*” . Reformasi birokrasi kontek pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Pfiffner and Presthus, (1960), yang menunjukkan bahwa proses politik (DPR) dengan unsure birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya sangat saling menundukung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini.

Proses reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya memerlukan langkah pemikiran akademis, pengamatan dan adopsi empiris dalam pelaksanaan birokrasi, dan kekosistenan dari grand desian yang telah disepakati ominimal oleh unsur lembaga negara. Transformasi dalam reformasi ini cukup panjang waktunya dan cukup kompleks hambatan yang dihadapinya, sebagaimana tegaskan oleh *Caiden (1969) dalam Prasajo (2014)*, “*The artificial inducement of administrative transformation against resistance*” . Resistensi utama dalam reformasi ini justru muncul dan terjadi dalam internal birokrasi itu sendiri sebagaimana yang terjadi dinegara Indoensia, sejak tahun 1998 pembenahan reformasi birokrasi secara kebijakan baru terwujud tahun 2014 dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2014, walaupun masih minus dengan RUU pendukungnya yang masih menjadi pekerjaan rumah para anggota legislative eksekutif.

Reformasi administrasi/birokrasi di Indonesia , sebagaimana dikemukakan oleh Prasajo mempunyai tujuan untuk terbebas dari KKN, akuntabel dalam pengelolaan birokrasi dan birokrasinya berkinerja tinggi, dan terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Proses ini merupakan perubahan dalam pemanfaatan system administrasi kedepan yang lebih handal dan mengikuti perkembangan dinamika yang terus berubah kearah penyempurnaan birokrasi, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut oleh *Dror (1976), dalam Prasajo* “*Directed change of main feature of an administrative system*” .

Fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi jelas terletak birokrasi atau apratur sipil negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lokus kemampuan profesional

manajemen dalam pengelolaan organisasi publiknya. Problema yang dihadapi berkaitan dengan lokus dan focus reformasi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Prasojo (2014) adalah “problem dasar yang harus dihadapi adalah merubah kultur di dalam birokrasi: incorruptibility dan budaya kinerja”. Budaya kerja birokrasi dan bertabiat korupsi birokrat sekarang ini masih berperilaku KKN atau tidak pro rakyat, jelas akan menghambat reformasi birokrasi.

KOMPETENSI ASN

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, pasal 69, ayat 3, bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Ketiga kompetensi tersebut, yaitu teknis, manajerial, dan social kulutural menjadi focus yang harus dimiliki oleh para birokrat.

1. Pemahaman konsep Kompetensi

Secara etimologi, kompetensi berasal dari istilah bahasa Inggris “*Competence*”, yaitu kecakapan/kemampuan/kompeten. Kecakapan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan aktivitasnya dengan baik dalam bentuk kemampuan khusus yang dimilikinya, kemampuan kesiapan atau ketahanan pribadinya, maupun kemampuan kapasitasnya. Kompetensi pada dasarnya merupakan kualitas atau syarat yang terdiri dari kemampuan kecakapan, ketahanan, dan kapasitas yang harus dimiliki seseorang, sebagaimana dipertegas dalam *The World Book Dictionary* (1994:423), yang mengemukakan bahwa: “*Competence is the quality or condition of being competent; ability; fitness; and capacity.*”

Suparno (2001:27), menegaskan lebih lanjut pengertian di atas secara lebih luas, bahwa: “kata kompetensi biasanya diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang

disyaratkan. kompetensi adalah untuk mengembangkan manusia yang bermutu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana disyaratkan”.

Pengertian kompetensi tersebut dipertegas oleh Charles (1994), dikutip dalam Mulyasa (2008:25) yang mengemukakan bahwa: “*competency is rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* “. Kompetensi merupakan performen yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Pemahaman mengenai kompetensi berkembang pada awal tahun 1960-an dari pandangan pakar psikologi yaitu Mc.Clelland (1973) dalam Mitrani (1994:27-28), yang mengemukakan pengertian kompetensi sebagai berikut: “*Competency is defined as “an underlying characteristic of an individual which is causally related to effective or superior performance in a job. Defferentiating competencies distinguish superior from average performers”*. Kompetensi dapat artikan sebagai karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik atau yang membedakan kompetensi yang berkinerja baik dengan yang kurang baik .

Pandangan Mc.Clelland (1973) tersebut dipertegas oleh Spencer and Spencer (1993:9) dari kelompok *Hay and Mac Ber*, yang mendefinisikan kompetensi sebagai berikut: “*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*”. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang dari bukti-bukti pengalaman sangat efektif mempengaruhi atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan *performance* ditempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada situasi tertentu.

Secara pragmatis Wibowo (2007:86), mengemukakan bahwa:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut”.

Pengertian ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan ciri khas yang dimiliki seseorang atas keterampilan dan pengetahuan dalam menunjukkan performennya. Hal ini sejalan dengan pandangan McAshan (1981:45), dalam kutipan Sanjaya (2005:6) mengemukakan bahwa kompetensi adalah: “...A knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which became part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, efektif, dan psikomotoriknya.

2. Karakteristik Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang mempunyai karakteristik yang berbeda, hal ini menunjukkan suatu kemampuan seseorang dengan orang lain berbeda pula, sebagaimana dikemukakan oleh Suryadana (2006:56), bahwa: “Kompetensi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari setiap manusia”.

Karakteristik kompetensi yang dimiliki seseorang diarahkan untuk mendukung kinerja pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana dikemukakan lebih lanjut oleh Wibowo (2007:87), bahwa: ”Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku ditempat kerja”. Karena kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik seseorang untuk berperilaku dalam organisasi.

Armstrong and Baron (1998:298), dikutip dalam Wibowo (2007: 88), menegaskan lebih lanjut bahwa: “kompetensi....sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika menjalankan peranannya dengan baik”.

Spencer and Spencer (1993:9), mengemukakan lebih dalam lagi bahwa: “Competency are underlying characteristics of people and indicate way of behaving or thinking, generalizing across situations, and enduring for a reasonably long period of time”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara bertindak atau berpikir, menjeneralkan lintas situasi, dan mendukung kemampuannya untuk periode waktu cukup lama.

Spencer and Spencer (1993:9-10), lebih lanjut mengemukakan ada lima macam karakteristik kompetensi, sebagai berikut :

1. *Motives. The things a person consistently think about or want that cause action.*

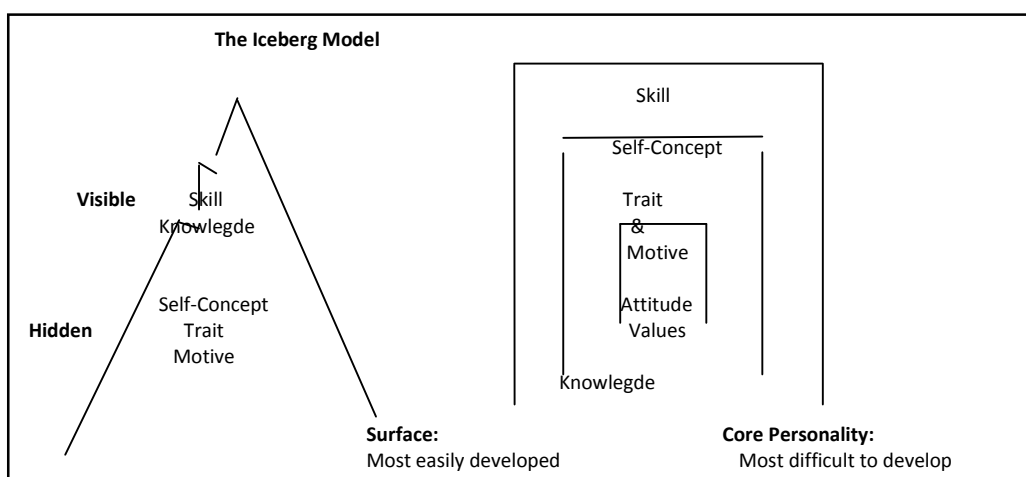
2. *Traits. Physical characteristics and consistent responses to situations or information.*
3. *Self concept. A person attitudes, values and self image.*
4. *Knowledge. Information a person has in specific content areas*
5. *Skill. The ability to perform a certain physical or mental task.*

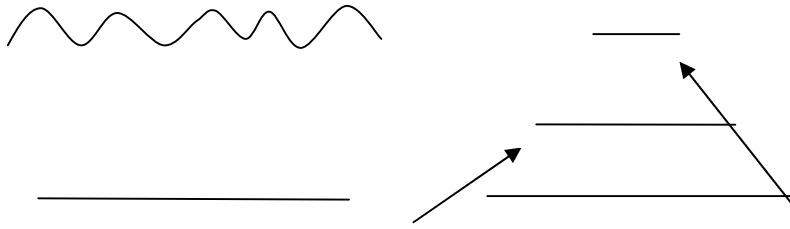
Kelima macam karakteristik kompetensi tersebut, menunjukkan bahwa: 1). *motif* merupakan pemikiran atau niat dasar konstan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku; 2). *ciri* atau *sifat* merupakan karakteristik yang relatif konstan pada tingkahlaku seseorang; 3). *citra diri* merupakan persepsi individu tentang dirinya; 4). *pengetahuan* merupakan informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang dalam bidang tertentu; dan 5). *keterampilan* merupakan keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik.

Pemikiran Spencer tersebut dipertegas oleh Wibowo (2007:92), berkaitan dengan kemampuan mengelola kompetensi secara baik, bahwa: “*Self management competency*, kompetensi berkaitan dengan menjadikan motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibelitas, dan berinisiatif”

Sedangkan menyangkut karakteristik kompetensi itu sendiri Wibowo (2007:95), menyatakan lebih lanjut bahwa: “Kompetensi termasuk karakteristik manusia yang paling dalam seperti motif, sifat, dan sikap atau merupakan karakteristik yang dengan mudah dapat diamati seperti keterampilan atau pengetahuan”.

Pemikiran tersebut lebih lanjut dipertegas oleh Spencer and Spencer (1993:11), yang mengemukakan bahwa tingkatan kompetensi seperti gunung es yaitu ada tingkatan karakteristik yang terlihat (yaitu keterampilan dan pengetahuan) karakteristik ini mudah untuk dibina atau dikembangkan dan ada karakteristik yang tersembunyi (citra diri, ciri/sifat, dan motif) karakteristik ini sukar untuk dibina dan dikembangkan khususnya karakteristik motif dan ciri/sifat. Secara skematis kelima karakteristik tersebut dapat terlihat pada gambar 2.6 di bawah ini.





Gambar 2.6 : *Central and Surface Competencies* (Spencer and Spencer,1993:11)

Pemikiran lain mengenai karakteristik kompetensi dikemukakan oleh Gordon (1988), dalam kutipan Sanjaya (2005:6-7) bahwa ada beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya birokrat harus dapat fungsi dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Keterampilan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan. Misalnya birokrat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang terurai dalam program dan kegiatan kerjanya dapat mendiskresikan dengan baik.
4. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya. Misalnya standar tiga kompetensi birokrat dalam UU ASN diharapkan berdampak terhadap perilaku birokrat terhadap kinerja, proses pelayanan publik, kepekaan kemasyarakatannya, memiliki integritas tinggi, maupun peningkatan kemampuan profesionalismenya.
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya perasaan senang atau tidak senang terhadap munculnya peraturan baru; reaksi terhadap diberlakukannya lelang jabatan.
6. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Misalnya minat birokrat untuk meningkatkan

kualifikasi akademik kejenjang studi lanjut Magister Administrasi Publik untuk memperkuat profesionalismenya.

Karakteristik kompetensi sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemikir di atas, menurut Spencer and Spencer (1993:19-89), dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok kompetensi sebagai sebuah pengembangan *dictionary* kompetensi sebagai berikut:

1. *“Achievement and action : a. anchievement orientation, b. concern for order, quality and accuracy, c. initiative, and d. information seeking.*
2. *Helping and human orientation: a. interpersonal understanding and b. customer service orientation,*
3. *The impact and influence: a. impact and influence, b. organization awareness, and c. relationship performance building.*
4. *Managerial skill: a. development others, b. directiveness assertiveness and use position power, c. team work and cooperation and d. team leadership*
5. *Cognitive: a. analytical thinking, b. conceptual thinking, and c.profesional expertise.*
6. *Personal effectiveness : a. self control, b. self confidence, c. flexiblelity,and d. organization commitment.”*

Keenam pengelompokan pengembangan kompetensi tersebut dapat di jelaskan secara ringkas dengan indikator dan sub indikator yang dimiliki pada setiap karakteristik kompetensi sebagai berikut:

1. *Achievement and action*, yaitu karakteristik *dictionary* kompetensi berprestasi dan bertindak dengan indikator :
 - a. *anchievement orientation* (orientasi untuk berprestasi), yaitu tingkat kepedulian untuk bekerja dengan baik atau berusaha bekerja dengan baik di atas standar dengan sub indikatornya: berorientasi pada hasil, efesien, peduli terhadap standar, fokus pada perbaikan, kewirausahaan, dan optimal penggunaan SDM;
 - b. *Concern for order, quality and accuracy* (perhatian terhadap aturan, mutu dan ketelitian), yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk mengurangi ketidakpastian dilingkungan kerjanya khususnya berkaitan dengan ketersediaan data dan informasi yang handal dan akurat, dengan sub indikatornya: monitoring, kejelasan, mengurangi ketidakpastian dan *helping track*;

- c. *Initiative* (inisiatif), dengan sub indikatornya: menangkap peluang, condong untuk melakukan tindakan, berorientasi pada masa depan, dan proaktif; dan
 - d. *Information seeking* (pencarian dan pengumpulan informasi).
2. *Helping and human orientation* (memberikan bantuan dan pelayanan), dengan indikator:
 - a. *interpersonal understanding* , yaitu adanya rasa empati
 - b. *customer service orientation*, yaitu berorientasi pelayanan dan kepuasan pelayanan atau kepuasan pelayan.
 3. *The impact and influence* (dampak dan pengaruh), dengan indikator:
 - a. *impact and influence*, yaitu adanya dampak dan pengaruh
 - b. *organization awareness*, yaitu timbulnya kesadaran berorganisasi
 - c. *relationship performance building*, yaitu dapat membangun hubungan kerja
 4. *Managerial skill* (kemampuan manajerial), dengan indikator:
 - a. *development others*, yaitu adanya kemampuan mengembangkan orang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - b. *directiveness assertiveness and use position power*, yaitu memberikan arahan dan memanfaatkan kekuasaan jabatan.
 - c. *team work and cooperation*, yaitu kerja kelompok dan kerjasama
 - d. *team leadership*, yaitu kepemimpinan kelompok.
 5. *Cognitive* (daya pikir atau kemampuan keahlian), dengan indikator:
 - a. *analytical thinking* (berpikir analitis)
 - b. *conceptual thinking* (berpikir konseptual)
 - c. *profesional expertise* (keahlian profesional).
 6. *Personal effectiveness* (keefektifan personal), dengan indikator:
 - a. *self control*, yaitu bagaimana pengendalian diri ke arah yang lebih baik
 - b. *self confidence*, yaitu adanya kepercayaan diri dalam menjalankan profesi yang dimilikinya.
 - c. *flexiblelity*, yaitu adanya fleksibelitas dalam pelaksanaan kerjanya
 - d. *organization commitment*, yaitu adanya komitmen pada organisasi

PENUTUP

Reformasi birokrasi dalam hal peningkatan kompetensi birokrasi atau dalam UU ASN disebut dengan pegawai ASN, ditinjau secara teoritis, kebijakan dalam hal ini UU ASN, maupun pragmatis. Jelas penguatan kompetensi aparatur sipil Negara

memegang peran penting dalam penentuan keberhasilan dan kegagalan manajemen birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Kompetensi teknis, manajemen, dan social sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai ASN dalam pengimplementasian kebijakan maupun layanan public.

Kompetensi yang perlu menjadi penekanan justru terletak pada kompetensi social atau individu pegawai ASN yang perlu terus dipupuk untuk mendukung budaya kerja tidak KKN dengan integritas dan komitmen dalam membangun bangsa. Kompetensi social atau individu ini menurut Spencer and Spencer (1993) sangat sukar untuk dibina atau dilatih, tetapi dengan penanaman dan pembinaan yang konsisten dengan contoh para elit birokrasi dan legislative akan terwujud birokrasi yang berintegritas dan berkomitmen kepada kepentingan publik

REFERENSI

- Handoko, Hani T. 1997. *Manajemen, Edisi 2*. Jogyakarta : BPF.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilannya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kaplan, Robert M., and Denis P Saccuzza. 1993. *Psychological Testing (Principles, Application, and Issues)*, California:3rd edition Brooks/Cole Publishing company.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta:Bumi Aksara
- Mirtiani, Alain. 1994. *Competency Human Resource Management*, London: Kogan Page Limited 120 Pentronville Road.
- Mueller, Daniel J. 1986. *Measuring, Social Attitudes*. New York-London : Teacher Collage Press.
- Mustopadidjaja, AR.1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Kebijakan dilihat dalam Kaitan Disiplin dan Sistem Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- _____.2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Neuman, W.Laurence. 1997. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Third Edition. Allyn and Bacon.
- Pfiffner, John M and Presthus, Robert V. 1960. *Public Administration*. New York : The Ronald Press Company.
- Prasojo, Eko, 2014, *Mereformasi Aparatur Sipil Negara*, Makalah Kuliah Umum Disampaikan Pada Wisudawan Universitas Terbuka
- _____, 2014, *Membangun Daya Saing Dan Governansi Melalui Reformasi Birokrasi*, Makalah Kuliah Umum Disampaikan Pada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka
- Sanjaya, Wina. 2005. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Soedjadi, FX. 1990. *O & M (Organization and Methods) Penunjang keberhasilannya Proses Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Spencer, Lyle M.Jr & Signe M.Spencer. 1993. *Competence At Work Model for Superior Performance*, United States of America: John Wiley and Son. Inc.
- Spencer, Lyle M.Jr. 1995. *Reengineering Human Resources, Achieving Radical Increases in Service Quality – with 50% to 90% Cost and Head Count Reductions*. United States: John Wiley and Son. Inc.
- Suparno, A Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti Diknas.
- The World Book Dictionary. 1994. USA Chicago: World Book Inc.*
- Thompson, Jhon L. 1999. *A Strategic Perspective of Entrepreneurship*. Huddersfield: MCB University Press.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 1992. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

RPSEP-07

**IRONI PROGRAM HIBAH RUANG KELAS BARU (RKB)
DI PROVINSI JAWA BARAT**
**Sebuah studi kasus: Program Hibah RKB Gubernur Jawa Barat
tahun anggaran 2013-2014 oleh Organisasi X**

Bunga Aprillia, S. AP., M.Si.

Program Studi Ilmu Politik Universitas Wanita Internasional
Jl. Ahmad Yani no. 18-20 Bandung
Email : bunga.april@gmail.com

Abstrak

Program hibah pembangunan ruang kelas baru (RKB) merupakan salah satu solusi yang diberikan Gubernur Jawa barat dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Program tersebut memiliki peran yang besar dalam membangun sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana khususnya di wilayah Jawa Barat. Menurut beberapa berita yang dilansir oleh media cetak dan elektronik program hibah RKB digunakan sebagai alat untuk mendapatkan beberapa keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Hasil sementara dari lapangan, menunjukkan bahwa program hibah RKB telah digunakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab oleh beberapa oknum khususnya di wilayah Jawa Barat⁹.

Paradigma *New Public Service* menjadi kerangka yang digunakan untuk melihat bahwa implementasi kebijakan program hibah RKB seharusnya menjadi pelayanan yang bersifat mengutamakan kepentingan publik. Teori implementasi kebijakan yang diusung oleh Adam smith akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program hibah RKB yang lebih bersifat *bottom up* ini dipengaruhi oleh kebijakan yang ideal, target grup, badan pelaksana dan faktor lingkungan. Pada akhirnya, penelitian ini akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam penggunaan implementasi kebijakan *bottom up*.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pendekatan *bottom up*, program hibah, *new public service*.

A. Latar Belakang

Tahap implementasi merupakan tahapan selanjutnya dari proses kebijakan. Tahap ini melibatkan banyak aktor untuk terlibat dalam setiap pelaksanaan prosedur juga teknik yang dilakukan dilapangan. Pendekatan implementasi kebijakan terbagi kedalam dua arah yaitu *top down* (dari atas ke bawah) dan *bottom up* (dari bawah ke

⁹ Keterangan diringkas dari berita yang dilansir oleh beberapa media elektronik

atas). Pendekatan pelaksanaan kebijakan publik yang bersifat *top down* merupakan pelaksanaan yang dimulai dari aktor pemerintah untuk diteruskan kepada publik (warga negara). Berbeda dengan implementasi kebijakan yang bersifat *bottom up* pelaksanaannya yang dimulai dari publik (warga negara) untuk diteruskan kepada aktor pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan paradigma baru *New Public Service* seyogyanya masih bisa diselaraskan bukan hanya dengan implementasi kebijakan yang bersifat *bottom up* tetapi juga bisa diselaraskan dengan implementasi kebijakan yang bersifat *top down*. Perspektif *New Public Service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Selaras dengan perspektif *New Public Service*, pelaksanaan kebijakan yang bersifat *bottom up* juga mengutamakan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini menjadi sangat penting.

Pelaksanaan kebijakan program RKB merupakan implementasi kebijakan yang bersifat *bottom up*, dimana Pergub No. 56 Tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaannya. Seyogyanya kebijakan yang bersifat *top down* tetap dijalankan dengan pendekatan *bottom up* dalam rangka mengedepankan masyarakat sebagai kepentingan utama untuk dilayani. Program pembangunan ruang kelas baru dilaksanakan secara swakelola melalui mekanisme partisipasi masyarakat dengan subsidi langsung ke sekolah, maka pelaksanaan program ini disebut sebagai pelaksanaan yang menggunakan pendekatan *bottom up*. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekolah bersama masyarakat dan tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan sekolah dan masyarakat akan mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi dan bertanggungjawab untuk senantiasa memelihara fasilitas yang ada tersebut agar bisa mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kegiatan pembelajaran.

Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat tercapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan mutu pendidikan dalam bidang akses pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang saat ini dilaporkan dalam kondisi rusak dan kurang memenuhi syarat. Pada tahun 2013, dilaporkan bahwa dari 271.745 ruang kelas pada 28.835 sekolah negeri dan swasta yang terdapat di Jawa Barat, tercatat kurang lebih 11,78% dalam

keadaan rusak ringan sampai berat¹⁰. Kondisi ruang kelas tersebut kurang lebih memberikan gambaran umum kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah yang bersangkutan. Sadar akan hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan melalui program subsidi pembangunan ruang kelas baru (RKB) Sarana dan Prasarana sekolah melalui pembangunan ruang kelas baru yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk yang mengucurkan dana hibah dan bansos dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data KPK, pada 2010 dana hibah Pemprov Jabar hanya 1,43% dari total APBD sedangkan dana bansos mencapai 1,73. Pada 2011 terdapat kenaikan hibah menjadi 2,72% dan 3,40%. Tahun 2012 dana hibah melonjak tajam menjadi 30,7%, meskipun dana bansosnya hanya 0,08%. Tahun 2013 dana hibahnya Jabar masih di angka 30,53% dan bansos sebesar 0,15%. Pengucuran hibah Jawa Barat berada di atas rata-rata anggaran dana hibah dari APBD secara nasional. Secara nasional rata-rata pengucuran dana hibah 2012 hanya 20,68% dan 23,11% pada 2013. Angka-angka tersebut menempatkan Jabar sebagai daerah dengan hibah tertinggi pada 2012 dan 2013. Pada 2012, Jabar mengucurkan dana hibah sebesar Rp 4,8 triliun¹¹. Perhitungan angka tersebut menjadi rujukan penulis untuk melihat kembali contoh kasus pertanggungjawaban program hibah ruang kelas baru tahun anggaran 2013/2014 di Jawa Barat.

Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah seminar bimbingan teknis program RKB bantuan hibah dari Gubernur Jabar tahun anggaran 2013/2014 diselenggarakan di salah satu Hotel bintang dua di Bandung pada tanggal 27-28 Februari 2014 oleh organisasi X dengan tujuan tindak penipuan terhadap target grup. Melalui seminar bimbingan teknis, penulis yang juga sebagai pemateri untuk seminar tersebut merasakan hal yang janggal dimana tidak adanya transparansi bahwa bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Terlebih ketika seminar ini diselenggarakan oleh Event Organizer (EO) bukan oleh organisasi non profit seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak dari EO bahwa peserta seminar yang diantaranya kepala sekolah dari berbagai sekolah di Jawa Barat adalah peserta yang telah terpilih untuk mendapatkan hibah dari pemerintah sehingga seminar bimbingan teknis hanya sebagai formalitas saja,

¹⁰ Buku panduan pelaksanaan Program Subsidi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bantuan hibah Gubernur Prov. Jabar berdasarkan jenjang/tingkatan sekolah di Prov. Jabar. Tahun anggaran 2013/2014, hal. 1.

¹¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/267578>, diakses pada tanggal 10/9/14

selain itu diketahui pula bahwa sebelum didaftarkan menjadi peserta panitia menarik dana dari masing-masing peserta sejumlah 25% dari jumlah uang yang akan diterima¹². Dari beberapa indikasi masalah tersebut bahasan ini akan terfokus pada bagaimana pelaksanaan program subsidi pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun anggaran 2013/2014 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sehingga mengakibatkan banyaknya oknum tindak penipuan dan kerugian peserta hibah.

B. Telaah Literatur

Implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up*

Penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* yang diusung oleh Adam Smith karena pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan yang bersifat swakelola antara sumbangan yang diberikan pemerintah dan juga sumbangan dari masyarakat. Menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu ¹³:1. *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya 2. *Target groups* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan 3. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 4. *Environmental factors* unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik

¹² Wawancara dengan pemilik event organizer sebagai penyelenggara bimtek program RKB pada tanggal 26 Februari 2014

¹³Diakses pada tanggal 6 / 10/14, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-shandydwip-24320-2-babii.pdf>

Keempat variabel tersebut tak berdiri sendiri akan tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian yang pada akhirnya menimbulkan *tension* (tekanan) bagi terjadinya tawar menawar antara *formulator* dan *implementator*. Model ini memandang bahwa implementasi kebijakan tak berjalan secara *linear* dan mekanistik tetapi memberi peluang terjadinya bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi yang berdimensi *target group*.

C. Metode Penelitian

Penelitian studi kasus adalah salah satu bentuk dari penelitian kualitatif yang fokus pada penyediaan perhitungan yang detail dari satu atau banyak kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk menggambarkan sebuah entitas dalam bentuk unit tunggal seperti perorangan, sebuah organisasi atau institusi.¹⁴ Tujuan dari studi kasus dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagian dari suatu kasus secara detail. Dalam menyelidiki fenomena tersebut maka penulis mengambil responden diantaranya adalah petugas pengelola program hibah RKB dari Pemprov Jabar bagian pendidikan dan pelayanan sosial, event Organizer sebagai penyelenggara seminar bimtek, Peserta program hibah RKB, petugas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.

D. Pembahasan

Sosialisasi dan Bimbingan teknis sebagai pola interaksi

Kebijakan program hibah RKB memberikan angin segar untuk sekolah yang membutuhkan bantuan sarana prasarana sekolah, terutama sekolah yang berada di desa dan pedalaman. Sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan langkah pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk secara teknis mengenai program hibah. Langkah ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membentuk pola interaksi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan sekolah yang menerima bantuan sebagai target grup. Sosialisasi dan bimbingan teknis perlu dilakukan mengingat pelaksanaan kebijakan ini tergantung dari kesiapan para peserta (sekolah). Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan untuk mau dilibatkan dalam swakelola pembangunan RKB.

¹⁴ Merriam, Sharan B, 2002, *Qualitative Research in Practice (Part1: The nature of Qualitative Inquiry)*, John Wiley and Sons Ltd.

Pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi ini dinilai positif karena sosialisasi dan bimbingan teknis secara langsung menjadi wadah bertemunya pemerintah dan peserta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi sekolah yang ingin diberikan hibah dan bagaimana cara mengajukan proposal yang baik. Disamping itu, bimbingan teknis diselenggarakan agar terjadi perjanjian kerjasama hibah RKB antara pemerintah dan peserta.

Sekolah yang membutuhkan bantuan sebagai target grup

Sekolah yang membutuhkan bantuan ruang kelas baru merupakan target grup dari kebijakan program hibah RKB. Target grup ini diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan pada saat bimbingan teknis dan sosialisasi. Sekolah yang membutuhkan bantuan harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. Menurut Kepala Biro Humas Pemprov Jabar, Rudi Ganda Kusumah menjelaskan, pada prinsipnya penerima hibah dan bansos di Pemprov Jabar harus memenuhi lima prasyarat wajib. Pertama penerima merupakan warga asli Jabar punya KTP Jabar; kedua, ada rekening yayasan atau organisasi bukan rekening pribadi; ketiga, mengajukan proposal pengajuan kegiatan, menandatangani fakta integritas; kelima, serta dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya sesuai dana peruntukan yang diberikan¹⁵.

Kurangnya pemahaman masyarakat terutama sekolah terhadap kebijakan program hibah RKB ini menjadi salah satu kemungkinan berkembangnya kasus penipuan program hibah RKB terhadap sekolah¹⁶. Sekolah yang membutuhkan bantuan belum mengerti bagaimana membuat proposal dengan baik, siapa seharusnya aktor yang terlibat, pemahaman mereka mengenai bantuan hibah pun sangat kurang. Kurangnya pemahaman dari sekolah-sekolah dimanfaatkan oleh lingkungan sosial yaitu masyarakat/ kelompok/ individu untuk melakukan kecurangan.

Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat sosialisasi dan bimbingan teknis program dana hibah ruang kelas baru tahun anggaran 2013/2014 yang merupakan sebuah tindak penipuan. Hal ini merupakan pembuktian secara jelas bahwa kurangnya pemahaman target grup akan dimanfaatkan oleh sebagian kelompok/individu untuk berbuat curang dan merugikan.

¹⁵ <http://nusantara.rmol.co/read/2014/01/29/141802/Pemprov-Jabar-Didesak-Umumkan-Nama-nama-Penerima-Hibah-dan-Bansos->, merupakan situs berita politik yang diakses pada tanggal 22/9/2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan rovinsi Jabar pada tanggal 25 September 2014

Bimbingan teknis yang dimaksud diatas meliputi penyampaian materi petunjuk pelaksanaan RKB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, keuangan hingga petunjuk pelaksanaan pertanggungjawaban. Acara bimbingan teknis diselenggarakan oleh oknum yang mengalihkan kepada *event organizer* yang telah dipilih sebelumnya. Bimbingan teknis berlangsung selama 2 hari di salah satu hotel bintang dua di Jalan Pangarang Bandung, peserta yang hadir terdiri dari 80 sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah maupun Kepala Desa¹⁷. Materi yang dipaparkan oleh para pembicara merupakan materi yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Buku panduan petunjuk pelaksanaan program hibah RKB dijadikan pegangan para pembicara untuk penyampaian materi. Dalam acara tersebut ditemukan keluhan para Kepala Sekolah mengenai sekolah dan desa nya masing-masing. Salah satu hal yang menjadi keluhan adalah dana yang masih belum tentu adanya. Keluhan lainpun diungkapkan bahwa keterangan tentang pemberian dana bantuan terhadap sekolah masih belum mendapat jawaban. Setelah seminar selesai, tiga orang Kepala Sekolah secara pribadi mengutarakan bahwa program ini sangat diharapkan karena selama ini mereka tidak memiliki tempat atau ruang kelas yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan di masjid, ruang terbuka atau sekolah Madrasah Islamiyah lain yang tidak dipakai pada waktu-waktu tertentu. Beberapa kisah yang diutarakan bapak-bapak ini membuat penulis merasa yakin bahwa memang program bantuan hibah gubernur ini dibutuhkan dan memiliki tingkat urgensi yang luar biasa dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Dalam kurun waktu enam bulan berikutnya, ramai diberitakan bahwa marak terjadi penipuan program dana bantuan sosial salah satunya adalah dana hibah RKB. Beberapa media elektronik dan cetak memberitakan terdapat 315 sekolah swasta di Jawa Barat diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh AP dan CS, yang mengaku menjadi koordinator pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jabar.

Permasalahan selanjutnya, ditemukannya pungutan dana dari peserta yang mengikuti bimtek dan sangat disayangkan bahwa memang benar mereka diminta sekitar lima juta perorang/persekolah untuk mencairkan dana hibah RKB tersebut, bahkan pengelola tidak memberi kabar dan dana hibah pun tidak cair hingga hari ini¹⁸. Kejadian tersebut sama halnya dengan yang telah diungkapkan media bahwa untuk mendapatkan bantuan hibah RKB setiap sekolah harus memberi uang muka terhadap pelaku yang

¹⁷ Data terlampir

¹⁸ Wawancara dengan salah satu peserta bimtek melalui telepon pada tanggal 9/9/14 13.47

mengaku sebagai konsultan pemprov dan pimpinan proyek dana bantuan tersebut. Jumlah uang yang diminta berkisar dari Rp 14 juta hingga Rp 22 juta¹⁹. Berita tersebut merupakan beberapa bukti bahwa program dana hibah RKB yang dimanfaatkan oleh kepentingan individu bukan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan tetapi justru merugikan masyarakat terlebih lagi ditemukan banyaknya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan dan Sekolah sebagai Badan Pelaksana

Badan pelaksana merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan program hibah yang bersifat *bottom up*. Tentunya badan pelaksana dalam implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* bukan hanya pemerintah, tetapi juga *stake holder* yang lain. Implementasi kebijakan program hibah melibatkan pemerintah dan sekolah yang membutuhkan sebagai aktor. Pemerintah di tingkat daerah yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sebagai langkah awal implementasi, program hibah RKB dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan tingkatan sekolah. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah atas memiliki dikelola oleh masing-masing divisi tersendiri.

Berdasarkan banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum, penelitian ini mencoba memberikan informasi resmi dari pemerintah bahwa setiap bimbingan teknis atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah²⁰; 1) diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis, tidak dikontrakan kepada pihak ketiga, 3) kegiatan dilakukan sesuai dengan tahun anggaran yang bersangkutan 4) tidak pernah menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tingkatan sekolah yang beragam (campur), 5) setelah dilakukan bimbingan teknis, pemerintah akan melakukan verifikasi langsung ke sekolah yang bersangkutan. Hal ini memberikan pemahaman informasi yang jelas bahwa pemerintah memiliki prosedur yang jelas mengenai setiap kegiatan RKB yang dilakukan. Jika kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka bimbingan teknis tersebut tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah akan sulit untuk bertanggungjawab akan beberapa tindak

¹⁹ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/281968>, diakses pada tanggal 9/9/2014.

²⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan rovinsi Jabar pada tanggal 11 September 2014

penipuan yang akhir-akhir ini terjadi dan biasanya langsung ditangani oleh pihak kepolisian untuk kelanjutannya.

Sekolah merupakan badan pelaksana sekaligus sebagai target grup karena kebijakan yang menggunakan pendekatan *bottom up* akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakannya. Sekolah sebagai badan pelaksana pada tahap pembangunan ruang kelas baru. Tahap pembangunan ruang kelas baru adalah tahap dimana sekolah memiliki peran utama dalam melaksanakan kebijakan ini. Pada tahap ini, pemerintah sangat mengandalkan swakelola sekolah dan masyarakat sekitar dalam membangun ruangan. Sekolah yang bersangkutan akan dimintai persetujuan untuk membangun ruang kelas baru dengan cara swakelola, biasanya perjanjian ini dilakukan pada saat bimbingan teknis. Setelah perjanjian dilakukan, sekolah harus memberikan proposal agar pemerintah bisa memperkirakan berapa dana hibah yang bisa dikeluarkan sesuai dengan pagu yang diajukan di dalam proposal. Sesuai dengan ketentuan tersebut, jumlah dana program hibah tidak bisa ditentukan di awal pada saat akan melakukan bimbingan teknis. Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi permintaan uang muka kepada sekolah yang membutuhkan bantuan.

Hasil penelitian pada kasus yang sama, para oknum kembali mengundang *event organizer* yang sama untuk mengumpulkan 15 sekolah lagi yang akan diikutsertakan dalam bimtek program dana hibah lanjutan²¹. Setelah terkumpul 15 sekolah di suatu rumah makan di daerah Cinunuk, Kabupaten Bandung, calon peserta bimtek dimintai uang muka 25% dari dana hibah sebesar Rp. 125.000.000 untuk kelancaran cairnya dana tersebut. Kepala sekolah dari 15 sekolah sudah setuju dengan persyaratan tersebut, tetapi *event organizer* yang ditunjuk oleh oknum menggagalkan hal tersebut dan menyatakan ketidakmampuannya untuk menjadi penyelenggara acara bimtek selanjutnya karena mencium aroma penyalagunaan kewenangan di dalamnya.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa terdapat banyaknya tindak penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab. Tindak penipuan ini dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada pula yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Berdasarkan informasi dari Kasubag pendidikan dan pelayanan sosial Pemerintah Provinsi Jabar bahwa maraknya penipuan ini membuat Sekretaris Daerah mengambil langkah untuk investigasi terhadap kemungkinan kejadian di lapangan, hasilnya ditemukan lebih dari dua tindak penipuan yang telah diinvestigasi telah merugikan banyak pihak.

²¹ Wawancara dengan pemilik Event Organizer Maret 2014

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan

Faktor lingkungan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan. Dampak negatif dari faktor lingkungan bagi pelaksanaan program RKB tersebut adalah terdapat oknum di lingkungan masyarakat yang melihat kebijakan ini mudah disusupi oleh tindak penipuan. Pertanyaan selanjutnya mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana badan pelaksana menanggapinya. Apabila dikaji kembali tindak penipuan program RKB dilakukan oleh kelompok/individu yang memiliki niat buruk. Pada kenyataannya implementasi kebijakan ini sangat mudah disusupi oleh berbagai kepentingan individu yang ingin meraup keuntungan besar dalam sekejap. Hasil penelitian lapangan ditemukan indikasi bahwa banyaknya tindak penipuan dikarenakan pelaksanaan program hibah RKB bukan dilakukan oleh satu badan saja tetapi juga ada pihak lain yang melaksanakan kebijakan ini. Salah satu responden dari Dinas Pendidikan Provinsi Jabar saat itu menyebutkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan pula oleh Pemerintah Provinsi Jabar sebagai “aspirasi anggota dewan” atau dengan kata lain disebut juga kegiatan non DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Dana yang digunakan untuk pelaksanaan hibah RKB dikeluarkan dari APBD dan ketika sudah dapat dilaksanakan masuk kedalam dana DPA, tetapi ada beberapa kepentingan anggota dewan yang harus dikabulkan sehingga menggunakan program hibah langsung kepada target grup tidak melalui penyelenggaraan bimbingan teknis/ sosialisasi. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa ada lebih dari satu pelaksana kebijakan program hibah sehingga memberikan peluang kepada individu tertentu untuk menyalahgunakan kebijakan program hibah RKB. Lingkungan politik memberikan sumbangsih dari ketidakberhasilan pelaksanaan program hibah RKB ini dan lingkungan sosial merespon dengan memanfaatkan kondisi tersebut.

Lingkungan sosial yang merupakan masyarakat pemantau pelaksana justru memanfaatkan peluang keterlibatan aktor lain dalam pelaksanaan kebijakan program RKB dengan melakukan tindak penipuan, sejauh orang tersebut mengetahui adanya program RKB. Kasus ini merugikan para peserta bimtek karena uang yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak ada kejelasan. Tentunya kasus tersebut menjadi masalah publik dimana adanya keterlibatan dari pihak yang dirugikan karena sangat membutuhkan program tersebut.

Lingkungan politik yang didefinisikan sebagai kepentingan anggota dewan tertentu sudah mengacaukan esensi dari implementasi *new public service* dimana setiap

implementasi kebijakan harus mengedepankan kepentingan publik. Kepentingan publik sudah jelas terpinggirkan demi kepentingan pribadi atau kelompok orang tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam buku “*bringing the public back in*” khususnya dilihat dari *perspective* warga negara bahwa pelayanan publik melalui program pemerintah harus memuliakan publik dimana didalamnya terdapat perhatian bersama bagi kebaikan bersama²².

E. Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* memiliki kekuatan yang akan memberikan keleluasaan pada sekolah-sekolah untuk terlibat dan secara langsung mengedepankan kepentingan publik. Disisi lain implementasi menggunakan pendekatan *bottom up* memiliki kelemahan seperti yang tercermin pada munculnya kemungkinan aktor lain yang terlibat dan dengan sengaja menyalahgunakan program hibah ini baik dari sisi lingkungan politik ataupun sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Buku panduan pelaksanaan Program Subsidi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bantuan hibah Gubernur Prov. Jabar berdasarkan jenjang/tingkatan sekolah di Prov. Jabar. Tahun anggaran 2013/2014.
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt, 2007, *New Public Service*, M.E., Sharpe Inc., Armonk, New York.
- Fariyeh, Ali, 1997, Metodologi Penelitian Sosial Dalam bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasasmita, PS., 2006, “*Binging the public back in*”: Revitalisasi Konsep Publik dalam pemikiran dan praktek Administrasi Publik di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta..
- Robert.K., Yin, 2002, Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sharan B, Merriam, 2002, *Qualitative Research in Practice (Part I: The nature of Qualitative Inquiry)*, John Wiley and Sons Ltd.
- Silalahi, Ulber, 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama, cetakan kedua April.
- Smith, Adam and Islamy, *Public Policy Implementation*,
- Suparmoko, M., Keuangan Negara dalam teori dan praktek, Edisi 5, BPFE – Yogyakarta : 2003.

Internet

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-shandydwip-24320-2-babii.pdf>

²² Kartasasmita, PS., 2006, “*Binging the public back in*”: Revitalisasi Konsep Publik dalam pemikiran dan praktek Administrasi Publik di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta.

<http://www.fokusjabar.com/2014/01/27/ini-himbauan-kpk-untuk-kepala-daerah/>,
http://www.nasional.kompas.com/read/2013/02/20/02070085/Hentikan.Dana.Ba_nsos
<http://www.nusantara.rmol.co/read/2014/01/29/141802/Pemprov-Jabar-Didesak-Umumkan-Nama-nama-Penerima-Hibah-dan-Bansos->
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/281968>
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/267578>

RPSEP-08

KEMISKINAN PROVINSI *VERSUS* KEMISKINAN KABUPATEN DI BALI

Tedi Erviantono
FISIP Universitas Udayana, Bali
Jl. PB Sudirman Bali
E-mail : erviantono2@yahoo.com

Abstrak

Kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki tingkatan beragam. Program solutif kemiskinan hanya cenderung didekati dengan pendekatan pembangunan sektoral yang realitasnya kurang bisa menjawab akar persoalan kemiskinan. Pada akhirnya, dengan kondisi ini Kabupaten / Kota di Bali masih terdapat pengeluaran penduduk miskin yang masih jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten / Kota masih memiliki gap cukup besar bahkan terdapat beberapa kabupaten yang kondisinya berada di bawah rata-rata indeks Provinsi Bali.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kabupaten/Kota, Provinsi Bali

A. Latar Belakang

Salah satu tolok ukur capaian kinerja Pemerintah Daerah adalah menurunnya prosentase pengentasan angka rumah tangga miskin yang ada di wilayahnya. Selama 14 tahun berjalannya otonomi daerah, beragam cara telah dilakukan Pemerintah Daerah guna mereduksi angka rumah tangga miskin ini. Desiminasi inovasi kerap menjadi program yang dikedepankan pemerintah daerah dalam mengatasi problematika kemiskinan. Target yang dituju tidak sekedar menerjemahkan program dekonsentrasi pemberian bantuan sosial pada rumah tangga miskin, melainkan pada diversifikasi program yang mengarah pada perluasan akses masyarakat terhadap kue perekonomian yang merujuk pada pemerataan pendapatan dan mengurangi pengangguran.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya melaksanakan beragam kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya lebih melihat kemiskinan sebagai permasalahan yang harus segera dituntaskan karena kondisinya membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat. Pada struktur anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, upaya penanggulan kemiskinan disolusikan dengan program sektoral terpadu, terintegrasi dan sinergis.

Penanggulangan kemiskinan ini beberapa diantaranya teraplikasi pada program instansi vertikal yang bersumber pendanaan dekonsentrasi di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, maupun ragam program pendanaan desentralisasi yang dijalankan SKPD pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Program pengentasan masyarakat miskin lebih dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Program sektoral holistik dengan kelompok sasaran masyarakat miskin ini dikembangkan pada beberapa program seperti perbaikan rumah tidak layak huni (bedah rumah), bantuan beras bagi rumah tangga miskin (raskin), PNPB Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa miskin, Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM), Jaminan Kesehatan Bali Mandara, Simantri, Gerbang Sadu, serta beragam program pengentasan kemiskinan lainnya.

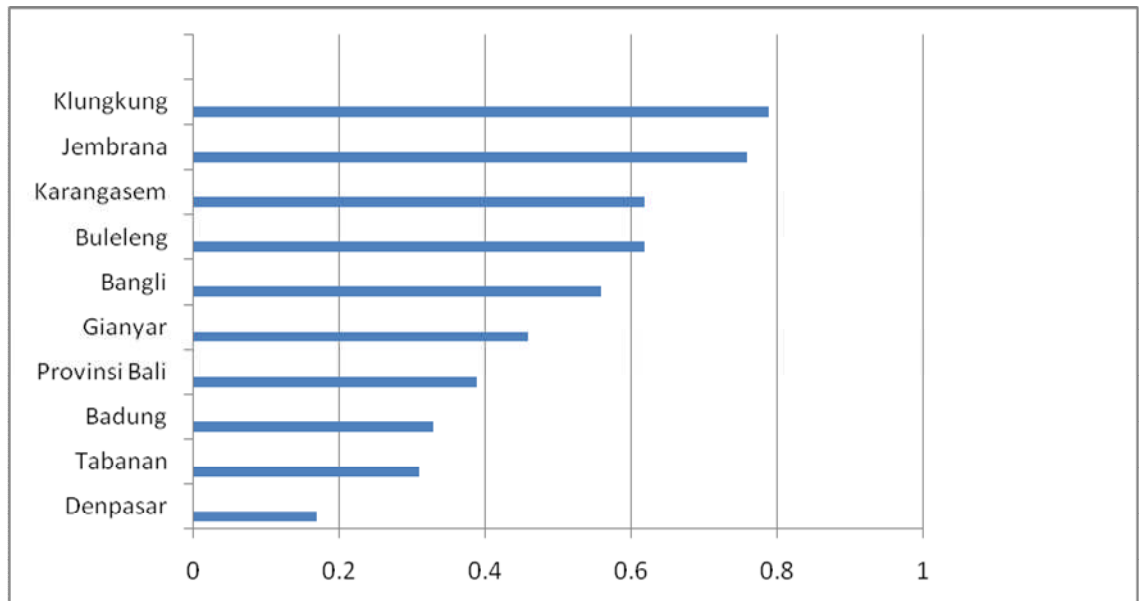
Meski pada pola perencanaan program pengentasan kemiskinan “diklaim” Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan ruang partisipasi masyarakat miskin dalam mendesain program, hanya saja realitasnya banyak program yang dirasakan kelompok sasaran tidak berimplikasi pada penurunan prosentase angka kemiskinan. Penurunan prosentase ini lebih banyak disandarkan pada rilis data SUSENAS dimana jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan yakni berjumlah 29,132.40 juta pada tahun 2012. Hanya saja, saat data Susenas ini masih harus ditinjau ulang apabila didekati dengan indikator kemiskinan pemenuhan hak dasar, seperti kesempatan kerja dan berusaha, akses pendidikan, akses layanan kesehatan, dan kecukupan dan mutu pangan, selisih angka prosentasenya masih cukup tinggi (Nasir, 2013).

B. Pembahasan

Salah satu gejala yang muncul pada prosentase pengentasan kemiskinan di tingkat Provinsi tidak selamanya inheren dengan tingkat prosentase kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Meski angka kemiskinan di level provinsi turun, namun tidak senantiasa menunjukkan trend penurunan serupa di tingkat kabupaten/kota. Pada Provinsi Bali, berdasarkan catatan BPS menunjukkan hingga tahun 2013 tingkat kemiskinan mencapai 0,13 persen. Namun data kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota selama kurun tahun 2012-2013 menunjukkan rentang rata-rata pengeluaran penduduk miskin di setiap kabupaten / kota masih cenderung tinggi (Bappeda Karangasem, 2014).

Tabel 1

Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali



Dalam memahami angka prosentase riil pengentasan kemiskinan atau tren naik turunnya jumlah penduduk miskin, lebih tepat dilihat pada level Kabupaten/Kota. Pada tingkatan wilayah inilah pemenuhan hak dasar kebutuhan sejatinya langsung terakses warga sehingga searah pula dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengentaskan rumah tangga miskin. Hanya saja pada konteks ini, penanganan problematika kemiskinan tidak sekedar memberikan program bersifat jangka pendek, melainkan efektifitas pemerintah, --baca : eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif (DPRD)--, menghasilkan regulasi pro perlindungan/pemberdayaan masyarakat miskin. Rilis Indonesia Governance Index (IGI) tahun 2013 misalnya mencatat 72% Pemerintah Daerah pada level Kabupaten Kota cenderung abai dalam menghasilkan kebijakan yang memberi perlindungan/pemberdayaan bagi masyarakat miskin. Pengelolaan program didekati hanya melalui program sektoral berjangka pendek, tanpa memberikan regulasi pengaman atas kesinambungan program itu sendiri (Kemitraan, 2013).

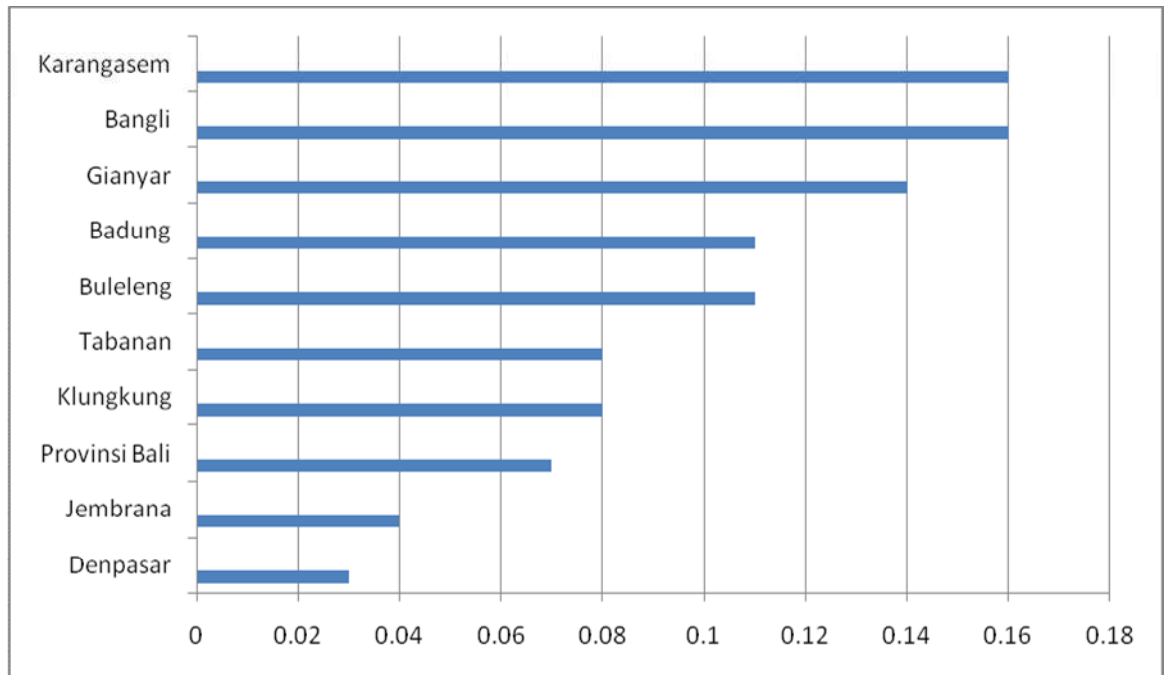
Penjelasan kondisi ini terlihat pada minimnya pembahasan materi rancangan peraturan daerah tentang dalam program legislasi daerah hingga pada problematika tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat miskin dalam visi misi kepala daerah yang terjabar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk menjamin kontinuitas keberlangsungan program di dalamnya. Program penanganan kemiskinan yang tersaji pada anggaran publik Kabupaten Kota setiap tahunnya hanya sekedar membagi kail, bukan umpan yang memberdayakan rumah tangga miskin.

Berdasarkan catatan Indeks Governance Indonesia (2013), meski usaha pengentasan rumah tangga miskin Provinsi Bali terformat pada program besar Bali Mandara, namun indeks capaian rata-rata kinerja efektifitas Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan sebesar 4,71 dengan kategori cenderung buruk. Capaian indeks ini diakibatkan beragam hal. Pertama, masih adanya ketimpangan distribusi pembangunan kabupaten/kota di Bali, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan antar daerah. Perekonomian Bali yang bertumpu pada ekonomi tersier (*services sector*) menempatkan terkonstrasinya pertumbuhan ekonomi sebagian besar pada wilayah Bali bagian selatan. Kedua, derasnya arus migrasi membawa konsekuensi menjamurnya kemiskinan baru di Bali, sehingga hal ini berpengaruh pada kondisi kependudukan yang relatif padat, yaitu rata-rata mencapai 705 jiwa per km² dengan besaran Human Development Index (HDI) Provinsi Bali adalah sebesar 72.84.

Pada potret ini salah satunya bisa dijelaskan pula pada penerapan prinsip keadilan tata kelola Pemerintah Provinsi Bali. Pada setiap tahun anggaran, Bali sebenarnya memiliki komitmen pendanaan penanganan kemiskinan perkapita di APBD cukup besar. APBD Provinsi Bali tahun 2011 misalnya, dana yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan terbesar kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 365.756.67. Beberapa program yang teraplikasi, antara lain, Jaminan Kesehatan Bali Mandara, Bedah Rumah, Beasiswa kaum miskin, dll. Program ini, meski bukan penjelas tunggal, mereduksi angka kemiskinan di Provinsi Bali hingga 4,59%.

Kondisi ini sejalan pula dengan capaian skor 10.00 untuk prinsip akuntabilitas, khususnya pada indikator rasio belanja hibah/subsidi dan bantuan sosial terhadap belanja barang/jasa dan modal. Jadi pada hakekatnya, Provinsi Bali sebenarnya memiliki komitmen tinggi untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, sebagai konsekuensi masuknya industrialisasi pariwisata yang cukup pesat di pulau ini (Erviantono, 2012). Hanya saja kondisinya justru berbalik dengan beberapa kabupaten di Provinsi Bali. Salah satu bentuk ketimpangan distribusi pembangunan kabupaten/kota di Bali tercermin pada indeks keparahan kemiskinan versi BPS Provinsi Bali 2013 sebagai berikut (Bappeda Karangasem, 2013):

Tabel 2
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2012



Tabel diatas menggambarkan bahwa terdapat penduduk miskin yang pengeluarannya berada di atas rata-rata pengeluaran penduduk miskin namun tidak sedikit pula yang pengeluarannya masih jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Pada pemaknaan yang lebih tegas bahwa masih terdapat penduduk yang lebih miskin di antara penduduk miskin. Mencermati tabel diatas pula, menyiratkan bahwa pada Kabupaten / Kota di Bali masih terdapat pengeluaran penduduk miskin yang masih jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Bahkan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten / Kota masih memiliki gap cukup besar bahkan terdapat beberapa kabupaten yang kondisinya berada di bawah rata-rata indeks Provinsi Bali yang capaiannya antara 0,13-0,16. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat Keparahan Kemiskinan di beberapa Kabupaten disandang Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Karangasem, yang mana di bawah indeks Provinsi Bali sebesar 0,07

Menyandingkan rilis temuan IGI dengan data BPS memberikan gambaran bahwa di beberapa Kabupaten tersebut masih dimungkinkan adanya ketimpangan distribusi pembangunan yang menyertakan penduduk / rumah tangga miskin. Meski Kabupaten ini merupakan wilayah yang berada di kawasan selatan dan timur Bali yang “seharusnya” memiliki angka pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun kondisi ini tak sebanding dengan tingkat pengeluaran warga miskin yang masih jauh di bawah rata-rata pengeluaran warga miskin lainnya.

Pendekatan penanganan program kesejahteraan bagi rumah tangga miskin selama ini sekedar disandarkan pada hitungan kuantitatif yang bersifat cacah jiwa, bukan penilaian persepsional kelompok sasaran. Penilaian atas persepsi sangat penting mengingat pada penilaian ini menyangkut penilaian persepsi mendalam mengenai program dan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan yang dirasakan tepat sasaran termasuk harapan dari kalangan ini. Penilaian persepsional di kalangan rumah tangga miskin diharapkan dapat meletakkan secara tepat dan komprehensif penyebab masalah kemiskinan pada sebuah wilayah sekaligus upaya-upaya solutifnya.

Pada konteks ini, Kepala Daerah dan DPRD, baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, harus senantiasa bersinergi dalam menentukan prioritas unggulan pembangunan daerah. Terlebih pula peran Gubernur sebagai wakil pusat di Daerah lebih ditonjolkan, agar arah gerak Kabupaten / Kota lebih sinergis dan terkoordinasi, sehingga ragam kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten/Kota tidak kontraproduktif dengan kebijakan Provinsi yang mana cenderung merugikan masyarakat luas.

Selain itu pula, Pemerintah Daerah harus memahami bahwa faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan adalah pemerataan pendapatan serta memperluas akses masyarakat terhadap 'kue' perekonomian guna mengurangi pengangguran. Hal ini mengingat bahwa perluasan akses terhadap kue ekonomi akan berkorelasi dengan nilai positif dalam mereduksi peningkatan angka rumah tangga miskin.

C. Kesimpulan

Kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki tingkatan yang beragam. Pada konteks ini, program solutif kemiskinan hanya cenderung didekati dengan pendekatan pembangunan sektoral yang realitasnya kurang bisa menjawab akar persoalan kemiskinan. Kabupaten / Kota di Bali masih terdapat pengeluaran penduduk miskin yang masih jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten / Kota masih memiliki gap cukup besar bahkan terdapat beberapa kabupaten yang kondisinya berada di bawah rata-rata indeks Provinsi Bali. Pola penanganan komprehensif dan lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir, Muhammad, 2013. Indikator dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara, Aceh : Politeknik Negeri Lhokseumawe;

- Erviantono, Tedi, 2013. Laporan Indonesia Governance Index 2012 Provinsi Bali. Jakarta: Kemitraan;
- Wakil Bupati Karangasem. 2014. Paparan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem. Karangasem : Bappeda;
- Bali dalam Angka Tahun 2012 dan 2013.

RPSEP-09

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Dudi Wahyudi
Pusdiklat Pajak
dudi.wahyudi@depkeu.go.id

Abstract

This study aims to find out how corporate governance and tax audit activity influence corporate tax avoidance activity in companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2012. The samples are manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2012 as many as 42 companies. This study uses multiple regression analysis to test the influence of element of corporate governance and tax audit on tax avoidance activity. The results show that the audit committee significantly influence the tax avoidance activity as measured by Cash Effective Tax Rate. However this study show that tax avoidance activity is not significantly influenced by the proportion of independent commissioner, audit quality and tax audit.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, independent commissioner, audit committee, audit quality, tax audit.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatakelola perusahaan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Sampel yang digunakan adalah 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh elemen tatakelola perusahaan dan pemeriksaan pajak terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate. Namun demikian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh proporsi komisioner independen, kualitas audit dan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci: tax avoidance, corporate governance, komisioner independen, komite audit, kualitas audit, pemeriksaan pajak.

Pendahuluan

Setelah Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, peranan *Good Corporate Governance* (GCG) dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan kepada dunia bisnis. Penerapan GCG terutama penting bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola dana publik seperti perusahaan yang terdaftar di bursa efek, perusahaan perbankan, dan perusahaan BUMN. Penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik sehingga dapat membantu perekonomian secara makro.

Di sisi lain, pajak merupakan hal penting lain dalam perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu menyediakan barang-barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, maupun sekolah memiliki peranan besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sarana dan prasarana seperti ini harus disediakan oleh negara yang dananya berasal dari masyarakat, baik individu maupun perusahaan, dalam bentuk pajak.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu biaya yang harus dikeluarkan. Seperti biaya yang lain, perusahaan pada umumnya akan meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada negara supaya dapat memaksimalkan laba. Penghematan pajak merupakan sumber dana penting bagi perusahaan sebagai pengganti pinjaman dari kreditur. Untuk mengurangi beban pajak ini perusahaan dapat menempuh dua cara yaitu melalui *tax evasion* atau melalui *tax avoidance*. Mengurangi pajak melalui *tax evasion* adalah melanggar hukum. Sanksi pidana adalah ancaman hukumannya. Sebaliknya, aktivitas *tax avoidance* pada umumnya tidak melanggar hukum. Perusahaan berisiko akan dikenakan sanksi administrasi bila melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh penerapan GCG terhadap aktivitas *tax avoidance* menjadi salah satu topik penelitian yang cukup menarik di bidang akuntansi. Penelitian yang dilakukan Irawan and Farahmita (2013) menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Namun demikian, ternyata berdasarkan penelitian Annisa and Kurniasih (2012), tidak semua mekanisme GCG berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hanya jumlah Komite Audit dan kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Konsentrasi kepemilikan institusional, prosentase Dewan

Komisaris, dan jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012). Hanum and Zulaikha (2013) juga menunjukkan bahwa karakteristik GCG yang diwakili oleh komisaris independen, komite audit dan investor institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Minnick dan Noga (2010) dalam C. Armstrong, Blouin, Jagolinzer, and Larcker (2013) juga menemukan sedikit bukti bahwa *corporate governance* berasosiasi dengan *tax avoidance*. Hasil yang kurang konsisten ini membawa penulis kepada kesimpulan bahwa mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Penulis menduga bahwa aktivitas pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*.

Pengukuran GCG juga mungkin menjadi penyebab ketidakkonsistenan hasil penelitian. Proksi GCG dengan menggunakan struktur GCG seperti komisaris independen, komite audit, dan jumlah dewan komisaris mungkin belum sepenuhnya menggambarkan implementasi GCG di perusahaan. Untuk mengukur implementasi GCG secara menyeluruh, sebaiknya menggunakan indeks CG atau *ASEAN Corporate Governance Scorecard* sebagai proksi dari penerapan GCG di perusahaan. Namun demikian, mengingat terbatasnya sampel jika menggunakan ukuran ini, karakteristik GCG berupa komisaris independen, jumlah komite audit dan kualitas audit masih tetap digunakan untuk menguji kembali pengaruhnya terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris hubungan antara penerapan GCG terhadap aktivitas *tax avoidance* oleh perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

B.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976), manajer sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Agar Manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, manajer diberi insentif yang cukup dan dengan mengeluarkan biaya monitoring untuk membatasi penyimpangan oleh manajer. Dalam

teori keagenan, masalah keagenan timbul karena diasumsikan bahwa manajer bertindak *self interest*. Untuk itu muncul biaya-biaya keagenan untuk mengatasi masalah ini. Penerapan GCG di perusahaan merupakan salah satu cara mengurangi masalah keagenan di antara manajer perusahaan dan pemegang saham.

Keputusan Manajer untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* merupakan salah satu masalah keagenan. Penghematan pajak dari *tax avoidance* merupakan sumber pendanaan murah bagi perusahaan (C. S. Armstrong, Blouin, & Larcker, 2012) dan manfaat *tax avoidance* secara ekonomi cukup besar (Scholes et al., 2009 dalam C. Armstrong et al. (2013)). Namun demikian, tindakan *tax avoidance* yang agresif dapat diikuti dengan biaya baik yang terlihat seperti denda atau biaya legal, atau juga biaya yang tidak terlihat seperti risiko yang besar dan reputasi perusahaan (C. Armstrong et al., 2013).

Seperti juga keputusan manajer lainnya, keputusan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi manajer (misalnya kepentingan terhadap laba yang tinggi). Namun demikian, bisa saja keputusan ini bukan merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajer mungkin saja hanya mengambil keputusan *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka pendek. Pemegang saham di sisi lain akan memandang dari sudut pandang kepentingan jangka panjang. Dari sinilah muncul masalah keagenan di mana kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer.

B.2 Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2006), GCG diperlukan untuk mendukung terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. GCG juga harus jelas memisahkan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang melakukan pengawasan, pembuat peraturan dan otoritas penegakan hukum (OECD, 2004).

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006). Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*).

Dalam menerapkan asas transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Asas responsibilitas mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.

Dalam melaksanakan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen di mana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Sementara itu, berdasarkan *OECD Principles of Corporate Governance* (OECD, 2004), terdapat lima prinsip penerapan GCG yaitu hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan, perlakuan yang adil di antara pemegang saham, peran dari pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan prinsip-prinsip CGC OECD ini, perusahaan harus memastikan pondasi penerapan CGC efektif. Penerapan CGC semestinya mendorong transparansi dan pasar yang efisien, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memberikan kejelasan pembagian tanggung jawab di antara otoritas pengawasan, pembuat aturan, dan penindakan. Penerapan CGC harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Dalam menerapkan CGC, perusahaan harus memperlakukan secara adil di antara pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

Perusahaan harus mengakui hak pemangku kepentingan yang dibangun berdasarkan hukum atau kesepakatan bersama. Penerapan GCG juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dilakukan untuk semua hal yang material

yang berkaitan dengan perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tatakelola perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis bagi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen, dan tanggung jawab Direktur dan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

B.3 Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2001). Dengan kata lain *Tax Avoidance* adalah *Tax Planning* yang bertujuan merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang (Suandy, 2001). Istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga skema tersebut legal (Darussalam & Septriadi, 2008).

Penghematan pajak dari aktivitas *tax avoidance* dapat merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan sebagai alternatif dari pendanaan dari pihak ketiga. Walaupun aktivitas *tax avoidance* memiliki manfaat secara finansial, *aggressive tax planning* juga memunculkan risiko timbulnya biaya bagi perusahaan berupa *observable cost* seperti denda dan biaya legal serta *non observable cost* seperti risiko yang berlebihan dan menurunnya reputasi perusahaan (C. Armstrong et al., 2013).

Masih sedikit penelitian yang secara langsung menguji bagaimana *corporate governance* mempengaruhi *tax avoidance* (C. Armstrong et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap perilaku *tax avoidance* dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2013), Annisa dan Kurniasih (2012) dan Hanum and Zulaikha (2013). Irawan dan Farahmita (2013) menemukan bahwa jumlah kompensasi kepada Direktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Mereka menemukan juga bahwa pengaruh kepemilikan manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan adalah sangat signifikan dan sifat hubungan adalah negatif serta implementasi *corporate governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari konsentrasi kepemilikan institusional, prosentasi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris terhadap aktivitas *tax avoidance*. Namun demikian, ditemukan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hanum and Zulaikha (2013) bahkan tidak menemukan pengaruh signifikan *corporate governance* terhadap *effective tax rate* (ETR) di mana ETR ini juga bisa digunakan proksi aktivitas *tax avoidance*.

B.4 Pemeriksaan Pajak

Dalam konteks perpajakan Indonesia, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²³ Pemeriksaan pajak bertujuan terutama untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem *self assesment* pada sistem perpajakan Indonesia menempatkan pemeriksaan pajak sebagai instrumen vital dalam mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Produk hukum pemeriksaan pajak adalah berupa surat ketetapan pajak (*tax assesment letter*). Terdapat tiga jenis surat ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak masih terdapat kekurangan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan jika berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak masih memiliki kelebihan pembayaran pajak sehingga berhak atas restitusi pajak. SKPN diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak terutang pajak dan tidak terdapat kredit pajak.

B.5 Hubungan GCG Dengan Tax Avoidance

Perusahaan dengan penerapan GCG yang baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer. Manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena dengan penerapan GCG maka perusahaan akan lebih transparan sehingga masalah kesenjangan informasi (*information asymetry*) bisa teratasi. Asas-asas lain dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia seperti akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan juga dapat mengurangi masalah keagenan. Dengan demikian, penerapan GCG juga akan mempengaruhi

²³ Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

aktivitas *tax avoidance* karena masalah *tax avoidance* juga merupakan masalah keagenan.

Transparansi akan menyediakan informasi bukan hanya yang diwajibkan oleh ketentuan, tetapi juga informasi-informasi relevan lain yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan transparansi dan keterbukaan maka pihak luar perusahaan dapat mengakses informasi penting persusahaan, termasuk informasi perpajakan. Aktivitas *tax avoidance* memang memberikan manfaat bagi perusahaan tetapi juga membawa risiko yang besar.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* bisa terjadi karena manajemen dinilai prestasinya berdasarkan kinerja laba. Keputusan manajemen yang penuh risiko tidak akan dikehendaki oleh pemegang saham karena pemegang saham cenderung berpandangan dalam jangka panjang. Prinsip keterbukaan dan transparansi memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui keputusan manajemen dengan segera. Melalui mekanisme RUPS misalnya, pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajemen yang lebih mementingkan *self interest*. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam penerapan GCG akan membuat manajemen melakukan *tax avoidance* dalam tingkat yang lebih rendah.

Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dengan asas ini manajemen perusahaan akan terdorong untuk selalu menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan karena tindakan manajemen akan selalu terawasi dan termonitor. Di sisi lain, asas tanggung jawab mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan prinsip ini perusahaan akan menjadi warga masyarakat yang baik.

Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas dan tanggung jawab juga akan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan pajak. Dengan akuntabilitas, keputusan manajemen akan dipertanggungjawabkan, termasuk keputusan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Dengan asas tanggung jawab manajemen akan

mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengukur penerapan GCG dalam perusahaan sebaiknya menggunakan indeks CG ataupun CG *Scorecard* sehingga dapat lebih menjelaskan penerapan CG secara keseluruhan. Namun demikian, data sampel yang memiliki indeks CG dan CG *Scorecard* sangat terbatas. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan proksi penerapan CG berupa proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit sebagaimana dilakukan oleh Annisa and Kurniasih (2012) dan Hanum and Zulaikha (2013).

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dengan demikian keberadaan Dewan Komisaris relevan dengan masalah keagenan prinsipal-agen dalam konteks *monitoring cost*. Hal ini berarti juga keberadaan Dewan Komisaris mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Apabila Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik, masalah keagenan pemegang saham dan manajemen bisa teratasi. Lebih jauh lagi, supaya tugas Dewan Komisaris bisa efektif dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, keberadaan komisaris independen diperlukan. Menurut UU PT, komisaris independen diangkat diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak berafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dapat mengatasi masalah keagenan dan mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan *tax avoidance* yang dilakukan direksi.

B.6 H1a: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor KEP-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dengan demikian, keberadaan komite audit membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan kepada direksi. Apabila komite audit efektif melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kualitas pengawasan Dewan Komisaris akan lebih baik sehingga dapat membantu penyelesaian permasalahan keagenan dalam perusahaan. Hal ini

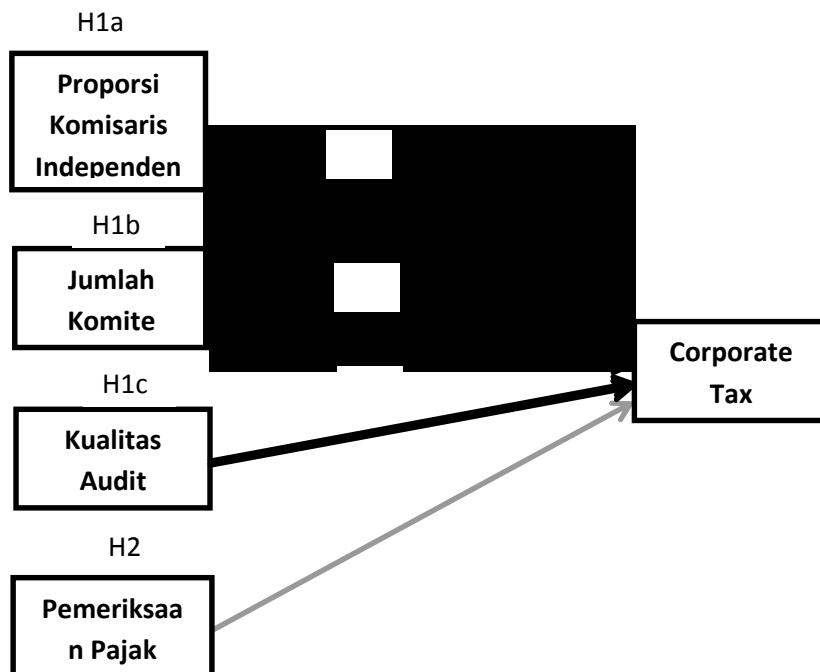
berarti bahwa keberadaan komite audit mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Aktivitas tax avoidance yang dilakukan direksi diharapkan dapat berkurang dengan adanya komite audit.

B.7 H1b: Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Aktivitas audit yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja dari manajemen. Dalam konteks keagenan, aktivitas pengauditan juga akan mengatasi masalah kesenjangan informasi (*information asymetry*) yang terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian aktivitas pengauditan merupakan pencerminan penerapan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip penerapan GCG. Kualitas audit yang baik akan membantu menyelesaikan masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam masalah keputusan *tax avoidance*.

B.8 H1c: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Hubungan Pemeriksaan Dengan Tax Avoidance



Gambar 1 Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel

Pada umumnya perilaku Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh seberapa efektif pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak. Jumlah pemeriksa pajak di Indonesia hanya 4.337 orang.²⁴ Jumlah ini sangat kurang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sehingga dapat dikatakan bahwa risiko terdeteksi bagi Wajib Pajak sangat kecil. Pada gilirannya hal ini dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan. Dengan logika yang sama, apabila aktivitas pemeriksaan pajak kurang maka Wajib Pajak perusahaan kemungkinan akan melakukan *tax avoidance* dengan tingkat yang lebih besar. Penelitian Hoopes, Mescall, and Pittman (2012) terhadap perusahaan publik Amerika Serikat menemukan bukti bahwa perusahaan akan kurang agresif dalam melakukan *tax avoidance* ketika penegakan hukum (*law enforcement*) lebih tegas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

B.9 H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, aktivitas *tax avoidance* diukur dengan menggunakan CashETR, yaitu jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar dibagi dengan laba akuntansi sebelum PPh. CashETR menunjukkan tarif efektif PPh yang dibayar dibandingkan dengan laba akuntansi sebelum PPh. Nilai CashETR yang besar menunjukkan bahwa perusahaan kurang melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya nilai CashETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* yang lebih besar.

Untuk mengukur *tax avoidance*, pada umumnya digunakan data-data keuangan dari laporan keuangan. Sebagian besar pengukuran *tax avoidance* berdasarkan data laporan keuangan karena data SPT tidak terpublikasi kepada masyarakat (Hanlon & Heitzman, 2010). Dengan demikian pengukuran *tax avoidance* didasarkan kepada laporan keuangan yang terpublikasi kepada masyarakat.

Dalam menghitung Cash ETR, jumlah pajak yang dibayar diambil dari angka pembayaran pajak dalam laporan arus kas. Sementara itu, angka laba sebelum pajak diambil dari laporan rugi laba.

Penggunaan variabel Cash ETR digunakan juga oleh Irawan and Farahmita (2013). Di sisi lain proksi *tax avoidance* yang digunakan oleh Annisa and Kurniasih (2012) adalah

²⁴<http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12554&q=&hlm=1>

Book Tax Gap (BTG) yang merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan rugi laba dengan laba fiskal. Sementara itu Hanum and Zulaikha (2013) menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel terikat yang merupakan jumlah beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak.

Penerapan GCG diwakili oleh tiga ukuran yaitu proporsi komisaris independen, jumlah komite audit dan kualitas audit sebagaimana dilakukan oleh Annisa and Kurniasih (2012). Proporsi komisaris independen dihitung dengan cara membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Kualitas audit diukur dengan apakah laporan keuangan perusahaan sampel diaudit oleh KAP *Big Four* atau tidak. KAP *Big Four* adalah Erns't & Young, Price Waterhouse, KPMG dan Delloitte.

Untuk mengukur aktivitas pemeriksaan pajak, penulis meneliti dalam laporan keuangan apakah tahun sebelumnya dilakukan pemeriksaan atau tidak. Indikasi dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bisa diketahui dari adanya SKPKB, SKPLB atau SKPN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan.

Variabel pengendali (*control variable*) yang digunakan adalah tingkat *leverage* yaitu jumlah hutang jangka panjang dibagi total asset dan kepemilikan publik. Penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar karena beban bunga dari hutang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*). Kepemilikan publik dijadikan variabel pengendali karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang kepemilikan saham publiknya lebih dari 40% mendapatkan pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5%. Jadi, besarnya kepemilikan publik akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Penggunaan variabel pengendali ini belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian tentang *tax avoidance* di Indonesia sebelumnya.

Model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{CashETR} = \beta_0 + \beta_1 \text{KOMIN} + \beta_2 \text{KOMAU} + \beta_3 \text{KUAL} + \beta_4 \text{TAXAU} + \beta_5 \text{LEV} + \beta_6 \text{PUB} + \varepsilon$$

di mananotasi di atas penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. CashETR adalah Pajak Penghasilan yang dibayar dalam satu tahun dibagi dengan laba sebelum pajak. CashETR merupakan proksi dari pengukuran tax avoidance.
- b. KOMIN adalah proporsi komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris.
- c. KOMAU adalah jumlah anggota komite audit.
- d. KUAL adalah kualitas audit yang merupakan *dummy variable* di mana jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* diberi nilai 1 dan jika perusahaan diaudit bukan oleh KAP *Big Four* diberi nilai 0.
- e. LEV adalah tingkat penggunaan hutang oleh perusahaan yang diukur dengan perbandingan jumlah hutang jangka panjang dibandingkan dengan total asset. LEV merupakan *control variable* dalam penelitian ini.
- f. PUB merupakan *dummy variable* berupa kepemilikan saham oleh publik. Perusahaan yang kepemilikan saham publiknya lebih dari 40% diberi nilai 1 dan yang kepemilikan saham publiknya kurang dari 40% diberi nilai 0.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI dengan periode amatan tahun 2012. Metode pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*. Kriteria pengambilan sampel adalah:

- a. perusahaan manufaktur selain *real estate/properti* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia,
- b. memiliki data laporan keuangan dan annual report tahun 2012,
- c. Nilai Cash ETR di antara 0 dan 1,
- d. tidak mengalami kerugian pada tahun 2012,
- e. tidak mengalami kerugian pada tahun 2011, dan
- f. laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Perusahaan *real estate/properti* tidak dijadikan sampel karena merupakan jenis kegiatan usaha yang perlakuan Pajak Penghasilannya berbeda, yaitu dikenakan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.

Hasil dan Pembahasan

D.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif masing masing variabel disajikan pada Tabel 1 untuk memberikan gambaran rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum dan deviasi standar dari perusahaan yang menjadi sampel.

Tabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata CashETR adalah 0,283143 atau sekitar 28,31% dengan standar deviasi 0,173110 atau 17,31%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan dalam sampel membayar pajak sebesar 28,31% dari laba sebelum pajak. Apabila dibandingkan dengan tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan pada tahun pajak 2012 yang sebesar 25%, maka terlihat bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan ini membayar pajak lebih besar dari tarif Pajak Penghasilan yang berlaku. Selisih sebesar 3,31% sangat mungkin disebabkan oleh adanya koreksi-koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	CashETR	KOMIN	KOMAU	KUAL	TAXAU	LEV	PUB
Mean	0.283143	0.38579	3.26190	0.40476	0.50000	0.09401	0.35714
		3	5	2	0	1	3
Median	0.254816	0.33333	3.00000	0.00000	0.50000	0.03530	0.00000
		3	0	0	0	0	0
Maximum	0.966784	0.66666	7.00000	1.00000	1.00000	0.40858	1.00000
		7	0	0	0	9	0
Minimum	0.010194	0.25000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		0	0	0	0	0	0
Std. Dev.	0.173110	0.09253	0.73449	0.49679	0.50606	0.12458	0.48496
		3	9	6	1	6	6

Proporsi komisaris independen memiliki rata-rata 0,3858 dengan nilai terendah 0,2500 dan nilai tertinggi 0,6667. Adapun nilai standar deviasinya adalah 0,0925. Dengan

demikian secara umum perusahaan-perusahaan dalam sampel memiliki proporsi komisaris independen sebesar 38,58%.

Jumlah komite audit secara rata-rata adalah 3,26 dengan jumlah terendah adalah 3 orang sesuai ketentuan dan jumlah tertinggi adalah 7 orang. Sementara itu jumlah rata-rata nilai kualitas audit adalah 0,4047 dan nilai rata-rata pemeriksaan pajak adalah 0,5000.

D.2 Uji Asumsi Klasik

Istilah multikolinieritas mengandung makna adanya hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen dari sebuah model regresi (Gujarati, 2004). Berikut ini adalah tabel korelasi di antara variabel independen dengan menggunakan program perangkat lunak Eviews 7.2.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

	KOMAU	KOMIN	KUAL	LEV	PUB	TAXAU
KOMAU	1.000000	0.120785	0.103445	-0.011419	0.073363	-0.164045
KOMIN	0.120785	1.000000	-0.064642	0.403898	-0.128895	0.064243
KUAL	0.103445	-0.064642	1.000000	-0.321156	-0.007231	0.048507
LEV	-0.011419	0.403898	-0.321156	1.000000	0.259935	0.043102
PUB	0.073363	-0.128895	-0.007231	0.259935	1.000000	-0.248452
TAXAU	-0.164045	0.064243	0.048507	0.043102	-0.248452	1.000000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada korelasi yang besarnya lebih dari 0,5 di antara variabel-variabel independen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan terbebas dari masalah multikolinieritas karena tidak terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebas.

Model persamaan regresi juga harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Masalah ini timbul karena adanya masalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua amatan pada sebuah model regresi. Untuk menguji apakah model persamaan regresi memiliki masalah ini, uji *White Heteroscedasticity* dapat digunakan. Berikut adalah hasil uji *White Heteroscedasticity* dengan menggunakan program Eviews 7.2

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.734037	Prob. F(6,35)	0.6256
Obs*R-squared	4.694354	Prob. Chi-Square(6)	0.5836
Scaled explained SS	12.87269	Prob. Chi-Square(6)	0.0451

Karena nilai p-value Obs*R-squared adalah 0,5836 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α 5%, maka model persamaan regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

D.3 Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program Eviews 7.2 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 Uji Hipotesis

Dependent Variable: CashETR				
Method: Least Squares				
Date: 06/05/14 Time: 11:36				
Sample: 1 42				
Included observations: 42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.036064	0.149654	0.240980	0.8110
KOMIN	-0.117189	0.296488	-0.395257	0.6951
KOMAU	0.094154	0.033459	2.813972	0.0080
KUAL	0.038670	0.051476	0.751220	0.4575
TAXAU	0.053332	0.049683	1.073442	0.2904
LEV	-0.172424	0.238722	-0.722279	0.4749
PUB	-0.114631	0.055203	-2.076544	0.0453
R-squared	0.339376	Mean dependent var	0.283143	
Adjusted R-squared	0.226126	S.D. dependent var	0.173110	

S.E. of regression	0.152285	Akaike info criterion	-0.775118
Sum squared resid	0.811672	Schwarz criterion	-0.485507
Log likelihood	23.27748	Hannan-Quinn criter.	-0.668964
F-statistic	2.996702	Durbin-Watson stat	2.615805
Prob(F-statistic)	0.018078		

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan program Eviews 7.2 diperoleh hasil bahwa hipotesis bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tidak dapat diterima. Hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hal ini bisa diketahui karena nilai signifikansi sebesar 0,691 yang lebih besar dari nilai α 5%. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Annisa and Kurniasih (2012). Komisaris independen juga terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate/ETR* (Hanum & Zulaikha, 2013).

Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Mungkin yang bisa mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan *tax avoidance* adalah apabila komisaris independen memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan, bukan sekedar eksistensi dan jumlah dari komisaris independen. Seorang komisaris independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi aktivitas *tax avoidance*.

Nilai signifikansi variabel KOMAU yang mewakili jumlah anggota komite audit adalah 0,0080. Nilai ini lebih kecil dari nilai α 5%. Dengan demikian hipotesis bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dapat diterima. Kemudian hasil ini dapat menyimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit maka perusahaan akan semakin kurang melakukan aktivitas *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka perusahaan semakin meningkatkan aktivitas *tax avoidance*. Annisa and Kurniasih (2012) menemukan hal yang sama bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Hanum and Zulaikha (2013) yang mendapatkan kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR.

Untuk variabel KUAL yang mewakili kualitas audit, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,4575 yang berarti lebih besar dari nilai α 5%. Dengan demikian hipotesis H1c tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Annisa and Kurniasih (2012) di mana diperoleh bukti bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini dapat menjelaskan beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin memang tidak terdapat perbedaan kualitas audit antara pengauditan yang dilakukan oleh KAP *Big Four* atau bukan. Kedua, audit laporan keuangan mungkin tidak dapat menjadi alat untuk mendeteksi adanya aktivitas *tax avoidance*. Terakhir, mungkin kualitas audit yang dikukur dengan pengauditan oleh KAP tidak sepenuhnya dapat mencerminkan penerapan GCG khususnya prinsip transparansi.

Nilai signifikansi TAXAU yang mewakili variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,2904. Nilai ini lebih besar dari nilai α 5% sehingga hipotesis H2 tidak dapat diterima. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa aktivitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis ini menunjukkan bahwa penelitian tentang pengaruh pemeriksaan terhadap aktivitas *tax avoidance* perlu lebih mempertajam lagi definisi operasional variabel, baik variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak, maupun variabel terikatnya yaitu *tax avoidance*. Perlu dicari proksi yang tepat untuk dapat menggambarkan keduanya secara lebih tepat.

Nilai signifikansi untuk variabel leverage (LEV) adalah 0,4749. Angka yang lebih besar dari alpha 5% menunjukkan bahwa variabel pengendali berupa tingkat leverage (LEV) ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CashETR). Hal ini mungkin disebabkan bahwa nilai hutang jangka panjang sampel perusahaan relatif tidak besar sehingga efek pengurang biaya bunga sebagai pengurang pajak tidak begitu signifikan berpengaruh terhadap CashETR.

Variabel pengendali berupa kepemilikan publik terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,0453 yang masih lebih kecil dari tingkat signifikansi nilai α 5%. Perusahaan publik yang dimiliki sahamnya oleh publik melebihi 40% menggunakan kesempatan ini untuk memperkecil pajak dengan pengurangan tarif 5%.

Penutup

Penelitian ini mencoba menguji hipotesis bahwa pelaksanaan GCG dalam perusahaan dapat mengurangi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Penerapan GCG dalam perusahaan diwakili oleh tiga variabel yaitu proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini juga menguji hipotesis bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mengurangi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Pengujian dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan beberapa hasil pengujian. Pertama, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* akan semakin berkurang jika jumlah anggota komite audit bertambah. Sebaliknya aktivitas *tax avoidance* akan semakin meningkat apabila anggota komite audit berkurang.

Kedua, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak secara signifikan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh besarnya komposisi komisaris independen. Bisa pula dikatakan keberadaan komisaris independen tidak efektif mencegah pihak eksekutif perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Ketiga, ditemukan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Pengauditan oleh KAP *Big Four* atau bukan tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini menggunakan sampel 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan satu tahun amatan yaitu tahun 2012. Hal ini menyebabkan studi ini tidak dapat menggambarkan hubungan GCG dan pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance* secara umum untuk seluruh jenis industri dan pada tahun yang berbeda. Kedua, pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan proksi Cash ETR mungkin tidak dapat secara utuh mewakili aktivitas *tax avoidance*. Hal ini disebabkan data jumlah pembayaran pajak mungkin saja bukan pembayaran pajak untuk tahun yang sama dengan tahun amatan. Akan lebih baik lagi bila data pembayaran pajak adalah data pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 untuk tahun

2012 saja. Ketiga, pengukuran GCG masih menggunakan pengukuran parsial berupa proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit. Pengukuran ini belum dapat menggambarkan penerapan GCG secara menyeluruh. Terakhir, pengukuran variabel pemeriksaan pajak hanya berdasarkan data laporan keuangan dengan menggunakan *dummy variable*. Pengukuran seperti ini belum dapat menggambarkan kuantitas dan kualitas dari pemeriksaan pajak.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Pertama, sampel penelitian dapat diperluas tidak hanya perusahaan manufaktur dan tahun amatan bisa lebih diperpanjang. Kedua, pengukuran Cash ETR bisa dilakukan dengan menggunakan data pembayaran pajak yang terkait dengan tahun amatan. Ketiga, pengukuran GCG dilakukan dengan menggunakan indeks CGPI atau ASEAN CG *Scorecard* untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan GCG. Terakhir, pengukuran pemeriksaan pajak dilakukan secara rinci untuk beberapa tahun sebelumnya. Kualitas pemeriksaan pajak bisa diukur misalnya jumlah koreksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu, & Kurniasih, Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8, 95-189.
- Armstrong, Chris, Blouin, Jennifer, Jagolinzer, Alan, & Larcker, David. (2013). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper*(136).
- Armstrong, Christopher S, Blouin, Jennifer L, & Larcker, David F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1), 391-411.
- Darussalam, & Septriadi, Danny. (2008). *Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*: Danny Darussalam Tax Centre.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Hanlon, Michele, & Heitzman, Shane. (2010). A Review of Tax Research. <http://ssrn.com/abstract=1476561>
- Hanum, Hashemi Rodhian, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate: Studi Empiris Pasa BUMN Yang Terdaftar di BEI 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Hoopes, Jeffrey L, Mescall, Devan, & Pittman, Jeffrey A. (2012). Do IRS Audits Deter Corporate Tax Avoidance? *The Accounting Review*, 87(5), 1603-1639.

Irawan, Hendra Putra, & Farahmita, Aria. (2013). The Effect of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 16(1), 1-17.

Jensen, Michael C., & Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, V. 3(No. 4), pp. 305-360.

Jumlah Pegawai Pajak Tidak Ideal. (2012). from <http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12554&q=&hlm=1>

KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia: Komite Nasional Kebijakan Governance.

OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD.

Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak: Salemba Empat*.

RPSEP-10

ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Hery Susanto (herys@ut.ac.id)
Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

The local government finances performance is a parameter to assess the success or the failure of the implementation of local governments financial management strategies achievement policy. The overview on local government finances performance is reflected on the local government budget (APBD) that can be used as a measure of the capability of the local governments to finance the implementation of developmental tasks and the equitable distribution in developing its local potentials. Based on this, the research is formulated as whether there is performance development on local government finances in West Nusa Tenggara province in order to support the implementation of the regional autonomy. The purpose of this study was to determine the development of financial performance in the Province of West Nusa Tenggara fiscal year of 2003 - 2007.

This research is included as a descriptive research using object Local Government of West Nusa Tenggara Province as the object of the research. The secondary data needed is the local budget FY. 2003-2007. Data collection method used is documentation. Analysis of data used are: (1) the ratio of local self-reliance, (2) the ratio of local dependency, (3) the ratio of the degree of fiscal decentralization, (4) the ratio of effectiveness, and (5) efficiency ratios.

The results showed: (1) the ratio of local self-reliance was very low, (2) the ratio of local dependency on Central Government was very high, (3) the ratio of the degree of fiscal decentralization was fair, (4) the effectiveness ratio was very effective, and (5) the efficiency ratio was inefficient. Research limitations: this research was limited to the ratio analysis, which did not analyze the overall elements of the local government budget.

Keywords: local government financial performance, regional autonomy

Ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerah sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan masing-masing. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan bergesernya pusat-pusat

kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah.

Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah. Lahirnya kedua Undang-Undang tersebut, merupakan proses yang mengawali reformasi pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah. Misi utama Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukannya suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Kemampuan mengembangkan potensi daerah serta penggalian sumber-sumber dana yang potensial bertujuan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah berubah yaitu diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari potensi penerimaan asli daerah, retribusi atau pajak daerah, laba atau keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penerimaan lain yang dianggap sah dan potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mendefinisikan Kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sementara Indra Bastian (2006: 330) mengemukakan bahwa Kinerja, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Jadi kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai hasil-hasil keuangan yang telah dicapai

atau prestasi keuangan yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam periode waktu tertentu.

Selanjutnya Whittaker (1993), yang dikutip Indra Bastian (2006:330) mengungkapkan bahwa, pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Mardiasmo (2005:219) mendefinisikan kinerja sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan perencanaan atau anggaran yang telah dibuat. Perbandingan antara perencanaan dan aktualisasi yang tercapai, cukup tepat digunakan sebagai indikator kinerja, dimana nilai perencanaan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kinerja keuangannya tergolong baik atau tidak.

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu parameter dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pencapaian suatu strategi dalam pengelolaan keuangannya. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Beberapa penelitian mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilakukan di beberapa daerah seperti di Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Di Propinsi Jawa Timur diperoleh temuan studi: bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kecuali desentralisasi fiskal. Perubahan yang terjadi pada aspek desentralisasi fiskal adalah menurun yang berarti bahwa meskipun telah diterapkan otonomi daerah, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah belum meningkat. Di Kabupaten Lombok Barat yang

memfokuskan kajian apakah pemberlakuan otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pengukuran terhadap 4 (empat) aspek yaitu, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan APBD, kemandirian keuangan daerah, dan keserasian aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Hasil studi menyimpulkan bahwa pemberlakuan otonomi daerah belum dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dengan mengidentifikasi potensi daerah sebagai peluang baru untuk sumber-sumber penerimaan yang mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Perumusan masalah ini adalah: apakah terdapat perkembangan kinerja keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah? Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun anggaran 2003-2007 dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan menurut Halim (2001:127) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, yang dapat dianalisis menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD (Halim, 2001:126)

Masih menurut Halim (2001:126) penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Adapun kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada (Halim, 2001:127):

1. Kemandirian keuangan daerah

Ukuran ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman.

2. Ketergantungan

Tingkat ketergantungan disini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi.

3. Derajat desentralisasi fiskal

Ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

4. Efektivitas

Tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

5. Efisiensi

Tingkat efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kedua rasio, yaitu efektivitas dan efisiensi ini harus dipersandingkan untuk mendapat ukuran yang lebih baik.

Efektivitas APBD

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2005:132), bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Sementara menurut Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004:43), Efektivitas diartikan berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik,

sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efisiensi APBD

Mardiasmo (2005:132) pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya atau dana yang serendah-rendahnya.

Sementara Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004:43) mengemukakan efisiensi meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Efisien pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input output*, yaitu rasio dari *output* dan *input*;
2. Efisien pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
3. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*), dengan biaya (*input*) yang rendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Efisien dan efektivitas dalam kerangka APBD adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal mengacu pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM (1991:42-47) mengemukakan bahwa untuk menentukan corak ekonomi daerah digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan tingkat desentralisasi fiskal daerah), aparatur pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri dari aspek politik dan hukum. Adapun kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Baik
10,01 - 20,00	Baik
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Berikut formula untuk mengukur tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

4. Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efektifitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektifitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di Atas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100%	Efektif
80 % - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

5. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{(Pengeluaran) Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100%	Kurang Efisien
80 % - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

METODOLOGI

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003: 54) . Penelitian ini berupaya untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan oonomi daerah.

Penelitian dengan obyek penelitian Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2003-2007. Data tersebut diperoleh melalui cara dokumentasi. Data diperoleh dari informasi yang tertuang dalam: NTB dalam angka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

- (2) Rasio Ketergantungan :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi

(3) Rasio Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

(4) Rasio Efektifitas :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

(5) Rasio Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{(Pengeluaran) Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh formula perhitungan sebagai berikut:

1. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bagian dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 6. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio (%)
2003	124.496.493.551,00	281.782.599.742,00	44,18
2004	150.171.212.619,00	287.054.563.870,00	52,31
2005	195.261.610.771,00	317.953.298.000,00	61,41
2006	249.352.517.142,00	482.130.000.000,00	51,71
2007	332.740.920.618,00	525.605.000.000,00	63,3
Rata-rata	210.404.550.940,00	378.905.092.322,40	54,58

Sumber : Data diolah 2014

2. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Subsidi (Dana Perimbangan). Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 7. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Penerimaan Non Subsidi (Rp)	Rasio (%)
2003	130.281.420.328,14	177.222.858.963,84	73,51
2004	170.222.966.514,50	199.259.093.831,26	85,42
2005	196.166.682.030,99	278.850.239.762,98	70,34
2006	265.025.384.205,54	325.343.351.243,00	81,46
2007	314.005.708.561,96	397.874.706.083,88	78,92
Rata-rata	215.140.432.328,22	275.710.049.976,99	77,93

Sumber : Data diolah 2014

3. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal

Rasio tingkat desentralisasi fiskal Provinsi NTB selama tahun anggaran 2003-2007 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 8. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2003	130.281.420.328,14	459.005.458.705,84	28,38
2004	170.222.966.514,50	486.313.657.701,26	35

2005	196.166.682.030,99	596.803.537.762,98	32,86
2006	265.025.384.205,54	807.473.351.243,00	32,82
2007	314.005.708.561,96	923.479.706.083,88	34
Rata-rata	215.140.432.328,22	654.615.142.299,39	32,61

Sumber : Data diolah 2014

4. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas pendapatan Provinsi NTB 2003-2007 diketahui melalui rasio antara realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran.

Tabel 9. Rasio Tingkat Efektivitas APBD Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2003	471.573.620.461,10	459.005.458.705,84	102,73
2004	472.286.945.115,86	444.953.776.489,00	106,14
2005	529.021.795.997,99	520.114.908.771,00	101,71
2006	740.870.868.888,54	731.482.517.142,00	101,28
2007	848.508.456.155,96	858.345.920.618,00	98,85
Rata-rata	612.452.337.323,89	602.780.516.345,16	102,14

Sumber : Data diolah 2014

5. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi belanja Provinsi NTB Tahun anggaran 2003-2007 diketahui melalui rasio antara antara pengeluaran atau belanja daerah dengan pendapatan daerah.

Tabel 10. Rasio Tingkat Efisiensi APBD Provinsi NTB TA 2003-2007

Tahun	Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2003	459.005.458.705,84	471.573.620.461,10	91,23
2004	476.558.783.701,26	472.286.945.115,86	100,91
2005	581.792.711.662,98	529.021.795.997,99	109,97
2006	787.124.594.243,00	740.870.868.888,54	106,24
2007	905.479.706.083,88	848.508.456.155,96	106,71
Rata-rata	641.992.250.879,39	612.452.337.323,89	109,93

Sumber : Data diolah 2014

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian deskriptif tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB selama periode tahun anggaran 2003-2007 adalah **54,58 %** dikategorikan dengan kriteria Provinsi dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah *Sangat Kurang*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode TA 2003-2007 memiliki kemandirian keuangan yang sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kendati terjadi peningkatan kinerja PAD setiap tahunnya selama periode 2003-2007, namun masih juga tetap diikuti dengan peningkatan perolehan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Faktanya, bahwa kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Aspek penting lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah adanya dukungan

kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

2. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi NTB terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode tahun anggaran 2003-2007 adalah **77,93 %**, yakni Provinsi dengan tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah ***Sangat Tinggi***.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan.

3. Rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi NTB periode tahun anggaran 2003-2007 adalah **32,61 %** sehingga dikategorikan sebagai Provinsi dengan tingkat Desentralisasi Fiskal, ***Cukup***.

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja pada tahun anggaran 2004 tidak terlalu menunjukkan dampak terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Provinsi NTB melalui optimalisasi perolehan PAD. Masih besarnya tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi NTB kepada pemerintah pusat terutama ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri masih kurang dari 50 %, sisanya sebesar 60 % lebih masih menggantungkan pembiayaan dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU). Trend realisasi PAD yang kurang stabil turut mempengaruhi besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kecenderungan ini disebabkan masih rendahnya kinerja pemungutan pajak daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi fiskal.

4. Tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan ***Sangat Efektif*** dengan tingkat efektivitas diatas 100 %, karena efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2003-2007 diperoleh rata-rata sebesar **102,14**. Sehingga pencapaian ini perlu diperhatikan dan senantiasa dipertahankan.

5. Tingkat efisiensi dari belanja daerah Provinsi NTB memiliki kecenderungan ***Tidak Efisien***, dengan tingkat efisiensi di atas 100 %, yaitu **109,93 %**.

Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi

kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Seyogyanya pada struktur APBD NTB kedepan akan lebih mengutamakan pemenuhan terhadap *basic need* masyarakat yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pekerjaan umum dalam upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas layanan publik.

REFERENSI

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.

BPS., 2008, *NTB Dalam Angka*, BPS Mataram.

Bastian, Indra., 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta.

_____, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul., 2001, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Haryadi, Bambang, 2002, *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Provinsi Jawa Timur)*, Semarang : Simposium Nasional Akuntansi V.

Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mardiasmo., 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.

Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPA, Yogyakarta.

Nazir, Muhammad., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumantry, Edy., 2004, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Atas Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah Kabupaten Lombok Barat*, Tesis Progam Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Mataram.

RPSEP-11

KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Nora Eka Putri
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: nor.adisty@gmail.com

Abstrak

E-government atau electronic government adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah. E-government merupakan teknologi informasi yang berbasis internet untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Pengembangan e-government bertujuan antara lain: efektivitas prosedur birokrasi yang relatif berbelit-belit, kemudian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, dan juga peningkatan pendapatan asli daerah. Namun dalam implementasinya penerapan e-government ini memiliki kendala tertentu misalnya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang minim karena membutuhkan biaya tinggi dan faktor lainnya. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu agar penerapan e-government dapat terealisasi dengan baik pada pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara strategi tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis, selanjutnya melengkapi sarana dan prasarana penunjang e-government terutama yang terkait dengan teknologi informasi yang berbasis internet.

Kata Kunci: Pembangunan daerah, electronic government, kendala, strategi

A. LATAR BELAKANG

E-government adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah. E-government (E-gov) merupakan teknologi informasi berbasis internet yang mampu menjadikan tugas dan fungsi pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Pengembangan E-gov bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan masyarakat; dan pelaksanaan pembangunan, akan tetapi dalam implementasinya ternyata masih mengalami kendala-kendala tertentu.

Hal yang paling penting dalam penerapan E-gov adalah sumber daya manusia (SDM) yang akan melaksanakan E-gov tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kualitas SDM yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia antara daerah satu dengan daerah lain mengalami perbedaan, namun kecenderungan secara umum SDM yang mampu mengimplementasikan E-gov diasumsikan terbatas, sebab E-gov berkorelasi positif dengan kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi (termasuk komputer) sekaligus internet. Kelemahan tersebut di atas menghambat kelancaran implementasi E-gov di daerah dan ini berimplikasi bagi pelayanan masyarakat, misalnya pemerintah

tidak mampu melayani masyarakat secara online (pembayaran pajak, pengurusan perizinan, dan lain sebagainya).

Lebih jauh kendala SDM ini juga mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, masyarakat hanya fokus melakukan pekerjaan tanpa ada upaya peningkatan kreativitas dan inovasi agar taraf kehidupan meningkat yang dikarenakan terbatas informasi dari pemerintah. Kemudian lemahnya SDM di pemerintah daerah dalam penerapan E-gov juga berdampak pada peningkatan pembangunan, misalnya pelaksanaan seleksi tender pengadaan kegiatan tertentu, kemudian promosi pariwisata daerah, dan lain lain seharusnya dapat dilakukan secara online melalui website pemerintah, namun karena SDM belum bisa mengelola website secara maksimal, sehingga kegiatan tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Penyebab selanjutnya sebagian dari pemerintah di Indonesia mengeluhkan penerapan E-gov karena keterbatasan sarana dan fasilitas lain yang menunjang E-gov, akibatnya pekerjaan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan juga terhambat dan bermuara pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan clean government secara komprehensif. Oleh sebab itu perlu kiranya ditelaah persoalan yang menjadi kendala dan bagaimana strategi agar E-gov dapat diterapkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di daerah.

B. TELAAH LITERATUR

1. Definisi Electronic Government (E-Gov)

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government bahwa pengembangan E-gov adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui E-gov dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup aktivitas pengolahan data, pengelolaan informasi dan proses kerja secara elektronik; kemudian pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Menurut Zweers and Planque (2001), E government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh

pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.

Tujuan Pengembangan E-Government menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 adalah:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia setiap saat tanpa batas ruang, waktu dan pembiayaan
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan perdagangan internasional
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintahan daerah otonom.

Sementara itu menurut Djumadal (2003) dalam Khairul Anwar, bahwa E government sebagai aliran informasi fungsi kegiatan pemerintah, yang dapat di bagi menjadi:

- a. Government to People (G2P:G2C), dimana pemerintah memberi informasi kepada masyarakat dan masyarakat memberi masukan kepada pemerintah
- b. Government to business, dimana pemerintah memberi informasi tentang pasar, mempromosikan produk daerah, pelayanan perizinan, pajak dan sebagainya
- c. Government to Government, dimana ditekankan pada komunikasi, koordinasi dan kolaborasi (kepegawaian, keuangan, perencanaan pembangunan dan lain-lain).

Selanjutnya menurut Khairul Anwar dan Asianti Oetoyo, manfaat dari pengembangan E government adalah:

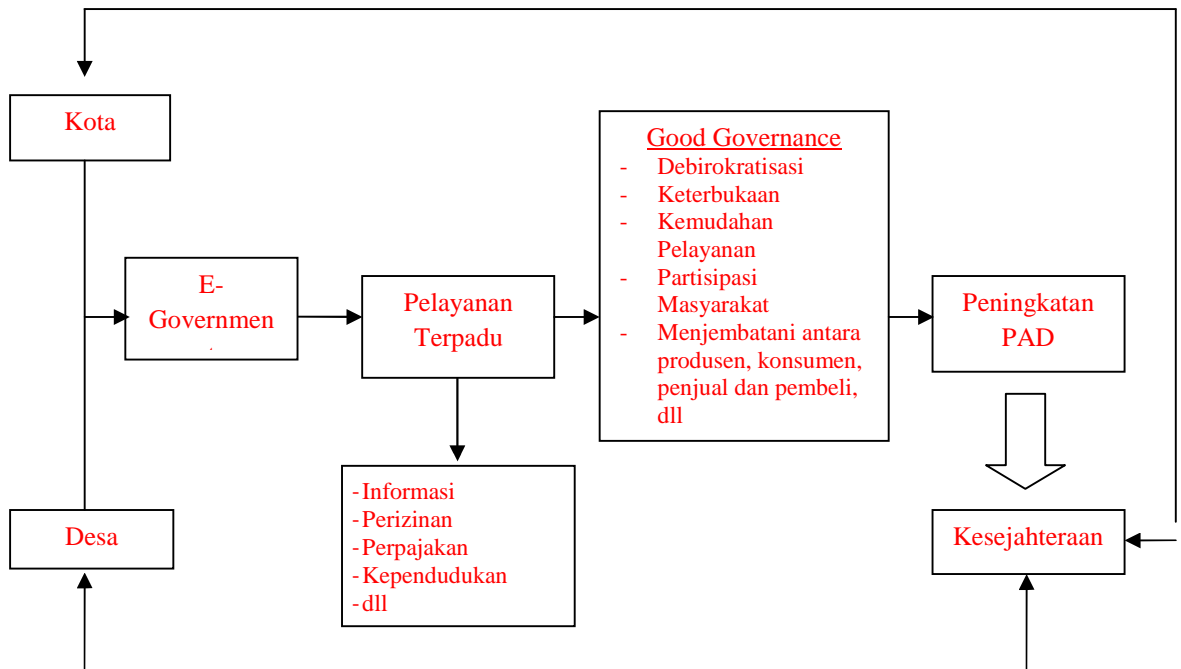
- a. Menghilangkan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, lamban, biaya tinggi dan tidak efisien sehingga pada akhirnya akan menghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah
- b. Fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta aparatur pemerintahan yang

kredibel, bersih, bertanggung jawab (good governance). Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi sebanyak-banyaknya dari pemerintah

- c. Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada proses pembangunan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada
- d. Menjembatani antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli, penyedia dan pengguna teknologi, potensi daerah dan investor, pemerintah dan masyarakat.

Berikut ini adalah skema yang menjelaskan pelaksanaan e government dalam pembangunan daerah:

Skema E-Government



Sumber: Khairul Anwar dan Asianti, 2004

C. PEMBAHASAN

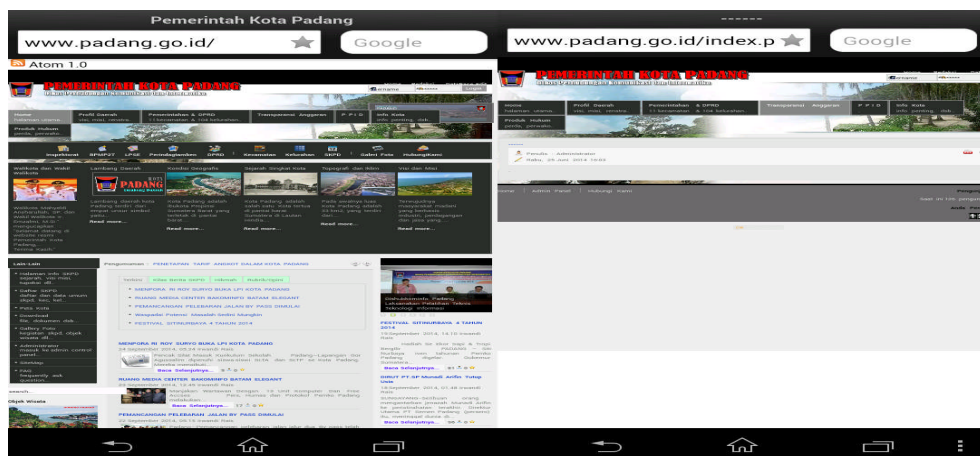
1. Kendala Penerapan E-Government

Implementasi e-government dalam menunjang pembangunan daerah sangat diperlukan, sebab melalui e-government tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan PAD dapat dioptimalkan dengan e-

government. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya tidak demikian terdapat beberapa kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Di antara yang menjadi kendala dalam implementasi E-gov ini adalah kesiapan birokrasi. Lebih jauh bahwa pemerintah daerah belum optimal menerapkan E-gov disebabkan belum terdapatnya organisasi yang fokus pekerjaannya terkait dengan implementasi E-gov. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri Otoda No 50 Tahun 2000 tentang Pedoman SOTK Daerah (Di antaranya pembentukan Kantor/Badan Pengolahan Data Elektronik atau K/BPDE) serta Inpres No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia. Sehingga semangat penerapan E-gov ini relatif terkendala karena tidak terdapatnya instansi pemerintah yang akan mengolah data elektronik tersebut K/BPDE). Sebab yang akan membuat perencanaan terhadap pengolahan data elektronik ini ditentukan oleh instansi terkait yang fokus pekerjaan pada perencanaan sampai dengan evaluasi pengolahan data elektronik di pemerintah daerah.

Misalnya di Kota Padang, website Pemerintah Kota Padang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu pelaksanaan program optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, di antaranya pengembangan content data website kota Padang, Pengembangan dan perbaikan jaringan lokal dan hotspot, Peningkatan kualitas SDM teknis teknologi informasi, Sistem informasi dan data menara seluler di Kota Padang, dan lain lain. Namun di dalam penerapannya masih terdapat kelemahan pada website yang ditampilkan, contoh kolom opini yang tidak di up to date, selanjut content tranparansi anggaran yang kosong sehingga masyarakat yang menginginkan informasi juga kecewa disebabkan informasi yang tidak komprehensif.



Selanjutnya keterbatasan SDM yang mampu mengelola E-gov dengan baik sehingga tenaga ahli yang tersedia terbatas yang mengakibatkan beban pekerjaan

semakin menumpuk. Kemudian hal tersebut juga terhambat karena sarana dan fasilitas yang terbatas, sebab pengadaan komponen teknologi informasi tersebut membutuhkan biaya yang tinggi, jika PAD daerah tinggi dan pemerintahnya juga mendukung maka persoalan ini tidak terlalu memberatkan namun jika sebaliknya yang terjadi akibatnya implementasi E-gov juga tidak maksimal.

Faktor jaringan komunikasi juga menjadi kendala yang signifikan sebab seluruh pekerjaan yang terkait dengan E-gov juga berhubungan dengan jaringan komunikasi sehingga jika jaringan komunikasi bermasalah maka pekerjaan akan tertunda

2. *Strategi Pengembangan E-Government*

Strategi diperlukan dalam pengembangan E-gov, di antaranya adalah:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak bersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah, begitu juga dengan lembaga negara lainnya bahwa kelancaran informasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah secara holistik. Penataan sistem manajemen dan proses kerja harus dirancang sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mampu menyerap informasi secara cepat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Di antara rancangan tersebut harus mencapai sasaran antara lain, sistem yang ditata berfokus pada kebutuhan rakyat; kemudian komitmen yang jelas untuk melakukan perubahan lebih baik; penguatan e-leadership; rasionalisasi peraturan dan prosedur operasional
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, perkembangan teknologi informasi dan jaringan komunikasi memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar lebih optimal dan tepat sasaran. Salah satunya dengan cara menetapkan standarisasi yang terkait dengan manajemen dokumen dan data elektronik
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan e-gov, partisipasi dunia usaha dalam pelayanan publik perlu untuk dikembangkan, misalnya keterlibatan dalam mengembangkan komputerisasi, jaringan informasi

dan teknologi informasi sehingga mampu memperluas cakupan pelayan publik tersebut.

- e. Mengembangkan kapasitas SDM pada pemerintah daerah disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Pengembangan kapasitas SDM ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain: meningkat kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan komunikasi; pemberian pendidikan dan pelatihan terkait dengan teknologi informasi; peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; perubahan pola pikir dan sikap budaya kerja aparatur pemerintah melalui sosialisasi mengenai konsep e-government; kemudian peningkatan motivasi melalui penghargaan atau apresiasi kepada SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. Penerapan e-government harus dimulai dari perencanaan yang jelas (SDM, fasilitas, dll); implementasi (pembuatan sistem informasi publik); pemantapan dengan membuat situs transaksi pelayanan publik; pemanfaatan teknologi informasi tersebut

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain

- a. Kendala dalam penerapan e-gov adalah birokrasi pemerintah yang belum optimal dalam mengimplementasikan e-gov, kemudian terbatasnya SDM dan sarana serta fasilitas juga membuat perkembangan e-gov di suatu daerah menjadi terhambat sehingga proses pelayanan publik juga tidak maksimal
- b. Strategi yang dapat dikembangkan dalam penerapan e-gov di pemerintah daerah untuk menunjang kesejahteraan rakyat adalah birokrasi yang pro aktif dengan e-gov ini melalui pembentukan K/BPDE di pemerintahan, selanjutnya melengkapi sarana dan fasilitas penunjang e-gov serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM sehingga tujuan pemerintah untuk pembangunan, melayani masyarakat, serta peningkatan PAD sesuai dengan tujuan e-gov dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M Khairul.2004. *Aplikasi SIM bagi Pemerintahan di Era Otoda, SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus.2002. *Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Djumadal, Surat, J.2003. *Pengembangan E-Gov Pemerintah Provinsi DIY*. Makalh studi lapangan E-Gov di UMM
- Puspitosari, Hesti, dkk.2012. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press
- Siagian, P Sondang.1999. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tamin, Feisal.2004. *Reformasi Birokrasi, Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta: Belantika
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Stretegi Nasional Pengembangan E-Government

RPSEP-12

BUREAUCRATIC TRANSFORMATION: UNIVERSITAS TERBUKA'S EXPERIENCE

Agus Joko Purwanto
Universitas Terbuka/UT (Indonesia Open University)
ajoko@ut.ac.id

Bureaucratic transformation is a of comprehensive effort in organizational change. It begins with re-assessed the organizational philosophy, values and norms. Other organizational components such as organizational culture, organizational structure, human resource, accountability, control, and leadership are also should be changed. Universitas Terbuka's (UT) transformation has systematically and structurally begun at 2001. It was started by re-assessing UT's vision and mission declared in the year of 1998 which then became basic for UT's policies as well as foundation of organizational culture development. Basic values adopted by UT are quality management and good and corporate governance. These values and norms, then operationalized to be quality culture, accountability, transparency, and law-abiding.

There are six strategies implemented in UT reform. First, to build common perception about task and function, and developed UT's corporate culture and character; Second, to change the organizational structure; Third, to change the planning mechanism and budget control; Fourth, to complete the work facilities. Fifth, to implement information system; Sixth, to transformation and increase human resources development. All strategies were taken as efforts to transform UT into a learning organization or knowledge management.

According to International Council for Distance Education (ICDE) on 2005 quality review, UT has been declared as a learning organization (LO). Then, by 2010 review, UT has been announced as a LO with an international quality standard of services. This opinion is in line with government regulations (2010 Presidential Regulation Number 81 which states that one of transformation program is transforming public organization to knowledge management.

Key Words: change, reformation, transformation, bureaucracy.

A. Latar Belakang

Menurut paradigma baru organisasi, perubahan adalah suatu keniscayaan. Lingkungan selalu berubah, maka organisasi harus melakukan perubahan agar tetap survive. Dalam konteks organisasi publik, perubahan organisasi sering juga disebut sebagai reformasi organisasi. Intinya adalah sama, organisasi melakukan "transformasi" agar organisasi selalu sesuai dengan tuntutan stakeholders dan tuntutan lingkungan. Organisasi yang tidak mampu melakukan perubahan seiring dengan perubahan lingkungan akan tertinggal dan kemudian mati. Demikian juga dengan Universitas Terbuka (UT).

Dalam Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 disebutkan bahwa tujuan akhir transformasi adalah adanya peningkatan pelayanan. Sasaran antara dalam mencapai tujuan tersebut adalah berlangsungnya *knowledge management*. Permen ini memberikan arah reformasi/transformatasi organisasi bagi seluruh organisasi Pemerintah, di Pusat maupun di daerah. Transformasi UT dilaksanakan tidak berpedoman kepada PermenPan dan RB, karena UT telah melaksanakan transformasi jauh sebelum Permen tersebut dilaksanakan. Namun pada dasarnya tahapan yang ditempuh UT tidak berbeda dengan tahapan yang disarankan oleh Permen tersebut.

Transformasi dilakukan UT secara terus menerus untuk menyesuaikan visi, tujuan, sasaran, dan strategi UT dengan tuntutan pelanggan dan perubahan lingkungan eksternal. Penetapan visi UT pada tahun 1998 dapat disebut sebagai tonggak implementasi manajemen dengan output yang lebih terukur. Pada tahun 2001, upaya implementasi visi dilakukan mulai dengan merumuskan tujuan, sasaran UT. Transformasi dilakukan dengan pertama, membangun persepsi yang sama tentang tugas dan fungsi UT, dan mengembangkan budaya organisasi UT. Kedua, menyempurnakan struktur organisasi. Ketiga, mengubah mekanisme perencanaan dan pengendalian anggaran. Keempat, melengkapi sarana dan prasarana kerja. Kelima, mengimplementasikan sistem informasi, dan keenam, menransformasi dan meningkatkan sistem pengembangan sumber daya manusia.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka transformasi harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram. Agar transformasi dapat berlangsung seperti yang diharapkan maka transformasi harus dikelola dengan baik. Mengelola perubahan/transformatasi bagi UT bukanlah hal yang mudah. Sebagai organisasi yang memiliki mahasiswa aktif sebanyak 433.763 mahasiswa yang belajar di empat fakultas dan Program Pascasarjana²⁵ yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, UT berupaya melaksanakan transformasi secara bertahap dan konsisten. Tulisan ini akan

²⁵ UT dalam Angka periode 2014.1, <http://www.ut.ac.id/tentang-ut/ut-dalam-angka.html#fakultas>

mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah UT dalam melakukan transformasi organisasinya.

B. Telaah Literatur

Dari telaah literature, terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menyebut perubahan (change) yaitu change itu sendiri, reformasi, dan transformasi. Dalam literature organisasi publik, tiga istilah tersebut digunakan bergantian untuk menyebut perubahan. Sedangkan dalam literature bisnis istilah yang digunakan adalah *change*, setelah sebelumnya banyak menggunakan istilah pengembangan (development). Istilah pengembangan organisasi diperkenalkan oleh Lewin, Douglas, Blake, dan Beckhard pada tahun 1950. Istilah *change* diperkenalkan oleh Beckhard dan Worley pada tahun 1980-an,²⁶ yang melahirkan pendekatan manajemen strategik. Menurut Daft, perubahan adalah *the adoption of the new idea or behavior by an organization*²⁷.

Penggunaan istilah transformasi dan reformasi sering dikaitkan dengan politik atau kebijakan. Montgomery seperti dikutip oleh Ndue, menyatakan bahwa *administrative reform* merupakan *a political process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and other element in society or within bureaucracy itself*.²⁸ Caiden menjelaskan *administrative reform* sebagai *artificial inducement of administrative transformation, against resistance*. Jika dibandingkan antara Caiden dan Ndue, mereka menggunakan istilah *administrative reform* untuk menyebut sebuah proses dalam melakukan perubahan. Ndue menggunakan *to adjust* sedangkan Caiden menggunakan istilah *administrative transformation* untuk menyebut *change*. Sedangkan Bainbridge menggunakan istilah *change* dan *transformation* secara bersamaan. Ia menulis buku dengan judul *Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation*. Menurut Bainbridge²⁹ *change* adalah *something we have to learn to live with, to structure and to manage. ...The change task is therefore not just about transformation to cope with current situation*³⁰, ...lebih lanjut Bainbridge menjelaskan *transformation*

²⁶ Ian Palmer, Richard Dunford, and Gib Akin, *Managing Organizational Change: A Multiple Perspective Approach*, Boston, McGraw-Hill, 2006. h.179.

²⁷ Richard L. Daft, *New Era of Management* (9th edition), Singapore, Cengage Learning Int'l Office. 2010. h.278.

²⁸ Paul N. Ndue, *Democratization, Good Governance, and Administrative Reform in Africa*, Paper of 26th African Association for Public Administration and Management (AAPAM) Annual Roundtable Conference, Kenya 7th-11th March, 2005.

²⁹ Colin Bainbridge, *Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation*, West Sussex, John Wiley and Sons. 1996.h.4.

³⁰ Ibid. h.18

*adalah a series of steps or activities which act on input and convert them into output*³¹. Menurut Bainbridge, transformasi adalah proses mengubah input menjadi output. Caiden, Ndue, dan Bainbridge memiliki pandangan yang sama tentang transformasi yaitu transformasi bekerja antara sisi input dan sisi output. Menurut Gouliart dan Kelly³², transformasi organisasi terdiri dari empat langkah besar yaitu *reframing, restructuring, revitalization, dan renewal*. Dari berbagai pendapat di muka dapat disimpulkan bahwa change atau reform dilakukan melalui proses transformasi.

Jika menggunakan pendekatan action research, tahapan perubahan adalah *diagnosing the organization, determining the desire future state, implementing action, evaluating the action, dan institutionalizing action research*.³³

C. Metode

Penulisan artikel ilmiah ini didasarkan pada data sekunder dan observasi. Data sekunder yang dianalisis adalah Laporan Rektor pada tahun 2001 – 2010 dan Memorandum Akhir Jabatan Rektor 2001-2009. Dokumen lainnya adalah proposal-proposal perubahan UT menjadi BLU juga dijadikan sumber pembahasan reformasi UT dan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasional UT. Berdasarkan dokumen dan observasi, penulis mengkonstruksi reformasi yang dilakukan UT sejak tahun 2001 sampai 2014. Sumber lain adalah buku-buku tentang perkembangan UT, perkembangan unit-unit di UT maupun perkembangan UPBJ yang diterbitkan oleh UT. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian direduksi, dikategorisasi, lalu dihubungkan, dan ditafsirkan.

D. Pembahasan

Dalam upaya menyehatkan organisasi agar UT dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, UT secara terus menerus melakukan perubahan. Perubahan menggunakan pendekatan manajemen strategic dimulai pada tahun 1998 ketika UT menetapkan visinya untuk pertama kalinya. Pada tahun tersebut, pandangan internal UT tentang UT sebagai PT sumber dan PT pengelola belumlah tuntas. Sehingga desain

³¹ Ibid, h.22.

³² Francis J. Gouillart dan James N Kelly, *Transforming The Organization*, New York, McGraw-Hill, 1995. h.7.

³³ Gareth Jones, *Organizational Theory, Design and Change* (6th edition), Upper Sadle River, Pearson. h. 311-3124

pengembangan UT seperti berada dipersimpangan antara universitas sumber dan univertas pengelola. UT memiliki persoalan pada jatidiri. Pada tahun 2001, manajemen UT menetapkan bahwa UT merupakan universitas pengelola. Keputusan ini didasarkan pada bahwa UT memiliki jumlah mahasiswa sekitar 450 ribu dengan sebaran luas, sedangkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan kurang dari 2000 orang. Disamping itu, kebijakan Pemerintah melalui Keppres No 41 Tahun 1984 tentang Pendirian UT bahwa UT harus bekerjasama dengan lembaga lain untuk menjalankan operasinya. Dengan demikian sejak awal memang UT sudah didesain sebagai PT pengelola. UT harus mengelola penulis soal, penulis bahan ajar, tutor, pengawas ujian, kelompok belajar, sekolah, dinas dan sebagainya.

Dalam rangka mengimplementasikan Visi 1998, pada tahun 2001-2010 program strategis yang pertama kali dilakukan oleh Rektor adalah membentuk budaya organisasi UT. Frame atau pandangan seluruh pegawai tentang UT disamakan. Budaya organisasi UT dibangun dengan melaksanakan nilai-nilai UT sebagai perguruan tinggi milik Pemerintah yang bertugas mengelola jaringan. Budaya kerja UT diarahkan pada terbentuknya budaya adaptif, fleksibel, *learning organization*, demokratis, bekerja dengan dituntun oleh visi dan tujuan, kualitas, dan kompetisi dengan mengembangkan prinsip-prinsip *total quality management* (TQM) dan *corporate and good governance* (CGG).

Lima langkah tersebut mampu meningkatkan budaya kerja pegawai UT. *Stakeholders* internal dan eksternal mampu diyakinkan tentang karakteristik khas PTJJ yang berbeda dengan PT tatap muka, sehingga UT harus dikelola secara berbeda pula. Hasilnya UT mampu membangun "brand" yang kuat sebagai PTJJ. Penilaian oleh International Council for Distance Education (ICDE) pada tahun 2004 menyebutkan UT telah menjadi *learning organization* dan audit kualitas tahun 2010 oleh ICDE menempatkan UT sebagai PTJJ yang telah berkelas dunia dalam penyelenggaraan PT. Penilaian ICDE yang menyatakan bahwa UT merupakan LO sejalan dengan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa salah satu program reformasi adalah mentransform organisasi publik menjadi organisasi yang mampu mengelola pengetahuan.

Jika analisis pada perkembangan 10 tahun (2001-2010) perkembangan UT, nampak bahwa langkah awal untuk mentransformasi UT adalah diagnosis diperoleh informasi

bahwa masih terdapat perbedaan stakerholder internal terhadap UT. Dosen dan tenaga kependidikan tidak satu pandangan tentang UT. Transformasi tahap awal dilakukan dengan melakukan *reframing*. Proses *reframing* dilakukan dengan mengubah konsepsi dosen dan tenaga kependidikan tentang UT. Ini merupakan perubahan *mind* UT sebagai organisasi.

Perubahan lain adalah penetapan visi dan misi. Penetapan ini merupakan strategi *determining the desire future state*. Visi dan misi UT dipandang sebagai *future state* yang harus digunakan sebagai pengarah dalam bekerja. Dengan adanya visi dan misi, maka seluruh sumberdaya UT harus dialokasikan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi UT.

Langkah berikutnya menurut Jones adalah *implementing action* atau mengimplementasikan tindakan. Gouillart dan Kelly memberi nama *restructuring*. *Implementing action* dan *restructuring* pada dasarnya langkah yang sama, yaitu melakukan transformasi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Restructuring dilakukan dengan mengimplementasikan secara konsisten prinsip TQM dan GCG. Pelaksanaan prinsip TQM dan GCG dilaksanakan dengan melakukan penataan ulang tata kelola (governance) UT sebagai PTJJ dengan melakukan: (1) menyempurnakan struktur organisasi; (2) perubahan mekanisme perencanaan dan pengendalian anggaran; (3) melengkapi sarana dan prasarana kerja, baik di UT Pusat maupun UPBJJ-UT; (4) mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk keperluan pengelolaan pekerjaan di UT; dan (5) membenahi administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi pegawai.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka organisasi UT kemudian menjadi Badan Layanan Umum. Agar operasional UT berkelanjutan maka UT harus mengikuti ketentuan UU No 17/2003 tersebut dengan mengubah status dari PTN menjadi BLU. UT menjadi BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tahun 2011, Universitas Terbuka (UT) sebagai instansi pemerintah menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Perubahan status ini merupakan transformasi yang mendasar, terutama dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ditransformasi dari pola sentralisasi ke pola dekonsentrasi. Sektor yang terkena dampak paling besar

dari transformasi UT dari PTN menjadi PK BLU adalah sektor keuangan. UT harus melakukan perubahan mendasar pada pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penentuan tarif, penanggungjawab anggaran, format-format dokumen, pertanggungjawaban dan pengendalian anggaran. Keputusan menjadi BLU diambil dalam upaya melakukan revitalisasi dan renewal UT.

Revitalisasi dan renewal dilakukan dengan meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Strategi pemberian tugas dan izin belajar dan pelatihan-pelatihan merupakan upaya untuk merevitalisasi SDM UT. Proses Revitalisasi dan renewal memerlukan dukungan faktor motivasional. Untuk itu UT mengupayakan remunerasi bagi seluruh pegawai. Pemberian remunerasi didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.05/2014 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Penjabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan memperhatikan uraian di muka nampak bahwa melakukan perubahan organisasi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan langkah yang terencana dan sistematis mulai dari penyatuan visi sampai kepada revitalisasi dan renewing dengan meningkatkan spirit organisasi.

Dengan selalu melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan lingkungan, UT sebagai organisasi public tetap sustain dan berkembang.

E. Kesimpulan dan Saran

Perubahan organisasi adalah suatu keniscayaan. Organisasi harus melakukan perubahan agar tidak terpuruk, UT melakukan perubahan terencana dengan menggunakan pendekatan manajemen strategic sejak tahun 1998. Perubahan yang dilakukan pada tahap awal adalah melakukan penyamaan persepsi untuk memperoleh gambaran yang sama tentang masa depan UT. Bersamaan dengan itu, dilakukan penataan ulang tata kelola (governance) UT sebagai PTJJ. Penataan ulang dilakukan dengan (1) menyempurnakan struktur organisasi; (2) perubahan mekanisme perencanaan dan pengendalian anggaran; (3) melengkapi sarana dan prasarana kerja, baik di UT Pusat maupun UPBJJ-UT; (4) mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

untuk keperluan pengelolaan pekerjaan di UT; dan (5) membenahi administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi pegawai.

Perubahan mendasar setelah tahun 2010 adalah perubahan UT menjadi BLU, keputusan Menkeu tentang Remunerasi UT, dan perubahan struktur organisasi UT yang saat ini usulan perubahannya sudah berada di kantor Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan terus menerus ini ditujukan agar UT selalu dinamis dan tumbuh.

Berdasarkan deskripsi di muka bahwa untuk melakukan perubahan, UT harus merencanakan dengan matang, menilai kembali seluruh produknya, membaca kembali visi, misi dan sasaran organisasi. Tujuannya adalah agar tak ada pegawai yang ketinggalan.

Daftar Pustaka

- Bainbridge, Colin, (1996). *Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation*, West Sussex, John Wiley and Sons.
- Daft, Richard L. (2010). *New Era of Management* (9th edition), Singapore, Cengage Learning Int'l Office.
- Gouillart, Francis J. dan James N Kell. (1995). *Transforming The Organization*, New York, McGraw-Hill.
- Jones, Gareth. (2010). *Organizational Theory, Design and Change* (6th edition), Upper Sadle River, Pearson.
- Ndue, Paul N. (2005). *Democratization, Good Governance, and Administrative Reform in Africa*, Paper of 26th African Association for Public Administration and Management (AAPAM) Annual Roundtable Conference, Kenya 7th-11th March.
- Palmer, Ian, Richard D., and Gib A. (2006), *Managing Organizational Change: A Multiple Perspective Approach*, Boston, McGraw-Hill
- Universitas Terbuka, Memorandum Akhir Jabatan Rektor 2005-2009, tidak diterbitkan.
- Universitas Terbuka, Rencana Strategi Bisnis. 2013. tidak diterbitkan.
- Universitas Terbuka, Usulan Remunerasi UT, 2014, tidak diterbitkan
- UT dalam Angka periode 2014.1, <http://www.ut.ac.id/tentang-ut/ut-dalam-angka.html#fakultas>

RPSEP-13

INDONESIA MEMBUTUHKAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Joseph M J Renwarin
Kalbis Institute Jakarta
Email : mrjoseph017@yahoo.com

This paper will show how to manage the potentials rich of Indonesia. Indonesia need Leader as Chief Executive Officer not only leader as the President – Political Leader. The CEO should manage the centre of industries by Entrepreneurship concept (the author said Governpreneurship) not by Work and Pay. This paper also focus on how to develop strategies based on archipelago's concept. The author try to analyze the archipelago potentials, especially in outside Java island potentials. The objective of production processes in that area (outside Java Island), would be easy to enter the export market because of low of cost leadership. The author give many strong recommendations such as the CEO should focused on bad infrastructures and interconnection between islands because it will be impact of the higher of distribution costs. The research method of this paper is Qualitative Analysis with the concern of description approaches. The results of this paper are the management should had of entrepreneurship in any level (head Government to Local Government). The CEO will ready to present the concept of partnership with the International Investors .

Keyword: Chief Executive Officer, Entrepreneurship, government, concept, industries, work and pay.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ibarat sebuah perusahaan, Indonesia membutuhkan seorang Chief Executive Officer (CEO) yang hebat, yang mampu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan tiap-tiap pulau dan gugus pulau-pulau, tiap-tiap daerah dan tiap-tiap propinsi. CEO membuat fondasi perencanaan yang tepat dan dijalankan secara konsisten untuk meningkatkan daya saing guna memenangi kompetisi global. Kalau soal prospek bisnis, jangan ditanya. Indonesia memiliki potensi daerah-daerah yang sangat menjanjikan.

Sang CEO harus benar-benar hebat, agar supaya dapat mewujudkan daya saing yang tinggi itu, jangan sampai meninggalkan potensi-potensi dari tiap-tiap daerah. Tentu hal ini tidaklah mudah karena karena jabatan CEO ini berbeda. Kalau di perusahaan, CEO mendapatkan mandat penuh dari pemilik atau pemegang saham untuk memajukan usahanya. Punya kekuasaan tangan besi untuk kapanpun menyingkirkan orang-orang

yang tidak sepeham. Dalam “perusahaan Negara” ini, CEO tidak punya kewenangan sejauh ini. Hal ini karena pemberlakuan sistem otonomi daerah dan sama sekali tidak bisa memaksa para gubernur dan bupati atau walikota termasuk perangkatnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai yang direncanakan.

Adapun “perusahaan Negara” Indonesia, secara makro, masih sangat bergantung dari akselerasi ekspor dengan terus memantau perbaikan ekonomi dunia. Dilain pihak, rating negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, China) membaik sedangkan rating Negara-negara Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan penurunan. Indonesia sendiri, mendapat penilaian menjadi Investment grade oleh Japan Credit Rating Agency Untuk kondisi ekonomi domestik, cenderung lebih stabil dengan iklim investasi yang baik.. Harga-harga komoditas yang terus meningkat antara lain, minyak, batubara, karet dan minyak sawit (CPO) . Pergerakan harga gas (LNG) juga bergerak searah dengan pergerakan minyak. Perbaikan kondisi ekonomi juga terjadi di Indonesia seperti tercermin pada PDB (GDP) pada triwulan kedua tumbuh sebesar 6,2 % (y.o.y), meningkat pesat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 5,2 % (Bakrie & Brothers, 2011).

Dari pemaparan tersebut dan disertai dengan beberapa data maka penulis melihat bahwa permasalahan utama adalah bagaimana pemimpin mengelola potensi-potensi dari tiap-tiap daerah sehingga menjadi satu kekuatan nasional. Bagaimana semangat kewirausahaan melekat pada para pejabat-pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Bagaimana mengelola potensi-potensi daerah dan melakukan interkoneksi antar daerah sehingga daerah-daerah siap dan mampu menerima investasi dari luar negeri. Dari berbagai karakteristik masalah-masalah tersebut maka yang menjadi masalah utama adalah bagaimana pemimpin Indonesia mengelola kekayaan yang dimiliki oleh daerah-daerah dengan semangat kewirausahaan.

B. METODE PENELITIAN

B.1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu hasil pengamatan yang outputnya hanya bisa dimasukkan kedalam suatu kategori (*Santoso, 2003*) misalnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan sebagainya.

b. Data Kuantitatif

Yaitu hasil pengamatan atas suatu hal yang bisa dinyatakan dalam angka (*Santoso, 2003*) misalnya usia seseorang, status dan sebagainya.

B.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui obyeknya (*Suprpto, 2003*).

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (*Suprpto, 2003*). Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa makalah seminar, penjelasan secara lisan saat seminar nasional dan dicatat oleh penulis, Koran, e-news, dll

Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis karena penulis ingin memahami dan mengungkapkan beberapa fenomena yang diketahui serta mencoba merinci realitas yang kompleks dan yang sulit diungkapkan oleh metode penelitian, dan berupaya untuk memahami lebih mendalam. Sebuah fenomena tentang sesuatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan (*Moleong, 2009;6*). Dalam penelitian ilmiah qualitative ini, penulis mendiskripsikan semua data-data yang diperoleh dari data-data sekunder, yang dikliping oleh penulis dari tahun ke tahun. Dari pengolahan data-data sekunder dan dibantu dengan penelitian qualitative, penulis membuat suatu formula strategi (*strategic formulation*) bagi manajemen dalam hal ini pemerintah Indonesia. Dalam melengkapi penulisan ini, penulis mengambil sampel untuk dianalisis lebih mendalam dan menggambarkan keadaan sebenarnya. Dengan memperhitungkan waktu dan biaya maka penulis menetapkan sebagian data-data dari Kluster industri di Sulawesi. Diharapkan, dari contoh Kluster industri di Sulawesi, dapat mewakili keseluruhan kluster industri di Indonesia dan dapat digunakan sebagai model untuk menggambarkan dan mewakili kondisi sarana dan prasarana dari tiap-tiap kluster industri di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi setelah krisis tahun 2008 mulai menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik dimana di tahun 2012 mulai banyak investor melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Tujuan pembangunan milenium Indonesia, Litbang Kompas

(2007) dan www.targetmdg's.org (2008), yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah :

Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan :

- Penduduk miskin hingga 50 persen
- Penderita kelaparan turun hingga 50 persen

Pencapaian pendidikan dasar untuk semua :

- Semua anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan :

- Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah

Penurunan angka kematian anak :

- Tingkat kematian anak balita berkurang hingga dua pertiganya

Kesehatan ibu :

- Menurunkan tiga perempat tingkat kematian ibu

Pengendalian HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya :

- Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS
- Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya.

Penjaminan kelestarian lingkungan hidup :

- Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah serta mengembalikan sumber daya yang hilang.
- Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
- Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah yang kumuh.

Pendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium :

- Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka dan tidak diskriminatif
- Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara yang paling tertinggal

- Menangani utang negara-negara berkembang
- Mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda
- Penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau
- Kerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

C.1 Kajian kebijakan

Menurut presiden SBY dalam *Presidential Lecture* oleh Prof. David. T. Elwood di Istana Negara hari Rabu tanggal 15 September 2010, Kompas (2010), Indonesia menerapkan strategi tiga jalur yakni (*triple track strategy*) : pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan kini bahkan strategi tersebut ditambahkan dengan jalur keempat, yakni pro-lingkungan. Beliau menambahkan juga bahwa Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan melancarkan program meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dipimpinnya menginginkan hasil yang lebih besar lagi. Presiden SBY juga menyampaikan bahwa untuk memerangi kemiskinan di negara berkembang, seperti Indonesia, harus berorientasi pada “ bekerja dan mendapat gaji “ (*work and pay*) untuk menopang kebutuhan sehari-hari, tidak tergantung pada sumbangan, bantuan uang tunai dan subsidi pangan. Menurut Profesor David T Elwood, Dekan Harvard Kennedy School, yang dikenal dengan guru besar ekonomi politik dan juga pernah ikut sebagai anggota Kelompok Kerja Reformasi (program) kesejahteraan pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, suatu negara memerlukan keunggulan komparatif diperekonomia jangka panjang. Suatu negara juga membutuhkan keunggulan kompetitif dalam teknologi, ketrampilan dan pendidikan. Pendidikan merupakan hal vital untuk pembentukan ketrampilan dan penyesuaian yang fleksibel. Institusi pemerintah juga dibutuhkan untuk membuat aturan-aturan hukum (*rule of law*) yang bisa dipercaya. Pemerintahan yang solid, kuat, efisien dan transparan. Ciri-ciri pemerintahan tersebut adalah punya daya untuk menstimulasi bisnis dan kompetisi, gait membangun infrastruktur dan mampu meminimalkan korupsi. Pemerintahan yang ideal yakni stabil, teramalkan dan tersambung dengan rakyat.

Dari pemaparan oleh kedua pembicara tersebut, penulis melihat bahwa belum ada kesinambungan atau sasaran yang sama karena Elwood menyimpulkan bahwa untuk

mengelola suatu negara maka diperlukan jiwa kewirausahaan bagi setiap pejabat negara sedangkan SBY masih terkesan mengarahkan pada mentalita pegawai. Mengelola suatu negara kepulauan haruslah mempunyai jiwa kewirausahaan atau dalam hal ini penulis menyebutkan dengan istilah Governpreneurship.

Pemerintah telah memetakan kondisi usaha dan industri dengan menggunakan sistem kluster. Penulis melihat bahwa hal ini sangat baik karena merupakan informasi bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk mencari mitra partner yang dalam hal ini dengan mengusahakan pemerintah daerah sebagai mitra bisnis. Adapun pembagian kluster industri tersebut terabagi dalam 3 (tiga) Koridor Ekonomi dengan 25 (dua puluh lima) Kluster Industri sebagai berikut :

1. Pengembangan kluster Industri prioritas di koridor Sumatra – Jawa, yakni : Kluster industri kelapa sawit Sei Mangke, Kluster industri karet Sei Baman, Kluster industri kelapa sawit Dumai, Kluster industri batu bara Muara Enim, Kluster industri perkapalan Karimun, Kluster industri tekstil Majalengka, Kluster industri mesin dan peralatan transportasi Karawang, Kluster industri telematika Semarang, Kluster industri perkapalan Lamongan.
2. Pengembangan kluster industri prioritas di koridor Kalimantan – Sulawesi, yakni : Kluster industri alumina Tayan, Kluster industri alumina Mempawah, Kluster industri batubara Puruk Cahu, Kluster industri kelapa sawit Maloy, Kluster industri besi baja Batu Licin, Kluster Industri Ferronikel di Halmahera Timur, Kluster industri kakao di Palu, Kluster industri kakao di Gowa, Kluster industri Ferronikel di Pomala, Kluster industri Ferronikel di Mandiodo, Kluster industri nikel di Soroako, Kluster industri di Bitung
3. Pengembangan kluster industri prioritas di koridor Papua, yakni : Kluster industri minyak dan gas di Tangguh, Kluster industri tembaga di Timika, Kluster industri di Merauke.

C.2. Laju inflasi

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau yang terpisah lautan memang sebuah anugerah. Namun, besarnya ukuran negara ini seharusnya menjadi pengingat bahwa biaya untuk mempersatukan itu mahal. Biaya itu, antara lain, muncul dalam bentuk ongkos logistik yang tinggi. Di Jepang, ongkos logistik hanya 5,9 persen

terhadap penjualan atau 10,6 persen atas produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia mencapai 20-30 persen atas Produk Domestik Bruto, ulasan-ulasan Kompas (2011). Rata-rata inflasi di negara-negara maju adalah sebesar 1.4 % sedangkan di negara-negara berkembang sebesar 6,3% di tahun 2010, Indonesia Economic Outlook (2011, 16), Bagaimana mungkin konsep Work and Pay akan berhasil ? Seorang pegawai akan sulit melakukan analisa biaya. Analisa ini adalah merupakan *concern* bagi seorang pengusaha sehingga dengan pengelolaan yang maksimal akan mendapatkan keuntungan yang baik.

Secara kasat mata, sering terjadi kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, terutama pada hari-hari besar nasional. Disparitas harga di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan terluar tinggi. Tingkat penyediaan infrastruktur rendah, plus munculnya pungutan tidak resmi. Secara tidak tertulis, penulis menemukan bahwa untuk membuat atau mendirikan suatu perusahaan di Indonesia saat ini, membutuhkan biaya yang besar dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan. Kondisi itulah yang menyebabkan laju inflasi di Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara terdekat, meskipun perekonomian dunia sedang normal. Inflasi bukan hal sepele karena dampaknya melebar ke mana-mana, antara lain menekan daya beli masyarakat termiskin dan cenderung memperlemah nilai tukar setidaknya dalam hitungan dua tahun.

Kementerian keuangan melansir laju inflasi tahunan per Februari 2011 sekitar 6,84 persen. Ini adalah inflasi tahunan per Februari 2011 sekitar 6,84 persen. Ini adalah inflasi tahunan terendah dalam empat bulan ini. Dengan kondisi ini, diperkirakan inflasi akan mulai menunjukkan peningkatan di kuartal pertama 2012. Untuk mengantisipasi naiknya harga-harga, maka sudah saatnya mengembangkan potensi daerah-daerah secara maksimal. Adapun beberapa industri yang fokus dan bisa dikembangkan berdasarkan klaster di tiap-tiap daerah. Dari 25 klaster industri, dipaparkan di bab teori, penulis melihat bahwa sebagian besar potensi yang bisa dikembangkan adalah terletak di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Bagaimana dengan kondisi infrastruktur daerah tersebut ? Apakah dapat menjadi daya tarik investasi ?

C.3 Kondisi infrastruktur

Harapan masyarakat dan pelaku usaha terkait kondisi infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur yang layak, kurangnya fasilitas infrastruktur, rasanya tak kurang-kurangnya disampaikan melalui berbagai media selama beberapa tahun terakhir. Silih

berganti, tamu negara dari negara-negara investor penting, menyampaikan keluhan sama dalam setiap pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (seperti yang sering diberitakan di media televisi). Hal itu khususnya terkait dengan infrastruktur jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Namun, rasanya kita tak kunjung melihat perbaikan signifikan-kecuali bandara. Bukan berita baru bahwa infrastruktur memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan. Dilain pihak, negara-negara lain semakin unjuk gigi dengan berbagai infrastruktur, seperti bandara, pelabuhan, jalan raya dan jaringan kereta api kelas dunia. Bukan hal aneh, bahwa Indonesia terkenal dengann Ibu Kota, antrean panjang di Merak, serta kehancuran jalan trans-jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang kian masif dan meluas. Siaran pers per 3 Nopember 2011 oleh Kementrian Perhubungan lewat radio, ditegaskan bahwa Pemerintah akan mengembangkan dan mengelola pelabuhan Merak, tetapi sangat disayangkan, tidak disertai dengan konsep bisnis, atau malah akan menjadi beban bagi anggaran negara. Begitu juga dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Penulis pernah menghadiri salah satu seminar tentang kajian teknologi dan keekonomian Jembatan Selat Sunda, ternyata masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengkaji kondisi teknis dan struktur jembatan. Meskipun yang digunakan adalah contoh jembatan di China dan beberapa negara lain, tapi kajiannya belum mendalami kondisi teknis seperti tidak tersedia pulau yang layak sebagai penyangga pondasi dan struktur, kondisi arus laut yang sangat kuat dan berubah-ubah, kondisi angin yang kencang dan berubah-ubah, adanya gunung berapi Krakatau dan anak gunung Rakata.

Belum lagi soal infrastruktur interkoneksi antarpulau, kian tertatih-tatihnya penyediaan energi dan listrik, serta hancurnya berbagai infrastruktur pedesaan dan pertanian. Semua ini penyebab ekonomi biaya tinggi dan kian mengeringnya arus investasi riil ke daerah. Kondisi akan semakin serius tanpa langkah serius untuk mengatasi. Padahal, dua pulau ini yakni Kalimantan dan Sulawesi banyak memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat. Jika dikelola secara profesional maka akan memberikan dampak yang sangat bagus. Beberapa harian mengabarkan bahwa penduduk perbatasan Kalimantan yang berwarga negara Indonesia, lebih cenderung memilih fasilitas yang didapat di Negara Malaysia dibandingkan Indonesia. Mengapa bisa demikian ? Seharusnya kondisinya terbalik karena luas kepemilikan pulau Kalimantan, lebih besar $\frac{3}{4}$ Indonesia daripada Malaysia.

Di ibukota dan Jawa, dapat dijadikan contoh sulitnya Indonesia keluar dari karut-marut infrastruktur ini karena tak terlepas dari absennya konsep Geopreneurship. Desain kebijakan besar yang jelas serta kepemimpinan yang tegas dan visioner. Tak adanya prioritas pada pengembangan sistem transportasi kereta api yang menjadi kunci untuk mengurangi beban berlebihan pada moda jalan di Ibu Kota dan Jawa. Setiap hari, disuguhkan pemandangan begitu banyaknya truk-truk kontainer dari kawasan industri di Jawa Barat menuju pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Merak. Mengapa tidak dibuatkan pelabuhan kontainer di daerah laut Karawang misalnya ? Sehingga dapat menjadi efisien dan menjadi daya tarik bagi investor ? Dilihat dari jumlah kawasan industri di Jawa Barat, akan memberikan nilai keekonomian yang baik bagi Pemda Karawang untuk membangun pelabuhan peti kemas (*Terminal Handling Crane*) karena daerah ini memberikan indikator-indikator investasi yang signifikan.

Dari berbagai penjelasan-penjelasan ini, terlihat bahwa skema kebijakan dan gagasan mempercepat pembangunan infrastruktur yang diluncurkan beberapa tahun terakhir juga tak kunjung terasa jejaknya. Ini akibat ketidakberanian pemerintah mengambil terobosan. Dalam konsep Governpreneurship, dituntut berjiwa *Risk Taker* dan bukan *Risk Waiver*. Seorang CEO mempunyai komitmen, terutama mengelola porsi anggaran infrastruktur yang hanya sekitar 2 persen dari produk domestik bruto. CEO juga harus mengelola dana yang terbatas itu dari korupsi sehingga infrastruktur tidak hancur sebelum waktunya. Etika bisnis, harus dipahami dan diresapi oleh para Governpreneurship. Misalnya, di Jakarta, masih lebih fokus ke pembangunan gedung mewah DPR daripada pembangunan tol diatas tol dalam kota (sistem dua susun misalnya). Dibeberapa daerah, membiayai pilkada yang mahal mampu, tetapi infrastruktur yang vital bagi perbaikan kesejahteraan rakyat terbengkalai. Jika total biaya pilkada dijadikan modal disetor (*paid up capital*) maka akan mudah bagi investor untuk ikut bergabung dalam mengelola daerah-daerah. CEO perlu membuat terobosan (*breakthrough strategy*) di bidang infrastruktur, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen di tahun 2015, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembentukan koridor ekonomi baru dapat terealisasi dengan baik.

C.3.1 Jalan sebagai alat vital bagi investasi

Penulis mengajak untuk melihat potensi yang belum dikembangkan secara maksimal terutama di daerah Sulawesi. Dasar pertimbangannya adalah Pulau Sulawesi adalah merupakan salah satu jalur perdagangan ke wilayah pasifik baik melalui jalur laut dan udara. Pulau Sulawesipun, mempunyai potensi untuk dikembangkan seperti halnya pencaangan koridor utama oleh pemerintah. Bagaimana dengan kondisi jalan dan jalur perdangannya ? Data-data mengenai tersedianya jalan nasional dan jalur distribusi yang ada di Sulawesi dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bisa atau tidaknya interkoneksi antar daerah : Sulawesi Utara 1.397,051 km, Gorontalo 606,696 km, Sulawesi Tengah 2.181,945 km, Sulawesi Barat 571,981 km. Sulawesi Selatan 1,722,856 km. Kompas (Agustus 2011). Dari data-data ini, jelas terlihat bahwa pembangunan jalan masih belum seluruhnya terpenuhi. Belum diperhitungkan dengan kondisi kelayakan jalan seperti kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Kondisi jalan yang merupakan jalur distribusi sangat diperlukan bagi pengusaha dengan berbagai pertimbangan seperti jenis usaha, rute, waktu tempuh dan biaya yang harus dikeluarkan akibat jalur distribusi jalan dan jembatan yang kurang memadai. Contohnya, di pola distribusi melalui jalan darat di Sulawesi Selatan, untuk usaha pengangkutan udang dari pinang ke makasar (200 km), jarak tempuh normal 2 jam biaya Rp. 720 ribu harus ditempuh 4 jam dengan biaya Rp. 1,2 juta. Kakao dari Luwu Timur ke Makasar (600 km), jarak tempuh normal 14 jam biaya Rp. 2 juta harus ditempuh 20 jam dengan biaya Rp. 2,6 juta. Beras dari Sidrap ke makasar (220 km), jarak tempuh normal 5 jam biaya Rp. 800 ribu harus ditempuh 8 jam dengan biaya Rp. 1,1 juta. Jasa Angkutan Umum dari Makasar ke Toraja (300 km), jarak tempuh normal 8 jam biaya Rp. 1 juta harus ditempuh 10 jam dengan biaya Rp. 1,3 juta. Perhitungan waktu dan jarak tempuh ini memperlihatkan berapa besar biaya angkut yang harus dikeluarkan oleh pengusaha saat ini. Penulis menduga bahwa di beberapa pulau di Indonesia juga mengalami hal yang sama sehingga dapat menjadi sebuah potret mengenai infrastruktur jalan darat terkini.

Selain pengembangan program pemerintah atas 7 (tujuh) Klaster Industri, perlu di pikirkan juga pelabuhan peti kemas internasional di Makasar Sulawesi Selatan dan Bitung Sulawesi Utara sebagai pelabuhan akhir untuk tujuan ekspor ke negara-negara Asia Pasifik. Hal ini dapat mengurangi beban pulau Jawa sebagai pelabuhan terminal peti kemas. Pemerintah juga perlu memperbaiki kondisi jalan trans Sulawesi yang rusak dan memperlambat distribusi barang. Penulis melihat bahwa CEO perlu membenahi

jalan-jalan ini bisa dilakukan dengan konsep kerjasama dengan pihak swasta (private partnership program). Berdasarkan pengamatan penulis bahwa letak jalan masih terdapat di Jalur Trans Sulawesi bagian utara, diperlukan pembangunan jalur Trans Sulawesi bagian selatan dari Manado sampai Makasar. Banyak potensi di daerah-daerah bagian bawah, juga termasuk dari pulau-pulau sekitarnya yang bisa dikembangkan.

C.4 Perbandingan dengan negara-negara lainnya

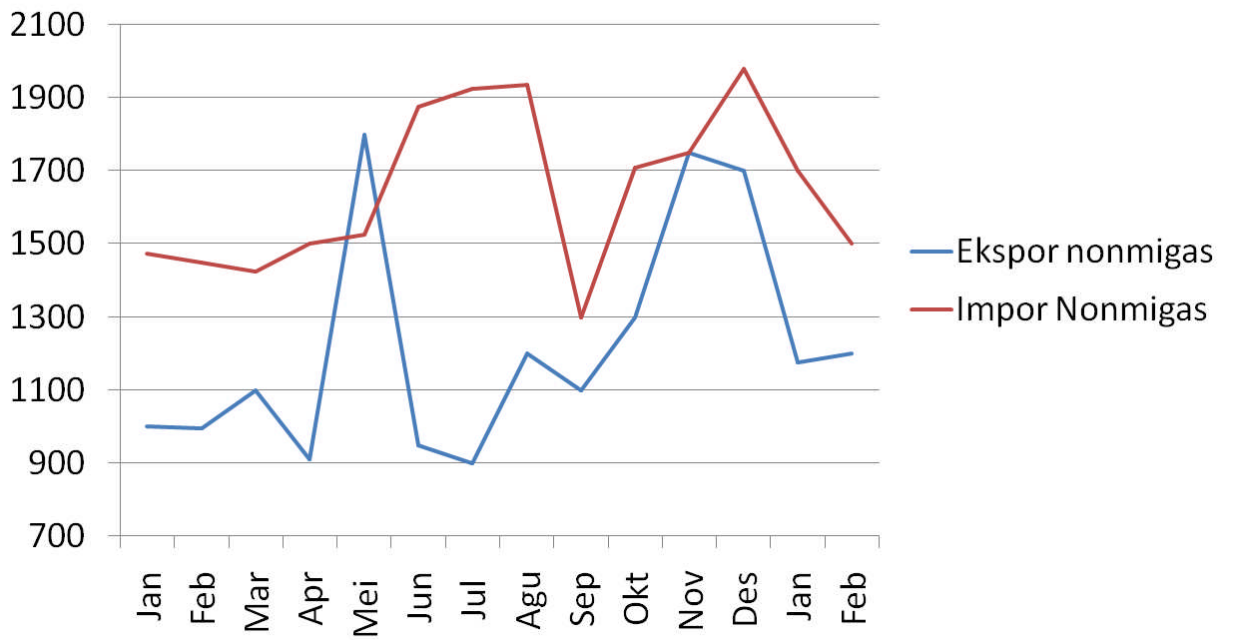
Untuk mendapatkan informasi keseluruhan mengenai infrastruktur di Indonesia maka penulis mengutip dari Prof Faisal Basri (Basri F 2000, 21) dimana Jalan yang layak dipakai di Indonesia adalah 9.500 km (27,94 %) selebihnya rusak berat 2.500 km dan rusak ringan 3.800 km. Panjang pantai Indonesia 81.000 km sedangkan jumlah pelabuhan hanya 18 buah. Jepang mempunyai panjang pantai 4.500 km tetapi setiap 11 km memiliki pelabuhan. Hal ini berarti bahwa Jepang memiliki kurang lebih 7,382 pelabuhan. Thailand mempunyai panjang pantai 2,600 km tetapi memiliki 52 buah pelabuhan. Dilihat dari kenyataan ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memungkinkan menjadi tempat yang subur untuk penyelundupan. Indonesia mulai membangun jalan tol setidaknya 12 tahun lebih cepat dari Malaysia. Republik Rakyat China (RRC) juga terhitung terlambat memulai pembangunan jalan tol dibandingkan Indonesia. Tetapi, sekarang jalan tol Malaysia sepanjang 6.000 kilometer dan dibangun oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sementara total jalan tol RRC sudah mencapai 90.000 kilometer. Menurut analisis penulis bahwa masih ada pertanyaan yang mengganjal bahwa buku ini diterbitkan awal tahun 2000 tetapi sampai saat ini, kondisi infrastruktur tidak banyak berubah. Penulis melihat bahwa sangat diperlukan jiwa *Governpreneurship* untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan semangat *risk taker* dan *Private Partnership Program*. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur. Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3% terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3% (2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP. Krisis ekonomi 1997-1998 membuat kondisi infrastruktur di Indonesia menjadi sangat buruk. Bukan saja pada saat krisis, banyak proyek-proyek infrastruktur baik yang

didanai oleh swasta maupun dari APBN ditangguhkan, tetapi setelah krisis, pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN untuk sektor ini telah turun sekitar 80% dari tingkat pra-krisis. Pada tahun 1994, pemerintah pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk pembangunan, 57% diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan menjadi jauh lebih sedikit yakni kurang dari 5 milyar dolar AS, dan hanya 30%-nya untuk infrastruktur. Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan

C.5 Peluang Ekspor

Rheinald Kasali, Kompas (Juli 2012) dan Kristanto (2009), mempunyai pendapat yang sama yakni hendaknya pemerintah focus pada pengembangan pasar ekspor dibandingkan pasar domestik. Kondisi ekonomi global berpengaruh tetapi pengaruhnya positif.

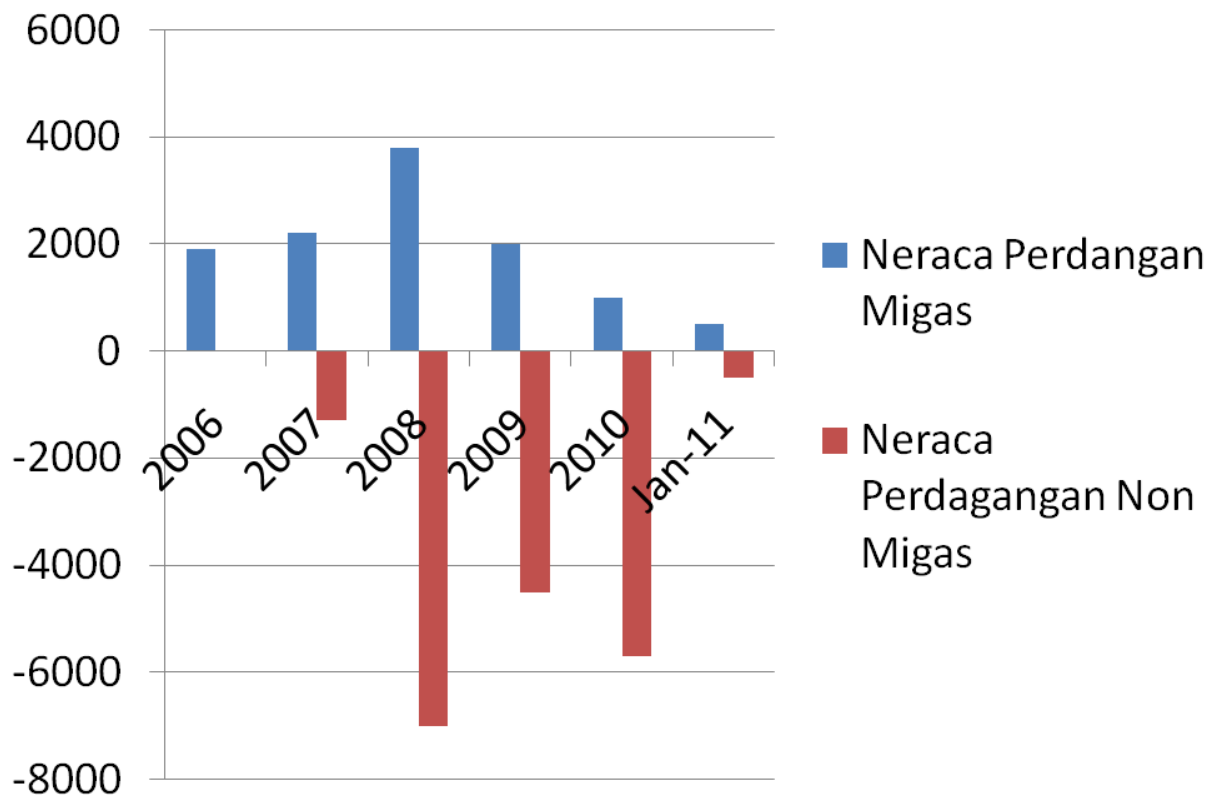
Impor Nonmigas dari china Lebih Besar daripada Ekspor Nonmigas ke China



2010

2010

2011



Dari kedua tabel diatas, penulis melihat bahwa masih sangat besar kesempatan untuk melakukan ekspor terutama ke negara China yang tidak terpengaruh atas krisis Eropa. Produk-produk yang dihasilkan dari klaster-klaster yang dibentuk oleh pemerintah, bisa dipasarkan ke China. Juga negara-negara Eropa menjadi peluang ekspor dikarenakan adanya dampak krisis yang membuat pola konsumsi masyarakat Eropa, mulai berubah dari yang produk-produk mahal ke produk-produk standar.

C.6 Pengelolaan Kluster-kluster

Pengelolaan Kluster adalah melalui pemerintah pusat dan dikelola oleh professional yang tidak mempunyai kepentingan dengan birokrasi. CEO dalam industri swasta, tidak dipengaruhi oleh pemilik perusahaan. Intervensi dari pemilik perusahaan adalah pada saat pelaporan akhir tahun dengan membandingkan rencana dan implementasi program kerja yang disepakati bersama. Untuk ke 3 (tiga) kluster industry diperlakukan sebagai Strategic Business Units (SBU). Tiap pemimpin kluster diberi wewenang untuk mengelola dan mendatangkan keuntungan. Begitu juga pengelolaan beberapa sub-sub kluster, dipimpin oleh seorang Chief yang professional. Setiap pemimpin kluster diberi wewenang penuh untuk melakukan negosiasi dengan pihak swasta dalam membangun infrastruktur. Bentuk kerjasamanya, bias dalam bentuk Build Operation and Transfer (BOT) selama kurun waktu yang disepakati, dan bentuk kerjasama lainnya. Dengan adanya kerjasama ini, maka akan mudah untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan pengusaha daerah seperti dermaga, jalan, jembatan, dan lain-lain. Setiap pengusaha local atau daerah yang menggunakan fasilitas tersebut, diwajibkan membayar karcis, fee, dan lain-lain. Kerjasama yang sudah ada di Indonesia adalah pembangunan jalan tol yang diserahkan kepada pihak swasta untuk pengelolaan tetapi pendapatan dibagi dengan pemerintah. Biasanya didaerah, akan terjadi benturan kepentingan (*conflicts of interest*) dengan pejabat daerah yakni Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk pemerintah daerah, bias diberikan fee perbulan (misalnya 3 % dari pemasukan). Pemasukan dari daerah bukan hanya didapat dari fee tetapi juga dari pembayaran ijin atas pelaksanaan konstruksi infrastruktur, penerimaan pajak dari para pekerja dan penerimaan pajak penghasilan dari para pengusaha local yang mendapatkan manfaat atas produksi mereka.

Setelah kerjasama BOT jatuh tempo, biasanya dalam 30 tahun, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menikmati hasil seutuhnya. Dengan demikian, Negara Indonesia akan bias menyaingi negara-negara tetangga khususnya dalam pengadaan infrastruktur untuk kebutuhan industri. Pemerintahpun mempunyai dana dan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan.

D. SIMPULAN DAN SARAN MANAGERIAL

Dari pemaparan dan analisis paper ini, maka penulis berkesimpulan dan memberikan beberapa saran yakni :

- Diperlukan seorang Presiden merangkap sebagai Chief Executive Office (CEO) dengan *Grand Design Concept*, kepemimpinan yang tegas dan visioner, berjiwa *Risk Taker* dan bukan *Risk Waiver* dan dengan penuh komitmen.
- Konsep Governpreneurship diperlukan dengan membuat suatu terobosan (*breakthrough strategy*) di bidang infrastruktur terutama interkoneksi antar daerah dan pulau-pulau, demi mengejar pertumbuhan ekonomi 7-8 persen di tahun 2015, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembentukan koridor ekonomi baru dapat terealisasi dengan baik dan inflasi bisa dipertahankan atau bahkan turun
- Perubahan paradigma dari Work and Pay ke Entrepreneurship dengan memfokuskan pada pengembangan sentra-sentra industri terutama diluar pulau Jawa dengan orientasi ekspor barang-barang murah.

Referensi Pustaka :

Bank Indonesia (2010), Laporan bulan Agustus.

Basri F (2000), Perekonomian Indonesia, Grasindo

Bakrie & Brothers (2011), Pemaparan Keuangan Triwulan kedua, naskah yang tidak dipublikasikan

Kementrian PU (2011), Seminar Design and Build Jembatan Selat Sunda (JSS), naskah yang tidak dipublikasikan

Kementrian Keuangan (2010), Laporan dan pemaparan kondisi ekonomi pada Capital Market and Investor Summit, Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Pemaparan lisan yang ditulis kembali oleh penulis.

Kompas 2011, beberapa data-data dan berita selama satu semester Januari s/d Juni.

Kompas 2012, 3 Juli hal 20

Kristanto R H HC 2009, Kewirausahaan Entrepreneurship, Pendekatan Manajemen dan Praktik

Moelong, L. J. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke dua puluh tujuh. PT Remaja Rosdakarya

Pidato Menteri BUMN (2011), Indonesian International Conference Focus on Indonesian Economy 2011, Hotel Shangrila Jakarta. Pemaparan lisan yang ditulis kembali oleh penulis.

Zetha E dan Tarsidin (2011), Indonesia Economic Outlook 2011, LPEM-FE UI

www.targermdg's.org

RPSEP-14

Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Banten

Fitri Amalia
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
v3amalia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Propinsi Banten tahun 2010-2013. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terjadinya *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Propinsi Banten. Dalam hal ini, variabel dependen yang digunakan adalah belanja daerah sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Objek penelitian meliputi 8 kabupaten dan kota di Propinsi Banten dengan sumber data yang diperoleh dari Laporan Relisasi APBD 2010-2013. Desain penelitian menggunakan model pengujian hipotesis dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, (2) PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, (3) tidak terjadi *flypaper effect* pada kabupaten dan kota di Propinsi Banten pada tahun 2010-2013.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

Abstract

This study aims to identify the flypaper effect on the country and city in Banten Province in 2010-2013. The main objective of this research is to provide empirical evidence for the occurrence of flypaper effect on General Allocation Fund (DAU) and Local Revenue (PAD) to Regional Expenditure (BD) of country/city in Banten Province. In this case, the dependent variable used is the shopping area while the independent variable is PAD and DAU. Object of research include 8 counties and cities in Banten Province with data source Realisasi Budget Report 2010-2013. Design research using model hypothesis testing using secondary data in the form of panel data. The method of analysis of data used is multiple regression. This research result indicates that (1) PAD and DAU simultaneously influence significantly to regional expenditure, (2) PAD and DAU partially influential significantly against regional expenditure, (3) does not occur flypaper effect on contry and city in Banten in the 2010-2013.

Keyword: Local Revenue, General Allocation Fund, Regional Expenditure, Flypaper Effect

A. Pendahuluan

Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri masyarakat didaerahnya lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Menurut Undang – undang No. 32 tahun 2004 , otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Otonomi daerah dilakukan agar kesejahteraan yang didapat oleh seluruh masyarakatnya dapat merata atau tidak hanya sebagian orang saja yang merasakan kesejahteraan.

Dalam hal pengelolaan pembangunan dan keuangan, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran. Setiap daerah diwajibkan untuk membuat suatu rencana atau rancangan keuangan daerah yang biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang mana pada sebelumnya telah dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). Tujuan dirancangnya APBD ini adalah agar pemerintah daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan.

Adapun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah - pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini haruslah memberikan atau menyediakan apa yang disebut dengan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang dimaksud disini adalah dapat berupa seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perumahan rakyat, penataan ruang, perlindungan lingkungan hidup dan pelayanan lainnya yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

Kebutuhan akan pelayanan publik ini pun berbeda-beda kebutuhannya di setiap masing - masing daerahnya. Dalam rangka menyediakan pelayanan publik ini, maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang mana pengeluaran ini biasanya disebut dengan Belanja daerah.

Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya dana Alokasi Umum diperoleh tetap porsi nominalnya. Kuncoro (2004:26) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi *in efisien* pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *Flypaper Effect*.

Propinsi Banten sebagai salah satu propinsi yang terbentuk setelah adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mampu dalam berinovasi serta mengeksplorasi sumber-sumber alam yang terkandung di wilayah masing-masing. Sehingga lambat laun ketergantungan pada pusat dapat dihilangkan, seiring dengan adanya penambahan PAD. Kontribusi PAD memiliki peranan dalam rencana peningkatan Kemampuan daerah dari segi keuangan agar tidak harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan yakni : (1) Apakah DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, (2) Apakah PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, (3) Pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah (BD) berkaitan dengan Konsumsi Daerah, pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah (*government consumption*) dan konsumsi rumah tangga (*household consumption/private consumption*). Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Jika pendapatan disposabel meningkat,

maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan diposabel.

Menurut Mankiw (2007): Pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah permintaan terhadap barang dan jasa. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yang utama: konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Menurut Prasetya (2012:5), teori pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori tentang pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu teori makro dan mikro.

a. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

b. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

Menurut Kesumadewi dan Rahman (2007:70), Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Darise (2009:131) mengelompokka Belanja Daerah menurut Fungsi, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok Belanja, dan Jenis Belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi pengelolaan keuangan negara. Belanja penyelenggaran urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pelayanan standar minimal. Urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan juga potensi daerah (UU No 33 Tahun 2004). Adapun kebutuhan daerah ini dicerminkan dengan faktor luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan untuk kapasitas fiskal dicerminkan dengan faktor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Dana Alam. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Dengan maksud untuk melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Abdul Halim, 2009).

Besarnya besaran DAU menurut PP nomor 55 tahun 2005 pasal 37 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota. DAU untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{DAU} = \text{CF (Celah Fiskal)} + \text{AD (Alokasi Dasar)}$$

Celah Fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21). Kebutuhan fiskal diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. (Bahrul, 2010). Menurut Darise (2009:49), Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Menurut Bastian (2006:340), Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. *Pajak daerah*, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
2. *Retribusi daerah*, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. *Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan*, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. *Lain-lain PAD yang sah*, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas.

4. Flypaper Effect

Analisis mengenai *Flypaper Effect* mengandung dua prinsip dasar yaitu: 1) Model yang menunjukkan bagaimana pemerintah merespon bantuan dana transfer (*grants*) yang akan digunakan untuk mengukur demand pelayanan publik; 2) Model median (rata-rata) merupakan model yang dipilih untuk melihat respon transfer per wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, dimana pemerintah melihat ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis untuk dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri. (Tresch.2002:920-921).

Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak mengandalkan atau menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD (Maimunah, 2006). *Flypaper Effect* itu sendiri merupakan respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2002:920) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang

memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah.

Flypaper Effect terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih.

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Pada penelitian Sukri Abdullah & Abdul Halim (2004) terjadi *flypaper effect* dalam merespon (belanja) transfer (DAU) dan PAD di pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut juga diperkuat oleh Deller dan Maher (2005) yang meneliti mengenai kategori pengeluaran daerah dengan fokus pada terjadinya *flypaper effect*. Mereka menemukan pengaruh *unconditional grants* pada kategori pengeluaran adalah lebih kuat pada kebutuhan non esensial atau kebutuhan *luxury* seperti taman dan rekreasi, kebudayaan dan pelayanan pendidikan daripada kebutuhan esensial atau normal seperti keamanan (*police*) dan proteksi terhadap kebakaran.

Penelitian Legrenzi dan Milas (2001) juga memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa *local governments consistently increase their expenditure more with respect to increase in State transfer rather than increase in own revenues*

Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
2. Diduga Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah
3. Diduga pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD

B. Metodologi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) Variabel Independen dan 1 (satu) Variabel Dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD).

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yaitu data tahun 2010 - 2013 dan data *cross section* yaitu data 8 kabupaten/kota yang berada di provinsi Banten yang terdiri dari: Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon, Tangerang, Serang dan Tangerang Selatan. Anggota populasi yang ada diambil secara keseluruhan menggunakan teknik sensus atau disebut sampel jenuh.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan software statistic Eviews 6 untuk menjawab semua tujuan dari penelitian ini. Tahapan analisis dalam penelitian ini terdiri dari: estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, Uji asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi dan Analisis Ekonomi. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + e$$

Dimana :

BD : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

i : *Cross-section*

t : *Time series*

β_0 : Intesep/konstanta

β_1, β_2 : Koefisien regresi

e : *Error term*

Estimasi model panel data tergantung kepada asumsi yang dibuat peneliti terhadap intersep/ konstanta (*intercept*), koefisien kemiringan (*slope coefficients*) dan variabel error (*error term*). Model regresi dengan data panel secara umum mengakibatkan kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual *time series*, *cross-section* maupun gabungan keduanya. Maka terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan data panel ini yaitu:

a. Pooled Least Square (PLS)

Metode ini juga dikenal sebagai *Common Effect Model* (CEM). Pada metode ini, model mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama dan *slope* koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross-section*. Model data panel untuk teknik regresi adalah sebagai berikut;

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed effect (efek tetap) dalam hal ini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian pula halnya dengan koefisien regresi yang memiliki besaran yang tetap dari waktu ke waktu. Model ini menambahkan variabel *dummy* untuk mengizinkan adanya perubahan *intercept*. Model data panel untuk teknik regresi adalah sebagai berikut;

$$Y_{it} = a_1 + a_2 D_2 + \dots + a_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

c. Random Effect Models (REM)

Dalam menganalisis regresi data panel, selain menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), analisis regresi dapat pula menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Pendekatan efek random ini digunakan untuk mengatasi kelemahan *Fixed Effect Model* yang menggunakan variabel semu, sehingga akibatnya model mengalami ketidakpastian. Model Random Effect adalah variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS). Model data panel untuk teknik regresi adalah sebagai berikut;

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \alpha_{it} + \mu_{it}$$

Sebelum ditentukan model regresi data panel yang akan dipakai, maka terlebih dahulu dilakukan uji chow dan uji hausman. Uji Chow test yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data. Uji ini dapat dilakukan dengan uji *restricted F-Test* atau uji *Chow-Test*. dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : Model PLS (*Restricted*)

H1 : Model FEM (*Unretriced*)

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F-statistik. Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik yaitu jika nilai F-test atau *Chow Statistik* (F-statistik) hasil pengujian lebih besar dari Ftabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Setelah uji Chow dilakukan lalu dilanjutkan dengan uji Hausman. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan dipilih. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model REM

H_1 : Model FEM

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistic *Chi-Square*. Jika *Chi-Square* statistik $>$ *Chi-Square* table maka H_0 ditolak (model yang digunakan adalah *Fixed Effect*).

Untuk menguji hipotesis, maka dilakukan tiga pengujian lainnya yakni: Uji F, uji t serta koefisien determinasi. Uji F atau uji model secara keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau model diterima. Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji (F-statistik) pada hasil regresi dengan F-tabel. Jika jika nilai $F\text{-stat} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sebaliknya, jika $F\text{-stat} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel bebas. Koefisien penduga perlu berbeda dari nol secara signifikan atau *pvalue* sangat kecil. Uji t biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil uji (t-statistik) pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika jika nilai $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Atau bisa dikatakan Uji ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai R_2 atau (R_2 adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin baik.

C. Hasil dan Pembahasan

Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000, dibentuk melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2000, sebelumnya Banten merupakan keresidenan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada awal pembentukannya Banten memiliki 6 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Pada tanggal 17 Juli 2007 kota serang dibentuk sebagai kota otonom sedangkan KotaTangerang Selatan dibentuk sebagai kota otonom pada tanggal 29 Oktober 2008 dari wilayah Kabupaten Tangerang. Maka saat ini Provinsi Banten memiliki 8 Kabupaten/Kota. Perekonomian daerah Provinsi Banten terletak pada beberapa sektor diantaranya; penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian dan peternakan, perhutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, serta sektor pariwisata.

Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, apakah menggunakan PLS atau FEM, maka dilakukan suatu uji yang dinamakan dengan uji Chow. Dalam penentuan model data panel dengan menggunakan uji Chow ini dilakukan dengan cara membandingkan Probability dari Cross Section – F dengan $\alpha = 0,05$. Pengujian hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model PLS (Restricted)

H_1 : Model FEM (Unrestricted)

Dari hasil regresi berdasarkan metode PLS dan FEM diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.695634	(7,22)	0.0007
Cross-section Chi-square	33.087485	7	0.0000

Dari tabel diatas diperoleh nilai F-statistik sebesar 5.695634 dengan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0.0007. ini berarti probabilitas cross-section F < 0,05 maka H_0 ditolak sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Setelah uji chow dilakukan, maka dilakukan pula uji Hausman, yakni untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang dipilih. Uji Hausman test ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dan α . Dengan pengujian hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Random Effect Model (REM)

H_1 : Fixed Effect Model (FEM)

Dari hasil regresi berdasarkan metode REM diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.902367	2	0.0862

Dari tabel diatas diperoleh nilai Chi-Square statistic sebesar 4.902367 dan nilai probabilitas 0.0862. ini berarti probabilitas cross-section random $> 0,05$ maka H_0 diterima sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan model random effect, maka hasil regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Regresi dengan Random Effect Model

Dependent Variable: BD?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Included observations: 4				
Cross-sections included: 8				
Total pool (balanced) observations: 32				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.95	9.61	2.024329	0.0522
PAD?	2.63	0.23	11.21377	0.0000
DAU?	0.94	0.16	5.854160	0.0000

R-squared	0.9173	Mean dependent var	5.90
Adjusted R-squared	0.9116	S.D. dependent var	4.15
S.E. of regression	1.23	Sum squared resid	4.40
F-statistic	160.967	Durbin-Watson stat	1.458
Prob(F-statistic)	0.0000		

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 3 di atas dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) didapatkan hasil persamaan sebagai berikut :

$$BD : 1,95 + 2,63*PAD + 0,94*DAU + e$$

Dimana :

BD : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum)

e : *error term*

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas F statistik yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berdasarkan hasil uji t, maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Dari nilai koefisien PAD diketahui pengaruh positif antara PAD dengan Belanja Daerah. Setiap kenaikan 1 persen PAD akan meningkatkan BD sebesar 2,63 persen, begitupula sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kontributor penyumbang dana dalam Belanja Daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) maka akan semakin baik dan semakin mandiri dalam hal keuangan daerahnya. Karena daerah tersebut dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri tanpa mengharapkan pemberian dari Pemerintah Pusat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu Sumarmi (2010:7) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Daerah akan lebih dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula.

Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini ditunjukkan dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Semakin tinggi nilai DAU menyebabkan belanja daerah semakin besar pula. Dari nilai koefisien DAU diketahui bahwa setiap kenaikan 1 persen DAU akan meningkatkan BD sebesar 0,94 persen, begitupula sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah yang bersifat umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterimanya tinggi. Sedangkan suatu daerah yang potensi fiskalnya tinggi maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterimanya rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian Provinsi Banten tergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. Dilihat juga dari pengertiannya tujuan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) itu sendiri pada dasarnya sebagai “alat pancing” untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini sama seperti pada penelitian Diah Ayu dan Arif Rahman (2007:11). Serta pada Prakosa (2004:13), dimana secara empiris besarnya Belanja daerah (BD) dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterimanya dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Jika hal ini masih berlangsung terus maka otonomi daerah kemungkinan besar akan terhambat.

Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,9116. Hal ini berarti bahwa 91,16 persen Belanja Daerah (BD) di Propinsi Banten dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan sisanya yaitu 8,84 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Analisis flypaper effect yang dapat disimpulkan dari hasil diatas adalah bahwa meskipun kedua variabel bebas (PAD dan DAU) secara signifikan dapat mempengaruhi variabel terikatnya (Belanja Daerah), namun PAD ternyata lebih berpengaruh dibandingkan DAU dimana koefisien regresi variabel PAD lebih besar dibandingkan koefisien regresi DAU. Dimana koefisien regresi dari PAD sebesar 2,63 sedangkan koefisien dari DAU sebesar 0,94. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* artinya kebijakan Belanja Daerah (BD) Pemerintah Provinsi Banten periode 2010-2013

lebih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang Dana Alokasi Umum (DAU). Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Nunuy dan Halida (2013:12) dimana tidak terjadi *flypaper effect* pada Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2006-2012.

D. Penutup

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Hasil penelitian dengan variabel yang digunakan, menunjukkan tidak terjadi *flypaper effect* pada kabupaten kota di provinsi Banten pada tahun 2010 -2013.

E. Daftar Pustaka

Bahrul Ulum Rusydi. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi 2)*. Penerbit Indeks. Jakarta.

Deller, Steven, Craig Maher. 2005. Categorical Municipal Expenditures with a focus on the flypaper effect. Public Budgeting/Fall. Kesumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. JAAI Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67–80. Yogyakarta.

Kesumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. JAAI Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67–80. Yogyakarta.

Kuncoro, Haryo. 2004. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9

Legrenzi. Gabriella & Costas Milas. 2001. Non-linier and asymetrics adjustment in the local revenue –expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan. *Working paper*.

Maimunah, Mutiara. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. 2006. Padang

Mankiw, Gregory. N. 2007. “*Pengantar Ekonomi Makro*”, Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta. Mankiw, N. G. 2003. *Teori Makroekonomi*

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Volume 6 No 2 Desember 2004

Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik Bagian V : Teori Pengeluaran Pemerintah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Sukriy, Abdullah., & Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi STEI No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.

Sumarmi, Saptaningsih. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta*”. 2010. Yogyakarta.

Tresch, Richard. 2002. “*Finance Public Anormative Theory*”. Department of Economic , Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.

RPSEP-15

PENGELOLAAN SITU/RAWA DI INDONESIA: ISU DESENTRALISASI, PARTISIPASI WARGA, DAN INSTRUMEN EKONOMI

Pitri Yandri

Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah(PSDOD)

(*Research Center for Regional Autonomy*)

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: p.yandri@gmail.com

Abstract

In the Indonesian context, many economic resources are conducted by the wrong actors, and this practice is more common in the activity of natural resource and environmental economic. One of a number of economic resources are swamp. Facts indicate that the regulations associated with swamp is overlap. The indication of the over-lapping of the regulation looks from the unclear whom institutions manage the swamp. This phenomenon then resulted continues decreasing quality of swamp in Indonesia. Seeing the empirical facts, the necessary number of tactical and systematic strategies are required on the spirit of decentralization. This paper elaborates a number of ideas that can be applied in swamp management in Indonesia. The main idea of this paper is that we need an economic instrument that the actors (government, private and community) can be proactively pushed in swamp management in Indonesia. Economic instruments that can be applied is the incentive scheme and the formulation of Corporate-Community Resource Responsibility (CCRR) in each region.

Abstrak

Dalam konteks Indonesia, banyak sekali sumberdaya ekonomi dijalankan oleh pelaku yang keliru, dan praktik ini banyak terjadi pada aktivitas ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. Satu dari sejumlah sumberdaya ekonomi tersebut adalah situ/ rawa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang terkait dengan situ/rawa sangat tumpang-tindih. Indikasi ketumpang-tindihan itu terlihat dari tidak jelasnya institusi mana yang melakukan pengelolaan situ/rawa. Fenomena inilah yang kemudian mengakibatkan situ/rawa di Indonesia terus mengalami penurunan kualitas. Melihat fakta empirik yang ada, diperlukan sejumlah strategi taktis dan sistematis yang disesuaikan dengan semangat desentralisasi. *Paper* ini mengelaborasi sejumlah gagasan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan situ/rawa di Indonesia. Gagasan utama dari *paper* ini adalah kita memerlukan instrumen ekonomi agar pelaku/aktor (pemerintah, swasta dan masyarakat) dapat terdorong secara pro-aktif dalam pengelolaan situ/rawa di Indonesia. Instrumen ekonomi yang dapat diterapkan adalah skema insentif dan formulasi *Corporate-Community Resource Responsibility* (CCRR) pada setiap daerah yang terdapat situ/rawa di dalamnya. **Keywords:** swamp, over-lapping regulation, decentralization, economic instrument, CCRR, incentives

I. Pendahuluan

*Sumber daya umum (public property) ternyata tidak selalu harus diprivatisasi ataupun diserahkan kepada pemerintah. Public goods umumnya bersifat kompetisi namun pada saat yang sama ia juga harus dibagi (shared but at the same time rivalrous). Birokrat sering tidak memiliki informasi yang tepat sementara warga dan pengguna sumberdaya alam tahu semuanya.
(Elinor Ostrom, Peraih Nobel Ekonomi 2009)*

Kalimat itu muncul dari Ostrom ketika Ia mendengar bahwa Ia dinisbat sebagai penerima Nobel Ekonomi tahun 2009, selain kolega akademisnya, Oliver Williamson. Ia *shock* mendengar berita yang disampaikan Komisi Nobel beberapa hari sebelumnya tentang dirinya itu. Terlepas dari suara-suara sumbang atas pemberian hadiah itu, Ia telah berhasil menjelaskan institusi mana (perusahaan, pasar, pemerintah, atau masyarakat dengan norma sosial yang melekat padanya) yang paling cocok menjalankan aktivitas ekonomi tertentu.

Dalam konteks Indonesia, banyak sekali sumberdaya ekonomi dijalankan oleh pelaku yang keliru, dan praktik ini banyak terjadi pada aktivitas ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. Satu dari sejumlah sumberdaya ekonomi tersebut adalah rawa/situ. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1991 tentang Rawa disebutkan bahwa rawa adalah “lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis”. Pada daerah-daerah tertentu, ada banyak sekali istilah yang asosiatif dengan “rawa”. Di Sumatera Barat misalnya, rawa disebut juga “talago”. Sementara di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, rawa disebut juga “situ/setu” atau “embung”. Embung sendiri diartikan sebagai “tempat menampung air” ketika hujan. Dalam bidang pertanian, talago/embung/situ difungsikan sebagai waduk (*small farm reservoir*) yang memasok air ke lahan-lahan pertanian. Istilah-istilah yang bersifat lokal itu kemudian diformalisasi menjadi “rawa”.

Sampai saat ini, belum ada data pasti yang mempublikasi tentang berapa jumlah situ di seluruh Indonesia. Meski terdapat menu “jumlah situ/rawadi Indonesia” pada laman situs internet Kementerian Pekerjaan Umum RI, tetapi ketika dilacak lebih jauh dan sampai artikel ini ditulis, menu pada laman internet tersebut masih kosong-melompong alias tidak terdapat data secuilpun pada menu

tersebut. Padahal jika disadari, kelengkapan dan keakuratan data atau informasi yang bisa diakses oleh publik menjadi “pintu masuk” bagi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tentu didasari oleh pemahaman bahwa dengan tersedia data/informasi yang baik dan akurat, publik bisa memberi kontribusi, baik dalam bentuk penggunaan data tersebut untuk keperluan riset dan pengembangan maupun sebagai basis pengambilan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu, jangan heran jika kemudian data jumlah situ di Indonesia tersebar acak pada berbagai publikasi dan artikel lepas di internet. Damayanti (2012) dari Universitas Indonesia misalnya menyebutkan, di Provinsi Jawa Barat terdapat 354 buah situ dan di Provinsi Jawa Timur 438 buah situ. Di lain pihak, berdasarkan data inventarisasi situ Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum RI yang diadopsi oleh Noviadriana (2012) menyebutkan sebaran situ di Jabodetabek sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Situ di Jabodetabek

No	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Situ
1	Jawa Barat	Kab. Bogor	83
		Kota Bogor	4
		Kab. Bekasi	14
		Kota Bekasi	2
		Kota Depok	23
2	Banten	Kab. Tangerang	24
		Kota Tangerang	5
		Kota Tangerang Selatan	9
3	DKI Jakarta	Jakarta Utara	1
		Jakarta Pusat	2
		Jakarta Barat	0
		Jakarta Timur	8
		Jakarta Selatan	5

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, 2012

Paralel dengan minimnya data itu, dalam tataran akademis, ternyata belum banyak karya tulis yang membahas tentang keberadaan situ di Indonesia. Kalaupun ada, karya tulis itu lebih merupakan tugas akhir pada jenjang sarjana, magister ataupun doktoral yang publikasi penelitiannya tidak tersebar secara luas. Padahal, kita membutuhkan publikasi penelitian itu dalam rangka pengambilan kebijakan. Hasil pelacakan pada situs pencari dan *e-journal*, sedikit sekali hasil penelitian tentang situ yang beredar di internet. Hal itu menunjukkan, permasalahan situ belum menjadi pusat perhatian para pemikir dan akademisi untuk diteliti secara luas. Padahal, isu situ bukan hanya isu ekologis *an sigh*, tetapi juga mencakup isu dengan spektrum persoalan yang sangat luas. Hal itu terbukti dari enam hasil penelitian

yang terlacak adalah penelitian yang dilakukan Alfarobi (2002), Rini (2002), Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007), Tjahjo (2010), Wardianto, *et al.* (tahun anonim), Soekarno, Natasaputra dan Maulana (tahun anonim), Aradhita (2011) dan Yandri (2013).

Alfarobi (2002) misalnya meneliti “Kesesuaian Kawasan Situ Babakan dan Situ Manggabolong sebagai Perkampungan Budaya Betawi”. Sementara Rini (2002) menawarkan topik penelitian “Kajian Ekologi Situ Citayam, Depok Jawa Barat dalam Upaya Pelestarian dan Peningkatan Fungsi Situ”. Di lain lain pihak, Tjahjo (2010) meneliti tentang “Bio-Limnologi dan Sumberdaya Ikan Dalam Rangka Menyusun Model Pemacuan Stok Ikan di Situ Cileunca, Bandung”. Wardianto, *et al.* (tahun anonim) menyusun “Profil dan Permasalahan Perairan Tergenang (Situ, Rawa dan Danau)”. Soekarno, Natasaputra dan Maulana (tahun anonim) mengkaji “Situ Ciharus untuk Penyediaan Air Baku dan Potensi Mikrohidro di Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat”. Lalu Aradhita (2011) mengkaji “Sumberdaya Perairan Situ Cikaret untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor”. Dan terkait dengan isu otonomi dan desentralisasi, Yandri (2013) mengkaji “Pengembangan Kawasan Situ Pulo di Bekasi dengan Pendekatan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*”. Di Kota Depok-Jawa Barat, terdapat blog internet dengan alamat <http://konservasisitud Depok.wordpress.com/> yang mempublikasi hasil riset dan makalah yang khusus membahas persoalan situ di Depok. Slogan menarik yang tertera dalam blog itu amat cemerlang: “berbasis warga, manajemen kolaboratif dan aksi kolektif lokal”.

Wacana partisipasi warga dan pentingnya aksi kolektif yang berangkat dari semangat lokal memang semakin semarak di era otonomi dan desentralisasi. Hal itu terlihat di hampir setiap regulasi yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, partisipasi menjadi salah satu prinsip pelaksanaan. Namun demikian, pertanyaan fundamental yang mesti kita ajukan adalah bagaimana mungkin pengelolaan situ bisa dibangun atas dasar partisipasi warga dan aksi kolektif lokal, jikalau sistem pengelolaan dan pembinaannya masih di tangan pemerintah, khususnya pemerintah pusat?

Dalam Bab III Pasal 5 ayat (1) PP.No. 27/1991 tentang Rawa misalnya disebutkan bahwa “Rawa dikuasai oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah”. Dalam butir (2) disebutkan, “pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh menteri”.

Sementara wewenang dan tanggung jawab pembinaan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Bab V Pasal 7 ayat 3).

Lalu, sampai batas mana wewenang dan tanggung jawab pembinaan situ oleh pemerintah daerah? Ambiguitas regulasi ini tampaknya juga menjadi persoalan yang serius dan ruwet di tataran teknis-implementasi. Bukan itu saja, ambiguitas ini mengakibatkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Noor, 2012). Dari sini bisa terbaca, pemerintah telah gagal dalam menentukan dengan jelas hak kepemilikan situ. Padahal, kata Fauzi (2006), kegagalan dalam menentukan dengan jelas hak kepemilikan bisa berakibat pada munculnya eksternalitas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Fakta empirik misalnya, betapa lahan situ terus terdesak oleh permukiman masyarakat dan bahkan tanah kawasan situ diberi hak pada sejumlah warga. Selain itu, kurangnya pengawasan pemerintah mengakibatkan warga kadang menyerobot atau memanfaatkan secara illegal kawasan situ/rawa.

Tragisnya, salah satu sandaran PP. No. 27/1991 itu adalah UU. No. 5/1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sampai saat ini belum jelas orientasi keberpihakkannya (Wiradi dan Wiradi, dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 2008). Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Setiawan (2008) misalnya mencatat, jumlah konflik bendungan dan sarana pengairan sejak 1970-2001 mencapai 77 kasus dari ribuan kasus konflik yang dipicu oleh persoalan agraria.

Dalam rentang waktu 2010-2012, konflik yang dipicu oleh persoalan agraria kembali menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2010 terjadi sedikitnya 106 konflik agraria, kemudian membengkak menjadi 163 konflik di tahun 2011 yang menyebabkan 22 orang petani dan warga tewas, maka sepanjang tahun 2012, ada 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Konflik pada 2012 itu mencakup luas areal lebih dari 963.411,2 hektar dan melibatkan 141.915 kepala keluarga (KPA, 2012).

Tabel 2. Jumlah dan Luas Lahan Konflik dan KK yang Terlibat dalam Konflik Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Kasus Konflik	Luas Konflik Agraria (hektar)	Kepala Keluarga (KK) yang Terlibat Konflik
2010	106	-	-
2011	163	-	-
2012	198	963.411,2	141.915
2013	369	1.281.660,09	139.874
Luas lahan konflik sepanjang 2004 – 2013: 3.680.974,58 hektar			
Jumlah KK yang terlibat dalam konflik agrarian sepanjang 2004 – 2013:			

Jika dibandingkan tahun 2012, terdapat tren peningkatan kuantitas konflik agraria sebanyak 171 kasus, atau naik 86,36% pada tahun 2013. Terjadi kenaikan luas wilayah konflik sebesar 33,03% antara tahun 2012 ke 2013. Naik 861%, terhitung sejak tahun 2009. Perkebunan merupakan sektor tertinggi dalam hal kuantitas kasus. Namun meski tertinggi, ternyata sektor kehutanan adalah sektor yang paling luas dalam konflik agrarian. Jika dihitung sejak tahun 2009, berarti terjadi peningkatan, 1.744% jumlah KK yang terlibat konflik agrarian. Jatuhnya korban akibat konflik agraria pada tahun ini meningkat tajam, yaitu 525%. Tahun lalu jumlah korban tewas 3 orang petani, dan tahun 2013 mencapai 21 orang.

Tabel 3. Sektor, Jumlah dan Luas Lahan Konflik

Sektor	Jumlah Konflik (kasus)	Luas Lahan Konflik (hektar)
Perkebunan	180	527.939,27
Infrastruktur	105	35.466
Pertambangan	38	197.365,90
Kehutanan	31	545.258
Pesisir/kelautan	9	-
Lain-lain	6	-

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2013

II. Metode

Pembahasan dalam makalah ini dilakukan melalui metode deskriptif-analitis yaitu sebuah metode untuk menggambarkan kondisi tata ruang di Indonesia. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam konteks tata ruang. Dalam kerangka itu, pendekatan penulisan *paper* ini menggunakan beberapa aspek pendekatan sebagai berikut:

1. Keterpaduan (*integrality*)

Pendekatan keterpaduan menekankan pada pentingnya berbagai aspek (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kelembagaan) dalam konteks perencanaan tata ruang. Pendekatan keterpaduan ini juga menekankan pada pentingnya keterpaduan antar-*stake holder*, khususnya partisipasi masyarakat lokal.

2. Pendekatan Sistem (*system*)

Pendekatan sistem memungkinkan semua pihak dapat meninjau hubungan kesaling-terkaitan (*interrelation*) berbagai faktor yang mempengaruhi tata kelola situ/rawa di Indonesia.

Pisau analisis menggunakan pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep partisipasi dan instrumen ekonomi. Pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan dalam upaya pemetaan persoalan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah beserta implikasi implementasinya. Konsep partisipasi digunakan dengan argumen bahwa konsep ini sejalan dengan semangat desentralisasi. Justru dengan adanya partisipasi masyarakat lah maka desentralisasi dapat berjalan efektif. Sementara konsep instrumen ekonomi digunakan sebagai upaya elaboratif-rekomendatif kepada pemerintah atas tata kelola situ/rawa di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Justifikasi Teoritik

Bentuk-bentuk konflik lahan, khususnya lahan kawasan situ, baik antarmasyarakat (*horizontal conflict*) maupun antara masyarakat dengan aparat pemerintah (*vertical conflict*) itu bisa saja dianggap sebuah eksternalitas, lebih tepatnya eksternalitas publik (Hartwick dan Olewiler, 1998 dalam Fauzi, 2006). Eksternalitas publik terjadi jika barang publik (*public good*) dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Pada kawasan situ, pemanfaatan oleh satu pihak meskipun tidak mengurangi kuantitas untuk dimanfaatkan oleh pihak lain (dalam hal pemandangannya), namun nyatanya kawasan situ berkurang kualitasnya, baik karena pendangkalan dan pencemaran limbah, perubahan tataguna lahan, penurunan daya dukung (*carrying capacity*) dan lain sebagainya.

Pemahaman tentang eksternalitas ini menjadi penting karena erat kaitannya dengan efisiensi alokasi sumber daya. Efisiensi alokasi sumber daya sendiri terkait dengan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*), apakah itu bersifat terpusat (*central planning*), kediktatoran, melalui mekanisme pasar (*free market*) (Fauzi, 2006) ataupun terdesentralisasi.

Secara teoritik-formal, alokasi *public good* yang optimal dapat diturunkan dari fungsi utilitas individu. Fungsi utilitas individu untuk *private good* y dan *public good* z adalah $U = u(y, z)$. Fungsi pajak adalah $t(z)$. Sehingga pendapatan setelah kena pajak menjadi $[y = Y - t(z)]$ dan fungsi utilitasnya menjadi

$U = u[Y - t(z), z]$. Setiap individu akan memaksimalkan utilitasnya terhadap z sebagai berikut:

$$\frac{dU}{dz} = -u_y t'(z) + u_z = 0$$

$$t'(z) = \frac{dt(z)}{dz} = p/N$$

$$\frac{dU}{dz} = MRS = \frac{u_z}{u_y} = \frac{p}{N}$$

$$N = MRS \cdot P \dots\dots\dots$$

.....(1)

$$\left(\sum MRS = MC = p \right)$$

Penetapan harga pajak (p) dilakukan melalui proses politik yaitu mekanisme *budgeting*. Penggabungan analisis ekonomi dan proses politik ini merupakan solusi terbaik untuk mencapai alokasi *public good* yang efisien. Prosedur ini tentu saja tidak sempurna karena dalam kenyataan preferensi dan tingkat pendapatan konsumen bervariasi. Alokasi optimum ini berlaku bagi *pure public good*.

Alokasi optimum yang dicapai pada *purepublic good* di atas belum menjamin *equity*, karena terdapat konsumsi *private good* yang menimbulkan eksternalitas dan mekanisme pasar tidak dapat menginternalkan eksternalitas tersebut. Di samping itu juga terdapat batasan spasial dari *benefit* dan kemacetan (*congestion*) dalam penyediaan *private good* sehingga memerlukan aturan efisiensi yang berbeda. Barang-barang semacam ini dikategorikan ke dalam *mix good* yang memerlukan ukuran optimal yang lebih kecil dari *pure public good* dalam alokasi dan kelompok konsumennya (*club size*).

Untuk mengetahui solusi optimal dari *mix good* tersebut maka asumsi yang dibangun adalah asumsi-asumsi homogenitas wilayah yaitu (Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju, 2010):

1. Lahan (ruang) dalam keadaan *fixed*;
2. Pendapatan dan preferensi identik;
3. Biaya penyediaan *public good* konstan;
4. Pemerintah tidak membedakan pelayanan (*good governance*) dan distribusi pendapatan dalam keadaan *given*;
5. Semua barang adalah *purepublic good*.

Jika *public good* tersebut adalah z^* dan $z^* = \left(\frac{1}{\alpha}\right)z$, maka fungsi utilitas setelah pendapatan kena pajak adalah $u[Y - t(z^*), z^*]$ dimana $t = \frac{\alpha p z^*}{N}$, sehingga:

$$\frac{dU}{ds} = \frac{u_{z^*}}{u_y} = \frac{\alpha p}{N} \dots \dots \dots (2)$$

dan $MRS = \alpha p/N$ (ukuran fasilitas memenuhi syarat Samuelson). Dari persamaan (1) dan (2) dapat dilihat adanya perbedaan harga pajak antara *pure public good* (z) dan *local public good* (z^*).

Ukuran optimal klub dapat dicapai bila turunan harga pajak minimum. Pada kasus *pure public good*, harga pajak adalah $\frac{p}{N}$ sehingga $\frac{d(p/N)}{d(N)} = -\frac{p}{N^2}$. Semakin besar populasi (N), turunanya akan mendekati $= 0$. Implikasinya, semakin besar N , penyediaan *public good* akan semakin murah dan efisien. Sebaliknya pada kasus *local public good* (z^*), di mana harga pajak $p^* = \frac{\alpha p}{N}$, sehingga

$$\frac{dp^*}{dN} = \frac{p}{N} \cdot \frac{\delta \alpha}{\delta N} - \frac{\alpha p}{N^2} = 0$$

$\frac{\delta \alpha}{\delta N} \cdot \frac{N}{\alpha} = r$ adalah elastisitas α terhadap perubahan N .

Sehingga: $\frac{dp^*}{dN} = \frac{\alpha p}{N^2} (r - 1) = 0$

P^* minimum bila $r = 1$. Pada titik tersebut, penurunan p^* dari kelebihan pembagian beban pajak akan diimbangi oleh tambahan harga pajak dari *congestion* melalui fungsi α dan pada saat $r = 1$ ukuran klub mencapai optimum. Apabila N semakin besar akan menyebabkan mahalnya biaya penyediaan *public good*.

Struktur optimal penyediaan *public good* menggambarkan interaksi antara ukuran optimal *public good* dan ukuran optimal klub. Solusi optimal merupakan perpotongan antara *service* optimal dengan klub optimal penyediaan jasa publik. Modal efisiensi penyediaan *public good* dalam sistem pemerintahan multiunit memerlukan perbedaan dalam ukuran fasilitas dan jangkauan wilayah. Interpretasi dari solusi optimal tersebut adalah penyediaan *pure public good* memerlukan ukuran pemerintah yang besar (nasional) dengan sistem sentralisasi sedangkan untuk *local public good* memerlukan ukuran pemerintah yang lebih kecil (daerah) dengan sistem desentralisasi (Yandri, 2013).

Karena itu, kewenangan pengelolaan situ sebenarnya lebih tepat dikelola oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Osborne dan Gaebler (1995)

mengemukakan beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan diterapkannya sistem desentralisasi, yaitu:

1. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tercentralisasi. Lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan;
2. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tercentralisasi. Para pegawai yang berada di lini depan, paling dekat dengan masalah dan peluang serta mereka yang lebih tahu dengan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga akan lebih cepat mengambil keputusan yang diperlukan;
3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dibanding yang tercentralisasi. Inovasi biasanya tidak terjadi pada seseorang yang berada pada puncak pimpinan, tetapi sering muncul dari gagasan baik pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaan dan berhubungan dengan pelanggan;
4. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, sehingga banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya. Pemberian kepercayaan kepada pegawai untuk mengambil keputusan yang penting dalam tugasnya dapat menjadi motivasi bagi mereka, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerjanya.

3.2 Perbandingan Antar-regulasi: Usang dan Tumpang Tindih?

Di level regulasi, terdapat UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang aturan teknis kewenangan daerah (desentralisasi) diatur spesifik dalam PP. No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan PP. No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP. 38/2007, eksplisit tertera bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi: (1) politik luar negeri; (2) pertahanan; (3) keamanan; (4) yustisi; (5) moneter dan fiskal nasional; serta (6) agama. Sementara kewenangan daerah meliputi 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Sekarang pertanyaannya, mengapa pengelolaan situ masih tercentralisasi yang kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh menteri? Ada dua jawaban yang mungkin: *pertama*, dari perspektif tata urutan munculnya regulasi, PP. No. 27/1991 lahir 16 (enam belas) tahun sebelum PP. No. 38/2007. Artinya, PP. No. 27/1991 lahir jauh sebelum

undang-undang otonomi efektif diterapkan pada tahun 2001 dengan munculnya UU. No. 22/1999 yang kemudian diubah menjadi UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari perspektif ini, tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk tidak menerapkan peraturan itu karena memang tidak/belum adaya peraturan pengganti yang sesuai dengan semangat desentralisasi. Dari sini masalahnya menemui titik terang: regulasi usang dipakai sementara pengelolaan situ dihadapkan pada kondisi iklim desentralisasi dan partisipasi aktif warga masyarakat.

Pada wilayah tertentu, pemerintah melalui presiden juga menetapkan Keppres. No. 12/2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Dalam Keppres tersebut dijelaskan bahwa beberapa situ masuk ke dalam wilayah sungai yang kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat. Argumen yang mendasari mengapa situ masuk ke dalam wilayah sungai tampaknya disebabkan oleh pemahaman bahwa air yang terdapat di dalam situ bersumber dari dan mengalir ke sungai. Dan karena itu, situ merupakan bagian dari sungai. Secara fisik sumberdaya air, pendapat itu ada benarnya. Tetapi *concern* saya adalah mengapa kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat? Bukankah pemerintah daerah lah yang mengetahui secara pasti sumberdaya yang ada di daerahnya? Bagaimana mungkin situ dikelola oleh pemerintah pusat yang keberadaannya nun jauh di sana, baik dari sisi letak geografis maupun dari sisi rentang kendali?

Kemungkinan *kedua*, adanya pihak-pihak tertentu yang tidak ingin mempertegas pengelolaan kawasan situ menjadi terdesentralisasi dan adanya partisipasi aktif warga masyarakat setempat (*community*). Boleh jadi penyebabnya adalah terkait dengan isu redistribusi lahan yang payung hukumnya masih berpangku pada undang-undang agraria. Sebagaimana kita pahami, stagnasi peraturan reformasi agraria karena sarat dengan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi maupun sosial.

Stagnasi ini berujung pada situasi di mana masyarakat warga menjadi bulan-bulanan berkepanjangan akibat persekongkolan antara kekuatan elit politik dan elit ekonomi. Padahal sejarah Hindia Belanda ratusan tahun yang lalu memperlihatkan, tahun 1870 perekonomian Hindia Belanda kala itu mengalami resesi luar biasa akibat liberalisasi lahan oleh pemerintah kepada kelompok kapitalis. Akibatnya, masyarakat kala itu seperti pepatah “ayam mati di lumbung padi”, mereka jatuh miskin karena tidak adanya akses atau kedaulatan atas sumber daya lahan (Rahardjo, 2011). Padahal, studi Hernando de Soto (2000) di negara berkembang telah membuktikan

bahwa redistribusi lahan merupakan langkah penting dalam mengangkat masyarakat ke kancah kesejahteraan.

Kesimpulan de Soto memperoleh relevansinya. Pada konteks situ, dengan pengelolaansitu berbasis partisipasi masyarakat setempat, selain berfungsi sebagai tempat resapan air dan sumber irigasi; tempat berkembangnya keanekaragaman hayatiserta pengendali banjir, situ bisa dimanfaatkan bagi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan tempat pariwisata. Bahkan jika tempat wisata itu diinstitusionalisasi oleh pemerintah daerah setempat dengan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan lingkungan, situ dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Jika ini terjadi, skema pengawasan dan pengendalian agar kondisi alamiah situ tidak terganggu fungsinya, pemerintah daerah dapat membentuk kelompok kerja dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh secara kultural di lingkungan sekitarnya.

3.3 Partisipasi Warga

Oleh karena itu, tahap utama dan pertama dalam mereformulasi pengelolaan situsebagai bagian dari lahan, perbaharui dahulu regulasi yang ada agar iklim partisipasi memiliki sandaran hukum (*legal standing*) yang kokoh. Regulasi itu tentu harus diarahkan pada semangat desentralisasi. Sebab, sistem desentralisasi ini merupakan syarat mutlak (*necessary condition*) bagi terciptanya partisipasi warga dalam pengelolaan situ. Karena itu, menjadi *absurd* jika kita mengharapkan partisipasi warga masyarakat untuk ikut terlibat dan peduli terhadap pengelolaan situ jika sistemnya masih sentralisasi.

Secara teoritik, Pretty, (1995) dalam Syahyuti (2006) membagi karakteristik partisipasi, yakni: (1) partisipasi pasif atau manipulatif; (2) partisipasi informatif; (3) partisipasi konsultatif; (4) partisipasi insentif; (5) partisipasi fungsional; (6) partisipasi interaktif; (7) mandiri.

Saat ini, seluruh pemerintah daerah memang menggunakan kata partisipasi warga dalam pengelolaan situ. Tetapi, berangkat dari teori partisipasi yang dikemukakan Pretty (1995) di atas, kita pasti dapat mengelompokkan partisipasi seperti apa dari warga masyarakat dalam mengelola situ. Bentuk partisipasi warga

masyarakat masih bersifat partisipasi pasif dan manipulatif karena terpenjara oleh PP.No. 27/1991 itu. Di masa datang, yang kita harapkan tentu bentuk partisipasi interaktif dan mandiri dalam pengelolaan situ. Apalagi, menurut Oliner Ostrom, “sumber daya umum (*public property*) ternyata tidak selalu harus diprivatisasi ataupun diserahkan kepada pemerintah, tetapi harus ada *public property* yang bisa dikelola secara bersama oleh masyarakat pada komunitasnya masing-masing (Ostrom, 1990).

3.4 Pengembangan Instrumen Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi telah lama dikenal sejumlah instrumen yang dapat mengubah perilaku pelaku ekonomi (pemerintah, swasta, dan masyarakat/konsumen). Dalam buku teks ekonomi standar, kita telah mengenal instrumen kebijakan moneter dan fiskal (*monetary and fiscal policy*) dengan berbagai kebijakan turunannya. Namun teori ekonomi menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah sedapat mungkin harus seminimal mungkin. Hal itu menyiratkan sebuah asumsi adanya Pareto Optimum yang menyatakan bahwa efisiensi ekonomi dapat tercapai jika keputusan individual pelaku ekonomi berada dalam pasar yang kompetitif (*competitive market*).

Namun demikian dalam konteks lingkungan, mekanisme pasar justru tidak bekerja sempurna karena kita dihadapkan pada munculnya dampak negatif (eksternalitas) dari pelaku ekonomi (Bator, 1958; Dahlman, 1979; Vatn dan Bromley, 1997; Tisdell, 2003). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, para ahli di Indonesia telah mengembangkan dan sekaligus menginternalisasi instrumen ekonomi ke dalam tata kelola lingkungan hidup. Dalam UU. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa instrumen ekonomi adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan.

Kata kunci utama dalam pengertian tadi tampaknya terletak pada kata “mendorong”. Karena sifatnya itu, maka instrumen ekonomi dapat dinyatakan sebagai pemberian motivasi positif dan sekaligus negatif kepada pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai yang diharapkan. Karena itu, instrumen ekonomi beroperasi dengan menyelaraskan hak dan tanggung jawab dari perusahaan, kelompok atau individu sehingga mereka memiliki insentif dan kekuatan untuk bertindak dengan

cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (UNEP, 2004), khususnya situ/rawa.

Dalam pada itu, terdapat beberapa instrumen yang dapat diterapkan. Misalnya instrumen berbasis pasar (*market-based instrument*) atau instrumen yang bukan berbasis pasar (*nonmarket-based instrument*) yang berupa perintah dan pengendalian (*command and control/CAC*). Satu dari sejumlah instrumen berbasis pasar adalah pengembangan skema insentif.

1. Skema Insentif

Dalam literatur, terdapat berbagai jenis kelompok insentif yang dapat mendorong para pelaku terdorong untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, baik yang bersifat langsung (izin melepaskan pencemar yang dapat ditransfer/*tradable permits*, pengenaan biaya polusi/*pollution charges*, dll) maupun tidak langsung (pajak dan subsidi) (Stavins, 2001).

Pengembangan skema insentif ini dapat dikembangkan dan diterapkan pada dua pelaku/aktor sekaligus, yaitu perusahaan/swasta dan masyarakat. Implementasinya dapat dilakukan melalui pajak dan subsidi. Seiring dengan iklim desentralisasi (Pasal 14 ayat (2) UU. No. 32/2014), pemerintah daerah dapat menyusun sebuah skema yang dipayungi oleh peraturan daerah (Perda) tentang penerapan internalisasi biaya perusahaan ke dalam bentuk keterlibatan mereka dalam pengelolaan situ/rawa. Soal berapa proporsi biaya yang harus disisihkan perusahaan dapat ditempuh melalui mekanisme negosiasi. Forum negosiasi itu tentu harus difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah mengembangkan skema agar masyarakat di sekitar lokasi situ/rawa dapat berpartisipasi dalam pengelolaan situ/rawa. Satu dari sejumlah skema yang secara sosial dapat diterima, secara manajemen bisa efektif dan secara ekonomi efisien adalah membentuk kelompok kecil organisasi masyarakat yang khusus *concern* terhadap situ/rawa. Masyarakat yang dapat berpartisipasi adalah masyarakat di sekitar kawasan situ/rawa (*local communities*). Kelompok masyarakat yang telah terbentuk kemudian diformalisasi ke dalam penetapan surat keputusan bupati/walikota. Dengan cara itu, maka keberadaan kelompok masyarakat mempunyai dasar hukum yang kuat.

Segera setelah kelompok masyarakat terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah menginternalisasi Forum CCRR ke dalam setiap kelompok masyarakat setiap kawasan situ/rawa. Dengan begitu, Forum CCRR dapat melakukan pemantauan kegiatan kelompok masyarakat. Hal ini juga dilakukan agar dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Corporate-Community Resource Responsibility (CCRR)*

Bibit dari konsep CCRR adalah *Corporate Resource Responsibility (CRR)* yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Akhmad Fauzi di IPB pada 2007 lalu. CCRR sendiri diperkenalkan satu tahun setelahnya di sebuah seminar bertaraf nasional pada medium 2008 di Bogor. Namun tampaknya konsep ini tenggelam seiring waktu, karena praktis tidak ada akademisi yang mau meluangkan waktu untuk mengelaborasinya lebih jauh.

Sebagai konsep yang lahir dari rahim paradigma yang sama dengan pendahulunya (*Corporate Social Responsibility/CSR*), oleh Fauzi (2008), CCRR tampaknya diposisikan ke dalam instrumen yang berbasis kesukarelaan (*voluntary instrument*). Jika demikian, instrumen ini tampaknya justru tidak sesuai dengan kedua instrumen yang telah disebut di awal (*economic/market-based instrument* dan *nonmarket-based instrument*). Karena berdimensi “sukarela”, maka mau tidak mau kita harus memosisikannya ke dalam terminologi lain, yakni instrumen yang berbasis sosial (*social instrument*).

Justru menurut saya, CCRR harus berjiwa *economic/market-based instrument*, terlepas dari kelebihan-kekurangan instrumen ini. Dengan memosisikannya pada kelompok demikian, maka kita dapat menyusun skema insentif apa yang dapat diterapkan agar CCRR berjalan efektif (*on the track*). Penentuan “kerangka” paradigmatis ini menjadi penting, mengingat kejelasan paradigmatis akan menentukan di mana sesungguhnya posisi CCRR. Dengan kejelasan posisinya, maka pengembangan spesifikasi instrumennya akan menjadi jelas pula.

Satu poin yang kongkrit adalah bahwa pelaku/aktor utama CCRR adalah korporasi/perusahaan yang orientasi kegiatannya diarahkan pada lokasi situ/rawa pada lingkup regional/daerah dengan melibatkan masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan. Dengan demikian, konsep CCRR

adalah konsep yang lebih spesifik untuk bisa meng-*capture* secara jelas isu lingkungan, terutama situ/rawa. Dan dengan demikian, makakonsep CSR tentu kurang pas jika dipersamakan dengan CCRR. Ada dua alasan utama: *pertama*, CSR adalah tanggung jawab sosial korporasi yang orientasi kegiatannya hanya berdimensi sosial. Walaupun saat ini Kementerian Lingkungan Hidup (2011) telah menginternalisasi bidang lingkungan dalam kegiatan CSR, namun tetap saja terminologinya kurang tepat. Karena CCRR secara jelas dan spesifik adalah bentuk tanggung jawab korporasi/perusahaan terhadap lingkungan, terutama situ/rawa dengan melibatkan masyarakat setempat.

Dengan demikian, posisi paradigmatiknya menjadi lebih terang-benderang, karena CSR berdasar dan mengarah pada “hak sosial (*social rights*)” sementara CCRR berdasar dan menyasar pada “hak alam pada komunitas setempat (*nature and communities rights*)”. *Kedua*, pada korporasi skala besar, kegiatan CSR seringkali dilakukan bukan di daerah (*region*) tempat di mana lokasi perusahaan tersebut berada. Dan sering pula, kebijakan program CSR dilakukan dengan skala massif, mengabaikan karakteristik masyarakat lokal, hanya “memberi ikan tanpa memberi pancing”, dan tidak terlihat signifikansi keberhasilannya (Blowfield dan Frynas, 2005; Suharto, 2008; dan Afifah, 2011).

Dalam pada itu, sesuai dengan semangat desentralisasi, pemerintah daerah dapat menyusun regulasi tentang CCRR tersebut. Regulasi harus membuka peluang seluas-luasnya kerjasama antara *corporate-community*, termasuk dengan perguruan tinggi. Di level teknis, kerangka kerja yang diperlukan dalam implementasi CCRR adalah:

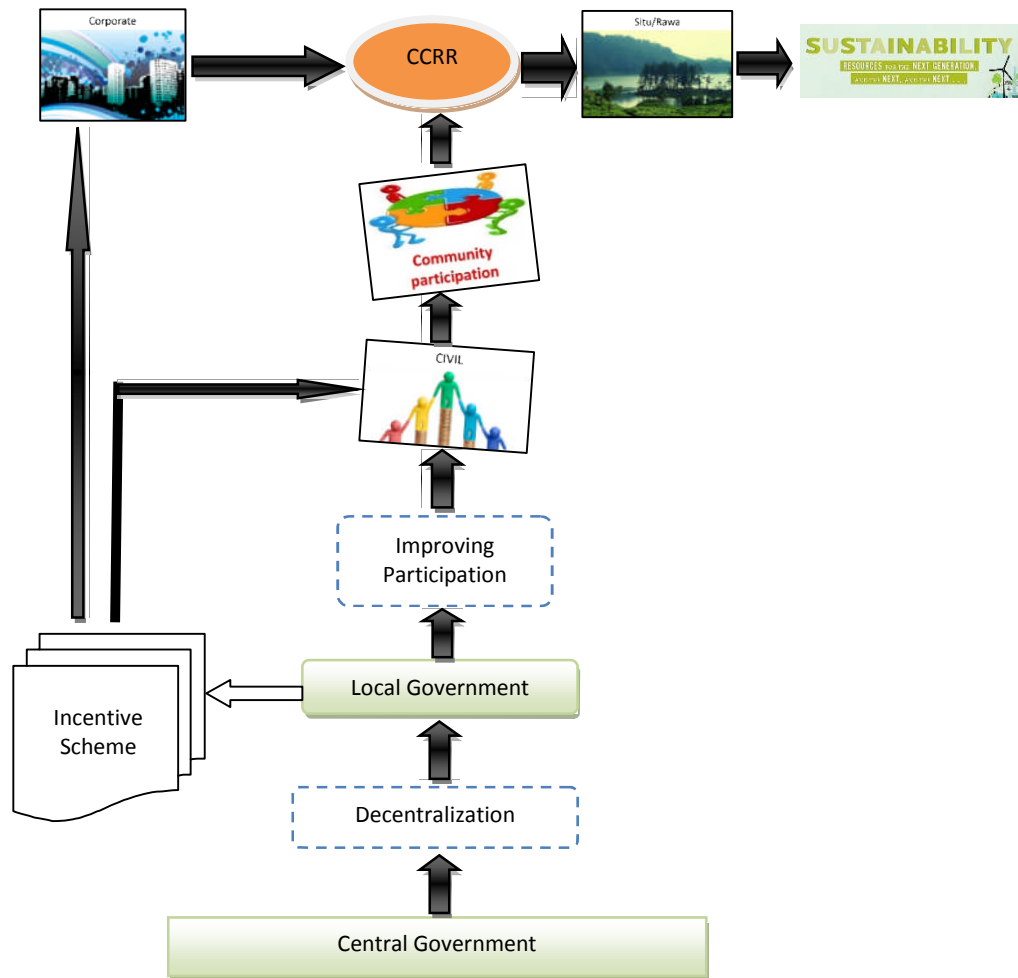
1. Melimpahkan wewenang pengelolaan situ/rawa kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah, dan pengelolaan teknisnya dilimpahkan kepada kelompok masyarakat
2. Penyusunan regulasi lokal tentang pengelolaan situ/rawa;
3. Penyusunan skema insentif yang karakteristik insentif tersebut sesuai dengan karakter masing-masing daerah;
4. Memobilisasi masyarakat di sekitar kawasan situ/rawa untuk membentuk kelompok masyarakat peduli situ/rawa;
5. Formalisasi organisasi kelompok masyarakat

6. Kemitraan *corporate-community*

Seluruh upaya tersebut dilakukan tentu demi satu tujuan, yaitu situ/rawa yang lestari (*sustainability*). Karena itu, syarat keharusan (*necessary condition*) bagi terciptanya situ/rawa yang lestari adalah adanya iklim desentralisasi yang berbentuk penyerahan kewenangan pengelolaan situ kepada pemerintah daerah. Tidak cukup sampai di situ, desentralisasi juga harus dilakukan sampai ke tingkat kelompok masyarakat. Artinya, pengambilan keputusan tentang berbagai persoalan situ/rawa dilakukan oleh kelompok masyarakat. Selain syarat keharusan, diperlukan pula syarat cukup (*sufficient condition*), yakni adanya partisipasi aktif-interaktif-mandiri dari kelompok masyarakat.

Tabel 4. Skema Insentif Pengelolaan Situ/Rawa di Indonesia

Skema	Insentif
CCRR	<ul style="list-style-type: none">• Perda yang mendukung terbentuknya Forum CCRR• Pengurangan pajak• Penghargaan secara periodik bagi perusahaan yang signifikan kontribusinya terhadap Forum CCRR dan pengelolaan situ/rawa
Partisipasi Komunitas	<ul style="list-style-type: none">• Desentralisasi pengambilan keputusan• Kegiatan penyuluhan dan pelatihan• Penghargaan secara periodeik bagi kelompok masyarakat yang berhasil dalam mengelola situ/rawa• Upah



Gambar 1.
Bagan Alir Implementasi Skema CCRR dan Partisipasi Komunitas
dalam Tata Kelola Situ/Rawa

IV. Penutup

Pemerintah dapat berfungsi sebagai pembuat regulasi dan pengawas bagi pengelolaan situ. Masyarakat cukup diberi rambu-rambu dan insentif. Dengan memberi kepercayaan (*trust*) pada masyarakat setempat, pengelolaan dan pemanfaatan situ/rawa dapat lestari secara berkelanjutan, karena masyarakat setempat lah yang mengetahui secara pasti kawasan situ. Untuk mewujudkannya, diperlukan langkah kongkrit:

1. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) perlu mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menggugat atau uji materi regulasi terkait dengan pengelolaan kewenangan situ yang bertentangan dengan semangat desentralisasi. Gugatan tersebut diajukan kepada Mahkamah

Konstitusi (MK) ataupun kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui APKASI.

2. Jika gugatan tersebut berhasil, perlu disusun skema yang pasti dalam mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan situ. Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan adalah *Corporate-Community Resource Responsibility* (CCRR), sebagai pengembangan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah ada. Konsep CCRR sekaligus mengadopsi tiga pihak dalam proses pembangunan bangsa: pemerintah, masyarakat dan swasta. Pelibatan swasta dalam pengelolaan situ/rawa adalah skema yang tidak berorientasi bisnis semata, tetapi lebih kepada proses penyadaran bahwa swasta adalah aktor yang juga penting dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Skema CCRR tentulah masih terlalu dini. Tetapi uji coba perlu dilakukan untuk menilai dan mengukur tingkat akurasi dan validitas konsepnya.
3. Skema lanjutan setelahnya adalah bagaimana membuat mekanisme agar komunitas masyarakat setempat terlibat, baik dalam proses perencanaan sampai kepada pengawasan dan pengendaliannya. Keterlibatan komunitas warga setempat sekaligus menjadi instrumen bagi efisiensi dan efektifitas pengelolaan situ secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Prosiding, dll

- Afifah, D., 2011, *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan CSR oleh PT. Wirakarya Sakti Dalam Penguatan Ekonomi Lokal*, Skripsi, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB, Bogor
- Alfarobi, D.E., 2002, *Kajian Kesesuaian Kawasan Situ Babakan dan Situ Manggabolong sebagai Perkampungan Budaya Betawi*, <http://eprints.undip.ac.id/5404/1/danielazka97.pdf>, diakses 8 Maret 2013
- Aradhita, D., 2011, *Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor*, http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/51666/C11dar1_.pdf?sequence=1, diakses 8 Maret 2013
- Bator, F.M., 1958, The Anatomy of Market Failure, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 72, Issue 3 (Aug, 1958), 351-379
- Blowfield, M., dan Frynas, J.G., 2005, Setting New Agendas: Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World, *International Affairs*, 81, 3 (2005), 499-513
- Dahlman, C.J., 1979, The Problem of Externality, *Journal of Law and Economics*, Vol. 22, No. 1, (Apr, 1979), 141-162

- Damayanti, A., 2012, *Telaga*, staff.ui.ac.id/internal/.../TELAGADANAU.doc, diakses 04 Juni 2014
- Fauzi, A., 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
-, 2008, *Paradigm Shift: Korporasi dan SDAL*, Materi Paparan Seminar, IPB, Bogor
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, *Pedoman CSR Bidang Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta
- Natur Vards Varket, tanpa tahun, *Economic Instrument for the Environment*, ISBN: 91-620-8221-2, Stockholm, Swedish
- Noor, I., 2012, *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) & Profajar Journalism
- Noviadriana, D., 2012, *Action Plan Penanganan Situ-Situ di Kota Tangerang Selatan*, Lokakarya Pengelolaan Situ Terpadu Kota Tangerang Selatan, 04 Desember 2012
- Osborne, D., dan Gaebler, T., 1995, *Reinventing Government: Mewirusahaakan Birokrasi* (edisi terjemahan), Penerbit PPM, Jakarta
- Ostrom, E., 1990, *Governing the Commons: The Evolutions of Institution for Collective Action*, Cambridge University Press,
http://www.kuhlen.name/MATERIALIEN/eDok/governing_the_commons1.pdf, diakses 10 April 2013
- Rahardjo, D. M., 2011, *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, IPB Press, Bogor
- Rini, F. S., 2002, *Kajian Ekologi Situ Citayam, Depok Jawa Barat dalam Upaya Pelestarian dan Peningkatan Fungsi Situ*,
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/28481/G02fsr.pdf?sequence=1>, diakses 8 Maret 2013
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D.R., 2010, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Setiawan, U., 2008, *Dinamika Reforma Agraria di Indonesia Setelah Orde Baru*, dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gunawan Wiradi dan S.M.P Tjondronegoro (penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soekarno, I., Natasaputra, S., dan Maulana, I., tanpa tahun, *Situ Ciharus untuk Penyediaan Air Baku dan Potensi Mikrohidro di Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat*, <http://www.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/95010012-Ikbal-Maulana.pdf>, diakses 4 maret 2013
- Soto, H., 2000, *The Mystery of Capital: Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*, Penerbit Qalam, Yogyakarta
- Stavins, R. N., 2001, *Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments*, Discussion Paper 01-58, Resource for the Future, Washington DC
- Suharto, E., 2008, *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate?*, Makalah, Seminar Dua Hari CSR: Strategy, Management, and Leadership, 13-14 Februari 2008
- Syahyuti, 2006, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Tisdell, C., 2003, *Economics, Ecology and the Environment*, Working Paper No. 89, The University of Queensland, Australia
- Tjahjo, D.W.H., Purnamaningtyas, S.E, dan Satria, H., 2010, *Kajian Bio-Limnologi dan Sumberdaya Ikan Dalam Rangka Menyusun Model Pemacuan Stok Ikan di Situ Cileunca, Bandung*, Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan, Badan Penelitian

- dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, <http://km.ristek.go.id/assets/files/258.pdf>, diakses 8 Maret 2013
- UNEP, 2004, *The Use of Economic Instrument in Environmental Policy: Opportunities and Challenges*, United Nation Publication, ISBN: 92-807-2391-X,
- Vatn, A., dan Bromley, D.W., 1997, Externalities-A Market Model Failure, *Environmental and Resource Economics*, 9, 135-151
- Wiradi, G., 2008, *Garis-Garis Besar Argumen dalam Wacana Reforma Agraria*, dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gunawan Wiradi dan S.M.P Tjondronegoro (penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Wiradi, G., 2008, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gunawan Wiradi dan S.M.P Tjondronegoro (penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Yandri, P., 2013, Pengembangan Kawasan Situ Pulo di Bekasi dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), *Jurnal Liquidity* Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2013, 87-99

Peraturan Perundang-Undangan

- UU. No. 5/1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP. No. 27/1991 tentang Rawa
- PP. No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- PP. No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Keppres. No. 12/2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Situs Internet

- www.kpa.or.id
- <http://konservasisitudepok.wordpress.com/>

RPSEP-16

Kata siapa, Yogyakarta kota budaya?

Hascaryo
UPBJJ-UT Semarang

Tata kelola pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik, bukan hanya urusan pemerintah, pejabat publik, atau pimpinan daerah. Tetapi urusan pembangunan – khususnya pembangunan mental dan social – menjadi tanggung jawab kreator komunikasi. Pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam isu aktual yang melibatkan publik, menjadi tanggung jawab kreator komunikasi. Kreator komunikasi berfungsi mengembangkan kekuatan modal sosial masyarakat, harus punya bekal teknik komunikasi politik yang kuat. Kehandalan komunikasinya diartikan sebagai sebuah kekuatan riil yang akan menempatkan anggota komunitas publik dalam kesatuan fenomena sosial yang beradab. Untuk itu, kreator komunikasi perlu mempertimbangkan kesesuaian dan kebenaran substansi pesan yang akan dipublikasikan dan tetap mengedepankan praduga yang memang perlu pembuktian khusus.

Jawa payah! Sekelumit pernyataan itu menjadi cerminan sikap reaktif seorang mahasiswa Yogyakarta yang menilai masyarakat Jawa – khususnya Yogyakarta – termasuk yang memprihatinkan. Meskipun sudah ditangani oleh aparat berwenang, namun tetap ada sesuatu yang perlu dikaji. Kajian utama fenomena Yogyakarta adalah tentang pandangan masyarakat pendatang tentang daerah ini.

Jika diruntut akarnya, pelanggaran sosial yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah karena ia sudah memiliki persepsi tertentu tentang masyarakat Yogyakarta. Ia berasumsi bahwa kualitas mental masyarakat tempat ia berasal, jauh lebih baik. Sementara, yang ia huni saat ini banyak tipu-tipu, kesungkanan, atau apapun itu yang senantiasa menghambat pola komunikasi publik.

Jenis komunikasi semacam ini, menurutnya, akan banyak menemui kegagalan. Bahkan akan cenderung menimbulkan konflik antarpelaku kepentingan. Dan yang dirugikan pasti masyarakat umumnya. Benarkah dalih dan asumsi yang semacam ini? Dalam kajian ini, penulis menyampaikan gagasan tentang perlunya analisis mengenai keberadaan kreator pembangunan mental sosial di sebuah wilayah. Kreator ini bisa saja

berasal dari pemimpin opini atau orang yang dianut oleh warganya. Kita mulai dari teori yang bersinggungan dengan masalah ini, yaitu teori interaksionalisme simbolik.

Pijakan teori ini adalah masalah individu atau pelaku interaksi. Beberapa ahli yang mendalami teori ini sepakat bahwa individu atau pelaku interaksi merupakan hal paling penting dalam konsep sosiologi. Diyakini oleh mereka bahwa individu menjadi objek yang – teknik dan kualitas interaksinya – telaah dan dianalisis secara langsung oleh individu yang lain. Sosiolog yang unggul di bidang interaksionalisme simbolik antara lain George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley. Keduanya juga fokus terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Bukti-bukti yang pernah mereka kemukakan kepada publik antara lain adalah kenyataan bahwa bahwa individu selalu berinteraksi dengan menggunakan simbol, yang di dalamnya berisi tanda, isyarat, dan kata-kata.

Langkah selanjutnya adalah menempelkan teori tersebut dengan fenomena mahasiswa Yogyakarta tadi. Benarkah simbol yang ia gunakan untuk berinteraksi dengan seseorang, telah menimbulkan friksi tertentu? Ternyata benar. Simbol berupa kata-kata yang pedas melalui media sosial, terbukti menyakiti kultur masyarakat Yogyakarta – yang ada di Pulau Jawa – bahwa mereka adalah kaum miskin, tolol, dan tak berbudaya. Gejolak sosial langsung muncul ketika pesan sosial itu menyinggung perasaan masyarakat Yogyakarta yang selalu diselaraskan dengan aspek halus, lembut, dan penuh kehati-hatian.

Masyarakat Yogyakarta enggan dinilai sebagai kaum dengan tiga sebutan tadi. Dengan berbagai dalih dan diskusi panjang, berakhirlah fenomena itu pada permohonan maaf. Meskipun pemberian maaf sudah dilakukan oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta, namun agaknya proses hukum akan tetap berjalan. Dari sikap perwakilan masyarakat Yogyakarta, bolehkah jika diasumsikan bahwa masyarakat Yogyakarta tidak lagi mudah memaafkan? Atau karena kasus yang muncul sudah sangat menyakiti? Atau karena ada hal lain yang menjadikan fenomena mahasiswi ini sebagai bom waktu?

Apapun yang melatari sikap perwakilan masyarakat Yogyakarta ini, ada baiknya dikaji tipis dalam paparan ini. Jika yang mendasari – ambil saja – adalah masalah sesuatu yang menyakitkan, maka perlu ditelusuri lagi mengenai latar belakang perwakilan ini. Keyakinan bahwa masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat pemaaf, hingga saat ini tidak melunturkan persepsi penulis. Masyarakat yang *nrima*, ikhlas, dan penuh kesabaran merupakan ujud muka Yogyakarta. Keyakinan persepsi ini tentu didasarkan pada pengalaman pribadi yang menyaksikan langsung perilaku masyarakat Yogyakarta.

Begitu gembira mereka melakukan semua aktivitasnya dengan senyum keceriaan. Namun, begitu dihentak oleh pernyataan mahasiswi tadi, sikap mereka berubah. Perubahan ini – ternyata – tidak serta mengubah keikhlasan masyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan silaturahmi. Masih ada yang menghendaki agar mahasiswi tersebut memperoleh sanksi hukum.

Seketika itu juga, persepsi penulis berubah haluan. Jika seseorang sudah meminta maaf dan yang bersangkutan bersedia menyampaikannya kepada publik, haruskah ia memperoleh sanksi yang lebih berat. Pernyataan ini bukan dilatari oleh belas kasihan atau hal lain yang berusaha meringankan sanksi bagi mahasiswi. Dasar pemikiran penulis yaitu karena ketidakyakinan penulis terhadap sikap yang ditempuh oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta. Namun, penulis yakin bahwa semua itu sudah dipertimbangkan dengan baik.

Kembali pada konsep tentang kreator tadi. Seorang kreator, seharusnya mempertimbangkan berbagai implikasi yang akan muncul jika ketetapanannya bernilai tinggi. Kreator pembangunan mental sosial masyarakat akan lebih bijak apabila ia memiliki keunggulan dalam hal komunikasi personal. Ia akan menjadi ujung tombak leburan wajah masyarakat yang diwakilinya. Keputusan untuk meneruskan fenomena mahasiswi ke ranah hukum, tentu sudah menjadi pilihan bijak. Bukan lantaran karena ada sikap atau pengalaman pribadi yang menimpa salah satu atau dua kreator tadi.

Mulyana (2007) menyatakan bahwa untuk menjadikan seorang kreator sebagai figur yang diberi amanah, sebaiknya ia juga berbekal kemampuan berkomunikasi yang baik, yaitu paling tidak dengan memahami konteks komunikasi yang terjadi. Dan kreator juga harus menggunakan model komunikasi yang sesuai. Model merupakan representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena yang berkembang. Yang pasti, sebuah model bukanlah fenomena itu sendiri. Akan tetapi, peminat komunikasi, termasuk kreator pembangunan mental sosial, sering mencampuradukkan model komunikasi dengan fenomena komunikasi.

Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, model seharusnya dapat mempermudah penjelasan tersebut. Hanya saja model tersebut sekaligus mereduksi fenomena komunikasi. Artinya, ada nuansa komunikasi lain yang mungkin terabaikan dan tidak dijelaskan oleh model tersebut. Akibatnya, jika kita kurang hati-hati menggunakan model, model dapat menyesatkan kita. Inilah sisi negatif dari model. Inti pernyataan Mulyana adalah lebih pada kedewasaan publik dalam menyikapi sanksi yang

akan dikeluarkan oleh kreator. Publik boleh saja menentang atau menolak rencana sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku. Namun biasanya – lagi-lagi – karena keYogyaannya, masyarakat di wilayah itu enggan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Mereka khawatir dinilai sebagai warga pembangkang. Dianggap memusuhi keputusan komunitas. Akan dikucilkan dan tidak dihadiri kegiatan keluarganya oleh penduduk sekitar. Berbagai kekhawatiran yang tidak perlu itulah yang sudah seharusnya mulai luntur. Bukan berarti luntur untuk tak bernilai sosial, namun luntur karena kebutuhan peradaban. Sebaiknya, masyarakat di wilayah mana pun, jangan khawatir jika dianggap tidak beradab hanya karena menunjukkan suatu perilaku yang sewajarnya. Nilai adab yang diterima, bukan selalu berasal dari keputusan atas dasar sikap yang sejalan dengan kreator atau pemimpin opini publik.

Yang bersebarangan dengan kreator dan memang benar untuk diakui, sudah sepatutnya dijadikan acuan. Benarkah jika hal ini yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya sikap gengsi atau enggan mendengarkan pendapat pengikut kreator? Bisa saja demikian adanya. Apabila itu yang terjadi, kekekalan komunitas biasanya tidak akan bertahan lama. Akan banyak terjadi gejolak jika kreator senantiasa memaksakan kehendak dan tidak mau berkompromi dengan pengikutnya. Pengikut setia akan semakin meningkatkan kualitas kesetiaannya apabila ia diberi ruang untuk berbicara, meskipun menyimpang. Simpangan yang diberikan pun lebih didasarkan untuk kepentingan yang lebih baik dan beradab.

Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai hal-hal yang dibutuhkan agar terjadi komunikasi yang efektif. Dengan digunakannya model komunikasi yang sesuai, hal itu akan mampu merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dengan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Meskipun ada teori lain yang menyatakan bahwa model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model, namun hal itu tidak meruntuhkan teori pertama. Namun dalam teori kedua, dikuatkan oleh pernyataan bahwa model merupakan gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori tertentu. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

Apabila seluruh model komunikasi dipahami dan dipilih salah satu untuk dijadikan perangkat komunikasi, hasilnya pasti akan bagus. Perlu dipahami bahwa fungsi model komunikasi adalah untuk melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan

visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Kemungkinan besar, telah terjadi kemacetan komunikasi dalam komunitas perwakilan Yogyakarta. Belum semua aspirasi terwadahi dengan baik. Memang, ada yang pro dengan sikap dan keputusan perwakilan masyarakat Yogyakarta, tetapi ada juga yang kontra. Yang kontra mungkin jumlahnya lebih sedikit, dan belum tentu idenya tidak benar atau pantas. Mereka merupakan bagian minoritas dari sebuah komunitas yang bersuara.

Kenyataan yang memprihatinkan belakangan ini, justru sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah komunitas justru berlawanan dengan nilai sosial moral yang selama ini berkembang. Yang aktual saja, masalah pemilihan kepala daerah. Sudah jadi kemajuan luar biasa bagi masyarakat Indonesia bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, kini berubah. Perubahan ini langsung direspons dengan berbagai sikap yang – pada umumnya – menentang dan mempertanyakan. Prestasi mundur menjadi kebiasaan baru di negeri ini. Namun bagi yang diuntungkan dengan sikap akomodatif komunitas yang membawa aspirasinya, hal ini merupakan berkah. Berkah karena ide mereka tersampaikan dan dapat memuaskan dahaga batin untuk sementara waktu.

Harus diakui bahwa kepuasan batin menjadi indikator keberhasilan sebuah aspirasi. Semakin ngotot dan kencang usahanya, makin bagus pula hasilnya. Dengan catatan, didukung oleh mayoritas komunitas. Yang terjadi di Yogyakarta, kemungkinan juga sama. Sikap kuat pantang menyerah, akhirnya membuahkan air pelepas dahaga batin bagi pengusulnya. Untuk sementara waktu, mereka akan menyatakan bahwa dirinya menang dalam mempertahankan aspirasinya. Sikap rendah hati yang selama ini agung bagi masyarakat Yogyakarta, bagi penulis tampak memudar. Sikap ini akhirnya bias oleh keinginan sebagian perwakilan masyarakat Yogyakarta yang menginginkan mahasiswa memperoleh hukuman setimpal. Bahkan kalau bisa dua timpal. Inikah jawaban bahwa Yogyakarta adalah kota budaya? Bukankah budaya lekat dengan keteduhan dan ketenangan hati, batin, dan jauh dari nafsu negatif? Penulis pun menjadi kian limbung dengan kenyataan yang ada.

Padahal, di balik sikap rendah hati - pastilah semua tahu – akan mendatangkan rezeki luar biasa. Rezeki itu bisa saja berupa kekuatan lahir batin masyarakat Yogyakarta, kecerdasan emosional, ketangguhan beribadah, ketahanan budaya, atau kemandirian sosial. Semua aspek itu makin penting ketika sebuah wilayah menginginkan dirinya berbenah dan mendapatkan simpati dari masyarakat wilayah lain. Yogyakarta tak butuh

simpati! Agaknya, jika pernyataan atau paling tidak persepsi masyarakat adalah demikian, kekhawatiran pun akan mengikuti. Meskipun Yogyakarta sudah punya nama dan hati di masyarakat Indonesia dan negara manca, namun keteguhan pribadi si kota budaya harus terus dipertahankan. Keluhuran martabat budaya dan masyarakat menjadi jaminan klasikalitas wilayah ini.

Semua paparan ini akan terbantahkan jika kreator pembangunan sosial dan mental masyarakat Yogyakarta mampu mengendalikan dirinya. Pada saat yang sangat tepat seorang kreator akan mampu menarik simpati pengikutnya, sehingga ia pun akan diikuti semua ucapan dan keputusannya. Oleh karena itu, kreator yang cerdas tentu akan menempatkan konteks budaya yang diyakini dengan menghindari diri dari celah petaka budaya berkepanjangan. Petaka sosial pun diharapkan terhindari jika kreator mengutamakan kepentingan kelompok yang belum tentu semuanya memahami celah konflik tadi.

Bukan bermaksud berharap, namun tentu masyarakat Yogyakarta tidak bersedia jika warganya di wilayah lain diperlakukan sama karena masalah serupa. Kenyataan pahit akan makin mencekat ketika kita mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara kita sendiri. Untuk itu, kreator perlu cerdas dalam mengarahkan corong komunikasinya dengan kualitas substansi yang tak terbantahkan.

Distorsi pesan komunikasi, khususnya bidang komunikasi politik, besar kemungkinannya disebabkan oleh adanya manipulasi pesan. Kreator bijak tak perlu ceroboh dan gegabah dengan melakukan maneuver politik yang tendensinya adalah untuk menaikkan popularitas. Perlu *make up* pesan agar masyarakat pengikutnya tidak terjerumus dalam diskusi atau polemik yang merugikan pihak tertentu. Apalagi jika memang ada pesanan dari pihak tertentu yang berusaha mencari keuntungan, popularitas, atau ada keinginan untuk menjadikan Yogyakarta sejuk menjadi kota rusuh tak terkendali.

Meskipun kenyataan yang ada saat ini sudah lebih baik, namun alangkah lebih bagus jika sejak awal pada diri masyarakat Yogyakarta sudah tertanam watak antimanipulatif dan antikedangkalan yang difasilitasi oleh minimnya pemahaman komunikasi politik dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasilnya, pasti akan jauh lebih bagus jika peran komunitas mengedepankan kepentingan publik dan mengandalkan kepatuhan komunitas dalam pelaksanaan interaksi antaranggota komunitas. Namun sayangnya, dengan adanya fenomena mahasiswi tadi, icon bahwa Yogyakarta

merupakan kota budaya, agaknya makin menjauh dari kenyataan. Hal ini menjadikan sikap – khususnya pada diri penulis – yang tadinya sangat bersimpati dengan kultur dan egosentris masyarakat Yogyakarta yang pluralis menjadi berantakan. Memang, jika ada yang menyatakan bahwa, hanya ada satu orang, yaitu penulis, yang hilang simpati, hal itu tak berarti apa-apa, memang benar begitu.

Akan tetapi, keindahan panorama Yogyakarta dalam benak tiap orang yang fanatik dengannya, harus dijaga dan dihormati. Selayaknya nasabah perbankan yang membutuhkan semua layanan apik dari pegawainya, masyarakat Yogyakarta pun sudah melakukan hal itu. Bahkan sudah lebih dari cukup. Tinggal sekarang saatnya adalah kebiasaan untuk saling mengingatkan jika ada individu, masyarakat, atau perwakilan masyarakat yang akan bersuara kepada publik dan mengatasnamakan Yogyakarta. Perlu dikaji kebenaran perwakilan itu agar tidak merugikan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

SIMPULAN

Kreator komunikasi yang berfungsi mengembangkan kekuatan modal sosial masyarakat, harus berbekal teknik komunikasi politik yang kuat. Kehandalan komunikasi perlu dimaknai sebagai sebuah kekuatan riil yang akan menempatkan anggota komunitas publik dalam kesatuan fenomena sosial yang beradab. Keberadaban sebuah konflik sosial, tidak akan merambah ke berbagai hal yang tak perlu jika disampaikan secara apik dan santun. Untuk itulah, kreator komunikasi perlu mempertimbangkan kesesuaian dan kebenaran substansi pesan yang akan dipublikasikan dan tetap mengedepankan praduga yang memang perlu pembuktian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Severin & Tankard. 1992. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses In The Mass Media*. New York: Langman Inc.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soeprapto, Riyadi. 2007. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- <http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik.html>
- <http://politik.kompasiana.com/2013/09/19/orasi-ilmiah-pramono-anung-wibowo-membangun-komunikasi-politik-beretika-593302.html>

RPSEP-17

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM GOVERNANSI HUTAN
LINDUNG DI KABUPATEN WONOSOBO**
(Sebuah aplikasi Riset Tindakan Berbasis *Soft Systems Methodology*)

darmanto@ut.ac.id

Universitas Terbuka

Abstrak

Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis *Soft Systems Methodology* dalam rangka governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Selain Perum Perhutani yang memiliki kewenangan dalam governansi hutan lindung di Pulau Jawa, ada beberapa *stakeholder* lain yang terkait erat dengan governansi hutan lindung, seperti pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lembaga yang dibentuk pemerintah seperti Tim Kerja Pemulihan Kawasan Dieng (TKPD) dan Forum Hutan Wonosobo (FHW). Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi kendala, salah satunya adalah menyangkut implementasi kebijakan Perum Perhutani yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesulitan masyarakat sekitar hutan lindung dalam memanfaatkan hasil hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan yang secara *systematically desirable* dan *culturaly feasible* dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung.

Kata Kunci: governansi, pengelolaan hutan lindung, Perum Perhutani, implementasi kebijakan

Pendahuluan

Hutan lindung mempunyai fungsi yang sangat penting karena berperan sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah (Arief, 2001). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pasal 1 menyatakan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Perhutani) menegaskan Perhutani mempunyai kewenangan untuk

mengelola hutan lindung (tidak termasuk hutan konservasi) khususnya yang berada di Pulau Jawa.

Kerusakan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo dimulai sejak era reformasi pada tahun 1998. Tujuan masyarakat merambah hutan adalah karena lahan pertanian yang lama sudah tidak subur lagi, sehingga dengan kondisi tersebut memaksa masyarakat untuk membuka lahan baru lagi dengan cara merambah hutan lindung tersebut (Zulaifah, 2007; Suara Merdeka Cyber News, 2007). Sampai saat ini perambahan hutan masih tetap terjadi dalam bentuk atau jenis yang lain, walaupun intensitas perambahannya tidak sebesar pada era Reformasi tahun 1998 tersebut. Masyarakat yang masih tetap melakukan perambahan hutan pada umumnya masih memiliki anggapan atau ekspektasi bahwa hutan lindung dapat ditanami serta diolah tanahnya, sehingga masyarakat bebas melakukan penanaman di hutan lindung tersebut. Padahal sesuai dengan fungsi hutan lindung, masyarakat dilarang mencangkul dan menanam tanaman semusim (wawancara dengan Nara Sumber, 12 Februari 2012).

Kebijakan maupun program yang dibuat oleh Perum Perhutani dalam prakteknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Keputusan Direksi Perhutani Nomor 682 tahun 2009 tentang PHBM ternyata berdampak kurang diharapkan oleh masyarakat desa hutan. Implikasi dari kebijakan tersebut sangat berdampak pada masyarakat desa hutan serta berjalannya program PHBM itu sendiri (Ketidakadilan PHBM, 2012). Murdiyanto (2008) menyatakan bahwa ketidakpahaman masyarakat mengenai peraturan PHBM kemungkinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan pengenalan mengenai PHBM dan khususnya program *agrosilvikultur*. Masyarakat desa hutan melalui LMDH tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat Perhutani tersebut (Ketidakadilan PHBM, 2012). Ginoga, et al (2005: 229-230) menyatakan bahwa kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan lindung adalah kebijakan yang jelas dan terarah antara yang dilarang dan dibolehkan, kesamaan persepsi tentang istilah yang berkaitan dengan kawasan hutan lindung, tidak adanya *overlapping* antara kebijakan, tidak adanya dualisme antara kebijakan, dan tidak adanya ego sektoral antara pembuat kebijakan, sehingga fungsi kawasan hutan lindung dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para pihak yang terkait baik di pusat dan daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa masalah implementasi kebijakan merupakan masalah yang harus segera dicari penyelesaiannya. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung oleh karena itu dapat dianggap sebagai masalah

yang bersifat sistemik yang pendekatannya harus dilihat dari sudut perspektif keseluruhan (*adaptif whole*). Oleh karena itu sehubungan dengan permasalahan tersebut diusahakan suatu pendekatan yang lebih spesifik yaitu dengan menggunakan paradigma berpikir serba sistem (*systems thinking*) dengan mempertimbangkan relasi dan peran dari berbagai pihak yang terkait dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan yang diharapkan dari proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi kriteria yang logis secara sistematis (*systematically desirable*) dan dapat diterima secara budaya (*culturally feasible*). Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penataan ulang menyangkut *problem solving interest* yang berlangsung secara partisipatif dan berbasis budaya menghasilkan optimalisasi implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung di Perum Perhutani Kabupaten Wonosobo?

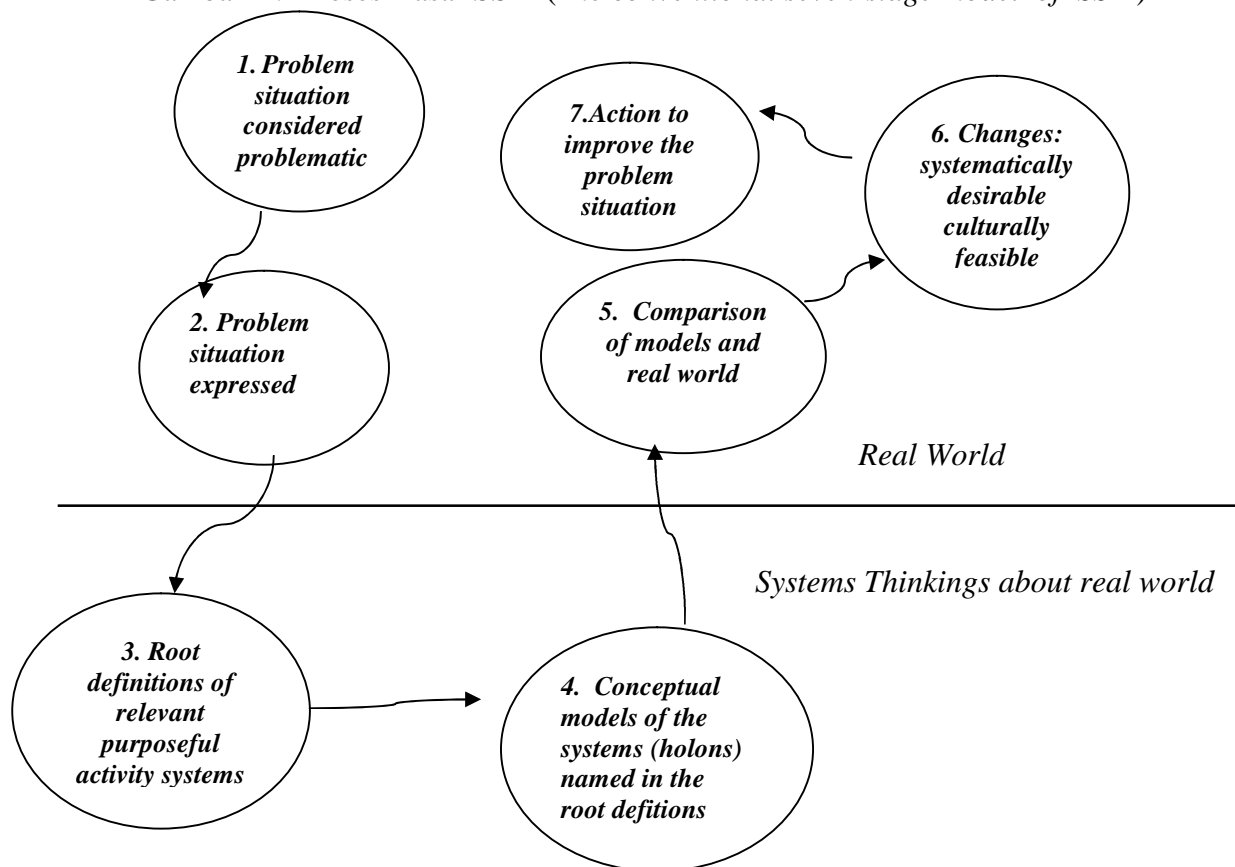
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi serba sistem lunak (*soft systems methodology/SSM*). Pendekatan SSM tepat digunakan bagi penelitian yang memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik, misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang (Checkland dan Poulter, 2006). Menyangkut teknik pengumpulan data, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interviews*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi atau literature. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara mendalam dan direkam serta dilakukan transkrip untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari rekaman tersebut. Data tersebut kemudian dibuat koding serta kategori-kategori data sehingga mempermudah dalam penganalisisan data. Tahap kesatu, data mentah yang telah dikumpulkan tersebut digunakan sebagai sebagai dasar dalam pelaksanaan tahap-tahap dalam SSM dari tahap 1 sampai dengan 6. Tahap kedua, melalui transkrip data, pembuatan koding, serta pengkategorisasian data. Dalam proses pelaksanaan tahapan 1 sampai dengan tahap 6 SSM, proses triangulasi selalu dilakukan. Teknik triangulasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan perbandingan data yang telah diperoleh dengan sumber data.

Tahapan SSM

Proses SSM (Checkland dan Scholes, 1990) terdiri atas 7 (tujuh) tahapan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 2 ranah, yaitu ranah dunia nyata (*real world*) dan ranah berpikir serba sistem (*systems thinking about the real world*) seperti tampak dalam Gambar 1. 7 tahapan kegiatan tersebut adalah: (1) menemukan situasi permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik; (2) Menstrukturkan situasi permasalahan; (3) Menentukan root definitions dari sistem yang relevan (4) Membuat model konseptual; (5) Membandingkan tahap 2 dan tahap 4 melalui komparasi model konseptual dengan situasi dunia nyata; (6) Menentukan perubahan yang diinginkan serta layak dilaksanakan (*Changes systematically desirable, culturally feasible*); dan (7) Melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan atau memperbaiki situasi masalah. Tahap 1 dan tahap 2 termasuk tahap pencarian (*finding out*). Tahap 6 dan tahap 7 termasuk dalam tahap melaksanakan tindakan (*taking action*). Tahap 1, tahap 2, tahap 5, tahap 6, dan tahap 7 merupakan *reality* atau *perception about real world*. Adapun tahap 3 dan tahap 4 merupakan tahap berpikir serba sistem (*systems thinking*) yang merupakan *actuality* atau *feeling about real world*.

Gambar 1. Proses Dasar SSM (*The conventional seven-stage model of SSM*)

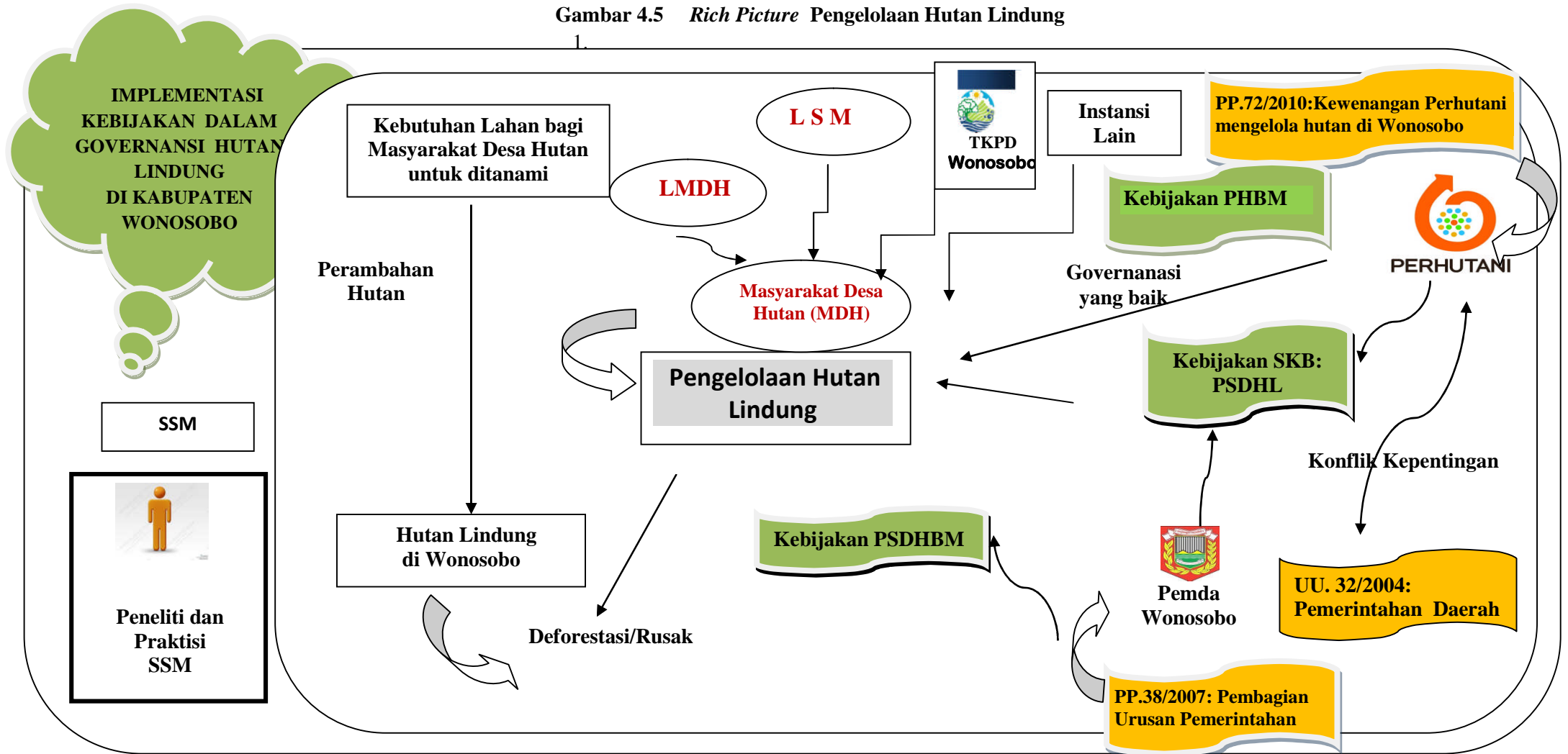


Sumber: Checkland and Scholes, 1990.

Rich Picture

Ada tiga analisis dalam membuat *rich picture* yaitu (a) Analisis Satu yang menyangkut Analisis Intervensi, (b) Analisis Dua yang menyangkut Analisis yang berfokus pada aspek Sosial yang melibatkan aspek peran, norma, dan nilai, dan (c) Analisis Tiga yang berfokus pada Analisis Politik yang menyangkut struktur *power* (Checkland dan Poulter, 2006).

Gambar 4.5 Rich Picture Pengelolaan Hutan Lindung



Root definitions dari sistem yang relevan

Alat bantu yang tepat untuk menganalisis *root definitions* adalah kata CATWOE : C (*Customer*), A (*Actors*), T (*Transformation*), W (*Worldview* atau *Weltanschauung*), O (*Owners*), dan E (*Environmental Constraints*). Setelah dilakukan analisis satu sampai analisis tiga serta analisis CATWOE, maka diteruskan dengan menguji seberapa jauh model yang dihasilkan memberikan hasil yang optimal. Checkland dan Poulter (2006) menyatakan bahwa perlu adanya kriteria menyangkut pengukuran kinerja bekerjanya sistem aktivitas yang punya maksud tersebut yaitu (1) *Efficacy*, (2) *Efficiency*, dan (3) *Effectiveness*. Pada *the Stream of Logic-Based Enquiry* analisisnya berbasis logika yang berlangsung pada tahap berpikir serba sistem tahap 3 dan tahap 4 dari SSM. Adapun kategori *The Stream of Cultural Enquiry* yang telah dijelaskan di bagian awal berlangsung pada tataran dunia nyata yang berlangsung pada tahap 1, 2, 5, 6, dan 7 (Checkland dan Scholes, 1990). Pada tahap 3 dan tahap 4 dari *The Stream of Logic-Based Enquiry* ini sebagai tahapan berpikir serba sistem mengenai dunia nyata yang menyangkut tahap pemilihan dan penamaan sistem aktivitas manusia yang relevan (*Relevant Purposeful Activity Systems*) serta tahap pembuatan model konseptual (*Conceptual Model*).

Root Definitions of Relevant Purposeful Activity Systems

Pada tahap 3 ini dibuat *root definition of relevant system* sebagai suatu deskripsi terstruktur dari sebuah sistem aktivitas manusia yang relevan dengan situasi problematis yang menjadi perhatian di dalam penelitian ini (Hardjosoekarto, 2012).

Agar *root definition* benar-benar dapat dipakai sebagai dasar dalam pembuatan model konseptual, maka perlu dicek dengan menggunakan alat bantu analisis CATWOE, sehingga *root definition* benar-benar mampu menggambarkan sebuah sistem aktivitas manusia yang punya maksud yang relevan yang kita pilih. CATWOE merupakan singkatan dari *Customers (C)*, *Actors (A)*, *Transformation Process (T)*, *Worldview (W)*, *Owners (O)*, *Environment Constraints (E)*. Selain itu juga digunakan kriteria kinerja 3E yaitu: 1) Efikasi, 2) Efisiensi, dan 3) Efektivitas. Efikasi mengacu kepada keberhasilan transformasi T dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kriteria Efisiensi merujuk kepada pemakaian sumberdaya yang minimum dalam mencapai proses transformasi T. Sedangkan kriteria Efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih baik yang disebabkan oleh transformasi T. Ketiga kriteria tersebut digunakan dalam pengawasan terhadap kinerja dari seluruh tahapan kegiatan dari suatu sistem aktivitas yang punya maksud yang tujuannya adalah untuk pelaksanaan kontrol terhadap aktivitas kegiatan tersebut.

Di bawah ini adalah CATWOE sebagai alat uji atau analisis untuk *Root Definition* tentang Pemahaman Masyarakat yaitu: “ Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk menghasilkan kebijakan (P) melalui pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani (Q) dalam rangka menjamin optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung (R). Analisis CATWOE untuk *Root Definition* Implementasi Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 CATWOE dan 3E dalam *Root Definition*: Pemahaman Masyarakat

<i>Customers (C)</i>	Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan),Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang berkepentingan (<i>stakeholder</i>) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo (FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
<i>Actors (A)</i>	Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
<i>Transformation Process (T)</i>	Terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal melalui komunikasi dan interaksi antarinstitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung; penjelasan mengenai harapan-harapan yang akan dipenuhi sekaligus juga mampu memenuhi komitmen yang sudah diikrarkan; penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan <i>stakeholder</i> ; pemberdayaan SDM Perum Perhutani mencakup sikap, ketrampilan, dan budaya; jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk standarisasi pelayanan, monitoring, dan evaluasi ; penyediaan pedoman dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung.
<i>Worldview (W)</i>	Tercapainya implementasi kebijakan Perum Perhutani secara maksimal sangat penting dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung
<i>Owners (O)</i>	Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
<i>Environmental Constraints (E)</i>	Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Perum Perhutani, terbatasnya sumberdaya yang ada dalam masyarakat desa hutan (MDH), Fungsi LMDH belum maksimal, kebijakan Perum Perhutani yang belum sesuai

	dengan kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan kendala bagi terwujudnya implementasi kebijakan yang maksimal dalam pengelolaan hutan lindung.	
Menetapkan kriteria kinerja melalui 3E.	E-Efikasi/ Keberlang- sungan	Misi dan tujuan kebijakan pengelolaan hutan lindung Perum Perhutani, sumber daya Perum Perhutani; peran serta masyarakat desa hutan (MDH) dan <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi; kemudahan prosedur bagi masyarakat desa hutan dan <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi; situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif akan membantu mewujudkan implementasi kebijakan yang maksimal dalam rangka menjamin tercapainya governansi hutan lindung yang baik di Kabupaten Wonosobo.
	E-Efisiensi	Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran Perum Perhutani mengingat luasnya wilayah hutan lindung. Menggunakan fasilitas dan sarana Perum Perhutani.
	E-Efektivitas	Terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal dalam rangka menjamin tercapainya governansi hutan lindung yang baik di Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Olahan Peneliti, 2014

Dalam proses tranformasi, terkait dengan terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal melalui komunikasi dan interaksi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung; penjelasan mengenai harapan-harapan yang akan dipenuhi sekaligus juga mampu memenuhi komitmen yang sudah diikrarkan; penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholder*; pemberdayaan SDM Perum Perhutani mencakup sikap, ketrampilan, dan budaya; jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk standarisasi pelayanan, monitoring, dan evaluasi ; penyediaan pedoman dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung.

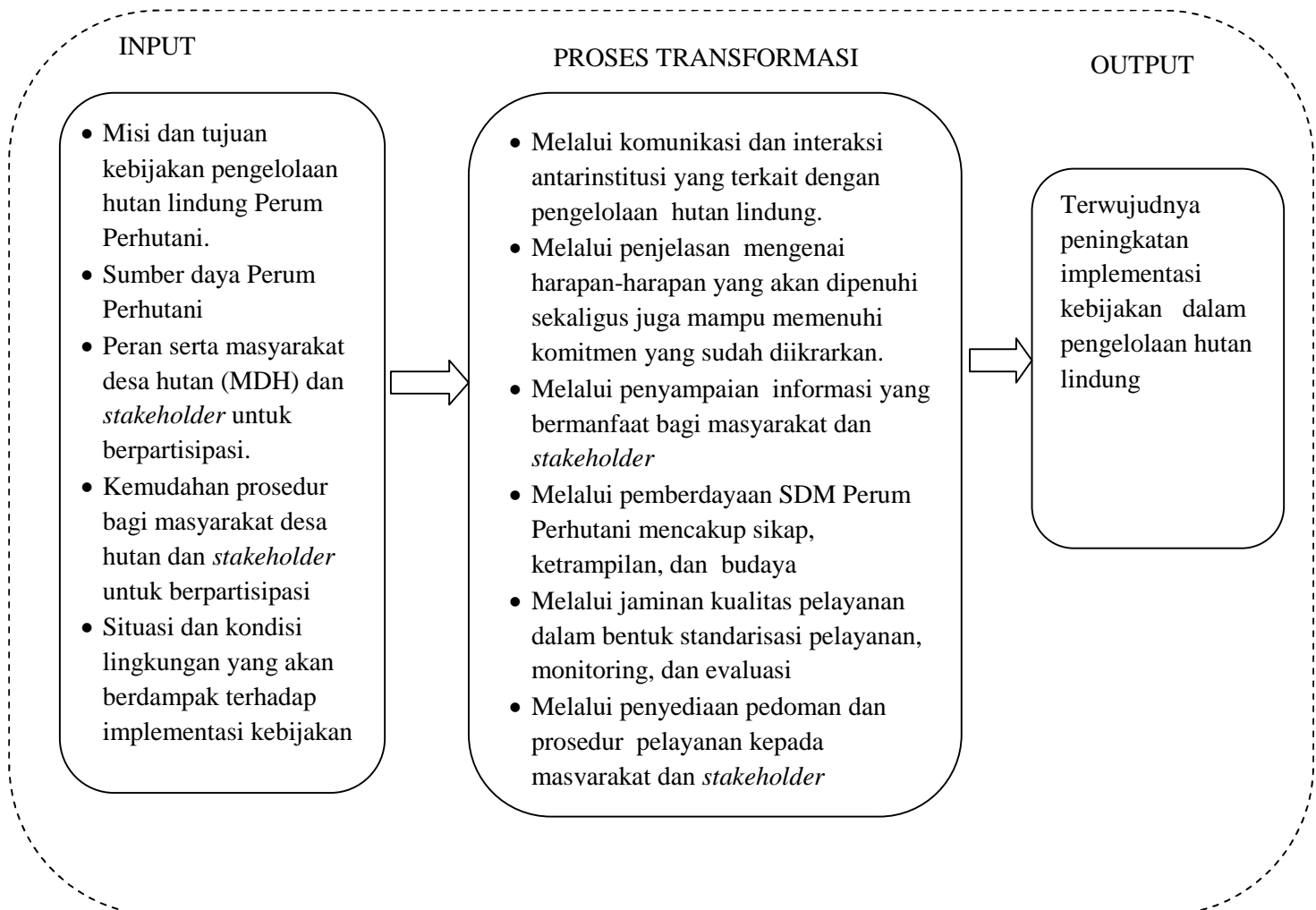
Dalam rangka proses transformasi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan di antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung melalui pemahaman masyarakat mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam pengelolaan hutan lindung memiliki hambatan (E: *Environmental Constraints*) khususnya menyangkut birokrasi dan sumber daya manusia. Birokrasi kadang menghambat masyarakat dalam menjalankan implementasi kebijakan Perhutani seperti disampaikan oleh salah satu ketua LMDH yang

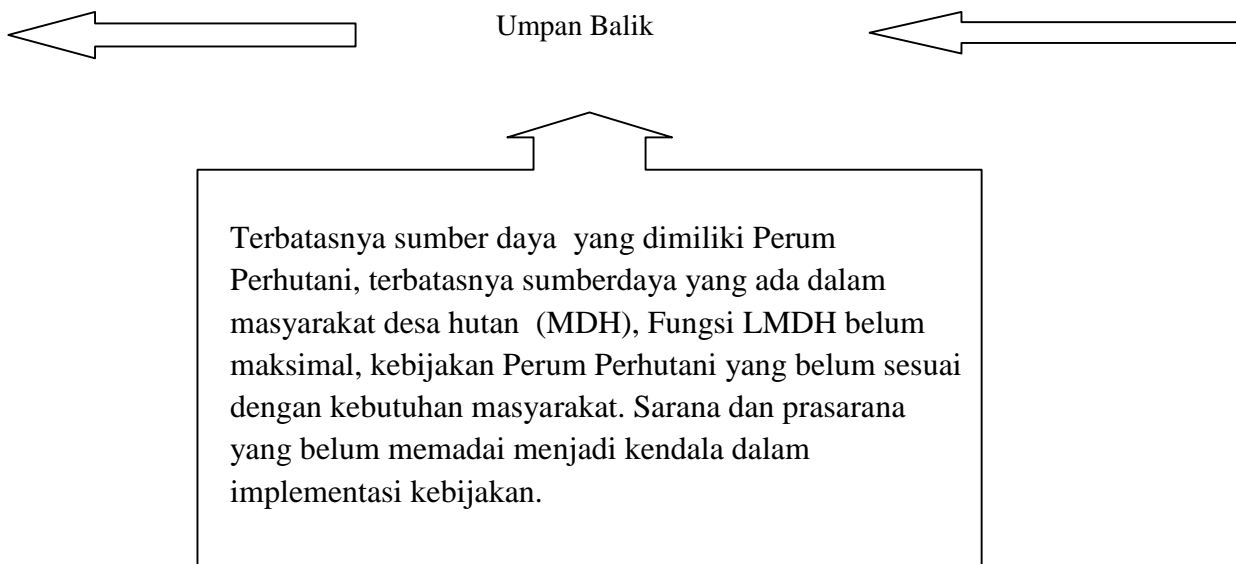
mengatakan bahwa sudah lama proses tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tapi hasilnya belum nampak. Hambatan lain adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia seperti disampaikan oleh staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo yang menyatakan bahwa terdapat keterbatasan dalam hal personel LMDH sehingga terkadang mereka menyalahi kesepakatan bersama.

Dalam aspek efikasi dilihat sejauh mana pencapaian dari keberlangsungan kegiatan implementasi kebijakan Perhutani. Efisiensi terkait dengan sejauh mana penggunaan sumberdaya dapat dibuat secara minimum mungkin (sumberdaya manusia dan anggaran) dalam rangka implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Adapun efektivitas menyangkut ketercapaian secara maksimal implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Perhutani terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformasi yang berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar kinerja kegiatan-kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Transformasi Implementasi Kebijakan





Membangun Model Konseptual (*Conceptual Model of the Systems Named in the Root Definition*)

Tabel 2. Kegiatan Sistem: Pemahaman Masyarakat

1	Menetapkan aparatur Perhutani yang berhubungan dengan implementasi kebijakan
2	Memastikan pengetahuan dan pemahaman aparatur Perhutani mengenai kebijakan yang diimplementasikan
3	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang memerlukan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan hutan lindung
4	Menyiapkan kebijakan yang akan disosialisasikan
5	Mempertimbangkan anggaran untuk implementasi kebijakan
6	Merancang media yang tepat untuk kelancaran penyebarluasan (diseminasi) kebijakan kepada <i>stakeholder</i>
7	Membuat modul atau panduan sosialisasi kebijakan
8	Menyusun jadwal rangkaian sosialisasi peraturan dan program
9	Melakukan sosialisasi kebijakan kepada <i>stakeholder</i>

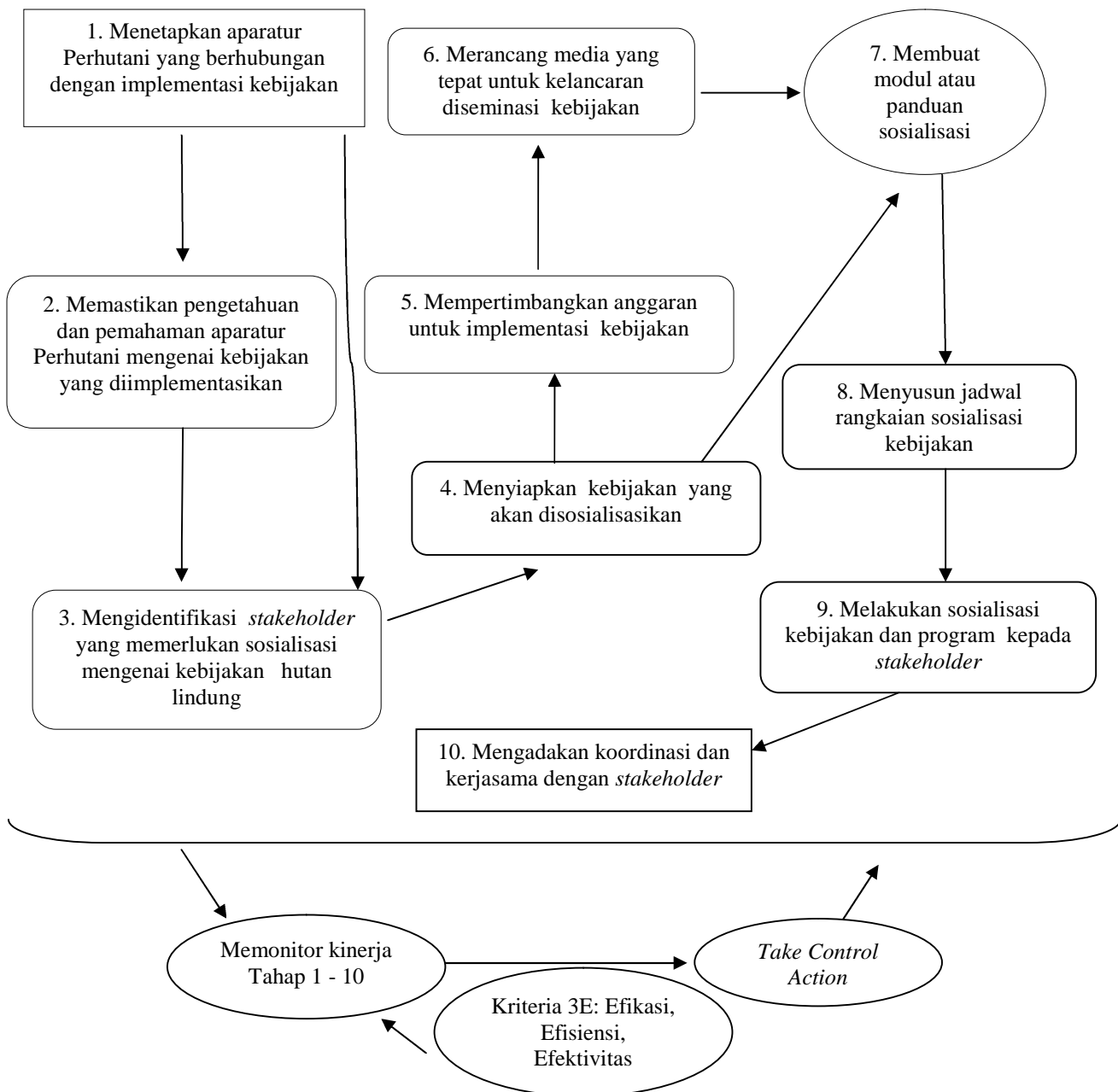
10	Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>
----	---

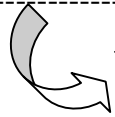
Sumber: Olahan Peneliti, 2014

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka di bawah ini digambarkan model konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem Pemahaman Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Model Konseptual Sistem Pemahaman Masyarakat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURANG MAKSIMAL





IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEBIH MAKSIMAL

Sumber: Olahan Peneliti, 2014

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada ini dilakukan uraian langkah ke 5 dari SSM mengenai perbandingan model konseptual terhadap situasi dunia nyata menyangkut sistem Pemahaman Masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.

**Tabel 3. Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem : Pemahaman Masyarakat**

No	Aktivitas Model Konseptual	Dunia Nyata				Alternatif Tindakan
		Keberadaannya?	Bagaimana?	Siapa?	Baik/Jelek?	
1	Menetapkan aparatur Perhutani yang berhubungan dengan implementasi kebijakan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo	Kurang Optimal	Tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur Perhutani yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan Perhutani
2	Memastikan pengetahuan dan pemahaman aparatur Perhutani mengenai kebijakan yang diimplementasikan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara	Sudah Optimal	Menyiapkan aparatur Perhutani yang memiliki pemahaman mengenai kebijakan Perhutani
3	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang memerlukan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan hutan lindung	Ada	Rapat Internal	LMDH Pemerintah Daerah LSM Organisasi nonpemerintah(Ornop)	Sudah Optimal	Menelaah <i>stakeholder</i> yang terkait dengan sosialisasi kebijakan Perhutani
4	Menyiapkan kebijakan yang akan disosialisasikan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara	Sudah optimal	Menelaah dokumentasi berkaitan dengan sosialisasi kebijakan

No	Aktivitas Model Konseptual	Dunia Nyata				Alternatif Tindakan
		Keberadaannya?	Bagaimana?	Siapa?	Baik/Jelek?	
5	Menyiapkan anggaran untuk implementasi kebijakan	Ada	Pengajuan Anggaran	KPH Kedu Utara	Kurang Optimal	Menambah anggaran sehingga implementasi kebijakan Perhutani dapat terlaksana dan tepat sasaran
6	Merancang media yang tepat dalam rangka penyebaran (diseminasi) kebijakan kepada <i>stakeholder</i>	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo	Kurang optimal	Melakukan kajian sasaran/obyek/orang yang akan diberikan informasi
7	Membuat modul atau panduan sosialisasi kebijakan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara	Perlu Perbaikan	Harus ada gambaran yang komprehensif mengenai diseminasi kebijakan, menyangkut materi, sasaran, dsb.
8	Menyusun jadwal rangkaian sosialisasi kebijakan	Ada	Rapat Internal	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo	Kurang optimal	Perlu kajian yang lebih komprehensif mengenai sosialisasi sehingga jadwal dapat terlaksana dan tepat sasaran
9	Melakukan sosialisasi kebijakan <i>stakeholder</i>	Ada	Rapat Koordinasi	KPH Kedu Utara BKPH WOnosobo RPH Wonosobo	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih memperhatikan jadwal yang telah tersusun • Memperhatikan obyek/orang yang akan disosialisasikan sehingga obyek/orang dapat memahami • Melakukan pendekatan secara individual sehingga sosialisasi tepat sasaran
10	Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait dengan implementasi	Ada	Rapat Koordinasi	LMDH Pemerintah Daerah LSM Organisasi	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Perhutani lebih memahami permasalahan <i>stakeholder</i> • Perhutani lebih memahami kebutuhan <i>stakeholder</i>

No	Aktivitas Model Konseptual	Dunia Nyata				Alternatif Tindakan
		Keberadaannya?	Bagaimana?	Siapa?	Baik/Jelek?	
	kebijakan dari Perhutani			nonpemerintah(Ornop)		Perhutani mencari cara dan metode koordinasi yang tepat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Tabel 4. *Systematically Desirable dan Culturally Feasible* Menyangkut Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Hutan Lindung

No	Nama RDs	<i>Desirable?</i>	<i>Feasible?</i>	<i>Possible Action</i>
1	Implementasi Kebijakan melalui Pemahaman Masyarakat	Mengembangkan konsep pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program Perhutani	Ya, merancang media yang tepat dalam rangka sosialisasi program Perhutani	Peningkatan kualitas SDM masyarakat desa hutan (MDH)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Dalam kaitan dengan *Root Definitions* Pemahaman Masyarakat, Akib (2010:6) menyatakan bahwa ada empat syarat pengelolaan diseminasi kebijakan, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan; 2) adanya kesadaran masyarakat untuk menerima serta melaksanakan kebijakan; 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Pemahaman masyarakat mengenai suatu kebijakan juga sangat penting untuk terlaksananya implementasi kebijakan tersebut seperti disampaikan oleh Baedhowi (2004) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik memerlukan beberapa faktor penting agar dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu sasaran kebijakan publik yang mampu merespon dengan baik dan berpartisipasi aktif terhadap kebijakan yang telah

dilaksanakan. sasaran kebijakan publik dapat bermacam-macam, di antaranya adalah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang terkena implementasi kebijakan tersebut. FAO-UN (2010) menjelaskan bahwa proses secara partisipatif *bottom-up* yang menggunakan lokakarya multipihak adalah cara yang tepat untuk mengembangkan suatu implementasi kebijakan yang bermanfaat. Pemerintah tidak harus bekerja sendirian namun pemerintah perlu mempromosikan dan memfasilitasi implementasi kebijakan, sesuai dengan tanggung jawab yang terkait dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan dalam rangka pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem diinginkan atau diharapkan adalah melakukan pengembangan suatu pola atau konsep pemahaman masyarakat terhadap kebijakan atau program Perhutani terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Perubahan yang secara sistem dapat dilakukan terkait dengan implementasi kebijakan Perhutani dalam pengelolaan hutan lindung adalah merancang media atau sarana yang tepat dalam rangka sosialisasi kebijakan program Perhutani kepada masyarakat. Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh Perhutani dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat adalah melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat desa hutan (MDH). Dengan peningkatan pemahaman masyarakat desa hutan maka fungsi hutan lindung bagi kemaslahatan manusia dapat tetap terjaga disamping menjaga keharmonisan hubungan dengan Perum Perhutani sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan: “Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan LMDH belum kuat semua, di Wonosobo semua Desa sudah ber LMDH semua, tapi hanya formalitas.” Hal yang senada disampaikan oleh anggota Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo yang mengungkapkan: “Cuma yang jadi masalah antara keinginan masyarakat dengan keinginan Negara dalam hal ini adalah Perhutani adalah berbeda, kalau masyarakat inginnya bebas menanam, tapi bagi Perhutani atau Negara, sudah ada aturan mainnya.” Weiland (2010) mengatakan bahwa banyak negara berkembang masih memiliki kendala menyangkut dana dan sumber daya manusia yang memadai untuk menyiapkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan hutan. Menurut Dwidjowiyoto (2005) inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan diperlukan sumber daya yang memadai sehingga program yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung dapat berjalan dengan baik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian mengenai penataan ulang governansi menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat desa hutan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Namun hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi hutan lindung belum maksimal. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan lindung yang merugikan fungsi dan peran hutan lindung. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi khususnya dari Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dirumuskan rekomendasi dimana sehubungan dengan optimalisasi implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung maka diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM masyarakat desa hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1. Hal. 1-11
- Arief, Arifin. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*. Universitas Indonesia: Disertasi
- Checkland, Peter and Scholes, Jim. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. England: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Checkland, Peter and Poulter, John. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for practitioners, Teachers, and Students*. JohnWiley and Sons, Ltd, Chichester.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2005). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- FAO-UN. (2010). *State of the World's Forests*.
- Ginoga, Kirsfianti L., dkk. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi* Vol. 2 No. 2 Juli , hal 203 -232
- Ketidakadilan PHBM. (2013). <http://arupa.or.id/ketidakadilan-phbm/>. Diunduh 9 Nopember 2013.

Murdiyanto, Eko. (2008). Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Kearifan Lokal: Suatu Konsep untuk Pengentasan Kemiskinan, dalam *Pendidikan Agroforestry Sebagai Strategi Menghadapi Pemanasan Global*. Prosiding Seminar Fakultas Pertanian UNS. Hal. 255-265

Suara Merdeka Cyber News. Minggu, 11 Maret 2007.

<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0703/11/dar32.htm>. diunduh tanggal 4 Februari 2013.

Weiland, Sabine. (2010). Change in forest governance in developing countries. In search of sustainable governance arrangements. *International Journal of the Commons*. Vol 4, No 2.

Zulaifah, Siti. (2007). Rehabilitasi Lahan Hutan dan Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. *Majalah Kehutanan Indonesia*. Edisi I.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

RPSEP-18

REFORMASI INFORMASI SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN *KNOWLEDGE CIVIL SOCIETY*

Siti Samsiyah
Fisip-Universitas Terbuka
Email: siti@ut.ac.id

Abstrak

Sejak runtuhnya orde baru tahun 1988 kebebasan dunia penyiaran terus berkembang. Semula jalur komunikasi radio dan televisi diharuskan mengikuti visi pemerintah. Seiring berkembangnya perubahan di masyarakat, media televisi dan radio juga mengalami perubahan. Keluarnya UU penyiaran No.32/2002 memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menformat siaran sesuai visi dan misi media tersebut, namun tetap ada ranah-ranah yang harus diperhatikan yang ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat dan keutuhan NKRI. Keluarnya regulasi pemerintah mengenai penyiaran juga mendorong berkembangnya radio komunitas. Berkembangnya teknologi juga melahirkan media baru atau internet yang saat ini menguasai jalur transportasi komunikasi. Berkembangnya teknologi juga melahirkan media baru atau internet yang saat ini menguasai jalur transportasi komunikasi. Penelitian Reformasi Informasi Sebagai Strategi Membangun *Knowledge Civil Society* merupakan penelitian deskriptif, menggambarkan kondisi masyarakat saat ini yang menjadikan teknologi informasi sebagai media untuk mengakses informasi dan menyebarkan informasi. Semakin berkembangnya media dengan produksi siarannya yang beragam mencakup berbagai sektor kehidupan pendidikan, kesehatan perekonomian, budaya mendorong informasi adalah hak bagi setiap orang untuk mendapatkannya. Dengan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat maka secara bertahap akan membentuk masyarakat yang berpengetahuan.

Kata kunci: teknologi informasi dan komunikasi, reformasi informasi, masyarakat berpengetahuan,

Abstract

Since the collapse of the Orde Baru regime (one of the regime in Indonesia) in 1988, The freedom of broadcasting continues to grow. Originally a radio and television communication lines required to follow the vision of the government. As the development of changes in society, television and radio media is also changing. With the issuance of broadcast law 32/2002 gives freedom to people to format the broadcast according to the vision and mission of the media, but still there are domains that should be considered are intended for the benefit of society and the integrity of Unitary State of the Republic Indonesia (NKRI). The release of government regulations regarding radio broadcasting is also supporting encourage community development. The development of technology has also spawned new media or the internet which currently controls the transport lines of communication. This technology also affects the appearance of the internet radio streaming. Research of Information Reform As a Strategies For Build a Civil Society Knowledge is a descriptive study, describes the current state of society which makes information technology as a medium to access information and

disseminate information. The continued development of media with diverse broadcast production covers various sectors of education, health, economy, culture of pushing information is a right for everyone to get it. With the information that is easily accessible to the public will gradually form a knowledgeable society.

Keywords: *information and communication technology, information reform, knowledge civil society*

A. Pendahuluan

Sampai era 80-an masyarakat Indonesia masih terbatas dengan akses informasi yang bermuatan pendidikan maupun hiburan. Saluran televisi yang kita kenal saat itu masih terbatas pada televisi milik pemerintah pusat (TV-RI) dan televisi milik pemerintah daerah (tingkat propinsi) misalnya untuk wilayah Surakarta bisa mengakses TV-RI –Yogyakarta, TV-RI Surabaya. Televisi swasta maupun teve kabel belum dikenal masyarakat. Begitu pula untuk media radio, saat itu RRI masih mendominasi siaran radio secara nasional. Dengan frekuensinya yang begitu kuat jalur frekuensi RRI sangat jernih dan bisa ditangkap oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan radio siaran swasta ?, radio swasta masih menggunakan frekuensi AM. AM merupakan frekuensi dengan daya jangkau cukup jauh namun dari sisi suara kurang jernih.

Seiring majunya teknologi informasi maka semua lini media terdorong memunculkan bentuk –bentuk baru media. Dimana kehadiran media baru ini mempermudah dalam mengaksesnya dan menghasilkan suara atau kualitas yang lebih baik. Untuk media elektronik termasuk didalamnya televisi, radio dan media baru internet mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Media radio yang semula kita hanya mengenal RRI, radio swasta berjalur AM. Dengan majunya teknologi ini maka radio media radio telah merubah diri menjadi media yang dapat menjangkau masyarakat luas. Jalur FM merupakan bentuk teknologi baru dari frekuensi radio. Dengan jalur FM ini radio akan menghasilkan suara yang jernih meskipun daya jangkauannya lebih pendek dari jalur AM. Tidak berhenti itu saja, dengan kecanggihan teknologi maka radio FM saat ini pun telah memfasilitasi dirinya dengan radio tanpa frekuensi, atau melalui jalur internet. Radio ini dikenal dengan radio steaming.

Internet, media yang satu ini menjadi *booming* luar biasa, perkembangannya mampu mengalahkan media cetak yang merajai media di era 80-an. Saat ini mayoritas dari media cetak baik itu koran, majalah, telah memfasilitasi versi elektronik untuk memberikan kemudaahn bagi masyarakat luas untuk mengakses informasi yang diproduksinya.

Media internet itu sendiri memiliki fasilitas yang luar biasa untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari menyimpan dokumen, membentuk jaringan kolega, membagi informasi untuk kalangan tertentu hingga membagi informasi untuk masyarakat dunia.

Dengan jumlah penduduk 250.000.000 orang, Indonesia menduduki peringkat ke 5 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah tersebut media memiliki posisi yang strategis untuk menyebarkan informasi dari masyarakat untuk masyarakat, atau dari pemerintah untuk masyarakat. Informasi merupakan aspek yang sangat diperlukan oleh semua orang. Informasi memiliki misi yang bermacam-macam, dari informasi yang sifatnya umum untuk pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, hingga informasi yang sifatnya khusus. Artinya informasi hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

Negara yang maju adalah negara dimana masyarakatnya telah menjadikan informasi sebagai komoditi utamanya. Dari besarnya masyarakat yang mengakses informasi, hingga jumlah pekerjaan yang berada di sektor media yang memberikan kesempatan bekerja cukup luas.

Untuk membangun masyarakat yang terinformasi di Indonesia perlu sinergi berbagai pihak, pemerintah, swasta, masyarakat itu sendiri. Dengan kemajuan teknologi sangat memungkinkan menciptakan masyarakat yang terinformasi yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang berpengetahuan.

Bagaimanakah strategi membangun masyarakat berpengetahuan di Indonesia ?

B. Pembahasan

1. Kondisi Masyarakat Indonesia Saat ini

Dari uraian pada pendahuluan disebutkan media di Indonesia cetak dan elektronik saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jangkauan, akses informasi yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat/mengedukasi, menghibur atau memperkenalkan sebuah produk tertentu, program tertentu pada masyarakat. Namun karena kondisi geografis negara kita yang beragam, tidak semua media tersebut bisa sampai ke masyarakat.

Media televisi, media elektronik yang satu ini selain mampu memberikan pilihan channel/saluran yang jumlahnya ratusan pada masyarakat juga teknologinya berkembang pesat.

Televisi digital merupakan perkembangan teknologi televisi yang saat ini mulai memasyarakat. Kelebihan dari televisi ini adalah kualitas gambar dan suara yang lebih bagus.

Untuk media radio selain jalur AM dan FM seiring perkembangan teknologi informasi, dengan adanya internet muncullah *radio streaming*. Keistimewaan dari *radio streaming* ini adalah jangkauannya luas mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia *radio streaming* jumlahnya cukup banyak data yang diperoleh dari (<http://nusradio.com/indonesia/page/2/>) menunjukkan bahwa jumlah *radio streaming* di Indonesia mencapai 400 *radio streaming*. Jumlah yang cukup besar dan mampu memberikan berbagai alternatif bagi masyarakat untuk memilih informasi sesuai kebutuhannya.

Selain *radio streaming* teknologi radio yang berkembang saat ini adalah radio komunitas. Radio komunitas adalah radio yang mayoritas nirlaba, radio ini didirikan atas prakasa seseorang, golongan masyarakat tertentu dan informasi yang diproduksinya disesuaikan dengan komunitasnya. Dengan daya jangkau maksimal 5 km radio komunitas sesuai untuk wilayah yang terpencil di Indonesia yang memerlukan akses informasi. (<http://jrki.wordpress.com/anggota/>) menyatakan bahwa jaringan radio komunitas saat ini mencapai 18 jaringan dengan masing-masing keanggotaan antara 20-25 radio komunitas bisa dijumlahkan mencapai 400 lebih radio komunitas di Indonesia dengan jaringannya yang tersebar dari Aceh hingga wilayah Papua.

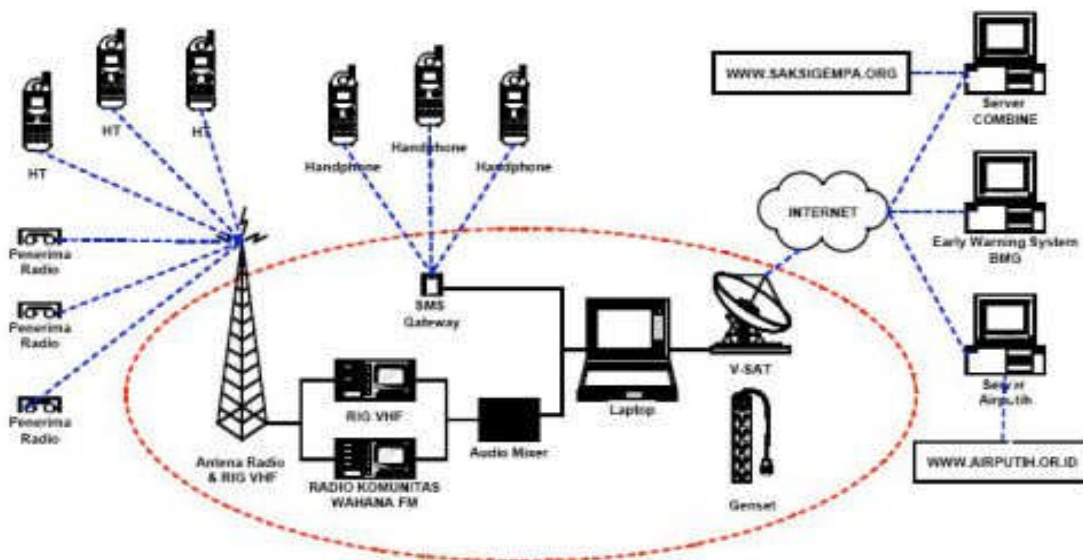
Mencermati kondisi ini Indonesia telah bergeser dari masyarakat tradisional dalam hal akses informasi menuju masyarakat informasi. Jika wilayah desa hingga perkotaan telah mampu mengases informasi dengan beragam media tahap selanjutnya adalah membangun masyarakat berpengetahuan.

Untuk melihat akses masyarakat terhadap media radio digunakan masyarakat dalam lingkup mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di 16 UPBJJ di wilayah tengah (Jawa, Sumatera dan Kalimantan) hasil penelitian tahun 2011 tentang “Kajian Pemanfaatan Radio *Streaming* (Radio Internet) Sebagai Alternatif Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Bantuan Belajar Mahasiswa UT” (Samsiyah dkk, 2011) menunjukkan beberapa catatan melalui akses yang sangat luas ini mahasiswa UT dapat belajar secara non-stop 24 jam dimanapun mereka berada. Keunggulan radio juga diperlihatkan pada hasil penelitian tahun 2010 dengan judul Media Literacy Mahasiswa UT Melalui Network Radio (

Samsiyah, Siti dkk) menyebutkan bahwa dari 16 UPBJJ yang ada di wilayah tengah 12 diantaranya masih menggunakan media radio sebagai sarana komunikasi antara UPBJJ dengan masyarakat. Radio yang dipilih bervariasi, namun pilihan radio AM dan FM lah yang paling mendominasi. Dari kedua hasil penelitian mengenai media khususnya radio dapat diidentifikasi bahwa media radio atau media elektronik mendominasi pengaksesan informasi oleh masyarakat khususnya mahasiswa UT.

2. Sinergi Media Elektronik dan Cetak Untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan

Sinergi pada media cetak dan elektronik khususnya media radio yang menggunakan frekuensi dan media radio yang menggunakan jalur internet akan mampu secara bertahap membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Dengan kemampuannya menyebarkan informasi ke seluruh tempat dimanapun di dunia *radio streaming* mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Mobilisasi informasi dapat dilakukan melalui siaran *radio streaming* ini. Selanjutnya untuk kondisi geografis yang tidak terkendala oleh frekuensi masyarakat dapat mengakses melalui radio AM dan FM. Untuk masyarakat yang berada di wilayah terpencil bisa menggunakan radio komunitas sebagai media penyebaran informasi mereka. Dengan konsep dari masyarakat untuk masyarakat radio komunitas mampu memproduksi siaran sesuai informasi yang dibutuhkan masyarakat setempat. Konsep jaringan radio komunitas yang tersebar di berbagai daerah bisa membantu dalam pemerataan akses informasi pada masyarakat. Berikut adalah ilustrasi penyebarluasan informasi dari jaringan radio komunitas.



Sumber: (<http://ahmadsamantho.wordpress.com/2010/03/22/pemberdayaan-masyarakat-melalui-jaringan-informasi-komunikasi-radio-komunitas/>)- (akses 17 /10/2014)

Pada gambar di atas menunjukkan proses penyebaran informasi dari jaringan radio komunitas yang disebarluaskan melalui jalur internet untuk direlay oleh radio-radio komunitas lainnya yang berada dalam satu jaringan radio komunitas. Beberapa daerah telah mengembangkan radio komunitas sebagai media komunikasi antar warga. Misalnya di wilayah Yogyakarta, radio komunitas untuk wilayah ini digunakan sebagai antisipasi terhadap bencana alam. Dengan radio komunitas desa-desa yang sulit terjangkau dapat dievakuasi melalui siaran radio komunitas ini. Begitu pula di wilayah lain akan menggunakan radio komunitas sesuai dengan keperluannya. Berikut ini adalah beberapa contoh media elektronik yang menggabungkan diri dalam jaringan media, sehingga mempermudah dalam penyebarluasan informasi. Berikut adalah jaringan radio komunitas yang ada di Indonesia saat ini :

(<http://jrki.wordpress.com/anggota/>) (akses 17 Oktober 2014)

1. Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat
2. Jaringan Radio Komunitas Jabotabek
3. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta
4. Jaringan Radio Komunitas Jawa Timur
5. Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah
6. Jaringan Radio komunitas Lampung
7. Jaringan Radio Komunitas Banten

8. Jaringan Radio Komunitas Sumatera Barat
9. Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara
10. Jaringan Radio Komunitas Bali
11. Jaringan Radio Komunitas Sulawesi Utara
12. Jaringan Radio Komunitas NTB
13. Jaringan Radio Komunitas Papua
14. Jaringan Independen Radio Komunitas (JIRAK CELEBES) Sulawesi Selatan
15. Jaringan Radio Komunitas Kalimantan Timur
16. Jaringan Radio Komunitas NTT
17. Jaringan Radio Komunitas Kalimantan Barat
18. Jaringan Radio Komunitas Nangroe Aceh Darussalam

Beberapa contoh Radio Online/Radio Streaming (<http://nusaradio.com/indonesia/>) (Akses 17 Oktober 2014)

Station Name	Listen Live	Station Homepage
<u>Beat Radio Indonesia</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://beatradioid.com</u>
<u>Radio MTA FM Surakarta</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://mtafm.com/v1/</u>
<u>Dreamers Radio</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://www.dreamersradio.</u>
<u>RadioMGL</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://radiomgl.blogspot.</u>
<u>Radio Terbeken FM</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://radio.terbeken.com</u>
<u>Yobel FM Radio</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://yobelfm.webs.com/</u>
<u>Scout Radio 107.7 FM</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	<u>http://www.scoutradio.net</u>
<u>Poris Radio</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> -	<u>http://porisradio.com</u>

	<u>Facebook</u>	
<u>North Smooth Radio 24H</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://northsmoothradio24
<u>Radio Saderna</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://radiosaderna.blogs
<u>Amamis FM</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://parakkek.listen2my
<u>Memora FM Gorontalo</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://www.memorafmgoront
<u>TOP FM Cilegon 91.80</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://www.topfmcilegon.c
<u>Radio Ranah Pusako</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://ranahpusako.blogspot
<u>Malala Radio</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://www.malalaradio.co
<u>Radio Cempaka Asri FM Bulukumba</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://www.rca-fm.com/
<u>Radio Diradja FM 106.2</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://dirajafm.blogspot
<u>Radio Party People</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://www.ryan-inside.co
<u>Radio Indonesia Bergegas</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://ib.onlivestreaming
<u>Easy Station</u>	<u>Streaming</u> - <u>PLS</u> - <u>Facebook</u>	http://easystationlive

Selain jaringan radio komunitas, radio streaming, penyebarluasan informasi bisa dilakukan melalui televisi lokal yang ada di Indonesia, televisi lokal yang ada di daerah, serta televisi satelit yang telah banyak menyiarkan berbagai informasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan beragamnya media informasi elektronik maupun media cetak

yang jumlahnya ratusan memberikan pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi sesuai keperluannya.

3. Masyarakat Berpengetahuan

Masyarakat berpengetahuan adalah masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan dengan penguasaan ketrampilan, pengetahuan dan memiliki akses informasi yang luas. Berikut adalah ciri masyarakat Berpengetahuan yang disarikan dari berbagai sumber :

1. Masyarakat memiliki akses informasi luas
2. Masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang cukup besar
3. Masyarakat mampu berkontribusi terhadap pembangunan dengan ketrampilan/pengetahuan yang dimilikinya
4. Memiliki kemampuan akademik
5. Terbuka untuk mempelajari hal-hal baru

Berdasarkan ciri tersebut serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini bertahap masyarakat berpengetahuan di Indonesia dapat direalisasikan. Diantaranya pemerintah mendukung kebijakan dari tingkat daerah hingga pusat diantaranya masyarakat mudah untuk mengakses informasi. Hal ini telah diwujudkan pemerintah dengan adanya desa pintar, atau kecamatan yang telah menyediakan akses internet bagi masyarakat desa, program ini merupakan program dari KOMINFO yang bertujuan membantu masyarakat desa dapat memanfaatkan internet untuk mengakses informasi. Dengan kemampuan ketrampilan serta pengetahuan yang dimilikinya inilah masyarakat dapat memberikan kontribusinya bagi daerahnya. Karena pembangunan yang ada di daerah adalah masyarakat daerah itu sendiri yang akan menjalani program-programnya.

C. Kesimpulan

Masyarakat berpengetahuan (*Knowledge Society*) merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan pengetahuan/ketrampilan yang baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dan memiliki akses yang luas dalam memperoleh/mendapatkan informasi yang diperlukan. Dengan menggunakan media cetak dan elektronik serta variannya. Media radio AM, FM dan radio streaming serta munculnya radio komunitas, media internet dengan ragam fasilitas yang ada merupakan sarana-sarana yang mampu mewujudkan masyarakat berpengetahuan.

Munculnya UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk membeikan akses yang luas bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi apapun yang diperlukannya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, 2007. Literasi Informasi dan Aplikasi Library Software. Makalah dalam Seminar Perpustakaan Sekolah dp Perpustakaan Universitas Kristen Petra.

Dominick, Joseph. R., The Dynamics of Mass Communication, Sixth Edition, Internasional Edition, Mc Graw-Hill College.

MC Quail, Dennis Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, edisi kedua, Erlangga, Jakarta.

Moss Sylvia Stewart L. Tubbs-, Human Communication: Kontek-Konteks Komunikasi, Pengantar Dr. Deddy Mulyana, M.A

Samsiyah, Siti dkk. 2011. Informasi Literacy Mahasiswa UT Melalui Media Radio. Penelitian

Samsiyah, Siti dkk. 2013. Pengintegrasian Radio (Swasta, Streaming, Komunitas) Sebagai Sebagai Media Komunikasi Mahasiswa. Penelitian.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Informasi Nasional, 2003. Jakarta.

[\(http://nusaradio.com/indonesia/page/2/\)](http://nusaradio.com/indonesia/page/2/)

[\(http://jrki.wordpress.com/anggota/\)](http://jrki.wordpress.com/anggota/)

<http://ahmadsamantho.wordpress.com/2010/03/22/pemberdayaan-masyarakat-melalui-jaringan-informasi>

[komunikasi-radio-kumunitas/\)-](http://nusaradio.com/indonesia/)

[\(http://nusaradio.com/indonesia/\)](http://nusaradio.com/indonesia/)

RPSEP-19

Analisis Keunggulan Kompetitif Melalui CRM (*Customer Relationship Marketing*) dalam Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah di Jawa Timur

Rini Rahayu Kurniati
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Abstrak

CRM (*Customer Relationship Marketing*) mampu merumuskan strategi yang berbeda dalam melakukan kegiatannya untuk mewujudkan daya saing perbankan dalam rangka keunggulan kompetitif. Adapun kegiatan usaha bank konvensional dan atau syariah adalah: menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) serta memberikan jasa- jasa bank lainnya (*services*), dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pohan, 2008). Prospek perbankan syariah terlihat sangat cerah, industri perbankan syariah dapat bertahan dari krisis global karena tidak terkait dengan mekanisme pasar dan tanpa spekulasi. Terlihat pada tahun 2010 pertumbuhan aset perbankan syariah global mencapai 8,9 persen dengan total aset sebesar 900 miliar dolar AS. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia seharusnya dapat lebih meningkat dan tumbuh secara signifikan. Tentu saja masih banyak yang harus disiapkan oleh semua pihak yang terlibat, antara lain pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi produk dan layanan kompetitif serta berbasis hubungan dan kekhususan untuk kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jika ketiga unsur itu dapat dipenuhi dan didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai untuk mempromosikan program syariah serta peningkatan instrumen syariah yang terkait, harapannya adalah terwujudnya iklim dan situasi yang ideal bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Hall , 2012)

Payne (2009) yang mengatakan bahwa: Konsep *customer relationship marketing* (CRM) yaitu konsep yang berusaha untuk menekankan pada pendekatan fungsional marketing. CRM berusaha menekankan pada tindakan pemasaran melibatkan pasar yang

memiliki banyak stakeholder. Pasar terdiri dari sejumlah kekuatan atau unsur-unsur seperti pemerintah, pemasok, lembaga media, serikat pekerja, pelanggan dll dan CRM dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi bisnis yaitu "kemampuan untuk menang serta mempertahankan pelanggan"

Dalam perbankan yang dimaksud kemampuan untuk menang serta mempertahankan pelanggan adalah mempertahankan nasabah. Pendapat Payne (2009) tersebut didukung oleh pendapat Zeihmal, *Vet al* (2013) yang mengatakan bahwa janji-janji dengan mengkomunikasikan produk serta layanan perusahaan itu akan diharapkan oleh pelanggan dan tujuan utama *relationship marketing* adalah memelihara pelanggan atas dasar komitmen, kepercayaan/ keyakinan yang diberikan oleh perusahaan sehingga mengurangi kegelisahan dan menimbulkan kenyamanan yang akan menguntungkan perusahaan dan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya didukung oleh hasil penelitian Mithas, Krishnan, & Fornell (2005) yang mengatakan bahwa *Customer Relationship Marketing* (CRM) telah menjadi konsep populer untuk pengelolaan hubungan yang sukses dengan pelanggan sehingga implementasi CRM seringkali menyebabkan peningkatan kepuasan, loyalitas pelanggan dan kinerja bisnis sebagai potensi pelanggan yaitu keuntungan yang maksimal. Bertahun-tahun, pemasaran telah menjadi bagian penting dalam membangun *customer centric*.

Hasil penelitian Aiyub (2007) dan didukung oleh hasil penelitian Maski (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat pandangan yang keliru terhadap bank syariah sehingga akan membentuk preferensi yang rendah dan berakhir dengan rendahnya keputusan untuk memilih bank syariah sehingga pada masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi yang lebih baik dan efektif. Hal ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah maka sosialisasi yang efektif dan intensif perlu ditekankan pada pengenalan sisi keunggulan komparatif yang dimiliki bank syariah yaitu tentang produk dan layanan yang dimiliki oleh bank syariah selain itu bank syariah tetap menjaga kepercayaan dari memberikan *image* yang baik terhadap nasabah yaitu melalui layanan dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga akan dapat menepis sikap keragu-raguan dikalangan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Untuk menepis sikap keragu-raguan dikalangan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut maka menurut Lo (2012) mengatakan bahwa CRM sebagai pilar tidak hanya diberikan sebagai dimensi hubungan tetapi juga merupakan upaya lebih dalam melayani permintaan pelanggan untuk produk dan jasa perusahaan sehingga akan mendapatkan hasil

yang diinginkan melalui strategi dalam meningkatkan penjualan, kepuasan pelanggan. Menurut Gronroos (2007), CRM (*Customer Relationship Marketing*) yaitu cara meningkatkan nilai pelanggan dengan menggunakan sarana didalam pemasaran yang memainkan peran penting yaitu berupa *communication* (komunikasi), *trust* (kepercayaan), *commitment* (komitmen) dan *empathy* (empati) dengan pelanggan yang bertujuan untuk kenyamanan, mengurangi kegelisahan, rasa kepercayaan pelanggan terhadap penyedia layanan serta pengembangan persahabatan karyawan dengan pelanggan sehingga pelanggan menjadi akrab dengan karyawan agar profitabilitas perusahaan tercapai. Sedangkan Kepuasan menurut Oliver dalam Zeithaml *et al* (20013) merupakan evaluasi pelanggan dari produk atau jasa yang telah digunakan dan produk atau jasa tersebut telah memenuhi atau melebihi harapannya.

Berdasar pada uraian tersebut perlu dilakukan penelitian CRM yang efektif dengan menanamkan konsep CRM atau pemasaran hubungan dengan tujuan untuk mendiskripsikan bagaimana keunggulan kompetitif melalui CRM dalam kepuasan nasabah. Penentuan lokasi penelitian dipilih Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kantor cabang Bank Muamalat sekaligus Bank Syariah Mandiri (BSM). Berdasarkan data skunder, terdapat 4 Kota dan Kabupaten yaitu: 1. Kota Surabaya, 2. Kota Malang, 3. Kabupaten Kediri, dan 4. Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan teknik analisis data: (1) Reduksi data, (2) Penarikan kesimpulan dan (3) Verifikasi

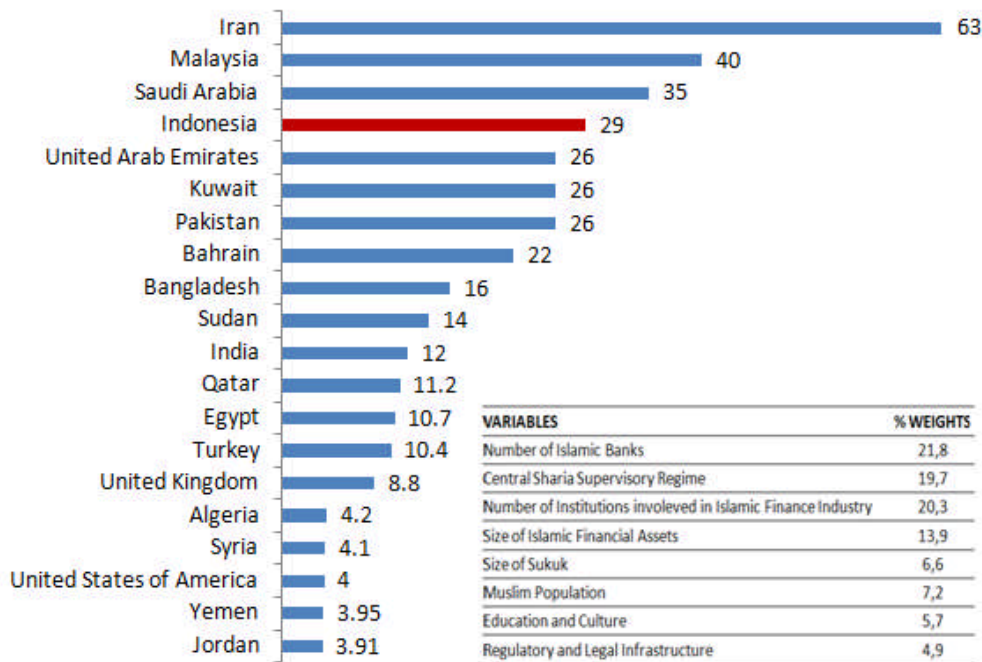
Berdasarkan jawaban hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa CRM telah diterapkan dengan baik di Bank Muamalat dan BSM di Jawa Timur yang dikarenakan Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur: (1) mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah atas dana yang disimpan karena nasabah tidak pernah merasa terjadi kesalahan atas jumlah uang yang disimpan, (2) mampu memberikan informasi produk yang sesuai dengan konsep syariah karena nasabah merasa transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariah, suatu misal tabungan mudharabah, bahwa dalam pembagian keuntungan yang diberikan oleh bank sesuai dengan nisbah bagi hasil, kemudian (3) mampu memelihara hubungan baik dengan nasabah yang dapat memberikan panutan/uswah hasanah karena nasabah merasa adanya pendekatan melalui kontak telepon dan kunjungan dalam rangka menanyakan permasalahan ataupun memperkenalkan produk baru syariah dengan penuh keramahan, serta (4) mampu memberikan komitmen pada nasabah bahwa konsep bagi hasil

tidak melanggar keadilan karena nasabah merasa bahwa memang nisbah bagi hasil sudah sesuai dengan porsi pengelolaan sehingga nasabah tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci: CRM, dan Kepuasan

PENDAHULUAN

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia (Grafik). Melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas (Alamsyah,2012)



Grafik: Islamic Finance Country Index (IFCI, 2011)
 Sumber: Alamsyah (2012)

Tabel: Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah

Rank	Country	Shari'ah-Compliant Assets \$m	Rank	Country	Shari'ah-Compliant Assets \$m
1	Iran	293,165.8	1	Iran	314,897.4
2	Saudi Arabia	127,896.1	2	Saudi Arabia	138,238.5
3	Malaysia	86,288.2	3	Malaysia	102,639.4
4	UAE	84,036.5	4	UAE	85,622.6
5	Kuwait	67,630.2	5	Kuwait	69,088.8
6	Bahrain	46,159.4	6	Bahrain	44,858.3
7	Qatar	27,515.4	7	Qatar	34,676.0
8	UK	19,410.5	8	Turkey	22,561.3
9	Turkey	17,827.5	9	UK	18,949.0
10	Bangladesh	7453.3	10	Bangladesh	9,365.5
11	Sudan	7151.1	11	Sudan	9,259.8
12	Egypt	6299.7	12	Egypt	7,227.7
13	Pakistan	5126.1	13	Indonesia	7,222.2
14	Jordan	4621.6	14	Pakistan	6,203.1
15	Syria	3838.8	15	Syria	5,527.7
16	Iraq	3815	16	Jordan	5,042.4
17	Indonesia	3388.2	17	Brunei	3,314.7
18	Brunei	3201.4	18	Yemen	2,338.7
19	Yemen	1318.3	19	Thailand	1,360.8
20	Switzerland	1040.6	20	Algeria	1,051.1
21	Mauritius	943.5	21	Mauritius	992.2
22	Algeria	837.5	22	Switzerland	935.5
23	Tunisia	632.3	23	Tunisia	770.1
24	Singapore	618	24	Singapore	725.0
25	Thailand	495.5	25	Palestine	612.5

Sumber: Maris Strategies & the Banker (2010) dalam Alamsyah (2012)

Bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah *regulatory regime* yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju *global player* juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$7,2 miliar (Tabel). Melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US\$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan (Alamsyah,2012)

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (MUI) dan pemerintah dengan dukungan dari ICMI. Berdiri pada tahun 1991 diatur dengan UU No. 10 tahun 1998, pada tahun 2007, terdapat institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Produk jasa yang disediakan bank syariah : *mudharabah* (perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha), *musharakah* (*joint venture*/ada campur tangan pengelolaan manajemen), *murabaha* (penyaluran dana dalam bentuk jual beli) dan *takaful* (asuransi Islam). Berdirinya bank syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia awalnya tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh Bank- Bank yang lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia. Awalnya semua itu dikemas dengan berdirinya *Grammen Bank*. *Grammen Bank* (*Grammen* berarti pedesaan) yang lebih dikenal selama ini ujut konkretnya dalam konteks Bank Syariah.

Grammen Bank tersebut memiliki idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Sistem tersebut ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang khusus dibuat untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Satu dekade

terakhir ini, bisnis perbankan syariah di Indonesia mulai semarak, bank syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) atau *Profit Margin* yaitu keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah, sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini bank syariah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif (Febrinol dkk, 2012)

CRM (*Customer Relationship Marketing*) mampu merumuskan strategi yang berbeda dalam melakukan kegiatannya untuk mewujudkan daya saing perbankan dalam rangka keunggulan kompetitif. Adapun kegiatan usaha bank konvensional dan atau syariah adalah: menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) serta memberikan jasa- jasa bank lainnya (*services*), dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pohan, 2008). Prospek perbankan syariah terlihat sangat cerah, industri perbankan syariah dapat bertahan dari krisis global karena tidak terkait dengan mekanisme pasar dan tanpa spekulasi. Terlihat pada tahun 2010 pertumbuhan aset perbankan syariah global mencapai 8,9 persen dengan total aset sebesar 900 miliar dolar AS. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seharusnya, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih meningkat dan tumbuh secara signifikan. Tentu saja masih banyak yang harus disiapkan oleh semua pihak yang terlibat, antara lain pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inovasi produk dan layanan kompetitif serta berbasis hubungan dan kekhususan untuk kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jika ketiga unsur itu dapat dipenuhi dan didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai untuk mempromosikan program syariah serta peningkatan instrumen syariah yang terkait, harapannya adalah terwujudnya iklim dan situasi yang ideal bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Hall , 2012)

Payne (2009) yang mengatakan bahwa: Konsep *customer relationship marketing* (CRM) yaitu konsep yang berusaha untuk menekankan pada pendekatan fungsional marketing. CRM berusaha menekankan pada tindakan pemasaran melibatkan pasar yang memiliki banyak stakeholder. Pasar terdiri dari sejumlah kekuatan atau unsur-unsur seperti pemerintah, pemasok, lembaga media, serikat pekerja, pelanggan dll dan CRM dapat secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi bisnis yaitu "kemampuan untuk menang serta mempertahankan pelanggan”

Dalam perbankan yang dimaksud kemampuan untuk menang serta mempertahankan pelanggan adalah mempertahankan nasabah. Pendapat Payne (2009) tersebut didukung oleh pendapat Zeihmal, Vet al (2013) yang mengatakan bahwa janji-janji dengan mengkomunikasikan produk serta layanan perusahaan itu akan diharapkan oleh pelanggan dan tujuan utama *relationship marketing* adalah memelihara pelanggan atas dasar komitmen, kepercayaan/ keyakinan yang diberikan oleh perusahaan sehingga mengurangi kegelisahan dan menimbulkan kenyamanan yang akan menguntungkan perusahaan dan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya didukung oleh hasil penelitian Mithas, Krishnan, & Fornell (2005) yang mengatakan bahwa *Customer Relationship Marketing (CRM)* telah menjadi konsep populer untuk pengelolaan hubungan yang sukses dengan pelanggan sehingga implementasi CRM seringkali menyebabkan peningkatan kepuasan, loyalitas pelanggan dan kinerja bisnis sebagai potensi pelanggan yaitu keuntungan yang maksimal. Bertahun-tahun, pemasaran telah menjadi bagian penting dalam membangun *customer centric* .

Hasil penelitian Aiyub (2007) yang menjelaskan bahwa terdapat pandangan yang keliru terhadap bank syariah sehingga akan membentuk preferensi yang rendah dan berakhir dengan rendahnya keputusan untuk memilih bank syariah sehingga pada masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi yang lebih baik dan efektif. Hal ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, sosialisasi yang efektif dan intensif perlu ditekankan pada pengenalan sisi keunggulan komparatif yang dimiliki bank syariah yaitu tentang produk dan layanan yang dimiliki oleh bank syariah selain itu bank syariah tetap menjaga kepercayaan dari memberikan *image* yang baik terhadap nasabah yaitu melalui layanan dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga akan dapat menepis sikap keragu-raguan dikalangan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Selain itu hasil penelitian Maski (2010) mereferensikan yang diberikan adalah: bank syariah harus memberikan informasi secara lengkap dan baik mengenai prinsip syariah, jenis produk atau jasa, layanan dan fasilitas yang menunjang kepada masyarakat (pasar sasaran). **Selanjutnya menurut Infobank (Bratadharma, 2012) bahwa masalah** perbankan syariah **dari sisi pendidikan adalah masih kurangnya peneliti terkait ekonomi syariah di Indonesia sehingga kurang** kerja sama antara akademisi dan praktisi dalam industri perbankan syariah. Padahal jika hal itu dilakukan secara kontinu maka akan dapat

memberikan masukan untuk kebutuhan industri perbankan syariah di Indonesia dengan harapan agar dapat mencapai kepuasan serta loyalitas nasabah.

Untuk menepis sikap keragu-raguan dikalangan masyarakat terhadap perbankan syariah seperti yang disampaikan oleh Ayub (2007) maka menurut Lo (2012) mengatakan bahwa CRM sebagai pilar tidak hanya diberikan sebagai dimensi hubungan tetapi juga merupakan upaya lebih dalam melayani permintaan pelanggan untuk produk dan jasa perusahaan sehingga akan mendapatkan hasil yang diinginkan melalui strategi dalam meningkatkan penjualan, kepuasan pelanggan. Menurut Gronroos (2007), CRM (*Customer Relationship Marketing*) yaitu cara meningkatkan nilai pelanggan dengan menggunakan sarana didalam pemasaran yang memainkan peran penting yaitu berupa *communication* (komunikasi), *trust* (kepercayaan), *commitment* (komitmen) dan *empathy* (empati) dengan pelanggan yang bertujuan untuk kenyamanan, mengurangi kegelisahan, rasa kepercayaan pelanggan terhadap penyedia layanan serta pengembangan persahabatan karyawan dengan pelanggan sehingga pelanggan menjadi akrab dengan karyawan agar profitabilitas perusahaan tercapai. Sedangkan Kepuasan menurut Oliver dalam Zeithaml *et al* (20013) merupakan evaluasi pelanggan dari produk atau jasa yang telah digunakan dan produk atau jasa tersebut telah memenuhi atau melebihi harapannya.

Berdasar pada uraian tersebut perlu dilakukan penelitian CRM yang efektif dengan menanamkan konsep CRM atau pemasaran hubungan dengan tujuan untuk mendiskripsikan bagaimana kepuasan nasabah melalui CRM dengan harapan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, menjaga kepercayaan dan memberikan *image* yang baik agar keunggulan komparatif tercapai sehingga akan dapat menepis sikap keragu-raguan dikalangan masyarakat terhadap perbankan syariah serta terciptanya kepuasan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif berdasarkan pada Santoso (2000) yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik, keadaan, serta gejala pada nasabah tabungan Perbankan Syariah di Jawa Timur yaitu nasabah Bank Muamalat dan nasabah Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan *Indonesia Bank Loyalty Index* (I IBLI) dari 10 Bank Syariah terdapat 2 bank yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri dalam 5 tahun terakhir mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kedua bank tersebut selalu menduduki urutan loyalitas no 1 dan no 2. Penentuan lokasi penelitian dipilih Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang

memiliki kantor cabang Bank Muamalat sekaligus Bank Syariah Mandiri (BSM). Berdasarkan data skunder, terdapat 4 Kota dan Kabupaten yaitu: 1. Kota Surabaya, 2. Kota Malang, 3. Kabupaten Kediri, dan 4. Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah CRM dengan menggunakan aspek-aspek: kepercayaan nasabah (*trust*), mengembangkan strategi komunikasi (*communication*) yang efektif, menunjukkan empati (*empathy*), serta memberikan komitmen (*commitment*) kemudian diturunkan kedalam item pertanyaan:

1. Bank Muamalat dan BSM mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah atas dana yang disimpan
2. Bank Muamalat dan BSM sudah memberikan informasi tentang tabungan yang sesuai dengan konsep syariah dengan baik
3. Bank Muamalat dan BSM mampu memelihara hubungan baik dengan nasabah yang dapat memberikan panutan/uswah hasanah
4. Bank Muamalat dan BSM mampu memberikan komitmen pada nasabah bahwa konsep bagi hasil tidak melanggar keadilan

Analisis pada penelitian ini berdasar pada Miles dan Huberman (2004) yaitu: (1) Reduksi data dengan melakukan pemilihan, pengabstrakan kemudian menyusun narasi jawaban informan (nasabah) tentang CRM yaitu bagaimana kepercayaan nasabah (*trust*), mengembangkan strategi komunikasi (*communication*) yang efektif, menunjukkan empati (*empathy*), serta memberikan komitmen (*commitment*) penuh kepada nasabah dalam loyalitas supaya tersusun kedalam bentuk yang terpadu, (2) Penarikan kesimpulan serta menjelaskan alur sebab akibat, (3) Melakukan verifikasi atas kesimpulan kemudian muncul kesimpulan final yang kompeten dengan proposisi-proposisi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat dengan visi dan misi: 1. visi: menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. 2. misi: menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syari'ah dunia

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

Sedangkan tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>

II. Profil Bank Syariah Mandiri (BSM)

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB), yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan

untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Adapun visi BSM adalah, memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia. Sedangkan misinya adalah: (1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, (2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, (3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat, (4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, (5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

[\(http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/\)](http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/)

Hasil dan Pembahasan

CRM pada penelitian ini menggunakan aspek-aspek kepercayaan nasabah (*trust*), mengembangkan strategi komunikasi (*communication*) yang efektif, menunjukkan empati (*empathy*), serta memberikan komitmen (*commitment*) dengan item berikut ini:

1. Bank Muamalat dan BSM mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah atas dana yang disimpan
2. Bank Muamalat dan BSM sudah memberikan informasi tentang tabungan yang sesuai dengan konsep syariah dengan baik
3. Bank Muamalat dan BSM mampu memelihara hubungan baik dengan nasabah yang dapat memberikan panutan/uswah hasanah
4. Bank Muamalat dan BSM mampu memberikan komitmen pada nasabah bahwa konsep bagi hasil tidak melanggar keadilan

Hasil wawancara dengan nasabah menyatakan bahwa (1)” nasabah puas terhadap Bank Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur yang mampu memberikan kepercayaan kepada

nasabah atas dana yang disimpan. Hal ini dikarenakan nasabah tidak pernah merasa terjadi kesalahan atas jumlah uang yang disimpan serta adanya dukungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”, (2) hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa “nasabah puas terhadap informasi produk Bank Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur yang sesuai dengan konsep syariah dengan baik. Hal ini dikarenakan nasabah merasa transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariah, suatu misal tabungan mudharabah, bahwa yang diberikan oleh bank sesuai dengan nisbah bagi hasil”.

Ketiga (3) hasil wawancara menunjukkan bahwa ”nasabah menyatakan puas bahwa Bank Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur mampu memelihara hubungan baik dengan nasabah yang dapat memberikan panutan/uswah hasanah. Hal ini dikarenakan nasabah merasa adanya kontak telepon dan kunjungan dalam rangka menanyakan permasalahan ataupun memperkenalkan produk baru, selain itu pula, menghubungi nasabah yang telah tidak aktif, hal ini akan diperoleh informasi penyebab ketidak aktifan tersebut mungkin beralih ke bank lain atau penyebab lain yang dikarenakan kurang faham maka akan dijelaskan tentang produk-produk syariah yang ditawarkan. Jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan oleh pihak bank serta mendengarkan keluhan nasabah, memberikan perhatian atas keinginan nasabah dengan penuh keramahan sehingga pembeli merasa diperhatikan dan merasakan bahwa kinerja bank sesuai dengan harapan nasabah dengan kata lain nasabah merasa senang atau tidak kecewa karena kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang”. Atas dasar kepuasan tersebut dapat diartikan terjadi komunikasi pemasaran yang efektif. Hal ini sesuai dengan tujuan CRM yaitu akan memelihara hubungan dengan nasabah atas dasar komitmen, kepercayaan/ keyakinan yang diberikan oleh pihak bank sehingga mengurangi kegelisahan dan menimbulkan kenyamanan serta kepuasan yang akan menguntungkan nasabah dan pihak bank itu sendiri.

Berikutnya (4) hasil wawancara menunjukkan bahwa “nasabah menyatakan puas bahwa Bank Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur mampu memberikan komitmen pada nasabah bahwa konsep bagi hasil tidak melanggar keadilan. Hal ini dikarenakan nasabah merasa nisbah bagi hasil yang diberikan memang sudah sesuai dengan porsi pengelolaan”. Berdasarkan jawaban hasil wawancara dari 4 (empat) aspek fokus penelitian tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CRM telah diterapkan dengan baik di Bank Muamalat dan BSM di Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Kotler (2002) yang mengatakan bahwa pembeli akan puas setelah pembelian tergantung pada kinerja yang sehubungan dengan harapan pembeli karena kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan- harapannya. Serta sejalan dengan teori Zeihmal,V *et al* (2013) yang mengatakan bahwa janji-janji dengan mengkomunikasikan produk serta layanan perusahaan itu akan diharapkan oleh pelanggan dan tujuan utama *relationship marketing* adalah memelihara pelanggan atas dasar komitmen, kepercayaan/ keyakinan yang diberikan oleh perusahaan sehingga mengurangi kegelisahan dan menimbulkan kenyamanan yang akan menguntungkan perusahaan dan pelanggan itu sendiri dan sejalan pula dengan teori Payne (2009) bahwa CRM bertujuan untuk mempertahankan pelanggan.

Selanjutnya penelitian ini mendukung penelitian Lo (2012) menunjukkan bahwa pemasaran hubungan dengan pelanggan (CRM) merupakan pilar yang tidak hanya diberikan sebagai dimensi baru, tetapi juga memberikan yang lebih dalam melayani permintaan pelanggan dari produk dan jasa suatu organisasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan strategi dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan juga menunjukkan bahwa penerapan konsep pemasaran hubungan dalam organisasi membantu dalam mempertahankan hubungan yang sehat dengan pelanggan. Perusahaan akan merasakan lebih baik dan lebih percaya diri dengan fakta bahwa pelanggan lama telah dapat dipertahankan. Kepuasan dan Kepercayaan merupakan dua pilar utama organisasi dengan kata lain perusahaan harus bisa memikat konsumen dengan sikap atau perilaku tertentu. Ini akan mendorong interaksi timbal balik yang sedang berlangsung antara pelanggan dan pihak produk jasa atau bisnis yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini juga mendukung pula penelitian Jumaev (2012) yang menyatakan bahwa pemasaran hubungan dengan pelanggan dapat memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepuasan serta loyalitas pelanggan, dikatakan pula bahwa kepuasan serta loyalitas adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali produk/ jasa yang lebih disukai secara konsisten pada masa mendatang hal itu dipengaruhi oleh variabel pemasaran hubungan antara lain, empati, kepercayaan, komitmen, nilai-nilai dan cara negosiasi konflik. Hasil penelitian Jumaev ini juga membuktikan bahwa kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh pemasaran hubungan merupakan elemen penting dari keberhasilan perbankan dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Kepuasan konsumen dipandang sebagai faktor kunci

dalam memenangkan pangsa pasar dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak terkecuali industri perbankan karena industri perbankan memiliki interaksi yang tinggi dengan pelanggan, sehingga manajer harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan tersebut terhadap bank masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan nasabah dari 4 (empat) aspek fokus penelitian tersebut, maka CRM telah diimplementasikan dengan baik di Bank Muamalat dan BSM di Jawa Timur.
2. Hasil wawancara dengan nasabah maka Bank Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur telah puas terhadap:
 - Produk/ jasa bank syariah
 - Layanan bank syariah secara keseluruhan
 - Janji/ komunikasi pemasaran

Saran:

1. Obyek penelitian diharapkan tidak terbatas hanya pada 2 (dua) bank syariah saja yaitu Bank Muamalat dan BSM, dapat ditambah dengan bank syariah yang lain, sehingga untuk peneliti selanjutnya akan lebih banyak referensi
2. Variabel penelitian diharapkan tidak berhenti pada kepuasan tetapi dapat dilanjutkan sampai pada loyalitas, sehingga untuk peneliti selanjutnya lebih komprehensif
3. Wilayah penelitian diharapkan tidak hanya di Jawa Timur agar supaya lebih luas
4. Mempertahankan dan meningkatkan CRM (*Customer Relationship marketing*) oleh pihak manajemen Bank Muamalat dan BSM di Propinsi Jawa Timur yang dibentuk oleh indikator komunikasi, kepercayaan/ keyakinan serta komitmen yaitu dengan cara memberikan informasi, kepercayaan/keyakinan, menciptakan hubungan baik dengan selalu kontak melalui telepon serta kunjungan ke nasabah kemudian menciptakan komitmen kepada nasabah tentang produk-produk dan konsep-konsep yang dimiliki oleh perbankan syariah suatu misal, bagaimana tabungan mudharabah, tabungan wadiah serta bagaimana konsep bagi hasil disampaikan dengan jelas dengan demikian nasabah akan lebih merasa percaya/yakin dan aman atas dana yang disimpan sehingga tercapai kepuasan nasabah

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyub. 2007. "Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah di Nangroe Aceh Darussalam", *Jurnal E-Mabis FE-Unimal*, Volume 8 (1): 1-17
- Alamsyah. 2012. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", *Makalah Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)* <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato/dewangubernur/Documents/6bf00812e40b4d0cb>
- Bank Muamalat Tbk. 2009. Profil Bank Muamalat <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>
- Bratadharma, Angga. 2012. BI Siapkan Solusi Atasi SDM Perbankan Syariah. Info Bank. <http://dev.infobanknews.com/2012/08/bi-siapkan-solusi-atasi-sdm-perbankan-syariah/>
- Febrinol, Tisna Surya Adi Prenanto dan Riyadian Dwi Cahyo. 2012. "Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah", Artikel Kompasiana <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/09/25/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah-496026.html>
- Gronroos, C. 2007. *Service Management and Marketing: A Customer Management in Service Competition*, England, John Wiley & Sons Ltd.
- Hall, Maximilian JB. 2012. Industri Perbankan Syariah Dapat Bertahan dari Krisis Global Karena Tidak Terkait dengan Mekanisme Pasar dan Tanpa Spekulasi, *Analisis Statistik Perbankan Syariah Indonesia Januari 2012*
- Jumaev, Mukhiddin. Kumar. M. Dileep and Hanaysha Jalal R. M. 2012. "Impact of Relationship Marketing on Customer Loyalty in The Banking Sector". *Far East Journal of Psychology and Business*, 6 (3): 36 - 55
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*, Alih Bahasa Hendra Teguh, Rony A. Rusli, dan Benyamin Molan, Jilid 1, Edisi Milenium, Jakarta, Prenhallindo.
- Lo, Sheng Chung. 2012. "A Study of Relationship Marketing on Customer Satisfaction". *Journal of Social Sciences*, 8 (1): 91 - 94

- Maski, Ghozali. 2010. "Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah di Malang" *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4 (1): 43-57
- Miles, MB dan Huberman, AM. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Mithas, S, Krishnan, M.S., & Fornell, C. 2005. "Why Do Customer Relationship Management Applications Affect Customer Satisfaction?". *Journal of Marketing*, 69: 201- 209.
- Payne, Adrian. 2009. *Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- PT. Bank Syariah Mandiri .2010. <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>
- Santoso, Singgih. 2000. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Edisi ke-2, Jakarta, Gramedia.
- Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D. 2013. *Service Marketing, Integrating Customer Focus across the Firm*. 6th,ed, New York, McGraw-Hill/Irwin

RPSEP-20

STRATEGI RITEL OLEH-OLEH DALAM MEMBANGUN *STORE IMAGE* DI KAWASAN WISATA BATU JAWA TIMUR

Siti Saroh, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Islam Malang (UNISMA)
ulilamri_2307@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini di fokuskan pada: gambaran ritel oleh-oleh di kawasan wisata kota Batu Malang, strategi pemasaran yang dilakukan ritel oleh-oleh dalam membangun store image di kawasan wisata, dan bagaimana dampak store image yang di bangun terhadap bauran ritel (Ritel Mix). Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dari dokumen, observasi, wawancara, gambar atau foto. Teknik analisis data menggunakan analisis dari Neuman, (2013), dengan tahapan analisis data dimulai pada proses waktu mengumpulkan data, kemudian mencari hubungan antara data fokus penelitian dengan konsep, tahap berikutnya generalisasi awal terahir mengidentifikasi tema yang luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bisnis ritel oleh-oleh di kota wisata Batu tumbuh pesat, mulai dari Pedagang Kaki Lima, Toko Kelontong hingga Toserba atau toko ritel modern. Banyak bisnis ritel tradisional yang mulai mengembangkan diri menjadi ritel modern. Ritel-ritel tersebut lokasinya berada disekitar obyek wisata dan di jalan-jalan utama menuju Kota Batu yang dilalui wisatawan dari luar daerah. Strategi pemasaran yang diterapkannya dua, yaitu Merchandise Management dan Store Management. Merchandise Management. Dimensi-dimensi Strategi pemasaran atau bauran ritel (*retail mix*), merupakan karakteristik dari toko ritel yang dapat membentuk kepribadian toko atau citra toko. Sehingga citra toko yang baik memberi kesan baik pula terhadap dimensi-dimensi ritel atau bauran ritelnya.

Kata Kunci: Strategi ritel, oleh-oleh wisata, citra ritel

A. PENDAHULUAN

Awal mula industri ritel (*retail*) adalah merupakan bisnis lokal, yang hanya menjual barang-barang di toko, namun seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen, membawa konsep ritel berkembang pesat secara modern. Perkembangan ritel dapat dilihat dari perubahan-perubahan antara lain: perbedaan yang mendasar dalam format ritel, menjamurnya industri ritel dan globalisasi perdagangan. Aktivitas ritel saat ini tidak hanya menjual barang-barang di toko, tetapi juga melibatkan pelayanan jasa seperti layanan antar (*delivery services*) ke rumah-rumah. Sehingga aktivitas yang dilakukan dalam bisnis ritel modern meliputi penjualan berbagai barang dan jasa atau aktivitas kedua-duanya. Penjualan

produknya pun tidak hanya melalui toko, namun juga dapat dilakukan secara *online* kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi maupun bersama.

Pemilik ritel berusaha mengelola bisnisnya secara baik, karena seorang pebisnis ritel merupakan orang yang memiliki aktivitas penjualan barang atau jasa yang ditujukan langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan nonbisnis (Kotler, 2009). Memenuhi kebutuhan konsumen akhir, tentunya berada pada lingkungan persaingan yang ketat baik pesaing yang sudah diketahui maupun tidak diketahui serta pesaing tidak pasti. Agar berhasil dalam pasar ritel yang kompetitif, maka pebisnis ritel harus selalu siap memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pesaing. Di sisi lain pebisnis ritel perlu melakukan perbaikan dan peningkatan di bidang pemasaran, serta perlu juga mengoptimalkan peran ritel. Hal ini dilakukan karena pebisnis ritel sebagai penghubung antara produsen, pedagang besar, agen, pemasok dan distributor lainnya dengan konsumen akhir.

Peran pebisnis ritel dalam rangka membantu menyediakan berbagai barang dan jasa kebutuhan konsumen, menurut Sugiarta (2011) antara lain; 1) menyediakan barang dan jasa dengan berbagai variasi, sebagai alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 2) Menjual produk dalam eceran atau pecahan, misalnya produk kemasan karton dijual ke dalam bentuk satuan, dengan satuan tersebut akan memudahkan konsumen melakukan pembelian. 3) Menyediakan persediaan barang, agar barang selalu ada ketika sewaktu-waktu konsumen membutuhkan. 4) Memberikan pelayanan secara optimal kepada konsumen, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pelayanan bersifat langsung yaitu melayani konsumen yang berbelanja di toko. Sedangkan pelayanan bersifat tidak langsung misalnya penataan barang dalam rak-rak (*display*) untuk memudahkan konsumen dalam mencari barang yang dibutuhkan, memberikan kejelasan harga dan manfaat produk, menjaga kebersihan lingkungan toko, serta kecepatan melakukan transaksi di kasir.

Peran bisnis ritel yang sangat kompleks ini, harus menjadi perhatian bagi pebisnis ritel serta berusaha memahami persoalannya secara totalitas. Oleh karena itu pebisnis ritel paling tidak harus berorientasi pada 2 (dua) hal, yaitu berorientasi menciptakan strategi ritel yang dapat menarik perhatian konsumen dan berorientasi membangun citra toko. Orientasi menciptakan strategi ritel, diharapkan mampu mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Kemajuan perkembangan perekonomian yang mempengaruhi peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat mengakibatkan perubahan perilaku, gaya hidup dan

selera konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Berdasarkan perubahan perilaku konsumen, maka strategi ritel yang perlu diciptakan antara lain; 1) *merchandise management*, meliputi: produk, harga dan promosi. 2) *Store management*, meliputi: *store layout, design* dan *visual merchandising* (Levy and Weitz, 2012).

Orientasi lainnya yang perlu dilakukan oleh pebisnis agar mampu bersaing adalah membangun citra toko, karena citra toko dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Konsumen cenderung untuk membangun keyakinan tentang toko berdasarkan atribut yang disukai dan selanjutnya mengevaluasi untuk menentukan pilihannya. Citra toko merupakan salah satu strategi yang terpenting bagi pebisnis ritel, dengan tujuan untuk menarik perhatian dan memenuhi kepuasan konsumen. Konsumen menilai sebuah toko berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atas toko tersebut. Sebagai hasilnya, beberapa toko akan menetap dalam benak konsumen apabila merasa puas. Kunci sukses dalam menciptakan citra toko adalah menyelaraskan gaya hidup dan harapan konsumen yang menjadi target.

Bisnis ritel di Indonesia, saat ini juga mulai bertransformasi dari bisnis ritel tradisional menuju bisnis ritel modern. Perkembangan bisnis ritel modern di Indonesia sudah semakin menjamur di hampir seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya toko retailer modern yang membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Bisnis ritel banyak variasinya, mulai dari Pedagang Kaki Lima, Warung, Toko Kelontong, Toserba hingga Hyper Market. Jenis usaha ritel, bila ditinjau dari kepemilikan terdapat ritel perorangan yang ditangani langsung oleh pemilik, mempunyai bentuk beragam, misal: Toko Obat, Toko Batik, Toko Meubel, Toko Oleh-Oleh dll. Selain ritel perorangan terdapat ritel kelompok toko yang berlokasi di beberapa tempat, tapi dimiliki oleh satu badan usaha. Administrasinya dilakukan secara terpusat. Contoh : Matahari, Ramayana, Carefour, dll.

Kota Batu sebagai kawasan wisata yang sudah terkenal di berbagai wilayah di Indonesia dan merupakan ikon utama pariwisata di Jawa Timur, maka di kota ini bisa di temukan berbagai macam jenis tempat dan obyek wisata yang menarik dan lengkap mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata petualangan dan sebagainya. Sehingga industri wisata di Kota Batu siap menjadi tujuan kunjungan wisatawan domestik maupun asing.

Keunggulan Kota Batu ini, menyulut tumbuhnya industri ikutan yang mendukung dan melengkapi kebutuhan pengunjung wisata, oleh karena itu tidak heran jika banyak berdiri berbagai tempat seperti hotel, villa, resort, restoran, rumah makan dan juga sedang tumbuh

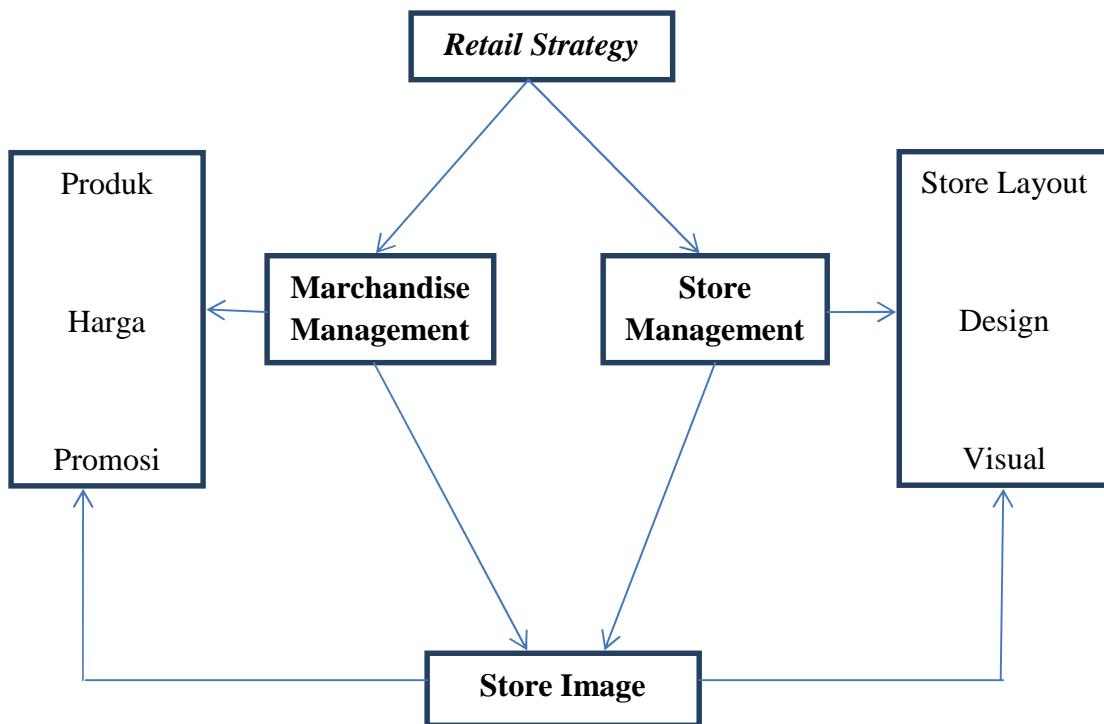
menjamur bisnis ritel khususnya ritel oleh-oleh. Pengembangan obyek pariwisata menjadi peluang bagi pebisnis oleh-oleh untuk menyediakan berbagai produk khas daerah, baik makanan maupun souvenir yang biasanya dibeli pengunjung wisata sebagai kenang-kenangan dan buah tangan untuk keluarga, teman-teman dan tetangganya.

Berdasar latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini di fokuskan pada: 1) Gambaran ritel oleh-oleh di kawasan wisata kota Batu Malang, 2) strategi pemasaran yang dilakukan ritel oleh-oleh dalam membangun *store image* di kawasan wisata, 3) Bagaimana dampak *store image* yang di bangun terhadap bauran ritel (*Ritel Mix*).

B. METODOLOGI

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada proses penelusuran data atau informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi, sehingga tidak terjerat dalam pengetahuan tentang suatu informasi dianggap sudah final. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menggambarkan rincian tentang manusia, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial, yang berbentuk teks dari dokumen, catatan observasi, naskah wawancara, gambar atau foto. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel tetapi perlu memandangnya sebagai bagian keutuhan.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan ritel oleh-oleh di kawasan wisata kota Batu Malang, strategi pemasaran yang dilakukan ritel oleh-oleh dalam membangun *store image* di kawasan wisata, dan menggambarkan dampak *store image* yang di bangun terhadap bauran ritel (*Ritel Mix*). Fokus penelitian ini mengembangkan strategi pemasaran ritel dari Levy and Weitz, 2012) yang disajikan pada gambar berikut.



Teknik analisis data menggunakan analisis dari Neuman, (2013), dengan tahapan analisis data kualitatif dilakukan dimulai pada proses waktu mengumpulkan data, kemudian mencari hubungan antara data fokus penelitian dengan konsep, tahap berikutnya generalisasi awal dan mengidentifikasi tema yang luas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batu dewasa ini dikenal sebagai Kota Wisata yang menjadi ikon wisata di wilayah Jawa Timur. Sebelum dikenal sebagai Kota Wisata, sebenarnya sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Pasalnya, wilayah Kota Batu berada di daerah pegunungan yang memiliki hawa dan udara yang sejuk. Terlebih lagi, pemandangan di wilayah ini sangat indah dengan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Kota Batu merupakan bagian dari Dataran Tinggi Malang yang terbentuk dari endapan lava yang menjadi danau. Sementara daerah Batu hingga Malang merupakan cekungan dalam yang terbentuk oleh apitan gunung dan pegunungan. Tak heran jika keadaan tanah di Kota Batu cukup subur.

Lokasi kota Batu terletak 20 km arah barat kota Malang, butuh waktu sekitar 15-20 menit memakai kendaraan mobil/sepeda motor, yang berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius.

Potensi alam yang dimiliki Kota Batu, merupakan prospek pengembangan pariwisata yang menjanjikan di masa akan datang dan tentunya akan menjadi sumber strategis dalam memperoleh pendapatan daerah, karena perkembangan pariwisata berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis lainnya yang menjadi ikutan di sektor wisata. Hasil penelitian sebelumnya oleh Islami dkk (2013), memperlihatkan bahwa perkembangan sektor ikutan industri wisata yang mengacu pada jumlah tenaga kerja dari jenis pekerjaan non pariwisata menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu bisnis cinderamata, oleh-oleh khas Kota Batu dan souvenir, jasa ojek wisata (pengantar jemput wisatawan), agen perjalanan, jasa penginapan, pengolahan industri oleh-oleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor wisata akan berdampak pada perkembangan sektor lainnya yang terkait dengan kebutuhan wisatawan.

Perkembangan bisnis ritel oleh-oleh di kota wisata Batu tumbuh pesat, mulai dari Pedagang Kaki Lima, Toko Kelontong hingga Toserba. Banyak bisnis ritel tradisional yang mulai mengembangkan diri menjadi ritel modern. Ritel oleh-oleh di Kota Batu dalam operasional teridentifikasi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu digambarkan sebagai berikut;

No	Pola Kelompok Ritel Oleh-Oleh	Segmen Pasar
1.	Toko kelontong	Rombongan wisatawan mobil pribadi
2.	Toko kelontong dan ritel modern	Rombongan wisatawan mobil pribadi > kendaraan umum
3.	Toserba	Rombongan wisatawan kendaraan umum > mobil pribadi
4.	Pedagang kaki lima	Konsumen di obyek wisata

Para peritel dengan format toko kelontong umumnya pola penawaran produknya membentuk klaster di lokasi sekitar tempat wisata dan di pinggir jalan yang dilalui wisatawan. Wisatawan yang belanja oleh-oleh di toko kelontong biasanya lebih banyak dari rombongan mobil pribadi. Kelompok toko kelontong dan ritel modern, juga dijumpai di pinggir jalan utama menuju tempat wisata. Pembelinya biasanya lebih banyak dari rombongan wisatawan mobil pribadi dari pada rombongan kendaraan umum.

Di Kota Batu juga terdapat Toserba yang menjual berbagai produk oleh-oleh khas daerah khususnya produk khas Kota Batu, mulai makanan, minuman, kerajinan, pakaian dan lainnya. Pengunjung Toserba yang berbelanja lebih banyak dari rombongan wisatawan kendaraan umum dari pada mobil pribadi. Di Area Toserba biasanya menyediakan tempat untuk istirahat, tempat bermain anak-anak, restorasi, maupun mushola. Sedangkan pedagang kaki lima lebih berkonsentrasi dekat lalu lalang pengunjung di dekat obyek wisata.

Jalan-jalan utama menuju Kota Batu yang dilalui wisatawan dari luar daerah, yaitu: jalan dari Kediri atau Jombang, jalan dari Kota Malang dan jalan dari Surabaya yang melewati Karangploso Kabupaten Malang (seperti yang tergambar dalam peta).



Sepanjang jalan-jalan utama tersebut banyak ditemui ritel yang menjual oleh-oleh, karena ketiga jalan utama yang dilalui wisatawan menjadi lokasi strategis bagi pebisnis ritel oleh-oleh. Lokasi strategis ini, menjadi peluang bagi beberapa pebisnis untuk membuka bisnis ritelnya lebih dari satu tempat.

C.1. Strategi Pemasaran Ritel Oleh-Oleh

Bisnis oleh-oleh yang berkembang pesat di Kota Batu, berdampak pada persaingan yang ketat antara para pebisnis ritel, sehingga pebisnis dituntut menerapkan strategi khusus untuk mampu bertahan ditengah-tengah persaingan. Strategi pemasaran yang dilakukan pebisnis ritel di Kota Batu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

C.1.1. Merchandise Management

Produk, merupakan objek dari proses pertukaran, yang ditawarkan produsen kepada konsumen potensial dalam pertukaran dengan sesuatu yang lain, dimana produsen merasakan sebagai nilai setara atau lebih besar (Hollensen, 2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek pertukaran adalah produk oleh-oleh yang ditawarkan ritel di kawasan wisata Kota Batu. Produk yang ditawarkan bervariasi dan berbasis produk khas daerah, hal ini dapat dilihat dari kategori produk yang tersedia. Berbagai macam makanan dan minuman, hasil kerajinan, kaos, tas, baju, sandal dan sepatu yang dipajang begitu lengkap. Selain itu ukuran produk bervariasi, stock produk tersedia, setiap jenis produk yang ditawarkan terdiri dari beberapa merek. Salah satu kategori produk menurut Zulaika (2011) yaitu *Local Products* yang meliputi makanan khas daerah, kelengkapan makanan dan semua jenis kerajinan lokal.



Menyediakan variasi produk merupakan suatu kegiatan penawaran barang yang bertujuan menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk oleh-oleh dibeli konsumen wisatawan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau memberi manfaat sebagai kenangan dan bukti bahwa konsumen telah melakukan perjalanan wisata di wilayah Kota Batu.

Harga, merupakan faktor penting bagi pebisnis ritel dalam menentukan posisinya di pasar dan untuk menyesuaikan dengan pasar sasarnya. Sepanjang sejarah harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli, namun beberapa periode terakhir faktor diluar harga semakin penting (Kotler dan Armstrong, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga produk dimasing-masing kelompok ritel oleh-oleh bervariasi. Pada Toserba oleh-oleh di Kota Batu, kemasan barang dagangan bagus, bermerk dan harga barang dicantumkan dengan jelas, besaran harga termasuk tinggi karena adanya pertimbangan faktor diluar harga yakni berbelanja sambil berekreasi. Ukuran harga meliputi nilai barang dan jasa lainnya yang melekatkan didalam barang tersebut. Oleh karena itu Toserba umumnya menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat bersantai untuk istirahat setelah mengunjungi objek rekreasi, restoran, mushola, toilet dan tempat parkir yang luas. Bagi pembelijika jasa-jasa yang diberikan oleh Toserba semakin tinggi, maka dapat membantu untuk mengalokasikan daya belinya pada aktivitas belannya yang dilakukan.

Pada ritel oleh-oleh yang lokasi berdagangnya menyatu atau berkelompok dalam satu area antara ritel modern dan toko kelontong, umumnya harga barang dagangan ditawarkan dibawah harga Toserba dan nominal harga dengan jelas dicantumkan dalam kemasan. Hanya saja fasilitas yang tersedia terbatas dan tidak selengkap di Toserba. Harga pada kelompok ritel ini merupakan faktor yang penting dalam penentuan posisi terhadap pasar, dengan demikian pebisnis kelompok ini harus memperhatikan taktik persaingan harga. Sering kali ditemui harga antara peritel satu dengan lainnya terdapat perbedaan. Walaupun perbedaan harga tidak jauh, namun bagi pembeli harga sebagai indikator besar pengeluaran yang diperlukan untuk membeli suatu produk sekaligus dijadikan sebagai suatu indikator *level of quality*, apakah harga sesuai dengan manfaat, apakah harga barang terjangkau, adanya persaingan harga, serta kesesuaian antara harga dengan kualitasnya.

Sedangkan pebisnis oleh-oleh berbentuk toko kelontong dan pedagang kaki lima, barang dagangan yang dijual kadang-kadang tidak diberi label atau bermerk, umumnya kemasan sederhana dan dalam kemasan tidak dicantumkan dengan jelas berapa harga barangnya. Sehingga konsumen memiliki peluang untuk menawar harga, sebelum memutuskan untuk membeli, namun pada umumnya pebisnis ritel oleh-oleh ini harga barangnya tergolong murah di banding kelompok ritel yang lainnya dan harga masih dapat ditawarkan.

Promosi, merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas pemasaran yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi terhadap suatu produk, baik jasa maupun barang kepada konsumen agar terdorong membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Promosi penjualan mencakup alat untuk mempromosikan kepada konsumen, promosi perdagangan, promosi bisnis dan tenaga penjualan. Alat promosi konsumen meliputi; sampel, kupon, tawaran uang kembali, potongan harga, cinderamata, hadiah, garansi, pajangan ditempat pembelian dan peragaan. Promosi perdagangan meliputi; potongan harga, dana iklan dan pajangan, serta barang gratis. Sedangkan promosi bisnis dan tenaga penjualan contohnya pameran, kontes untuk perwakilan penjualan dan iklan khusus (Kotler dan Keller, 2012).

Hasil penelitian tentang strategi promosi yang diterapkan ritel oleh-oleh di Kota Batu, di temukan beberapa alat yang digunakan untuk memotivasi konsumen, yaitu membangun jaringan dengan travel wisata dan rombongan wisata, antara lain berbentuk; pemberian premi pada sopirtravelwisata, pemberian bonus kepada panitia rombongan wisata, memberi kartu anggota bagi anggota rombongan yang berbelanja dengan maksud akan memperoleh diskon apabila melakukan pembelian ulang, pemberian diskon atau potongan harga pada produk tertentu serta pemberian diskon apabila jumlah pembelian besar.

C.1.2. Store Management

Store layout, ritel yang diatur secara rapi akan mengundang pengunjung untuk mendatangi toko, begitu pula jika penempatan barang dagangan dengan baik akan memikat konsumen untuk berkeliling lebih lama dan membeli barang dalam jumlah yang besar, selain itu juga memudahkan pembeli dalam memilih barang belanjanya. Menurut Peter dan Olson (2010) penataan toko dapat memiliki efek penting pada konsumen. Penataan toko berpengaruh terhadap berapa lama konsumen berada di toko, berapa banyak produk yang dibeli konsumen dan kemudahan perjalanan konsumen ketika berbelanja didalam toko.

Hasil penelitian di ritel oleh-oleh di kawasan wisata Kota Batu, secara umum penataan ritel rapi dan baik, yaitu dapat dilihat dari: 1) Penempatan rak disusun dengan rapi sesuai dengan jenis barang. 2) Jalan untuk berkeliling pengunjung di dalam ritel tidak ada hambatan. 3) Tempat kasir dan pengepakan barang belanjaan berada pada satu tempat walaupun tempatnya berbeda jaraknya tidak jauh.

Design, secara umum desain toko merupakan bagian dari strategi marketing karena untuk mendesain toko terlebih dahulu memahami konsumen sasaran, maka

desain toko yang baik adalah desain yang menyesuaikan dengan kondisi konsumen. Secara keseluruhan desain toko berfungsi mirip "logo" perusahaan. Karakter toko menjadi kata kunci yang harus dijabarkan seorang desainer karena desain toko berfungsi sebagai gimmick yaitu sesuatu yang special unik dan membuat toko tertentu menjadi lebih menonjol di bandingkan toko sejenis.

Pada dasarnya Fungsi desain toko adalah: 1) menciptakan citra toko (Penampilan luar/Exterior – Fascade Store, Pemilihan nama/logo - Store Image, Pemilihan warna/karakter, Colour Image). 2) Memberikan fleksibilitas yang maksimal, peralatan-peralatan toko yang dipergunakan hendaknya cukup fleksibel sehingga memungkinkan diadakan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. 3) Memudahkan pemeliharaan toko, agar toko tetap bersih dan menarik, perlu dipikirkan cara pemeliharannya dengan usaha yang minimal. 4) Mendukung pengamanan toko, desain toko harus mendukung pengamanan toko dari pencurian kemungkinan oleh pembeli maupun karyawan. 5) Memberikan kenyamanan berbelanja, harus memberikan kemudahan bagi pembeli yang masuk dan keluar toko, serta dapat mengundang orang untuk berani masuk ke dalam toko (Maddy, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain toko ritel oleh-oleh di Kawasan Wisata Kota Batu, sudah sesuai dengan fungsinya yang mencakup 5 fungsi dasar menurut Maddy, (2010) di atas. Hanya saja, sebagian besar pebisnis ritel menerapkan desain modern dan menggunakan konsep minimalis yang sedang menjadi trend sekarang ini. Toko dengan desain yang baik dan konsep minimalis nampak begitu mewah dan modern, terlebih interior yang ada pada bagian dalam toko juga mendukung, seperti rak tempat memajang produk yang juga dikemas seminimalis mungkin untuk menghemat ruang yang tersedia. Toko yang memiliki ruangan cukup luas pun, juga menerapkan desain konsep minimalis dengan dua lantai.

Visual merchandising, persaingan dalam dunia bisnis ritel saat ini semakin ketat. Perusahaan ritel agar berhasil menghadapi persaingan, maka salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menampilkan produk dengan mengembangkan *Visual merchandising* yang menarik perhatian dan memenangkan hati pelanggan. Hasil penelitian toko ritel oleh-oleh di kawasan Kota Batu pengembangan *Visual merchandising*, selain penataan barang dagangan (*merchandise presentation*) dengan menggunakan display di setiap area, juga mendekor toko yang menarik dan mendesain interior. Tujuan strategi ini untuk menciptakan

suasana toko yang menarik, sehingga menimbulkan keinginan pengunjung untuk membeli. Gambar dibawah ini contoh *merchandise presentation* di toko ritel oleh-oleh Kota Batu.



Implementasi Visual merchandising diterapkan toko ritel yang tidak lepas dari inovasi setiap saat, melakukan eksplorasi terhadap peluang-peluang yang belum tereskplorasi, dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan ritel yang sangat cepat serta dinamik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan.

C.1.3. Store Image

Citra toko mengacu pada apa yang dipikirkan konsumen tentang toko tertentu yang mencakup persepsi dan sikap yang didasarkan pada sensasi stimuli terkait dengan toko yang diterima melalui indera. Citra toko biasanya diketahui dengan bertanya pada konsumen, seperti apa yang konsumen pikirkan tentang toko, seberapa pentingkah atau seberapa menyenangkan aspek-aspek operasional toko ritel tersebut. Citra toko berhubungan dengan persepsi dan sikap konsumendaristimuli yang diterima melalui panca indera terhadap toko. Secara operasional, Peter dan Olson (2010) berpandangan bahwa citra toko umumnya merupakan hasil penilaian konsumen tentang seberapa baik atau seberapa penting dimensi-dimensi sebuah ritel itu. Dimensi dari citra toko yaitu barang, layanan, pelanggan, fasilitas fisik, promosi, dan kenyamanan. Begitu pula suasana toko juga sering dimasukkan sebagai bagian dari dimensi citra toko.

Dimensi-dimensi citra toko, menyatakan bahwa sebuah toko mempunyai kepribadian, bahkan beberapa toko mempunyai citra yang sangat jelas dalam benak konsumen. Sehingga dapat dikatakan citra toko adalah kepribadian sebuah toko. Kepribadian atau citra toko menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu.

Pebisnis ritel oleh-oleh di kawasan wisata Kota Batu, menggabungkan dimensi-dimensi citra ritel untuk menciptakan suatu metode ritel tunggal, yang terdiri dari; Barang Dagangan (*Merchandise*), Harga (*Price*), Promosi (*Promotion*), *Merchandise Presentation*,

Pelayanan (*Service*), Suasana dalam Toko (*Atmosfer*) dan, Karyawan Toko (*Customer Service*). Kombinasi dari dimensi-dimensi ritel ini dapat memproyeksikan citra toko atau dikenal dengan bauran ritel (*retail mix*), yang bertujuan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap toko ritelnya. Pebisnis ritel harus memastikan bahwa penetapan posisi tokonya sesuai dengan harapan-harapan pelanggan.

Penelitian citra toko dilakukan melalui wawancara dengan konsumen terhadap persepsi dan sikapnya pada dimensi-dimensi toko. Seringkali dimensi yang sama dari masing-masing toko-toko yang bersaing diteliti guna membandingkan kekuatan dan kelemahan image toko tertentu terhadap image toko pesaingnya. Mengembangkan citra toko yang konsisten menjadi tujuan pengecer terkait dengan kepentingan mengkoordinasikan berbagai dimensi citra toko guna menciptakan daya tarik bagi segmen pasar.

Pesatnya perkembangan ritel oleh-oleh semakin memperketat persaingan para pebisnis ritel yang ada di Kota Batu, sehingga menuntut mereka menerapkan strategi ritel khusus untuk mampu bertahan ditengah persaingannya. Rata-rata pebisnis ritel oleh-oleh tidak hanya menjual produk lokal Kota Batu, tetapi juga menjual produk daerah lain yang dikhususkan pada produk khas daerah.

Bisnis ritel disamping menawarkan barang dagangan khas daerah, juga sangat erat kaitannya dengan jasa atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus menjadi perhatian utama bagi pebisnis ritel. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka akan semakin baik pula citra sebuah toko ritel dimata konsumennya. Sebaliknya citra toko eceran yang baik, akan mencerminkan kualitas produk oleh-oleh yang tidak diragukan dan tambahan layanan-layanan yang dibekalkan akan semakin sesuai dengan kebutuhan konsumen dan berarti dapat mencapai sasaran pasar toko ritel.

D. PENUTUP

Obyek wisata Kota Batu dewasa ini dikenal sebagai ikon wisata di wilayah Jawa Timur. Pasalnya, wilayah Kota Batu berada di daerah pegunungan yang memiliki hawa dan udara yang sejuk, pemandangan alamnya sangat menakjubkan serta dihiasi warna-warni dari tanaman-tanaman yang tumbuh. Potensi alam yang dimiliki Kota Batu, merupakan prospek pengembangan pariwisata yang menjanjikan di masa akan datang dan tentunya akan menjadi sumber strategis bagi pendapatan daerah, disamping berdampak positif pada pertumbuhan

dan perkembangan bisnis lainnya yang menjadi ikutan disektor wisata, salah satunya yaitu bisnis oleh-oleh.

Perkembangan bisnis ritel oleh-oleh di kota wisata Batu tumbuh pesat, mulai dari Pedagang Kaki Lima, Toko Kelontong hingga Toserba atau toko ritel modern. Banyak bisnis ritel tradisional yang mulai mengembangkan diri menjadi ritel modern. Ritel-ritel tersebut lokasinya berada disekitar obyek wisata dan di jalan-jalan utama menuju Kota Batu yang dilalui wisatawan dari luar daerah, yaitu: jalan dari Kediri atau Jombang, jalan dari Kota Malang dan jalan dari Surabaya yang melewati Karangploso Kabupaten Malang.

Strategi pemasaran yang dilakukan pebisnis ritel di Kota Batu dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu Merchandise Management dan Store Management. Merchandise Management meliputi dimensi Produk, Harga, Promosi. Store Management meliputi dimensi Store Layout, Design dan Visual. Dimensi-dimensi Strategi pemasaran yang diterapkan oleh pebisnis ritel atau disebut dengan bauran ritel (retail mix), merupakan karakteristik dari toko ritel yang dapat membentuk kepribadian toko atau citra toko. Citra toko yang baik akan menimbulkan keinginan konsumen untuk berbelanja, karena Citra toko yang baik akan memberi kesan baik pula terhadap dimensi-dimensi ritel atau bauran ritelnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Islami,R., Citra; Dimas Wisnu Adrianto dan Kartika Eka Sari (2013). Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Kawasan Wisata Terhadap Kondisi Masyarakat. *Planning for Urban Region and Environment*. Volume 2. Nomor 3. Juli 2013
- Hollensen, Svend (2010). *Marketing Management : A Relationship Approach* . Second Edition. Pearson Education. England.
- Kotler, Philip, 2009. *Manajemen Pemasaran* 1, Edisi Ketigabelas. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2008. *Principles of Marketing*, Twelfth edition. Person Prentice Hall. America.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. 2012. *Marketing Management*. 14 e Global Edition. Pearson Education.England
- Levy, Michael and Barton A.Weitz (2012).*Retailing Management*. eighth edition. McGraw-Hill/Irwin. Americas. New York.
- Maddy, Khairul (2010), Sasaran Desain Toko, <http://ammarawirusaha.blogspot.com/2010/04/sasaran-desain-toko.html>
- Neuman, W. Lawrence. (2011). *Social Research Methods: Qualitatif and Quantitatif Approaches*, 7th edision. Person Education, Inc. Boston. Edina T. Sofia. 2013. *Metode Penelitian Sosial; Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*. PT Indeks. Jakarta barat.

Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson (2010). *Consumer behavior & marketing strategy*, 9th ed, Published by McGraw-Hill/Irwin. Americas. New York.

Sugiarta, I. N. (2011). *Retail Consumer Goods*. Cetakan Pertama, Penerbit Expose, Jakarta.

Zulaikha, Ellya and Brereton, Margot. (2011). *Innovation strategies for de-veloping the traditional souvenir craft industry*. In The First International Postgraduate Conference on Engineering, Designing and Developing the Built Environment for Sustainable Wellbeing. Queensland University of Technology. Brisbane Qld. 27-29

RPSEP-21

ANALISIS KUALITAS LAYANAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK GENDER PADA PELAKU UMKM BIDANG USAHA MAKANAN

The Analysis of the characteristics of Gender for service quality in Food Industry Implemented by Small Medium Enterprises

Siti Nurjanah¹⁾ Brenda Aurista²⁾ Tito Hananta Kusuma³⁾

¹⁾ Manajemen , Fakultas Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan 22, Jakarta 12020
Email: siti.nurjanah@kalbis.ac.id

Abstract

This paper analyzes the characteristics of gender in offering a service quality in SME's of food industry. The businesses that are run by the Small and Medium Enterprises are currently developing well. Service quality in SME's businesses are often overlooked by business owners due to several reasons such as limited human resources, lack of capital, lack of knowledge and others. There are several dimensions in service quality such as tangible or physical evidence. These dimensions can be seen through the ability of SMEs in existence to show the arrangement of stalls, creating interesting shops layout, cleanliness of the place, and neatness. While, the other dimensions to consider including: reliability, responsiveness, speed and accuracy as well as guarantees that the raw materials used. Service quality can be distinguished on the basis of gender characteristic, it is also indicates that the gender refers to psychological characteristics, social and culture associated. For men tend to have less rigorous due to the cultural characteristics of the family, the community formed that men tend to do the rough work, instead, while women tend to work toward accuracy. This type of research is qualitative research. The procedure used is a qualitative method of grounded research where the procedures aim to explain the concept, process, action or interaction about a given topic from the point of participants.

Keywords: Service quality, Gender, UMKM, Food

Abstrak

Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dibidang makanan tergolong cukup berkembang. UMKM dibidang ini dikerjakan baik pelaku mikro bergender perempuan dan laki-laki. Kualitas layanan dalam usaha kecil menengah seringkali dilupakan oleh pemilik usaha dikarenakan beberapa alasan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan dan lainnya. Kualitas pelayanan sebuah usaha kecil menengah bidang makanan bisa dilihat dari beberapa dimensi seperti tangible atau bukti fisik. Dimensi ini dapat dilihat melalui kemampuan UMKM dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak konsumen diantaranya penataan warung/toko yang menarik,

kebersihan tempat, serta kerapian. Dimensi lain yang perlu diperhatikan diantaranya kehandalan, daya tanggap, kecepatan dan ketepatan serta jaminan bahan baku yang dipergunakan. Dalam penelitian ini kualitas layanan dapat dibedakan berdasarkan karakteristik gender. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Prosedur metode kualitatif yang digunakan adalah *grounded resarch* yaitu prosedur penelitian yang menjelaskan konsep, proses, tindakan atau interaksi mengenai suatu topik tertentu dari sudut partisipan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik gender mengacu pada psikologis, sosial dan budaya yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Untuk gender laki-laki cenderung memiliki karakteristik kurang teliti dikarenakan budaya dari keluarga, lingkungan masyarakat yang membentuk bahwa laki-laki cenderung untuk melakukan pekerjaan yang kasar sedangkan perempuan ke arah pekerjaan yang butuh ketelitian.

Kata kunci: Kualitas layanan, Gender, UMKM, Makanan

A. PENDAHULUAN

Karakteristik kualitas layanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau memiliki harapan dengan lima dimensi utama, yakni bukti langsung (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), perhatian (*emphaty*). Dalam usaha kecil menengah kualitas layanan seringkali dilupakan oleh pemilik usaha dikarenakan beberapa alasan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan dan lainnya. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai karakteristik kualitas layanan yang dijalankan oleh pelaku UMKM yang bergender wanita dan yang bergender laki-laki pada jenis usaha makanan. Dalam dimensi kualitas layanan sebuah usaha kecil menengah perlu *tangible* atau bukti fisik dalam hal ini akan dilihat kemampuan UMKM dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak konsumen diantaranya : penataan warung yang menarik, kebersihan tempat, kerapian tempat, kelengkapan peralatan.

Selain bukti fisik dibutuhkan kehandalan yang meliputi kemampuan UMKM memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kesigapan karyawan dalam membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dan dengan penyampaian informasi yang jelas.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah daya tanggap, jaminan serta perhatian. Dimensi dari layanan sangat menentukan apakah konsumen memutuskan untuk melakukan keputusan suatu pembelian. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha mikro yang telah berhasil melampaui beberapa krisis moneter yang dialami negara ini. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan satu usaha kecil menengah yang dapat memperkuat dasar

kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia. UMKM telah berhasil menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sekitar 55 juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%. Angka tersebut diatas sangat berbeda jauh dari pangsa para konglomerat yang berjumlah kecil tetapi sangat mendominasi perekonomian negara Indonesia. UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari Produk Domestik Bruto dan menampung 97% tenaga kerja yang berada di Indonesia. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UMKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana peranan kualitas SDM yang ada di UMKM dilihat dari karakteristik kualitas layanan.

B. METODE PENELITIAN

B.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Prosedur metode kualitatif yang digunakan adalah *grounded research* yaitu prosedur penelitian yang menjelaskan konsep, proses, tindakan atau interaksi mengenai suatu topik tertentu dari sudut partisipan.

B.2 Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pasar Slipi Jaya , Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Desember 2013.

B.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah field research, yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mengetahui permasalahan yang terjadi, sekaligus untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam rangka untuk memperoleh data tersebut maka dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu para pelaku UMKM.

Cara selanjutnya pengambilan data yang akan digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan 17 informan yang akan dilakukan eksplorasi menggunakan fasilitator.

Proses eksplorasi dalam prosedur grounded theory digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pembentuk sikap terhadap perguruan tinggi yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan berguna, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk proposisi, berdasarkan informasi langsung dari pelaku UMKM.

B.4 Populasi dan Sampel

Total pelaku UMKM di Pasar Slipi Jaya Kecamatan Palmerah Jakarta Barat lebih dari 50 pelaku UMKM dan akan diambil sampel sebanyak 17 pelaku UMKM jenis usaha makanan .

Sedangkan untuk pelaku UMKM jenis usaha makanan 7 informan bergender laki-laki, 10 informan bergender perempuan.

B.5 Metode Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung , bahkan sebelum data benar benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Reduksi data meliputi:

1. Meringkas data
2. Mengkode
3. Menelusur tema
4. Membuat gugus

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Pelayanan

C.1.1 Pengertian Pelayanan

Kebutuhan akan memberikan pelayanan yang baik sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha, hal tersebut dibutuhkan karena layanan merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan bisnis dan memenangkan persaingan. Setiap pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang semakin baik dari hari ke hari kepada konsumen . Beberapa definisi mengenai pelayanan:

Menurut Buchari Alma (2000: 202-203) bahwa:“Pelayanan diberikan dengan memberikan fasilitas maupun kegiatan nyata kepada calon pembeli agar mau melakukan transaksi dengan perusahaan yang melakukan pelayanan tersebut. Pelayanan ini dapat berupa fasilitas, pelayanan langsung oleh pramuniaga maupun purna jual”

Kotler dialih bahasakan oleh Hendra Teguh , dkk (2000: 428), mengemukakan pelayanan sebagai berikut :

Pelayanan adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak menghasilkan kepemilikan.

Menurut Moenir (2001: 17) bahwa:

Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pengertian proses ini terbatas dalam kegiatan manajemen untuk pencapaian tujuan organisasi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan kepada suatu pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

C.1.2 Kualitas Pelayanan

Menurut Lewis & Booms(1983) dalam Tjiptono dan Chandra (2009;51) kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini , kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa : jasa yang diharapkan (*expectedservice*) dan jasa yang dirasakan / dipersepsikan (*perceived service*). Menurut Parasuraman,et.al dalam Tjiptono dan Chandra (2009;141) apabila *perceived service* sesuai dengan *expected service*, maka kualitas jasa bersangkutan akan dipersepsikan baik atau positif. Jika *perceived service* melebihi *expected service*, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila *perceivedservice* lebih jelek dibandingkan *expectedservice*, maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Menurut Tjiptono (2009;59) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan pelanggan yang disertai tingkat keunggulan yang diharapkan antara yang diharapkan dan dirasakan.

C.1.3 Mengukur Pelayanan

Menurut Parasuraman (dalam Fitzsimmons, 1994, Zeithmal dan Brietner , 1996) Yang dikutip oleh Fandy Tjiptono(2010:70) terdapat lima dimensi untuk mengukur pelayanan, yaitu:

1. Bukti Langsung(*Tangibles*) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi
2. Keandalan (*Reliability*) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera , akurat dan memuaskan
3. Daya Tanggap (*Responsiveness*) yaitu ketanggapan seorang pegawai untuk membantu para pelanggan dengan tanggap
4. Jaminan (*Assurance*) yaitu perilaku karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa man bagi pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.
5. Empati (*Emphaty*) yaitu memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman

Menurut Lamb, Hair , McDaniel dalam David Octarevia (2001;485), hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen menilai kualitas jasa melalui lima komponen sebagai berikut:

1. Keandalan (*reliability*): kemampuan menyelenggarakan jasa dengan dapat diandalkan, akurat dan konsisten. Keandalan memberikan pelayanan yang tepat pada saat pertama kali.Komponen ini dianggap sebagai salah satu yang terpenting bagi konsumen.
2. Cepat tanggap (*responsiveness*): kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera
3. Kepastian (*assurance*): pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan untuk menjaga kepercayaan
4. Empati (*Emphaty*): memperhatikan konsumen secara individual

5. Berwujud (*Tangibles*): bukti fisik dari jasa. Bagian nyata dari jasa meliputi fasilitas fisik, perkakas, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan jasa. Jadi dalam mengukur kualitas pelayanan dalam pemasaran jasa dapat diukur dengan melalui lima dimensi yaitu *Tangible* (bukti fisik), *Responsiveness* (cepat tanggap), *Assurance* (jaminan), *Emphaty* (Empati), *Reliability* (keandalan)

C.2 Jenis Kelamin dan Gender

Menurut Mead (1965) dalam bukunya Sunarto, Kamanto (2004;109) Dari hasil penelitian dilapangan bahwa tidak adanya hubungan antara kepribadian dengan jenis romokelamin, kepribadian laki-laki dan perempuan tidak tergantung pada faktor jenis kelamin, melainkan dibentuk oleh faktor kebudayaan. Perbedaan kepribadian antar masyarakat maupun antar individu merupakan hasil proses sosialisasi, terutama pola asuhan dini yang dituntun oleh kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

C.2.1 Jenis Kelamin

Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, pada perbedaan antara tubuh laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikemukakan Moore dan Sinclair (1995;117) dalam buku Sunarto, Kamanto (2004;110): “*Sex refers to the biological difference between men and women the result fo difference in the chromosomes of the embryo*” Definisi konsep seks tersebut menekankan pada perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kromosom pada janin. Dengan demikian manakala kita berbicara mengenai perbedaan jenis kelamin maka kita akan membahas perbedaan biologis yang umumnya dijumpai antara kaum laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan pada bentuk, tinggi serta berat badan, pada struktur organ reproduksi dan fungsinya.

C.2.2 Teori Gender

Konsep gender tidak mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, melainkan pada gender tidak mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan

dan laki-laki, melainkan pada perbedaan psikologis, sosial dan budaya yang dikaitkan masyarakat antara laki-laki dan perempuan

Gender tidak bersifat biologis melainkan dikonstruksikan secara sosial. Gender tidak dibawa sejak lahir melainkan dipelajari melalui sosialisasi.(Sunarto, Kamanto;122)

Secara khusus tidak ditemukan teori yang membahas tentang gender, tetapi teori yang digunakan dalam membahas permasalahan gender banyak diadopsi yang dikembangkan oleh para ahli dibidang social dan banyak diambil dari teori sosiologi dan psikologi (Marzuki, 2010). Dalam penelitian ini membahas mengenai teori gender dianggap sangat penting karena hasil dari penelitian diharapkan bisa menunjukkan apakah kualitas servis dari UMKM yang ber-gender wanita atau pria memiliki karakteristik yang sama atau berbeda. Adapun dari berbagai macam teori yang ada, yang akan dibahas hanya mengenai **a). Teori struktural fungsional, b).Teori Feminisme Liberal c). Teori Feminisme Marxis-Sosialis.**

a. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial.sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Ratna Megawangi, 1999: 56).Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial.Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa

makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak.Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis karena membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama

dalam masalah reproduksi Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.

b). Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik (Megawangi, 1999).

c). Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Teori ini mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Teori ini mengadopsi teori *praxis* Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan ‘kelas’ yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan (Ratna Megawangi, 1999: 225).

C.2.3 Perbedaan Gender

Shorea Dwarawati (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Akuntan Dilihat dari Perbedaan Gender menemukan bahwa, komitmen organisasi dan kepuasan kerja menunjukkan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Hal ini berarti adanya perbedaan yang signifikan pada komitmen organisasi dan kepuasan kerja antara karyawan pria dan wanita. Tangga, sosok yang lemah; sedangkan laki laki sebagai pelindung, penjaga keamanan, figur yang kuat.

The Australian – Indonesia Partnership For Reconstruction for Development (Gender Brief Series No 1, 2007), perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat secara normal/alamiah terjadi. Tetapi karakteristik yang dimiliki, peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada mereka bisa berbedabeda dari suatu masyarakat, budaya, dan periode historis. “Peran gender” (*genderroles*) merupakan aktivitas yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki atas dasar perbedaan yang

diterimanya. Selama ini, dalam masyarakat, peran, tugas dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan diterapkan secara ketat atas dasar karakteristik gender dan atribut-atributnya, dan bukan atas dasar kemampuan dan keterampilan. Misalnya, peran laki-laki: (1). Peran Produktif dan pengembangan masyarakat, (2). Laki-laki bekerja di wilayah “alat-alat berat, mengorganisasi massa, menyusun strategi ” sedangkan perempuan di wilayah “berhitung, di balik meja, atau berhadapan dengan klien”. (3). Laki-laki umumnya tidak terlibat dalam urusan domestik dan rumah tangga. Waktu luang mereka digunakan untuk terlibat dalam arena politik, kelompok hobi, memimpin masyarakat.

Dengan analisis gender, maka ketidakadilan gender dapat diuraikan agar struktur dan relasi yang tidak seimbang tersebut dapat diperbaiki, karena analisis gender membantu: (1). Menyingkap perbedaan di antara perempuan dan laki-laki, dan perbedaan “identitas” dari kelompok-kelompok gender yang beragam (berkaitan dengan, misalnya: kelas, ras, etnis, usia, kemampuan dan orientasi seksual). (2). Melihat masalah tidak dalam isolasi (ruang vakum) tanpa mengaitkannya dengan konteks sejarah, politik, sosial, maupun ekonomi’ (3). Menganalisis bagaimana perbedaan ini telah membawa ketidaksetaraan / ketidakadilan, terutama bagi perempuan (Suputra, 2011).

C.3 Analisis Data

1. Cara Penataan toko

Hasil penelitian ini terlihat bahwa untuk jenis usaha makanan dalam hal penataan toko atau warung untuk gender perempuan 4 informan menjawab menata dengan biasa saja, 3 menjawab menata dengan menarik, 3 menjawab menata dengan rapi dan 2 informan menjawab dengan bersih. Untuk gender laki laki semua informan menata warungnya dengan biasa dan sederhana. Dari hasil data diatas dapat ditarik suatu pernyataan perbedaan karakteristik layanan dalam hal penataan toko atau warung untuk jenis usaha makanan:

Gender Perempuan cenderung cara menata warung atau tokonya menarik, rapi dan bersih.

Gender laki-laki cenderung cara menata warung atau tokonya sederhana dan biasa saja.

2. Pengetahuan tentang penataan toko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk jenis usaha makanan dalam pengetahuan penataan toko atau warung diperoleh dari:

1. Gender perempuan 9 informan menjawab pengetahuan dari pengalaman sendiri, 1 informan menjawab dari melihat TV

2. Gender laki laki 7 informan menjawab pengetahuan dari pengalaman diri sendiri

Dari hasil data diatas dapat ditarik suatu pernyataan bahwa dalam hal penataan toko atau warung untuk jenis usaha makanan gender perempuan dan gender laki-laki cenderung pengetahuan tentang penataan warung berasal dari diri sendiri

3. Penentuan harga barang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk jenis usaha makanan penjual dalam menentukan harga barang ditentukan dari :

Gender perempuan 6 informan menjawab menentukan harga barang berdasarkan harga pasar, 5 informan menjawab menentukan harga barang berdasarkan modal yang dikeluarkan.

Gender laki laki 3 informan menjawab menentukan harga barang berdasarkan harga pasar, dan 4 informan menjawab menentukan harga barang berdasarkan modal yang dikeluarkan.

Gender Perempuan dalam hal menentukan harga barang cenderung berdasarkan harga pasar dan Gender laki-laki cenderung dalam hal menentukan harga barang berdasarkan modal yang dikeluarkan.

4. Cara menjaga kualitas produk

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk jenis usaha makanan pelaku UMKM dalam menjaga kualitas barang ditentukan dari :

Gender perempuan 1 informan menjawab untuk menjaga kualitas dengan memberikan yang terbaik, 2 informan memberikan jawaban dengan memberikan rasa

makanan yang sama, 7 informan menjawab dengan membuat dengan bahan baku yang baik.

Gender laki laki 1 informan menjawab tidak tahu, 6 informan menjawab dengan membuat bahan baku yang baik.

Dari hasil data diatas dapat ditarik suatu pernyataan bahwa dalam hal menjaga kualitas barang:

Gender Perempuan untuk jenis usaha makanan dalam hal menjaga kualitas barang cenderung dengan membuat dari bahan baku yang baik demikian pula dengan gender laki-laki cenderung dalam hal menjaga kualitas barang dengan membuat dari bahan baku yang baik.

5. Jam buka toko

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk usaha jenis makanan pelaku UMKM yang bergender perempuan dalam membukan warung/tokonya, 4 informan menjawab membuka warungnya selama 4 hari, 6 informan menjawab membuka toko/warungnya 7 hari.

Dari data diatas dapat dilihat tidak secara signifikan ada perbedaan:

Untuk jenis usaha makanan gender perempuan sebagian besar membuka tokonya selama 7 hari, demikian pula untuk informan laki-laki semua informan membuka tokonya selama 7 hari.

6. Keluhan tentang pelayanan

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa untuk usaha makanan baik yang bergender perempuan maupu laki-laki cenderung tidak ada keluhan tentang pelayanan walaupun ada 3 informan yang menjawab ada keluhan, 2 informan menjawab ada keluhan tanpa ada alasan, dan 1 informan memberikan keterangan bahwa keluhan dikarenakan karena suasana toko sedang ramai.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak banyak perbedaan dalam hal frekuensi terhadap keluhan antara gender perempuan dan gender laki-laki, pada gender perempuan ada 1 informan mengatakan ada keluhan dikarenakan kondisi toko yang ramai, sedangkan untuk gender laki-laki cenderung tidak pernah menerima keluhan.

7. Keluhan tentang kualitas barang

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa keluhan tentang kualitas produk dapat digambarkan sebagai berikut, pelaku UMKM usaha makanan dalam hal keluhan tentang kualitas produk cenderung tidak ada baik yang bergender perempuan sedangkan untuk gender laki-laki ada 1 informan menjawab ada keluhan tentang kualitas produk.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk usaha makanan cenderung tidak ada keluhan mengenai kualitas barang, hal tersebut dikarenakan konsumen untuk usaha makanan cenderung sudah menjadi langganan dan sudah sesuai dengan selera rasa masakan

8. Penggunaan Bahasa

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan bahwa untuk jenis usaha makanan gender perempuan ada 1 informan menggunakan bahasa campuran sedangkan untuk 10 informan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan untuk gender laki-laki hampir semua informan menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan pelayanan.

Dari gambar diatas dapat digambarkan bahwa semua informan laki-laki pada pelaku usaha makanan mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan mereka berjualan di Ibukota Jakarta yang memiliki kecenderungan konsumen yang datang berasal dari berbagai daerah dan mereka menggunakan bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia. Sedangkan ada 1 informan perempuan yang menggunakan bahasa campuran dalam melakukan usaha mereka, dari hasil wawancara didapatkan bahwa mereka menggunakan bahasa campuran apabila dia bertemu dengan konsumen yang satu daerah dengan mereka.

9. Perlakuan terhadap konsumen yang berasal dari satu daerah

Hasil penelitian diatas dapat diuraikan bahwa untuk jenis usaha makanan informan bergender menjawab 8 responden menjawab tidak ada perbedaan, 2 responden menjawab ada perbedaan. Untuk gender laki-laki semua menjawab tidak perbedaan dalam memberikan perlakuan terhadap konsumen yang berasal dari satu daerah.

Dari data diatas dapat digambarkan bahwa ada kecenderungan bahwa semua pelaku usaha makanan cenderung tidak membedakan perlakuan terhadap konsumen yang berasal dari satu daerah. Walaupun ada 2 informan menjawab bahwa mereka memberikan perlakuan yang berbeda terhadap konsumen yang berasal dari satu daerah. Tetapi dibandingkan dari total responden jumlah lebih kecil daripada yang menjawab memberikan perlakuan yang sama terhadap semua konsumen.

10. Kesalahan dalam pengembalian uang

Hasil penelitian diatas dapat diuraikan dalam pengembalian uang untuk jenis usaha makanan yang bergender perempuan menjawab 7 responden tidak pernah melakukan kesalahan dalam pengembalian uang, 3 responden pernah melakukan kesalahan dalam pengembalian uang. Sedangkan untuk gender laki-laki 2 orang responden menjawab tidak pernah melakukan kesalahan pengembalian uang dan 5 responden pernah melakukan kesalahan dalam pengembalian uang.

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa untuk jenis usaha makanan responden perempuan cenderung sedikit pernah melakukan pengembalian uang dan gender laki-laki cenderung lebih banyak melakukan pengembalian uang.

11. Kesalahan dalam penerimaan uang

Hasil penelitian diatas dapat diuraikan bahwa kesalahan dalam penerimaan uang UMKM berjenis usaha makanan yang bergender perempuan menjawab 8 responden tidak pernah melakukan kesalahan dalam penerimaan uang, 2 responden pernah melakukan kesalahan dalam pengembalian uang. Sedangkan untuk gender laki-laki 4 responden menjawab tidak pernah melakukan kesalahan penerimaan uang dan 3 responden pernah melakukan kesalahan dalam pengembalian uang.

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa untuk jenis usaha makanan responden perempuan cenderung sedikit pernah melakukan penerimaan uang dan gender laki-laki cenderung lebih banyak melakukan pengembalian uang.

12. Cara/usaha penjual agar konsumen kembali

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa para pelaku UMKM untuk membuat konsumen kembali dalam jenis usaha makanan untuk gender perempuan dari total 10 responden 4 orang responden menjawab melayani dengan baik, 1 orang menjawab

memberikan pelayanan cepat, 1 orang menjawab tidak tahu dan 4 orang menjual makanan yang enak. Untuk gender laki-laki sebanyak total 7 responden menjawab memberikan pelayanan yang baik sebanyak 6 memberikan pelayanan yang baik, 1 dengan menjual makanan yang enak. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk gender laki dalam membuat konsumen kembali dengan memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan untuk gender perempuan antara memberikan pelayanan yang baik dan menjual makanan yang enak memiliki persentase yang sama.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa baik gender perempuan maupun gender laki-laki untuk menarik konsumen kembali ke warung atau toko informan cenderung memberikan kualitas pelayanan yang baik yang meliputi : pelayanan yang ramah, sopan, baik, cepat, memberikan kualitas makanan yang baik serta membuat tampilan yang menarik.

D. SIMPULAN

1. Gender Perempuan untuk usaha jenis makanan cenderung cara menata warung atau tokonya dengan rapi
2. Gender laki-laki untuk jenis usaha makanan cenderung cara menata warung atau tokonya menggunakan imajinasi atau kreatifitas mereka.
3. Gender wanita cenderung terbentuk dengan budaya yang rapi, bersih dan menarik. Sedangkan untuk gender laki-laki cenderung terbentuk oleh budaya yang dari segi penampilan yang sederhana dan kecenderungan memiliki kreatifitas yang tinggi.
4. Pengetahuan tentang penataan warung/toko mereka berdasarkan proses pembelajaran selama hidup mereka melalui pengalaman maupun pengamatan.
5. Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM dengan gender laki-laki cenderung menentukan harga barang berdasarkan modal dan perempuan cenderung menggunakan harga pasar. Dari sisi konsep marketing bahwa penentuan harga barang bisa ditentukan oleh jumlah biaya yang telah dikeluarkan maupun dengan melihat tren pasar
6. Untuk menjaga kualitas produk yang dijual untuk usaha makanan cenderung untuk menjaga kualitas bahan baku. Hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa untuk

produk makanan akan memiliki kualitas yang baik apabila berasal dari bahan baku yang baik.

Dari hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan dalam cara menjaga kualitas produk yang dia jual dan apabila dikaitkan dengan teori bahwa dimensi dari produk adalah salah satunya kualitas mereka telah menyadari pentingnya kualitas.

7. Penelitian diatas menunjukkan bahwa rata-rata semua pedagang jenis makanan semua cenderung membuka toko/warungnya selama 7 hari. Dari hasil wawancara menunjukkan selain dikarenakan sewa toko yang cukup mahal mereka juga takut kehilangan pelanggan berpindah ketempat lain. Dari hal tersebut akan terbentuk persepsi bahwa perempuan cenderung untuk bertugas berada dirumah mengurus rumah tangga dan laki-laki keluar mencari nafkah untuk keluarga. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang sudah terbentuk tidak berpengaruh dalam penelitian ini, dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa gender perempuan pun membuka jam buka toko 7 hari kerja.
8. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan untuk jenis usaha makanan gender laki-laki cenderung tidak pernah menerima keluhan . Dari pernyataan diatas dapat simpulkan bahwa untuk usaha makanan cenderung tidak ada keluhan mengenai kualitas barang, hal ini peneliti amati dikarenakan untuk usaha makanan kecenderungan bahwa yang menjadi konsumen usaha makanan cenderung sudah menjadi langganan dan sudah sesuai dengan selera rasa masakan. Apabila dihubungkan dengan teori gender bahwa karakteristik gender mengacu pada psikologis, sosial dan budaya yang dikaitkan dengan jenis kelamin, untuk gender laki-laki cenderung ada keluhan dikarenakan bahwa laki-laki cenderung untuk tidak telaten dalam merawat produk.
9. Bahasa yang digunakan oleh pelaku usaha makanan menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan mereka berjualan di Ibukota Jakarta yang memiliki kecenderungan konsumen yang datang berasal dari berbagai daerah dan mereka menggunakan bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia
10. Para pelaku usaha makanan cenderung tidak membedakan perlakuan terhadap konsumen yang berasal dari satu daerah

11. Dari data diatas perempuan cenderung memiliki persentase yang kecil dalam kesalahan pengambilan uang. Apabila penelitian diatas dibandingkan dengan teori yang ada akan kembali ke teori gender bahwa karakteristik gender mengacu pada psikologis, sosial dan budaya yang dikaitkan dengan jenis kelamin, untuk gender laki-laki cenderung memiliki karakteristik kurang teliti dikarenakan budaya dari keluarga, didalam lingkungan keluarga bahwa anak laki-laki cenderung untuk melakukan pekerjaan yang kasar sedangkan perempuan ke arah pekerjaan yang butuh ketelitian.
12. Dari data diatas dapat diuraikan bahwa untuk jenis usaha makanan responden perempuan cenderung sedikit pernah melakukan penerimaan uang dan gender laki-laki cenderung lebih banyak melakukan pengembalian uang. Apabila penelitian diatas dibandingkan dengan teori yang ada akan kembali ke teori gender bahwa karakteristik gender mengacu pada psikologis, sosial dan budaya yang dikaitkan dengan jenis kelamin, untuk gender laki-laki cenderung memiliki karakteristik kurang teliti dikarenakan budaya dari keluarga, lingkungan mada keluhan dikarenakan bahwa laki-laki cenderung untuk melakukan pekerjaan yang kasar sedangkan perempuan ke arah pekerjaan yang butuh ketelitian.
13. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menarik konsumen kembali ke warung atau toko informan cenderung memberikan pelayanan yang baik, ramah, sopan. Apabila hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori service quality bahwa dimensi kualitas terdiri dari: tangible, realibility, responsiveness, emphaty dan assurance. Dari lima dimensi tersebut bahwa para pelaku UMKM tanpa pengetahuan yang mereka ketahui telah menerapkan dimensi-dimesi tersebut. Dalam hal cara atau usaha untuk menarik konsumen kembali antara gender perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan yang signifikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. (2005). *Psikologi Kepribadian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Development, T. A. (2007). *Gender Brief Series no.1*.
- Fatmawati. (2012). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang di PT. Angkasa Pura I (persero) Bandara Adisutjipto – Yogyakarta* .
- Henslin, James M. (2007) *Sosiologi dengan pendekatan membumi*. Ed. 6 Jakarta: Erlangga.

- Jhon.M, E., & Shadily, H. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Cet XII.
- Kotler, Philip (2007), *Marketing Management*, 5th ed. Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey.
- Kotler, Philip 2012, *Marketing Management*, 12th ed. Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong, 2010, *Principle of Marketing*, 13th ed, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey.
- Kuntjojo. (2009). *Diktat Psikologi Kepribadian*. Kediri: PGRI Kediri.
- Kretch, D. d. (1969). *Elements of Psychology*. New : Alfred A. Knopf.
- Kotler, Philip, 2001 . *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis , Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat. Jakarta
- Lupiyodi, Rambat, 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Ed.2, Salemba Empat, Jakarta
- Larasati, B. H. (2011). *Analisis Hubungan Komunikasi Pemasaran Dengan Kualitas Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) . Institut Pertanian Bogor .*
- Lips, H. M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Cet.I.
- Marzuki. (2010). *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*. Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Cet.I.
- R, A. P. (2013). *Analisis Perencanaan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Konsumen Dengan Metode Quality Function Deployment (Studi Kasus Pada Ukm Roti Mawadah Ratu Malang) . Universitas Brawijaya .*
- Sinaga, P. P. (2010). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Kepuasan Pelanggan Dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Warnet Chamber Semarang)*.
- Showalter, E. (1989). *Speaking of Gender*. New York: London Routledge.
- Shorea, D. (2005). *Analisis Perbedaan Kinerja Akuntan dilihat dari Segi Gender. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .*
- Sunarto. Kamanto,2004 *Pengantar Sosiologi*. Ed.rev . Jakarta: LPFE UI
- Sujanto, A., Lubis, H., & Hadi, T. (2009). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suputra, I. G. (2011). Perbedaan Gender, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Mahasiswa Stimi “Handayani” Denpasar. Denpasar, Denpasar, Indonesia, Jakarta

Segoro, Waseso, 2012, Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, Ed.1. Mitra Wacana Medika: Jakarta.

Tjiptono, Fandy, 2009, Prinsip-prinsip total quality service, Ed.5. Andi Offset: Yogyakarta.

Teguh, Hendra, 2001 . Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta

Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender*. New York: Routledge

Victoria, N. (1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelanland.

W.Sarwono, S. (2010). Pengantar Psikologi Umum. Dalam S. W.Sarwono, *Pembentukan Kepribadian* (hal. 169). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wawolumaja, R., & Agneslia, E. (2011). Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Teknik Universitas Kristen Maranatha Dengan Metoda Servqual.

RPSEP-22

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG BRANDING PRODUK UT

Tamjuddin, Mohamad Nasoha
Program Studi Manajemen Fekon Universitas Terbuka

Email: tamjuddin@ut.ac.id

Abstrak

Produk unggulan Universitas Terbuka yang ditawarkan merupakan salah satu produk yang disediakan dan ditawarkan yang memiliki ciri khas tersendiri seperti format penyajian logo, tinjauan matakuliah dan kompetensi yang ingin dicapai. Persepsi mahasiswa terhadap *branding* merek, iklan, kualitas merek dan asosiasi merek produk UT tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Populasi responden pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di area UPBJJ-UT Jabodetabek. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling*. Dari sampel penelitian digunakan 150 mahasiswa UT. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan metode tes. Pengukuran instrument menggunakan skala Likert 1-5. Hasil uji diperoleh bahwa mahasiswa lebih mengenal produk UT merek dibanding iklan, kualitas merek, dan asosiasi merek. Hasil uji korelasi dan komunalitas diindikasikan bahwa seluruh pernyataan terkait dengan empat komponen (merek, iklan, kualitas merek, dan asosiasi merek) dinyatakan valid. Hal ini tercermin dari setiap *factor loading* korelasi variabel dengan komponen persepsi yaitu diatas 0.40. dari Hasil analisis disimpulkan bahwa *branding* produk UT lebih menekankan pada merek, karena responden sangat mengenal merek produk UT dibanding komponen lain (iklan, kualitas merek dan asosiasi merek). Sehingga hal ini sangat membantu UT dalam melakukan sosialisasi dan promosi.

Kata kunci: Produk UT, persepsi, kualitas merek, sosialisasi, promosi.

A. PENDAHULUAN

Merek produk (*Brand*), kualitas merek, asosiasi merek dan iklan merupakan bidang kajian matakuliah manajemen pemasaran. Keempat komponen tersebut menjadi penting untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang persepsi mahasiswa terhadap merek produk, iklan, kualitas merek, dan asosiasi merek produk Universitas Terbuka (UT). Produk UT dikatakan baik apabila keempat komponen tersebut sesuai dengan harapan mahasiswa. Untuk

itu peneliti perlu menggali informasi dari mahasiswa tentang keempat komponen tersebut kaitannya dengan produk UT. Ciri khas produk UT seperti bentuk format penyajian (gaya selingkung), logo, tinjauan matakuliah, deskripsi singkat matakuliah, kompetensi yang ingin dicapai dan sebagainya. Selain itu, UT juga perlu melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan jumlah mahasiswa melalui merek, iklan, kualitas merek, dan asosiasi merek sehingga mahasiswa mengenal UT dari keempat komponen tersebut. Merek merupakan salah satu faktor penting yang tertanam di benak mahasiswa tentang perasaan puas, mudah diingat, berjangka waktu lama, biaya terjangkau serta berkualitas. Untuk terciptanya suatu merek yang baik, apabila suatu produk mampu memberikan kepuasan pengguna (mahasiswa), apabila sesuai atau melebihi harapan mahasiswa maka suatu produk dapat dikatakan baik atau berkualitas.

UT adalah perguruan tinggi negeri yang menganut konsep pendidikan jarak jauh. Bersifat wajib dilakukan oleh institusi UT untuk pengembangan layanan akademik berupa produk layanan seperti Buku Materi Pokok (BMP) atau modul yang terdapat di dalamnya memuat materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran jarak jauh termasuk logo UT pada sampul cover BMP tersebut. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan pengkajian lebih lanjut yaitu untuk menganalisis seberapa besar mahasiswa mengenal UT melalui produk layanan yang diberikan. Penelitian yang mengkaji tentang merek, iklan, kualitas merek dan asosiasi merek terhadap produk UT masih relatif kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

“Untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap merek, iklan, kualitas merek dan asosiasi merek produk UT ?”

B. TELAAH LITERATUR

sebagai sebuah institusi UT merupakan organisasi yang dapat mengundang persepsi dalam menciptakan merek, asosiasi terhadap merek, kualitas merek maupun pengiklanan terhadap merek, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penciptaan persepsi merek sehingga mahasiswa akan lebih mengenal entitas UT baik merek yang tertera pada produk UT, iklan UT, kualitas merek dan asosiasi merek. Merek menjadi salah satu faktor penting yang tertanam dalam pikiran pengguna entitas oleh mahasiswa dan pihak mendapatkan: perasaan puas, mudah diingat, memberikan kesan, biaya terjangkau serta berkualitas. Upaya penciptaan

suatu merek yang baik, dapat dilakukan sesuai atau melebihi harapan yang diterima mahasiswa daripada apa yang dipersepsikan.

Merek dapat dikenal oleh mahasiswa apabila disosialisasikan melalui media iklan baik cetak maupun non cetak, ataupun cara-cara lain yang dapat diterima oleh pengguna. Untuk penciptaan merek baik melalui proses dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendekatkan ke pengguna/mahasiswa maka UT mendapat tantangan untuk ~~harus~~-lebih giat lagi melakukan promosi melalui media baik cetak, non cetak. Maupun lisan dan bentuk - bentuk pelayanan nyata dilapangan

Menurut Kristanti (2007) yang melakukan penelitian tentang usaha kuliner ~~Restoran~~ Goota yang merupakan Restoran baru dengan khas makanan Jepang yang dipadu dengan citarasa Korea bahwa sebagai restoran baru yang tentunya memiliki banyak pesaing, Goota harus dapat muncul dan berusaha agar dikenal bahkan unggul di pasaran, dan salah satu strategi adalah pemberian merek, logo atau nama yang digunakan untuk membedakan perusahaan satu dengan yang lainnya (Kotler, 2002). Esensi merk merupakan *Brand* yang kuat serta mempunyai *value* yang dapat menciptakan kekuatan merek (*brand equity*) kemudian dapat menjadi keunggulan dari *brand* tersebut bila dibandingkan dengan *brand* lainnya, selain itu juga sebagai nilai lebih yang menjadikan *brand*, dimana brand tersebut dinilai berbeda oleh konsumen ketika konsumen melakukan keputusan pembelian (Boone dan Kurtz, 2005) dalam Kristanti (2005). Oleh karena itu, UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh akan semakin yakin mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain melalui merek, iklan, kualitas merek dan asosiasi merek yaitu dengan mengenalkan produk UT dan diharapkan mahasiswa dapat mengenal UT lebih baik. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang seberapa besar persepsi mahasiswa UT terhadap merek, iklan, kualitas merek dan asosiasi merek dari produk UT. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik dan menganggap penting untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Merek, Iklan, Kualitas Merek dan Asosiasi Merek Produk UT. David Ogilvy sependapat dengan teori klasik Gardner dan Levy dalam Jones dan Bonevac (2013) berpendapat bahwa citra itu yang memperkuat merek. Citra digambarkan sebagai suatu lambang, symbol dsb.

Pengertian Merek

Menurut Keller (2003) dalam Tjiptono (2005:19), merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa. Sedangkan menurut Durianto, *et al.* (2004:1), merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol disain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Menurut Kum *et al* (2012) merek merupakan komponen penting dalam meningkatkan kategori produk dan memperluas pasar, serta merek yang baik dan kuat akan meningkatkan penjualan.

Sejarah Merek

Kata “*brand*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*brand*” dalam bahasa Old Norse, yang berarti “*to burn*” yang mengacu pada pengidentifikasian ternak (Blackett, *et al.* 2003) dalam Tjiptono (2005:23). Pada waktu itu, pemilik peternakan menggunakan “cap” khusus untuk menandai ternak miliknya dan membedakannya dari ternak milik orang lain. Melalui cap seperti ini konsumen menjadi lebih mudah mengidentifikasi ternak-ternak berkualitas yang ditawarkan oleh para peternak bereputasi bagus.

Pengertian periklanan (*advertising*), menurut Ralph dan Alexander dalam Morissan (2010: 17) dapat didefinisikan sebagai “*any paid form of nonpersonal communication about an organization, product, service, or idea by an identified sponsor*”. Sedangkan menurut Tjiptono (1997: 226), iklan adalah komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan manfaat suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan terdapat suasana yang akan merubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Iklan dapat ditujukan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi pelanggan, evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna kepercayaan, sikap dan citra yang berkaitan dengan produk dan merek (Peter & Olson, 2000: 181).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei yaitu dengan memberikan kuesioner langsung kepada responden atau

sumber data sebagai dasar untuk analisis dan pengambilan kesimpulan atas hasil penelitian. Desain penelitian yang dilakukan dengan metode survei lapangan, sebelum kuesioner disebarkan, peneliti melakukan uji pendahuluan yaitu dengan melakukan studi pilot. Studi pilot atau pretest, dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk mengisi kuesioner secara konsisten, kemudian melakukan ricek instrumen. Sehingga dapat membantu peneliti dan dalam meninjau kembali untuk dan memperbaiki kuesioner sesuai dengan apa yang dipahami oleh responden (Su *et al.*, 2007). Kuesioner diberikan langsung ketika proses pembelajaran berlangsung kepada mahasiswa UT dari berbagai angkatan semester dan dari berbagai bidang ilmu untuk program sarjana dan pascasarjana. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 2 tahap (dua kali) untuk mengantisipasi isian yang tidak kembali / tidak memenuhi syarat penelitian, peneliti melakukan penyebaran kuesioner tahap II. Untuk mendukung data primer, peneliti melakukan studi literatur /sebagai data sekunder media internet, jurnal-jurnal, buku, dokumen serta sumber-sumber informasi lain yang mendukung tema penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat analisis Lisrel, yang mana alat bantu analisis ini mampu memberikan informasi yang cukup berarti dalam penelitian ini seperti untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari suatu indikator variabel. Populasi dalam penelitian ini diambil dari sejumlah mahasiswa yang berada di wilayah/ area Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa UT yang berada seputar lingkungan UPBJJ-UT se-Jabodetabek. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang digunakan oleh peneliti untuk menggeneralisasi populasi (Cooper & Schindler, 2001). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling* yaitu berdasarkan kemudahan saja. Adapun sampel yang digunakan adalah 150 orang sebagai responden.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan kuesioner langsung kepada responden yang dimaksud. Kuesioner disebar sebanyak 150 kuesioner kepada mahasiswa yang berada di area UPBJJ-UT se-Jabodetabek. Setiap variabel akan diukur dengan item-item pernyataan yang berbeda dengan menggunakan skala pengukuran 1 sampai 5 point *Likert Scale* yaitu: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju dan 5 = sangat setuju.

Tabel 1. Deskripsi Responden

Apabila dilihat dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa responden lebih menekankan pada merek dibanding iklan, kualitas merek dan asosiasi merek, hal ini dapat dilihat besaran angka yang menjawab kurang setuju (KS sebesar 13,8%). Sehingga dapat diartikan bahwa UT dalam meningkatkan promosi dapat lebih menekankan pada merek (*brand*). Namun sebaliknya bahwa UT sangat minim melakukan promosi melalui iklan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya responden yang menjawab Kurang Setuju (KS) yaitu sebesar 20,1. Sehingga kedepan UT harus lebih menekankan juga pada promosi melalui iklan baik melalui media cetak maupun media non cetak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel tentang korelasi dan komunalitas variabel di bawah ini:

Tabel 2. Korelasi dan Komunalitas Variabel

VARIABEL	STS	TS	KS	S	SS
Merk (1)	1,1	2,2	13,8	62,5	20,4
MR1	1,7	3,3	8,3	57,9	28,9
MR2	1,7	0,8	12,4	57,9	27,3
MR3	0,0	2,5	14,9	72,7	9,9
MR4	0,0	3,3	26,4	66,1	4,1
MR5	1,7	1,7	10,7	63,6	22,3
MR6	1,7	1,7	9,9	57,0	29,8
Iklan (4)	0,8	2,8	20,1	59,5	16,8
IK7	0,8	3,3	22,3	62,0	11,6
IK8	1,7	2,5	24,0	54,5	17,4
IK9	0,0	2,5	14,0	62,0	21,5
Kualitas (2)	0,9	2,5	15,7	65,4	15,5
KM10	1,7	0,8	4,1	67,8	25,6
KM11	1,7	1,7	21,5	60,3	14,9
KM12	0,0	4,1	19,0	62,8	14,0
KM13	0,8	2,5	15,7	67,8	13,2
KM14	2,5	0,0	13,2	66,1	18,2
KM15	0,0	4,1	22,3	64,5	9,1

KM16	0,0	4,1	14,0	68,6	13,2
Asosiasi (3)	1,2	1,5	16,5	65,1	15,7
AM17	0,8	2,5	9,9	60,3	26,4
AM18	1,7	0,0	18,2	66,1	14,0
AM19	0,0	3,3	26,4	62,0	8,3
AM20	1,7	0,0	19,8	68,6	9,9
AM21	1,7	1,7	8,3	68,6	19,8
General	1 0	2 2	16 0	63 7	17 1

**Korelasi variabel
dengan Komponen
Persepsi ***

No.	Kode	Variabel	1	2	3	4	Komunalitas
1	MR1		0,574	0,665	-	-	0,884
2	MR2		0,704	0,528	-	-	0,851
3	MR3		0,787	-	-	-	0,674
4	MR4		0,697	-	-	-	0,596
5	MR5		0,803	-	-	-	0,764
6	MR6		0,66	0,428	-	-	0,721
7	IK7		0,803	-	-	-	0,774
8	IK8		0,522	-	-	0,488	0,59
9	IK9		0,634	-	-	-	0,529
10	KM10		0,755	-	-	-	0,673
11	KM11		0,728	-	-	-	0,685
12	KM12		0,792	-	-	-	0,738
13	KM13		0,795	-	-	-	0,79
14	KM14		0,882	-	-	-	0,867
15	KM15		0,723	-	-	-	0,733
16	KM16		0,851	-	-	0,404	0,908
17	AM17		0,824	-	-	-	0,793
18	AM18		0,861	-	-	-	0,872
19	AM19		0,766	-	0,522	-	0,869
20	AM20		0,784	-	-	-	0,726
21	AM21		0,847	-	-	-	
	%		57,4	8,1	5,32	4,7	
	Cum. %		57,4	65,49	70,81	75,51	

Sumber : Lampiran
PCA

Keterangan: * koefisien korelasi ≥ 0.4 (Wichern, 1982)

Untuk tabel di atas adalah tabel validitas dan reliabilitas variabel. Dari tabel 4.5 di atas diindikasikan bahwa seluruh pernyataan terkait dengan empat komponen/faktor adalah valid. Hal ini tercermin dari setiap faktor loading korelasi variabel dengan komponen/faktor persepsi yaitu diatas 0.4. Peneliti menggunakan *factor loading* ≥ 0.4 berdasarkan saran dari Wichern (1982) yang berpendapat bahwa jika nilai mutlak *factor loading* suatu variabel/komponen kurang dari 0.40 maka variabel/komponen tersebut bisa dibuang. Sehingga dapat dikatakan untuk seluruh korelasi variabel dengan komponen persepsi dinyatakan valid. Sedangkan untuk menguji tingkat reliabilitas data, peneliti menggunakan tingkat komunalitas, yang mana kuadrat dari nilai validitas korelasi variabel dengan komponen persepsi yaitu 0.4 dikuadratkan sehingga menghasilkan angka sebesar 0.16 yang artinya apabila pernyataan ≥ 0.16 data dapat dikatakan reliabel. Hal ini terlihat jelas bahwa tingkat komunalitas untuk seluruh pernyataan sebesar ≥ 0.16 , sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan adalah reliable

Tabel 3. Statistik Deskripsi Variabel Komponen dan Tingkat Persepsi

No.	Variabel Komponen	Mean	St. Dev.	Skewness	Kurtosis	Minimum	Maximum
1	Kualitas Merek	14,398	2,206	-1,158	4,823	4,474	18,803
2	Merek	0,968	0,899	-0,717	5,481	-3,552	4,102
3	Asosiasi Merek	-1,544	0,749	0,832	4,106	-3,405	2,062
4	Iklan	-0,768	0,747	-0,528	0,328	-2,879	
<u>0,91</u>							
	Persepsi	10,891	1,677	-1,11	4,743	3,399	
<u>14,289</u>							

Untuk lebih jelasnya bahwa struktur korelasi variabel menghasilkan 4 (empat)

komponen/faktor utama dengan variansi data seluruhnya 75,5%, yaitu:

1. Komponen 1 adalah faktor tingkat kualitas merek (variansi data 57,4%),
2. Komponen 2 adalah faktor keadaan merek (variansi data 65,5%),
3. Komponen 3 adalah faktor tingkat asosiasi merek (variansi data 70,8%)

4. Komponen 4 adalah faktor keadaan iklan (variansi data 75,5%).

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa faktor tingkat kualitas merek, merek dan asosiasi merek memiliki nilai yang selisihnya tidak jauh, ini menandakan bahwa antara kualitas merek, merek dan asosiasi merek sulit untuk dipahami oleh responden. Karena mereka beranggapan bahwa ketiga faktor/komponen utama tersebut hampir sama maknanya dan mereka sulit untuk membedakannya.

Berikut tabel statistik deskripsi variabel komponen dan tingkat persepsi di bawah ini:

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat persepsi untuk keempat komponen di atas adalah 10,891, hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Rata-Rata Jumlah Pernyataan

		Rata-rata jumlah pernyataan					
TPersepsi	Kategori	N	ST	TS	K	S	SS
1	< 10	25	1,0	2,0	7,8	9,5	0,7
2	10 - 12	75	0,0	0,1	2,7	16,2	2,0
3	> 12	21	0,0	0,0	0,3	7,9	12,7

Dari tabel. 4 menunjukkan bahwa pada kelompok responden dengan tingkat persepsi rendah (25 orang responden/< 10), mereka menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS) terhadap 1 pernyataan, 2 pernyataan Tidak Setuju (ST), 7 – 8 pernyataan Kurang Setuju (KS), 9 – 10 pernyataan Setuju (S), dan 1 pernyataan Sangat Setuju (SS). Untuk kelompok sekitar rata- rata (kelompok persepsi sedang, 75 orang/10 -12), respon Kurang Setuju (KS) terjadi pada 2

- 3 pernyataan, 16 pernyataan Setuju (S), dan 2 pernyataan Sangat Setuju (SS) dan tidak ada

item pernyataan yang direspon Sangat Tidak Setuju (STS) dan Tidak Setuju (TS). Sedangkan pada kelompok persepsi tinggi (21 orang responden/>12) umumnya menjawab Sangat Setuju (SS) pada sebagian besar pernyataan (12 – 13 pernyataan), dan 7 -8 pernyataan dijawab Setuju (S).

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Terbuka (UT) Lokasi UT di area Pondok Cabe, Pamulang tepatnya di jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang dengan kodepos 15418, Tangerang Selatan dekat dengan kantor walikota Tangerang Selatan, dekat diantara pemukiman penduduk dan UT sampai tahun 2013 telah memiliki 37 Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) di seluruh wilayah Indonesia. UT telah menerima akreditasi dari lembaga Internasional Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh atau *International Council for Open and Distance Education* (ICDE).

Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Komponen Merek

VARIABEL	STS	TS	KS	S	SS
Merk (1)	1,1	2,2	13,8	62,5	20,4
MR1	1,7	3,3	8,3	57,9	28,9
MR2	1,7	0,8	12,4	57,9	27,3
MR3	0,0	2,5	14,9	72,7	9,9
MR4	0,0	3,3	26,4	66,1	4,1
MR5	1,7	1,7	10,7	63,6	22,3
MR6	1,7	1,7	9,9	57,0	29,8

Berdasarkan kuesioner yang disebar diperoleh 139 kuesioner dari responden, namun yang valid diperoleh 121 kuesioner.

Dari tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk komponen merek diketahui item pernyataan 1 yaitu merek UT mudah diucapkan oleh saya dan orang lain pada umumnya. Artinya bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui UT memang dari merek yaitu perguruan tinggi jarak jauh yang memiliki akreditasi internasional dan mereka mengetahui logo UT serta mudah untuk diucapkan, hal ini ditunjukkan dengan responden yang menyatakan kurang setuju sebesar 8,3% ini artinya bahwa semakin rendah responden yang menjawab kurang setuju akan berakibat pada besarnya responden dalam menjawab setuju dan sangat setuju. Kemudian dilanjutkan dengan item pernyataan poin 6 (Saya mengenal nama dan logo Produk UT) sebesar 9,9% responden menyatakan kurang setuju, artinya nama dan logo produk UT sudah sangat familiar dan kekhasan produk UT telah memberikan image yang unik. Misal keunikan yang dimaksud adalah modul UT yang memiliki tahapan-tahapan khusus yang berbeda dengan buku-buku pada umumnya baik dari sisi formating, kompetensi yang ingin dicapai dan sebagainya, kesemuanya itu ada di modul UT.

Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Komponen Kualitas Merek

Kualitas					
Merek (2)	0,9	2,5	15,7	65,4	15,5
KM10	1,7	0,8	4,1	67,8	25,6
KM11	1,7	1,7	21,5	60,3	14,9
KM12	0,0	4,1	19,0	62,8	14,0
KM13	0,8	2,5	15,7	67,8	13,2
KM14	2,5	0,0	13,2	66,1	18,2
KM15	0,0	4,1	22,3	64,5	9,1
KM16	0,0	4,1	14,0	68,6	13,2

Pada tabel 6 di atas dapat dijelaskan bahwa responden menyatakan kurang setuju sebesar 4,1%, ini artinya bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (67,8%) dan sangat setuju (25,6%) untuk item pernyataan “saya mengenal produk UT sebagai sebuah produk yang memiliki kualitas baik.” Kemudian dilanjutkan dengan item pernyataan kualitas merek yang ke-14 yaitu UT memiliki reputasi yang baik dalam memproduksi dan memasarkan produk UT, responden menyatakan setuju sebesar 66,1% dan sangat

setuju sebesar 18,2%. Hal ini membuktikan bahwa reputasi UT tidak hanya sebagai perguruan tinggi negeri jarak jauh namun lebih dari itu UT sebagai sebuah perguruan tinggi yang mampu mengembangkan dan memasarkan layanan produk UT dengan baik.

Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Komponen Asosiasi Merek

Asosiasi (3)	1,2	1,5	16,5	65,1	15,7
AM17	0,8	2,5	9,9	60,3	26,4
AM18	1,7	0,0	18,2	66,1	14,0
AM19	0,0	3,3	26,4	62,0	8,3
AM20	1,7	0,0	19,8	68,6	9,9
AM21	1,7	1,7	8,3	68,6	19,8

Pada tabel deskripsi responden berdasarkan asosiasi merek diketahui bahwa item pernyataan asosiasi merek ke-21 yaitu “saya meyakini bahwa UT memiliki SDM yang profesional dalam mengelola produk UT tersebut. Responden yang menyatakan kurang setuju sebesar 8,3%, setuju 68,6% dan sangat setuju 19,8%, artinya bahwa responden telah yakin bahwa SDM UT profesional dalam mengelola produk UT.

Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Komponen Iklan

Iklan (4)	0,8	2,8	20,1	59,5	16,8
IK7	0,8	3,3	22,3	62,0	11,6
IK8	1,7	2,5	24,0	54,5	17,4
IK9	0,0	2,5	14,0	62,0	21,5

Pada tabel 8 dapat dijelaskan bahwa item pernyataan ke-9 yaitu pemberitaan tentang Produk UT selalu saya dapatkan dari *website* UT, sebagian besar responden menyatakan setuju (62% dan sangat setuju (21,5%). Dari hasil tersebut mencerminkan bahwa responden mengetahui produk UT dari *website* UT.

Tabel 9. Korelasi dan Komunalitas Variabel

		Korelasi variabel dengan					
		Komponen Persepsi					
		*					
No.	Kode	Variabel	1	2	3	4	Komunalitas
1	MR1		0,574	0,665	-	-	0,884
2	MR2		0,704	0,528	-	-	0,851
3	MR3		0,787	-	-	-	0,674
4	MR4		0,697	-	-	-	0,596
5	MR5		0,803	-	-	-	0,764
6	MR6		0,66	0,428	-	-	0,721
7	IK7		0,803	-	-	-	0,774
8	IK8		0,522	-	-	0,488	0,59
9	IK9		0,634	-	-	-	0,529
10	KM10		0,755	-	-	-	0,673
11	KM11		0,728	-	-	-	0,685
12	KM12		0,792	-	-	-	0,738
13	KM13		0,795	-	-	-	0,79
14	KM14		0,882	-	-	-	0,867
15	KM15		0,723	-	-	-	0,733
16	KM16		0,851	-	-	0,404	0,908
17	AM17		0,824	-	-	-	0,793
18	AM18		0,861	-	-	-	0,872
19	AM19		0,766	-	0,522	-	0,869
20	AM20		0,784	-	-	-	0,726
21	AM21		0,847	-	-	-	
	%		57,4	8,1	5,32	4,7	
	Cum. %		57,4	65,49	70,81	75,51	

Sumber : Lampiran PCA

Keterangan: * koefisien korelasi ≥ 0.4 (Wichern, 1982)

Dari tabel 9 di atas dapat dijelaskan bahwa korelasi variabel kualitas merek pada item pernyataan kualitas merek ke-14 yaitu UT memiliki reputasi yang baik dalam memproduksi dan memasarkan produk UT menghasilkan nilai sebesar 0,882, ini artinya bahwa korelasi variabel kualitas merek dengan komponen persepsi merek hampir sama, responden sulit untuk membedakan antara merek dan kualitas merek dikarenakan memiliki makna yang hampir sama. Selanjutnya korelasi variabel merek pada item pernyataan 1 dengan komponen persepsi iklan sebesar 0,665 yang artinya $> 0,40$ dan dikatakan valid. Jumlah mahasiswa

akan tercapai apabila UT memperhatikan media iklan dengan mengenalkan merek UT. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal UT sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan konsep belajar jarak jauh.

Korelasi variabel asosiasi merek dengan komponen persepsi asosiasi merek itu sendiri memiliki nilai 0,522. Responden beranggapan bahwa produk UT kuat sehingga tidak mudah rusak dan ini membuktikan bahwa responden sudah sangat mengenal produk UT sebagai produk berkualitas tinggi dan ini telah dibuktikan dengan validnya nilai pada komponen ini. Lebih lanjut responden menyatakan bahwa korelasi variabel iklan terhadap komponen persepsi iklan itu sendiri sebesar 0,488 khususnya pada item pernyataan bahwa UT melakukan promosi langsung melalui pameran, festival, TV, disponsori, sosialisasi dan promosi. Sebagian besar responden mengetahui UT dari pameran, festival TV, disponsori, sosialisasi dan promosi. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa promosi UT dapat juga disebabkan karena “word of mouth” (WOM) yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah mahasiswa untuk masuk ke UT.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UT harus lebih menekankan pada merek, karena responden sangat mengenal merek produk UT. Sehingga hal ini sangat membantu UT dalam melakukan sosialisasi dan promosi, hal ini tercermin bahwa 13,8% responden menyatakan Kurang Setuju yang secara otomatis mempengaruhi besarnya responden yang menjawab Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). UT harus menyadari bahwa meningkatkan kualitas layanan melalui merek, iklan, kualitas merek dan asosiasi merek terhadap produk UT tidak terbatas pada wacana belaka namun dapat mendorong terciptanya brand lebih kuat yang mengacu pada konsep legacy marketing sustainable enterprise, dimana positioning yang bagus sebaiknya mesti didukung difrensiasi, layanan akademik dan administrasi yang lebih baik akan mendorong peningkatan jumlah mahasiswa untuk masuk ke UT melalui “word of mouth” (WOM).

F. DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swasta. 2007. *Manajemen Pemasaran Modern*. Liberty Yogyakarta : Yogyakarta
- Buchori Alma. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Manajemen Jasa*. Edisi Revisi. Alfabeta: Bandung.
- Buchory dan Djaslim Saladin. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Linda Karya : Bandung.
- Johnson, R.A. & Wichern, D.W. 1982. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Prentice Jones, Casey and Bonevac, Daniel (2013). *An evolved definition of the Term 'Brand': Why Branding Has a Branding Problem* Hall, Inc. New Jersey.
- Kasali. 2007. *Manajemen Periklanan*. PT Pustaka Utama Grafiti : Jakarta
- Kertajajaya Taufik 2009. *KOMPAS 100 Corporate Marketing Cases*: Gramedia Pustaka Utama
- Kotler. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Edisi-12 jilid 1 PT. Indeks : Indonesia
- Kum, Doreen; Bergkvist, Lars; Lee, YihHwai; Leong, SiewMeng.(2012). Brand personality inference: The moderating role of product meaning. *Journal of Marketing Management*. Vol. 28 Issue 11/12, p1291-1304. 14p.
- Milberg, Sandra J, Goodstein, Ronald C, Sinn, Francisca, Cuneo, Andres, and Epstein, Leonardo D. (2013). Call back the jury: Reinvestigating the effects of fit and parent brand quality in determining brand extension success. *Journal of Marketing Management*. Vol. 29, No. 3-4, pp. 374-390.
- Nurbiyati, Titiek dan Mahmud Maachfoed. 2005. *Manajemen Pemasaran Kontemporer*. Kayon : Yogyakarta
- Prasetijo. 2005. *Perilaku konsumen*. Andi : Yogyakarta
- Sutisna. 2006. *Perilaku Konsumen & Komunikasi pemasaran*. Remaja Rsdakarya : Bandung
- Tjiptono. 2007. *Perilaku Konsumen*. Andi : Yogyakarta
- Umar. 2005. *Riset pemasaran dan Perilaku Konsumen*. PT.gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Menurut Kum et al (2012) merek merupakan komponen penting dalam meningkatkan kategori produk dan memperluas pasar, serta merek yang baik dan kuat akan meningkatkan penjualan.

Kum, Doreen; Bergkvist, Lars; Lee, YihHwai; Leong, SiewMeng.(2012). **Brand personality inference: The moderating role of product meaning.** *Journal of Marketing Management*. Vol. 28 Issue 11/12, p1291-1304. 14p.

David Ogilvy sependapat dengan teori klasiknya Gardner dan Levy dalam Jones dan Bonevac (2013) berpendapat bahwa citra itu yang memperkuat merek. Citra digambarkan sebagai suatu lambang, symbol dsb.

Jones, Casey and Bonevac, Daniel (2013). An evolved definition of the Term 'Brand': Why Branding Has a Branding Problem. *Journal of Brand Strategy*. Vol 2. NO. 2. 112-120.

Menurut Milberg et al (2013) yang mengatakan bahwa kualitas merek merupakan kunci penentu keberhasilan suatu merek produk. Selain itu, kualitas merek akan mampu mengevaluasi berhasil atau tidaknya suatu merek produk di pasar.

Milberg, Sandra J, Goodstein, Ronald C, Sinn, Francisca, Cuneo, Andres, and Epstein, Leonardo D. (2013). Call back the jury: Reinvestigating the effects of fit and parent brand quality in determining brand extension success. *Journal of Marketing Management*. Vol. 29, No. 3-4, pp. 374-390.

RPSEP-23

ANALISIS STRATEGI PROMOSI UPBJJ-UT DENPASAR

Sudrajat, sudrajat@ut.ac.id

Hendrin Hariati Sawitri

Heri Wahyudi

UPBJJ-UT Denpasar

Abstract

Currently the number of Teacher Program students decreased because the teachers already certified almost all scholars, so the Universitas Terbuka should be able to increase the number of students in the Non-Teacher Program namely FISIP, FEKON and FMIPA. So we need a promotion to target prospective new students of Non-Teacher Program. In order for a promotion strategy that will be done UPBJJ-UT Denpasar can run effectively it is necessary to know information from people that they know the Universitas Terbuka through what media information. Thus it is necessary to do some research to get information from people that they know or at least know the Universitas Terbuka from what media. Data obtained from this research analyzed and interpreted to obtain an effective promotional strategies in reaching recruitment target of new students. The study was limited to respondents new students of Non-Teacher Program because the student has different characteristics to the students of Teacher Program. Based on data from research results, the promotion strategies undertaken UPBJJ-UT Denpasar preferably through the provision of good service, satisfaction and excellence to students, while another promotion strategies such as through newspapers, radio broadcasts, television broadcasts, brochures and internet are necessary to be done to socialize and promote the Universitas Terbuka to the wider community.

Key words: *Promotion, Promotion Strategy, Non-Teacher Program*

Abstrak

Saat ini jumlah mahasiswa Program Guru mengalami penurunan karena para guru hampir semua sudah berijazah sarjana, sehingga Universitas Terbuka harus dapat meningkatkan jumlah mahasiswa Program Non-Guru yaitu FISIP, FEKON dan FMIPA. Perlu adanya promosi untuk mencapai target mahasiswa baru Program Non-Guru. Agar supaya strategi promosi yang akan dilakukan UPBJJ-UT Denpasar dapat berjalan dengan efektif maka perlu mengetahui informasi dari masyarakat mengenal atau setidaknya mengetahui Universitas Terbuka melalui media apa. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan

strategi promosi yang efektif dalam mencapai target rekrutmen mahasiswa baru. Penelitian dibatasi dengan responden adalah mahasiswa baru Program Non-Guru karena mahasiswa tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mahasiswa Program Guru. Berdasarkan data dari hasil penelitian strategi promosi dilakukan yang UPBJJ-UT Denpasar sebaiknya melalui memberikan pelayanan yang baik, memuaskan dan prima kepada mahasiswa, sedangkan strategi promosi melalui surat kabar, radio, televisi, brosur dan internet perlu dilakukan untuk mensosialisasikan dan mempromosikan Universitas Terbuka kepada masyarakat luas.

Kata-kata kunci: Promosi, Strategi Promosi, Program Non-Guru

Universitas Terbuka telah berkiprah lebih dari 30 tahun dalam dunia pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Di usia yang cukup lama ini Universitas Terbuka telah dikenal masyarakat Indonesia sampai pelosok tanah air. Hal ini dikarenakan daya jangkau Universitas Terbuka yang luas. Universitas Terbuka didirikan dengan tujuan diantaranya memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan tinggi dan memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka yang bekerja, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi konvensional.

Dengan sistem belajar jarak jauh dan terbuka, Universitas Terbuka mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan pendidikan tinggi konvensional. Pada awal berdirinya Universitas Terbuka memberikan kesempatan pada para guru sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah umum dan masyarakat umum untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan profesionalisme. Seiring dengan kemajuan dan tuntutan di dunia pendidikan dan adanya sertifikasi guru dan dosen yang mensyaratkan guru harus sarjana, maka banyak guru sekolah dasar dan guru anak usia dini yang mengikuti Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) sehingga sampai saat ini jumlah mahasiswa UT yang terbanyak di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sedangkan jumlah mahasiswa di FISIP, FEKON dan FMIPA masih jauh di bawah FKIP.

Untuk tahun-tahun mendatang jumlah mahasiswa FKIP mengalami penurunan karena para guru hampir semua sudah berijazah sarjana, sehingga Universitas Terbuka harus dapat meningkatkan jumlah mahasiswanya pada Program Non-Guru yaitu FISIP, FEKON dan MIPA. Pada tahun 2014 ditargetkan jumlah mahasiswa Program Non-Guru berjumlah

150.000 mahasiswa. Strategi Universitas Terbuka untuk meraih jumlah mahasiswa tersebut adalah dengan membuka konsentrasi atau bidang minat pada program studi di FISIP, FEKON dan FMIPA. Namun disamping membuka konsentrasi atau bidang minat perlu juga adanya suatu promosi kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar lebih mengetahui dan mengenal Universitas Terbuka.

Saat ini Universitas Terbuka mempunyai 38 Unit Program Belajar Jarak Jauh yang berada di setiap propinsi dan kota besar di Indonesia. Hal ini membuat daya jangkauan yang luas untuk melakukan promosi dalam rangka menjaring mahasiswa baru Program Non-Guru. Namun setiap daerah tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menerima informasi, sehingga perlu dicari strategi promosi yang tepat dan efektif. Di UPBJJ-UT Denpasar juga dirasakan bahwa saat ini jumlah mahasiswa FKIP mengalami penurunan dikarenakan para guru hampir semua sudah pendidikannya berjenjang sarjana. Sehingga perlu adanya promosi untuk merekrut calon mahasiswa baru Program Non-Guru.

Agar strategi promosi yang dilakukan UPBJJ-UT Denpasar dapat berjalan secara efektif maka perlu mengetahui informasi dari masyarakat bahwa mereka mengenal Universitas Terbuka melalui media informasi apa. UPBJJ-UT Denpasar melakukan promosi melalui surat kabar, radio, televisi, spanduk dan brosur. Namun promosi melalui media tersebut perlu diteliti agar didapatkan strategi promosi yang efektif. Universitas Terbuka juga mempunyai web-site internet yang tentunya masyarakat juga dapat mengenal Universitas Terbuka melalui web-site UT. Disamping itu masyarakat juga mengenal UT dapat melalui masyarakat lain (*word of mouth*).

Dengan demikian kiranya perlu dilakukan suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka mengenal atau setidaknya mengetahui Universitas Terbuka dari media apa. Informasi/data yang didapat dari penelitian ini dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan strategi promosi yang efektif dalam mencapai target rekrutmen mahasiswa baru. Penelitian ini dibatasi dengan responden adalah mahasiswa baru Program Non-Guru (FISIP, FEKON dan FMIPA) karena mahasiswa tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mahasiswa Program Guru (FKIP).

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa saat ini Universitas Terbuka perlu meningkatkan jumlah mahasiswa Program Non-Guru. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu

dilakukan suatu sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Sosialisasi dan promosi ini sebaiknya dilakukan secara tepat dan efektif agar sesuai target. Promosi dapat dilakukan secara cetak, audio, video-visual, internet maupun memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa. Dari permasalahan ini maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi/data dari mahasiswa untuk dilakukan analisis terhadap strategi promosi yang dilakukan UPBJJ-UT Denpasar

Dari pembahasan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain: untuk memperoleh informasi dari mahasiswa baru Program Non-Guru bahwa mereka mengenal atau mengetahui pertama kali Universitas Terbuka melalui media apa, untuk memperoleh pendapat/saran dari mahasiswa baru Program Non-Guru tentang media yang tepat untuk promosi yang dilakukan UPBJJ-UT Denpasar dan untuk menganalisis strategi promosi yang telah dilakukan dan membantu menentukan strategi promosi yang akan dilakukan.

Strategi Promosi

Dalam manajemen pemasaran, promosi tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi *profit* saja tetapi juga dapat dilakukan oleh organisasi yang *not for profit* semisal lembaga pendidikan. Universitas Terbuka dengan karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi konvensional, maka *Brand Image* UT sudah melekat pada masyarakat, namun informasi yang lebih detail perlu disampaikan melalui media promosi. Menurut Belch dan Belch (2003) hampir setiap orang di dunia modern ini dipengaruhi oleh periklanan dan bentuk promosi lain sehingga organisasi baik sektor pemerintahan maupun swasta harus belajar kemampuan secara efisien dan efektif terhadap target audiennya adalah faktor kritis kesuksesannya.

Saat ini media promosi sangat beragam seiring dengan kemajuan jaman, dulu iklan hanya melalui surat kabar saja sekarang sudah era internet. Keberagaman media promosi ada media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, spanduk dan lain sebagainya maupun media non cetak seperti radio, televisi dan internet perlu disikapi secara efisien dan efektif agar tercapai target yang diharapkan. Efisien ini terkait dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan dan input yang diperoleh sedangkan efektif ini terkait dengan sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Kotler (2003) promosi adalah bagian dari komunikasi yang mengandung pesan perusahaan dirancang untuk membangkitkan kesadaran, minat, dan membeli berbagai produk dan jasa. Perusahaan menggunakan periklanan, promosi penjualan, tenaga penjualan, dan *public relation* menyebarkan pesan yang dirancang untuk menarik perhatian dan minat.

Jenis-jenis Media Promosi

Saat ini media untuk melakukan promosi sangat banyak jenisnya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sehingga untuk menentukan media mana yang akan digunakan untuk promosi harus dipertimbangkan dengan seksama. Berikut ini adalah media yang umum digunakan untuk promosi

1. Surat Kabar

Surat kabar telah lama digunakan sebagai media untuk mengiklankan (*advertising*) suatu produk atau jasa. Surat kabar di Indonesia sangat banyak baik yang bersifat nasional maupun lokal. Organisasi baik yang bersifat *profit* maupun *not for profit* banyak yang memanfaatkan media ini untuk mempromosikan produk atau jasanya. Kelebihan surat kabar mempunyai daya jangkauan yang luas untuk sampai kepada masyarakat, dapat dibaca ulang dan sebagian besar masyarakat membaca surat kabar. Namun kekurangannya adalah biaya yang relatif mahal apabila ditayangkan atau ditampilkan dengan frekuensi yang sering.

2. Televisi

Saat ini telah banyak stasiun televisi baik yang bersifat nasional maupun lokal. Banyak juga organisasi yang memanfaatkan media ini untuk promosi. Peralatan televisi tidaklah menjadi barang yang mahal harganya sehingga hampir semua rumah tangga mempunyai peralatan televisi. Televisi juga mempunyai daya jangkauan dalam menyampaikan informasi yang luas. Biaya untuk promosi di televisi lebih mahal dibanding dengan surat kabar. Kelebihan lain media ini adalah informasi yang disampaikan dapat dilihat, didengar dan dibaca.

3. Radio

Radio mempunyai peran penting dalam menyebarkan informasi, pemanfaatan radio telah lama digunakan masyarakat Indonesia sejak jaman kemerdekaan. Saat ini stasiun radio telah banyak berdiri di berbagai daerah. Umumnya siaran radio tersegmentasi

pemirsanya (*audien*), sehingga dalam melakukan promosi melalui radio harus mengenal radio tersebut sasarannya segmen mana. Daya jangkau radio dalam menyampaikan informasi juga luas namun tidak seluas televisi. Dilihat dari segi biaya, promosi melalui radio lebih murah dibanding dengan televisi. Namun kekurangan media radio adalah informasinya hanya dapat didengar saja dan waktu siarnya tertentu saja.

4. Brosur

Brosur merupakan media cetak untuk menyampaikan informasi. Brosur dapat dibuat berdasarkan keinginan pengguna (*customize*). Saat ini teknologi desain, cetak (*printing*), dan fotografi sudah sangat maju. Brosur-brosur yang sangat menarik dan informatif dapat dibuat dengan cepat. Kelebihan brosur ini informasinya dapat dibuat berdasarkan *customize*, dapat dibuat dengan tampilan yang menarik dan dapat disimpan. Namun kekurangannya daya jangkau untuk sampai kepada masyarakat sangat terbatas karena brosur harus disebarakan kepada sasaran dengan tepat.

5. Internet

Pada era teknologi digital dan informasi saat ini internet bukanlah hal yang asing lagi. Menurut Berthon *et al.* (1996) dalam Lin, C.T. dan Hsu, P.F. (2003) karakteristik internet dapat dengan mudah diakses, biaya pengadaan internet relatif murah, menjangkau secara global, tidak tergantung waktu, dan interaktif. Internet dapat diakses melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Bila kita membuka internet maka seolah-olah dunia berada dalam genggamannya kita karena segala informasi ada di internet. Pemanfaatan internet tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja tetapi dapat juga dijadikan media untuk melakukan transaksi bisnis *online*, seperti toko buku online, supermaket online dan sebagainya. Internet juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran seperti adanya kursus bahasa Inggris online, tutorial online dan sebagainya.

Kelebihan teknologi internet adalah informasi yang kita sampaikan dapat beraneka ragam dan banyak, dapat dibuat berdasarkan desain yang menarik, dapat diakses kapan saja dan dimana saja, mempunyai daya jangkau yang sangat luas melebihi surat kabar, radio, brosur dan televisi dan informasinya dapat disimpan dalam bentuk digital atau dicetak. Internet juga memiliki kekurangannya misalnya masih banyak

masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi komputer dan internet, jaringan internet belum sepihak menjangkau seluruh daerah terutama daerah yang terpencil, biaya untuk pengadaan peralatan komputer dan internet cukup besar sehingga tidak semua rumah tangga mempunyai komputer beserta jaringan internetnya dan sebagainya.

6. *Word of Mouth*

Informasi dapat juga disampaikan dari orang ke orang melalui informasi perkataannya (*word of mouth*). Informasi jenis ini sebenarnya dapat dikatakan paling efisien dan efektif. Untuk dapat dijadikan media penyampai informasi yang baik dan benar maka kita harus memberikan pelayanan prima kepada mereka sehingga mereka memberikan informasi yang baik dan benar kepada orang lain. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk dapat memberikan pelayanan prima dan kepuasan kepada pelanggan.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah menggunakan survei yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden dengan instrumen kuesioner dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Sedangkan metode pengumpulan data sekunder adalah melihat dan mempelajari data/dokumen UPBJJ-UT Denpasar. Kuesioner dibagikan kepada responden mahasiswa baru masa registrasi 2011.1 dan 2011.2 pada saat orientasi studi mahasiswa baru (OSMB) Program Non-Guru karena pada saat OSMB sebagian besar mahasiswa baru berkumpul di UPBJJ-UT Denpasar. Kuesioner ini bersifat tertutup dan terbuka. Pernyataan yang bersifat tertutup membuat para responden hanya memilih jawaban yang tersedia yang dianggap sesuai. Sedangkan pernyataan yang bersifat terbuka membuat responden bebas memberikan tanggapan atau komentar yang berkenaan dengan tema penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung oleh tim peneliti.

Data penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari responden mahasiswa baru Program Non-Guru dengan menggunakan kuesioner yang telah didesain untuk mengetahui informasi dari sumber media apa responden tersebut mengenal pertama kali Universitas Terbuka. Disamping itu kuesioner penelitian ini didesain untuk mengetahui informasi dari responden sebaiknya menggunakan

media apa promosi yang dilakukan oleh UPBJJ-UT Denpasar dan pendapat dari responden apa yang sebaiknya dilakukan untuk promosi di UPBJJ-UT Denpasar, dieksplorasi lebih dalam. Data primer yang dianalisis adalah data primer masa registrasi 2011.1 dan 2011.2.

Sedangkan data sekunder adalah dokumen UPBJJ-UT Denpasar mengenai perencanaan dan realisasi program sosialisasi dan promosi serta data bagian registrasi mengenai jumlah mahasiswa Program Non-Guru yang berhasil direkrut. Dari data perencanaan dan realisasi program sosialisasi dan promosi dapat diketahui promosi apa saja yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan. Sedangkan data dari bagian registrasi dapat diketahui jumlah mahasiswa baru Program Non-Guru yang mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Dari data tersebut dapat dianalisis strategi promosi yang telah dilakukan dan dapat membantu menentukan strategi promosi yang akan dilakukan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari responden, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti rata-rata (*mean*), frekuensi dan sebagainya. Data statistik deskriptif ini diolah dengan menggunakan bantuan *software SPSS 17.0 for windows*. Dari data statistik ini peneliti mendiskripsikan, menginterpretasikan dan menjelaskan (eksplanasi) informasi yang diperoleh dari responden untuk diambil kesimpulan yang strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Tabel 1 di bawah ini terlihat responden dalam hal ini mahasiswa baru Program Non-Guru sebagian besar mengenal pertama kali Universitas Terbuka melalui teman responden. Data 2011.1 menunjukkan frekuensi paling besar, sebanyak 30 responden (54,6%) mengenal atau mengetahui pertama kali Universitas Terbuka melalui teman responden. Sedangkan data 2011.2 menunjukkan frekuensi paling besar, sebanyak 84 responden (69,4%) mengenal atau mengetahui pertama kali Universitas Terbuka sebelum responden memutuskan untuk menjadi mahasiswa baru melalui teman responden.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Responden Mengenal Pertama kali Universitas Terbuka Melalui Media

Media	Data 2011.1		Data 2011.2	
	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
Surat Kabar	8	14,5%	1	0,8%
Radio	1	1,9%	2	1,7%
Televisi	0	0%	7	5,8%
Brosur	8	14,5%	5	4,1%
Internet	8	14,5%	22	18,2%
Teman	30	54,6%	84	69,4%
Total	55	100%	121	100%

(Data primer diolah, 2011)

Data 2011.1 dan 2011.2 menunjukkan hal yang sama dengan data sekunder 2009.1 dan 2009.2 bahwa frekuensi terbesar responden mendapatkan informasi Universitas Terbuka melalui teman, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Responden Mendapat Informasi Universitas Terbuka Melalui Media

Media	Data 2009.1		Data 2009.2	
	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
Surat Kabar	4	11,1%	7	10,6%
Radio	0	0%	1	1,5%
Televisi	0	0%	1	1,5%
Brosur	1	2,8%	4	6,1%
Internet	5	13,9%	0	0%
Teman	26	72,2%	53	80,3%
Total	36	100%	66	100%

(Data sekunder, 2009)

Untuk mengetahui lebih dalam siapa saja yang dimaksud dengan teman tersebut, peneliti melakukan wawancara lebih dalam dengan beberapa responden yang menjawab mengenal pertama kali Universitas Terbuka melalui teman. Dari hasil wawancara tersebut yang dimaksud teman adalah teman sekantor dengan responden baik itu atasan responden

maupun teman sesama staf yang telah menjadi alumni maupun yang masih menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Responden mendapatkan informasi mengenai Universitas Terbuka dari teman responden tersebut hingga responden mengambil keputusan untuk menjadi mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Ada juga yang dimaksudkan teman adalah kerabat responden misalnya responden mengenal pertama kali Universitas Terbuka dari paman responden, kakak responden, adik adik responden dan sebagainya yang telah menjadi alumni maupun masih menjadi mahasiswa Universitas Terbuka.

Menurut ilmu manajemen pemasaran teman di sini dapat diartikan sebagai pelanggan aktual (*actual customer*) sedangkan responden yang mendapat informasi dari pelanggan aktual dapat diartikan sebagai pelanggan potensial (*potential customer*). Informasi dari pelanggan aktual ke pelanggan potensial dikenal sebagai *word of mouth (WOM)*. Menurut Helm dan Schlei (1998) *word of mouth* mengacu pada komunikasi verbal antara pelanggan aktual dengan pelanggan potensial. Komunikasi ini dapat positif dan negatif. Sedangkan menurut Ennew *et al.* (2000) *word of mouth* positif dipertimangkan oleh banyak pemasar sebagai komunikasi pemasaran tertua. Merupakan nilai yang muncul sebagai akibat pengaruhnya pada pembeli aktual dan potensial. Lebih spesifik, informasi positif dari pelanggan yang puas dapat meningkatkan pembelian, sementara informasi negatif dari pelanggan yang tidak puas dapat menurunkan pembelian. Dalam konteks lembaga pendidikan tinggi informasi positif dari pelanggan (mahasiswa) yang puas dapat meningkatkan rekrutmen mahasiswa baru, sedangkan informasi negatif dari pelanggan (mahasiswa) yang tidak puas dapat menurunkan rekrutmen mahasiswa baru.

Gremler dan Brown (1996) dalam Chaniotakis dan Lympelopoulos (2009) berpendapat bahwa pelanggan yang akan memberikan pesan *word of mouth* positif lebih memungkinkan menjadi pelanggan loyal, maka *word of mouth* mempunyai manfaat retensi dan akuisisi. Mahasiswa yang memberikan informasi *word of mouth* positif lebih memungkinkan menjadi mahasiswa yang loyal. Menurut review literatur, penelitian telah membuktikan pentingnya *word of mouth* pelanggan dalam pembentukan sikap (Bone, 1995). Senada dengan pendapat tersebut dalam penelitian ini teman responden yang telah memberikan informasi melalui *word of mouth* telah mengubah sikap responden hingga menjadi mahasiswa baru Universitas Terbuka.

Pelanggan (mahasiswa) yang loyal atau setia adalah pelanggan (mahasiswa) yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kepuasan mahasiswa karena adanya kualitas pelayanan. Banyak penelitian yang menyatakan kualitas pelayanan – kepuasan pelanggan – loyalitas pelanggan mempunyai hubungan positif dan signifikan. Menurut Macfarlane (2007) pelayanan mahasiswa terletak pada dasar piramida pelayanan. Ini berarti memberikan pelayanan kepada mahasiswa sangat diprioritaskan agar mahasiswa merasa puas. Tentunya pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berkualitas. Menurut Amin dan Isa (2008) ada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu: 1. *Tangibles* (penampakan komponen fisik/bukti langsung); 2. *Reliability* (kehandalan); 3. *Responsiveness* (daya tanggap); 4. *Assurance* (jaminan) dan 5. *Empathy* (Empati). Kualitas pelayanan dapat diukur dari kelima dimensi tersebut. Bila mahasiswa merasa puas dengan pelayanan maka akan menjadi mahasiswa yang loyal. Mahasiswa yang loyal (pelanggan aktual) akan memberikan *word of mouth* positif kepada calon mahasiswa (pelanggan potensial). *Word of mouth* ini adalah promosi yang paling efektif.

Responden (mahasiswa baru) mengenal pertama kali Universitas Terbuka melalui media surat kabar, radio, televisi, brosur dan internet frekuensinya jauh lebih rendah dibanding responden (mahasiswa baru) mengenal pertama kali Universitas Terbuka melalui teman. Seperti terlihat pada Tabel 1 untuk data 2011.1 responden mengenal pertama kali Universitas Terbuka melalui surat kabar 8 responden (14,5%), radio 1 responden (1,9%), televisi 0 responden (0%), brosur 8 responden (14,5%) dan internet 8 responden (14,5%), sedangkan untuk data 2011.2 responden mengenal pertama kali Universitas Terbuka melalui surat kabar 1 responden (0,8%), radio 2 responden (1,7%), televisi 7 responden (5,8%), brosur 5 responden (4,1%) dan internet 22 responden (18,2%). Ini mengindikasikan bahwa promosi melalui surat kabar, radio, televisi, brosur dan internet belum diketahui secara penuh oleh pelanggan potensial (mahasiswa baru). Sehingga promosi melalui kelima media tersebut perlu dilakukan secara lebih intensif lagi agar Universitas Terbuka dapat dikenal oleh masyarakat luas dan diharapkan masyarakat luas tersebut menjadi pelanggan potensial sehingga rekrutmen mahasiswa baru dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Peneliti mencoba ingin mendapatkan informasi atau masukan dari responden mengenai pendapat responden sebaiknya UPBJJ-UT Denpasar melakukan promosi melalui media apa. Responden dapat memberikan pendapatnya lebih dari satu jawaban. Ternyata

hasilnya sesuai dengan Tabel 3 di bawah ini, untuk data 2011.1 bahwa UPBJJ-UT Denpasar sebaiknya melakukan promosi melalui media surat kabar 26 responden (17,5%), radio 11 responden (7,5%), televisi 35 responden (23,5%), brosur 31 responden (20,8%), internet 37 responden (24,8%) dan teman 9 responden (6,0%), sedangkan untuk data 2011.2 bahwa UPBJJ-UT Denpasar sebaiknya melakukan promosi melalui media surat kabar 60 responden (19,3%), radio 28 responden (9,0%), televisi 79 responden (25,4%), brosur 53 responden (17,0%), internet 68 responden (21,9%) dan teman 23 responden (7,4%).

Tabel 3. Statistik Deskriptif Pendapat Responden Sebaiknya UPBJJ-UT Denpasar Melakukan Promosi Melalui Media

Media	Data 2011.1		Data 2011.2	
	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
Surat Kabar	26	17,5%	60	19,3%
Radio	11	7,4%	28	9,0%
Televisi	35	23,5%	79	25,4%
Brosur	31	20,8%	53	17,0%
Internet	37	24,8%	68	21,9%
Teman	9	6,0%	23	7,4%
Total	149	100%	311	100%

(Data primer diolah, 2011)

Hal ini juga didukung dengan pendapat/saran/usulan/masukkan responden untuk meningkatkan promosi yang dilakukan UPBJJ-UT Denpasar pada pertanyaan kuesioner yang bersifat terbuka. Baik pada data 2011.1 maupun data 2011.2 sebagian besar responden mengisi pertanyaan tersebut. Dari pendapat responden tersebut setelah dikoding sebagian besar memberikan pendapatnya bahwa UPBJJ-UT Denpasar sebaiknya melakukan promosi melalui surat kabar, radio, televisi, brosur, internet dan teman (memberikan pelayanan prima pada mahasiswa). Dari pendapat responden tersebut dipandang perlu bagi UPBJJ-UT Denpasar terus melakukan sosialisasi dan promosi Universitas Terbuka kepada masyarakat luas melalui media surat kabar, radio, televisi, brosur dan internet, disamping terus meningkatkan pelayanan prima kepada mahasiswa.

Menurut Chan dan Cai (2009) promosi dirancang untuk menarik perhatian, memandu sikap, memfasilitasi perubahan sikap. Sehingga promosi dipertimbangkan sangat mempengaruhi sikap dan nilai dalam masyarakat modern. Era saat ini adalah masyarakat modern dimana informasi dapat dengan cepat diperoleh melalui berbagai media seperti surat kabar, radio, televisi dan internet. Kemajuan teknologi internet berkembang sangat pesat, informasi apa saja dapat diperoleh melalui internet. Sedangkan menurut Frolich dan Stensaker (2010) promosi keunggulan sebagai strategi utama yang akan membantu pendidikan tinggi untuk berhasil dalam lingkungan yang semakin terbuka dan kompetitif. UPBJJ-UT Denpasar telah mempromosikan keunggulan/karakteristik Universitas Terbuka yang berbeda dengan perguruan tinggi lain.pada media surat kabar, radio dan televisi. Dengan promosi keunggulan/karakteristik yang berbeda dapat membantu meningkatkan rekrutmen mahasiswa baru dalam lingkungan yang semakin terbuka dan kompetitif.

Menurut Berthon *et al.* (1996) dalam Lin dan Hsu (2003) mengungkapkan internet sebagai media massa yang relatif baru mempunyai karakteristik kemudahan akses, biaya set up relatif rendah, meraih cakupan global, tidak tergantung waktu dan interaktif. Internet memberikan keunggulan yang unik (berbeda) dibanding media lain, oleh karena itu internet nampak sebagai bagian pokok strategi komunikasi pemasaran, meskipun belum tentu efektif. Dari pendapat Berthon *et al.* tersebut kiranya perlu UPBJJ-UT Denpasar mengembangkan web-site yang terhubung dengan web-site Universitas Terbuka. Web-site ini dapat sebagai media untuk melakukan sosialisasi dan promosi pada masyarakat luas dan sebagai informasi kepada mahasiswa.

Promosi yang efektif dapat juga dilakukan dengan cara yang khusus. Busacca dan Mauri (1994) dalam Ziliani (2005) menyatakan efektifitas promosi didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan cara melakukan promosi khusus pada periode waktu tertentu. UPBJJ-UT Denpasar disamping melakukan promosi melalui surat kabar, radio, televisi, brosur, internet dan pelayanan prima juga melakukan promosi dengan cara khusus yaitu menjalin kerjasama dengan pengurus pokjar Program Pendas untuk dapat merekrut mahasiswa Program Non-Guru. Kerjasama dengan pokjar Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng telah berhasil merekrut mahasiswa Program Studi Manajemen sebanyak 24 mahasiswa baru. Kemudian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhasil merekrut mahasiswa Program Administrasi Pemerintahan

Desa (APD) sebanyak 29 mahasiswa. Melakukan sosialisasi dan promosi ke sekolah-sekolah SMU dan SMK. Sehingga rekrutmen masa registrasi 2011.2 mengalami peningkatan yang sangat tajam dan signifikan. Data mahasiswa baru masa registrasi 2011.1 dan mahasiswa baru masa registrasi 2011.2 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini

Tabel 4. Data Mahasiswa Baru Program Non-Guru

Fakultas	Mahasiswa Baru Program Non-Guru	
	2011.1	2011.2
FISIP	49	136
FEKON	35	128
FMIPA	3	2
Total	87	266

(Data SRS, 2011)

Dari Tabel 4 terlihat kenaikan jumlah mahasiswa baru Program Non-Guru yang sangat tajam dan signifikan, dari total 87 mahasiswa baru pada masa registrasi 2011.1 menjadi total 266 mahasiswa baru pada masa registrasi 2011.2 atau naik lebih dari 300%. Data masa registrasi 2011.2 jumlah mahasiswa baru FISIP sebanyak 136 mahasiswa baru ini termasuk 29 mahasiswa baru Program APD, jumlah mahasiswa baru FEKON sebanyak 128 mahasiswa baru termasuk 24 mahasiswa baru Program Studi Manajemen yang kerjasama dengan pokjar Sawan, sedangkan jumlah mahasiswa baru FMIPA hanya 2 mahasiswa baru karena kurangnya peminat. Untuk meningkatkan jumlah rekrutmen mahasiswa baru FMIPA perlu dilakukan sosialisasi dan promosi ke Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Bali dan Dinas Pertanian Propinsi Bali serta instansi terkait lainnya.

Disamping UPBJJ-UT Denpasar terus melakukan sosialisasi dan promosi melalui surat kabar, radio, televisi, brosur, internet, kerjasama dengan pokjar, kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota/propinsi dan sebagainya, juga terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa agar mahasiswa merasa puas dan menjadi loyal. Mahasiswa yang loyal akan memberikan informasi positif *word of mouth* kepada orang lain. Seperti dikatakan di atas *word of mouth* adalah promosi yang paling efektif. Daugherty *et al.* (2002) mengidentifikasi hubungan antara pelayanan pelanggan dan keputusan pembelian. Memberikan pelayanan yang terbaik secara positif mempengaruhi keputusan pembelian.

Begitu juga halnya dengan institusi pendidikan perlu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan aktual (mahasiswa lama) dan pelanggan potensial (calon mahasiswa baru). Daugherty *et al.* (2002) juga menyatakan pelayanan pelanggan merupakan suatu metode untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting yang terkait dengan strategi promosi, diantaranya:

1. Mahasiswa baru Program Non-Guru mengenal pertama kali Universitas Terbuka sebagian besar dari teman.
2. Mahasiswa baru Program Non-Guru mengenal pertama kali Universitas Terbuka sebagian kecil dari media surat kabar, radio, televisi, brosur dan internet.
3. Menurut pendapat mahasiswa baru Program Non-Guru sebaiknya UPBJJ-UT Denpasar tetap melakukan promosi melalui surat kabar, radio, televisi, brosur dan internet.
4. Memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa perlu dilakukan agar secara tidak langsung mahasiswa dapat mensosialisasikan dan mempromosikan Universitas Terbuka.
5. UPBJJ-UT Denpasar sebaiknya terus melakukan promosi dengan berbagai cara seperti melalui media surat kabar, radio, televisi, brosur, internet, spanduk, kerjasama, sosialisasi ke instansi terkait, memberikan pelayanan prima dan lain sebagainya.

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya dengan tujuan untuk menentukan strategi promosi yang efektif. Penelitian ini ruang lingkupnya masih sangat terbatas hanya enam media promosi yang diteliti. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih luas lagi ruang lingkup media promosi yang akan diteliti. Begitu juga dengan sampel, penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa baru Program Non-Guru, sampel ini masih kurang mewakili masyarakat luas, maka untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih luas lagi. Dengan menggunakan sampel yang luas maka hasil penelitian lebih dapat digeneralisir untuk masyarakat luas dalam menentukan strategi promosi.

REFERENSI

- Amin, M., & Isa, Z. (2008). An examination of the relationship between service quality perception and customer Satisfaction: A SEM approach towards Malaysian Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1 (3), 191-209.
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2003). *Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective*. 6th edition. New York: The McGrawHill Companies.
- Bone, P. F. (1995). Word of mouth effects on short-term and long-term product judgements. *Journal of Business Research*, 32 (3), 213-223.
- Chan, K., & Cai, X. (2009). Influence of television advertising on adolescents in China: an urban-rural comparison. *Young Consumers*, 10 (2), 133-145.
- Chaniotakis, I. E., & Lymperopoulos, C. (2009). Service quality effect on satisfaction and word of mouth in the health care industry. *Managing Service Quality*, 19 (2), 229-242.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Business research methods*. 9th edition. New York: McGraw-Hill.
- Daugherty, P. J., Kasulis, J. J., & Richey, R. G. (2002). The role of customer service in tread promotion decisions. *The International Journal of Logistics Management*, 13 (1), 43-56.
- Ennew, C. T., Banerjee, A. K., & Li, D. (2000). Managing word of mouth communication: Empirical evidence from India. *International Journal of Bank Marketing*, 18 (2), 75-83.
- Frolich, N., & Stensaker, B. (2010). Student recruitment strategies in higher education: promoting excellence and diversity?. *International Journal of Educational Management*, 24 (4), 359-370.
- Helm, S. and Schlei, J. (1998). Referral potential – potential referrals. An investigation into customers' communication in service markets. *Track 1 – Market Relationships. Proceedings 27th EMAC Conference. Marketing Research and Practice*, 41-56.
- Kotler, P. (2003). *Marketing insight from A to Z*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Lin, C. T., & Hsu, P. F. (2003). Adopting an analytic hierarchy process to select internet advertising network. *Marketing Intelligency & Planning*, 21 (3), 183-191.
- Macfarlane, B. (2007). Defining and rewarding academic citizenship: The implications for university promotions policy. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 29 (3), 261-273.
- Ziliani, C. (2005). Target promotion: How to measure and improve promotional effectiveness through individual customer information. *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing*, 14 (3), 249-259.

RPSEP-24

THE EFFECT OF INFORMATION SYSTEM QUALITY, PERCEIVED USEFULNESS AND INFORMATION QUALITY TO END USERS' SATISFACTION OF ACCOUNTING DRY LAB PROGRAM AT OPEN UNIVERSITY OF INDONESIA

Irma¹, Rini Dwiyani Hadiwidjaja²

^{1,2} Universitas Terbuka
¹irma@ut.ac.id, ²rini@ut.ac.id

Abstract

In implementing distance education, Universitas Terbuka (UT) utilizes numerous learning materials. Utilization of technology into the learning process also becomes a priority in implementing distance education at UT that can help learners to study independently. One of the most important aspects in UT's Accounting Department is the compliance of practicum subjects in a distance learning system. This becomes a challenge for Accounting Department to carry out the practicum in the distance learning system. Accounting Department of UT has developed system that delivering accounting course in a distance education to carry out the practicum. It's called Accounting Dry Lab Program (ADLP). ADLP is accounting practice with interactive computer-aided with interesting animation, images, audio and video to deliver the knowledge from teachers to the students. In addition, ADLP can be accessed via UT's website and facilitate students in understanding the knowledge.

The purpose of this study is to evaluate implementation of ADLP by looking at users' perceptions of the system quality and information quality, associated with the perceived usefulness and the satisfaction of user through Structural Equation Modeling (SEM). Respondents in this study were active college students in UT's accounting department at the registration period of 2014. The results of this study show that information system quality statistically significant affects the perceived of usefulness and end-user accounting software satisfaction. Information quality statistically significant affects the perceived usefulness and end-user accounting software satisfaction. Perceived usefulness affects the end-user accounting software satisfaction.

Keywords: accounting dry lab program, end user satisfaction, information system quality, information quality, perceived of usefulness.

1. Introduction

In 2010 UT's Accounting department launches a practicum program that seeks to cover the weaknesses experienced by students in the Online Tutorial (Tuton). Tuton has not been able to satisfy and meet the needs and objectives of practicum. Students should continue to monitor the initiation of material every week, and should be active in the discussion forum.

Besides interaction with tutors or lecturers every week should be exists. If students miss the learning process within a week, it will not be able to repeat in the next week. In general, Tuton can achieve cognitive objectives of the course Introduction to Accounting Laboratory, but it can't be used to improve student skills in working on accounting cases as in real business practices.

Though the end goal of accounting practicum is improving students skills to resolve the case of accounting transactions to the preparation of financial statements in various cases and industry. This skills will appear on the student's ability to resolve the case of accounting on the final exams. When students are not skilled, though diligent in following Tuton, surely will not be able to resolve the case of accounting in the final exam because they're not accustomed to practicing accountancy. That's why UT's Accounting Department makes a practicum program called Dry Lab for accounting introduction course.

Dry lab is an abbreviation of Dry Laboratorium which is a lab with simulated via computer and equipped with animation, images, audio, and video that developed to allow students to carry out practical work with easy, fun and effective and efficient. To assist students in conducting lab, UT's Accounting Department provide a theoretical basis or introductory on accounting concepts before students do the lab working. These concepts being contained in the Dry Lab Introduction to Accounting module which is expected students will not have difficulty in understanding the subject.

Dry Lab can be accessed easily via UT's website, without the constraints of time and place. In addition through the UT website, under certain circumstances dry lab program can also be obtained by the student in the form of a compact disc and the practicum results can be sent to either UT Accounting Department through the Internet (softcopy) or via mail (hardcopy). The two main requirements to be able to follow the drylab program is: 1). You have to be registered as a student lab course Introduction to Accounting and 2). having basic computer skills such as excel programs, word, and simple navigation computer operation.

Dry Lab program has been launched, but until now the evaluation of the quality of information and quality of information systems that affect the perception of usefulness and user satisfaction levels itself has not been much done at the Open University. Meanwhile, according to Janson and Subramanian (1996) and Lucas et al. (1998), stated that the problem that usually occurs in the use of accounting drylab package is system incompatibility with the

information required by the end user. The discrepancy between the needs of the students drylab applications as users could pose a significant problem for them. Technical difficulties which interfere in drylab, interfacing problems in the system, and difficulty in hardware can make a lower levels of satisfaction.

If students are not satisfied with the drylab program, they will no longer use it. EUCS (End User Computer Satisfaction) can be used as a signal for the Open University in general and specially for Accounting Department to overcome these difficulties and mismatches. Seddon (1997) stated that by overcoming the weaknesses of the better measurement, end-user satisfaction can be used to measure the gain or success of Dry Lab.

Departed from the reasoning and the empirical facts, this study try to evaluate the application of drylab program. The evaluation is done by looking at students' perceptions of the quality of information and quality of existing information systems in the Dry Lab, associated with the perceived usefulness and the level of student satisfaction over the Dry Lab through structural equation modeling. The use of this model is important because it is a powerful way to overcome the problems that arise in information systems research and understanding of emergence.

If the student does not accept or use the system effectively, the benefit of the Dry Lab as a learning system based on e-learning can not be realized. It is therefore important to investigate the factors and critical success drivers of Dry Lab to provide feedback to designers and teachers to build systems that are useful and accepted by the end user, in this case the student of UT's accounting department. Departed from this facts and the background research, the formulation of the problem in this study are: 1). how the influence of the quality of the information system and the quality of information on user satisfaction Dry Lab, 2).how the variables influence perceived usefulness as an intervening variable in the relationship between the quality of information and quality of information system on end-user satisfaction of Dry Lab, 3). how the structure and dimensionality, reliability and validity of the instrument used to measure end-user computing satisfaction (EUCS) made by Doll and Torkzadeh (1988). This study is also the response of Klenke's research (1992) which stated the need for cross-validation MIS instruments and to re-examine the instrument EUCS with new data.

Meanwhile the objective to be achieved in this study are: 1). To investigate the influence of the quality of the information system and the quality of information on end-user

satisfaction drylab program, 2). To examine the effect of perceived usefulness as an intervening variable in the relationship between the quality of information systems and information quality and end user satisfaction drylab introductory accounting, 3). To examine the structure and dimensionality, reliability and validity of the instrument used to measure end-user computing satisfaction (EUCS).

Hopefully this study can achieve the benefits to: 1). Those researchers and practitioners of information systems based learning (e-learning) in assessing the quality of cleaning lab to improve student satisfaction, 2). UT to develop innovations that fit the students need in the future and improvement of the dry lab quality, 3). UT's students in order to create an ideal network-based lab.

Information Systems

According to O'Brien (2006), information system is a combination of people, hardware, software, communication networks and data resources that collect, transform, and provide information in an organization. According Mutyarini and Sembiring (2006), the characteristics of information systems in higher education are as follows:

1. As a supporter of higher education institutions to achieve its objectives.
2. Having a purpose to:
 - a. Provide the necessary services to the satisfaction of the academic community, reliable and affordable.
 - b. Improving the quality of service in accordance with the mission of higher education.
 - c. Providing accurate information into and out of institutions.
3. Consists of units of information systems that stand alone but in line with the vision and mission of the institution.
4. Accessed by various academics communities with the needs, roles and different knowledge.

The role of computer-based information systems has expanded significantly over the past few years. The widespread development of information systems also brings a change in the role of the information system itself. Any changes have an impact on end users and managers in an organization. As an example of an information system among others:

1. Academic Information System (AIS)-based Web. The purpose of making the Academic Information System (AIS) is to support education, so that the college can provide better information and effective to the community, both within and outside the university through the Internet. Major features of Academic Information Systems (AIS) web based, among

others: the curriculum of the course, the semester KRS registration, registration KRS short term, study sheets, profiles of faculty, staff profiles, job descriptions faculty, student profiles, profiles of alumni, student enrollment new, structurally faculty, databases thesis / final project, E-learning, academic calendars, announcements, event organizer, online quizzes, news, articles, and online photo gallery.

2. Library Information System (SIP) Web-based.

SIP Web-based can be used by various groups, both libraries at educational institutions and public libraries public or private. These applications and services facilitate access to information and library data, such as makes it easy to book / catalog, system membership, journal information, course material, borrow and return books and periodic reporting. Thus, the efficiency will be obtained in the work of the library staff library book management, presentation of information more easily and interactive, providing better services to the users of library services. The main features of the library information system (SIP)-based web include:

- a. Catalog / book category, the program can divide the book / paper or other products to be displayed at the library information system in separate categories, making it easier for users to find what they need.
- b. Detailed information books, complete information on the book / product, will be displayed screenshots (pictures) of the book (if any), equipped with a library ID, title of book, name of author, publisher, ISBN, number of pages of the book, the size, the type of language, source books, stock books available as well as a brief resume of the book / product.
- c. Forms of borrowing, visitors can make a request to borrow this book, where after selecting the desired book they will be asked to fill out a request form of borrowing.

Previous Research and Hypothesis Development

A. Information System Quality and End-User Satisfaction of information system

Information System Quality and End-User Satisfaction of information system is an inherent characteristic of the system itself (DeLone and McLean (1992). Defined quality system also Davis et al., (1989) and Chin and Todd (1995) as perceived ease of use that is how big the perceived computer technology is relatively easy to understand and use. Perceived usefulness is defined as the degree to which a person believes that using a particular system can improve

the performance (Davis, 1989). Research Adams et al. (1992), showed a positive relationship between the usefulness and ease of use. Iqbaria, Guimaraes, and Davis (1995) in their study using the technology acceptance model (TAM) showed the influence of perceived ease of use on perceived usefulness. Test results Mao and Palvia (2006), as well as Simon and Paper (2007), shows the influence of perceived ease of use on perceived usefulness.

Seddon (1997) conducted a study to see the relationship between the perceived usefulness of information quality. The results of the study Seddon (1997) on the relationship between these two variables, the results of research supported by Li (1997) and Rai et al., (2002). If the user is confident with the quality of drylab accounting system it uses, and feel that the system is not difficult, then they will believe that the use of such a system would provide greater benefits and will improve their performance. If the information generated from the accounting drylab used increasingly accurate, timely, and has good reliability, the more it will increase the confidence of users of the system. Increased user confidence in information systems, is expected to further improve their performance.

Based on the above description of this study hypothesized that based on the perception of the user, the higher the quality of accounting drylab, will further increase the perceived usefulness. A second hypothesis is built higher quality accounting information produced Software used, will further enhance user perceived usefulness, in terms of its perception.

H1: The quality of information systems a positive effect on Perceived Usefulness.

H2: Information quality positive effect on Perceived Usefulness.

B. The quality of information systems, information quality and user satisfaction of information system.

Size of user satisfaction in a computer system is reflected by the quality system owned (Guimaraes et al, 1992; Yoon et al, 1995). User satisfaction of an information system is how users view information in a real system, not on the quality of the engineering system (Guimaraes et al, 2003). In the research literature and in practice, user satisfaction is often used as a surrogate measure of the effectiveness of information system (Melone, 1990). The results obtained DeLone and McLean (1992), McKiney et al., (2002), Rai et al., (2002), and Livari (2005) indicates that the quality of the information system has positive influence on the wearer satisfaction.

The higher the quality of information produced by an information system, will further enhance user satisfaction (DeLone and McLean, 1992). This opinion is supported by the

results of McKiney et al., (2002), Rai et al., (2002), and Livari (2005). If users believe that the quality of information systems and quality system information generated from the system used is good, they will be satisfied using the system.

This study hypothesized the third hypothesis that higher quality accounting introduction drylab used, will increase user satisfaction according to their perception. For the fourth hypothesis in this study is the higher quality of information produced by the introduction of accounting used drylab will increase user satisfaction based on their perceptions.

H3: The quality of information systems a positive effect on user satisfaction of information system.

H4: The quality of information has a positive effect on user satisfaction of information system.

C. Perceived Usefulness and User Satisfaction

DeLone and McLean Information System (1992), states that the impact of the use of information systems on the performance of the individual to the level of user satisfaction (user satisfaction) have a reciprocal relationship. While Seddon (1997) in his model hypothesizes that the impact of the use of information systems in the form of increasing the performance of the individual, will affect the level of user satisfaction.

Rai et al., (2002) examined the relationship between perceived usefulness to the user satisfaction using three models of information systems success. All three models are models of information systems success DeLone and McLean (1992), the model Seddon (1997), and Model Seddon (1997) modified by adding the relationship between perceived usefulness with system use. Research results indicate overall perceived usefulness affect user satisfaction. Livari (2005), conduct research on the success of the new information system is applied to the users of information systems in an organization which is mandatory. Research results for perceived usefulness variable relationship with user satisfaction shows the influence of both variables. If users feel the benefits of the information system of systems that are used, then they will be satisfied using the system.

Based on the above description of this study hypothesized that the higher the perceived usefulness, user satisfaction will increase drylab accounting, according to their perception.

H5: Perceived Usefulness has a positive effect on user satisfaction of information system.

Thought and the hypothesis can be stated in the following research framework.

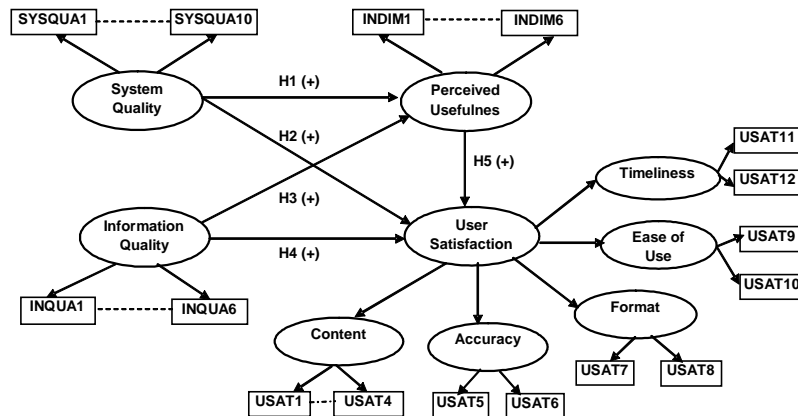


Figure 1. Modified Model of DeLone and McLean (1992) and Seddon (1992, 1997)

Methods and Techniques of Data Collection

This study uses primary data that is obtained directly from the original sources (Sekaran, 2003). The unit of analysis of this study is all respondents who use drylab introductory accounting at UT's Accounting Department. The data was collected through a questionnaire and sent to the students of UT's Accounting Department. Before being sent to the respondents, we conducted a pretest on the questionnaire in advance, to ensure that the sentences in the questionnaire can be correctly understood by the respondents. After the pretest, the questionnaire is sent directly to the student via e-mail and online tutorial. Questionnaires were sent, along with a cover letter containing instructions and explanations charging research purposes. This sample selection method is purposive sampling and based on certain criteria (Sekaran, 2003). Criteria for the selection of the sample respondents are students who register and use drylab program at least since 2011 to 2014. The size of the sample is determined by the number of respondents who return the questionnaire. The study period is the period of deployment to the collection of questionnaires from respondents that during the four months from February 2014 until April 2014.

Research Model

This research uses a model form of Structural Equation Model and uses a modified model of information system success model of DeLone and McLean (1992) and Seddon (1997), by adding a confirmatory factor analysis (CFA) for latent variables user satisfaction. The addition of this model is expected to give a better explanation on the validity and reliability of each instrument in EUCS. The addition of this model is also based on research results Somers, Nelson, and Karimi (2000).

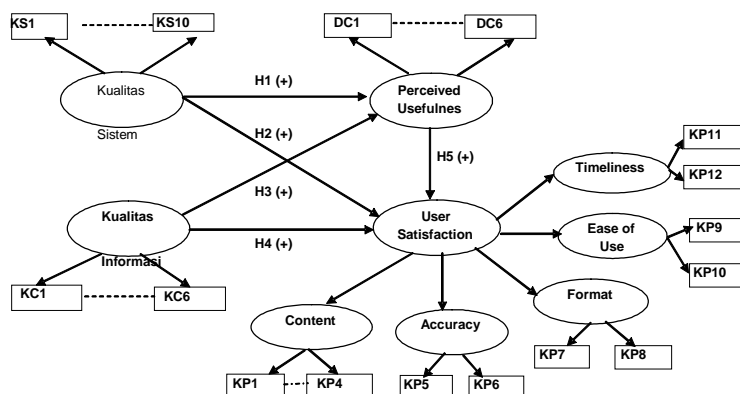


Figure 2. Research Model

Latent Variable

Operationalization of the latent variables are the key variables that are the focus of attention in this study. This variable is an abstract concept that can only be observed indirectly and imperfectly through its effect on the observed variables (Wijanto, 2006). There are 6 Latent variables in this study which consists of:

Information System Quality.

The quality of information systems referred to in this study is the quality of accounting drylab used, seen from the user perception. The items to measure these variables adopted from the questionnaire used by McGill et al. (2003). The items are an adaptation of the questionnaire Davis et al, (1988). The quality of information systems in the path diagram abbreviated as KS. This variable was measured by 10 questions with 5 Likert scale from very disagree to very agree. The higher the score of this variable, meaning the higher the accounting drylab quality as perceived by the user. The lower the score of this variable, indicating that lower the accounting drylab quality as perceived by the user.

Information Quality

Information Quality referred to user's perception of the quality produced by the accounting drylab used. Some karakteistik used to assess the quality of accounting drylab of these include the accuracy, timeliness, relevance, informativeness, and Competitiveness (Weber, 1999). The questionnaire used to measure the quality of this information in the adoption of the questionnaires used in the study of McGill et al., (2003). In the path diagrams,

quality of the information is abbreviated as KS. This variable was measured with 5 Likert scale from very disagree to very agree. The higher the score this variable, meaning the quality of accounting information generated drylab higher perceived by the user. The lower the score of this variable, indicating that the quality of accounting information produced drylab lower perceived by the user.

Perceived of Usefulness

In this study, perceived of usefulness variable is the user's perception of the extent to which the impact of the use of accounting drylab which may be influential in the increase their performance later. The instrument used to measure these variables are taken from Davis et al, (1988), with modifications of accounting drylab using. This questionnaire has also been used in research Sandee (1984) and Goodhue (1995). In the path diagram of this study, the perceived of usefulness variable abbreviated as DS. This variable was measured by 6 questions in 5 Likert scale from very disagree to very agree. The higher the score this variable, meaning the impact of the use of accounting drylab in improving user performance as perceived by the user is getting higher. The lower the score of this variable, indicating that the impact of the use of accounting drylab user performance as perceived by the user is getting lower.

User satisfaction

User Satisfaction in the study is the level of user satisfaction of using drylab accounting and outputs produced by the drylab. Weber (1999) states that there are five characteristics to assess user satisfaction is the content, accuracy, format, easy of use, and timeliness. Questionnaire to measure user satisfaction of information system in this study was adopted from a questionnaire compiled by Doll and Torkzadeh (1988), which has also been used in studies of Kim and McHaney (2000).

In this study, variable user satisfaction is abbreviated as KP. Indicators for user satisfaction consists of 12 question items with a five Likert scale ranging from very disagree to very agree. The higher the score of this variable, mean user satisfaction over the using of accounting drylab the higher perceived by the user and vice versa.

Observed variables

Observed variables also called manifest variables or observed variables (Ghazali, 2005). Unobserved variables are variables that can be observed or measured empirically which is also often referred to as an indicator (Wijanto, 2006). The observed variable is the effect or the size of the latent variables. Variable is observed in this study consisted of 34 baseline variables that constitute the existing question items in the questionnaire.

KS.

For latent variable quality of information systems (KS) consists of ten observed variables. Observed variables in the path diagram is abbreviated as KS, from KS1 to KS10.

KC

KC was observed variables as indicators of a latent variable quality of information. This variable consists of six indicators in the path diagram of this study, written as KC1 up with KC6.

DS

latent variables perceived usefulness had 6 observed variables, and in the path diagram is written as DS1 up with DS6.

Latent Variable Scores

Special for latent variables user satisfaction of is a confirmatory factor analysis (CFA) of five components: content, accuracy, format, ease of use and timeliness. Each of these components in the initial model is a latent variable in the path diagram is written as Content, Accuracy, Format, Ease and Time. Content have been observed by 4 variable, and written in the path diagram KP 1 until KP4. Accuracy in this study has been observed by 2 variables and written in the path diagram as KP 5 to KP6. Format in this study has 2 observed variables, in the path diagram is written as KP7 to KP8. Ease of use in this study has 2 observed variables, in the path diagram is written as KP9 until KP10. Time variables has 2 observable variables, in the path diagram is written as KP11 until KP12. After calculating the scores for the five latent variable content, accuracy, format, Ease and Time, then the five latent variables and the observed variables into the research model will be simpler.

TEST ANALYSIS AND RESULTS

250 questionnaires was sent to respondents, but only 165 questionnaires returned. So the response rate of the questionnaires was 66% of the total questionnaires sent. Of that amount back, there are 20 questionnaires could not be included in the sample because it does not meet the criteria for the selection of samples or incomplete filling. The number of samples that can be obtained final test is included in the 145 questionnaires. The data collection period is for four months from February 2014 until April 2014.

The number of respondents who are qualified to analyze as many as 145 people. The total number of manifest variables (indicators) are 34 questions that represent the five constructs which are system quality, information quality, perceived usefulness, and user satisfaction. Testing is done by following the steps that apply in the SEM using the method of maximum likelihood estimation (MLE). There is a two-step testing should be performed (Hair et al., 1995) that is testing the suitability of the measurement model and structural model fit.

1. Overall Model Suitability

Structural model in SEM analysis begins with testing the overall model fit is seen by the indicator Goodness-of-fit index (GFI) statistics of the output of LISREL (Hair et al., 1995). Overall summary of the critical value of the test the suitability of the overall model can be seen from the summary in Table 1.

Table 1.
Overall Model Suitability

Models Criteria for Suitability	Compatibility Level Indicator	Model Estimation Results	Level of Suitability Model
RMSEA	RMSEA < 0,08	0.22	Not Good
P (close fit)	P < 0.05	0.00	Good
ECVI	Smaller values of Independence and closer to the Saturated Model	$M^* = 17.13$ $S^{**} = 5.25$ $I^{***} = 97.07$	Good fit
AIC	Smaller values of Independence and closer	$M^* = 967.60$ $S^{**} = 756.00$	Good fit

	to the Saturated Model	$I^{***} =$ 13978.41	
CAIC	Smaller values of Independence and closer to the Saturated Model	$M^* =$ 2806.20 $S^{**} =$ 2259.21 $I^{***} =$ 14085.78	Good fit
NFI	$NFI > 0,90$	0,95	Good fit
NNFI	$NNFI > 90$	0,96	Good fit
CFI	$CFI > 0,90$	0,97	Good fit
IFI	$IFI > 0,90$	0,97	Good fit
RFI	$RFI > 0,90$	0,94	Good fit
RMR	Standardized RMR < 0.05	0.01	Good
GFI	$GFI > 0,90$, <i>good fit</i> ; $0.90 < GFI > 0.80$, <i>marginal fit</i>	0,84	Marginal fit

$M^* =$ Model $S^{**} =$ Saturated $I^{***} =$ Independence

By looking at the overall results of the estimation based on existing criteria, the overall values obtained are good. So from the results of an analysis of the reliability of the output for testing the overall model, it can be concluded that the model is a good fit or good.

Validity Test

Tests on the validity of a grain of questions indicated by the value of t and the standardized loading factor. For values of t must be above a critical value is 1.96 and the standardized factor loading greater than 0.5 (Iqbaria et al., 1997). Question items that do not meet the criteria for a valid test can not be included in the next. The load factor for each indicator on its latent variable is presented in the form of the relationships depicted in the path diagram obtained by running the LISREL program.

Variable User Satisfaction is a confirmatory analysis measured by two stages. First, the latent variables measured using observable variables that second order of five dimensions

into the indicator. The second step is to calculate the scores for the five latent variables into dimensions of user satisfaction variables. This score is used as an indicator of user satisfaction through a fifth dimension that has become the observed variables. This variable has five dimensions, namely the content, accuracy, format, ease of use, and timeliness.

Content is measured by 4 (four) of the observed variables KP1 to KP4. Accuracy is measured with 2 (two) variables observed that KP5 and KP6. Format, is measured by two observed variables from KP7 to KP8. Ease of use was measured by two observed variables, namely KP9 and KP10. Timeliness was measured by two observed variables namely KP11 and KP12. From the results of running the program Lisrel for KP twelve variables, all indicators have the t-value above the critical value of 1.96 and the value of the standardized factor loading are above 0.5. This means that all indicators are valid, so there is no indicator that should be discarded. These results are then used to calculate the latent variable scores of user satisfaction which has five dimensions, namely Content, Accuracy, Format, Ease of use, and timeliness. The results showed that the entire processing this indicator variable has a value of standardized loading factor above 0.5. This means that the variable content, accuracy, format, ease of use, and timeliness meet valid criteria to represent the construct being measured which is user satisfaction.

For system quality variable, the results indicate that all standardized loading factor values for KS1 to KS10 are more than 0.5. So, these variables can be used in the next test because it does represent the construct of system quality. For the indicator variables of the latent variable information quality, the results showed that no variable has a value of standardized loading factor below 0.5. This means that all the observed variables of information quality which is KC1 to KC6 can be used in subsequent testing. Meanwhile for perceived usefulness variable, the overall value of the standardized loading factor is significant, because from DS1 to DS6 has t-value above 0.5. So from the six variables was observed for the latent variables, can be used for further testing because it represents the construct being measured. Of the total 34 observed variables as indicators for each latent variable in this study, all variables can be included in subsequent testing. LISREL output processing results for each latent variable can be seen in the appendix.

Reliability test

Reliability test aims to test the consistency of the grains have a question or statement in the questionnaire. To test the reliability of the variables, we have to calculate the construct

reliability (CR) and variance extracted (VE) from each of the observed variables (Hair et al. (1995). If the calculation results of the construct reliability greater than 0.70, and the variance extracted is greater than 0.50, it can be said that the construct had good reliability (Wijanto, 2008). The figures are used to calculate Reliability Construct and Variance Extracted taken from the output Completely Standardized Solution of the data processing. The summary of CR and VE calculations for each latent variable, are presented in Table 2.

Table 2.

Construct Reliability and Variance-Extracted Value of Each Latent Variable

Latent Variabel	CR value ≥0.70	VE Value ≥ 0.50	Summary
System Quality (KS)	0.956	0.741	Good
Information Quality (KC)	0.962	0.809	Good
Perceived Usefulness (DS)	0.932	0.700	Good
User Satisfaction (KP)	0.934	0.740	Good

Structural Model Suitability

The analysis is performed on the structural equation coefficients by specifying a certain level of significance. Analysis of the structural model to test the hypotheses proposed in this study. For a significance level of 0.05, the value t of structural equation must be greater or equal to 1.96 or greater for practical equal to 2 (Wijanto, 2008). Of the overall hypothesis, generate 3 equations which means there are three structural models proposed.

Structural Equation Model 1:

H1: System Quality has positive effect on Perceived of Usefulness

H2: Information Quality has positive effect on Perceived of Usefulness

$$DS = 0.47*KS + 0.23*KC, \text{Errorvar.} = 0.65, R^2 = 0.35$$

$$(0.097) \quad (0.082) \quad (0.17)$$

$$4.80 \quad 2.82 \quad 3.79$$

From the first structural equation in the model above can be seen in the figure below, all coefficients have significant t values. This equation is an equation for the first and second hypothesis. It can be concluded that the hypothesis H1 and H2 in this study is significantly proved.

Structural Model 2:

H3: System Quality has a positive effect on the User Satisfaction.

H4: Information Quality has a positive effect on User Satisfaction.

H5: Perceived Usefulness has a positive effect on User Satisfaction.

$$KP = 0.46*DS + 0.47*KS + 0.13*KC, \text{Errorvar.} = 0.22, R^2 = 0.78$$

$$(0.077) \quad (0.061) \quad (0.050) \quad (0.033)$$

$$5.97 \quad 7.71 \quad 2.57 \quad 6.79$$

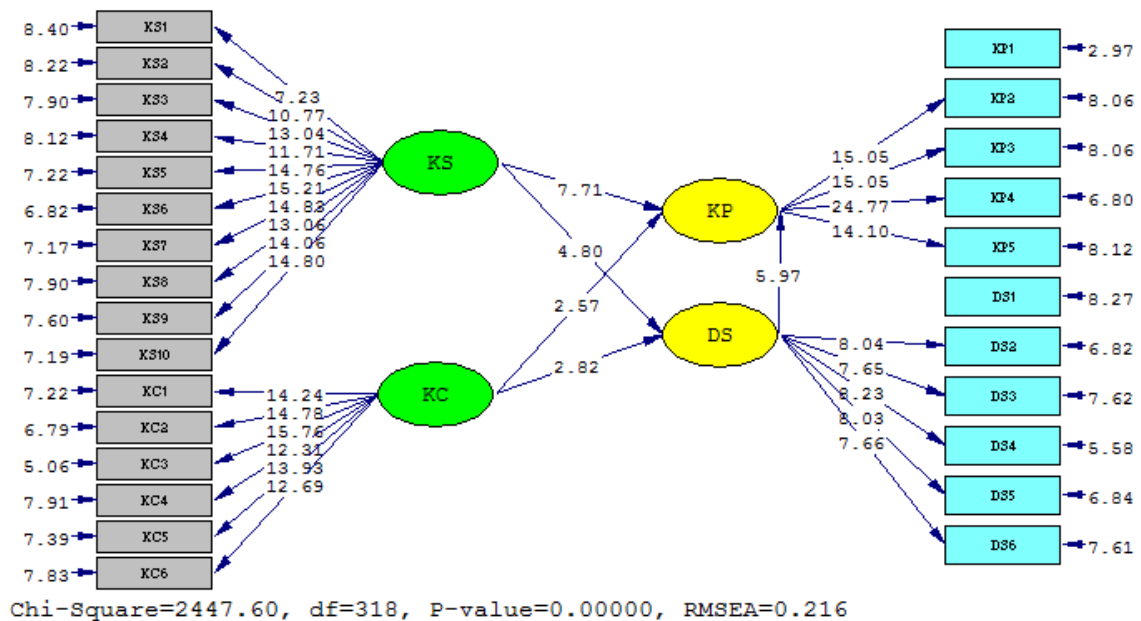
For the equation in this second model, also shown that all coefficients have significant t values above 1.96. So the conclusion that can be drawn is that the H3, H4, and H5 are also proven. From the second equation shows that the models have to offer a good level of significance for the t value is above the critical value of 1.96. This shows that all the coefficients for the first and second equation is significant. The Summary of t-value of each latent variable, are presented in Table 3.

Table 3. t-value for each hypothesis

Hypothesis	Path	Estimation	t-value	Summary
H1	KS → DS	0.46	5.97	Significant
H2	KC → DS	0.47	7.71	Significant
H3	KS → KP	0.47	4.80	Significant
H4	KC → KP	0.13	2.57	Significant
H5	DS → KP	0.23	2.82	Significant

The results of the path diagram in Figure 3 below, shows the structural model generated from Lisrel output.

Figure 3. Path Diagram



Test Results Analysis

Based on structural equation models testing were produced and confirmed that the system quality is significantly affect perceived usefulness. These results reinforce previous studies of Adams et al (1992), Mao and Palvia (2006), as well as Simon and Paper (2007). The influence of the system quality by Davis et al., (1989) and Chin and Todd (1995) which

is defined as the ease of use is the perceived usefulness also supports the findings of Rai et al., (2002) and Gumaraes et al., (2007) .

The second hypothesis examines the effect of information quality on the perceived usefulness of positive results also proved significant. These results also support the findings of Seddon (1997), Li (1997) and Rai et al., (2002). This indicates that the higher the quality of information produced by the accounting software used, will increase the perceived usefulness views of user perception.

The third hypothesis regarding the effect of system quality on user satisfaction, the results proved to be significantly positive. These results are consistent with the results obtained by DeLone and McLean (1992), McKiney et al., (2002), Rai et al., (2002), and Livari (2005). It can be concluded that based on the perception of the user, the higher the quality of accounting software, will further enhance the software user satisfaction.

The fourth hypothesis testing on the effect of information quality on user satisfaction results proved significant positive. These results support the results of previous studies that DeLone and McLean (1992), and Livari (2005). With these results we can conclude that the higher the quality of information produced by the accounting software used, will further improve user satisfaction, according to their perception.

Test results on the effect of perceived usefulness H5 against user satisfaction also proved significant, in line with the results of the research DeLone and McLean (1992). These results also support the model of Seddon (1997), Rai et al., (2002) and also Livari (2005). This gives the conclusion that the higher the level of perceived usefulness, user satisfaction will increase accounting software, based on their perception.

This research is motivated by numerous previous studies conducted related to the model of information system success. The purpose of this study is to see the extent of accounting software in terms of the perception of the user by implementing information systems success model of DeLone and McLean (1992) and Seddon (1997) modified by adding a variable confirmatory factor analysis to the user satisfaction. This model is used to test the primary data obtained via questionnaires 239 respondents.

This study contributes to the information systems success model of DeLone and McLean (1992) and Seddon (1997) by adding a variable confirmatory factor analysis to the

user satisfaction. The addition of CFA will help identify the validity and reliability of each indicator variable into user satisfaction instrument built by Doll and Torkzadeh (1988).

Conclusion

There are five hypotheses developed in this study which is a model of the relationships that exist in the success of information systems of DeLone and McLean (1992) and Seddon models (1997), and summarized by Rai et al., (2002). After testing the hypotheses proposed in this study, it produced some conclusions which are System Quality proved to be significantly positive effect on perceived usefulness. Information Quality proved to be significantly positive effect on perceived usefulness. System Quality proved to be significantly positive effect on user satisfaction.

Information Quality proved to be significantly positive influence on User Satisfaction. Perceived usefulness proved to be significantly positive effect on User Satisfaction. The results also lead to the conclusion that all the instruments of research into user satisfaction indicators has a good validity and reliability.

References:

- [1]. Adams, D.A., Nelson, R.R., and Todd, Peter, A., 1992, "*Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of Information Technology A Replication*" MIS Quarterly, June.
- [2]. Almutairi, H. & Subramanian, Girish, H., 2005, "*An Empirical of the DeLone and McLean Model in the Kuwaiti Private Sector*", The Journal of Computer Information System, Spring, 45,3,pg.113.
- Chin, Wynne. W., and Todd, Peter, A., 1995, "*On the Use, Usefulness, and Ease of Use A Structural Equation Modeling in MIS Research: A Note of Caution*", MIS Quarterly, June.
- Davis, Fred D., (1989), "*Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*", MIS Quarterly, September, pp.319- 340
- Davis, Fred D., Bagozzi, Richard P., dan Warshaw, Paul R., (1989), "*User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Two Theoretical Models*" Management Science, August, pp.982-1003
- DeLone, W.H., (1988). "*Determinants of Success for Computer Usage in Small Business*". MIS Quarterly/March. Pp. 51-61.
- DeLone, W.H., and Ephraim R. Mclean, 1992, "*Information System Success: The Quest for the Dependent Variable*". Information System Research, March, 60-95.

- Doll, W.J., and Torkzadeh, G, 1988, "*The Measurement of End User Computing Satisfaction*", MIS Quarterly, 12, (2), 159-174.
- Goodhue, D.L., and Thompson, R.L., 1995, "*Task-Technology Fit and Individual Performance*", MIS Quarterly, 19 (2), 213-236.
- Guimaraes, T., M. Igbaria, and M. Lu. 1992. "*The determinants of DSS success: An integrated model.*" Decision Sciences 23, no. 2: 409-430.
- Guimaraes, T., D. S. Staples, dan J. D. McKeen, 2003. "*Empirically Testing Some Main User-Related Factor for Systems Development Quality*". Quality Management Journal 10, No. 4: 39- 54.
- Hair, J.F. Jr., Anderson, R.E., Tathan, R.L., dan Black, W.C. 1998. "*Multivariate Data Analysis*". Fifth Edition. Prentice-Hall International Inc.
- Imam Ghazali. (2005) "*Model Persamaan Struktural*" Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istianingsih and Setyo Hari Wijanto. (2008). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, dan kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi. Universitas Indonesia. Unpublish.
- Iqbaria, M. and Tan, 1997, "*The Consequences Of Information Technology Acceptance On Subsequent Individual Performance*"
- Janson, M. A., and Subramanian, A., 1996, "*Packaged software: Selection and Implementation Policies*".INFOR, 34(2), 133-151.
- Kim, Sung & McHaney, Roger, 2000, "*Validation of End-User Computing Satisfaction Instrument in Case Tool Environments*", The Journal of Computer Information System, vol.41.,Iss. 1: pg.49.
- Klenke, K. (1992). *Construct Measurement In Management Information System: A Review And Critique Of User Satisfaction And User Involment Instruments*. INFOR, 30(4), 325-348.
- Lee, D.M., 1986, "*Usage Pattern and Source of persistence for Personal Computer Users*", MIS Quarterly, 10,4, 313-325.
- Li, C. 1997. "*ERP packages: What's next?*",Information System Management, 16(3), 31–35.
- Livari,Juhani, 2005, "*An Empirical Test of the DeLone and McLean Model of Information System Success*", Database for Advances in Information Systems, Spring,, 36,2.pg.8.
- Mao, En and Prashant Palvia, 2006. "*Testing an Extended Model of IT Acceptance in the Chinese Cultural Context.*" The Database for Advances in Information System 37, Spring 2006.

- McHaney, R., and Cronan, T. P., 2001, “ *A Comparison of Surrogate Success Measures in On-Going Representational Decision Support Systems: An Extension to Simulation Technology*”, *Journal of End User Computing*, 13, 2.
- McKinney, V., Yoon, K., and Zahedi, Fatemeh, 2002, “ *The Measurement of Web-Customer Satisfaction: An Expectation and Disconfirmation Approach*”, *Information System Research*, 13,3.
- Melone N.P. 1990,”*A Theoretical Assessment of The User Satisfaction Construct in Information System Research*”, *Management Science*. January.
- McLeod, R. Jr., and Schell, George, (2001). “*Management Information System,*”. Eight Edition, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- McGill, Tanya, Hobbs, Valerie, & Klobas, Jane, 2003, “*User-Developed Applications and Information Systems Success: a Test of DeLone and McLean’s Model*”, *Information resource Management Journal*; Jan-Mar; 16.1.pg.24.
- McHaney, R., and Cronan P.T., 2001,” *A Comparison of Surrogate Success Measure in On-Going Representational DSS: An Extension to Simulation Technology*”, *Journal of End-user Computing*; Apr-Jun; 13,2.
- Rai, A., Lang, S.S. and Welker, R.B., 2002, ”*Assessing the Validity of IS Success Models: An Empirical Test and Theoretical Analysis*”, *Information System Research*, Vol.13, No.1. pp. 29-34.
- Sekaran, U., (2003). “*Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*” (Fourth Edition). John Willey & Sons, Inc.
- Seddon.P.B. 1997,”*A Respecification and Extension of The DeLone and McLean’s Model of IS Success*”, *Information System Research*.8.September. 240-250.
- Simon, Steven J., and Paper, David, 2007., “ *User Acceptance of Voice Recognition Technology: An Empirical Extension of The Technology Acceptance Model*” *Journal of Organizational and End-User Computing*, 19(1), 24-50.
- Staples, Sandy D. dan Seddon, 2004, “*Testing the Technology-To-Performance Chain Model*”, *Journal of Organizational and End User Computing*, Oct-Dec. pp17- 35
- Toni M Somers; Klara Nelson; Jahangir Karimi, 2003. ” *Confirmatory Factor Analysis of the End-User Computing Satisfaction Instrument: Replication within an ERP domain*” *Decision Science*, 34 (3) 595-621
- Webber, Ron, 1999, *Information System Control and Audit*, First Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Wijanto, Setyo Hari, 2006, “ *Structural Equation Model (SEM) dengan Lisrel 8.7*”, *Catatan Kuliah, Pascasarjana Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia*.

Wijanto, Setyo Hari, 2008, “ *Structural Equation Model (SEM) dengan Lisrel 8.8, Konsep dan Tutorial*”, Graha Ilmu.

Widjayanto, Nugroho, 2001, “*Sistem Informasi Akuntansi*”, Penerbit Erlangga.

Yoon, Y., T. Guimaraes, and Q. O’Neal. 1995, “*Exploring the factors associated with expert systems success*”, MIS Quarterly 19, no. 1: 83-106.

RPSEP-25

DISKURSUS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KEGAGALAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Taufik Hidayat*, Dewi Saraswati**

*Perencana Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengolahan Mineral
Lampung-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

**Pranata Humas Muda pada Pusat Penelitian Informatikan - Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia

E-mail : tauf008@lipi.go.id dan taufikumsu@yahoo.com*

E-mail : dewi.saraswati@lipi.go.id dan saras_008008@yahoo.co.id**

Abstrak

Proses dan substansi perencanaan (planning) memegang peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program, sebaliknya bila perencanaan dilakukan secara asal saja maka sudah pasti kinerja program tersebut pasti rendah atau gagal sama sekali, terlebih lagi dikaitkan dengan kompleksitas program. Sesungguhnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah. Karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka PPD cenderung dan tentu mungkin saja jatuh pada kepentingan sesaat dari kepala daerah dan/atau elitis yang mengitarinya. Dengan demikian PPD yang diturunkan dalam program kemudian diturunkan lagi sebagai proyek, dapat saja berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan asal jadi. Metodologi dalam menyusun makalah ini adalah deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian didapat jawaban Oleh karena kepala daerah pusat pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka yang bertanggungjawab atas PPD adalah kepala daerah; Penolakan atas laporan pertanggungjawaban kepala 2egara/dan daerah merupakan ukuran kegagalan PPD; Oleh karena PPD adalah derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah, maka Tindak pidana penipuan dapat dijadikan dasar dari pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pidana, Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Pendahuluan

Dengan penulisan makalah ini, dicoba memberikan semacam diskursus/wacana dan mengingatkan bagi kita akan sangat pentingnya arti akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan di negeri ini. Dengan berbagai perdebatan yang akan timbul nantinya, diharapkan pertanggungjawaban hukum dapat menjadi perangkat "pencegah" itikad tidak baik yang cukup handal dalam perencanaan pembangunan daerah (untuk kemudian disingkat

PPD). Menimbulkan harapan bahwa pertanggungjawaban hukum atas perencanaan pembangunan akan menjadi juga semacam *panacea*, menjadi sebuah solusi atas sejumlah anomali dalam dinamika pelaksanaan jalannya pemerintahan berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme

Ungkapan sang filsuf, Plato, sebagaimana dikutip oleh Eriyatno (2002), dalam Lokakarya Penguatan UKM dalam rangka Mempercepat Agenda Reformasi Kebijakan, bahwa “*the most important part of the work is in the beginning*”. Dengan kata lain proses dan substansi perencanaan (*planning*) memegang peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Mutu perencanaan yang tinggi akan mampu menjamin keberhasilan suatu program, sebaliknya bila perencanaan dilakukan secara asal saja maka sudah pasti kinerja program tersebut pasti rendah atau gagal sama sekali, terlebih lagi dikaitkan dengan kompleksitas program. Demikian juga halnya dengan pembangunan di tanah air, peran PPD amat penting dalam menjamin keberhasilan semua program untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana *terstate* dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. PPD salah satunya tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah, memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, sesungguhnya PPD yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD tersebut merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah.

Karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka PPD cenderung dan tentu mungkin saja jatuh pada kepentingan sesaat dari kepala daerah dan/atau

elitis yang mengitarinya. Dengan demikian PPD yang diturunkan dalam program kemudian diturunkan lagi sebagai proyek, dapat saja berwarna korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan *asal jadi*. Tentu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum semacam KKN ini. Namun, pertanggungjawaban atas episentrum dari keseluruhan akibat dari perbuatan KKN tersebut, yaitu kegagalan atas PPD masih terasa *buram* dan begitu ringan, hanya sebatas jika Laporan Pertanggung Jawaban sebagai pelaksanaan PPD dinyatakan "ditolak", maka kepala daerah yang bersangkutan harus memperbaiki dan/atau tidak dapat lagi mencalonkan diri. Di pihak lain, PPD tentu telah memakai sumber daya yang jumlahnya tidak sedikit. Menarik untuk dapat melihat lebih dalam lagi, kemungkinan sanksi semisal pemidanaan yang dapat diberikan sebagai alat "pencegah" dari sebuah itikad tidak baik dari keseluruhan proses PPD. Berdasarkan hal-hal tersebut, makalah ini akan membahas kemungkinan untuk *memintakan* pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD.

B. Permasalahan

Sebagai batas ruang lingkup pembahasan, maka diajukan beberapa pertanyaan untuk menjadi sebuah permasalahan, yaitu :

- 2.1. Siapa yang bertanggung jawab atas PPD?;
- 2.2. Ukuran kegagalan PPD?;
- 2.3. Dasar pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD?.

C. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam menyusun makalah ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder, yaitu penelusuran bahan kepustakaan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, kamus, buku, bahan presentasi, berita serta tulisan-tulisan baik yang termuat dalam karya tulis maupun laman yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemidanaan, serta PPD.

D. Kajian Pustaka

D.1. Pengertian Diskursus

Secara umum, *diskursus* (sering juga disebut “wacana” dalam bahasa Indonesia) berarti cara khas dalam berbahasa atau menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun lisan. Kelompok masyarakat tertentu menggunakan bahasa secara khas. Orang-orang kedokteran, misalnya, mempunyai diskursus sendiri yang berbeda dengan orang-orang hukum. Michael Foucault mengkaitkan istilah diskursus dengan pembentukan “*knowledge*” (pengetahuan) dan relasi kekuasaan. Dia mendefinisikannya sebagai “praktik bahasa” (*language practice*) yang dipakai oleh berbagai konsituensi (misalnya hukum, agama, kedokteran, dan sebagainya) untuk tujuan yang berkenaan dengan relasi kekuasaan di dalam masyarakat (Wolfreys,1999). Definisi yang dikemukakan oleh Weedon (1987) mungkin dapat lebih menjelaskan apa yang dimaksud oleh Foucault. dikemukakan bahwa diskursus adalah: “... *cara menyusun pengetahuan, beserta praktik sosial, bentuk subjektifitas, dan relasi kekuasaan yang melekat di dalam pengetahuan tersebut, serta hubungan di antara semuanya itu.*”. Diskursus membentuk seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) yang pada gilirannya mempengaruhi praktik sosial, konsepsi tentang diri (subjektifitas), dan relasi kekuasaan yang terbentuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diskursus membentuk objek (dalam hal ini pengetahuan) sekaligus subjek (yaitu manusia-manusia yang menyusun pengetahuan itu maupun yang dipengaruhi olehnya) (<http://teori-teori.blogspot.com/2009/01/foucault-speak-diskursus.html>).

D.2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu (Romli Atmasasmita, 2000:hlm.65). Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa “ *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction*”. Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk

membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan (S.R Sianturi,1996: hlm.24). Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya (Djoko Prakoso, 1987: hlm. 75). Seseorang melakukan tindak pidana, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif (Martiman Prodjohamidjojo,1997: hlm.31).

D.3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan dan pembangunan yang meliputi pengertian-pengertian : (1) Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.(LAN-DSE, 1999), dan (2) Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa menuju perubahan yang lebih baik. (Ginanjari Kartasasmita, 1996).

D.4. Sistem Pengendalian

Sistem pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau perlakuan terhadap suatu sistem dengan masukan tertentu guna mendapatkan keluaran sesuai yang diinginkan. Sistem pengendalian merupakan hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki berupa respon (Dorf, 1983). Dengan kata lain, pengendalian merupakan proses mempengaruhi

anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang ditetapkan. Unsur-unsur sistem pengendalian meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi dan penghargaan atas kinerja. Selanjutnya, didalam pemerintahan dikenal adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 1 PP No. 60 Thn 2008 ttg SPIP).

E. Hasil dan Pembahasan

E.1. *Man Behind Gun*

Sistem pengendalian harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan organisasi yang dipimpinya dalam rangka pencapaian tujuan. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. Penilaian kinerja manajer sangat penting karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui apakah manajer pusat pertanggungjawaban tersebut melaksanakan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Tanggungjawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan sedangkan output diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.

Di Indonesia yang menganut sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan [sistem pemerintahan](#) negara [republik](#) di mana kekuasaan [eksekutif](#) dipilih melalui [pemilu](#) dan terpisah dengan kekuasaan [legislatif](#) [Jimly Asshiddiqie](#), (2004). Kepala Negara dan kepala daerah merupakan penyelenggara dari semua urusan pemerintahan ditingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, dapat manajer pusat pertanggungjawaban dari organisasi publik yang bernama pemerintah ini adalah kepala Negara untuk tingkat nasional dan kepala daerah untuk tingkat daerah.

Tujuan diadakannya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah : (1) Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya; (2) Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi; (3) Memfasilitasi terbentuknya *goal congruence*; (4) Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat; (5) Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan; (6) Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien; (7) Sebagai alat pengendalian anggaran (<http://www.baduttumin.wordpress.com>).

Dengan demikian, dapat disimpulkan *man behind gun* dari keseluruhan proses PPD adalah kepala Negara daerah. Kepada merekalah dimintakan pertanggungjawaban atas keseluruhan dari proses PPD.

E.2. Ukuran Kegagalan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai konsekuensi dari negara hukum dan negara demokrasi, maka kepala negara dan daerah di Indonesia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan urusan atau fungsi pemerintahan rakyat secara langsung maupun perwakilan. Hughes Owen (1992; hlm. 240) menyatakan bahwa *government organization are created by the public, for the public and need to be accountable to it* (organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik).

Untuk terwujudnya pelaksanaan dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala negara/daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan nasional/daerah. Salah satu prinsip yang ada dalam pemerintahan modern adalah "adanya pertanggungjawaban". Kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, karena kekuasaan itu lahir dari suatu kepercayaan rakyat. Kekuasaan yang diperoleh dari suatu lembaga yang dibentuk secara demokratis adalah logis harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dengan demikian pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak yang harus ada pada pemerintahan demokrasi.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban oleh kepala daerah. Bagaimana misalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan istilah Laporan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan Informasi LPPD. Kepala Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak bertanggungjawab ke samping kepada DPRD dan ke bawah kepada rakyat pemilih, melainkan bertanggungjawab ke atas (Gubernur bertanggungjawab ke Presiden melalui Mendagri, Bupati/Walikota bertanggungjawab ke Mendagri melalui Gubernur). Kepala Daerah cukup memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menyampaikan informasi kepada masyarakat (Pasal 27). Setiap kepala daerah diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban diakhir masa jabatannya.

Dengan demikian, Laporan pertanggungjawaban sebagai media akuntabilitas sejatinya adalah laporan dari keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari PPD. Oleh karena hal tersebut, ukuran kegagalan dari sebuah perencanaan pembangunan ditingkat nasional dan daerah dapat dilihat diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Jika, laporan pertanggungjawaban di tolak dapat dikatakan perencanaan pembangunan adalah gagal.

E.3. Dasar Pertanggungjawaban Pidana Atas Kegagalan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Sutoro Eko (2007), menilai mekanisme pertanggungjawaban khususnya kepala daerah, akan menimbulkan dampak buruk, dalam konteks struktur-kultur politik yang masih birokratis dan klientelistik, akuntabilitas vertikal justru akan membuat kepala daerah kurang akuntabel dan responsif kepada masyarakat, melainkan akan lebih loyal (tunduk) pada kekuasaan di atasnya. Dalam praktik bisa jadi kepala daerah akan menghindari desakan rakyat dan akuntabilitas publik, sebab sudah merasa cukup menyampaikan pertanggungjawaban kepada pusat. Loyalitas vertikal dengan mudah akan dijadikan kepala daerah sebagai tameng atas tuntutan publik.

Oleh karena itulah, belum pernah terjadi sebuah implikasi hukum terhadap penolakan Laporan Pertanggungjawaban dari Kepala Daerah yang dilakukan baik oleh DPRD maupun oleh masyarakat. Sebab meskipun DPRD berhak memberikan putusan terhadap Laporan Pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, namun putusan DPRD itu hanya bersifat

rekomendasi yang implikasinya hanya berupa masukan-masukan kepada Kepala Daerah agar dimasa mendatang pemerintahan ditingkatkan dengan lebih baik lagi

Anis Zakaria Kama (2012;hlm.258) pertanggungjawaban pemerintah terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni pertanggungjawaban politik (*political accountability*), pertanggungjawaban hukum (*legal accountability*) dan pertanggungjawaban ekonomi (*economic accountability*). Dengan demikian, sesungguhnya apabila laporan pertanggungjawaban kepala daerah ditolak yang merupakan ukuran dari kegagalan PPD, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pemidanaan. Oleh karena PPD merupakan derivasi dari janji-janji politik kepala daerah, maka dasar pertanggungjawaban dari kegagalan PPD yang dapat dikenakan adalah “penipuan”.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut : (1) Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya; (2) Unsur benda / barang; (3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain; (4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang; (5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas : (1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan (2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak. (Adami Chazawi, 2006)

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu*

muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”; dan 2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah (P.A.F Lamintang, 1989; Hlm. 142) : (a) bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (b) “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik); (c) “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban”penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu

perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya, tindak pidana penipuan merupakan delik aduan, maka dalam hal kegagalan PPD yang mempunyai legal standing dari delik ini adalah warga negara Indonesia.

F. Penutup

F.1. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Oleh karena kepala daerah pusat pertanggungjawaban dari penyelenggaran pemerintahan, maka yang bertanggungjawab atas PPD adalah kepala daerah;
- b. Penolakan atas laporan pertanggungjawaban kepala negara/dan daerah merupakan ukuran kegagalan PPN/D;

- c. Oleh karena PPD adalah derivasi dari janji-janji politik kepala daerah pada saat melakukan kampanye pemilihan kepala daerah, maka Tindak pidana penipuan dapat dijadikan dasar dari pertanggungjawaban pidana atas kegagalan PPD

F.2. Saran

Sebagai saran dalam makalah ini, perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dirasakan perlu untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan perencanaan pembangunan nasional/daerah;
- b. Masyarakat harus memiliki mekanisme untuk menyatakan menerima atau menolak dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Referensi :

I. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

II. Buku :

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta

P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung

Jimly Asshiddiqie, 2004, Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Jakarta

GINANJAR Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Cidesindo 1996

HUGHES OWEN, E., 1992, *Publik Management and Administration an Introduction*, New York, ST. Martin Press

MARTIMAN Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

R.C. DORF, 1983, *Sistem Pengaturan*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta

ROMLI ATMASASMITA, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakatan ke II, Mandar Maju, Bandung

S.R SIANTURI, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakatan ke IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta

III. Disertasi :

ANIS ZAKARIA KAMA, 2012, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

IV. Bahan Presentasi :

ERİYATNO, 2002. *Strategi Implementasi Program Pengembangan UKM*, Presentasi pada Lokakarya Penguatan UKM, Mempercepat Agenda Reformasi Kebijakan

YAHYA RACHMANA HIDAYAT, 2014, *Peningkatan Kemampuan Perencana*, Presentasi pada Kuliah Perdana Magister Administrasi Publik-Universitas Brawijaya

V. Laman :

<http://teori-teori.blogspot.com/2009/01/foucault-speak-diskursus.html>

<http://www.baduttumin.wordpress.com>

Sutoro Eko, "Resentralisasi dan Neokorporatisme." Sumber: <http://www.ireyogya.org>

RPSEP-26

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ari Mulianta Ginting^{*)}

Abstract

Economic development has main goals to increase the welfare of all Indonesian people. But in reality, until now there is still happened regional disparities in Indonesia. Thus, this research goals are to know the development of regional disparities in Indonesia and to analyze the influence of regional GDP per capita, investment, and agglomeration to regional disparities in Indonesia. Using qualitative and quantitative analyze method and using data from 2004 until 2012 this research have some conclusion, the first conclusion from qualitative analyze is that the regional disparities that shown by Williamson's index from the year 2004 until 2004 for eastern Indonesia higher than western Indonesia. This result shown that regional disparities in eastern Indonesia is higher than western Indonesia. The second conclusion, from the quantitative analyze has shown that variables such as regional GDP per capita, and investment have negative and significant influence to regional disparities, meanwhile agglomeration has positive and significant influence to regional disparities.

Keywords : regional GDP per capita, agglomeration, investment, regional disparities.

Abstrak

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi kenyataan yang terjadi bahwa sampai pada saat ini, masih terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif dan kuantitatif analisis dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2012 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, yang pertama bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2012 indeks williamson untuk Indonesia bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia antara Indonesia bagian barat dan timur masih terjadi. Kedua, berdasarkan

^{*)}Penulis adalah peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Setjen DPR
RI : arigins2@gmail.com

analisa kuantitatif didapatkan hasil bahwa variabel PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah, sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Kata Kunci : PDRB per kapita, Investasi, Aglomerasi, Ketimpangan antar Wilayah

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 194 dalam aline ke-4 secara tersurat menegaskan tujuan didirikannya Pemerintah Negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari tujuan ini adalah pemerintah harus menciptakan dan mendorong kesejahteraan bagi rakyat namun harus disertai dengan adanya azas keadilan bagi semua masyarakat dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka dibutuhkan suatu proses yang dinamakan pembangunan.

Proses pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berlangsung secara kontinu namun tidak diimbangi dengan azas keadilan dan pemerataan. Dampaknya yang langsung terlihat adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah wilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Untuk itu maka diperlukan suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah menurut Sjafrizal (2012) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*).³⁴

³⁴Sjafrizal.(2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Press. Jakarta.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahapan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antarwilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekutan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

Ketimpangan wilayah timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Armida S Alisjahbana mengatakan bahwa salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak tahun 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antar daerah yang lebih lebar.³⁶

Ketimpangan pembangunan antara provinsi di Indonesia yang terjadi menurut Deputi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin, mengatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembangunan daerah sampai saat ini masih banyak ketimpangan. Secara khusus ketimpangan tersebut hampir disemua sektor terutama pada ketersediaan sarana publik, pendidikan dan kesehatan. Bukan hanya ketimpangan saja, bahkan pembangunan selama ini mengabaikan kawasan timur Indonesia.³⁷ Bahkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam kunjungannya ke redaksi *Bisnis Indonesia* mengakui bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan di Indonesia

³⁵Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. 7th Edition. Wesley Longman, Inc. New York.

³⁶Armida S. Alisjahbana. (2005). *Kesenjangan Regional di Indonesia* Lembaga Penelitian SMERU.

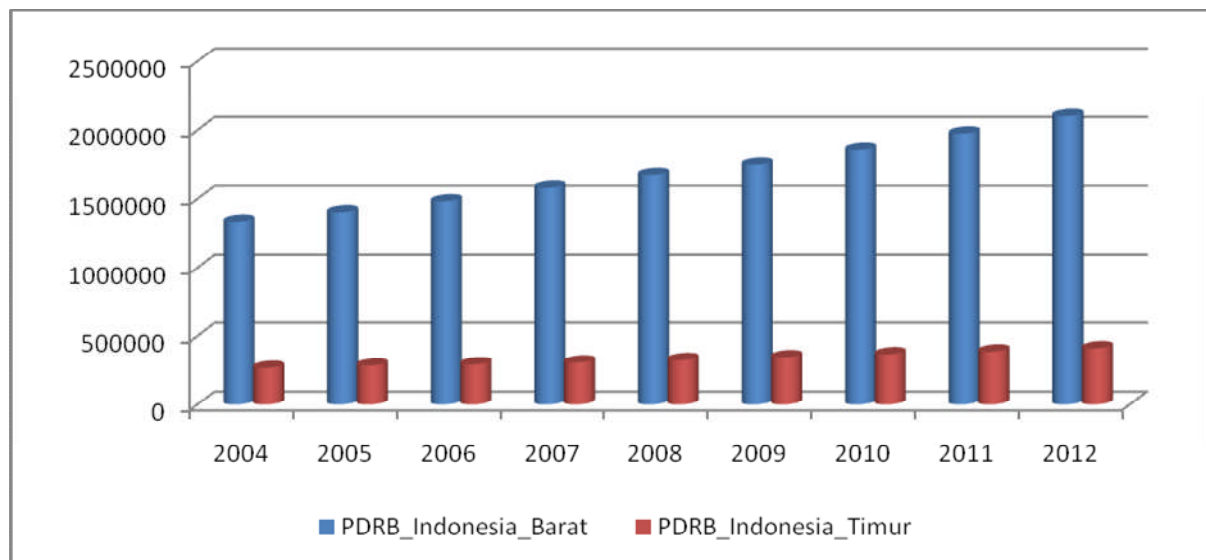
³⁷"Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Masih Terjadi". Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://nasional.kontan.co.id/news/ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-masih-tinggi>.

bagian timur, beliau mengatakan bahwa ketimpangan sangat jelas sekali di lapangan di Indonesia bagian timur.³⁸ Untuk itu maka pembangunan yang dilaksanakan harus didasarkan kepada azas pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dimana pun mereka berada..

Ketimpangan antar wilayah di Indonesia yang terjadi padahal pada saat yang bersamaan provinsi-provinsi tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia adalah dengan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing provinsi, baik provinsi yang berada di Indonesia bagian Barat maupun yang berada di Indonesia bagian Timur. Gambar 1. menunjukkan kepada kita perkembangan PDRB dari Indonesia Bagian Barat yang meliputi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan PDRB dari Indonesia Bagian Timur yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Dari Gambar 1 tersebut juga PDRB Indonesia bagian Barat menyumbang rata-rata hampir 83,4% dari total PDB nasional, sementara PDRB dari provinsi yang ada di Indonesia bagian timur menyumbang hanya rata-rata 16,57% dari PDB nasional. Melihat keadaan tersebut menandakan masih terjadinya ketimpangan yang cukup parah di Indonesia, antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Padahal peningkatan pertumbuhan PDRB di Indonesia diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁸“Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Timur”. Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/jokowi-akui-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-timur>.

**Gambar 1. Perkembangan PDRB Indonesia Bagian Barat dan Timur
(dalam Milyar Rp)**



Sumber : BPS (2014).

Perkembangan ketimpangan antar wilayah yang terjadi hingga pada saat sekarang menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Makadalam penelitian ini memiliki tujuan yang pertama mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan yang kedua adalah menganalisis pengaruh PDRB per kapita, Investasi, dan Aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Menurut Sadono Sukirno (2012) pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-neara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini dengan berikut : *economic development is growth plus change*-yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan sajaterarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegitan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian

yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah penataan pembagian pendapatan.³⁹

Lebih lanjut mengenai pembangunan ekonomi, menurut Wilardjo (2003) dalam Basuki Pujoalwanto (2014) mengatakan bahwa secara metaforis pembangunan ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju *desiderata*, yaitu tahap demi tahapnya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang meningkat. Sedana dengan Wilardjo, Abdullah (2010) mengatakan bahwa pembangunan semestinya berpihak kepada manusia. Keduanya terlihat menekankan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai martabat dalam kehidupannya.⁴⁰

Dalam hipotesa Neo Klasik dalam Sjafrizal (2012) proses pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya dan dapat mengarah kepada ketimpangan ekonomi antar wilayah. Menurut hipotesa Neo Klasik tersebut pada permulaan proses pembanguan suatu negara, ketimpangan pembangunan natar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasrakan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cendrung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan akan menjadi rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf U terbalik.⁴¹

Kebenaran Hipotesis Neo Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson dalam Sjafrizal (2012) melalui studi yang dilakukan pada tahun 1966 tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

³⁹Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.423.

⁴⁰Basuki Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Graha Ilmu. Jakarta. Hlm.15.

⁴¹Sjafrizal, *Op.cit.* hlm 108.

Thee Kian Wie (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandang ekonomi dibagi menjadi menjadi : (1) Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution outcome*); (2) Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*); (3) Ketimpangan pembagian pendapatan antara daerah (*regional income disparities*).⁴²

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Analisis yang menghubungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan versus pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznet (1955).

Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan sebagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah negara India, Srilangka, serta Puerto Rico dan hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahapan perkembangan (diwakili dengan PDB per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesa U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan Dualistik⁴³

⁴²Thee Kian Wie.(1982). *Perekonomian di Negara Berkembang*. Pustaka Jaya. Jakarta

⁴³ Munawir Ismail. (1995). *Teori Pertumbuhan dan Pemerataan*. Prisma tahun XXIV No. 1

Gambar 1.
Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir yang coba disusun oleh penulis, terlihat ingin mencoba melihat pengaruh antara variabel PDRB, investasi, dan aglomerasi, terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi antara provinsi di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai perkembangan ketimpangan pembangunan di Indonesia. Sedangkan analisa kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson⁴⁴ :

⁴⁴Sjafrizal. *Loc Cit.* hlm. 110-111

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y}$$

Dimana :

V_w = Koefisien Variasi Williamson (Indeks Williamson)

Y_i = PDRB Per Kapita Daerah masing-masing Provinsi di Indonesia

Y = PDB per kapita nasional seluruh provinsi di Indonesia

f_i = Jumlah penduduk masing-masing provinsi di Indonesia i

n = Jumlah penduduk seluruh Indonesia

Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai dengan angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin lebar.

Metodologi yang digunakan dalam analisis adalah model ekonometri berupa panel data (gabungan antara *time series* dengan *cross section*), yangselanjutnya akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini juga akan membahas mengenai data yang digunakan, konsep-konsep. Di samping itu dibahas pula mengenai teknik pendugaan dan pengujian parameter yang digunakan. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan . Regresi Panel yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian. Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$IW_{it} = a_{it} + b_{it}PDRB_{it} + c_{it}I_{it} + d_{it}Ag_{it} + e_{it}$$

Dimana IW_{it} adalah ketimpangan wilayah, a adalah konstanta, b , c dan d adalah koefisien regresi, $PDRB_{it}$ jumlah PDRB per kapita masing-masing provinsi, Ag_{it} adalah aglomerasi masing-masing provinsi, I_{it} adalah jumlah investasi untuk masing-masing provinsi e_{it} merupakan *error term*, i adalah provinsi di Indonesia, t adalah periode waktu, tahun 2004 sampai 2013.

Metode Estimasi

Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi panel data. Estimasi panel data adalah estimasi yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross*

section. Salah satu tujuan menggunakan estimasi panel menurut Baltagi (1995) yaitu dapat meneliti karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dari masing-masing variabel independen, sehingga analisis lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang mendekati realita. Dalam estimasi panel data, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*. Untuk memilih antara pendekatan *common effects* dan *fixed effects* digunakan Uji F.

Rumus Uji F yang digunakan adalah $F = F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)}$, dimana R_{UR}^2 adalah

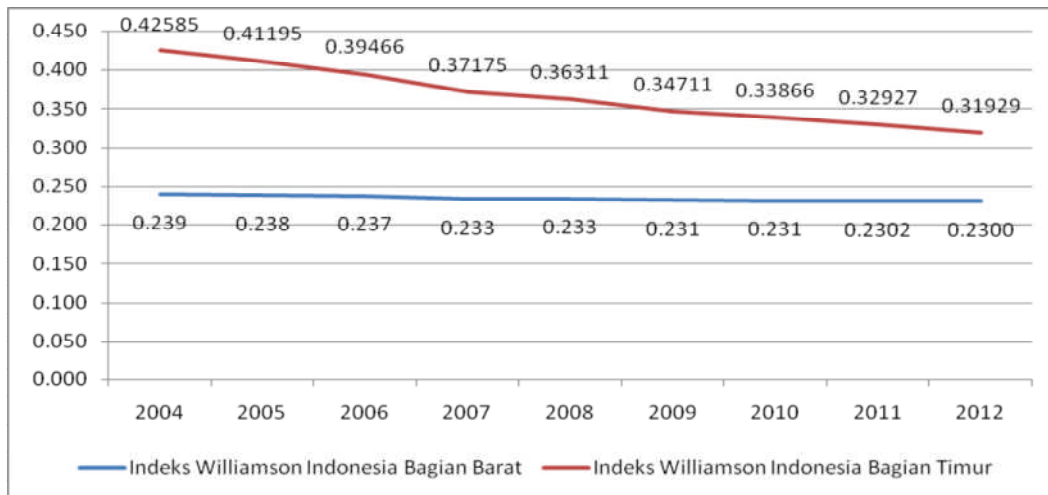
R^2 untuk *fixed effects*, R_R^2 adalah R^2 untuk *common effects*, m adalah jumlah restriksi, n adalah banyaknya observasi dan k adalah jumlah parameter dalam *fixed effects*. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *common effects* dan H_a : *fixed effects*. Sedangkan untuk memilih antara pendekatan *fixed effects* dan *random effects* digunakan Uji Hausman. Dimana hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *random effects* dan H_a : *fixed effects*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Penelitian ini mengukur ketimpangan pembangunan dengan menggunakan Indeks Williamson yang dipakai untuk melihat indeks ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Bila indeks mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila indeks mendekati nol berarti sangat merata. Dari Gambar 2. terlihat perkembangan ketimpangan ekonomi berdasarkan data dari Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dengan membagi menjadi dua bagian, yaitu Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Indonesia bagian barat sendiri terdiri dari Provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Sedangkan Indonesia bagian timur terdiri dari provinsi-provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Pulau Papua.

Gambar 2. Perkembangan Indeks Williamson antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur



Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014).

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan kepada kita bahwa indeks williamson untuk Indonesia Bagian Timur lebih tinggi dibandingkan Indeks Williamson untuk Indonesia Bagian Barat. Perbedaan indeks yang lebih tinggi pada Indonesia bagian timur menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia bagian timur lebih timpang dari pada pembangunan di Indonesia Bagian Barat. Pada tahun 2004 indeks williamson untuk Indonesia bagian timur adalah sebesar 0,4285 sedangkan indeks williamson untuk Indonesia bagian barat lebih rendah dibandingkan indeks williamson untuk Indonesia bagian timur yaitu sebesar 0,239.

Akan tetapi yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pada tahun 2004, ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tahun 2004, indeks williamson untuk Indonesia bagian timur cukup tinggi sebesar 0,42585 sedangkan indeks williamson untuk Indonesia Bagian Barat sebesar 0,239. Perbedaan indeks williamson yang cukup tinggi menandakan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar atau tinggi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Akan tetapi secara perlahan namun pasti, pada periode selanjutnya indeks williamson untuk Indonesia bagian timur mengalami penurunan dari 0,42585 pada tahun 2004 maka

pada tahun 2012 menjadi 0,31929. Hal ini pertanda terjadi peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia bagian timur sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi.

Terjadinya penurunan ketimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya di Indonesia bagian timur tidak lepas dari fungsi pemerintah. Menurut Stiglitz yang dikutip oleh Rama, *et. al.* mengatakan bahwa fungsi pemerintah itu sendiri diantaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.⁴⁵

Namun demikian gap antara indeks williamson untuk Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat secara keseluruhan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tercipta di Indonesia bagian timur memang terjadi akan tetapi belum dapat mengimbangi pembangunan yang terjadi di Indonesia bagian barat. Untuk itu maka diperlukan suatu strategi “*crash program*” untuk mendorong terjadinya konvergensi antara pembangunan di Indonesia bagian bagian barat dan timur. Sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat segera dapat diatasi dengan cepat dan tuntas.

2. Analisis Hasil Estimasi

Pengolaha data dilakukan dengan menggunakan *software Eviews 6* dengan metode *fixed effect* dengan pembobotan *cross section weight* untuk data *cross section* Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur dengan *time series* untuk tahun 2004 sampai dengan 2012.

⁴⁵Rama Nurhuda, Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4.

Penentuan metode estimasi *fixed effect* dengan *cross section weight*, dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian sebagai berikut :

- a. Untuk pemilihan metode estimasi untuk penggunaan metode *individual effect* atau *common effect* dilakukan dengan uji F.

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (intersep sama/ *common effect*)

$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$ (*individual effect*)

$$F = F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)} = \frac{(0,796 - 0,679)/4}{(1 - 0,796)/25 - 7} = 13,65$$

Berdasarkan rumus diatas didapatkan nilai F-hitung sebesar 13,62, sementara nilai F tabel sebesar 2,40. Maka F-hitung > F-tabel sehingga H_0 ditolak, yang menyatakan bahwa intersep adalah sama yaitu dengan metode *common effect*, dan metode yang lebih baik adalah metode estimasi dengan *individual effect*, dimana intersep antar individu berbeda.

- b. Dari efek individual, dilakukan pengujian untuk pemilihan antara model efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*) yaitu melalui *redundant fixed effect tests*.

H_0 : *fixed effect*

H_1 : *random effect*

Hasil dari *Hausman test* diperoleh hasil sebagai berikut :

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.142528	(8,6)	0.9926
Period Chi-square	3.131718	8	0.9258

Sumber : eviews 6 diolah

Dengan nilai probabilita sebesar 0.9926, maka H0 (model *fixed effect*) tidak ditolak, sehingga model yang tepat adalah menggunakan efek tetap (*fixed effect*). Berdasarkan hasil tersebut, maka model diestimasi menggunakan *fixed effect*. Maka model estimasi terbaik yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabell1. Hasil Regresi Panel Belanja Total

Variabel Dependen: Log(IW?)			
Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Log(PDRB?)	-1.052843	-3.013554	0.0100
Log(I?)	-0.425902	-2.945005	0.0114
Log(Ag?)	3.120115	15.37875	0.0001
Fixed Effects (Cross)			
_Barat-C	-3.01495		
_DIY-C	3.001495		
R ²	0,982632		
F	232,1833		
Prob(F-Stat)	0.0001		

Sumber: data diolah dengan *Eviews 6.0*

Dari Tabel 1. Dapat dilihat bahwa uji F dari pengaruh pertumbuhan masing-masing variabel mulai dari pendapatan perkapita, investasi dan aglomerasi terhadap pertumbuhan ketimpangan pembangunan dalam hal ini ditunjukkan oleh indeks williamson menunjukkan angka signifikan dengan probalitas (F-stat) = 0,00001 < α (0.05). Ini artinya, secara bersama-sama pertumbuhan dari masing-masing variabel independen dalam model secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan variabel dependen. Nilai R²*adjusted* sebesar 0,9862 artinya model secara representatif dapat menjelaskan keragaman variabel dependen sebesar 98,62 persen. Dalam metode estimasi panel data sering mengandung masalah heteroskedastisitas, tetapi dalam estimasi ini tidak mengandung masalah tersebut. Karena model ini diestimasi menggunakan Metode GLS *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Error and Covariance*, sehingga diasumsikan model sudah bersifat homoskedastisitas.

3. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Hasil analisa regresi panel diperoleh bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,01 lebih kecil dari pada alpha 0,05. Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa kenaikan 1% pertumbuhan PDRB per kapita akan meningkatkan menurunkan pertumbuhan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebesar 1,052%. Hasil regresi ini berarti setiap terjadi kenaikan pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia maka akan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi.

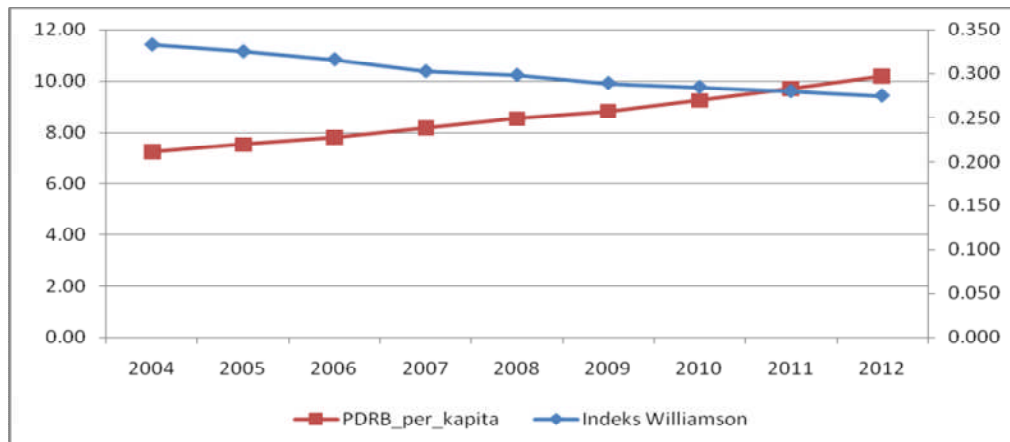
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sutarno dan Mudrajat Kuncoro yang mengatakan bahwa berdasarkan sampel Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dan mendukung berlakunya hipotesa Kuznet terjadi untuk Kabupaten Banyumas.⁴⁶ Pengaruh negatif dan signifikan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan pembangunan wilayah sesuai dengan hipotesa Neo-Klasik yang mengatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah tersebut akan menurun.

Berdasarkan analisa grafik jelas menunjukkan hal tersebut, Gambar 3 menunjukkan pada tahun 2004 indeks williamson yang menggambarkan ketimpangan antar wilayah sebesar 0,332 dan PDRB per kapita sebesar Rp. 7,25 juta. Pada perkembangan selanjutnya indeks williamson mengalami tren penurunan sedangkan PDRB per kapita pada tahun-tahun selanjutnya menunjukkan tren peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian ini membuktikan Hipotesa Neo-

⁴⁶Sutarno dan Mudrajat Kuncoro.(2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang.

Klasik benar. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hipotesa Kuznet mengenai kurva U terbalik berlaku di Indonesia.

Gambar 3. PDRB per Kapita dan Indeks Williamson Indonesia Tahun 2004 sampai dengan 2012



Sumber :Data diolah (2014).

4. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Hasil analisa regresi panel terhadap menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ketimpangan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien variabel investasi yang negatif 0,4259 dan probabilitinya sebesar 0.0114 lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0,05. Hasil ini berarti bahwa setiap 1 % peningkatan pertumbuhan investasi yang dilakukan maka dapat mengurangi 0,4259% pertumbuhan ketimpangan, *ceteris paribus*. Berdasarkan hasil tersebut, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dapat diselesaikan salah satunya dengan cara meningkatkan investasi yang merata di seluruh Indonesia, baik Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur.

Teori yang dikemukakan oleh Myrdal yang dikutip oleh Yenniwati mengatakan bahwa dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sedangkan wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah

menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidak merataan pembangunan⁴⁷.Dan kondisi tersebut terjadi di Indonesia, dimana investasi lebih banyak terpusat pada Indonesia bagian barat yang memiliki harapan laba yang tinggi.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Budiantoro Hartono pada tahun 2008 dengan menggunakan sampel Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan salah satunya bahwa peningkatan nilai investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Setiap peningkatan nilai investasi berarti meningkatkan kegiatan penanaman modal yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi maka akan mengakibatkan kepada peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun.⁴⁸ Yuniwati yang melakukan penelitian pada tahun 2013 terhadap provinsi di Sumatera juga menemukan hasil yang senada, yaitu variabel investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di provinsi yang ada di Sumatera.⁴⁹

5. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Berdasarkan hasil regresi diatas, diperoleh hasil bahwa variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi baik untuk Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada alpha 5%. Kenaikan 1 persen aglomerasi akan meningkatkan pertumbuhan ketimpangan wilayah sebesar 3,12%, *ceteris paribus*. Semakin meningkatnya aglomerasi maka akan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi hanya di pusat-pusat kegiatan aktivitas perekonomian. Sedangkan bagi daerah lain yang memiliki konsentrasi kegiatan produksi rendah akan mendorong pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya ketimpangan wilayah.⁵⁰

⁴⁷Yeniwati.(2013). *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera*.Jurnal Kajian Ekonomi. Vol II No. 03.

⁴⁸Budiantoro Hartono. (2008). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*.Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

⁴⁹.Yeniwati.*Ibid*.

⁵⁰Yuki Anglia. (2010). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuki pada tahun 2010⁵¹ yang menggunakan sampel DKI Jakarta dan Jaime Bonnet pada tahun 2006. Jaime Bonnet dengan menggunakan data dan sampel Kolombia. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang positif antara aglomerasi produksi dengan ketimpangan pembangunan regional suatu wilayah. Berdasarkan hasil tersebut, untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia maka yang diperlukan adalah penyebaran sentra-sentra produksi barang dan jasa keseluruh wilayah di Indonesia. Sentra-sentra produksi barang dan jasa yang selama ini hanya terdapat di Indonesia bagian barat, seperti Jawa dan Sumatera sudah waktunya dilakukan penyebaran ke seluruh wilayah di Indonesia.

6. Analisa Cross Section

Berdasarkan angka koefisien *cross section*, disebutkan apabila variabel-variabel independen tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian barat memiliki indeks yang negatif dan cukup tinggi (-3,01495). Sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian timur mengalami indeks yang positif (3,001495). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat variabel independen konstan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian barat akan memiliki kecenderungan menurun sebaliknya di Indonesia bagian timur mengalami kecenderungan peningkatan.

D. PENUTUP

Dari hasil pengolahan data pada penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu, pertama indeks wiliamson untuk Indonesia bagian timur dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan indeks williamson untuk Indonesia bagian barat. Hal ini pertanda bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia

⁵¹Yuki. *Ibid.*

selama tahun 2004 sampai dengan 2012 lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian barat. Akan tetapi yang cukup menarik adalah terjadi penurunan yang signifikan indeks Williamson dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 untuk Indonesia bagian timur.

Kedua, berdasarkan hasil analisa regresi panel didapatkan kesimpulan bahwa variabel PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Artinya setiap pertumbuhan variabel PDRB per kapita dan investasi dapat mengurangi besarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil ini berarti bahwa setiap terjadi aglomerasi di suatu wilayah dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi panel tersebut, maka untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara antara lain mendorong terciptanya pertumbuhan PDRB per kapita di seluruh Indonesia, meningkatkan investasi yang masuk ke daerah-daerah seluruh Indonesia dan terakhir dapat mengurangi terjadinya aglomerasi di sentra-sentra produksi di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Armida S. Alisjahbana. (2005). *Kesenjangan Regional di Indonesia* Lembaga Penelitian SMERU.
- Basuki Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Budiantoro Hartono. (2008). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. 7th Edition. Wesley Longman, Inc. New York.
- “Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Masih Tinggi”. Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://nasional.kontan.co.id/news/ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-masih-tinggi>.
- “Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Timur”. Diunduh tanggal 9 September 2014 dari <http://news.bisnis.com/read/20140721/15/244928/jokowi-akui-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia-timur>.
- Munawir Ismail. (1995). *Teori Pertumbuhan dan Pemerataan*. Prisma tahun XXIV No. 1.

- Rama Nurhuda, Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.423.
- Sutarno dan Mudrajat Kuncoro.(2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang.
- Thee Kian Wie.(1982). *Perekonomian di Negara Berkembang*. Pustaka Jaya. Jakarta
- Yeniwati.(2013). *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera*.Jurnal Kajian Ekonomi. Vol II No. 03.
- Yuki Anglia. (2010). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

RPSEP-27

SENJATA INDONESIA DALAM MENGHADAPI AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) 2015

Sri nathasya Br sitepu¹ dan Wendra Hartono²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra
UC Town, CitraLand Surabaya 60219

E-mail:

nathasya.sitepu@ciputra.ac.id

wendra.hartono@ciputra

Abstrak : *AFTA (Asean Free Trade Area) 2015 diilustrasikan sebagaipisau bermata dua bagi perekonomian Indonesia. Salah satu kuncikesuksesan Indonesia untuk menjadi penguasa perekonomian Asia Tenggara dapat diwujudkan dengan memaksimalkan peluang, serta mengintegrasikan segala potensi alam dan manusia yang dimiliki dalam menghadapi persaingan AFTA. Akan tetapi, apabila Indonesia gagal menghadapi AFTA maka perekonomian akan berada pada posisi mengawatirkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif didukung data sekunder (data potensi SDA) yang diperoleh dari kementerian Indonesia. Objek penelitian yang akan digunakan adalah potensi SDA dan SDM dari propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis potensi SDA dan SDM yang dimiliki di Indonesia, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menghadapi persaingan AFTA 2015. Selain itu, adanya campur tangan pemerintah juga berperan aktif dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki.*

Kata Kunci : *Pembangunan, Sumber daya, Persaingan AFTA.*

Abstract : *AFTA (Asean Free Trade Area) 2015 is illustrated as “two-edged” for Indonesia Economy. One of successful key for Indonesia to be the conqueror of Economic in South-East ASEAN could be showed by maximizing chance had, and integrate all of the potential natural and human resources had in participating AFTA 2015. However, when Indonesia failed to confront the AFTA then the economy will be in a contrary position. This research uses descriptive methods supported by secondary data (potential data natural and human resources) obtained from the ministries of Indonesia. The object of the research is to be used is the potential natural and human resources from existing provinces in Indonesia. This research aims to map and analyze potential natural and human resources owned in Indonesia, so it could be developed to increase revenues in the face of the original competition AFTA by 2015. In addition, the intervention of the Government also plays an active role in maximizing potential.*

Keywords: *development, resources, competition AFTA*

A. Latar Belakang

AFTA (ASEAN Free Trade Area) akan dilaksanakan pada tahun 2015, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang akan berpartisipasi dalam persaingan perdagangan pada negara ASEAN. Singapura, Malaysia dan Thailand merupakan negara ASEAN yang memiliki daya saing yang cukup besar dibanding Indonesia dalam persaingan AFTA ini, sehingga diperlukan refleksi diri atau SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Thread*) bagi bangsa ini untuk bisa menghadapi munculnya distorsi perdagangan yang akan terjadi.

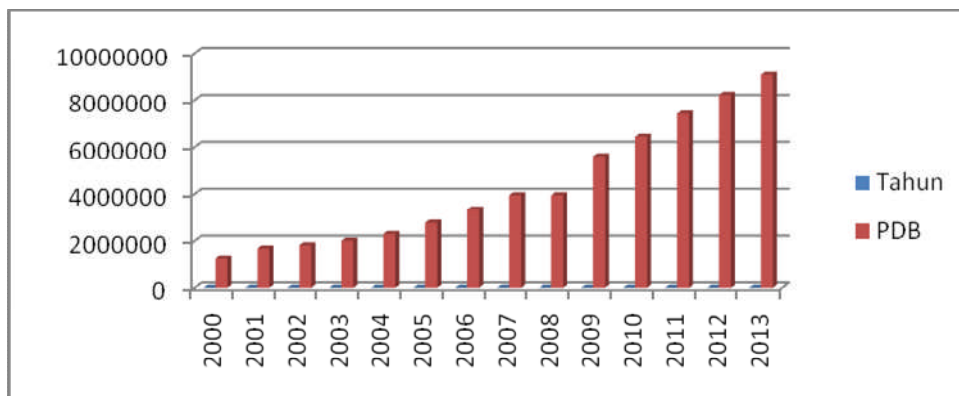
Salah satu dampak diberlakukannya AFTA bagi perdagangan Indonesia yaitu dimungkinkan produk dari negara-negara kawasan ASEAN akan masuk dan membanjiri pasar, dan memungkinkan juga adanya peningkatan penjualan produk-produk Indonesia untuk diekspor dan dipasarkan keluar negeri. *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* adalah kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang pelaksanaan di Brunai Darusalam pada tahun 2010, sementara untuk Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, Cambodia Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “senjata” apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015 ini, dan apakah Indonesia sudah siap menghadapi persaingan bebas ini dengan mempertimbangkan potensi SDA dan SDM.

SDA Indonesia sangat potensial karena merupakan negara kepulauan yang tergabung dalam komunitas negara ASEAN yang terletak di 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141° BT yang dibatasi oleh lautan Pasifik dan lautan Hindia, yang dikelilingi oleh dua benua yakni Asia dan Australi selain itu, letak Indonesia diantara dua rangkaian pergunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Data diatas membuktikan bahwa Indonesia memiliki lokasi yang strategis dalam jalur distribusi perdagangan dunia pada umumnya dan kawasan negara ASEAN pada khususnya.

Secara geografis, luas wilayah Indonesia adalah 1.904.569 Km² dan memiliki 17.508 pulau dilengkapi pulau-pulau besar di dunia, antara lain: Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian yang menjadikan Indonesia menjadi suatu negara kepulauan terbesar di dunia. (www.indonesia.go.id). Alam Indonesia dilengkapi 129 gunung merapi yang masih aktif yang dapat menjadikan tanah menjadi sangat subur (www.merapi.blg.esdm.go.id).

Tanah yang subur dapat menghasilkan SDA (pertanian) yang berlimpah, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan suatu wilayah. Pendapatan setiap provinsi akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi dibuktikan oleh angka produk domestik bruto (PDB) nominal yang terus menunjukkan peningkatan PDB dijelaskan pada gambar 1.

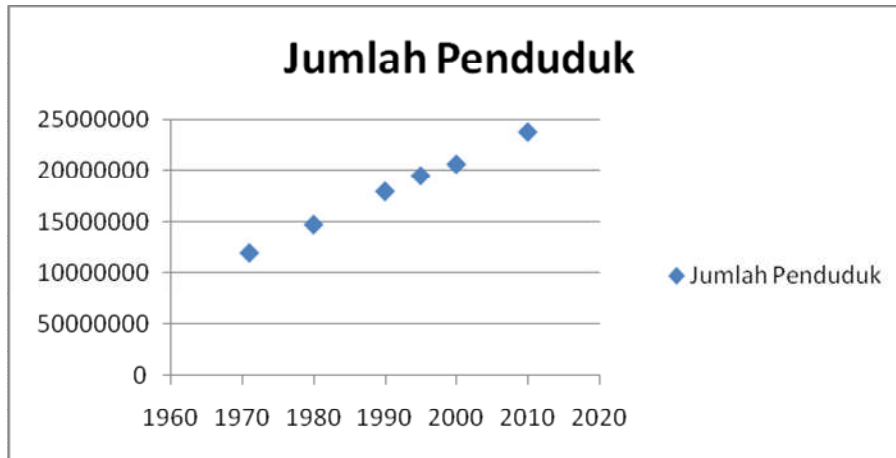
Gambar 1.
PDB Nominal Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000 – 2013 (Milliar Rp.)



Sumber : Data PDB nominal Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

PDB dari sektor pertanian dan pertambangan merupakan potensi alam yang menyumbang pendapatan pada negara selain itu, pendapatan negara juga disumbang dari sektor perdagangan yang didalamnya juga memperdagangkan hasil bumi. Sumber daya alam, manusia, perdagangan, dan jumlah penduduk yang dijadikan target pasar, sekaligus sebagai potensi tenaga kerja (faktor produksi) untuk menggerakkan industri dan perdagangan agar memenangkan kompetisi pada AFTA (Asean Free Trade Area) 2015. SDM adalah asset Indonesia untuk memenangkan AFTA 2015. Perkembangan ketersediaan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan.

Gambar 2.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia
Berdasarkan Data Sensus Penduduk tahun 1971-2010.



Sumber: www.bps.go.id

B. Telaah Literatur

Ibarat sebuah mata pisau *Asean Free Trade Area (AFTA)* dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi positif maupun negatif. Dampak negative ketika Indonesia tidak memiliki keunggulan kompetitif maka produk ASEAN menguasai pasar. Empat dampak positif AFTA bagi Indonesia: (1) memperbesar dan memperluas peluang pasar, biaya promosi dan produksi yang semakin rendah bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku /penolong serta target pasar yang berada dinegara anggota ASEAN. (2) Penghematan biaya bahan baku disebabkan karena penurunan/penghapusan tarif bea masuk yang sisepakati oleh negara anggota ASEAN.

Tabel 1.

Jadwal Penurunan dan atau Penghapusan Tarif Bea Masuk.

Negara Anggota AFTA	Jadwal Penurunan/penghapusan
ASEAN 6 yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2003 : 60% produk dengan tarif 0%. 2. Tahun 2007 : 80% produk dengan tarif 0%. 3. Tahun 2010 : 100% produk dengan tarif 0%.
Vietnam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2006 : 60% produk dengan tarif 0%.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tahun 2010 : 80% produk dengan tarif 0%. 3. Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0%.
Laos dan Myanmar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2008 : 60% produk dengan tarif 0%. 2. Tahun 2012 : 80% produk dengan tarif 0%. 3. Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0%.
Kamboja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2010 : 60% produk dengan tarif 0% 2. Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0%

Sumber : www.tarif.depkeu.go.id.

Ketiga (3) pilihan konsumen atas jasa/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Keempat (4) kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya (www.tarif.depkeu.go.id).

AFTA membuka peluang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia. Perhitungan PDB meliputi sembilan sektor lapangan usaha yaitu: pertanian(peternakan, kehutanan, perikanan) pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, Perdagangan(hotel dan restoran), pengangkutan dan komunikasi, keuangan (real estate dan jasa perusahaan), terakhir jasa-jasa (www.bps.go.id). sembilan sektor dalam prekonomian membutuhkan sumber daya manusia menggerakkan prekonomian sehingga mampu memenangkan persaingan di AFTA 2015.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif artinya “rangkaiian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi, dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami dengan tujuan penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam akan suatu situasi” (Cooper:2006).

Objek penelitian terdiri dari enam provinsi potensial di Indonesia terdiri dari provinsi: Nanggro Aceh Darusalam, D.K.I Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Objek penelitian membahas daridua sudut pandang yaitu: kompetensi penduduk dan potensi alam yang dijadikan modal menghadapi persaingan AFTA 2015. Sumber Daya Manusia (SDA) dilihat dari sisi kwalitas yang dapat diukur dari angka partisipasi

sekolah. Sudut pandang kedua adalah Sumber Daya Alam (SDA) karena kita adalah negara agraris maka penelitian fokus mengukur pendapatan sektor pertanian dan pertambangan yang nilainya dihitung dalam PDB.

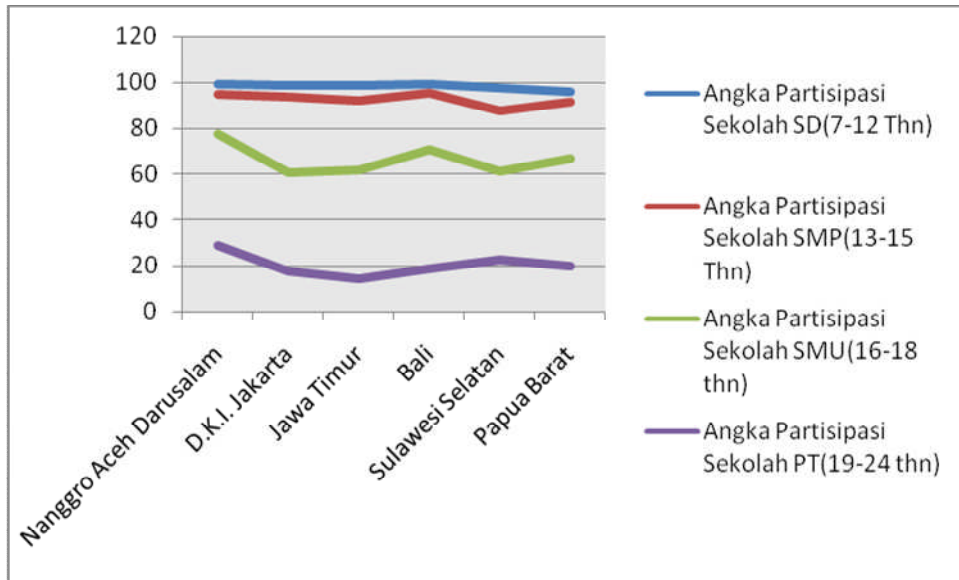
Penelitian mengolah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Variabel SDM menggunakan data angka partisipasi sekolah dan jumlah penduduk. Variabel SDA menggunakan data sektor pertanian dan pertambangan pada PDRB provinsi Nanggro Aceh Darusalam, D.K.I. Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. AFTA membuka peluang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia. Perhitungan PDB meliputi sembilan sektor lapangan usaha yaitu: bidang pertanian (peternakan, kehutanan, perikanan) pertambangan dan penggalan, Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, Perdagangan (hotel dan restoran), pengangkutan dan komunikasi, keuangan (real estate dan jasa perusahaan), terakhir jasa-jasa (www.bps.go.id). Sembilan sektor dalam perekonomian membutuhkan sumberdaya manusia menggerakkan perekonomian sehingga mampu memenangkan persaingan di AFTA 2015.

D. Pembahasan

Faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja dan modal (Dornbusch:1995). Tenaga kerja (SDM) sangat menentukan kesuksesan Indonesia menghadapi AFTA 2015. Berdasarkan data angka partisipasi sekolah masyarakat Indonesia memiliki nilai diatas 90% untuk tingkat pendidikan usia 7 – 15 tahun (SD – SMP). Sementara masyarakat usia 16 -18 tahun tingkat partisipasinya menurun < 80%, usia 19 – 24 tahun memiliki angka partisipasi terkecil < 30%. Data partisipasi sekolah memberikan urutan partisipasi tertinggi dimulai dari provinsi aceh, D.K.I. Jakarta, Bali, Sulawesi selatan, Jawa timur dan urutan terakhir Papua. Ketimpangan partisipasi pendidikan berdampak pada ketidaksiapan masyarakat menghadapi persaingan AFTA 2015. Persaingan kualitas SDM pasti akan muncul sehingga tenaga kerja yang diserap AFTA adalah SDM yang memiliki skill dan pengetahuan yang tinggi. Data ketimpangan SDM berdasarkan angka partisipasi sekolah terdapat pada gambar 3.

Gambar3

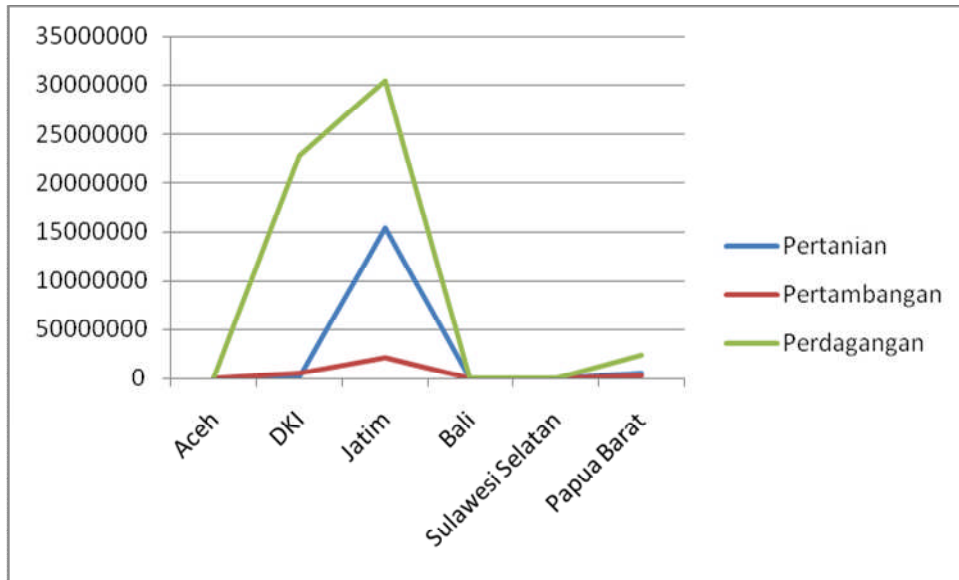
Data Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2013 (persentase %)



Sumber: www.bps.go.id.

Ketimpangan angka partisipasi sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan perkapita masyarakat. Jumlah pendapatan perkapita (*income*) berbicara tentang kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan selama satu tahun (Menkiew:2012).Pendapatan perkapita masyarakat daerah dihitung dalam PDRB provinsi.Total pendapatan disektor pertanian, pertambangan dan perdagangan adalah indikator kesiapan dalam menghadapi AFTA 2015. Produk pertambangan dan pertanian harus memiliki nilai tambah agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.Jumlah PDRB dari sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan menjelaskan besarnya porsi pendapatan daerah yang di sumbangkan. Urutan pendapatan provinsi yaitu: Jawa timur, D.K.I. Jakarta, Papua Barat, Sulawesi selatan, Aceh dan urutan terakhir diduduki oleh Provinsi Bali. Jumlah PDRB dari sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan dijelaskan padagambar 4.

Gambar 4
PDRB berdasarkan Sektor Pertanian, Pertambangan, dan Perdagangan
Tahun 2012 (Milliar Rp).



Sumber: www.bps.go.id.

E. Kesimpulan dan Saran

Senjata Indonesia menghadapi AFTA 2015 berupa ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah akan tetapi, ketersediaan kekayaan alam yang melimpah bila tidak didukung sumber daya manusia yang baik, maka kekayaan alam akan tergerus dan lama-kelamaan akan habis. Pengelolaan hasil dari alam membutuhkan manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi tinggi. Keahlian dan kompetensi tinggi akan terwujud dengan cara pemerataan angka partisipasi sekolah sampai usia 24 tahun. Pemerintah sebaiknya meluncurkan program percepatan pembangunan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Percepatan pembangunan dalam bentuk program wajib belajar hingga usia 24 tahun, sehingga masyarakat mampu mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sebelum diperdagangkan agar mendapatkan nilai tambah yang akhirnya memberikan pendapatan lebih banyak. Sumber daya manusia yang berkualitas (memiliki keahlian) harus diberikan sarana pendukung berupa keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Bali dalam Angka 2013*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Angka 2013*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Data Angka Partisipasi Sekolah tahun 2012*. www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Jawa Timur dalam Angka 2013*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Nanggro Aceh Darusalam dalam Angka 2013*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Sulawesi Selatandalam Angka 2013*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Papua Barat dalam Angka 2013*. BPS. Jakarta.
- Cooper, D.R. and Schindler, P.S. 2006. *Business Research Methods, 9th Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Tarif Bea Masuk Impor*. www.tarif.depkeu.go.id.
- Dornbusch, Fischer dkk. 1987. *Macroeconomics 4th Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Data Jumlah Gunung Merapi*.
www.merapi.blg.esdm.go.id
- Mankiw, Gregory dkk. 2012. *Principles of Economics*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd.
- Portal Nasional Republik Indonesia. *Sekilas Indonesia*. www.indonesia.go.id

RPSEP-28

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG RESPONSIF TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI KELOMPOK MARGINAL⁵²

Antarin Prasanthi Sigit⁵³

Abstrak

Prioritas pembangunan di bidang ekonomi berakibat pada liberalisasi sumber daya tanah. Strategi yang dipilih untuk itu telah mengesampingkan upaya menciptakan struktur pertanahan yang egaliter. Representasi dari pengabaian itu adalah munculnya sejumlah sengketa tanah yang melibatkan kelompok marginal (petani gurem & buruh tani) dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

Banyak sengketa tanah yang tidak juga dapat diselesaikan. Lahirnya sengketa baru berjalan lebih cepat dibandingkan penyelesaian sengketa yang ada sebelumnya. Sementara itu marginalisasi petani gurem dan buruh tani terus berlanjut tanpa perlindungan yang semestinya dari negara. Dengan mencermati realitas tersebut maka penyelesaian sengketa tanah yang mengakomodasi akses kelompok marginal terhadap keadilan mendesak untuk dilakukan.

Mengingat beragamnya fungsi tanah maka penyelesaian sengketa hak atas tanah tidak dapat hanya dikaji dari satu sisi - aspek hukumnya – saja. Dibutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya agar pemahaman yang didapat menjadi komprehensif. Karenanya penelitian ini menggunakan metode sosio-legal (*socio-legal studies*) yaitu dengan memanfaatkan pendekatan dalam ilmu hukum yang berkarakter normatif dan pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris.

Kata kunci: *struktur penguasaan tanah yang timpang, sengketa hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah, akses kelompok marginal terhadap keadilan*

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat senantiasa berada dalam keadaan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dinamika tersebut memunculkan berbagai perubahan yang menyebabkan masyarakat tidak lagi terdiri dari komunitas yang egaliter. Terjadi per lapisan

⁵²Makalah diajukan dalam Seminar Nasional Universitas Terbuka, tanggal 23 Oktober 2014

⁵³Pengajar di Bidang Studi Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mahasiswa program doktoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Alamat email: antarinprasanthi@yahoo.com

sosial (*social stratification*)⁵⁴ di sana. Hirarki yang merepresentasikan keadaan ketidaksamaan ini membuka peluang bagi terciptanya struktur masyarakat yang timpang.

Stratifikasi sosial di masyarakat juga berpengaruh pada hukum, baik itu di bidang pembuatan, pelaksanaan atau penegakan maupun penyelesaian sengketanya sehingga hukum sulit untuk mempertahankan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak.⁵⁵ Walaupun hukum memiliki fungsi yang penting yaitu untuk mengatur jalan masuk ke dalam penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah namun pada kenyataannya hukum menghadapi banyak kendala untuk melakukannya. Hukum menghadapi tantangan demi menjalankan fungsinya secara adil untuk menentukan akses bagi anggota masyarakat dalam memperoleh tanah yang mereka butuhkan.

Dalam konteks Indonesia, akses keadilan bagi warga masyarakat yang rentan (kelompok marginal) dalam pembagian tanah seringkali dipinggirkan. Di sini, “*Justice for All*” atau “Keadilan Bagi Semua” masih berada dalam tataran ideal karena pada kenyataannya masih banyak orang yang masuk dalam kategori miskin sehingga karenanya menjauhkan mereka dari akses pada keadilan, seperti yang dialami oleh petani gurem dan buruh tani. Sungguhpun secara asasi mereka berhak atas kehidupan yang memadai dan juga memiliki hak untuk memperoleh jaminan atas penegakan haknya itu. Namun dalam upaya untuk mencapai kehidupan yang layak dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, petani gurem dan buruh tani tidak menerima keuntungan yang berarti dari sistem pembagian sumberdaya tanah yang berlaku. Bahkan sistem tersebut cenderung menjauhkan petani gurem dan buruh tani dari kepastian akan jaminan penguasaan atas tanah yang dibutuhkannya. Hak mereka atas tanah yang bersifat mutlak dan sepatutnya tidak ditawar sering diabaikan, sekalipun secara ekonomi, sosial maupun budaya kehidupan mereka sangat bergantung kepada penguasaan terhadap tanah. Hak petani gurem dan buruh tani atas tanah seakan tidak memperoleh perlindungan meski sebenarnya ketersediaan luasan tanah yang adekuat secara berkelanjutan akan membuat kelompok tersebut mendapat penghidupan yang sewajarnya secara berkesinambungan.

⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 163.

⁵⁵Friedman (1975) seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlapisan sosial merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum itu bersifat diskriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri maupun melalui penerapannya. Peraturan-peraturan hukum itu sendiri tidaklah tak-memihak. Ia merupakan hasil dari suatu benturan atau perjuangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian maka pendapat yang berkuasa pun akan menentukan bagaimana isi peraturan hukum itu. *Ibid.*

Hak atas tanah bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan kaum tani pada khususnya sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960)⁵⁶ yang menjadi dasar pengaturan hukum tanah di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya kemakmuran bersama yang diharapkan dapat terwujud masih belum bisa direalisasikan. Ada banyak kepentingan berada di balik proses pengaturan tanah sehingga segala perubahan yang terkait dengan tanah harus berhadapan dengan kepentingan politik.⁵⁷

Marginalisasi petani gurem dan buruh tani berlangsung terus menerus hingga kini dan menjadi semakin parah dengan menguatnya kecenderungan pemberian berbagai keleluasaan bagi kebutuhan kapital untuk menguasai tanah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Akibat yang muncul dari dominasi kebijakan yang bersifat berat sebelah itu adalah ketimpangan dalam penguasaan tanah yang selanjutnya diikuti dengan maraknya konflik/sengketa⁵⁸ tanah di berbagai daerah di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria

⁵⁶ UUPA 1960 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal, yang seperti dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” serta Penjelasan Umum UUPA *berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah*, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia. Lihat Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 3. Lihat juga Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hal. 5. Selanjutnya dinyatakan bahwa alam pemikiran hukum adat mengandung konsepsinya hukum adat mengenai pertanahan yang diangkat dalam menjadi konsepsi Hukum Tanah Nasional dan dirumuskan sebagai *komunalistik-religius*, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama Karunia Tuhan Yang maha Esa oleh para warganegara secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Hubungan hukum *komunalistik-religius* dalam alam pemikiran hukum adat seperti itu dalam perundang-undangan dikenal sebagai hak ulayat, yang oleh Hukum Tanah Nasional diangkat pada tingkat nasional menjadi hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan semua tanah di seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama. Hubungan hukum ini dalam Hukum Tanah Nasional disebut “hak bangsa”. Lihat Boedi Harsono, *op.cit.*, 2007, hal. 30.

⁵⁷ Patrick Mc Auslan (2003) menyatakan bahwa sistem pertanahan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berlaku dan tercemar dalam politik hukumnya sehingga sistem tersebut sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian sistem pertanahan mengalami evolusi seiring dengan perubahan politik hukum. Lihat Patrick McAuslan, *Only the Name of the Country Changes: The Diaspora of "European" Land Law*, 2003, hal. 64-77. Selain itu sistem pertanahan juga berevolusi dari sistem komunal menuju sistem individual yang didorong oleh proses pembangunan dan juga terbatasnya tanah karena meningkatnya jumlah penduduk. Lihat Garret Harding, *The Tragedy of The Common Science*, 1968, hal 1243 - 1248.

⁵⁸ Pengertian konflik dan sengketa dikemukakan Maria S.W.Sumardjono: (1) Konflik (*latent conflict*) diindikasikan oleh adanya masalah yang timbul ke permukaan, ada pihak-pihak yang terlibat di mana mereka belum berhadapan langsung; (2) Sengketa (*manifest conflict*) diindikasikan oleh adanya pihak-pihak yang sudah teridentifikasi, yang berhadapan langsung dalam suatu sengketa, di mana sengketa sedang berlangsung atau berkelanjutan, dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua pihak. Secara umum, sengketa selalu diawali dengan adanya konflik. Lihat Maria S.W.Sumardjono, *Penyelesaian Konflik/Sengketa Pertanahan*, Presentasi dalam RDPU Komisi II DPR-RI, Jakarta, Februari, 2012, hal.3-4.

(KPA)⁵⁹ dalam Laporan Akhir Tahunan 2013 mencatat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013) telah terjadi peningkatan konflik tanah, di mana persentase terbesarnya terjadi di areal perkebunan.⁶⁰

Sekalipun terkendala oleh banyaknya kepentingan di balik pengaturan tanah, disparitas dalam struktur penguasaan tanah yang menciptakan “ketuna-kismaan” atau *landlessness* bagi petani gurem dan buruh tani sebagai kelompok marginal harus diatasi, di antaranya melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan secara komprehensif. Penyelesaian yang dimaksudkan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sejarah sengketa itu sendiri, pihak-pihak yang terlibat, dan unsur-unsur lain di luar hukum, sebagai suatu keutamaan.⁶¹

Agar dapat diperoleh pemahaman yang ekstensif tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dihadapi oleh petani gurem dan buruh tani sebagai kelompok marginal maka permasalahan utama yang dikaji di sini adalah “Bagaimana akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal dalam penyelesaian sengketa tanah?” Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan untuk menjawab permasalahan utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum dan asas-asas yang menjadi dasar bagi kelompok marginal untuk memperoleh akses terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah?
2. Bagaimana akses kelompok marginal terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah diberikan secara formal?

⁵⁹ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beranggotakan organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi perempuan, individu, dan akademisi yang memperjuangkan dijalkannya Pembaruan Agraria Sejati (*Genuine Agrarian Reform*) di [Indonesia](#). KPA didirikan pada tanggal [24 September 1995](#). Di tingkat global, KPA tergabung dalam ILC (*International Land Coalition*) dan menjadi dewan anggota. Lihat <http://www.kpa.or.id/?lang=en>, 14 Maret 2012.

⁶⁰KPA menggunakan pengertian konflik sebagaimana yang dipakai oleh BPN. Dijelaskan dalam laporan tersebut bahwa jumlah konflik di tahun 2013 meningkat sebesar 314% atau 3 (tiga) kali lipat dibandingkan tahun 2009. Sementara itu peningkatan lainnya adalah pada luasan areal konflik yaitu sebesar 861% dan jumlah kepala keluarga yang terlibat dalam konflik sebesar 1.744%. Selain itu ditemukan pula bahwa konflik di areal perkebunan pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 adalah yang terbesar, dengan persentase sbb: 42%, 60%, 45% dan 49%. Selain persoalan perizinan yang ditengerai sarat dengan manipulasi, masalah lain yang memicu sengketa di areal perkebunan adalah merupakan warisan persoalan sejak masa kolonial yang tidak juga dapat diselesaikan dan kemitraan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya dengan pola inti plasma di mana pembagian keuntungannya dirasikan berat sebelah. Lihat http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_final-release-19-Des.pdf

⁶¹ Setiap sengketa seringkali mempunyai spesifikasi sendiri sehingga membawa konsekuensi pada cara penyelesaiannya yang spesifik pula. Persoalan sengketa perkebunan tidak dapat semata-mata diselesaikan melalui hukum, kecuali sengketa biasa (tradisional) misalnya warisan, hibah, dan sebagainya. Lihat Achmad Sodiki, *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkenaan dengan Sumber Agraria*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya “Sengketa Agraria: Mencari Solusi yang Berkeadilan dan Mensejahterakan Rakyat Kecil”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Mei 2012, hal. 1.

3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah untuk mengakomodasi akses kelompok marginal terhadap keadilan dilakukan secara non-formal?

B. Metode Penelitian

Penelitian pertanahan di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya bersifat interdisiplin. Hal ini disebabkan oleh fungsi tanah yang beragam. Dengan demikian masalah pertanahan tidak dapat hanya dikaji dari satu sisi saja melainkan membutuhkan bantuan berbagai disiplin ilmu lainnya, yaitu dengan menggunakan kajian sosio-legal (*socio-legal studies*).

Oleh karena persoalan penyelesaian sengketa tanah yang menjadi fokus studi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakatnya maka metode yang dipergunakan di sini adalah bersifat sosio-legal. Selain mempergunakan pendekatan dalam ilmu hukum yang berkarakter normatif⁶², metode ini juga memanfaatkan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki karakter empiris⁶³.

C. Pembahasan

⁶² Studi normatif-tekstual yang dilakukan di sini adalah melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa ketentuan hukum tanah secara umum dan sengketa pertanahan secara khusus, baik perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi maupun kebijakan di bidang pertanahan lainnya dan juga doktrin-doktrin pertanahan yang ada. Material hukum dari bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat, yurisprudensi, putusan-putusan hakim. Bahan-hukum primer di sini adalah TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta ketentuan hukum yang menjadi dasar Hukum Tanah Nasional yakni Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Bahan hukum primer lainnya yang dikaji di antaranya adalah UU 18/2004 tentang Perkebunan, UU 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian berikut peraturan pelaksanaannya (PP 224/1961), PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah serta beberapa bahan hukum primer lainnya yang relevan dengan topik studi ini. Selain itu, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah berupa ajaran-ajaran hukum khususnya tentang pertanahan di Indonesia yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan pendapat dari para sarjana. Sedangkan bahan hukum tersier yang dimaksudkan sebagai pemberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Setelah kegiatan inventarisasi bahan hukum maka selanjutnya dilakukan sistematisasi atas bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Analisa data yang dilakukan dalam tahap ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait akses kelompok marginal dalam penyelesaian sengketa.

⁶³ Studi empiris-sosiologis melalui kasus-kasus sengketa tanah dilakukan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu dimanfaatkan metode pengamatan (*observasi*), wawancara secara mendalam dan diskusi dalam kelompok dengan bantuan instrumen pedoman wawancara dan pedoman diskusi. Studi kasus dipergunakan untuk membantu memberikan pemahaman tentang keberlakuan hukum sehari-hari dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Kasus yang distudi adalah sengketa tanah di areal perkebunan di Kabupaten batang, dalam hal ini sengketa antara masyarakat setempat dengan PT. Pagilaran, PT. Tratak, PT. Segayung dan PT. Simbangjati Bahagia.

I. Landasan Hukum dan Asas-asas yang Menjadi Dasar Bagi Kelompok Marginal Untuk Memperoleh Akses Terhadap Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Secara yuridis formal landasan hukum diakomodasikannya akses keadilan bagi kelompok marginal dalam penyelesaian sengketa tanah dapat ditemukan dalam:

1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945;
2. TAP IX/MPR/2001 ttg Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA dan TAP V/MPR/2003 ttg Saran Kepada Presiden dan DPR bagi Pelaksanaan Reformasi Agraria yang mengamanatkan penyelesaian konflik-konflik berkenaan dengan sumber daya agraria (termasuk di dalamnya tanah) secara proporsional dan adil.
3. UU 5/1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai dasar Hukum Tanah Nasional (HTN), dengan filosofi yang mendasarinya, yaitu:
 - a. *Falsafah Pancasila*: (1) Dasar Ketuhanan YME (Pasal 1 ayat 2, Pasal 14 dan Pasal 49); (2) Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: a. Secara umum (Pasal 10, Pasal 11 ayat 1, Penjelasan Umum II Angka 7; b. Secara khusus (perspektif kolektif → Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat 1; perspektif individual → Pasal 2 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16); (3) Dasar Persatuan Indonesia (Pasal 1 ayat 1, Pasal 9 ayat 1); (4) Dasar Demokrasi (Pasal 9 ayat 2, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 26 ayat 1); (5) Dasar Keadilan (Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat 2, Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 ayat 4, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 53, Penjelasan Umum II Angka 4)
 - b. *Falsafah Hukum Adat* (Konsiderans Berpendapat, Pasal 5 dan Penjelasannya, Pasal 16, Pasal 56, Pasal 58)
 - c. Konsepsi *komunalistik religius* sebagai penjabaran dari Pancasila dan politik pertanahan nasional yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945;

Dari pemahaman atas landasan hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa asas-asas yang digunakan untuk mengakomodasi akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal dalam penyelesaian sengketa tanah adalah:

- a. *Asas keadilan dalam penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah.*
- b. *Asas kesejahteraan rakyat ;*
- c. *Asas optimalisasi partisipasi rakyat;*
- d. *Asas fungsi sosial.*
- e. *Asas keseimbangan hak dan kewajiban.*

II. Akses Terhadap Keadilan Bagi Kelompok Marginal dalam Penyelesaian Sengketa Secara Formal

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Formal

1. Dengan menggunakan mekanisme litigasi yaitu melalui Pengadilan Umum (untuk sengketa perdata di mana berlaku ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan UUPA 1960) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk sengketa administrasi pertanahan) sebagaimana diatur dalam UU 5/1986 jo UU 9/2004 jo UU 51/2009;
2. Melalui penertiban administrasi pertanahan;
3. Melalui regulasi

B. Akomodasi Terhadap Akses Keadilan bagi Kelompok Marginal dalam Penyelesaian Sengketa Secara Formal

1. Untuk memanfaatkan cara-cara litigasi diperlukan adanya pendampingan dari aktor yang mampu memahami persoalan ketidakadilan yang dialami kelompok marginal selain juga memiliki kapasitas untuk merumuskan persoalan ketidakadilan tersebut ke dalam kerangka hukum yang ada. Hal tersebut diperlukan karena pengalaman ketidakadilan yang dimiliki kelompok marginal tidak dengan mudah dapat diungkapkan. Pengalaman yang merugikan itu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang “sudah semestinya”. Selain itu kurangnya kesadaran akan hak-hak yang mereka punyai dan minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh kelompok marginal membuat persoalan ketidakadilan ditekan dan tidak dinyatakan, apalagi diproses. Pada umumnya kelompok marginal masih enggan untuk menggunakan cara-cara litigasi karena selain biayanya mahal, waktu yang dibutuhkan juga lama. Selain itu solusi yang didapatkan sering tidak memuaskan harapan mereka;
- 2.a Permasalahan administrasi pertanahan muncul karena kesalahan penetapan pemberian hak/ijin dan pendaftaran tanah. Karenanya, jika ditemukan cacat administratif dalam pemberian hak/ijin dan pendaftaran tanah seperti itu perlu dilakukan koreksi administratif oleh instansi pemberi hak/ijin dan pendaftaran tanah. Apabila kekeliruan tersebut terlanjur menjadi sengketa maka instansi pemberi hak/ijin dan pendaftaran tanah harus memfasilitasi upaya musyawarah, sebelum dilanjutkan ke pengadilan;

- b. Sementara itu pensertipikatan yang menjadi bagian dari upaya penertiban administrasi pertanahan ternyata tidak secara serta merta mengentaskan kelompok marginal dari perangkap kemiskinan. Akses mereka kepada modal pinjaman dari bank tetap sulit karena tanah yang disertipikatkan luasannya sempit. Sebagai akibatnya tanah yang sempit itu dijual dan sertifikat tanah berpindah-tangan untuk membayar hutang dari pemiliknya.
- 3.a Regulasi yang dibuat untuk menangani konflik di masyarakat telah diatur dalam UU 7/2012 ttg Penanganan Konflik Sosial. Namun UU tersebut hanya mengatur konflik horisontal, sementara konflik vertikal yang juga sering muncul diabaikan.
- 3.b Dalam konteks sengketa tanah di areal perkebunan yang dipicu oleh konflik struktural diperlukan regulasi-regulasi yang mengutamakan pemberian kompensasi secara layak dan adil (seperti yang telah diatur dalam UU 5/1960 UU 2/2012, PP 39/1973 dan Keppres 55/1993). Selain itu diperlukan regulasi-regulasi yang mengatur pembukaan akses yang dapat meningkatkan kapasitas kelompok marginal agar nantinya mereka mampu untuk memperjuangkan hak/keadilan sendiri tanpa intervensi.

III. Akses Terhadap Keadilan Bagi Kelompok Marginal dalam Penyelesaian Sengketa Secara Non-Formal

Penyelesaian sengketa secara non-formal biasanya dilakukan melalui musyawarah dengan difasilitasi oleh mediator sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR). Penyelesaian seperti ini dipilih karena lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Selain itu penyelesaian tersebut dianggap sesuai dengan semangat kerukunan masyarakat yang ingin menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di dalam kehidupan bersama mereka sebagaimana didukung oleh realitas kehidupan di desa yang relatif masih saling tergantung. Ke"tidak-mengerti"an akan aturan-aturan hukum formal dan ke"tidak-percayaan" kepada aparat juga menjadi salah satu alasan mengapa kelompok marginal lebih memilih mekanisme non-formal untuk menyelesaikan sengketa tanah yang mereka hadapi.

Hingga sekarang sebenarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan APS/ADR. Selama ini alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan APS/ADR adalah Pasal 103 HIR yaitu bahwa hakim selalu mengusulkan penyelesaian secara damai oleh para pihak, dan Keppres 55/1993 berikut

peraturan pelaksanaannya yaitu Permeneg Agraria/KaBPN 1/1994 yang mengatur tata cara melakukan musyawarah dengan cukup rinci.

Terkait akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal dalam penyelesaian sengketa non-formal seperti APS/ADR, dapat dinyatakan:

- A. Peran serta dari berbagai pihak, di luar pihak yang bersengketa, seperti pemerintah daerah, DPRD, pimpinan informal/ketua-ketua masyarakat melalui forum dialog sering dipergunakan. Namun demikian ada kecenderungan pemilik kekuasaan di tingkat lokal mengendalikan/mendominasi proses penyelesaian sengketa. Sebagai akibatnya kesepakatan yang dicapai dalam forum dapat saja dibatalkan dan dinyatakan sebagai bias serta tidak sesuai dengan kepentingan mereka yang marginal;
- B. Beberapa forum dialog yang berhasil dilakukan adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 1. Forum-forum dialog harus disepakati, tidak hanya bentuk forumnya namun juga aturan pembicaraan yang akan dilakukan. Kesepakatan itu terjadi setelah sebelumnya dilakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa secara terpisah untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait akar sengketa dan menggali kemungkinan-kemungkinan damai yang bisa ditawarkan berikut respons alternatif jika ternyata tawaran itu tidak disetujui;
 2. Proses penyelesaian harus diupayakan bersama sehingga kemungkinan terjadinya dominasi oleh elit dengan menghasilkan “kesepakatan semu” dapat diperkecil. Proses penyelesaian sengketa secara partisipatif ini seyogyanya menghilangkan perbedaan kekuasaan, melindungi pihak yang lemah dan menjauhkan politik lokal. Sehingga untuk itu diperlukan mediator pihak ketiga yang benar-benar memiliki legitimasi dan mempunyai *concern* terhadap kelompok marginal.
- C. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mempertimbangkan faktor lokal, seperti norma lokal dan kepentingan lokal, seringkali melibatkan pula norma dan kepentingan lembaga yang lebih luas sebagai dampak dari heterogenitas penduduk dan mobilitas mereka. Dengan demikian pembuatan keputusan lokal tidak secara langsung dapat memberikan resolusi yang adil karena proses lokal juga dapat dipengaruhi oleh ketimpangan dalam relasi kuasa.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- 1.a Akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal belum diakomodasi dengan baik dalam proses penyelesaian sengketa tanah walaupun dasar hukum dan asas-asas yang mendasarinya telah mengamanatkannya. Pengabaian akan akses tersebut telah menjauhkan kelompok marginal dari cita-cita keadilan yang diharapkan dan membuat mereka semakin rentan;
- 1.b Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur formal, akses kelompok marginal tergantung pada pendampingan dari aktor luar yang punya kemampuan untuk memahami persoalan ketidakadilan yang dialami kelompok marginal selain memiliki akses informasi dan jejaring yang luas dengan lembaga bantuan hukum. Terkait administrasi pertanahan, penyelesaian perselisihannya harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung-jawab berlandaskan asas-asas penyelesaian sengketa yang telah diamanatkan. Untuk pemberian sertipikat, sebagai bagian dari penertiban administrasi pertanahan, masih belum dapat dimanfaatkan untuk membuka akses kelompok marginal akan permodalan. Sementara itu di bidang regulasi, aturan-aturan yang mengatur tentang penanganan konflik dan/atau sengketa belum komprehensif sehingga dapat disalahtafsirkan;
- 1.c Penyelesaian sengketa melalui jalur non-formal tidak menjamin absennya penyalahgunaan kekuasaan, seperti kecenderungan elit desa mendominasi upaya penyelesaian sengketa sehingga kesepakatan yang dihasilkannya sering bersifat semu. Oleh karenanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme non formal harus diupayakan bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan kelompok marginal. Proses dialog yang dinamis sangat diperlukan di sini sehingga mediator menjadi sangat berperan. Ia harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial-budayanya.

2. Saran

- 2.a Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan mekanisme formal maupun non-formal ternyata belum cukup menekan sengketa tanah untuk bereskalasi. Oleh

karenanya perlu dibuka saluran keluhan dan konsultasi warga sebelum terjadi konflik. Mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi warga tersebut diawali dari tingkat desa ke tingkat kabupaten. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya otonomi daerah di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan mekanisme ini perlu melibatkan peran serta semua pihak yang berkompeten, di mana pemerintah daerah dapat saja berperan sebagai mediator yang independen atau dapat pula menunjuk mediator lain. Pihak yang berperan sebagai mediator harus benar-benar netral dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dapat dipercaya, *credible*, dan memiliki kapasitas mediasi yang baik, selain juga memahami aspek sosio-budaya masyarakat setempat;

- 2.b Di tengah keterbatasan hukum untuk dapat memberikan keadilan maka kualitas dan kebijakan sumberdaya manusia di lingkungan pengadilan harus ditingkatkan. Pengadilan harus mampu melakukan inovasi dengan memberikan penafsiran baru jika hal tersebut dianggap perlu untuk dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Dalam merespons dinamika di masyarakat sudah waktunya dipersiapkan hakim-hakim yang mendalami satu bidang spesialis, selain sebagai seorang hakim generalis, melalui pendidikan lanjutan, pelatihan-pelatihan, guna pengembangan analisa atas kasus-kasus yang muncul, seperti di bidang pertanahan. Selain itu perlu disusun regulasi yang mengatur pembukaan akses yang dapat meningkatkan kapasitas kelompok marginal agar nantinya mereka mampu untuk memperjuangkan hak/keadilan sendiri tanpa intervensi.
- 2.c Jalur alternatif hukum non formal perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat atas lembaga penyelesaian sengketa dapat dipenuhi. Penguatan area hukum non formal ini harus diletakkan dalam konteks sebagai alternatif keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya mekanisme alternatif ini maka secara sistemik akan terjadi kompetisi yang sehat antara berbagai pilihan mekanisme hukum.

E. Daftar Pustaka

Achmad Sodiki, *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkenaan dengan Sumber Agraria*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya “Sengketa Agraria: Mencari Solusi yang

Berkeadilan dan Mensejahterakan Rakyat Kecil”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Mei 2012

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.

Garret Harding, *The Tragedy of The Common Science*, 1968, hal 1243 - 1248.

Maria S.W.Sumardjono, *Penyelesaian Konflik/Sengketa Pertanahan*, Presentasi dalam RDPU Komisi II DPR-RI, Jakarta, Februari, 2012

Patrick McAuslan, *Only the Name of the Country Changes: The Diaspora of "European" Land Law*, 2003

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

<http://www.kpa.or.id/?lang=en> ,14 Maret 2012.

http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_final-release-19-Des.pdf

RPSEP-29

KERJASAMA PENANGGULANGAN HIV/AIDS, MEMUNGKINKAN?

Amata Luna Bethari, S.Ap.
Magister Ilmu Sosial Universitas Katolik Parahyangan
amatalunab@gmail.com

Abstrak

HIV/Aids menjadi masalah global yang sampai saat ini belum ditemukan obat penyembuhannya. HIV/Aids tidak hanya menjadi ancaman yang menyerang secara fisik pada penderitanya tetapi juga menjadi beban di dalam dirinya karena stigma terhadap penderita dari masyarakat pada umumnya. Penanggulangan HIV/Aids bukan menjadi tanggung jawab atau peranan satu instansi saja, misalnya tugas departemen kesehatan. Tulisan ini bertujuan menjawab kerjasama yang seharusnya terjadi bagi para partisipan yang peduli terhadap HIV/Aids. Kerangka konseptual yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Collaborative Governance*. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis di Kota Bandung sebagai pemilihan kota yang terus berkembang dan contoh kerjasama penanggulangan HIV dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber, studi dan analisis dokumen serta observasi. Penulisan jurnal ini dengan harapan menjadi indikasi bahwa masalah-masalah publik saat ini yang tentu saja tidak hanya di bidang kesehatan, dapat diselesaikan dengan kerjasama semua pihak.

Kata Kunci: kerjasama, penanggulangan HIV, isu kesehatan.

A. PENDAHULUAN

Sehat menjadi modal dasar seseorang dalam kehidupan. Jika seseorang saja dapat hidup sehat, maka ia dapat beraktivitas melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, sehat menjadi modal penting jika seseorang ingin bekerja, belajar, dan melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Salah satu derajat kesehatan yang mempengaruhi kesehatan hidup manusia adalah HIV/Aids dan isu ini menjadi isu global karena setiap negara di dunia menghadapi permasalahan ini. Isu HIV/Aids menjadi target dalam *Millennium Development Goals* hingga tahun 2015 pada poin keenam yaitu *Memerangi HIV/Aids, malaria dan penyakit lainnya*.

MDGs yang akan mendekati tahun 2015, masih ada target di tahun 2015 dengan komitmen dan tantangan yang masih signifikan sama.⁶⁴

1. Menurunkan infeksi HIV dari transmisi seksual sebesar 50% di tahun 2015.

Jumlah tahunan infeksi baru HIV di kalangan orang remaja dan dewasa mengalami penurunan sebesar 50% di lebih di 26 negara antara tahun 2001-2012. Namun untuk negara-negara lainnya belum dapat mengurangi separuh penularan HIV secara seksual sehingga upaya pencegahan harus ditingkatkan kembali. Survei di beberapa negara sub-sahara Afrika telah mengalami penurunan penggunaan kondom dan/atau peningkatan jumlah pasangan seksual.

2. Mengurangi infeksi HIV dengan narkoba suntik di tahun 2015.

Prevelansi HIV di antara orang-orang yang memakai narkoba suntik masih tetap tinggi, angka di Asia menunjukkan 28%. Target 2015, setiap negara mampu menurunkan prevelansi sebesar 50%. Cakupan pencegahan HIV bagi orang yang menggunakan narkoba suntik masih rendah, hanya 2 dari 32 negara yang melaporkan menyediakan minimal 200 jarum suntik steril per tahun untuk setiap orang pengguna.

3. Menghilangkan infeksi HIV di kalangan anak-anak dan mengurangi kematian ibu.

Target di tahun 2015, wanita hamil yang hidup dengan intervensi antiretroviral mencapai minimal 90%. Untuk tahun 2012, cakupan antiretroviral pada wanita hamil dengan HIV hanya mencapai 62% dan jumlah anak yang baru terinfeksi HIV adalah 35% lebih rendah dari 2009. Namun, untuk mengurangi jumlah anak yang baru terinfeksi pada tahun 2015 memerlukan strategi pencegahan lain yaitu pencegahan HIV primer bagi perempuan dan akses penggunaan kontrasepsi bagi keluarga.

4. Mencapai 15 juta orang yang hidup dengan HIV dengan pengobatan antiretroviral pada tahun 2015.

⁶⁴ *Ibid*, hlm..4.

Pada tahun 2012, 9,7 juta orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menerima pengobatan antiretroviral (ART), mewakili 61% dari semua orang yang memenuhi syarat dalam pedoman pengobatan yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO). Namun, di tahun 2013, cakupan pengobatan HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah hanya mewakili 34% dari 28,3 juta orang. ART tidak hanya mencegah penyakit terkait Aids dan kematian, tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko penularan HIV dan penyebaran TBC.

5. Mengurangi kematian yang disebabkan karena *tuberculosis* (TB) bagi orang-orang dengan HIV di tahun 2015.

Target di tahun 2015 untuk mengurangi kematian akibat TB pada orang-orang dengan HIV/Aids sebesar 50%. Sejak tahun 2004, kematian akibat TB mengalami penurunan hingga 36% di seluruh dunia dan di Afrika ada 75% orang yang hidup dengan TB dan HIV/Aids. Di antara 10 negara yang melaporkan jumlah terbesar penderita HIV/TB, hanya 2 negara yaitu Kenya dan Malawi yang memberikan pengobatan ART pada tahun 2012 menjadi lebih dari 50% pasien HIV/TB positif, sementara laju peningkatan pengobatan untuk pasien HIV/TB melambat.

6. Menutup kesenjangan sumber daya global untuk Aids.

Target pengeluaran tahunan sebesar US \$ 22-24 milyar. Pada tahun 2012, sekitar US \$ 18,9 milyar tersedia untuk program HIV di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan peningkatan 10% dari tahun 2011. Meskipun bantuan internasional untuk HIV tetap stabil secara riil di tahun 2012, banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah telah meningkatkan pengeluaran keuangan untuk HIV. Belanja domestik menyumbang 53% dari seluruh pengeluaran terkait HIV di tahun 2012. Meskipun peningkatan investasi dalam negeri telah terjadi di antara negara-negara di semua tingkat pendapatan, belanja meningkat tajam di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dengan banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah tergantung pada bantuan internasional. 51 negara, 75% pengeluaran untuk HIV nya tergantung pada bantuan internasional.

Sumber daya domestik untuk belanja pengobatan dan perawatan sedangkan bantuan internasional untuk belanja kegiatan pencegahan.

7. Menghilangkan ketidaksetaraan kekerasan berbasis gender dan meningkatkan kapasitas perempuan dan anak untuk melindungi diri dari HIV.

Perempuan yang mengalami kekerasan sebagai pasangan, memungkinkan hidup dengan HIV sebesar 50%. 92% dari seluruh negara dalam ulasan jangka menengah mengenai penanggulangan Aids nasional, mengakui bahwa pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender. Namun, kurang dari setengah negara saja yang mengalokasikan dana untuk organisasi perempuan, mengintegrasikan HIV dan pelayanan kesehatan reproduksi serta seksual.

8. Menghilangkan stigma, diskriminasi dan praktik hukum terkait HIV.

Stigma dan diskriminasi terkait penderita HIV masih dapat ditemukan di beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah akses perawatan kesehatan. Pada tahun 2012, 61% dari negara-negara melaporkan adanya undang-undang anti diskriminasi yang melindungi orang-orang yang hidup dengan HIV. Proporsi negara yang melaporkan adanya jasa hukum terkait HIV meningkat dari 45% tahun 2008 menjadi 55% tahun 2012, tetapi kurangnya akses layanan hukum berarti masih ada contoh diskriminasi HIV yang tidak tertangani.

9. Menghilangkan pembatasan masuk dan menetap terkait HIV.

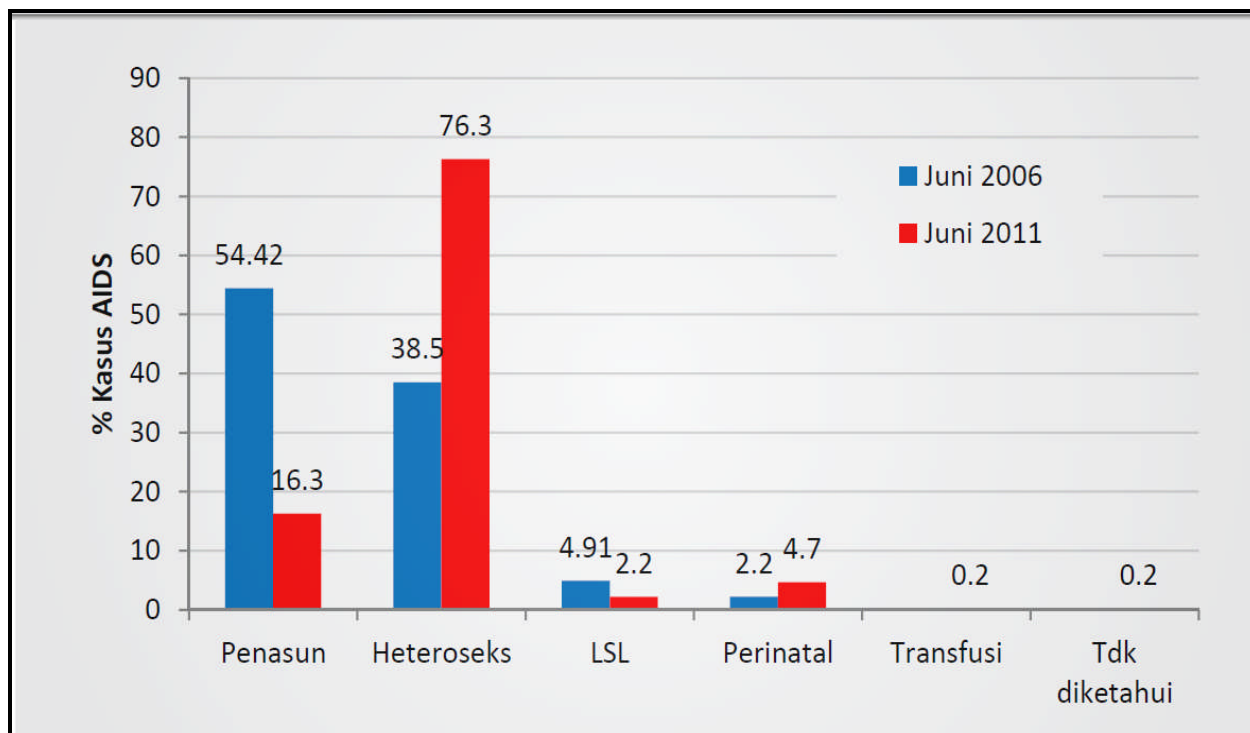
Sejak tahun 2010, 8 negara telah menghilangkan pembatasan masuk dan tinggal bagi orang-orang yang hidup dengan HIV. Pembatasan masuk dan menetap, mencerminkan penguatan stigma dan diskriminasi yang menghambat respon terhadap Aids yang membuat kesulitan bagi orang dengan HIV.

10. Memperkuat integrasi HIV

Meskipun tren terhadap integrasi HIV dengan sistem dan berbagai sektor telah jelas, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menghilangkan struktur dan sistem paralel agar memastikan integrasi HIV dalam upaya kesehatan dan pembangunan yang luas. 90% negara di dunia mengakui integrasi sebagai prioritas inti, 82% adalah rencana strategis nasional dan 45% melaporkan bahwa HIV diselaraskan dengan perencanaan penyakit yang lain. 53% dari negara-negara sepenuhnya terintegrasi HIV dan layanan TB sebagai pelayanan bersama, 70% dari negara-negara membuka layanan untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dimana 2/3 nya berupa layanan kesehatan seksual dan reproduksi, 23% dari negara-negara menghubungkan HIV dan pengelolaan penyakit menular kronis lainnya dan setengahnya terintegrasi dengan konseling dan *testing* serta ART.

Harapannya, di dalam laporan *Global Report UNAIDS report on the global Aids Epidemic 2013*, seluruh dunia dapat mengurangi penularan infeksi HIV sehingga pencegahan Aids dapat meningkat. Di beberapa negara di Asia Tenggara telah mencapai kemajuan yang baik dalam melawan penyakit, namun situasinya masih suram di negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Laos, Sri Lanka dan Filipina. Sejak HIV pertama kali muncul 1980, penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling mendesak di dunia, sebagian besar menyerang kaum muda yang aktif secara ekonomi. Penyakit ini paling umum di sub-sahara Afrika, tempat HIV dianggap sebagai epidemi umum yang mempengaruhi populasi secara lebih luas. Di Asia Tenggara, HIV disebut sebagai epidemi yang terkonsentrasi, mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu seperti pekerja seks, orang yang menyuntikkan narkoba, atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Saat ini, HIV/Aids berada di urutan kelima setelah penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan, stroke dan diare sebagai penyakit yang mematikan di dunia.⁶⁵

⁶⁵ Dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/content/angka-kematian-terkait-hiv-meningkat-di-98-negara/1733733.html> mengenai *Angka Kematian Terkait HIV Meningkat di 98 Negara* yang diakses pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 13.30 WIB.



Gambar 1. Persentase Penyebab Transmisi HIV di Indonesia tahun 2006 dan 2011

Perbedaan yang sangat jelas penyebab transmisi HIV di tahun 2006 dan 2011. Ketika di tahun 2006, penyebab yang utama adalah penasun yaitu pengguna narkoba suntik, sedangkan di tahun 2011 penyebab utama adalah heteroseksual seperti wanita/pria tuna susila, waria, dan pasangan suami istri berisiko. Ini bukanlah kemajuan, dari satu sisi di tahun 2011, penggunaan narkoba suntik berkurang namun tidak menutup penggunaan narkoba jenis lain, satu sisi lagi, bagi pasangan yang berisiko atau seseorang dengan pekerjaan yang dianggap berisiko dapat menularkan HIV dengan mudah bagi seseorang yang tidak berisiko misalnya kepada anak.

Tabel 1. Jumlah Kumulatif Kasus HIV/Aids Menurut Provinsi Tahun 2013

No	Provinsi	HIV	Aids
1	Papua	12840	7795
2	Jawa Timur	15273	7714
3	DKI Jakarta	27224	6299
4	Jawa Barat	9340	4131
5	Bali	7791	3798
6	Jawa Tengah	5882	3339
7	Kalimantan Barat	3973	1699

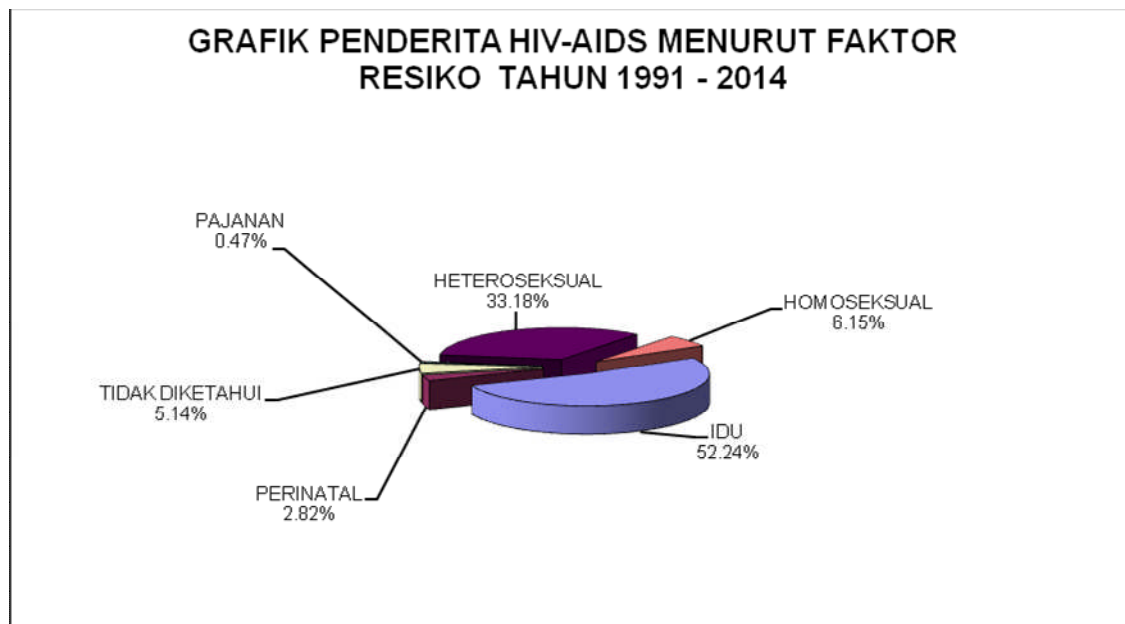
No	Provinsi	HIV	Aids
8	Sulawesi Selatan	3563	1660
9	Banten	2983	957
10	Riau	1620	951
11	D.I. Yogyakarta	1966	821
12	Sumatera Barat	836	802
13	Sulawesi Utara	1973	759
14	Sumatera Utara	7588	515
15	Nusatenggara Timur	1453	496
16	Jambi	577	384
17	Kepulauan Riau	3640	382
18	Nusatenggara Barat	666	379
19	Maluku	1093	355
20	Kalimantan Timur	2071	332
21	Sumatera Selatan	1389	322
22	Bangka Belitung	406	288
23	Lampung	898	242
24	Papua Barat	2174	187
25	Sulawesi Tenggara	196	186
26	Bengkulu	213	160
27	NAD	124	145
28	Kalimantan Selatan	314	134
29	Maluku Utara	193	131
30	Sulawesi Tengah	275	127
31	Kalimantan Tengah	180	93
32	Gorontalo	45	62
33	Sulawesi Barat	33	5
	Jumlah	118792	45650

(sumber : www.yayasanspiritia.co.id mengenai Laporan Terakhir Kemenkes)

DKI Jakarta menjadi daerah dengan epidemik HIV/Aids tertinggi di Indonesia sampai tahun 2013. Data kasus HIV/Aids di atas merupakan data kasus yang teridentifikasi di Indonesia dan Jawa Barat menempati urutan keempat di Indonesia. Data di atas menyajikan bahwa penyebaran HIV merata di seluruh Indonesia.

Kota Bandung berada pada posisi pertama dengan kasus HIV/Aids di provinsi Jawa Barat. Kasus HIV di Kota Bandung ditemukan pada tahun 1991 sebanyak 1 orang dan perkembangannya setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena banyaknya kasus HIV/Aids di Kota Bandung yang meningkat pula. Pada awalnya kasus HIV ditemukan pada kelompok tertentu yang mempunyai risiko tinggi seperti pengguna narkoba

suntik, wanita penjaja seks dan lelaki seks lelaki lainnya. Sejak tahun 2006 kasus HIV telah ditemukan pada ibu rumah tangga dan anak. Hal ini disebabkan orang yang berisiko tinggi menularkan pada pasangannya sebagai ibu rumah tangga dan dari ibu ditularkan kepada anaknya dan kecenderungannya setiap tahun terus meningkat. Sampai tahun 2011 tercatat 248 kasus ibu rumah tangga dan 75 kasus anak.⁶⁶



Gambar 2. Grafik Penderita HIV/Aids Menurut Faktor Risiko di Kota Bandung Tahun 1991-2014

Menurut data di atas, faktor risiko penyebaran HIV/Aids di Kota Bandung yang tertinggi adalah penggunaan *Injecting Drug Use* (IDU) atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan risiko ini tinggi di antara pengguna narkoba dengan jarum suntik yang disebut putauw. Penggunaan jarum suntik berisiko menularkan jenis penyakit hepatitis C dan HIV/Aids. Di peringkat kedua tertinggi adalah heteroseksual pada pasangan suami istri, pasangan yang berganti-ganti pasangan, pekerja seks, dan diikuti dengan pasangan homoseksual bagi para gay atau waria dan pasangan lesbi. Sebesar 2,82%, risiko penularan HIV terjadi juga dalam periode perinatal (periode kehamilan, selama dan setelah persalinan).

⁶⁶ Dikutip dari <http://www.kpakotabandung.org/index.php/kpa/tujuan> mengenai *Latar Belakang KPA* yang diakses pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 21.00 WIB.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, *collaborative governance* adalah⁶⁷

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Adanya hubungan baik yang terjalin antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam memecahkan masalah publik. Penyelesaian ini dimulai dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan dilaksanakan secara formal dengan musyawarah antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang memiliki kepentingan sehingga masalah yang ada dalam masyarakat dapat dipecahkan.

Salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam pemberantasan HIV/Aids adalah Komisi Penanggulangan Aids. KPA dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan Aids dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan Aids Pusat Nomor 8/KEP/MENKO KESRA/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids. Dasar hukum berdirinya KPA diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan Aids di daerah.

Komisi Penanggulangan Aids Kota Bandung sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 443/Kep.190-Huk/2007 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA) Kota Bandung. Lembaga ini termasuk aktif dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan HIV di kota Bandung karena ia sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat khususnya para penderita HIV/Aids di Kota Bandung.

⁶⁷ Chris Ansell dan Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley. hlm. 544.

1. Komisi Penanggulangan Aids dengan klinik kesehatan

Ada beberapa layanan HIV/Aids di Kota Bandung seperti *Voluntary Counselling and Testing (VCT)*/Konseling dan Tes HIV Sukarela, *Care Support Treatment (CST)*/Perawatan Pengobatan Dukungan, *Anti Retroviral (ARV)*/Obat yang dapat menekan pertumbuhan virus HIV, *Harm Reduction (HR)*/Pengurangan Dampak Buruk Narkoba dalam program pencegahan HIV/Aids dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Beberapa daftar tempat yang menerima layanan HIV/Aids, yaitu :

- a. Ruang teratai RS. Hasan Sadikin : CST (VCT, ARV dan perawatan)
- b. RSUD Kota Bandung : CST (VCT, ARV dan perawatan)
- c. Puskesmas Kopo : HR, VCT dan Yankesdas
- d. Puskesmas Ibrahim Adjie : HR, VCT dan Yankesdas
- e. Puskesmas Garuda : HR, VCT dan Yankesdas
- f. Puskesmas Pasundan : HR, IMS, VCT dan Yankesdas
- g. Puskesmas Pasirkaliki : HR dan Yankesdas
- h. Klinik Mawar PKBI : IMS dan VCT

Bagi para pasangan berisiko, tes HIV wajib dilakukan dan tes sudah dapat dilakukan di puskesmas sebagai unit pelayanan terpadu kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya pelayanan di puskesmas Pasundan. Pelayanan yang pertama adalah HR atau pengurangan dampak buruk narkoba dalam program pencegahan HIV/Aids dengan kegiatan pertukaran jarum suntik. Program ini diadopsi dan diinisiasi dari WHO. Program pertukaran jarum suntik ini diberikan kepada para pengguna narkoba suntik atau *Injected Drug User (IDU)* dengan tujuan untuk mencegah penularan virus HIV kepada orang lain dan penyakit virus lainnya yang ditularkan melalui jarum suntik. Di puskesmas, layanan ini disebut Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS). Program ini tentu menimbulkan kontra karena mendukung pengguna narkoba suntik. Namun, bagi pengguna narkoba suntik, mereka belum dapat menghentikan sepenuhnya aktivitas narkoba mereka dan mereka

berusaha untuk mengurangi penggunaan narkoba tersebut. Beberapa pengguna narkoba suntik juga menjadi penderita HIV.

Pelayanan LJSS tidak hanya melayani pertukaran jarum suntik, tetapi juga memberikan edukasi atau pendidikan atau penyuluhan kepada pengguna narkoba suntik untuk mau peduli dengan orang di sekitarnya agar tidak tertular dengan tidak sengaja tertusuk oleh limbah jarum suntik bekasnya. Para pengguna diajarkan untuk mensterilkan jarum suntik yang telah dipakai, diajar untuk mengumpulkan dan mengamankan jarum suntik bekasnya dan selalu dihibau untuk segera mengembalikan jarum suntik bekas ke puskesmas.

Kemudian, beberapa penderita HIV di kota Bandung sudah ada yang menikah. Mereka diwajibkan untuk melindungi pasangan yang berisiko dengan penggunaan pengaman yaitu kondom karena infeksi virus HIV menyebar melalui cairan kelamin saat berhubungan intim. Pengenalan ini pun melalui penyuluhan seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Pasundan yang bekerja dengan KPA Kota Bandung dimana KPA Kota Bandung menyebar informasi kepada LSM pemerhati HIV/Aids dan masyarakat di Kecamatan setempat yaitu Regol. Tes VCT juga dilakukan di puskesmas, dengan Rp.10.000,- dan membayar administrasi, tes HIV sudah dapat dilakukan.

Bagi para penderita HIV/Aids, puskesmas juga memberikan pengobatan ARV, yaitu obat yang dapat menekan laju pertumbuhan virus HIV sehingga seseorang yang telah terinfeksi HIV mampu bertahan hidup dengan meminum obat ARV secara rutin pada jam tertentu dan setiap hari selama hidupnya.

KPA Kota Bandung menjadi pen jembatan informasi terhadap program penanggulangan HIV/Aids yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui puskesmas menjadi mitra dengan KPA Kota.

2. Komisi Penanggulangan Aids dengan LSM Pemerhati HIV/Aids

Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi himpunan bagi orang-orang yang berkepentingan karena memiliki kesamaan baik dalam hobi, visi dan misi, ideologi dan masalah yang sama, sama halnya dengan beberapa LSM yang selalu berhubungan dengan KPA dalam hal penyebaran informasi mengenai kegiatan pemerintah. Bagi para anggota dalam LSM peduli HIV/Aids memiliki misi dan pola yang sama yaitu menghilangkan stigma masyarakat terhadap Orang dengan HIV/Aids (odha), menjalankan aktivitas positif bagi para odha dan mengurangi penyebaran infeksi HIV.

Stigma dan diskriminasi ini berupa .⁶⁸

a. Stigma dan Diskriminasi di Lingkungan Individual

HIV/Aids masih memiliki citra yang menakutkan di kalangan masyarakat khususnya pada penderita sendiri, selain karena faktor cara penularannya, Aids dianggap sebagai vonis hukuman mati. Orang yang pertama kali terdiagnosis HIV/Aids seringkali merasa depresi, takut, gundah dan putus asa. Hal ini menyebabkan ODHA melakukan stigma dan diskriminasi terhadap dirinya sendiri. Kejadian ini masih sering dijumpai pada ODHA di Kota Bandung terutama pada ODHA yang berusia lebih muda yaitu sekitar 15-24 tahun. Ketika pertama kali terdiagnosis HIV, banyak ODHA merasa cemas tidak akan lagi diterima di keluarga, lingkungan dan masyarakatnya serta ketakutan untuk menyongsong masa depan sehingga ODHA tidak lagi mau bergaul, tidak mau melanjutkan pendidikan atau cenderung melakukan bunuh diri. Pada ODHA yang sudah lebih tua cenderung tidak mengalami stigma sebab telah mencapai tingkat kemandirian dan kepercayaan diri.

b. Stigma dan Diskriminasi di Lingkungan Keluarga

Stigma dan diskriminasi di lingkungan keluarga di Kota Bandung masih sering terjadi hingga saat ini walaupun sudah mulai terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan terjadi seiring dengan mulai bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/Aids. Contoh tindakan stigma dan diskriminatif yang

⁶⁸ Eka Nurhayati, Deni. K. Sunjaya, Irvan Afriandi. *Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHA di kota Bandung (Bandung : Universitas Padjajaran)*, hlm 5.

terjadi di lingkungan keluarga di Kota Bandung diantaranya adalah pengucilan atau pembuangan ODHA ke tempat terpencil di luar kota, pengucilan ODHA dari daftar waris keluarga, pemisahan alat mandi dan alat makan di rumah, serta tuntutan perceraian dari pasangan.

c. Stigma dan Diskriminasi di Lingkungan Komunitas

Seperti halnya pada lingkungan keluarga, stigma dan diskriminasi di lingkungan komunitas pun telah banyak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat saat ini telah menerima ODHA sebagai bagian dari komunitas. Tindakan diskriminatif yang sebelumnya ada seperti pengucilan, tidak mau berjabat tangan atau melakukan kontak dengan ODHA masih ada di tengah-tengah masyarakat, namun menunjukkan banyak perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Pengakuan beberapa ODHA yang sudah mau membuka statusnya kepada masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak lagi menemukan kesulitan untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat. Senada dengan pengakuan tersebut, narasumber lainnya juga menyatakan bahwa saat ini tingkat toleransi masyarakat terhadap ODHA di Kota Bandung saat ini semakin tinggi. Menurut narasumber, hal ini diakibatkan oleh peran serta LSM dan masyarakat yang turut serta membantu pemerintah dalam sosialisasi HIV/Aids.

d. Stigma dan Diskriminasi di Lingkungan Institusi

Stigma dan diskriminasi di berbagai lingkungan institusi di Kota Bandung, terbilang masih tinggi dan menimbulkan banyak hambatan. Di institusi pendidikan, banyak ODHA anak dan anak dari ODHA yang tidak mau lagi melanjutkan pendidikan karena mendapat perlakuan yang berbeda dari guru maupun rekan sesama siswa. Lebih buruk lagi, masih banyak institusi sekolah yang tidak mau menerima ODHA anak atau anak ODHA untuk bersekolah di institusinya. Di institusi pekerjaan, saat ini banyak perusahaan swasta maupun BUMN di Kota

Bandung yang mengharuskan pelamarnya melakukan tes diagnostik HIV. Bila hasilnya positif, maka pelamar tentu saja tidak diterima bekerja. Tindakan lainnya adalah mencutikan pegawai ODHA dalam waktu yang tidak terbatas, pemecatan secara sepihak, tidak mendapatkan jaminan kesehatan tenaga kerja dan sebagainya. Di institusi kesehatan pun masih banyak terjadi tindakan diskriminatif walaupun kebanyakan tenaga kesehatan telah memiliki pengetahuan yang cukup memadai mengenai HIV/Aids. Tindakan diskriminatif ini antara lain adalah tes diagnostik HIV tanpa informed consent kepada pasien yang akan dilakukan tindakan operatif, tenaga kesehatan tidak mau melakukan kontak fisik seperti jabat tangan dan pemeriksaan fisik dasar dengan ODHA, tenaga kesehatan tidak mau mengambil sampel darah ODHA dan sebagainya.

e. Stigma dan Diskriminasi di Lingkungan Kebijakan

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids di Kota Bandung saat ini jumlahnya sangat banyak, namun belum ada kebijakan yang secara spesifik mengatur stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Kebijakan yang ada pun dinilai kurang sosialisasi ke masyarakat umum, sehingga yang mengetahui kebijakan tersebut hanya pemerintah. Kebijakan pun dinilai hanya sebagai aturan tertulis, namun implementasinya di lapangan sangat berbeda. Contohnya ialah kebijakan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh memecat karyawan ODHA. Pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak ditemui kasus karyawan dipecat karena terdiagnosis HIV. Kebijakan lainnya ialah pelarangan pemeriksaan HIV pada pelamar kerja. Kenyataannya, masih banyak perusahaan yang meminta pelamar kerja untuk melakukan tes HIV terlebih dahulu sebelum diterima kerja.

Misi yang dikembangkan oleh LSM ini, sama halnya dengan misi yang dikembangkan KPA yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis dalam pengendalian, penanggulangan serta memutus mata rantai penyebaran HIV/Aids di Kota Bandung.
- b. Mengidentifikasi dan memetakan lokasi/wilayah yang berpotensi dalam penyebaran HIV/Aids di Kota Bandung.

- c. Mengembangkan pusat informasi dalam hal penanggulangan HIV/Aids serta pengelolaan data dan informasi terkait HIV/Aids di Kota Bandung.
- d. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral, lintas daerah dan antar tingkatan pemerintahan berkaitan penanggulangan HIV/Aids.
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/Aids di Kota Bandung.
- f. Menyiapkan laporan tentang perkembangan endemic HIV/Aids di Kota Bandung serta upaya penanggulangannya kepada KPA Provinsi Jawa Barat dan KPA Nasional.

3. Komisi Penanggulangan Aids dengan Masyarakat

Kebijakan yang dikeluarkan KPA adalah membentuk program Warga Peduli Aids (WPA) yang diprakarsai di tahun 2005. WPA adalah bentuk gerakan warga masyarakat yang memiliki kesiapan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah penyakit medis yang ditimbulkan akibat perilaku masyarakat yaitu penyakit kelamin (infeksi menulat seksual), hepatitis C dan HIV/Aids. WPA ada di setiap kecamatan. Sampai tahun 2011, baru ada 7 kecamatan yang memiliki wadah WPA. Di tahun 2012, wadah WPA sudah mencapai 22 kecamatan. WPA menjadi semacam pionir di lingkungannya dengan mengajak warga sekitarnya untuk memahami persoalan HIV/Aids secara lebih mendalam

Salah satu kegiatan yang dilakukan dimana anggota WPA menghadiri penyuluhan mengenai HIV/Aids di puskesmas. Setelah mereka mendapatkan penyuluhan, mereka akan kembali ke kecamatan masing-masing dan menyebarkan informasi bagi warga setempat di masing-masing RW. Tidak hanya berakhir sebagai penyebar informasi juga, WPA memberikan bantuan juga untuk mendampingi para odha di wilayah setempat untuk menjalani terapi pengobatan HIV.

Hal ini menjadi peluang bahwa stigma negatif mengenai odha dapat berkurang.

C. PENUTUP

Bentuk kerjasama yang dilakukan Komisi Penanggulangan Aids dilakukan dengan tiga pihak yaitu puskesmas, LSM dan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan akan ada aktor-aktor baru yang memiliki rasa yang sama, misalnya pihak bisnis. Kerjasama dengan tiga pihak tersebut berjalan secara beriringan dan saling mendukung. KPA kota Bandung membuktikan bahwa ia mampu berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV/Aids.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kerjasama antar instansi di Indonesia sangat diharapkan terjadi. Adanya pembagian tanggungjawab bahwa isu HIV/Aids menjadi perhatian bersama. Dunia mengakui bahwa penyebaran HIV akan sangat cepat apabila setiap individu tidak memiliki rasa peduli terhadap sesamanya. Apa yang dilakukan oleh KPA Kota Bandung sebagai kepanjangan tangan program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemberi informasi sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Penulis berharap bahwa akan muncul aktor baru untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan HIV/Aids misalnya bisnis. Tentu saja, hal ini dapat dianggap sebagai tanggungjawab sosial perusahaan untuk masyarakat. Penulis juga berusaha untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai kerjasama yang menghasilkan dampak jangka panjang. Dengan kata lain, penulis ingin meneliti dampak dari kerjasama ini.

Sekian penulisan jurnal ini, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi narasumber dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

“Angka Kematian Terkait HIV Meningkat di 98 Negara”

(<http://www.voaindonesia.com/content/angka-kematian-terkait-hiv-meningkat-di-98-negara/1733733.html>, diakses 18 Maret 2014)

“Latar Belakang KPA”

(<http://www.kpakotabandung.org/index.php/kpa/tujuan>, diakses 20 Maret 2013)

Jurnal

Ansell, Chris., Gash, A. (2007), "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 544-563.

Nurhayati, Eka., Sunjaya, D., Afriandi, I.. (2012), "Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODHA di kota Bandung", *Universitas Padjajaran*, 5-7.

RPSEP-30

MEREFLEKSI PENTINGNYA DIMENSI WILAYAH SEBAGAI FAKTOR LOKASIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG

Oleh : ennys@ut.ac.id
Dosen Fekon UPBJJ-UT Palembang

Abstrak

Pada saat ini Palembang berkeinginan merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman dan Sejahtera) dengan ikon Jembatan Ampera, dan mewujudkan Palembang kota International atau Sumsel go International. Pemerintah kota telah membuat rencana jangka menengah hingga tahun 2031, yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan membagi daerah menjadi Sembilan kawasan strategis, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus berkembang..

Dimensi wilayah merupakan hal penting dalam menganalisis dan menentukan dimana suatu program atau proyek diletakkan dalam perencanaan pembangunan. Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi. Dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasi akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan tersebut. Dalam studi pembangunan pengertian wilayah ditekankan bagaimana pentingnya kedudukan pusat urban tingkat nasional berkaitan dengan aglomerasi industri..

Dalam tulisan ini akan dibahas strategi penting dan menarik yang berpengaruh mendasar terhadap penataan ruang wilayah baik secara regional maupun nasional. Gejala ekonomi menjadi jelas dan nyata apabila tata ruang wilayah diterapkan dalam kerangka analisis pembangunan ekonomi. Selanjutnya apakah dimensi wilayah perencanaan strategis tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis dan sosial oleh pemerintah kota Palembang dengan efektif dan efisien. Tantangan dalam menghadapi permasalahan perencanaan dan pelaksanaan harus didukung oleh kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang, walaupun kadang kala kebijakan harus bertentangan dengan budaya, adat istiadat, karakter manusia setempat.

Peluang kota Palembang harus digali dengan sebaik-baiknya mulai dari sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam. Pemanfaatan harus dicermati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya, sehingga pembangunan terus berkembang. Keberhasilan pembangunan merupakan modal dasar untuk mewujudkan Palembang EMAS.

Kata Kunci : dimensi wilayah, faktor lokasional, pembangunan ekonomi

Abstract

At this time Palembang eager to realize the vision and mission that has been set at Palembang EMAS (Elegant, Civil, Safe and Prosperous) with Ampera Bridge icons, and realize the city of Palembang in South Sumatra International or go International. The city government has made a medium-term plan until the year 2031, as stipulated in the Spatial

Plan (Spatial) by dividing the area into nine strategic areas, so that the development and economic growth continues to grow ..

Dimensional region is important in analyzing and determining which a program or project is put into development planning. Connoted region with the location of a development activity or economic activity. Thus the selection or determination of the location will affect the sustainability of these activities. In the area of development studies emphasized how important understanding the position of the center of national urban agglomeration berkaitan the industry ..

In this paper will discuss important and interesting strategy that fundamentally affect the spatial structuring both regionally and nationally. Symptoms became apparent and the real economy if applied spatial analysis within the framework of economic development. Furthermore, if the dimensions of the area of strategic planning has been implemented economically and socially by the city of Palembang with effectively and efficiently. Challenge in addressing the planning and implementation of strategic policies must be supported by short-term, medium and long term, although sometimes at odds with the policy should be the culture, customs, local human character.

Opportunities should be explored Palembang city with the best start of human resources, and natural resources. Utilization should be observed ranging from planning, implementation, and evaluation to determine the next policy, so that development continues to grow. The success of development is the basis for realizing Palembang EMAS.

Keywords: *dimensional region, locational factors, economic development*

A. Pendahuluan

Sejak terpilih sebagai walikota Palembang H.Romi Hertton yang pada saat ini menjadi tahanan KPK terus berupaya merealisasikan program kerja, terutama dalam merumuskan visi, misi dalam mencapai Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera), dengan ikon Jembatan Ampera untuk mewujudkan Palembang kota Internasional. Oleh sebab itu marilah kita analisa kajian tersebut melalui Ekonomi Regional terutama pengembangan kawasan yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah kota Palembang.

Pertumbuhan wilayah dari dalam dimaksudkan sebagai telaah atau wacana untuk mengamati proses berlangsungnya pertumbuhan pembangunan dalam suatu wilayah yang ditinjau dari segi hubungan fungsional atau interaksi antar sub sistem dalam suatu wilayah. Tata ruang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tata ruang wilayah secara geografis, Tata ruang wilayah dengan *polarisasi* membahas pengertian tentang ketergantungan antar berbagai elemen yang ada, sebagai landasan untuk mengkaji pusat-pusat kota yang saling ketergantungan.

Ekspansi perangkat kegiatan-kegiatan *polarisasi* terkait akan menimbulkan dua macam dampak yaitu *aglomerasi* (*agglomeration effect*) yang terjadi jika industri pendorong berhasil menarik kegiatan-kegiatan komplementer (saling melengkapi). Kegiatan untuk memperoleh kesempatan kumulatif dengan tingkat biaya yang lebih rendah terkonsentrasi pada sebuah tempat, disebut dampak pertemuan jalan (*junction effect*). Kedua kegiatan ini timbul akibat dari konsekuensi dari penciptaan jaringan transformasi yang melayani utamanya kepada unit-unit pendorong dan kegiatan-kegiatan ekonomi terkait lainnya secara langsung. Sedangkan kegiatan yang melayani produsen disepanjang jaringan transformasi untuk memperoleh akses pasar harus juga berjalan secara langsung.

Jika dilihat dari segi tata ruang wilayah geografis, industri-industri pendorong dan industri-industri yang dominan telah mendorong terjadinya *aglomerasi* pada kutub-kutub pembangunan di mana mereka berada, maka jelaslah bahwa besarnya kapasitas industri mempunyai pengaruh yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dengan dioperasikan pelabuhan Tanjung Api-api berdampak pada penyerapan tenaga kerja, areal pergudangan, industri sangat jelas pertumbuhannya. Menurut rencana kawasan ini akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan melalui Tanjung Carat akan menjadi pelabuhan Internasional dengan luas 3000 hektar dan bisa disandari 7000 DWT (*dead weight tonnage*). Sebagai contoh lainnya adalah pembukaan daerah baru Jaka Baring, daerah Grand City, daerah Alang-alang Lebar, daerah Karya Jaya, daerah Sukarami, Kertapati dan sebagainya.

Palembang dengan luas wilayah 400,41 kilometer persegi, dengan penduduk 1,5 juta jiwa yang tersebar dalam 16 kecamatan, 107 kelurahan kota Palembang terus berbenah diri, sehingga kota ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 9,71%, pendapatan per kapita Rp.32.670.008, dan dengan pertumbuhan penduduk 1,76 persen Struktur perekonomian didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa, dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 77,38% (Pemerintah kota Palembang dalam Sumeks 16 Mei 2014 halaman 49). Pesatnya kemajuan Palembang tentunya tidak lepas dari sejarah sebelumnya yaitu kejayaan kerajaan Sriwijaya, pusat pendidikan Budha di Asia Tenggara dan sebagainya. Sisa peninggalan tersebut masih dapat dilihat dengan jelas di kelurahan Bukit Lama, Kedukan Ilir, Boom Baru, Talang Kerangga, Karang Anyar, Benteng Kuto Besak yang berada dalam kecamatan Ilir Barat 1, Gandus, dan Ilir Timur 2 Palembang.

Ditambah lagi akses penerbangan langsung ke kota terbesar kelima di Indonesia antara lain melalui Singapura (50 menit), Kualalumpur (75 menit), Jakarta (50 menit) dan penerbangan ke kota lain di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini setidaknya ada Sembilan Kawasan Strategis yang telah dipersiapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain Agropolitan Gandus adalah kawasan untuk fokus pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian, kawasan industri ada di daerah Karya Jaya yang sekaligus sebagai pusat pengembangan ekonomi terpadu. Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) diubah menjadi daerah strategis sosial budaya, kawasan Jakabaring adalah kawasan daerah pertumbuhan ekonomi, perkantoran, sport city, perumahan, pusat perbelanjaan dan lainnya.

Selanjutnya kawasan Sungai Musi akan diubah menjadi daerah strategis sosial budaya dan lingkungan hidup, sedangkan kawasan yang berada di pusat kota adalah Central Business District (CBD). Kawasan Talang Kelapa difokuskan sebagai Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang merupakan daerah strategis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perumahan atau direncanakan sebagai kota baru. Terakhir adalah kawasan untuk industri dan pergudangan sehingga kendaraan yang bertonase besar tidak melewati jalan protokol yang sering membuat macet.

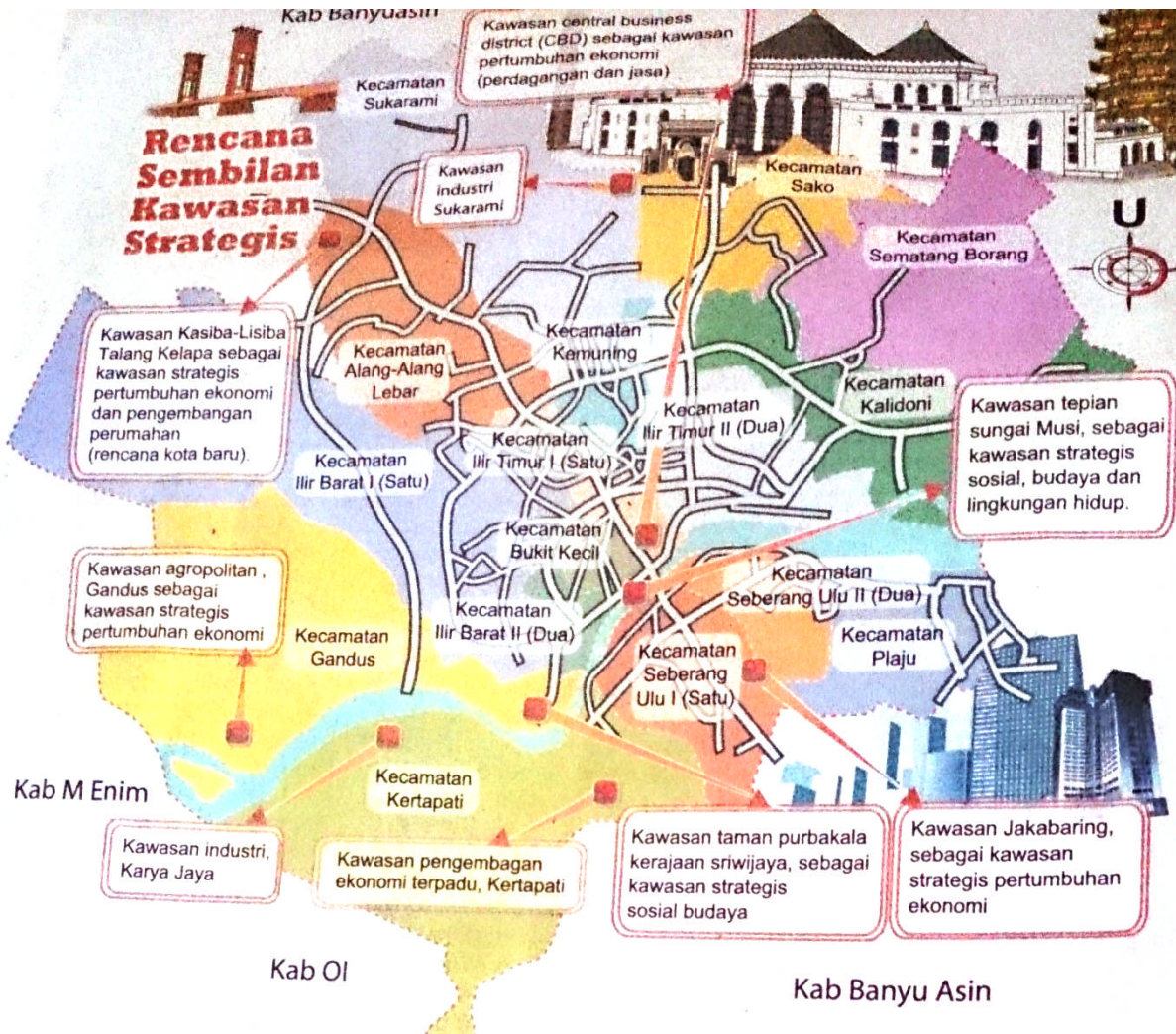
Dari rencana tersebut akan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan program yang pertama adalah penataan kawasan tepian sungai, pengelolaan kawasan strategis, pengembangan sistem pusat pelayanan, sarana dan prasarana kota, peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, pariwisata berskala internasional dan pengembangan kawasan budaya.

Kedua adalah perencanaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung, pembangunan jalan lingkar timur luar di kabupaten Banyuasin, dan jalan lingkar timur dalam yang nantinya terhubung dengan Jembatan Musi 3 di Pulau Kemaro.

Ketiga adalah pengembangan jaringan gas yang diarahkan untuk seluruh wilayah kota, dan sistem jaringan sumberdaya air, bidang pengendalian banjir yang akan menormalisasikan sungai Musi dan seluruh anak sungai serta kolam retensi. Selanjutnya akan dilakukan pembangunan jaringan drainase, retaining wall (dinding penguat) sepanjang sungai Musi dari Pulokerto sampai pulau Kemaro.

Keempat adalah pembangunan kolam retensi, yang rencananya akan dibangun 10 kolam lagi antara lain didaerah Sub DAS Gandus, Gasing, Lambidaro, Borang, Bendung,

Buah, Lawang Kidul, Selincah, Batang, dan Sriguna, juga akan dikembangkan jaringan jalur pedestrian koridor jalan utama, pedestrian jalur sepeda disepanjang tepian sungai Sekanak, Bendung dan Musi. Secara komprehensif perencanaan strategis kota Palembang dapat dilihat pada gambar berikut :



B. Permasalahan

Apakah pemerintah kota Palembang dalam merencanakan program untuk mencapai visi dan misinya telah berdasarkan dimensi wilayah sebagai faktor lokasional dalam pembangunan ekonomi ?.

C. Pembahasan

Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Arsyad (2012) pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial ekonomi, system pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk yang lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas.

Menurut Direktorat pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah (2002) mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah : (1) sebagai *growth center* yaitu pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional, (2) pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah, (3) pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan, (4) dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya (Dirjen Pengembangan wilayah dan Transmigrasi, 2003 dalam Fahrizal, 2011)

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya dikarenakan adanya kebutuhan manusia yang terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan

sumberdaya alam yang efisien. Disamping itu perhatian dan konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggung jawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Secara tegas dimensi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempunyai tagung jawab pada peningkatan ketersediaan dan kecukupan ekonomi, kelestarian asset yaitu efisiensi dalam pembangunan sumberdaya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan yang tinggi saja tanpa memperhatikan aspek social dan lingkungan. Pandangan ekologis didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan lingkungan akan terjadi di waktu yang akan datang dan dipengaruhi oleh segala aktivitas manusia.

Dengan demikian factor social dalam pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu factor yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan factor ekonomi dan ekologi, Bukti-bukti menjelaskan bahwa banyak proyek pembangunan yang kurang memperhatikan factor social kemasyarakatan akan menjadi ancaman bagi keberhasilan proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memiliki hubungan dengan tujuan lingkungan. Keberhasilan dan keberlanjutan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dan social. Pembangunan akan terhambat apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat penuh dengan ketidak pastian

Oleh sebab itu untuk melihat bagaimana pelaksanaan perencanaan program di kota Palembang akan kita refleksi dengan meninjau 34 program prioritas tahun 2013-2018 yang telah direncanakan oleh pemerintah kota sebagai berikut :

1. Program penataan administrasi kependudukan
2. Program koordinasi, fasilitasi konsultasi dan supervisi pembangunan daerah
3. Program peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
6. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
8. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
9. Program pengembangan industri kecil dan menengah
10. Program peningkatan kesempatan kerja
11. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
12. Program peningkatan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
13. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
14. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan
15. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
16. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
17. Program peningkatan kegiatan keagamaan
18. Program pengendalian pemanfaatan ruang
19. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
20. Program pengendalian banjir
21. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
22. Program pembangunan jalan dan jembatan
23. Program pengembangan perumahan
24. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
25. Program peningkatan pelayanan angkutan
26. Program pembangunan sapsras perhubungan
27. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
28. Program pendidikan anak usia dini
29. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
30. Program pendidikan menengah
31. Program upaya kesehatan masyarakat
32. Program perbaikan gizi masyarakat
33. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
34. Program pengembangan pemasaran pariwisata (Sumber Bapeda kota Palembang)

Diantara sekian banyak program kerja dan skala prioritas, pemerintah kota Palembang juga berencana menghidupkan kembali tepian sungai Musi dengan nama programnya Water Front City (WFC) menuju zona ekonomi baru. Dari pengembangan rencana ini terdapat 7 (tujuh) titik kawasan tepian sungai Musi yang akan dijadikan pendukung rencana tersebut antara lain tepian sungai Sekanak, 5 Ulu, 14 Ulu, 11 Ulu, 7 Ulu., 3 Ulu, dan 4 Ulu.

Tahap awal pembangunan dimulai dengan pembangunan pulau Kemaro, turap dan pembebasan lahan secara bertahap. Luas lahan sekitar 25 hektar dengan dana 84 miliar, dan selama tiga tahun pengembangan pembebasan lahan ini akan dikebut. Lokasi dan revitalisasi pembebasan lahan tepian sungai Musi untuk ketujuh kawasan tersebut diatas dianggarkan oleh pemerintah kota Palembang pada tahun 2013 dan 2014 dengan alokasi dana dari APBD-P dan diperuntukan pembangunan hotel dan restoran.

Pendek kata tidak hanya kehidupan masyarakat yang diperbaiki namun juga perekonomian disepanjang tepian sungai Musi atau akan mengubah dari sistem tradisional menjadi daerah modern. Dengan adanya zona ekonomi baru tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Palembang dan mulai saat ini kawasan tersebut telah ditawarkan kepada investor dengan konsep terpadu yaitu pembangunan kawasan yang mempunyai fasilitas hotel, pendidikan cottage, pesantren, restoran dan lainnya.

Ketujuh titik kawasan tersebut akan dimulai pembebasan lahan secara bertahap, yang nantinya akan menyamai lokasi Benteng Kuto Besak (BKB). Selanjutnya BKB yang satu ini akan dimanfaatkan untuk area pameran kerajinan industri seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), agrowisata, wisata daerah, religi atau zona permainan terbuka yang representatif untuk usaha sehingga dapat membentuk zona ekonomi baru. Dimana selama ini kawasan tepian sungai Musi cenderung menjadi kawasan yang kumuh, semrawut penataannya.

Dari rencana tersebut kawasan ini akan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir, pajak dari kios-kios pedagang, dan lain-lain. Dalam tahun ini dapat realisasi dari pendapatan parkir dapat berkontribusi sebesar 3 triliun, diharapkan pada tahun depan akan naik menjadi 5 triliun (Pemkot Kota Palembang). Dengan naiknya PAD, maka pembangunan kota Palembang akan meningkat untuk semua sektor, sehingga dapat mengejar ketinggalan pembangunan yang pada akhirnya akan bermuara pada percepatan pembangunan secara komprehensif di kota Palembang.

Pembangunan tidak hanya untuk merevitalisasi pembebasan lahan tepian sungai Musi, namun juga diimbangi dengan penataan infrastruktur. Hal tersebut dimulai dari perbaikan pembenahan drainase sehingga banjir dapat diminimalisir khususnya daerah Sekip Bendung juga meluapnya anak sungai Musi jika hari hujan. Selain itu adanya perbaikan sistem kerja pintu air yang akan dialirkan ke kolam retensi dengan sistem buka tutup buat penampungan.

Dimensi wilayah sangat penting dan memang harus diperhitungkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Potensi dan kondisi masing-masing wilayah berbeda satu sama lainnya, sehingga potensi dan kondisi yang terdiri dari faktor-faktor internal dan eksternal dapat memberikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Perbedaan faktor internal dan eksternal tersebut harus dirumuskan secara tepat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah untuk menentukan perencanaan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

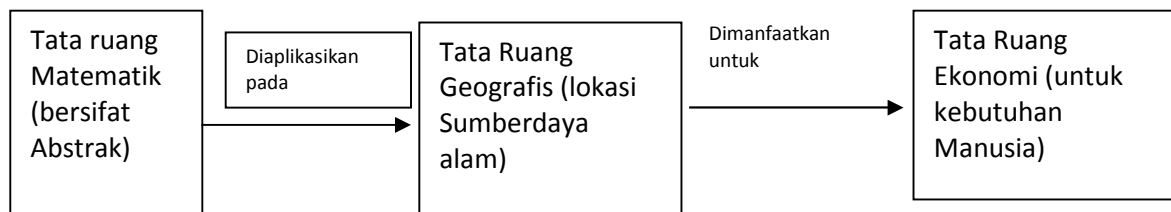
Dalam studi pembangunan wilayah peranan tata ruang wilayah sangat penting jika ditinjau dari perkembangan historis banyak mengalami perubahan dan pertumbuhan. Beberapa kasus *spasial* (tata ruang) dapat dikemukakan seperti terjadinya pemusatan kegiatan industri (*aglomerasi*) dan urbanisasi ke kota besar, terbentuknya pasar dan pusat kota baru menimbulkan perubahan dalam wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan pemasaran antara kota dan wilayah pedesaan. Keterkaitan yang makin erat satu sama lainnya, saling melengkapi, dan kemungkinan akan membuat penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan.

Tata ruang wilayah dapat diartikan sebagai lingkungan tradisional dari kehidupan manusia mempunyai ketentuan-ketentuan dan kemampuannya sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatan penduduknya, dan bahkan tata ruang wilayah dianggap sebagai salah satu sasaran pembangunan. Secara logis dan historis tata ruang wilayah dapat dibagi menjadi tiga pengertian yaitu tata ruang wilayah ekonomi, tata ruang wilayah geografi, dan tata ruang wilayah matematik.

Konsep tata ruang wilayah ekonomi mempunyai pengertian bersifat operasional berkaitan dengan investasi, modal, jaringan transportasi, industri, dan teknologi pertanian . Kesemuanya dapat menciptakan perkembangan baru yang meliputi bahan-bahan material dan aturan-aturan baru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan manusia, sehingga tata ruang wilayah ekonomi lebih bersifat kompleks dan bersifat multi dimensial. Tata ruang

wilayah geografi merupakan tata ruang wilayah tiga dimensi yang menempatkan manusia dalam lingkungan alam, sedangkan tata ruang wilayah matematik benar-benar bersifat abstrak yang tidak berkaitan dengan lokasi geografis.

Jika suatu tata ruang wilayah terbentuk semata-mata oleh variable-variabel ekonomi, maka tata ruang wilayah tersebut merupakan tata ruang matematik, yang mempunyai arti secara matematik dapat terjadi dimana-mana, akan tetapi sebaliknya tata ruang wilayah ekonomi merupakan aplikasi variable-variabel ekonomi di atas untuk kebutuhan manusia pada suatu tata ruang wilayah geografis dan melalui transformasi matematik dapat dijelaskan proses ekonomi. Selanjutnya ketiga jenis tata ruang wilayah di atas dapat diperlihatkan sebagai gambar berikut :



Gambar 1: Kaitan antar tata ruang wilayah matematika, tata ruang wilayah geografis, tata ruang wilayah ekonomi

Dilihat dari gambar di atas hubungan formal pembangunan, tata ruang wilayah ekonomi merupakan medan atau arena kekuatan (*a field of forces*). Tata ruang wilayah polarisasi, yaitu sebagai tempat dimana terdapat konsentrasi atau pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang relatif besar dan nyata berbeda dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pada bidang kegiatan industri dapat ditunjukkan gap atau kesenjangan yang makin besar dalam hal tingkat produktivitas di daerah perkotaan dan pedesaan sehingga akan menimbulkan ketimpangan *spatial*

Secara abstrak tata ruang wilayah ekonomi menekankan pada aspek pemusatan proses pertumbuhan pada titik-titik *spatial*. Dalam kerangka analisis wilayah dimensi geografis telah dimasukkan kedalam pengaruh pusat pengembangan, hal ini berarti bahwa tata ruang wilayah ekonomi berkaitan sangat erat dengan tata ruang wilayah geografis. Pembangunan berasal pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan yang terletak pada titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi, sehingga pembangunan cenderung menyebar ke bawah dan keluar. Penyebaran dari pusat-pusat tersebut menuju ke wilayah disekitarnya mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah tetapi penyebaran tidak membahas masalah pemilihan lokasi

optimum industri dan tidak pula menentukan jenis investasi apa yang sebaiknya di tetapkan di pusat-pusat urban tersebut.

Dimensi geografi dan lansekap ekonomi termasuk dalam variabel tambahan, yang penting untuk menyusun perencanaan pembangunan, dengan demikian pertanyaan mendasar dalam analisis ekonomi klasik dan liberal yang berkisar pada komoditas “apa” (*what to produce*), “bagaimana” (*how to produse*), “untuk siapa” (*for whom to produse*) masih harus ditambah pertanyaan “dimana” ? (*where to produce*), hal ini mempunyai makna bahwa dimensi tata ruang wilayah telah memberi warna penting dalam analisa ekonomi.

Gejala ekonomi menjadi lebih jelas secara eksplisit bahwa pertimbangan mengenai pentingnya dimensi tata ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan dapat diungkapkan melalui lima persoalan utama ekonomi wilayah, antara lain sebagai berikut :

Petama yang berhubungan dengan penentuan landsekap ekonomi yaitu mengenai penyebaran kegiatan-kegiatan ekonomi pada tata ruang wilayah. Jika pemilihan lokasi tata ruang wilayahnya tidak tepat, maka kesalahan dapat diperbaiki dengan melakukan relokasi walaupun dibutuhkan waktu yang lama dan dana yang besar.

Kedua berkaitan dengan diintroduksikan konsep wilayah dalam analisis teoritik sebagai sub sistem *spasial* dari system ekonomi nasional. Dengan konsep wilayah tersebut telah mendorong penyusunan pembangunan *spasial* dan pembangunan regional serta pengukuran aktivitas ekonominya. Beberapa kriteria telah dikembangkan untuk menentukan batas suatu wilayah pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Kriteria tersebut bukan merupakan hal yang gampang, sehingga penentuan kriteria batas suatu wilayah digunakan batasan pembangunan administrasi pemerintahan.

Ketiga adalah analisis interaksi antara wilayah yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk interaksi antar wilayah yaitu arus pergerakan faktor produksi dan pertukaran komoditas. Penjelasan mengenai terjadinya arus pergerakan faktor produksi dan pertukaran komoditas dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi suatu wilayah merupakan titik sentral dalam permasalahan ekonomi wilayah

Keempat adalah persoalan analisis optimum yang selalu dikaitkan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai seperti alokasi sumberdaya yang optimal (*Pareto optimum allocation of resources*) atau minimasi masukan yang tertentu. Spesialisasi produksi

dilakukan pada wilayah secara optimal dan pertukaran komoditas juga dilakukan dengan analisis optimum sebagai pembahasan dan implikasi tujuan yang telah ditentukan.

Kelima berkaitan dengan persoalan kebijakan merupakan kegiatan yang berusaha untuk memperhatikan dan memperhitungkan pengaruh perilaku ekonomi pada suatu lingkungan *spasial*. Kebijakan ekonomi berusaha mengendalikan dan mengontrol struktur dan proses ekonomi dalam subsistem ekonomi nasional

Dampak *aglomerasi* dan *polarisasi* wilayah dapat memberikan dorongan bagi wilayah yang relatif sudah makmur untuk berkembang lebih maju, daerah yang belum berkembang relatif menuju agak makmur, dan juga dapat menciptakan keserasian antar wilayah yang memerlukan kebijakan ekonomi wilayah yang tepat dan sesuai.

Pemerintah kota Palembang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan program pembangunan dari Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program ini merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diperuntukan untuk pembangunan sarana infrastruktur.

Dalam pelaksanaan program tersebut khususnya untuk pembangunan percepatan pertumbuhan ekonomi banyak mengalami hambatan, terutama jika berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sarana jalan yang mulus belum terwujud, jembatan yang memerlukan pembebasan lahan. Permasalahan timbul dikarenakan besaran ganti rugi lahan yang tidak disepakati antara pemerintah dan pemilik lahan. Pada umumnya pemilik lahan adalah para pejabat yang dari awal telah melihat perencanaan tata kota, atau rencana pemekaran daerah, sehingga mereka berlomba untuk menguasai lahan-lahan yang strategis, dan dalam kurun waktu tertentu harga lahan bisa naik sampai 200 kali lipat.

Selain itu masalah yang tidak kalah pentingnya dan kemungkinan sama permasalahan yang dialami oleh kota lain di Indonesia adalah urbanisasi, sampah, kemacetan, dan masalah sosial. Permasalahan yang seharusnya diatasi dalam kurun waktu 20 tahun akan dicoba dapat diatasi dalam kurun waktu 5 tahun, oleh sebab itu masalah pertama yang harus diatasi adalah kemacetan. Masalah ini harus dipikirkan serius karena ketersediaan ruas jalan dengan pertumbuhan kendaraan tidak seimbang, dan harus ada ring road antara jalan propinsi dan kota yang jelas sesuai dengan porsinya agar tidak tumpang tindih. Permasalahan lain adalah sampah yang belum optimal karena belum mengandung nilai ekonomi, padahal dengan

pengelolaan sampah yang benar (memisahkan antara organik, anorganik, kering, basah) semua bisa mempunyai nilai ekonomi dengan mengelola dengan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Selanjutnya masalah urbanisasi yang terjadi setiap tahun yang berdampak pada masalah tempat tinggal dan gaji semakin meningkat. Kondisi ini sangat berkorelasi erat dengan permasalahan sosial, antara lain pemberian layanan air bersih, keamanan, dan kesejahteraan.

Hambatan selanjutnya adalah dari segi pendanaan antara pemerintah dengan perbankan, yaitu pihak bank tidak mudah memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Besarnya pinjaman oleh pihak perbankan dianalisa terlebih dahulu, jika tidak terjadi kesepakatan maka akan dikembalikan kepada investor. Selanjutnya hambatan teknis konstruksi dikarenakan kondisi lahan yang labil, daerah rawa-rawa, ancaman gempa hingga ke struktur geografis, lahan yang strategis dimiliki tuan-tuan tanah, sehingga hal ini memerlukan dana yang besar.

Lambannya pembangunan di kota Palembang harus dijadikan perhatian, ditambah lagi dengan adanya tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kebiasaan warga Palembang khususnya dari penduduk asli Sumatera Selatan dengan membawa pisau di pinggang merupakan kebanggaan. Banyak yang mengandaikan pisau cap garpu di pinggang sebagai lambang kelam kriminalitas jalanan. Stigma yang melekat di benda ini sangat jelek sebagai kriminalitas, walaupun pisau cap garpu bagus dan disenangi oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai alat memasak di dapur. Namun, dampak akhirnya akan sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi, masyarakat untuk beraktivitas dalam menunjang kegiatan ekonomi di kota Palembang.

Selain itu terdapat beberapa isu analisis mengenai evaluasi hambatan dalam perencanaan kota Palembang yang tertuang dalam laporan Bapeda pemerintah kota Palembang antara lain, adalah rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kualitas lingkungan, fungsi sistem drainase perkotaan yang belum optimal, dan masih tingginya angka pengangguran. Selain itu adanya sistem manajemen transportasi yang belum optimal, penurunan kawasan hijau perkotaan, belum optimalnya promosi kebudayaan kepariwisataan, dan masih perlunya peningkatan akses air bersih.

D. Kesimpulan

Pentingnya dimensi wilayah sebagai faktor lokasional dalam perencanaan pembangunan telah terbukti dilakukan oleh pemerintah kota Palembang melalui Rencana

Sembilan Kawasan Strategis yang telah dituangkan dalam beberapa program prioritas kota 2013-2018.

E. Saran

1. Pemerintah kota Palembang hendaknya menjaga sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, lingkungan hidup
2. Dalam melaksanakan rencana prioritas dapat menjaga iklim usaha yang ada
3. Memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan usaha menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan,
4. Meningkatkan prospek investasi perbankan.
5. Masyarakat dapat memberikan dukungan dan peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial

F. Daftar Pustaka

- Adisasmita R. 2008. Pengembangan Wilayah. Konsep dan Teori. Graha Ilmu. Jakarta
- Arsyad,L. 1992. Ekonomi Pembangunan.STIE YKPN. Jogjakarta
- ,1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Media Widya Mandala. Jogjakarta
- ,1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPEE. UGM. Jogjakarta
- Bachri Fachrizal. 2011. Studi Pengembangan Model Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Regional Kota Pagar Alam. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Halaman 21-34. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Bapeda Palembang,2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2008-2013 (Perda Kota Palembang Nomor 6 tahun 2009). Pemerintah Kota Palembang)
- Didik Susetya. 2011. Ekonomi Regional.Universitas Sriwijaya. Palembang
<http://palembang.kota.bps.go.id/pdf>
<http://bapeda.kota.palembang.go.id/pdf>
- Masahisa Fujita, K.Paul, Anthony J. 1999. The Spatial Economy. Cities, Regional, and Internal Trade.London. The Mit Press Cambridge
- Priyarsono, D,S, Sahara, Firdaus,M. 2007. Ekonomi Regional. Universitas Terbuka Jakarta.
- Tambunan Tulus. 2012. Perekonomian Indonesia. Beberapa Masalah Penting. Ghalia. Jakarta
- Sumatera Ekspres. 16 Mei 2014
- Sumatera Ekspres, 6 Agustus 2014
- Sumatera Ekspres, 7 Agustus 2014
- Sumatera Ekspres, 11 Agustus 2014

RPSEP-31

KEMAMPUAN BERSAING INSTANSI PEMERINTAH BERENTREPRENEUR MELALUI ANALISIS SWOT

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E, M.M
Universitas Ciputra Surabaya
fransisca.desiana@ciputra.ac.id

Abstrak

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang perlu dicapai dengan strategi yang baik. Membangun kemajuan sebuah negara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan. Keduanya sama-sama melakukan proses yang mirip yaitu mengolah berbagai macam sumber daya untuk mendorong tercapainya visi/tujuan. Riset ini memandang bahwa strategi perusahaan yang dikelola oleh seorang pemimpin berjiwa *entrepreneur* juga dapat diterapkan untuk sebuah negara. Dengan demikian, melalui rumusan strategi yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan diharapkan sebuah negara dapat menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi sebuah instansi pemerintah atau ekonomi kerakyatan demi menuju Indonesia yang lebih baik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan analisis SWOT sebagai instrumen penelitian. Objek penelitian ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta sebagai salah satu contoh instansi pemerintah. Hasil dari riset ini adalah gambaran analisis SWOT yang bisa digunakan untuk perbaikan sistem dan juga sebagai acuan strategi instansi dalam bersaing dengan pasar global.

Kata kunci: *managemen strategi, analisis SWOT, entrepreneur.*

A. PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang perlu dicapai dengan strategi yang baik. Melalui Pancasila dan UUD 1945, Indonesia telah merumuskan cita-cita tertingginya bagi bangsa dan rakyatnya. Hanya saja apakah cita-cita tersebut sudah diimplementasikan melalui tahapan yang sinergi untuk kemajuan bangsa?

Membangun kemajuan sebuah negara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan. Keduanya sama-sama melakukan proses yang mirip yaitu mengolah berbagai macam sumber daya yang dimilikinya untuk mendorong tercapainya visi dan tujuan. Dengan demikian, kita perlu tahu, sumber daya dan kemampuan yang Indonesia miliki untuk diolah sehingga akan menambah *value/* nilai dari Indonesia itu sendiri. *Entrepreneur* biasanya identik

dengan seorang wirausaha yang memiliki dan membangun bisnis tertentu. Padahal menurut Suryana (2006:2), kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah kemampuan kreatif serta inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya dalam rangka mencari peluang menuju sukses. Dengan definisi tersebut, setiap perusahaan, individu, maupun negara pasti mampu melakukan kegiatan dengan jiwa *entrepreneur*. Secara spesifik, jiwa ini bisa dibangun dari instansi pemerintah atau ekonomi kerakyatan seperti pasar tradisional dimana mereka mempunyai kontribusi secara langsung dalam perekonomian Indonesia.

Riset ini memandang bahwa strategi perusahaan yang dikelola oleh seorang pemimpin berjiwa *entrepreneur* juga dapat diterapkan untuk sebuah negara. Dengan demikian, melalui rumusan strategi yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan diharapkan sebuah negara dapat menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi sebuah instansi pemerintah atau ekonomi kerakyatan melalui analisis SWOT demi menuju Indonesia yang lebih baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Proses inovatif dan kreatif merupakan kunci keberhasilan seorang *entrepreneur*. Proses kreatif inilah yang kemudian didefinisikan kembali oleh Suryana (2006:2) yaitu kemampuan dalam mengembangkan ide sertacara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang pasar. Dengan demikian saat pemerintah mampu melakukan kegiatannya dengan inovasi dan kreatifitas, maka pemerintah dapat dikatakan sebagai seorang *entrepreneur*. Definisi tersebut dikuatkan dengan definisi *entrepreneurship* dari Kuratko (2007:5)

“Entrepreneurship is a dynamic process of vision, change, and creation that requires an application of energy and passion toward the creation and implementation of new ideas and creative solutions.”

Ciri-ciri *entrepreneurship* menurut Suryana (2006:30) yaitu: memiliki motif berprestasi tinggi, memiliki perspektif ke depan, mempunyai kreativitas tinggi, inovasi tinggi, berkomitmen terhadap pekerjaan, mempunyai tanggung jawab, memiliki kemandirian, memiliki keberanian mengambil resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan managerial, dan memiliki kemampuan personal.

Agar suatu perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka diperlukan sebuah strategi yang handal. David (2011: 37) mendefinisikan strategi manajemen sebagai berikut:

“strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. As this definition implies, strategic management focuses on integrating management, marketing, finance/accounting, production/operations, research and development, and information systems to achieve organizational success.”

Formulasi strategi sebaiknya dilakukan dengan mengidentifikasi visi dan misi perusahaan agar dapat selaras dengan strategi yang akan dijalankan. Menurut David (2011:38) proses dalam formulasi strategi adalah membangun visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman dari eksternal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, mengukur target jangka panjang, membuat alternatif strategi dan terakhir adalah memilih strategi yang cocok untuk tujuan awal.

Ada sembilan kunci dalam manajemen strategi menurut David (2011:41) yaitu keunggulan kompetitif, strategi, pernyataan visi dan misi, ancaman dan kesempatan dari luar, kekuatan dan kelemahan dari internal perusahaan, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan tahunan, dan kebijakan. Manajemen strategi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan harus mampu mencapai keunggulan kompetitif dengan cara beradaptasi secara terus menerus pada perubahan eksternal, kemampuan internal, dan sumber dayanya serta efisiensi strateginya. Membangun sebuah pernyataan visi merupakan langkah pertama dalam perencanaan strategi, sedangkan pernyataan misi merupakan pernyataan langkah untuk mencapai tujuan yang akan membedakan dengan perusahaan lainnya. Ancaman dan kesempatan yang datang dari luar berasal dari kondisi ekonomi suatu negara, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kekuatan dan kelemahan internal perusahaan terlihat dari kinerja perusahaan. Tujuan jangka panjang merupakan hasil spesifik suatu organisasi yang berasal dari misi dan jangka waktunya lebih dari satu tahun.

Menurut Rangkuti (2002:60) setelah melakukan penyusunan formulasi strategis, kegiatan selanjutnya adalah mengelompokkan strategi tersebut dalam masing-masing isu strategis yang sudah dilakukan dalam analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threat*). Isu tersebut dikelompokkan berdasarkan pada faktor internal dan eksternal suatu perusahaan. Kemudian strategi tersebut disusun dengan menggabungkan indikator dalam analisis SWOT menjadi model penggabungan baru dan dipilih satu strategi yang dapat dipakai untuk memecahkan isu/ masalah perusahaan. Rangkuti (2002:64) mendefinisikan hubungan dalam formulasi strategi tersebut sebagai berikut yaitu: S-O Strategi (strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang), W-O strategi (strategi yang disusun dengan cara meramalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada), S-T strategi (strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman) dan W-T strategi (strategi yang disusun dengan carameminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

C. METODOLOGI

Pasar tradisional merupakan salah satu alat perekonomian negara yang bertujuan untuk memajukan suatu negara. Dalam sebuah pasar tradisional inilah perputaran bisnis banyak terjadi. Karena itu, penulis melakukan penelitian di Pasar Beringharjo Yogyakarta sebagai objek penelitian. Pasar Beringharjo ini merupakan salah satu bentuk instansi pemerintah yang diawasi secara tidak langsung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Penulis menggunakan metode studi *literature* sebagai data sekunder dan wawancara sebagai data primer. Pengumpulan data primer penulis lakukan kepada Bapak Gunawan Nugroho Utomo, SE, Akt, MM, Kepala UPT Pusat Bisnis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Data sekunder didapatkan dari dokumen RSB (Rencana Strategi Bisnis) dan RBA (Rencana Strategi Anggaran). Instrumen penelitian dilakukan dengan analisis SWOT yang mencakup: *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threat* (ancaman). Kemudian dihubungkan masing-masing indikator untuk membuat sebuah formulasi strategi yang cocok dipakai untuk untuk perbaikan sistem dan juga sebagai acuan strategi instansi dalam bersaing dengan pasar global.

D. HASIL PENELITIAN

Sistem pengelolaan pasar tradisional di Indonesia kebanyakan diberikan kepada pihak swasta karena tidak mampunya pemerintah daerah mengelola keseluruhan kegiatan dan sarana prasarana pasar tradisional. Dengan prinsip *profit oriented*, pada akhirnya nasib pedagang atau dalam hal ini adalah rakyat, kurang diperhatikan perkembangannya. Fasilitas pasar juga kurang dirawat dengan baik sehingga banyak yang rusak dan kotor. Akibatnya pasar tradisional akan semakin lemah bersaing dengan pasar modern.

Melihat permasalahan tersebut, Pasar Beringharjo kemudian mengambil alih pengelolaan yang selama ini diserahkan kepada swasta untuk dikelola sendiri dibawah pengawasan pemerintah kota. Usaha mandiri Pasar Beringharjo inilah yang kemudian membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasar Beringharjo pada tahun 2013. Pemerintah memandang bahwa Pasar Beringharjo itu mampu mengelola kegiatan dan sarana prasarananya sendiri. Oleh karena itu, melalui analisis SWOT akan tergambarakan situasi dan posisi Pasar Beringharjo dalam penyusunan langkah strategis BLUD untuk mencapai visi dan misi Pasar Beringharjo

Banyak penelitian yang telah mendukung analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Helms dan Nixon (2010) bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, SWOT difokuskan pada analisis organisasi untuk langkah strategis perusahaan. Dalam rangka merumuskan analisis SWOT, penulis mulai dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal Pasar Beringharjo.

1. Faktor Internal

1.1. Aspek Pengunjung dan Pasar

Daya tarik yang paling signifikan dari Pasar Beringharjo adalah nilai historis dan lokasinya yang sangat strategis. Lokasinya yang berada dikawasan Malioboro dengan diapit oleh beberapa tempat wisata populer di Yogyakarta seperti Benteng Vredenburg dan Taman Pintar inilah yang membuat tingkat kunjungan konsumen ke pasar sangat tinggi. Jumlah rata-rata pengunjung Pasar Beringharjo berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Yogyakarta adalah 10.000 orang per hari dari berbagai kota. Jumlah tersebut akan meningkat secara signifikan pada hari libur. Tingginya tingkat kunjungan konsumen ke Pasar Beringharjo inilah yang membuat potensi positif bagi pedagang, bank, dan pelaku bisnis lainnya.

1.2. Aspek Usaha dan Pelayanan

Pasar Beringharjo berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi penyewa kios agar terus melakukan kerjasama dengan Pasar Beringharjo. Harga sewa yang tidak terlalu mahal dengan tingkat kunjungan yang tinggi menjadikan lokasi usaha ini sebagai kawasan bisnis yang selalu diminati. Pelayanan yang disediakan Pasar Beringharjo meliputi fasilitas eskalator, layanan keamanan, layanan kebersihan, sarana penunjang KM/WC dan layanan informasi radio siaran. Hanya saja yang masih dirasa kurang adalah keamanan dan kebersihan. Pihak Beringharjo cukup kesulitan menekan angka resiko tindakan pencurian, mengingat ramainya kunjungan pengunjung setiap harinya. Perbaikan kebersihan menjadi fokus bagi Pasar Beringharjo dengan memberi pelatihan dan bimbingan bagi petugasnya. Pelatihan ini juga sebagai bentuk pengelolaan *stakeholder* Pasar Beringharjo dimana prinsip mereka yaitu "*stakeholder* adalah mitra bisnis". Fasilitas parkir juga masih menjadi kendala bagi Pasar Beringharjo karena sampai sekarang belum bisa mencukupi kapasitas kendaraan keseluruhan pengunjung sehingga masih banyak kendaraan yang parkir di trotoar sehingga membuat macet jalan di sekitarnya.

2. Faktor Eksternal

2.1. Kondisi Ekonomi (makro) Yogyakarta

Secara umum, perputaran komoditas pada bulan Agustus 2014 mengalami peningkatan karena liburan pasca Lebaran. Hal ini diikuti dengan peningkatan harga komoditas yang kemudian menyebabkan kenaikan inflasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan tersebut Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 0,09 persen dengan angka indeks 112,67 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka indeks pada bulan Juli 2014 yang sudah mencapai 112,57. Laju inflasi pada tahun kalender (Agustus 2014 terhadap Desember 2013) menjadi 2,78 persen.

2.2. Kondisi musiman

Dalam harian kedaulatan rakyat online yang ditulis oleh Danar (2014), Pasar Beringharjo selalu mengalami kenaikan omset menjelang musim liburan, terutama saat Lebaran. Padahal menurut data BPS dalam masa liburan Lebaran sebelumnya, inflasi Yogyakarta naik sehingga harga-harga ikut naik, bahkan kenaikan omzet bisa mencapai 30% - 40%. Untuk menunjang meledaknya pengunjung di musim liburan, Dinas

Pengelolaan Pasar (Dinlopas) kota Yogyakarta menyediakan beberapa pemandu wisata yang beroperasi mulai H-7 sampai H+7 Lebaran sehingga pengunjung dapat dengan mudah mencari kebutuhan belanjanya dan tidak tersesat.

2.3. Pertumbuhan pasar modern

Perilaku masyarakat Indonesia termasuk dalam konsumen yang konsumtif. Menurut Fabrice Carraso (2012), seorang Managing Director Kantar Worldpanel untuk Vietnam, Indonesia, dan Filipina, dalam survey yang dilakukan ke 7000 rumah tangga didapatkan hasil bahwa dalam satu tahun rata-rata kunjungan untuk berbelanja ada mereka sebanyak 2,2 juta kali kunjungan.

Berdasarkan hasil survey AC Nielsen dalam majalah Tempo online tahun 2004, jumlah pasar tradisional di Indonesia yaitu sebanyak 1,7 juta atau sebesar 73 persen dari keseluruhan pasar yang ada. Hanya saja, laju pertumbuhan pasar modern jauh lebih tinggi yaitu 16 persen daripada pasar tradisional yaitu 5 persen. Dengan demikian untuk bisa berkembang dan bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional harus berjiwa *entrepreneur* yaitu kreatif dan inovatif. Pasar Beringharjo memiliki satu keunggulan yaitu sebagai ikon wisata belanja Yogyakarta, sehingga tidak terlalu khawatir dengan persaingan dengan pasar modern karena sudah memiliki segmentasi sendiri. Selain itu, Pasar Beringharjo dapat dikatakan sebagai “*one stop shopping*” dimana ada banyak variasi produk dengan harga terjangkau dijual di sini.

Dengan melihat bahasan faktor internal dan eksternal yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulis dapat rumuskan analisis SWOT yang dapat memberi informasi posisi Pasar Beringharjo saat ini. Selanjutnya melalui hubungan masing-masing indikator dalam Strength – Opportunities, Weakness – Opportunities, Strength – Threat, dan Weakness - Threat akan tergambar strategi yang dapat digunakan untuk menunjang persaingan Pasar Beringharjo.

Tabel 1.1. Strategi SWOT

Strength	<ol style="list-style-type: none"> 1. nilai historis dan lokasinya yang sangat strategis. 2. banyak variasi produk dengan harga terjangkau dijual di sini. 3. Pelatihan untuk stakeholder (mitra bisnis) 	Weakness	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan kurang 2. Kebersihan masih kurang baik. 3. Lahan parkir kurang menunjang banyaknya pengunjung
Opportunities	Strength - Opportunities	Weakness - Opportunities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musim liburan omzet naik. 2. Sebagai ikon wisata belanja Yogyakarta 3. Konsumen yang konsumtif
Threat	Strength - Threat	Weakness - Threat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi makro (inflasi) 2. Persaingan dengan pasar modern
	<p>Lokasi yang strategis ditambah dengan banyaknya variasi produk akan mampu menjangkau konsumen yang konsumtif sehingga omzet dapat naik terus.</p> <p>Pelatihan pada <i>stakeholder</i> diharapkan mampu mencegah ancaman persaingan dengan pasar modern.</p>	<p>Mempertahankan diri sebagai ikon wisata belanja Yogyakarta untuk mengatasi kelemahan intern. (kebersihan, keamanan, dan parkir)</p> <p>Mengatasi masalah kebersihan dan kewanamanan untuk mencegah ancaman bersaing dengan pasar modern.</p>	

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat bersaing dengan pasar modern, sebuah pasar tradisional harus memiliki jiwa *entrepreneur* yaitu inovatif dan kreatif. Melalui perumusan analisis SWOT, sebuah pasar tradisional dapat memahami bagaimana posisinya saat ini yang tergambar dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tahapan selanjutnya setelah menentukan posisi adalah

mengaitkan masing-masing indikator sehingga terciptalah rumusan strategi bersaing. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, Pasar Beringharjo dapat menyesuaikan pemakaian strategi sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Dengan demikian, kemampuan Pasar Beringharjo dalam persaingan pasar menunjukkan partisipasinya dalam memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Berita Resmi Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta no 50/09/34/Th.XVI, 1 September 2014*. <http://yogyakarta.bps.go.id/download/BRS/2014/September/1.%20BRS%20DIY%20No.%2050%20%201%20September%202014%20-%20IHK%20Agustus%202014%20final.pdf> diakses tanggal 26 September 2014
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management : Consept and Cases*. Thirteenth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Helms, Marilyn M; Judy Nixon. 2013. " *Exploring SWOT analysis -where are we now? A review of academic research from the last decade.* ". Journal of Strategy and Management. Vol. 3 No. 3, 2010 pp. 215-251.
- Bisnis Aceh. 2014. <http://www.bisnisaceh.com/umum/hasil-survei-masyarakat-indonesia-sangat-konsumtif/index.php> diakses 26 September 2014
- Juhardi, Ujang; Edi Noersasongko; Mohamad Sidiq. 2010. " *Penerapan Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government Kabupaten Kaur* ". Jurnal Teknologi Informasi, Vol 6 No 1, April 2010, ISSN 1414-9999: 80-93.
- Kuratko, Donald F. 2007. *Introduction to Entrepreneurship*. Canada: South Western.
- Nafi, Muchamad. 2004. *Tren Perkembangan Ritel Pasar Tradisional Akan Tergusur*. <http://www.tempo.co/read/news/2004/08/19/05646731/Tren-Perkembangan-Ritel-Pasar-Tradisonal-Akan-Tergusur> diakses tanggal 26 September 2014
- Rangkuti, Freddy. 2002. *SWOT Balance Scorecard*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rencana Strategis Anggaran (RSA). 2013. Badan Layanan Umum Daerah Pasar Beringharjo. Yogyakarta.
- Rencana Strategis Bisnis (RSB). 2013. Badan Layanan Umum Daerah Pasar Beringharjo. Yogyakarta.

Sigit, Agus. 2014. *Liburan Omzet Pedagang Beringharjo Naik 40 Persen*.<http://krjogja.com/read/216666/liburan-omzet-pedagang-beringharjo-naik-40-persen.kr> diakses 5 September 2014

Sujatmiko, Tomi. 2014. *Dinlopas Siapkan 8 Pemandu Wisata di Beringharjo*.<http://krjogja.com/read/139723/dinlopas-siapkan-8-pemandu-wisata-di-beringharjo.kr> diakses 5 September 2014

Suryana. 2006. *Kewirausahaan : Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Bandung: Salemba Empat

RPSEP-32

IMPLIKASI FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI DALAM PENINGKATAN PRESTASI KERJA STAF EDUKATIF PADA PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Risnashari
risnashari@ut.ac.id

Abstrak

Konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta ditetapkan secara luas. Oleh karena itu, kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut.

Kita mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Jadi pengertian sosial itu sendiri adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antar warga negara dan pemerintahan.

Prestasi kerja suatu organisasi adalah cerminan dari prestasi-prestasi kerja seluruh bagian yang terkait dengan aktivitas organisasi. Prestasi kerja sering di hubungkan dengan tingkat produktivitas yang menunjukkan resiko *input* dan *output* dalam organisasi, bahkan dapat dilihat dari sudut prestasi kerja memberikan penekanan pada nilai efisiensi yang dikaitkan dengan kualitas *output* yang dihasilkan oleh para pegawai berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi yang bersangkutan.

Terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi prestasi kerja yaitu variabel individu terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian, dan sikap. Dan yang kedua yaitu variabel situasional, terdiri dari faktor fisik dan pekerjaan yang meliputi metode kerja, dan faktor sosial dari organisasi yang meliputi beberapa hal seperti kebijaksanaan perusahaan dalam hal ini yaitu pendidikan jarak jauh (PJJ). Dengan demikian, faktor sosial dan ekonomi berimplikasi terhadap peningkatan prestasi kerja staf edukatif pada PJJ.

Kata Kunci : Sosial, ekonomi, dan prestasi kerja

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di semua aspek kehidupan manusia, dimana berbagai permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta ditetapkan secara luas. Oleh karena itu, kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Sudah sejak lama diakui bahwa tingkah laku dalam organisasi terutama merupakan fungsi dari interaksi antar individu dalam lingkungan kerja, oleh karenanya pimpinan wajib merancang lingkungan kerja dengan memberikan berbagai fasilitas serta memberikan perhatian akan prosedur pemilihan dan penetapan pekerja; pendidikan dan pengembangan pekerja; desain tugas; serta penilaian dan pemberian imbalan pada prestasi.

Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah pendidikan yang dilakukan dengan adanya jarak antara pendidik dan peserta didik sehingga pendidikan jarak jauh ini sangat bergantung pada media dan strategi untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

B. Telaah Literatur

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi keempat, sosial yaitu berkenaan dengan masyarakat; suka memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara).

Manulang (2001: 118) merumuskan prestasi kerja adalah sebuah penilaian sistematis kepada pengawas oleh beberapa orang ahli untuk suatu atau beberapa tujuan tertentu. Sedangkan menurut Prawirosentono (1999: 2) mendefinisikan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Moh. As'ad (1991: 48) mendefinisikan prestasi kerja adalah "*successful role achievement*" yang diperoleh seseorang dari perbuatannya atau hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib serta benar dapat membantu

meningkatkan motivasi kerja dan sekaligus juga meningkatkan loyalitas organisasi-organisasional dari para karyawan (anggota organisasi) hal ini tentunya akan menguntungkan organisasi yang bersangkutan. Paling tidak karyawan akan mengetahui sampai di mana dan bagaimana prestasi kerja dinilai oleh atasan sendiri atau team penilai. Kelebihan maupun kekurangan yang ada akan merupakan cambuk bagi kemajuan-kemajuan mereka mendatang.

Menurut Robbins (2002: 258-259) penilaian prestasi kerja mempunyai tujuan:

1. Manajemen menggunakan penilaian untuk mengambil keputusan personalia secara umum, karena penilaian memberikan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang penting dalam hal promosi, transfer ataupun pemberhentian.
2. Penilaian memberikan penjelasan tentang pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penilaian menjelaskan keterampilan dan daya saing para pekerja yang belum cukup tetapi dapat diperbaiki jika suatu program yang memadai dikembangkan.
3. Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai kriteria untuk program seleksi dan pengembangan yang disahkan. Karyawan kontrak yang masih baru yang kinerjanya masih rendah, dapat diidentifikasi melalui penilaian kinerja. Sama halnya, efektivitas suatu pelatihan serta program pengembangan dapat ditentukan dengan menaksir seberapa baik partisipasi karyawan dalam memenuhi penilaian prestasi mereka.
4. Penilaian kinerja juga untuk memenuhi tujuan umpan balik yang ada terhadap para pekerja tentang bagaimana organisasi memandang kinerja mereka.
5. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan atau menentukan penghargaan. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan peningkatan pembayaran yang pantas dan penghargaan-penghargaan lainnya ditentukan melalui penilaian kinerja.

Penilaian prestasi kerja dapat saja terjadi manakala penyelia merasa dibutuhkananya komunikasi. Pimpinan langsung dari para pegawai yang dinilai itu tidak mempunyai peranan sama sekali dalam proses penilaian prestasi kerja para pegawai.

Selanjutnya Dubrin dalam Dwi Janto (2002: 35) mengemukakan lima kegunaan penilaian prestasi kerja, yaitu :

1. Penilaian prestasi kerja akan mengarah secara langsung untuk menaikkan produktifitas. Penilaian prestasi kerja yang efektif akan membantu memelihara perhatian orang untuk berfokus pada hasil kerja.
2. Program penilaian prestasi kerja berguna untuk membantu dalam administrasi gaji. Hasil penilaian dapat digunakan untuk menentukan kenaikan gaji maupun pembayaran bonus.
3. Penilaian prestasi kerja berperan secara vital dalam penentuan kepatuhan seorang karyawan yang mempertunjukkan kepemimpinan dan kepandaian dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam posisi manajerial.
4. Penilaian memudahkan pengembangan karier karena hasil tersebut dapat bermanfaat sebagai dasar untuk perencanaan dan pelatihan.
5. Hasil penilaian prestasi kerja digunakan secara ekstensif dalam penelitian sumber daya manusia. Misalnya dalam penyeleksian, diumumkan berlakunya pengumuman peringkat evaluasi prestasi kerja sebagai alat ukur kesuksesan.

Berdasarkan pemahaman di atas menunjukkan bahwa penilaian kinerja haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan tegas agar dapat bermanfaat baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan itu sendiri. Penilaian prestasi kinerja memberikan gambaran hasil dari peran seseorang karyawan dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi, peran itu adalah wujud prestasi kerja yang dapat diukur dan selanjutnya menjadi dasar alokasi penghargaan; seperti pemberian bonus, kenaikan gaji, produktifitas, promosi pada jenjang manajerial dan lain-lain keperluan sebagai wujud umpan balik atas prestasi kerja yang telah dicapai setiap karyawan. Agar penilaian mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan, maka sistem penilaian prestasi kerja haruslah mempunyai hubungan dengan pekerjaan (*job related*), praktis, mempunyai standar-standar dan menggunakan berbagai ukuran yang dapat diandalkan. *Job related* berarti sistem menilai perilaku-perilaku kritis yang mewujudkan keberhasilan perusahaan. Sistem praktis bila dipahami atau dimengerti oleh para penilai, evaluasi prestasi kerja memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja dimana prestasi kerja diukur agar objektif (Dwi janto, 2002: 39).

Menurut Alewine (Dwi Janto, 2002: 59) menegaskan penilaian prestasi kerja haruslah memperhatikan dua aspek yaitu : uraian tugas (*job description*) dan standar prestasi kerja (*performance standars*). Uraian penegasan Alewine sebagai berikut :

1. Secara tradisional, orang bekerja berdasarkan tugas yang memuat tugas-tugas dan tanggung jawab. Namun standar-standar prestasi kerja harus menekankan hasil kerja bukan tugas. Tugas harus dipandang dari segi sesuatu yang dicapainya. Kegiatan-kegiatan hanya merupakan langkah-langkah antara yang akan menuju hasil-hasil yang dikehendaki.
2. Jabatan adalah sesuatu yang hidup dan tumbuh serta berubah sejalan dengan waktu, pengenalan perbaikan-perbaikan teknologi serta prestasi kerja manusia. Orang menginterpretasikan pekerjaan mereka berbeda-beda dan sering melaksanakan tanggung jawab dengan cara lain dari yang diharapkan. Spesifikasi jabatan harus tetap sejalan dengan tuntutan masa kini, namun lingkungan kerja yang dinamis sering menuntut perubahan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, teknologi dan kegiatan dalam kandungan tugas (*job contents*).
3. Penyusunan standar prestasi kerja yang bersumber pada uraian jabatan akan memberikan peluang kepada pengawas dan karyawan untuk membuat sebuah uraian tugas yang dinamis untuk pekerja. Karena itu, uraian tugas dapat berfungsi sebagai sebuah pernyataan tentang tujuan-tujuan umum yang harus dicapai bawahan dalam mendukung sasaran-sasaran organisasi. Standar prestasi kerja berfungsi sebagai tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai oleh karyawan, harus realistis, dapat di ukur dan dapat dicapai jabatan tertentu.
4. Standar prestasi kerja dapat dibuat dari uraian jabatan untuk mengaitkan definisi jabatan statis kepada prestasi kerja yang dinamis. Dalam menulis standar, pengawas juga harus memasukkan pengamatan pribadi serta catatan prestasi kerja masa lalu. Laporan-laporan produksi, insiden dan pengukuran kerja akan standar prestasi kerja dapat dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian jabatan. Setiap karyawan mengusulkan sasaran-sasarannya sendiri kepada pengawas secara tertulis, bila keduanya menyepakati setiap sasaran kemudian dibuat pernyataan sasaran secara tertulis. Standar prestasi kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan seberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan, memuat bagaimana suatu kegiatan

kerja akan dilakukan dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana hasil-hasil kinerjanya akan diukur.

Selanjutnya Robbins (2002: 262-264) memberikan metode penilaian prestasi kerja sebagai berikut :

1. Esai tertulis, merupakan metode yang paling mudah untuk menilai suatu kinerja karena sebuah narasi yang menggambarkan kelebihan, kekurangan, prestasi waktu lampau, potensi dan saran-saran mengenai seorang karyawan untuk perbaikan. Esai tertulis ini tidak membutuhkan format yang rumit, namun hasil tulisan sering menggambarkan kemampuan penulisnya.
2. Keadaan kritis, metode ini memfokuskan perhatian si penilai pada perilaku-perilaku yang merupakan kunci untuk membedakan antara sebuah pekerjaan efektif dan tidak efektif yang menjadi kunci adalah perilaku yang sifatnya khusus dan bukan sifat-sifat personal yang samar melainkan yang disebutkan, dengan demikian daftar para karyawan dapat melihat perilaku-perilaku yang diharapkan dan perilaku-perilaku yang membutuhkan pengembangan.
3. Grafik skala penilaian, merupakan salah satu metode tertua dan terpopuler untuk penilaian dengan menggunakan grafik skala penilaian. Metode ini dicatat faktor-faktor kinerja, seperti kualitas dan kuantitas kerja, tingkat pengetahuan, kerjasama, loyalitas, kehadiran, kejujuran dan inisiatif. Selanjutnya si penilai memeriksa daftar tersebut dan menilai setiap faktor sesuai dengan skala peningkatan. Metode ini membutuhkan sedikit waktu untuk pengembangan dan pengolahannya juga memberikan analisis yang kuantitatif dan analisis perbandingan.
4. Skala peningkatan perilaku, skala ini mengkombinasikan elemen penting dari metode keadaan kritis dengan metode pendekatan grafik skala penilaian yang merupakan contoh perilaku aktual di dalam pekerjaan, bukan sekedar deskripsi atau ciri-ciri umum, karena menentukan dengan pasti, bersifat dapat diamati dan dapat mengukur perilaku kerja.
5. Perbandingan multipersonal, metode ini mengevaluasi satu kinerja individu dengan membandingkannya dengan individu-individu lainnya. Cara ini bersifat relatif, bukan sebagai alat pengukur absolut. Ada tiga pembandingan yang sangat populer yakni peringkat urutan kelompok peringkat individu dan perbandingan berpasangan.

C. Pembahasan

Prestasi kerja suatu organisasi adalah cerminan dari prestasi-prestasi kerja seluruh bagian yang terkait dengan aktivitas organisasi. Prestasi kerja karyawan dalam hal ini merupakan para staf edukatif pada dasarnya merupakan penilaian yang sistematis terhadap penampilan kerja karyawan itu sendiri dan terhadap potensi karyawan dalam upayanya mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi dalam hal ini yaitu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu factor dari pengembangan organisasi secara efektif dan efisien. Penilai prestasi kerja suatu organisasi menunjukkan bahwa telah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara optimal.

Terdapat dua variable yang dapat mempengaruhi prestasi kerja menurut McCornick and Tiffin (1974 : 491) yaitu :

1. Variable individu:

Terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian, dan sikap

2. Variabel Situasional :

- a. Fakktor fisik dan pekerjaan yang meliputi metode kerja, pengaturan dan kondisi perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, penyinaran, dan temperature
- b. Factor social dari organisasi yang meliputi beberapa hal seperti : kebijaksanaan perusahaan, jenis latihan dan pengawasan, system upah, dan lingkungan social.

Simamora (1997 : 421) mengemukakan bahwa semakin para karyawan memahami proses penilaian kinerja dan semakin penilaian kinerja dipakai sebagai peluang-peluang penghargaan daripada kejadian-kejadian pengkritikan, maka dibutuhkan aktualisasi diri bakal kian terpenuhi.

Dengan demikian factor social dan ekonomi berimplikasi terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan dalam hal ini adalah staf edukatif.

D. Kesimpulan

Peningkatan kualitas kinerja staf edukatif pada Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tidak terlepas dari dua factor, yaitu factor sosail dan factor ekonomi. Factor social

berorientasi dengan eksistensinya sebagai warga masyarakat yang dapat diteladani, sedangkan factor ekonomi yang berorientasi dengan financial yang dapat menjadi atmosper sirkulasi pekerjaan menuju pekerjaan yang berkualitas. Implikasi kedua factor tersebut menjadi suatu motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijanto, 2002. *Analisis Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Strategi Bersaing serta Kebijakan Pemerintah terhadap Prestasi Kerja dan Kualitas Produk di Daerah Sentra Industri Jawa Timur*. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Dendy Sugono. Dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta, PT. Gramedia
- Manulang, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, PT. BPFE.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga.
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE YKPN.

RPSEP-33

ANALISIS MANAJEMEN PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE MANAGEMENT*) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PADA LEMLITBANG PEMERINTAH PENGAMBIL KEBIJAKAN)

Umi Rusilowati
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
umi_rusilowati@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1). proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pada pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan; 2). peran Teknologi Informasi dalam mengakomodasi proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*); Obyek penelitian ini adalah Lembaga LIT-BANG Pemerintah Pengambil Kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya, dan kerangka acuan bagi penelitian dan praktisi dalam membangun rencana manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berbasis Teknologi Informasi dan manajemen Sumber Daya Manusia serta ilmu ekonomi pada umumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan *single case study*. Ada 4 (empat) Informan kunci yang ditetapkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil pengumpulan dan analisis terhadap data dan informasi dapat diketahui bahwa : 1). Proses *knowledge management* pada pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan di lembaga litbang pemerintah telah berjalan dan telah menghasilkan beberapa inovasi melalui berbagai rekomendasi hasil penelitian yang disampaikan kepada unit teknis; 2). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan sudah merupakan kebutuhan bagi pejabat fungsional peneliti, namun ketersediaan perangkat komputer masih terbatas;

Kata kunci : Manajemen pengetahuan dan Teknologi Informasi.

Abstract: The purpose of this study is to investigate and analyze: 1). *knowledge management* processes on the development of activities to share and absorb knowledge, 2). Information Technology's role in accommodating the process of *knowledge management*. The object of this research is at Research and Development Institution of Government. This study used a qualitative analysis approach with the *single case study*. There are 4 (four) key informants defined by certain criteria. From the collection and analysis of data and information can be seen that: 1). The process of *knowledge management* in development activity to share and absorb knowledge R & D institutions of government have been run and produced several innovations through various recommendations of research results are submitted to the technical unit, 2). Utilization of information technology advances in the development of activities to share and absorb

knowledge is a requirement for a functional official researcher, but there are still limited availability of computer equipment.

Keyword: *knowledge management and information technology*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan manusia dimulai sejak manusia mengenal informasi, kemudian informasi yang didapat selanjutnya diteruskan kepada orang lain melalui komunikasi, berlangsung antar manusia dengan manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pengetahuan dan informasi tersebut bergerak dinamis melalui organisasi dalam berbagai cara, tergantung bagaimana organisasi memandangnya.

Menyongsong diberlakukannya ekonomi pasar bebas dimana kompetisi dan globalisasi menjadi ciri utama, maka tuntutan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan daya saing tinggi menjadi satu keharusan. Basis keunggulan bersaing telah mengalami perubahan dari pendekatan konvensional ke pendekatan kontemporer, yakni berbasis pengetahuan (*knowledge based assets intellectual capital*), seperti kreativitas, inovasi, pembelajaran organisasi, dan kapabilitas strategik. Menurut Azhar, Affandi (2009: 1) bahwa pergeseran paradigma tersebut telah melahirkan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang dipandang lebih *powerfull* sebagai sumberdaya penting yang menjadi syarat terciptanya keunggulan bersaing bagi individu, unit, departemen dan organisasi.

Carl Davidson dan Philip Voss dalam Bambang Setiarso (2008:22) menyatakan bahwa mengelola *knowledge* sebenarnya merupakan cara bagaimana organisasi mengelola karyawan mereka, mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki karyawan, menyimpan dan membagi dalam tim, serta meningkatkan dan mewujudkan inovasi. Menurut Pleffer dalam Azhar Affandi (2009) sumber keunggulan bersaing yang penting bagi setiap organisasi seyogyanya bertumpu pada aspek sumberdaya manusia serta bagaimana memanajemennya.

Manajemen pengetahuan yang efektif memerlukan perspektif multidimensi, yaitu gabungan dari manusia, teknologi, dan proses. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi banyak aspek dalam manajemen, struktur dan aktivitas tugas organisasi. Rockart dalam Erlita MF (2005) menyatakan bahwa Teknologi Informasi (TI) merupakan senjata strategik dan memanfaatkan TI menjadi sangat penting. Perkembangan dan pengaruh teknologi

informasi terhadap organisasi telah mendorong organisasi untuk dapat mengaplikasikan teknologi tersebut, dengan tujuan agar organisasi lebih dapat memperbaiki kinerja, daya tahan, dan respon organisasi. Penggunaan teknologi informasi menuntut suatu perencanaan yang memadai yang menjamin tujuan strategis dan menuntut adanya perubahan organisasi yang memungkinkan integrasi sistem.

Teknologi Informasi (TI) selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dikatakan sebagai kekuatan pendorong yang sangat besar bagi meningkatnya minat organisasi terhadap manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Majunya TI memang dapat memacu efisiensi dan efektifitas organisasi, karena dirasakan banyak manfaatnya bagi organisasi sehingga usaha-usaha untuk lebih memaksimalkan TI terus berkembang, Teknologi Informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan merupakan infrastruktur yang penting bagi organisasi atau memberi nilai tambah atau keuntungan kompetitif.

Peran sumber daya manusia (SDM) sangat diperlukan untuk mengadopsi segala perubahan yang terjadi. Organisasi berperan penting dan dapat mempengaruhi daya inovasi dan kemampuan organisasi dalam menyerap pengetahuan, organisasi dapat melakukan inovasi dengan lebih baik disebabkan organisasi tersebut memiliki divisi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang canggih. Menurut Barney dalam Azhar Affandi (2009:4) yang terpenting dan harus dimiliki organisasi adalah keberhasilan menciptakan inovasi. Organisasi yang mampu bersaing adalah organisasi yang mampu belajar dan kreatif, hal ini hanya mungkin terlaksana apabila interaksi berupa aktivitas berbagai pengetahuan (*knowledge sharing*) di dalam institusi terlaksana dengan baik. Sebagai sebuah organisasi, dalam lembaga litbang pemerintah terjadi interaksi baik interaksi antara pejabat fungsional peneliti (PFP), antar staf badan litbang, antar pejabat struktural, antar pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti dengan pengguna atau *stakeholder* yang lain. Interaksi yang terjadi dapat menjadi sebuah sarana untuk menghasilkan kinerja yang sangat bermanfaat bagi suatu lembaga litbang untuk bersaing. Kinerja lembaga litbang yang baik tentunya akan mampu mencapai harapannya dalam memberikan bahan kebijakan sebagai unsur penunjang pada suatu kementerian dan mempunyai dampak pada tingginya kualitas pejabat fungsional peneliti yang mengarah kepada profesionalisme.

Untuk penerapan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di dalam suatu organisasi, komponen pertama yang harus diperhatikan adalah ketrampilan dan pendidikan formal. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga penelitian (riset) dan pengembangan di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas SDM. Salah satu penyebab kinerja peneliti di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Negara-negara di Asia adalah masih rendahnya pengembangan dan penguasaan pengetahuan, dan teknologi serta minimnya dana untuk penelitian dan pengembangan.

Menciptakan keunggulan bersaing di era yang semakin intens membutuhkan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas organisasi untuk memposisikan produk dan jasanya kepada pengguna (konsumen). Pergeseran basis keunggulan bersaing yang telah dikemukakan dari pendekatan konvensional ke pendekatan kontemporer yakni berbasis pengetahuan (*knowledge - based asset intellectual capital*), telah melahirkan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang dipandang lebih kuat sebagai sumber daya penting yang menjadi syarat terciptanya keunggulan bersaing bagi individu, dan organisasi.

Proses penelitian ditentukan oleh isi intelektual, karakteristik sosial peneliti dan proses sosial dalam hal *intellectual authority*. Penelitian dan pengembangan suatu ilmu dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kondisi tiga elemen dasarnya yakni: (1). Komunitas ilmunan dan teknologi itu sendiri, (2). Sistem ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya tempat ilmu dan teknologi itu berkembang serta (3). Organisasi yang menjadi semacam katalis bagi komunitas untuk tumbuh kembang didalam sistem yang lebih luas ini, kondisi ini dapat dilihat pada organisasi besar semacam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), maupun yang lebih kecil seperti Lembaga-lembaga penelitian (riset) dan pengembangan, unit-unit riset organisasi profesi dan sebagainya Constan II dalam Setiarso, B (2003:5).

Komunitas pejabat fungsional peneliti (yang saat ini belum diwadahi dengan baik dalam suatu asosiasi) diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui berbagai terobosan baru yang kaya akan inovasi, kreativitas, dan nilai-nilai intelektual. Mengingat kuantitas dan kualitas pejabat fungsional peneliti, maka keberadaan peneliti di Indonesia sampai saat ini dianggap masih belum menjadi sumber daya manusia penting untuk memajukan bangsa. Disisi lain penelitian yang telah dihasilkan (terlepas dengan kualitas dari hasil penelitiannya)

kurang dimanfaatkan oleh *stakeholder*, sebagai contoh di lembaga litbang pemerintah dan pemerintah daerah masih banyak kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah yang ditetapkan tanpa memperhatikan hasil penelitian dan pengembangan. Setiap tahun lembaga litbang dapat melakukan 10 judul penelitian dan 20 judul kajian strategis serta menghasilkan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian maupun kajian strategis dimaksud. Kondisi ini juga menyebabkan pejabat fungsional peneliti merasakan pekerjaannya merupakan pekerjaan yang sia-sia yang dapat mempengaruhi ketidaksiaran pejabat fungsional peneliti melakukan penelitiannya.

Khaerudin DS, (2010), menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai sejumlah Negara di Asia seperti Thailand, Malaysia, dan Jepang tak terlepas dari peran pemerintah memajukan dunia riset. Anggaran riset di sejumlah kementerian dan lembaga riset pemerintah (negara) masih terlalu kecil (sedikit) jika dibandingkan dengan perkembangan problem kehidupan dan tuntutan inovasi teknologi. Secara Nasional tahun 2008 anggaran riset (penelitian dan pengembangan) Indonesia hanya 0,07 % dari Produk Domestic Bruto (PDB) sementara Thailand mencapai 4 (empat) kali lipat dan Jepang mencapai 45 (empat puluh lima) kali lebih banyak dari Indonesia.

Dana riset (penelitian dan pengembangan) ideal Indonesia seharusnya minimal 0,7% - 1% dari APBN data yang ada menunjukkan anggaran riset di Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan Lembaga Penelitian Non Departemen (LPND) pada tahun 2009 hanya sebesar 0.3% dari APBN atau 0,04% dari PDB.

Dampak dari kecilnya dukungan pendanaan ini mengarah kepada tingkat kesejahteraan pejabat fungsional peneliti masih rendah, apalagi jika dibandingkan dengan Pejabat fungsional lainnya, seperti guru dan dosen. Tunjangan pejabat fungsional peneliti di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan beban tugasnya sebagai tenaga ahli di bidangnya. Untuk itu pada tahun 2009 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) telah memberikan sejumlah pendanaan melalui program bantuan sosial penelitian dan perekayasaan bagi peneliti dan perekayasa seluruh Indonesia, dan pada tahun 2010 pemerintah juga masih memberikan perhatian melalui program insentif peningkatan kemampuan peneliti dan perekayasa (PKPP 2010).

Penghargaan kepada pejabat fungsional peneliti diharapkan akan memotivasi peneliti untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil riset (penelitian) yang inovatif. Sehingga menjadi penyeimbang antara upaya peningkatan kesejahteraan peneliti dan menjaga agar penelitian (riset) yang dilakukan bermanfaat nyata bagi masyarakat, dan terwujudnya pejabat fungsional Peneliti ideal yaitu peneliti yang sejahtera dan berprestasi.

Pada penelitian ini masalah penelitian dibatasi hanya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) adalah cara organisasi/lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) mengelola karyawan mulai dari mengidentifikasi pengetahuan pejabat struktural dan staf serta pejabat fungsional peneliti, menyimpan dan membagi pengetahuan dalam tim peneliti dan sesama pejabat fungsional peneliti agar terjadi inovasi yang dihasilkan dari berbagi/*sharing* pengetahuan melalui komunikasi (saling berbicara/berdiskusi).
2. Teknologi Informasi (TI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi banyak aspek dalam menjamin struktur dan aktifitas tugas organisasi lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), dalam mengaplikasikan teknologi untuk memperbaiki kinerja, daya tahan dan respon organisasi/lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dalam memberikan nilai tambah atau keuntungan kompetitif serta meningkatkan minat organisasi/lembaga penelitian dan pengembangan terhadap manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pada pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan, dalam meningkatkan kemampuan para pejabat fungsional peneliti berinovasi di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dukungan atau peran Teknologi Informasi dalam mengakomodasi proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pada pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dalam memperbaiki kinerja dan memberikan nilai tambah serta keunggulan kompetitif.

Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan merupakan pengelolaan secara menyeluruh dari proses penciptaan atau pengembangan pengetahuan, proses penyimpanan pengetahuan dan proses berbagi pengetahuan serta proses implementasi pengetahuan dalam rangka upaya mengeksploitasi asset pengetahuan *tacit* dan *eksplisit* yang dimiliki organisasi, guna mencapai keunggulan bersaing. Nonaka & Takeuchi (1995), Timo Kucza (2001), Regina Yu (2002), Zhou & Fink (2003).

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaring dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik, atau secara umum KM adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Para peneliti menyatakan bahwa dalam memiliki keunggulan berkompetisi selalu berkelanjutan yaitu, bahwa hanya ada satu hal yang membuat perusahaan bisa memiliki keunggulan bersaing (berkompetisi), yaitu saat perusahaan mengenali bagaimana menggunakan pengetahuan yang telah diketahui dan bagaimana pengetahuan yang diketahui tersebut dengan cepat dapat digunakan untuk mengetahui sesuatu yang baru (Prusak, 2001:1002-1007).

Davenport dalam Saifulrahman (2003:3) menyatakan bahwa manajemen pengetahuan adalah proses menterjemahkan pelajaran yang dipelajari, yang ada dalam diri/pikiran seseorang menjadi informasi yang dapat digunakan setiap orang. Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen pengetahuan adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual asset yang dikelola (Jerry Honeycutt dalam Saifulrahman (2003:4). Ia berpendapat bahwa konsep manajemen pengetahuan pada dasarnya adalah berkembang dari kenyataan bahwa dimasa sekarang dan dimasa depan, aset utama sebuah organisasi agar mampu berkompetisi adalah aset intelektual atau pengetahuan bukan aset *capital*.

Menurut Nonaka dan Takeuchi dalam Setiarso B (2008:23) keberhasilan perusahaan jepang ditentukan oleh keterampilan dan kepakaran mereka dalam penciptaan knowledge organisasinya (*organizational knowledge creation*). Penciptaan knowledge melalui pemahaman atau pengeluaran terhadap hubungan *synergistic* dari tacit dan eksplisit. Knowledge dalam organisasi, serta melalui desain dari proses social yang menciptakan knowledge baru dengan

mengalihkan tacit knowledge kedalam explicit knowledge. Halini berarti melakukannya berdasarkan learning proses.

Dalam penelitian ini pengertian pengetahuan mencakup dua jenis pengetahuan. Pertama adalah pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang meliputi pengalaman, gagasan dan keahlian yang dimiliki. Kedua, adalah pengetahuan eksplisit, yaitu informasi yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang umum dikenal dengan istilah informasi kontekstual.

Setiarso, B (2008:23) menyatakan bahwa pengertian knowledge berdasarkan uraian Nonaka dan Takacuchi adalah pengetahuan, pengalaman, informasi faktual dan pendapat para pakar. Organisasi perlu terampil dalam mengalihkan tacit knowledge ke explicit knowledge dan kembali ke tacit yang dapat mendorong inovasi dan pengembangan product baru.

Berbagi Pengetahuan (*knowledge Sharing*)

Seminar, Kudang B, (2010:4) berpendapat bahwa riset adalah tindakan (proses) sistematis yang memenuhi kaedah-kaedah ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya hasil riset sangatlah vital untuk menjadi landasan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya. Untuk itu hasil riset perlu didokumentasikan, didiskusikan, dikaji, didayagunakan dan didiseminasikan ke komunitas luas yang berkepentingan agar dapat dimanfaatkan dengan benar sesuai kebutuhan nyata. Hasil riset ini juga perlu dikelola secara lestari dan profesional agar dapat dijadikan acuan dan penyusunan rekam jejak perjalanan (research road map) dan “state of the art” dari riset-riset terkini.

Penggunaan istilah berbagi (*sharing*) menegaskan adanya proses mempresentasikan pengetahuan individu kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. istilah berbagi juga menegaskan bahwa bukan berarti pemilik pengetahuan atau orang yang memiliki pengetahuan melepas kepemilikannya, melainkan membentuk kepemilikan bersama antara pengirim dan penerima pengetahuan tersebut Davenport etal. (1997) mendefinisikan istilah berbagi sebagai tindakan sukarela dan membedakannya dengan istilah reporting (melaporkan). *Reporting* melibatkan pertukaran informasi berdasarkan suatu rutinitas atau format yang terstruktur, sedangkan berbagi melibatkan kesadaran sendiri dari individu yang berpartisipasi dalam pertukaran pengetahuan meskipun tidak ada keharusan untuk melakukannya. pendapat lain dari Hendriks (1999:91-100) yang menyatakan bahwa berbagi

pengetahuan melibatkan setidaknya hubungan antara dua pihak, yaitu pihak yang menguasai pengetahuan dan pihak yang berusaha menguasai pengetahuan.

Hooff dan Weenen (2004:13-24) menjelaskan *knowledge sharing* sebagai suatu proses pertukaran personal *intellectual capital* antar individu. definisi ini mengimplikasikan bahwa perilaku *knowledge sharing* terdiri atas *bringing (donating knowledge)* dan *getting (collecting knowledge)*. *Donating knowledge* yaitu perilaku mengkomunikasikan modal intelektual yang dimiliki seseorang kepada yang lainnya dan *collecting knowledge* yaitu perilaku individu untuk berkonsultasi dengan individu lainnya mengenai modal intelektual yang dimiliki. Dua perilaku ini dibedakan sebagai proses-proses aktif, baik berkomunikasi dengan yang lain secara aktif atas apa yang diketahui seseorang atau berkonsultasi dengan yang lain secara aktif untuk mempelajari apa yang diketahui. kedua perilaku ini memiliki sifat yang berbeda dan dapat memberi pengaruh yang berbeda.

Konsep *knowledge sharing* sebagai sikap (*attitude*) yang terdiri dari kesediaan (*willingness*) dan keinginan (*eagerness*). Kesediaan didefinisikan sebagai tingkat kesiapan seorang individu untuk memberi akses modal intelektual yang dimilikinya kepada para anggota kelompok lain, sedangkan keinginan didefinisikan sebagai tingkat kekuatan dorongan internal seorang individu untuk mengkomunikasikan modal intelektual kepada para anggota kelompok lain, demikian menurut Reinout et al. (2006:115-135), selanjutnya ia berpendapat bahwa kesediaan dan keinginan merupakan sikap yang mengarahkan orang-orang untuk berbagi pengetahuan.

Peneliti dan lembaga penelitian serta komunitas lain yang relevan memerlukan wadah komunikasi dan bersinergi dalam suatu forum jaringan riset yang profesional dan strategis dalam melestarikan dan mempropagasikan proses dan produk riset. Forum jaringan riset ini sangat dibutuhkan, khususnya terkait dengan informasi dan penyediaan hasil penelitian yang dilakukan oleh semua peneliti baik individu maupun institusi yang tersebar di berbagai wilayah geografis di tingkat nasional maupun internasional. Pengembangan forum jaringan riset ini harus berbasis pada platform teknologi informasi yang memungkinkan penghimpunan semua agen dan lembaga penelitian serta berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), Seminar, Kudang B, (2010:6).

Veugelers dalam Anrawina L (2009:78) menyatakan bahwa investasi dalam program penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang penting dalam menambah keahlian

karyawan yang terlibat didalamnya. Program penelitian dan pengembangan dapat meningkatkan simpanan pengetahuan dan berkontribusi terhadap dasar pengetahuan suatu organisasi. Pendapat lain menyatakan terdapat hubungan saling berpengaruh antara hasil program penelitian dan pengembangan dengan kapasitas penyerapan pengetahuan (Vinding dalam Andrawina 2009:78). Hubungan tersebut memiliki dua arah. Arah yang pertama, kapasitas penyerapan pengetahuan mempengaruhi intensitas penelitian dan pengembangan. Arah yang kedua, semakin banyak program penelitian dan pengembangan yang dilakukan maka semakin efisien pula upaya untuk memperoleh pengetahuan eksternal.

Era globalisasi yang ditunjang oleh inovasi juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Kemampuan suatu Negara dibidang iptek menjadi salah satu faktor daya saing yang paling penting dewasa ini.

Kemampuan inovasi didefinisikan sebagai keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk secara efektif menyerap pengetahuan, menjadi ahli (master) dan meningkatkan teknologi yang telah ada untuk dapat menciptakan sesuatu yang baru dalam Aulawi, H (2010:43).

Von Krogh, Ichiyo, Nonaka dan Chun Wei hoo dalam Setiarso B, (2008:22) disampaikan ringkasan gagasan yang didasari pengertian *knowledge* adalah sebagai berikut:

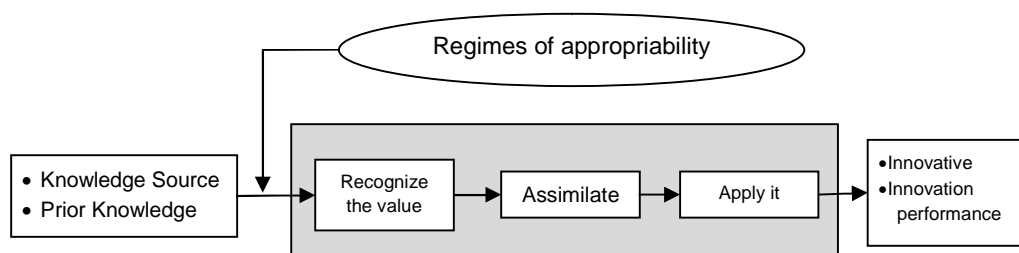
1. *Knowledge* merupakan kepercayaan yang dapat dipertanggung jawabkan (*justified true believe*).
2. *Knowledge* merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus terpikirkan (*tacit*).
3. Penciptaan inovasi secara efektif bergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut.
4. Penciptaan inovasi yang melibatkan lima langkah utama yaitu

Berbagi *knowledge* terpikirkan (*tacit*), menciptakan konsep, membenarkan konsep, membangun prototype, dan melakukan penyebaran *knowledge* tersebut

Selanjutnya Carl Davidson dan Philip Voss dalam Setiarso B (2008:22) mengatakan bahwa mengelola *knowledge* sebenarnya merupakan cara bagaimana organisasi mengelola karyawan mereka daripada berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk mengaplikasikan teknologi informasi. Sebenarnya menurut mereka "*knowledge management*" adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara.

Kemampuan Menyerap Pengetahuan (*Absorptive Capacity*)

Konsep awal dari menyerap pengetahuan (*absorptive capacity*) diperkenalkan oleh Cohen dan Levinthal (1990 :128-152), dengan menggunakan istilah “pembelajaran” (*learning*) sebagai sebutan lain dari kemampuan menyerap pengetahuan (*absorptive capacity*). Konsep menyerap pengetahuan terdiri dari tiga dimensi, yaitu : kemampuan organisasi mengidentifikasi, mengasimilasi dan mengeksploitasi pengetahuan yang dapat menimbulkan inovasi. Selanjutnya Cohen dan Levinthal dalam Affandi,A. (2009: 11) menyatakan bahwa kemampuan memperluas dasar pengetahuan dalam sebuah organisasi tergantung pada tingkat pembelajaran dan dasar pengetahuan sebelumnya dari individu-individu dalam organisasi, yang memperluas kemampuan mereka untuk memperoleh pengetahuan lebih jauh. Model menyerap pengetahuan dari Cohen dan Levinthal dalam Affandi, A.(2009:12) dapat dilihat pada Gambar 1



Sumber : Cohendan Levinthal (1990)

Gambar 1
Model Kemampuan Menyerap Pengetahuan

Zahra dan George dalam Affandi,A. (2009:13) melakukan rekonseptualisasi konsep kemampuan menyerap pengetahuan yang dikemukakan oleh Cohen dan Levinthal dengan memperkenalkan komponen tambahan, yaitu transformasi pengetahuan sebagai kapabilitas organisasi untuk mengembangkan aktivitas yang memfasilitasi penggabungan pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang baru diperoleh dan diasimilasi. Konsep kemampuan menyerap pengetahuan dari Cohen dan Levinthal yang memiliki tiga dimensi direkonseptualisasi menjadi empat dimensi yaitu; akuisisi, asimilasi, transformasi dan eksploitasi.

Teknologi Informasi (TI)

Kemajuan di bidang *Information Communication Tecnology* (ICT) telah memberikan banyak manfaat bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Sebagai suatu bentuk konvergensi dari teknologi informasi, telekomunikasi, dan multimedia, ternyata ICT telah menciptakan berbagai peluang dalam pembangunan ekonomi sekaligus tantangan.

Wong,(2005:261) menyatakan bahwa Teknologi Informasi(TI) adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) dan memiliki peran yang tidak dapat terbantahkan. Dukungan TI terhadap proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dapat dikembangkan secara luas sehingga dapat diaplikasikan dan diintegrasikan ke dalam suatu *platform* teknologi organisasi.

Secara Umum teknologi informasi telah membantu mengurangi “*transaction cost*”, menyediakan akses informasi yang lebih murah, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Satriya,E (2003:3).

Penggunaan teknologi informasi sebagai suatu aset yang strategik dalam mendesain dan mengelola organisasi , serta dapat membuat organisasi lebih responsif, fleksibel, efisien dan bahkan organisasi dalam posisi ofensif, namun dalam penerapannya tidak selalu berhasil. J.B. Wahyudi dalam Erlita, M.F.(2005 : 14), menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu

Perkembangan teknologi Informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan konsep manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Istilah Teknologi Informasi merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ilmu, atau dapat diartikan sama dengan ilmu terapan. Sedangkan informasi merupakan sesuatu yang diungkapkan oleh manusia atau fakta.

Dampak teknologi informasi terhadap organisasi, pengguna, dan manusia pendukungnya antara lain adalah meningkatkan efisiensi operasi, mendukung inisiatif strategis, memperluas batas organisasional, mengubah pola kerja, mengubah persyaratan kemampuan individu dalam organisasi, mengubah sifat pengawasan, meningkatkan daya saing,

dan mengusahakan *platform* budaya yang sesuai Suadi (1993:37-46) dan Sudibyo (1992:19-26)

Selanjutnya semianar Kudang, B (2010:7) mengatakan bahwa Kemajuan Teknologi Informasi memang dapat memacu efisiensi dan efektifitas organisasi. Karena dirasakan bermanfaat bagi organisasi, maka usaha untuk lebih memaksimalkan teknologi informasi terus berkembang. Bagi organisasi teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan merupakan infrastruktur yang penting bagi organisasi atau organisasi dalam memberikan nilai tambah atau keunggulan kompetitif.

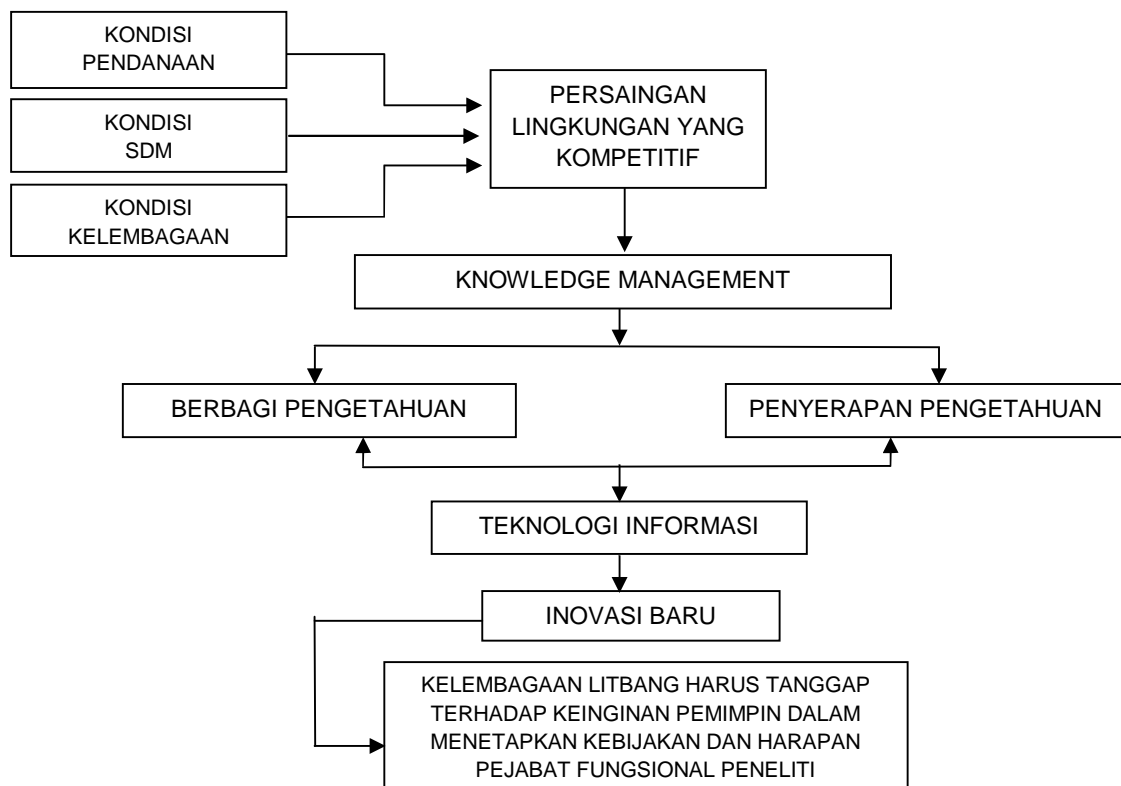
O'Leary et al., dalam Elita, F.M (2005:22) menyatakan Penerapan *Knowledge management* (manajemen pengetahuan) hanya akan memberi dampak positif bila terintegrasi dengan baik antara aspek teknologi dengan aspek sosial dan organisasi. Teknologi informasi merupakan sesuatu yang penting bagi kesuksesan, tetapi bukan yang paling penting. Tanpa organisasi dan pengelolaansumber daya manusia maka teknologi informasi tidak akan sukses.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dari kondisi yang ada saat ini di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah yaitu kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) pejabat fungsional peneliti yang masih terbatas dalam kuantitas maupun kualitas, begitu pula dengan tingkatan kelembagaan penelitian dan pengembangan (litbang), ada yang setingkat Badan, ada yang setingkat kantor, dan ada yang setingkat fungsi (UPT, Bidang, Bagian). Selain itu kondisi pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum menggembirakan apabila dibandingkan dengan Negara berkembang atau negara maju. Ketiga kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi persaingan lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang semakin kompleks ini membutuhkan modal dasar pengetahuan. Dengan adanya lingkungan bersaing yang kompetitif, dimana kompetisi harus dihadapi oleh setiap organisasi termasuk lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan keunggulan dalam menemukan berbagai inovasi dalam memenuhi pengguna atau *User*. Untuk memperoleh inovasi baru pejabat fungsional peneliti wajib berbagi pengetahuan dan menyerap pengetahuan.

Pengetahuan dianggap sebagai sumber daya lembaga litbang paling strategis, karena dengan kepemilikan modal pengetahuan (*intellectual capital*), lembaga akan memiliki sumber

daya yang bila dikelola dengan efektif mampu mendorong lembaga untuk memiliki keunggulan dibanding para pesaingnya Prusak,L.(2001: 1002-1007) Namun agar pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah bagi lembaga/perusahaan, maka pengetahuan harus disosialisasikan, dieksternalisasikan, dikombinasikan, dan diinternalisasi Nonaka dan Takeuchi (1995:34).



Gambar 2
Kerangka Berfikir Penelitian

Peran sumberdaya manusia sangat diperlukan untuk mengadopsi segala perubahan yang terjadi. Sumber daya manusia yang ada di lembaga litbang harus selalu dikembangkan secara kontinu guna meningkatkan kemampuan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pejabat fungsional peneliti yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan merupakan

aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan kesesuaian sikap dalam rangka meningkatkan kinerja pada saat ini dan masa yang akan datang.

Brink dalam Aulawi.H.(2010:70) berpendapat bahwa kondisi Teknologi suatu perusahaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi aktifitas berbagi pengetahuan pada perusahaan tersebut. Teknologi Informasi (TI) berfungsi untuk memfasilitasi terjadinya aliran pengetahuan didalam suatu organisasi Chua (2004:87-98). Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee (2006: 370-385) menyatakan bahwa aplikasi Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berbagi pengetahuan suatu perusahaan.

Peranan TI berkembang semakin pesat, dimana pada awalnya TI hanya berfungsi sebagai penyimpanan data yang bersifat statik, namun kini berubah menjadi penghubung (katalisator) aliran informasi antar manusia. Alavi dan Leidner juga Lee dan Hong dalam Aulawi,H.(2010:87) menyatakan bahwa melalui pemanfaatan TI dimungkinkan terjadinya proses pencarian, pengaksesan dan pemanggilan informasi dapat dilakukan secara cepat selain hal tersebut TI dapat pula mendukung kolaborasi dan komunikasi antar anggota organisasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Inovasi melibatkan seluruh bagian dalam sebuah lembaga litbang tanpa pengecualian, sebagaimana diutarakan Gaynor dalam Andrawina,L.(2009: 81) yang dapat diadopsi terhadap lembaga litbang adalah tidak hanya pejabat fungsional peneliti yang ada dilembaga litbang yang harus berpikir inovatif, namun juga pejabat struktural dan staf. Untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang berubah dengan dinamis, lembaga Litbang harus menyesuaikannya melalui proses belajar para individu pejabat fungsional peneliti atau karyawannya. Proses belajar dapat menghasilkan pengetahuan baru dalam mengambil pilihan strategis terbaik. Proses belajar akan menghasilkan perubahan atau perbaikan terhadap simpanan pengetahuan yang dimiliki oleh pejabat fungsional peneliti dan pejabat struktural dan staf/ karyawan.

Investasi dalam program penelitian dan pengembangan berulang kali dinyatakan memiliki peranan penting dalam menambah keahlian peneliti yang terlibat didalamnya. Program penelitian dan pengembangan dapat meningkatkan simpanan pengetahuan dan berkontribusi terhadap dasar pengetahuan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Alasan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam mencari solusi alternatif sesuai dengan judul penelitian dan sesuai dengan , tujuan dan manfaat penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan utama menggunakan metode kualitatif adalah sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu : melakukan kajian terhadap isu kontemporer dengan permasalahan yang masih belum jelas, holistic dan kompleks serta dinamis penuh dengan makna terutama dalam konteks Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dengan fokus kajian Manajemen pengetahuan(*knowledge management*). Berbasis Teknologi Informasi , yang tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarang dengan metode penelitian kuantitatif.

Pada penelitian ini hanya melakukan *single case study*, merupakan kritikal tes bagi teori manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berbasis teknologi informasi.*Focus Group Discussion* sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif, merupakan wawancara kelompok yang ditekankan pada interaksi dan perilaku yang muncul dalam kelompok, ketika kelompok itu disodorkan suatu topik atau isu tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian.

Desain Penelitian

Disain penelitian merupakan suatu alat yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam desain penelitian ini peneliti memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan menginterpretasikan atau menterjemahkan data yang dikumpulkan dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Desain penelitian diawali dengan fokus masalah yang muncul pada proses berbagi dan menyerap pengetahuan, kemudian hasil identifikasi ini disusun yang terkait dengan masalah manajemen pengetahuan (*knowledge management*) Berbasis Teknologi Informasi di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah khususnya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Proposisi Studi (*Study Proposition*)

Study proposisi memberikan arahan dalam mengidentifikasi dan mendapatkan informasi-informasi yang relevan dalam mendukung penelitian ini, artinya studi proposisi

membatasi penelitian ini dari informasi-informasi yang tidak ada hubungannya dengan penelitian ini, yang mungkin akan dikumpulkan oleh peneliti.

Study proposisi dalam penelitian ini adalah :

1. Proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pada pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan di lembaga litbang dapat meningkatkan kemampuan berinovasi.
2. Teknologi Informasi memiliki peran yang besar dalam mendukung proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pada pengembangan aktivitas berbagi dan menyerap pengetahuan.

Yin (1994: 14) mendefinisikan bahwa *unit of analysis* sebagai berikut *is related to the way the initial research questions have been defined*. Dalam penelitian ini unit analisis adalah lembaga litbang pemerintah dan direktorat jenderal terkait.

Tabel 1 : Menunjukkan Mengenai Data yang Relevan dan Bagaimana Data yang Relevan Tersebut Dengan Studi Proposisi.

Tabel 1
Kaitan Data dengan Proposisi

No.	Proposisi	Data yang Relevan	Keterangan
1.	Proses manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) di lembaga litbang dapat meningkatkan kemampuan berinovasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kondisi pejabat fungsional peneliti (komposisi, kompetensi SDM Peneliti/ketrampilan dan pendidikan formal) 2. Kondisi SDM dalam mengadopsi segala perubahan yang terjadi. 3. Data pengelolaan transfer pengetahuan dan teknologi. 	<p>Untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi individu dan lembaga litbang pemerintah.</p> <p>Melalui peningkatan penguasaan pengetahuan dalam bidang/kajian</p>

		4. Kemampuan menyerap pengetahuan 5. Daya inovasi pejabat fungsional peneliti 6. Lingkungan strategis (penyediaan sarpras, penyediaan tempat kerja, hubungan kerja).	spesifik/ keunggulan kompetitif.
2.	Infrastruktur Teknologi Informasi memiliki peran yang besar dalam mendukung proses Manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>).	1. Sarana dan prasarana yang tersedia dan disediakan. 2. Aplikasi teknologi informasi yang sudah dan akan direncanakan. 3. Persiapan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi. 4. Dukungan pendanaan bagi pengembangan aplikasi teknologi informasi.	Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah dan mempercepat proses berbagi dan menyerap pengetahuan.

Suatu penelitian yang ilmiah dituntut untuk memenuhi dua kriteria yaitu: logis dan empiris, dengan kata lain suatu penelitian dituntut untuk berkualitas. Untuk mengetahui bahwa suatu penelitian memenuhi kedua kriteria tersebut, maka dilakukan suatu pengujian dalam pembuktiannya, tidak terkecuali pada saat melakukan penelitian *case study*. Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang diperhatikan dengan baik, tidak semua data harus dikumpulkan, namun hanya data yang relevan dengan penelitian ini saja yang akan dikumpulkan.

Terdapat enam macam sumber bukti yang bisa digunakan dalam penelitian *case study*, yaitu : dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan dan perangkat perangkat fisik.

Teknik Analisis

Case study merujuk pada *explanatory study*, maka teknik analisisnya juga lebih mengarah pada *explanatory*, yang mana akan banyak dilakukan analisis dan penjelasan serta data yang didapat selama penelitian dilakukan. Perbedaan perspektif dari setiap sudut pandang mengenai *penerapan* manajemen pengetahuan (*knowledge management*) berbasis teknologi informasi dapat diketahui dari sudut pandang pejabat struktural dan staf serta pejabat fungsional peneliti selaku konsumen dan akhirnya bisa didapat solusi terbaik; dan terakhir melakukan *chain of evidence*, dengan menganalisis keterkaitan diantara data yang dikumpulkan dalam penelitian *case study*.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dapat dilihat pada rasio tenaga peneliti per 1.000 pekerja, dari data yang tersedia dapat diketahui bahwa negara Jepang memiliki rasio yang paling baik yaitu 9,9 pada tahun 2002, dengan ini berarti setiap 1.000 pekerja terdapat 9,9 pekerja dengan kategori tenaga peneliti, kemudian disusul oleh Korea Selatan sebesar 6,4 sedangkan yang terkecil adalah Indonesia sebesar 0,5 pada tahun 2001 berarti tidak ada 1 peneliti dari 1.000 pekerja Indonesia.

Pendanaan/anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dapat diindikasikan dengan persentase belanja penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap PDB, untuk negara Asia yang terbesar adalah negara Jepang sebesar 3,12 % pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 3,21%, kemudian disusul Korea Selatan sebesar 2,91 % pada tahun 2002 dan meningkat pula menjadi 2,96 % pada tahun 2003, sedangkan yang terkecil adalah Indonesia sebesar 0,05 % pada tahun 2001 dan menurun sangat kecil menjadi 0,039% pada tahun 2002. Sedangkan negara China meningkat cukup drastis pada tahun 2000 hanya sebesar 1 % meningkat menjadi 2,2 % pada tahun 2003, dan negara Singapura pada tahun 2000 menganggarkan sebesar 1,89 % pada tahun 2000 dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 2,2 %.

Saat ini kondisi pejabat fungsional peneliti kurang mendapat perhatian, pendapatan seorang prof. riset sangat memprihatinkan yang dapat diindikasikan dengan tunjangan fungsional hanya sebesar Rp. 1 400 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibandingkn

seorang profesor (jabatan akademis di perguruan tinggi). Meskipun tunjangan professor riset jauh lebih rendah dari profesor di bidang pendidikan di perguruan tinggi, pemerintah tidak punya rencana menaikkan tunjangan peneliti (Kompas, 2011), kondisi demikian apabila dibiarkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah sangat berbahaya bagi kelangsungan lembaga riset Indonesia, Pratiwi P Sudarsono (Kompas, 2011) mengatakan Indonesia memiliki banyak orang pintar, keahlian, dan jejaring Internasional, namun, peneliti sains dan teknologi pun ternyata belum mendapat prioritas dari Negara.

Kondisi Litbang Permerintah Saat Ini

Tabel 2.

Matrik Strategi SWOT LITBANG

	Kekuatan	Kelemahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan lembaga litbang di setiap kementerian dan non kementerian. • Adanya tupoksi yang jelas • Adanya mekanisme penyusunan kebijakan yang harus dilandasi penelitian • Mekanisme dan frekuensi pembahasan yang teratur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan kualitas pejabat fungsional peneliti (PFP) rendah • Struktur lembaga belum mencerminkan struktur lembaga litbang • Lembaga didominasi struktural • Dukungan pendanaan rendah • Tingkat kesejahteraan rendah dibandingkan tanggungjawab dan beban kerja • Keberadaan PFP belum diperhatikan sebagai sumber intelektual • Kurangnya sarpras serta informasi bagi PFP • Penghargaan dalam

		mendukung motivasi rendah
<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya himbauan dari Presiden RI untuk memperhatikan keberadaan PFP beserta kesejahteraannya • Adanya usulan peningkatan tunjangan bagi PFP yang memadai • Adanya peraturan perundangan yang cukup jelas bagi pembinaan karier PFP • Adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang jabatan rangkap bagi PFP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu komitmen dari pimpinan kementerian dalam memerankan lembaga litbang dalam proses penyusunan kebijakan • Memanfaatkan momentum himbauan presiden RI dalam meningkatkan daya tarik PFP (baik material maupun non material). • Mengimplementasikan tupoksi dan meningkatkan pembinaan karier hingga merealisasikan jabatan rangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas melalui rekrutmen baru PFP dan staf di lingkungan balitbang. • Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan PFP. • Memanfaatkan momentum dukungan presiden untuk meningkatkan kesejahteraan PFP. • Menambah sarpras yang dibutuhkan oleh PFP termasuk jaringan informasi beserta perlengkapannya.
<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya image negative dari badan litbang sebagai tempat buangan atau tempat parker pejabat struktural • Realisasi perkembangan karier yang belum optimal • Hasil litbang kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemiliner image negative lembaga litbang dengan mengimplementasikan tupoksi yang jelas • Memasarkan hasil litbang hingga mendatangi unit pengguna • Memberikan pelayanan terhadap penelitian yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Merubah struktur lembaga litbang bercirikan lembaga fungsional • Adanya persyaratan khusus sebagai pejabat structural di lembaga litbang (mengeliminir tempat buangan) • Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan unit pengguna dalam

<p>dimanfaatkan oleh pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penelitian dan kajian dilaksanakan oleh unit teknis (pengguna sendiri) 	<p>dibutuhkan pengguna pada waktu yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemitraan dengan unit pengguna dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian 	<p>meningkatkan penghargaan kepada PFP menjadi narasumber dan atau pakar.</p>
---	--	---

Tabel 3
Pembobotan Aspek-Aspek Internal dan Eksternal

Aspek Internal	Nilai	Skor	Kinerja Existing (SW)	Bobot	Skor Tertinggi
Kepastian keberadaan litbang dgn topuksi yang jelas	Kuat	3	+	20 %	+0,6
Mekanisme penyusunan kebijakan berlandaskan hasil litbang	Sedang	2	+	20 %	+0,4
Kualitas dan kuantitas belum optimal	Kuat	3	+	20 %	+0,6
Struktur lembaga, kesejahteraan dan penghargaan belum sesuai	Lemah	1	-	20 %	-0,2
Pendanaan kegiatan litbang rendah	Sedang	2	-	10 %	-0,2
Sarana dan prasarana tidak	Sedang	2	-	10 %	-0,2

memadai					
					Total 1,00

Aspek Eksternal	Nilai	Skor	Kinerja Existing (OT)	Bobot	Skor Tertinggi
Himbauan dan dukungan Presiden RI	Sedang	2	+	15 %	+0,3
Usulan kesejahteraan PFP	Sedang	2	+	15 %	+0,3
Adanya peraturan pembinaan karier PFP	Tidak menarik	1	+	10 %	+0,1
Image tempat buangan	Menarik	3	-	25 %	-0,75
Hasil litbang belum digunakan	Menarik	2	+	20 %	+0,4
Unit pengguna melaksanakan litbang	Menarik	2	+	15 %	+0,3
					Total 0,65

Tabel 4
Matrik Strategi SWOT Manajemen Pengetahuan

	Kekuatan	Kelemahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pejabat fungsional peneliti dari berbagai tingkatan di setiap badan litbang pemerintah. • Terbiasanya peneliti memanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya peneliti utama maupun ahli peneliti utama dan professor riset di setiap badan litbang pemerintah. • Pendidikan formal rendah dan ketrampilan menyerap pengetahuan kurang. • Kurangnya perangkat keras

	<p>kemajuan teknologi informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum forum komunikasi dan berbagai fasilitasi rapat pertemuan antara pejabat fungsional peneliti, nara sumber, pengguna. • Tersedianya sumber sumber pengetahuan yang mudah diakses. 	<p>yang dapat digunakan untuk berbagi dan menyerap pengetahuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan perpustakaan kurang memadai.
<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Formasi calon PNS untuk jabatan fungsional peneliti • Terasanya manfaat berbagi dan menyerap pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. • Adanya fasilitas internet di setiap ruangan kerja dan rapat walaupun belum disediakan perangkat kerasnya secara memadai. • Adanya peluang 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan formasi calon PNS dalam menambah komunitas berbagi dan menyerap pengetahuan. • Memelihara kebiasaan melakukan berbagi dan menyerap pengetahuan melalui berbagai fasilitas baik langsung maupun tidak langsung • Meningkatkan daya piker melalui pendidikan formal maupun informal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas Pejabat Fungsional Peneliti melalui pendidikan formal terutama strata 3. • Memberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan dan memelihara nilai kredit jabatan fungsional peneliti. • Memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan untuk proses berbagi dan menyerap pengetahuan. • Memelihara budaya membaca, mendengar, menulis dan berbicara.

untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal.		
<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peluang mutasi ke luar badan litbang. • Image lembaga litbang yang kurang menguntungkan. • Belum adanya system penghargaan yang layak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeliminir mutasi pejabat fungsional terutama bagi pejabat fungsional pertama dan muda. • Mengeliminir image negative lembaga litbang dengan melakukan forum pertemuan yang berkualitas dengan nara sumber yang baik. • Menerapkan system penghargaan bukan sekedar sertifikat semata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan formal • Adanya larangan untuk mutasi bagi pejabat fungsional peneliti pertama dan muda. • Penghargaan kepada PFP menjadi narasumber dan atau pakar.

Tabel 5. Pembobotan Aspek-Aspek Internal dan Eksternal

Aspek Internal	Nilai	Skor	Kinerja Existing (SW)	Bobot	Skor Tertinggi
Adanya pejabat fungsional peneliti dari berbagai tingkatan	Kuat	3	+	20 %	+0,60
Sudah terbiasanya pejabat fungsional peneliti	Sedang	2	+	15 %	+0,30

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi					
Terdapatnya fasilitas forum forum pertemuan baik internal maupun eksternal dan suber lainnya.	Kuat	3	+	20 %	+0,60
Pendidikan formal dan kemampuan membagi dan menyerap pengetahuan kurang memadai.	Sedang	2	-	20 %	-0,40
Kurangnya professor riset atau penet utama	Kuat	3	-	15 %	-0,30
Sarana dan prasarana perpustakaan	Sedang	2	-	10 %	-0,20
					Total 0,60

Aspek Eksternal	Nilai	Skor	Kinerja Existing (OT)	Bobot	Skor Tertinggi
Adanya formasi calon PNS untuk pejabat fungsional peneliti	Menarik	3	+	15 %	+0,45
Sudah terasanya manfaat berbagi dan menyerap pengetahuan pada kegiatan penelitian.	Sedang	2	+	15 %	+0,30
Adanya fasilitas internet disediakan ruangan kerja maupun rapat	Sedang	2	+	10 %	+0,20

Adanya peluang mutasi bagi pejabat fungsional peneliti.	Menarik	3	-	30 %	-0,9
Image lembaga yang kurang baik.	Menarik	2	+	20 %	+0,40
System penghargaan belum memadai.	Menarik	3	-	10 %	- 0,30
					Total 0,15

Interview Secara Terbuka (*Interview Open-ended*)

Dalam penelitian studi kasus ini, dilakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa informan kunci (*Key Informan*) . Deskripsi informan kunci yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan 4 (empat) kategori pejabat fungsional peneliti yang berada di kementerian Nakertrans dan diluar kementerian Nakertrans begitu pula untuk pejabat strukturalnya (sebagai pengguna).

Menganalisis Data Studi Kasus

Dalam penelitian *case study*, terdapat 4 (empat) strategi teknik analisis data yang sering digunakan yaitu :*pattern matching, explanation building, time series analysis*, dan program *logic model*. Keempat teknik analisis tersebut dapat digunakan dalam strategi *single case study* maupun *multiple case study*

Teknik Analisis Data

Penjabaran analisis data terdiri atas pengujian, pengkatagorian, pentabulasian ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk merujuk pada proposisi awal penelitian. :

1. Berdasarkan pada proposisi teoritis.
2. Mengembangkan deskripsi kasus.

Proposisi 1: ProsesManajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) di Lembaga Litbang Dapat Meningkatkan Kemampuan Berinovasi.Deskripsi Persepsi

Proses Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) di Lembaga Litbang Pemerintah.

Proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di lembaga litbang pemerintah diawali dengan kondisi pengetahuan yang dimiliki lembaga litbang pemerintah yang ditunjukkan dari bagaimana kondisi pejabat fungsional penelitiannya ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, dan tingkat jabatan penelitiannya serta pengalamannya dalam melakukan penelitian. Dari hasil wawancara dengan para informan kunci terlihat bahwa kondisi pejabat fungsional peneliti yang berada di lembaga litbang pemerintah relatif kurang dapat bersaing dengan peneliti luar negeri, dimana jabatan fungsional peneliti setingkat Profesor riset sangat jarang, walaupun sudah ada peneliti utamanya.

Hasil penelitian yang digunakan sebagai *mapping* yang bisa dikatakan sebagai *pre-case study* dengan informan yang terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas menjawab setuju bahwa proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di lembaga litbang dapat meningkatkan inovasi, melalui proses berbagai kemampuan dalam menggali kecakapan berinovasi

Hasil deskripsi kondisi tentang manajemen pengetahuan (*knowledge management*) memiliki kesamaan pendapat dengan pendapat key informan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesesuaian terhadap persepsi proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam meningkatkan inovasi pejabat fungsional peneliti.

Sikap berbagi pengetahuan sangat baik, dimana pejabat fungsional peneliti saat ini sudah banyak melakukan aktivitas berbagi pengetahuan dengan memberikan pengetahuan yang dimilikinya meliputi gagasan, keahlian dan informasi konseptual kepada peneliti lain dan sudah banyak berperan sebagai narasumber dan pakar di lembaga litbang maupun diluar lembaga litbang. Kondisi ini berdampak pada jenjang jabatan fungsional namun tidak berdampak pada karir jabatan struktural (bagi rangkap jabatan).

Kondisi lingkungan litbang yang berbeda terutama dari aspek frekuensi pertemuan yang diadakan dengan kondisi lingkungan kerja di unit teknis atau direktorat jenderal teknis terkait dapat mempengaruhi sikap berbagi pengetahuan ini. Dengan frekuensi yang tinggi dapat menghasilkan berbagai inovasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan,

sudah banyak rekomendasi disampaikan kepada unit teknis namun belum seluruh rekomendasi yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan.

Hasil dari jawaban informan yang ditetapkan dapat diketahui mendukung persepsi terhadap proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam meningkatkan inovasi. Dengan semakin banyaknya frekuensi forum- forum pertemuan di lembaga litbang maupun diluar lembaga litbang atau pihak lain, lembaga litbang semakin mampu memberikan gagasan atau ide dalam bentuk rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. Dari beberapa pernyataan yang dijawab menunjukkan kategori tinggi, namun peneliti memiliki kecenderungan enggan mendistribusikan ide dan gagasan di luar tim penelitian yang ditunjukkan dengan kriteria rendah, kecuali pada pertemuan formal, keenganan untuk mendistribusikan ide atau gagasan menjadi kecil yang ditunjukkan kategori tinggi.

Proposisi 2 : Teknologi Informasi memiliki peran yang besar dalam mendukung proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Kondisi kesediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di lembaga litbang adalah tersedianya saluran internet maupun sebagian yang belum membangun intranet. Dengan tersedianya fasilitas ini pejabat fungsional peneliti dapat memperoleh pengetahuan secara *online* yang sangat dibutuhkan oleh peneliti, sehingga walaupun komputer yang tersedia masih terbatas, banyak pejabat fungsional peneliti yang memiliki sendiri lap top. Kondisi ditunjukkan dengan nilai kategori tinggi untuk memperoleh berbagai sumber data dan informasi secara *on line*. Lain halnya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam menyimpan data dan informasi belum banyak dimanfaatkan oleh pejabat fungsional peneliti yang ditunjukkan dengan nilai kategori sedang.

Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam melakukan komunikasi antar atau sesama pejabat fungsional peneliti di lembaga litbang menunjukkan kategori sedang, hal ini dapat dibuktikan masih besarnya komunikasi langsung yang dimanfaatkan oleh para pejabat fungsional peneliti, dengan adanya pertemuan pertemuan rutin, seperti pertemuan rutin dalam tim penelitian, pertemuan rutin FKK dan FKPPD, pertemuan rutin antar pejabat fungsional peneliti dan lain lan pertemuan.

Jawaban informan mengenai infratraktur Teknologi Informasi yang memiliki peran besar dalam proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) ini ditunjukkan pula dengan jawaban kuesioner dari informan kunci yang telah ditetapkan.

Kondisi system informasi yang tersedia masih terbatas pada jaringan internet dan intranet, system informasi ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan eksplisit dan untuk menyimpan berbagai bahan terkait dengan kegiatan penelitian belum banyak dimanfaatkan, untuk lebih memanfaatkan system informasi ini perlu dipikirkan adanya wadah yang menangani penyimpanan pengetahuan eksplisit.

Proses berbagi dan menyerap pengetahuan selalu berkaitan dengan proses komunikasi dan kolaborasi yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi. Hampir di setiap lembaga litbang pemerintah sudah dilengkapi dengan system informasi melalui jaringan internet. Namun jaringan ini belum maksimum dimanfaatkan begitu pula dengan jaringan intranet. Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi ini tidak ada lagi sumbatan dalam memperoleh pengetahuan baru. Walaupun komputer yang disediakan kurang namun sudah ada pejabat fungsional peneliti yang memiliki laptop, sehingga laptop merupakan kebutuhan primer bagi pejabat fungsional peneliti.

Dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien masih diperlukan adanya sarana pembelajaran pelatihan berbasis *online*, walaupun dalam melakukan komunikasi sebagian pejabat fungsional peneliti sudah memiliki alamat *e-mail*. Kondisi ini menunjukkan kemajuan teknologi informasi saat ini sudah diandalkan dalam berbagi pengetahuan yang diindikasikan banyak pejabat fungsional peneliti yang setiap saat menggunakan kemajuan teknologi Informasi dimaksud.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari hasil wawancara, FGD, dan pengisian kuisisioner serta hasil pembahasan disajikan diskripsi berdasarkan masing masing proposes sebagai berikut :

Proposisi 1: Manajemen Pengetahuan pada Pengembangan Aktivitas Berbagai dan Menyerap Pengetahuan di Lembaga Litbang dapat Meningkatkan Kemampuan Berinovasi.

Tabel 7
Deskripsi Proposisi 1

No	Data	Ukuran	Kondisi	Analisis
1.	Data kondisi pejabat fungsional peneliti (komposisi, kompetensi SDM Peneliti/ketrampilan dan pendidikan formal)	Komposisi kompetensi	Cukup terkait dengan badan litbang kementerian masing –masing perlu rekrutmen baru dari calon PNS.. Cukup ditinjau dari disiplin keilmuan dalam wujud tim yang solid,, namun perlu ditingkatkan untuk peneliti berpendidikan S3 (Doktor).	Lembaga litbang sudah melaksanakan manajemen pengetahuan dengan indikasi kemampuan peneliti memberikan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan untuk mengumpulkan pengetahuan dari peneliti atau structural atau sumber lain. Dengan berbagai
2.	Kondisi SDM dalam mengadopsi segala perubahan yang terjadi.	Minat aktifitas berbagi dan sikap aktifitas berbagi	Keenggangan berbagi pengetahuan yang dilandasi dengan sikap terhadap aktifitas berbagi pengetahuan dan minat untuk berbagi pengetahuan cukup tinggi	tahapan diskusi dapat diperoleh berbagai idea atau gagasan dari internal tim maupun eksternal tim dalam memecahkan suatu permasalahan melalui suatu rekomendasi penelitian
3.	Data pengelolaan transfer pengetahuan dan teknologi.	Tersedianya berbagai referensi dan pengalaman para peneliti	Transfer pengetahuan dapat diperoleh melalui forum-forum pertemuan baik internal maupun	(menciptakan keunggulan bersaing bagi individu dan lembaga litbang pemerintah).

			eksternal.	
4.	Kemampuan menyerap pengetahuan	Adanya tanggapan dan saran	Pembahasan internal tim maupun eksternal tim dapat menyerap pengetahuan, saling memberi masukan.	
5.	Daya inovasi pejabat fungsional peneliti.	Tersedianya berbagai rekomendasi kebijakan	Pembahasan yang intensif dapat menghasilkan ide ide dalam pemecahan masalah dengan melahirkan rekomendasi Kebijakan maupun penyempurnaan..	
6.	Lingkungan strategis (penyediaan sarpras, penyediaan tempat kerja, hubungan kerja).	Tersedianya internet dan ruang diskusi serta pembagian kewenangan antara fungsional dan structural serta tupoksi tim peneliti	Disetiap ruang peneliti terdapat saluran internet namun belum seluruhnya dilengkapi computer, namun diruang rapat dapat diakses saluran internet. Kondisi ini mempercepat timbulnya inovasi baru.	

Proposisi 2 : Teknologi Informasi Memiliki Peran yang Besar dalam Mendukung ProsesManajemen Pengetahuan.

Tabel 7
Deskripsi Proposisi 2

No	Data	Ukuran	Kondisi	Analisis
1.	Sarana dan prasarana yang tersedia dan disediakan.	Tersediannya fasilitas internet dan perangkat keras (computer dan laptop) dimana saja dan kapan saja	Fasilitas internet sudah tersedia baik di ruang kerja maupun di ruang rapat namun perangkat kerasnya (computer maupun laptop) kurang tersedia. Saat ini peneliti dapat memperoleh pengetahuan secara online.	Peneliti sudah merasakan adanya kebutuhan dalam penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan memberi nilai tambah atau keuntungan kompetitif, dan untuk itu masih diperlukan
2.	Aplikasi teknologi informasi yang sudah dan akan direncanakan.	Terbangunnya hasil penelitian dan kajian secara online begitu pula jurnal online	Internet sudah merupakan kebutuhan namun belum dimanfaatkan untuk mensosialisasikan rekomendasi hasil penelitian maupun kajian.	adanya sarana pembelajaran pelatihan berbasis online. Walaupun pemanfaatan teknologi informasi sudah digunakan namun masih
3.	Persiapan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi.	Peneliti menguasai penggunaan berbagai software computer dalam melaksanakan penelitian	Hampir seluruh peneliti dapat menggunakan computer namun belum seluruh software seperti SPSS dll.	diperlukan forum forum pertemuan rutin secara periodic.

4.	Dukungan pendanaan bagi pengembangan aplikasi teknologi informasi.	Pengadaan computer dan laptop setiap tahun.	Pengadaan perangkat keras setiap tahun bertambah namun yang sudah tidak sesuai belum dihilangkan sehingga seolah olah memadai dan adanya kebijakan terkesan Pejabat struktural lebih diberi fasilitas dibandingkan peneliti	
----	--	---	---	--

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelirian tentang Analisis Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*) Berbasis Teknologi Informasi Pada Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Deskripsi persepsi proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di lembaga litbang dapat meningkatkan kemampuan berinovasi;
 - a. Proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sudah terjadi di lembaga litbang. Proses ini sudah dimulai dari pembentukan tim penelitian, komposisi tim penelitian yang ditetapkan dapat mendukung aktifitas berbagi dan menyerap pengetahuan. Proses berbagi dan menyerap pengetahuan dapat terjadi mulai dari kegiatan penyusunan proposal, riset desain dan instrument survey, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data hingga penyebaran hasil penelitian.
 - b. Kondisi lingkungan lembaga litbang dengan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan forum-forum pertemuan tidak terlepas dari manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan kondisi ini akan meningkatkan mutu atau kualitas hasil penelitian. Kualitas ini dapat meningkatkan posisi tawar menawar pejabat fungsional peneliti. Inovasi yang diperoleh dari proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) diindikasikan berada pada kategori tinggi

- c. Lembaga litbang pemerintah sudah melaksanakan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam meningkatkan kompetensi pejabat fungsional peneliti dalam menghasilkan rekomendasi, namun rekomendasi yang diberikan belum dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini digunakan sebagai dasar oleh pengguna (unit teknis atau direktorat jenderal teknis) melakukan kegiatan kajian yang dilakukan sendiri (sebenarnya tupoksi litbang). Selain itu juga digunakan untuk menghindari adanya kritikan pedas yang membangun (litbang lembaga bebas nilai sehingga dalam memberikan rekomendasinya sesuai dengan kenyataannya). Kondisi ini diindikasikan berada pada katagori tinggi dari hasil penelitian dan kajian yang selalu disampaikan beserta rekomendasinya.
2. Deskripsi Presepsi Teknologi Informasi memiliki peran besar dalam mendukung proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*);
 - a. Pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dikarenakan kurang tersedianya komputer yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan, walaupun demikian kemajuan teknologi saat ini sudah diandalkan oleh pejabat fungsional peneliti dalam berbagi pengetahuan (sudah merupakan kebutuhan). Untuk memperoleh pengetahuan eksplisit selalu menggunakan sarana dan prasarana internet berada pada kategori tinggi.
 - b. Fasilitas jaringan internet sudah tersedia namun belum diikuti dengan penyediaan perangkat komputernya, untuk itu banyak pejabat fungsional peneliti yang berupaya memiliki laptop sendiri dalam mendukung proses berbagi dan menyerap pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi A. 2009. *Peran Knowledge Management Dalam Menciptakan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan (Sustainable Competitive Advantage) Pada Institusi Pendidikan Tinggi Orasi Ilmiah* Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pasudan
- Andrawina L, 2009. *Hubungan Antara Kemampuan Berbagi Pengetahuan, Kapasitas Penyerapan Pengetahuan dan Kemampuan Berinovasi*, Disertasi, Institut Teknologi Bandung (ITB).

- Apripradono, HW. 2008. *Pemanfaatan Pengembangan Sistem Informasi berbasis Manajemen Pengetahuan untuk Membentuk Sharing Culture Di STIE IEU Surabaya* [http://directory.umm.ac.id/SIP/jurnal - Heru – 02 \(2008\).pdf](http://directory.umm.ac.id/SIP/jurnal-Heru-02(2008).pdf)
- Arifin Y 2011. *Implikasi Kepemimpinan Transformasional dan Manajemen Pengetahuan Terhadap Kinerja Pelayan E-Government Pemerintah Daerah Melalui Manajemen Perubahan*. Disertasi Universitas Padjadjaran.
- Arismunandar, 2009. *Perilaku Organisasi Sebagai Pendekatan Antardisiplin Dalam Manajemen Pendidikan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Universitas Negeri Makassar Pada Tanggal 17 Februari 2009.
- Aulawi H, 2010. *Analisis Hubungan Antara Knowledge Enablers, Perilaku Berbagi Pengetahuan dan Kemampuan Berinovasi*, Disertasi, Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Barney, JB., (1996) : *The resources-based theory of firm, Organization Science*, 7(5)
- Benu YM, 2006. *Studi Mengenai Learning Organization di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya*, Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Bessant, J. (2003) *High Involvement Innovation : Building and Sustaining Competitive Advantage through Continuous Change*, John Wiley, Chichester.
- Brink, P.V.D. (2003): *Social, Organizational, and Technological Condition that Enable Knowledge Sharing*, Disertasi Program Doktor, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
- Bungin, B. (2010) : *Penelitian Kualitatif, untuk Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial lainnya*, penerbit Kencana Predanaedia Group
- Campos, J. (1999): *An Exchange on Definitions of Innovation from the Innovative Management Network*, <http://www.innovation.cc/discussion-papers/definition.htm>, diunduh pada 5 juni 2011.
- Chaudhry, A.S. (2005) *Knowledge Sharing Practice in Asia Institution: A Multicultural Perspective from Singapore*, *World Library and Information Congress : 71th IFLA General Conference and Council "Libraries-A voyage of discovery, 14-18 August 2005, Oslo, Norway*
- Chua, A. (2004) *Knowledge Management System Architecture: A Bridge between KM Consultants and Technologists*, *International Journal of Information Management*, Vol 24, 87-98
- Dalt, RL. 2010 *New Era Of Management (Era Baru Manajemen)* Penerbit Salemba Empat.
- Elita, F.M. 2005. *Kajian Tentang Manajemen Pengetahuan*, <http://pustaka.unpad.ac.id>, disadur 6 – 12 – 2010.
- Erlita MF, 2005. *Kajian Tentang Manajemen Pengetahuan*, <http://pustaka.unpad.ac.id> disadur 6 Desember 2010
- Hansen, S., dan Avital, M. (2005): *Share and Share a Like : The Social and Technological Influences on Knowledge Sharing Behavior*, <http://sprouts.case.edu/2005/050101.pdf>. diunduh pada 18 Februari 2011.
- Hendriks, P. (1999) : *Why Share Knowledge? The Influence of ICT on the Motivation for Knowledge Sharing*. *Knowledge and Process Management*, 6(2), 91-100
- Hooff, V.D. dan Weenen, F>L. (2004) : *Committed to Share : Commitment and CMC Use as Antecedents of Knowledge Sharing*, *Knowledge and Management*, 11, 13-24.

- Honeycutt, Jerry. 2000. *Knowledge Management Strategies: Strategi Manajemen Pengetahuan*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Jackson, S E., Schuler, R,S., & Werner, S., (2009) *Managing Human Resources*. Cengage Learning Asia Pte Ltd, 10 th ed.
- James, AF Stoner and Freeman R. Edward. 2002. *Manajemen*, Singapore. Simon and Sebuster.
- Jones,G. Dan Terry, M. (1988). *Information Technology and TheNew Accounting*. Mc Graw-Hill Book Company, UK.
- Kankhalli, A, Tan, B.C.Y dan Wie, K.K, 2005, Contributing Knowledge to Electronic Knowledge Repositories : An Empirical Investigation, MIS Quaterly 29(1), 113-143
- Kompas, 27 Okt 2011, Kesejahteraanlman, Tak Ada RencanaNaikanGajiPeneliti.
- Krueger, Richard A. *Focus Group A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publication, Inc. Newbury Park, California. 1998.
- Kucza, Timo., (2001) *Knowledge Management Process Model Expo Technical Research of Finland*, VTT publication 455.
- Litosseliti, L. *Using Focus Group in Research*. Continuum London. 2003.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *PerilakuOrganisasidanBudayaOrganisasi*, RefikaAditama, Bandung.
- McFarlan, F.W 1990. *The 1990's : The Information Systems*. Prentice –Hall
- McInerney, Claire. *Knowledge Management and the dynamic nature of knowledge*. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 53, Issue 12 (Oktober 2002) Hal: 1009 – 1018. 2002.
- Nonaka,I., Takeuchi,H. (1995) : *The Knowledge-creatingCompany*, New York: Oxford University Press.
- Prusak, L., (2001) : *Where did Knowledge Management ComeFrom?* IBM System Journal, 40, 1002 – 1007..
- Rangkuti, Freddy, 2004, *Analisis SWOT TeknikMembedahKasusBisnis*, PT. GramediaPustakaUtama, Jakarta.
- Reinout, E.D.V., Hooff,B.V.D.,dan Ridder, J.A.D. (2006). Explaining Knowledge Sharing: The Role of Team Communication Styles, Job Satisfaction, and Performance Beliefs, *Communication Research* 33(2), 115-135.
- Satriya,E. 2003. *Tantangan dan Prospek Program Pendidikan Diploma di Era New Economy*. Makalah disampaikan dalam Workshop Kerangka penjenjangan Kompetensi SDM dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Industri. P4D Bandung.
- Sedarmayanti (2009) *Manajemen Sumberdaya Manusia*, edisi 3, PT Refila Aditama. Bandung
- Seminar, Kudang, B, 2010 *Model Platform TeknologiInformasiuntuk E-Forum Riset*, Fateta IPB.
- Setiarso B, (2003-2007). *Penerapan Knowledge Management diOrganisasi*,<http://kimwayang.blogspot.com>, disadur 17 Januari2011.
- Setiarso B., Subagyo, H ., Suryati, Y (2008) *Study AnalisisdanPerancanganOrganisasiBerbasis Knowledge Managemant*, BidangPengembanganSistemDokumentasidanInformasi PDII-LIPI.
- Stephen P. Robbins, (2005). *PerilakuOrganisasiKonsep, KonsentrasidanAplikasi, TerjemahanHandyanaPujaatmaka*, Jakarta, Prenhallindo
- Suadi, Arif. 1993. *Implikasi Perkembangan Teknologi Terhadap Pengajaran Akuntansi Managemen*. Jurnal Akuntansi dan Managemen. Edisi Oktober.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Sutrisno E, 2010. *Manajemen Sumber Daya manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tiwana. Amrit. *The Knowledge Management Toolkit*. Prentice Hall PTR. Upper Saddle River, NJ 07458. 2000.

Widayana, Lendy., (2005) *Knowledge Management Meningkatkan Daya Saing Bisnis*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publihsing, Malang.

Wong, KY (2005) *Critical Success Factors For Implementing K M in small and Medium Enterprises*, Industrial management and Data System. Vol 105. No 3 (261-279).

Yin, Robert K, 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)* Edisi Revisi (terjemahan), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

RPSEP-34

PENERAPAN PRINSIP STRATEGIK MANAJEMEN DALAM MEMPERTAHANKAN JUMLAH MAHASISWA DI UPBJJ-UT KUPANG

Wise Rogate Silalahi

Fakultas Ekonomi UPBJJ – Universitas Terbuka Kupang
Jl. Pulau Indah No. 06 Oesapa Barat, Kupang - Indonesia - 85228
Telp.: (0380) 8553813, Fax.: (0380) 8553825, HP: 081239524314
swise_r@yahoo.com, wsr_silalahi@yahoo.co.id, wise@ut.ac.id,

Abstrak

Sumber pendanaan bagi Universitas Terbuka sebagian besar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 84 %. Sisanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 16 %. PNBP diperoleh dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa. Agar kegiatan akademik dan non akademik dapat terus berjalan lancar, maka mempertahankan jumlah mahasiswa menjadi penting. Manajemen perlu melakukan upaya agar jumlah mahasiswa tetap dan tidak menurun.

Semakin tingginya tingkat sosial dan pendidikan masyarakat, berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap layanan prima yang diberikan suatu organisasi. Pelayanan yang tidak optimal dapat menurunkan citra institusi di mata calon pelanggan, dan dapat beralih ke organisasi lain. Dalam bidang pendidikan, banyaknya perguruan tinggi yang menawarkan program yang sama, merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah mahasiswa, disamping ketersediaan calon mahasiswa. Perguruan tinggi harus jeli dalam melihat peluang bisnis yang ada dan kelemahan yang dimiliki, serta strategik yang perlu ditetapkan untuk mengoptimalkan penerimaan jumlah mahasiswa.

UPBJJ-UT Kupang sebagai salah satu unit di bawah Universitas Terbuka, melalui Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2021, telah menetapkan peningkatan jumlah mahasiswa sebagai salah satu sasaran kualitasnya. Sebagai upaya dari pencapaian sasaran kualitas tersebut, UPBJJ-UT Kupang melakukan langkah-langkah strategik, yang disebut sebagai strategik manajemen. Strategik manajemen terdiri dari identifikasi faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman, pernyataan visi dan misi, pembuatan formulasi strategik, dan pelaksanaan (Glueck, W. 1988). Penerapan prinsip strategik manajemen ini telah membuahkan hasil. Jumlah mahasiswa UPBJJ-UT Kupang sejak periode 2012.1 sampai dengan 2014.1 dapat dipertahankan.

Kata kunci : *strategik manajemen, jumlah mahasiswa, rencana strategik*

PENDAHULUAN

Sumber pendanaan bagi perguruan tinggi ada 2, yaitu dari APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM), dan dari dana pengelolaan oleh perguruan tinggi, dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Universitas Terbuka, sumber pendanaan dari PNBP lebih besar daripada APBN, yaitu 84 % PNBP sementara APBN 16 %. PNBP bagi Universitas Terbuka berasal dari pemasukan yang diberikan oleh mahasiswa, di antaranya melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan dari kegiatan-kegiatan lainnya. Jumlah mahasiswa menjadi hal penting, di mana semakin tinggi jumlah mahasiswa, semakin besar PNBP yang diperoleh, demikian sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Universitas Terbuka Tahun 2010 – 2021 telah menetapkan peningkatan jumlah mahasiswa, sebagai salah satu sasaran kualitasnya. Renstra ini merupakan pedoman bagi unit-unit di Universitas Terbuka, di antaranya Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) dalam menetapkan kebijakan dan sasaran kualitasnya.

UPBJJ-UT Kupang sebagai salah satu unit di bawah Universitas Terbuka, juga telah menetapkan kebijakan kualitasnya dalam meningkatkan angka partisipasi mahasiswa per tahun. Dari penetapan kebijakan dan sasaran kualitas tersebut, kemudian disusun upaya strategik oleh manajemen untuk memenuhi target kebijakan kualitas, yaitu mempertahankan jumlah mahasiswa dan juga dapat meningkatkan jumlah mahasiswa. Stratejik manajemen adalah upaya-upaya untuk memperkuat manajemen, dalam bentuk meningkatkan peluang bisnis sebagai faktor eksternal, dan mengurangi kelemahan organisasi sebagai faktor internal (Glueck dan Jauch, 1988). Langkah-langkah ini meliputi pernyataan visi dan misi, identifikasi kekuatan internal dan peluang bisnis, formulasi strategik, dan implementasi dalam upaya mencapai target manajemen. Identifikasi kekuatan internal adalah faktor-faktor keunggulan internal sumberdaya organisasi. Peluang bisnis adalah faktor-faktor di luar organisasi yang merupakan peluang untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. Pernyataan visi dan misi adalah target organisasi. Formulasi strategik adalah strategik yang dirancang untuk memenuhi visi dan misi organisasi. Sedangkan implementasi adalah pelaksanaan dari formulasi strategik yang disusun.

Untuk merancang strategik manajemen tersebut, terdapat suatu alat untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, serta merancang formulasi strategik. Alat ini adalah Matrks SWOT 4 K (4 kuadran), yaitu Strengthening (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), Threathening (Ancaman). (Pierce dan Robinson, 2003).

Tujuan penerapan prinsip strategik manajemen ini bagi UPBJJ-UT Kupang adalah untuk meningkatkan keberhasilan manajemen dengan meningkatkan peluang bisnis sebagai eksternal faktor dan mengurangi kelemahan oranisasi sebagai faktor internal. Dalam hal ini, bagi UPBJJ-UT Kupang, keberhasilan itu ditunjukkan dengan kemampuan organisasi daam meningkatkan atau mempertahankan jumlah mahasiswanya.

Langkah-langkah penyusunan matriks 4 K ini meliputi : analisis dan inventarisasi dari kapasitas masing-masing kelompok belajar mahasiswa, memberikan berat dan skor kelompok belajar mahasiswa dari masing-masing indikator, dan menentukan posisi 1 kuadran dari 4 kuadran yang ada, dan menentukan implikasi strategik yang sesuai dengan posisi mahasiswa. Maksimum berat dari masing-masing indikator adalah 1 atau 100 %, dan skor per unit adalah tersebar dari 1 (rendah) sampai dengan 5 (tinggi). Inventarisasi dari masing-masing mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Variabel Kategori dan Indikator	Berat	Skor	Bobot Tertimbang
Kekuatan/Strengthening (S)			
Kelemahan/Weakness (W)			
Peluang/Opportunity (O)			

Tabel 1. Total skor dari mahasiswa

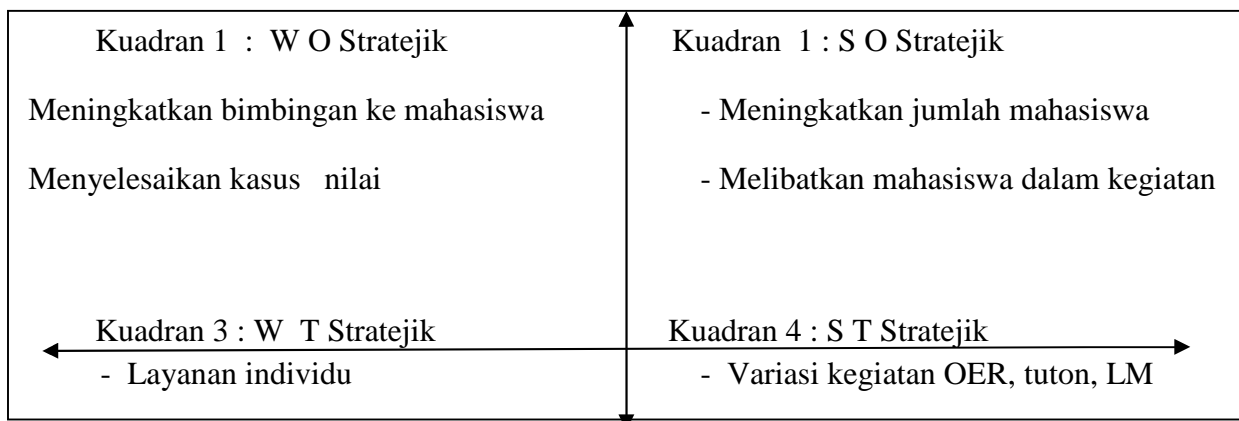
Skor total menyajikan 4 alternatif yaitu :

- a. S - W = Positif, O - T = Positif: S O Strategi (Strategi Pertumbuhan) : Kuadran 1
- S -W = Negatif, O – T = Positif : W O Strategi (Strategi Stabilitas) : Kuadran 2
- S - W = Negatif, O – T = Negatif : WT Strategi (Strategi Bertahan) : Kuadran 3
- S - W = Negatif, O – T = Positif : ST Strategi (Strategi Diversifikasi) : Kuadran 4

- **Stratejik Pertumbuhan** adalah implikasi **Stratejik** untuk kombinasi antara kekuatan sebagai faktor internal dan peluang sebagai faktor eksternal. Maksud dari **Stratejik pertumbuhan** adalah untuk memperluas peran dari mahasiswa dalam mengoptimalkan sumberdayanya yaitu : menjadi nara sumber dalam OSMB, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, menjadi model untuk ditiru oleh mahasiswa lain, menjadi nara sumber dalam pembelajaran mahasiswa melalui penggunaan model jigsaw pada saat kegiatan Tutorial Tatap Muka (TTM), dan lain-lain.
- **Stratejik Stabilitas** adalah kombinasi antara Kelemahan dan Peluang. **Stratejik stabilitas** di sini dimaksudkan untuk menjaga murid agar selalu fokus dalam belajar, mengurangi kegiatan di luar untuk meningkatkan nilai.
- **Stratejik Bertahan** adalah kombinasi antara Kelemahan dan Ancaman. Bentuk kegiatan stratejik bertahan adalah dengan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, pembentukan diskusi kelompok kecil bagi tiap-tiap mahasiswa, dan intensif konsultasi dengan tutor dan pihak manajemen UPBJJ-UT Kupang.
- **Stratejik Diversifikasi** adalah kombinasi strategi antara Kekuatan dan Ancaman. **Diversifikasi** dilakukan dengan memperluas alternatif dalam belajar seperti memberikan alternatif layanan seperti tutorial online, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa, sipas non TTM, toko buku online, dan lain-lain.

Diagram untuk masing-masing implikasi stratejik dapat dilihat pada Diagram 1 di bawah ini.

Gambar . 1. Diagram Matriks 4 Kuadran



METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini bertempat di UPBJJ-UT Kupang Periode 2012,2 – 2014.1.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa, sedangkan sampel adalah mahasiswa pokjar-pokjar.

3. Pengumpulan data

Data yang diperlukan diidentifikasi baik faktor internal meliputi Kekuatan, Kelemahan, maupun eksternal meliputi Peluang, dan Ancaman. Langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Susun daftar indikator dan variabel internal dan eksternal,
- b. Tentukan berat dari masing-masing indikator, dan bandingkan peran 1 indikator terhadap indikator lainnya. Maksimum berat dari masing-masing indikator adalah 1 atau 100 %,
- c. Berikan skor sesuai dengan kontribusi atau penghalang dari masing-masing indikator. Skor menggunakan rasio skala, yang mana skala pengukuran adalah dari + 1 sampai + 5 untuk Kekuatan dan Peluang, serta - 1 sampai dengan - 5 untuk Kelemahan dan Ancaman. Skor positif diberikan untuk Kekuatan dan Peluang sesuai dengan kontribusi dalam mempertahankan jumlah mahasiswa. Sementara itu skor negatif diberikan sesuai dengan penghalang atas upaya mempertahankan jumlah mahasiswa,
- d. Lakukan perkalian antara berat dengan skor dari masing-masing kategori untuk mendapatkan bobot tertimbang. Lalu jumlahkan bobot tertimbang dari masing-masing kategori,
- e. Dapatkan sub total dari hasil penjumlahan masing-masing kategori faktor internal dan faktor eksternal,
- f. Tentukan posisi kuadran dari mahasiswa sesuai dengan hasil dari perhitungan skor. Ada 4 alternatif kuadran, di antaranya adalah :
 - $S > W$ atau $S - W = +$ dan $O > T$ atau $O - T = +$: Kuadran 1
 - $S < W$ atau $S - W = -$ dan $O > T$ atau $O - T = +$: Kuadran 2
 - $S < W$ atau $S - W = -$ dan $O < T$ atau $O - T = -$: Kuadran 3

- $S < W$ atau $S - W = -$ dan $O > T$ atau $O - T = +$: Kuadran 4
- g. Tentukan implikasi strategik dari masing-masing mahasiswa, terkait dengan pencapaian masing-masing kuadran :
- Kuadran 1 : S O Strategi (Strategi Pertumbuhan)
 - Kuadran 2 : W O Strategi (Strategi Stabilitas)
 - kuadran 3 : W T Strategi (Strategi Bertahan)
 - Kuadran 4 : S T Strategi (Strategi Diversifikasi),
- h. Lakukan langkah-langkah manajemen strategik oleh pihak insitusi atau manajemen, berpedoman pada implikasi strategik dari masing-masing mahasiswa.
- i. Bandingkan jumlah mahasiswa sejak 2012.2 sampai dengan 2014.1, untuk mengetahui keadaan jumlah mahasiswa terkait dengan penerapan implikasi manajemen pada periode tersebut.

Format Variabel Kategori, Indikator, dan Skor Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini :

Variabel Kategori dan Indikator (1)	Berat (2)	Skor (3)	Bobot Tertimbang (4) = (2)*(3)
Kekuatan			
A Enerjik	0,2	(1 - 5)	
B Penuh waktu dalam belajar. Motivasi tinggi.	0,3	(1 - 5)	
C Memiliki pengetahuan tentang IT	0,2	(1 - 5)	
D Disiplin	0,3	(1 - 5)	
Sub Total	1		

Kelemahan				
A	Kurang fokus	0,2	(1 - 5)	
B	Kurang percaya diri	0,2	(1 - 5)	
C	Ketergantungan/membutuhkan bimbingan	0,3	(1 - 5)	
D	Kurang menguasai strategi belajar	0,3	(1 - 5)	
Sub Total		1		
Peluang				
A	Menggunakan berbagai jenis OER	0,3	(1 - 5)	
B	Sering berdiskusi dengan tutor	0,3	(1 - 5)	
C	Partisipasi tinggi di kelas	0,2	(1 - 5)	
D	Bergabung dalam diskusi kelompok kecil	0,2	(1 - 5)	
Sub Total		1		
Ancaman				
A	Akreditasi	0,2	(1 - 5)	
B	Adanya pesaing dari perguruan tinggi lain	0,2	(1 - 5)	
C	Keseibukan sebagai Pegawai	0,3	(1 - 5)	
D	Kesulitan dalam memahami materi pelajaran	0,3	(1 - 5)	
Sub Total		1		
GRAND TOTAL				
Rata-rata				

Tabel 2. Format Variabel Kategori, Indikator, and Skor dari Mahasiswa

4. Analisis Data

Peneliti mengobservasi dan membandingkan jumlah mahasiswa per semester sejak Periode 2012.2 sampai dengan 2014.1. Data dikumpulkan dari *Student Record System*, mengamati jumlah mahasiswa, dan membandingkan dengan melakukan analisis stratejik manajemen 4 K tiap semester.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil dari penelitian ini ada 3 data, meliputi :

1. Skor Bobot Tertimbang dan Impikasi Stratejik dari Kelompok Mahasiswa.
2. Penerapan Implikasi Stratejik oleh mahasiswa.
3. Jumlah mahasiswa periode 2012.2 sampai dengan 2014.2, sebagai dampak dari penerapan prinsip stratejik manajemen dalam mempertahankan jumlah mahasiswa.

Skor dari Bobot Tertimbang dan Implikasi Stratejik dari mahasiswa ditujukan untuk menggambarkan kondisi mahasiswa dalam internal maupun eksternal dan implikasi stratejiknya. Data tersebut diberikan pada Tabel 3 di bawah ini :

No.	Kelompok Belajar yang diamati	Skor dari Bobot Tertimbang		Implikasi Stratejik
		Internal	External	
1	Kota Kupang	0,2 (S)	0,2 (O)	S O
2	Kupang Tengah	-0,4 (W)	-0,3 (T)	WT
3	Kupang Timur	0,6 (S)	0,4 (O)	SO
4	Amabi Oefeto	-0,2 (W)	0,3 (O)	WO
5	Amarasi	-0,4 (W)	0,2 (O)	WO
6	Sulamu	0,2 (W)	-0,2 (T)	ST
7	Amfoang Utara	-0,4 (W)	-0,4 (T)	WT
8	Amfoang Selatan	-0,2 (W)	-0,4 (T)	WT
9	Kota Soe	0,2 (S)	0,1 (O)	SO
10	Amanuban Barat	0,2 (S)	-0,2 (O)	SO
11	Amanuban Tengah	0,1 (S)	-0,3 (T)	ST
12	Amanuban Timur	-0,3 (W)	-0,3 (T)	WT

13	Amanuban Selatan	-0,4 (W)	-0,3 (T)	WT
14	Kuanfatu	-0,4 (W)	-0,2 (T)	WT
15	Kolbano	-0,3 (W)	0,8 (O)	SO
16	Mollo Selatan	0,4 (S)	0,2 (O)	SO
17	Mollo Utara	-0,2 (W)	0,1 (O)	WO
18	Kuatnana	-0,4 (W)	0,8 (O)	WO
19	Poli	0,1 (S)	0,1 (O)	SO
20	Kota Kefa	0,6 (S)	0,8 (O)	SO
21	Miomaffo Timur	-0,1 (W)	0,4 (O)	WT
22	Biboki Utara	-0,4 (W)	-0,4 (T)	WT
23	Atambua	-0,2 (W)	0,4 (O)	WO
24	Malaka Timur	0,6 (S)	0,4(O)	SO
25	Baa Lobalain	0,2 (S)	-0,2 (T)	ST
26	Rote Barat Laut	-0,2 (W)	-0,3 (T)	WT
27	Rote Tengah	-0,1 (W)	-0,2 (T)	WT
28	Pantai Baru	-0,4 (W)	-0,3 (T)	WT
29	Rote Timur	0,3 (S)	-0,3 (T)	ST
30	Sabu Liae	0,2 (S)	0,1 (O)	SO
31	Sabu Barat	-0,4 (W)	0,2 (O)	WO
32	Alor	0,3 (S)	0,3 (O)	SO
33	Lewoleba	-0,3 (W)	0,4 (O)	WO
34	Ie Ape	-0,4 (W)	-0,3 (T)	WT
35	Nagawutung	0,2 (S)	-0,2 (T)	ST
36	Omesuri	-0,4 (W)	-0,3 (T)	WT
37	Waibalun	0,3 (S)	0,4 (O)	SO
38	Wulanggitang	0,3 (S)	-0,1 (T)	ST
39	Adonara Timur	0,3 (S)	0,3 (O)	SO
40	Solor Timur	-0,2 (W)	-0,2 (T)	WT
41	Solor Barat	-0,4 (W)	-0,2 (T)	WT
42	Maumere	0,4 (S)	0,4 (O)	SO
43	Lekebai Madawat	0,3 (S)	0,3 (O)	SO
44	Detung Nelle	0,3 (S)	0,2 (O)	SO
45	Paga	0,1 (S)	-0,2 (T)	ST
46	Ende	0,3 (S)	0,3 (O)	SO
47	Nagekeo	-0,1 (W)	0,2 (O)	WO
48	Bajawa	-0,4 (W)	-0,4 (T)	WT
49	Borong	0,3 (S)	0,5 (O)	SO
50	Ruteng	-0,2 (W)	0,3 (O)	WO

51	Labuanbajo	0,3 (S)	0,4 (O)	SO
52	Waingapu	0,6 (S)	0,8 (O)	SO
53	Waibakul	0,5 (S)	0,5 (O)	SO
54	Waikabubak	0,3 (S)	0,5 (O)	SO
55	Waitebula	0,6 (S)	0,7 (O)	SO

Tabel 3. Skor Bobot Tertimbang dan Implikasi Stratejik untuk Mahasiswa

Informasi pada tabel di atas digunakan untuk membantu manajemen dalam menentukan implikasi stratejik mana yang dipakai. Ini termasuk intervensi yang dilakukan manajemen, untuk menaikkan prestasi belajar dan minat mahasiswa. Implementasi ini dijelaskan pada Matriks 4 K sebagai berikut :

- a. Kuadran 1. Stratejik Pertumbuhan (S O Strategi)
 - Mahasiswa dalam strategi ini dilibatkan dalam kegiatan akademik, misalnya sebagai asisten tutor. Disperseni, dan lain-lain. Model tutorial disarankan menggunakan model Jigsaw yaitu belajar melalui teman.
- b. Kuadran 2. Stratejik Stabilitas (W O Strategi)
 - Menjaga agar tutorial tetap terkelola dengan baik, mengelola jadwal, layanan bahan ajar, monitoring, dan evaluasi secara periodik.
 - Rekrutmen tutor didasarkan atas kebutuhan kelas semester berjalan, dan kesesuaian latar belakang pendidikan tutor dengan mata kuliah yang di TTM kan.
- c. Kuadran 3. Stratejik Bertahan (W T Strategi). Mahasiswa pada WT Stratejik diberi bimbingan individual untuk menaikkan motivasinya. Disamping itu juga ada pembagian pengalaman (*sharing*) tentang strategi belajar.
- d. Kuadran 4. Stratejik Diversifikasi (ST Strategi)

Mahasiswa pada kuadran 4 disarankan untuk mengikuti layanan UT, seperti tuton, LM, TBO, dan lain-lain.

Dengan menerapkan prinsip stratejik manajemen, maka selama periode 2012.2 sampai dengan 2014.1, jumlah mahasiswa UPBJJ0-UT Kupang secara rata-rata tidak menurun

atau dapat dipertahankan. Data jumlah mahasiswa Periode 2012.2 sd 2014.1 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini :

No.	Mahasiswa yangdiamati	Jumlah Mahasiswa			
		2012.2	2013.1	2013.2	2014.1
1	UPBJJ-UT Kupang	24,841	24,619	24,960	21,882

Tabel 5. Jumlah mahasiswa UPBJJ-UT Kupang Periode 2012.2 sd 2014.1

B. Pembahasan

Jumlah mahasiswa UPBJJ-UT Kupang tidak mengalami penurunan sejak 2012.2 sampai dengan 2014.1 Penentuan secara spesifik kebutuhan pokjar berdasarkan hasil identifikasi kondisi mahasiswa, membuat mahasiswa terlayani kebutuhannya.

Implikasi strategik yang sesuai kondisi lapangan, berdasarkan hasil formulasi strategik, membuat variasi dalam upaya pemberian layanan, sehingga dapat mempertahankan minat mahasiswa meregsitrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Prinsip Strategik Manajemen dapat mempertahankan angka partisipasi mahasiswa di UPBJJ-UT Kupang.

B. Saran

Penerapan Prinsip Strategik Manajemen dapat diterapkan dalam upaya mempertahankan jumlah mahasiswa, sebagai bagian dari visi dan misi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Glueck, W., and Jauch W. (1988). *Strategic Management and Business Policy*.

New York: Mc Graw Hill.

Pierce II, John, A., and Robinson, R. (2003). *Strategic Management: Formulation,*

Implementation, and Control. Boston: McGraw-Hill Irwin.

RPSEP-35

BUDAYA DAN ETIKA ORGANISASI PUBLIK/BISNIS

Timbul Sahala Tua Hutabarat
Universitas Terbuka
Jurusan Sosiologi
timbulsahalatuahutabarat@gmail.com

Abstrak

Full paper ini berisikan Budaya dan Etika Organisasi publik/Bisnis. Full paper ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita budaya yaitu menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi terkhusus bangsa kita bangsa Indonesia. Jenis full paper ini adalah sebuah tindakan penilaian suatu individu terhadap masyarakat yang merupakan organisasi publik/bisnis, disamping full paper ini dibuat dengan dorongan yang tinggi dari penulis dikarenakan pernah mengalami masalah budaya dan etika dalam lingkungan masyarakat. Adapun teknik analisa full paper ini adalah dengan menguraikan persentase masyarakat yang aktif dalam urusan budaya (60%) menjadi (90%) setelah mengetahui betul budaya dan etika organisasi publik/bisnis. Sebelum dilakukan observasi ini tampaknya masyarakat masih kurang dalam masalah budaya, etika dalam organisasi yang diikutinya. Tulisan ini juga mencoba membahas upaya peningkatan rasa cinta budaya dan nasionalisme masyarakat, yang mana itu merupakan salah satu tugas masyarakat. Melalui tugas itu masyarakat diharapkan melestarikan budaya dan menanam tinggi etika-etika organisasi dalam lingkungan sosialnya. Permasalahannya adalah apakah upaya yang dilakukan masyarakat itu benar benar akan berhasil mewujudkan peradaban bangsa yang tinggi seperti yang diharapkan. Namun, dilain pihak akan sangat tergantung pada upaya penciptaan prakondisi (iklim/budaya kondusif) oleh pihak-pihak lain yang dimantapkan dengan transformasi maupun pembauran budaya sosial secara menyeluruh dari masyarakat ataupun oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab yang ingin menggagalkan peningkatan peradaban tinggi tersebut.

Kata kunci: motivasi masyarakat, transformasi sosial kultural.

Abstract

The full paper contains Organisa Ethical Culture da public / Business. Full paper aims to realize the ideals of the culture into high society be civilization specifically for our nation of Indonesia. This type of full paper is an assessment of an individual action against the society which is the public organization / business, in addition to the full paper is made with a high boost of writers have experienced problems due to cultural and environmental ethics in the community. The full analysis techniques this paper is to outline the percentage of people who are active in cultural affairs (60%) to (90%) after knowing the true culture and ethics of public organizations / businesses. Prior to this observation it seems the community is still lacking in cultural issues, ethics in organizations that follow. This paper also tries to discuss efforts to increase the love of the culture and society of nationalism, which was one of the

tasks constitute community. Through the task of society is expected to preserve the culture and ethics of high ethics planting organization in social environment. The issue is whether the efforts made by the community that will truly succeeded in realizing a high civilization as expected. However, on the other hand will depend on the effort to create the preconditions (climate / culture conducive) by other parties are consolidated with the transformation of social and cultural assimilation of the community as a whole or the individuals who are less responsible wish thwart the increase of high civilization.

Key words: motivation of society, sociocultural transformation.

A. Pendahuluan

Membahas masalah budaya dan etika organisasi publik/bisnis pada saat ini tentunya sangat relevan dalam hubungan dengan isu klaim dan plagiat produk, terkhusus budaya kita budaya Indonesia.

Munculnya gagasan untuk mewacanakan dan mengimplementasi budaya dan etika organisasi publik/bisnis. Pada saat ini dalam rangka pengimplementasian hal tersebut perlu ditegaskan satu tema yaitu “masyarakat sebagai pelaku budaya dan etika organisasi publik”. Tentu saja pernyataan itu sendiri bukan sesuatu yang baru karena sejak awal munculnya budaya, budaya di hakikatkan sebagai ilmu yang harus di pelajari.

Maka dari itu,niat/teknik untuk pembaharuan di bidang budaya dan etika organisasi ini tentu patut diapresiasi apalagi kemudian didukung dengan upaya –upaya nyata kearah realitas tujuan budaya tersebut (dengan undang-undang serta program-program pendukungnya). Namun,pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah masyarakat mau mewujudkan dan bergerak dalam mewujudkan masyarakat yang berperadapan tinggi. Mengingat kondisi objektif yang ada justru belum sinkron dalam upaya-upaya yang sedang dijalankan.

Diberbagai media massa telah muncul komentar kritis tentang kondisi nyata yang sedang dialami sistim kebudayaan kita , apalagi di eraglobalisasi ini. Realitas –realitasitu antara lain menyangkut kebijakan masyarakat dalam menyaring kebudayaan yang telah berkontribusi dengan budaya-budaya lain. Masyarakat terkesan kontroversional bahkan bersifat anomali. Kesan kuat penerapan kebijakan uji coba (tidak atas dasar uji kelayakan).

Khusus menyangkut pelaksanaan undang-undang budaya dan etika ,juga dihadapkan pada banyak kondisi yang tidak menguntungkan baik dari segi teknis operasional maupun dari dasar-dasar filosofis idiologinya. Yamh jelas ini menyangkut umlah masyarakat yang cukup

besar yang akan dan harus terlibat dalam masalah, pengimplementasiannya budaya tapi juga peningkatan nilai budaya semaksimal mungkin.

Namun, terlepas dari semua itu kiranya perlu dibahas lebih lanjut apa sebenarnya budaya dan etika organisasi publik/bisnis. Lebih dari itu juga sangat perlu dibahas strategi dasar yang harus dilakukan untuk mewujudkan peradaban bangsa yang tinggi sebagai prasyarat peningkatan kualitas budayadan etika publik secara menyeluruh. Ini semua akan dicoba dipaparkan dalam pembahasan berikut.

B. Metodologi

Adapun metodologi dalam full paper ini adalah disertai dengan ilmu, metode, uraian yang mendasar yang disertai pendapat dan bukti-bukti kuat mengenai budaya dan etika organisasi publik. Budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integritas internal yang sudah berjalan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah. Budaya organisasi terdiri dari berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi sekelompok orang dalam lingkungannya.

Jadi, dalam pengimplementasian budaya dan etika organisasi perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan perusahaan maupun bisnis yang terkait dengan nilai, dalam arti nilai budaya khas masyarakat atau bangsanya. Selain nilai, norma dan wewenang juga harus melekat dalam diri mereka dalam melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan budaya dan etika organisasi.

C. Hasil dan pembahasan

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas

implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etikabisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Hubungan Etika Dengan budaya Etika merupakan bagian dari kompleksitas unsur-unsur kebudayaan. Ada banyak unsur kebudayaan lain. Norma, sistem nilai, pandangan dunia, filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, ekonomi, cita rasa, tingkah laku, sikap, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan setempat, dan juga agama, dapat dianggap contoh-contoh yang dapat memperjelas persoalan kebudayaan. Etika dan kebudayaan itu tidak dapat kisah pisahkan. kedua nya saling melekat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena ketika suatu komunitas itu menciptakan batasan dan aturan-aturan dalam etika tentu lah berdasarkan dari kebiasaan dan juga hukum yang berlaku di tempat tersebut. Karena terkadang suatu etika itu tidak lah berlaku sepanjang masa, terkadang terjadi pelapukan dan pemudaran nilai-nilai etika. Nah, untuk membentuk ataupun membuat abatasan-batasan etikayag baru diperlukanlah kebudayaan. karena kebudayaan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada suatu komunitas tertentu. Nah disinilah keterkaitan kebudayaan. karena Ukuran etis, patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, nista atau mulia, memalukan atau tidak perlu dianggap malu, semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan . Dan itu semua merupakan syarat untuk menciptakan etika.

Dalam disiplin antropologi disadari bahwa manusia, setiap saat pada dasarnya disibukkan oleh urusan menciptakan etika, norma, tradisi, maupun pandangan dunia. Dengan ringkas dapat dikatakan, kita selalu sibuk menciptakan kebudayaan, karena suatu corak kebudayaan tertentu—di dalamnya ada etika tadi—sering mengalami proses pelapukan, memudar, tak lagi akomodatif, dan tertinggal dari perkembangan zaman yang terus berputar dan berubah secara sangat cepat. Kita membutuhkan sikap, carapandang, perilaku, nilai-nilai, etika, norma dan tradisi yang lebih baru, yang dapat memberi kita rasa nyaman dalam merespon perkembangan zaman tadi. Dengan kata lain kita membutuhkan kebudayaan—sekaligus dengan unsur etikanya tadi—untuk bisa menjaga kelangsungan hidup di tengah perputaran dan perubahan-perubahan zaman. Maka agar kebutuhan itu terpenuhi kita harus kreatif mencipta. Mungkin mencipta etika, hanya sebagian, mungkin mencipta kebudayaan

secara keseluruhan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa etika—apa yang etis dan tidak etis, pantas dan tidak pantas, atau sopan atau tidak sopan, sering tak terpisah, overlap, dengan norma hukum.

Di sini berarti, bila kita menciptakan etika, sekaligus kita menciptakan hukum. Bagi manusia yang “berbudaya”, yang menjaga tata aturan hidup dari urusan sopan dan tidak sopan, layak dan tidak layak, maka perkara malu dan tidak malu, pantas dan tidak pantas, nista atau mulia, merupakan perkara penting dan sensitif, dan dijaga dengan baik agar segenap tingkah lakunya tak tercemar dari sudut etika tadi. Maka dari itu, jelaslah bahwa manusia itu membutuhkan kebudayaan dan juga aturan– aturan etika agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka agar kebutuhan itu terpenuhi kita harus kreatif mencipta. Mungkin mencipta etika, hanya sebagian, mungkin mencipta kebudayaan secara keseluruhan.

a. Apa itu etika bisnis

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok”. Makna kedua menurut kamus – lebih penting – etika adalah “kajian moralitas”. Tapi meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. A. Moralitas Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk. Norma moral seperti “selalu katakan kebenaran”, “membunuh orang tak berdosa itu salah”. Nilai-nilai moral biasanya diekspresikan sebagai pernyataan yang mendeskripsikan objek-objek atau ciri-ciri objek yang bernilai, semacam “kejujuran itu baik” dan “ketidakadilan itu buruk”. Standar moral pertama kali terserap ketika masa kanak-kanak dari keluarga, teman, pengaruh kemasyarakatan seperti gereja, sekolah, televisi, majalah, music dan perkumpulan. Hakekat standar moral :

1. Standar moral berkaitan dengan persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius atau benar-benar akan menguntungkan manusia.

2. Standar moral tidak dapat ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoritatif tertentu.
3. Standar moral harus lebih diutamakan daripada nilai lain termasuk (khususnya) kepentingan diri.
4. Standar moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak.
5. Standar moral diasosiasikan dengan emosi tertentu dan kosa kata tertentu.

Standar moral, dengan demikian, merupakan standar yang berkaitan dengan persoalan yang kita anggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas, melampaui kepentingan diri, didasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak, dan yang pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah dan malu dan dengan emosi dan kosa kata tertentu.

b. Etika

Merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar itu masuk akal atau tidak masuk akal – standar, yaitu apakah didukung dengan penalaran yang bagus atau jelek. Etika merupakan penelaahan standar moral, proses pemeriksaan standar moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan konkret. Tujuan akhir standar moral adalah mengembangkan bangunan standar moral yang kita rasa masuk akal untuk dianut.

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penalaran yang baik, dan dengan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan tentang moral yang benar dan salah, dan moral yang baik dan jahat.

c. Etika Bisnis

Merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu

diterapkanke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

d. Penerapan Etika pada Organisasi Perusahaan publik/bisnis

Dapatkan pengertian moral seperti tanggung jawab, perbuatan yang salah dan kewajiban diterapkan terhadap kelompok seperti perusahaan, ataukah pada orang (individu) sebagai perilaku moral yang nyata?Ada dua pandangan yang muncul atas masalah ini :

- Ekstrem pertama, adalah pandangan yang berpendapat bahwa, karena aturan yang mengikat, organisasi memperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa perusahaan bertindak seperti individu dan memiliki tujuan yang disengaja atas apa yang mereka lakukan, kita dapat mengatakan mereka bertanggung jawab secara moral untuk tindakan mereka dan bahwa tindakan mereka adalah bermoral atau tidak bermoral dalam pengertian yang sama yang dilakukan manusia.
- Ekstrem kedua, adalah pandangan filsuf yang berpendirian bahwa tidak masuk akal berpikir bahwa organisasi bisnis secara moral bertanggung jawab karena ia gagal mengikuti standar moral atau mengatakan bahwa organisasi memiliki kewajiban moral. Organisasi bisnis sama seperti mesin yang anggotanya harus secara membabi buta mentaati peraturan formal yang tidak ada kaitannya dengan moralitas. Akibatnya, lebih tidak masuk akal untuk menganggap organisasi bertanggung jawab secara moral karena ia gagal mengikuti standar moral daripada mengkritik organisasi seperti mesin yang gagal bertindak secara moral. Karena itu, tindakan perusahaan berasal dari pilihan dan tindakan individu manusia, individu-individulah yang harus dipandang sebagai penjaga utama kewajiban moral dan tanggung jawab moral : individu manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan perusahaan karena tindakan perusahaan secara keseluruhan mengalir daripilihan dan perilaku mereka. Jika perusahaan bertindak keliru, kekeliruan itu disebabkan oleh pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan itu, jika perusahaan bertindak secara moral, hal itu disebabkan oleh pilihan individu dalam perusahaan bertindak secara bermoral.

e. Teknologi dan Etika Bisnis

Teknologi yang berkembang di akhir dekade abad ke-20 mentransformasi masyarakat dan bisnis, dan menciptakan potensi problem etis baru. Yang paling mencolok adalah revolusi dalam bioteknologi dan teknologi informasi. Teknologi menyebabkan beberapa perubahan radikal, seperti globalisasi yang berkembang pesat dan hilangnya jarak, kemampuan menemukan bentuk-bentuk kehidupan baru yang keuntungannya dan risikonya tidak terprediksi. Dengan perubahan cepat ini, organisasi bisnis berhadapan dengan setumpuk persoalan etis baru yang menarik.

f. Argumen yang mendukung dan menentang etika bisnis

Banyaknya yang keberatan dengan penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis. Bagian ini membahas keberatan-keberatan tersebut dan melihat apa yang dapat dikatakan berkenaan dengan kesetujuan untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Tiga keberatan atas penerapan etika ke dalam bisnis : Orang yang terlibat dalam bisnis, kata mereka hendaknya berfokus pada pencarian keuntungan finansial bisnis mereka dan tidak membuang-buang energi mereka atau sumber daya perusahaan untuk melakukan "pekerjaan baik". Tiga argumen diajukan untuk mendukung perusahaan ini : Pertama, beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif sempurna, pencarian keuntungan dengan sendirinya menekankan bahwa anggota masyarakat berfungsi dengan cara-cara yang paling menguntungkan secara sosial. Agar beruntung, masing-masing perusahaan harus memproduksi hanya apa yang diinginkan oleh anggota masyarakat dan harus melakukannya dengan cara yang paling efisien yang tersedia. Anggota masyarakat akan sangat beruntung jika manajer tidak memaksakan nilai-nilai pada bisnis, namun mengabdikan dirinya pada pencarian keuntungan yang berfokus. Argumen tersebut menyembunyikan sejumlah asumsi yaitu : Pertama, sebagian besar industri tidak "kompetitif secara sempurna", dan sejauh sejauh perusahaan tidak harus berkompetisi, mereka dapat memaksimalkan keuntungan sekalipun produksi tidak efisien. Kedua, argumen itu mengasumsikan bahwa langkah manapun yang diambil untuk meningkatkan keuntungan, perlu menguntungkan secara sosial, sekalipun dalam kenyataannya ada beberapa cara untuk meningkatkan keuntungan yang sebenarnya merugikan perusahaan : membiarkan polusi, iklan meniru, menyembunyikan cacat produksi, penyuaipan. Menghindari pajak, dsb. Ketiga, argumen itu mengasumsikan bahwa dengan memproduksi

apapun yang diinginkan publik pembeli, perusahaan memproduksi apa yang diinginkan oleh seluruh anggota masyarakat, ketika kenyataan keinginan sebagian besar anggota masyarakat (yang miskin dan dan tidak diuntungkan) tidak perlu dipenuhi karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pasar. Keempat, argumen itu secara esensial membuat penilaian normatif. Kedua, Kadang diajukan untuk menunjukkan bahwa manajer bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan pertimbangan etis, yang oleh Ale C. Michales disebut "argumen dari agen yang loyal". Argumen tersebut secara sederhana adalah sbb :Sebagai agen yang loyal dari majikannya manajer mempunyai kewajiban untuk melayani majikannya ketika majikan ingin dilayani (jika majikan memiliki keahlian agen).Majikan ingin dilayani dengan cara apapun yang akan memajukan kepentingannya sendiri. Dengan demikian sebagai agen yang loyal dari majikannya, manajer mempunyaikewajiban untuk melayani majikannya dengan cara apapun yang akan memajukan kepentingannya.Argumen agen yang loyal adalah keliru, karena "dalam menentukan apakah perintah klien kepada agen masuk akal atau tidak... etika bisnis atau profesional harus mempertimbangkan" dan "dalam peristiwa apapun dinyatakan bahwa agen mempunyai kewajiban untuk tidak melaksanakan tindakan yang ilegal atau tidak etis". Dengan demikian,kewajiban manajer untuk mengabdikan kepada majikannya, dibatasi oleh batasan-batasan moralitas.Ketiga, untuk menjadi etis cukuplah bagi orang-orang bisnis sekedar mentaati hukum: Etika bisnis pada dasarnya adalah mentaati hukum.Terkadang kita salah memandang hukum dan etika terlihat identik. Benar bahwa hokum tertentu menuntut perilaku yang sama yang juga dituntut standar moral kita. Namun demikian, hukum dan moral tidak selalu serupa. Beberapa hukum tidak punya kaitan dengan moralitas, bahkan hukum melanggar standar moral sehingga bertentangan dengan moralitas, seperti hukum perbudakan yang memperbolehkan kita memperlakukan budak sebagai properti. Jelas bahwa etika tidak begitu saja mengikuti hukum.Namun tidak berarti etika tidak mempunyai kaitan dengan hukum. Standar Moral kita kadang dimasukkan ke dalam hukum ketika kebanyakan dari kita merasa bahwa standar moral harus ditegakkan dengan kekuatan sistem hukum sebaliknya, hukum dikritik dan dihapuskan ketika jelas-jelas melanggar standar moral.Kasus etika dalam bisnisEtika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitas manusia yang disengaja, dan karena bisnis merupakan aktivitas manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis. Argumen

lain berpandangan bahwa, aktivitas bisnis, seperti juga aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika. Bisnis merupakan aktivitas kooperatif yang eksistensinya mensyaratkan perilaku etis. Dalam masyarakat tanpa etika, seperti ditulis oleh filsuf Hobbes, ketidakpercayaan dan kepentingan diri yang tidak terbatas akan menciptakan "perang antar manusia terhadap manusia lain", dan dalam situasi seperti itu hidup akan menjadi "kotor, brutal, dan dangkal". Karenanya dalam masyarakat seperti itu, tidak mungkin dapat melakukan aktivitas bisnis, dan bisnis akan hancur. Karena bisnis tidak dapat bertahan hidup tanpa etika, maka kepentingan bisnis yang paling utama adalah mempromosikan perilaku etika kepada anggotanya dan juga masyarakat luas. Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Contoh Merck dikenal karena budaya etisnya yang sudah lama berlangsung, namun ia tetap merupakan perusahaan yang secara spektakuler mendapatkan paling banyak keuntungan sepanjang masa. Apakah ada bukti bahwa etika dalam bisnis secara sistematis berkorelasi dengan profitabilitas? Apakah Perusahaan yang etis lebih menguntungkan daripada perusahaan lainnya? Beberapa studi menunjukkan hubungan yang positif antara perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dengan profitabilitas, beberapa tidak menemukan korelasi bahwa etika bisnis merupakan beban terhadap keuntungan. Studi lain melihat, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial bertransaksi di pasar saham, memperoleh pengembalian yang lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Semua studi menunjukkan bahwa secara keseluruhan etika tidak memperkecil keuntungan, dan tampak justru berkontribusi pada keuntungan. Dalam jangka panjang, untuk sebagian besar, lebih baik menjadi etis dalam bisnis daripada tidak etis. Meskipun tidak etis dalam bisnis kadang berhasil, namun perilaku tidak etis ini dalam jangka panjang, cenderung menjadi kekalahan karena meruntuhkan hubungan kooperatif yang berjangka lama dengan pelanggan, karyawan dan anggota masyarakat dimana kesuksesan bisnis sangat bergantung. Akhirnya kita harus mengetahui ada banyak bukti bahwa sebagian besar orang akan menilai perilaku etis dengan menghukum siapa saja yang mereka persepsi berperilaku tidak etis, dan menghargai siapa saja yang mereka persepsi berperilaku etis. Pelanggan akan melawan perusahaan jika mereka mempersepsi ketidakadilan yang dilakukan perusahaan dalam bisnis lainnya, dan mengurangi minat mereka untuk membeli produknya. Karyawan yang merasakan ketidakadilan, akan

menunjukkan absentisme lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan tuntutan upah lebih tinggi. Sebaliknya, ketika karyawan percaya bahwa organisasi adil, akan senang mengikuti manajer. Melakukan apapun yang dikatakan manajer, dan memandang keputusan manajer sah. Ringkasnya, etika merupakan komponen kunci manajemen yang efektif.

Dengan demikian, budaya dan etika sangatlah erat, dan keduanya mempunyai hubungan, oleh karena itu, dapat disimpulkan inti dari paper ini:

Manfaat budaya perusahaan :

1. Membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya.
2. Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Adanya budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya.
3. Mementingkan tujuan daripada mengutamakan kepentingan individu.
4. Menjaga stabilitas organisasi, komponen-komponen organisasi direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil.

Etika perusahaan menyangkut hubungan :

1. Perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya (misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat).
2. Etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawan.
3. Etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan.

Faktor utama yang dapat menciptakan iklim etika dalam perusahaan :

1. Terciptanya budaya perusahaan secara baik.
2. Terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya (trust-based-organization).
3. Terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai (employee relationship management).

Etika seseorang dan etika bisnis adalah satu kasatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan

keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkatan manajer terhadap tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan. Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial budaya, dan masyarakat dimana dia berada. Budaya perusahaan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya.

Disamping itu, pengaruh etika terhadap budaya terkhusus budaya kita budaya Indonesia yang pada saat ini panas dipermasalahkan :

- ✚ ORDER DAGING SAPI KASUS PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA BISNIS Seorang pelaku perusahaan dari Amerika mendapat order daging sapi dari pelaku usaha lain asal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebagian besar warga Indonesia merupakan penganut agama Islam. Jadi masalah daging sapi tidak hanya berhubungan dengan standar kesehatan, tapi juga berkaitan dengan proses penyembelihan hewan ternak yang harus sesuai dengan syariah. Padahal di Amerika sendiri, proses penyembelihannya tidak pernah memikirkan urusan tersebut. Perbedaan budaya serta cara pandang seperti ini mengakibatkan order yang sebenarnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak bisa menjadi batal bahkan berujung pada gugatan. Untuk mengatasinya, sebelum perjanjian jual beli daging sapi tersebut dibuat seharusnya juga dicantumkan bahwa pengusaha dari Amerika harus bisa mendatangkan daging sapi yang proses penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Selain itu harus melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal. Saat ini kasus bisnis internasional seperti yang disebut di atas memang sudah jarang terjadi. Tapi masih banyak sengketa lain yang sumber masalahnya berhubungan dengan budaya dan adat yang berbeda di masing-masing negara

🚩 **KASUS PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA BISNIS** Nissan Motor Indonesia adalah sebuah PMA yang dimiliki oleh Nissan Motor Co. Ltd. NISSAN WAY adalah budaya organisasi yang dimiliki oleh Nissan sebagai tolak ukur dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang diharapkan dari karyawan Nissan dalam melakukan pekerjaan. Mengapa perlu NISSAN WAY ? Karena setiap karyawan mempunyai kepentingan dan pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini bisa menimbulkan konflik di dalam organisasi, sehingga akan berakibat melemahkan organisasi itu. Dengan adanya NISSAN WAY diharapkan semua pemikiran akan menjadi sama. Di dalam NISSAN WAY terdapat yang disebut sebagai MINDSET dan ACTION. Di dalam MINDSET terkandung 5 unsur : Cross-functional & Cross-cultural, Transparent, Leaner, Frugal, dan Competitive. Sedangkan di dalam ACTION terkandung 5 unsur : Motivate, Commit & Target, Perform, Measure, dan Challenge. Sehingga di dalam beraktifitas setiap karyawan harus berpedoman dan menerapkan 5 unsur MINDSET dan 5 unsur ACTION.

D. Penutup

Bahwasannya upaya untuk mengubah citra masyarakat, terutama dalam rangka peningkatan peradaban dan etika organisasi yang logis adalah suatu keharusan, tentu tidak bisa disangkal lagi. Ini terutama terkait dengan tekad pemerintah dan bangsa ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat, nasional secara keseluruhan.

Namun, untuk mewujudkan ideal di atas yang pertama-tama perlu disadari adalah sulit bahkan tidak mungkin mengubah tujuan masyarakat, bila masyarakat itu sendiri tidak punya motivasi untuk mengubah dirinya. Maka dari itu, perlu dikembangkan strategi internal yang ujung-ujungnya mengubah masyarakat sekitar, dan ia merasa berkepentingan untuk berubah. Ini meliputi berbagai langkah menciptakan kebanggaan bangsa yang didasari munculnya jati diri masyarakatnya.

Hanya saja berhasilnya unsur internal ini diwujudkan, memang tidak bisa lepas dari dukungan faktor eksternal, contohnya dukungan dari masyarakat lain maupun pemerintah sekalipun.

E. Daftar pustaka

Setiadi, Elly M., Kama Abdul Hakam dan Ridwan Effendi. (2006). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana

<http://www.scribd.com/doc/45032772/Hubungan-etika-dengan-Budaya-Etika-Bisnis>

RPSEP-36

THE PROBLEMATIC CAREER PLAN OF THE LECTURERS OF UNIVERSITAS TERBUKA INDONESIA

Dr. Hanif Nurcholis

Social and Political Sciences Faculty of Universitas Terbuka
Cabe Raya Street, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan City, Banten Province,
Indonesia, Zip Code 15418

hanif@ut.ac.id; nurcholishanif23@gmail.com

Abstract

The lecturer of Universitas Terbuka (UT) in today era faces tremendous obstacle in achieving their job promotion. Most of them have been able only to achieved assistant professor degree in career rank (52,7%). The fact of the matter, at UT departments which are Economics Faculty, Social and Politic Sciences Faculty, and Mathematic and Natural Sciences Faculty, have not had professorship job position, eventhough they have already been having 29 years long lecturing services. The critical obstacle level to get higher promotion in UT lecturer career path is that has been laid on reaching job position from assistant professor to associate professor. Many of those lecturers have failed proposing their higer job's position, from assistant professor to associate Professor, were due to the Ministry of Education refusal of their proposition, since the prerequisites research credits as one the many prerequisite to be met was considered unqualified. To inquire what the causes are, using qualitative approach. The method used was descriptive. Then, data collected were using document study, in-depth interview, and participant observation. The data obtained, further was analyzed descriptive qualitative. The theoretical framework in the analysis was using the Minzberg's Five Disciplines and the Bureaucracy of Max Weber. The present work found out that the difficulty of the lecturers in achieving their job's promotion was caused by "the job-exchange" happened among support staff and operating core, such as: support staff rolled into operating core and vice versa. Furthermore, this research concluded that the lecturers of UT are having difficulty in achieving their job's promotion since his/her academic competency is considered weak resulted from the deviated institutional policy from the prevailed regulations.

Keyword: *Job's promotion, operating core, support staff, exchange of core-noncore job function.*

Universitas Terbuka (UT) from its first establishment since 1984 has been facing such problems in managing its lecturers' career path and plan, due to the "misalignment" of the UT lecturer's unique core function to the abound regulation that expresses conventional university lecturer function. The UT lecturer's unique core function has been so relevance with the organization core business over the matter of running the distance learning process. In consequences, half of the UT lecturers have been promoted as in the path of structural administrative officer as oppose to the path of functional lecturer. The assigned lecturers who those of administrative officers have been functioned as course managers. Literary, UT has not assigned its lecturers as 'real-teacher' in common knowledge as in distance learning system. Therefore, UT has not ever experience to form its Departments and Study Programs under the authority of its Faculty domain. The Departments and Study Programs at UT had just been formed in the mid of 1990s by the UT central office.

The Indonesian regulation concerning the lecturer terminology in distance learning of higher education sets down that a lecturer is a professional teacher and scientist, whose main duty is transforming, developing and disseminating knowledge, technology, and art through the means of distance learning and/or education, scientific research, and community services. UT, so far however, has implemented this regulation by its own concept. UT, hence-forward has defined itself the term professional teacher and scientist is as course-manager. As a consequence, this policy has affected on the UT lecturer promotional career plan and path itself.

The present work of this research highlights the several factors causing the lecturers difficulty in their job's promotion. This research used qualitative method, and the data taken were collected by the use of participant observation, document study and in-depth interview. Afterward, the data were analyzed by using content analysis method as to the theory proposed by Minzberg regarding the structure of five disciplines, and the bureaucracy theory proposed by Max Weber (in Farazmad, 2010), and affirmed by related regulations. Minzberg (1983) explains:

There are five parts of the organization: 1) strategic apex; 2) middle line, 3) operating core, 4) support staff; and 5) techno structure. Strategic apex is unit that makes the policy, middle line is policy executor at the middle level, and operating core is policy

executor in the field. The support staff and techno structure are support unit for management in order that the organization's activities can achieve the objectives.

Ali Farazmand (2010) explains:

one is the Weberian ideal-type concept of bureaucracy as the most efficient type of organization characterized by hierarchy and unity of command, division of labor and task specialization, merit-based staffing and promotion, rules and regulations universally applied to govern working systems, formal communication and interaction systems, and records for reference and administrative decisions or behaviors.

RESULT

Management

In accordance with the UT Statute of 2007, the UT organizational structure comprises of top-leader elements acted in the university presidential office (rectories: University President and its Deputies). The executor elements of academic affairs are the faculty and the post-graduate office. The faculty subordinates the departments and the study programs. A long way side.the executor element of academic affairs in research and community services are acted by Research and Social Services Institution (LPPM). The supporting element of learning services is acted by the Center for the Development of Teaching and Examination Materials and Information System(LPBAUSI). Supporting element of academic administration is acted by the Academic Administration, Planning, and Monitoring Bureau (BAAPM). Supporting element of financial, staff and facility is acted by the General Administration and FinanciesBureau (BAUK). Last but not least, the executor element of the student technical services in the region is acted by the Office of Distance Learning Program Unit (UPBJJ).

UT received standard recognition “A” (very good) from ISO9001:2008 and ICDE certification in accordance with university management performance. Furthermore, the accreditation on the performance of the study programs assessed by the Ministry of Education and Culture was appreciated on “B” (good). However, the performance standard in research assessed by the Ministry of Education and Culture was considered “Poor”.

Lecturer Assignment

Formally, each UT lecturer is assigned to teach several subject courses in order to execute its function, as this has to be in line with his/her academic qualification, even though some lecturers are not assigned. For instance, to what happen in the Faculty of Social and Political Science, a lecturer with Master Degree in Public Administration is assigned to handle 9 (nine) course subjects with work-load value as much as 27 Credits (SKS), i.e Subject of Study Program of State Administration: 1) State and Local Owned Entity; 2) Organization Behavior; 3) City Planning; 4) Office Administration; 5) Compensation Management; 6) Human Resource Development; Subject of Study Program of Business Administration is Tax Administration; and Subject of Study Program of Archive: 1) Business Correspondence and 2) Vital Archive Management.

From the above case, the lecturer assignment shows that the course subjects assigned in accordance with his/her academic qualification are six course subjects which is under the public administration program. Then, the course subjects which are appropriately close to his/her academic qualification is one course subject under the Study Program of Business administration, and the last which are not suitable at all are the two course subjects belong to the Study Program of Archive.

Specifically, the duty of the lecturer in this term of function has to be legitimated through a Rector Decree (SK) regarding the Lecturer Main Task. The lecturer's main task includes: 1) developing guidelines of teaching program (GBPP), 2) evaluating the course-material (BMP), 3) developing teaching and upgrading course-material, 4) writing course-material examination, 5) writing tutorial kit, 6) conducting tutorial online, 7) processing transfer of course-credits, and 8) deciding student graduation. In more detail, the GBPP are intended to be utilized by the course-subject-content writer that might possibly not be written by its developer but by other content-expert. The intention of evaluating the course material (BMP) is to measure whether the legitimate contract between UT and the author (writer) are expired, or academically the course-material requires total revision as to be

kept up with the latest issues of current science development. When the lecturer has evaluated with results that half or most of the BMP requires revision, then he/she has to ask the content-writer to revise that of BMP. Furthermore, the lecturer function to develop or to upgrade teaching course-material is intended to creating non-printed course-material in the form of web-supplement or audio-visual course-material. The other lecturer's function of preparing the course-material exam, this possibly could be executed in two ways, those are 1) the lecturer writes it by him/her self or 2) the lecturer seeks out or outsources any other content writer outside UT. Then, the final products of course-subject exam material are submitted to the LPBAUSI to be stored in the bank of exam. As there is going to be any semester-exam, the lecturer validates and finalizes the item-test that had been stored and prepared in the bank of exam at that of LPBAUSI. In the matter of conducting online-tutorial, this function was initialized in the UT Academic Year of 2012, as there was no such functional assignment like this before. Online-Tutorial is supposed to be executed through creating any initiation of the content-course material, as technical Online-Tutorial discussions and task-issues have to be uploaded in the website-online of UT. Face-to-face tutorial mode had been prohibited since the lecturers were potentially assumed to could have leaked the course-material exam and have been being absent during the office hour⁶⁹. In the case of functional assignment in processing the transfer of course-credits and deciding student graduation through "judicium" process are executed under the Departments and Study Programs authority control.

In doing its function, the lecturer is not assigned to draft or to develop the course-subject, rather the course-subject is written in the main form of course-material book (BMP), which is in its making might be arranged in accordance with outside UT content-writer or might be written by the UT lecturer whom considered has met such academic qualification. Since an outside UT course-subject-content writer has been decided to write that of course-subject-content by the Faculty, then the UT lecturer's tasks is seeking out the most reputable course-subject-content writer available around. Later on, when the BMP writing has been fully done, then the next the BMP has to be reviewed by wether UT lecturer or other UT external reviewer. To review it, the beholding-lecturer in that

⁶⁹Rector's Explanation in front of SenateMeeting on June 26th2013

course subject could possibly be assigned by the Faculty as to be a reviewer, when he/she has been considered yet scientifically masters the course-subject-content. When it is not so, he/she shall seek out someone else considered expert in content, either from internal or external of UT, to be assigned as a reviewer.

In research domain, the UT lecturer is supposed to perform any research, particularly in the area of distance learning management. The UT research policy in the area of distance learning management has boosted up domination in the lecturer's research theme in that of area since 2010. The research of science and technology alone has been apparently becoming less-significant in UT nature. Whatsoever, UT has provided financial support for its lecturers to perform research. Until 2012, most of UT research grants have come from UT fund it self. In this year, the research grants derived from the Ministry of Education and Culture was short in acquirement. In 2012, only five UT lecturers had gotten competitive grand research from the Ministry of Education and Culture. Then starting from the year of 2013, the research grand which expectedly come from the Ministry of Education and Culture would be predictably much acquired.

Concerning on the domain of community services, the UT lecturer is assumed to provide any means of aid to the community who live in the UT campus surrounding. Undesirebly, the UT community service programs were not reflecting linearity between the social-community intervention programs and the practical implementation of science and technology developed by the Study Program, but simply was a general social empowerment. A number of community development programs had been executed were a result of cooperation between UT and the Municipal Government of South Tangerang.

Profile of Lecturer Position

The total number of UT lecturer is 756 people. From those number, the lecturer that have not had the functional position are 63 people (8,3%), 156 lecturers (20,6%) are Professional Assistant, Assistant Professor are 399 people (52,7%), Associate Professor are 135 people (17,8%), and Professors are 3 people (0,4%). Furthermore, these data show that the majority of the lecturer rank-position is Assistant Professor (52,7%). While, the

lecturers who are positioning as professor are only 3 people(0,4%) and the two of them are nearly getting retired. Here below, Table 1 shows this issue.

Table 1
Functional Position Based Lecturer

Faculty	Total					Total
	Lecturer	Professional Assistant	Assistant Professor	Associate Professor	Professor	
Social and Political Sciences	22	19	52	27	0	120
Economic	21	34	34	10	0	99
Mathematics and Natural Sciences	16	23	63	24	0	126
Teacher's Training and Education	4	80	250	74	3	411
Total	63	156	399	135	3	756

Source: Staff Administration

In 2012 UT proposes 19 lecturer with the rank of assistant professor to associate professor to Government. The Government approved only 3 lecturer. Table 2 below depicts that, in 2012 there are 399 lecturers had positioned their rank in assistant professor status, and among them who succeeded for getting the rank of associate professor were only 3 (three) people. One was from Economics Faculty and the other two were from Teacher's Training and Education Faculty. Nevertheless, none of them could possibly be positioned to be professor in rank.

Table 2
Promoted Lecturer in 2012

Faculty	Total of Promoted Lecturer		
	Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Social and Political Sciences	52	0	0
Economic	34	1	0
Mathematics and Natural Sciences	63	0	0
Teacher's Training and Education	250	2	0
Total	399	3	0

Source: Staff Administration

As of 2012, there were 176 lecturer (23%) are not promoted for 12 years. This amount is greater than the previous year which only 162 people (21%). Lecturers who his promotion between 10-12 years was 72 people; many as 114 people were 7-9 years, and many as 188 people was 4-6 years⁷⁰.

DISCUSSION

UT lecturer is considered public servant in Indonesian bureaucracy, it is due to as part of the government employee. Therefore, UT lecturer as the same as any other government employee is supposed to obey any legal formal rules (Max Weber in Farazmand, 2010). The formal regulations that specifically bound the lecturer existence comprises in several Laws, those are: The Laws Number 12 Year 2012 regarding Higher Education, The Laws Number 14 Year 2005 regarding Teacher and Lecturer, The Regulation of Minister of Education and Culture Number 24 Year 2012 regarding Distance Learning Implementation in University, and the UT Statute of 2007. Article 1 number 19 of UT Statute states that lecturer is professional teacher and scientist, whose main duties are transforming, developing and disseminating knowledge, technology, and/or art through distance learning via education, scientific research, and community service. In short, the lecturer's main tasks are giving lecture, conducting research, and delivering community services (tri dharma).

Since there is consistency in implementing the Statute, thus the UT lecturer's task comprises of three main activities: 1) distance lecturing, 2) scientific researching, and 3) community servicing. The execution of these tasks is aimed to transforming, developing, and disseminating science, technology, and art. Teaching is an activity of reviewing the course-subject taught to the student in order to obtain a better comprehension to the course-subject-content. Henceforward, teaching has been developed through dialogue, discussion, general lecture, assignment, counseling, and assessment, then the lecturer competency would build up comprehensively. Conducting a research means to perform a scientific research toward lecturer's science competency. Implementing community service is applying science into the fields by which has been developed in the faculty, so that it would presumably provides socio-

⁷⁰ Annual Work Report of the Rector 2012

economic effects on the public. Transforming, developing and disseminating science, technology, and art mean to review continuously science, technology, and art which is persevered through lecturing, researching and community servicing that be a long the line could give benefit to the public. Thus, the theoretical mainstream in par with the practical one would be well-developed and established through dissemination.

Undesirably, the fact of the matter shows that the Decree of UT Rector on Lecturer Main Task does not assign the lecturer in this sense. The lecturer, further a long the line has not planned and implemented the learning process, remedial teaching, and distance assessment which is truly supposed to be accomplished. The lecturer does not develop the course-subject in-charged since an external subject-content writer develops the BMP. There are only a few certain UT lecturers eligibly may develop the BMP. The UT lecturers are prohibited to deliver face-to-face tutorial and impossibly assess the student competency as the course-exam materials are totally held by LPBAUSI and UPBJJ through the use of computerized inspection system, and including the essay exam marking is executed by the UT external content-expert. Thus, in the case of student evaluation, the UT lecturer's task is simply preparing, validating, finalizing and arranging the course-exam material at LPBAUSI office, as the other tasks include drafting non-printed material, evaluating the BMP, and seeking out the course-content (BMP) writer and reviewer as well as the course-subject exam writer. In research area, the UT lecturers observably look more nerve-racking on the distance learning management research than that of science research. Only last year, UT has just boosted up its lecturers in conducting intensive science research and has provided grand on the international seminar presentation in 2013. Prior to 2013, UT only provided grand in international seminar presentation held by ICDE and AAOU.

The above description depicts that UT has practiced misalignment job-exchange in role and function. The Faculty plays as the middle-line subordinating academic operating core, is functioned as supporting staff in the techno-structure. It shifts the faculty into as supporting staff, and the lecturer's task is turned into technical staff under LPBAUSI authority, then thus the lecturer is not as an academic executor of the Department or the Study Program as supposed to be. The transferability of job-function, viewed from Mintzberg's statement (1983), means that the organization who stresses in the techno-structure is to achieve the goal.

Minzberg points out that to achieve the goal the organization may hassle on the operating core, the supporting staff, or the techno-structure. According to Minzberg, there are five principles in the organization that apply to UT organization, at which consist of 1) the rectory as strategic apex, 2); the faculty as middle line operating core; 3) the department and the study program run as academic operating core; The three of them geographically are located in the central office. Meanwhile the technical front-line executing units are located in regional offices (UPBJJ) which function as administrative operating core; 4) the bureau (BAAPM and BAUK) function as supporting agents; and 5) the institution (LPPM and LPBAUSI) play as techno – structure.

The consequence of practicing job-interchange function is that the lecturer becomes incompetent and unprofessional in his/her own academic discipline. The absent of capacity in drafting teaching-plan, conducting teaching process, remedial teaching, evaluating learning-result, and researching critical issues in sciences, all in all the lecturer surely could not develop and improve his/her own academic capacity. The lecturer, who does not have any teaching experience would encounter shortage in mastering the course-subject-content. Further, the lecturer that does not have scientific research experience could also face difficulty in making analytical thinking research report and disseminating the findings through scientific journal publishing.

Apparently in principles, the lecturer's promotional system has been arranged in the Laws Number 14 Year 2005 regarding Teacher and Lecturer, the Laws Number 12 Year 2012 regarding Higher Education, the Government Regulation Number 37 Year 2009 regarding Teacher and Lecturer, and the Decree of State Minister of Development Supervisory and State Apparatus Empowerment Coordinator Number. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 regarding Functional Position of Lecturer and the Credit-Point. In accordance with the above regulations, to achieve a career-promotion, each lecturer should satisfy the credit-point criteria to get promoted, such as credit-point in teaching (40%), in research and scientific publication (40%), in community service (10%), and in supporting activity (10%).

The fact of the matter shows that there would have been only a fat chance a lecturer at UT could get promoted to be as a professor as it relates with the job-exchange function of the

lecturer as it could affect the lecturer's academic incompetency. So far, none of the lecturers who have been holding associate professor position have gotten its professorship. UT lecturers experience shortage in their credit-points on research and scientific works. The Directorate General of Higher Education has turned down most of the lecturers' credit-points proposal for promotion. The main cause of the lecturer's incompetency in his/her academic performance is due to the deviated function and role of the lecturer. More specifically as already mentioned above, the lecturer's function as supposed to be a professional teacher and scientist has shifted to a non-academic affairs, such as: preparing, validating, finalizing and arranging the course-subject exam material, drafting non-printed course material, evaluating the BMP, seeking out the writer and the reviewer of the BMP, and finding out the writer of course-subject exam material. In the area of research, the lecturer has not conducted scientific research but distance learning management research⁷¹. As a consequence, the Government does not admit the lecturer's research finding as it is considered not-linear with his/her academic competency. Due to the lack of conducting academic research, the lecturer barely keeps up with the scientific seminar, either national or international. Then consequently, the lecturer does not have any scientific publication in both national and international scientific journal. The UT lecturer's low performance on research area greatly implicates the results of National Accreditation Board (BAN-PT) assessment to the UT administration. National Accreditation Board confers final accreditation to the UT administration with the mark "Poor" to UT administration.

In line with the study of Nurcholis (2013), learning model applied by UT contributes the difficulty of the UT lecturer in improving his/her academic competency. Nurcholis points out that UT has implemented four learning models which give stressing on the certification model. This model does not require lecturer involvement in learning process, excluding the certification model. Specifically, the lecturer involvement in the plus certification model is highly less involved, mainly on the tutorial online. On the tutorial online, the lecturer only prepares few things, such as initiating the course-subject material, giving assignments, giving feedback through discussion forum with the student, and grading. The absent of the lecturer

⁷¹ UT does not develop sciences and technology in distance learning. UT just utilizes distance-learning model in its learning process. It is better that the research of distance learning management is research of institution policy in the sense of assignment, not in terms of lecturer's research.

involvement in the face-to-face tutorial, then the academic and scientific work of counseling which is supposed to be necessarily mastered by the lecturer has experienced shortage learning process in as well. In consequence, the lecturer would not be able to write any research report and would not be able to publish his/her research finding into national or international scientific journal.

Undesirably, in the UT community service programs, it contributes as well in the deficiency of lecturer's academic competency at this moment. These programs are not connected directly with the implementation of the lecturer's academic disciplines. The social service programs coordinated by the LPPM is considered public programs to improve social welfare. Unfortunately, the social service programs are not relevance with the lecturer academic disciplines being developed.

CONCLUSION

What makes the UT lecturer facing difficulty in obtaining the job-promotion is that their academic competency is weak. The indication is incapability to perform scientific research and publish the research finding through scientific journal. This problematic situation is resulted from the UT institutional policy which deviates from the educational regulations. The weaken lecturer's competency over the mastery of course-subject assigned, the further effect is the shortage of conducting scientific research, and as a result, the lecturer does not have scientific publication in his/her academic discipline.

UT as an institution under the Ministry of Education and Culture, it is obliged to reposition its lecturer in line with the bound regulations. The lecturer should be assigned as academic executor under the faculty authority and the main task is functioning the tri dharma: teaching, researching, and community servicing. Teaching means reviewing the subject assigned along with the student to achieve better understanding on the subject's content by dialogue, general lecture, assignment and counseling, and distance learning assessment. Research means performing research on the academic discipline as same as his/her competency in developing the concept and theory. Community service means implementing the knowledge which has

been developed by the faculty and implemented in the field in order to provide socio-economic effect on public.

REFERENCES

Farazmand, A. (2009). *Bureaucracy and Administration*. Boca Raton: Taylor and Francis

Minzberg, Henry. (1983). *Structure in Five, Designing Effective in Organization*. New Jersey: Prentice Hall

Nurcholis, Hanif and Rachman, Ace Sriati. (2013). "Theoretical and Practical Dilemma of Distance Learning: The Case of Universitas Terbuka Indonesia". *AAOU Journal*, Vol. 8, No. 1, March 2013

Laws Number 20 Year 2003 Regarding National Education System

Laws Number 14 Year 2005 Regarding Teacher and Lecturer

Laws Number 12 Year 2012 Regarding University

Government Regulation Number 37 Year 2009 Regarding Lecturer

Regulation of Minister of National Education Number 23 Year 2007 Regarding Statue of *Universitas Terbuka*

Regulation of Minister of Education and Cultural Number 24 Year 2012 Regarding Distance Learning Management of University

Decree of State Minister of Development Supervisory and State Apparatus Empowerment Coordinator Number: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Regarding Functional Position of Lecturer and The Credit.

Rector Decree of *Universitas Terbuka* Number: 252 / UN31/KEP/2013 Regarding Lecturer Main Task and Lecturer Main Task with Professor in *Universitas Terbuka*

Laporan Kerja Tahunan Rektor 2012

RPSEP-37

***SPECIALTY COFFEE* SEBAGAI ASET TAKBERWUJUD, TINJAUAN AKUNTANSI**

Zulfikar, MSi, Ak, CA
PT Florentine Andika Sejahtera
Zulfikar_ikhsan@yahoo.com

Abstrak: Saat ini, Indonesia merupakan negara ke 7 eksportir kopi di dunia dan merupakan bagian dari 10 komoditas ekspor utama. Untuk *specialty coffee*, Indonesia berpotensi menjadi negara terdepan karena memiliki 11 *specialty coffee* arabika dan 9 *specialty coffee* robusta, sedangkan negara lain maksimal hanya memiliki 2. *Specialty coffee* merupakan biji kopi yang berasal dari satu daerah tertentu, diproses menghasilkan citarasa yang unik. Tujuan tulisan ini untuk menggali dampak dan kemungkinan *specialty coffee* untuk diakui sebagai aset takberwujud bagi entitas bisnis. Dengan menganalisa karakteristik *specialty coffee* dan definisi pengakuan aset menurut akuntansi, tulisan ini menyimpulkan bahwa *specialty coffee* dapat diakui sebagai aset takberwujud serta menjadikan entitas bisnis bersaing di pasar international.

Kata kunci : aset takberwujud, kopi, *specialty coffee*

A. LATAR BELAKANG

Ngopi saat ini telah menjadi budaya. (Tucker, 2011). Awalnya tanaman kopi jenis arabika dibawa oleh seseorang berkebangsaan Belanda ke Jawa dan setelah tumbuh baik diaplikasikan ke Jawa Barat, kemudian disebar ke Sumatra dan Sulawesi. Karena adanya penyakit karat daun, tahun 1900an pemerintah Belanda membawa tanaman kopi jenis Robusta ke Indonesia. (Panggabean, 2011)

Biji kopi merupakan salah satu dari 10 komoditas utama ekspor. Hingga Juni 2014 Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor pertama sebesar USD 145,542,880 diikuti Jepang dan Malaysia sebesar USD 48,403,220 dan USD 31,654,797 (www.kemendag.go.id)

Saat ini, Indonesia menjadi negara eksportir ke 7 di dunia, masih kalah dibandingkan Brazil dan Vietnam. Namun Indonesia dapat menjadi pemasok terdepan karena memiliki 7 *specialty coffee* berdasarkan daerah tumbuhnya, dibandingkan negara lain yang hanya memiliki 1 – 2. (www.bumn.go.id). Indonesia juga tengah menjadi pusat festival kopi. Selama tahun 2014, telah 3 kali mengadakan festival kopi yaitu 2 – 4 Mei di Medan, 29 – 30 Agustus 2014 di Surabaya dan yang akan datang tanggal 17 – 19 Oktober 2014 di Sanur, Bali.

Perhelatan ini menjadi salah satu signal bahwa *specialty coffee* Indonesia merupakan pasar potensial. Selain jenis arabika, kopi robusta terus di dorong menjadi *specialty coffee* misalnya dari Jawa Tengah, Ruteng (Nusa Tenggara Timur) dan Bengkulu (Kompas,13 September 2014).

Specialty coffee memungkinkan adanya pertumbuhan penjualan bagi perusahaan karena menawarkan hal yang berbeda seperti tingkat keasamaan, rasa dan aroma yang memiliki standar tersendiri. Konsumen akan mendapatkan *value added* selain produk inovasi kopi lain yang telah beredar sebelumnya seperti *canned coffee*, *iced coffee* dan *flavored coffee* (Hilten, 1996).

Benefit *specialty coffee* juga dapat memberikan ruang ancaman bagi negara yang belum memiliki *trademark* atas kopi tersebut. Contohnya nama “Toraja” yang sempat diperebutkan antara Key Coffee Co yang dimiliki Toshoku Ltd dari Jepang dan Toarco Toraja dari Indonesia. Demikian juga merek “Gayo” telah di patenkan dan hanya boleh dipergunakan oleh Holland Coffee B. V. (Mawardi, 2009). *Specialty coffee* sewajarnya memiliki tempat tersendiri di mata hukum. Dan bila itu terealisasi, akan memberikan dampak terhadap entitas bisnis di industri kopi.

Tujuan tulisan ini ialah untuk melihat apakah pengakuan *specialty coffee* dapat berpengaruh positif terhadap entitas bisnis, kemungkinan kapitalisasi biaya bagi entitas bisnis yang berkaitan dengan *specialty coffee* dan dampaknya bila kapitalisasi tersebut terealisasi.

B. TELAAH LITERATUR

Keunggulan kompetitif tidak hanya melakukan kombinasi atas produk dan pangsa pasar di industri tersebut, namun perlu adanya *resources* di dalam organisasi yang menyebabkan organisasi tersebut terus bertahan (Sanchez, *et al*, 2000). *Resources* tersebut harus *valuable*, *rarity*, *imitability*, dan *non-substitutable (non-transferable)* (Kristandl, *et al* (2007).

Resources memiliki beragam istilah seperti *knowledge assets*, *intellectual capital*, *intangible*, *intangible capital*, *intangible resources*, *knowledge resources* (Steenkamp, *et al* ,2010) namun semuanya dapat dikategorikan aset takberwujud yang memberikan kontribusi antara lain sebagai pembentukan nilai untuk perusahaan non keuangan (Tanfous, 2013), salah satu tolak ukur kesehatan perusahaan (Sriram, 2008) dan *value driver* bagi kesuksesan

perusahaan kecil dan menengah melalui *customer satisfaction, customer loyalty, corporate reputation, product reputation* dan *employee know-how*. (Steenkamp, et al (2010)

Menurut PSAK 19, aset takberwujud ialah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Untuk memenuhi definisi aset maka harus memenuhi tiga kriteria : **keteridentifikasian** yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas yang bersangkutan dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain; **pengendalian** yaitu entitas mampu untuk mengendalikan aset tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dan membatasi akses pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomi; serta memberikan **manfaat ekonomi masa depan**. Untuk masuk dalam laporan keuangan, maka aset takberwujud harus dapat diakui dan diukur jumlahnya.

Batasan lain ialah kapitalisasi biaya hanya untuk tahap pengembangan bukan untuk tahap penelitian, aset takberwujud yang diperoleh secara internal tidak boleh dikapitalisasi namun yang diperoleh secara terpisah diperbolehkan dengan syarat tertentu, kategori umur manfaat bisa secara terbatas maupun tidak terbatas, amortisasi hanya diperuntukan bagi aset takberwujud dengan kategori umur terbatas, kedua kategori umur manfaat mengharuskan adanya uji penurunan nilai dengan melihat informasi internal maupun eksternal antara lain keusangan atau kerusakan fisik aset, penurunan nilai pasar aset secara signifikan, kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan, adanya rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi, perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau legal, perubahan signifikan dalam hal suku bunga serta kapitalisasi pasar aset menurun nilainya sehingga nilai tercatat aset melebihi kapitalisasi pasarnya.

Pada saat pengukuran awal, aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, setelah pengukuran diperkenankan menggunakan model biaya (harga) perolehan atau model revaluasi. Setelah pengukuran, bila menggunakan model biaya (harga) perolehan, maka aset takberwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Sedangkan bila menggunakan revaluasi, maka aset takberwujud dinilai berdasarkan nilai revaluasinya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Namun model revaluasi jarang digunakan karena sulitnya mendapatkan nilai wajar dari aset tak berwujud (Wahyuni, 2012).

COO (country-of-origin) ialah streatip suatu produk dikaitkan negara tertentu, baik sebagai produsen, asembli maupun pemberi label. COO berasosiasi dengan merek (Licsandru,

et al, 2013), merek juga ikut melibatkan letak geograhis karena merek merupakan manifestasi, representasi ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan daerah tersebut (Pike, 2009). Konsumen akan mengasosiasikan produk dengan tempat asalnya (baik negara atau daerah) untuk menduga atribut apa yang melekat di produk tersebut. Sehingga mereka akan dapat memutuskan apakah akan membeli dan level harga tertinggi yang akan mereka bayar (Skuras, *et al* 2002). Melalui label yang melekat, konsumen melihat dua hal yaitu kualitas dan produk tersebut bukanlah imitasi. (Teuber, 2011).

Geographical labeling terdiri dari 3 yaitu *Geographical Indication (GI)*, *trademark*, COO. Ada pendapat *Geographical Indication* hanya diperuntukkan untuk barang/produk fisik, sedangkan jasa/non fisik menggunakan *trademark*. Sedangkan COO digunakan untuk sesuatu yang lebih luas (Schüßler, 2009). Contoh sistem *Geographical Indication (GI)* yang dibentuk *European Union (EU)* yaitu **PDO (Protected Designation of Origin)** yaitu ketika produk dihasilkan, diproses dan disiapkan di area yang telah ada dengan menggunakan keahlian dan tehnik yang diakui; **PGI (Protected Geographical Indication)** yaitu ketika produk bertautan minimal dengan satu daerah ketika dihasilkan, di proses maupun disiapkan; dan **TSG (Traditional Specialty Guarantee)** yaitu produk tidak berkaitan dengan letak geographinya namun lebih menekankan pada karakter tradisi, apakah produksi maupun komposisinya. Contoh penggunaan *Geographical Indication (GI)* ialah “Basmati” (nasi dari India dan Pakistan), “Mocha” (kopi dari Yaman), “Ceylon” (the dari Sri Lanka), “Champagne” (sparkling wine dari Prancis), “Havana” (tembakau dari Kuba) and “Parma” (daging asap dari Itali) (Blackwell (2007), “Marcala” (kopi dari Honduras) (Herrmann, *et al*, 2009)

Menurut Specialty Coffee Association of Europe (SCAE), *Specialty coffee* ialah “...as a crafted quality coffee-based beverage, which is judged by the consumer (in a limited marketplace at a given time) to have a unique quality, a distinct taste and personality different from, and superior to, the common coffee beverages offered. The beverage is based on beans that have been grown in an accurately defined area, and which meet the highest standards for green coffee and for its roasting, storage and brewing. Singkatnya, dikatakan *specialty coffee* bila tumbuh di daerah tertentu (single origin) dan memiliki kualitas superior serta citarasa yang berbeda melalui proses,

1. **roasting (sangrai)**, yaitu menggoreng biji kopi dengan derajat panas tertentu untuk menghasilkan biji kopi yang lebih gelap dan memunculkan karakteristik citarasa kopi sehingga menghasilkan atribut : **aroma**, keharuman/ bau yang dapat diterima oleh indra penciuman seperti coklat/citrus/herbal/*spicy/tobacco/woody/winey* dan lainnya; **flavor**, rasa yang dapat dicecap oleh indra perasa seperti pahit, manis, asin; **body**, tingkat ketebalan rasa; dan **acidity**, tingkat keasaman rasa (www.bincangkopi.com)
2. **storage**, atau penyimpanan biji kopi yang baik. Kesalahan penyimpanan dapat menyebabkan : **baggy**, wangi kopi hilang terserap oleh karung penyimpanan karena periode penyimpanan yang terlalu lama atau karung yang digunakan berulang – ulang; **mouldy**, munculnya jamur dibiji kopi menyebabkan rasa kopi menurun; **earthy**, aroma dan rasa menjadi satu karena biji kopi kontak langsung dengan debu dan permukaan tanah; **onion**, muncul bau bawang pada biji kopi akibat *over-fermented* akibat disimpan dalam kondisi lembab; **old crop**, kualitas kopi menurun karena lingkungan yang terlalu panas atau lembab; dan **contaminated**, biji kopi berbau aneh karena terkontaminasi zat yang ada disekitarnya dan akan muncul ketika kopi dikonsumsi (Wintgens, 2004)

Indonesia telah memiliki 11 *specialty coffee* arabika dan 9 *specialty coffee* robusta yang telah dipasarkan yaitu *specialty coffee arabika* : Lintong, Mandheling, Gayo Mountain, Toraja, Kalosi, Kintamani Bali, Flores Bajawa, Java Estate, Java Preanger, Java ‘kopi luwak’ dan Sumatra ‘kopi luwak; dan *specialty coffee robusta* : Pagaralam robusta, Lampung robusta, Java Estate robusta, Java Dampit, Java Bagelan, Bali, Flores, Java robusta ‘kopi luwak’ dan Sumatra robusta ‘kopi luwak’. Namun hanya satu yang dilindungi *Geographical Indication* yaitu Bali Kintamani. (Mawardi, 2009).

C. PEMBAHASAN

Atas permasalahan diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut,

1. *Specialty coffee* memberikan dampak positif bagi entitas bisnis di industri kopi karena entitas bisnis akan fokus terhadap kualitas dan mengangkat budaya setempat. Seluruh cabang, agen, pembeli mudah mendapatkan nama baik tersebut namun pesaing tidak dapat menduplikasinya karena perbedaan kondisi alam. Label *specialty coffee* memberikan keyakinan biji kopi tersebut benar – benar berasal dari daerah tertentu, bukan dari daerah lain walaupun keduanya berkualitas. Label *specialty coffee* juga

memberikan keyakinan kopi tersebut benar – benar biji kopi berkualitas, bukan kualitas rendah, biji kopi gosong (over roasted) bahkan biji kopi yang dicampur bahan lain seperti kulit kopi, daun jagung yang digiling menyerupai bubuk kopi.

2. *specialty coffee* dapat dikategorikan aset takberwujud menurut standar akuntansi keuangan karena,

- a. memiliki manfaat ekonomis di masa datang, terlihat munculnya sengketa nama ‘single-origin’ untuk “Toraja” dan “Gayo” yang menandakan ada keuntungan yang akan diraih dimasa datang bila menggunakan nama tersebut. Dalam hitungan, Indonesia mengekspor lebih kurang 670ribu ton per tahun, dimana 30% adalah *specialty coffee*.

Total produksi 670.000 ton	Harga Normal (USD. 2.000/ton)	Harga <i>specialty coffee</i> (USD. 5.000/ton)
70% kopi biasa	USD 938.000.000	
30% <i>specialty coffee</i>		USD 1.005.000.000

Dari tabel tersebut terlihat, ekspor penjualan 30% *specialty coffee* dapat melebihi penjualan 70% kopi biasa.

- b. dapat dikendalikan oleh entitas bisnis tersebut melalui peran pemerintah daerah/pusat. Bila entitas bisnis kopi Lintong menemukan entitas lain menggunakan nama kopi Lintong namun ternyata kopi tersebut tidak orisinal, dapat diadukan ke pemerintah daerah/pusat untuk di proses secara hukum. Untuk citarasa, entitas kopi dapat bekerjasama dengan asosiasi Q Grader atau R Grader. Q Grader atau R Grader merupakan orang – orang yang telah lulus uji cicip citarasa kopi yang disertifikasi oleh *Coffee Quality Institute (CQI)*.
- c. teridentifikasi dengan jelas misalnya dengan kategori *trademark* yang terpisah dari aset yang lain dan diperoleh melalui kontrak pembelian dengan pihak eksternal baik pemerintah daerah/pusat dan pihak yang mengelola proses sangrai, penyimpanan dan penyeduhan.

Pengeluaran untuk *specialty coffee* dapat di kapitalisasi dengan syarat *trademark* diperoleh dari pihak ketiga baik pemerintah pusat/daerah, proses sangrai dan penyeduhan diserahkan kepada pihak ketiga dimana untuk mendapatkan citarasa yang sesungguhnya perlu proses berulang karena karakteristik biji kopi di setiap daerah berbeda, proses penyimpanan

diserahkan kepada pihak ketiga namun persediaan biji kopi tetap dikuasai perusahaan inti dan biaya yang muncul dibebankan kepada perusahaan inti. Seluruh pengeluaran lebih realistis menggunakan *historical cost* karena *fair value* terhambat pada ketersedianya harga pasar.

Tantangan kapitalisasi ialah akan muncul perusahaan SPV (Special Purposes Vehicle) yaitu perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan inti untuk tujuan tertentu seperti manipulasi uji penurunan nilai, manipulasi jumlah persediaan biji kopi yang rusak/usang. Selain itu pemerintah daerah/pusat perlu menyusun standar pengakuan *specialty coffee*.

D. KESIMPULAN

Ketatnya persaingan industri kopi di dunia, *specialty coffee* memberikan keunggulan bagi Indonesia karena banyaknya jumlah *specialty coffee* yang dimiliki. Pengakuan *specialty coffee* sebagai aset takberwujud dalam laporan keuangan entitas bisnis akan memberikan pengaruh positif sekaligus menguatkan status hukum *specialty coffee* Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackwell, Martin (2007). The relationship of geographical indications with real property valuation and management. *Property Management* Vol. 25 No. 2. pp. 193-203.
- Herrmann, Roland. Marauhn, Thilo (2009). The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction. *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*. Vol 10 No 1. pp. 12-19.
- Tucker, Chatrine M (2011), *Coffee Culture*, *Routledge*
- Van Hilten, Java (1996), New Development in the International Coffee Trade, *International Trade Forum* pp. 4
- Kristandl, Gerhard. Bontis, Nick (2007) Constructing a definition for intangibles using the resource based view of the firm, *Management Decision*, Vol. 45 No. 9. pp. 1510-1524
- Licsandru, Tana Cristina. Szamosi, Leslie T. Papadopoulos, Nicolas (2013). The Impact of Country-of-Origin, Ethnocentrism and Animosity on Product Evaluation: Evidence from Romania. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*. Vol 01. No. 02. pp. 259-277.

- Mawardi, Surip (2009), *Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia*, Worldwide Symposium on Geographical Indication
- Mnzava, Bernard (2013). Do intangible investments matter? Evidence from soccer corporations. *Sport, Business and Management: An International Journal* Vol. 3 No. 2. pp. 158-168
- Panggabean, Edy (2011). *Buku Pintar Kopi. Agromedia*
- Pike, Andy (2009). Geographies of brands and branding. *Progress in Human Geography*. Vol.33 No. 5. pp. 619–645.
- [Sanchez, Paloma](#), [Chaminade, Cristina](#), [Olea, Marta](#) (2000). Management of intangibles - An attempt to build a theory. *Journal of Intellectual Capital*. Vol 01 No.04. pp 312 - 327
- Sriram, Ram S (2008). Relevance of intangible assets to evaluate financial health. *Journal of Intellectual Capital* Vol. 9 No. 3. pp. 351-366
- Skuras, Dimitris. Vakrou, Aleka (2002). Consumer's willingness to pay for origin labelled wine : A Greek case study. *British Food Journal*. Vol. 104. No. 11. pp 898-912.
- Schüßler, Lennart (2009). Protecting 'Single-Origin Coffee' within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks. *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*. Vo.10 No. 1. pp. 149-185.
- Tanfous, Maha Ben (2013). The Contribution of Intangibles to the Value Creation, *Journal of Business Studies Quarterly*. Vol 5, No 1
- Teuber, Ramona (2011). Consumer's and producer's expectations towards geographical indications : Empirical evidence for a German case study. *British Food Journal*. Vol. 113 No. 7. pp. 900-918
- Wahyuni, Ersya Tri. Juan, Ng Eng (2012). *Panduan Praktis : Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS. Salemba Empat*.
- Wintgens, Jean Nicolas (2004). *Coffee : Growing, Processing, Sustainable Production. A Guidebook for growers, processors, traders and reserachhes. Wiley*.

RPSEP-38

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Kasus di Tangerang Selatan dan Bogor)

Oleh

Hendrian

Rini Dwiyani H.

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Abstrak

Usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran ini semakin besar seiring dengan signifikannya pertumbuhan UMKM, baik dari segi jumlah maupun aset yang dimiliki. Sayangnya, berita baik ini tidak disertai dengan penerapan akuntansi dan pelaporan yang baik, yang sesuai dengan standar akuntansi berlaku, dalam hal ini SAK-ETAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan serta kendala penerapan SAK-ETAP pada UMKM di Wilayah Kab. Tangerang Selatan dan Bogor. Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey yang disertai dengan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baru 4% UMKM yang telah menggunakan SAK-ETAP sebagai pedoman dalam akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan mereka, sisanya masih sekedar melakukan pencatatan dengan lebih menekankan kepada identifikasi transaksi dan pencatatan jumlah omset. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan mereka terhadap SAK-ETAP serta kompetensi staf akuntansi yang dimiliki. Sosialisasi dan bimbingan dari berbagai pihak terkait perlu lebih diintensifikan.

Kata Kunci: SAK-ETAP, UMKM, Penerapan, Masalah Penerapan.

A. PENDAHULUAN

Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun masyarakat luas lainnya. Artinya, semangat dan pengembangan UMKM sudah menjadi fokus pemerintah sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mendorong UMKM secara terus menerus khususnya menyediakan bantuan permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagian masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan peran dan kemampuan UMKM dalam segi bisnis selama ini ternyata memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat pada saat krisis ekonomi di Indonesia UMKM mampu melakukan

penyesuaian dan bertahan (*survive*) pada saat banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis, hal ini didukung oleh data seperti disajikan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)
TAHUN 2007 - 2012

No	Indikator	Tahun 2007		Tahun 2012		PERKEMBANGAN TAHUN 2007 - 2012	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
1	Unit Usaha	49.218.030	99,99	56.534.592	99,99	7.326.929	9,8%
2	Tenaga Kerja	87.909.598	97,30	107.657.509	97,16	19.792.178	13,07%
3	PDB	1.783.423.81 4 jt	56,23	4.304.393.31 4 jt	57,94	2.682.969,5 00	94,37%

Sumber : www.depkop.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM selama 5 tahun terakhir yaitu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,8% dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 19,72 juta atau 13,07% dari total tenaga kerja serta peningkatan kontribusi UMKM yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) yaitu sebesar 57.94% dari total PDB.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang menggembirkan, namun pelaku bisnis pada UMKM diduga masih memiliki pemahaman yang belum memadai tentang akuntansi dan pelaporan keuangan serta urgensi penggunaannya. Mereka masih cenderung untuk mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Oleh karena itu dinilai perlu untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan. Kalaupun ada pencatatan yang selama ini mereka lakukan, pembukuan UMKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku), termasuk penerapan standar akuntansi. Padahal, laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan bisnis, termasuk untuk tujuan yang paling

umum diketahui, pertanggungjawaban manajemen dan untuk tujuan pemenuhan persyaratan kredit perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya. Untuk tujuan perbankan misalnya, UKM telah mempunyai laporan keuangan yang disusun berdasarkan sebuah standar yang baku dan telah berterima umum, pihak perbankan tentu akan lebih mudah untuk memberikan respon dan melakukan penilaian kelayakan bisnis UKM untuk memperoleh kredit pengembangan usaha. Untungnya, DSAK- IAI sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang salah satunya ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dinamakan dengan SAK- ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang secara efektif telah diberlakukan efektif 1 Januari 2011.

Kajian tentang kelayakan penerapan SAK umum (mengacu kepada PSAK) pada UMKM dalam beberapa tahun terakhir telah mengarahkan kepada suatu kondisi yang disebut dengan standard *overload*. Maksudnya, PSAK terlalu berat untuk diterapkan pada UMKM, termasuk koperasi. Oleh karena itu pemberlakuan PSAK-ETAP dapat dinilai sebagai sebuah terobosan dan langkah maju dalam pengembangan penerapan akuntansi sampai pada level usaha mikro, kecil dan menengah. SAK-ETAP ini adalah suatu prinsip, prosedur, metode atau aturan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Tanpa Akuntansi Publik (ETAP) yaitu entitas usaha yang tidak (belum) tercatat di pasar modal atau tidak dalam proses pengajuan di pasar modal dan entitas ini bukan lembaga keuangan. Salah satu entitas usaha yang dimaksud dalam standar tersebut adalah usaha ekonomi berskala kecil dan menengah (UKM.).

Vasek (2010) menjelaskan tentang Perkembangan IFRS untuk UKM sebagai alternatif dari penerapan *full IFRS*. *International Accounting Standards Board* (IASB) mulai menyadari kompleksitas dari penerapan *full IFRS* untuk perusahaan jasa. Pada Juni 2004, ketika *exposure draft* IFRS untuk usaha kecil dan menengah (IFRS for SMEs), proyek lima tahunpun dimulai. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketentuan dan persyaratan yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dari para pengguna informasi dari UKM tersebut dan mengarahkan pada keseimbangan antara biaya dan manfaat (*cost versus benefit*) yang berhubungan dengan pengadopsian IFRS.

Dukungan terhadap proyek ini telah diperlihatkan dengan adanya perluasan adopsi IFRS secara terus menerus di dunia. Semakin banyak negara yang memerlukan atau mengizinkan untuk menggunakan IFRS ketika perusahaan menyusun laporan keuangan

terpisah atau konsolidasi. Fakta ini tidak hanya menyangkut perusahaan publik tetapi juga menyangkut usaha kecil dan menengah.

Sementara di Indonesia, latar belakang diperlukannya SAK-ETAP karena Standar Akuntansi Keuangan yang mengadopsi IFRS terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia. Kompleksitas ini akan mengakibatkan *cost of compliance* yang lebih besar pula seperti dikemukakan oleh Eierle dan Haller (2010). Tujuan penyusunan SAK-ETAP tidak hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum *go public*, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih matang dalam mempersiapkan laporan keuangan kedepannya ketika *go public*. Pada mulanya sempat tercetus ide agar SAK-ETAP mengikuti "IFRS for SME's" (*Small Medium Entities*). Namun setelah dikaji lebih mendalam IFRS for SME's tersebut ternyata tidak sederhana untuk ukuran perusahaan kecil menengah di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan- Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengembangkan standar yang dianggap lebih cocok dengan kondisi di Indonesia yang kemudian disebut dengan SAK-ETAP. Ada beberapa pihak yang juga memberikan pendapat bahwa penamaan usaha kecil dan menengah dapat mengundang perdebatan karena terdapatnya beragam definisi dan kriteria suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil atau menengah.

SAK-ETAP adalah salah satu dari tiga pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia bersama dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan PSAS (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah). Beberapa karakteristik SAK-ETAP adalah ia adalah *stand alone standard* maksudnya tidak tergantung kepada PSAK, hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, mayoritas menggunakan konsep kos historis, pengaturan yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK dan tidak akan berubah dalam beberapa tahun. Beberapa karakteristik ini, seharusnya, jika diterapkan dengan baik memberikan harapan baik terhadap penerapan akuntansi pada level UMKM.

Meskipun SAK-ETAP telah diterapkan sejak 3 tahun yang lalu, tetapi sepertinya perkembangan penerapan SAK-ETAP pada UMKM masih belum menggembirakan. Belum banyak UMKM yang telah menerapkannya dan dari yang sedikit tersebut sebagian besar belum menerapkannya sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam SAK-

ETAP. Selain itu mungkin perlu didukung oleh regulasi yang dapat mendorong (*triggering*) seperti yang telah diterapkan pada koperasi. Sebagai perbandingan, koperasi yang sebelumnya mengacu kepada PSAK nomor 27 telah diminta untuk meninggalkan penggunaan PSAK tersebut melalui PPSAK (Pencabutan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan) nomor 8 tahun 2010. Sejak 1 Januari 2012 Standar Akuntansi Keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan Surat Edaran Deputi Bidang Kelembagaan KUKM No. 200/SE/Dep.I/XII/2012. Sejak Desember 2011 disampaikan ke seluruh dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM provinsi, tentang pencabutan PSAK No. 27 dan penggunaan SAK ETAP (Setyo, 2012). Hal ini juga kemudian dipekuat dengan Permen KUKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Koperasi Indonesia. Oleh karena itu, pengidentifikasian kembali permasalahan-permasalahan terkait dengan masih lemahnya penerapan SAK ETAP perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana pengaruh penerapan SAK-ETAP bagi dunia bisnis UMKM dalam penyusunan Laporan Keuangan
2. Bagaimana pengaruh penerapan SAK ETAP bagi dunia bisnis UMKM
3. Kendala dan hambatan apa sajakah yang dialami oleh UKM dalam dalam penerapan dan pengimplementasian SAK dan SAK ETAP?

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi, menelaah dan sekaligus mengevaluasi tentang Penerapan SAK ETAP bagi dunia bisnis UMKM dalam penyusunan Laporan Keuangan telah berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan UMKM, Penerapan Prinsip-prinsip SAK ETAP bagi dunia bisnis UMKM dalam pengaruhnya terhadap kinerja UKM dan kendala atau hambatan apa yang dialami oleh UKM dalam dalam penerapan dan pengimplementasian SAK dan SAK ETAP

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah diharapkan bermanfaat dalam mengukur kinerja keuangan UKM, khususnya implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan UKM. Untuk UKM itu sendiri untuk dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis dengan memahami dan

mengimplemantasikan SAK ETAP serta bagi peneliti berikutnya yang memiliki *research interest* tentang penerapan SAK ETAP pada UKM.

B. Tinjauan Literatur

B.1 Definisi dan Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UKM memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: (1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, (2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah, (3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, (4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, (5) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha, (6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal dan (7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Tambunan (2009) juga memberikan gambaran tentang karakteristik UKM seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Karakteristik-karakteristik Utama Entitas Bisnis Kecil

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi dan Manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS)	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS	Banyak yang mempekerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS
3	Sifat dari Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga yang tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai TK yang digaji; semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola/sifat dari Proses Produksi	Derajat mekanisme sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru	Banyak punya derajat mekanisasi yang tinggi/punya akses terhadap teknologi tinggi
5	Orientasi Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas
6	Profil Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama: <i>survival</i>	Banyak berpendidikan baik dan dari RT nonmiskin; banyak	Sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
			yang bermotivasi bisnis/mencari profit	utama: profit
7	Sumber-sumber dari Bahan Baku dan Modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses kredit formal
8	Hubungan-hubungan Eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar (UB)	Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)	Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)
9	Wanita Pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah.

Sumber: Tambunan, 2009

B.2 Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan.

Menurut *J. Fred Weston & Thomas E. Copeland* (dalam Sawir, 2001), “Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”. Menurut Kieso, (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi

tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP 2009:2)

B.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas dinyatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

B.4 Dampak Penerapan SAK ETAP Bagi UKM

Tabel 3 berikut ini menyajikan dampak positif yang akan diperoleh jika pelaku usaha menyadari pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan untuk mendukung perencanaan dan operasi perusahaannya.

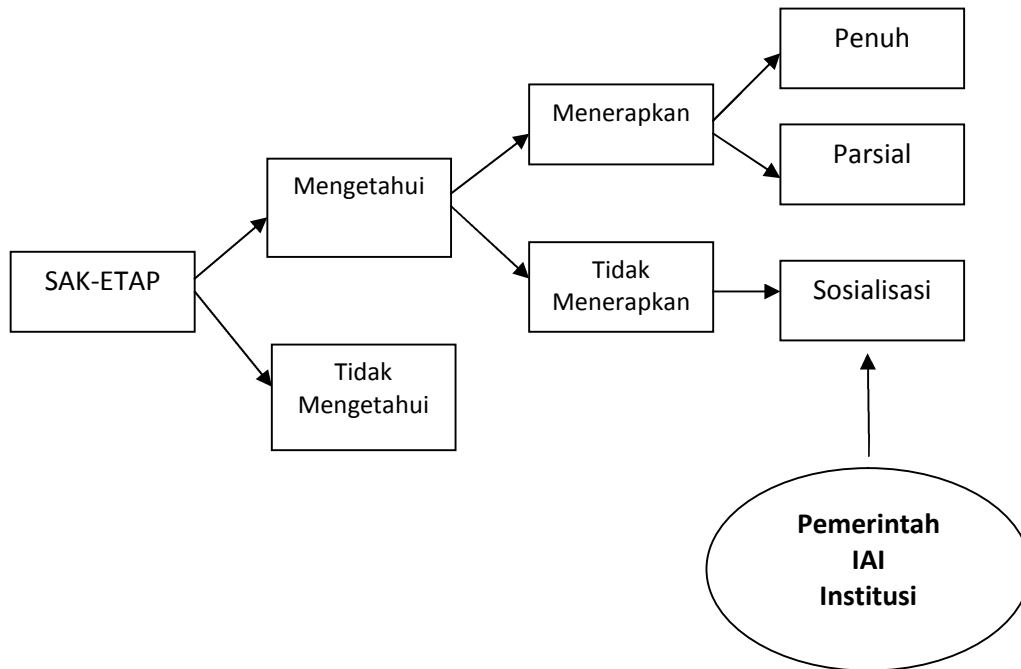
Tabel 3
Dampak Penerapan SAK ETAP

Laporan Keuangan	Aktivitas Manajemen	Hubungan dengan pihak ke 3 (bank)	Perguruan tinggi & pihak terkait
TAAT yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Tertib • Akurat • Akuntabel • Terbuka/ transparan 	<ul style="list-style-type: none"> • pengambilan keputusan • ekspansi usaha • peningkatan dalam efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • akses kredit dan modal • bankable • pendekatan yang sistematis dlm pendanaan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • bentuk tridarma PT • implementasi teori (praktis) • peningkatan kualitas mahasiswa (civitas akademik. PT) • lapangan kerja baru (selaku konsultan/trainer)
Penguatan salah satu dari 3 pilar standar (PSAK, ETAP dan SAK Syariah).	Peningkatan profesionalitas SDM dan usaha	Sinergitas antar entitas dan investor	Mendukung program pemerintah

B.5 Alur Pemikiran Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi beberapa hal penting tentang penerapan SAK-ETAP pada usaha kecil dan menengah. Poin-poin penting tersebut antara lain mengidentifikasi penerapan akuntansi pada UKM atau *existing condition* kemudian menjelaskan bagaimana bentuk penerapan SAK-ETAP pada UKM-UKM tersebut. Alur pikir dari penelitian ini digambarkan dengan gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Alur Pemikiran Penelitian



C. METODE PENELITIAN

C.1 Desain Penelitian

Arah penelitian yang akan dilakukan, penelitian tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ditinjau dari tujuan penelitian merupakan penelitian terapan, dimana dalam penelitian tersebut diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. (Sugiyono, 1999:5). Ditinjau dari metode penelitiannya merupakan penelitian dengan metode kuantitatif (*naturalistic*) yang disertai dengan tambahan informasi kualitatif di lapangan.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah organisasional. Artinya, penelitian ini menggunakan organisasi sebagai subyek untuk menyimpulkan proses identifikasi, telaah dan evaluasi. Dengan kata lain, penelitian ini bukan menggunakan unit analisis secara individual yang artinya pendapat individu sebagai subyek untuk menyimpulkan analisis. Adapun, domain subyek penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Penerapan akuntansi adalah pemanfaatan ketrampilan dan pengetahuan dalam mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian

yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

- Laporan keuangan UKM adalah pembukuan sederhana yang dibuat oleh pengelola UKM untuk mengukur kinerja bisnis, apakah bisnis anda menguntungkan atau justru merugikan.
- Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK ETAP, dan laporan keuangan ini diharapkan dapat mempermudah UKM dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan SAK-ETAP pada UKM serta permasalahan yang mereka dihadapi. Data diperoleh melalui survey dengan menggunakan kuesioner yang disertai dengan observasi dan wawancara langsung yang dilakukan kepada responden (sebagai wakil organisasi bisnis), yang sesuai dengan apa yang terjadi dan dialami oleh responden.

C.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. **Kuesioner** dengan memberikan kuesioner kepada responden
2. **Wawancara** dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.
3. **Observasi** merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.” (Sugiyono, 1999, 130-134).
4. **Inspeksi langsung** pada responden, untuk mengetahui proses bisnis yang berkaitan dengan usaha responden.

Beberapa poin penting yang ingin diidentifikasi adalah seperti digambarkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Indikator Penerapan SAK-ETAP

No	Indikator
1	pencatatan asset telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
2	pencatatan utang telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
3	modal telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
4	laporan realisasi anggaran telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
5	pengelolaan keuangan telah ada pemisahan tugas fungsi dan tanggungjawab
6	pengelola keuangan telah memahami penatausahaan keuangan sesuai ketentuan
7	pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi
8	sarana/prasarana didalam pengelolaan keuangan yang dimiliki telah memadai
9	informasi disajikan dengan jujur
10	informasi disajikan dengan terbuka (tidak ada yang di tutupi)
11	anggaran penerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran

C.3 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah pada penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Tabulasi hasil wawancara, observasi, inspeksi, vouching atau tracing dokumen,
- 2) Perangkingan masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan primer dan selanjutnya permasalahan-permasalahan sekunder dan seterusnya,
- 3) Mengevaluasi hasil dari pengamatan dan wawancara serta data yang didapat, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur.
- 4) Menyimpulkan kelemahan dan menyarankan perbaikan dalam penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
- 5) Menyajikan rekomendasi kepada penyusun standar dan atau seluruh bisnis UMKM agar penerapan SAK ETAP menjadi lebih bermakna di kemudian hari.

D. HASIL PENELITIAN

D.1 Demografi Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden khususnya dalam pertanyaan terbuka untuk 25 orang responden dalam pilot proyek didapatkan informasi sebagai berikut: responden laki-laki 64% dan perempuan 36%, umur responden kurang dari 25 tahun 4%, 26 sd 30 tahun 8%, 31 sd 35 tahun 28%, dan di atas 36 tahun sebanyak 60%. Berdasarkan posisi dalam perusahaan didapatkan informasi sebagai pemilik 64%, Direktur 8%, Manajer Keuangan dan akuntansi 12%, lain-lain 12% dan tidak mengisi 4%. Pendidikan responden SMA sederajat 52%, diploma 12%, sarjana 32%, dan pasca sarjana 4%. Latar belakang pendidikan responden akuntansi 4%, manajemen 12%, ekonomi 20% dan lainnya 64%. Untuk latar belakang usaha perdagangan 44%, produksi 4%, jasa 40%, peternakan 4% dan lainnya 12%. Tahun berdiri usaha 0-5 tahun 32%, 6-10 tahun 40%, 11-15 tahun 16% dan lebih dari 16 tahun 16%.

Gambaran lainnya menjelaskan tentang aset perusahaan, jumlah karyawan, omset serta sumber pendanaan perusahaan. dari segi aset, perusahaan dengan aset kurang dari 500 juta rupiah sebanyak 52% sedangkan yang lebih dari 500 juta sebesar 44% dan tidak menjawab 4%. Karyawan yang bekerja pada unit usaha yang kurang dari 20 orang sebesar 76%, lebih dari 20 orang sebesar 16% dan sisanya tidak memberikan jawaban.

UKM dengan omset usaha selama setahun yang kurang dari 500 juta rupiah sebanyak 84% sedangkan yang lebih dari 500 juta rupiah sebesar 12% dan sisanya tidak memberikan data tentang omzet mereka. Hal penting lainnya menunjukkan, sumber pendanaan usaha sebanyak 36% dari responden menunjukkan menggunakan pendanaan pribadi dengan porsi kurang dari 50% dan sisanya sebesar 64% menggunakan pendanaan pribadi lebih dari separuh pendanaan yang dibutuhkan.

Terkait dengan pengalaman mendapatkan pendanaan dari perbankan, hasil menunjukkan bahwa hanya 48% dari unit usaha yang pernah mengajukan kredit ke bank,

sedangkan 52% belum pernah melakukannya. Diantara yang pernah mengajukan pinjaman ke Bank, 16% diantaranya pernah mendapatkan pendanaan lebih dari Rp 100.000.000.

Responden yang mempunyai staf akuntansi hanya sebesar 44%, dengan divisi khusus akuntansi hanya sebesar 40%. Laporan keuangan yang dibuat secara rutin oleh responden hanya sebesar 40%. Sedangkan untuk laporan keuangan yang berlatar belakang PSAK-ETAP hanya sebesar 12%, dengan penyusunan menggunakan program hanya sebesar 8%. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah belum adanya pemahaman, sosialisasi dan pelatihan yang responden dapatkan mengenai PSAK-ETAP. Bagi responden yang melakukan pencatatan berbasis PSAK mereka dapatkan dari pembelajaran mandiri dan mendapat informasi non formal. Padahal mereka menyadari bahwa penggunaan PSAK sangat mereka butuhkan. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi formal belum dilakukan mereka. Bagi responden pengenalan akuntansi melalui penelitian ini akan bermanfaat untuk beberapa hal diantaranya adalah untuk pencatatan asset, utang, modal, neraca, laporan laba rugi dan laporan realisasi anggaran. Begitu juga dengan fungsi informasi laporan keuangan yang ditanyakan dalam beberapa pertanyaan, secara keseluruhan hanya dipahami oleh 4% responden.

D.2 Penerapan SAK-ETAP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat responden yang memiliki asset di bawah 500 juta sebesar 52%, dan di atas 500 juta sebesar 44%. Dari informasi tersebut usaha yang dilakukan responden sudah tepat jika mereka mulai menerapkan pencatatan akuntansi yang layak. Walaupun responden yang mempunyai staf akuntansi sebanyak 44%, tapi laporan yang mereka buat masih jauh dari standar yang ada. Masih banyak dari responden hanya melakukan pencatatan yang tidak terstruktur dan manual. Informasi yang mereka dapatkan dari laporan keuangan tidak maksimal. Mereka melakukan pencatatan hanya agar tidak lupa atas transaksi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tujuan penelitian dan data empiris dari responden didapatkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi keuangan belum sepenuhnya dilakukan, apalagi menyangkut penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK- ETAP). Hanya 4% UMKM yang telah menerapkannya dengan baik. Sehingga hasil ini belum dapat

mengungkap pengaruh penerapan SAK-ETAP terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada UMKM secara keseluruhan. Apalagi jika kita mencoba mengukur pengaruhnya terhadap kinerja UMKM.

Kendala dan hambatan yang dihadapi responden dalam penerapan SAK-ETAP ini adalah kurangnya sosialisasi yang diterima mereka. Apalagi pelatihan SAK-ETAP agar laporan keuangan yang disusun oleh UMKM berlangsung dengan baik hampir tidak pernah dilakukan. Sehingga laporan keuangan yang disusun UMKM terkesan seadanya dan tidak memberikan informasi yang cukup.

E. SIMPULAN DAN SARAN

E.1 Simpulan

Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun masyarakat luas lainnya. Namun demikian dalam penerapan laporan keuangan masih banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan sederhana dan seadanya. Dari data lapangan yang didapat hanya 4% dari semua responden yang menggunakan standar laporan keuangan yang layak (SAK-ETAP). Sangat ironi jika kita bandingkan dengan peran penting UMKM dalam PDB yang hampir mencapai 58%. Untuk itu sangat diperlukan peran instansi terkait dalam mendukung tumbuh berkembangnya UMKM di Indonesia, salah satunya dalam hal pembuatan laporan keuangan yang berstandar.

Sebagian masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan peran dan kemampuan UMKM dalam segi bisnis yang selama ini ternyata memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat pada saat krisis ekonomi di Indonesia UMKM mampu melakukan penyesuaian dan bertahan (*survive*) pada saat banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. Tapi dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki, khususnya dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan ini menjadi perhatian utama, karena laporan keuangan menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas unit usaha yang bermanfaat pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu, serta menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen. Jika

terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pencatatan laporan keuangan di UMKM maka institusi yang berkompeten diharapkan ikut berperan untuk meningkatkan penerapan standar akuntansi ini.

E.2 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini hanya sekedar mengidentifikasi penerapan SAK-ETAP pada UKM. penelitian ini belum menjelaskan banyak hal tentang proses adopsi dan dinamika internal perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi ini. Kemudian, penelitian dilakukan pada lingkup wilayah yang terbatas yang mungkin tidak merepresentasi penerapan SAK-ETAP ini dengan baik. Kelemahan lainnya adalah penelitian ini tidak mampu memberikan jawaban yang *clear* untuk menjelaskan hubungan antara penerapan SAK-ETAP dengan berbagai aspek manajerial seperti perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terkait dengan penerapan SAK-ETAP pada UKM, beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut, (1) Melakukan pendekatan mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi bisnis, (2) Melakukan sosialisasi mengenai penataan pencatatan laporan keuangan yang berstandar agar jalannya operasional bisnis mereka menjadi lebih baik dan (3) Selanjutnya mengadakan pelatihan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (mengarah pada pelatihan SAK-ETAP)

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan SAK-ETAP yang masih jauh dari harapan memerlukan campur tangan dari berbagai pihak baik dari regulator, praktisi maupun akademisi.

DAFTAR REFERENSI

- Ardi Kusumah, Arief. 2012. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, diunduh dari journal.unsil.ac.id/download.php?id=283
- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Kampung Batik Di Sidoarjo. STIE Perbanas Surabaya.

- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kieso, Weygandt, Warfield, 2002. Akuntansi Intermediate, edisi kesepuluh, Jakarta: Erlangga.
- Megginson, William. L. Mary Jane Byrd, and Leon C Megginson. 2000. *Small Business Management: An Entrepreneurs Guide Book*, (3rd Ed). United States of America: McGraw Hill.
- Rudiantoro, Rizki. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Universitas Indonesia: Makalah.
- Sarifah, Atun (2012) Analisis Persepsi SAK-ETAP Terhadap Kinerja Usaha pada UMKM Se Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*.
- Seifert, Deborah L dan Deborah L. Lindberg. 2010. Key Provision of IFRS for Small and Medium-sized Entities. *CPA Journal*.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suhardjono dan Dr. Rofi'ul Metode Penelitian Bisnis University Adibuana Perss. Surabaya. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Mei 2009*
- Susanto, Edi. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta* : Gigital Library Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Tambunan, T. (2009). *UMKM Di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Vasek, Libor. 2010. IFRS for SME's: A New Challenge for Worldwide Financial Reporting. *International Journal of Management Case*.

RPSEP-39

INTELLECTUAL CAPITAL MENINGKATKAN DAYA SAING: SEBUAH TELAAH LITERATUR

Noorina Hartati, S.E., M.Sc.
Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15418,
Telp. (021) 7490941
E-mail: orin@ecampus.ut.ac.id

Abstract: *Intellectual Capital becomes an interesting topic to discuss and to research because it provides more value for the company thereby increasing competitiveness. Many companies still think that physical assets such as land, machinery, and labor that can generate profits for the company, so that the exclusion of non-physical assets (intellectual capital) such as, knowledge and competence of employees, customer relationships, innovation, and administration of computer systems, creativity in designing a unique product as well as the ability to master technology. Therefore, it should be realized by the owners or top management that the training programs to improve employee competency needs to be improved rather than just buying land for business expansion and new machinery. Based on the research from experts proves that companies that have a more intellectual capital than its competitors the company more profitable, as well as financial performance and firm value better. Viewed from the standpoint of accounting, disclosure of intellectual capital can be seen from the financial reporting of the company through good training programs and human resource spending can increase employee competency, so that the impact effect on Free Cash Flow (FCF) is rising.*

Keywords: *intellectual capital, competitiveness, financial reporting, and FCF*

A. PENDAHULUAN

Seperti yang dikemukakan oleh Widyaningdyah dan Aryani (2014), suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif jika dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain dalam industrinya. Fokus dunia bisnis tidak lagi bertumpu pada aset berwujud (*tangible asset*) namun sudah beralih ke aset tidak berwujud (*Intangible assets*). *Intellectual capital* tidak hanya berupa *goodwill* atau paten seperti yang dilaporkan di neraca. Kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan,

penciptaan inovasi, sistem komputer dan administrasi, hingga kemampuan menguasai teknologi juga merupakan bagian dari *intellectual capital* (Soetedjo dan Mursida, 2014).

Bentuk nyata *intellectual capital* seperti desain produk yang kreatif dan unik yang tidak dimiliki oleh pesaing bisnis, teknologi yang lebih canggih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang perlu disadari oleh *top management* dan pemilik perusahaan adalah aset yang sebenarnya adalah manusia bukan aset fisik yang dapat dilihat. Oleh karena itu, program-program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan staf sangat diperlukan demi untuk memupuk aset yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Intangible assets masuk dalam kategori *goodwill*. Menurut IAS 38 *Intangible assets* yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2013, *Intangible assets* diakui jika dan hanya jika: (1) memungkinkan manfaat ekonomis di masa mendatang yang dapat diatribusikan ke dalam aset (aktiva) yang akan mengalir ke perusahaan, dan (2) biaya perolehan aset (aktiva) dapat diukur dengan handal. Berdasarkan IFRS 3 *Business Combinations*, jika *Intangible assets* diakui dalam *Business Combinations*, biaya perolehan *Intangible assets* adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Dilihat dari sudut pandang akuntansi, pengungkapan *intellectual capital* dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan dari program-program pelatihan dan belanja SDM yang terdapat di neraca, kemudian untuk dampaknya di masa mendatang bisa dilihat dari *Free Cash Flow (FCF)*.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Intellectual Capital*

Intellectual capital merupakan instrument penentu bagi nilai dan kinerja perusahaan yang memicu *munculnya the value of know how* (Petty dan Guthrie, 2000). Bontis (2000) mengemukakan, *intellectual capital* adalah seluruh kemampuan pekerja yang menciptakan tambahan nilai.

International Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai sinonim dari *intellectual property* (kekayaan intelektual), *intellectual asset* (aset intelektual), dan *knowledge asset* (aset pengetahuan), Modal ini dapat diartikan sebagai saham/modal yang berbasis pengetahuan yang dimiliki perusahaan. IFAC juga mengestimasi bahwa saat ini nilai perusahaan lebih ditentukan atas manajemen atas

intellectual capital, tidak lagi terhadap aset tetap. Sehingga, *Intellectual capital* masuk dalam kategori aset (aktiva) bukan modal (equity) di dalam neraca.

Sangkala (2006) menjelaskan bahwa *Intellectual capital* merupakan materi intelektual berupa informasi, pengetahuan, inovasi, *intellectual*, dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan aset yang mempunyai nilai tambah dan memberikan keunggulan bersaing.

2. Komponen *Intellectual Capital*

Menurut Steward (1998), Sveiby (1997), Saint-Onge (1996), dan Bontis (2000) dalam Sawarjuwono dan Kadir (2003), *intellectual capital* terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1. *Human Capital*

Human capital sebagai sumber pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. *Human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki karyawannya.

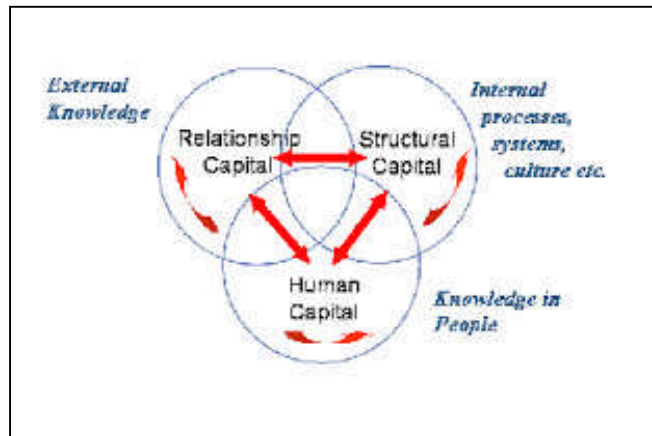
2. *Structural Capital*

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses pabrikasi, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki system dan prosedur yang buruk maka *intellectual capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. *Relational Capital*

Relational capital merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. Elemen ini merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan

perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.



Sumber: <http://www.skyrme.com/kmbasics/ic.htm>

3. *Resource-based Theory (RBT)*

Teori berbasis sumber daya (RBT) merupakan pengembangan lanjutan atas teori *Ricardo's Economic Rent*, dan *structure-performance-conduct* Porter (Barney and Clark 2007). Teori ini muncul karena adanya pertanyaan strategik tentang mengapa sebuah perusahaan dapat mengungguli perusahaan lain dan mempunyai kinerja superior yang berkelanjutan (*sustainable superior performance*). Perusahaan yang membangun sumber dayanya sendiri dan dapat mengendalikannya akan mempunyai kemampuan mempertahankan keunggulannya dibandingkan jika perusahaan membeli atau memperoleh sumber dayanya dari luar organisasi. Kumpulan sumber daya yang unik yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kinerja superior yang berkelanjutan.

Sumber daya unik yang dimaksudkan dalam RBT adalah sumber daya yang mempunyai sifat bermanfaat/bernilai (*valuable*), langka (*rare*), tidak dapat ditiru (*inimitable*), dan tidak terganti (*non-substitutable*). Bernilai artinya dapat digunakan untuk aktivitas perusahaan, langka berarti hanya dimiliki oleh sedikit perusahaan saja. Tidak dapat ditiru berarti sumber daya tersebut dilindungi dari kemungkinan ditiru oleh pesaing. Tidak terganti artinya sumber daya hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu saja dan tidak dapat diganti

dengan produk lain (Barney, *et al.* 2001). Jenis sumber daya ini dapat mengantarkan perusahaan pada pencapaian keunggulan kompetitif.

Perkembangan RBT cukup pesat, terutama dalam pembuktian konsistensinya dengan menggunakan studi empiris di berbagai ranah ilmu. Ranah yang pertama kali mengembangkannya adalah manajemen stratejik (Spanos and lioukas 2001, Schroeder *et al.* 2002, Ray, *et al.* 2004), yang kemudian berkembang pada ranah ilmu yang lain, seperti manajemen sumber daya manusia (Gates and Langevin 2012; Connelly, *et al.* 2012), serta Akuntansi (Henri 2006, Toms 2010).

Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa menurut pandangan *resource based theory* perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan asset-aset strategis yang penting (asset berwujud dan tidak berwujud). Belkaoui (2003) menyatakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menyatukan asset berwujud dan asset tidak berwujud. *Resource based theory* adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategic dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul (Solikhah, dkk, 2010). Berdasarkan pendekatan *Resource-Based Theory* dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

4. Stakeholder Theory

Teori stakeholder menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Deegan, 2004). teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap *powerfull*. kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, dkk, 2008). Dalam konteks ini, para stakeholder memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan *value*

added untuk kemudian mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang merupakan orientasi para stakeholder dalam mengintervensi manajemen.

5. Legitimacy Theory

Menurut pandangan teori legitimasi, organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. organisasi berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi diterima oleh pihak luar (Deegan, 2004). teori ini berdasar pada pernyataan bahwa terdapat sebuah kontrak sosial antara organisasi dengan lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan usahanya. kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring dengan berjalannya waktu, maka hal ini menuntut perusahaan untuk tanggap terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi (Deegan, 2004). pandangan teori legitimasi menyatakan bahwa dalam menjalankan operasinya, organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. hal ini dapat tercapai melalui pengungkapan dalam laporan keuangan (Gutrie, 2006).

6. Signaling Theory

Khlifi dan Bouri (2010) menyebutkan bahwa *signaling theory* dikemukakan oleh Spence (1973) dan Ross (1977) dan kemudian diadopsi oleh Leland dan Pyle (1977) ke dalam pasar perdana. pada penawaran umum saham perdana terdapat asimetri informasi antara pemilik lama dengan investor potensial mengenai prospek perusahaan di masa depan (Hartono, 2006). *signaling theory* mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada investor potensial melalui pengungkapan dalam laporan keuangan (Miller dan Whiting, 2005). Leland dan Pyle (1997) menyatakan bahwa sinyal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik lama dalam mengkomunikasikan informasi yang dimilikinya kepada investor. pemilik lama memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi privat secara sukarela karena mereka berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dan mampu mengurangi asimetri informasi.

7. Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)

Saat ini upaya memberikan penilaian terhadap modal intelektual merupakan hal yang penting. Kesulitan dalam bidang modal intelektual adalah masalah pengukurannya. Dari model-model pengukuran yang dikembangkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan merupakan tindakan yang tidak tepat karena pengukuran tersebut hanyalah sebuah alat yang dapat diterapkan pada situasi dan kondisi perusahaan dengan spesifikasi tertentu (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).

Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa metode pengukuran *Intellectual Capital* dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: pengukuran *nonmonetary* dan pengukuran *monetary*. Salah satu metode pengukuran *intellectual capital* dengan penilaian non-moneter yaitu *Balanced Scorecard* oleh Kaplan dan Norton, sedangkan metode pengukuran *intellectual capital* dengan penilaian moneter, salah satunya yaitu model Pulic yang dikenal dengan sebutan VAICTM.

Pulic (1998) mengusulkan Koefisien Nilai Tambah Intelektual/*Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) untuk menyediakan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak berwujud dalam perusahaan. VAICTM digunakan karena dianggap sebagai indikator yang cocok untuk mengukur IC di riset empiris. Beberapa alasan utama yang mendukung.

Penggunaan VAICTM diantaranya yaitu yang pertama, VAICTM menyediakan dasar ukuran yang standar dan konsisten, angka-angka keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan (Pulic dan Bornemann, 1999), sehingga memungkinkan lebih efektif melakukan analisis komparatif internasional menggunakan ukuran sampel yang besar di berbagai sektor industri. Kedua, semua data yang digunakan dalam perhitungan VAICTM didasarkan pada informasi yang telah diaudit, sehingga perhitungan dapat dianggap obyektif dan dapat diverifikasi (Pulic, 1998, 2000). VAICTM adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah atau *Value Added* (VA) dengan total sumber daya

perusahaan dan masing-masing komponen sumber daya utama. Nilai tambah adalah perbedaan antara pendapatan (OUT) dan beban (IN).

Metode VAICTM mengukur efisiensi tiga jenis input perusahaan yaitu modal manusia, modal struktural, serta modal fisik dan finansial yang terdiri dari:

1) *Human Capital Efficiency* (HCE) adalah indikator efisiensi nilai tambah modal manusia. HCE merupakan rasio dari *Value Added* (VA) terhadap *Human Capital* (HC). Hubungan ini mengindikasikan kemampuan modal manusia membuat nilai pada sebuah perusahaan. HCE dapat diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan nilai tambah setiap rupiah yang dikeluarkan pada modal manusia. HCE menunjukkan berapa banyak *Value Added* (VA) dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja (Ulum, 2008). Rumus untuk menghitung HCE yaitu:

$$HCE = VA/HC$$

HC = Gaji dan tunjangan karyawan

2) *Structural Capital Efficiency* (SCE) adalah indikator efisiensi nilai tambah modal struktural. SCE merupakan rasio dari SC terhadap VA. Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai (Tan *et al.*, 2007). Rumus untuk menghitung SCE yaitu :

$$SCE = SC / VA, \text{ dimana } SC = VA - HC$$

3) *Capital Employed Efficiency* (CEE) adalah indikator efisiensi nilai tambah modal yang digunakan. CEE merupakan rasio dari VA terhadap CE. CEE menggambarkan berapa banyak nilai tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal yang digunakan. CEE yaitu kalkulasi dari kemampuan mengelola modal perusahaan (Imaningati, 2007). Rumus untuk menghitung CEE yaitu :

$$CEE = VA/CE$$

CE = nilai buku aktiva bersih

Meningkatnya pemahaman atas pentingnya pengungkapan *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan berbanding lurus dengan penelitian atas pengukurannya. Banyak metode pengukuran *intellectual capital* yang telah dikembangkan, salah satunya yaitu metode *The Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) yang dikembangkan oleh Pulic (1998). VAIC merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

menciptakan nilai secara efisien dengan memanfaatkan keberadaan modal fisik (*physical capital*) dan modal intelektual (*intellectual capital*) untuk memberikan nilai tambah (*value added*). Perusahaan yang memiliki nilai VAIC tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengombinasikan keberadaan sumber daya yang dimiliki, mulai dari dana-dana keuangan, *human capital*, *structural capital* hingga *customer capital*. Dan dengan adanya pengelolaan yang baik, maka kinerja perusahaan pasti akan mengalami peningkatan pula.

8. Keunggulan Kompetitif

Sebuah perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif apabila dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam industrinya. Namun lebih lanjut dikatakan hal yang paling penting adalah menjaga keberlanjutan dari keunggulan kompetitif tersebut atau yang biasa disebut sebagai *sustained competitive advantage* (Barney and Clark 2007). Keunggulan kompetitif dalam RBT merupakan penciptaan *abnormal profit* (Peteraf 1993) atau tingkat kembalikan di atas rata-rata (*above average returns*) dengan memanfaatkan fitur-fitur khusus yang dimiliki perusahaan (Lin and Huang 2011).

Keunggulan kompetitif dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keunggulan kompetitif berbasis logistik (Porter 1985) dan keunggulan kompetitif berbasis sumber daya (Barney 1991).

9. Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan penelitian Widarjo (2011), pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana. Semakin tinggi pengungkapan modal intelektual, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Perluasan pengungkapan modal intelektual akan mengurangi asimetri informasi antara pemilik lama dengan calon investor, sehingga membantu calon investor dalam menilai saham perusahaan dan dapat melakukan analisis yang tepat mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Williams (2001), dan Miller dan Whiting (2005) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela mengenai modal intelektual memungkinkan investor dan stakeholder lainnya untuk

lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko mereka. perusahaan mengungkapkan *intellectual capital* pada laporan keuangan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi investor, serta meningkatkan nilai perusahaan (Miller dan Whiting, 2005). sinyal positif dari organisasi diharapkan akan mendapatkan respon positif dari pasar, hal tersebut dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan.

10. *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil pengujian Chusnah (2014) dengan menggunakan data 80 perusahaan manufaktur periode 2008-2010 membuktikan bahwa pengaruh IC dan komponen IC terhadap kinerja perusahaan menunjukkan arah yang positif dan signifikan dengan model pengujian yang mempertimbangkan peran moderasi dari strategi dalam hubungan antara IC dengan kinerja menunjukkan hasil yang positif dan signifikan.

Intellectual capital sendiri menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti mengingat perannya yang makin vital pada perusahaan saat ini. Menurut pandangan tradisional, aset yang berharga bagi perusahaan berupa aset fisik berupa tanah, tenaga kerja dan modal, dan aset-aset tersebut dianggap sebagai penentu seberapa baik kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang *software*, keuangan, farmasi, perhotelan sangat bergantung pada *intellectual capital* untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan manufaktur mengombinasikan *intellectual capital* dengan aset fisik untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. *Intellectual capital*, yang meliputi sumberdaya dan kemampuan perusahaan yang berharga, sulit untuk ditiru dan bersifat tak tergantikan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dan kinerja yang superior dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakannya (Barney, 1991).

Chen *et al.* (2005) menggunakan model Pulic (VAIC) untuk menguji hubungan antara *intellectual capital* dengan nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Taiwan. Kinerja keuangan yang digunakan adalah *market-to-book value*, *ratios of equity*, *return of equity*, *return on assets*, *growth in revenue* dan *employee productivity*. Hasilnya menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh secara

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bahkan penelitian ini dapat dijadikan indikator untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang.

11. Intellectual Capital Meningkatkan Daya Saing

Untuk memiliki kekuatan sebagai nilai tambah (value added), perusahaan harus memperbaiki kondisi internal perusahaan itu sendiri. banyak faktor yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih kokoh di mata pasar yang ditunjukkan bukan hanya dari asset fisik yang dimiliki, walaupun sangat penting tapi juga ditunjukkan dengan asset tak berwujud yang dimiliki perusahaan. asset yang tidak berwujud tersebut seperti jumlah stockholder equity yang positif, kekuatan pada *financial performance*, kemampuan intelektual perusahaan dalam efisiensi biaya yang ditemukan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan kekuatan dalam persaingan, hingga inovasi yang terus menerus yang dalam hal ini disebut *intellectual capital* atau modal intangible yang dapat meningkatkan *financial performance* dan competitive perusahaan (Nur, 2008).

12. Intellectual Capital Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi

Pengungkapan intellectual akuntansi dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan didalam program pelatihan dan belanja SDM untuk selanjutnya dampaknya dapat dilihat pada free cash flow (FCF).

Pengungkapan dianggap oleh teori agensi sebagai mekanisme yang dapat mengurangi biaya yang dihasilkan dan konflik serta mengontrol kinerja manajer, sehingga manajer didorong untuk mengungkap *voluntary information seperti intellectual capital disclosure* (erdianthy dan djakman, 2014). Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erdianthy dan Djakman (2014), tingginya pengungkapan modal intelektual pada beberapa item disebabkan adanya aturan dari Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai bentuk dan isi laporan tahunan, sehingga sifat pengungkapan tersebut lebih bersifat mandatory atau memenuhi ketentuan.

C. SIMPULAN

Intellectual Capital dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan sehingga meningkatkan daya saing. Banyak perusahaan masih beranggapan bahwa asset fisik berupa

tanah, mesin, dan tenaga kerja yang dapat menghasilkan profit bagi perusahaan, sehingga mengesampingkan asset non fisik (*intellectual capital*) seperti, pengetahuan dan kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, inovasi, system computer dan administrasi, kreativitas dalam mendesain produk yang unik serta kemampuan menguasai teknologi. Oleh karena itu perlu disadari oleh para pemilik maupun top management bahwa program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan daripada hanya membeli tanah untuk ekspansi usaha dan mesin-mesin baru. Berdasarkan hasil penelitian dari para ahli membuktikan bahwa perusahaan yang mempunyai *intellectual capital* dibanding perusahaan pesaingnya lebih profitable, serta kinerja keuangan dan nilai perusahaan lebih baik. Dilihat dari sudut pandang akuntansi, pengukapan *intellectual capital* dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan melalui baik program-program pelatihan maupun belanja SDM yang dapat meningkatkan kompetensi karyawan, sehingga dampaknya berpengaruh pada Free Cash Flow (FCF) yang naik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J. B. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17, 99-120.
- Barney, J. B. and Clark, D. N. 2007. *Resource-based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Barney, J. B., Wright, M., and Ketchen, D. J. 2001. The Resource-based View of The Firm: Ten Years After 1991. *Journal of Management*, 27, 625-641.
- Belkaoui, Ahmed-Riahi. 2003. "Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms." *Journal of Intellectual Capital*. Vol 4, No. 2, pp. 215-226.
- Bontis, N., Keow, W. C., and Richardson, S. (2000). Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. *Journal of Intellectual Capital*, 1(1), 85-100.
- Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., and Trougakos, J. (2012). Knowledge Hiding in Organizations. *Journal of Organizational Behavior*, 33, 64-88.
- Chusnah, F. N., Lies Z dan Diana S. 2014. Intellectual capital anda performance: implementasi korelasi strategi bisnis pada perusahaan go public studi kasus: perusahaan

- manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram: 24-27 September
- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company. Sydney
- Erdianthy, Daissy dan Chaerul D. Djakman. 2014. Pengungkapan Modal Intelektual, Proporsi Komisaris Independen dan Kinerja Bank di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram: 24-27 September
- Gates, S. and Langevin, P. (2010). Human Capital Measures, Strategy and Performance: HR Managers' Perceptions. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(1), 111-132.
- Henri, J. (2006). Management Control Systems and Strategy: A Resource-based Perspective. *Accounting, Organizations, and Society*, 31, 529-558.
- International Federation of Accountants (1998), *The Measurement and Management of Intellectual capital: An Introduction*, New York.
- Khelifi, F. dan A. Bouri. 2010. Corporate Disclosure and Firm Characteristics: A Puzzling Relationship. *Journal of Accounting – Business & Management* 17 (1): 62-89.
- Leland, H. E., dan D. H. Pyle. 1977. Information Asymetries, Financial Structure, and Financial Intermediation. *The Journal of Finance* 32 (2): 371-387.
- Lin, C. and Huang, C. (2011). Measuring Competitive Advantage with an Asset-Light Valuation Model. *African Journal of Business Management*, 5(13), 5100-5108.
- Miller, C. dan H. Whiting. 2005. Voluntary disclosure of intellectual capital and the “hidden Value”. Proceedings of the accounting and finance association of Australia and new Zealand conference.
- Nur, Dhani Ichsanuddin. 2010. Meningkatkan Kinerja Keuangan melalui Intellectual Capital: Bukti Empiris Perusahaan Otomatif Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol. 8, No. 3.
- Spanos, Y. E. and Lioukas, S. (2001). An Examination into the Causal Logic of Rent Generation: Contrasting Porter's Competitive Strategy Framework and the Resource-based View Perspective. *Strategic Management Journal*, 22, 907-934.
- Schroeder, R. G., Bates, K. A. and Junttila, M. A. (2002). A Resource-based View of Manufacturing Strategy and the Relationship to Manufacturing Performance. *Strategic Management Journal*, 23, 101-117.

- Peteraf, M A. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View. *Strategic Management Journal*, 14(3), 179-191.
- Petty, R. and Guthrie, J. (2000). Intellectual Capital Literature Review: Measurement, Reporting, and Management. *Journal of Intellectual Capital*, 1(1), 155-176.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Pulic, A. 1998. *Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy*. Paper presented at the 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential.
- Pulic, A. 2000. "VAIC – an accounting tool for IC management". (online), (www.vaic-on.net. Diakses tanggal 3 oktober 2014).
- Rahardian, Ariawan Aji dan Wahyu Meiranto. (.....). Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Perusahaan: Suatu Analisis Dengan Pendekatan *Partial Least Squares*.
- Ray, G., Barney, J. B., and Muhana, W. A. (2004). Capabilities, Business Process, and Competitive Advantage: Choosing The Dependent Variable in Empirical Test of The Resource-based View. *Strategic Management Journal*, 25, 23-37.
- Ross, S. A. 1977. Some Notes on Financial Incentive-Signalling Models, Activity Choice and Risk Preferences. *The Journal of Finance* 33 (3): 777-792.
- Sangkala. 2006. *Intellectual Capital Management: Strategi Baru Membangun Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Yapensi.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi dan Agustine Prihatin Kadir. 2003. "Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan (Sebuah Library Research)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 5, No. 1, h.31-51.
- Sholikhah, B., A. Rohman dan W. Meiranto. 2010. Implikasi intellectual capital terhadap financial performance, growth, dan market value: studi empiris dengan pendekatan simplistic specification. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: 13-14 Oktober.
- Soetedjo, Soengeng dan Safrina Mursida. (.....). Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan
- Spence, M. 1973. Job Market Signalling. *The Quarterly Journal of Economics* 87 (3): 355-374.

- Tan et al. 2007. Intellectual capital and financial returns of companies. *Journal of Intellectual Capital* Vol. 8 No. 1, 2007 pp. 76-95.
- Toms, S. (2010). Value, Profit, and Risk: Accounting and the Resource-based View of the Firm. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(5), 647-670.
- Ulum, Ihyaul. 2008. "Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan di Indonesia." *Paper disajikan pada SNA 11, Pontianak*
- Wernerfelt, B. 1984. A Resourced-Based View of The Firm. *Strategic Management Journal*. Vol.5: 171-180.
- Widyaningdyah, agnes utari dan y anni ariyani. 2013. Intellectual Capital dan Keunggulan Kompetitif (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur versi *Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA*). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, Mei 2013, 1-14.
- Widarjo, wahyu. 2011. Pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual pada nilai perusahaan. *Simposiom Nasional Akuntansi XIV*. Aceh : 21-22 Juli.
- Williams, S.M. 2001. Is Intellectual Capital Performance and Disclosure Practise Related? *Journal of Intellectual Capital* 2 (3): 192-203.

RPSEP-40

KAJIAN TENTANG UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN SPIP: TERKAIT DENGAN HASIL SURVAI *POLITICAL ECONOMIC RISK CONSULTANCY* (PERC)

Tim Peneliti
Puslitbangwas BPKP
puslitbang@bpkp.go.id

Abstrak

Menurut PERC, tingkat korupsi di Indonesia dari tahun 2002-2010 tetap yang paling buruk diantara negara-negara lain. Sedangkan menurut *Transparency International* (TI), tingkat korupsi di Indonesia sudah mengalami perbaikan. Hasil survai tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil survai PERC dalam kaitannya dengan gambaran permasalahan korupsi di Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi yang salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana SPIP dapat mencegah korupsi di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, telaahan pustaka, dan dokumen skunder. Kajian dilakukan melalui analisis trend, perbandingan data kuantitatif, dan *gap analysis*, untuk menjelaskan perbedaan antara upaya yang telah dilakukan dengan IPK yang diperoleh serta fakta yang ada.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan hasil survai PERC dan TI disebabkan perbedaan responden dan objek survai. Responden PERC adalah para ekspatriat dengan objek survai *political corruption*. Sedangkan responden TI lebih beragam dengan objek survai lebih variatif. Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi meliputi penyempurnaan perundang-undangan, kelembagaan, serta upaya lainnya. PP tentang SPIP merupakan suatu rangkaian dari sistem peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam upaya mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara. PP tersebut telah memuat ukuran-ukuran pencegahan korupsi (*preventive measures*) secara sistematis dalam suatu sistem dengan konsep yang jelas sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.

A. PENDAHULUAN

Beberapa media masa, baik di dalam maupun luar negeri (khususnya di kawasan Asia Pasifik) tanggal 8 Maret 2010 merilis hasil survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), dimana Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets*, ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup, dengan skor 9,07.⁷²

PERC adalah perusahaan konsultasi yang bergerak dibidang spesialisasi informasi dan analisis bisnis strategis bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara Asia Pasifik. Salah satu jasanya adalah menghasilkan laporan-laporan risiko (*risk reports*), dengan perhatian utama terhadap variabel-variabel sosio-politik yang kritis (*critical socio-political variables*), seperti korupsi. PERC sudah bertahun-tahun melakukan survei kepada para ekspatriat yang tinggal dan bekerja di negara-negara yang disurvei di kawasan Asia-Pasifik, untuk memeringkat korupsi di antara negara-negara tersebut. Selama ini hasil survei PERC selalu menempatkan Indonesia pada urutan bawah.

Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan, karena tidak sedikit upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memerangi korupsi, peningkatan pelayanan publik, dan melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga cukup memperoleh apresiasi, baik dari masyarakat domestik maupun luar negeri.

Hasil survei tersebut sangat menarik untuk dikritisi dan dikaji, bukan dengan maksud untuk mencari-cari kelemahan atas pelaksanaan survei di atas, melainkan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi untuk masa yang akan datang, dengan cara mencari

⁷²Hasil survei PERC berupatabelskorkorupsi, yang dimulaidariangka 0 (skorterbaik) sampaidengan 10 (skorterbuk). Skor di bawah 4,0 termasukrendah, antara 4,0—7,0 moderat, dan di atas 7,0 tinggiatau serious corruption problem.

tahu/menganalisis permasalahan yang ada. Antara lain, “mengapa persepsi para pebisnis asing tersebut terhadap permasalahan korupsi di Indonesia kembali memburuk pada periode dua tahun terakhir?”

Sebagai pembandingan, misalnya kita lihat hasil survei *Transparency International* (TI). IPK Indonesia menurut hasil survei TI memperlihatkan peningkatan yang terus-menerus. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 IPK di Indonesia meningkat rata-rata 0,16 poin (2,8-2,2/4). Penurunan hanya terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,1 poin.

Hasil survei PERC layak untuk dikritisi dan dikaji lebih dalam, sebagai bahan introspeksi dan mengambil manfaatnya, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam kebijakan ataupun strategi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara-negara lain pun, sering memanfaatkan hasil survei tersebut dalam rangka memperbaiki kebijakan pelayanan publik dan iklim investasi di negaranya.

Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa pemberantasan TPK di Indonesia terlalu fokus pada langkah penindakan, sedangkan di banyak negara pemberantasan korupsi lebih difokuskan pada langkah-langkah preventif dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Salah satu langkah pencegahan yang menjadi alternatif adalah melalui “pembangunan sistem pengendalian intern yang efektif.” Ada banyak alasan, mengapa banyak kalangan mulai melihat pentingnya sistem pengendalian intern untuk mencegah korupsi atau fraud secara umum. Beberapa alasan di antaranya, sebagai berikut:

1. Korupsi (dibaca *fraud*), menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah;
2. Keberadaan *fraud* sendiri menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern;
3. *Fraud* secara tidak langsung berkaitan dengan masalah integritas.

Dengan demikian, korupsi atau *fraud* akan berkembang pada suatu entitas, jika:

1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan (<http://www.bpkp.go.id>)

Bersamaan dengan mencuatnya permasalahan korupsi di negara kita tercinta saat ini, seperti masalah makelar kasus, mafia hukum, kasus Bank Century, mafia perpajakan, dan sebagainya, pemerintah sedang giat melakukan upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ini merupakan momentum yang tepat, untuk mengetahui apakah SPIP sebagai alat kendali bagi para pimpinan K/L dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dapat pula digunakan sebagai alat pencegahan bagi timbulnya TPK. Khususnya, sebagai upaya menurunkan tingkat korupsi, yang terkait dengan survei yang dilakukan oleh PERC.

Kajian ini dikaitkan dengan hasil survei persepsi korupsi oleh PERC, namun tidak menggali secara rinci setiap variabel survei ataupun metodologi yang dilaksanakannya, melainkan terhadap permasalahan korupsi secara umum yang menjadi perhatian responden survei tersebut, yaitu para pebisnis asing di Indonesia (*expatriate*).

Data dan informasi survei PERC yang digunakan dalam ini, hanya terbatas pada publikasian yang diterbitkan oleh PERC, baik melalui *website* maupun media massa lainnya, dan tidak mengonfirmasi langsung ke PERC yang berkantor di Hongkong.

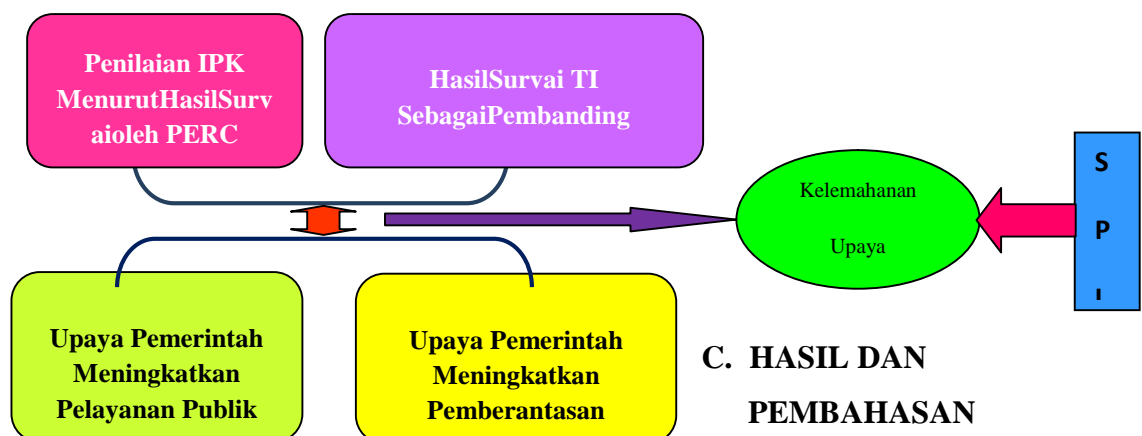
Berdasarkan latar belakang di atas, pernyataan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi fokus utama survei PERC dan kaitannya dengan permasalahan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia?
3. Apakah SPIP dapat mencegah korupsi dan bagaimana caranya?

B. METODOLOGI

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data kajian diperoleh dari: 1) wawancara; 2) telaahan pustaka; dan 3) dokumen skunder. Teknik analisis kajian dilakukan melalui analisis *trend*, perbandingan-perbandingan data kuantitatif, dan *gap analysis*, untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan antara upaya-upaya yang telah dilakukan dibandingkan dengan IPK yang diperoleh serta fakta yang ada.

Kerangka pikir kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Penilaian Korupsi menurut PERC dan TI

Simpulan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang menyatakan Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan Asia Pasific adalah berdasarkan hasil survai yang dilakukan kepada para pebisnis asing (ekspatriat) yang bekerja di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia dan Pasifik dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan tertulis melalui surat (*mail*) dan melakukan interviu secara langsung (*face-to-face interview*). Para responden tersebut ditanya perihal penilaian mereka mengenai berbagai hal/masalah korupsi baik di sektor privat maupun publik. Muara dari pertanyaan PERC menuju pada suatu simpulan mengenai seberapa besar masalah korupsi mempengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan dan apakah ada perubahan dari tahun ke tahun.

Permasalahan yang disurvei/ditanyakan kepada para ekspatriat adalah sebagai berikut:

1. *How serious do you consider the problem of corruption to be in the public sector?*
2. *How serious do you consider the problem of corruption to be in the privat sector?*
3. *How effective is the judicial system at prosecuting and punishing individuals for corruption when abuse are uncovered?*
4. *How serious is the government about fighting corruption?*
5. *How tolerant are average citizens of corruption?*
6. *Do you perceive the trend of corruption to be decreasing, staying the same, or increasing?*
7. *What extent is corruption a deterrent to your willingness to invest and expand your business?*

Hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas adalah sebagaimana terlihat padatable di bawah ini:

NO.	Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Singapore	0,90	0,38	0,50	0,65	1,30	1,20	1,13	1,07	1,42
2	Australia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,40	2,28
3	Hong Kong	3,33	3,61	3,60	3,50	3,13	1,87	1,80	1,89	2,67
4	USA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,89	3,42
5	Japan	3,25	4,50	3,00	3,46	3,01	2,10	2,25	3,99	3,49
6	Macao	N/A	N/A	N/A	N/A	4,78	5,18	3,30	5,84	4,96
7	South Korea	5,75	5,50	6,67	6,50	5,44	6,30	5,65	4,64	5,98
8	Taiwan	5,83	6,33	6,10	6,15	5,91	6,23	6,55	6,47	6,28
9	Malaysia	5,71	6,00	7,33	6,80	6,13	6,25	6,37	6,70	6,47
10	China	7,00	8,33	7,48	7,68	7,58	6,29	7,98	6,16	6,52
11	India	9,17	9,30	8,9	8,63	6,76	6,67	7,25	7,21	7,18
12	Thailand	8,89	8,75	7,80	7,20	7,64	8,03	8,00	7,63	7,60
13	Philippines	8,00	7,67	8,33	8,80	7,00	9,40	9,00	7,00	8,06
14	Vietnam	8,25	8,83	8,71	8,65	7,91	7,54	7,75	7,11	8,07
15	Cambodia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,25	9,10
16	Indonesia	9,92	9,33	9,25	9,10	8,16	8,03	7,98	8,32	9,27

(Sumber: data diolah dari berbagai publikasian PERC)

IPK Indonesia dilihat dari besarnya sejak 2002 hingga 2008 mengalami peningkatan terus-menerus (semakin membaik), yaitu: mulai 9,92 (2002) menjadi 7,98 (2008). Atas peningkatan IPK tersebut, pada tahun 2006 Indonesia mendapat pujian dari PERC, dengan mengatakan bahwa *“President Susilo seems to be making a favorable impression on expatriates working in the country with this anti-corruption drive.”* Di lain pihak, Thailand mendapat kritikan, karena persoalan keterkaitan Perdana Menteri Thaksin dengan perusahaan-perusahaan keluarganya (Shin Corp.). Meskipun demikian, IPK Indonesia sampai dengan

2006 masih berada pada posisi terbawah dibandingkan dengan dua belas negara lainnya.

Pada tahun 2007, IPK Indonesia mengalami perbaikan, baik dalam angka maupun posisi. Peringkat Indonesia sama dengan Thailand, yaitu ke-11 dengan IPK 8,03, dan peringkat terbawah adalah Philipina, dengan IPK 9,40. PERC mengatakan bahwa “kampanye Presiden SBY untuk mengambil tindakan keras terhadap korupsi, telah banyak memberikan hasil yang positif, tetapi saat ini Dia masih banyak menghadapi tantangan.”

Pada tahun 2008 IPK Indonesia semakin meningkat menjadi 7,98, pada posisi ke-11 di atas Thailand (ke-12, dengan IPK 8,00) dan Philipina (ke-13, dengan IPK 9,00). Situasi di Philipina mungkin tidak lebih buruk dibandingkan dengan Indonesia dan Thailand, tetapi korupsi di Philipina “telah dipolitisasi dan dibicarakan secara terbuka di media massa,” tidak seperti di China dan Vietnam, meskipun negara otoriter. Terhadap Indonesia, PERC mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami perbaikan di bawah Presiden SBY, tetapi persepsi terhadap “pelayan publik, yang masih suka menerima hadiah, masih tetap kuat,... Oleh karena itu, problem Indonesia masih sangat serius” (March 11, 2008 0:00 am TWN, AFP).

Setelah mengalami perbaikan IPK dalam kurun waktu tujuh tahun (2002—2008) dan memperoleh pujian dari PERC, ternyata pada tahun 2009 dan 2010 IPK Indonesia kembali anjlok (*set back*) ke peringkat terbawah. Berdasarkan Publikasi PERC, ternyata permasalahan yang membuat rontoknya IPK ini, antara lain hiruk-pikuknya pemilihan umum yang dilakukan bulan Juli 2009 serta mengenai keberlanjutan KPK di masa mendatang (yang selama ini telah menanamkan kesan baik terhadap para responden dalam memerangi korupsi), telah memengaruhi persepsi responden. Demikian pula pada 2010, banyak pemberitaan kasus-kasus korupsi di media masa, seperti permasalahan Pimpinan KPK (Antasari dan kasus Bibit-Chandra), permasalahan bailout Bank Century, yang disinyalir melibatkan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, juga ikut memperburuk persepsi responden (*expatriates*).

Melihat gambaran tersebut, ternyata IPK hasil survai PERC bukan semata-mata dipengaruhi oleh para responden manakala mereka bersinggungan dengan buruknya masalah pelayanan publik, melainkan juga banyak dipengaruhi oleh masalah politik (*socio politic*) atau *political corruption*. Oleh karena itu, hasil survai PERC ini tidak dapat dijadikan sebagai barometer/ukuran peringkat korupsi komprehensif.

Untuk mengukur tingkat korupsi secara lebih komprehensif atau dalam lingkup makro, TI telah lama (sejak 1995) melaksanakan survai yang menggunakan indikator pada level agregat atau indikator-indikator *governance*, sebagaimana dikemukakan dalam hasil telitian oleh Kaufmann et.al. Sebaliknya, survai PERC termasuk level nonagregat, yang sarannya diperluas, bukan hanya terhadap perusahaan, melainkan juga negara, namun respondennya tunggal, yaitu para ekspatriat. Oleh karena itu, hasil survai TI lebih sesuai dalam melihat permasalahan korupsi dalam aspek yang lebih luas. Selain itu, survai TI memiliki banyak keunggulan, antara lain: sumber data memanfaatkan setidaknya sepuluh lembaga yang memiliki reputasi baik (PERC merupakan salah satu sumber data yang digunakan oleh TI dalam menghasilkan *corruption perception index* atau CPI); respondennya tidak sekedar para ekspatriat; dan subyek yang disurvei juga lebih luas, mulai dari urusan suap sampai kepada masalah tata kelola pemerintahan. Sumber data responden, dan subyek, serta jumlah negara yang disurvei oleh TI periode 2009 sebagai berikut:

No.	Sumber	Subyek yang Ditanyakan	Responden Survai	Tahun Publikasi	Jumlah Negara
1.	<i>Asian Development Bank</i>	<i>Transparency, Accountability, and Corruption in the Public Sector” is especially relevant, as explained by the guidelines</i>	<i>Country teams, experts inside and outside the bank</i>	2008/2009	27 Asian countries
2.	<i>African Development Bank</i>	<i>Corruption, conflicts of interest, diversion of funds as well as anticorruption</i>	<i>Country teams, experts inside and outside the</i>	2008/09	53 countries

No.	Sumber	Subyek yang Ditanyakan	Responden Survai	Tahun Publikasi	Jumlah Negara
		<i>efforts and achievements</i>	<i>bank</i>		
3.	<i>Bertelsmann Foundation</i>	<i>The government's capacity to punish and contain corruption</i>	<i>Network of local correspondents and experts inside and outside the organization</i>	2009	<i>128 less developed and transition countries</i>
4.	<i>Economist Intelligence Unit</i>	<i>The misuse of public office for private (or political party) gain</i>	<i>Expert staff assessment</i>	2009	<i>158 countries</i>
5.	<i>Freedom House</i>	<i>Extent of corruption as practiced in governments, as perceived by the public and as reported in the media, as well as the implementation of anticorruption initiatives</i>	<i>Assessment by experts originating or resident in the respective country</i>	2009	<i>29 countries/ territories</i>
6.	<i>Global Insight</i>	<i>The likelihood of encountering corrupt officials, ranging from petty bureaucratic corruption to grand political corruption</i>	<i>Expert staff assessment</i>	2009	<i>203 countries</i>
7.	<i>IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center</i>	<i>Category Institutional Framework - State Efficiency: "Bribing and corruption exist/do not exist"</i>	<i>Executives in top and middle management; domestic and international companies</i>	2008. 2009	<i>55 countries; 57 countries</i>
8.	PERC	<i>How serious do you consider the problem of corruption to be in the public sector?</i>	<i>Expatriate business executives</i>	2008;2009	<i>15 countries ; 16 countries</i>
9.	<i>World Bank</i>	<i>Corruption, conflicts of</i>	<i>Country teams,</i>	2008-09 /	75

No.	Sumber	Subyek yang Ditanyakan	Responden Survai	Tahun Publikasi	Jumlah Negara
	<i>(IDA and IBRD)</i>	<i>interest, diversion of funds as well as anticorruption efforts and achievements</i>	<i>experts inside and outside the bank</i>	<i>2008</i>	<i>countries (eligible for IDA funding)</i>
10.	<i>World Economic Forum</i>	<i>Undocumented extra payments or bribes connected with 1) exports and imports, 2) public utilities, 3) tax collection, 4) public contracts and 5) judicial decisions are common/never occur</i>	<i>Senior business leaders; domestic and international companies</i>	<i>2008-09; 2009-10</i>	<i>134 countries 133 countries</i>

Melihat lebih jauh kebelakang, IPK atau CPI berdasarkan hasil survai TI sejak tahun 1995 sampai dengan 2009 sebagai berikut:

Tahun	<i>Perception Corruption Index (CPI)</i>	Ranking	Jumlah Negara yang Disurvei
Sebelum Reformasi			
1995	1,94	41	41
1996	2,65	45	54
1997	2,72	46	52
Era Presiden BJ.Habibie			
1988	2,0	80	85
1999	2,0	80	85
Era Presiden Abdurahman Wahid			
2000	1,7	86	90
2001	1,9	88	91
Era Presiden Megawati S (s.d. September 2004)			
2002	1,9	96	102
2003	1,9	122	133
2004	2,0	133	145
Era Presiden SBY			
2005	2,2	137	158

2006	2,4	130	163
2007	2,3	143	179
2008	2,6	126	180
2009	2,8	111	180

(Sumber: data diolah dari Laporan *Transparency International*)

Skor korupsi Indonesia sejak TI memulai melaksanakan survei (1995) berada pada posisi terendah, yaitu pada urutan ke-41 dari 41 negara yang disurvei. Judul publikasi TI saat pertama kali memublikasikan hasil survainya adalah “*New Zealand The Best, Indonesia Worst In World Poll Of International Corruption.*” Skor korupsi sejak saat itu hingga 2004 tidak mampu melebihi skor 2,0 (Catatan: tahun 2006 dan 2007 melebihi 2,0, karena jumlah negara yang disurvei saat itu masih sedikit, tidak lebih dari 54 negara, sehingga skor rata-rata secara individu menjadi besar).

Mulai 2005 skor korupsi Indonesia meningkat terus sampai dengan tahun 2009, dengan IPK 2,8, yaitu berada pada peringkat ke 111 dari 180 negara yang disurvei. Hasil survei TI ini telah memasukkan hasil survei yang dilaksanakan oleh PERC (lihat Matriks 3.1 butir ke-8), dengan demikian IPK Indonesia menurut PERC, sebagai negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010, tidak sepenuhnya menggambarkan “buruknya kondisi pelayanan publik di Indonesia”, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politis (*political corruption*).

2. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi

Runtuhnya rezim Soeharto disebabkan oleh praktik-praktik korupsi yang dilakukannya beserta kroninya, ternyata pada era reformasi tidak menyurutkan para koruptor untuk meninggalkan praktik-praktik yang telah membuat rakyat banyak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, dan kesejahteraan hidup yang lebih baik tersebut. Era reformasi hanya memindahkan praktik-praktik terlarang tersebut tidak hanya di Pusat, melainkan juga ke daerah-daerah, dengan kata lain hanya melakukan pemerataan pembagian kue reformasi. Alhasil, skor IPK

Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi tidak beranjak dari kelompok negara-negara terkorup.

Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Upaya-upaya untuk memerangi korupsi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. melalui instrumen hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
2. melalui kelembagaan yang mendukung efektivitas hukum dengan membentuk lembaga baru seperti KPK dan PPATK.
3. melalui strategi pemberantasan TPK yang terintegrasi yang diarahkan pada tiga strategi yaitu edukatif, preventif, dan represif.
4. melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
5. meratifikasi konvensi *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan baru yang salah satunya adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. melalui perbaikan kelembagaan dengan membentuk Kementerian PAN dan RB serta Ombudsman Republik Indonesia.
3. melaksanakan reformasi birokrasi

Upaya tersebut telah menunjukkan hasil berupa peningkatan IPK dari 2,0 (tahun 2004) menjadi 2,8 (tahun 2009). Namun harus diakui, untuk mendorong perubahan yang lebih besar agar Indonesia keluar dari kelompok negara-negara terkorup di dunia, kenaikan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat dan tidak signifikan (rata-rata hanya 0,16 poin/tahun). Indonesia *still having a serious corruption problem*. Artinya, segala upaya yang telah dilakukan belum dapat

mendongkrak tingkat persepsi korupsi Indonesia yang rendah/buruk. Hal tersebut disebabkan upaya pemberantasan TPK yang belum optimal. Beberapa hal yang memperlihatkan bahwa upaya tersebut belum optimal adalah sebagai berikut.

1. Komitmen politik nasional tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
2. Belum ada strategi nasional pemberantasan TPK yang dilaksanakan secara terintegrasi.
3. Upaya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi belum optimal.
4. Upaya pemberantasan TPK belum optimal mencegah timbulnya penyebab mendasar perbuatan TPK.

3. Bagaimana SPIP Mencegah Korupsi?

Kelemahan dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dapat ditutupi melalui SPIP. SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2). Sesuai dengan definisi tersebut, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, SPIP pada dasarnya adalah untuk mengamankan pencapaian tujuan instansi pemerintah, agar tercapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

SPIP memiliki lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Lingkungan pengendalian berperan sebagai fondasinya yang memiliki dampak yang sangat kuat terhadap struktur kegiatan operasi, penetapan tujuan dan penilaian risiko. Lingkungan pengendalian juga mempengaruhi kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan kegiatan monitoring. Kegiatan pengendalian dirancang terutama untuk kegiatan utama

instansi pemerintah guna meminimalkan terjadinya risiko dan dampaknya. Informasi dan komunikasi diperlukan untuk membantu melaksanakan kegiatan pengendalian dengan baik. Keempat komponen tersebut kemudian dipantau melalui sistem pemantauan yang memungkinkan pimpinan organisasi mengetahui efektivitas sistem pengendalian yang dibangunnya sehingga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

a. SPIP Menekankan Pada Pencapaian Tujuan Instansi Pemerintah

Mengatasi ketiadaan tujuan dan target pemberantasan korupsi yang jelas, maka SPIP dimulai dengan adanya kejelasan tujuan (target) yang akan dicapai dari suatu entitas atau aktivitas atau proses bisnis. Fungsi SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan.

b. SPIP Merupakan Sistem Pencegahan yang Sistematis dan Terintegrasi

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang mengintegrasikan unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. SPIP tidak hanya memfokuskan pada sistem, melainkan pada unsur manusia atau lingkungan pengendalian, yang selama ini kurang disentuh dalam upaya pemberantasan TPK.

Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika merupakan salah satu subunsur lingkungan pengendalian yang paling penting. Bagaimanapun baiknya peraturan perundang-undangan dan sistem penegakan hukum dibangun, jika unsur manusia/ penyelenggara layanan publik atau para penegak hukum mengabaikan etika dan nilai-nilai yang hendak dibangun oleh suatu sistem, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi sulit untuk dicapai secara efektif dan efisien.

c. SPIP Memberi Fondasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Persoalan yang dihadapi saat ini dalam pelayanan publik, seperti penundaan layanan yang berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan melakukan keberpihakan dalam pemberian layanan. Perilaku penyelenggara negara dan

pelayan publik “jauh dari sikap memperlakukan masyarakat yang dilayaninya sebagai raja, melainkan sebaliknya berupaya mencari-cari peluang yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya.” Buruknya perilaku penyelenggara pelayanan publik tersebut, merupakan salah satu indikasi lemahnya integritas. Berlarut-larutnya pelayanan dan rendahnya kualitas pelayanan, merupakan pertanda kurang kompetennya para pelayan publik.

Perbuatan-perbuatan di atas dapat memicu pihak yang dilayani untuk memberikan pembayaran tambahan, agar pengurusan izin dapat lebih dipercepat. Di sini bermula terjadinya suap menyuap. Parahnya, kecenderungan terjadinya suap, justru pada instansi-instansi yang seharusnya (memiliki tugas dan fungsi) dalam penegakan hukum, instansi-instansi pemberi layanan publik yang vital, pemda dan sebagainya (Transparansi Internasional Indonesia, Desember 2008)

Demikian pula reformasi birokrasi bukan sekedar remunerasi, melainkan membangun nilai-nilai dan kultur pelayan publik yang memiliki integritas yang tinggi dan berkualitas, “birokrasi diperlukan sebagai aktor public services yang netral dan adil, dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi, terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara.” Kasus-kasus yang terjadi saat ini, merupakan salah satu contoh yang mengindikasikan belum tersentuhnya tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu unsur SPIP adalah lingkungan pengendalian intern, antara lain penegakan integritas dan nilai-nilai etika dan komitmen terhadap kompetensi, harus dijadikan sebagai fondasi dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

d. SPIP dalam Mencegah Timbulnya Penyebab Utama Perbuatan TPK

Pada tahun 1997 Puslitbangwas BPKP pernah melakukan kajian mengenai berbagai penyebab timbulnya korupsi, setidaknya terdapat enam belas penyebab. Kemudian tahun 1999, BPKP mengkaji lagi secara lebih mendalam dan hasilnya dituangkan ke dalam Buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (BPKP,

Maret 1999). Berbagai penyebab timbulnya korupsi dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek yaitu: *administrative*/organisasi, manusia, dan kultural.

Penerapan SPIP secara benar dapat mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan mendasar tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan koruptif, yang dapat dilihat pada beberapa contoh di bawah ini:

- a. Permasalahan kurang adanya keteladanan dari pimpinan (aspek administrasi) diatasi dengan membangun lingkungan pengendalian. Inti dari lingkungan pengendalian berada di tangan pimpinan, yang harus memberikan keteladanan atau *tone at the top* atau kepemimpinan yang kondusif. Tanpa ada keteladanan dari pimpinan yang memperlihatkan perilaku yang antikorupsi, maka pemberantasan TPK tidak akan berhasil.
- b. Permasalahan tidak adanya kultur organisasi yang benar (aspek administrasi) diatasi dengan membangun lingkungan pengendalian. Inti dari lingkungan pengendalian untuk membangun kultur organisasi yang benar, antara lain dengan membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, dan membina hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- c. Permasalahan sifat tamak manusia yang mendorong untuk korupsi diatasi dengan penerapan subunsur penegakan integritas dan nilai-nilai etika, yang dilaksanakan melalui cara-cara edukatif, melalui budaya kerja, misalnya siraman rohani. Juga melalui keteladanan pimpinan dan internalisasi tentang perilaku kesederhanaan hidup.
- d. Permasalahan moral yang kurat kuat menghadapi godaan (aspek manusia) diatasi dengan penerapan subunsur penegakan integritas dan nilai-nilai etika, yang dilaksanakan melalui cara-cara edukatif melalui budaya kerja, misalnya kegiatan siraman rohani, untuk peningkatan kualitas mental PNS. Juga dilakukan melalui pembelajaran kepada masyarakat (edukatif) untuk tidak memberikan suap kepada petugas layanan publik sesuatu yang di luar aturan.

- e. Permasalahan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi (aspek kultural) diatasi dengan pencegahan melalui pendekatan edukatif: kampanye untuk membentuk sikap masyarakat yang antikorupsi secara konkrit.
- f. Permasalahan masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah masyarakat itu sendiri (aspek kultural) diatasi dengan pendekatan edukatif: memberikan pemahaman tentang berbagai modus operandi TPK, agar masyarakat paham berbagai jenis perbuatan korupsi, serta ikut berperan serta melaporkan perbuatan tersebut kepada penegak hukum.

e. SPIP dalam Mengatasi Jenis-jenis TPK Pasal 2–13 UU No. 31 Tahun 1999

Upaya pemberantasan TPK yang selama ini dilakukan pada umumnya masih terfokus pada penindakan/pemidanaan jenis TPK yang berkaitan dengan pasal 2 dan 3 (mengenai kerugian keuangan negara) dan belum menyentuh pasal-pasal atau jenis-jenis TPK lainnya dari UU No. 31 Tahun 1999, yaitu: (1) suap menyuap; (2) penggelapan dalam jabatan; (3) perbuatan pemerasan; (4) perbuatan curang; (5) benturan kepentingan dalam penguasaan; dan (6) gratifikasi. Penerapan SPIP bukan hanya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara seperti dalam pasal 2 dan 3, melainkan keenam jenis TPK tersebut di atas.

Sebagai contoh dalam mencegah perbuatan suap-menyuap. Suap dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat, dengan cara melanggar aturan. Suap terjadi mulai dari sekedar pemberian uang rokok, uang jalan, uang makan atau apapun namanya, agar urusan dipercepat, sampai kepada suap dalam jumlah besar, agar diluluskan dalam mendapatkan proyek.

Mencegah suap tidak mudah, karena suap terjadi berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Jadi, kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama membutuhkan. Di lain pihak, undang-undang akan memberi sanksi baik kepada si

pemberi maupun penerima, sehingga mereka cenderung tidak mau terbuka. Itulah sebabnya dalam upaya pemberantasan korupsi, pasal-pasal suap jarang digunakan.

Penyebab suap, selain karena mental yang korup, tidak berintegritas, juga dapat terjadi karena lemahnya komitmen, dan didukung dengan sistem dan prosedur operasi yang lemah sistem pengendalian internnya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya suap, dapat dilakukan melalui penerapan SPIP, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Penegakan integritas dan nilai-nilai etika (subunsur ke-1 lingkungan pengendalian). Subunsur ini antara lain mengatur perlu adanya aturan perilaku dan standar etika yang ditetapkan secara formal dan diberlakukan serta dilaksanakan secara menyeluruh. Aturan perilaku ini mengatur antara lain tentang pembayaran yang tidak wajar.
- b) Pemimpin instansi yang pertama kali dan paling depan melaksanakan aturan perilaku tersebut, guna memberikan contoh dan keteladanan bagi para bawahannya. Ini merupakan bagian dari subunsur kepemimpinan yang kondusif. Dengan melihat pimpinan yang berperilaku antisuap, maka diharapkan para bawahan dapat mencontoh, dan timbullah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh jajaran penyelenggara layanan publik untuk menerapkan budaya antisuap pada instansinya.
- c) Lingkungan pengendalian saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh sistem dan prosedur yang dapat mencegah timbulnya penyebab terjadinya suap-menyuap, seperti adanya standar waktu pelayanan, fasilitas dan prosedur pengaduan agar masyarakat pengguna dapat ikut mengawasi dan menyampaikan keluhannya secara terbuka, keterbukaan informasi, dan seterusnya. Untuk itu perlu dibangun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prosedur-prosedur standar baku yang jelas dan dilaksanakan secara transparan. SOP ini perlu didukung dengan kegiatan pengendalian yang cukup, seperti pemisahan fungsi, adanya indikator kinerja, serta review atas kinerja, dan seterusnya.

- d) Realisasi pelaksanaan dari standar pelayanan perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik, untuk memperbaiki standar waktu pelayanan dan prosedur standar baku.

Selain itu, masyarakat harus berpartisipasi melakukan kontrol terhadap pelayanan publik, melalui budaya antisuap dan menyampaikan pengaduan. Dengan sistem pengendalian intern yang diterapkan seperti ini, maka terjadinya praktek suap-menyuap dapat diminimalisasi, walaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa SPIP dapat mencegah TPK dan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini dalam upaya pemberantasan TPK.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan PERC, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. menurut hasil survai PERC, IPK Indonesia dari tahun ke tahun (2002–2010) secara *magnitude* mengalami peningkatan, kecuali pada periode 2009 dan 2010 mengalami penurunan kembali. Sedangkan hasil survai TI, pada periode 2002–2009 menunjukkan IPK Indonesia mengalami peningkatan, baik secara *magnitude* maupun peringkatnya di antara negara-negara yang disurvei.
2. Survai PERC dilakukan terhadap para ekspatriat yang tinggal dan berbisnis di masing-masing negara yang disurvei (16 negara di kawasan Asia-Pasifik), dengan obyek survai masalah *political corruption*. Sedangkan survai yang dilakukan TI lebih lengkap dan komprehensif, karena: menggunakan indikator pengukuran korupsi pada *level aggregate*; obyek survainya variatif mulai dari korupsi hingga tata kelola pemerintahan; respondennya adalah masyarakat, para pakar, dan para manajer perusahaan/instansi, dan negara yang disurvei saat ini ±180 negara; serta sumber data yang digunakan sebanyak sepuluh lembaga dengan reputasi yang prestisius yang ada di berbagai Negara.

3. Hasil survei PERC termasuk salah satu sumber data yang digunakan oleh TI⁷³ dalam menetapkan IPK Indonesia sebesar 2,8 pada tahun 2009, yang berada pada posisi ke-111 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian hasil survei PERC tersebut merupakan bagian kecil dari hasil survei yang dilakukan oleh TI, sehingga tidak perlu dijadikan polemik di masyarakat. Karena, pemerintah senantiasa mempergunakan hasil survei TI dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan pemberantasan TPK.
4. Hasil survei PERC yang mengatakan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010, tidak mewakili atau menggambarkan sepenuhnya atau secara menyeluruh buruknya kondisi pelayanan publik di Indonesia, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor/kondisi politik (political corruption) pada saat itu. Namun demikian, hasil survei tersebut patut dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, antara lain: survei tersebut menggambarkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah belum dilaksanakan secara serius; masih lemahnya kepastian hukum yang dapat mengakibatkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Lembaga pemerintah yang menangani perkara TPK belum berfungsi secara optimal, karena pemberantasan TPK yang selama ini dilakukan pada umumnya masih terfokus pada penindakan/pemidanaan jenis TPK yang berkaitan dengan pasal 2 dan 3 (mengenai kerugian keuangan negara) dan belum menyentuh pasal-pasal lainnya dari UU No. 31 Tahun 1999, yaitu:
 - a. suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12, dan 13);
 - b. penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, 10 a–c);

⁷³Survei PERC yang dilaksanakan setiap tahun, biasanya antara bulan Januari dan Februari, dipergunakan sebagai salah satu sumber data survei TI, yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan semester II pada tahun berjalan.

- c. perbuatan pemerasan (pasal 12e, 12f, dan 12 g);
 - d. perbuatan curang (pasal 7.1.a, 7.1.b, 7.1.c, 7.1.d, 7.2., dan 12h);
 - e. benturan kepentingan dalam penguasaan (pasal 12.i);
 - f. gratifikasi (pasal 12 B Jo. Pasal 12 C).
6. Pemberantasan TPK selama ini, belum optimal mencegah timbulnya penyebab mendasar timbulnya TPK, yaitu aspek administrasi, manusia, dan kultural/budaya yang mendorong munculnya perilaku koruptif, antara lain: integritas pelayan publik yang masih rendah; penundaan layanan yang berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian layanan publik, penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, melakukan keberpihakan dalam pemberian layanan, inkompetensi dalam memberikan pelayanan, kurangnya komitmen dan keteladanan para pejabat dan elit politik.
7. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ruang lingkup, sistim pelayanan, pedoman penyusunan standar pelayanan, tata cara pengikutsertaan masyarakat dan pembayaran ganti rugi belum terbit, padahal dalam Undang-Undang no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diamanatkan paling lambat 6 bulan sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tersebut harus diterbitkan. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya para penyelenggara pelayanan publik menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.

Terlepas dari IPK yang dibuat oleh berbagai lembaga antikorupsi, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan upaya-upaya pemberantasan TPK (perang melawan korupsi), baik melalui penyempurnaan instrumen perundang-undangan, kelembagaan utama maupun pendukung, serta berbagai upaya lain. Kebijakan pencegahan tersebut mulai tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian secara lebih tegas dimana strategi pencegahan, penindakan, dan edukatif dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengoordinasikan strategi-strategi pemberantasan TPK tersebut, tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003, memuat sembilan ukuran pencegahan TPK (*preventive measures*), yang substansinya berkaitan dengan perbaikan sistem dan kebijakan, kelembagaan, dan terutama menyangkut "orang" atau perilaku para pejabat publik⁷⁴ antara lain adanya:

1. kebijakan pencegahan dan implementasi anti korupsi yang efektif dan koordinatif, yang mencakup aspek-aspek: partisipasi masyarakat; mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, manajemen publik dan kekayaan publik yang layak, integritas, transparansi, serta akuntabilitas;
2. lembaga atau lembaga-lembaga pencegahan anti korupsi yang bebas pengaruh manapun;
3. sistem *recruitment, hiring*, promosi, dan pensiun para pejabat sektor publik;
4. kode etik bagi pejabat sektor publik (pasal 8);
5. sistem pelaporan dan akuntabilitas publik yang transparan.

Ukuran-ukuran tersebut di atas, pada dasarnya sudah terakomodasi di dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, namun belum terintegrasikan dalam suatu sistem dan dengan konsep yang jelas. Hal tersebut baru terakomodasi secara sistematis dan terintegrasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP).

PP SPIP merupakan suatu rangkaian dari sistem perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. PP SPIP merupakan amanah dari pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004. Salah satu tujuan terbitnya ketiga UU ini adalah untuk "mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara." Jika dipandang secara komprehensif, rangkaian perundang-undangan pengelolaan keuangan negara ini tidak terlepas dari sistem perundang-undangan tentang pemberantasan TPK.

⁷⁴Muatan atau substansi Undang-Undang tersebut banyak yang berkaitan dan menyentuh aspek-aspek sistem pengendalian intern pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Anti Corruption Task Force (ACTF) BPKP. 2002. Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Mendorong Terciptanya Clean Governance dan Good Governance. Jakarta : BPKP.

Grafika, Sinar. 2006. Himpunan Peraturan tentang Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Cet II. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.

TI (Transparency International). Oktober 2009. The Methodology of the Corruption Perceptions Index. Transparency International (TI) and University of Passau. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/methodology.

Klitgaard R., Abaroa R.M., Parris H.L. Institute for Contemporary Studies Okland, California, Word Bank Institute, USA. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Puslitbangwas BPKP. Oktober 2007. Peningkatan Peran BPKP dalam Percepatan dan Pemberantasan TPK. BPKP. Jakarta.

PERC (Political & Economic Risk Consultancy Ltd.). January 28, 2008. Indonesia Risk Rating Update. PERC. Hongkong. (<http://www.asiarisk.com/percrpts.html>).

PERC (Political & Economic Risk Consultancy Ltd.). Wednesday March 1, 2008. Asian Intelligence. PERC. Hongkong. (<http://www.asiarisk.com/lib10.html> (1of 21)03/15/2007 3:03:48 PM).

UNCAC (United Nations Conventions Against Corruption). 2003. (<http://www.antikorupsi.org>)

Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 2008. Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/2008). Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta.

Duadji S. Mei 2010. Memberantas Korupsi dengan Menerapkan Undang-Undang

Tentang Tindak Pidana. Jakarta.

Supandji H. Agustus 2009. Kebijakan Strategis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. (www.setneg.go.id/index.php?option=com)

Kaufmann D., Kraay A., and Mastruzzi M. 2006. Measuring Corruption: Myths and Realities. The World Bank. (siteresources.worldbank.org/.../six_myths_measuring_corruption.pdf)

Rohwer A. 2009. Measuring Corruption: A Comparison Between The Transparency International's Corruption Perceptions Index And The World Bank's Worldwide Governance Indicators. UNDP. <http://www.ifo.de/pls/guestci/download/CESifo%20DICE%20Report%202009/CE Sifo%20DICE%20Report%203/2009/dicereport309-rr2.pdf>

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Edisi Maret 1999. Jakarta.

Soekanto. S. Prof.Dr. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wikipedia. Expatriate. Diakses tanggal 5 Mei 2010. (en.wikipedia.org/wiki/Expatriate)

RPSEP-41

FAKTOR-FAKTOR UTAMA *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI INDONESIA

Ali Muktiyanto¹
Hilda Rossieta²
Ancella A. Hermawan³

Abstract

This study aims to develop a GUG main factors of previous studies. First, the need to involve the formulation of the vision, mission, and purpose of the college is based on the moral and ethical high in GUG build (AWI / MCI Program, 2010; Indrajit and Djokopranoto, 2006). Secondly, GUG's Guidelines in various OECD member countries stressed how important the role of governance structure and credibility in the implementation of the principles of GUG (Henard and Mitterle, 2010). Third, the existence of the main principles GUG known that fairness, responsiveness, accountability, transparency, and autonomy of universities (World Bank, OECD, UNDP, AWI / MCI Program, 2010; Henard and Mitterle, 2010; Indrajit and Djokopranoto 2006). Furthermore, these dimensions were tested to find the main factors GUG. This study used an explanatory design and processed using Structural Equation Model approach. The test results showed that the study variables showed good validity and. The results of the study illustrate the change in the composition of the major factors that is known GUG become Fairness, Responsibility, Governance Structure, and Accountability. Other variables such as vision-mission, transparency, autonomy, credibility, and ethics can not be proven by this study because it does not meet the criteria of reliability. This may be because of the data that is dominated by Accounting Studies Program of private universities that the most accredited C. It is possible other variables that are not proven in this study because in principle these variables has been absorbed by the four variables that have been proven. The study provides recommendations for further research with the data partitioned state and private universities and ensure the status of state and private universities distinction is still relevant in the determination of the main factors GUG.

Keywords: *Fairness, Responsibility, Governance Structure, Accountability*

PENDAHULUAN

Pertemuan *International Association of University Governing Bodies* tahun 2008 menegaskan perlunya institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan meningkatkan dan menyelaraskan model *governance*-nya dalam menghadapi

tantangan. Pada dekade terakhir ini perguruan tinggi menghadapi perubahan yang dramatis antara lain perkembangan modus sistem pendidikan yang lebih fleksibel seperti *e-learning* dan sistem belajar jarak jauh, bertumbuhnya internasionalisasi perguruan tinggi, profil mahasiswa yang lebih heterogen menurut latar belakang sosial ekonomi, etnis, dan pendidikan sebelumnya, serta peningkatan partisipasi perempuan. Selain itu tekanan untuk mendiversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan publik terus meningkat. Sebagai contoh, pada sebagian besar di negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) secara bertahap pendanaan dari pemerintah mulai dialihkan dari pendanaan rutin menjadi *block grant*, pencairan dana tanpa ketentuan khusus beralih dalam bentuk kontrak berdasarkan profil dan perencanaan strategis perguruan tinggi, serta dana riset harus melalui hibah kompetisi (Henard dan Mitterle, 2010).

¹Lektor Kepala pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

²Lektor Kepala pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

³Lektor pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Tekanan atas *governance* perguruan tinggi sebagai dampak tuntutan ranking internasional juga meningkat. Salmi (2009) mengaitkan ranking perguruan tinggi dengan tiga faktor: konsentrasi bakat, pendanaan yang melimpah, dan *governance* yang tepat. *Governance* lain yang dianggap penting seperti pemimpin yang konsisten dan menginspirasi, visi strategi yang kuat untuk mengarahkan institusi, filosofi kesuksesan, keunggulan dan budaya yang kuat, dan *learning organization* juga menjadi tuntutan publik. Beranjak dari hal tersebut, GUG menjadi satu elemen vital agar perguruan tinggi mampu mengantisipasi, mendesain, mengimplementasikan, memantau, dan menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan (Henard dan Mitterle, 2010).

Pengujian dan pengkajian GUG, khususnya di Indonesia, masih relatif sedikit dan belum mendalam. Sebagai contoh survei implementasi GUG di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom tahun 2011 dengan dimensi transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, mutu layanan akademik, budaya akademik, dan prakarsa hanya sampai pada gambaran umum implementasi GUG dengan hasil penilaian cukup baik (STISI Telkom, 2011). Muhi (2010) dalam disertasinya secara implisit merekomendasikan adanya model GUG bagi tiap perguruan tinggi sebagai tindak lanjut temuannya tentang pengaruh dimensi GUG (transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, budaya akademik, prakarsa) terhadap mutu layanan akademik.

Langkanya kajian GUG pada perguruan tinggi boleh jadi karena belum *fit* dimensi ataupun model GUG itu sendiri pada satu sisi dan landasan teori-praktik *governance* dengan GUG pada sisi lain. Hussin dan Asimirin (2010) yang mengaitkan *governance* dengan otonomi perguruan tinggi di Malaysia mengemukakan bahwa kajian GUG harus mempertimbangkan konteks tempat perguruan tinggi berada baik konteks internal-eksternal dan nasional-internasional, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan keyakinan adiluhung. *The Arabic World Initiative/the Merseille Center for Mediterranean Integration* (AWI/MCI) Program (2010) ketika mengembangkan *university governance scorecard* di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara mengemukakan 6 (enam) dimensi keberhasilan GUG yaitu konteks, misi dan goal; struktur *governance*; manajemen/kepemimpinan; otonomi; akuntabilitas; dan partisipasi.

Henard dan Mitterle (2010) mengungkapkan karakteristik *governance* di Inggris Raya, Irlandia, dan Denmark. Inggris Raya mengemukakan karakteristik *governance* yang meliputi *selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, dan leadership*. Sementara itu Irlandia menambahkan dengan *transparency, fairness, independence, efficiency and effectiveness, dan value for money*. Pada sisi lain Denmark mengemukakan karakteristik *independence, openness (transparency), efficiency, dan quality*. OECD secara implisit mengemukakan perlunya mengaitkan GUG dengan visi pencapaian sasaran dan strategi bertumbuh dan bersaing perguruan tinggi (Henard dan Mitterle, 2010).

Selain itu terdapat prinsip atau karakteristik lain yang sering dipertimbangkan dalam GUG selain yang telah disebutkan sebagai adopsi *good governance* yaitu penentuan *stakeholders*, pendefinisian peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders*, penegakan hukum, orientasi pada konsensus, serta persamaan derajat dan inklusivitas. Nampak betapa variatifnya prinsip-prinsip, praktik, dan pandangan tentang GUG yang berkembang. Beranjak dari paparan tentang GUG di atas penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis faktor-faktor utama yang membentuk GUG program studi akuntansi di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian lainnya terutama pada setting pendidikan tinggi sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik yang berimplikasi pada penyesuaian konstruk untuk indikator-indikator ataupun variabel-variabel terkait.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penambahan bangunan pengetahuan tentang teori GUG pada konteks perguruan tinggi di Indonesia. Dimensi GUG banyak diuji, namun masih secara parsial, seperti Hussin dan Asimirin (2010) melalui pengembangan otonomi; OECD dalam Henard dan Mitterle (2010), Tierney (2006), dan Allan dan Rieu-Clarke (2010) dengan visi, misi, dan goal perguruan tinggi. David dan Philip (2005) memasukkan etika dalam *governance*, sementara itu Medueke (2008) menekankan aspek kepemimpinan dan birokrasi. Bagi praktisi pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan wawasan yang positif dalam menentukan dan menerapkan prinsip-prinsip GUG serta mengelola perguruan tinggi. Akhirnya bagi pemerintah diharapkan dapat mendorong penyusunan dan penguatan praktik GUG di perguruan tinggi baik melalui regulasi maupun kebijakan-kebijakan.

KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep *governance* muncul pertama kali pada ranah privat lalu ke publik dan kemudian diimplementasikan pada sektor pendidikan tinggi. Apabila dilihat sifat dan tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di suatu negara, sekalipun mengadopsi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam GG dan GCG

nampaknya GUG tidak serta merta dapat dinyatakan sama. Hal tersebut juga terkait dengan pendefinisian pendidikan tinggi sebagai *public goods* atau *private goods* atau bahkan kombinasi diantara keduanya serta model perguruan tinggi yang dipilih.

GUG sangat penting bagi suatu perguruan tinggi, hal tersebut dijelaskan dalam *Governance of Irish University* (2007) dalam Henard dan Mitterle (2010) sebagai berikut.

A robust system of governance is vital in order to enable organizations to operate effectively and to discharge their responsibilities as regards transparency and accountability to those they serve. Given their pivotal role in society and in national economic and social development, as well as their heavy reliance on public as well as private funding, good governance is particularly important in the case of the universities

Perguruan tinggi tidak akan mampu mencapai tujuan menjadi unggulan pada seluruh visi dan misinya tanpa menerapkan prinsip dasar GUG yang didasarkan pada pilar kebebasan akademik dan otonomi. AWI/MCI Program (2010) ketika membangun *governance university scorecard* mengemukakan dimensi dan indikator GUG sebagai berikut (1) Konteks, misi dan goal, (2) Struktur *governance*, (3) Manajemen, (4) Otonomi, (5) Akuntabilitas, dan (6) Partisipasi. Dimensi tersebut mencoba membangun keselarasan lingkungan internal dan eksternal dan pengelolaan perguruan tinggi yang menuju kinerja yang optimal. Konteks, misi, goal, dan struktur *governance* mencerminkan lingkungan eksternal dan internal. Otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah inti prinsip-prinsip GUG. Manajemen mencerminkan aspek manajerial dalam mengelola perguruan tinggi. Secara umum, prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang harus diikuti dalam penyelenggaraan perguruan tinggi apabila memang secara konsisten ingin menerapkan konsep GUG. Aplikasi dari prinsip-prinsip ini sebenarnya secara luas dapat ditempatkan dalam hampir semua konteks permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Beranjak dari pemaparan konsep dan praktik GUG di muka, penelitian ini mencoba menyusun satu kerangka GUG yang mengemukakan prinsip-prinsip

governance. *Pertama*, struktur organisasi internal yang tidak dapat diabaikan dalam GUG adalah perencanaan strategis yang tepat beranjak dari formulasi visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi (AWI/MCI Program, 2010; Indrajit dan Djokopranoto, 2006). *Kedua*, *Guidlines* GUG di berbagai negara anggota OECD seperti Inggris Raya, Denmark, Kanada, dan Australia menekankan betapa penting peranan struktur *governance* dan kredibilitasnya menjadi aktor utama implementasi prinsip-prinsip GUG (Henard dan Mitterle, 2010). *Ketiga*, prinsip-prinsip utama GUG yang menjadi intisari GUG adalah *fairness*, *responsiveness*, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi perguruan tinggi (World Bank, OECD, UNDP, AWI/MCI Program, 2010; Henard dan Mitterle, 2010; Indrajit dan Djokopranoto, 2006). Diharapkan cakupan GUG tersebut menjadi semakin komprehensif dan melingkupi implementasi GUG.

Visi, Misi, dan Tujuan (*Strategic Objective*)

Perencanaan organisasi dimulai dengan menetapkan visi, misi dan *strategic objective* yang baik, artinya sesuai dan *fit* dengan lingkungan eksternal dan internalnya. Mengidentifikasi visi, misi, dan *strategic objective* merupakan titik awal yang logis untuk manajemen strategis karena situasi dan kondisi yang mungkin tidak cocok dengan strategi tertentu dan mungkin mensyaratkan tindakan tertentu (David, 2006). Manfaat dari penetapan visi, misi, dan *strategic objective* bagi organisasi sangat penting karena visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita organisasi yang berisikan arahan yang jelas dan yang akan diperbuat organisasi di masa mendatang. Untuk mewujudkan visi, organisasi melakukan pengembangan misi yang akan dijalani dalam tiap aktivitas karena misi merupakan penetapan tujuan dan sasaran organisasi yang mencakup kegiatan jangka panjang tertentu dan jangka pendek yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan jika diimbangi dengan strategi yang tepat dalam penerapannya (Mangkuprawira, 2009).

Nilai, Moral, dan Etika

Di dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat

manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Namun, di sisi lain tidak dapat tidak manusia harus mencari makna penemuan baru. Makna tersebut akan menjamin bahwa penemuan baru digunakan untuk kesejahteraan otentik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etik penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah contoh dimensi etika dari perguruan tinggi. (Indrajit dan Djokopranoto, 2006).

Oleh karena itu nilai, moral, dan etika harus dijunjung tinggi perguruan tinggi. Seluruh prinsip ini harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai, etika, moral dan tujuan dasar yang dianut dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan diterapkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi dasar perguruan tinggi. Perguruan tinggi mengemban amanat dan harapan yang besar dari masyarakat, bangsa dan negara, sehingga penyimpangan dari nilai-nilai ini merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanat dan harapan itu.

Oleh karena peran nilai, moral, dan etika sebagai spirit dan penjaga amanah perguruan tinggi menjadi penting. Keberlepasan pengelolaan perguruan tinggi dari nilai, etika, dan moral akan mengarahkannya pada eksploitasi *residual claimer* (mahasiswa) untuk kepentingan sesaat, jauh dari misi mulia perguruan tinggi itu sendiri. GUG hendaknya menjadikan etika sebagai pilar prinsipnya agar peran perguruan tinggi sebagai masyarakat akademik tetap terjaga.

Struktur Governance

Struktur *governance* merupakan bagian yang banyak dikaji dan menjadi sorotan dalam penyusunan panduan GUG seperti dikemukakan dimuka. Hampir semua panduan GUG, khususnya untuk negara-negara yang tergabung dari OECD, menjadikan struktur *governance* sebagai pusat perhatian. AWI/MCI Program (2010) mengemukakan pembahasan mengenai struktur *governance* meliputi proses pendefinisian, komposisi, proses pengangkatan anggota, kejelasan mandat, keselarasan mandat dengan misi, goal dan kerangka legal, akuntabilitas badan *governance*, mekanisme pengukuran kinerja badan *governance*. Selain itu

terkait dengan struktur *governance* adalah manajemen perguruan tinggi; pimpinan perguruan tinggi: proses pengangkatan, peran dan tanggung jawab, fungsi legal, jalur akuntabilitas, mekanisme evaluasi kinerja; dan struktur manajemen sampai kepada unit yang mencakup peran, tanggung jawab, jalur akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi kinerja (SDM, Penganggaran, pengadaan, aspek hukum). Indrajit dan Djokopranoto (2006) menegaskan bahwa struktur *governance* atau organisasi mencakup hubungan yang memiliki koherensi dengan rencana kebijakan serta keputusan yang terkait dengan pengelolaan kegiatan dan pendanaannya. Hubungan yang dimaksud adalah tata hubungan antara berbagai unit organisasi serta tanggung jawab masing-masing unit dengan bagian organisasi serta personel yang menduduki posisi organisasi.

Kredibilitas

Kredibilitas menuntut pejabat perguruan tinggi memiliki kompetensi akademik dan kecerdasan yang cukup, memiliki *leadership* yang kuat, integritas akademik, dan kemampuan manajerial yang baik. Kredibilitas dibutuhkan perguruan tinggi dalam membawa misi pendidikan, pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kredibilitas merupakan integritas dan kapasitas *stakeholders* dalam menjaga dan membawa nama baik perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah dan ber peradaban (AWI/MCI Program, 2010).

Level pengetahuan dan ketrampilan merupakan salah satu kunci dalam kapasitas *stakeholders* (Carter and Lorsch, 2004; Charan, 1998; Hendri, 2005). Fungsionalisasi pengetahuan dan ketrampilan tidak hanya untuk kepentingan manajemen, pemasaran dan akuntansi namun juga untuk mengelola hubungan dengan konteks lingkungan (Forbes dan Milliken, 1999). Selanjutnya *leadership* yang kuat menentukan kemampuan perguruan tinggi untuk tumbuh dan berkembang (Bikmoradi et.al, 2010). *Leadership* yang tidak efektif akan menghasilkan ketidakstabilan *governance* (Madueke, 2008). Sementara itu integritas *stakeholders* terutama dalam integritas akademik yang merupakan prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, khususnya yang terkait dengan kebenaran, keadilan dan kejujuran (MMR FK UGM).

Transparansi

Transparansi semakin urgen dalam sektor publik (pemerintah) dan privat (swasta). Hal ini didorong oleh berkembangnya tuntutan lingkungan terhadap akses informasi. Aliran informasi tidak pernah secara total tanpa hambatan, karena manajemen yang tidak transparan dalam mengelola organisasi. Transparansi diterima luas masyarakat (sektor publik dan privat), karena transparansi memberikan harapan terhadap efisiensi, membangun kredibilitas dan citra, kepercayaan dan kolaborasi (Drucker dan Gumpert, 2007). Transparansi sangat penting untuk mencegah terjadinya skandal, penyelewengan dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kebangkrutan. Filosofinya adalah *stakeholders* memiliki keterbatasan dalam menjalankan organisasi, sehingga harus menerapkan prinsip transparansi untuk memudahkan *stakeholders* dalam mengawasi dan menilai organisasi. Transparansi tidak bersifat absolut, tetap ada pembatasan-pembatasan mengenai informasi apa saja yang dapat diberikan. Pembatasan terkait : (1) Siapa saja yang berhak mengakses informasi. (2) Jenis informasi yang dapat diberikan dan jenis informasi yang tidak boleh diberikan, seperti rahasia dagang piranti lunak dan strategi organisasi (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Kerangka GUG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan organisasi. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja organisasi, kepemilikan dan pengelolaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Akuntabilitas

Institusi perguruan tinggi harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perguruan tinggi terhadap seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, terutama pada masyarakat umum. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan secara rutin dengan jangka waktu

tertentu. Misalnya, dalam hal anggaran setiap tahun perlu dilakukan proses audit, baik audit internal maupun audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil audit maupun laporan pertanggungjawaban lain harus dengan mudah dapat diakses oleh seluruh *stakeholders*. AWI/MCI Program (2010) mengemukakan dimensi akuntabilitas dalam GUG meliputi

- 1) Kejelasan definisi jalur akuntabilitas: staf akademik, staf manajerial, staf administrasi, badan *governance*,
- 2) Proses untuk evaluasi penyelesaian goal institusi.
- 3) Diseminasi informasi: tujuan dan sasaran institusi, prestasi mahasiswa, penyerapan pasar lulusan, evaluasi institusional (internal dan eksternal), dan akreditasi
- 4) Metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa, staf pengajar, staf administrasi, dan staf manajerial
- 5) Pemeriksaan keuangan: proses pemeriksaan akun perguruan tinggi
- 6) Pencegahan risiko; dan
- 7) Mekanisme penanganan *misconduct*.

Responsiveness

GUG memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua *stakeholders* dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai. Seorang pelayan publik, politisi atau birokrat yang responsif harus menjadi seorang yang reaktif, simpatik, sensitif, dan mampu berempati pada opini dan kebutuhan masyarakat. *Responsiveness* merupakan kesigapan dan akurasi dari penyedia layanan dalam merespons permintaan dari *stakeholders* untuk ditindaklanjuti. Kesigapan terkait dengan kecepatan, mengacu pada waktu tunggu antara permintaan pihak masyarakat dan tindak lanjut oleh pihak pelayan publik. Akurasi mengandung makna respons pelayan publik yang dapat memenuhi keinginan *stakeholders* (Vigoda, 2002).

Responsiveness memiliki efek positif terhadap kesejahteraan sosial, perbaikan sektor publik, peningkatan *outcomes*, dan berpengaruh terhadap mekanisme kontrol. Oleh karenanya, para pelayan publik harus lebih sensitif terhadap tugas dan memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Lembaga publik harus tahu betul siapa pelanggannya dan mau mengubah dirinya untuk mulai mendengar pelanggannya, mensurvey serta melakukan pendekatan kepada *stakeholdersnya* (Osborne dan Gaebler, 2000).

Fairness

Fairness merupakan prinsip *governance* yang mengutamakan adanya perlindungan bagi *stakeholders* minoritas baik dari segi gender, ekonomi, geografi, dan lain-lain, terlindungi dari kecurangan-kecurangan, *self dealing* atau kekeliruan tindakan. *Fairness* juga mengharuskan adanya sistem peran dan tanggung jawab *board*, manajemen dan *committee*, dan remunerasi yang adil (*performance based*), termasuk juga penyampaian secara fair informasi materiil dan pengungkapan penuh dan pengenalan peluang pekerjaan secara adil.

Otonomi

Otonomi merupakan ruh dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat beroperasi secara fleksibel dan bertanggung jawab secara utuh ketika memiliki otonomi yang cukup atas akademik, pengelolaan keuangan, dan pengembangan sumberdaya manusia. AWI/MCI Program (2010) mengemukakan dimensi otonomi sebagai berikut.

- 1) akademik: otonomi penentuan struktur akademik, kebijakan penerimaan mahasiswa, mekanisme jaminan mutu, pembukaan program baru, penerimaan tiap program, evaluasi hasil pembelajaran, dan evaluasi metode pengajaran
- 2) Finansial: otonomi dalam menggali dana, perjanjian kontrak kerjasama, kepemilikan aset, dan memperoleh pinjaman
- 3) Staffing: kebijakan SDM, peran dan responsibilitas yang terlibat, kemampuan merekrut staf (akademik dan administratif), kebijakan pengembangan karir, kinerja manajemen, dan mekanisme penilaian kinerja.

Kajian Kritis dan Senjangan Penelitian

Perkembangan prinsip-prinsip dan praktik GUG sangatlah beragam antar satu negara ke negara lain, namun pada hakikatnya mengarah kepada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada *stakeholders*: pemerintah,

mahasiswa, masyarakat, manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perguruan tinggi. Adopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip GCG dan GG terhadap GUG tidak serta merta mengubah pengelolaan perguruan tinggi menjadi seperti pengelolaan negara atau korporasi, karena tidak semua pendekatan *total quality management* dan GCG dengan mudah diterapkan di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi harus memanfaatkan dan memaksimalkan manfaat otonomi institusi dan kebebasan akademik untuk mengoptimalkan layanannya. Perguruan tinggi tidak akan mampu mencapai tujuan atau *goals* yang dicita-citakan dan menjadi unggulan pada seluruh misinya tanpa menerapkan prinsip GUG. Namun demikian penerapan GUG harus didasarkan pada pilar otonomi dan kebebasan akademik tersebut.

Banyak prinsip-prinsip GUG yang dikembangkan di berbagai negara yang dituangkan dalam *guidlines* namun sesungguhnya bermuara pada prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan berkeadilan. Kredibilitas menuntut *governance* memiliki kompetensi akademik, integritas (jujur dan amanah), cerdas, memiliki *leadership* yang kuat dan kemampuan manajerial yang baik. Transparansi atas perbaikan kinerja dan keterbukaan semua informasi yang akurat dan secara periodik dipublikasi. Akuntabilitas dilakukan manajemen melalui *oversight* yang efektif berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang seimbang antara berbagai level manajerial, *stakeholders*, top manajemen dan auditor. Responsibilitas menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat patuh pada tata hukum dan regulasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Keadilan bermakna bahwa bagi *stakeholders* minoritas (antara lain dari segi ekonomi, gender, geografi) terlindungi dari kecurangan (*fraud*), *self dealing*, atau tindakan salah lainnya.

Faktor nilai-nilai, moral, budaya, dan keyakinan yang dianut *stakeholders* menjadi khasanah yang harus dipertimbangkan menjadi bagian dari mekanisme GUG. Demikian pula faktor perencanaan strategis, faktor internal eksternal, dan lingkungan tempat perguruan tinggi berada.

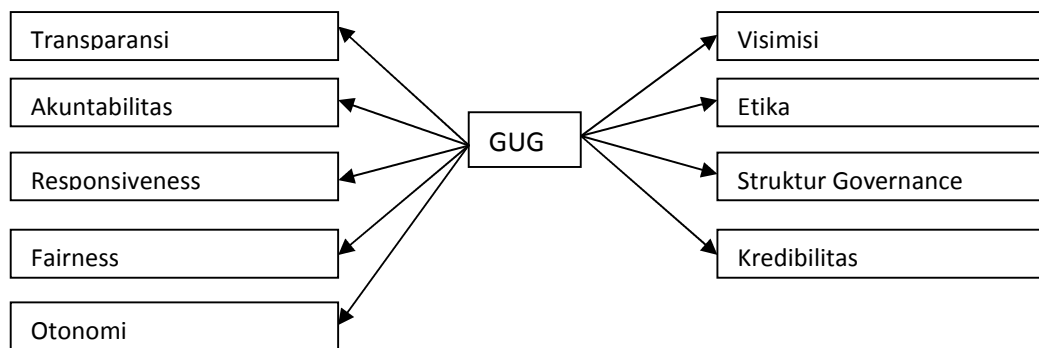
Konsep GUG menghendaki adanya *strategic vision* yang jelas untuk menghasilkan *competitive strategic position* yang tepat. Tidak ada satu model GUG yang tepat untuk seluruh perguruan tinggi, namun dapat diupayakan model GUG yang bersifat generik dan luwes untuk diadopsi baik ditambah atau dikurangkan unsur-unsur yang terdapat dalam model GUG karena faktor kedinamisan dan perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

Oleh karena itu beranjak dari analisis di atas dan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha mengisi sebagian kesenjangan-kesenjangan yang ditinggalkan penelitian sebelumnya yaitu pengujian GUG hendaknya menambahkan dimensi-dimensi lain selain yang sudah biasa dikaji dalam GUG (transparansi, akuntabilitas, dan *responsiveness*) seperti otonomi (Hussin dan Asimirin, 2010), manajemen (Kim, 2008), visi, misi, dan goal perguruan tinggi (Henard dan Mitterle, 2010; Tierney, 2006; dan Allan dan Rieu-Clarke, 2010), struktur *governance* (Medueke, 2008; Beth dan Yarbrough, 1999), dan etika (David dan Philip, 2005). Selanjutnya dimensi-dimensi tersebut diuji dalam satu model keselarasan untuk mencari faktor-faktor utama GUG itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk membangun model GUG yang khas untuk program studi akuntansi di Indonesia.

Rerangka Konseptual Dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama GUG. Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji aspek GUG seperti STISI Telkom (2011) yang menyajikan hasil survey GUG di institusinya. Muhi (2010) menemukan hubungan GUG dengan kinerja, namun tidak mengaitkannya dengan aspek manajemen, akuntansi manajemen dan strategi. Hussin dan Asimirin (2010) mengaitkan GUG dengan pengembangan otonomi. Kim (2008) mengaitkan manajemen dengan GUG dalam pengendalian mutu dan akuntabilitas. OECD dalam Henard dan Mitterle (2010) mengaitkan GUG dengan visi, misi, dan goal perguruan tinggi sekaligus memperkuat kajian Tierney (2006) dan Allan dan Rieu-Clarke (2010) yang menekankan prinsip-prinsip dan dimensi dari GUG. Sementara itu Medueke (2008) menekankan aspek kepemimpinan dan birokrasi dalam GUG. David dan

Philip (2005) memasukkan etika sebagai dimensi yang penting ke dalam *corporate givernance*. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan literatur yang disajikan sebelumnya, dimensi GUG meliputi visi-misi-tujuan, etika, struktur *governance*, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *fairness*, dan otonomi (UNDP, World Bank, OECD, Hussin dan Asimirin, 2010; Kim, 2008; Henard dan Mitterle, 2010; Tierney, 2006; Allan dan Rieu-Clarke, 2010; Medueke, 2008; Beth dan Yarbrough, 1999; dan David dan Philip, 2005). Beranjak dari pemikiran tersebut dapat dibangun satu kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian GUG

Gambar 1. menunjukkan GUG dicerminkan oleh VISIMISI, ETIKA, STRUKTUR GOVERNANCE, KREDIBILITAS, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS, FAIRNESS dan OTONOMI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori. Metode pengumpulan data melalui survei atas objek yang menjadi sampel penelitian. Populasi penelitian adalah 3.164 Perguruan Tinggi dengan 507 Program Studi (Prodi) S1 Akuntansi.

Tabel 1. Penarikan Sampel Akhir

Kriteria	Jumlah
Populasi Perguruan Tinggi	3164
Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi S1 Akuntansi	507
Kuesioner yang tidak kembali	265
Kuesioner kembali	242
Kuesioner kembali yang tidak dapat diolah	11
Sampel Akhir	231

Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian terdiri atas variabel teramati (manifes) dan variabel laten. Variabel teramati meliputi VISIMISI, ETIKA, STRKGOV, KREDIBEL, TRANSP, ACCOUNT, RESPONS, FAIRNESS, OTONOMI. Adapun variabel-variabel laten meliputi variabel laten GUG. Seluruh variabel manifes dikonstruksi dalam skala liker 1-5. Secara lengkap definisi operasional, skala dan teknik pengukuran variabel-variabel penelitian disajikan pada Lampiran 4.

Berdasarkan definisi operasional maka disusun kuesioner. Rancangan kuesioner yang telah disusun selanjutnya dilakukan pengujian bahasa dan substansi serta istilah-istilah akuntansi ahli dari rekan sejawat. Validitas berhubungan dengan apakah suatu variabel mengukur apa yang seharusnya diukur. Doll, Xia, Torkzadeh (1994) mengukur validitas variabel-variabel dalam *Confirmatory Factor Analysis (CFA) Model*. Menurut Ridgon dan Ferguson (1991), dan Doll, Xia, Torkzadeh (1994) dalam Wijanto (2008), suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik jika nilai t muatan faktornya (*loading factors*) lebih besar dari nilai kritis (atau ≥ 1.96 atau untuk praktisnya ≥ 2), dan muatan faktor *Standardized Loading factors* ≥ 0.70 . Sementara itu, Igarria et.al (1997) yang menggunakan panduan dari Hair *et al.* (1995) dalam Wijanto (2008) tentang *relative importance and significant of the factor loading of each item*, menyatakan bahwa muatan faktor standar ≥ 0.50 adalah *very significant*. Igarria et.al (1997) menambahkan jika ada nilai muatan faktor standar < 0.50 , tetapi masih ≥ 0.30 maka variabel yang terkait bisa dipertimbangkan untuk tidak dihapus. Penggunaan batas kritikal 0.50 atau 0.70 sepenuhnya terserah kepada peneliti dengan mempertimbangkan teori atau substansi yang mendasari model, banyaknya variabel teramati yang tersisa setelah penghapusan dan reliabilitas model pengukuran yang terkait.

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya. Untuk mengukur reliabilitas dalam model persamaan struktural akan digunakan *composite reliability measure* (ukuran reliabilitas komposit/*construct reliability/CR*) dan *variance extracted measure* (ukuran ekstrak varian/*variance extracted/VE*). Hair *et al.* (2007) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik adalah jika nilai $CR \geq 0.70$, dan $VE \geq 0.50$.

Hasil pengujian kuesioner pada *First Order Confirmatory Factor Analysis* (Lampiran 2) nampak bahwa dari 63 pernyataan pada kuesioner yang dikembangkan terdapat 45 pernyataan lolos uji validitas dan reliabilitas. Dengan kata lain terdapat 18 pernyataan yang dikeluarkan dari kuesioner. Selanjutnya disusun *Latent Variable Score* (LVS) berdasarkan kedelapan puluh dua pernyataan tersebut sesuai variabel masing-masing. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan kembali pada masing-masing variabel yang sudah dalam bentuk LVS untuk membentuk variabel utama (GUG). Uji tersebut sering disebut *Second Order Confirmatory Factor Analysis* (lampiran 3).

Dari Lampiran 3 pada pengujian pertama nampak VISIMISI memiliki *standardized loading factor* ≤ 0.5 , dan ETIKA, KREDIBEL, TRANSPARANSI dan OTONOMI memiliki *standardized loading factor* ≥ 0.5 namun dibawah 0.60. Sementara itu seluruh variabel memiliki *t-value* ≥ 1.96 . Nampak *Construct Reliability (CR)* ≥ 0.70 dan *Variance Extracted (VE)* ≤ 0.5 . Dengan demikian dilakukan proses pengujian kedua dengan menghilangkan variabel yang memiliki *standardized loading factor* ≤ 0.60 . Hasil pengujian tersebut menyisakan 4 variabel yang memiliki *standardized loading factor* ≥ 0.6 dengan *t-value* di atas 1.96 dan $CR \geq 0.70$ dan $VE \geq 0.5$.

Uji Kecocokan Model dan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan SEM, maka harus dipastikan telah terjadi kecocokan data dan model. Menurut Hair *et al.* (1998) evaluasi terhadap kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (1)

kecocokan keseluruhan model (*overall model fit*); (2) kecocokan model pengukuran (*measurement model fit*); dan (3) kecocokan model struktural (*Structural Model fit*). Hasil kecocokan keseluruhan model menunjukkan *Goodness of Fit Statistic is Perfect*.

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 0

Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.00)

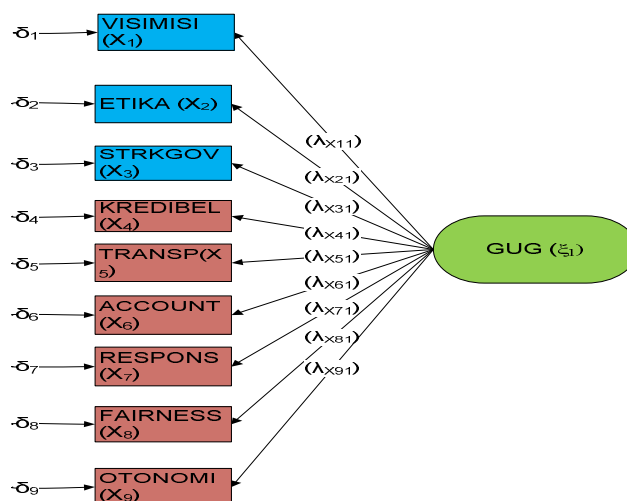
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00)

The Model is Saturated, the Fit is Perfect !

Hasil pengujian kedua untuk kecocokan model pengukuran variabel-variabel penelitian juga menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik.

Metode Analisis

Model penelitian disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 2. Variabel-variabel laten GUG secara keseluruhan direfleksikan oleh adanya visi dan misi yang jelas (VISIMISI), etika akademik (ETIKA), struktur *governance* (STRKGOV), kredibilitas (KREDIBEL), transparansi (TRANSP), akuntabilitas (ACCOUNT), *responsiveness* (RESPONS), *fairness* (FAIRNESS), dan otonomi (OTONOMI).



Gambar 2. Model Pengukuran GUG

Spesifikasi Model

Model pengukuran GUG di atas dapat dituliskan dalam notasi matematik sebagai berikut.

$$X_1 = \lambda_{X11}\xi_1 + \delta_1 \text{ atau}$$

$$\text{VISIMISI} = \lambda_{X11}\text{GUG} + \delta_1 \dots\dots\dots 1)$$

$$X_2 = \lambda_{X21}\xi_1 + \delta_2 \text{ atau}$$

$$\text{ETIKA} = \lambda_{X21}\text{GUG} + \delta_2 \dots\dots\dots 2)$$

$$X_3 = \lambda_{X31}\xi_1 + \delta_3 \text{ atau}$$

$$\text{STRKGOV} = \lambda_{X31}\text{GUG} + \delta_3 \dots\dots\dots 3)$$

$$X_4 = \lambda_{X41}\xi_1 + \delta_4 \text{ atau}$$

$$\text{KREDIBEL} = \lambda_{X41}\text{GUG} + \delta_4 \dots\dots\dots 4)$$

$$X_5 = \lambda_{X51}\xi_1 + \delta_5 \text{ atau}$$

$$\text{TRANSP} = \lambda_{X51}\text{GUG} + \delta_5 \dots\dots\dots 5)$$

$$X_6 = \lambda_{X61}\xi_1 + \delta_6 \text{ atau}$$

$$\text{ACCOUNT} = \lambda_{X61}\text{GUG} + \delta_6 \dots\dots\dots 6)$$

$$X_7 = \lambda_{X71}\xi_1 + \delta_7 \text{ atau}$$

$$\text{RESPONS} = \lambda_{X71}\text{GUG} + \delta_7 \dots\dots\dots 7)$$

$$X_8 = \lambda_{X81}\xi_1 + \delta_8 \text{ atau}$$

$$\text{FAIRNESS} = \lambda_{X81}\text{GUG} + \delta_8 \dots\dots\dots 8)$$

$$X_9 = \lambda_{X91}\xi_1 + \delta_9 \text{ atau}$$

$$\text{OTONOMI} = \lambda_{X91}\text{GUG} + \delta_9 \dots\dots\dots 9)$$

Modifikasi Model

Apabila kecocokan model dengan data telah terjadi, maka model dapat menjelaskan persamaan yang diinginkan. Namun sekiranya terdapat ketidakcocokan model dengan data, maka model harus dimodifikasi untuk meningkatkan hasil yang cocok (*fit*). Terdapat berbagai pilihan untuk memodifikasi model, tergantung kepada tingkat ketidakcocokan model dan data, umumnya melalui pengurangan atau penghilangan spesifikasi yang keliru. Program LISREL menyediakan informasi bagaimana model seharusnya dimodifikasi (Hatcher, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengujian kedua (pengujian akhir) menunjukkan bahwa Variabel-variabel penelitian menunjukkan validitas yang baik. Seluruh variabel memiliki t-value di atas 1.96. seluruh variabel memiliki SLF di atas 0.60. Demikian pula untuk reliabilitas seluruh variabel baik memiliki $CR \geq 0.70$ dan $VE \geq 0.50$.

Tabel 2. Hasil 2nd Order Confirmatory Analysis

No	Variabel Teramati	2nd Order Confirmatory Factor Analysis			
		Validitas		Reliabilitas	
		SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)
1	STRUKTUR GOVERNANCE (STRKGOV)	0.66	21.88		
2	AKUNTABILITAS (ACCOUNT)	0.66	20.10		
3	RESPONSIBILITAS (RESPONS)	0.68	22.52		
4	FAIRNESS (FAIRNES)	0.82	26.57		
	GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)			0.80	0.50

Pembahasan

Sebelum menganalisis hubungan antar variabel utama untuk menjawab tujuan penelitian ini akan dibahas variabel manifes yang merupakan refleksi variabel utama. Seperti diketahui bahwa penelitian ini memiliki 1 variabel utama,

yaitu GUG dengan 9 variabel manifes. Hasil estimasi model pengukuran GUG dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Pengukuran GUG

Indikator/ Variabel	Uji pertama			Uji kedua		
	t-value	Estimasi	R ²	t-value	estimasi	R ²
VISIMISI	3.11	0.098	0.0096			
ETIKA	19.29	0.14	0.32			
STRKGOV	23.43	0.66	0.44	21.88	0.66	0.43
KREDIBEL	8.01	0.26	0.066			
TRANSP	19.42	0.57	0.33			
ACCOUNT	22.04	0.64	0.41	20.1	0.66	0.43
RESPONS	24.12	0.68	0.46	22.52	0.68	0.46
FAIRNES	31.03	0.82	0.67	26.57	0.82	0.67
OTONOMI	16.7	0.51	0.26			
CR	0.81			0.80		
VE	0.35			0.50		

Nampak dari Tabel 3. Pada saat Uji pertama kali bahwa seluruh variabel manifes signifikan ($t\text{-value} > 1.96$), namun hasil VE di bawah 0.50 sehingga tidak memenuhi kriteria reliabilitas. Setelah dilakukan penghapusan variabel manifes yang memiliki nilai *standard loading factor* di bawah 0.60, hasil akhirnya adalah seperti yang termuat pada Tabel 3 bagian uji kedua dengan seluruh variabel valid dan memenuhi kriteria reliabilitas.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel *Fairness* merupakan refleksi GUG paling besar (0.82). Program Studi (Prodi) menghendaki adanya *key performance indicator* dalam menilai kinerja dan sistem remunerasi yang diterapkan secara luas. Prodi juga mengharapkan beasiswa untuk mahasiswa terus meningkat. Prodi menghendaki perwakilannya pada Senat Fakultas dapat terus aktif dan informatif atas hasil-hasil Rapat Senat ke Prodi.

Refleksi terbesar kedua adalah *Responsibilitas* (0.68). Sebagai wujud *responsibilitas* pengelolaan dan pengembangan, Prodi melakukan reanalisis kurikulum dan studi kelayakan kebutuhan berbasis kurikulum dan pasar, kegiatan

bersama dengan asosiasi dan atau masyarakat, dan melaksanakan kegiatan CSR, dalam 5 tahun terakhir ini.

Refleksi terbesar ketiga dan keempat adalah Struktur *Governance* dan Akuntabilitas (0.66). Berkenaan dengan Struktur *Governance*, fokus perhatian Prodi adalah kompetensi Tim Penilaian Angka Kredit dan Kepangkatan dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian pula Surat Keputusan pengangkatan Kaprodi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Penerbitan Laporan Akademik dan NonAkademik Prodi yang tepat waktu dan bermutu merupakan wujud dari hasil struktur *governance* yang baik. Prodi menghendaki sesedikit mungkin intervensi pemilik terhadap manajemen Prodi. Sebagai imbalannya, secara tejadwal Prodi dengan Dekanat melakukan rapat koordinasi dan manajemen yang menjadi mekanisme struktur *governance* dalam memantau kinerja Prodi.

Upaya mewujudkan Akuntabilitas dapat dilakukan melalui evaluasi pencapaian tujuan, prestasi mahasiswa, penyerapan lulusan yang terjadwal dan mekanisme evaluasi atas penyelenggaraan Prodi secara keseluruhan. Demikian pula tindakan pencegahan dan penanganan risiko terus dilakukan. Rapat manajemen Prodi sebagai tindak lanjut atas temuan audit mutu eksternal maupun internal harus dilakukan. Prodi percaya mekanisme penyebaran informasi tujuan institusi, prestasi mahasiswa, dan penyerapan lulusan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Program studi sebagai ujung tombak perguruan tinggi, kumpulan orang-orang yang memiliki idealisme pendidikan, memandang bahwa aspek prinsip-prinsip GUG adalah yang utama dalam meraih kinerja yang unggul. Prodi memandang bahwa aspek utama GUG yang meliputi aspek *Fairness*, *Responsibilitas*, Struktur *governance*, Akuntabilitas, merupakan hal yang signifikan dalam membangun GUG.

Secara keseluruhan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya penelitian ini membuktikan adanya perubahan komposisi dan faktor utama GUG. Variabel *Transparansi* yang dalam penelitian Muhi (2010) masuk sebagai variabel

utama GUG tidak terbukti. Demikian pula variabel VISIMISI (AWI/MCI Program, 2010), Otonomi (Hussin dan Assamirin, 2010), Kredibilitas dan Etika (Henard dan Mitterle, 2010) tidak terbukti.

Perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya boleh jadi terkait dengan konteks perguruan tinggi di Indonesia dan lebih dari 50% sampel berasal dari PTS dan juga sebagian besar berakreditasi C. Seperti diketahui penelitian ini tidak melakukan partisi antara PTS dan PTN.

Beberapa hal yang menarik dikemukakan adalah bahwa para pengelola program studi menyadari betapa pentingnya keadilan dan perlakuan yang fair atas kinerja mereka dan terhadap hak-hak mahasiswa. Selain itu optimalisasi suara perwakilan mereka pada Senat Fakultas sangat diharapkan. Program studi juga menyadari pentingnya perubahan melalui kurikulum yang berbasis kebutuhan konsumen, hubungan yang intens dengan masyarakat dan asosiasi. Program studi akuntansi menyadari bahwa untuk membangun struktur *governance* yang kuat harus beranjak dari kompetensi stakeholders utama mereka serta kejelasan tupoksi mereka. Mereka menghendaki diberikan keluasaan dalam mengelola manajemen program studi. Mereka memiliki komitmen atas penerbitan laporan dan koordinasi dengan dekanat.

Upaya meningkatkan akuntabilitas dapat dilakukan dengan penyebaran informasi yang masif, manajemen berbasis analisis risiko, dan evaluasi yang menyeluruh atas pencapaian tujuan yang telah digariskan baik untuk mereka, mahasiswa maupun institusi.

SIMPULAN

Hasil penelitian memberikan gambaran baru adanya perubahan komposisi faktor-faktor utama GUG yang selama ini dikenal (Transparansi, **Akuntabilitas, Responsibilitas**) menjadi Fairness, **Responsibilitas**, Struktur *Governance*, **Akuntabilitas**. Variabel lain seperti Transparansi (Muhi, 2010), VISIMISI (AWI/MCI Program, 2010), Otonomi (Hussin dan Assamirin, 2010), Kredibilitas dan Etika (Henard dan Mitterle, 2010) belum dapat dibuktikan oleh penelitian ini karena ketidakcukupan dalam memenuhi kriteria reliabilitas. Hal tersebut boleh

jadi karena faktor data yang didominasi oleh Program Studi Akuntansi dari PTS yang sebagian besar berakreditasi C. Selain itu dimungkinkan variabel lain yang tidak terbukti dalam penelitian ini karena secara prinsip variabel-variabel Transparansi, Visimisi, Otonomi, Kredibilitas dan Etika sudah diserap oleh keempat variabel yang dibuktikan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan mempartisi data PTN dan PTS untuk membuktikan sinyalemen bahwa Program Studi Akuntansi dari PTS yang sebagian besar berakreditasi C memiliki peran signifikan atas hasil tersebut. selain itu perlu dibuktikan apakah perbedaan status PTN dan PTS masih relevan dalam penentuan faktor-faktor utama GUG.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, A., Rieu-Clarke, A. 2010. *Good governance and IWRM—a legal perspective*.
- Beth V, Y., Yarbrough, R.M.1999. Governance Structure, Insider Status, and Boundary Maintenance. *Journal of Bioeconomics*. 1.3 pg 289-310
- Bikmoradi, A., Brommels, M., Shoghli, A., Khorasani-Zavareh, D., Masiello, I. 2010. Identifying challenges for academic leadership in medical universities in Iran. *Medical Education: 44: 459-467*
- Carter, C.B. dan J.W. Lorsch. 2004. *Back to the Drawing Board – Designing Corporate Boards for a Complex World*. Boston, MA: Harvard Business School Press
- Charan, R. 1998. *Boards at Work: How Corporate Boards Create Competitive Advantage*. San Francisco, CA: Jossey-Bass
- Chenhall, R.H. 2003. Management control system design within its organizational context: Findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 23(2-3), pp. 127-164.
- David, F.R. 2010. *Strategic Management-Manajemen Strategis*. Edisi. Keduabelas. Salemba Empat. Jakarta.
- David, F.R. 2006. *Manajemen strategis*. Salemba Empat. Jakarta
- David, K., Phillip, L.. 2005. Corporate Governance and Business Ethics in the Asia-Pacific Region. *Business and Society*; Jun 2005; 44, 2; ProQuest Sociology pg. 178

- Doll, W.J., Xia, W., Torkzadeh, G. 1994. Confirmatory Factor Analysis of the End User Computing Satisfaction Instrument, *MIS Quarterly*, December, 453-461
- Drucker, S.J. and Gumpert, G. 2007. Through the Looking Glass: Illusion of Transparency and the Cult of Information. *Journal of management Development*. Vol 26 No.6 Emerald Group Publishing Limited. USA
- Effendi, Sofian. 2003. Membangun *Good Governance*: Tugas Kita Bersama. *Prosiding Seminar nasional Meluruskan Jalan Reformasi*. UGM
- Forbes, D.P. dan F.J. Milliken. 1999. Cognition and corporate governance: understanding boards of directors as strategic decision-making groups. *Academic of Management Review*, 24, pp. 489-505
- Hair, J.F., Anderson, R.F., Tatham, R.L., Black, W.C. 1998. *Multivariate Data Analysis*, 5th Edition, Prentice Hall
- Henard, Fabrice., Mitterle. Alexander. 2010. *Governance and Quality Guidelines in Higher Education*. OECD
- Hendri, J. 2005. Beyond self-interest: agency theory and the board in a satisficing world. *British Journal of Management*, 16. Pp. 55-63
- Hussin, Sufean., Asimirin, Soaib. 2010. *University Governance and Development Autonomy*
- Igbaria, M., Zinatelli, N., Cragg, P., Cavaye, A.L.M. 1997. Personal Computing Acceptable Factors in Small Firms: A Structural Equation Model. *MIS Quarterly*, September, 279-299
- Indrajit, R.E., Djokopranoto, R. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Andi. Yogyakarta
- Kim, Terri. 2008. Changing university governance dan manajemen in the U.K. and elsewhere under market conditions: issues of quality assurance and accountability. *Intellectual Economics*. No 2(4) pp35-42
- Kotter, J.P. 1996. *Leading Change*. Boston, MA: Harvard Business School Press,
- Madueke, C.N.Z. 2008. *The Role of Leadership in Governance: The Nigerian Experience*. Walden University
- Mangkuprawira, T.S. 2009. *Bisnis, Manajemen dan Sumber Daya Manusia*, IPB Press. Bogor.
- Miller, D. 1988. Relating Porter's Business Strategies to Environment and Structure: Analysis and Performance Implications. *The Academy of Management Journal*, 31 (2), 280-308
- Muhi, A.H. 2010. *Implementasi Nilai-nilai Good Governance di Perguruan Tinggi*. Sekolah Pascasarjana UPI. Bandung

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2005. *Guidelines for Quality Provision in cross-border Education*. OECD/Unesco. Paris
- Osborne, David., Gaebler, Ted. 2000. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Pressindo. Jakarta
- Ridgon, E.E., dan Ferguson, C.E. 1991. The Performance of the Polychoric Correlation Coefficient and Selected Fitting Function in Confirmatory Factor Analysis with Ordinal Data, *Journal of Marketing Research*, 28, November, 491-497
- Salmi, J. 2009. The Growing Accountability Agenda in Tertiary education: Progress or Mixed Blessing"? *Education Working Paper Series N 16*. Washington, DC. World Bank
- STISI Telkom. 2011. *Survey Good University Governance (GUG) STISI Telkom*
- Surya, Indra., Yustivandana, Ivan., 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. LKPMK dan Fakultas Hukum UI. Jakarta
- The Arabic World Initiative (AWI)/The Merseille Center for mediterranean Integration (MCI) Program. 2010. *Building a University Governance Score Card*.
- Tierney, W.G.. 2006. *Governance and the Public Good*. State University of New York Press. Albany.
- Vigoda, E. 2002. From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next generation of Public Administration. *Public Administration Review- Educational Journal*. Vol 62. No 5. Spet/oct.
- Wijanto, Setyo Hari. 2008. *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta

Lampiran 1.
Rangkuman Hasil Penelitian Sebelumnya Terkait Variabel-Variabel Utama Penelitian dan Senjangan Penelitian

No	Variabel Utama	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Senjangan Penelitian
Variabel GUG					
1	Nilai-nilai GUG (transparansi, akuntabilitas, <i>responsiveness</i>), budaya akademik, prakarsa, dan kinerja mutu layanan akademik di PT	Muhi, A.H., 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Menguji kontribusi nilai-nilai GUG terhadap budaya akademik dan prakarsa serta dampaknya pada mutu layanan akademik di Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai GUG berpengaruh terhadap kinerja mutu layanan akademik melalui budaya akademik dan prakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil survey di 2 PTN BHMN sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati • Tidak menguji GUG dalam kerangka kontinjensi yang menggali aspek manajemen dan strategi • Belum sampai pada pembentukan model GUG
2	Dimensi GUG (transparansi, akuntabilitas, <i>responsiveness</i>), pendukung GUG (budaya akademik, prakarsa), dampak implementasi GUG (mutu layanan akademik)	STISI Telkom, 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi faktor-faktor GUG (transparansi, akuntabilitas, <i>responsiveness</i>), faktor pendukung GUG (budaya akademik, prakarsa), dan dampak implementasi GUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif statistik survey GUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey implementasi GUG pada satu PT saja. • Tidak melakukan uji inferensi faktor-faktor GUG dengan pendukung dan dampak implementasi

No	Variabel Utama	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Senjangan Penelitian
			(mutu layanan akademik)		
3	Tata pamong PT dan pengembangan otonomi	Hussin dan Asimirin, 2010	<ul style="list-style-type: none"> •Mengkaji tata pamong PT dan otonomi PT 	<ul style="list-style-type: none"> • kajian tata pamong PT harus mempertimbangkan konteks tempat PT berada baik konteks internal-eksternal dan nasional-internasional, prinsip-prinsip, nilai dasar, dan keyakinan adiluhung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkapkan banyak dimensi dan tantangan GUG dan otonomi, namun belum memberikan arah yang jelas akan model GUG
4	Konteks, misi dan goal, struktur <i>governance</i> , manajemen, otonomi, akuntabilitas, partisipasi	AWI/MCI Program, 2010	<ul style="list-style-type: none"> •Membangun GUG <i>scorecard</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan model GUG yang relatif komprehensif melibatkan GUG, konteks, dan manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum teruji GUG <i>scorecard</i> karena belum dilakukan uji inferensi dengan dampak atau implementasinya pada setting dan lingkungan yang berbeda
5	Dimensi, nilai-nilai dan prinsip GUG di negara-negara anggota OECD	Henard dan Mitterle, 2010	<ul style="list-style-type: none"> •Menyajikan prinsip-prinsip <i>governance</i> di berbagai negara dan panduan mutu di PT 	<ul style="list-style-type: none"> • Paparan komprehensif akan dimensi dan prinsip-prinsip GUG dan panduan mutu PT 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas prinsip-prinsip <i>governance</i> pada berbagai negara belum diuji secara mendalam • Menyarankan mengaitkan GUG dengan strategi PT

Lampiran 2. Hasil *First Confirmatory Factor Analysis*

No	Variabel Teramati	Akhir				Akhir			
		Validitas		Reliabilitas		Validitas		Reliabilitas	
		SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)	SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)
1	VM1	0.13	4.24			0.68	26.19		
2	VM2	0.12	4.01			0.71	27.74		
3	VM3	0.29	9.75			0.77	31.54		
4	VM4	0.31	10.48			0.57	20.91		
5	VM5	-0.02	(0.71)						
6	VM6	0.3	(10.13)						
7	VM7	0.19	6.26			0.69	26.97		
8	VM8	0	0.08						
9	VM9	0.13	4.34						
10	VM10	0.22	7.36			0.76	30.49		
11	VM11	0.21	7.04			0.71	27.88		
12	VM12	0.05	1.82						
13	VM13	0	(0.12)						
14	VM14	-0.03	(1.01)						
15	VM15	0.26	8.82			0.54	19.71		
16	VM16	0.76	30.19			0.87	38.19		
17	VM17	0.87	37.13			0.79	32.33		
18	VM18	0.64	23.86			0.70	27.41		
19	VM19	0.79	31.73			0.86	37.45		
20	VM20	0.89	38.34			0.76	30.96		
	VISIMISI			0.70	0.18			0.94	0.53
21	ET21 (ETIKA)	**	**	**	**	0.96	**	0.94	0.94
22	STR22	0.87	34.31			0.82	34.59		
23	STR23	0.92	36.99			0.81	33.64		
24	STR24	0.5	17.49			0.77	31.03		
25	STR25	0.24	8.07			0.68	26.20		
26	STR26	0.04	1.30						
27	STR27	0.21	6.94						
28	STR28	0.32	10.67			0.92	41.73		
29	STR29	0.35	11.92			0.81	33.77		
	STRUKTUR GOVERNANCE			0.67	0.27			0.92	0.65
30	KRED30	0.75	30.02			0.76	30.52		
31	KRED31	0.97	46.11			0.97	46.12		
32	KRED32	0.60	22.43			0.59	21.94		
33	KRED33	-0.41	(14.34)						
34	KRED34	0.41	14.36						
	KREDIBILITAS			0.66	0.44			0.83	0.62
35	TRAN35	0.46	15.09						
36	TRAN36	0.53	17.61						
37	TRAN37	0.29	9.10						
38	TRAN38	0.71	25.15			0.64	21.39		
39	TRAN39	0.78	27.76			0.86	27.77		
40	TRAN40	0.63	21.60			0.67	22.20		
	TRANSPARANSI			0.92	0.68			0.77	0.53
41	ACC41	0.45	14.92						
42	ACC42	0.63	21.66			0.87	38.16		
43	ACC43	0.67	23.65			0.91	40.69		
44	ACC44	0.62	21.21			0.94	43.79		
45	ACC45	0.2	6.42						
46	ACC46	0.64	22.25			0.52	18.90		
47	ACC47	0.71	25.28			0.56	20.43		
	AKUNTABILITAS			0.77	0.34			0.88	0.61

Lampiran 2. Hasil First Confirmatory Factor Analysis...lanjutan

No	Variabel Teramati	Akhir				Akhir			
		Validitas		Reliabilitas		Validitas		Reliabilitas	
		SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)	SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)
48	RESP48	0.81	31.00			0.81	31.00		
49	RESP49	0.85	33.14			0.85	33.14		
50	RESP50	0.68	24.89			0.68	24.89		
51	RESP51	0.60	21.51			0.60	21.51		
	RESPONSIBILITAS			0.83	0.55			0.83	0.55
52	FAIR52	0.53	14.69			0.91	40.68		
53	FAIR53	0.27	7.49			0.85	36.79		
54	FAIR54	0.66	17.09			0.96	44.83		
55	FAIR55	0.59	15.95			0.94	43.15		
	FAIRNESS			0.59	0.28			0.95	0.84
56	OTO56	0.5	16.34						
57	OTO57	0.67	27.71			0.92	41.49		
58	OTO58	0.7	25.97			0.64	24.03		
59	OTO59	0.41	10.15						
60	OTO60	0.57	25.25			0.55	20.11		
61	OTO61	0.66	22.58			0.67	25.48		
62	OTO62	0.67	23.17			0.89	39.51		
63	OTO63	0.62	19.34			0.55	20.13		
	OTONOMI			0.82	0.37			0.86	0.52

Lampiran 3. Second Order Confirmatory Factor Analysis

Uji pertama

No	Variabel Teramati	2nd Order Confirmatory Factor Analysis			
		Validitas		Reliabilitas	
		SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)
1	VISIMISI	0.1	3.11		
2	ETIKA	0.57	19.29		
3	STRUKTUR GOVERNANCE (STRKGOV)	0.66	23.43		
4	KREDIBEL	0.26	8.01		
5	TRANSPARANSI	0.57	19.42		
6	AKUNTABILITAS (ACCOUNT)	0.64	22.04		
7	RESPONSIBILITAS (RESPONS)	0.68	24.12		
8	FAIRNESS (FAIRNES)	0.82	31.03		
9	OTONOMI	0.51	16.7		
	GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)			0.81	0.35

Uji kedua

No	Variabel Teramati	2nd Order Confirmatory Factor Analysis			
		Validitas		Reliabilitas	
		SLF	t-value	Construct Reliability (CR \geq 0.70)	Variance Extracted (VE \geq 0.50)
1	STRUKTUR GOVERNANCE (STRKGOV)	0.66	21.88		
2	AKUNTABILITAS (ACCOUNT)	0.66	20.10		
3	RESPONSIBILITAS (RESPONS)	0.68	22.52		
4	FAIRNESS (FAIRNES)	0.82	26.57		
	GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)			0.80	0.50

Lampiran 4. Definisi Operasional

Good University Governance (GUG)

Good University Governance (GUG) adalah penerapan prinsip-prinsip dasar “*good governance*” dalam sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (UNDP dan World Bank dalam Effendi (2003) dan OECD (2005)). GUG adalah variabel laten yang dikonstruksi oleh VISIMISI, ETIKA, STRKGOV, KREDIBEL, TRANSP, ACCOUNT, RESPON, FAIRNESS, dan OTONOMI.

1) Visi, misi dan Tujuan yang efektif (VISIMISI)

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi merupakan cita-cita tentang keadaan di masa depan yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personel organisasi, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Misi merupakan penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah dimengerti bagi seluruh staf organisasi.

Tujuan adalah hasil-hasil spesifik yang ingin diraih oleh suatu organisasi terkait dengan misi dasarnya. Selanjutnya diadakan evaluasi normatif atas visi, misi, dan tujuan atas kesesuaiannya dengan karakteristik dimensi visi, misi, dan tujuan yang efektif sebagai berikut.

Tabel 2. Karakteristik Visi yang Efektif

No.	Dimensi	Kriteria
1.	<i>Graphic</i>	Menggambarkan program studi yang berusaha untuk diciptakan manajemen dan posisi pasar yang hendak dicapai
2.	<i>Directional</i>	Berpandangan ke depan, memberikan gambaran strategik dan manajemen, juga produk, pasar, pelanggan, perubahan teknologi yang akan menolong program studi di masa depan
3.	<i>Focused</i>	Spesifik sehingga mampu memberikan panduan bagi para manajer dalam membuat keputusan dan menggunakan sumberdaya
4.	<i>Flexible</i>	Tidak dibuat untuk berlaku pada segala waktu, tetapi dapat disesuaikan seiring dengan perubahan pasar, teknologi, dan pelanggan di masa depan
5.	<i>Feasible</i>	Dapat dicapai oleh program studi pada waktunya dan mudah dilaksanakan
6.	<i>Desirable</i>	Memberikan tantangan untuk pencapaian tujuan jangka panjang
7.	<i>Easy to Communicate</i>	Dapat dijelaskan dalam 5-10 menit dan idealnya dapat disederhanakan dalam kalimat singkat

Sumber: Kotter (1996)

Tabel 3. Karakteristik Misi yang Efektif

No.	Dimensi	Parameter/ Karakteristik
1.	Pelanggan	Siapa pelanggan program studi?
2.	Produk atau jasa	Apa produk dan jasa utama program studi?
3.	Pasar	Secara geografis, di mana program studi berkompetisi?
4.	Teknologi	Apakah program studi menerapkan teknologi terbaru?
5.	Fokus pada <i>sustainability, growth, dan profitabilitas</i>	Apakah program studi berkomitmen untuk pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik?
6.	Filosofi	Apa dasar-dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etika program studi?
7.	Konsep diri	Apakah kemampuan khusus atau keunggulan program studi?
8.	Fokus citra publik	Apakah program studi responsif terhadap pemikiran sosial dan masyarakat?
9.	Fokus karyawan	Apakah karyawan merupakan aset berharga bagi program studi?

Sumber: David (2006)

Tabel 4. Karakteristik Tujuan yang Efektif

No.	Dimensi	Parameter/ Karakteristik
1.	<i>Specific</i>	Menjelaskan secara khusus mengenai apa yang ingin dicapai oleh program studi
2.	<i>Measurable</i>	Ukuran kuantitatif dan <i>timeline</i> terhadap hasil yang ingin dicapai
3.	<i>Achievable</i>	Realistis terhadap apa yang ingin dicapai
4.	<i>Realistic</i>	Faktor tercapainya tujuan program studi dikaitkan dengan lingkungan keseluruhannya
5.	<i>Time-related</i>	Ada batas waktu pencapaian tujuan secara jelas

Sumber: Ducker (2001)

2) Nilai, etika, moral akademik (ETIKA)

ETIKA merupakan keyakinan dasar, pandangan hidup yang digali dari filosofi dan nilai-nilai luhur yang dianut dan diterima secara umum oleh *stakeholders* (Indrajit dan Djokopranoto, 2006). Indikator ini dapat diukur dengan melihat ada tidaknya kode etik dosen dan akademik yang tertulis dan pengetahuan dosen dan civitas akademika atas ETIKA tersebut. Selain itu dilihat pula penegakan ETIKA tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut setidaknya menunjukkan keinginan Program Studi untuk menjadikan etika sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak.

3) Struktur *Governance* (STRKGOV)

Disarikan dari AWI/MCI Program (2010) dan Indrajit dan Djokopranoto (2006) Struktur *Governance* merupakan struktur yang direfleksikan oleh hubungan antar *stakeholders* didalamnya. Indikator untuk mengukur konstruk struktur *governance* adalah sebagai berikut.

- a. badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; diukur dengan melihat kompetensi tim penilaian angka kredit dan kepangkatan dalam memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen. Selain itu juga diukur dengan kompetensi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam memutuskan kenaikan jabatan fungsional dan struktural.
- b. SK pengangkatan ketua program studi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas.

- c. laporan berkala program studi, diukur dengan melihat penjadwalan penerbitan Laporan Akademik dan NonAkademik Program Studi
- d. Tidak adanya afiliasi ketua program studi dengan pimpinan di atasnya, diukur dengan melihat hubungan/afiliasi saudara sedarah semenda antara ketua program studi dan pimpinan di atasnya maupun dibawahnya
- e. keterpisahan antara penyelenggara dan pemilik, diukur dengan melihat keterpisahan personel manajemen program studi dan pemilik perguruan tinggi. Selain itu dilihat pula tingkat intervensi pemilik terhadap manajemen program studi
- f. rapat berkala program studi dengan dekanat, dilihat dari penjadwalannya.

4) Kredibilitas (KREDIBEL)

Disarikan dari AWI/MCI Program (2010), KREDIBEL merupakan kredibilitas ketua program studi khususnya dalam kompetensi akademik, integritas, kecerdasan, *leadership* dan kapasitas manajerial. Indikator untuk mengukur KREDIBEL adalah.

- a. Latar belakang pendidikan ketua program studi baik formal maupun profesi dan keanggotaan dalam asosiasi (IAI)
- b. Pengalaman organisasi ketua program studi atau dalam ad hoc di luar program studi
- c. Pencapaian target yang direncanakan oleh program studi selama ketua program studi menjabat
- d. Kenaikan pangkat akademik ketua program studi sesuai jadwal
- e. Pengalaman pengabdian masyarakat ketua program studi yang diakui

5) Transparansi (TRANSP)

TRANSP merupakan ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengikuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Dapat dilihat dari adanya sistem dan standar akuntansi untuk menjamin kualitas laporan keuangan

dan pengungkapannya, pengembangan *management information system* (MIS) untuk menjamin pengukuran kinerja dan keefektifan proses pengambilan keputusan, pengembangan manajemen risiko PT untuk menjamin bahwa seluruh risiko signifikan telah diidentifikasi, dan diukur dan dikelola hingga batas toleransi. Dengan demikian indikator untuk mengukur variabel transparansi adalah.

- a. keberadaan Laporan keuangan dan Laporan akademik Program Studi
- b. ketepatan penerbitan Laporan keuangan dan Laporan akademik Program Studi
- c. adanya audit atas Laporan keuangan Program Studi atau institusi Perguruan Tinggi
- d. Aksesabilitas Laporan keuangan dan laporan akademik Program Studi
- e. Aksesabilitas Informasi tentang Program Studi melalui ICT
- f. Aksesabilitas Notulen rapat Program Studi

6) Akuntabilitas (ACCOUNT)

Beranjak dari AWI/MCI Program (2010), ACCOUNT merupakan tuntutan agar manajemen memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan dari *stakeholders* atas berbagai *corporate action* yang mereka lakukan. ACCOUNT meliputi kejelasan definisi jalur akuntabilitas: staf akademik, staf manajerial, staf administrasi, badan *governance*; Proses untuk evaluasi penyelesaian goal institusi; Diseminasi informasi: goal institusi, prestasi mahasiswa, penyerapan pasar lulusan, evaluasi institusional (internal dan eksternal), akreditasi; Metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa, staf pengajar, staf administrasi, dan staf manajerial; Pemeriksaan keuangan: proses pemeriksaan akun perguruan tinggi; Pencegahan risiko; dan mekanisme penanganan *misconduct*. Dengan demikian indikator untuk mengukur konstruk ACCOUNT sebagai berikut.

- a. kejelasan jalur pertanggungjawaban Ketua Program Studi
- b. adanya penjadwalan evaluasi pencapaian tujuan, prestasi mahasiswa, penyerapan lulusan
- c. dilakukannya tindakan pencegahan dan penanganan risiko

- d. adanya mekanisme dan pelaksanaan penyebaran informasi tujuan institusi, prestasi mahasiswa, penyerapan lulusan
- e. peringkat Akreditasi BAN PT untuk Program Studi
- f. Adanya rapat manajemen Program Studi sebagai tindak lanjut atas temuan audit mutu eksternal maupun internal
- g. Mekanisme evaluasi atas penyelenggaraan Program Studi yang ajek dan sistematis

7) *Responsiveness* (RESPONS)

RESPONS merupakan kemampuan pihak Program Studi menangkap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dinamika penyelenggaraan Program Studi. Selain itu merupakan upaya respon Program Studi atas harapan-harapan *stakeholders* dan penyikapan permasalahan yang terjadi. Program Studi dituntut responsif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan mampu bertindak atau berpartisipasi untuk menyikapinya. Dapat dilihat sebagai kepedulian atas tanggung jawab sosial dan penjaminan suasana dan lingkungan akademik yang kondusif. Dengan demikian konstruk RESPONS dapat diukur dengan indikator sebagai berikut.

- a. Adanya kegiatan reanalisis kurikulum secara berkala
- b. Adanya kegiatan studi kebutuhan berbasis kurikulum dan pasar
- c. Adanya kegiatan bersama prodi dengan asosiasi dan atau masyarakat
- d. Adanya kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) Program Studi atau institusi

8) *Fairness* (FAIRNESS)

FAIRNESS merupakan perlindungan bagi *stakeholders* minoritas baik dari segi gender, ekonomi, geografi, terlindungi dari kecurangan-kecurangan, *self dealing* atau kekeliruan tindakan. Sistem peran dan tanggung jawab struktural, manajemen dan komite dan remunerasi yang adil (*performance based*). Dengan demikian konstruk FAIRNESS dapat diukur melalui indikator sebagai berikut.

- a. Adanya *key performance indicator* dalam menilai kinerja dan penerapannya serta menjadi dasar penilaian kinerja

- b. Adanya skema subsidi dan alokasi biaya pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu
 - c. Adanya sistem remunerasi dan penerapannya termasuk menjadi dasar penghargaan bagi staf
 - d. Adanya perwakilan program studi pada senat fakultas dan keefektivannya
- 9) Otonomi (OTONOMI)

Bersumber dari AWI/MCI Program (2010), OTONOMI merupakan otonomi Program Studi dari aspek akademik, finansial, dan pengembangan SDM. Otonomi akademik meliputi otonomi penentuan struktur akademik, kebijakan penerimaan mahasiswa, mekanisme jaminan mutu, pembukaan program baru, penerimaan tiap program, evaluasi hasil pembelajaran, dan evaluasi metode pengajaran. OTONOMI meliputi otonomi dalam menggali dana, perjanjian kontrak kerjasama, kepemilikan aset, memperoleh pinjaman. Sementara otonomi pengembangan SDM meliputi *staffing*: kebijakan SDM, peran dan tanggung jawab yang terlibat, kemampuan merekrut staf (akademik dan administratif), kebijakan pengembangan karir, kinerja manajemen, dan mekanisme menilai kinerja. Dengan demikian indikator untuk pengukuran untuk konstruk OTONOMI adalah sebagai.

- a. penentuan struktur akademik
- b. penentuan kebijakan penerimaan mahasiswa
- c. penentuan mekanisme jaminan mutu
- d. metode pengajaran dan evaluasi hasil belajar
- e. Pembukaan Program Studi /Jurusan baru
- f. memperoleh dan menggali dana
- g. kontrak kerjasama
- h. Perekrutan dosen dan staf

Lampiran 5. Perbandingan Aspek GUG Hasil Penelitian dengan Literatur Sebelumnya

Hasil penelitian	Efendi (2003) & LAN dan BPKP (2000)		Henard dan Mitterle (2010)			AWI/MCI Program (2010)	Muhi, A.H (2010), STISI Telkom (2011)	Hussin dan Asimirin (2010)
	ADB	UNDP	Inggris Raya & Skotlandia	Irlandia	Kanada			
Fairness Responsibilitas Struktur governance Akuntabilitas Transparansi Otonomi Kredibilitas Etika Visimisi	Akuntability Transparency Prediktability Partisipation	Participation rule of law Transparency Responsiveness Concensus orientation equity and inclusiveness Effectiveness and efficiency Accountability Strategic vision	Selflessness, Integrity, Objectivity, Accountability, Openness, Honesty, Leadership	Selflessness, Integrity, Objectivity, Accountability, Openness, Honesty, Leadership Transparency, Fairness, Independence, Efficiency effectiveness, Value for money	impartially independence loyalty to the institution	Konteks, misi dan goal, Struktur governance, Manajemen, Otonomi, Akuntabilitas, Partisipasi.	transparansi, akuntabilitas, responsiveness	Tata Pamong (Struktur Governance) Otonomi

ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP HARGA SAHAM DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Dwi Wulandari
Universitas Negeri Malang
Email: wulan501@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to understand the impact of monetary variables (inflation, interest rate, exchange rate and money supply) to stock prices in two ASEAN countries namely Indonesia and Singapore. These countries has different characteristic than stock market in other countries because their stock market has experienced two big crises. Monetary policy of their government has serious impact on how these countries managed their financial markets. It was found that there were different variables affecting stock price in these countries. In Indonesia, stock prices are affected by stock prices in the past. In Singapore, stock prices are affected by the inflation rate.

Key words: stock price, inflation, interest rate, exchange rate, money supply, Indonesia, Singapura

A. PENDAHULUAN

Penelitian tentang faktor-faktor apakah yang mempengaruhi harga saham di ASEAN sampai saat ini belum banyak dilakukan, kecuali pada saat periode krisis moneter tahun 1997. Hasil penelitian terdahulu pun sangat bervariasi dan belum dapat menjelaskan sebenarnya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi harga saham di pasar modal yang ada di ASEAN. Atmadja (2004) yang meneliti hubungan kausalitas antara variabel ekonomi makro dan harga saham di ASEAN pada periode krisis moneter di Indonesia, menyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara variabel ekonomi makro dan harga saham di ASEAN. Sedangkan Harjito (2004) menemukan adanya kausalitas antara nilai tukar dan harga saham di ASEAN dimana nilai tukar Singapura adalah yang sifatnya paling dominan. Kirativanich (2000) juga tidak menemukan hubungan antara variabel ekonomi makro dan harga saham di ASEAN kecuali untuk Indonesia yang harga sahamnya dipengaruhi oleh inflasi dan jumlah uang beredar. Setelah berakhirnya krisis moneter, belum ada lagi penelitian yang membahas tentang variabel apakah yang berpengaruh terhadap harga saham di ASEAN.

Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergerakan harga saham sangat penting bagi seorang investor. Apabila ingin mendapatkan keuntungan, seorang investor harus pandai membaca pasar dan memahami faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap harga saham, sehingga investor tersebut bisa memprediksikan harga saham dan memperoleh keuntungan.

Pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap harga saham, coba dijelaskan dengan sejumlah teori oleh sejumlah ekonom misalnya dengan teori *The one period valuation model*, *Generalized Dividend Valuation Model*, *The Gordon Growth Model*, *The Efficient Market Hypothesis* yang lalu ditentang dengan sejumlah argumen. Tetapi model-model ini kurang bisa menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di ASEAN, salah satu cara awal yang bisa dilakukan adalah melihat karakteristik pasar modal di ASEAN. Karakteristik bursa saham di ASEAN, tentu saja berbeda dengan negara-negara lain di dunia, sehingga teori konvensional mungkin tidak bisa menjelaskan pola pergerakan harga saham di negara-negara yang sudah dua kali mengalami krisis yang cukup berat ini.

Liberalisasi pasar keuangan di negara ASEAN termasuk di Indonesia dan Singapura pada tahun 1980an menghasilkan aliran modal masuk yang cukup besar di negara-negara tersebut. Terjadilah ekspansi pasar keuangan dan pasar modal. Tetapi liberalisasi ini tidak didukung dengan regulasi dan pengawasan sistem keuangan yang kuat sehingga justru memicu krisis moneter pada tahun 1997. Krisis yang terjadi ini tidak hanya menyerang pasar keuangan dan pasar saham di ASEAN tetapi juga menyerang fundamental ekonomi makro negara-negara tersebut yang ditandai dengan inflasi dan suku bunga yang tinggi, nilai tukar yang terdepresiasi dan pasar saham berada dalam kondisi resesi (Atmadja, 2004).

Kondisi pasar modal dan pasar keuangan sejak 1999 mulai membaik. Terjadi apresiasi mata uang serta penurunan inflasi dan suku bunga pada negara-negara ini. Pada 2008, sekali lagi terjadi krisis global yang dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia termasuk ke negara-negara ASEAN, meskipun secara kasat mata, dampaknya tidak seluas krisis moneter 1997. Pada setiap krisis yang terjadi, setiap kali terjadi pelemahan di pasar keuangan dan pasar modal, maka terjadi pula pelemahan pada variabel-variabel ekonomi makro di negara-negara tersebut. Ini mengindikasikan adanya hubungan antara pasar saham dan variabel-variabel ekonomi makro negara-negara ASEAN.

Pergerakan indeks harga saham sangat sensitif terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi dan perubahan ekspektasi tentang prospek di masa depan. Ekspektasi akan dipengaruhi oleh fundamental mikro dan makro yang bisa terbentuk secara rasional atau adaptif terhadap fundamental ekonomi dan bersifat subyektif yang tidak bisa diduga dan dihitung (Ahmad dan Ahmed, 2006)

Variabel ekonomi makro dapat dihubungkan dengan harga saham melalui *Arbitrage Pricing Theory* (APT) (Ross, 1976), dimana beberapa faktor resiko dapat menjelaskan *return* asset. Studi empiris yang berdasar pada APT menghubungkan variabel ekonomi makro dengan harga saham, menggunakan model hubungan jangka pendek misalnya penelitian yang dilakukan oleh Fama (1981), Fama dan French (1989), Schwert (1981), Ferson dan Harvey (1991) dan Fraser dan Power (1997). Secara umum penelitian-penelitian ini menemukan hubungan signifikan antara harga saham dengan perubahan variabel-variabel ekonomi makro (Humpe dan Mc Millan, 2007)

Kelemahan model ini adalah karena dasarnya adalah data historis maka model ini hanya cocok apabila kondisi relatif stabil, sedangkan pada saat kondisi tidak stabil, maka koefisien beta yang diestimasi, mungkin tidak berhubungan dengan nilai yang diharapkan (Goetzmann, 2006). Selain itu dalam model ini tidak dijelaskan variabel ekonomi yang mana yang akan mempengaruhi harga saham (DeStefano, 2000, Kim, 1987)

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian melalui dampaknya pada penilaian saham. Hal ini dijelaskan oleh *Tobin's q theory*. Kebijakan moneter mempengaruhi harga saham dengan cara ketika kebijakan moneter bersifat ekspansioner, masyarakat akan memiliki uang lebih dan meningkatkan pengeluaran. Salah satu tempat mengeluarkan uang adalah pasar modal (dengan membeli saham). Hal ini akan meningkatkan permintaan saham dan menaikkan harga saham.

Pendekatan alternatif lain adalah *Discounted Cash Flow (DCF)* atau *Present Value Model (PVM)*. Secara formal, metode DCF ini pertama kali digunakan oleh John Burr Williams pada 1938 pada karyanya yang berjudul "*The Theory of Investment Value*". Model ini menghubungkan harga saham dengan *expected cash flow* dan *discount rate* dari aliran kas ini. Maka variabel-variabel yang mempengaruhi *expected cash flow* atau mempengaruhi *discount rate* akan berpengaruh terhadap harga saham (Humpe dan Mc Millan, 2007).

Apabila kita melihat dari sudut pandang ekonomi, ketika saham diklaim sebagai asset keuangan dan alat menabung bagi konsumen, sangat mungkin ada hubungan antara harga saham dengan variabel ekonomi makro (DeStefano, 2000). Hubungan ini telah banyak diteliti di negara-negara maju. Tetapi di negara-negara berkembang yang pasar modalnya masih baru tumbuh, sangat sedikit penelitian tentang hal ini karena ukuran pasar yang kecil dan lokasi geografisnya. Beberapa tahun terakhir ini, sudah dimulai penelitian tentang hal ini di negara-negara berkembang misalnya India, Ghana, Srilanka dan Turki. Meskipun hubungan antara harga saham dan variabel ekonomi makro telah banyak diteliti, hasilnya tidak konsisten dan hubungannya tidak dimengerti dengan baik (DeStefano, 2000). Pengaruh variabel moneter terhadap harga saham di negara-negara Asia yang pasar modalnya tidak semaju negara-negara maju juga tidak begitu jelas (Kwon, 1999), sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut di area ini.

Ada banyak penelitian terdahulu yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi makro dengan harga saham. Dimulai oleh Fama pada 1981, yang menemukan bahwa pergerakan variabel ekonomi makro dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham. Tiap peneliti menggunakan variabel-variabel ekonomi makro yang berbeda-beda karena memang belum ada konsensus variabel ekonomi makro mana yang berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian pada *emerging markets* terutama disebabkan karena ekspansi perdagangan internasional dan adanya liberalisasi. Selain itu adanya kebutuhan untuk diversifikasi oleh manajer portofolio internasional. Liberalisasi pada negara-negara ini diharapkan meningkatkan integrasi negara-negara ini dengan perekonomian dunia dan mengurangi biaya modal. Proses integrasi akan sangat berhubungan dengan kebijakan ekonomi makro yang diadopsi di negara-negara tersebut. Kebijakan ekonomi makro yang dijalankan juga berhubungan dengan tingkat integrasi global dari suatu negara. Maka hubungan antara variabel ekonomi makro dan harga saham penting untuk memahami *emerging markets* (Muradoglu *et al.* 2001)

Salah satu variabel ekonomi makro yang sering digunakan adalah inflasi. Beberapa penelitian menemukan hubungan signifikan antara inflasi dengan harga saham. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fama (1981), Schwert (1981), Gultekin (1983), Geske dan Roll (1983), Mukherjee dan Naka (1995), Adrangi (2000) di Brazil, Udegbumam *et al.* (2001) di Nigeria, Wongbangpo dan Sharma (2002) di negara-negara ASEAN, Gunasekarage *et al.* (2004) di *South Asia*, Maysami *et al.* (2004) di Singapura, Islam *et al.* (2004) di Thailand, Chakravarty (2005) di India, Haruman *et al.* (2005) di Indonesia, Nishat dan Shaheen (2005) di Pakistan,

Erbaykal *et al.* (2006) di Turki. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rapach (2001) di enam belas negara industri tidak menemukan hubungan yang signifikan antara inflasi dan harga saham. Hubungan yang tidak stabil ditemukan oleh Graham (2006) yang meneliti di Amerika Serikat pada periode 1953-1990. Hubungan bersifat negatif sebelum 1976 dan setelah 1982, tetapi bersifat positif antara kedua tahun tersebut. Instabilitas ini mungkin disebabkan karena pergeseran dari kebijakan moneter *counter cyclical* ke *pro cyclical* pada 1976 dan kembali ke *counter cyclical* pada 1982. Laopodis (2006) menemukan hubungan negatif lemah antara inflasi dan harga saham di AS pada periode 1970-1980.

Meskipun banyak penelitian yang menemukan signifikansi antara inflasi dan harga saham, arah hubungan dari inflasi dan harga saham masih perlu diteliti lebih lanjut. Secara teoritis, inflasi yang tidak diantisipasi berpengaruh negatif terhadap harga saham melalui perubahan tingkat harga yang tidak diantisipasi. Ketidakpastian inflasi juga mempengaruhi *discount rate* yang akan mengurangi *present value* dari aliran kas perusahaan. Menurut DeFina (1991), kenaikan inflasi memiliki dampak negatif terhadap pendapatan perusahaan karena naiknya biaya perusahaan dan lambatnya penyesuaian harga output, mengurangi keuntungan dan lalu menurunkan harga saham. Tetapi ada juga penelitian yang menemukan hubungan positif antara inflasi dan harga saham, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bulmash dan Trivoli (1991), Abdullah dan Hayworth (1993). Variabel lain yang sering digunakan adalah tingkat bunga. Secara teoritis perubahan tingkat bunga secara langsung merubah *discount rate* dan mempengaruhi arus kas perusahaan saat ini dan masa depan. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Peningkatan tingkat bunga mungkin menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada instrumen investasi yang lain. Beberapa penelitian yang menemukan signifikansi antara tingkat bunga dan harga saham antara lain Wongbangpo dan Sharma (2002) di negara-negara ASEAN, Islam *et al.* (2004) di Thailand, Gunasekarage *et al.* (2004) di *South Asia*. Hinda dan Kuroki (2006) menemukan adanya hubungan antara kebijakan suku bunga di Jepang dengan harga saham. Secara rata-rata penurunan suku bunga sebesar 1% akan memicu kenaikan harga saham sebesar 3%. Beberapa peneliti juga menemukan arah hubungan positif antara suku bunga dan harga saham. Ini cukup bertentangan dengan teori awal sehingga masih dimungkinkan penelitian lebih lanjut pada variabel ini. Peneliti-peneliti tersebut diantaranya adalah Fama (1981), Wongbangpo dan Sharma (2002) di Malaysia, Islam *et al.* (2004) di Thailand. Beberapa peneliti menemukan

juga signifikansi antara nilai tukar dengan harga saham. Diantaranya adalah Wongbangpo dan Sharma (2002) di negara-negara ASEAN, Maysami (2004) di Singapura. Muradoglu dan Metin (1998) menemukan bahwa nilai tukar mata uang asing sangat berpengaruh terhadap harga saham ketika pasar semakin berkembang. Tetapi beberapa peneliti juga tidak menemukan signifikansi antara nilai tukar dengan harga saham diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chakravarty (2005) di India, nilai tukar sangat penting karena tiga alasan. Yang pertama, jumlah uang beredar digunakan untuk menstabilkan nilai tukar, pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi hubungan antara uang dan inflasi dan nilai tukar adalah variabel penting bagi investor untuk memutuskan untuk berinvestasi dalam pasar valuta asing atau pasar modal.

Hubungan negatif antara nilai tukar dan harga saham lebih dominan, tetapi ada juga penelitian-penelitian yang menemukan hubungan positif antara nilai tukar dengan harga saham misalnya Islam *et al.* (2004) di Thailand, Wongbangpo dan Sharma (2002) di Malaysia dan Filipina. Maka masih terbuka untuk dilakukan penelitian pada variabel nilai tukar.

Perubahan jumlah uang beredar mungkin berhubungan dengan kenaikan inflasi yang tidak diantisipasi dan ketidakpastian inflasi di masa depan dan berpengaruh negatif terhadap harga saham. Perubahan jumlah uang beredar mungkin berpengaruh positif pada harga saham melalui dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Laopodis (2006) menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi suku bunga yang akan membuat investor mengevaluasi saham yang dimilikinya dan ini akan berpengaruh pada harga saham. Perubahan jumlah uang beredar akan membuat investor menilai kembali pasar modal. Karena nilai saham adalah gabungan dari *discounted future dividends*, maka kebijakan moneter ketat/longgar dapat mempengaruhi harga saham melalui *expected future earnings*. Tidak signifikannya pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga saham juga bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Chakravarty (2005). Arah hubungan jumlah uang beredar dan harga saham juga bisa positif ataupun negatif. Hubungan positif ditemukan pada penelitian Fama (1981), Ibrahim *et al.* (2001) dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, Ibrahim *et al.* (2001) menemukan hubungan negatif antara jumlah uang beredar dengan harga saham.

Ada pula penelitian-penelitian yang tidak menemukan hubungan signifikan antara variabel-variabel ekonomi makro dengan harga saham diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Atmadja (2004) pada lima negara ASEAN. Maka penelitian tentang hubungan

variabel ekonomi makro terutama variabel makro moneter dengan harga saham masih sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan penelitian terutama di kawasan ASEAN.

B. METODOLOGI

Obyek penelitian ini adalah dua negara ASEAN yaitu Indonesia dan Singapura. Sampel data dimulai pada tahun 2001-2013. Data harga saham di masing-masing negara digunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau *Jakarta Composite Index*, (JCI), Index Straits Times Index mewakili kinerja saham-saham yang terdaftar di pasar modal Singapura. Sedangkan variabel tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga pasar uang di masing-masing negara. Variabel inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi bulanan yang merupakan perubahan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus, yang dihitung dari perubahan Harga Konsumen Gabungan di masing-masing negara dan dinyatakan dalam persen. Sedangkan variabel nilai tukar yang dipakai adalah nilai tukar mata uang masing-masing negara terhadap dollar AS dinyatakan dalam mata uang/US\$. Dan variabel jumlah uang beredar adalah jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) atau likuiditas perekonomian dalam satuan milyar mata uang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data tersebut diperoleh dari situs resmi *International Monetary Fund Statistics*, *World Development Indicators*, *Heritage Foundation*, Pasar Modal di masing-masing negara, bank Sentral di masing-masing negara dan Biro Statistik di masing-masing negara. Metode Analisis yang digunakan adalah *Vector Auto Regression* (VAR). Ada beberapa keuntungan dari VAR (Gujarati, 1995:387) yaitu : VAR mampu melihat lebih banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, VAR mampu mengkaji konsistensi model empirik dengan teori ekonometrika, VAR mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtun waktu yang tidak stasioner (*non stasionary*) dan regresi lancung (*spurious regresion*) atau korelasi lancung (*spurious correlation*) dalam analisis ekonometrika.

Data penelitian sebelum digunakan untuk estimasi perlu dilakukan serangkaian tahapan pengujian, yaitu: uji stasioneritas, penentuan panjang lag, uji kausalitas Granger, *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*. Penentuan jumlah lag dalam model VAR ditentukan pada kriteria informasi yang direkomendasikan oleh *Final Prediction Error* (FPE) atau *Aike Information Criterion* (AIC) atau *Schwarz Criterion* (SC) atau *Hannan-Quinn* (HQ).

Uji Kausalitas *Granger* digunakan untuk melihat arah hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Singapura

VAR Model - Substituted Coefficients:

=====

$$\text{BUNGA} = 0.9177310382*\text{BUNGA}(-1) - 0.01584290888*\text{INFLASI}(-1) + 0.0001119245788*\text{SAHAM}(-1) - 0.2537301411*\text{TUKAR}(-1) - 1.464444989\text{e-}06*\text{UANG}(-1) + 0.6671620385$$

$$\text{INFLASI} = - 0.1969708603*\text{BUNGA}(-1) + 0.9203748296*\text{INFLASI}(-1) + 0.0007426423398*\text{SAHAM}(-1) - 0.4941933095*\text{TUKAR}(-1) - 5.089274516\text{e-}06*\text{UANG}(-1) + 0.8733467862$$

$$\text{SAHAM} = 5.983727577*\text{BUNGA}(-1) - 35.75651169*\text{INFLASI}(-1) + 0.965820961*\text{SAHAM}(-1) - 335.8687219*\text{TUKAR}(-1) + 0.0001724526232*\text{UANG}(-1) + 631.293406$$

$$\text{TUKAR} = - 0.0009921730094*\text{BUNGA}(-1) - 7.578677964\text{e-}05*\text{INFLASI}(-1) - 1.484152027\text{e-}05*\text{SAHAM}(-1) + 0.8348764853*\text{TUKAR}(-1) - 2.461872735\text{e-}07*\text{UANG}(-1) + 0.3582992406$$

$$\text{UANG} = 596.1318973*\text{BUNGA}(-1) - 437.5886257*\text{INFLASI}(-1) - 1.624710148*\text{SAHAM}(-1) - 21096.5169*\text{TUKAR}(-1) + 0.9935196066*\text{UANG}(-1) + 40894.95168$$

Untuk Singapura, hasil menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh inflasi satu periode sebelumnya dan harga saham satu periode sebelumnya sedangkan suku bunga dipengaruhi oleh suku bunga satu periode sebelumnya. Inflasi dipengaruhi oleh suku bunga satu periode sebelumnya, inflasi satu periode sebelumnya serta harga saham satu periode sebelumnya. Nilai tukar dipengaruhi oleh nilai tukar satu periode sebelumnya sedangkan jumlah uang beredar dipengaruhi oleh inflasi satu periode sebelumnya, harga saham satu periode sebelumnya, nilai

tukar satu periode sebelumnya serta jumlah uang beredar satu periode sebelumnya. Di Singapura, harga sahamnya ditentukan oleh inflasi satu periode sebelumnya. Selain itu harga saham di Singapura juga dipengaruhi oleh harga saham periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung menanamkan modalnya dalam jangka pendek dan mengharapkan keuntungan dari perubahan pasar. Sehingga investor lebih cenderung melihat harga saham di masa lalu untuk mengestimasi harga saham di masa depan

2. Indonesia

VAR Model - Substituted Coefficients:

=====

$$\begin{aligned} \mathbf{BUNGA} = & 1.383511672*\mathbf{BUNGA}(-1) - 0.4311737832*\mathbf{BUNGA}(-2) + \\ & 0.06989914522*\mathbf{INFLASI}(-1) - 0.05636412858*\mathbf{INFLASI}(-2) - 0.0004576889121*\mathbf{SAHAM}(-1) \\ & + 0.0008720212453*\mathbf{SAHAM}(-2) + 0.0001431713706*\mathbf{TUKAR}(-1) + 5.125413219e- \\ & 05*\mathbf{TUKAR}(-2) + 6.743761013e-07*\mathbf{UANG}(-1) - 1.93935141e-06*\mathbf{UANG}(-2) - 0.520888798 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{INFLASI} = & 1.473651053*\mathbf{BUNGA}(-1) - 1.367930799*\mathbf{BUNGA}(-2) + 0.888855741*\mathbf{INFLASI}(- \\ & 1) - 0.09715288326*\mathbf{INFLASI}(-2) - 0.000578777408*\mathbf{SAHAM}(-1) + \\ & 0.000610760612*\mathbf{SAHAM}(-2) - 8.033568194e-05*\mathbf{TUKAR}(-1) + 0.0002659863539*\mathbf{TUKAR}(- \\ & 2) + 4.86427826e-06*\mathbf{UANG}(-1) - 4.553964287e-06*\mathbf{UANG}(-2) - 1.24945732 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{SAHAM} = & - 37.33960327*\mathbf{BUNGA}(-1) + 29.0443012*\mathbf{BUNGA}(-2) - 9.8970976*\mathbf{INFLASI}(-1) \\ & + 11.44072877*\mathbf{INFLASI}(-2) + 1.293688434*\mathbf{SAHAM}(-1) - 0.282299908*\mathbf{SAHAM}(-2) + \\ & 0.06043094177*\mathbf{TUKAR}(-1) - 0.01636995099*\mathbf{TUKAR}(-2) - 0.001045226037*\mathbf{UANG}(-1) + \\ & 0.0009539847424*\mathbf{UANG}(-2) - 229.4621718 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{TUKAR} = & 365.9900981*\mathbf{BUNGA}(-1) - 322.7792132*\mathbf{BUNGA}(-2) - 7.506625674*\mathbf{INFLASI}(- \\ & 1) - 10.69008517*\mathbf{INFLASI}(-2) - 1.150669848*\mathbf{SAHAM}(-1) + 1.208552844*\mathbf{SAHAM}(-2) + \\ & 0.9023374064*\mathbf{TUKAR}(-1) - 0.2967707153*\mathbf{TUKAR}(-2) + 0.001889346414*\mathbf{UANG}(-1) - \\ & 0.001832817872*\mathbf{UANG}(-2) + 3270.35302 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{UANG} = & 14145.34261 * \text{BUNGA}(-1) - 12915.23769 * \text{BUNGA}(-2) - 860.927118 * \text{INFLASI}(-1) + \\ & 644.9706076 * \text{INFLASI}(-2) + 17.6177423 * \text{SAHAM}(-1) - 22.82075275 * \text{SAHAM}(-2) + \\ & 10.99263923 * \text{TUKAR}(-1) - 17.80372184 * \text{TUKAR}(-2) + 0.8255284226 * \text{UANG}(-1) + \\ & 0.2173868152 * \text{UANG}(-2) + 24928.54679 \end{aligned}$$

Untuk Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang di Indonesia, harga saham dipengaruhi oleh harga saham satu periode sebelumnya dan harga saham dua periode sebelumnya sedangkan suku bunganya dipengaruhi oleh suku bunga satu periode sebelumnya, suku bunga dua periode sebelumnya, inflasi satu periode sebelumnya, inflasi dua periode sebelumnya dan harga saham dua periode sebelumnya. Sedangkan Inflasi dipengaruhi oleh suku bunga satu periode sebelumnya, suku bunga dua periode sebelumnya serta inflasi satu periode sebelumnya. Nilai tukar dipengaruhi oleh suku bunga satu periode sebelumnya, suku bunga dua periode sebelumnya, harga saham satu periode sebelumnya, harga saham dua periode sebelumnya, nilai tukar satu periode sebelumnya dan nilai tukar satu periode sebelumnya. Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh nilai tukar dua periode sebelumnya dan jumlah uang beredar satu periode sebelumnya. Harga saham di Indonesia ternyata tidak dipengaruhi sama sekali oleh variabel moneter. Harga saham justru dipengaruhi oleh harga saham di masa lampau. Hal ini bisa disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang kurang bagus dan stabil sehingga investor cenderung menanamkan modalnya dalam jangka pendek dan mengharapkan keuntungan dari perubahan pasar. Sehingga investor lebih cenderung melihat harga saham di masa lalu untuk mengestimasi harga saham di masa depan. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa variabel moneter bukan merupakan indikator yang tepat untuk memprediksi indeks harga saham. Ini juga mengindikasikan bahwa investor di pasar modal Indonesia tidak secara intensif menggunakan informasi tentang perubahan variabel-variabel moneter ketika memutuskan untuk bertransaksi di pasar modal.

D. PENUTUP

Ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di kedua negara ASEAN ini. Di Indonesia, harga sahamnya lebih dipengaruhi oleh harga saham masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa investor di Indonesia cenderung melakukan analisis teknikal dalam

melihat harga saham serta cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Di Singapura, harga sahamnya dipengaruhi oleh inflasi. Ini menunjukkan bahwa investor Singapura sangat memperhatikan stabilitas makroekonomi Singapura sebelum melakukan investasi di pasar modal Singapura. Di Singapura, harga sahamnya juga dipengaruhi oleh harga saham periode sebelumnya, ini menunjukkan bahwa investor melakukan analisis teknikal terhadap pasar modal di Singapura. Pemerintah kedua negara ASEAN perlu untuk meningkatkan stabilitas moneter karena stabilitas moneter bisa mempengaruhi persepsi investor dan mempengaruhi fluktuasi harga saham

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.D., Hayworth, S.C. 1993, Macroeconometrics of stock price fluctuations, *Quarterly Journal of Business and Economics* vol 32.
- Adrangi, B. 2000. Inflation, Output and Stock Prices: Evidence from Brazil. *The Journal of Applied Business Research*
- Ahmad, N., Ahmed, F. 2006. The long-run and short-run endogeneity of money supply in Pakistan: An empirical investigation, *State Bank of Pakistan Research Bulletin*, 2.
- Atmadja, A. 2004. The Granger causality Tests for The Five ASEAN Countries Stock Markets and Macroeconomic Variables During and Post the 1997 Asian Financial Crisis. *Jurnal Universitas Petra*
- Bulmash, S.B., Trivoli, G.W., 1991. Time Lagged Interactions between Stock Prices and Selected Economic variables. *Journal of Portfolio Management*
- Chakravarty, S. 2005. Stock Market and Macroeconomic Behavior in India
- DeFina, R. H. 1991. Does Inflation Depress the Stock Market. *Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review*
- DeStefano, M.R. 2000. Macroeconomic Determinants of US Stock Prices: Are the Business Cycle and the Level of Economic Activity Moderating factors.
- Erbaykal, E. 2006. Real Macroeconomic Variables and Stock Prices: Test of Proxy Hypothesis in Turkey
- Fama, E.F. 1981. Asset Returns and Inflation. *Journal of Financial Economics* vol 5
- Geske, R., Roll, R. 1983. The Fiscal and Monetary Linkage Between Stock Returns and Inflation. *Journal of Finance* vol 38

Graham, F.C. 2006. Inflation, Real Stock Returns and Monetary Policy. *Applied Financial Economics vol 6*

Gujarati, D. 1995. *Basic Econometrics*. 3rd edition. Singapore:McGraw-Hill Book Co.

Gultekin, N. 1983. Stock market Returns and Inflation: Evidence from other Countries. *The Journal of Finance vol 38*

Gunasekarege, A. 2004. Macroeconomic Influence on the Stock Market : Evidence from an Emerging Market in South Asia. *Journal of Emerging Market Finance*

Gwartney, J., and Lawson, R. 2004. *Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report*. Vancouver, B.C.: Fraser Institute.

Haruman, T. 2005. Pengaruh faktor Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap Tingkat Pengembalian Saham BEJ. *Usahawan no 11*

Hinda, Y. Kuroki, Y. 2006. Financial and capital Market's Responses to Changes in the Central Bank's Target Interest rate: The Case of Japan. *The Economic Journal vol 116*

Humpe, A. 2007. Can macroeconomic variables explain long term stock market movements? A comparison of the US and Japan. *Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis Working paper Series*

Islam. 2004. A Time Series Analysis and Modelling of The Thai Stock Market. *International Business Management Conference*

Laopodis, N. 2006. Dynamic Interactions among the Stock Market, Federal Funds Rate, Inflation and Economic Activity. *The Financial Review 41*

Li, K. 2002. What Explains the Growth of Global Equity Markets? *Canadian Investment Review*

Maysami, R.C. 2004. Relationship between macroeconomic variables and stock market indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore's All-S Sector Indices. *Jurnal Pengurusan*

Mukherjee, T. K. , Naka, A. 1995. Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock market: An Application of a VECM. *The Journal of Financial Research vol*

Muradoglu. 2001. Is there a long run relationship between stock returns and monetary variables: evidence from an emerging market. *Applied Financial Economics vol 11*

Muradoglu , Metin. 1998. Are there trends toward efficiency for emerging markets?

Cointegration between stock prices and monetary variables at Istanbul Stock Exchange. *Applied Financial Economics*

Nishat, M and Shaheen, R. 2005. Macroeconomic Factors and Pakistani Equity Market.

Rapach, D.E. 2001. The Long Run Relationship between Inflation and Real Stock Prices. *Journal of Macroeconomics*

Schwert, W.G. 1981. The Adjustment of Stock Prices to Information about Inflation. *The Journal of Finance vol 36*

Stocker, M. 2005. Equity Returns and Economic Freedom. *Cato Journal Vol 25*

Udegbonam, R, Eriki, P.O. 2001. Inflation and Stock Price Behaviour: Evidence From Nigerian Stock Market. *Journal of Financial Management and Analysis vol 14 no 1*

Wongbangpo, P., Sharma, S.C. 2002. Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic Interactions: ASEAN Countries. *Journal of Asian Economics vol 13*

**SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN PENDUDUK
LOKAL? DAMPAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI EMPAT
KECAMATAN AREA KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA**

Rahmad Budi Suharto¹, Rian Hilmawan^{2a}, Rizky Yударuddin³

¹²³ Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

E-mail: ^a hilmawan.feunmul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan, sekali lagi, hipotesis kutukan sumber daya alam (*natural resource curse hypothesis*) berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian empiris yang biasanya menggunakan pendekatan ekonometrik, kami memilih menggunakan pendekatan survei lapangan dengan wawancara dan memotret langsung kondisi faktual yang terjadi. Kami memilih pertambangan batu bara di koridor Kalimantan dengan empat sampel wilayah kecamatan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda) sebagai obyek penelitian. Lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: apakah kegiatan pertambangan batu bara memberi dampak perubahan (positif atau negatif) bagi penduduk lokal di sekitar area terdampak. Terutama berkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi di antaranya seperti kualitas lingkungan, mata pencaharian dan pola pergeserannya, biaya hidup, penghasilan, kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha. Hasil penelitian menyajikan temuan fakta, implikasi dan memberikan pencerahan terhadap perdebatan hipotesis kutukan sumber daya alam.

Keywords: *social, economy, coal, natural resource curse*

Abstract

This study aims to prove, once again, the famous, so called: resource curse hypothesis is really exist in Indonesia. In contrast to empirical studies typically use an econometric methods, we choose alternative, to use a field survey approach to interview and photograph the factual conditions that occur. We chose coal mining in Kalimantan corridor with four sample sub-district (kabupaten) and cities in the province of East Kalimantan (Kutai regency and the city of Samarinda) as an object of research. More specifically, the purpose of this study is to answer the question: whether the coal mining activities affect (positive or negative) for the population in the surrounding area. Primarily concerned with the social and economic dimensions such as environmental quality, livelihoods and the shift pattern, cost of living, income, employment opportunities and openness sought. The results show facts from field, the implications and provide insight to the truth of the resource curse hypothesis debate.

Kata Kunci: *Sosial ekonomi, Batu Bara, Kutukan Sumber Daya Alam*

A. LATAR BELAKANG

KALIMANTAN dan Sumatera merupakan dua wilayah yang memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia.¹ Meskipun demikian, dibandingkan Sumatera, Kalimantan merupakan wilayah dominan eksplorasi batu bara, terutama Kalimantan Timur. Dampak ekonomi bagi Kalimantan Timur memang besar, misalnya penerimaan daerah melalui dana bagi hasil tambang dan mineral, yang membawa kenaikan APBD kabupaten/kota hingga triliunan rupiah. Namun sifat eksplorasi batu bara memiliki pola yang cenderung primitif dan destruktif.

Orientasi perusahaan umumnya adalah bagaimana memproduksi sebesar-besarnya dan menjualnya ke luar negeri (ekspor) dengan harga pasar. Ini berdampak pada pembukaan lahan yang menyebabkan degradasi, erosi, dan deforestasi wilayah hutan. Menurut data dari Walhi Kaltim, setidaknya terdapat 166 perusahaan yang kini melakukan pinjam pakai kawasan hutan dan berisiko tinggi merusak konservasi dan ekosistem hutan alam.²

Perusahaan batu bara umumnya memproduksi kualitas batu bara yang rendah kalori yang juga menyebabkan permasalahan yang serius dari sisi lingkungan, misalnya pencemaran emisi gas karbondioksida (CO²) dan hujan asam. Dilema dihadapi Indonesia, karena di satu sisi pemerintah berusaha untuk mensukseskan ekonomi hijau (*green economy*) dengan cara mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020.

Ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur terhadap komoditas batu bara sangat besar. Terlihat bahwa total ekspor rata-rata Kalimantan Timur selama 2005-2010 sebesar 53 persen diisi oleh komoditas batu bara. Ini memperlihatkan daerah ini belum mengoptimalkan sektor di luar *non-renewable*. Kondisi ini kental dengan keadaan yang mendekatkan Kalimantan Timur pada kondisi “kutukan sumber daya alam” (*resources curse*). Teori kutukan sumber daya alam³ menyebutkan, negeri yang dikaruniai sumber daya alam melimpah justru menjadi bangsa yang terbelakang jika tidak berhati-hati mengelolanya. Sumber daya alam yang melimpah cenderung membuat penduduk malas dan tidak kreatif. Sumber kekayaan alam ini bisa menjadi “kutukan”

¹ Lihat: *Penambangan Batu Bara di Kalimantan Berlebihan*.

<http://economy.okezone.com/read/2013/01/08/19/743269/penambangan-batu-bara-di-kalimantan-berlebihan>

² Baca: *Walhi Kaltim waspadai 166 perusahaan tambang*.

http://nasional.tvonenews.tv/berita/view/33762/2010/03/01/walhi_kaltim_waspada_166_perusahaan_tambang_tvOne

³ Diperkenalkan oleh Richard M. Authy pada tahun 1993

jika terus dieksploitasi, tanpa ada inovasi yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia.

Penelitian Busse dan Groning (2013) membuktikan, dengan menggunakan data panel skala besar dari negara-negara yang dikaruniai sumber daya alam, bahwa kegiatan ekspor sumber daya alam menyebabkan naiknya tingkat korupsi. Hasil ini secara statistik *robust* dan dapat dipercaya kevalidannya. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan hipotesis teori ini. Sanglimsuwan (2008), Auty (1993) dan Sachs & Warner (1995, 1997) didasarkan pada korelasi negatif yang konsisten antara kinerja ekonomi (tingkat pertumbuhan PDB per kapita) dan kelimpahan sumber daya alam (pangsa ekspor produk berbasis sumber daya alam).

Berbeda dengan penelitian empiris sebelumnya yang menggunakan pendekatan ekonometrika untuk menganalisis hubungan sumber daya alam, pembangunan, dan kesejahteraan publik, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengamatan langsung dampak operasi pertambangan batu bara terhadap sosial ekonomi masyarakat yang permukimannya dekat dengan tambang.

Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini untuk mengungkap pertanyaan apakah kegiatan pertambangan batu bara telah memberi perubahan positif atau negatif (khususnya pada dimensi-dimensi kesejahteraan yang paling dasar) bagi warga masyarakat/penduduk di sekitar area tambang. Dimensi dasar dari kesejahteraan publik di antaranya sarana dan prasarana, penguasaan lahan, perekonomian dan aktivitasnya, mata pencaharian, dan pendapatan.

B. TELAAH LITERATUR

Literatur mengenai kaitan antara sumber daya alam dan pembangunan, telah menemukan apa yang dinamakan fenomena kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam pada dasarnya merupakan hipotesis yang menyatakan semakin besar karunia alam yang dimiliki suatu wilayah, semakin menggiring wilayah tersebut kepada keterbelakangan (Kolstad dan Wiig, 2009). Bahwa negara yang dianugerahi kekayaan alam kerap terjebak pada pertumbuhan yang lamban dan masalah kemiskinan (Sachs and Warner, 1995; Kolstad dan Wiig, 2009). Ini dapat terjadi karena komoditas hasil alam umumnya, dalam jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga dunia, efek *Dutch disease*, dan kelembagaan serta pemerintahan yang buruk (Frankel, 2010).

Penelitian empiris juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya sumber daya alam cenderung melambat (Sachs & Warner, 2001) juga cenderung terjebak pada fenomena *rent seeking* (Torvik, 2002). Atas alasan itu, ada anggapan bahwa karunia sumber daya alam lebih banyak memberikan kutukan bagi pembangunan daripada sebagai berkah.

Umumnya wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam terjebak dengan fenomena seperti: (a) hilangnya kepemilikan sumber daya alam, karena dimiliki asing (*Dutch Disease*); (b) praktik politik ekonomi patron klien, yang umumnya memberikan izin terhadap eksploitasi sumber daya alam kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan; (c) praktek *rent seeking* yang terjadi akibat desentralisasi ekonomi ke wilayah kabupaten/kota (Kolstad dan Wiig, 2009, Sugiri dan Adisaputra, 2011).

Pada kasus negara yang kaya sumber daya alam berupa minyak, misalnya pada dua negara Venezuela dan Angola, mengalami perbedaan dampak dari kutukan sumber daya alam. Venezuela berhasil mencegah kutukan, sementara Angola tidak. Faktor seperti mismanajemen ekonomi, korupsi, dan standar hidup dari populasi mempengaruhi efek yang diterima kedua negara itu atas karunia alam yang mereka punya (Hammond, 2011). Dengan menggunakan data panel skala besar dari negara-negara, Busse dan Groning (2013), menemukan bahwa sumber daya alam meningkatkan peluang korupsi. Ekspor sumber daya alam mempengaruhi kualitas birokrasi pemerintahan.

Studi empiris terkait dengan relasi antara sumber daya alam dan kesejahteraan telah diteliti, meskipun dalam jumlah yang terbatas, dengan cakupan wilayah dan isu yang berbeda. Pada kasus Indonesia, Komarulzaman dan Alisjahbana (2006) pernah menguji hipotesis kutukan sumber daya alam di Indonesia, yang merelasikan anugerah kekayaan alam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pada level wilayah menggunakan pendekatan regresi *cross section*. Pada intinya, penelitian membuat dua model untuk membuktikan efek total sewa sumber daya alam (pada model pertama) dan mendekomposisi efek sewa sumber daya alam pertambangan, minyak, dan gas alam serta kehutanan (pada model kedua) untuk kemudian melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memfokuskan kepada tiga komponen yaitu (i) *share* sewa lahan kehutanan terhadap PDB; (ii) *share* sewa lahan pertambangan terhadap PDB; dan (iii) *share* sewa minyak bumi dan gas terhadap PDB. Mereka

menemukan bahwa provinsi kaya cenderung terjebak pada kutukan ini, di mana faktor sewa lahan kehutanan dan pertambangan berpengaruh positif dan signifikan.

Di level provinsial, Fatah (2008) pada kasus Kalimantan Selatan menemukan bukti bahwa sektor pertambangan batu bara bertanggung jawab untuk banyak pencemaran lingkungan dan gangguan sosial. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan besaran angka dampak kegiatan operasi batu bara pada ekonomi dan lingkungan.

Temuan studi Fatah (2008) membuktikan bahwa pertambangan batubara yang mendominasi perekonomian Kalimantan Selatan hanya menyerap 2 persen dari penduduk yang bekerja. Di satu sisi pertambangan batubara menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi. Jadi rumah tangga yang paling terpengaruh oleh kontraksi akan menjadi orang-orang yang relatif kaya. Keadaan ini akan semakin memperburuk ketimpangan pendapatan. Namun berbeda dengan Fatah, temuan Dutt dan Mahy (2007) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, keberadaan pertambangan batu bara justru berdampak positif terhadap perempuan dan anak-anak, dari lapangan kerja yang tercipta dan *multiplier effect* yang terjadi di wilayah tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada wilayah eksplorasi utama kegiatan pertambangan batu bara koridor Kalimantan yaitu di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah fokus yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak dua Kecamatan yaitu Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya ialah di Kota Samarinda, yaitu Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda.

Sumber data kami himpun menggunakan kuesioner dan wawancara langsung. Wawancara bersifat semi-struktur. Pertanyaan seputar latar belakang sosial ekonomi dan perubahan keadaan sejak pertambangan mulai beroperasi (atau sejak mereka menetap di area ini). Pekerja tambang, petani dan pembudidaya, pedagang, wirausahawan, ibu rumah tangga, pemuda, guru sekolah, pengangguran, dan ketua forum desa merupakan responden yang ditargetkan. Jumlah responden berkisar antara 80-90 orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan oleh Dutt dan Mahy (2007). Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan menggunakan grafik persentase dan *cross*

tabulation (tabulasi silang) untuk mendapatkan hubungan deskriptif antara dua variabel. Analisa ini pada intinya mengelaborasi isu-isu sosial ekonomi yang berkembang di lokasi permukiman masyarakat di sekitar eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara. Kami mengukur beberapa dimensi, yang mayoritas diadaptasi dari Dutt dan Mahy (2007) di antaranya: (1) Suku dan Mata pencaharian; (2) biaya hidup, (3) Kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha yang tersedia, (4) pendapatan/penghasilan (5) kualitas lingkungan, (6) pola pergeseran mata pencaharian. Informasi yang ditarget pada Tabel dikumpulkan melalui survei setelah itu ditabulasi datanya secara deskriptif dan ditampilkan secara persentase.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei lapangan di empat Kecamatan menunjukkan masyarakat dominan yang bermukim merupakan warga transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Suku Jawa cenderung bekerja sebagai wiraswasta sebesar 32,5 persen, lebih banyak dibandingkan dengan penduduk asli sebanyak 12,5 persen. Namun jika dilihat dari pekerjaan sebagai aparatur pemerintah (PNS atau tenaga honor) maka penduduk asli lebih banyak dibandingkan responden yang bersuku Jawa yaitu sebesar 8,8 persen. Hal ini merupakan temuan menarik karena dapat membedakan perilaku penduduk asli dan pendatang dikaitkan dengan pekerjaan utamanya.

1. Biaya Hidup dan Implikasinya

Kegiatan pertambangan batu bara diyakini masyarakat yang menjadi responden kami ikut mendongkrak tingginya biaya hidup di wilayah mereka. Setidaknya 66 persen responden menyatakan bahwa kehidupan sekarang lebih mahal dibandingkan sebelum adanya aktivitas pertambangan batu bara. Hal yang menyebabkan kenaikan biaya hidup ini, akibatmulai ramainya penduduk pendatang, baik yang menetap secara permanen maupun temporer. Ini membuat peredaran uang melalui transaksi masyarakat semakin cepat dibandingkan sebelum adanya tambang. Namun demikian sarana yang terbatas terutama akses jalan dan transportasi ikut menyebabkan tingginya biaya logistik barang sehingga harga-harga barang juga terdongkrak menjadi mahal.

Semakin tingginya biaya hidup menyebabkan masyarakat sekitar tambang beralih mata pencaharian yang terkait dengan aktifitas tambang. Penghasilan yang diterima pun lebih tinggi

dibandingkan jika mereka sebelumnya hanya bekerja sebagai petani. Biaya hidup yang semakin tinggi yang tidak dapat ditopang penduduk sekitar, menyebabkan mereka mengambil jalan praktis dengan menjual lahan-lahan lama mereka. Kepemilikan lahan ini mereka miliki karena status warga umumnya adalah transmigran yang telah menetap lama.

Kejadian di Kecamatan Tenggara Seberang umumnya lahan pertanian dibeli oleh perusahaan pertambangan batu bara. Di Tenggara Seberang, warga masyarakat lebih tertarik untuk menjual lahan mereka karena harga ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan umumnya berada di atas harga pasar. Para pemilik lahan ini umumnya adalah para transmigran lama yang telah menghuni wilayah tersebut sejak tahun 1970-an. Mereka berpikir bahwa sangat menguntungkan menjual lahan pada harga tersebut, dibandingkan mengelola lahan yang umumnya memberi hasil (keuntungan) yang tidak terlampau besar. Akibatnya banyak pemilik lahan lama terjebak dengan iming-iming tersebut dan rela menjual lahan milik mereka ke perusahaan pertambangan. Para pemilik lahan lama umumnya mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar atas penjualan lahannya tersebut, sehingga oleh masyarakat sekitar fenomena mereka ini sering dinamakan dengan istilah “*Orang Kaya Baru*”. Fenomena jual beli lahan milik warga masyarakat inilah yang bisa menjawab pertanyaan mengapa lahan pertanian di Kutai Kartanegara semakin lama semakin berkurang.

Jadi salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian akibat faktor biaya hidup dapat dibuktikan melalui hasil *cross tab*. Responden menilai ada kecenderungan semakin berkurangnya lahan pertanian diakibatkan adanya peningkatan biaya hidup akibat adanya aktivitas tambang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.

Persepsi Responden Tentang Peningkatan Biaya Hidup Menurut Kondisi Lahan Pertanian Setelah Adanya Kegiatan Tambang

Biaya Hidup	Kondisi Lahan Pertanian			Total
	Semakin Berkurang	Tetap	Semakin Bertambah	
Semakin mahal	46	4	1	51

	57.5%	5.0%	1.3%	63.8%
Sama saja	19	9	1	29
	23.8%	11.3%	1.3%	36.3%
Total	65	13	2	80
	81.3%	16.3%	2.5%	100.0%

Sumber: hasil survei lapangan, 2014

Tingginya biaya hidup, berkurangnya lahan pertanian dan kualitas lingkungan mengakibatkan kehidupan masyarakat di sekitar tambang semakin sulit. Peningkatan biaya hidup menuntut kaum perempuan juga turut aktif dalam menopang perekonomian keluarga khususnya pasca tambang. Responden menilai ada kecenderungan tingginya biaya hidup membuat peran kaum perempuan dalam membantu perekonomian keluarga semakin besar.

2. Dampak terhadap kesempatan kerja dan keterbukaan berusaha serta penghasilan penduduk

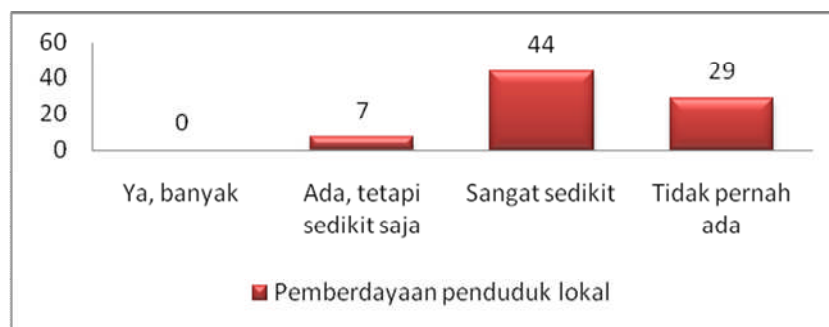
Dampak pertambangan batubara diyakini oleh 38 persen responden memberi kontribusi terhadap terbukanya kesempatan kerja di wilayah mereka. Namun sebanyak 58 persen menjawab tetap-tetap saja keadaannya. Responden yang merasakan adanya kontribusi sebenarnya bukan berasal dari efek langsungnya seperti penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, melainkan efek tidak langsungnya. Seperti mulai ramainya penduduk yang berwirausaha, misalnya membuka rumah-rumah sewaan, warung sembako, warung makan, kios pulsa, mendirikan bengkel, pencucian kendaraan dan jasa-jasa musiman seperti jasa parkir sepeda motor. Masyarakat mendirikan usaha-usaha tersebut karena mulai ramainya permintaan terhadap pelayanan tersebut, dibandingkan sebelum adanya operasi pertambangan batu bara yang terjadi di wilayah mereka. Seperti halnya pada perusahaan pertambangan batu bara di Kelurahan Sempaja Utara. Kesempatan bekerja pada sektor pertambangan batu bara terhadap masyarakat lokal sangatlah kecil, terlihat dari sedikitnya jumlah masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan. Masyarakat yang bekerja pada perusahaan cenderung hanya sebagai buruh kasar dan supir truk pengangkut batubara. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat lokal tidak dapat melakukan penetrasi ke posisi strategis di perusahaan pertambangan batu bara.

Pertama, disebabkan lebih karena adanya budaya masyarakat setempat bahwa menjadi pegawai pemerintah jauh lebih baik dan berwibawa, dibandingkan bekerja di perusahaan. Kedua, alasan teknis di mana penduduk lokal memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak sesuai spesifikasi perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil survei kami bahwa sangat sedikit perhatian perusahaan tambang dalam memberdayakan warga lokal, bahkan secara ekstrem masyarakat menyatakan sama sekali tidak ada perhatian (lihat Gambar 2). Jika dikalkulasi persentasenya, 91 persen masyarakat yang menjadi responden kami menyatakan bahwa pemberdayaan perusahaan pertambangan terhadap penduduk lokal sangat minimal.



Gambar 1.

Jasa Parkir yang didirikan warga di Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara



Gambar 2.

Persepsi Responden Tentang Pemberdayaan Penduduk Lokal

Perubahan lapangan kerja dilihat dari banyaknya aktifitas warga yang dulunya hanya petani dan sekarang menjadi wirausaha. Masyarakat-masyarakat tersebut membuka warung makan, rumah

sewaan, dan sebagainya, sehingga karena perubahan lapangan kerja tersebut pendapatan dapat meningkat. Persepsi responden tentang tingkat penghasilan dengan adanya aktivitas tambang batu bara menurut pekerjaan dinilai oleh mayoritas responden baik pegawai negeri, swasta dan wiraswasta cenderung tetap. Peningkatan ini terjadi karena dengan adanya aktivitas pertambangan batu bara, responden yang bekerja sebagai wiraswasta dapat mendukung aktivitas kegiatan tambang dan para pekerjanya, seperti menyediakan jasa rumah makan, rumah kos, kios pulsa, warung sembako, dan pelayanan jasa yang diperuntukkan bagi pekerja tambang. Juga banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani, berkebun dan budi daya ikan harus beralih ke pekerjaan lain seperti penjual makanan, buruh tambang, penyedia jasa (tukang ojek, rumah khos dan lainnya).

Adanya pergeseran mata pencaharian diakibatkan banyak masyarakat yang menjual lahannya. Sebagian masyarakat yang menjadi responden menuturkan bahwa kebanyakan penduduk menjual lahannya, untuk kemudian membelanjakan pada hal yang sifatnya konsumtif dan ada pula yang sifatnya produktif (investasi). Untuk yang konsumtif, lahan yang dijual digunakan untuk membeli kendaraan, naik haji, perbaikan rumah dan lainnya sebagainya yang tidak memberikan efek bagi peningkatan penghasilan. Sedangkan yang berpikir produktif, lahan yang dijual kembali digunakan untuk membangun toko, rumah kos, kendaraan yang disewakan atau lahan pertanian di tempat lain sehingga menjadi penunjang bagi peningkatan pendapatan di masa depan.

Meskipun responden berpindah pekerjaan, namun tidak serta merta meningkatkan penghasilan. Responden mayoritas menilai, meskipun sangat banyak yang berpindah kerja, namun penghasilan yang diperoleh tidak mengalami peningkatan (tetap) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.
Hubungan Tingkat Penghasilan Setelah Adanya Kegiatan Tambang
Dengan Pergeseran Mata Pencaharian

Tingkat Penghasilan	Pergeseran Mata Pencaharian			Total
	sangat banyak	sangat sedikit	tidak ada	
Semakin Sedikit	6.3%	1.3%	3.8%	11.3%
Tetap	28	6	11	45

	35.0%	7.5%	13.8%	56.3%
Semakin Bertambah	9	6	11	26
	11.3%	7.5%	13.8%	32.5%
Total	42	13	25	80
	52.5%	16.3%	31.3%	100.0%

Sumber: hasil survei lapangan, 2014

Hal yang menarik yaitu adanya hubungan durasi lama tinggal penduduk dengan penghasilan yang mereka terima. Bagi penduduk sekitar yang memiliki waktu tinggal lebih dari 15 tahun, mayoritas menilai tingkat penghasilan yang diperoleh setelah adanya aktivitas tambang tidak mengalami perubahan (tetap). Justru mayoritas penduduk yang baru tinggal dengan durasi kurang dari 5 tahun, menilai adanya peningkatan penghasilan (semakin bertambah). Hal ini karena masyarakat yang tinggal dalam durasi kurang dari 5 tahun merupakan pendatang (dari Jawa dan Sulawesi). Ini menunjukkan bahwa penduduk pendatang berhasil mengambil peluang ekonomi dari imbasan aktivitas pertambangan dibandingkan penduduk asli yang telah menetap lama.

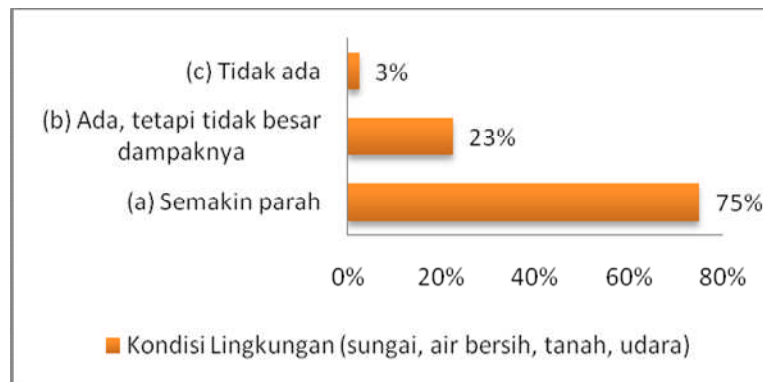
Tabel 4.
Hubungan Tingkat Penghasilan Setelah Adanya Kegiatan Tambang
Dengan Durasi Lama Tinggal

Tingkat Penghasilan	Durasi Lama Tinggal			Total
	<5 Tahun	5-15 Tahun	>15 Tahun	
Semakin Sedikit	2	3	4	9
	2.5%	3.8%	5.0%	11.3%
Tetap	9	11	25	45
	11.3%	13.8%	31.3%	56.3%
Semakin Bertambah	8	6	12	26
	10.0%	7.5%	15.0%	32.5%
Total	19	20	41	80
	23.8%	25.0%	51.3%	100.0%

Sumber: hasil survei lapangan, 2014

3. Dampak terhadap Lahan Pertanian dan Lingkungan

Kegiatan pertambangan batu bara telah nyata menyebabkan berkurangnya kawasan pertanian dan kesuburan tanah. Ini dikarenakan metode penggalan batu bara adalah *open pit* sehingga merusak kualitas lapisan tanah subur yang berada pada struktur atas. Warga juga mengkhawatirkan lahan potensi pertanian yang beralih fungsi menjadi kebun sawit, dikarenakan lahan tersebut menganggur. Hasil kajian kami menemukan fakta bahwa lebih dari 70 persen masyarakat menyatakan kondisi lingkungan saat ini semakin parah dibandingkan sebelumnya. Kualitas air, sungai, tanah, dan udara sudah sedemikian tercemar.



Gambar 5.

Penilaian Masyarakat di 4 Kecamatan terhadap Kondisi Lingkungan

Eksternalitas negatif seperti kualitas udara yang menurun akibat debu yang berlangsung setiap hari sangat dirasakan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Akibat Jalan lingkungan berdekatan dengan *stok pile* perusahaan tambang batu bara yang hanya beberapa meter dari kawasan permukiman warga. Dampak debu dirasakan warga hingga radius tiga kilometer. Ini dialami di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Tenggara Seberang, Tanah Merah, dan Palaran yang jumlah penduduknya sebanyak 6.254 orang. Sakit paru-paru yang mengakibatkan infeksi pernapasan (ISPA) dan penglihatan dan juga radiasi yang berpotensi memicu kanker dan penyakit TBC mulai dicemaskan warga.



Gambar 7.

Kondisi Jalan Lingkungan dan Stokpile batu bara di Kecamatan Loa Kulu

4. Rekapitulasi Persepsi Masyarakat tentang Perubahan Pra-Pasca Tambang Batu Bara

Dari hasil temuan lapangan di empat Kecamatan, dapat dibuat rekapitulasi persepsi masyarakat tentang perubahan yang terjadi pada seluruh dimensi atau indikator. Perubahan ini terdiri atas dua jenis yaitu perubahan positif atau negatif. Hasil rekapitulasi dapat dilihat pada Tabel 5. Pada tiga wilayah yang dijadikan obyek penelitian didapatkan hasil yang serupa. Masyarakat menganggap keberadaan kegiatan pertambangan batu bara memiliki efek positif terhadap kesejahteraan penduduk lokal namun lebih banyak perubahan yang mengarah ke dampak negatif. Sebesar 64% masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara memberi penilaian negatif (kesejahteraan menurun) keberadaan tambang batu bara. Kemudian 86% masyarakat di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda juga memberi penilaian negatif keberadaan tambang batu bara.

Hal yang sama pun juga muncul dari persepsi warga di Kecamatan Loa Kulu yang mengakui adanya perubahan positif dari tambang batu bara di wilayah tempat tinggalnya yaitu sebesar 32%. Sisanya sebesar 68 persen lebih menilai perubahan yang terjadi ke arah yang negatif.

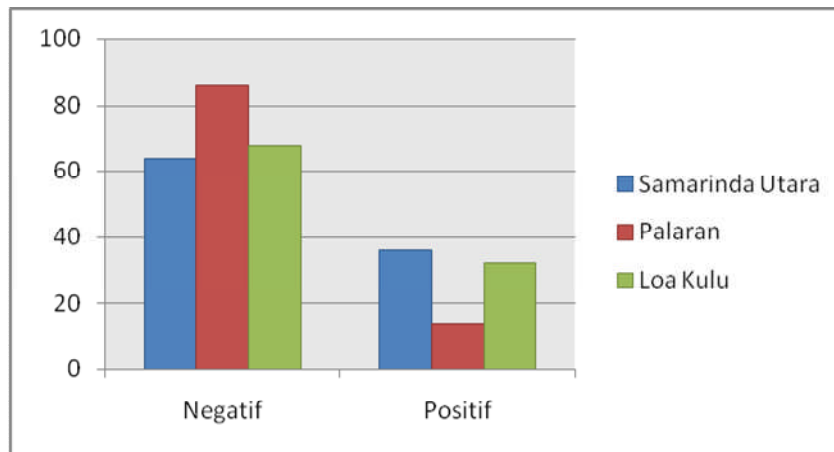
Tabel 5.

Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Area Tambang

Kecamatan	Arah Penurunan Kesejahteraan	Pra – Pasca Tambang (%)
------------------	---	------------------------------------

Samarinda Utara	Menurun	64
	Meningkat	36
Palaran	Menurun	86
	Meningkat	14
Loa Kulu	Menurun	68
	Meningkat	32

Sumber: Data Primer, diolah (2013 dan 2014)



Gambar 8.

Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan di Tiga Wilayah

E. Penutup

Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini ialah: Pertama, penduduk lokal merasakan lebih banyak perubahan negatif daripada perubahan positif sesudah kegiatan tambang batu bara beroperasi di wilayah mereka. Perubahan negatif ini akibat menurunnya kondisi saat ini dibandingkan sebelum adanya tambang batu bara. Kedua, masyarakat yang menjadi responden juga mengakui ada dampak positif dari kegiatan pertambangan batu di wilayah mereka, seperti mata pencaharian dan penghasilan, namun sifatnya adalah efek tidak langsung dibandingkan efek langsung. Efek ini juga bersifat temporer di mana ketika pertambangan batu bara selesai masa operasinya, maka efek pada penghasilan dan mata pencaharian juga akan terhenti.

Kami dapat menyimpulkan, pada kasus temuan penelitian ini, bahwa perdebatan terhadap efek negatif dari imbasan sumber daya alam terhadap kesejahteraan penduduk lokal, terbukti adanya.

Bagi penduduk lokal yang permukimannya terdampak langsung operasi tambang, sangat sedikit perubahan positif yang mereka rasakan. Sangat kurang perhatian dari perusahaan pertambangan dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, serta sangat banyak implikasi penurunan kualitas kesejahteraan (dilihat dari dimensi ekonomi, Kesehatan, sosial dan infrastruktur) yang mereka alami. Kami dapat mengatakan bahwa baik pada level data maupun empiris lapangan, eksploitasi sumber daya alam, terutama batu bara di Indonesia, berdampak buruk dan luas bagi masyarakat.

Saran yang dapat disampaikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan dan penganggaran yang pro-pada kesejahteraan penduduk lokal yang terimbas langsung aktivitas operasi batu bara. Perencanaan harus bersifat partisipatif dan tidak semata teknokratis. Perencanaan ini harus masuk dalam Rencana Strategis SKPD terkait dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan APBD.
- b. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu dipertegas dalam Peraturan Daerah yang mana di dalamnya memuat berapa jumlah dana yang harus disisihkan perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya perencanaan program apa saja dan prioritas daerah mana yang dikembangkan serta keberlanjutannya dijamin dan dilindungi dalam ketentuan regulasi tersebut. Selama ini Perda yang mengatur dana CSR tidak tegas menjelaskan secara rinci hal-hal seperti di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Busse, M. & Groning, S. 2013. The resource curse revisited: governance and natural resources. *Public Choice* (2013) 154: 1-20

Dutt, Kuntala L. and Petra Mahy. 2007. *Impacts of Mining on Women and Youth in Indonesia: Two Mining Locations*.
https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/rmap/lahiridutt/CR3_KLD_Mahy_Impacts_Mining_Indonesia.pdf

Escaping the 'resource curse': East Kalimantan at the tipping point . The Jakarta Post, Januari 17 2013, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/17/escaping-resource-curse-e-kalimantan->

[tipping-point.html](#)Pegg, Scott. 2006. Can policy intervention beat the resource curse? Evidence from the Chad-Cameroon pipeline project. *Oxford Journals African Affairs*, Volume 105, Issue 418, Pp 1-125

Fatah, Luthfi. The Impacts of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province, Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin* Vol. 25 No. 1 (2008), pp. 85-98

Frankel, J. 2010. *The natural resource curse: a survey*. NBER Working Paper No. 15836, NBER.

Hammond, John L. 2011. The resource curse and oil revenues in Angola and Venezuela. *Science & Society*. Vol. 75, No. 3, July 2011, 348-378

Imi, Atsushi. 2007. *Escaping from the Resource Curse: Evidence from Botswana and the Rest of the World*. IMF Staff Papers Vol 54 No. 4.

Jooppe, Ing. B. 2011. Christian. Coal Transport Kalimantan. Thesis Report. Delf University of Technology. http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:18db9469-f613-4580-b390-c4a5f2ba3931/20111231def_Coal_Transport_Kalimantan.pdf

Kolstad, I. and Arne Wiig. 2009. Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries? *World Development* Vol. 37, No. 3, pp. 521 – 532

Komarulzaman, A and Alisjahbana, Armida S. 2006. *Testing the Natural Resource Curse Hypothesis in Indonesia: Evidence at the Regional Level*. CEDS Unpad Working Paper in Economics and Development Studies No. 200602.

Maslyuk, S., and Dinusha Dharmaratna. 2012. *Impact of Shocks on Australian Coal Mining*. Department of Economics, Discussion Paper 37/12. Monash University. <http://www.buseco.monash.edu.au/eco/research/papers/2012/3712impactmaslyukdharmaratna.pdf>

Miler R. and Blair, P. 2009. *Input-Output Analysis: Foundations and Extension*. Cambridge Press. New York.

Miles, Matthew B. dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Pennsylvania Economy League of Soutwestern Pennsylvania. *The Economic Impact of the Coal Industry in Pennsylvania..* April, 2010. <http://www.alleghenyconference.org/PennsylvaniaEconomyLeague/PDFs/EconomicImpactAnalyses/EconomicImpactOfCoalIndustryInPa0410.pdf>

Pick, D. & Thein Htwe H. 2010. Development failure and the resource curse: the case of Myanmar. *International Journal of Sociology and Social Policy*. Vol. 30 No 5/6, 2010, pp. 267-279

Robert T. Deacon. *The Political Economy of Natural Resource Curse: A Survey of Theory and Evidence*. Foundations and Trends in Microeconomics. Vol. 7 No. 2 (2011) 111-208.

Sachs, J.D. & Warner, A.M. 2001. The curse of natural resources. *European Economic Review*, 45, 827-838

Sanglimsuwan, Karnjana. Natural Resources: Are They Really a Curse? Evidence from Asia-Pacific. *Executive Journal*. Chulalongkorn University. Volume 98, Issue 213, Pp 24-65

Smith, Brock. *The Resources Curse Exorcised: Evidence from a Panel Data Countries*. Working Paper Series Department of Economics. March 18, 2013.

Sugiri, A. and Adiputra, I. 2011. Natural resources for local people's welfare? People participation in oil governance of Cepu Block, Indonesia. *International Journal of Arts and Sciences* 4(13):169-187.

Torvik, R. 2002. Natural resources, rent seeking and welfare. *Journal of Development Economics*, 67, 455-470

RPSEP-44

REFLEKSI PENCAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PADA KABINET INDONESIA BERSATU JILID II

Purwaningdyah Murti Wahyuni,SH.,M.Hum

UPBJJ UT Semarang

purwaningdyah@ut.ac.id

dan

Siswandaru K.,SE.,Akt,M.Si

UPBJJ UT Semarang

ndarufekon@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian besaran inflasi pada suatu negara merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan dan perputaran seluruh sumber daya ekonomi di suatu negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2013 adalah sebesar 6,2% pada tahun 2010, sebesar 6,5% pada tahun 2011, sebesar 6,3% pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 hanya sebesar 5,7%. Disamping itu pergerakan rata-rata laju inflasi Indonesia pada periode yang sama yang ditargetkan hanya berkisar sebesar 4%-6%, realisasinya masih belum sesuai dengan target yaitu sebesar 7% pada tahun 2010, sebesar 3,8% pada tahun 2011, sebesar 4,3% pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi sebesar 8% pada tahun 2013.

Beberapa hal dalam pengambilan kebijakan Pemerintah selama periode Kabinet Indonesia Bersatu II yang dianggap menjadi hal yang memicu belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengendalian inflasi Indonesia antara lain pengambilan kebijakan Pemerintah terhadap subsidi bahan bakar minyak yang berdampak pada peningkatan defisit APBN, semakin besarnya defisit neraca perdagangan akibat ketidakseimbangan ekspor dan impor serta defisit neraca transaksi berjalan akibat ketidakseimbangan inflow dan outflow devisa negara. Makalah ini akan menguraikan hal-hal yang menjadi faktor pemicu perlambatan ekonomi Indonesia dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi sesuai RPJMN 2010-2014.

Kata Kunci: refleksi, target, pertumbuhan ekonomi Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian besaran inflasi pada suatu negara merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan dan perputaran seluruh sumber daya ekonomi di suatu negara. Dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat adanya peningkatan atau penurunan dari perekonomian yang sedang terjadi disuatu negara, sedangkan pengendalian besaran inflasi dapat dijadikan patokan agar kestabilan perekonomian dapat dikendalikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ingin diciptakan oleh pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan
2010	6,2 %
2011	6,5 %
2012	6,3 %
2013	5,7 %

Sumber : Bank Indonesia

Disamping itu pergerakan rata-rata laju inflasi Indonesia pada periode yang sama yang ditargetkan hanya berkisar sebesar 4%-6%, realisasinya masih belum sesuai dengan target yang diinginkan yaitu sebesar :

Tabel 1
Rata-rata Laju Inflasi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan
2010	7 %
2011	3,8 %
2012	4,3 %

2013	8 %
------	-----

Sumber : Bank Indonesia

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sampai saat ini telah memberikan hasil pembangunan yang cukup baik. Dibandingkan dengan kondisi awal pada 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih demokratis.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan di tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Pengakuan dunia internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat dalam hal demokrasi adalah bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan bidang politik. Secara umum, kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi telah mengalami peningkatan, tetapi upaya sungguh-sungguh perlu terus dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif disertai dengan kerja keras dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dengan demikian, keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

B. METODOLOGI

Adapun analisis yang digunakan oleh penulis kali ini adalah analisis deskriptis sederhana dengan bantuan literatur, dimana didalamnya penulis ingin mengemukakan segala sesuatu yang telah dicapai oleh KABINET INDONESIA BERSATU JILID II.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi serta Agenda Utama Pembangunan dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) Prioritas Nasional lainnya yang dapat kita lihat dalam Buku Laporan EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Maret 2013) yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran:

- (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih,
- (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan
- (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang didukung oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemda;
- b) penguatan otonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penataan daerah, penggunaan dana perimbangan daerah, dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah;
- c) pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit;
- d) percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan;
- e) penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik; dan
- f) perbaikan data kependudukan melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), serta penerapan eKTP.

Secara umum, pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan tata kelola masih kurang menggembirakan, yang ditunjukkan dengan tidak akan tercapainya beberapa target yaitu: persentase Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemda (daerah), peringkat kemudahan berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan. Sedangkan Integritas pelayanan publik (daerah) dan persentase Kab/Kota yang akuntabel memerlukan kerja keras untuk mencapai target. Sementara indikator yang diperkirakan tercapai antara lain persentase K/L dengan opini WTP atas laporan keuangan K/L (pusat),

skor integritas pelayanan publik (pusat), persentase K/L yang Akuntabel, dan persentase provinsi yang akuntabel.

2. Pendidikan yang ditujukan terutama untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan diarahkan terutama untuk :

- a. meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;
- b. meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal;
- c. meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;
- d. meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- e. memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; dan
- g. memperkuat tata kelola pendidikan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang berdampak pada perbaikan kinerja pendidikan nasional.

Sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yang diindikasikan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, peningkatan angka partisipasi murni (APM), dan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di seluruh jenjang pendidikan. Pembangunan pendidikan hingga tahun 2012 telah mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, bahkan capaian beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

Indikator pembangunan bidang pendidikan sampai dengan 2012 telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan arah pencapaian target RPJMN. Pencapaian dua Indikator utama bidang pendidikan adalah: Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,72 tahun pada 2009 menjadi 7,92 tahun pada 2011, demikian juga Angka Buta Aksara pada Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas juga telah berhasil diturunkan dari 5,3% pada 2009 menjadi 4,43% pada 2011. Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah juga menunjukkan perkembangan yang sama. Diperkirakan target RPJMN pada 2014 akan tercapai. Meskipun target-target bidang pendidikan dapat tercapai, namun masih terdapat ketidak-sesuaian dengan kebutuhan pendidikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa seperti: krisis karakter bangsa, penurunan daya saing,

korupsi yang merajalela, dan permintaan pasar tenaga kerja. Pendidikan tidak hanya memperkaya siswa dengan pengetahuan saja tetapi juga harus meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan pengembangan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Perbaikan kurikulum yang akan diterapkan di tahun 2013, diharapkan bukan hanya memasukkan kurikulum budi pekerti, tetapi juga perlu memasukkan komponen etos kerja dan budaya anti korupsi untuk mengatasi krisis karakter bangsa yang terjadi saat ini. Kurikulum ini juga didesain sesuai dengan pasar kerja dan mendorong terjalinnya networking antara sekolah dengan dunia usaha.

3. Kesehatan dengan penitikberatan pada pendekatan preventif dan kuratif.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam RPJMN 2010-2014, sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, dan menurunnya angka kelahiran total (total fertility rate/TFR). Pencapaian sasaran pembangunan nasional didukung melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, dan pemenuhan sumber daya kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Selain itu, didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, penyediaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan tidak mampu, penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, pengembangan manajemen dan informasi kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk melalui revitalisasi Program KB, serta penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Secara umum pencapaian sasaran pembangunan kesehatan masih kurang menggembirakan, seluruh capaian indikator.

Dalam laporannya pemerintah berasumsi bahwa keadilan sosial ditunjukkan oleh meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2011 cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan mencapai 64,58%, yang dilaksanakan melalui Program Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan jaminan kesehatan lainnya. Dengan demikian masih ada sekitar 35,42% masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Untuk itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target 2014 sebesar 100% penduduk terlayani jaminan kesehatan. Hal yang harus dilakukan antara lain pemerintah harus mempercepat

terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar pelayanan kesehatan akan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, mulai pekerja hingga rakyat miskin. Selain itu pemerintah perlu memastikan agar ketepatan data sasaran Jamkesmas di daerah benar-benar akurat sehingga pelayanan jaminan sosial dapat semakin optimal. Dalam prakteknya ternyata masih banyak hal-hal yang membuat BPJS terkendala oleh berbagai masalah, tentu hal ini amat sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka penyempurnaannya.

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan status kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan, namun untuk mencapai target UHH pada 2014 perlu kerja keras terutama melihat perkembangan AKI dan AKB yang kurang memuaskan. AKB pada 2012 adalah sebesar 32 (hasil sementara SDKI 2012). Angka ini lebih rendah dari AKB 2009 sebesar 34. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan bidang kesehatan. Meskipun demikian, capaian ini masih jauh dari target penurunan AKB dalam RPJMN 2014. Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengupayakan capaian target tersebut, diantaranya dengan memperluas cakupan pelayanan kunjungan neonatal, imunisasi, pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pelayanan tersebut agar dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berada di daerah tertinggal. Hal penting lainnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

4. Penanggulangan Kemiskinan termasuk perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat melalui berbagai program penang-gulangan kemiskinan. Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 % pada 2009 menjadi 11,66 % pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju per-tumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan

yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 % pada tahun 2014.

Dalam *Bisnis.com* tanggal 10 Agustus 2014, Pemerintah mengaku berat untuk mencapai target kemiskinan tahun ini sebesar 10,5% seiring dengan tren perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang masih berlangsung apalagi pada kuartal II/2014 perekonomian Indonesia hanya melaju 5,12%. Walaupun optimistis target pengangguran 5,8% - 5,9% tidak akan terlampaui karena pada Februari lalu tingkat pengangguran sebesar 5,7%. Kepala Bappenas Armida Alishjabana mengatakan butuh *extra effort* jika tetap ingin mencapai target kemiskinan. “Terakhir 11,25% ya memang berat. Jadi kan kalau mau akhir tahun harus 0,75% ,” ungkap beliau. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Maret 2014 sebesar 11,28% turun tipis 0,08% dari periode yang sama sebelumnya 11,36%. Capaian penurunan kemiskinan tersebut merupakan kinerja terburuk pemerintah setidaknya sejak tiga tahun terakhir. Bahkan, capaian tersebut juga lebih rendah dari prediksi angka kemiskinan Maret 2014 dari Bank Dunia sebesar 11%-11,1%. Adapun, angka kemiskinan Maret 2013 tercatat turun 0,59% dari 11,96%. Sementara angka kemiskinan Maret 2012 turun 0,53% dari 12,46%. Tak tanggung-tanggung, belum lama ini Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan sulit mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5% seperti yang disepakati pemerintah dengan Banggar DPR dalam APBN-P 2014. Hasil hitungannya, pemerintah hanya sanggup mengejar pertumbuhan 5,3%. Armida mengatakan walaupun berdampak pada sulitnya pencapaian target kemiskinan, perlambatan ekonomi saat ini memang difokuskan untuk proses restrukturasi dan transformasi perekonomian lewat mitigasi terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan.

5. Ketahanan Pangan serta lanjutan revitalisasi pertanian.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat; melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian dan perikanan; dan peningkatan pendapatan petani; serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun sasaran yang perlu dicapai yaitu terciptanya kemandirian ketahanan pangan pada akhir

tahun 2014 pencapaian surplus beras 10 juta ton dan meningkatnya produksi komoditas pangan utama lainnya, meningkatnya PDB sektor pertanian sekitar 3,7 % per tahun dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014. Secara umum, selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 % per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 % per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009.

Peningkatan kesejahteraan petani juga merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat jumlah petani yang cukup besar. Salah satu Indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN, nilai NTP meningkat dari 101,20 (2009) menjadi 105,76 pada 2012. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan petani. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mendekati angka target pada 2014 sebesar 115-120. Kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya pada stabilitas harga, tetapi juga pada peningkatan produksi beberapa komoditi pangan utama (padi, jagung, tebu dan perikanan) yang kurang memadai, bahkan produksi kedelai mengalami penurunan. Oleh karena itu, selain menjaga stabilitas harga komoditi pangan, upaya yang perlu dilakukan adalah akselerasi program swasembada pangan terutama kedelai dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

6. Infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, dan terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran pembangunan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 alokasi anggaran untuk infrastruktur terhadap PDB terus ditingkatkan

dari 3,4 % pada tahun 2010, menjadi 4,1 % pada tahun 2012, sehingga diharapkan akan mengarah pada pemenuhan minimal 5 % dari PDB. Peningkatan tersebut merupakan upaya kuat dari pemerintah untuk terus mendorong agar dunia usaha di Indonesia tetap bergairah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi antara 6,3–6,8 %, sesuai sasaran RPJMN 2010-2014, di tengah-tengah perekonomian dunia yang cenderung tidak ada perubahan.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan pula melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dari estimasi nilai investasi KPS dalam RPJMN 2010-2014 sebesar Rp344.6 triliun, sampai saat ini proyek KPS yang telah selesai transaksi dan mulai konstruksi adalah sebesar Rp. 32 triliun. Pada tahun 2012 telah digulirkan peluang investasi proyek KPS sejumlah 58 proyek dengan perkiraan total investasi mencapai Rp. 500 Triliun, dimana saat ini 17 proyek senilai Rp. 98 trilliun sedang dalam proses transaksi dan 13 proyek senilai Rp. 58 trilliun sedang dalam proses persiapan transaksi. Dengan semakin memadainya alokasi anggaran infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghasilkan capaian-capaian penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan eksporimpor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014, dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai.

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010-2014 terutama dalam upaya meningkatkan keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) yang dilaksanakan melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, secara umum akan dapat dicapai. Hingga akhir tahun 2012 terdapat pertambahan jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dari 87,3 % pada awal tahun 2009 menjadi 90,82 % pada akhir tahun 2012. Berdasarkan kinerja kemanfaatannya, penambahan lajur-Km dan lebar jalan telah menghasilkan rasio volume lalu lintas dengan kapasitas (*V/C ratio*) jalan nasional rata-rata mencapai 0,41, yang berarti bahwa terdapat ruang pemanfaatan jalan yang masih memadai.

Sementara itu capaian pembangunan jalan tol hingga Juni 2012, terdapat penambahan panjang jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi sepanjang 86,19 Km baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta. Capaian tersebut masih jauh dari target RPJMN sepanjang 1.296 km sehingga memerlukan upaya yang keras dan sungguh-sungguh khususnya terkait dengan hambatan pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dan membaiknya peringkat investasi (investment rating) Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS, dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha. Pertumbuhan yang baik terjadi pada PMTB, PMA, dan PMDN. Pertumbuhan PMTB tahun 2010 dan 2011 masing-masing 8,5 % dan 8,8 %, lebih cepat dari pertumbuhannya pada 2009 yaitu 3,3 %. Pada tahun 2012 PMTB tumbuh mencapai 10 % (y-o-y, hingga Semester I). Selanjutnya, PMDN meningkat dari Rp37,8 triliun pada 2009 menjadi Rp76,0 triliun pada tahun 2011, demikian pula PMA meningkat dari USD 10,8 juta menjadi USD19,5 juta. Hingga tahun 2012 Triwulan III, realisasi PMDN dan PMA masing-masing sebesar Rp. 25,2 triliun dan USD6,3 juta atau masing-masing meningkat sekitar 37% dan 22% dibandingkan dengan realisasi Triwulan III tahun 2011. Selain itu, peringkat investasi Indonesia telah membaik sehingga dimasukkan dalam kategori negara yang layak investasi (investment grade), yaitu Fitch: BBB-, Moody's: BAA3, dan Standard & Poors: BB+. Peningkatan peringkat ini merupakan cerminan perbaikan persepsi terhadap situasi perekonomian Indonesia. Predikat investment grade akan menambah kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Laporan *World Economic Forum (WEF)* juga menyebutkan bahwa posisi daya saing ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi ke-46 pada tahun 2011 menjadi posisi ke-50 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam iklim investasi di Indonesia, yang disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan korup, infrastruktur tidak memadai, etika kerja buruk, peraturan buruh yang membatasi, akses pada pembiayaan yang sulit, kurangnya jumlah tenaga kerja terdidik, dan rendahnya kemampuan berinovasi. Jika segala hambatan diatas tidak segera diatasi maka diprediksi target peringkat ke-75 dalam kemudahan berusaha (IFC) pada tahun 2014 tidak akan tercapai. Diperkirakan pada 2014 peringkat kemudahan berusaha hanya berada pada kisaran di atas 100. Untuk mencapai target penurunan tingkat korupsi dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah akselerasi secara menyeluruh, misalnya melalui:

- a) penegakan hukum secara konsisten dan pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi;
- b) penguatan dan pembenahan institusi penegak hukum beserta perangkat yang ada di Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengadilan (MA, MK, KY);
- c) menyelesaikan dengan segera kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan politisi, mafia hukum, dan pejabat publik tingkat tinggi;
- d) penguatan peran dan fungsi KPK dan pengadilan TIPIKOR; dan
- e) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang diperluas baik sasaran maupun kualitasnya, seperti, penerapan pakta integritas, kontrak kinerja, pengembangan IKU pada instansi pemerintah, serta evaluasi kinerja program/kegiatan yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi.

RPJMN 2010-2014 menyebutkan pentingnya penegakan pilar demokrasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang demokratis. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap hak azasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, dan jaminan terhadap keberagaman. Berkaitan dengan itu, penegakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia juga dilakukan melalui penguatan peran kelembagaan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan harmoni interaksi antarlembaga tersebut, yang mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala

macam bentuk diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggungjawab. Dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia mendapat catatan kritis dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei 2012, di Jenewa, Swiss. Sebanyak 74 negara berpartisipasi dalam sidang UPR tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan menerima 179 rekomendasi yang disampaikan oleh UPR, dengan rincian langsung mengadopsi 143 rekomendasi dan akan mempertimbangkan kembali 36 rekomendasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius dan bersungguh-sungguh dalam penghapusan diskriminasi, intoleransi beragama, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta impunitas atas kasus pelanggaran HAM berat.

Pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil merupakan salah satu pilar demokrasi penting. Sasaran pemerintah dalam bidang politik seperti yang tertuang dalam RPJMN adalah Pemilu yang adil dan tidak diskriminatif dengan tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 mencapai 75 % dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014 yang mencapai skor 73. Pencapaian partisipasi politik masyarakat dalam pemilu baru dapat diketahui setelah pelaksanaan pemilu pada 2014. Dalam laporan Freedom of the World 2012, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang bebas (*Freedom Status: Free*) bersama negara-negara maju karena mampu memberikan dan menjaga hak politik dan kebebasan sipil masyarakat. Freedom House menilai skor Tingkat Kebebasan (*Freedom Rating*) Indonesia sebesar 2,5 (skala 0-10, semakin kecil semakin baik) dan dapat dipertahankan sejak 2009 sampai 2012.

Kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan salah satu pendukung demokrasi yang penting juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh dicabutnya kewenangan Jaksa Agung untuk melarang peredaran buku pada tahun 2010, terjaminnya kebebasan pers dan penggunaan internet. Penilaian *Freedom House* atas kondisi kebebasan pers dan penggunaan internet di Indonesia merupakan gambaran terjaganya kondisi kebebasan pers yang semakin membaik. Sampai 2012 Indonesia memperoleh status Partly Free dalam bidang pers, dengan skor kebebasan pers (Freedom of Press) yang semakin membaik, yaitu dari 54 pada tahun 2009 menjadi 49 pada 2012. Perbaikan skor ini didukung oleh membaiknya skor pada lingkungan legal dan politik. Terjaganya pemenuhan hak politik, kebebasan sipil masyarakat dan membaiknya kebebasan pers merupakan capaian

penting dalam pembangunan pilar-pilar demokrasi. Meskipun demikian, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh:

- a. meningkatnya jumlah kekerasan di masyarakat dan antarkelompok masyarakat sebagai dampak dari masih adanya politik pragmatisme-transaksional pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan permasalahan institusional politik yang berpotensi pada munculnya political distrust;
- b. adanya masalah prosedural pemilu dalam bentuk belum akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya hambatan hak memilih dan dipilih, dan masih buruknya fasilitas penyandang cacat pada Pemilu;
- c. terbatasnya kaderisasi dalam parpol; dan
- d. masih rendah peran DPRD, terutama dalam pelaksanaan hak inisiatif.

Diprediksi bahwa sasaran RPJMN 2014 untuk penegakan pilar demokrasi masih berpotensi dapat dicapai melalui pelaksanaan :

1. Penyusunan DPT secara profesional, partisipatif dan transparan;
2. Pendidikan politik dan pemilih tepat sasaran, penggunaan budaya lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Pengawasan secara intensif penyelesaian peraturan perundangan bidang politik agar tepat waktu;
4. Desain bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu;
5. Pengawasan ketersediaan anggaran untuk tahapan pemilu agar tepat waktu;
6. Perhatian pada penyediaan fasilitasi penyandang cacat.

Wujud dari penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan dilaksanakan melalui peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Agenda penegakan hukum mencakup keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang, termasuk proses penjabarannya, pengawasannya dan penegakan aturan hukumnya. Beberapa indikator utama pada agenda ini, yaitu jumlah penyelesaian perkara, baik di tingkat Peradilan Umum dan MA, dan penanganan kasus korupsi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target

RPJMN, sementara indikator penyelesaian Prolegnas diperkirakan akan sangat sulit dicapai pada tahun 2014.

Salah satu penyebab buruknya penilaian masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia ternyata tidak terlepas dari sistem hukum itu sendiri, yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia tidak dapat bekerja secara maksimal. Sebagai contoh adalah adanya peraturan yang mengharuskan para penegak hukum untuk meminta izin kepada Presiden dalam melakukan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Sementara itu, proses pembuatan undang-undang berjalan lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya capaian Prolegnas setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kebuntuan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif, karena capaian Prolegnas adalah hasil kompromi antara DPR dan Pemerintah.

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan DPR lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran daripada fungsi legislasi. Rendahnya capaian Prolegnas perlu dijadikan bahan koreksi bersama antara Pemerintah dan DPR dalam menetapkan target Prolegnas dalam tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, perlu perbaikan /peningkatan efektifitas komunikasi dan penyesuaian target Prolegnas dengan mempertimbangkan kemampuan penyelesaiannya. Jika hal ini tidak segera diatasi maka diprediksi target Prolegnas tahun 2014 tidak akan tercapai.

8. Energi yang diprioritaskan pada terjaminnya kelangsungan pertumbuhan nasional dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluasluasnya.
 - a) Kebijakan pembangunan bidang energi diarahkan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi guna menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional. Substansi inti dari kebijakan bidang energi mencakup antara lain kapasitas energi, pemanfaatan energi alternatif khususnya panas bumi, dan konversi penggunaan sumber energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Sasaran yang ingin dicapai dalam kapasitas energi adalah: (a) produksi minyak bumi mulai tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari; (b) tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 3.000 megawatt (MW) per tahun; (c) rasio elektrifikasi sebesar 80 % pada tahun 2014; dan (d) Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi alternatif, khususnya panas bumi, mencapai 5.000 MW. Sedangkan sasaran

dalam konversi penggunaan gas adalah: (a) terbangunnya jaringan gas kota di 19 kota dengan 80.000 sambungan rumah, dan;

b) terbangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 21 unit. Secara umum, pencapaian sasaran utama pembangunan bidang energi masih belum menggembirakan, terutama produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diarahkan pada:

- a) antisipasi dampak dan pengendalian laju perubahan iklim;
- b) upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
- d) penanggulangan bencana.

Hal tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran utama, yaitu Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana. Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana dilakukan guna mengantisipasi perubahan iklim. Secara umum sasaran pembangunan tersebut telah tercapai (lihat Tabel IV.15). Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, yakni dari 66 % pada periode 2010-2011 menjadi 69% pada periode 2011-2012. Ini merupakan wujud dari upaya perbaikan kondisi lingkungan dan penyeimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk menurunkan beban pencemaran dan mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan kondisi lingkungan yang ada saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang diantaranya adalah pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik yang mengutamakan dan menjamin pertumbuhannya keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya. Sedangkan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Secara umum pencapaian sasaran Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator utama prioritas ini, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014. Namun demikian target pengentasan daerah tertinggal yang sedikitnya mencapai 50 Kabupaten pada 2014, diperkirakan akan tercapai.

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh rakyat tanpa membuat kesenjangan dan disparitas. Walaupun selama ini Pemerintah sudah bekerja keras untuk dapat menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, tetapi beberapa indikator utama dalam RPJMN diperkirakan akan sulit untuk dicapai targetnya. Beberapa target tersebut antara lain persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dan angka kemiskinan daerah tertinggal. Jangkauan pelayanan kesehatan perlu diperluas, khususnya melalui perluasan cakupan sistem jaminan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu pengelolaan di bawah BPJS kesehatan, yang mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan Jamkesda.

Dalam kaitan dengan keadilan ekonomi, perlu dipercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat padat karya. Sebagai contoh, percepatan pembangunan bidang pertanian, terutama akselerasi program swasembada pangan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, peningkatan akses petani pada sumber daya produktif, dan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyiapkan program/kegiatan daerah yang

mendukung. Demikian juga dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan sekitarnya perlu lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah, yang selanjutnya akan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan pada pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya diperlukan untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa. Hal ini harus didukung dan disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim kepulauan. Maka, untuk mencapai hal-hal tersebut disusunlah arah Kebijakan prioritas pembangunan di bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, yaitu: (1) meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, (2) mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya, serta (3) menguatkan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis. Sementara sasaran pembangunannya adalah: (1) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (2) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; (3) penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; dan (4) terselenggaranya paket riset insentif SINAS, yang terdiri atas insentif riset dasar, insentif riset terapan, insentif difusi iptek dan insentif peningkatan kapasitas iptek. Pembangunan prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi hingga bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014, bahkan capaian beberapa indikator bidang tersebut telah melampaui target sasaran RPJMN 2010-2014

12. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, khususnya pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan/penangkalan terorisme.

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencakup substansi inti penanggulangan terorisme, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, pembangunan bidang hukum, dan pendayagunaan industri pertahanan. Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2010–2014 untuk penanggulangan terorisme ditekankan pada pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme, dan pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia dilakukan antara lain melalui partisipasi aktif dan prakarsa Indonesia dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan melaksanakan kerja sama internasional dalam penanganan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum PBB; dan meningkatnya kerjasama multilateral dalam isu perdamaian dunia. Arah kebijakan pembangunan hukum adalah terwujudnya penegakan hukum, terjaganya ketertiban umum dan tercapainya peningkatan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Saat ini yang menjadi prioritas Pemerintah adalah mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Sasaran outcome dalam pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 dengan skor 5. Salah satu sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnya postur dan struktur pertahanan sebesar 25-27,5 % dari kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar, dengan dukungan dari industri pertahanan nasional yang kuat dan handal. Oleh karena itu, pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta Road Map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya merupakan arah kebijakan yang sangat strategis bagi upaya kemandirian alutsista TNI sekaligus untuk mengurangi ketergantungan alutsista produksi luar negeri.

13. Bidang Perekonomian yang terkait dengan kebijakan Industri Nasional dan peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Arah kebijakan PN Lainnya di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Selain itu, hingga saat ini telah tercapai pertumbuhan pada sektor non-migas; pemantapan peran Indonesia dalam berbagai forum perdagangan internasional; dan perbaikan pelayanan terhadap TKI. Sasaran PN perekonomian secara umum tercapai, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri.

Pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan perbaikan yang nyata walaupun masih ada indikator yang kurang memuaskan sehingga untuk mencapainya diperlukan kerja keras, perbaikan dan perkuatan program.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia telah diakui dunia internasional antara lain dengan bergabungnya Indonesia dalam kelompok G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 % PDB dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global. Selain itu, di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup memuaskan dari 4,6 % di tahun 2009 menjadi 6,3 % di triwulan dua tahun 2012. Demikian juga dengan laju inflasi berhasil dikendalikan, dari 7% pada tahun 2010 menjadi sekitar 3,5 % pada tahun 2012. Penurunan Inflasi ini mampu mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan cukup besar dari 6,6 % di tahun 2010 menjadi 4,2 % tahun 2012, tingkat suku bunga yang relatif rendah ini akan lebih mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil.

Selama tiga tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 7,87% pada 2009 menjadi 6,32% pada 2012. Berdasarkan progres tersebut, target pengangguran terbuka pada 2014 sebesar 5-6% diperkirakan tercapai. Untuk mempertahankan laju perbaikan TPT, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan upaya mengatasi kendala-kendala inefisiensi yang menurunkan daya saing produk Indonesia. Kendala-kendala tersebut antara lain produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah 2,

tingkat korupsi yang tinggi, dan infrastruktur yang masih terbatas. Selanjutnya tuntutan kenaikan upah buruh yang tidak diikuti perbaikan kendala-kendala yang ada akan membebani pengusaha dan akan berdampak pada pemutusan kerja.

Menurut P.A. Samuelson dalam Buku Pengantar Ilmu Ekonomi, Wawan Hermawan (Universitas Terbuka : 2014) dikatakan bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi perekonomian yaitu :

1. Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi
2. Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah.
3. Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Dalam Pengantar Ekonomi Makro (Sony Harry B. , Universitas Terbuka : 2012) dikatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu :

1. Tanah dan kekayaan alam
 2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja
 3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi
 4. Sistem sosial dan Sikap Masyarakat
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya mencakup : Peningkatan kerukunan umat beragama maupun peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Pembangunan PN Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui pembangunan Agama, Pariwisata, Pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan, serta Pemuda dan Olahraga. Kebijakan pembangunan agama diarahkan untuk:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. pelaksanaan haji yang tertib dan lancar.

Adapun sasaran utama pembangunan bidang agama dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji yang tertib dan lancar. Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan destinasi, peningkatan promosi pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata, dan penguatan kelembagaan pariwisata. Sasaran utama pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2010-2014 adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 % secara bertahap dalam lima tahun. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada:

- 1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan;
- 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Sasaran utama pembangunan kepemudaan dan keolahragaan adalah sebagai berikut:

- (a) pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; dan
- (b) peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, serta revitalisasi gerakan pramuka.

Pengaruh pengutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan difokuskan pada perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG&A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya. Sasaran utama pembangunan bidang PUG serta perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah:

- (1) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah dan
- (2) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak, terhadap berbagai tindak kekerasan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Buku Laporan EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Maret 2013) dapat kita lihat bagaimana pemerintah dalam Kabinet ini berusaha dengan keras agar semua yang dicita-citakan RPJMN 2010-2014 dapat dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan. Namun

memang banyak sekali kendala yang terus dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya yang perlu dilakukan dalam sisa waktu yang ada ini adalah :

1. Mengoptimalkan dan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia hingga dilantiknya Presiden terpilih yang baru.
2. Meningkatkan dan menjaga kesolidan kinerja pemerintahan dari masing-masing departemen hingga masa akhir jabatan.
3. Menyegerakan segala rencana yang masih tertunda dengan semaksimal mungkin sampai dengan masa akhir jabatan.
4. Berkoordinasi dengan dengan baik antara Presiden lama dengan calon Presiden yang baru, sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif untuk saling memahami segala potensi kelemahan dan keunggulan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, sebagai bentuk persiapan pembentukan pemerintahan yang baru nantinya agar tidak terlalu tertinggal akan informasi yang ada dari pemerintahan yang lama.

Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna menjelaskan dalam RPJMN 2014-2019 akan memfokuskan pada :

1. Pembangunan infrastruktur dasar seperti pemerataan ketersediaan listrik seluruh Indonesia. 100 persen masyarakat Indonesia harus menikmati listrik pda tahun 2019,
2. Permasalahan ketersediaan air minum juga menjadi perhatian Bappenas untuk diselesaikan. Saat ini ketersediaan air minum hanya 81%, dengan pertumbuhan sekitar 3% per tahunnya. Diperkirakan dengan pertumbuhan normal ketersediaan air minum pada 2019 tidak dapat diperoleh seluruh masyarakat Indonesia. Dimana pada saat ini hanya sekitar 90% saja untuk ketersediaan air minum,
3. Permasalahan sanitasi dan kepemilikan rumah pada seluruh masyarakat Indonesia juga menjadi perhatian. Ia mengatakan RPJMN kali ini akan memperbaiki infrastruktur dasar tersebut.
4. Selain itu Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah supaya naik kelas menjadi upper middle income. Namun, ketersediaan dana pemerintah dalam menjalankan rancangan tersebut menjadi kendala. Pemerintah membutuhkan dana sebesar US\$ 5400 triliun. Sedangkan ketersediaan dana pemerintah sebesar US\$ 1200 triliun. Hanya sanggup 22%. Sisanya 78% dapat dari mana itu yang perlu dibahas dengan pemerintahan yang baru.

Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu diungkapkan dalam hal ini selain apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, namun pada tulisan kali ini penulis beranggapan bahwa hal-hal tersebut merupakan hal pokok yang mesti disampaikan dan digarap lebih selektif karena hal ini akan menyangkut kepada seluruh kebutuhan yang lain.

D. PENUTUP

Dari beberapa telaah yang ada dapat disimpulkan bahwa sebenarnya baik pemerintahan yang lama dalam hal ini KABINET INDONESIA BERSATU JILID II telah berusaha keras melaksanakan tugasnya, namun memang masih sangat banyak kekurangannya, namun tidak dimungkiri bahwa Kabinet yang dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudoyono ini juga memiliki kelebihan atau keberhasilan yang cukup banyak.

Ditengah badai yang menimpa baik dari dalam ataupun dari luar negeri, yang pasti hingga detik ini kita masih mampu berdiri tegak dinegeri tercinta ini dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada didalamnya. Puas tidak puas, mau tidak mau, kurang atau lebih kondisi kita saat ini, pemilik negeri ini adalah kita bersama. Dan tugas kita bersama adalah ikut menjaga segala hal yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh lapisan rakyat negeri ini dan membangunnya dengan segenap kemampuan yang ada, hingga akhir hayat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Maret 2013), Buku Laporan EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014

P.A. Samuelson dalam Buku Pengantar Ilmu Ekonomi, Wawan Hermawan, Penerbit :
Universtias Terbuka Edisi ke-13. 2014

Sony Harry B., 2012. "Pengantar Ekonomi Makro" , Penerbit : Universitas Terbuka

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20140810/9/248874/pemerintah-akui-target-kemiskinan-sulit-tercapai>

<http://www.gatra.com/ekonomi-1/55494-rpjmn-2014-2019,-bappenas-susun-rancangan-untuk-pemerintahan-baru%E2%80%8F.html>

RPSEP-45

KEBIJAKAN TARGET INFLASI SEBAGAI SASARAN KEBIJAKAN MONETER BARU BANK SENTRAL

Etty Puji Lestari

Isnina Wahyuning Sapta Utami

Tri Kurniawati R

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

ettypl@ut.ac.id, isnina@ut.ac.id nuning@ut.ac.id

Abstract

The two major prerequisites for adopting inflation targeting are a degree of independence of monetary policy and no fiscal dominance. A country meet this requirements could choose to conduct its monetary policy in a framework of inflation targeting. Seven industrial economies and many emerging market countries have used such a framework have so far met with apparent success. These countries have adopted inflation targeting from starting point of low (less than 10 percents) inflation, considerable exchange rate flexibility, and substantial independence of the central bank-condition rarely found in developing countries. The main objective of Bank Indonesia is to achieve the stability of the Rupiah value and another objective is to pursue price stability through the framework Inflation targeting (IT). But the current consideration is to what extent the IT strategy should be implemented and what type of IT is suitable for Indonesia?

Keywords : *inflation Targetting, Monetary Policy, Strategy*

Abstrak

Dua prasyarat utama untuk mengadopsi kebijakan target inflasi adalah tingkat kemandirian kebijakan moneter dan tidak adanya dominasi fiskal. Sebuah negara apabila telah memenuhi persyaratan ini bisa melakukan kebijakan moneter target inflasi. Tujuh negara industri dan negara-negara *emerging market* telah menggunakan kerangka tersebut dengan tingkat keberhasilan nyata nyata. Negara-

negara ini telah mengadopsi target inflasi dari titik rendah (kurang dari 10 persen) inflasi yang didukung fleksibilitas nilai tukar yang cukup besar dan kemandirian substansial dari bank sentral yang jarang ditemukan di negara-negara berkembang. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah dan tujuan lain adalah untuk mengejar stabilitas harga melalui kerangka target inflasi (IT). Tapi pertimbangan saat ini adalah apa yang sejauh strategi TI harus dilaksanakan dan apa jenis TI yang cocok untuk Indonesia?.

Kata kunci: Inflasi Penetapan sasaran, Kebijakan Moneter, Strategi

PENDAHULUAN

Inflasi memang merugikan. Dampak negatif yang ditimbulkan inflasi sangat banyak. Selain mendistorsi harga, inflasi juga mengerosi tabungan, menurunkan investasi, merangsang terjadinya *capital flight*, menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak perencanaan ekonomi yang sudah dibuat, dan yang lebih parah lagi menimbulkan “kegerahan” sosial dan politik. Pemerintah di negara manapun di dunia ini, biasanya menjadikan inflasi sebagai “wabah penyakit” dan berusaha menyembuhkannya dengan mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal yang konservatif dan terus menerus. Pengalaman yang terjadi selama ini, telah mendorong pemerintah untuk mengendalikan kebijakan moneter dengan mengandalkan pada sasaran antara (*intermediate targets*) seperti pengendalian jumlah uang beredar dan nilai tukar. Selama beberapa dekade terakhir, tujuh negara industri maju (*industrialized developed countries*) atau G7 (sekarang delapan) dan beberapa negara yang pasarnya berkembang pesat (*new emerging market countries*) banyak mengalami kemunduran dengan mempertahankan “tradisi lama” menggunakan sasaran antara seperti di atas dan telah mulai memfokuskan pada tingkat inflasi itu sendiri. Pendekatan baru untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter dikenal dengan target inflasi (*inflation targeting*). Dalam pendekatan ini, otoritas moneter diwajibkan untuk mengumumkan target inflasi secara eksplisit kepada masyarakat sekaligus otoritas moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi pada waktu yang telah ditentukan (*agreed time horizon*)

Dipelopori oleh Selandia Baru dan diikuti oleh negara-negara industri seperti Kanada, Inggris, Swedia, Finlandia, Spanyol, Australia dan Israel, target inflasi telah mendapat dukungan

lebih luas dan sekarang telah diadopsi di beberapa negara yang pasarnya tumbuh pesat (*emerging market countries*) seperti Chili dan Republik Ceko. Akhir-akhir ini Brazil dan beberapa negara Asia seperti Korea, Thailand dan Filipina bahkan Indonesia secara resmi telah mengadopsi target inflasi sebagai acuan kebijakan moneter.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa beberapa negara industri maju memilih target inflasi sebagai kerangka berfikir kebijakan moneter (*monetary policy framework*)?. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Negara-negara tersebut memilih target inflasi; pertama, otoritas moneter di negara-negara tersebut telah memutuskan untuk mempertahankan stabilitas harga, yaitu tingkat inflasi yang rendah dan stabil, sebagai tujuan utama sehingga kebijakan moneter dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Alasan yang kedua adalah, pengalaman praktis selama ini telah menunjukkan bahwa kebijakan moneter jangka pendek untuk mencapai sasaran yang lain, seperti penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan output nasional, dapat menimbulkan konflik dengan mempertahankan stabilitas harga (*inflationary biased*). Target inflasi pada dasarnya membantu otoritas moneter memecahkan masalah ini dengan menjadikan inflasi-bukan kesempatan kerja (*employment*), output, ataupun yang lainnya-sebagai tujuan utama kebijakan moneter.

Secara teoritis, target inflasi merupakan kebijakan yang langsung menuju sasaran (*straightforward*). Bank sentral diharapkan mampu meramalkan (*forecast*) jalur inflasi masa datang dimana peramalannya dengan membandingkan dengan target tingkat inflasi yang diharapkan (yaitu tingkat inflasi dimana pemerintah menilai “layak” bagi tingkat perekonomian), sehingga perbedaan antara peramalan dan target menentukan besarnya kebijakan moneter yang harus disesuaikan. Negara-negara yang menganut target inflasi meyakini bahwa target inflasi mampu meningkatkan kinerja kebijakan moneter dibandingkan dengan pola atau prosedur konvensional yang dilakukan oleh bank sentral selama ini. Tulisan ini bertujuan mengemukakan argumentasi berkenaan isu-isu seputar target inflasi. Yang pertama, adalah menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan kebijakan target inflasi, pemilihan jenis inflasi, target operasional dan instrumen moneter baik di negara maju maupun di negara lainnya. Yang kedua adalah penetapan target inflasi di Indonesia.

PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN

Target inflasi mensyaratkan dua hal. Yang pertama adalah bank sentral harus diberikan kebebasan yang besar dalam mengendalikan kebijakan moneter. Tidak ada bank sentral yang sepenuhnya bebas dari pengaruh pemerintah selaku otoritas sektor fiskal atau riil, yang dimaksud disini adalah kebebasan dalam memilih instrumen moneter untuk mencapai tingkat inflasi yang oleh pemerintah dirasa cukup “layak”. Untuk memenuhi persyaratan ini, pemerintah selaku otoritas di sektor fiskal tidak boleh menunjukkan dominasi fiskal (*no fiscal dominance*), artinya pertimbangan kebijakan fiskal tidak bisa mendikte kebijakan moneter (lihat. Debelle, 1997; Debelle et al., 1998). Kebebasan dari dominasi fiskal berimplikasi bahwa pinjaman pemerintah dari bank sentral adalah nol atau tidak ada, selain itu pasar keuangan domestik sudah mampu untuk menyerap (*absorb*) semua utang publik, seperti surat utang negara. Tidak adanya dominasi fiskal diharapkan pemerintah mampu membiayai basis penerimaan (*revenue base*) sendiri dan tidak mengandalkan penerimaan dari *seignorage* (keuntungan dari pencetakan uang). Yaitu suatu penerimaan dari dimilikinya monopoli dalam menerbitkan uang dalam negeri, sebagai contoh setiap penerbitan nilai mata uang (*face value*) bernominal Rp. 100.000,- akan mendatangkan keuntungan sebesar Rp. 95.000,-. Jika masih ada dominasi fiskal, maka pemerintah bisa menyuruh bank sentral untuk menuruti semua kemauan pemerintah misalkan menurunkan tingkat suku bunga, mencairkan kredit atau sebagai “kasir” bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan fiskal tertentu.

Persyaratan yang kedua agar target inflasi bekerja adalah kemauan dan kemampuan otoritas moneter untuk tidak menargetkan indikator yang lain, seperti upah, tingkat kesempatan kerja, nilai tukar, ataupun pertumbuhan output nasional. Suatu negara yang telah memilih sistem nilai tukar yang tetap (*fixed exchange rate system*) misalnya, walaupun dalam situasi tertentu sangat bermanfaat, namun sistem target inflasi tidak akan mampu beroperasi selama aliran modal dapat bergerak keluar masuk secara bebas.

Secara teoritis, terpenuhinya dua persyaratan ini akan membuat otoritas moneter mampu mengendalikan kebijakan moneter yang dipusatkan pada target inflasi. Dalam prakteknya, ada beberapa langkah awal yang harus dilakukan oleh otoritas moneter. Otoritas moneter harus

menentukan target kuantitatif (*quantitative targets*) untuk inflasi pada beberapa periode waktu ke depan (*future inflation*). Mereka harus mengumumkan kepada masyarakat secara jelas dan tidak ambigu bahwa penentuan target inflasi menjadi sasaran utama dibanding semua sasaran kebijakan moneter. Mereka harus menyusun suatu model atau metodologi untuk meramalkan inflasi dengan mengumpulkan seluruh informasi atau indikator-indikator yang terkait. Yang terakhir, otoritas moneter harus merumuskan instrumen kebijakan moneter dengan prosedur operasional *forward looking* dalam menilai inflasi yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam merumuskan model dan peramalan inflasi domestik, pengaruh kelambanan (*time lag*) antara penyesuaian instrumen moneter dan tingkat inflasi, serta tingkat efektifitas dari berbagai instrumen kebijakan moneter harus dimasukkan sebagai pertimbangan yang matang.

PEMILIHAN TARGET INFLASI

Satu hal yang membedakan target inflasi dibandingkan cara pengendalian inflasi yang lain adalah penyesuaian instrumen kebijakan yang mengandalkan pada penilaian yang terjadi masa mendatang (dibandingkan dengan masa lalu atau sekarang) dan bukan pada asumsi arbitrer (*arbitrary assumption*) tentang inflasi yang akan terjadi. Target inflasi menunjukkan bahwa otoritas moneter secara eksplisit menspesifikasi target inflasi (*specify inflation targetting*) dan memantapkan peraturan kelembagaan (*establishing the institutional arrangements*) yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut (Debelle, *et.al.*, 1998).

Spesifikasi target inflasi diantaranya memilih indeks harga yang dipakai dalam mendefinisikan target, merumuskan target dalam tingkat harga ataukah tingkat inflasi, memutuskan apakah target berupa titik (*point estimation*) ataukah rentang (*interval estimation*), dan menentukan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi (*escape clauses*) jika target inflasi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena peristiwa tertentu. Pemantapan peraturan kelembagaan diantaranya memutuskan apakah target inflasi sebagai tujuan yang formal dimandatkan kepada otoritas moneter ataukah tidak, menentukan mengintegrasikan target inflasi dengan seluruh kebijakan makro ekonomi, dan menyusun prosedur resmi (undang-undang) untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Tabel 1. Pilihan Target Pengendalian Inflasi

Pilihan	Negara
<p>Price Index (Indeks harga) <i>CPI (Consumer Price Index)</i></p> <p>Core / Underlying CPI</p> <p>Escape Clauses</p>	<p>Brazil, Chili, Israel, Selandia Baru, Polandia, Spanyol, Swedia</p> <p>Australia, Kanada, Republik Ceko, Finlandia, Afrika Selatan, Inggris</p> <p>Kanada, Republik Ceko, Selandia Baru, Afrika Selatan</p>
<p>Titik atau Interval (<i>Point or range</i>)</p> <p>Target titik</p> <p>Target titik dengan interval</p> <p>Interval target 2% atau kurang dari titik</p> <p>Interval target lebih besar 2% dari titik</p> <p>Core / Underlying CPI</p>	<p>Finlandia, Spanyol, Inggris</p> <p>Brazi, Swedia</p> <p>Australia, Kanada, Chili, Republik Ceko, Israel, Polandia</p> <p>Selandia Baru, Afrika Selatan</p> <p>Australia, Kanada, Republik Ceko, Finlandia, Afrika Selatan, Inggris.</p>

Sumber: Bernanke *et al* (1999).

Tabel 1 menunjukkan berbagai alternatif pilihan target inflasi yang telah digunakan oleh berbagai negara. Pemilihan indeks harga membutuhkan pertimbangan yang matang berkaitan dengan kesulitan yang dimiliki masing-masing. CPI atau Indeks harga konsumen dipilih karena selain perhatian publik yang sangat besar terhadap CPI, juga frekuensi ketersediaan data yang cukup tinggi. Akan tetapi indeks CPI dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dikendalikan oleh otoritas moneter, seperti pajak tak langsung atau dasar tukar (*terms of trade*). Sementara *escape clause*, merupakan mekanisme yang digunakan jika tingkat harga meningkat tanpa kendali otoritas moneter dan dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak indeks harga secara keseluruhan yang tidak baik. Sehingga, hanya beberapa negara saja yang menggunakannya seperti, Kanada, Republik Ceko, Selandia baru, dan Afrika Selatan.

Kedua karakteristik di atas secara umum menimbulkan implikasi adanya *trade off* antara kredibilitas dan fleksibilitas. Membuat target inflasi kredibel akan mengurangi fleksibilitas otoritas moneter dalam jangka pendek walaupun dalam jangka panjang kredibilitas mungkin

memberikan otoritas moneter fleksibilitas yang lebih besar. Pengalaman di negara industri maju yang telah memulai dengan target inflasi akan memudahkan dalam menganalisis penerapannya.

TARGET OPERASI DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN

Seperti yang sudah sering dilakukan kebanyakan bank sentral, target inflasi juga harus memilih target operasi, seperti tingkat suku bunga jangka pendek (*very short term interest rate*) bahkan *overnight rate*. Tabel 2 menunjukkan target operasi yang paling banyak digunakan. Keuntungan dari tingkat suku bunga jangka pendek adalah bank sentral dapat mempengaruhi pasar secara langsung sekaligus dapat diandalkan, frekuensi penyesuaiannya lebih cepat dan lebih mudah berkomunikasi dengan pasar.

Tabel 2. Target Operasi dan Instrumen Kebijakan Moneter Utama

Negara	Target Operasi	Instrumen Utama
Brazil	<i>Overnight interbank interest rate</i>	OPT dari Obligasi pemerintah atau yang diterbitkan oleh BCB
Chilli	<i>Real overnight interbank rate</i> dikaitkan dg <i>lag</i> 20 hari dari CPI	OPT dari penerbitan surat utang CBC.
Afrika Selatan	<i>Overnight repo rate</i>	OPT dari saham pemerintah
Australia	<i>Overnight interest rate</i>	OPT dengan saham pemerintah
Selandia Baru	<i>Overnight Cash rate</i>	<i>Lending or borrowing of overnight money to commercial banks</i>
Spanyol	<i>Money market overnight interest rate</i>	OPT dengan saham pemerintah dan surat utang bank
Swedia	<i>Weekly repo rate</i>	OPT dengan surat utang bank sentral
Inggris	<i>Short term repo interest rate</i>	OPT dengan saham pemerintah, surat utang bank dan pemda.

Sumber: Central Bank Websites, Borio (1997) dan Landerretche et al. (1999)

Bank sentral di negara yang menerapkan target inflasi lebih mengandalkan pada pengendalian instrumen kebijakan tidak langsung (*indirect instruments of monetary control*) dalam memutuskan kebijakan moneter (untuk diskusi lebih lanjut, lihat Alexander *et al.* (1995)). Sangat sulit untuk menggunakan instrumen kebijakan langsung (*direct instrument*) sebagai

arahan untuk memprediksi tingkat harapan inflasi (*inflationary expectations*) mengingat kebijakan tersebut tidak terlalu bisa diandalkan dalam mempengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek. Sehingga pemilihan kebijakan tidak langsung menjadi prioritas dalam menerapkan target inflasi, selain itu juga bisa membantu mengembangkan pasar uang (*money market*). Pasar uang merupakan tempat aliran transmisi keuangan pertama bank sentral sebelum mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

PENETAPAN TARGET INFLASI DI INDONESIA

Krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1997 dan 1998 telah menimbulkan dampak ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Tekanan yang terjadi pada nilai tukar dan cadangan devisa pada awal krisis memaksa otoritas moneter untuk mengabaikan sistem nilai tukar merangkak rentang ("*crawling band*" *exchange rate regime*) dan rupiah dibiarkan mengambang pada bulan Agustus 1997. Dipicu oleh depresiasi rupiah yang luar biasa, krisis menimbulkan kemunduran ekonomi lebih dari 30 tahun. GDP riil turun sebesar 13,2 persen pada tahun 1998 yang diperparah dengan sistem perbankan yang hancur (*collapse*), kerugian di sektor bisnis (*business failure*) dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Untuk mencegah terjadinya *bank runs* (kepanikan masyarakat dalam menarik dananya di bank) akibat sistem perbankan yang hancur, Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dipaksa untuk menyediakan dana likuiditas yang cukup besar (KLBI dan BLBI) bagi bank yang bermasalah. Akibatnya uang inti (*base money*) dan uang dalam arti luas (*broad money*) mengalami peningkatan sebesar 30% pada bulan Desember 1997 sampai dengan Maret 1998, sehingga bank sentral kehilangan kendali moneter. Ekspansi jumlah uang beredar yang berlebihan lebih lanjut menimbulkan inflasi tinggi (*hyperinflation*) yang tidak terkendali sekitar 77%. Bersamaan dengan itu, tujuan utama Bank Indonesia berubah yaitu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Lebih lanjut Bank Indonesia meyakinkan kepada DPR bahwa jika tingkat harga (inflasi) stabil, maka nilai tukar (kurs) akan menguat dengan sendirinya. Sehingga pada tahun 1999 keluarlah Undang-undang nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, untuk menjawab tantangan sekaligus harapan baru bagi lembaga ini.

Dalam pasal 7 UU No. 23/99 disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam pasal 10, untuk menjalankan tugas ini Bank Indonesia diwajibkan untuk mengumumkan sasaran inflasi dan sasaran moneter untuk mencapai sasaran inflasi tersebut. Untuk itu berbagai aspek penting yang perlu dikaji dalam penetapan sasaran inflasi ini adalah penentuan jenis target inflasi, penentuan jangka waktu pencapaian target inflasi, level dari target inflasi yang akan dicapai, target operasional dan instrumen kebijakan yang dipakai, yang terakhir adalah masalah dan tantangan yang dihadapi.

Pemilihan Jenis Target Inflasi

Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan karena kontinuitas penyediaan data yang dapat disediakan dengan segera dan perannya lebih mencerminkan biaya hidup masyarakat (*cost of living*). Namun tingginya variabilitas pergerakan harga diantara komponen barang yang tercakup dalam IHK serta tingginya pengaruh non fundamental seperti, pengaruh musiman dan dampak penerapan kebijakan pemerintah berimplikasi pada kekurangtepatan arah kebijakan moneter yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam upaya pengendalian laju inflasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Anglingkusumo (1998) berusaha mengukur indikator perubahan harga yang lebih dapat mencerminkan perubahan harga-harga fundamental, yaitu perubahan harga-harga yang disebabkan oleh kondisi perekonomian secara agregat. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa jenis inflasi inti (*core inflation*) yang diperoleh dari berbagai metode, dimana masing-masing metode dibedakan oleh cara mengeluarkan gangguan-gangguan (*shocks*) yang ada dalam inflasi IHK.

Metode yang pertama digunakan adalah dengan pendekatan *trimmed mean*. Secara statistik, pendekatan ini merupakan perhitungan inflasi inti yang paling baik karena benar-benar dapat mencerminkan laju perubahan harga yang persisten. Kedua, dengan menggunakan metode *exclusion*, yaitu mengeluarkan berbagai jenis komoditi yang pergerakan harganya sangat fluktuatif dan/atau komoditi-komoditi yang penetapan harganya diatur oleh pemerintah, dari perhitungan inflasi. Yang ketiga adalah, metode *specific adjustment*, yaitu dengan menghilangkan pengaruh khusus pada harga agregat melalui penyesuaian pada waktu-waktu

tertentu di saat terjadinya gangguan (*shocks*). Jenis metode ini dikenal dengan nama inflasi di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan.

Dalam memilih indikator sasaran inflasi, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan diantaranya prediktabilitas, kontrolabilitas dan akseptabilitas. Mulai tahun 2002 dan 2003 Bank Indonesia lebih mengutamakan kriteria akseptabilitas, dalam arti memilih jenis inflasi yang lebih dapat diterima masyarakat dibanding yang lainnya. Jenis inflasi tersebut adalah inflasi IHK, sehingga harapan masyarakat terhadap inflasi akan lebih mudah dipengaruhi oleh sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia⁴. Konsekuensinya Bank Indonesia harus menanggung rendahnya tingkat prediktabilitas dan kontrolabilitas mengingat jenis inflasi ini memiliki banyak faktor gangguan.

LEVEL SASARAN INFLASI DAN JANGKA WAKTU PENCAPAIAN

Dalam penentuan level sasaran inflasi yang patut dipertimbangkan adalah masalah karakteristik inflasi, efektifitas dan variabilitas kebijakan moneter, dampaknya terhadap proses pemulihan ekonomi dan perkiraan mengenai sumber-sumber tekanan inflasi yang berada di luar pengaruh kebijakan moneter.

Kajian mengenai karakteristik inflasi IHK memperlihatkan bahwa pergerakan inflasi di Indonesia banyak disebabkan oleh gejolak harga beberapa barang tertentu dalam keranjang IHK (Hutabarat dkk, 2000). Dengan angka rata-rata kurtosis perubahan harga barang-barang dalam keranjang IHK yang sangat tinggi, inflasi yang terjadi tidak mencerminkan perubahan harga-harga secara umum. Hal ini banyak disebabkan oleh masalah distribusi barang dan faktor musiman yang terjadi di Indonesia. Implikasi dari karakteristik ini adalah sulitnya menurunkan tingkat inflasi pada level yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anglingkusumo dan Ligaya (2000) mengenai efektifitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi yang optimal menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki efek kelambanan yang cukup panjang. Kajian ini mempertimbangkan adanya *trade off* antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pengendalian inflasi. Implikasi

⁴ Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2012.

dari panjangnya efek kelambanan optimal dari kebijakan moneter ini adalah adanya keterbatasan dalam ruang gerak kebijakan moneter dalam melakukan proses disinflasi (pengendalian inflasi) dalam jangka pendek.

Dalam periode jangka pendek, proses disinflasi membutuhkan penerapan kebijakan moneter yang ekstra ketat yang akan berakibat buruk pada upaya pemulihan ekonomi. Namun demikian, Proses disinflasi dapat dilakukan dengan menurunkan inflasi secara bertahap sehingga target inflasi yang sangat rendah bisa ditetapkan dalam jangka menengah sekitar 5 tahun. Sehingga kebijakan moneter diharapkan mempunyai ruang gerak yang memadai untuk memberikan iklim yang kondusif bagi proses pemulihan ekonomi, namun ekspektasi inflasi masyarakat secara bertahap akan terbentuk sesuai dengan sasaran inflasi jangka menengah. Proses disinflasi tersebut dilandasi atas beberapa asumsi yang bersifat optimis yaitu:

1. Kebijakan pemerintah menaikkan harga barang *administered* harus berkurang dalam jangka menengah, terutama karena telah dihapuskannya subsidi BBM dan berakhirnya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sesuai dengan harga internasional.
2. Pergerakan nilai tukar rupiah yang lebih stabil, sejalan dengan berkurangnya tekanan permintaan murni valuta asing, membaiknya struktur pasar keuangan, serta pulihnya kondisi dan fungsi intermediasi perbankan dan berkurangnya resiko dari faktor non ekonomi.
3. Fungsi intermediasi perbankan telah kembali normal sehingga transmisi dan eektifitas kebijakan moneter dapat berlangsung dengan baik.
4. Permasalahan-permasalahan di sektor riil telah dapat diatasi dan realisasi investasi telah membaik sehingga kendala peningkatan penawaran agregat dalam mengimbangi permintaan agregat tidak menimbulkan tekanan yang besar terhadap inflasi.
5. Kredibilitas Bank Indonesia yang telah terbentuk melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara konsisten dan penetapan sasaran inflasi yang realistis, sehingga dapat mengarahkan dan membentuk ekspektasi inflasi yang rendah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan melihat kondisi ekonomi makro dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi, sasaran inflasi IHK yang optimum untuk dicapai dalam jangka pendek adalah kisaran 9% - 10%. Sementara sasaran inflasi IHK jangka menengah yang dapat diupayakan oleh Bank Indonesia tanpa menghambat proses pemulihan ekonomi adalah 6% - 7%.

PROSEDUR OPERASI KEBIJAKAN MONETER

1. Target Operasi

Dalam kerangka target inflasi, kebijakan moneter diarahkan untuk mempengaruhi permintaan agregat, begitu juga dari kapasitas ekonomi melalui sisi penawaran agregat. Dengan cara ini, proses pertumbuhan ekonomi dapat di raih secara lebih berkelanjutan (*sustainable way*). Yang menjadi masalah di sini adalah pada tingkat implementasi kebijakan moneter. Aliran instrumen kebijakan moneter yang pada akhirnya mampu mempengaruhi tingkat inflasi, sering dikenal dengan mekanisme transmisi moneter. Mekanisme yang berlangsung sangat kompleks dan hubungan antar variabel tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, iklim ketidakpastian harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kerangka kebijakan moneter.

Hal yang patut dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan moneter adalah faktor kelambanan (*considerable lag*). Ada dua aspek mengenai masalah waktu untuk mencapai target inflasi yang diinginkan; pertama adalah berapa lama dicapai target inflasi yang diinginkan yang menghasilkan kerugian output paling minimum. Yang kedua adalah berapa lama waktu perkiraan yang layak bagi kebijakan moneter dalam bereaksi, berkaitan dengan kelambanan kebijakan moneter. Dengan metode yang berbeda, studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyimpulkan bahwa kelambanan kebijakan berkisar antara 4 sampai dengan 8 kuartal. (Bank Indonesia, 1999a) Temuan ini konsisten dengan kelambanan kebijakan moneter di beberapa negara.

Permasalahan target operasi adalah mengubah paradigma kebijakan moneter dari target moneter konvensional menjadi paradigma baru sesuai yang telah diamanatkan oleh Bank Sentral. Hilangnya kendali moneter temporer pada awal krisis harus diperbaiki lagi, seperti penggunaan tingkat suku bunga sebagai target operasi moneter yang pernah mencapai angkut 65%, terbesar dalam sejarah. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa sasaran inflasi bisa diraih secara lebih efektif dengan menggunakan piranti suku bunga sebagai target operasional dibandingkan agregasi moneter (Bank Indonesia, 1999b). Dalam paradigma baru ini, Bank Indonesia harus merumuskan instrumen tingkat suku bunga yang akan digunakan sekaligus upaya mengendalikan operasi pasar terbuka (OPT).

2. Instrumen Moneter

Satu pertanyaan penting adalah bagaimana mengendalikan kebijakan moneter dalam kerangka target inflasi. Bank sentral Amerika Serikat (*US Federal reserves*) menggunakan piranti Operasi Pasat Terbuka, yaitu dengan membeli atau menjual obligasi pemerintah atau surat berharga yang lain, untuk mengarahkan suku bunga pasar menuju sasaran yang diinginkan. Bank Sentral Selandia Baru menggunakan manajemen moneter pasif dengan menciptakan aliran kas melalui fasilitas deposito dan peminjaman (lihat Tabel 2).

Isu-isu lain, banyak yang memusatkan perhatiannya pada pentingnya cadangan wajib minimum (*reserve requirements*) dan upaya untuk menyelaraskan dengan gangguan dari perubahan nilai tukar (*Exchange rate shocks*) Banyak negara yang menganut IT telah mengabaikan atau paling tidak mengurangi peranan cadangan wajib minimum sebagai instrumen moneter. Banyak Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa cadangan wajib minimum memainkan peranan penting dalam mengurangi volatilitas tingkat suku bunga dan meningkatkan tingkat sensitifitas permintaan cadangan bank umum (*demand for bank reserves*) terhadap perubahan tingkat suku bunga (Untuk diskusi lebih lanjut lihat Boediono, 1998; Sarwono dan Warjiyo, 1998; dan Agung, 2000). Pengalaman selama krisis menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak selalu berhubungan langsung dengan stabilitas nilai tukar, terutama dalam jangka pendek. Bank Indonesia sering mengalami dilema antara membiarkan nilai tukar bergerak bebas atau pelan (*smooth*) sehingga dampak terhadap tingkat inflasi bisa diminimalisir.

PENETAPAN TARGET INFLASI

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$.

Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada

tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (*anchor*) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%, yoy)
2001	4% - 6%	12,55
2002	9% - 10%	10,03
2003	9 ±1%	5,06
2004	5,5 ±1%	6,40
2005	6 ±1%	17,11
2006	8 ±1%	6,60
2007	6 ±1%	6,59
2008	5 ±1%	11,06
2009	4,5 ±1%	2,78
2010	5±1%	6,96
2011	5±1%	3,79
2012	4.5±1%	4,30
2013	4.5±1%	8,38
2014*	4.5±1%	-
2015*	4±1%	

*) berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tanggal 30 April 2012.

Angka target atau sasaran inflasi dapat dilihat pada web site Bank Indonesia atau web site instansi Pemerintah lainnya seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Perekonomian, atau Bappenas. Sebelum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan

oleh Bank Indonesia. Sementara setelah UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah.

Permasalahan dan Kendala

Dalam prakteknya Bank Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan sasaran inflasi seperti yang sudah dilakukan oleh Selandia Baru dan Inggris (Alamsyah, dkk., 2000). Walaupun Bank Indonesia telah memberlakukan kebijakan target inflasi akan tetapi kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh bank sentral. Kendala-kendala ini meliputi aspek kelembagaan (*institutional framework*), isu-isu kebijakan dan kemampuan teknis (*technical capabilities*).

1. Berdasarkan kendala aspek kelembagaan, independensi bank sentral, yang merupakan faktor penting dari target inflasi. Campur tangan pemerintah dan kebijakan politik dalam pemilihan gubernur misalnya mungkin mengurangi independensi bank sentral. Agar benar-benar independen, bank sentral harus mempunyai kewibawaan dan mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat dalam negeri, dan bukan masalah legislasi semata.
2. Kewajiban bank sentral dalam mempertahankan stabilitas rupiah dapat diartikan sebagai stabilitas harga dan nilai tukar. Dalam sistem nilai tukar mengambang, volatilitas nilai tukar banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi seperti politik, sosial keamanan bahkan aksi-aksi terorisme bom bali dan bom JW Marriot. Dampak selanjutnya adalah adanya kecenderungan kebijakan moneter yang tidak konsisten dalam menangani hal ini, sehingga sangat sulit bagi bank sentral dalam mencapai interval sasaran inflasi yang telah ditetapkan.
3. Inflasi tidak hanya bisa dikendalikan oleh otoritas moneter sendiri. Sistem perbankan yang rapuh (*fragile*), defisit fiskal yang cukup besar, utang swasta yang gagal bayar, ketidakmampuan sistem perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi, dan iklim sosial dan politik yang tidak kondusif, yang kesemuanya memberikan kontribusi cukup besar dalam mempengaruhi gejolak volatilitas nilai tukar dan pada akhirnya akan menciptakan tekanan inflasi.
4. Secara teknis, kendala dalam mengadopsi target inflasi dapat dihilangkan jika Bank Indonesia telah memiliki mekanisme transmisi kebijakan moneter yang jelas dan menetapkan aliran (*channels*) yang paling sesuai untuk digunakan menuju sasaran inflasi yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Warjiyo dan Zulverdi (1998) menunjukkan

bahwa ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan tingkat suku bunga SBI satu bulan dalam mempengaruhi target inflasi melalui aliran pasar uang (*money market channels*), nilai tukar, permintaan agregat dan kesenjangan output (*output gap*).

PENUTUP

Sasaran Inflasi (*Inflation targeting*) telah menjadi suatu kerangka acuan baru (*framework*) kebijakan moneter yang dianut oleh sebagian besar otoritas moneter dunia. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi adalah independensi dari bank sentral dan tidak adanya dominasi fiskal pemerintah selaku otoritas fiskal terhadap otoritas moneter. Bagi Indonesia sasaran inflasi dengan rentang yang cukup rasional atau layak bagi perekonomian bisa mengurangi kerugian output (baca pendapatan) sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat secara riil tanpa menambah output nominal yang drastis. Sasaran inflasi memungkinkan bank sentral memiliki waktu dalam jangka menengah untuk melakukan penyesuaian dengan memberlakukan instrumen moneter yang dimilikinya seperti tingkat suku bunga overnight, fasilitas diskonto (*discount facility*), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Bank Indonesia dan lain lain. Pemilihan jenis inflasi yang digunakan, level sasaran inflasi dan jangka waktu pencapaiannya memerlukan pertimbangan efektifitas kebijakan moneter sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi proses pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, J., (1998), "Financial Deregulation and Banking lending channels of monetary policy in developing countries: The Case of Indonesia", *Asian Economic Journal*, Vol. 12, No.3.

Agung, J., (2000), "Financial constraints, firms investments and channel of monetary policy for Indonesia", *Applied Economics*.

Alexander, W.E., Balino, J.T., and others (1995)," The Adoption of Indirect Instruments of Monetary Policy", *IMF Occasional Paper*, No.126.

Anglingkusumo R., dan Ligaya C., (2000), "Pengukuran Target Inflasi Dalam Rangka Melaksanakan Kebijakan Moneter Secara Forward Looking", *BEMP*, Vol.2 No.4., Maret.

Bank Indonesia (1999a), "Pengukuran target inflasi dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter secara forward looking", *Division of Real Sector, Directorate of Economic Research and Monetary Policy*.

Bank Indonesia (1999b), "Mekanisme Pengendalian moneter dengan Inflasi sebagai sasaran tunggal", *Division of Policy Analysis and Planning, Directorate of Economic Research and Monetary Policy*.

Bank Indonesia (2014). "Penetapan target Inflasi" didownload dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/bi-dan-inflasi/Contents/Penetapan.aspx> pada tanggal 10 Oktober 2014.

Balino, J.T., (2000), "Designing and Implementing Monetary Policy in an Inflation Targeting Framework", Makalah Seminar Inflation Targeting oleh Bank Indonesia.

Bernanke, Ben, and Mark Gertler (1999), "Monetary Policy and Asset Price Volatility: New Challenges for Monetary Policy", *Federal Reserves Bank of Kansas City*.

Bernanke, B.S., Laubach T., Mishkin, F.S., Posen A.S., (1999), "Inflation Targeting: Lessons from International Experience", *Princeton University Press*.

Borio, C.E.V., (1997), "The Implementation of Monetary Policy in Industrial Countries: A Survey", *Bank for International Settlement Economics Paper*, No. 47, July.

Boediono, (1998), "Merenungkan kembali mekanisme transmisi moneter di Indonesia", *BEMP*, Vol.1, No.1.

Debelle, Guy (1997), "Inflation Targeting In Practice", *IMF Working Paper*.

Debelle, G., Masson, P., Savastano, M., Sharma, S., (1998), "Inflation Targeting as a Framework For Monetary Policy", *IMF Working Paper*.

Hutabarat, A.R., Anglingkusumo R., Majardi F., dan Wimanda R.E., (2000), "Penelitian Tentang Optimal Policy Rules Untuk Pengendalian Inflasi Secara Forward Looking", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BEMP)*, Vol.2, No.3, Desember.

Hutabarat A.R., Majardi F., Anglingkusumo R., Tjahyono E.D., Haryono E., Pramono B., Alamsjah H., (2000) "Perhitungan Inflasi Inti di Indonesia", *BEMP*, Vol2 No.4 Maret.

Landerretche, O., Morande F., and Schmidt-Hebbel K., (1999), "Inflation Targets and Stabilization in Chile". *Central Bank of Chile Working Paper*, No. 55, December.

LAPORAN TAHUNAN BANK INDONESIA, berbagai edisi

Santoso W., dan Anglingkusumo R., (1998), "Underlying Inflation sebagai Indikator Harga Yang Relevan Dengan Kebijakan Moneter : Sebuah Tinjauan untuk Indonesia", *BEMP*, Vol 1. No.1 Juli.

Sarwono,H.A., dan Warjiyo,P.,(1998),”Mencari Paradigma baru manajemen moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel: Suatu pemikiran untuk penerapannya di Indonesia”, *BEMP*, Vol 1. No.1.

Warjiyo, P dan Zulverdi, D.,(1998), “ Penggunaan Suku Bunga Sebagai Target Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia”, *BEMP*, Vol 1., No.1.

RPSEP-46

REFLEKSI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DESA GUNA MENGHIDUPKAN PEREKONOMIAN BANGSA

Solakhudin
UPBJJ-UT SEMARANG
dhikdhik0@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan wilayah terkecil dalam pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian di bidang pertanian yang sangat dipengaruhi oleh alam sekitar seperti iklim, kondisi alam dan kekayaan alam.

Sepintas desa terlihat lebih makmur, damai dan sejahtera dibanding masyarakat kota karena kehijauan yang ada pada desa, namun jika kita amati lebih teliti, tidak sedikit dari kalangan masyarakat desa yang merantau ke kota baik dari kalangan muda maupun kalangan orang tua. Selain itu banyak pula pengusaha desa yang hanya mampu mendirikan usahanya sebagai pedagang kaki lima di teras-teras pertokoan milik warga asing yang bukan asli pribumi, jika diistilahkan "*seperti menjadi tamu di rumah sendiri*". Sebagai warga pribumi yang merupakan tuan rumah dari warga asing (*non pribumi*) sudah sepantasnya untuk tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Yang lebih memprihatinkan banyak dari pedagang kaki lima yang berlapak di pinggir jalan yang dalam situasi tertentu dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Disisi lain kualitas sumber daya manusia tergolong rendah yaitu dilihat dari segi pendidikan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh beberapa factor, akibatnya tingkat pengangguran menjadi cukup tinggi.

Untuk mengatasi paradigma tersebut diperlukan adanya pembangunan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pembangunan tersebut tidak terlepas dari keberadaan SDM sebagai subjek dan objek pembangunan. Sistem pembangunan ekonomi harus diprioritaskan pada pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan pelaku ekonomi mikro terutama pengusaha kecil dan menengah.

Proses pembangunan perekonomian desa memerlukan beberapa upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun konsepnya akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan di halaman berikutnya mengenai bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan perekonomian desa guna menghidupkan perekonomian bangsa.

A. Pendahuluan

Selama pemerintahan orde baru, pembangunan ekonomi terlihat lebih terfokus pada pergerakan angka-angka pertumbuhan secara berkala tanpa memperhatikan pemerataan, serta

aspek pembinaan budaya, hubungan antara golongan dan antar umat beragama. Kebijakan orde baru lebih dominan menyoroti perkembangan Ekonomi Perkotaan, Ekonomi Pedesaan Transmigrasi, Ekonomi Konglomerat, dan monopoli kegiatan Ekonomi Pulau Jawa. Ekonomi Perkotaan bertumbuh sangat cepat karena berbagai fasilitas, infrastruktur, serta akses perdagangan menjangkau pusat-pusat kegiatan ekonomi produksi atau jasa lebih mudah.

Ekonomi berbasis perkotaan menyedot masyarakat desa sehingga Urbanisasi besar-besaran tumpah ke kota-kota. Petani menjual sawah, lading, ternak, kemudian mengadu nasib ke kota-kota besar. Penduduk usia muda yang berpotensi membangun ekonomi justru meninggalkan desa. Akhirnya sentra-sentra ekonomi produksi desa tidak bisa dikelola oleh para orang tua lanjut usia karena kurang mahir mengelola produksi dengan teknologi ringan.

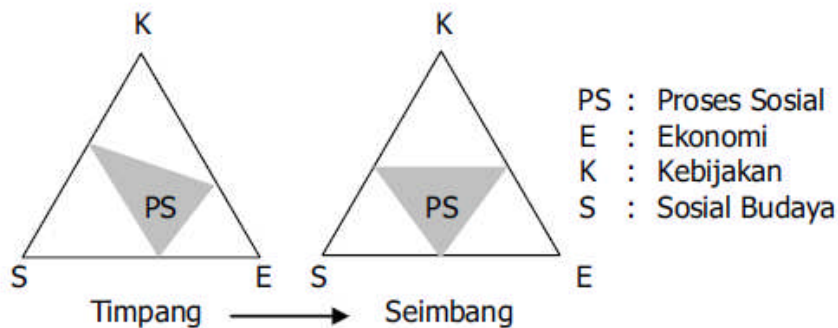
Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desan akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 telah mengamanatkan bahwa pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah serta laju pertumbuhan antara wilayah pedesaan dan perkotaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya makin merata di seluruh Indonesia. GBHN menegaskan bahwa pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Keseluruhan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional untuk memantapkan terwujudnya Wawasan Nusantara. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila kemampuan, prakarsa, serta partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan terus didorong dan ditingkatkan.

GBHN menekankan perlunya pembangunan daerah memberikan perhatian khusus kepada daerah yang relatif miskin dan terbelakang, daerah padat penduduk dan daerah sangat kurang penduduk, daerah transmigrasi, daerah kepulauan terpencil, serta daerah perbatasan. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial perlu ditingkatkan secara lebih merata ke seluruh wilayah tanah air.

“...Apabila tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya, maka pembangunan desa di mana mayoritas manusia Indonesia berada tentulah hal yang merupakan prioritas”. (Moneth Ginting).

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan, baik pada bidang ekonomi, kebijakan maupun sosial budaya yang berjalan seimbang tanpa ada ketimpangan. Keseimbangan antara 3 bidang penting dalam kehidupan desa yaitu : ekonomi, kebijakan, dan sosial budaya dapat digambarkan seperti “*Segitiga Proses Sosial*” berikut ini :



Dari gambar di atas memperlihatkan bahwa bidang yang satu mempengaruhi bidang yang lain yaitu dengan adanya ketergantungan, dapat dijelaskan bahwa sosial budaya memberi arah kepada ekonomi dan mempengaruhi kebijakan desa (politik), namun kebijakan desa pada dasarnya adalah untuk mengembangkan keadaan ekonomi desa dan sosial budaya, sedangkan ekonomi akan menyangga kelangsungan sosial budaya dan juga menyangga pula berjalannya politik kebijakan desa. Adanya keseimbangan antara ekonomi, kebijakan dan sosial budaya merupakan harapan dalam proses sosial.

Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan

kesenjangan perkembangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.

Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Untuk itu perlu adanya model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan yang bertumpu pada paradigma pengkotaan pedesaan (rural urbanization) yang bertumpu pada pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai kesatuan ekonomi dan kawasan, pengembangan kegiatan pertanian secara modern melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian dan penerapan standar pelayanan minimum yang sama antara desa dan kota.

Dalam upaya intervensi pembanguan pedesaan perlu memperhatikan secara mendalam tentang “anatomi desa” sehingga tidak kontraproduktif dalam membangun desa. Anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Singkat kata, dalam pembangunan pedesaan harus berlandaskan pada “*local wisdom*”.

Tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam membangun perekonomian desa namun masyarakat desa pun ikut berperan aktif sebagai subjek pembangunan desa. Agar masyarakat desa mampu berperan aktif dalam pembangunan perekonomian desa maka diperlukan adanya pelatihan khusus dan juga diadakan “*Kelompok Mandiri*” yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Sudah seharusnya pendekatan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat dari sisi kondisi, potensi dan prospek dari masing-masing daerah. Namun di dalam penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara umum dapat dilihat dalam tiga kelompok (Haeruman, 1997), yaitu :

1. Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang.
2. Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
3. Kebijakan khusus menjangkau masyarakat melalui upaya khusus, seperti penjaminan hukum melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.

B. Permasalahan

Dalam mewujudkan sarana pembangunan pedesaan, banyak kendala yang akan dihadapi, yaitu masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, konflik sosial dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun antar daerah. Dalam lingkup yang lebih luas, masalah kemiskinan dan kesenjangan akan memicu kecemburuan sosial, dan pada akhirnya mengganggu kelangsungan pembangunan

C. Metodologi

Jenis dan sumber data berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka (bahan bacaan berupa makalah dan karya ilmiah). Analisis data pada penulisan full paper yang berjudul *Refleksi Pembangunan Perekonomian Desa guna Menghidupkan Perekonomian Bangsa* ini menggunakan metode kualitatif.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- 1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan

campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan; kedua, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa; ketiga, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa; keempat, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; kelima, pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; dan keenam, pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

D. Pembahasan

D.1 Daerah Tertinggal

Pengertian Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:

- 1) **Geografis.** Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
- 2) **Sumber daya Alam.** Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

- 3) **Sumber daya Manusia.** Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
- 4) **Prasarana dan Sarana.** Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- 5) **Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana.** Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam (6) kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu :

- a. perekonomian masyarakat, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita;
- b. sumber daya manusia, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf;
- c. prasarana (infrastruktur) dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk;
- d. kemampuan keuangan daerah dengan indikator utama celah fiskal,
- e. aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km dan

- f. karakteristik daerah dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.

Dengan kriteria tersebut, berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal di Indonesia. Daftar kabupaten tersebut telah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014 sebagai target Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyebaran daerah tertinggal sebagian besar (70%) daerah tertinggal saat ini terdapat di Kawasan Timur Indonesia.

Biro Pusat Statistik (1990) mengklasifikasikan sektor perekonomian ke dalam dua kriteria, yaitu asas kesatuan komoditi dan kesatuan kegiatan, prinsip utama pengklasifikasian ini adalah keragaman (homogenitas) dari tiap sektor, sehingga barang dan jasa atau kegiatan perekonomian yang tercakup salah satu sektor harus memiliki sifat yang relatif homogen. Oleh karena itu, pengklasifikasian 19 sektor khususnya untuk sektor pertanian, dibagi ke dalam enam sub sektor pertanian, yaitu padi atau persawahan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat dijadikan dasar keagamaan kegiatan pertanian di pedesaan.

Adapun Mubiyarto (1994) membagi tipologi desa tertinggal di Propinsi Jawa Tengah ke dalam sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan karakteristik desa adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Sedangkan Soedrajad (1997) membagi tipologi ke dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Desa pantai adalah desa yang kegiatan utamanya alam penangkapan ikan.
- b. Desa persawahan adalah desa yang mayoritas penggunaan lahan untuk persawahan terutama tergantung pada produktivitas penanaman padi.
- c. Desa perkebunan adalah desa yang mayoritas penggunaan lahanya untuk perkebunan.

- d. Desa perladangan adalah desa yang kegiatan utamanya adalah perladangan (menanam tanaman pangan tadah hujan dan palawija).

Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi

Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Pemerintah berperan sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan instrumen yang telah dibuat atau tidak. Jadi, dalam hal ini peran pemerintah tersebut sebagai pengendali.

Di era globalisasi ini, peranan pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur bahkan pada waktunya diharapkan bisa menjadi Negara yang maju/industry. Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan permintaan, dibutuhkan pengawasan dan regulasi pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang. Sebab keseimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi komoditas.

Untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dijalankan. langkah-langkah tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. menurut Arthur Lewis lingkup itu menyangkut masalah :

A. Penyelenggaraan pelayanan umum

Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik, akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut umumnya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhinya. Sebaliknya, pemusatan segala urusan publik hanya

kepada negara, pada kenyataannya hanya sebuah retorika, sebab urusan pelayanan publik yang demikian kompleks, mustahil dapat dikerjakan semua hanya oleh pemerintah.

Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu usaha oleh seorang / kelompok orang, atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1991). Hanya saja, dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah tugas yang mudah mengingat usaha tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu kemudian peran swasta sangat diharapkan untuk melengkapi pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal.

B. Penentuan sikap

Dalam hal ini pemerintah dalam melihat berbagai permasalahan ekonomi hendaknya tanggap serta sensitif terhadap berbagai masalah masyarakatnya. misalnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan pada pembangunan nasional, yaitu:

1) Kebijakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Pemerintah terus aktif melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan pangan, penyediaan perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Kebijakan ini terlihat dari program penyediaan distribusi bahan makanan, program wajib belajar 12 tahun, pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.

2) Pembangunan pemerintah dan usaha kecil.

Sektor pertanian dan usaha kecil memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

3) Pembangunan SDM.

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan

penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.

4) Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Peranan LSM penting bagi program pengurangan kemiskinan. Mereka justru mampu menjangkau golongan kelompok miskin.

C. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.

D. Penentuan penggunaan sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.

b. Sumber Daya Alam

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sudah cukup tepat dalam hal menjaga keseimbangan SDA yang berkelanjutan, tetapi sebaiknya peran pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menghadapi masalah ekonomi di Negara kita ini. Krisis moneter yang dialami bangsa Indonesia memberikan

dampak yang amat besar. Kemiskinan, pengangguran memuncak. Ditambah dengan bertambahnya koruptor yang ada di Indonesia mengakibatkan dana APBN maupun APBD yang ada tidak tersalurkan dengan tepat sehingga mengakibatkan hutang negara semakin besar.

Serta turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, turunnya harga migas semakin memperberat kondisi ekonomi negara dan mengakibatkan defisit terhadap devisa negara.

Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah di kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bahkan mereka menganggap pemerintah dengan sebelah mata. Pemerintah mulai dipertanyakan kinerjanya ditambah pula dengan terbongkarnya kasus korupsi di Indonesia. Maka dari itu peran pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian yang semakin krisis ini harus semakin ditingkatkan. Berikut adalah beberapa peran pemerintah untuk mengatasi perekonomian:

Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menentukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
2. Pada fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera.
3. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.

Masyarakat berharap semoga pemerintah dapat melaksanakan peranannya dengan sebaik mungkin. Agar masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan kepada para wakil rakyat

untuk mengatur segala sumber daya yang ada. Sehingga mereka tidak dipandang dengan sebelah mata.

E. Agenda Kebijakan Publik Pemerintah

Dalam perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki agenda kebijakan publik untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain :

1. Pemberdayaan UMKM

Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penduduk yang kurang mampu. Kaitannya dengan menggerakkan sektor riil terutama di bidang UMKM, pemerintah akan meningkatkan pemberdayaannya termasuk memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bentuk konkrit dari program tersebut salah satunya adalah merekomendasikan agar RUU LKM segera diselesaikan. Sementara itu, revitalisasi Kredit Usaha Rakyat akan menjadi salah satu program pemerintah. Begitu pula usaha mengembangkan kapasitas UKM.

Pemerintah bukannya tak memperhatikan nasib pengusaha UMKM. Beberapa agenda menggerakkan sektor riil terutama di bidang pemberdayaan UMKM sudah dibuat. Namun, pada kenyataannya program ini belum menyentuh pengusaha kelas menengah ke bawah. Mereka masih menyesalkan tidak adanya perhatian dari pemerintah kepada pengusaha UMKM. Dalam mengajukan kredit modal pun dirinya merasa dipersulit. Mereka harus mengurus Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Akhirnya kredit modal batal diajukan. Bantuan dari pemerintah tak jadi diterima.

2. Privatisasi Ekonomi

Kebijakan publik yang dihasilkan dalam bidang ekonomi cenderung dimenangkan oleh kepentingan asing dalam memperkuat perekonomian di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk meminjam dana asing dari IMF, World Bank, dan lembaga-lembaga donor lainnya. Dengan adanya transaksi utang luar negeri tersebut, Indonesia diwajibkan memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh lembaga pendonor. Persyaratan tersebut berupa beberapa kebijakan nasional yang harus diterapkan di Indonesia. Hampir seluruh

kebijakan-kebijakan tersebut cenderung menguntungkan pihak-pihak asing, yakni dengan kebijakan privatisasi dan membuka lebar-lebar kran investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, keuntungan lebih banyak dirasakan oleh para pengusaha asing yang masuk ke Indonesia sehingga perekonomian Indonesia lebih banyak dikendalikan oleh Negara asing.

Kebijakan privatisasi ekonomi merupakan rangkaian agenda kebijakan publik yang ditawarkan oleh negara-negara maju di Negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap posisi Negara yang cenderung lemah. Dengan keadaan Negara yang lemah, kebijakan publik mudah dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu, Negara melalui perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN yang menjadi pemasok keuangan Negara untuk kepentingan publik selalu kalah saat berkompetisi dengan perusahaan swasta yang hanya untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, Negara harus melakukan monopoli. Dalam hal ini Negara harus memiliki tempat yang kuat terlebih dahulu.

PENUTUP

E. Kesimpulan

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Dari paparan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yang cukup padat dan sederhana mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa, yaitu :

Pertama, mengupayakan setiap warga masyarakat hidup sehat melalui upaya penambahan jumlah sarana kesehatan bagi masyarakat seperti : Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Posyandu dan Apotek. Dengan dukungan sarana kesehatan yang memadai tingkat kesehatan masyarakat secara umum terus mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari angka kematian bayi yang rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

Kedua, mengupayakan setiap warganya berpendidikan. Pendidikan adalah salah satu modal utama dari kemajuan suatu bangsa. Demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang

berkualitas mutlak dibutuhkan pendidikan yang berkualitas pula. Untuk itu pemerintah perlu mengupayakan penyediaan sarana pendidikan yang berkualitas. Misalnya dengan rasio tenaga pengajar 1 banding 15 artinya setiap 1 tenaga pengajar menangani 15 murid, dengan harapan setiap murid benar-benar digembleng sehingga dapat menciptakan Lulusan yang unggul dan berkualitas.

Ketiga, mengupayakan setiap warga masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang layak. Upaya pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang layak dimulai dari pembangunan berkelanjutan yang merupakan wujud kerjasama antara masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai pengawas serta pembuat kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara umum pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan positif sosial dan ekonomi dengan tidak mengabaikan lingkungan tempat manusia hidup di dalamnya. Dengan kata lain terjadinya keseimbangan pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Keempat, Mengupayakan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang memadai di setiap pedesaan. Perbaikan jalan yang rusak dan jembatan penghubung antar desa, penyediaan sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana irigasi, sarana produksi, listrik, air bersih dan lainnya untuk kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi pedesaan.

Kelima, mengupayakan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi desa yang akan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada suatu desa dalam rangka menciptakan desa agar menjadi tempat yang menarik dalam pembangunan perekonomian bangsa. Misalnya dengan membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat, membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat memberikan kredit modal bagi pengusaha mikro, membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang difungsikan sebagaimana mestinya, dan membentuk Lembaga Pembangunan Desa Terpadu (LPDT).

Keenam, mengupayakan prioritas pembangunan lapangan pekerjaan di desa. Yaitu dengan membatasi investor yang akan membangun sentra-sentra industri di perkotaan dan mengalihkannya ke desa. Dengan demikian maka akan memberikan peluang kerja di desanya sendiri tanpa harus merantau ke kota, dan akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di

desa. Menurunnya tingkat pengangguran akan berakibat pada turunnya angka kemiskinan dan tujuan utama pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

F. Saran

Sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam membangun perekonomian desa, pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan program-program unggulan pembangunan, antara lain : penyediaan lokasi dan tenda untuk pedagang kaki lima, membatasi calon investor yang akan membangun mall, swalayan besar, outlet-outlet modern yang dimiliki pihak luar dan sebagainya, dengan tujuan untuk tetap menghidupkan aktivitas perdagangan masyarakat setempat. Batasan penetrasi investor ini hanya berlaku untuk mendirikan hypermart dan pewartalaba saja, investor yang tidak bersaing langsung dengan pengusaha mikro tetap diperbolehkan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pembatasan tersebut tidak bersifat mutlak karena penanaman modal oleh investor dari luar memiliki fungsi sebagai penggerak perekonomian.

Selain program-program tersebut, program lain yang dapat dijadikan program unggulan yaitu dengan menjadikan desa sebagai tempat wisata. Dengan banyaknya tempat wisata yang mempunyai prospek yang bagus, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modal terutama di bidang jasa khususnya di bidang perhotelan dan juga akan menghidupkan para pelaku UKM.

Mengadakan perlombaan desa dan evaluasi tingkat perkembangan desa setiap tahun untuk mendorong percepatan perkembangan desa menjadi Desa Swasembada serta untuk menumbuhkan dan menggerakkan kompetisi yang sehat bagi desa-desa dalam melaksanakan pembangunan baik tingkat kabupaten/kotamadya maupun tingkat Propinsi. Pemenangnya adalah desa yang mempunyai prestasi yang paling tinggi dalam pembangunan desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Hernowo (2009). *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. From http://www.bappenas.go.id/files/5013/5080/2310/ekonomidesa__20090929140041__2080__1.pdf

Ginting, Moneth (2005). *Pembangunan Masyarakat Desa (PMD): Sebuah Refleksi*. From http://usupress.usu.ac.id/files/Pembangunan%20Masyarakat%20Desa_Normal_bab%201.pdf

A. Helmy Faishal Zaini (2014). *Pembangunan Pedesaan*. From http://www.kemenegpdt.go.id/uploads/artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf

MG Ana Budi Rahayu (2013). *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. From <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Mixed/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf>

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2012. From <http://kpdt.bps.go.id/index.php?Ekonomi/tabel1>

RPSEP-47

PENDIDIKAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA INSANI

Nadia Sri Damajanti (dini@ut.ac.id)

IN Baskara

Rini Febrianti

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Abstrak

Industri jasa perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat selama dekade terakhir dan telah terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi dimana banyak bank konvensional terguncang dan gulung tikar. Fenomena ketahanan perbankan syariah terhadap krisis ekonomi di berbagai negara terhadap krisis ekonomi yang melanda dunia menunjukkan bahwa perbankan syariah terbukti mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagaimana halnya perbankan konvensional. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah telah mendorong tumbuhnya jumlah kantor dan perluasan wilayah pelayanan perbankan syariah di Indonesia. Trend pertumbuhan jumlah kantor bank syariah telah mendorong permintaan akan tenaga kerja perbankan syariah yang sampai saat ini masih belum didukung oleh jumlah lulusan perguruan tinggi program studi perbankan syariah.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Sumberdaya Insani

Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara maju berakar dari kegagalan lembaga-lembaga perbankan dan sistem keuangan. Krisis tersebut menjadi arena pembelajaran bagi dunia bahwa sudah bukan saatnya industri jasa keuangan mempertahankan praktek-praktek bisnis yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, perkembangan lembaga keuangan syariah secara global meningkat pesat selama satu dekade terakhir. Bahkan Indonesia diakui sebagai salah satu diantara *six rapid growth markets* yang memiliki potensi pertumbuhan dan kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah selain Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirates Arab dan Turki (World Islamic Banking Competitiveness Report 2013–14).

Perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang resmi beroperasi pada tahun 1992 menjadi tonggak bersejarah beroperasinya industri perbankan yang berbasis syariah. Sampai dengan Juli tahun 2013, menurut Bank Indonesia industri perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah memiliki jaringan sebanyak 2.830 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia dengan jumlah karyawan mencapai 40.187 orang, jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah.

Tabel 1. Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah Indonesia tahun 2008-2013

Jenis Lembaga	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BUS	6.609	10.348	15.224	21.820	24.111	25.582
UUS	2.562	2.296	1.868	2.067	3.108	9.781
BPRS	2.581	2.799	3.172	3.773	4.359	4.824

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Juli 2013

Industri jasa keuangan syariah telah menjadi lahan bisnis yang masih dapat terus dikembangkan yang kemudian mendorong munculnya permintaan akan tenaga kerja yang memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam perbankan dan keuangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Menyadari tingginya permintaan akan tenaga kerja dengan kompetensi perbankan dan keuangan syariah, sementara penawaran tenaga kerja dengan kompetensi tersebut masih terbatas, industri jasa pendidikan terdorong untuk menyediakan tenaga-tenaga yang memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diminta industri perbankan dan keuangan syariah.

Untuk melihat pertumbuhan potensi industri jasa perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang perlu dilakukan analisis *trend* berdasarkan kondisi yang telah ada. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam membuat *trend* adalah pertumbuhan ekonomi, ekspansi perbankan syariah, jumlah karyawan tiap kantor unit usaha syariah. Dengan berbagai pertimbangan tersebut diharapkan proyeksi permintaan dapat diketahui lebih akurat.

Telaah Literatur

Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk didalamnya bank syariah, ini dilandasi oleh keyakinan bahwa lembaga keuangan syariah akan membawa 'maslahat' bagi perbaikan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari hantaman krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi spirit dalam perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Perkembangan perbankan syariah secara kelembagaan berawal pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang kemudian resmi beroperasi pada tahun 1992. Industri perbankan syariah baru berkembang pesat setelah tahun 1998. Perbankan syariah semakin mendapat perhatian setelah melewati beberapa krisis ekonomi. Krisis ekonomi pertama yang dihadapi adalah krisis moneter pada tahun 1998 yang pengaruhnya sangat dirasakan di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Krisis kedua adalah krisis ekonomi global tahun 2008-2009 yang pengaruhnya hampir merata dirasakan oleh negara-negara dunia terutama Amerika Serikat. Berdasarkan hasil kajian selama dua tahun (2007-2009) di Amman, Jordan, ditemukan krisis ekonomi global memberikan dampak negatif yang lebih besar pada perbankan konvensional dibandingkan perbankan, karena pola dan falsafah yang dianut oleh perbankan Islam dalam pendekatan investasi yang digunakan lebih beretika dan kurang berisiko dibandingkan dengan bank konvensional (Tobin, 2009). Kenyataan ini telah membuka kesempatan yang lebih baik terhadap sistem keuangan Islam umumnya dan perbankan syariah khususnya yang merupakan alternatif kepada sistem perbankan konvensional (Smolo, 2009).

Halim, A (2012) menyebutkan bahwa empat faktor yang secara signifikan menjadi pendorong kinerja industri perbankan syariah, dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Pertama, perluasan jaringan kantor perbankan syariah yang selain mendekatkan juga membuat masyarakat mendapatkan kemudahan akses. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga, meningkatnya kualitas layanan. Keempat adalah

pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Di tengah harapan akan perkembangan industri perbankan syariah yang pesat tersebut, perlu disadari masih adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Halim, A (2012) menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang harus diselesaikan industri perbankan syariah dalam jangka pendek dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean MEA 2015 salah satunya adalah pemenuhan *gap* sumber daya insani (SDI), bahwa ekspansi industri perbankan syariah yang tinggi ternyata belum didukung oleh tersedianya tenaga kerja atau sumberdaya insani secara memadai. Angka kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam industri jasa perbankan syariah diperkirakan mencapai 20.000 orang per tahun. Kesenjangan ini terjadi karena masih terbatasnya lulusan perguruan tinggi dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Berbeda halnya dengan Malaysia, adanya kebutuhan mendesak akan tenaga kerja dalam industri perbankan setempat telah mendorong lembaga-lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi untuk menyediakan *a highly skilled Islamic finance workforce* (MIFC, 2013).

Permintaan tenaga kerja dalam industri jasa perbankan syariah merupakan permintaan turunan dari industri jasa perbankan syariah mengingat tenaga kerja merupakan faktor produksi dalam industri jasa perbankan syariah. Adanya peningkatan kinerja industri jasa perbankan syariah akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang perbankan syariah. Tidak berlebihan jika perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja berkeahlian untuk menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan industri perbankan syariah.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung trend secara non linier pertumbuhan jumlah kantor cabang dan jumlah karyawan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Hasil *trend* digunakan untuk meramalkan jumlah kantor dan jumlah tenaga kerja yang terlibat untuk 5 tahun ke depan. Dengan cara ini akan diperoleh proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada industri perbankan syariah lebih baik.

Analisis *trend* tenaga kerja di industri jasa perbankan syariah pada penelitian ini menggunakan metode Hodrick-Prescott Filter (HP filter). Kelebihan metode ini adalah mampu menggambarkan perubahan *trend* dari waktu ke waktu secara non linier (Hodrick R.J. dan Prescott E. C., 1981). Berbeda dengan metoda *trend* lainnya, metoda HP filter berdasarkan asumsi bahwa variabel y_t dapat dipisahkan menjadi komponen trend g_t dan komponen siklis c_t :

$$y_t = g_t + c_t \text{ untuk } t = 1, \dots, T.$$

Dalam metode HP Filter, kehalusan jalur g_t merupakan jumlah kuadrat diferens kedua. c_t merupakan penyimpangan dari g_t yang dalam jangka panjang rata-ratanya mendekati 0. Dengan ketentuan tersebut maka persamaan untuk menyelesaikannya adalah:

$$\text{Min} \quad \sum_{t=1}^T c_t^2 + \lambda \sum_{t=1}^T \{(g_t - g_{t-1}) - (g_{t-1} - g_{t-2})\}^2, \quad \text{dimana } c_t = y_t - g_t.$$

$$(g_t)_{t=1}^T$$

Parameter λ adalah bilangan positif yang menentukan variabilitas seri komponen pertumbuhan.

Proyeksi jumlah tenaga kerja perbankan syariah menggunakan *trend* non linier secara *trial and error* untuk memperoleh jumlah varian terkecil pada model persamaan.

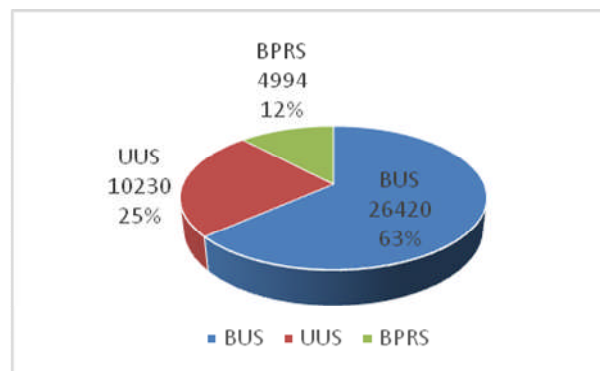
Penelitian ini menganalisis informasi yang bersumber dari berbagai publikasi, data sekunder yang digunakan untuk keperluan analisis permintaan tenaga kerja bersumber pada publikasi laporan bulanan Bank Indonesia.

Pembahasan

Perkembangan industri jasa perbankan syariah di Indonesia telah menuju pada arah yang menggembirakan. Pengalaman di berbagai negara yang dilanda krisis ekonomi, menunjukkan bahwa perbankan syariah terbukti tahan terhadap berbagai goncangan. Sesuai dengan karakter

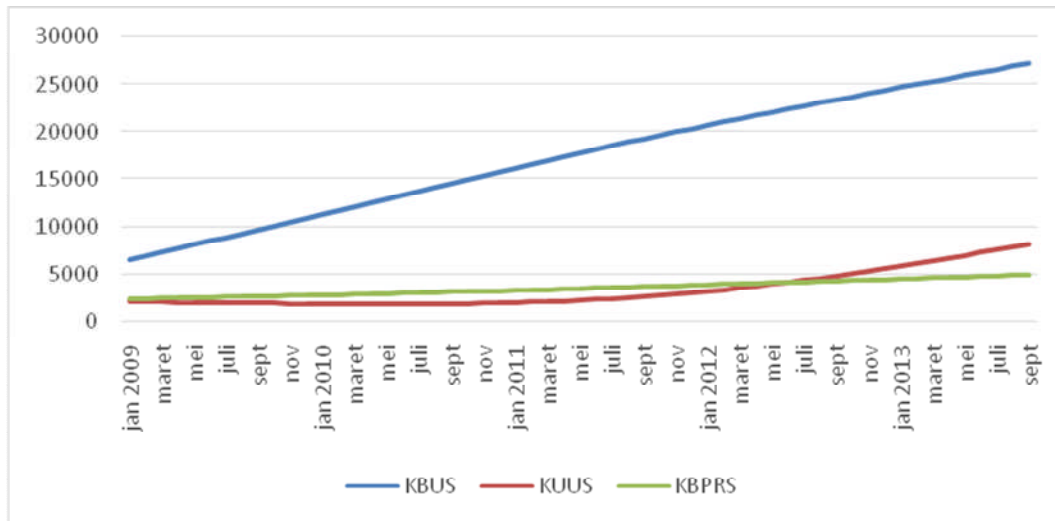
perbankan syariah yang cenderung beroperasi di sektor riil yang mendorong pertumbuhan ekonomi, orientasi bisnis perbankan syariah menghindari bisnis yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga tahan terhadap hantaman krisis keuangan global serta sistem bagi hasil yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana. Geliat dalam industri perbankan syariah Indonesia telah terbukti, bahwa selama periode tahun 2007-2013 jumlah kantor Bank Umum Syariah meningkat dari 401 pada tahun 2007 menjadi 1882 pada tahun 2013, sedangkan jumlah kantor Unit Usaha Syariah meningkat dari 196 menjadi 550 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berkembang dari 185 menjadi 398. Sekalipun hingga tahun 2013 telah terjadi perkembangan pesat dalam jumlah kantor perbankan syariah, namun peningkatan jumlah kantor perbankan syariah didominasi di pulau Jawa terutama di propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sampai tahun 2013, layanan perbankan syariah belum mampu menjangkau beberapa propinsi seperti Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara (Bank Indonesia, 2013).

Jumlah pekerja pada industri perbankan syariah pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah pekerja BUS masih mendominasi, hal ini sesuai dengan perkembangan kinerja BUS yang lebih agresif dibandingkan UUS dan BPRS. Pada Gambar 1 nampak bahwa jumlah pekerja BUS mencapai 63%, kemudian diikuti oleh pekerja UUS dan BPRS sebanyak 25% dan 12%.



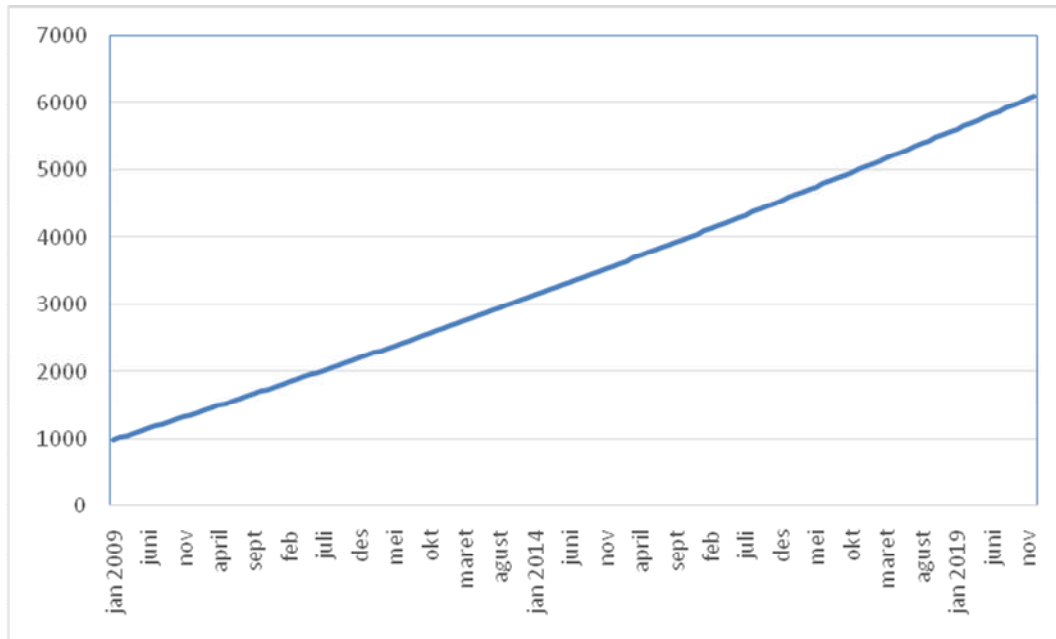
Gambar 1. Komposisi Jumlah pekerja pada BUS, UUS dan BPRS

Pertumbuhan jumlah pekerja BUS dari tahun 2009 hingga 2013 memang menunjukkan angka yang menakjubkan yang didorong oleh maraknya pembukaan kantor-kantor BUS, jauh di atas pertumbuhan jumlah pekerja UUS, sedangkan pertumbuhan BPRS yang cenderung stagnan seperti nampak pada Gambar 2 berikut ini.



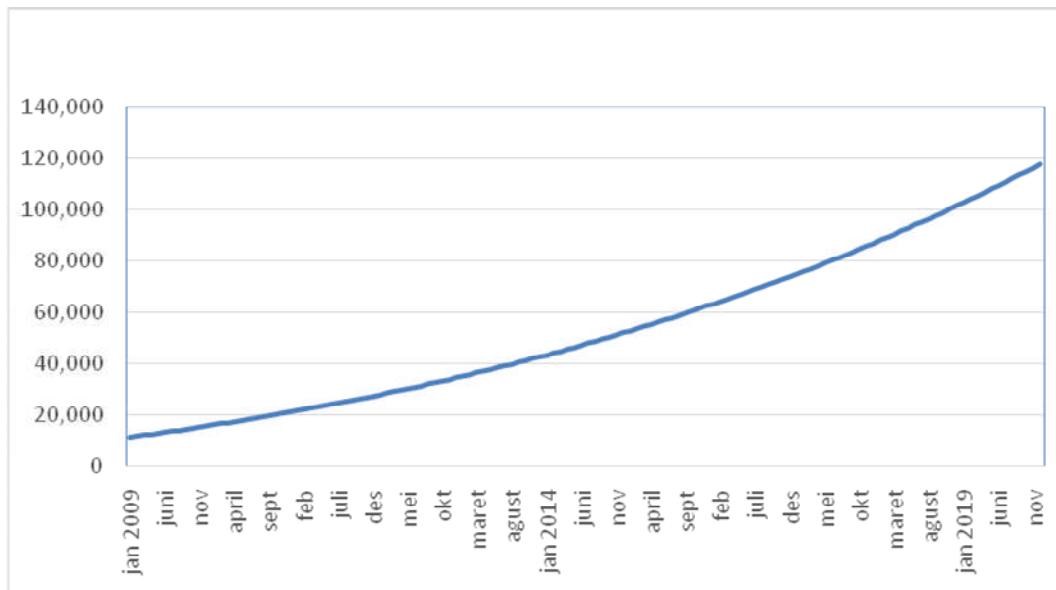
Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Pekerja Perbankan Syariah

Potensi perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan, masih terus dapat ditingkatkan. Dengan dukungan pemerintah melalui peraturan perundangan yang mendukung pembukaan kantor-kantor perbankan syariah serta masih terbukanya peluang perbankan syariah untuk membuka kantor di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka mendekatkan dan memberikan kemudahan akses dengan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat serta edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang semakin gencar, niscaya kinerja industri perbankan syariah akan terus mengalami perkembangan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Kantor Perbankan Syariah

Dampak dari pesatnya pertumbuhan jumlah kantor perbankan syariah akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perbankan syariah sebagaimana terlihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Proyeksi Pertumbuhan Pekerja Perbankan Syariah

Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan perbankan syariah masih menjadi hambatan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan jumlah pekerjanya. Dari hasil observasi peneliti di beberapa bank yang berbasis syariah pada tahun 2014, ditemukan bahwa perekrutan tenaga perbankan syariah didominasi oleh lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan perbankan konvensional, bahkan tidak jarang untuk jabatan tertentu, perbankan syariah merekrut lulusan perguruan tinggi berbagai jurusan. Salah satu alasan bahwa perekrutan tidak mensyaratkan penguasaan bidang perbankan syariah karena jumlah pelamar dengan latar belakang pendidikan perbankan syariah sangat terbatas dan pihak perbankan syariah mengandalkan pendidikan dan pelatihan yang nantinya akan diberikan setelah bekerja (*on the job training*). Dalam kondisi pasar tenaga kerja kekurangan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah, maka menjadi tugas perguruan tinggi untuk menyiapkan calon-calon pekerja dalam industri perbankan syariah. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh perbankan terhadap pekerjanya menuntut investasi yang sangat besar.

Kesimpulan

Industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Trend jumlah kantor perbankan syariah meningkat dengan pertumbuhan yang meningkat diikuti oleh jumlah tenaga kerja dengan arah yang sama. Proyeksi sampai tahun 2019 menunjukkan *trend* yang masih terus meningkat. Pertumbuhan permintaan tenaga kerja perbankan syariah belum didukung oleh penawaran tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah. Kesenjangan dalam penyediaan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan perbankan syariah disiasati oleh industri perbankan syariah dengan melakukan pendidikan pelatihan jangka pendek. Dalam upaya memperkuat industri perbankan syariah jangka panjang maka perguruan tinggi ditantang untuk berpartisipasi dengan menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perbankan syariah. Perkembangan industri perbankan syariah mendorong peningkatan sumberdaya insani yang terdidik.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia, 2013, *BI Outlook Perbankan Syariah 2014*, Jakarta.

- Halim A., 2012, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Paper disampaikan pada Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta.
- Hodrick R. J. dan Prescott E. C, 1981, *Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation*, Discussion Paper #451, Northwestern University.
- Malaysian International Islamic Finance Centre (MIFC), 2013, Human Capital Development: Sustaining the Growth of Islamic Finance, diunduh dari www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=56&bb...
- Smolo E., 2009, Financial Derivatives From Islamic Perspective, *Islamic Finance Bulletin*, April-June 2009, Issue#24.
- Tobin, S., 2009, *Islamic Banking in the Global Financial Crisis: The Value of Banking Rightly*, *Anthropology News*, 50: 13–14
- World Islamic Banking Competitiveness Report 2013–14, The Transition Begins, diunduh dari www.ey.com/.../World_Islamic_Banking_Competitiveness.../World%20Islam.

RPSEP-48

PERTAMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH DI KABUPATEN TANAH LAUT

Hidir tresnadi
PTSM-BPPT

Hidir.tresnadi@bppt.go.id

Abstrak

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara, yang kini telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan(WP) dalam tata ruang nasional, yang memiliki WUP Mineral Logam, WUP Batubara, dan WUP Bukan Logam dan Batuan. WUP Logam, khususnya bijih besi dan Chromite tersebar di Kecamatan Pelaihari, Bajuin dan Takisung. Potensi bijih besi ini dapat dikembangkan untuk memenuhi bahan baku industri besi baja nasional. Namun dalam pengembangannya harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kadar bijih yang lebih kecil daripada 60 %, standar kualitas lingkungan yang berlaku, dll. Sedang WUP Batubara sebagian besar meliputi Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, yang harus patuh pada KepMenLH No 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah pertambangan batu bara.. Produksi Bijih Besi, Chromite dan Mangan berfluktuasi dari tahun 2005 hingga 2011. Sehingga NBP pun turut berfluktuasi pula. Dalam perannya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, maka industri pertambangan bijih besi, Mangan dan Chromite akan terhenti sementara kegiatannya karena dengan adanya Permen ESDM No 1 2014 yang mengharuskan peningkatan nilai tambah terhadap bijih besi dan Chronite, Mangan, sehingga mengakibatkan para pelaku pertambangan harus meningkatkan kapasitas teknologi dan sumberdaya manusia perusahaannya untuk memenuhi ketentuan yang ada. Sehingga pendapatan daerah dari sektor ini akan menurun untuk sementara waktu.

Kata Kunci : Bijih Besi, Nilai Tambah, PNBP, Sumberdaya Mineral

Abstract

Tanah Laut District has the potential mineral resources and coal, which has now been established as a mining area (WP) in the national spatial planning, which has WUP Metal Mineral, Coal WUP, and WUP Non Metal and Rock. WUP metals, particularly iron ore and Chromite scattered in sub-District Pelaihari, Bajuin and Takisung. The potential of iron ore can be developed to meet the raw material of steel industry nationwide. But in The development should consider various factors, such as ore grade less than 60%, the applicable environmental quality standards, etc. Coal is being WUP covers most of Batu Ampar, District and Sub-District Jorong Kintap, which must comply with the KepMenLH No. 113 of 2003 on waste water quality standard coal mining .. Production of Iron Ore, Chromite and Manganese fluctuated from 2005 to 2011. Thus, PNBP also fluctuate anyway. In his role as a supporter of economic growth, the iron ore mining industry, Manganese and Chromite is suspended activities due to the presence of ESDM No. 1 in

2014 which requires an increase in added value to the iron ore and Chronite, Manganese, resulting in the mining industry should increase the capacity of technology and human resources to fulfill its existing regulations. So the mining sector revenue will decline for a while.

Keywords : Iron Ore, Mineral Resources, Value Added, PNB

A. PENDAHULUAN

Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam memberikan sumbangan besar pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial pada lima dekade ini. Industri mineral menjadi penopang bagi industri energi, industri besi dan baja, industri non logam, industri pembangkit listrik, industri kimia, konstruksi, material konstruksi, tekstil, pertanian, bahan baku dan lainnya. 95 % energi, 80 % industri bahan baku, 70 % material produk pertanian, dan lebih daripada 30 % air dipergunakan untuk irigasi pertanian, dan lebih daripada sepertiga untuk air minum disuplai oleh industri mineral (MOLAR, 1999).

Perencanaan, manajemen, konservasi dan penggunaan rasional sumberdaya alam merupakan hal kritis untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di China. Untuk itu MOLAR, diminta Pemerintah Pusat China bertanggung jawab mengemban tugas tersebut. MOLAR melakukan fokus permasalahan pada

- penguatan manajemen lahan dan kawasan, khususnya yang terkait pada konservasi lahan budidaya
- Meningkatkan kembali upaya untuk melakukan survey, evaluasi dan perencanaan iptek untuk sumberdaya alam yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.
- Melakukan pembangunan infrastruktur dan prasarana sistem informasi sumberdaya alam yang menyediakan jasa informasi pada publik.
- Membentuk mekanisme pengoperasian dan sistem baru dalam manajemen sumberdaya alam yang berdasarkan pada sistem ekonomi pasar
- Memperkuat legislasi dan penguatan administrasi sistem tata guna lahan terkait yang industri pertambangan

Faktor-faktor di atas akan memberikan kontribusi besar dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan pada abad ini. (Zhong Ziran, 1999)

Industri pertambangan merupakan model yang berkelanjutan jika dapat memberikan dampak langsung bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi, lingkungan dan sosial komunitas masyarakat yang lebih baik (Victoria Kenrick, 2012). Berkelanjutan berarti dampak pertambangan akan

diminimalkan dan remediasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kebutuhan yang diperlukan oleh generasi mendatang. Dalam konteks ini pula tingkat penggunaan produk industri pertambangan tidak melebihi kapasitas penemuan sumber-sumber pertambangan yang baru, termasuk dari daur ulang logam terpakai. Pertambangan tidak hanya mengkaitkan keberlanjutan sumberdaya mineral atau cara hidup yang dikembangkan berdasarkan sumberdaya yang ada. Tetapi melibatkan komponen lingkungan sebagai faktor penting melalui penggunaan sumberdaya alam secara berhati-hati dan tidak membahayakan kehidupan di sekitarnya seperti sumberdaya air, udara, tanah dan biota yang ada.

Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), telah diidentifikasi beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan di masa depan, yaitu: minyak, gas, besi baja, bauksit, perikanan, batubara dan kelapa sawit. Dalam Industri Pertambangan koridor utama ekonomi Kalimantan adalah Bijih Besi, Bauksit dan Batubara. (MP3EI, 2011)

Dengan telah ditetapkannya Kabupaten Tanah laut sebagai wilayah Pertambangan, maka sesuai potensinya yang dimilikinya, kabupaten ini memiliki Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Batubara, WUP Mineral Logam dan WUP Mineral Non Logam. Sebaran mineral logam, non logam, dan batubara di Kabupaten tanah Laut dapat dilihat pada Gambar. Peluang investasi yang diunggulkan pada saat ini di Kabupaten Tanah Laut adalah hilirisasi pengolahan bijih besi sesuai dengan yang telah dicanangkan sebagai program nasional MP3EI (BKPM, 2012). Wilayah Kabupaten Tanah Laut menyimpan berbagai jenis bahan tambang, seperti batu bara; mineral logam seperti bijih besi, emas, chromite, dan mangan; mineral non logam seperti pasir kwarsa, batu gamping, lempung, marmer, granit, oker, andesit, periodotit, basalt, dan diorit. Dalam kegiatan penambangannya dilakukan sesuai dengan penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian pertambangan di Kabupaten Tanah Laut sebagai penggerak perekonomian daerah di Kabupaten Tanah Laut, maka dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut :

- Studi literatur daerah penelitian

- Survey lapangan potensi endapan daerah penelitian
- Pengolahan dan penyajian data dan informasi penelitian, yang disajikan baik dalam bentuk statistik grafis maupun informasi geografi
- Analisis dan Pembahasan
- Kesimpulan dan Saran

C. TELAAH LITERATUR

3.1. Geografi

Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota Pelaihari memiliki wilayah seluas 3.361,35 km². Luas kabupaten ini merupakan 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Geografis kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114030'20" dan 115023'31" Bujur Timur, serta diantara 3030'33" dan 4011'38" Lintang Selatan. Kabupaten Tanah Laut memiliki batas administrasi sebagai berikut:

1. Batas Utara adalah Kabupaten Banjar,
2. Batas Timur adalah Kabupaten Tanah Bumbu,
3. Batas Selatan adalah Laut Jawa,
4. Batas Barat adalah Laut Jawa.

Topografi Kabupaten Tanah Laut umumnya merupakan daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung yang terdapat dibagian Utara dan Timur, yaitu tersebar di Kecamatan Pelaihari, Jorong, Batu Ampar, Tambang Ulang dan Kintap. Sedangkan dibagian Selatan dan Barat merupakan daerah dataran rendah, pantai, dan rawa-rawa yaitu terdapat di Kecamatan Kurau, Takisung dan Panyipatan.

Daerah pasang surut terdapat dipesisir pantai sepanjang 200 km yang merupakan hutan api-api, dan hutan bakau. Tingkat kelerengan tanah umumnya berkisar antara 0 sampai 2 % dan rata-rata ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai 7 m di atas permukaan laut. Kemiringan Tanah di Kabupaten Tanah Laut sangat bervariasi yaitu berkisar antara kurang dari 2% hingga lebih dari 40%. Wilayah dengan kelerengan lebih dari 40% merupakan wilayah yang dilindungi dengan penyebaran di sekitar Gunung Paikat, Gunung Damar Gusang, Pegunungan Kemuning, dan Batumandi.

Daerah ini beriklim tropis yang dipengaruhi musim hujan dan kemarau. Temperatur suatu tempat bergantung pada tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari

pantai. Pada tahun 2010 temperatur berkisar antara 20,0 – 35,2 [0C], kelembaban udara berkisar antara 77,1 – 85,2 [%], jumlah curah hujan 2.445,6 mm, dan jumlah hari hujan 117 hari.

Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap. Jumlah desa yang tersebar di semua kecamatan adalah 135 desa.

3.2. Geologi

3.2.1. Morfologi

Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) satuan utama, yaitu :

a) Satuan dataran rendah landai hingga berombak umumnya terdapat di bagian selatan.

Satuan ini membentang memanjang dari Timur ke Barat dan melebar di bagian barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai yang bermuara di Laut Jawa;

b) Satuan bukit bergelombang dan pegunungan terdapat di bagian utara sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar, dengan puncak gunungnya.

Endapan Bijih Besi dan Kromit di daerah penelitian memiliki morfologi satuan bukit bergelombang seperti di Sungai Bakar, Pontain, Sungai Riam, dan Pemalongan, sedang Ambungan dan Kortein memiliki satuan dataran rendah. Sebaran bijih besi dan Khromit ini dapat dilihat pada Gambar 9.

3.2.2. Geologi Regional

Secara fisiografi daerah kegiatan terletak di bagian ujung baratdaya Pegunungan Meratus, bagian Selatan Cekungan Barito dan Sub-Cekungan Asam-Asam. Batuan tertua yang menyusun daerah ini adalah Komplek Ultramafik (Mm) dan Batuan Malihan (Mub) dan di beberapa tempat batuan ini berasosiasi dengan gabro (Mgb) yang berumur Awal Kapur. Batuan ini diterobos oleh Granit (Mgr) dan Diorit (Mdi) pada Awal Kapur. Pada Akhir Kapur terbentuk Kelompok Alino yang terdiri dari : Formasi Paniungan (Kpn) yang merupakan batuan sedimen, Olistolit Kintap Formasi Pudak (Kok) yang terdiri atas batugamping klastika dan batupasir konglomeratan pada bagian bawahnya. Anggota Batukora Formasi Pudak (Kab) yang terdiri atas andesit piroksen porfir dan bagian atasnya menjemari dengan batuan vulkanik klastik dan dengan Formasi Keramaian (Kak) yang merupakan perselingan batupasir dengan batulanau dan lempung setempat bersisipan batugamping. Kemudian terbentuk Formasi Manunggul (Km) terdiri atas

konglomerat aneka bahan bersisipan batupasir dan batulempung. Kelompok Alino ini diselingi dengan kegiatan gunung api Kelompok Pitanak yang berumur Kapur Akhir.

Pada Kala Paleosen, kegiatan tektonik menyebabkan terangkatnya batuan Mesozoikum yang disertai dengan penerobosan oleh batuan andesit porfir (Man). Setelah pengangkatan pada Kala Paleosen, pengendapan batuan dimulai lagi pada Kala Eosen dengan diendapkannya batuan dari Formasi Tanjung (Tet). Pada bagian bawah formasi dijumpai sisipan batubara, setempat dijumpai lensa batugamping mengandung cangkang moluska. Formasi ini di tutupi secara selaras oleh Formasi Berai (Tomb) yang diendapkan pada lingkungan neritik. Di atas Formasi Berau diendapkan secara selaras Formasi Warukin (Tmw) berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada kala Pliosen diendapkan Formasi Dahor (Tqd) secara tidak selaras di atas Formasi Warukin (Tmw). Aluvium merupakan Endapan Kuartar berupa kerikil, pasir, lanau lempung dan dan Diorit (Mdi) pada Awal Kapur. Pada Akhir Kapur terbentuk Kelompok Alino yang terdiri dari : Formasi Paniungan (Kpn) yang merupakan batuan sedimen, Olistolit Kintap Formasi Pudak (Kok) yang terdiri atas batugamping klastika dan batupasir konglomeratan pada bagian bawahnya. Anggota Batukora Formasi Pudak (Kab) yang terdiri atas andesit piroksen porfir dan bagian atasnya menjemari dengan batuan vulkanik klastik dan dengan Formasi Keramaian (Kak) yang merupakan perselingan batupasir dengan batulanau dan lempung setempat bersisipan batugamping. Kemudian terbentuk Formasi Manunggul (Km) terdiri atas konglomerat aneka bahan bersisipan batupasir dan batulempung. Kelompok Alino ini diselingi dengan kegiatan gunung api Kelompok Pitanak yang berumur Kapur Akhir. Pada Kala Paleosen, kegiatan tektonik menyebabkan terangkatnya batuan Mesozoikum yang disertai dengan penerobosan oleh batuan andesit porfir (Man). Setelah pengangkatan pada Kala Paleosen, pengendapan batuan dimulai lagi pada Kala Eosen dengan diendapkannya batuan dari Formasi Tanjung (Tet). Pada bagian bawah formasi dijumpai sisipan batubara, setempat dijumpai lensa batugamping mengandung cangkang moluska. Formasi ini di tutupi secara selaras oleh Formasi Berai (Tomb) yang diendapkan pada lingkungan neritik. Di atas Formasi Berau diendapkan secara selaras Formasi Warukin (Tmw) berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada kala Pliosen diendapkan Formasi Dahor (Tqd) secara tidak selaras di atas Formasi Warukin (Tmw). Aluvium merupakan Endapan Kuartar berupa kerikil, pasir, lanau lempung dan lumpur.

3.3. Endapan Bijih Besi

Endapan Bijih besi tersebar di Propinsi Kalimantan Selatan dari Hulu Sungai Utara, Balangan, Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu hingga Kotabaru. Endapan bijih besi ini ada yang masih berupa sumberdaya endapan ada yang sudah ditambang. Di Kabupaten Tanah Laut endapan bijih besi yang sudah ditambang terdapat di Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari dan sekitarnya. Di Kabupaten Tanah Laut, endapan mineral logam besi ini terdapat bersamaan dengan mineral logam kromit yang juga terdapat di Kecamatan Pelaihari.

Batuan pembawa mineralisasi bijih besi dan batuan tertua di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut adalah batuan ultrabasa yang berumur Jura. Pelapukannya, terutama serpentin yang mengalami dekomposisi dan akumulasi kimia menghasilkan bijih besi tipe laterit. Seri batuan gunung api – sedimen berumur Kapur Atas, terutama yang bersipat gampingan (“calcareous”) diterobos oleh kompleks batuan intrusi (granit, granodiorit, diorit dll), menghasilkan endapan bijih besi tipe kontak metasomatik (“skarn”). Endapan ini diperkirakan terjadi pada Kapur Akhir –Tersier Awal Di Kabupaten Tanah Laut, khususnya Bajuin, Pleihari dan Takisung terdapat endapan bijih besi ini. Endapan ini tersebar dari batas timur laut kecamatan Bajuin, Pelaihari hingga pantai Takisung. Endapan-endapan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 blok, yaitu Blok.Plaihari –Kintap, terdiri dari daerah Sarang Halang, G. Melati, G. Tembaga, -G. Sanggar, dan G. Sulin; Blok. Sungaibakar, terdiri dari daerah Batukora (Pit 1) - Jabukan (Pit 2), Pontain (Pit 3) -Linoh (Pit 4); Blok. Riampinang, terdiri dari daerah, Ambungan, Tanjung, Riampinang, -Tebing Siring; Blok. Talok, yaitu daerah Takisung. (Asep Sofyan, dkk , 2007)

3.4. Peluang Investasi (BKPM, 2012)

Peluang investasi yang diunggulkan pada saat ini di Kabupaten Tanah Laut adalah hilirisasi pengolahan bijih besi sesuai dengan yang telah dicanangkan sebagai program nasional MP3EI. Peleburan bijih besi membutuhkan energi yang relatif besar, sehingga wilayah yang memiliki energi yang besar dan relatif murah akan menjadi ekonomis bagi industri pengolahan bijih besi. Kabupaten Tanah Laut memiliki pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Pembangkit listrik tersebut berada di desa Asam-Asam dan memiliki kapasitas terpasang sebesar 2 x 65 [MW]. Batubara di kabupaten Tanah Laut maupun di provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak. Sehingga investor yang ingin membangun pembangkit listrik sendiri dapat membelinya dari perusahaan-perusahaan penambang batubara yang telah

beroperasi (eksis) di Provinsi Kalimantan Selatan maupun di provinsi lainnya di pulau Kalimantan.

Kadar kandungan Fe bijih besi di Kabupaten Tanah Laut dibawah 65% (Bulletin sumber daya geologi, 2009). Hasil analisis komposisi kimia bijih besi Kalimantan Selatan menunjukkan kadar Fe tidak lebih dari 65%, baik pada laterit maupun metasomatik (magnetit dan hematit).

Hasil Analisis kimia pada Contoh Bijih Besi Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa pada kisaran 35+ hingga -200 -+325 mesh merupakan mineral Magnetite, Ringwoodite, Hematite, Dohathite dan analisis lanjutan terhadap komposisi senyawa atau unsur secara lebih teliti menunjukkan bahwa kadar besi rata-rata masih kurang dari 60%-berat (BPPT, 2008),. Karena itu masih diperlukan benefisiasi untuk meningkatkan kadarnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan besi. Karakteristik bijih besi menunjukkan bahwa bahan baku bijih besi yang ada di Kabupaten Pelaihari sangat bervariasi dari Fe kadar rendah hingga tinggi. Hal ini membutuhkan penanganan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan baku dalam *blast furnace*. Salah satu penanganannya adalah dengan mencampur bahan baku yang berkadar Fe rendah dengan Fe berkadar tinggi dengan perbandingan tertentu sehingga didapat campuran bijih besi dengan kadar Fe yang diinginkan (BPPT, 2008)

Pada saat ini konsumsi baja Indonesia adalah sekitar 37 kg/kapita. Dalam jangka menengah dan panjang, konsumsi baja di Indonesia pada tahun 2015 akan mencapai 43 kg/kapita dan pada tahun 2025 mencapai 100 kg/kapita, maka dibutuhkan pembangunan beberapa industri baja yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mencapai konsumsi baja pada tahun 2025, maka terbuka peluang pasar sebesar 17,972 juta ton. Adanya rencanajangka panjang konsumsi baja seperti yang diuraikan di atas dalam MP3EI 2011 – 2025, maka peluang pasar dalam negeri untuk hasil produk industri baja akan semakin besar.

Ketersediaan lahan bagi calon investor hilirisasi pengolahan bijih besi terdapat di Kecamatan Jorong dan Kintap, sesuai dengan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 - 2031, bahwa peruntukan lahan bagi industri besar pengolahan hasil perkebunan dan pertambangan ditempatkan di kecamatan Jorong dan Kintap seluas 4.357 ha (lihat gambar Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Laut). Kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tersebut tidak dibebaskan (dibeli) oleh pemerintah,tetapi pada kawasan tersebut pemerintah mengizinkan konversi peruntukan lahan menjadi lahan industri besar.Pada saat ini lahan-lahan pada kawasan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tanah Laut, suasta dan

masyarakat. Dengan demikian calon investor diharapkan langsung melakukan negosiasi pembebasan tanah pada pemiliknya jika ingin melakukan investasi industri hilir besi.

Berdasarkan data yang didapat dari, bijih besi sebagai bahan baku industri hilir besi/baja di kabupaten tanah laut tersebar di beberapa tempat. Tempat yang memiliki cadangan terkira (*probable*) besi primer (bijih dan logam) yang besar di Kabupaten Tanah Laut adalah Riampinang, Gunung Tembaga dan Tanjung. Sumber daya besi primer terukur (*measured*) jumlahnya melebihi 1,5 juta ton, berada di daerah Pontain dan Tebing Siring. Sedangkan sumber daya besi primer terka (*inferred*) lebih dari seratus tujuh puluh ribu ton (Pusat Sumber Daya Geologi, 2008).

3.5. Hukum dan Peraturan

Beberapa hukum dan peraturan yang terkait dengan investasi hilirisasi pengolahan bijih besi adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
- PerMen ESDM No : 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi mineral logam, seperti bijih besi dan chromite dan batubara yang cukup besar (Gambar 1). Produksi bahan tambang (Gambar 5) berfluktuasi naik turun dari tahun 2005 hingga 2011. Produksi Bijih besi berlangsung dari tahun 2005 naik dan kemudian menurun pada tahun 2009 dan naik kembali pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2006 dan 2007 produksi batubara turun dari tahun 2005 dan naik kembali pada tahun 2007, turun pada tahun 2009 dan 2010, kemudian naik kembali pada tahun 2011. Produksi chromite naik pada tahun 2009 dari tahun 2008 kemudian turun pada tahun 2010 dan 2011, dan berhenti pada tahun 2011. Sementara produksi mangan naik pada tahun 2010 dari tahun 2009, dan turun pada tahun 2011. Fluktuasi produksi akan mengakibatkan PNBP negara turut berfluktuasi, sehingga PNBP sektor pertambangan pada daerah juga berfluktuasi.

Dengan diberlakukannya PerMen ESDM No : 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, maka upaya ekspor bahan tambang mineral tak dapat dilakukan, karena setiap bahan baku yang dihasilkan dari kegiatan penambangan bijih besi, yang berupa mineral magnetite, hematite dan pyrite, sebelum diekspor harus dinaikan nilai tambahnya melalui proses pengolahan. Untuk bijih besi maka konsentrat bijih besi yang diolah harus memenuhi persyaratan minimal 62 %, untuk Chromit harus diolah menjadi konsentrat dengan kadar 49 %, yang berasal dari bijih mangan berupa mineral psilomelane, pyrolusite, manganite dan Braunite. Sedang untuk Chromite harus terolah menjadi logam 99 % Chromite jika berasal dari mineral Chromite, atau jika berupa produk terolah logam paduan maka kandungan Chrom minimal 60 % atau lebih. Dengan adanya kebijakan nasional tersebut maka menjadi kewajiban bagi setiap pelaku dalam industri pertambangan untuk mematuhi peraturan tersebut dengan meningkatkan kapasitas teknologi dan sumberdaya manusia yang dimilikinya, atau bekerjasama dengan pihak lain di dalam negeri untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri agar produk pertambangan yang dihasilkannya memenuhi peraturan yang ada.

Keberhasilan pembangunan kapasitas teknologi dan sumberdaya manusia perusahaan dalam industri pertambangan untuk mendukung perekonomian daerah tergantung pada :

- Ketersediaan Teknologi dan Sumberdaya Manusia yang diperlukan

Ketersediaan teknologi yang diperlukan untuk melakukan peningkatan nilai tambah dalam proses pengolahan bahan baku menjadi bahan baku lanjutan dan ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil dan terlatih dalam peningkatan nilai tambah menjadi faktor yang menentukan bagi

para pelaku industri pertambangan untuk menjadi pendukung pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

- Kontinuitas kuantitas dan kualitas bahan baku yang ditambang

Kontinuitas kuantitas dan kualitas produk tambang tergantung pada kuantitas dan kualitas cadangan endapan bijih besi, chromite, dan mangan yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut. Seandainya potensi dan cadangan bijih besi tidak mencukupi untuk memasok bahan baku bagi industri pengolahan bijih besi yang ada, maka bahan baku dapat didatangkan dari Kabupaten Tanah Bumbu atau kabupaten lain yang memiliki potensi bijih besi, baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan cara mengimpornya, dengan persyaratan bahwa produk yang dihasilkan dari bahan baku impor sebaiknya berorientasi ekspor.

- Kebijakan kemudahan berinvestasi pemerintah

Meliputi kebijakan kemudahan dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung seperti pemasok energi listrik yang dibutuhkan oleh unit pengolahan yang didirikan, kemudahan dalam pembangunan seperti jalan tambang, jalan pelabuhan dan dermaga pelabuhan. Berbagai fasilitas pelabuhan yang dibangun oleh perusahaan pelaku industri pertambangan dapat dilihat pada Tabel 3

- Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku

Dalam melakukan kegiatannya maka diharapkan bahwa para pelaku industri pertambangan ini harus memiliki IUP, mematuhi peraturan lingkungan yang ada, CSR, dll

- Sumberdaya Energi atau Listrik

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Tanah Laut dipenuhi oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarmasin. Pembangkit listrik yang berada di Kabupaten Tanah Laut terletak di desa Asam-Asam, adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 65 MW.

- Pasar Produk tambang

Pasar produk tambang yang dipengaruhi oleh harga dan sistem pasokan permintaan pada pasar nasional maupun internasional akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pasokan atau pun permintaan produk tambang. Sehingga kegiatan industri pertambangan pun akan terkena imbasnya.

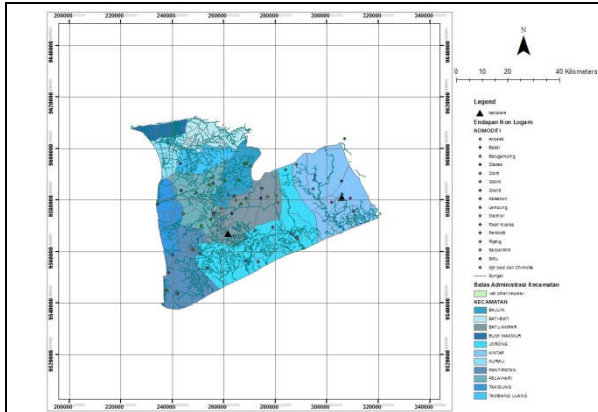
E. KESIMPULAN DAN SARAN

- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penambahan pendapatan daerah melalui PNBPN yang berasal dari pembangunan industri pertambangannya.
- Di Kabupaten Tanah Laut pembangunan industri pertambangan yang dimulai dari industri pertambangan bijih besi dapat memicu pertumbuhan ekonomi jika ditopang oleh ketersediaan pasokan bijih besi yang diperoleh dari cadangan bijih besi yang dimilikinya. Selain itu pasokan dapat diperoleh dari bijih besi yang tersebar dan terdapat di daerah lain di propinsi Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah.
- Dalam pembangunan industri besi dan baja Nasional di Kalimantan Selatan harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan bahan baku bijih besi dari pasar internasional jika pasokan dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tidak mencukupi.
- Perkembangan industri besi dan baja nasional di Kalimantan Selatan tergantung pula dari ketersediaan pasokan batubara, kapur yang diperlukan dalam proses pengolahan besi dan baja
- Keberhasilan pembangunan kapasitas teknologi dan sumberdaya manusia perusahaan dalam industri pertambangan untuk mendukung perekonomian daerah tergantung pada : Ketersediaan Teknologi dan Sumberdaya Manusia yang diperlukan; Kontinuitas kuantitas dan kualitas bahan baku yang ditambang; Kebijakan kemudahan berinvestasi pemerintah; Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku; Sumberdaya Energi atau Listrik yang diperlukan dalam hilirisasi industri pertambangan; Pasar produk pertambangan.

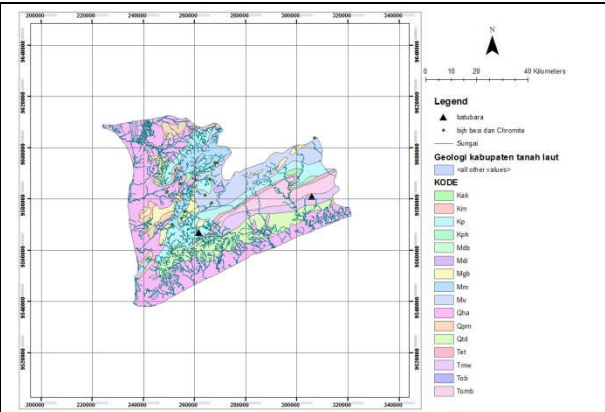
F. DAFTAR PUSTAKA

- Balitbangda Kalimantan Selatan dan BPPT; Kajian Bijih Besi Kalimantan Selatan, Identifikasi interaksi antara wilayah untuk industri Besi di Kalimantan Selatan; Laporan Akhir, , 2007.
- Bappeda Kab Tanah Laut; BPPT, PTSM; Penyusunan dan Pengumpulan data / informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kajian Pengembangan Bijih Besi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Rakyat di Kabupaten Tanah Laut, Laporan Akhir, 2007.

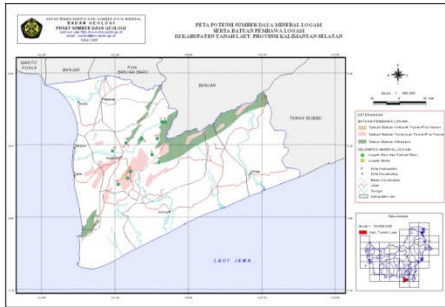
- Tresnadi, Hidir; Kususmastuti, ETTY; Laporan Survey lapangan Bijih Besi di Sumber Mulia; 2008, BPPT
- Tresnadi, Hidir; Potensi Pencemaran Cr(VI) (Krom) Dan Remediasinya Pada Penambangan Bijih Besi Di Sumber Mulia, Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Seminar Ilmiah Nasional X Penelitian Masalah Lingkungan di Indonesia, Universitas Brawijaya, 2014.
- Asep Sofyan, dkk Inventarisasi Cebakan Bijih Besi Primer Di Kabupaten Tanah Bumbu Dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Pusat Sumber Daya Geolog, Tanah Bumbu dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 2007
- BKPM, Peluang Investasi Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2012
- Handoyo, Mulyo; Kewajiban Keuangan (Pnbp) Bagi Perusahaan Pertambangan, DJMBP, ESDM
- Kenrick, Victoria; Sustainability in mining models; World Pumps; July/August 2012; Elsevier.
- Ziran, Zhong, 1999, Natural Resources Planning, Chapter 13 in Natural Resources Management, edited by the MOLAR, Geological Publisher, 1999.
- Ziran, Zhong; Natural resources planning, management, and sustainable use in China, Resources Policy 25, hal 211–220, 1999, www.elsevier.com/locate/resourpol



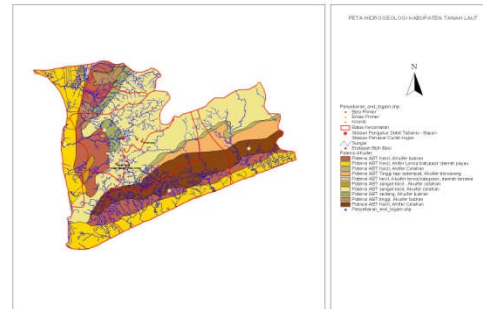
Gambar 1 Sebaran Endapan di tiap Kecamatan Kabupaten Tanah Laut



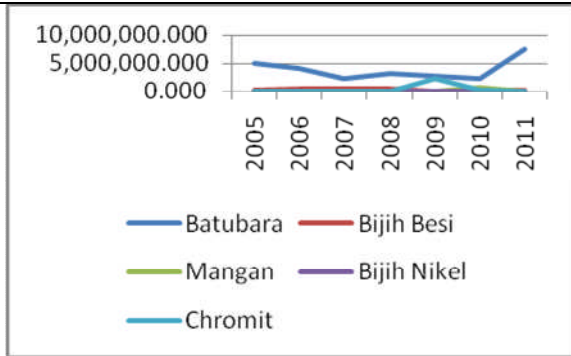
Gambar 2 Geologi dan Sebaran Endapan Logam, Logam dan Batubara Kabupaten Tanah Laut



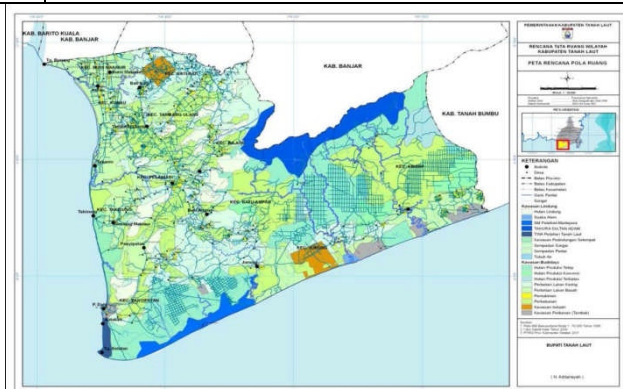
Gambar 3 Potensi Sumberdaya Mineral Logam Serta Batuan Pembawa Logam di Kabupaten Tanah Laut



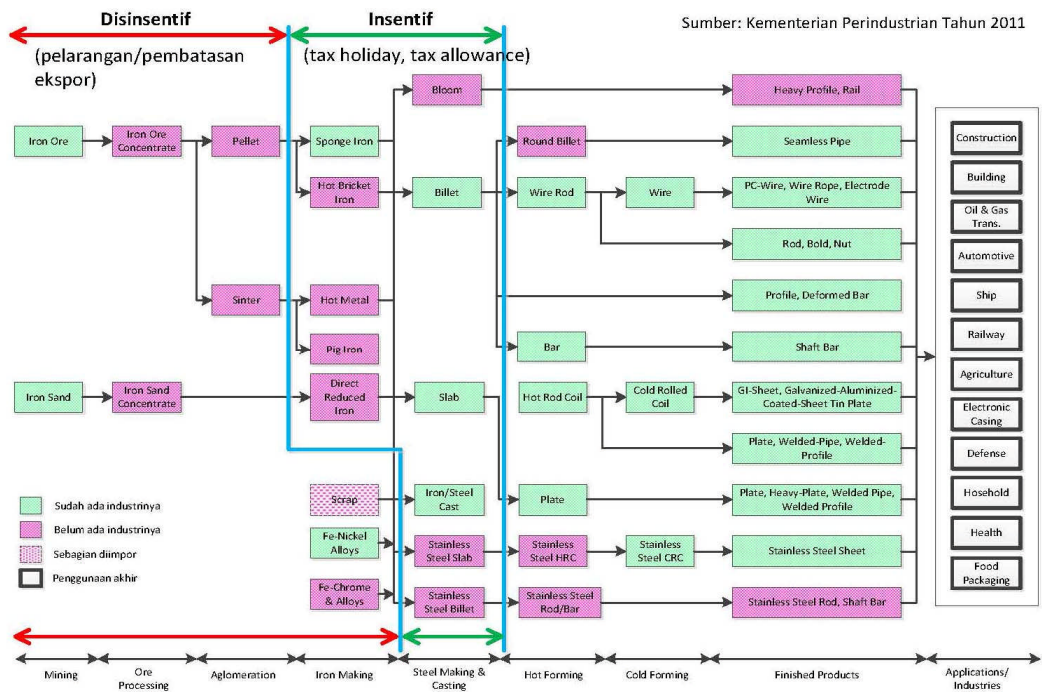
Gambar 4 Hidrogeologi Kabupaten Tanah Laut



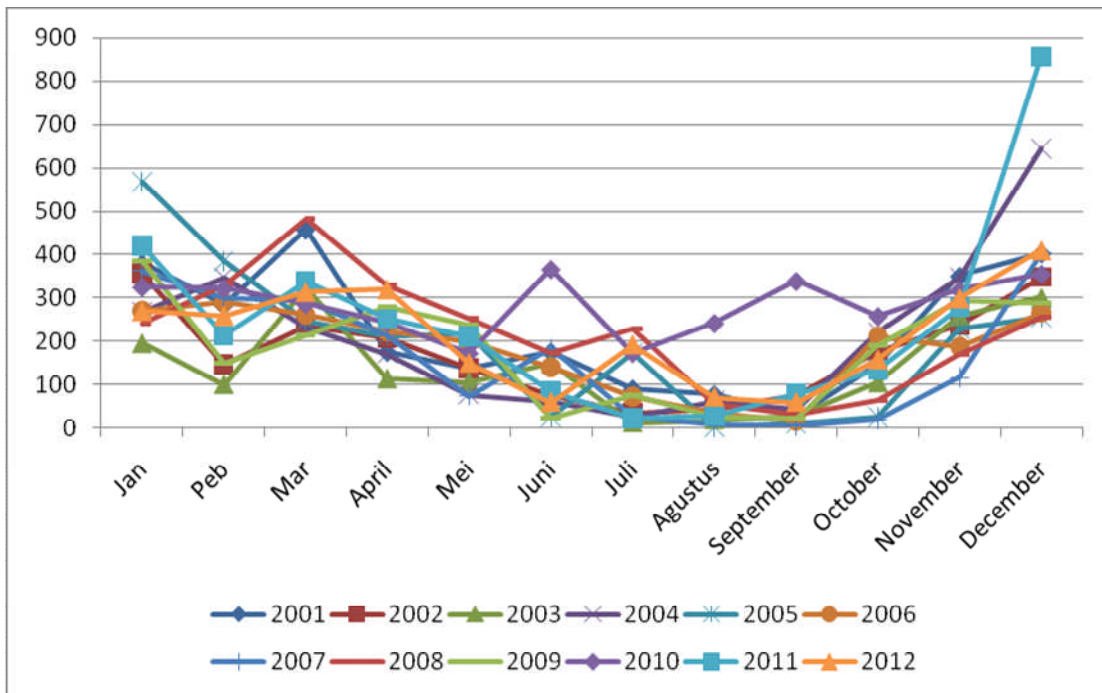
Gambar 5 Produksi Bahan Tambang di Kabupaten Tanah Laut (Sumber BPS: KDA Tanah Laut)



Gambar 6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 – 2031 (Sumber: Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 – 2031)



Gambar 7 Pohon Industri Besi/Baja (Sumber: Kementerian Perindustrian Tahun 2011)



Gambar 8. Curah Hujan di Banjarbaru

Tabel 1 Komposisi Kimia (%) Bijih Besi Di Kalimantan Selatan

Tipe Bijih	Fe	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	P	S	Ni	LOI
Laterit	40-56	3-12	0,5-2	0,5-2	5-13	1-2,5	0,05-0,1	0,05-0,1	0,015-0,25	5-15
Metasomatik (Magnetite dan Hematite)	30-63	3-15	0,5-2	0,5-2	2-15	<0,1	<0,1	<0,1	-	<2

Sumber : Buletin Sumber Daya Geologi, Vol 4, No 2, 2009

Tabel 2. Sumber Daya dan cadangan Besi Primer di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2008

No	Lokasi	Sumber Daya (Ton)				Cadangan (Ton)	
		Tereka		Terukur		Terkira	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Pontain			1.197.000	778.050		
2	Tebing Siring			1.149.200	625.049,88		
3	Riam Pinang					1.149000	746.850
4	Tanah Ambungan	132.000	41.870,40				
5	Tanjung					177.200	79.740
6	G Tembaga					889.00	556.247,30
7	Melati					108	60,48
8	Batukora					155	79,67
9	Ukin					512	259,07
10	Koratein					30	19,97
	Jumlah	132.000	41.870,40	2.346.200	1.403.100	2.216.005	1.383.256

Sumber : Pusat Sumber Daya Geologi, 2008

Tabel 3 Pelabuhan Khusus Regional dan Nasional Di Kabupaten Tanah Laut 2009
(Peluang Investasi Daerah, BKPM, 2012)

No	Perusahaan	Bidang Usaha	Desa	Kecamatan
1	PT Restu Mulia Kencana	Batubara	Pandansari	Kintap
2	PT Astana Karya	Batubara	PandanSari	Kintap
3	PT Alkatara	Batubara	Sungai Cuka	Kintap
4	PT Mandiri Citra Bersama	Batubara	Pandan sari	Kintap
5	PT Dewata Utama	Batubara	Pandan Sari	Kintap
6	PT Surya Sakti Dharma Kencana	Batubara	Kintap Kecil	Kintap

Sumber : Bidang LLAJ

Tabel 4 Cadangan Bahan Tambang dan Galian Kabupaten Tanah Laut
(<http://www.tanahlautkab.go.id>)

No	Jenis Bahan Mineral Non Logam	Cadangan (Juta Metrik Ton)
1	Pasir Kwarsa	20,4
2	Batu Gamping	102,0
3	Lempung	117,6
4	Marmer	7,3
5	Granit	5,0
6	Oker	3,9
7	Andesit	13.420,0
8	Periodotit	944
9	Basalt	1.600
10	Diorit	541
	Batubara dan Mineral Logam	Cadangan (Juta Metrik Ton)
1	Batubara	Tersebar di areal 314,4 juta m ²
2	Emas	Tersebar cukup banyak di areal lebih dari 100 Ha
3	Platina	Tersebar tidak merata dengan cadangan cukup banyak
4	Mangan	Cukup banyak

Tabel 5. Cakupan DAS dan Luasnya di Kabupaten Tanah Laut
(Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, 2007)

No	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Ranau, Kintap, Cuka, dan Kudung	Kecamatan Kintap	91.283,27
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Pelaihari dan Takisung	62.300,19
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan Asam-asam	Kecamatan Pelaihari, Batuampar, dan Jorong	53.378,92
4.	DAS Maruka	Sungai Rangka dan Maruka	Kecamatan Bati-bati, Tambakulang, dan Kurau	52.459,38

5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Batuampar, dan Jorong	32.607,49
6.	DAS Batang-gayang	Sungai Batanggayang	Kecamatan Pelaihari, Penyipatan, dan Takisung	25.938,11
7.	DAS Kepunggur dan Kandangan	Sungai Kepunggur dan Kandangan	Kecamatan Panyipatan	24.746,12
8.	DAS Sebukur	Sungai Sebukur	Kecamatan Panyipatan dan Jorong	20.878,46
9.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	9.014,24
10.	DAS Pandan	Sungai Pandan	Kecamatan Jorong	7.055,39
11.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Jorong	3.624,24

Sumber: Interpretasi Peta RBI, 1999

Tabel 6 Kawasan Budidaya Untuk Kawasan Pertambangan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 – 2031

(Sumber: Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 – 2031)

No	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Lokasi
1	Gas Methan Batubara	Kec Bumi Makmur, Kurau , Bati-Bati, Tambang Ulang, Kurang, Pelaihari, Penyipatan, Jorong, Batu Ampar, Kintap, dan 5 km lepas pantai, jorong, Panyipatan dan Kintap
2	Mineral Logam	Kec bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, dan Kintap
3	Batubara	Kec Bati-Bati, Jorong, Kintap, Panyipatan dan Batu Ampar
4	Mineral Non Logam	Seluruh Kecamatan
5	Batuan	Seluruh Kecamatan

RPSEP-49

RESPON MAHASISWA TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS *E-LEARNING* MELALUI PEMANFAATAN *ACADEMIC INFORMATION SYSTEM* (AIS) DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA DENGAN *TECNOLOGY ACCEPTANCE MODELS* (TAM)

Yusar Sagara
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This study aims to (1). Knowing the response and preparedness of students in the use of AIS -based learning application e-learning , (2). Knowing the factors that influence the adoption of e -learning through the AIS in learning , (3). Knowing the strategy of improving the quality of learning for students through the use of AIS . The research methodology is descriptive quantitative research data collection tool was a questionnaire that uses a five Likert scale to measure the use of AIS as an e -learning respondents (students) in the learning activit. Questionnaires were collected and processed as many as 833 questionnaires. The results of this study showed that of 25 questions that measure variables obtained a total score of 58.202 respondents were classified based on the value of the quartile values. the use of AIS as a medium of learning is between the second quartile (41.650) and the maximum score (104.125) the use of AIS as a medium of e -learning is not good .Factors affecting the implementation of AIS as a medium of learning is a permanent feature and collided with the bandwidth capacity provided by UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, the development is still limited to the initiation of the material is limited given the limited bandwidth, and time lecturer for the development of e -learning is limited so that the functionalization of the AIS -based learning management not entirely unworkable. AIS based E-learning is used as a viable communication option that complements traditional classroom, but still requires development consistently visible from the side of the learning design is quite decent used but only in a good criterion.

Keywords : *Respons, Student, e-learning, Akademik Informatin System (AIS)*

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Pusat komputer dan sistem informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara terus menerus melakukan pengembangan model sistem dan komunikasi akademik dan pembelajaran bagi civitas akademika di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satunya adalah aplikasi *Academic Information System* (AIS) merupakan media pembelajaran interaktif antara dosen dan mahasiswa, dimana (a) mahasiswa dapat memilih materi kuliah

sesuai dengan program studi termasuk mata kuliah dan penugasan dari dosen. (b) dosen dapat melakukannya sebagai aktifitas pengajaran pada mata kuliah yang telah dibuat kerangka perkuliahan (<https://ais.uinjkt.ac.id>)

Menu yang terdapat di AIS adalah (a) Mata Kuliah yang berisi sejumlah mata kuliah yang diupload oleh dosen dan dapat didownload oleh mahasiswa sebagai sumber belajar (b) Fakultas yaitu semua fakultas dan program studi yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan kegunaan untuk memudahkan browsing maupun searching materi bagi mahasiswa (c) link internal untuk memudahkan ke link induk seperti UIN, Sistem Akademik atau lainnya (d) petunjuk penggunaan bagi dosen dan mahasiswa.

Saat ini terdapat perubahan peran dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran. Peran dosen telah berubah *dari*: (1) sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, ahli materi, dan sumber segala jawaban, *menjadi* sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator pengetahuan, dan mitra belajar; (2) *dari* mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, *menjadi* lebih banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Sementara itu peran mahasiswa dalam pembelajaran telah mengalami perubahan yaitu: (1) *dari* penerima informasi yang pasif *menjadi* partisipan aktif dalam proses pembelajaran, (2) *dari* mengungkapkan kembali pengetahuan *menjadi* menghasilkan dan berbagai pengetahuan, (3) *dari* pembelajaran sebagai aktivitas individual (soliter) *menjadi* pembelajaran berkolaboratif dengan lainnya. Bentuk perubahan peran tersebut akan optimal bila didukung dengan adanya sistem pembelajaran berbasis elektronik seperti AIS.

AIS merupakan aplikasi dari pembelajaran elektronik (*e-learning*). Secara sederhana e-learning dapat difahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi (internet, intranet, ekstranet) dan multimedia (grafis, audio, video) sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar (guru/dosen) dan pembelajar (siswa/mahasiswa) (Sutrisno, 2007)

Dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan kepada mahasiswa, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pemahaman mahasiswa saat ini AIS hanya berfungsi sebagai kegiatan layanan administrasi akademik bukan sarana untuk kegiatan pembelajaran. Kebanyakan mahasiswa hanya melihat nilai, mengambil mata kuliah (KRS) belum sampai pada pemanfaatan pembelajaran. Pada tingkat kesiapan peserta belajar

(mahasiswa) dalam mengakses pembelajaran e-learning berbasis AIS. Permasalahan tersebut bermula pada (a) heterogenitas kompetensi input (mahasiswa) tersebut, ada yang berasal dari daerah yang belum terjangkau internet, pendidikan di SMA/SMK belum berbasis TIK, kompetensi siswa rendah, daya dukung SMA/SMK ketersediaan TIK rendah (b) adaptasi terhadap proses pembelajaran (aplikasi AIS) tersebut yang rendah sehingga pada proses awal mengalami kesulitan walaupun selanjutnya mahasiswa tidak mengalami kesulitan.

B. Perumusan Masalah

AIS merupakan media penting dalam pembelajaran interaktif antara dosen dan mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun adanya ketidakpahaman dan kurangnya sosialisasi AIS sebagai media pembelajaran serta perbedaan kompetensi pada tingkat kesiapan peserta belajar (mahasiswa) dalam mengakses pembelajaran e-learning berbasis AIS, sehingga perumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut : (1). Bagaimanakah respon dan kesiapan mahasiswa tentang penerapan pembelajaran berbasis e-learning melalui AIS di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-learning melalui AIS dalam pembelajaran di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (3). Bagaimanakah strategi peningkatan kualitas pembelajaran bagi Mahasiswa melalui pemanfaatan AIS di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui respon dan kesiapan mahasiswa pemanfaatan AIS dalam penerapan pembelajaran berbasis e-learning, (2). Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-learning melalui AIS dalam pembelajaran di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (3). Mengetahui strategi peningkatan kualitas pembelajaran bagi Mahasiswa melalui pemanfaatan AIS di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tujuan tersebut memiliki kegunaan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kompetensi siswa dalam memanfaatkan ilmu disamping untuk mengembangkan strategi dalam membimbing Mahasiswa dalam memanfaatkan AIS

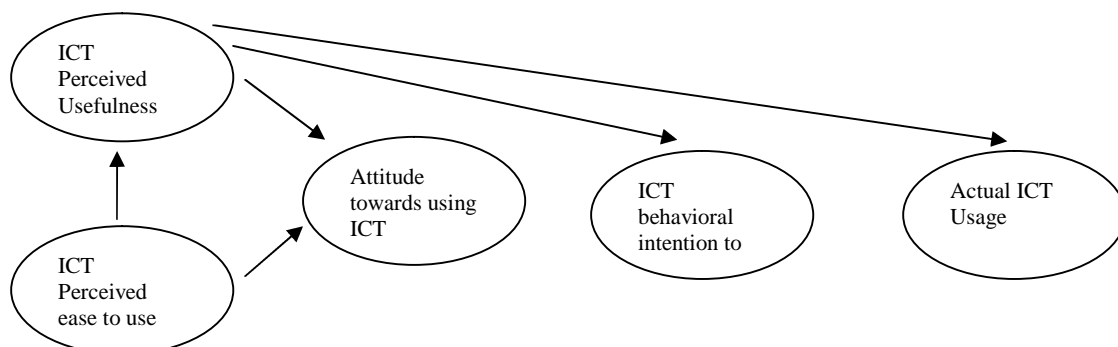
D. Kajian Teori

Pembelajaran Elektronik (e-learning)

Dalam proses belajar mengajar, model pendidikan TIK lebih menitik beratkan kemampuan peserta didik secara individual terhadap materi pembelajaran yang telah disusun ke tingkat kesiapan sehingga peserta didik mampu memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Melalui teknologi, materi pelajaran dan metodologi pengajaran ditetapkan dengan dukungan teknologi. Singkatnya secara esensial teknologi pengajaran dapat menggantikan peran pendidik dan peserta dapat berperan aktif sebagai pelatih yang mempelajari semua data dan keterampilan yang berguna.

Berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan terutama sebagai media pembelajaran juga tidak terlepas dari perilaku pengguna dalam hal ini adalah para dosen. Penggunaan ICT oleh dosen/guru baik untuk pembelajaran maupun untuk mendukung manajemen kelas dicoba untuk diterapkan dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Models (TAM).

Penggunaan ICT yang sesungguhnya oleh para pengajar ditentukan oleh sikap guru/dosen terhadap penggunaan ICT dan minat perilaku menggunakan ICT. Minat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku memanfaatkan ICT. Sikap didefinisikan sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku. Sikap (*attitude*) seseorang terhadap ICT menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa ICT baik atau jelek.



Gambar 1. Model Technology Acceptance Model

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. (Mulyasa, 2003 : 100).

Tugas guru/dosen yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Tugas ini diwujudkan dalam strategi pembelajaran, strategi pembelajaran dimaknai sebagai pola umum perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, atau keseluruhan aktivitas guru dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembelajaran (Raka Joni,1982).Dalam strategi pembelajaran kuantum mencakup tiga hal yaitu kuantum, pemercepatan belajar, dan fasilitasi (De, Porter; 1999: 4-5).

Hal ini dapat diuraikan bahwa tugas guru secara kuantum harus mampu mengubah energi yang berupa minat dan bakat siswa menjadi cahaya pengetahuan, dalam pemercepatan belajar, pendidik hendaknya mampu menghilangkan keterbatasan siswa dan hambatan – hambatan lain yang dapat menghambat pelaksanaan belajar siswa, dan terakhir seorang pendidik harus memfasilitasi kelancaran siswa didik dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuannya. Secara umum tugas tersebut dapat disimpulkan seorang dosen memiliki tugas dalam pembelajaran, harus mampu mendeteksi dan mengidentifikasi kemampuan kompetensi siswa, membantu menghilangkan hambatan belajar, dan menyediakan fasilitas pembelajaran, hal ini menurut Usman tugas – tugas dosen dalam pembelajaran dapat dirinci sebagai berikut: (1) Menetapkan tujuan pembelajaran; (2) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran; (3) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar; (4) Memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai; (5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar

Belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung pada periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. (Gagne dalam Wahyu, 2007). Pendapat tersebut dapat dimaknai jika belajar bukan karena tumbuhnya subyek pembelajar dalam arti fisik tetapi merupakan perubahan kualitas yang dapat dicapai dengan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi harapan.

Peningkatan kualitas pembelajar sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal; kualitas internal mengacu pada potensi diri siswa yang berupa kompetensi, dan lingkungan eksternal yaitu komponen yang akan membentuk pembelajar pada peningkatan

kompetensi (Yassin, 2000); komponen eksternal berupa guru dan fasilitas belajar (Muslim,2007), berasumsi dengan pendapat tersebut maka kualitas belajar siswa dipengaruhi oleh kualitas guru, dan kualitas fasilitas yang tersedia. Meskipun demikian tidak berarti bahwa guru berkualitas dan kualitas fasilitas yang baik akan langsung meningkatkan kompetensi siswa, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi kompetensi siswa dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia, pendapat ini diperkuat oleh penelitian Berge (2002) bahwa dalam pelatihan di dunia kerja hampir 80 % kegagalan siswa yang dilatih disebabkan karena tidak memahami dan memiliki kompetensi dalam penggunaan peralatan di dunia kerja.

Untuk pembelajaran *e learning* dengan menggunakan AIS yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, agar dapat maksimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, maka mahasiswa perlu memiliki sejumlah kompetensi dalam pemanfaatan media AIS.

Adapun indikator kompetensi mahasiswa dalam pemanfaatan e learning dalam AIS sebagai sumber belajar dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Teori dan Indikator Model Technology Acceptance Models (TAM)

Kompetensi Mahasiswa dalam Pemanfaatan AIS	Indikator
ICT Perceived Usefulness	kemudahan akses ke sumber referensi, Komunikasi dalam kelas, saran kerja kelompok, ujian dan pengumpulan tugas elektronik
ICT Perceived ease to use	kemudahan akses ke sumber referensi, Komunikasi dalam kelas, saran kerja kelompok, ujian dan pengumpulan tugas elektronik
Attitude towards using ICT	kemudahan akses ke sumber referensi, Komunikasi dalam kelas, saran kerja kelompok, ujian dan pengumpulan tugas elektronik
ICT behavioral intention to use	kemudahan akses ke sumber referensi, Komunikasi dalam kelas, saran kerja kelompok, ujian dan pengumpulan tugas elektronik
Actual ICT usage	kemudahan akses ke sumber referensi, Komunikasi dalam kelas, saran kerja kelompok, ujian dan pengumpulan tugas elektronik

Sumber : TAM

Technology Acceptance Model (TAM)

Penerapan dan penggunaan teknologi informasi (TI) telah menjadi tujuan utama dari setiap organisasi pada dua dekade terakhir ini (Al-Gahtani, 2001). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan TI (*IT acceptance*). Dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa faktor penentu utama dari berhasil atau tidaknya suatu proyek sistem informasi adalah penerimaan pemakai (*user acceptance*) (Bailey.et.al, 1983;Davis F.D, 1989; dan Igarria, 1994).

Para peneliti sistem informasi telah mengadopsi teori tindakan yang beralasan(*Theory of Reasoned Action*) dari Fishbein dan Azjen (1975) yaitu suatu teori yang berhubungan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan utama TAM adalah menjadi dasar untuk memahami pengaruhfaktor-faktor eksternal pada keyakinan internal (*internal beliefs*) dan tingkahlaku (*attitude*). TAM mencapai tujuan di atas dengan mengidentifikasi beberapa variabel fundamental sesuai dengan hasil dari penelitian terdahulu tentang faktor-faktor penentu penerimaan komputer.

Seseorang akan memanfaatkan komputer atau TI dengan alasan bahwa teknologi tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya. Model *Technology Acceptance Model* (TAM)sebenarnya diadopsi dari model *The Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Fishbein dan Azjen (1975), dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.

Technology Acceptance Model (TAM) sendiri dikembangkan untuk menjelaskan perilaku penggunaan komputer. Model TAM yang dikembangkan oleh Davis F.D (1989) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam penelitian teknologi informasi, perilaku akuntansi, dan psikologi (Adam.et.al, 1992;Chin dan Todd, 1995; Igarria.et.al, 1997; Mhd.Jantan.et.al, 2001). Sampai saat iniTAM merupakan model yang paling banyak digunakan dalam memprediksi penerimaan teknologi informasi (Gefen, 2002) dan telah terbukti menjadi model teoritis yang sangat berguna dalam membantu memahami dan menjelaskan perilaku pemakai dalam implementasi sistem informasi (Legris.et.al, 2003). Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pemakai TI terhadap penerimaan penggunaan TI itu sendiri. Model TAM secara lebih terperinci menjelaskan penerimaan TI dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah

diterimanya TI oleh pemakai. *Technology Acceptance Model* (TAM) mendefinisikan dua persepsi dari pemakai teknologi yang memiliki suatu dampak pada penerimaan mereka. TAM menekankan pada persepsi pemakai tentang "bagaimana kegunaan sistem untuk saya" dan "semudah apakah sistem ini digunakan" adalah dua faktor kuat yang mempengaruhi penerimaan atas teknologi dan merupakan determinan fundamental dalam penerimaan pemakai. Model ini menempatkan faktor sikap dan tiap-tiap perilaku pemakai dengan dua variabel yaitu kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*). Kemudahan penggunaan serta kemanfaatan adalah dua karakteristik yang banyak dipelajari secara mendalam karena merupakan hal utama dalam *Technology Acceptance Model* (TAM).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa dalam penggunaan AIS berbasis e learning tersebut dalam pembelajaran sehingga dapat merekomendasikan strategi yang tepat untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui AIS mengetahui penggunaan atau kompetensi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam memanfaatkan AIS sebagai sumber belajar dengan berbasis pada model *Technology Acceptance Models* (TAM) serta

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan lima skala likert untuk mengukur penggunaan AIS sebagai e-learning responden (mahasiswa) dalam aktivitas pembelajarannya. Skala lima likert direkomendasikan untuk mengukur pemanfaatan teknologi dalam pendidikan (Godfrey Maleko Munguatosha et al, 2011) dan dengan pertanyaan terbuka semi terstruktur untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap penggunaan e-learning dalam pembelajaran (Glenn Hardaker, Gurmak Singh, 2011). Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

F. Hasil Penelitian

1. Sebaran Kuesioner

Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan selama 3 bulan. Kuesioner yang disebar sebanyak 1100 eksemplar. Dari 1100 eksemplar kuesioner yang dikirim, sebanyak 1100 kuesioner kembali. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner 100%, namun

dari 1100 kuesioner yang layak dianalisis sebanyak 833 eksemplar. Deskripsi tingkat pengembalian kuesioner adalah :



Gambar 1
Grafik Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dari 1100 eksemplar kuesioner yang kembali, ada 267 eksemplar kuesioner yang tidak layak dilakukan pengujian dan analisa dikarenakan yang mengisi adalah semester 1 (satu) ganjil dimana mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer tetapi belum menggunakan AIS dalam pengisian KRS dan kegiatan lainnya. Dengan demikian studi deskriptif mengenai masalah sebanyak 833 eksemplar.

Gambaran Unit Observasi

Berikut ini adalah sebaran kuesioner berdasarkan unit observasi, yaitu lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tabel 2
Sebaran Kuesioner per Unit Observasi

Unit Observasi	Kuesioner Yang Disebar
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)	100
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)	100
Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)	100
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM)	100
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)	100
Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI)	100
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	100
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	100
Fakultas Psikologi (FPSi)	100
fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	100

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	100
Total	1100

Sumber : Data diolah sendiri, 2013

2. Pengembangan Pruduk

Academic Information System (AIS) adalah sistem administrasi akademik yang baru dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PUSKOM) sebagai leading sector-nya. Sistem ini sudah meliputi alur perkuliahan, di antaranya: pengambilan KRS, validasi dosen Penasihat Akademik (PA), penilaian, sampai dengan wisuda. Dalam format laporannya AIS menggunakan fasilitas barcode sebagai alat validasi untuk hasil cetak yang dilakukan oleh semua stakeholder (mahasiswa, dosen, dan lain-lain). Sistem AIS dikembangkan dengan menggunakan Java sebagai bahasa programnya dan Postgres sebagai database. Framework yang digunakan adalah ZKoss. AIS dapat diakses di alamat <http://ais.uinjkt.ac.id>. Halaman depan AIS :



Gambar 2

Tampak Tampilan Halaman Depan AIS

Respon Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tentang Pemanfaatan *Academic Information System (AIS)*

Dimensi Pengetahuan dan kemampuan dasar mahasiswa tentang teknologi informasi

Tabel 3

Tanggapan atas penguasaan mahasiswa dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi office, seperti MS Word, Excel, Powerpoint, dll (baik pada aplikasi windows, macintosh, dan lainnya)

Pertanyaan No.1	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Mahasiswa mempunyai penguasaan dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi office, seperti MS Word, Excel, Powerpoint, dll (baik pada aplikasi windows, macintosh, dan lainnya)	Sangat Tidak Setuju	0	0,00	0
	Tidak Setuju	0	0,00	0
	Netral	0	0,00	0
	Setuju	751	90,16	3004
	Sangat Setuju	82	9,84	410
	Total	833	100	3414

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 3 dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa mereka memiliki penguasaan dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi office, seperti MS Word, Excel, Powerpoint, dll (baik pada aplikasi windows, macintosh, dan lainnya)

Tabel 4

Tanggapan atas penguasaan mahasiswa dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi internet seperti internet explorer (ie), google chroom, Mozilla firefox, atau lainnya yang sejenis

Pertanyaan No.2	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Mahasiswa mempunyai penguasaan dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi internet seperti internet explorer (ie), google chroom, Mozilla firefox, atau lainnya yang sejenis	Sangat Tidak Setuju	0	0,00	0
	Tidak Setuju	0	0,00	0
	Netral	0	0,00	0
	Setuju	810	97,24	3240
	Sangat Setuju	23	2,76	115
	Total	833	100	3355

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 4 dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa mereka mempunyai penguasaan dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi internet seperti internet explorer (ie), google chroom, Mozilla firefox, atau lainnya yang sejenis.

Tabel 5
Tanggapan mahasiswa dalam melakukan dan pernah mengupload file (dokumen, foto, atau lainnya)

Pertanyaan No.3	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya pernah dan melakukan mengupload file (dokumen, foto, atau lainnya)	Sangat Tidak Setuju	51	6,12	51
	Tidak Setuju	33	3,96	66
	Netral	4	0,48	12
	Setuju	612	73,47	2448
	Sangat Setuju	133	15,97	665
	Total	833	100	3242

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.4. dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa mereka dapat melakukan dan pernah mengupload file (dokumen, foto, atau lainnya)

Tabel 6
Tanggapan mahasiswa pernah mendownload file (dokumen, foto, atau lainnya)

Pertanyaan No.4	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya pernah dan melakukan dan pernah mendownload file (dokumen, foto, atau lainnya)	Sangat Tidak Setuju	91	10,92	91
	Tidak Setuju	84	10,08	168
	Netral	0	0,00	0
	Setuju	405	48,62	1620
	Sangat Setuju	253	30,37	1265
	Total	833	100	3144

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 6. dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa mereka dapat melakukan dan pernah mendownload file (dokumen, foto, atau lainnya)

Tabel 7
Tanggapan mahasiswa pernah mempunyai dan atau pernah punya dan atau punya tidak pernah digunakan blog/website pribadi

Pertanyaan No.5	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya mempunyai dan atau pernah punya dan atau punya tidak pernah digunakan blog/website pribadi	Sangat Tidak Setuju	245	29,41	245
	Tidak Setuju	311	37,33	622
	Netral	28	3,36	84
	Setuju	113	13,57	452
	Sangat Setuju	136	16,33	680
	Total	833	100	2083

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 7. dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa mereka pernah mempunyai dan atau pernah punya dan atau punya tidak pernah digunakan blog/website pribadi

Dimensi AIS Perceived Usefulness (Perspsi Pengguna terhadap Kegunaan AIS).

Persepsi pengguna terhadap kegunaan AIS adalah tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya yang dalam hal ini adalah dalam peningkatan kualias pembelajaran.

Berikut ini respon mahasiswa terhadap pengetahuan dan kemampuan dasar mahasiswa tentang teknologi informasi

Tabel 8
Informasi mengenai perkuliahan seperti kontrak perkuliahan, silabus dan referensi dapat saya peroleh di AIS

Pertanyaan No.6	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Informasi mengenai perkuliahan seperti jadwal perkuliahan, jadwal UTS, jadwal UAS, jadwal kuliah pengganti, jadwal ketidakhadiran dosen, jadwal keterlambatan dosen, jadwal bimbingan akademik, jadwal bimbingan skripsi, jadwal ujian komperhensif, jadwal sidang	Sangat Tidak Setuju	378	45,38	378
	Tidak Setuju	256	30,73	512
	Netral	2	0,24	6
	Setuju	100	12,00	400
	Sangat Setuju	97	11,64	485
	Total	833	100	2083

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 8 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa mereka memperoleh informasi mengenai perkuliahan seperti seperti jadwal perkuliahan, jadwal UTS, jadwal UAS, jadwal kuliah pengganti, jadwal ketidakhadiran dosen, jadwal keterlambatan dosen, jadwal bimbingan akademik, jadwal bimbingan skripsi, jadwal ujian komperhensif, jadwal sidang dapat saya peroleh di AIS

Tabel 9
Materi kuliah dapat saya peroleh di AIS

Pertanyaan No.7	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Materi kuliah dapat saya peroleh di AIS seperti silabus, kontrak belajar, modul, power point, rancangan tugas, pendukung lain (jurnal ilmiah, artikel, opini, e-book	Sangat Tidak Setuju	712	85,47	712
	Tidak Setuju	106	12,73	212
	Netral	15	1,80	45
	Setuju	0	0,00	0
	Sangat Setuju	0	0,00	0
	Total	833	100	968

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 9 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa mereka mendapatkan Materi kuliah seperti silabus, kontrak belajar, modul, power point, rancangan tugas, pendukung lain (jurnal ilmiah, artikel, opini, e-book) dapat saya peroleh di AIS

Tabel 10
Saya dapat berkomunikasi mengenai perkuliahan dengan teman satu rombel melalui AIS

Pertanyaan No.8	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya dapat berkomunikasi mengenai perkuliahan dengan dosen atau teman, misalnya membuka forum diskusi oleh dosen, menjawab quiz melalui AIS	Sangat Tidak Setuju	730	87,64	730
	Tidak Setuju	96	11,52	192
	Netral	7	0,84	21
	Setuju	0	0,00	0
	Sangat Setuju	0	0,00	0
	Total	833	100	943

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 10 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa mereka berkomunikasi mengenai

perkuliahan dengan dosen atau teman, misalnya membuka forum diskusi oleh dosen, menjawab quiz melalui AIS

Tabel 11
AIS berguna dalam memberikan dukungan dalam pemahaman materi kuliah yang disampaikan dosen pengajar

Pertanyaan No.9	Respon	Frek.	%	Σ Skor
AIS berguna dalam memberikan dukungan dalam pemahaman materi kuliah yang disampaikan dosen pengajar	Sangat Tidak Setuju	800	96,04	800
	Tidak Setuju	26	3,12	52
	Netral	7	0,84	21
	Setuju	0	0,00	0
	Sangat Setuju	0	0,00	0
	Total	833	100	873

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 11 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa AIS berguna dalam memberikan dukungan dalam pemahaman materi kuliah yang disampaikan dosen pengajar

Tabel 12
AIS berguna dalam memberikan dukungan dalam pengumpulan tugas

Pertanyaan No.10	Respon	Frek.	%	Σ Skor
AIS berguna dalam memberikan dukungan dalam pengumpulan tugas	Sangat Tidak Setuju	807	96,88	807
	Tidak Setuju	18	2,16	36
	Netral	8	0,96	24
	Setuju	0	0,00	0
	Sangat Setuju	0	0,00	0
	Total	833	100	867

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 12 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa AIS berguna dalam memberikan dukungan dalam pengumpulan tugas

Dimensi AIS Perceived ease to use (Kemudahan dalam Menggunakan AIS). Ini dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun (free of effort).

Tabel 13

Saya tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan dan akses AIS dimanapun dan kapanpun saya perlukan

Pertanyaan No.11	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan dan akses AIS dimanapun dan kapanpun	Sangat Tidak Setuju	210	25,21	210
	Tidak Setuju	358	42,98	716
	Netral	210	25,21	630
	Setuju	15	1,80	60
	Sangat Setuju	40	4,80	200
	Total	833	100	1816

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 13 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan dan akses AIS dimanapun dan kapanpun

Tabel 14

Saya tidak mengalami kesulitan dalam mendownload materi pembelajaran dari dosen

Pertanyaan No.12	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya tidak mengalami kesulitan dalam mendownload materi pembelajaran dari dosen	Sangat Tidak Setuju	36	4,32	36
	Tidak Setuju	674	80,91	1348
	Netral	55	6,60	165
	Setuju	23	2,76	92
	Sangat Setuju	45	5,40	225
	Total	833	100	1866

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 14 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa AIS tidak mengalami kesulitan dalam mendownload materi pembelajaran dari dosen

Tabel 15

Saya tidak mengalami kesulitan dalam mengupload tugas dari dosen

Pertanyaan No.13	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya tidak mengalami kesulitan dalam mengupload tugas dari dosen	Sangat Tidak Setuju	382	45,86	382
	Tidak Setuju	444	53,30	888
	Netral	7	0,84	21
	Setuju	0	0,00	0
	Sangat Setuju	0	0,00	0
	Total		833	100

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 15 dapat diketahui bahwa responden menyatakan tidak setuju bahwa AIS tidak mengalami kesulitan dalam mengupload tugas dari dosen

Tabel 16

Menu dalam AIS tidak menyulitkan saya dalam mengakses informasi perkuliahan yang saya perlukan

Pertanyaan No.14	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Menu dalam AIS tidak menyulitkan saya dalam mengakses informasi perkuliahan yang saya perlukan	Sangat Tidak Setuju	8	0,96	8
	Tidak Setuju	11	1,32	22
	Netral	113	13,57	339
	Setuju	610	73,23	2440
	Sangat Setuju	91	10,92	455
	Total		833	100

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 16 dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa AIS Menu dalam AIS tidak menyulitkan saya dalam mengakses informasi perkuliahan yang saya perlukan

Tabel 17

Pemakaian AIS dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Pertanyaan No.15	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Pemakaian AIS dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.	Sangat Tidak Setuju	17	2,04	17
	Tidak Setuju	24	2,88	48
	Netral	107	12,85	321
	Setuju	556	66,75	2224
	Sangat Setuju	129	15,49	645
	Total	833	100	3255

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 17 dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa Pemakaian AIS dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Attitude towards using AIS (Sikap Pengguna terhadap Penggunaan AIS) Ini adalah suatu tingkat penilaian terhadap dampak yang dialami oleh seseorang bila menggunakan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya. Penggunaan AIS sangat berdampak pada mahasiswa dalam peningkatan kualitas pembelajaran

Tabel 18

AIS tidak dapat menggantikan proses pembelajaran di kelas

Pertanyaan No.16	Respon	Frek.	%	Σ Skor
AIS tidak dapat menggantikan proses pembelajaran di kelas	Sangat Tidak Setuju	47	5,64	47
	Tidak Setuju	13	1,56	26
	Netral	100	12,00	300
	Setuju	626	75,15	2504
	Sangat Setuju	47	5,64	235
	Total	833	100	3112

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 18 dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa AIS tidak dapat menggantikan proses pembelajaran di kelas.

Tabel 19

AIS hanya sebagai pendukung kegiatan pembelajaran di kelas

Pertanyaan No.17	Respon	Frek.	%	∑ Skor
AIS hanya sebagai pendukung kegiatan pembelajaran di kelas	Sangat Tidak Setuju	57	6,84	57
	Tidak Setuju	81	9,72	162
	Netral	8	0,96	24
	Setuju	667	80,07	2668
	Sangat Setuju	20	2,40	100
	Total	833	100	3011

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 19 dapat diketahui bahwa responden menyatakan setuju bahwa AIS hanya sebagai pendukung kegiatan pembelajaran di kelas

Tabel 20

Pengumpulan tugas mahasiswa dikumpulkan melalui AIS

Pertanyaan No.18	Respon	Frek.	%	∑ Skor
Saya setuju pengumpulan tugas mahasiswa melalui AIS	Sangat Tidak Setuju	229	27,49	229
	Tidak Setuju	420	50,42	840
	Netral	167	20,05	501
	Setuju	7	0,84	28
	Sangat Setuju	10	1,20	50
	Total	833	100	1648

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 20 dapat diketahui bahwa responden menyatakan tidak setuju bahwa pengumpulan tugas dilakukan melalui AIS

Tabel 21

Hasil penilaian proses belajar dapat saya peroleh secara cepat melalui AIS

Pertanyaan No.19	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Hasil penilaian proses belajar dapat saya peroleh secara cepat melalui AIS	Sangat Tidak Setuju	77	9,24	77
	Tidak Setuju	111	13,33	222
	Netral	325	39,02	975
	Setuju	123	14,77	492
	Sangat Setuju	197	23,65	985
	Total	833	100	2751

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 21 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan sangat setuju bahwa AIS Hasil penilaian proses belajar dapat saya peroleh secara cepat melalui AIS

Tabel 22.

AIS kurang memberikan manfaat dalam kegiatan pembelajaran

Pertanyaan No.20	Respon	Frek.	%	Σ Skor
AIS kurang memberikan manfaat dalam kegiatan pembelajaran	Sangat Tidak Setuju	19	2,28	19
	Tidak Setuju	99	11,88	198
	Netral	52	6,24	156
	Setuju	421	50,54	1684
	Sangat Setuju	242	29,05	1210
	Total	833	100	3267

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 22 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan setuju bahwa AIS AIS kurang memberikan manfaat dalam kegiatan pembelajaran

AIS behavioral intention to use (Kecenderungan Tingkah Laku dalam pemanfaatan AIS) dan Actual AIS usage (Pemanfaatan dan Penggunaan AIS) Dua indikator yang diukur dalam behavioral intention to use dan actual AIS usage adalah dua indikator yang paling dapat diterima adalah kepuasan pengguna (User satisfaction) dan kegunaan sistem (system usage)

Tabel 23

Saya mengakses AIS bila hanya disarankan oleh dosen pengajar

Pertanyaan No.21	Respon	Frek.	%	∑ Skor
Saya mengakses AIS bila hanya disarankan oleh dosen pengajar	Sangat Tidak Setuju	333	39,98	333
	Tidak Setuju	462	55,46	924
	Netral	35	4,20	105
	Setuju	2	0,24	8
	Sangat Setuju	1	0,12	5
	Total	833	100	1375

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 23 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa AIS diakses hanya jika disarankan oleh dosen

Tabel 24

Saya selalu mengakses AIS setiap akan kuliah

Pertanyaan No.22	Respon	Frek.	%	∑ Skor
Saya selalu mengakses AIS setiap akan kuliah	Sangat Tidak Setuju	401	48,14	401
	Tidak Setuju	403	48,38	806
	Netral	21	2,52	63
	Setuju	8	0,96	32
	Sangat Setuju	0	0,00	0
	Total	833	100	1302

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 24 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan tidak setuju bahwa AIS bahwa AIS diakses setiap akan kuliah

Tabel 25.

Saya selalu mengakses AIS untuk mencari informasi terbaru mengenai perkuliahan walaupun tidak disarankan dosen

Pertanyaan No.23	Respon	Frek.	%	∑ Skor
Saya selalu mengakses AIS untuk mencari informasi terbaru mengenai perkuliahan walaupun tidak disarankan dosen	Sangat Tidak Setuju	36	4,32	36
	Tidak Setuju	27	3,24	54
	Netral	21	2,52	63
	Setuju	539	64,71	2156
	Sangat Setuju	210	25,21	1050
	Total	833	100	3359

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 25 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan setuju bahwa Saya selalu mengakses AIS untuk mencari informasi terbaru mengenai perkuliahan walaupun tidak disarankan dosen

Tabel 26

Saya sangat puas menggunakan AIS perspektif pengguna maupun fasilitas yang diberikan

Pertanyaan No.24	Respon	Frek.	%	∑ Skor
Saya sangat puas menggunakan AIS perspektif pengguna maupun fasilitas yang diberikan	Sangat Tidak Setuju	43	5,16	43
	Tidak Setuju	29	3,48	58
	Netral	601	72,15	1803
	Setuju	115	13,81	460
	Sangat Setuju	45	5,40	225
	Total	833	100	2589

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 26 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan netral jika AIS memberikan kepuasan perspektif pengguna maupun fasilitas yang diberikan

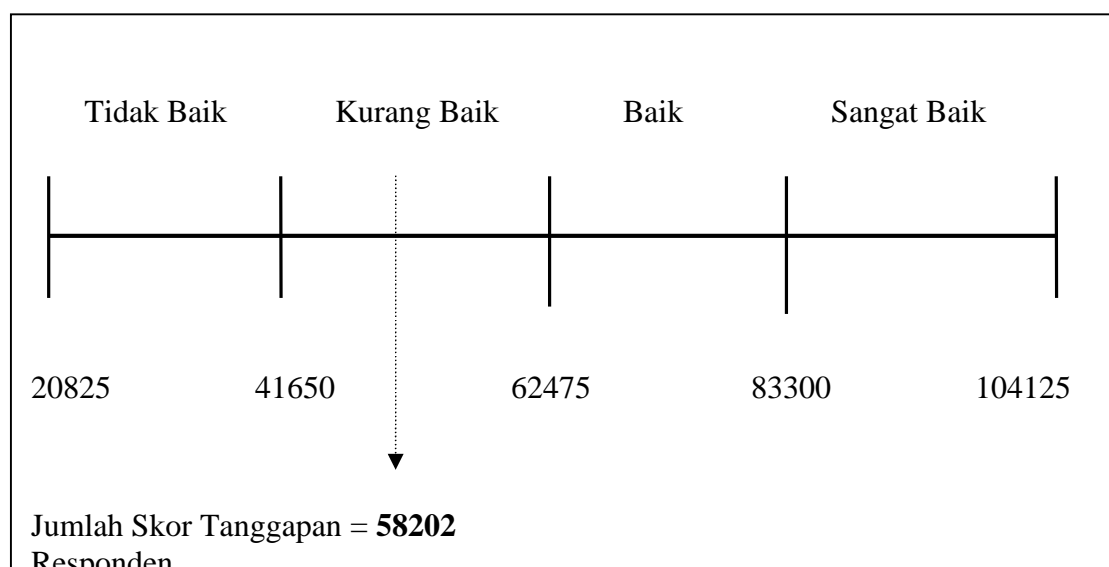
Tabel 27

Saya akan mendukung pembelajaran berbasis AIS

Pertanyaan No.25	Respon	Frek.	%	Σ Skor
Saya akan mendukung pembelajaran berbasis AIS	Sangat Tidak Setuju	3	0,36	3
	Tidak Setuju	11	1,32	22
	Netral	4	0,48	12
	Setuju	770	92,44	3080
	Sangat Setuju	45	5,40	225
	Total	833	100	3342

Berdasarkan data tanggapan responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.26 dapat diketahui bahwa reponden menyatakan setuju bahwa AIS dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran di kelas

Setelah diuraikan gambaran tanggapan responden pada masing-masing butir pertanyaan, selanjutnya dibuat gambaran tanggapan responden pada masing-masing butir pertanyaan secara menyeluruh dengan mengakumulasikan jumlah skor tanggapan responden dari masing-masing butir pertanyaan. Dari 25 pertanyaan yang mengukur variabel diperoleh total skor tanggapan responden sebesar 58.202 dan nilai ini akan diklasifikasikan berdasarkan nilai kuartil .



Skor Minimum	$= 1 \times 25 \times 833 = 20825$
Kuartil I	$= [20825 + 62475] : 2 = 41650$
Kuartil II	$= [20825 + 104125] : 2 = 62475$
Kuartil III	$= [62475 + 104125] : 2 = 83300$
Skor Maksimum	$= 5 \times 25 \times 833 = 104125$

Sehubungan dengan total tanggapan responden dari 25 butir pertanyaan pada variabel respon mahasiswa tentang pemanfaatan AIS sebagai media pembelajaran berada diantara kuartil II (41.650) dan skor maksimum (104.125) maka dapat disimpulkan pemanfaatan AIS sebagai media e-learning kurang baik

G. Kesimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Hasil tanggapan responden tentang pemanfaatan Akademik Information System (AIS) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara umum dapat disimpulkan bahwa kurang baik. Sehubungan hal tersebut potret pemanfaatan AIS terpusat pada administratif belum dapat dimaksimalkan dalam proses belajar mengajar.

2. Keterbatasan

Penelitian ini bertujuan melihat repon mahasiswa secara deskriptif tentang pemanfaatan AIS di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya sebagai media pembelajaran berbasis web dan kebermanfaatannya tersebut secara lebih dalam sebagai media komunikasi antara civitas akademika dengan pihak user dimanapun dan kapanpun. Kecenderungan penelitian ini bersifat subjektif hanya terbatas pada mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga penarikan kesimpulan secara generalisasi belum dapat dilakukan. Variabel pertanyaan belum sepenuhnya menjadi titik pengambilan kesimpulan sebatas pengujian belaka.

3. Rekomendasi

Mahasiswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan sumber belajar berbasis AIS sehingga memiliki kesiapan mengikuti pembelajaran *online*. Kemampuan dasar AIS mahasiswa baru perlu distandarisasi dan dievaluasi per tahun. Mata kuliah berkaitan dengan peningkatan kemampuan AIS di setiap jurusan harus dipertahankan. Bagi para dosen sebaiknya menggunakan fasilitas *e-learning* sebagai pilihan komunikasi pembelajaran dan terus dikembangkan ke mode *advance*. Pelatihan kemampuan dosen dalam memanfaatkan AIS khususnya mengelola *e-learning* perlu dilakukan secara berkala.

Referensi

_____, (2003), *Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Internet; Studi Survei Kesiapan Dosen dalam Mengadopsi Inovasi e-learning*, Jakarta: Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia.

_____, (2003). *Model Inovasi e-Learning dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Teknodik Edisi 12.

Arends, Richard. I. (1997), *Classroom Instruction and Management*, McGraw Hill Companies, New York.

Balitbang Depdiknas. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Depdiknas

Cisco, (2001). *e-Learning: Combines Communication, Education, Information, and Training*. <http://www.cisco.com/warp/public/10/wwtraining/elearning>.

Cuban, L. (1996). *Techno-reformers and classroom teachers*, *Educational Week on the Web*. <http://www.edweek.org/ew/vol-16/o6cuban> (Nopember 2000).

Davis et al dalam Made Suarta. Model Struktural Hubungan Kompetensi dan Pemanfaatan TIK oleh Guru. *Jurnal Politeknik Negeri Bali*. Maret 2007

Hari Wibawanto. 2007. TIK : *Konsep dan Perkembangannya*. Disampaikan pada Seminar "Tantangan dan Peluang Pembelajaran TI&K di Sekolah di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan," Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 10 Februari 2007

Hartanto, A.A. dan Purbo, O.W. (2002), *Teknologi e-Learning Berbasis PHP dan MySQL*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Heinich, R., et. al. (1996). *Instructional Media and Technologies for Learning*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs

Jatmiko, R. (1997), *Enhancing Learning Experiences through the Use of Internet*. Paper presented at the International Symposium on Distance Education and Open Learning organized by MONE Indonesia, IDLN, SEAMOLEC, ICDE, UNDP and UNESCO, Tuban, Bali, Indonesia, 17-20 November 1997.

Jogiyanto. 2007. *Sistem Analisis Perilaku*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Kamarga, Hanny. (2002). *Belajar Sejarah melalui e-learning; Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*. Jakarta: Inti Media.

Koran, Jaya Kumar C. (2002), *Aplikasi E-Learning dalam Pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Malaysia*. (8 November 2002).

Lawanto, Oemardi. (2000). *Pembelajaran Berbasis Web sebagai Metoda Komplemen Kegiatan pendidikan dan Pelatihan*. Makalah Video Conference; Bandung-Suarabaya: Depdiknas.

Mason Robin. 1994 *Using Communications Media in Open and Fleksible Learning*. London: Kogan PageLtd.

Moh Uzer Usman.2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosda Karya

Muhammad Anas et al. 2006. Pemanfaatan TIK sebagai Media Pembelajaran di

Munir. 2006. Penggunaan Learning Management System (Lms) Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia. Cakrawala Pendidikan, Februari 2010, Th. XXIX, No. 1

Muslim (2007) ; *Mutu Pendidikan Kejuruan* ; [www;/Http: tutomu](http://www.tutomu.com). Files. Wordpress.com/2007, diakses 20 –juli -2010

Natalia Tangke. 2004. Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (Tabk) Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Ri Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 6, No. 1, Mei 2004: 10- 28

Purbo, Onno W. (2001) *Masyarakat Pengguna Internet di Indonesia*. Available, <http://www.geocities.com/inrecent/project.html>. (4 November 2002). Pavlik, John V. (1996). *New Media Technology. Cultur and Commercial Perspectives*. Singapore: Allyn and Bacon.

Purbo, Onno W. dan Antonius AH. (2002). *Teknologi e-Learning Berbasis PHP dan MySQL: Merencanakan dan Mengimplementasikan Sistem e-Learning*. Jakarta: Gramedia.

Raka Joni, 1985. *Wawasan Kependidikan Guru*. Jakarta Depdikbud Robert A. Ellis (2011) Managing quality improvement of eLearning in a large, campus-based university. Quality Assurance in Education Vol. 15 No. 1, 2007 pp. 9-23

Robinson, ET. (2001). *Knowlarge as Commodity: How do e-commerce a e-learning Relate*. Available, <http://www.elearningmag.co>

Roll Reider (1997) *SEAMOLEC_IDLN Regional Symposium on Future Vision: Distance Education and Open Learnin*. Bali Pustekom.

Romiszowski, Alexander J. and Robin Mason. (1996) *Computer Mediated Communication in Handbook of Research for Educational Communications Technology*. New York: AECT, Macmillan Library Reference USA.

Rosenberg, Marc J. (2001), *e-Learning; Strategies for Delivering Knowledge in the Digital*. New York: McGraw Hill.

Sidi, Indra Djati, Menuju Masyarakat Belajar (Menggagas Paradigma Baru Pendidikan), Paramadina, Jakarta, 2001

Soekartawi (2002b), *e-Learning: Konsep dan Aplikasinya. Bahan-Ceramah/Makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Balitbang Depdiknas, Jakarta, 18 Desember 2002.*

Soekartawi (2002c), *The Role of Regional Organization for Mass Education. Invited paper presented at the International Conference on Lifelong Learning organized by Asian European Institute, Kuala Lumpur, 13-15 May 2002.*

Soekartawi (2003). *Prinsip Dasar e-Learning: Teori dan Aplikasinya di Indosnesia*. Jurnal Teknodik Edisi 12.

Sumber : <http://semangatbelajar.com/kompetensi-siswa-sebagai-indikatorkeberhasilan-teori-belajar-perilaku/> diakses tanggal 13 Agustus 2010

Supratman Zahir. 2010. Kompetensi Siswa sebagai Indikator Keberhasilan Belajar

Sutrisno. 2007. E-Learning dan KTSP. Sumber : <http://www.e-dukasi.net/artikel/index.php?id=60> diakses 23 Maret 2008

Tung, Khoe Yao. (2000). *Pendidikan dan Riset di Internet*. Jakarta: Dinastindo.

Wahyu Ismuwardani. 2007. Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Oleh Guru-Guru SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2006. Skripsi FIP Unnes

www.moe.edu.my/smartshool/newweb/Seminar/kkerja8.htm.

PERAN HUMAN CAPITAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

Irmawaty
Universitas Terbuka
irmawaty@ut.ac.id

***Abstrak** : Tulisan ini berusaha memberikan tinjauan literatur mengenai peran human capital dalam peningkatan kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan berbasis human capital merupakan hal menarik yang perlu dikembangkan oleh perusahaan. Human capital adalah salah satu komponen utama dari intellectual capital (intangible asset) yang dimiliki perusahaan. Selama ini, penilaian terhadap kinerja perusahaan lebih banyak menggunakan sumber daya yang bersifat fisik (tangible asset). Menurut Mayo (2000:115), mengukur kinerja perusahaan dari perspektif keuangan sangatlah akurat, tetapi sebenarnya, dasar penggerak nilai dari keuangan tersebut adalah sumber daya manusia (human capital) dengan segala pengetahuan, ide, dan inovasi yang dimilikinya. Selain itu, human capital juga merupakan inti dari suatu perusahaan. Pengukuran human capital bukan dimaksudkan untuk menentukan nilai instrinsik SDM, melainkan dampak perilaku SDM atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan perusahaan terhadap seberapa besar kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja Dalam lingkungan bisnis yang semakin maju. Wealtherly (2003:92) mengatakan terdapat dua kekuatan utama mengapa pengukuran human capital menjadi pusat perhatian utama di komunitas bisnis. Pertama, kompetisi dalam lingkungan bisnis adalah akibat dari globalisasi perdagangan dan perkembangan beberapa sektor kunci seperti telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Kedua, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat terutama setelah kemunculan internet. Kedua perkembangan ini secara dramatis telah merubah struktur bisnis dan mendorong intangibles asset memegang peran yang kian penting bagi perusahaan.*

Keyword : Human Capital, Kinerja, Kinerja organisasi, Intangible Asset, SDM

A. PENDAHULUAN

Penilaian kinerja perusahaan berbasis *human capital* merupakan hal menarik yang perlu dikembangkan oleh perusahaan. *Human capital* adalah salah satu komponen utama dari *intellectual capital (intangible asset)* yang dimiliki perusahaan. Selama ini, penilaian terhadap kinerja perusahaan lebih banyak menggunakan sumber daya yang bersifat fisik (*tangible asset*). Menurut Mayo (2000:115), mengukur kinerja perusahaan dari perspektif keuangan sangatlah akurat, tetapi sebenarnya, dasar penggerak nilai dari keuangan tersebut adalah sumber daya

manusia (*human capital*) dengan segala pengetahuan, ide, dan inovasi yang dimilikinya. Selain itu, *human capital* juga merupakan inti dari suatu perusahaan.

Penyebutan *human capital* untuk sumber daya manusia (SDM) sepertinya belum banyak dianut oleh pelaku bisnis, sementara peran SDM terhadap masa depan perusahaan sangat menentukan. SDM adalah *capital* yang dapat terus berkembang seiring dengan waktu dan dinamika lingkungan bisnis serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Keunggulan SDM dibandingkan faktor produksi lainnya dalam strategi persaingan suatu perusahaan antara lain: kemampuan inovasi dan *entrepreneurship*, kualitas yang unik, keahlian yang khusus, pelayanan yang berbeda dan kemampuan produktivitas yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. (Mathis, 2003: 76).

Organisasi tidak dapat menciptakan pengetahuan dengan sendirinya tanpa inisiatif dari individu yang terlibat dalam proses organisasi. Oleh karena itu, *human capital* sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi karena *human capital* merupakan penggabungan sumber daya-sumber daya *intangible* yang melekat dalam diri anggota organisasi. “*Human*” *capital* dapat dikategorikan sebagai “personal” atribut (termasuk di dalamnya adalah kecerdasan dan skill atau keahlian). Beberapa faktor personal yang sering diteliti yaitu, kestabilan emosi, keterbukaan, pengalaman serta kesepahaman. Munchinsky (dalam Carson, 2004), menyebutkan beberapa penelitian tentang *human capital* dikaitkan dengan faktor personal dalam perilaku organisasi. Beberapa hasil penelitian itu menyebutkan bahwa perilaku organisasi berkaitan dengan *human capital*.

Menurut Mayo (2000:120), sumber daya manusia atau *human capital* memiliki lima komponen yaitu *individual capability*, *individual motivation*, *leadership*, *the organizational climate*, dan *workgroup effectiveness*. Setiap komponen memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan *human capital* perusahaan yang akan menentukan nilai sebuah perusahaan. Oleh karena itu, mengingat peran SDM yang begitu besar dalam perusahaan, maka, manajemen perusahaan harus lebih proaktif menjadikan SDM-nya sebagai *human capital* yang perlu diberi perhatian dan pengembangan secara terus menerus sesuai dengan kedinamisan lingkungan bisnis.

B. METODOLOGI

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kutha(2010:53) dalam Gindarsyah (2010:30) menjelaskan, metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya

Sumber Data

Ini merupakan studi literatur. Adapun data yang diperoleh adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan human capital, jurnal dan internet untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Human Capital

Pengukuran *human capital* bukan dimaksudkan untuk menentukan nilai instrinsik SDM, melainkan dampak perilaku SDM atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan perusahaan terhadap seberapa besar kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja. Di samping itu, pengukuran SDM merupakan suatu manajemen kinerja yang sangat penting dan alat untuk melakukan perbaikan. Menurut Fitz-Enz (2000:267), bila tidak melakukan pengukuran SDM, maka, perusahaan tersebut tidak akan dapat:

1. Mengkomunikasikan harapan kinerja yang spesifik,
2. Mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi,
3. Mengidentifikasi *gap* kinerja yang harus dianalisis dan dieliminasi,
4. Memberikan umpan balik dengan membandingkan kinerja terhadap standar,
5. Mengetahui kinerja yang harus diberi *reward*,

6. Mendukung keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya, proyeksi, dan jadwal.

Dalam lingkungan bisnis yang semakin maju, maka, perusahaan semakin banyak tergantung pada *intangible asset*. Adanya pergeseran ini tercermin dalam studi Brooking Institution di Amerika Serikat yang meneliti 500 perusahaan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (Wealthly, 2003:71). Pada 1982, *tangible asset* merepresentasikan 62% nilai pasar perusahaan, turun menjadi 38% pada 1992. Studi terakhir yang dilakukan pada 2002 menunjukkan angka penurunan yang semakin besar menjadi 15%, sementara 85% merupakan *intangible asset* yang menentukan nilai pasar perusahaan.

Wealthly (2003:92) mengatakan terdapat dua kekuatan utama mengapa pengukuran *human capital* menjadi pusat perhatian utama di komunitas bisnis. Pertama, kompetisi dalam lingkungan bisnis adalah akibat dari globalisasi perdagangan dan perkembangan beberapa sektor kunci seperti telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Kedua, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat terutama setelah kemunculan internet. Kedua perkembangan ini secara dramatis telah merubah struktur bisnis dan mendorong *intangibles asset* memegang peran yang kian penting bagi perusahaan.

Kinerja Karyawan

Organisasi yang membangun kemampuan bersaing melalui sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif maka sistem penilaian terhadap kinerja karyawan dalam organisasi harus memiliki daya pembeda untuk menentukan karyawan berprestasi, yang pantas menerima insentif dan yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja haruslah dipandang sebagai kegiatan strategis organisasi untuk mendorong kinerja, pengembangan, melindungi hak-hak (berupa kompensasi), dan pengukuran terhadap kewajiban serta tanggung jawab karyawan dalam menunaikan tugas-tugasnya. Dari hasil penilaian terhadap kinerja ini pihak pimpinan organisasi akan mengetahui kinerja karyawan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib memiliki manajemen kinerja sebagai bagian sentral untuk keunggulan bersaing melalui peran sumber daya manusia dan menjalankan strategi bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Penilaian kinerja yang efektif berfokus pada hasil kerja yang terkait secara langsung dengan misi dan tujuan organisasi sehingga nantinya dapat menunjang implementasi strategi bisnis. Hal ini terwujud apabila karyawan memahami dimensi-dimensi yang dievaluasi, aspek-aspek yang dinilai dari jabatannya, dan

mereka memandang penilaian telah dilakukan secara terbuka dan valid. Dalam hal ini diperlukan adanya interaksi antara penilai dengan individu yang dinilai dalam proses penentuan dimensi kegiatan, standar penilaian, dan metode penilaian memegang peranan yang sangat penting.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja diantaranya, kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, imbalan atau insentif, hubungan mereka dengan organisasi dan masih banyak lagi faktor lainnya. Organisasi atau perusahaan,kinerjanya lebih tergantung pada kinerja dari individu tenaga kerja. Menurut Mangkunegara (2001) “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Berdasarkan pengertian mengenai kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja yang bisa ditunjukkan oleh seorang karyawan baik itu dalam bentuk kuantitas ataupun kualitas dari pekerjaannya pada perusahaan. *Human capital* sangat penting bagi perusahaan karena dapat mengetahui sejauh mana kemajuan dan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawannya, juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan perusahaan dimasa yang akan datang.

Hubungan *Human Capital* dengan Kinerja Perusahaan

Menurut Totanan (2004:245) sebuah perusahaan akan menghasilkan kinerja yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda, oleh karena itu, SDM yang berbeda dalam mengelola aset perusahaan yang sama akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda pula. Dapat disimpulkan bahwa *tangible* aset yang dimiliki perusahaan bersifat pasif tanpa sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menciptakan nilai bagi suatu perusahaan. Beberapa penelitian terakhir telah membuktikan keterkaitan antara kinerja perusahaan dengan proses pengelolaan SDM di perusahaan.

Studi-studi empiris 1980-an memberikan hasil yang *mixed* terhadap hubungan antara *human capital* dengan kinerja perusahaan. Nkomo (1986, 1987:180) menguji hubungan antara perencanaan SDM dengan kinerja bisnis, dan menemukan tidak ada korelasi di antaranya. Hasil ini juga didukung oleh studi yang didasarkan atas survei (Delaney, Lewin and Ichniowski 1988, 1989:50) yang menyimpulkan tidak ada hubungan antara praktek SDM dengan kinerja keuangan perusahaan. **Sementara studi-studi empiris 1990-an lebih** banyak

membuktikan hubungan yang positif dan signifikan antara *human capital* dengan kinerja perusahaan

Studi Guest (2003:28), melakukan penelitian terhadap hubungan antara *human capital* dan kinerja perusahaan pada 366 perusahaan di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan SDM lebih banyak dikaitkan dengan tingkat *turnover*, maka, tenaga kerja yang rendah mampu menghasilkan profit per tenaga kerja yang lebih tinggi, tapi produktivitasnya rendah. Estimasi terhadap kinerja, memperlihatkan hubungan yang sangat kuat antara SDM, kinerja produktivitas dan keuangan. Li dan Wu (2004:95) juga membuktikan hubungan positif dan signifikan antara *intellectual capital* dengan kinerja perusahaan

Secara individual, riset tentang SDM dan dikaitkan dengan kinerja perusahaan telah dirintis sejak awal 1990-an. Bartel (1994:173) menguji hubungan antara program pelatihan yang diadopsi dan pertumbuhan produktivitas, sementara hubungan antara program pelatihan dan kinerja keuangan didukung oleh Gerhart dan Milkovich (1992:384). Weitzman dan Kruse (1990:419) mengidentifikasi hubungan antara skema kompensasi insentif dan produktivitas, dan Terpstra dan Rozell (1993:62) menguji proses rekrutmen, seleksi uji validasi dan penggunaan prosedur seleksi formal, juga menemukan hubungan dengan profit perusahaan. Pada umumnya, penyeleksian dalam penyusunan staf mempunyai hubungan positif dengan kinerja perusahaan (Becker dan Huselid 1992:20; Schmidt, Hunter, McKenzie dan Muldrow, 1979:40). Evaluasi kinerja dan keterkaitan dengan skema kompensasi telah diidentifikasi sebagai penyumbang kenaikan dalam profitabilitas perusahaan (Borman, 1991:294).

Studi empiris yang terkait dengan hubungan *intellectual capital* dalam bentuk sumber daya pengetahuan (*knowledge*) dengan kinerja perusahaan antara lain dilakukan oleh: Nonaka dan Takeuchi (1995:230), dan Zahra dan George (2002:23). Nonaka dan Takeuchi (1995:230) menyatakan bahwa hanya perusahaan yang dapat memproduksi pengetahuan baru secara berkelanjutan saja yang mampu mencapai posisi lebih baik untuk memiliki *competitive advantage*. Zahra dan George (2002:23) mengutarakan model rekonseptualisasi yang menghubungkan antara sumber pengetahuan, *absorptive capacity* dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keunggulan bersaing.

Keunggulan kompetitif akan dicapai apabila sumber pengetahuan individu yang menjadi dasar kekuatan dikelola dan dipelihara. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Morling dan Yakhlef (1999:89) bahwa yang akan menentukan kesuksesan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola aset pengetahuan. Perusahaan tidak dapat menciptakan pengetahuan tanpa tindakan dan interaksi para karyawannya. Di sinilah pentingnya perilaku para karyawan dalam melakukan *knowledge sharing*. Bollinger dan Smith (2001:146) berpendapat bahwa perilaku manusia merupakan kunci kesuksesan atau kegagalan sebuah strategi manajemen pengetahuan. Bagaimanapun, pengetahuan terletak pada individu dan diciptakan oleh individu (Nonaka dan Takeuchi, 1995:240). Pengetahuan akan memberi peran terhadap *absorptive capacity* apabila terjadi aktivitas pertukaran pengetahuan di antara para karyawannya.

Hubungan antara pelatihan dan pengembangan SDM dengan kinerja perusahaan antara lain dilakukan oleh: Black dan Lynch, 1996; Garcia, 2005; dan Khatri, 2000. **Pengetahuan dan skill** karyawan dengan melalui aktivitas pelatihan sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Preffer (1994:349) dan Upton (1995:78) menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar ditentukan oleh *human capital*, bukan *physical capital*, sehingga perusahaan dianjurkan untuk investasi dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pengetahuan, keahlian dan kemampuan karyawan yang lebih baik dibanding dengan pesaing mereka. Oleh karena itu, pengeluaran perusahaan dalam bidang pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keahlian dan pengetahuan pekerja, agar mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Barney, 1991:24) dan memperbaiki kinerja perusahaan (Kozlowski et al., 2000:91; Salas dan Cannon-Bowers, 2001:239).

Pengelolaan SDM

Mengelola SDM perusahaan pada hakekatnya adalah kegiatan perusahaan dalam mengelola para pegawainya (SDM) mulai dari saat direkrut sampai pegawai memasuki masa pensiun dari perusahaan. Kegiatan ini tentu saja akan berjalan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk itu hal yang paling utama dari kegiatan ini adalah membuat pola/rancangan pengelolaan SDM, yaitu dimana seluruh aspek/bidang SDM harus dibuat terpadu atau setiap aspek merupakan komponen yang tak terpisahkan. Pola/rancangan setiap perusahaan tentu saja berbeda-beda tergantung dari tujuan atau Visi misi Perusahaan.

Selanjutnya pola/rancangan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dan dapat diterima oleh stakeholder.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka, diperlukan pengelolaan SDM yang lebih efisien dan profesional. Di dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis baik secara internal maupun eksternal, manajer SDM perusahaan dituntut untuk dapat mengembangkan *human capital*. Terdapat enam elemen penting dalam pengelolaan SDM yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja bisnis dan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan secara menyeluruh.

1. Rekrutmen dan Penempatan

Rekrutmen dan penempatan karyawan adalah proses fundamental yang sangat penting bagi perusahaan. Langkah awal adalah bagaimana perusahaan melakukan rekrutmen SDM dan penempatan yang tepat pada bidangnya untuk mendapatkan orang-orang yang dapat membawa perusahaan mencapai tujuan secara optimal. Rekrutmen SDM adalah proses identifikasi dan penarikan karyawan yang potensial dilakukan perusahaan dari waktu ke waktu dalam kegiatan operasional. Program rekrutmen dilakukan untuk mencari orang-orang yang tepat dan memiliki talenta yang dianggap mampu mengisi posisi lowong dalam berbagai level organisasi.

Keberhasilan perusahaan di masa depan sangat tergantung pada rekrutmen SDM. Tidak mudah untuk memilih SDM yang tepat pada tempat yang tepat. Oleh karena itu, baik secara langsung maupun tidak perlu dilakukan proses pengujian dan penyaringan secara bertahap. Proses penyeleksian SDM membutuhkan alat dan metode yang tepat agar dapat mengestimasi kualitas calon karyawan. Oleh karena itu, pengujian yang akan dilakukan sudah diuji validitas dan realibilitasnya.

2. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan SDM penting dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang berubah dengan cepat. Menurut Wexley dan Yukl (1976:282) *“training and development are terms referring to planned efforts designed facilitate the acquisition of relevant skills, knowledge, and attitudes by organizational*

members". Selanjutnya Wexley dan Yukl (1976:375) menjelaskan pula "*development focusses more on improving the decision making and human relation skills of middle and upper level management, while training involves lower level employees and the presentation of more factual and narrow subject matter*".

Pendapat Wexley dan Yukl tersebut memperjelas penggunaan istilah pelatihan dan pengembangan. Mereka berpendapat bahwa pelatihan dan pengembangan adalah istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha terencana untuk mencapai penguasaan atau *skill*, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Pengembangan difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan tingkat menengah, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana).

Pengertian pelatihan dan pengembangan pegawai, dikemukakan oleh Adrew E. Sikula (1981 :227) "*training is short-terms educational procces utilizing a systematic and organized procedure by which nonmanagerial personnel learn technical knowlegde and skills for a definite purpose. Development, in reference to staffing and personnel matters, is a long-terms educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personnel learn conceptual and theoretical knowledge for general purpose*".

Istilah pelatihan ditujukan pada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedang pengembangan ditujukan pada pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas *human relation*.

Mariot Tua Efendi H (2002:149) pelatihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Selanjutnya, Mariot Tua menambahkan pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dilihat dari tujuannya, kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Untuk mengubah perilaku kerja, maka, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada

saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain.

Sjafri Mangkuprawira (2004:83) pelatihan bagi karyawan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan standar. Sementara, pengembangan memiliki ruang lingkup lebih luas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pengetahuan untuk kepentingan di masa depan. Pengembangan sering dikategorikan secara eksplisit dalam pengembangan manajemen, organisasi, dan pengembangan individu karyawan. Penekanan lebih pokok adalah pada pengembangan manajemen. Dengan kata lain, fokusnya tidak pada pekerjaan kini dan mendatang, tetapi pada pemenuhan kebutuhan organisasi jangka panjang.

3. Manajemen Kerja

Biasanya, perusahaan yang mampu menghasilkan kinerja yang tinggi memiliki SDM yang dapat diandalkan dengan motivasi kerja yang kuat serta memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian tujuan dan misi perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, di semua lini, Manajemen kerja SDM dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal. Tujuan yang diharapkan perusahaan antara lain untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan keputusan promosi ataupun kompensasi, dan evaluasi terhadap kinerja karyawan, baik di tingkat bawah maupun manajerial. Oleh karena itu, diperlukan keefektifan para manajer dalam menilai, mengatur, mengembangkan dan menghargai kinerja karyawan, serta memberi umpan balik dan *coaching* yang berkesinambungan dalam menilai kinerja dan mengelola konsekuensi dari kinerja buruk.

Bagi perusahaan, keberadaan manajemen kerja memungkinkan terciptanya keterkaitan antara tujuan perusahaan dan tujuan pekerjaan karyawan. Selain itu, manajemen kerja memberikan argumentasi hukum yang relatif kuat untuk setiap keputusan yang menyangkut SDM .

Secara umum, implementasi manajemen kinerja yang efektif mampu:

Mengkoordinasikan unit-unit kerja yang ada dalam organisasi,
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai hambatan dan permasalahan kinerja,
Menjadi landasan pengambilan keputusan di bidang SDM,
Menjadi alat untuk mengefektifkan manajemen SDM,
Menumbuhkembangkan kerjasama antara atasan dengan bawahan, Menjadi wahana penyampaian umpan balik secara reguler kepada bawahan,
Meminimalkan kesalahan dan meniadakan kesalahan berulang.

4. Pengembangan Karir

Karir adalah serangkaian posisi jabatan yang dimiliki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Pengembangan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kemampuan manajerial seorang pekerja. Terdapat dua mekanisme untuk memahami pengembangan karir dalam suatu perusahaan:

a. Carrer Management

Merupakan suatu mekanisme untuk mewujudkan suatu kebutuhan SDM masa kini dan masa datang. Prosesnya mengarah kepada bagaimana perusahaan mendesain dan melaksanakan program pengembangan karir. Proses ini merupakan usaha formal yang terorganisir dan terencana untuk mencapai keseimbangan antara keinginan karir individu dengan persyaratan tenaga kerja perusahaan

b. Carrer Planning

Perencanaan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya, hal ini merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan sadar akan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya terhadap berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi.

5. Kompensasi dan Penghargaan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, maka, perusahaan dituntut untuk memberikan kompensasi dan penghargaan yang layak

kepada karyawannya. Sasaran yang diharapkan adalah mendorong daya saing perusahaan, menyelaraskan sasaran kerja individu atau kelompok dengan sasaran perusahaan, dan memperkuat perilaku positif terhadap para pelanggan. Bagi perusahaan, keterlibatan karyawan dalam desain program kompensasi dan penghargaan, penjelasan terhadap cara kerja sistem kompensasi dan penghargaan yang diberikan perusahaan, penggunaan kombinasi imbalan finansial dan non-finansial serta komponen kompensasi yang membedakan antara gaji pokok, insentif dengan gaji variabel merupakan hal yang positif untuk meningkatkan partisipasi karyawannya.

Perencanaan kompensasi perusahaan merupakan strategi yang terkait dengan suatu perusahaan dalam memposisikan tingkat kompensasi yang diberikan dibandingkan dengan pesaingnya. Selain itu, kompensasi juga menggambarkan bagaimana perusahaan memberikan *reward* kepada karyawan. Dengan perencanaan kompensasi yang baik, diharapkan, karyawan akan dapat dipertahankan terutama terhadap karyawan yang memiliki kinerja baik.

6. Budaya dan Lingkungan Kerja

Manajemen perusahaan dituntut untuk memperbaiki budaya ataupun lingkungan kerja di dalam perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam mengelola perubahan. Kotter dan Heskett (1997:678) menempatkan budaya organisasi sebagai faktor utama yang mengondisikan faktor-faktor lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi memiliki keterkaitan yang erat terhadap keberhasilan suatu organisasi. Harvey dan Bowin (1996:508) dalam bukunya mengungkapkan, semakin jelas terbukti bahwa hanya perusahaan-perusahaan dengan budaya perusahaan efektif saja yang dapat menciptakan peningkatan produktivitas, meningkatkan rasa ikut memiliki dari karyawan, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan.

Lebih jauh Robbins (1998:801) memerinci fungsi budaya organisasi sebagai berikut: Pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi membayar suatu rasa identitas bagi

anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial.

Proses Human Capital

Pengertian Human Capital sendiri menekankan pada pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam perusahaan dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola dalam suatu proses, yang pada akhirnya menghasilkan *value creations* bagi para *stakeholders* seperti pemegang saham, konsumen, karyawan dan masyarakat.

Jac Fiz-enz sebagai salah satu pencetus ide mengenai Human Capital dalam bukunya *The ROI of Human Capital* memaparkan bahwa pegawai, sebagai bagian dari sumberdaya di dalam perusahaan, menyedot biaya hingga 40% dari biaya umum dan administrasi. Oleh karena itu perusahaan perlu mencermati *return of investment* dari proses pengelolaan kekayaan manusianya (*human assets*) sebagai suatu faktor *capital* yang sangat signifikan dalam proses produksi.

Di dalam perusahaan, suatu strategi *Human Capital*, harus mendukung visi dan misi perusahaan serta selaras dengan strategi usaha yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, strategi *Human Capital* yang baik, juga harus mempertimbangkan strategi dari fungsi-fungsi lain di dalam perusahaan. Keselarasan itu membuat kontribusi strategis *Human Capital* dirasakan dalam eksekusi semua strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan pun dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya yang berkesinambungan melalui kekayaan manusianya.

Strategi *Human Capital* bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan secara terus menerus melalui jasa atau produk yang selalu memenuhi kebutuhan pelanggan.

Untuk memastikan kekayaan manusia di dalam perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk atau jasa dimaksud, diperlukan proses pengelolaan atau *Human Capital Process*. Berdasarkan tulisan Dave Ulrich, Wayne Broadbank, Jac Fiz-enz serta penelitian

yang dilakukan oleh CIPD UK, ada 4 (empat) kategori proses dalam Human Capital process, yaitu :

1. *Acquisition Process*, merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan guna memastikan bahwa didalam pelaksanaan strategi usaha, perusahaan selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di dalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem Human Capital, terutama sistem perencanaan kekayaan manusia, sistem asesmen dan sistem suksesi.
2. *Development Process*, adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa semua kekayaan manusia (human assets) yang sudah berada di tempatnya, akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki setinggi-tingginya. Di dalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem *Human Capital*, terutama sistem pembelajaran dan pengembangan serta sistem pengembangan kepemimpinan.
3. *Engagement Process* adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa kekayaan manusianya, terutama mereka yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi, memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan. Didalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem *Human Capital*, terutama sistem hubungan industrial dan hubungan kepegawaian.
4. *Retention Process* adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh penghargaan yang diberikan perusahaan, dapat mengelola kompetensi spesifik yang dibutuhkan perusahaan dan mempertahankan kinerja setiap individu didalam perusahaan. Didalam proses ini, didisain dan diimplementasikan beberapa sistem *Human Capital*, seperti sistem imbal jasa dan sistem manajemen kinerja.

D. PENUTUP

Organisasi tidak dapat menciptakan pengetahuan dengan sendirinya tanpa inisiatif dari individu yang terlibat dalam proses organisasi. Oleh karena itu, human capital sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi karena human capital merupakan penggabungan sumber daya-sumber daya *intangibile* yang melekat dalam diri anggota organisasi. Pengukuran *human capital* bukan dimaksudkan untuk menentukan nilai instrinsik SDM, melainkan dampak perilaku SDM atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan

untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan Organisasi terhadap seberapa besar kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja.

Sasaran *Human Capital Process* yang dijalankan dan sistem manajemen yang didesain dan diimplementasikan adalah kekayaan manusia yang berkinerja ekselen (*high performing human assets*). Untuk memastikan hal tersebut dicapai, maka fungsi *Human Capital* di perusahaan harus mendisain alat-alat pengukuran (*measurement tools*) bagi setiap sistem-sistem manajemen yang diimplementasikan. Dengan demikian perusahaan dapat memastikan bahwa investasinya pada spesifik pengetahuan, keahlian dan perilaku, pada akhirnya akan dapat menambah nilai tambah pada kesuksesan kinerja perusahaan

E. DAFTAR PUSTAKA

Barney, J B 1991 Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage *Journal of management*. pp. 99-20

Bollinger, A.S., and Smith, R.D., 2001. "Managing Organizational Knowledge as a Strategic Asset" dalam *Journal of Knowledge Management*, Vol. 5, No. 1.

Delaney, Lewin, and Ichniowski, C. 1989. *HR policies and practices in American firms. US Department of Labor Management Relations and Co-operative programs, BLMR 173* . Washington DC: US Government Printing Office.

Endri, *Peran Human Capital Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*, Jurnal Administrasi Bisnis (2010), Vol.6, No.2: hal. 179–190,

Fitz-enz, J, 2000. *The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value Added of Employee Performance, AMA-COM*. New York: American Management Association,

Guest, D.E., Michie, J, Conway, N & Sheehan, M. 2003. "Human resource management and corporate performance in the UK" dalam *British Journal of Industrial Relations*, 41.

Mayo, A. 2000. "The Role of Employee Development in The Growth of Intellectual Capital" dalam *Personal Review*, Vol. 29, No. 4.

Mangkuprawira, Sjafri.2004.*Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* .Jakarta:Ghalia Indonesia

Mangkunegara, Anwar Parabu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosda Karya: Bandung

Mathis, Robert L. dan John H. Jakson. 2003. *Human Resource Management*, South-Western: Thomson Learning.

Morling, M. S., and Yakhlef, A., 1999. *The Intellectual Capital: Managing by Measure*. New York: City University of New York, .

Nonaka, I., and Takeuchi, H., 1995. *The Knowledge-Creating Company*, Oxford University Press, New York.

Nkomo, S.M. 1987. "Human resource planning and organisational performance: An exploratory analysis" dalam *Strategic Management Journal*, 8.

Robbins, S. P., 1998. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications, 6th Edition*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall International.

Preffer, Jeifry. 1995. Producing Sustained Competitive Advaittage Through The Effective Management of People, *Accademy Management Excecutive*, vol9. No. I . 55-72.

Terpstra, D.E. & Rozell, E.J. 1993. "The relationship of staffing practices to organisational level measures of performance" dalam *Personnel Psychology*, 46.

Weitzman, M.L. & Kruse, D.L. 1990. "Profit sharing and productivity. In A.S" dalam Blinder (Ed.) *Paying for productivity*: 95-141. Washington: Brookings Institution.

Weatherly, L.A. 2003. "The Value of People: The Challenges and Opportunities of Human Capital Measurement and Reporting," dalam *Research Quarterly*. Society for Human Resource Management.

Zahra, S.A., and George, G., 2002. "Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension" dalam *Academy of Management Review*, Vol. 27.

RPSEP-51

PERANAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KOMPETENSI UNTUK MEREKLEKSI PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK DI INDONESIA

Sri Endah Setiarini
SMA Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah
rinnie.ratno@gmail.com

Abstrak

Manajemen sumber daya manusia merancang dan membuat organisasi sehingga dapat bertahan dan berhasil mencapai tujuan. Bila sumber daya manusia diabaikan maka organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi. Dampak organisasi secara luas pada sumber daya manusia berpengaruh terhadap proses dan sifat dasar organisasi, termasuk keputusan strategis dari pimpinan sumber daya manusia yang berpengaruh pada organisasi masa kini.

Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia hendaknya dapat meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia yang meliputi pembangunan social, ekonomi dan politik, sehingga pengembangan MSDM harus ditingkatkan secara menyeluruh dari pendekatan aspek multidimensional yaitu pendekatan politik, ekonomi, hukum, sosiokultural, administrative dan teknologikal.

Salah satu bentuk pengembangan MSDM adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui beberapa aspek karakteristik yaitu : knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), motif, traits (watak), dan self concept (nilai sikap).

Kompetensi dibutuhkan pada setiap level manajemen, yaitu level eksekutif, manajer/pimpinan dan karyawan. Pada tingkat pimpinan/eksekutif diperlukan beberapa kompetensi yaitu : 1). Strategic thinking 2). Change leadership 3). Relationship management. Dalam organisasi public kompetensi lebih diorientasikan pada aspek entrepreneurship, sensitivitas dan responsivitas, mempunyai wawasan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang relevan dengan visi, misi dan budaya kerja organisasi

Sebagai bagian dari manajemen karakteristik kompetensi dan keterkaitan penerapannya dengan seleksi, perencanaan, pengembangan, sistem penghargaan dan manajemen kinerja sangat membantu keberhasilan organisasi agar tetap survive dan berkembang

Kata kunci : Manajemen, Sumber Daya Manusia, Kompetensi

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi sumber daya manusia merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan system rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi.

Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan.

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya (resources) yaitu sumber daya alam atau Natural Resources maupun sumber daya manusia atau human resources. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Namun untuk mendukung suatu pembangunan, SDM adalah yang terpenting, karena jika sebuah Negara memiliki suatu SDM yang terampil dan berkualitas maka ia kan mampu mengelola SDA yang jumlahnya terbatas. Untuk itu dibutuhkan manajemen yang bagus untuk mengatur sumber daya tersebut. Manajemen SDM berbeda dengan SDA, manajemen SDM sangat ditentukan oleh sifat sumber-sumber daya manusia itu sendiri yang selalu berkembang baik jumlahnya maupun mutunya, sedangkan sumber daya alam jumlah absolutnya tidak berkembang. Manajemen SDM harus dapat mencari keseimbangan antara jumlah dan mutu sumber daya manusia itu dengan kebutuhan suatu Negara dalam pembangunan nasional. Ada 2 aspek SDM yaitu yang pertama, Negara-negara dimana kekurangan SDM akibat pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, sedangkan tingkat dan kemajuan ekonomi cukup tinggi dan pesat. Yang kedua yakni Negara-

negara dimana masih terdapat kelebihan sumber-sumber daya manusia dibandingkan dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional.

Untuk Negara-negara berkembang dimana terdapat “Labour Surplus Economy” artinya modal pembangunan tak dapat dituangkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembangunan tersebut akan terlalu mahal dan juga akan mengalami hambatan apabila sesuatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain itu jumlah sdm yang besar hendaknya dijadikan sebagai keunggulan karena jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha disegala bidang.

Antara dinamika jumlah penduduk dan proses pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan timbal balik yang erat. Hubungan ini dicerminkan dalam hal bahwa penduduk merupakan faktor dinamika pokok pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang aktif terhadap dinamika besarnya penduduk di pihak yang lain, sehingga pada saat tertentu akan terjadi suatu keseimbangan rasional antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan menerapkan pengembangan sdm dari berbagai bidang yaitu social, ekonomi dan politik di Indonesia yang dimasukkan dalam pendekatan multidimensional. Sumber Daya Manusia yang berkualitas membutuhkan suatu kompetensi yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan dirinya menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang semakin tajam.

B. Permasalahan

1. Apa sajakah peranan manajemen SDM dalam rangka meningkatkan pembangunan social, ekonomi dan politik di Indonesia?
2. Bagaimanakah kompetensi bisa berperan untuk mengembangkan manajemen SDM di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran manajemen SDM dalam rangka meningkatkan pembangunan social, ekonomi dan politik di Indonesia
2. Karakteristik kompetensi dalam pengembangan manajemen SDM di Indonesia

D. Metodologi Penelitian

1. Metode telaah pustaka melalui literature
2. Metode penelitian deskriptif yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, keadaan, variable, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Manajemen sumber daya manusia (human resources management) berbeda dengan manajemen personalia (personnel management). Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi yang harus dikelola dengan baik, jadi MSDM sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen personalia menganggap karyawan sebagai salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif, atau manajemen personalia lebih menekankan pada system dan prosedur.

Human resources management is the recognition of the importance of an organization's workforce as vital human resources contributing to the goals of the organization, and the utilization of several functions and activities to ensure that they are used effectively and fairly for the benefit of the individual the organization, and society (Schuler, Dowling, Smart dan Huber, 1992:16)

Human resources management is the part of the organization that is concerned with the people or human resources aspect of management position, including recruiting, screening, training, rewarding, and appraising (De Cenzo and Robbins, 1996:8)

Human resources management is a system that consists of many interdependent activities. This activities do not occur in isolation virtually every one affects another human resources activity (Werther and Davis, 1996:18)

Human resources management is series of integrated decisions that from the employment relationship, their quality directly contributes to the ability of the organization and the employees to achieve their objectives (Mondy, Noe and Premeaux, 1999:4)

Human resource management encompasses those activities designed in to provide for and coordinate the human resources of organization(Lyoyd L. Byars & Leslie Rue, 2000:3)

Personal/human resources management is the set of activities in all organizations intended to influence the effectiveness of human resources and organizations. (William F. Glueck, 1982:11)

Human resources management is clearly toward to the adoption of human resources approach, through with organization benefit in two significant ways : an increase in organizational effectiveness and the satisfaction of each employee's needs. The human resources approach is relatively new management of people (Michael R.Carrel, Norbert F. Elbert & Robert D. Hatfield, 1995 :8)

Manajemen SDM didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu : planning, organizing, leading dan controlling dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penetapan yang meliputi promosi, demosi, transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.(Ramli, 2009)

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat (T.Hani Handoko,1996:6)

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi telah menunjukkan keberhasilan dengan memperlihatkan praktek pengelolaan SDM yang efektif melalui peningkatan keterampilan dan keahlian SDM.

Pengembangan SDM adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir dan pengembangan organisasi.

Amstrong (1997:507) : Pengembangan SDM berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi atas program-program tersebut.

McLagan dan Suhadolnik (Wilson, 1999:10) : Pengembangan SDM adalah pemanfaatan pelatihan dan pengembangan, pengembangan karir dan pengembangan organisasi, yang terintegrasi antara satu dengan yang lain, untuk meningkatkan efektivitas individual dan organisasi.

Mondy and Noe (1990:270) : Pengembangan SDM adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Hariris and DeSimone (1992:2) : Pengembangan SDM dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi

dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Stewart dan McGoldrick (1996:1) : Pengembangan SDM meliputi berbagai kegiatan dan proses yang diarahkan pada terjadinya dampak pembelajaran, baik bagi organisasi maupun bagi individu.

Megginson (1993:14) membuat pertanyaan sebagai awal pemikiran tentang pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut :

Perubahan (dalam hal keahlian dan kemampuan) apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja/prestasi kerja individu tertentu?

Kekurangan apa yang secara jelas teridentifikasi dalam kaitannya dengan kinerja yang perlu segera ditangani?

Perubahan apa yang berkaitan dengan teknologi, proses produksi, dan kultur organisasi bagi para pegawai yang belajar sesuatu yang hal baru?

Kesempatan apa yang saat ini tersedia bagi para pegawai untuk mendapatkan keahlian yang baru?

Siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi terhadap tersedianya kesempatan belajar yang tepat?

Perubahan perilaku apa yang secara umum harus dilakukan oleh staff untuk dapat meningkatkan kinerja mereka dan juga mendukung peningkatan kinerja yang lain?

Hal apa yang tidak berjalan dengan semestinya dan kesalahan apa yang telah kita lakukan?

Apa yang kita dapatkan dari pengalaman kita dalam pendidikan dan pelatihan yang terdahulu?

Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan suatu organisasi.

3. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi didefinisikan (Mitrani et.al,1992: Spencer and Spencer, 1993) : *an underlying characteristics of an individual which is related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation* (sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya)

Spencer (1993), Mitrani et.Al, (1992) menyebutkan terdapat lima karakteristik kompetensi yaitu :

1. Knowledge
2. Skill
3. Motives
4. Traits
5. Self Concept

Dalam kaitannya dengan karakteristik kelima kompetensi tadi, maka dapat dikatakan adanya 3 kecenderungan yang terjadi : bahwa kompetensi pengetahuan (knowledge competencies) dan keahlian (skill competencies) cenderung lebih nyata (visible) dan relative berada dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. Oleh karenanya kompetensi pengetahuan dan keahlian relative mudah untuk dikembangkan sehingga program pelatihan merupakan cara yang sangat memungkinkan untuk menjamin tingkat kemampuan SDM. Dikatakan pula bahwa ada motif kompetensi dan trait berada pada personality iceberg sehingga cukup sulit untuk dinilai dan dikembangkan sehingga salah satu cara yang dipandang efektif adalah memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Bahkan self concept (konsep diri), trait (watak/sifat) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (hidden) dalam (deeper) dan berada pada titik sentral kepribadian seseorang (Spencer and Spencer, 1993). Konsep diri terletak (self concept) terletak diantara keduanya. Sedangkan sikap dan nilai (values) seperti percaya diri (self confidence) dapat dirubah melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit. Dengan melihat kecenderungan diatas, maka dapat memberikan gambaran pada manajemen bagaimana upaya meningkatkan kualitas SDM ke depan baik dalam perencanaan maupun dalam pengembangannya.

PEMBAHASAN

1. Peranan Manajemen SDM dalam rangka meningkatkan pembangunan social, ekonomi dan politik di Indonesia

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi. Selanjutnya MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari Ilmu Manajemen (Management Science) yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan.

Foulkes (1975) memprediksi bahwa peran SDM dari waktu ke waktu akan semakin strategis dengan ucapan berikut :*For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don't think this any longer holds true. I think it's the work force and the company's inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production...I think this will hold true even more in the future.*

Manajemen SDM mempunyai peran strategis untuk ikut serta dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui beberapa metode pendekatan multidimensional yaitu pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan sosio kultural, pendekatan administratif dan pendekatan teknologikal.

- a. Pendekatan Politik

Pendekatan politik terhadap pemahaman pentingnya manajemen SDM berangkat dari keyakinan yang semakin mendalam dikalangan para politis bahwa asset terpenting yang dimiliki suatu Negara adalah SDM. Berbagai Negara di dunia. Meskipun tidak memiliki sumber daya dan kekayaan alam kan tetapi bila mempunyai SDM yang terdidik, terampil, dan mau bekerja keras serta setia kepada bangsa ternyata berhasil meraih kemajuan yang sangat besar.

b. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang paling erat hubungannya dengan pemahaman meningkatnya perhatian semakin banyak orang pada manajemen sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam usaha menghasilkan barang atau jasa oleh satuan-satuan ekonomi

c. Pendekatan Hukum

Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern adalah semakin tingginya kesadaran para warga masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Semakin meningkatnya kesadaran demikian biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan para warga masyarakat.

Sebagai makhluk ekonomu, tiap warga berkewajiban menumbuhkan dan memelihara solidaritas social. Hal ini berarti antara lain, bahwa seorang kaya harus menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya itu memiliki fungsi social, misalnya dalam bentuk penggunaannya dalam bentuk lapangan kerja yang dapat dinikmati orang lain dan tidak hanya diri sendiri atau keluarganya.

d. Pendekatan Sosio Kultural

Manajemen sumber daya manusia juga memerlukan pendekatan sosio kultural karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia, selain itu juga manajemen sumber daya manusia ini bersifat universal dan penerapannya tidak pernah bebas nilai. Pendekatan sosio budaya terlihat lebih jelas lagi apabila diingat bahwa manajemen SDM, baik disoroti dari sudut teori maupun aplikasinya selalu bersifat situasional. Meskipun demikian hal yang tidak perlu dilupakan ialah system nilai yang berlaku dalam suatu organisasi merupakan bagian dari kultur yang dianut oleh masyarakat luas, akan tetapi biasanya terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat idiosinkronatik yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai social yang berlaku. Perbedaan ini timbul akibat beberapa faktor seperti : sejarah organisasi, konfigurasi anggotanya, para stakeholders dan barang jasa yang dihasilkan organisasi.

e. Pendekatan Administratis

Secara makro, tujuan dan cita-cita serta harapan suatu bangsa diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi yang disebut Negara. Secara

mikro, tujuan dan cita-cita serta harapan sekelompok orang yang merasa memiliki kesamaan kepentingan juga diusahakan pencapaiannya melalui organisasi, seperti organisasi politik, organisasi niaga dan lainnya.

f. Pendekatan Teknologikal

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap manajemen sumber daya manusia, dampak tersebut dapat bersifat negative karena pesan yang segera timbul ialah bahwa pemanfaatan berbagi hasil temuan di bidang teknologi berakibat pada kurangnya kesempatan kerja, karena semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan manusia diambil alih oleh mesin.

Keberhasilan pendekatan teknologikal terletak pada kearifan manusia menggabungkan kemajuan dibidang teknologi dengan manajemen sumber daya manusia yang berangkat dari harkat dan martabat manusia. Dalam pendekatan teknologikal terdapat perubahan-perubahan internal yang beraneka ragam bentuknya seperti perluasan atau penyempitan usaha dan kegiatan, pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Sedangkan perubahan eksternal dapat bersumber dari berbagai faktor seperti faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor kependudukan, dan faktor ketidak pastian dalam menghadapi masa depan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan manajemen SDM di Indonesia

Pengembangan sumber daya manusia meliputi aktivitas-aktivitas yang diarahkan terhadap pembelajaran organisasi maupun individual. Pengembangan sumber daya manusia terwujud dalam aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk merubah perilaku organisasi. Pengembangan sumber daya manusia menunjukkan suatu upaya yang disengaja dengan tujuan mengubah perilaku anggota organisasi atau paling tidak meningkatkan kemampuan untuk berubah. Jadi ciri utama pengembangan sumber daya manusia adalah aktivitas-aktivitas yang diarahkan pada perubahan perilaku.

Pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan tujuan organisasi, maka program program yang dirancang harus selalu berkaitan erat dengan berbagai perubahan yang melingkupi organisasi, termasuk kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam hal pekerjaan serta yang lebih penting berkaitan erat dengan rencana strategis

organisasi sehingga sumber daya organisasi yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Di Indonesia masalah sumber daya manusia menjadi sangat penting sekali, karena dalam pelaksanaan organisasi di pemerintahan sering menghadapi masalah yang berakar dari sumber daya manusia itu sendiri, antara pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang besar, sehingga dibutuhkan suatu manajemen yang dapat mewujudkan aktivitas-aktivitas organisasi pemerintahan menjadi kredibel, aktif, efisien dan efektif. Manajemen Sumber Daya Manusia di Indonesia yang diharapkan adalah suatu system atau rancangan atau aturan formal suatu organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Salah satu bentuk pengembangan manajemen sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia yaitu dengan beberapa karakteristik kompetensi yang berorientasi pada aspek entrepreneurship, sensitivitas dan responsivitas, mempunyai wawasan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap perilaku (attitude) yang relevan dengan visi, misi dan budaya kerja organisasi. Karakteristik kompetensi tersebut amat membantu keberhasilan organisasi dalam membawa misinya dengan memperhatikan keterkaitan dengan seleksi, perencanaan suksesi. Untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah dengan pelatihan yang dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Peranan kompetensi bagi organisasi tidak akan mampu memacu produktivitas yang tinggi tanpa dibarengi system penghargaan dan evaluasi kinerja yang terukur, teratur dan periodic.

Karakteristik Kompetensi yang diharapkan dapat mengembangkan manajemen sumber daya manusia adalah :

1. Knowledge (pengetahuan)

Adalah pengetahuan yang harus dimiliki SDM yang merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja SDM karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

2. Skill (keterampilan)

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental

3. Motives (motif)

Adalah motif seseorang untuk selalu berprestasi secara konsisten dengan mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya.

4. Traits (watak)

Adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri (self confidence), control diri (self control), stress resistance atau hardiness (ketabahan/daya tahan)

5. Self Concept (sikap dan nilai yang dimiliki seseorang)

Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang yang diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana value (nilai) yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Seseorang yang dinilai menjadi leader seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang leadership ability.

Karakteristik kompetensi tersebut harus dapat mengetahui jenis kompetensi sumber daya manusia melalui model kompetensi adalah suatu cara bagaimana memetakan suatu system pemikiran yang dapat memberi gambaran terintegrasi mengenai kompetensi kaitannya dengan strategi manajemen SDM. Dalam konteks strategi manajemen SDM tersebut terdapat beberapa unsur terkait yakni : 1). Sistem Rekrutmen dan Seleksi . 2). Penempatan dan rencana suksesi 3). Pengembangan Karir dan 4) Kompensasi.

Sistem seleksi dan penetapan harus menekankan kepada identifikasi kompetensi yang paling dibutuhkan bagi kepentingan suatu pekerjaan tertentu. Usaha yang dilakukan adalah menggunakan sebanyak mungkin sumber informasi tentang calon sehingga dapat ditemukan apakah calon memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Metode penilaian atas calon yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti wawancara perilaku tes, simulasi lewat assessment centers, menelaah laporan evaluasi kinerja atas penilaian atasan, teman sejawat dan bawahan, calon pegawai direkomendasikan untuk promosi atau ditetapkan pada suatu pekerjaan berdasarkan atas ranking dari total bobot skor berdasarkan kriteria kompetensi.

Kebutuhan kompetensi untuk pengembangan dan jalur karir akan menentukan dasar untuk pengembangan karyawan. Karyawan yang dinilai lemah apada aspek kompetensi tertentu dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan kompetensi tertentu sehingga dapat diharapkan memperbaiki kinerjanya. Beberapa pilihan pengembangan kompetensi termasuk pengalaman assessment center, lembaga-lembaga training, pemberian tugas-tugas pengembangan, mentor dan sebagainya.

Proses perolehan kompetensi telah dikembangkan untuk meningkatkan tingkat kompetensi yang meliputi : proses suatu simulasi atau studi kasus yang memberikan kesempatan peserta untuk mengenali satu atau lebih kompetensi yang dapat memprediksi individu berkinerja tinggi di dalam pekerjaannya sehingga seseorang dapat belajar dari pengalaman simulasi tersebut : understanding, instruksi khusus termasuk modelling perilaku tentang apa itu kompetensi dan bagaimana penerapan kompetensi tersebut, dan assessment, umpan balik kepada peserta tentang berapa banyak kompetensi yang dimiliki peserta. Cara ini dapat memotivasi peserta mempelajari kompetensi sehingga mereka sadar adanya gap antara kinerja yang actual dan kinerja yang ideal. Feedback suatu latihan dimana peserta dapat mempraktekkan kompetensi dan memperoleh umpan balik bagaimana peserta dapat melaksanakan pekerjaan tertentu disbanding dengan seseorang yang berkinerja tinggi, Job application : peserta menetapkan tujuan dan mengembangkan tindakan yang spesifik agar dapat menggunakan kompetensi di dalam kehidupan yang nyata.

Sistem kompensasi yang didasarkan pada keahlian secara ekplisit mengkaitkan reward terhadap pengembangan keahlian. Cara ini sangat tepat untuk dilakukan apabila karyawan tidak memiliki control terhadap hasil-hasil kinerjanya. Efektivitas evaluasi kinerja tergantung pada ketetapan penggunaan masing-masing bentuk data yang ditentukan sebagai sasaran suatu system dan tingkat pengawasan atas kinerja karyawan untuk masing-masing variable yang dinilai. Data ahasil kinerja karyawan biasanya digunakan untuk keputusan pemberian reward. Jika karyawan mempunyai pengawasan yang bersifat individual atas hasil suatu pekerjaan maka rewardnya hanya akan didasarkan atas hasil tersebut. Hasil pekerjaan tersebut tentunya dapat mengakibatkan demotivasi bagi individu yang berkinerja tinggi. Dalam hal ini beberapa porsi reward harus didasrkan atas job behavior. Data job behavior biasanya digunakan untuk keputusan pengembangan skill individu.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Manajemen SDM memiliki peran strategis dalam suatu organisasi perusahaan dan pemerintahan
2. Peranan Manajemen SDM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui beberapa pendekatan multidimensional yaitu : pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan sosio kultural, pendekatan administrates dan pendekatan teknologikal
3. Dalam upaya mengembangkan manajemen sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui karakteristik kompetensi yaitu : knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), motif, traits (watak), self concept (nilai sikap).

B. SARAN

1. Setiap organisasi publik di Indonesia hendaknya mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk membantu dan mengembangkan organisasi mencapai tujuan dan keberhasilannya.
2. Organisasi pemerintahan di Indonesia harus mengupayakan proses peningkatan kualitas kompetnsi sumber daya manusia melalui pelatihana-pelatihan kerja

DAFTAR PUSTAKA

B Siswanto S.2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administratif dan Operasional*.Bandung : Bina Aksara

Dessler, Gary 2000. *Human Resource Management*, International Edition, 8 th Ed. Prentice Hall, Inc, Upper Saddle River, New Jersey

Drucker, Peter. 1988. *The Coming of the New Organization*. Harvard Business Review

Gilley.W.J and May Cunich, Ann, *Beyond the Learning*.2 000.

Handoko, T.Hani.1998. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE Yogyakarta

Hasibuan, S.P, Malayu.2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Ike Kusdyah Rachmawati, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Yogyakarta

Mitrani, A.Daziel, M.And Fitt, D. 1992. *Competency Based Human*.

Mangkunegara, Anwar Prabu.2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Resource Management : Value-Driven Strategis for Recruitmen

Spencer, M.Lyle and Spencer, M.Signe, 1993. *Competence at Work*.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2005. *Manajemen Publik, Gramedia Widiasara Indonesia*. Jakarta

RPSEP-52

MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI KATALISATOR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Joko Rizkie Widokarti (*jokorw@ut.ac.id*)
Universitas Terbuka

Abstrak

Human resources (HRD) are the most important elements of the organisation of local government; and function as a prime mover, in realizing the vision and an organizational goal. So the importance of the role and function of human resources, the management of human resources needed to was managing systematically, premeditated; and the desired goal formed organization in both the present and in the future will be achieved optimally. One problem facing the local governments nowadays is often judged not reliable human resources and professional and create problems for an accelerated development regions. This paper intended to discuss the management of human resources as a catalyst of regional development.

Abstrak

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen terpenting dari organisasi pemerintahan daerah, dan berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Begitu pentingnya peran dan fungsi SDM, maka manajemen SDM dibutuhkan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi baik di masa sekarang maupun di masa depan dapat tercapai secara optimal. Salah satu persoalan yang dihadapi organisasi pemerintahan daerah saat ini adalah SDM yang sering dinilai tidak handal dan profesional sehingga menciptakan masalah dalam upaya melakukan percepatan pembangunan daerah. Makalah ini dimaksudkan untuk membahas manajemen sumber daya manusia sebagai katalisator percepatan pembangunan daerah.

Keyword: Manajemen SDM, Pembangunan Daerah, Organisasi

A. Pendahuluan

Pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi atau kelembagaan saat ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dalam manajemen, SDM merupakan asset penting dan menempati urutan pertama dalam menentukan mati hidupnya sebuah organisasi. Pentingnya SDM ini dikemukakan oleh Panggabean yang mengatakan bahwa keberadaan SDM dalam sebuah organisasi sangat penting karena mereka yang memprakarsai terbentuknya organisasi, mereka yang berperan membuat keputusan untuk semua fungsi dan

mereka juga yang berperan dalam menentukan kelangsungan hidup organisasi itu (Panggabean, 2004:11).

Kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada keberadaan dan keterlibatan SDM di dalamnya, dapat dikatakan pula bahwa SDM mempunyai daya dukung terhadap eksistensi organisasi. Pesatnya teknologi yang diterapkan suatu organisasi secanggih apapun teknologi tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal apabila tidak ada peran manusia di dalamnya.

Peran manusia (SDM) dengan demikian menjadi krusial bagi sebuah organisasi. Organisasi harus dapat merespon banyak kejadian yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Perubahan tersebut melibatkan manusia dan akan mempengaruhi manusia, perubahan ini memiliki implikasi utama pada pengelolaan SDM dan menimbulkan isu yang nyata bagi pihak-pihak yang terkait dengan SDM. Karena itu, disinilah salah satunya SDM itu berperan, yakni merespon perubahan lingkungan yang terjadi dan dapat mempengaruhi organisasi.

Wiley mengklasifikasikan peran SDM menjadi 3 (tiga) yaitu proses strategis, aspek-aspek resmi, dan aspek-aspek operasional. Sementara Walker menjelaskan bahwa 4 (empat) peran SDM merupakan satu kesatuan yang meliputi dukungan, pelayanan, konsultasi dan kepemimpinan (Wiley, 1992:27-29). Menurut Schuler, menghubungkan strategi SDM dan strategi bisnis adalah peranan utama SDM saat ini. Schuler menggaris bawahi 6 (enam) peranan kunci berdasar dimana orang SDM menghabiskan waktu yaitu organisasi bisnisnya, agen perubahnya, konsultasi antara organisasi dengan lini-lininya, yang memformulasi strategi dan yang mengimplementasikannya, bakat manajer, dan kemampuan/ kekayaan manajer dan pengawas biaya (Schuler & Jackson, 1987: 207-219).

Untuk menciptakan nilai, maka peran SDM yang baru harus ditentukan, karena telah terjadi perubahan-perubahan dari masalah operasional menjadi strategis, kuantitatif menjadi kualitatif, mengatur menjadi bekerjasama, jangka pendek menjadi jangka panjang, administratif menjadi konsultatif, orientasi fungsi menjadi orientasi bisnis, fokus internal menjadi fokus eksternal/ pelanggan, reaktif menjadi proaktif, fokus aktivitas menjadi fokus pemecahan (Heru Kurninato Tjahjono (makalah), 2010)

Aktivitas SDM meliputi pengaturan terhadap proses-proses SDM dan mengatur orang. Setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip peran SDM yang dapat dimiliki, yaitu manajemen SDM yang strategis, manajemen infrastruktur perusahaan, manajemen kontribusi karyawan, dan

manajemen transformasi dan perubahan (Dave Ulrich, 1996). *Pertama*, manajemen SDM yang strategis. Peran SDM dalam hal ini adalah menyamakan strategi dan praktek SDM dengan tujuan bisnis perusahaan. Untuk mencapai ini SDM harus berperan sebagai *partner* strategis.

Kedua, manajemen infrastruktur perusahaan. Menciptakan infrastruktur organisasi adalah peran tradisional dari peran SDM. Sebagai penanggungjawab infrastruktur perusahaan, profesional-profesional SDM harus meyakinkan bahwa proses-proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan disain dan berjalan dengan efektif seperti *staffing*, *training*, hadiah, penghargaan, promosi, maupun hal lain yang berhubungan dengan karyawan dalam organisasi.

Ketiga, manajemen kontribusi karyawan. Peran kontribusi terhadap karyawan membuat profesional-profesional SDM harus terlibat dalam masalah-masalah harian, sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Agar berhasil, profesional SDM harus menghubungkan kontribusi karyawan untuk mencapai kesuksesan organisasi.

Empat, manajemen transformasi dan perubahan. Transformasi meliputi perubahan budaya dasar atau fundamental yang terjadi dalam perusahaan, profesional SDM mengarahkan transformasi baik sebagai penjaga budaya maupun penyaring budaya. Perubahan mengarah pada kemampuan perusahaan untuk mendesain dan menerapkan ide-ide atau inisiatif dan mengurangi perputaran waktu dalam semua aktivitas organisasi, profesional SDM membantu mengidentifikasi dan menerapkan proses-proses perubahan.

Peran SDM dewasa ini telah mengalami pergeseran pada fokus strategis. Untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan menciptakan keuntungan dalam bersaing, SDM harus berfokus pada seperangkat prioritas baru. Prioritas ini lebih menekankan pada orientasi isu bisnis daripada fungsi SDM tradisional yang khusus. Perubahan tersebut sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. Perubahan Fokus dan Prioritas dalam SDM

PENELITI	KONSEP KUNCI	PRIORITAS SDM
Lawler (1995)	SDM merupakan pemain utama dalam menciptakan kemampuan organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan karyawan dan organisasi. • Mempengaruhi persaingan. • Mengatur belajar dan hubungan. • Membangun organisasi kerja dengan mendisain ulang kemampuan. • Pengembangan kepemimpinan.
Ulrich,	SDM mempunyai	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan konsumen luar.

Brockbank, Yeung dan Lake (1993)	agenda strategis baru.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen horizontal • Perubahan manajemen. • Kemampuan kerja tim. • Budaya dan Sistem-sistem untuk mendukung TQM.
Tower Perrin (1992)	Tindakan-tindakan SDM memperoleh keuntungan penting untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing.	<ul style="list-style-type: none"> • Arah, masalah dan rencana bisnis. • Memberi hadiah karyawan karena pelayanan pada konsumen. • Mengidentifikasi dari awal karyawan yang potensial.
Schuler (1990)	Isu-isu SDM adalah berhubungan dengan isu-isu bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kepentingan karyawan. • Mengatur keanekaragaman karyawan. • Mengatur/mempertinggi daya saing. • Mengatur globalisasi.
Georgelades (1990)	Area-area SDM mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan. • Budaya perusahaan. • Strategi dalam manajemen SDM.

Sumber: Conner, J. and Ulrich., 1996, *Human Resources Roles: Creating Value, not Rhetoric, Human Resources Planning*. 19(3):38-49

Untuk itulah, dibutuhkan SDM yang profesional dengan kemampuan yang memadai terutama di dalam menyelenggarakan pembangunan. Menurut Yeung, Woolcock & Sullivan (1996) kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM profesional di masa datang meliputi; *business knowledge, customer orientation, effective communication, credibility and integrity, systemic, perspective, negotiation and conflict resolution skills*.

Dalam konteks pembangunan daerah saat ini, peran SDM juga sangat besar terutama di dalam mengelola dan mengatur perkembangan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Bahkan, dengan diberlakukannya UU otonomi daerah yang memberi kewenangan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, peran SDM diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Hakekat pembangunan pada dasarnya merupakan pembangunan manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat seluruhnya. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi tapi sejauhmana pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pembangunan berkelanjutan dewasa ini tidak hanya ditunjang oleh pembangunan ekonomi tetapi juga oleh pembangunan SDM, karena itu investasi pada aspek manusia sebagai modal dasar pembangunan sangat didahulukan.

Kristiadi mengemukakan, peningkatan kualitas SDM juga merupakan tuntutan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan pembangunan yang makin cepat dan kompleks. Perkembangan ekonomi, industrialisasi, arus informasi, dan perkembangan iptek yang pesat makin membuat kualitas SDM sangat dibutuhkan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan SDM melalui empat jalur kebijaksanaan yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusia seperti jasmani, rohani maupun kualitas kehidupan; 2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya penyebarannya; 3) Peningkatan SDM yang berkembang dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan penguasaan iptek; dan 4) Pengembangan prana yang meliputi kelembagaan dan perangkat yang mendukung peningkatan kualitas SDM (J.B. Kristiadi, 1994).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah dimana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir, 2002).

B. Metodologi

Penulisan makalah ini menggunakan studi literatur (kepuustakaan), yakni suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Data yang diperoleh melalui pembacaan dokumen diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi dalam penulisan makalah ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang merupakan aset penting pencapaian tujuan organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia menurut Dessler merupakan kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbangan dan penilaian (Gary Dessler, 2005).

Dalam pengertian yang lain, manajemen SDM adalah suatu aktifitas yang didesain untuk menyediakan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia pada suatu organisasi (L.Byars dan W. Rue, 2005:4). Manajemen SDM juga dinilai sebagai sistem manajemen formal pada manusia di dalam organisasi (Thomas S. Bateman dan Scott A. Snell, 2004:300).

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya memiliki empat tujuan (Rahmayanti (artikel), 2001), yaitu:

1) Tujuan Organisasional

Bertujuan untuk dapat mengenali keberadaan sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

2) Tujuan Fungsional

MSDM memiliki tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi.

3) Tujuan Sosial

Ditujukan untuk secara etis dan sosial dapat proaktif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dan mengantisipasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat, dapat menyebabkan hambatan-hambatan.

4) Tujuan Personal

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi

Setidaknya, terdapat 9 (Sembilan) peran manajemen sumber daya manusia dalam mengatur dan menetapkan program kepegawaian (Johar Arifin dan A Fauzi, 2007:8-9), yaitu:

1. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. Melakukan perekrutan karyawan, seleksi dan penempatan pegawai sesuai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan perusahaan.
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi dan pemutusan hubungan kerja.
4. Membuat perkiraan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang.
5. Memperkirakan kondisi ekonomi pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Senantiasa memantau perkembangan undang-undang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu khususnya yang berkaitan dengan masalah gaji/upah atau kompensasi terhadap pegawai.
7. Memberikan kesempatan karyawan dalam hal pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan.
8. Mengatur mutasi karyawan.
9. Mengatur pensiun, pemutusan hubungan kerja beserta perhitungan pesangon yang menjadi hak karyawan.

a. Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Strategis

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2007:12-13), manajemen sumber daya manusia yang strategis didefinisikan sebagai adanya keterkaitan antara SDM dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan fleksibilitas untuk memungkinkan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut L. Mathis & H. Jackson (2003:30), *strategic human resource management* adalah pemanfaatan kepegawaian dari suatu organisasi untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dari kompetitor. SDM sebagai sentral untuk mencapai keunggulan bersaing telah mengarahkan kemunculannya pada bidang yang dikenal sebagai manajemen SDM yang strategis. Manajemen SDM didefinisikan sebagai tautan dari SDM dengan tujuan dan sasaran strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur perusahaan yang mendorong inovasi dan kelenturan. dengan kata lain, itu merupakan pola dari penyebaran SDM dari kegiatan-kegiatan terencana yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan sebuah perusahaan mencapai tujuannya.

Sumber daya manusia sebagai pengelola sebuah organisasi harus selalu tanggap terhadap persaingan global yang selalu berubah setiap saat dengan melakukan perubahan lingkup usaha, menciptakan hubungan jaringan kerja yang baru, bertujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Manajemen sumber daya manusia strategis diperlukan untuk mencapai keunggulan bersaing yang merupakan suatu proses dinamis dimana bisa dicapai melalui keterampilan superior yang mencakup kemampuan teknis, manajerial, dan operasional. Sumber daya manusia yang superior memungkinkan pembentukan dimensi keunggulan tersebut. Secara singkat ada beberapa hal yang perlu dipahami sebagai sumber keunggulan yaitu; keterampilan superior, sumber daya yang superior, pengendalian yang superior. Hal ini akan membentuk keunggulan posisi organisasi bisnis karena mampu menciptakan *customer value* yang superior dengan biaya yang lebih rendah (Abdul Rahman Pakaya, 2011:103).

Manajemen sumber daya manusia strategis (MSDMS) merupakan keterkaitan dari sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi sesuai dengan perubahan lingkungannya, atau dengan kata lain, merupakan pola penyebaran sumber daya manusia dari kegiatan-kegiatan terencana yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Hasil akhir dari MSDMS khususnya dalam organisasi bisnis adalah kemampuannya secara terus menerus meningkatkan atau mempertahankan kepuasan dan loyalitas konsumen, pangsa pasar dan kemampulabaan yang tinggi (Abdul Rahman Pakaya, *ibid*).

SDM strategis berarti menerima fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam formulasi dari strategi-strategi perusahaan, juga dalam implementasi strategi-strategi tersebut melalui kegiatan-kegiatan SDM seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, dan imbalan.

Sementara sumber daya strategis mengakui kemitraan SDM menstrategisasi proses, istilah strategi SDM merujuk kepada jalan tindakan SDM khususnya jalan yang direncanakan perusahaan untuk berupaya mencapai sasarnya. Contoh satu dari sasaran utama SDM strategis perusahaan industri perbankan adalah mencapai tingkat unggul dari pelayanan prima pelanggan dan kemampuan mendapatkan laba yang tinggi melalui SDM yang sangat setia. Dengan demikian, strategi SDM keseluruhannya adalah mengarah kepada pembangunan suatu angkatan kerja yang setia, lebih disukai dalam lingkungan kerja bukan serikat kerja.

Komponen khusus dari strategi SDM bank menyusul dari sasaran dasar itu menggunakan berbagai mekanisme untuk membangun komunikasi dua arah yang sehat, yaitu menyeleksi

manajer yang potensial yang nilainya tidak berorientasi orang, memberikan kompensasi yang sangat bersaing dan insentif pembayaran kinerja, menjamin seluas mungkin perlakuan yang adil dan keamanan karyawan bagi semua karyawan, melembagakan berbagai kegiatan promosi dari dalam yang diarahkan pada pemberian setiap peluang bagi karyawan untuk menggunakan sepenuhnya keterampilan dan bakat mereka ketika bekerja.

Brian E. Becker dalam buku "*The Human Resources Scorecard, Linking People, Strategy, and Performance*" mengemukakan 4 perspektif tentang evolusi sumber daya manusia sebagai aset strategis. Evolusi sumber daya manusia sebagai aset strategis sebagai berikut:

- 1) *The personel perspective*, yaitu perusahaan merekrut karyawan yang paling baik dan mengembangkannya.
- 2) *The compensation perspectives*, yaitu perusahaan menggunakan bonus, pembayaran insentif, dan perbedaan-perbedaan yang berarti dalam pembayaran untuk memberi ganjaran kepada karyawan yang berprestasi tinggi dan rendah. Ini adalah langkah pertama dalam memercayai orang sebagai sumber keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), namun perusahaan belum secara penuh mengeksplorasi manfaat dari sumber daya sebagai aset strategis.
- 3) *The alignment perspective*, yaitu manajer senior melihat karyawan sebagai aset strategis namun mereka tidak melakukan investasi dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Sebab itu, sistem sumber daya manusia tidak dapat meningkatkan perspektif manajemen.
- 4) *The high performance perspective*, yaitu eksekutif sumber daya manusia dan yang lain memandang sumber daya sebagai suatu sistem yang melekat dalam sistem yang lebih besar dari implementasi strategi perusahaan. Perusahaan mengelola dan mengukur hubungan antara kedua sistem tersebut dengan kinerja perusahaan (*linking people, srategy, and performance*).

b. Peran Sumber Daya Manusia Sebagai Mitra Srategis

SDM sebagai staf atau fungsi kemitraan telah mewariskan suatu reputasi yang miskin dengan ide-ide dan motivasi, serta tidak kreatif. Sebagai contoh, satu pandangan bahwa SDM itu terlalu fokus pada kebiasaan operasional sehingga kegiatan SDM tidak strategis.

Menurut penalaran ini, kegiatan-kegiatan SDM sebenarnya mencakup untuk memastikan bahwa orang dibayar pada hari yang tepat, iklan pekerjaan yang tidak melewati *deadline* surat kabar, seorang penyelia yang cocok direkrut untuk *shift* malam pada waktu sebelumnya dan manajer yang sama itu mengingatkan untuk melakukan observasi proses yang seharusnya sebelum memecat perwakilan penjualan baru yang tidak berfungsi.

Sebuah pandangan yang lebih canggih (namun barang kali tidak lebih akurat) atas SDM adalah hanya untuk mencocokkan strategi perusahaan. Dalam pandangan ini, peran strategi SDM adalah untuk menyesuaikan praktik SDM individual (perekrutan, pengimbalan dan lain-lain) agar cocok dengan strategi perusahaan khususnya dan strategi bersaing dan selanjutnya, SDM diminta menciptakan program-program SDM yang dituntut untuk berhasil mengimplementasikan strategi perusahaan tersebut. Seperti yang dikemukakan para ahli, perencanaan strategi, sistem manajemen SDM harus disesuaikan pada tuntutan-tuntutan strategi bisnis. Gagasan di sini adalah bahwa bagi strategi organisasi tertentu manapun, pada pokoknya adalah strategi SDM yang sepadan dengannya.

Pandangan lainnya adalah bahwa manajemen SDM itu merupakan suatu mitra sejajar dalam proses perencanaan strategi. Menurut pandangan ini, peran manajemen SDM adalah bukan sekedar menyesuaikan kegiatan-kegiatannya pada tuntutan strategi bisnis, tetapi juga tentu saja sekedar menjalankan tugas operasional sehari-hari, seperti memastikan bahwa karyawan sudah dibayar. Sebaliknya, menurut pandangan ini kebutuhan untuk mendorong angkatan kerja sebuah perusahaan kedalam suatu keunggulan bersaing, berarti bahwa manajemen SDM harus menjadi mitra sejajar, baik dalam formulasi dan implementasi dari strategi bersaing dan mencakup seluruh organisasi perusahaan.

c. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan, fungsi manajemen SDM meliputi beberapa hal (Hasibuan, 2007:21-22), antara lain:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menerapkan program kepegawaian yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,

kedisiplinan, dan pemberhentian program kepegawaian yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menerapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi, dengan organisasi yang kuat akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4) Pengadaan

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

5) Pengembangan

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dengan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan dan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini dan di masa yang akan datang.

6) Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung maupun tidak langsung uang ataupun barang kepada karyawan sebagai balas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak, adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya dan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada upah minimum pemerintah.

7) Pengintegrasian

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan .

8) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara kondisi mental, fisik, dan loyalitas karyawan agar mereka mau tetap bekerja sama sampai pensiun.

9) **Kedisiplinan**

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa kedisiplinan yang baik maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan dan norma-norma yang ada di dalam perusahaan.

10) **Pemberhentian**

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu organisasi dikarenakan kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

2. Pembangunan Daerah

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan keterangan di atas maka perlu diuraikan pengertian pembangunan daerah seperti dikemukakan oleh Sukirno (2000) yaitu:

1. Sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah.
2. Strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional.

Dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik.

Pada dasarnya, pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor *returns*) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir, 2002).

Pada dasarnya, pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi, pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk.

Dalam strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah: di daerah-daerah mana serangkaian pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya.

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya masyarakat Indonesia, pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan koordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain.

Sebelum suatu daerah menyusun berbagai langkah-langkah dalam pembangunan daerahnya, dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya, sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun.

3. SDM sebagai Katalisator Percepatan Pembangunan

Salah satu kunci penting dari keberadaan SDM yang menjadi katalisator percepatan pembangunan di daerah adalah keberadaan SDM birokrasi yang handal dan berkualitas. Keberadaan SDM seperti ini akan memicu keunggulan pembangunan dan mempercepat usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan pegawai atau aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan di segala bidang. Peranan pegawai atau aparatur negara sangat dituntut dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan baik materil maupun spirituil.

Untuk dapat menggerakkan atau mengarahkan dengan tepat sehingga pegawai dapat bekerja lebih efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi, maka unsur manusia dalam organisasi khususnya pegawai atau aparatur pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius dari setiap organisasi. Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam usaha pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan pegawainya disamping kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahan atau pegawai dari pimpinan organisasi itu sendiri.

Kunci kesediaan SDM aparatur daerah yang handal dan berkualitas adalah pemberdayaan masyarakat bawah (*grass root*) dan peningkatan kualitas penyelenggara daerah agar kapabel dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Masukan masyarakat dimanfaatkan dalam teknik pengembangan SDM birokrasi lokal dan memberikan laporan dalam konteks akuntabilitas publik kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat dalam hal ini perlu diyakinkan bahwa kinerja dan akuntabilitas aparat pelaksana atau pemerintah telah berubah ke arah positif dari sisi sifat (*attitude*) sebagai memotivasi masyarakat berpartisipasi meningkatkan kinerja pembangunan. Keseluruhan upaya mewujudkan SDM aparatur daerah yang handal dan berkualitas membutuhkan pengelolaan atau manajemen SDM yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Selain manajemen SDM dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat bawah, Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 43/1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8/1974, menyebutkan tentang manajemen SDM yang terdiri dari norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas SDM pemerintah, pemindahan, gaji,

tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Undang-undang Nomor 43/1999 juga mengharapkan terbentuknya SDM profesional sebagai pelaksana pembangunan, pemerintahan dan pelayan masyarakat, netral dari kepentingan politik dan golongan.

Berkaitan dengan kompetensi, jumlah PNS merupakan beban organisasi atau instansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95/2000 pengadaan PNS diajukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) untuk disetujui. Oleh karena itu, kedua instansi tersebut juga berwenang menetapkan jumlah pegawai atau pengadaan di seluruh Indonesia. Walaupun begitu, perekrutan pegawai daerah dilakukan melalui biro kepegawaian atau kepegawaian instansi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

4. Masalah SDM Di Daerah

Permasalahannya penanganan SDM di daerah terutama SDM aparatur adalah karena *Key Performance Indicators* tidak jelas dibarengi dengan *Key Performance Index* tidak baku (Amstrong, 1998). Ketidajelasan dan ketidakbakuhan tersebut dapat disebabkan karena kurang standarnya ukuran pencapaian *Knowledge, Skill, Expertise, dan Behavior* yang merupakan atribut kompetensi.

Secara garis besar kendala-kendala di daerah berkaitan dengan SDM berkisar pada:

- 1) PNS tidak profesional,
- 2) Kurang SDM berkualitas (pemuda dan masyarakat inovatif),
- 3) Swasta yang kurang proaktif dan hanya melihat keuntungan jangka pendek, sehingga membutuhkan komitmen politik dari eksekutif serta legislatif,
- 4) Tidak adanya penerapan *knowledge based competition*,
- 5) Kurangnya budaya *learning organization* berbasis *knowledge management*,
- 6) Pendekatan sistem yang tidak kunjung terintegrasi,
- 7) Manajemen pembangunan daerah hanya bertumpu pada eksploitasi penggunaan sumber daya alam tanpa memikirkan pengembangan SDM,
- 8) Manajemen pembangunan daerah kurang menggali iklim partisipatif masyarakat sebagai bagian SDM daerah,
- 9) Marginalisasi kepentingan rakyat di bawah kepentingan politik pemerintah dan pengusaha.

Senada dengan hal tersebut diatas, Siagian (2000), Martoyo (2000) menyatakan ada beberapa masalah atau alasan utama mengapa perlu diadakannya pengembangan sumber daya manusia yaitu:

- 1) Adanya pegawai/ aparatur baru yang diterima tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- 2) Pengetahuan karyawan/ aparatur yang perlu pemuktahiran;
- 3) Selalu terjadi perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi juga karena pergeseran nilai-nilai sosial budaya;
- 4) Kemungkinan perpindahan pegawai;
- 5) Pegawai/ aparatur yang sudah berpengalaman pun perlu belajar dan menyesuaikan dengan organisasi, kebijaksanaan dan prosedur-prosedurnya (guna meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya sekarang maupun masa datang). (T.Hani Handoko, 1995).

Salah satu hambatan yang cukup serius yang sering dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah belum sesuainya kualitas kerja aparatur dengan apa yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya tenaga manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai.

Dengan demikian, SDM daerah merupakan bagian penting dari kesuksesan otonomi daerah dan rangka percepatan pembangunan daerah. Dengan terbentuknya SDM profesional, maka arah pembangunan daerah dapat lebih terarah dan kompetitif dengan pembangunan daerah di tempat lain. Tuntutan globalisasi akan SDM berdaya saing, dapat tercapai karena kompetensi unggul yang telah terasah dengan baik melalui peraturan perundangan dan penegakan implementasinya, mengayomi ketiga unsur SDM daerah yaitu birokrasi, swasta, dan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia karenanya juga sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja (*performence*) pemerintah dalam pembangunan daerah dan merupakan alat manajemen untuk mewujudkan sosok dan profesionalisme seseorang pimpinan baik dalam jabatan organisasi publik maupun dalam organisasi swasta/bisnis.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan argumen yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM selalu mengarahkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Manajemen SDM dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan kelenturan. Dengan kata lain, itu merupakan pola dari penyebaran SDM dari kegiatan-kegiatan terencana dimaksudkan untuk memberikan kemampuan sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Manajemen SDM merupakan bagian penting dalam proses perencanaan strategi. Karena itu, peran manajemen SDM adalah bukan sekedar menyesuaikan kegiatan-kegiatan pada tuntutan strategi jangka menengah dan panjang, tetapi juga tentu bagaimana menjalankan tugas operasional keseharian yang menjadi rutinitas kerja. Dengan kata lain, manajemen SDM adalah kerangka kerja untuk mengatur sistem dan proses dari kinerja kelembagaan/ organisasi.

Manajemen SDM erat hubungannya dengan pembangunan terutama pembangunan daerah. Pembangunan daerah menetapkan segala sesuatu untuk dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pembangunan daerah bersumber dari kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak memprakarsai pembangunan di daerahnya masing-masing. Meski demikian, pembangunan daerah tak lepas dari yang perencanaan, pembiayaan, dan sistem pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pusat. Sementara daerah bisa ikut terlibat agar bisa bersinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

SDM dinilai sebagai unsur penting dari kesuksesan bagi pembangunan daerah. SDM yang berkualitas dan profesional karenanya menjadi syarat utama dalam percepatan pembangunan daerah. SDM yang profesional akan menjadikan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan kompetitif dengan pembangunan di daerah lain. Untuk mewujudkan SDM aparatur daerah yang handal dan berkualitas membutuhkan pengelolaan atau manajemen SDM yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di daerah.

2. Saran

Hal yang paling penting dalam mengelola SDM untuk mempercepat pembangunan daerah adalah bagaimana setiap daerah bisa membangun perencanaan dan strategi yang

prospektif, terukur, sistematis dan terencana dengan melibatkan segala unsur yang ada dan memaksimalkan kemampuan akan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, dengan kedudukan SDM sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan, maka penting pula untuk selalu meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki aparatur daerah sehingga SDM yang mendukung percepatan pembangunan daerah bisa diperoleh.

E. Daftar Pustaka

- Arifin, Johar, & Fauzi, A., (2007), *Aplikasi Excel dalam Aspek Kuantitatif Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi pertama, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Armstrong, Michael & Baron, A. 1998. *Performance Management : The New Realities*, Institute of Personnel and Development, New York
- Bateman, Thomas S. B dan Scott A. Snell. 2004. *Management: The New Competitive Landscape*. 6th edition. McGraw Hill, New-York
- Byars , Lloyd L & Rue, Leslie W. 2005. *Human Resources Management*, 8th edition. McGraw-Hill Irwin.
- Conner, J. and Ulrich., 1996, *Human Resources Roles: Creating Value, not Rhetoric, Human Resources Planning*. 19(3):38-49.
- Dessler, Gary. 2005. *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)* edisi kesembilan jilid 2. edisi Bahasa Indonesia. Indeks. Jakarta
- Heru Kurnianto Tjahjono, 2010, *Peran-Peran Sumber Daya Manusia: Telaah Konseptual dan Validasi Empiris* (makalah), diakses dari <http://herukurniantotjahjono.com/wp-content/uploads/2010/07/Peran-peran-SDM.doc>, tanggal 13 September 2014, pukul 22.10 WIB.
- J.B. Kristiadi, 1994. *Administrasi/Manajemen Pembangunan* (Kumpulan Tulisan). Subbagian Tata Usaha Ketua LAN RI. Jakarta
- Munir, Badrul, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi NTB, Mataram
- Marihot Tua Efendi Hariandja, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasrama.
- Mathis, Robert L & Jackson, John H., 2003, *Human resource management*, 10th ed. Thomson South – Western
- Mutiara, S. Panggabean, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Malayu S.P Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pakaya, Abd Rahman. 2011. *Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi dan Manajemen Transformasi Terhadap Keunggulan Bersaing*. Jurnal INOVASI, Volume 8, Nomor 3, September.
- Rahmayanti, 2001. *Peran Strategis Human Resources Departement Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi* (Makalah), diakses dari [http://asm.ariyanti.ac.id/download/Karya%20Ilmiah/Nomor%207%20Tahun%20IV/Penganti%20artikel-4%20\(Rahmayanti\).docx](http://asm.ariyanti.ac.id/download/Karya%20Ilmiah/Nomor%207%20Tahun%20IV/Penganti%20artikel-4%20(Rahmayanti).docx), tanggal 13 September 2014, pukul 22.30 WIB.
- Schuler & Jackson. 1987. Linking competitive strategies with human resource management practices. *Academy of Management Executive*. 1(3):207-219

Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta

Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan

T.Hani Handoko, (1995), *Manajemen*, BPFE, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta.

Ulrich, Dave. 1997. *Human Resource Champions: the next agenda for adding value and delivering results*. Harvard Business School Press, USA

Wiley. 1992. A comprehensive view of roles for human resource managers in industry today. *Industrial Management*

.

RPSEP-53

PENGARUH ANALISA JABATAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT CARTON INDUS SUMBERJAYA TANGERANG

(STUDI KASUS PERANAN SEKRETARIS PADA KARYAWAN CARTON BOX CORUGATED TANGERANG)

Nurhadi

AMIK

Jl. Letnan sutopo BSD (Bumi serpong damai) sektor XIV BlokC 1/1 Tangerang selatan

Email : nurhadi_bsi@yahoo.com

Abstract

Processing industries in the world of work roles human resource developmen (HRD) is very important relationship between the positions assigned to provide the representative authority of the leadership so motivated to move as a leader to improve the performance between the lower and the lines in each section PT Carton indust Sumberjaya Tangerang.

The method used in this study is the multiple regression (multiple regression) to test the effect of independent variables on the dependent variable using the formula: $\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

The magnitude of the simultaneous influence of variable positions (X1) and motivation (X2) on the performance of work (Y) relatively strong. While the contributions together (simultaneously) variables X1, X2 of (Y) = $R^2 \times 100\%$ or $0,9522 \times 100\% = 906.3\%$ 806.3% while the rest are determined by other variables, then the rise and fall, or the size of the PT Carton indus employee performance can be predicted Sumberjaya regression equation $\hat{Y} = .13.663 .148 X_1 + 1362X_2$

The correlation between the effect of position and motivation significantly influence the performance of acquired T employee count = 586 608, compared with the t table using a 5% error level values obtained t table = 0.254, so t count > t table (586 608 > 0.254), the Ho rejected and Ha accepted, meaning that there is influence between the post and the motivation to

Keywords: human resouced developmen (HRD) position, motivation, work performance the labor laws

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan struktur organisasi perusahaan ditinjau dari segi struktur garis, dengan satu dimensi tambahan berupa aktivitas staf ahli yang mendukung aktivitas

struktur garis dengan memfasilitasi pencapaian tujuan utama organisasi dari struktur garis masih ada. yang menjadi perbedaan utama adalah aktifitas garis berperan langsung, sementara aktivitas staf tidak dapat berperan langsung dalam pengambilan keputusan. Keberadaan mereka dibutuhkan sebagai supporting staff bagi manajer yang bertanggung jawab mengelola departemen yang dipimpinnya.

Dalam dunia kerja industri olahan peranan sumber daya manusia (SDM) sangat penting hubungannya antara jabatan yang bertugas memberikan wewenang kepanjangan tangan dari pimpinan sehingga termotivasi untuk bergerak sebagai leader untuk meningkatkan kinerja antara lower dan lini di setiap bagian PT Carton industri sumberjaya Tangerang .

Adapun konflik kepentingan sering terjadi terhadap sumber daya manusia (SDM) yang berasaskan asal pimpinan senang saling sikut menyikut antara bagian dari proses pengolahan sampai ke finishing good sehingga SDM (sumber daya manusia) tidak berkualitas menjamur dan silih berganti guna menempati bagian dari tingkat personalia sampai tingkat tenaga kerja karyawan.

Adapun permasalahan di atas penulis kutip sebagai berikut:

1. Di duga adanya pengaruh antara variabel X1 (jabatan) terhadap variabel Y kinerja pegawai.
2. Di duga adanya pengaruh antara variabel X2 (motivasi) terhadap variabel Y kinerja pegawai.
3. Di duga adanya pengaruh antara variabel jabatan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai.

B. KAJIAN LITERATUR

Struktur fungsional

Struktur organisasi/perusahaan yang mempunyai area spesialisasi sebagai dasar eksistensi sebagai departemen misalnya pada perusahaan industri area spesialisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : produksi, penjualan, pemasaran, keuangan, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Spesialis, biasanya dibawah jabatan manajer atau direktur keuangan mengatur tiap area fungsional. Mereka mempunyai wewenang garis pada bawahan di unit mereka

sendiri dan wewenang fungsional pada aktifitas departemen lain yang terkait dengan area spesialisasi mereka.

Struktur ini lazim ditemui pada perusahaan kecil dan menengah, yang memuaskan pengambilan keputusan pada tingkat tinggi, yang memuaskan pengambilan keputusan pada tingkat tinggi dari perusahaan.

Sekretaris

Salah satu divisi/posisi selalu terdapat dalam organisasi yang berkaitan dengan administrasi adalah sekretaris dan kesekretariatan, seiring dengan perkembangan zaman, peran seorang sekretaris tidak lagi hanya sebagai pelaksana administrasi, namun semakin berkembang dan memiliki posisi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan seseorang pimpinan dalam tugas administrasi maupun manajerial. Di kantor, sekretaris merupakan pusat informasi bagi satu departemen yang dilayaninya dan diharapkan tahu segala sesuatu yang berada dibawah wewenangnya.

susanto (2001) peran dari seorang sekretaris adalah Sebagai pusat informasi, sekretaris menjelaskan fungsi strategisnya di dalam organisasi dengan memberikan pengaruh positif pada status dan performansi perusahaan melalui kelancaran arus informasi internal maupun eksternal, selain itu, melalui peranan teknisnya sekretaris juga mampu menunjang kinerja pimpinan dengan menyalurkan informasi yang jelas dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pekerjaan Gomez –Mejia, dkk (2004) sebagai proses pengorganisasian pekerjaan kedalam tugas-tugas yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan.

Ada 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam merancang pekerjaan (gomez-mejia, dkk 2004) yaitu :

1. Penyederhanaan pekerjaan, pendekatan ini didasari oleh asumsi bahwa pekerjaan dapat diuraikan menjadi lebih sederhana, berupa tugas yang selalu berulang-ulang untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan administrasi meskipun penyederhanaan pekerjaan hampir sama dengan penyusunan kembali proses bisnis namun yang membedakan adalah pendekatan ini hanya menitik beratkan pada pekerjaan dan proses tertentu, bukan proses keseluruhan dari sebuah perusahaan.
2. Pemekaran pekerjaan, szilagyi (1980) dilakukan dengan memekarkan sebuah pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya

3. Pemer kaya pekerjaan, pendekatan ini dilakukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan menantang bagi seorang karyawan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan beberapa tugas khusus untuk dilakukan satu orang yang bertanggung jawab hingga selesainya proses pekerjaan.
4. Pemer kaya pekerjaan, pendekatan ini dilakukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan menantang bagi seorang karyawan
5. Desain pekerjaan berdasarkan tim, pendekatan ini dilakukan dengan memberikan wewenang bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan (situasional), motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal.

Sikap mental karyawan haruslah memiliki sikap mental yang siap sedia secara psikofisik (mental, fisik, situasi dan tujuan) artinya karyawan dalam bekerja secara mental sikap, fisik, sehat, memahami situasi dan kondisi serta berusaha keras mencapai target kerja

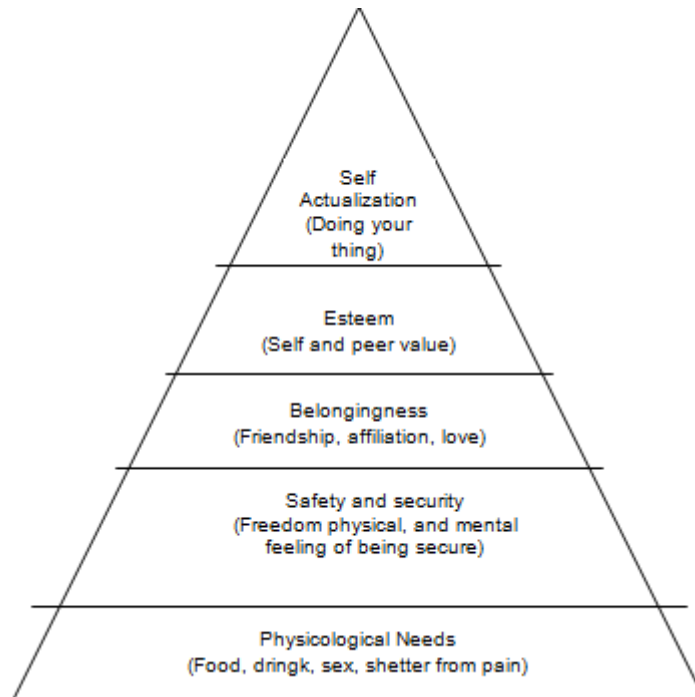
Secara psikologis, aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan kerja adalah sejauh mana pimpinan mampu mempengaruhi motivasi kerja SDM-nya agar mereka mampu bekerja produktif dengan penuh tanggung jawab. Hal ini karena beberapa alasan, antara lain:

1. Karyawan harus didorong untuk bekerja sama dalam organisasi.,
2. Karyawan harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan tuntutan kerja.,
3. Motivasi karyawan merupakan aspek yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan SDM dalam organisasi.

Teori motivasi dipahami agar pimpinan mampu mengidentifikasi apa yang memotivasi karyawan bekerja, hubungan perilaku kerja dengan motivasi dan mengapa karyawan berprestasi tinggi. Teori-teori motivasi dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori motivasi dengan pendekatan isi
2. Teori motivasi dengan pendekatan proses

3. Teori motivasi dengan pendekatan penguat



Abraham Maslow mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah.,
2. Kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup.,
3. Kebutuhan untuk rasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.,
4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain.,
5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensial, kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu.

Dari pengertian motivasi karyawan di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi karyawan merupakan sebagai sesuatu yang mendorong karyawan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi perusahaan atau organisasi.

Kinerja kerja

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode

tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Anwar Prabu Mangkunegara (2000,67) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sulistiyani (2003,223) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

Barry Cushway (2002,198) kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

C. METODE PENELITIAN

Menggunakan software SPSS versi 17.00 Analisa data merupakan serangkaian kegiatan mengolah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang kemudian dibentuk menjadi seperangkat hasil, baik berbentuk penemuan data baru maupun dalam bentuk lain. Dalam penelitian ini, akan mengalisis 3 variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi ganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana Y = kinerja pegawai

X_1 = jabatan

X_2 = motivasi

a = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

e = variabel pengganggu

D. PEMBAHASAN

Demografi responden berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah responden	Dalam Persentase
Pria	20	20% %
Wanita	40	40% %
Total	60	60%

Dari tabel diatas bahwa dari jumlah 60 respoden yang berjenis kelamin pria sebanyak 20 responden atau sebesar 20% dan yang wanita sebanyak 40 responden atau 40%

Demografi responden berdasarkan Usia.

Usia	Jumlah responden	Persentase
Usia 12 tahun s/d 25 tahun	35	35%
Usia 26 tahun s/d 35 tahun	25	25%
Jumlah	60	60%

Dari tabel diatas bahwa dari jumlah 60 respoden yang berusia 12 sampai 25 tahun sebanyak 35 responden, yang berusia 26 sampai dengan 35 tahun sebanyak 25 responden,

Demografi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Pendidikan	Jumlah responden	Dalam Persentase
SMP	15	15%
SMK	40	40%
Perguruan tinggi	5	5%
Jumlah	60	60%

Dari tabel diatas bahwa dari jumlah 60 respoden yang tamat SMP sebanyak 15 responden atau sebesar 15% , tamat SMK sebanyak 40 responden atau sebesar 40%, tamat perguruan tinggi sebanyak 5 responden atau 5%

Analisa statistik

a. Pengaruh analisa jabatan terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan komputer melalui program SPSS versi 17.00 diperoleh sebagai berikut:

Pengaruh analisa jabatan terhadap kinerja pegawai dilihat dari hasil perhitungan dalam model:

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.437 ^a	.191	.177	20.105582	.191	13.925	1	59	.000	1.361

a. Predictors: (Constant), jabatan

b. Dependent Variable: kinerjapegawai

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5628.793	1	5628.793	13.925	.000 ^a
	Residual	23849.832	59	404.234		
	Total	29478.625	60			

a. Predictors: (Constant), jabatan

b. Dependent Variable: kinerjapegawai

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.57876	23.040		2.512	.015					
	jabatan	2.558	.685	.437	3.732	.000	.437	.437	.437	1.000	1.000

a. Dependent Variable: kinerjapegawai

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara jabatan terhadap kinerja pegawai sebesar 0.437 korelasi sebesar 0.437 artinya ada pengaruh antara jabatan dengan kinerja pegawai cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika jabatan tinggi maka kinerja pegawai juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0,191 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh kinerja kerja karyawan terhadap meningkatkan kualitas pelayanan prima (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh motivasi kerja karyawan

terhadap meningkatkan kualitas pelayanan prima adalah 19,1 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 80,9%.

Dari tabel koefisien dapat dikatakan:

1. persamaan Regresi

$$\hat{Y} = 57.876 + 2.558 X_1$$

- a. 57.876 artinya jika tidak ada pengaruh jabatan terhadap kinerja pegawai.
- b. 2.558 artinya jika nilai jabatan bertambah sebesar satu satuan, maka kinerja pegawai bertambah.

2. Hasil uji hipotesis

T hitung = 3.732, dibandingkan dengan t tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai t tabel = 0,254 jadi t hitung > t tabel (3,732 > 0,254), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh antara jabatan terhadap kinerja pegawai.

b. Pengaruh analisa motivasi terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan komputer melalui program SPSS versi 17.00 diperoleh sebagai berikut:

Pengaruh analisa motivasi terhadap kinerja pegawai dilihat dari hasil perhitungan dalam model:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.976 ^a	.952	.952	4.877218	.952	1180.261	1	59	.000	1.792

a. Predictors: (Constant), motivasi

b. Dependent Variable: kinerjapegawai

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28075.177	1	28075.177	1180.261	.000 ^a
	Residual	1403.448	59	23.787		
	Total	29478.625	60			

a. Predictors: (Constant), motivasi

b. Dependent Variable: kinerjapegawai

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	18.061	1.467		12.308	.000					
	motivasi	1.346	.039	.976	34.355	.000	.976	.976	.976	1.000	1.000

a. Dependent Variable: kinerjapegawai

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0.976 korelasi sebesar 0.976 artinya ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pegawai cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika motivasi terhadap tinggi maka kinerja pegawai juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0,952 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,952 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 852%.

Dari tabel koefisien dapat dikatakan:

3. persamaan Regresi

$$Y = 18.061 + 1.346X_1$$

- 18.061 artinya jika tidak ada pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai
- 1,346 artinya jika nilai motivasi bertambah sebesar satu satuan, maka kinerja pegawai bertambah.

4. Hasil uji hipotesis

T hitung = 34.355 dibandingkan dengan t tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai t tabel = 0,254, jadi t hitung > t tabel ($34,355 > 0,254$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pegawai.

a. Pengaruh analisa jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan komputer melalui program SPSS versi 17.00 diperoleh sebagai berikut:

Pengaruh analisa jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai dilihat dari hasil perhitungan dalam model:

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.976 ^a	.953	.951	4.893128	.953	586.608	2	58	.000	
2	.976 ^a	.952	.952	4.877218	.000	.617	1	58	.435	1.792

a. Predictors: (Constant), motivasi, jabatan
b. Predictors: (Constant), motivasi
c. Dependent Variable: kinerjapegawai

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28089.948	2	14044.974	586.608	.000 ^a
	Residual	1388.677	58	23.943		
	Total	29478.625	60			
2	Regression	28075.177	1	28075.177	1180.261	.000 ^a
	Residual	1403.448	59	23.787		
	Total	29478.625	60			

a. Predictors: (Constant), motivasi, jabatan
b. Predictors: (Constant), motivasi
c. Dependent Variable: kinerjapegawai

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.13.663	5.790		2.360	.022					
	jabatan	.148	.189	.025	.785	.435	.437	.103	.022	.781	1.280
	motivasi	1.362	.044	.988	30.629	.000	.976	.970	.873	.781	1.280
2	(Constant)	18.061	1.467		12.308	.000					
	motivasi	1.346	.039	.976	34.355	.000	.976	.976	.976	1.000	1.000

a. Dependent Variable: kinerjapegawai

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 0.976 korelasi sebesar 0.976 artinya ada pengaruh antara jabatan dan motivasi, secara simultan kinerja pegawai cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika jabatan dan motivasi tinggi maka kinerja pegawai juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0.952 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai adalah 0.952 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 0,852%.

Dari tabel koefisien dapat dikatakan:

1. Persamaan Regresi

$$Y = 0.13.663 + .148 + 1.362 + e$$

a. = 13.663 artinya jika tidak ada pengaruh jabatan dan motivasi terhadap kinerja kerja pegawai.

b1 = 0,148 artinya jika nilai jabatan ditingkatkan sebesar satu kesatuan dengan asumsi kinerja pegawai konstan, maka kinerja pegawai bertambah.

$b_2 = 0, 1.362$ jika motivasi ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan asumsi motivasi kerja karyawan maka meningkatkan kualitas pelayanan prima bertambah.

2. Hasil uji hipotesis

T hitung = 586.608, dibandingkan dengan t tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai t tabel = 0,254, jadi t hitung > t tabel ($586.608 > 0,254$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Besarnya pengaruh secara simultan antara variabel jabatan (X_1) dan motivasi (X_2) terhadap kinerja kerja (Y) tergolong kuat. Sedangkan kontribusi secara bersama-sama (simultan) variabel X_1, X_2 terhadap (Y) = $R^2 \times 100\%$ atau $0, 952^2 \times 100\% = 906,3\%$ sedangkan sisanya 806,3% ditentukan oleh variabel lainnya, kemudian mengenai naik turunnya atau besar kecilnya kinerja pegawai PT Carton indus sumberjaya dapat diprediksi persamaan regresi $\hat{Y} = .13.663 + .148 X_1 + 1.362 X_2$ sehingga dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa sub kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa jabatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai PT Carton indus sumberjaya

Besarnya pengaruh variabel analisa jabatan terhadap kinerja pegawai adalah 0,116 sedangkan kontribusi variabel X_1 terhadap Y sebesar .191 % kemudian sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 80,1%. Informasi ini memberikan keterangan bahwa variabel jabatan memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja pegawai.

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa jabatan yang menjadi dedikasi karyawan/staff pada perusahaan (PT Carton indust sumberjaya) dalam tingkat atau kategori baik dan akan lebih mewujudkan kinerja yang optimal sehingga diharapkan akan mempengaruhi efektifitas kerja

2. motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai PT Carton indus sumberjaya.

Besarnya pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja pegawai adalah .951 adapun kontribusi variabel X_2 terhadap Y sebesar .952 sisanya 80,9 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 98,9%. Informasi ini memberikan keterangan bahwa variabel motivasi memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja pegawai.

Temuan penelitian ini menerangkan bahwa penerapan motivasi kepada karyawan/staf selama ini menunjukkan tingkat yang cukup baik dan mencerminkan tingkat kinerja pegawai yang baik pula, diharapkan akan mempengaruhi produktivitas kerja yang optimal.

Nilai korelasi antara pengaruh jabatan dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai didapat T hitung =586.608, dibandingkan dengan t tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai t tabel =0,254, jadi t hitung > t tabel (586.608>0,254), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara jabatan dan motivasi terhadap kinerja pegawai.

Saran

Dari kesimpulan diatas, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan untuk mencapai maksud dan tujuan kinerja pegawai PT Carton indust sumberjaya Tangerang, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pimpinan senantiasa meningkatkan kemampuan karyawan dalam meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan cara, memberikan kesempatan untuk mengikuti, kursus-kursus, seminar sumberdaya manusia atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik formal maupun informal, sehingga karyawan/staf dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
2. Pimpinan mengupayakan peningkatan tunjangan kesejahteraan karyawan/staf secara adil dan transparan.
3. Dalam menyambut era globalisasi dan perdagangan bebas melalui AFTA pimpinan hendaknya memilih karyawan/staff yang relevan dengan keahliannya dan profesional dalam bidangnya.
4. Dalam birokrasi dimanajemen PT Carton indust sumberjaya ditekan konflik horisontal guna kemajuan perusahaan tersebut dengan KKB (kesepakatan kerja bersama) serikat kerja
5. Peranan personalia keras kepala yang kaku atas tekanan pimpinan *otokratic* hendaknya mengacu undang-undang pancasila lebih mengenal akan psikologi, sikologi, fisikologi terhadap keberadaan karyawan harian lepas hendaknya tidak ada *diferensialisime* terhadap keberadaan kuli harian lepas (tidak jelas akan status) menjadi patner perusahaan menjadi aset saling menguntungkan (*mutualisme simbiosisme*).

DAFTAR PUSTAKA

Imam ghozali Msc *Aplikasi analisis multivariatedengan program SPSS Versi 7.00* badan penerbit universitas diponogoro

Jonni J Manurung (2005) *Ekonometrika Teori dan Aplikasi* Elekmedia komputindo Jakarta.

Malayu SP Hasibuan (2005) *organisasi dan motivasi dasar peningkatan produktivitas* Bumi aksara

Malayu SP Hasibuan (2005) *manajemen sumberdaya manusia* bumi aksara

Nina Rahmayanty (2010) *manajemen pelayanan prima* graha ilmu jogjakarta

Soekidjo notoatmodjo (2009) *pengembangan sumberdaya manusia* rineka cipta

RPSEP-54

PENGARUH TRUST, RISK AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODELS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DENGAN MINAT NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Dra. Wiwin Siswantini, MM /0018126007, Dra. Sri Ismulyaty, M.Si./0007056306

Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

wiwin@ut.ac.id

Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

srismu@ut.ac.id

Abstract

According to the WDR research, the growth of Internet users in Indonesia reached 105 % per year and is the highest growth among the countries in Asia after China (Boerhanoeddin, 2003, in the Ainur, 2007). There are six reasons why the internet is so popular technology. The sixth reason is to have internet connectivity and a broad range, can reduce communication costs, lower transaction costs can reduce agency cost, interactive, flexible, and easily, as well as having the ability to quickly distribute knowledge. The purpose of research is to determine the effect of trust , risk and technology acceptance models, perceived ease of use , perceived usefulness , perceived credibility, the customer interest in using internet banking? And how to influence customers' interest in the use of internet banking to the decision in dealing with internet banking? As well as how to influence customers' interest in using internet banking mediate the relationship between trust, risk and technology acceptance models with decisions in dealing with internet banking ? Discussion of the results of this research can take the conclusion as follows trust affects customers 'interest in using internet banking, risk affect customers' interest in using internet banking, ease of use, perceived influence on customers 'interest in using internet banking, usefulness perceived influence on customers' interest in using internet banking, perceived credibility of an effect on interest customers to use internet banking, customer interest in using internet banking affect the decision in the transaction, interest in the use of internet banking customers can mediate the relationship between trust, risk and technology acceptance models with decisions in dealing with internet banking.

Keywords : *trust, risk and technology acceptance decision model customer, customer interest as an intervening variable*

A. PENDAHULUAN

Menurut catatan WDR *research*, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencapai 105% per tahun dan merupakan pertumbuhan paling tinggi di antara negara-negara di Asia setelah China (Boerhanoeddin, 2003 dalam Ainur, 2007). Ada enam alasan mengapa teknologi internet begitu populer. Keenam alasan tersebut adalah internet memiliki konektivitas dan jangkauan yang luas, dapat mengurangi biaya komunikasi, biaya transaksi yang lebih rendah dapat mengurangi biaya *agency*, interaktif, fleksibel, dan mudah, serta memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pengetahuan secara cepat. Konsep yang dinilai salah satunya merupakan paradigma bisnis baru adalah *e-banking*. *E-banking* sebagai bidang kajian yang relatif masih baru dan akan terus berkembang, *e-banking* berdampak besar pada praktek perbankan, setidaknya dalam hal penyempurnaan pelayanan dan mempermudah akses perbankan.

Bagi pihak bank, *cyberbanking* memberikan alternatif yang lebih efisien dibandingkan *branch banking* (melayani nasabah di kantor cabang). Bank juga dapat memanfaatkannya untuk keperluan implementasi strategi *relationship marketing*. Selain itu, bank juga bisa melayani nasabah yang lokasinya susah dijangkau atau belum dilayani dengan kantor cabang yang bersangkutan. Bagi nasabah, layanan *cyberbanking* memberikan sejumlah manfaat seperti hemat biaya dan waktu, transaksi relatif aman, dan melakukan berbagai transaksi secara nyaman dan fleksibel tanpa terikat waktu (misalnya membayar tagihan listrik dan telepon, memeriksa saldo, mentransfer uang, membayar tagihan kartu kredit, mengajukan kredit dan layanan lainnya).

Internet banking memberikan keuntungan bagi nasabah maupun bank. Bagi nasabah, *internet banking* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan dari menyediakan layanan *internet banking* bagi bank adalah *internet banking* bisa menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur dibanding membuka outlet ATM, contohnya klik bca saat ini telah menggantikan fungsi 160 ATM dan menghemat biaya pencetakan formulir yang harus diisi nasabah untuk bertransaksi, brosur, katalog, dan menggantinya dengan data elektronik (Sutadi, 2001 dalam Sri Maharsi, 2006). Tetapi *internet banking* juga membuka peluang timbulnya kejahatan menggunakan *internet banking*. Seberapa besar tingkat keamanan dan kerahasiaan data-data pribadi maupun keuangan dalam *internet banking* seringkali dipertanyakan oleh nasabah sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan *internet banking*.

Untuk melihat kesuksesan dalam penerapan *internet banking* harus memperhatikan aspek perilaku. Aspek perilaku tersebut tercermin dalam *Technology Acceptance Model* yang

dikembangkan oleh Davis (1986 dalam Sri Maharsi dan Yuliani Mulyadi, 2007). Konsep tersebut digunakan untuk melihat pengaruh variabel *perceived ease of use* (persepsi kemudahan untuk menggunakan), *perceived usefulness* (persepsi pada daya guna), variabel *perceived of credibility* (sikap pengguna) terhadap *behavior intention* (minat untuk menggunakan) teknologi informasi. Selain variabel tersebut yang tidak kalah penting yaitu resiko (*risk*) dan kepercayaan (*trust*) transaksi *internet banking* merupakan hal yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan transaksi maya (*virtual*) karena jarak, kemampuan teknologi dalam memfasilitasi transaksi, layanan yang tidak bertatap muka dengan *teller / customer service* dan banyak hal yang dipertimbangkan nasabah bank dalam transaksi melalui *online banking* (Shergill dan Li, 2005). Variabel *risk* dan *trust* ditambahkan untuk melihat bagaimana perilaku nasabah bank untuk menggunakan *internet banking* ini. Dari latar belakang di atas maka peneliti bermaksud ingin meneliti tentang “Pengaruh Trust, Risk And Technology Acceptance Models (Tritam) Terhadap Keputusan Nasabah Dengan Minat Nasabah Sebagai Variabel Intervening”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *trust*, *risk and technology acceptance models*, *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, *perceived of credibility*, terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking? Dan bagaimana pengaruh minat nasabah dalam menggunakan internet banking terhadap keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking? Serta bagaimana pengaruh minat nasabah dalam menggunakan internet banking memediasi hubungan antara *trust*, *risk and technology acceptance models* dengan keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking?

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh *trust*, *risk and technology acceptance models*, *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, *perceived of credibility*, terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking? Dan bagaimana pengaruh minat nasabah dalam menggunakan internet banking terhadap keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking? Serta bagaimana pengaruh minat nasabah dalam menggunakan internet banking memediasi hubungan antara *trust*, *risk and technology acceptance models* dengan keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking? Kegunaan dari Penelitian ini bagi kalangan akademisi, dapat memberikan informasi secara ilmiah dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi pihak bank, diharapkan dapat menjadi masukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap minat pengguna *internet banking* dan keputusan bertransaksi.

Telaah Pustaka dari penelitian ini adalah tentang Pengertian Bank Menurut UU No. 10 tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. *Internet Banking* adalah kegiatan perbankan yang dilakukan secara online dalam hal ini adalah internet banking sifatnya lebih fleksibel karena tidak diatasi ruang dan waktu, sehingga nasabah dapat menjangkau layanan perbankan dari manapun dan kapanpun. Jadi, dapat dikatakan bahwa internet banking seperti kantor cabang suatu bank yang tidak berwujud karena semua kegiatan di dalamnya dilakukan secara *online*. Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*) *internet banking* merupakan manfaat yang diperoleh atau diharapkan oleh para nasabah dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Seseorang akan mengadopsi *internet banking* apabila orang tersebut mempercayai bahwa *internet banking* dapat memberikan manfaat terhadap pekerjaannya dan pencapaian prestasi kerjanya. Oleh karena itu, tingkat kemanfaatan *internet banking* mempengaruhi sikap para nasabah terhadap sistem tersebut. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Easy of Use*) adalah Pengertian perspektif memberikan indikasi bahwa suatu sistem dirancang bukan untuk menyulitkan pemakainya, akan tetapi penggunaan sistem justru mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, seseorang yang menggunakan sistem akan bekerja lebih mudah dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan sistem manual. Persepsi Kredibilitas (*Perceived Credibility*) adalah persepsi atas suatu kondisi yang dapat diberikan kepercayaan, karena memiliki kredibilitas yang baik. dalam penelitian ini, *perceived credibility* adalah persepsi terhadap kredibilitas *internet banking* yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan perbankan seperti reputasi, prestasi dan sebagainya. Resiko (*Risk*) adalah suatu keadaan *uncertainty* yang dipertimbangkan orang untuk memutuskan atau tidak melakukan transaksi secara *online*. Orang-orang benar-benar mempertimbangkan jarak dan suasana impersonal dalam transaksi *online* dan infrastruktur global yang banyak mengandung unsur resiko. Besarnya persepsi konsumen mengenai resiko memengaruhi besarnya kepercayaan mereka terhadap online bank dan sistem dari *online* bank tersebut sehingga ketika memproses informasi *online*, konsumen sering menganggap bahwa ada resiko yang tinggi walaupun resiko tersebut sebenarnya rendah (Mukherjee dan Nath, 2003). Kepercayaan (*Trust*) pada penyelenggara transaksi *online* (*banking/retailer/produsen*) dan kepercayaan pada mekanisme

operasional dari transaksi yang dilakukan. Upaya tinggi harus dilakukan oleh penyelenggara transaksi *online* agar kepercayaan konsumen semakin tinggi, karena *trust* mempunyai pengaruh besar pada niat konsumen untuk melakukan transaksi secara *online* atau tidak melakukannya. Minat menggunakan Internet Banking digambarkan sebagai hubungan secara online antar nasabah dan banking *online*. Penelitian ini mempertimbangkan minat untuk bertransaksi secara *online*, yaitu transfer antar rekening, pembayaran tagihan, informasi saldo, pembukaan dan penempatan deposito, dan lain sebagainya. Dalam TAM, faktor persepsi terhadap kemudahan untuk menggunakan teknologi dan persepsi terhadap daya guna sebuah teknologi berhubungan dengan sikap seseorang pada penggunaan teknologi tersebut. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku minat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya.

Pengembangan Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dasar dari penelitian Lui dan Jamieson (2003) serta penelitian Shergill dan Li (2005). Lui dan Jamieson menggunakan konsep TRITAM yang merupakan modifikasi dari model TAM, sedangkan Shergill dan Li meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *trust*. Berdasarkan penelitian Maharsi dan Fenny (2006) dapat diketahui Kepercayaan pengguna pada *internet banking* (TRU) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Trust* berpengaruh terhadap terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*.

Modifikasi model TAM juga dilakukan oleh Venkantesh (2002) dengan menambahkan variabel *trust* dengan judul : *Trust enhanced Technology Acceptance Model*. Modifikasi TAM lain yaitu *Trust and Risk in Technology Acceptance Model (TRITAM)* yang menggunakan variabel kepercayaan dan resiko bersama variabel TAM (Lui dan Jamieson, 2003). Berdasarkan penelitian Lui dan Jamieson (2003) dapat diketahui *perceived risk* memiliki pengaruh terhadap intensitas untuk bertransaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : *Risk* berpengaruh terhadap terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*.

Berdasarkan penelitian Lui dan Jamieson (2003) dapat diketahui *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* memiliki pengaruh terhadap intensitas untuk bertransaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : *Perceived ease of use* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking.

H₄ : *Perceived usefulness* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking.

Berdasarkan penelitian Maharsi dan Fenny (2006) dapat diketahui Kepercayaan pengguna pada *Perceived of credibility* terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : *Perceived of credibility* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking.

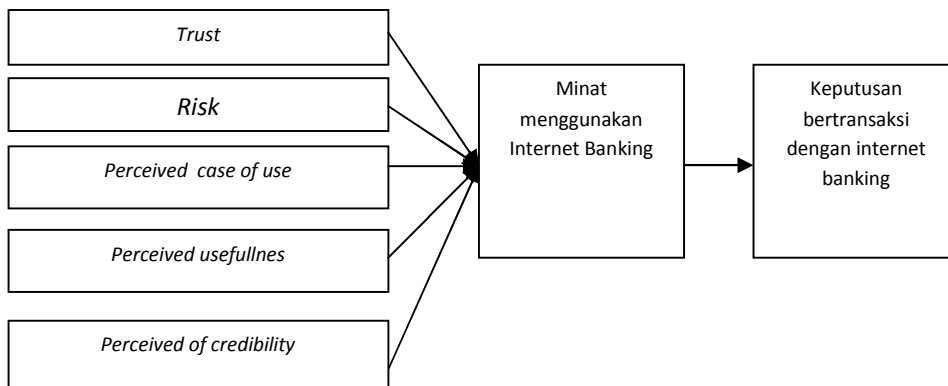
Keputusan seorang konsumen dalam melakukan transaksi dilatarbelakangi oleh minat. Setelah konsumen berminat tahap selanjutnya adalah melakukan pembelian. Berdasarkan penelitian Prabowo (2007) dapat diketahui bahwa minat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi, sehingga dirumuskan hipotesis:

H₆ : Minat nasabah dalam menggunakan internet banking berpengaruh terhadap keputusan dalam bertransaksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui adanya pengaruh trust, risk and technology acceptance models terhadap minat nasabah sebagai variabel intervening dan minat berpengaruh terhadap keputusan nasabah, maka disusun hipotesis.

H₇ : Minat nasabah dalam menggunakan internet banking dapat memediasi hubungan antara *trust, risk and technology acceptance models* dengan keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking.

Berdasarkan teori di atas, maka penulis menggunakan konsep TRITAM sehingga diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode dalam penelitian ini untuk obyek dan sasaran dilakukan pada perusahaan jasa perbankan yang menerapkan *internet banking* dan sasarannya adalah pengguna *internet banking* di Jabodetabek. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari responden secara langsung dari hasil pengisian kuesioner. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah bank umum maupun swasta yang pernah menggunakan *internet banking* di Jabodetabek. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu nasabah yang menggunakan *internet banking* serta mampu menjawab setiap butir pernyataan kuesioner yang diberikan dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Obyek dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa perbankan yang menerapkan *internet banking* dan sasarannya adalah pengguna *internet banking* di Jabodetabek

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari responden secara langsung dari hasil pengisian kuesioner.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen penelitian berupa kuesioner.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank umum maupun swasta yang pernah menggunakan *internet banking* di Jabodetabek. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu nasabah yang menggunakan *internet banking* serta mampu menjawab setiap butir pernyataan kuesioner yang diberikan dengan baik.

5. Definisi Operasional untuk penelitian

ini adalah :

- a. *Trust* (X1)
- b. *Risk* (X2)
- c. *Perceived easy of use* (X3)
- d. *Perceived usefullnes* (X4)
- e. *Perceived credibility* (X5)
- f. Keputusan (Y₂)
- g. Minat (Y₁)

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan cara :

Pengukuran Variabel, Uji Validitas, *Standardized loading* , *Structural Equation Modeling (SEM)*

Ada tujuh langkah yang harus dilakukan apabila menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)* (Ferdinand ; 2005): ada tahapan-tahapannya adalah :

- a. Pengembangan model teoritis
- b. Pengembangan diagram alur (*path diagram*).
- c. Konversi diagram alur ke dalam persamaan

d. Memilih matrik input dan estimasi model menggunakan matriks varians/kovarians atau matrik korelasi untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan.

e. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi

f. Evaluasi kriteria *goodness of fit*

Pada tahap yang terakhir adalah menginterpretasikan model dan memodifikasi model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji- t untuk melihat signifikansi koefisien regresi yang dihasilkan oleh berbagai hubungan kausalitas dalam model. Pengujian mediasi dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982 dalam Ghozali, 2009 : 220-221) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test).

Pembahasan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pada Hipotesis pertama menyatakan *trust* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui adanya pengaruh yang positif *trust* terhadap minat menggunakan internet banking. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maharsi dan Fenny (2006) dapat diketahui kepercayaan pengguna pada *internet banking* (TRU) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan *internet banking*.

Hipotesis kedua menyatakan *risk* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel *risk* memiliki pengaruh yang negatif terhadap minat menggunakan internet banking, yaitu semakin tinggi risiko maka akan semakin rendah minat menggunakan internet banking. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel *risk* terhadap minat menggunakan internet banking. Hasil penelitian ini ada kesesuaian dengan penelitian Lui dan Jamieson (2003) dapat diketahui *perceived risk* memiliki pengaruh terhadap intensitas untuk bertransaksi.

Pengujian hipotesis ketiga dan keempat merupakan pengembangan dari hasil penelitian Lui dan Jamieson (2003) dapat diketahui *perceived case of use* dan *perceived usefullnes* memiliki pengaruh terhadap intensitas untuk bertransaksi. Hipotesis ketiga dan keempat tersebut adalah *perceived case of use* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking dan *perceived usefullnes* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui *perceived case of use* memiliki pengaruh yang positif terhadap minat menggunakan internet banking, yaitu semakin baik *perceived case of use* maka akan mengakibatkan minat menggunakan internet banking semakin tinggi. Hasil penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan terdapat pengaruh positif dari variabel *perceived usefullnes* terhadap minat menggunakan internet banking, artinya semakin baik *perceived usefullnes*, maka minat menggunakan internet banking juga akan semakin kuat.

Hipotesis kelima menyatakan *perceived of credibility* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel *perceived of credibility* terhadap minat menggunakan internet banking. Hasil penelitian ini ada kesesuaian dengan penelitian Maharsi dan Fenny (2006) dapat diketahui Kepercayaan pengguna pada *Perceived of credibility* terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan *internet banking*.

Hipotesis keenam menyatakan minat nasabah dalam menggunakan internet banking berpengaruh terhadap keputusan dalam bertransaksi. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel minat menggunakan internet banking memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan internet banking, yaitu semakin kuat minat menggunakan internet banking maka akan mengakibatkan keputusan bertransaksi dengan menggunakan internet banking semakin baik. Hasil penelitian ini ada kesesuaian dengan penelitian Prabowo (2007) dapat diketahui bahwa minat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi.

Hipotesis ketujuh menyatakan minat nasabah dalam menggunakan internet banking dapat memediasi hubungan antara *trust, risk and technology acceptance models* dengan keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui minat dapat memediasi *trust, risk, perceived case of use*, dan *perceived usefullnes* dengan keputusan menggunakan internet banking, sedangkan variabel *perceived of credibility* tidak dapat dimediasi oleh minat terhadap keputusan menggunakan internet banking.

C. PEMBAHASAN

Hipotesis pertama menyatakan *trust* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui terdapat pengaruh yang positif *trust* terhadap minat menggunakan *internet banking*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maharsi dan Fenny (2006) dapat diketahui kepercayaan pengguna pada *internet banking* (TRU) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan *internet banking*.

Hipotesis kedua menyatakan *risk* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel *risk* memiliki pengaruh yang negatif terhadap minat menggunakan *internet banking*, yaitu semakin tinggi risiko maka akan semakin rendah minat menggunakan *internet banking*. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel *risk* terhadap minat menggunakan *internet banking*. Hasil penelitian ini ada kesesuaian dengan penelitian Lui dan Jamieson (2003) dapat diketahui *perceived risk* memiliki pengaruh terhadap intensitas untuk bertransaksi.

Pengujian hipotesis ketiga dan keempat merupakan pengembangan dari hasil penelitian Lui dan Jamieson (2003) dapat diketahui *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* memiliki pengaruh terhadap intensitas untuk bertransaksi. Hipotesis ketiga dan keempat tersebut adalah *perceived ease of use* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking* dan *perceived usefulness* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui *perceived ease of use* memiliki pengaruh yang positif terhadap minat menggunakan *internet banking*, yaitu semakin baik *perceived ease of use* maka akan mengakibatkan minat menggunakan *internet banking* semakin tinggi. Hasil penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan terdapat pengaruh positif dari variabel *perceived usefulness* terhadap minat menggunakan *internet banking*, artinya semakin baik *perceived usefulness*, maka minat menggunakan *internet banking* juga akan semakin kuat.

Hipotesis kelima menyatakan *perceived of credibility* berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel *perceived of credibility* terhadap minat menggunakan *internet banking*. Hasil penelitian ini ada kesesuaian dengan penelitian Maharsi dan Fenny (2006) dapat diketahui Kepercayaan pengguna pada *Perceived of credibility* terbukti

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan *internet banking*.

Hipotesis keenam menyatakan minat nasabah dalam menggunakan internet banking berpengaruh terhadap keputusan dalam bertransaksi. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel minat menggunakan internet banking memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan internet banking, yaitu semakin kuat minat menggunakan internet banking maka akan mengakibatkan keputusan bertransaksi dengan menggunakan internet banking semakin baik. Hasil penelitian ini ada kesesuaian dengan penelitian Prabowo (2007) dapat diketahui bahwa minat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi.

Hipotesis ketujuh menyatakan minat nasabah dalam menggunakan internet banking dapat memediasi hubungan antara *trust, risk and technology acceptance models* dengan keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui minat dapat memediasi *trust, risk, perceived ease of use*, dan *perceived usefulness* dengan keputusan menggunakan internet banking, sedangkan variabel *perceived credibility* tidak dapat dimediasi oleh minat terhadap keputusan menggunakan internet banking.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

Trust berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*.

Risk berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan *internet banking*.

Perceived ease of use berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking.

Perceived usefulness berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking.

Perceived credibility berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking.

Minat nasabah dalam menggunakan internet banking berpengaruh terhadap keputusan dalam bertransaksi.

Minat nasabah dalam menggunakan internet banking dapat memediasi hubungan antara *trust, risk and technology acceptance models* dengan keputusan dalam bertransaksi dengan internet banking.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofiq. 2007. *Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce*. Tesis S2. FE Universitas Brawijaya Malang.
- Ferdinand, Agustus.2005. *Structural Equation Modeling*. Edisi ketiga. BP UNDIP, Semarang
- Imam Ghozali, 2009, *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lui Hung Kit dan Rodger Jamieson, 2003. *Tritam: a model for integrating trust and risk perceptions in bussiness to consumer Electronic Commerce*. 16 th Bled E-Commerce Conference e- Transformation, Slovenia.
- Mukherjee, A. and Nath, P. 2003. A Model of Trust in Online Relationship Banking. *The International Journal of Bank Marketing Bradford*, 21 (1), 5. March 10, 2005. <http://proquest.umi.com/pqdweb?>
- Shergill, G.S. and Li, B. 2005. *Internet Banking-An Empirical Investigation Of Customer's Behaviour for online Banking in New Zealand(online)*. Agustust 5, 2005. http://www.Business.massey.ac.nz/commerce/research_outputs/2004/2004011.pdf.
- Sri Maharsi dan Fenny. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan dan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pengguna Internet Banking di Surabaya*. <http://petra.ac.id> 30 November 2008.
- Sri Maharsi dan Yuliani Mulyadi. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)*. <http://petra.ac.id> 30 November 2008

RPSEP-55

**PENGARUH STRESSOR TERHADAP STRES KERJA DAN KINERJA
KARYAWAN PADA KARYAWAN UNIVERSITAS TERBUKA (UT)**

Etty Susanty
Ami Pujiwati
Helmiatin

Manajemen Fekon Universitas Terbuka

Abstrak: Ketidaksesuaian antara pekerjaan dan kemampuan seringkali memicu timbulnya stres dalam pekerjaan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan kemampuan karyawan dapat memicu timbulnya stres dalam diri karyawan. Ditambah beban kerja yang berlebihan dan ketersediaan waktu yang tidak cukup akan semakin cepat menjadi pemicu terjadinya stres. Dalam dunia kerja sering muncul berbagai masalah sehubungan dengan stres kerja. Namun stres secara ilmiah tidak senantiasa merupakan kondisi yang negatif yakni sesuatu yang mengarah kepada timbulnya penyakit fisik maupun mental serta perilaku tidak wajar (*distress*). Stres juga merupakan kekuatan positif (*eustress*) yang diperlukan untuk menghasilkan prestasi tinggi. Sampai titik tertentu, bekerja dengan tekanan batas waktu (*deadline*) dapat merupakan proses kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari faktor-faktor yang menjadi pembangkit stress (stressor) dan menganalisis seberapa besar pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan UT. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah SEM dengan *SmartPLS*. Sampel yang digunakan sebanyak 134 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stressor kerja berpengaruh secara signifikan terhadap stress kerja sebesar 11,335, stressor kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien sebesar 0,756, dan pengaruh secara signifikan terhadap kinerja sebesar 1,690. Interelasi terbesar stressor direfleksikan oleh *role overload* dan *time availability*, *stres kerja* direfleksikan oleh emosional dan sikap/perilaku serta kinerja direfleksikan oleh keandalan, kerjasama, kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, dan pengetahuan.

Kata kunci: *Stressor, stress kerja, kinerja*

A. PENDAHULUAN

Tujuan perusahaan dan tujuan karyawan memiliki kepentingan yang tidak dapat dipisahkan karena berada dalam satu kesatuan yang utuh. Tujuan dan harapan karyawan terhadap perusahaan seringkali terjadi kesenjangan (gap) dengan realita yang ada. Kesenjangan ini dapat menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada

di dalam perusahaan. Masalah-masalah SDM yang timbul tentunya akan mempengaruhi kinerja karyawan.

Kinerja karyawan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi pada perusahaan, yang meliputi pemangku kepentingan eksternal (stakeholder) dan kepentingan internal (karyawan) yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja yang optimal dapat diperoleh perusahaan dari keberadaan karyawan apabila perusahaan Guna memperoleh kinerja yang optimal dari keberadaan karyawan dalam perusahaan maka perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat, yaitu dengan memikirkan bagaimana mengelola karyawan agar mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan (Mangkuprawira, 2009). Kinerja karyawan pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal yakni kemampuan, keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Karyawan yang tidak mengetahui ketiga faktor ini maka kinerja yang baik tidak akan tercapai. Dengan kata lain, kinerja karyawan dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan.

Ketidaksesuaian antara pekerjaan dan kemampuan seringkali memicu timbulnya stres dalam pekerjaan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan kemampuan karyawan dapat memicu timbulnya stres dalam diri karyawan. Ditambah beban kerja yang berlebihan dan ketersediaan waktu yang tidak cukup akan semakin cepat menjadi pemicu terjadinya stres. Stres merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja dan produktivitas karyawan.

Suatu studi mengungkapkan bahwa perusahaan kehilangan penghasilan sebesar US\$68 milyar per tahun karena turunnya produktivitas sebagai efek dari stres karyawan (Gibson.et.al,1993).

Biaya-biaya tersebut termasuk tunjangan kesehatan (ketika sakit), biaya perawatan inap dan opname, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan produktivitas yang menurun. Para pekerja yang telah dilatih dalam jangka waktu yang lama, dengan biaya yang sangat besar, mungkin akan mengalami stres ketika mendapat tekanan dalam pekerjaannya. Kemudian mereka mungkin membuat keputusan yang dangkal seperti absen dan tidak bekerja selama beberapa hari, mulai menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan, bahkan sampai meninggal dan harus diganti oleh

pekerja lainnya yang membutuhkan pelatihan kembali. Biaya-biaya yang timbul akibat stress akan menambah beban biaya perusahaan (Greenberg, 2004).

Tugas pokok Universitas Terbuka (UT) adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu berdasarkan sistem jarak jauh. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UT mempunyai fungsi antara lain; melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi, melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan tenaga administrasi hubungannya dengan lingkungan, melaksanakan kegiatan layanan administratif, terkait dengan Tupoksi UT tersebut karyawan dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Dalam pemberian layanan tersebut, tidak terlepas dari permasalahan teknis atau non teknis yang akan menimbulkan dampak stress pada setiap karyawan.

Dilihat dari tugas yang diemban oleh karyawan UT, tentunya beban kerja dan jenis pekerjaan yang sangat menuntut PNS-nya memiliki keterampilan khusus untuk menangani pekerjaan tersebut. Tidak menutup kemungkinan stres akan dialami oleh karyawan harus memiliki keterampilan khusus dan tanggung jawab tupoksi yang cukup berat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini yakni Bagaimana pengaruh stressor terhadap stress kerja dan kinerja karyawan UT, faktor-faktor apa yang menjadi stressor bagi stress kerja dan kinerja karyawan UT dan Bagaimana pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan UT. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari faktor-faktor yang menjadi pembangkit stress (stressor) dan menganalisis seberapa besar pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan UT.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pimpinan Karyawan UT untuk mengantisipasi semua kejadian yang potensial menimbulkan stress mengingat dampak negatif stress bisa merugikan perusahaan. Pengetahuan stress juga bisa dimanfaatkan pimpinan untuk mengatasi persoalan stress agar stress bisa berubah menjadi eustress. Dimana eustress sangat bermanfaat bagi diri seseorang untuk mengembangkan diri, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Stress

Kata stress berasal dari bahasa Latin *Stringer* yang berarti menarik secara kencang. Dalam ilmu fisika dan teknik telah diketahui secara luas bahwa tekanan akan menghasilkan ketegangan dan akhirnya menyebabkan sesuatu bias patah/retak. Demikian juga dalam ilmu kedokteran kita sering mendengar istilah orang yang sarafnya putus disebabkan karena ketegangan berlebihan. Konsep inilah yang kemudian diadopsi oleh para *behavioral scientist* untuk menjelaskan konsep stres.

Ivancevich (1987) menyatakan stress merupakan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Stres juga sering didefinisikan sebagai respon tidak spesifik dari tubuh manusia terhadap lingkungan eksternalnya (Jams, 1986). Dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab munculnya stres karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang ditindaklanjuti oleh respon individual terhadap interaksi tersebut. Penjelasan ini juga mengatakan bahwa stres merupakan fenomena individual, bukan fenomena kelompok atau organisasional meskipun kelompok dan organisasi merupakan penyebab terjadinya stres.

Kinerja

Kinerja didefinisikan sebagai salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai '*thing done*' dalam satuan organisasi. Kinerja hakekatnya suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999).

Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara (2000) menegaskan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Keduanya menganggap, bahwa kinerja merupakan parameter bagi pengukuran akuntabilitas bagi individu sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Baik

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas individu dalam suatu organisasi ditentukan oleh kinerja yang dicapainya selama kurun waktu tertentu.

Penelitian terdahulu

Penelitian Rahmawati (2009) yang menjadi faktor-faktor penyebab stress kerja (stressor) karyawan PT BRI (Persero) Tbk Bogor terdiri dari tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi dan tahap hidup organisasi. Shaikh *et al.* (2011) dalam risetnya untuk manager pabrik di Pakistan bahwa konflik pekerjaan dan ketidakjelasan peran berhubungan positif dan signifikan dengan stress kerja manager dan stress kerja berhubungan negatif dan signifikan dengan kepuasan kerja. Makhbul (2009) dalam jurnal “*Work Stress Issues in Malaysia*” mengemukakan bahwa kesehatan, tempat kerja, shift kerja, sistem kelembaban dan faktor jam kerja berhubungan signifikan dengan hasil stress kerja.

Wheatley (1990) mengemukakan bahwa reaksi individu terhadap sumber stres dapat terlihat dari satu atau pada beberapa aspek kehidupannya. Aspek-aspek kehidupan tersebut adalah: aspek kebiasaan sosial, hubungan sosial, kehidupan seksual dan kebiasaan tidur individu. Adapun reaksi-reaksi tersebut antara lain: pada saat individu menanggapi kejadian-kejadian hidup yang dialami, kondisi jantung setiap individu serta adanya simptom-simptom psikiatrik. Selain itu ada aspek-aspek khusus lainnya, yaitu aspek khusus bagi wanita: tentang siklus menstruasi dan aspek khusus bagi mereka yang berusia lanjut. Stres pada satu aspek kehidupan dapat berpengaruh pada aspek kehidupan lainnya, misalnya stres pada pekerjaan (yang termasuk aspek kehidupan sosial) dapat mempengaruhi aspek kebiasaan tidur, aspek kehidupan seksualnya, atau mempengaruhi kesehatan jantungnya.

Studi dari Kahn *et al.* (1964) menyelidiki variabel-variabel pemicu stres (stressor) yaitu ketidakjelasan peran (*role ambiguity*), beban kerja berlebih (*role overload*) dan konflik pekerjaan (*role conflict*). Pada saat individu berinteraksi dengan aktor lain (pelanggan, atasan atau rekan kerja) untuk memperoleh informasi (arah dan bantuan); harapan dan permintaan aktor-aktor tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber stres. Sumber stres tersebut dirasakan ketika individu merasakan adanya permasalahan, atau ketidaksesuaian (antar permintaan masing-

masing aktor), ketidakjelasan (mengenai harapan yang dibebankan kepadanya), atau beban berlebih (dari permintaan dan harapan tiap-tiap aktor).

Kerangka Pemikiran Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka dan permasalahan, maka ada 3 variabel yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel bebas yang dimaksud adalah stressor (X) yakni sumber atau pembangkit stress kerja yang terdiri dari ketidakjelasan peran (*role ambiguity*), konflik pekerjaan (*role conflict*), beban kerja berlebih (*role overload*), ketersediaan waktu (*time availability*), pengembangan karir (*carrer development*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Ketidakjelasan peran (X_1) yaitu hal yang dirasakan ketika tidak ada informasi yang jelas yang dibutuhkan seorang pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka; ketidakjelasan peran bisa juga harapan yang tidak tentu. Konflik pekerjaan (X_2), yaitu hal yang terjadi ketika seorang pekerja mempercayai bahwa harapan dan permintaan dua atau lebih aktor (seperti atasan atau pelanggan) bertentangan dengan keinginan aktor yang lain. Beban kerja berlebih (X_3), yaitu hal yang terjadi ketika seorang pekerja merasa bahwa peranannya dalam melaksanakan tugas melebihi kemampuannya (Kahn *et al.*, 1964). Ketersediaan waktu (X_4) adalah waktu yang tersedia untuk mengerjakan pekerjaan, pengembangan karir (X_5) adalah kesempatan karyawan untuk mengembangkan karirnya dan tanggung jawab (X_6) adalah tanggung jawab atas pekerjaan (Milbourn, 2006).

Sedangkan untuk variabel terikat atau tergantung yaitu ada 2 yakni stress kerja (Y1) dan kinerja (Y2). Stres kerja dapat diukur dengan emosional ($Y_{1.1}$) dan sikap atau perilaku ($Y_{1.2}$). Sedangkan Marifah (2004) merujuk kinerja dari beberapa pendapat seperti Livine.,*et.al* (1990), Schuler (1996), Mink (1993), Vincent Caspersz (2002). Dari pendapat beberapa pakar tersebut, Marifah (2004) menyimpulkan bahwa kinerja diukur melalui: (1) Keandalan ($Y_{2.1}$), yaitu kemampuan dan keandalan dalam melaksanakan tugasnya baik dalam menjalankan peraturan maupun inisiatif dan disiplin. (2), yaitu kemampuan pekerja dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan. Kehadiran ($Y_{2.2}$) yaitu aktivitas pekerja di dalam kegiatan-kegiatan rutin kantor, rapat-rapat atau kehadiran di tengah-tengah klien yang membutuhkannya. (3) Kerjasama ($Y_{2.3}$), yaitu bagaimana pekerja dapat bekerja dengan orang

lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. (4) Kualitas pekerjaan ($Y_{2.4}$), yaitu ketelitian dan kerapian bekerja, kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja. (5) Kuantitas pekerjaan ($Y_{2.5}$), yaitu kemampuan secara kuantitatif dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru. (6) Pengetahuan ($Y_{2.6}$), yaitu kemampuan pekerja dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini dimana konstruk/variabel dapat diukur dengan melihat dimensi. Dimensi tersebut merupakan konstruk *first order* sedangkan stressor, stres kerja karyawan dan kinerja karyawan merupakan konstruk *second order*. Adapun Tabel 3.1 menunjukkan bahwa konstruk penelitian ini adalah konstruk dengan multidimensi.

Tabel 1
Konstruk/Variabel dan Item Pertanyaan

Konstruk <i>Second Order</i>	Konstruk <i>First Order</i>	Item Pertanyaan
Stressor (X)	<i>role ambiguity</i> (X_1)	X _{1.1} mengerjakan tugas yang penting dan berhubungan dengan pekerjaan utama
		X _{1.2} kekurangan wewenang untuk bisa melaksanakan tanggung jawab pekerjaan
		X _{1.3} mengetahui kinerja apa yang diharapkan
		X _{1.4} memahami sumbangan pekerjaan terhadap pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.
	<i>role conflict</i> (X_2)	X _{2.1} tugas dan pekerjaan yang dikerjakan jelas.
		X _{2.2} posisi terjepit di antara atasan dan teman sekerja
		X _{2.3} instruksi kerja secara formal tidak melekat di perusahaan ini.
		X _{2.4} mendapat tugas dan pekerjaan yang konflik dari dua atau lebih karyawan.
	<i>time availability</i> (X_3)	X _{3.1} harus membawa pulang pekerjaan ke rumah.
		X _{3.2} banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti rapat-rapat.
		X _{3.3} diberi banyak tugas sehingga susah mengaturnya.
		X _{3.4} mendapat banyak tugas pekerjaan yang tak mungkin dapat diselesaikan dalam satu hari normal.

Konstruk <i>Second Order</i>	Konstruk <i>First Order</i>	Item Pertanyaan
		X _{3,5} merasa memiliki waktu untuk mengambil cuti istirahat
		X _{3,6} memiliki cukup pelatihan atau pengalaman untuk menjalankan tugas pekerjaan.
	<i>role overload</i> (X ₄)	X _{4,1} tuntutan terhadap kualitas pekerjaan masuk akal.
		X _{4,2} tuntutan terhadap kualitas pekerjaan masuk akal.
		X _{4,3} perusahaan menuntut lebih dari kemampuan yang miliki.
	<i>carrer development</i> (X ₅)	X _{5,1} mendapat kesempatan untuk memajukan perusahaan ini.
		X _{5,2} mengharap promosi hanya bisa mendapatkannya di perusahaan lain, bukan di perusahaan ini.
		X _{5,3} merasa karier saya akan maju jika tinggal terus di perusahaan ini.
		X _{5,4} memiliki sedikit peluang untuk maju maupun mendapat pengetahuan dan keterampilan baru di pekerjaan
		X _{5,5} merasa karier sudah mentok.
	<i>responsibility</i> (X ₆)	X _{6,1} dibebani tanggung jawab untuk membimbing karyawan lain.
		X _{6,2} tanggungjawab diperusahaan ini lebih banyak berurusan dengan orang-orang daripada ke pekerjaan.
		X _{6,3} bertanggung jawab terhadap masa depan karyawan lain.
		emosional (Y _{1,1})
Y _{1,1,2} membuat keputusan secepatnya pada saat kritis.		
Y _{1,1,3} merasakan ada persaingan untuk maju dalam melaksanakan pekerjaan.		
Y _{1,1,4} sering mengalami perubahan antara aktivitas yang membosankan dengan yang menantang.		

Konstruk <i>Second Order</i>	Konstruk <i>First Order</i>	Item Pertanyaan	
Stres Kerja Karyawan (Y₁)		Y _{1.1.5} mengerjakan tugas administrasi secara berlebihan.	
		Y _{1.1.6} merasakan kurang jam istirahat dalam melakukan pekerjaan.	
		Y _{1.1.7} merasakan ada konflik dengan bagian (departemen) lain dalam menyelesaikan pekerjaan.	
		Y _{1.1.8} merasakan kurang ada kesempatan untuk maju atau menduduki jenjang karier yang ada dalam perusahaan.	
		Y _{1.1.9} merasa kurang dukungan dari atasan.	
		Y _{1.1.10} Pekerjaan yang kurang baik kurang dapat pengakuan.	
		Y _{1.1.11} merasa pendapatan saya kurang memadai	
		Y _{1.1.12} merasa pengawasan atasan yang buruk dan kurang memadai.	
		Y _{1.1.13} mempunyai rekan sekerja yang rendah motivasinya.	
		sikap/perilaku (Y_{1.2})	Y _{1.2.1} sering melakukan tugas dan pekerjaan yang dirasakan tidak cocok.
			Y _{1.2.2} sering melaksanakan kerja lembur
			Y _{1.2.3} melakukan tugas pekerjaan baru atau yang kurang saya mengerti.
			Y _{1.2.4} menghadapi situasi kritis dalam menyelesaikan pekerjaan.
	Y _{1.2.5} melakukan pekerjaan di luar tugas yang seharusnya dikerjakan.		
	Y _{1.2.6} melakukan pekerjaan untuk karyawan lain.		
	Y _{1.2.7} Rekan sekerja tidak mau melakukan kerja.		
	Y _{1.2.8} bekerja dengan peralatan yang tidak memadai atau kurang baik.		
	Y _{1.2.9} merasa kesulitan bergaul dengan		

Konstruk <i>Second Order</i>	Konstruk <i>First Order</i>	Item Pertanyaan
		<p>atasan.</p> <p>Y_{1.2.10} merasa kurangnya karyawan untuk menangani suatu tugas dengan memadai.</p> <p>Y_{1.2.11} kurang diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.</p>
Kinerja Karyawan (Y ₂)	keandalan (Y_{2.1})	<p>Y_{2.1.1} selalu dibutuhkan oleh klien dalam memecahkan suatu permasalahan.</p> <p>Y_{2.1.2} sering dimintai pertimbangan oleh pimpinan dalam menangani suatu permasalahan.</p> <p>Y_{2.1.3} Selama ini mempunyai kemampuan dan kesediaan menyelesaikan tugas jabatan yang lebih berat daripada yang telah biasa dilaksanakan sehari-hari</p> <p>Y_{2.1.4} berusaha keras meningkatkan prestasi kerja</p>
	kehadiran (Y_{2.2})	<p>Y_{2.2.1} datang ke kantor dengan tepat waktu.</p> <p>Y_{2.2.2} selalu menepati waktu dalam melaksanakan tugas walaupun itu jadwalnya malam hari.</p> <p>Y_{2.2.3} seringkali merasa tidak punya waktu untuk bersenang-senang dan bersantai.</p>
	kerjasama (Y_{2.3})	<p>Y_{2.3.1} bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas-tugas jabatan dengan menerima resiko atas kegagalan dari pelaksanaan tugas-tugas jabatan tersebut..</p> <p>Y_{2.3.2} menganggap diri sebagai bagian dari tim/kelompok dalam pekerjaan</p> <p>Y_{2.3.3} berusaha untuk bekerja dalam kelompok.</p>
	kualitas pekerjaan (Y_{2.4})	<p>Y_{2.4.1} mampu membuat keputusan yang dapat menjawab permasalahan dalam waktu tertentu.</p> <p>Y_{2.4.2} merasa bertanggung jawab atas pengembangan dan berniat mengevaluasi diri secara terus menerus.</p>

Konstruk <i>Second Order</i>	Konstruk <i>First Order</i>	Item Pertanyaan
		<p>Y_{2.4.3} mau mengambil resiko dan berpikir keras untuk selalu dapat bekerja dengan baik.</p> <p>Y_{2.4.4} mempunyai kemampuan dan kesediaan bekerja secara proaktif, kreatif dan inovatif melalui penyajian gagasan-gagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja jabatan atau unit kerja .</p> <p>Y_{2.4.5} selalu berusaha mencoba melakukan pekerjaan yang sulit dan penuh tantangan.</p> <p>Y_{2.4.6} selalu berusaha memahami data-data dan informasi yang menjadi tanggung jawab.</p>
	kuantitas pekerjaan (Y_{2.5})	<p>Y_{2.5.1} biasanya bekerja sesuai dengan target yang telah saya tentukan.</p> <p>Y_{2.5.2} dalam melakukan tugas atau suatu pekerjaan selalu berorientasi pada keberhasilan.</p> <p>Y_{2.5.3} ketika sedang bekerja, tuntutan untuk berhasil mengerjakannya sangat tinggi.</p> <p>Y_{2.5.4} merasa menikmati jika diberi beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari yang dilakukan saat ini.</p> <p>Y_{2.5.5} merasa senang jika prestasi unit kerja lain dapat terlihat oleh unit kerja, sehingga dapat diperbandingkan dengan hasil kerja di tempat.</p> <p>Saya bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas-tugas jabatan dengan menerima resiko atas kegagalan dari pelaksanaan tugas-tugas jabatan tersebut.</p>
	pengetahuan (Y_{2.6})	<p>Y_{2.6.1} selalu mengenali suatu permasalahan yang ada di lingkungan.</p> <p>Y_{2.6.2} mengerti visi, misi dan tujuan perusahaan.</p> <p>Y_{2.6.3} mempunyai pengetahuan atas ruang</p>

Konstruk <i>Second Order</i>	Konstruk <i>First Order</i>	Item Pertanyaan
		lingkup serta keterkaitan tugas-tugas jabatan saya dengan jabatan-jabatan lain di dalam atau di luar lingkup perusahaan

C. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Pengujian terhadap kuesioner dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian dilakukan terhadap 31 orang responden pada unit yang ada di Universitas Terbuka (UT) secara acak. Uji validitas bertujuan untuk menilai kemampuan suatu instrumen (kuesioner) dapat mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat memperoleh data serta variabel yang diteliti secara tepat.

Hasil uji validitas pada seluruh pertanyaan adalah lebih besar dari r Tabel pada selang kepercayaan 95% yaitu 0.355 (r_{tabel} pada $n = 31$ dan $\alpha = 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan adalah signifikan dan dapat dinyatakan valid. Berarti responden mengerti maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kuisisioner.

Uji Realibilitas

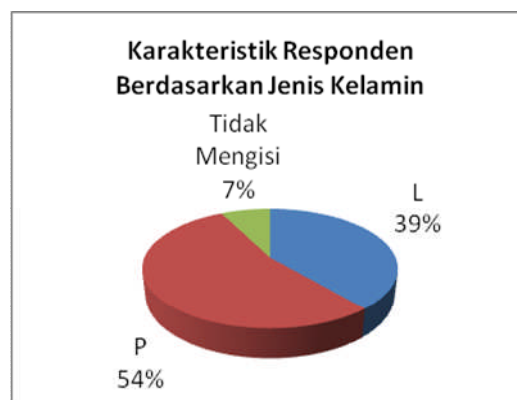
Reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Uji realibilitas dilakukan dengan teknik α cronbach. Dalam teknik ini instrument diuji cobakan pada sekelompok responden dan dilakukan dengan bantuan *software SPSS versi 17.00 for windows*.

Metode Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1 – 4, 1 – 5). Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0.05, artinya instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis *product moment* atau lebih besar dari 0.60.

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh Cronbach's Alpha sebesar 0.749. Nilai tersebut berarti bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sangat reliabel.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

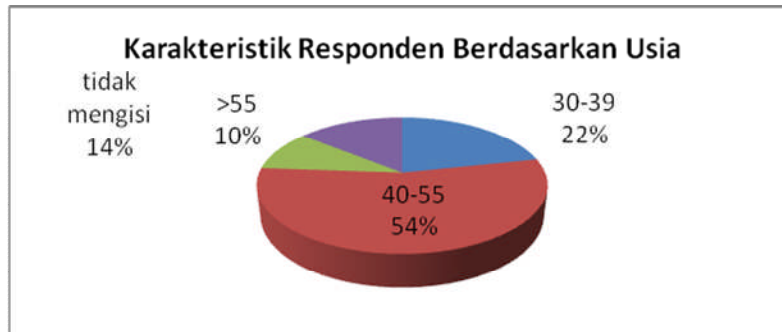
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 54%, responden laki-laki sebanyak 39% dan responden yang tidak mengisi jenis kelamin 7% dari 134 orang. Perbedaan jenis kelamin karyawan di suatu perusahaan sangat tergantung pada jenis pekerjaan.



Gambar 1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
sumber : data primer yang diolah, 2014

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

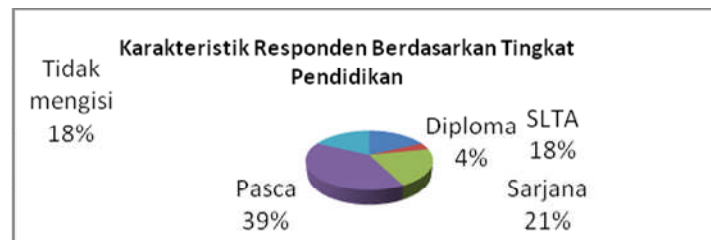
Usia dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Usia seorang karyawan sangat menentukan kinerja secara keseluruhan. Karyawan dengan usia yang relatif masih muda akan mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik daripada karyawan yang lebih tua. Akan tetapi seorang karyawan yang sudah berusia lebih tua akan mempunyai pengalaman yang tidak dimiliki oleh karyawan yang masih berusia muda. Oleh karena itu akan lebih baik apabila perusahaan menggabungkan atau memadukan karyawan berusia tua dengan usia muda. Data mengenai komposisi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Responden Berdasarkan Usia
sumber : data primer yang dioleh, 2014

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi sikap, pengambilan keputusan serta kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini peneliti membatasi hanya pada pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden. Dari penelitian terhadap 134 orang responden yang diteliti didapatkan pendidikan responden sebagai berikut :



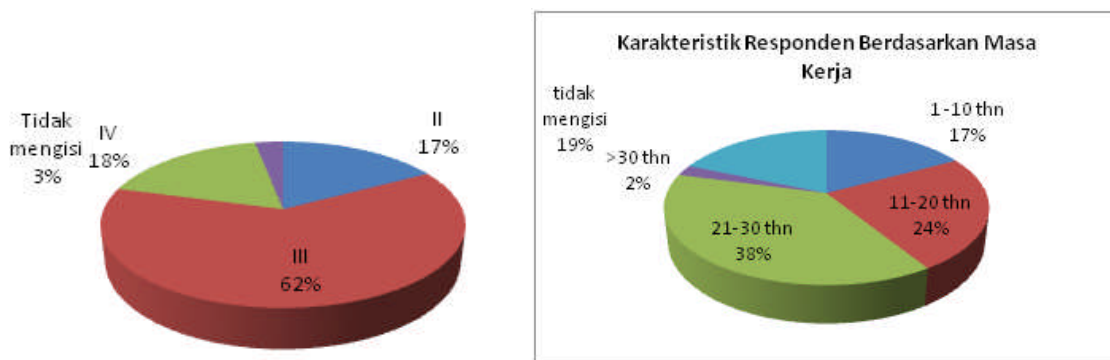
Gambar 3. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
sumber : data primer yang dioleh, 2014

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu : SMA, Diploma, Sarjana, Pascasarjana. Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan pasca sarjana yaitu sebesar 39% dari 134 responden (Gambar 3).

Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Kepangkatan dalam PNS berjenjang dari yang terendah sampai tertinggi. Pangkat ini merupakan bagian dari Identitas untuk setiap PNS. Setiap orang yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan **Nomor Induk Pegawai** atau **NIP**, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui pada saat diterima awal sebagai CPNS / PNS dan secara bertahap pangkat akan naik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini (<http://sholi48.blogspot.sg/2013/02/daftar-pangkat-golongan-dan-ruang-pns.html>).

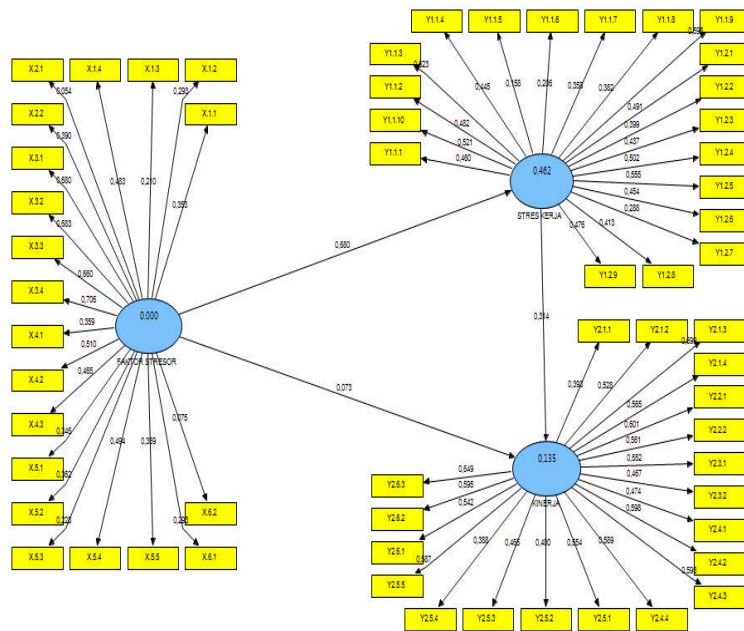
Data mengenai komposisi responden berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden telah memiliki masa kerja di atas 20 tahun yaitu sebesar 38.3% dari 120 responden, kemudian diikuti dengan karyawan yang memiliki masa kerja 0 – 5 tahun sebesar 36% .



Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan dan Masa Kerja
Sumber: Data diolah tahun 2014

Hasil Analisis *Partial Least Square* (PLS) : Pengaruh Stressor Terhadap Stres Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Karyawan Universitas Terbuka

Metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui bentuk dan besar pengaruh variabel laten independen (eksogen) yaitu stressor terhadap variabel laten dependen (endogen) yaitu stres kerja dan kinerja karyawan adalah menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang diolah dengan SmartPLS 2.0. Hasil analisis model penelitian dapat dilihat dalam Gambar 5.



Gambar 5. Pengaruh Stressor Terhadap Stres Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Karyawan Universitas Terbuka (sumber : hasil data primer yang diolah *smartPLS*, 2014)

Gambar 5 menunjukkan bentuk hubungan variabel laten dengan indikator yaitu reflektif. Variabel stressor direfleksikan dengan *role ambiguity*, *role conflict*, *time availability*, *Overload*, *carrer development*, dan *responsibility*. Variabel stress kerja direfleksikan dengan sikap/perilaku dan emosional. Sementara variabel kinerja karyawan direfleksikan oleh keandalan, kehadiran, kerjasama, kualitas, kuantitas dan pengetahuan. Setelah model dibentuk dengan menggunakan *SmartPLS*, dilakukan pengujian kelayakan model.

Evaluasi *Outer Model* – Reflektif Pada Variabel Stressor, stress kerja dan kinerja karyawan

Menurut Ghozaly (2008) untuk evaluasi *outer model-refleksi* dilakukan berdasarkan 4 (empat) kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminat validity*, *Average Variance Extracted (AVE)* dan *composite reliability* (Tabel 2).

Tabel 2. Kriteria dan Standarisasi dalam Evaluasi *Outer Model – Refleksi*

Kriteria	Standar	Keterangan
<i>Converge validity</i> (Reliabilitas indikator)	Nilai <i>loading</i> > 0.50	Menilai kekuatan indikator dalam merefleksikan variabel laten Chin (1998) menyatakan jika < 0.50 maka indikator harus di drop
<i>Discriminat validity</i>	Nilai <i>cross loading</i> korelasi indikator ke variabel latennya lebih besar dari variabel laten- laten lain	Mengukur ketepatan model refleksi
<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	AVE > 0,5	Mengukur konsistensi indikator dalam pengukuran variabel laten
<i>Composite reliability</i> (ρ_c)	$\rho_c > 0,6$	kestabilan dan konsistensi internal indikator yang baik

Composite Reliability

Nilai *composite reliability* dapat dilihat pada nilai *outer model loading* masing-masing variabel laten. Pada table 4 menunjukkan nilai reliabilitas komposit untuk variabel stressor, stress kerja maupun kinerja karyawan memiliki sebesar 0.8346, 0,8713 dan 0,7484. Karena nilai reliabilitas komposit untuk masing-masing variable > 0.6 berarti menunjukkan kestabilan dan konsistensi internal indikator yang baik.

Average Variance Extracted (AVE)

Validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar konsisten mengukur apa yang seharusnya diukur, dalam hal ini bagaimana indikator-indikator baik stressor, stress kerja maupun kinerja konsisten mengukur variabel latennya masing-masing. Hal ini dapat digambarkan oleh besaran nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE stressor, stress kerja dan kinerja karyawan masing-masing sebesar 0.5056, 0,3826 dan 0.3757 (Tabel 4). Nilai-nilai tersebut di atas standar, berarti baik indikator stressor, stress kerja maupun indikator kinerja konsisten dalam mengukur variabel laten stressor, stress kerja dan kinerja.

Discriminat validity

Pada Tabel 3, menunjukkan nilai korelasi variabel stressor, stress kerja dan kinerja dengan masing-masing indikatornya. Jika indikator-indikator stressor menggambarkan refleksi dari stress kerja dan kinerja, maka nilai korelasi indikator-indikator ini terhadap stress kerja dan kinerja harus lebih besar dibandingkan korelasi indikator-indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya. Begitu pun untuk variabel stress kerja dan kinerja. Jika indikator-indikator untuk masing-masing variabel menggambarkan refleksinya, maka nilai korelasi harus lebih besar dibandingkan korelasi indikator-indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa model reflektif Stressor terhadap stress kerja dan kinerja pada penelitian ini valid.

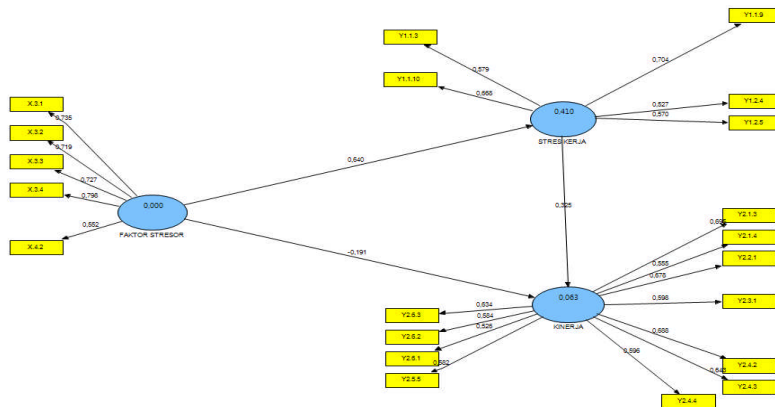
Tabel 3. *Cross Loading Pengaruh Stressor Terhadap Stress Kerja dan Kinerja*

	FAKTOR STRESOR	KINERJA	STRES KERJA
X.3.1	0,7354	0,038	0,5203
X.3.2	0,7194	0,1396	0,4152
X.3.3	0,727	-0,0237	0,4406
X.3.4	0,7979	-0,0691	0,556
X.4.2	0,552	-0,008	0,2762
Y1.1.10	0,4321	0,0922	0,6681
Y1.1.3	0,5322	0,027	0,5789
Y1.1.9	0,345	0,3027	0,7038
Y1.2.4	0,2128	0,1261	0,5267
Y1.2.5	0,3326	0,0982	0,5696
Y2.1.3	0,0671	0,6951	0,1291
Y2.1.4	0,0821	0,5553	0,137
Y2.2.1	-0,051	0,6777	0,0907
Y2.3.1	-0,0253	0,5983	0,0721
Y2.4.2	-0,0203	0,6878	0,1705
Y2.4.3	0,037	0,6431	0,1548
Y2.4.4	0,054	0,5956	0,1438
Y2.5.5	0,095	0,5816	0,1718
Y2.6.1	-0,0916	0,5264	0,069
Y2.6.2	-0,0868	0,5843	-0,0221
Y2.6.3	0,0292	0,6341	0,1283

sumber : hasil data primer yang dioleh *smartPLS*, 2014

Convergent Validity (Reliabilitas Indikator)

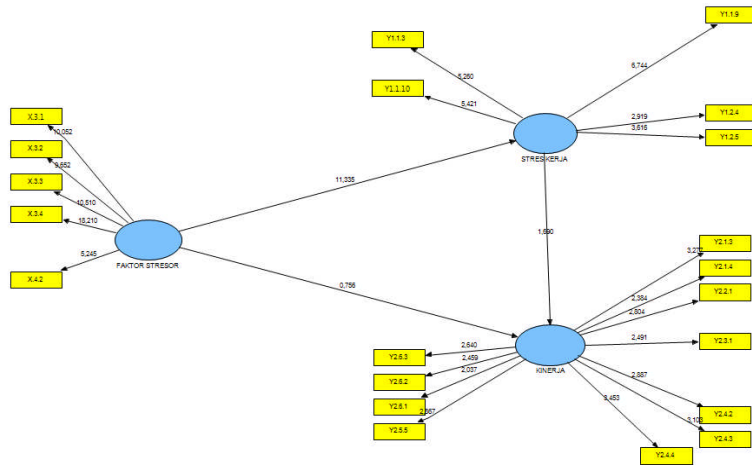
Reliabilitas indikator dicerminkan dari nilai *loading factor* yang merefleksikan kekuatan interelasi antara variabel laten stressor, stress kerja dan kinerja karyawan terhadap masing-masing variabel indikatornya. Interelasi terbesar stressor direfleksikan oleh *time availability* dengan nilai *loading factor* untuk masing-masing sub indikator X3.1 sebesar 0,7354, X3.2 sebesar 0,7194, X3.3 sebesar 0,727 dan X3.4 sebesar 0,7979 dan *role overload* dengan nilai *loading factor* untuk sub indikator X4.2 sebesar 0,552. Variabel stres kerja direfleksikan oleh emosional dengan nilai *loading factor* untuk masing-masing sub indikator Y1.1. 3 sebesar 0,5789, Y1.1.9 sebesar 0,7038 dan Y1..1.10 sebesar 0,6681 dan sikap/perilaku dengan nilai *loading factor* masing-masing sub indikator, Y.1.2.4 sebesar 0,5267, Y.1.2.5 sebesar 0,5696. Variabel kinerja direfleksikan oleh keandalan dengan nilai *loading factor* untuk masing-masing sub indikator Y2.1.3 sebesar 0,6951, Y2.1.4 sebesar 0,5553; kerjasama mempunyai nilai *loading factor* sub indikator Y2.2.1 sebesar 0,677, kualitas pekerjaan mempunyai nilai *loading factor* untuk sub indikator Y2.3.1 sebesar 0,5983, kuantitas pekerjaan mempunyai nilai *loading factor* untuk sub indikator Y2.1., dan pengetahuan. Model *SmartPLS* untuk menghasilkan *loading factor* dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Model Pengaruh Stressor terhadap stress kerja dan kinerja karyawan (sumber : hasil data primer yang dioleh *smartPLS*, 2014)

Evaluasi Model struktural atau *Inner Model*

Menilai *inner model* adalah mengevaluasi pengaruh antar variabel laten dan pengujian hipotesis. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel endogen dan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} (t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% adalah 1.96).



Gambar 7. Model SmartPLS untuk Uji Hipotesis Pengaruh Stressor Terhadap Stress Kerja dan Kinerja (karyawan (sumber : hasil data primer yang diolah *smartPLS*, 2014)

Tabel 4. Overview Untuk Melihat R Square Pengaruh Stressor Terhadap Stress Kerja dan Kinerja Karyawan

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
Faktor Stressor	0.5056	0.8346	0	0.7557	0.5056	0
Kinerja	0.3826	0.8713	0.0628	0.8402	0.3826	-0.016
Stress kerja	0.3757	0.7484	0.4095	0.6013	0.3757	0.1382

Penelitian ini memiliki 2 (dua) variabel endogen yaitu variabel stress kerja dan kinerja. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa *R-Square* stressor terhadap kinerja sebesar 0.0628. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa stressor memiliki kontribusi positif terhadap kinerja sebesar 6,28% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi penyebab stress (stressor) tidak mempengaruhi kinerja karyawan.

Stress kerja dipengaruhi secara positif oleh stressor dengan nilai *R-Square* sebesar 0.4095. Artinya, kontribusi stressor terhadap stress kerja karyawan sebesar 40,95% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2008) bahwa Hasil *R-Square* sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural, masing-masing mengindikasikan bahwa model “baik”, ”moderat”, dan “lemah”. Berdasarkan teori tersebut dan nilai *R-Square* pada variabel laten menunjukkan bahwa kategori model yang diterangkan termasuk ke dalam model yang moderat dan lemah (interpretasi).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat analisis *bootstrapping* pada *path coefficients*, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil analisis *path coefficients* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Bootstrap SmartPLS untuk Pengaruh Stressor Terhadap Stress Kerja dan Kinerja

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O /STERR)
FAKTOR STRESOR -> KINERJA	-0.191	-0.1792	0.2527	0.2527	0.7559
FAKTOR STRESOR -> STRES KERJA	0.64	0.6478	0.0565	0.0565	11.335
STRES KERJA -> KINERJA	0.3253	0.3665	0.1924	0.1924	1.6905

Hipotesis 1 : Stressor berpengaruh positif terhadap stress kerja

Pada Tabel 5 dan Gambar 7 menunjukkan bahwa stressor berpengaruh secara positif terhadap stress kerja, dimana nilai koefisien parameter sebesar 11,335. Hal ini berarti semakin tinggi stressor perusahaan maka tingkat stress kerja karyawan akan meningkat.

Pengujian hipotesis satu diterima karena pada hasil analisis diperoleh bahwa $t_{hitung} = 11.335$ lebih besar dibanding $t_{tabel} = 1.96$. Hal ini menunjukkan bahwa stressor di Universitas Terbuka berpengaruh positif secara signifikan terhadap stress kerja karyawan.

Hipotesis 2 : Stressor berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien parameter antara stressor dengan dengan variabel kinerja karyawan sebesar 0.7559. Pengujian hipotesis ke-dua tidak diterima karena pada hasil analisis diperoleh bahwa $t_{hitung} = 0.7559$ lebih kecil dibanding $t_{tabel} = 1.96$ (Lampiran 13). Hal ini menunjukkan bahwa stressor di Universitas Terbuka tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Positif Stress Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa stress kerja dipengaruhi secara positif oleh kinerja, dimana koefisien parameter sebesar 1,6905. Pengujian hipotesis ketiga tidak diterima karena pada hasil analisis diperoleh bahwa $t_{hitung} = 1,6905$ lebih kecil dibanding $t_{tabel} = 1.96$ (Lampiran 13). Hal ini menunjukkan bahwa stress kerja karyawan di Universitas Terbuka tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan metode SEM SmartPLS diperoleh hasil:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada stressor terhadap stress kerja. Hal ini berarti semakin banyak stressor maka semakin tinggi stress kerja karyawan
2. Tidak ada pengaruh antara stressor terhadap kinerja karyawan. Ini berarti meskipun penyebab stress (stressor) makin banyak tidak akan mempengaruhi keinerja karyawan
3. Tidak ada pengaruh stress kerja dengan kinerja. Berarti semakin tinggi tingkat stress kerja karyawan tidak akan mempengaruhi kinerja karyawan.

Daftar Pustaka

- Gibson, C.B., Zellmer. & Schwab. 1993. Team Effectiveness in Multinational Organization: Evaluation Accross Context. *Group And Organization Management*. 28 (4): 444-475.
- Greenberg, J., Baron, R.A. 2003. Behavior in Organization. Upper Saddle River. New York : Prentice Hall.
- Ivancevich,J.M., Matesson,M.T. 1997. *Organization Behavior and Management*. 3rd edition. Homewood.

Jams, V.M. 1986. *Understanding Human Behavior*. 5th edition. CBS College Publish.

Mangkuprawira S. 2009. *Horizon: Bisnis, Manajemen dan Sumberdaya Manusia*. Bogor: IPB Press.

Milbourn, G. 2006. Teaching the Job Stress Audit to Business School Student: Cause, Measures, Reduction. *Journal of American Academy of Business*. 8 (2): 44-50.

Prawirosentono, S. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

Rahmawati, S. 2009. Analisis Stres Kerja Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bogor. *Jurnal Manajemen IPB*. 5(2): 111-122.

Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D., & Rosenthal, R.A. 1964. *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Wheatley, D. 1990. The Stress Profile. *British Journal of Psychiatry*. 156 : 685-688.

RPSEP-56

PRINSIP ETIKA DALAM BISNIS HINDU (FENOMENA PRAKTIK BISNIS DI ERA GLOBALISASI)

Made Wahyu Adhiputra

Universitas Mahendradatta, Bali
madewahyuadhiputra@gmail.com

Abstract

The objective of this paper is to describe whether there's Hindu concept that offers the business ethics as the trigger to receive the economy. This paper is a theoretical analysis. It can be conclude that business in Hindu is not only as a manifestation of pragmatism human relationship, but also as a manifestation of a totally devotional and environment service (Tri Hita Karana). Tri Hita Karana (Three Holy Deeds) which focusing on the balance of good relation between human and God, among human, and human with their surrounding or environment. The manifestation of business ethics while doing the business practice in globalization era is significant to get both heaven and earth prosperity

Keywords: *Ethics, Hindu business and Tri Hita Karana.*

PENDAHULUAN

Permasalahan pembentukan etika di berbagai bidang keilmuan menjadi penting tatkala dunia dihadapkan pada berbagai persoalan yang menjurus pada krisis moral. Munculnya fenomena ketakutan akan kekalahan berkompetisi dalam kehidupan dunia mengakibatkan aktor ekonomi Hindu menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan semu, menyalahkan takdir ilahi sebagai wakil di dunia dengan membikin kerusakan, padahal salah satu Dharma yang harus dilaksanakan adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh alam sebagaimana yang diajarkan dalam agama Hindu. Akademisi dan praktisi memberikan empati cukup tinggi terhadap pentingnya membangun kesadaran moral dan etika dalam menegmbangkan sebuah keilmuan, sebuah teori tidak akan berguna jika tidak diterapkan dalam konteks nyata, namun akan menjadi keresahan individu sekaligus publik jika dalam pengamalan sebuah teori tidak didasarkan pada perilaku etis.

Adalah dua hal yang tidak terpisahkan antara ekonomi bisnis dengan etika, karena bisnis tidak bisa terlepas begitu saja dengan sosial budaya masyarakat dimana etika dipraktekkan. Richard DeGeorge dalam Muhammad (2008:50), membuat distingsi yang jelas antara etika dalam

bisnis (*ethics in business*) dengan etika bisnis (*business ethics*), etika dalam bisnis belum merupakan suatu bidang khusus yang memiliki corak dan identitas tersendiri, sedangkan etika bisnis memiliki corak yang khas, istilah secara spesifik tersebut menandai ekonomi dan bisnis tidak lagi dipandang sebagai aspek yang terpisah dari lingkungannya. Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka organisasi bisnis tidak lagi hanya berfikir hanya beorientasi mendapatkan keuntungan saja dengan menghalalkan segala cara. Namun menjadikan lembaga bisnis yang bisa mengakomodasi aspek-aspek lain seperti nilai etika, sosial, budaya dan agama dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi.

Sekitar dasawarsa 1960-an, istilah *business ethics* atau *ethics in business* di Amerika Serikat menjadi bahan kontroversial. Wacana tentang nilai-nilai moral (keagamaan) tertentu ikut berperan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu, telah banyak digulirkan dalam masyarakat ekonomi sejak memasuki abad globalisasi, sebut saja misalnya, Max Weber dalam karyanya yang terkenal, *The Religion Ethics and The Spirit Capitalism*, meneliti tentang bagaimana nilai-nilai Protestan telah menjadi kekuatan pendorong bagi tumbuhnya kapitalisme di dunia Eropa Barat dan kemudian Amerika. Walaupun di kawasan Asia (terutama Cina) justru terjadi sebaliknya sebagaimana yang ditulis Weber. Dalam karyanya *The Religion Of China: Confucianism and Taoism*, Weber mengatakan bahwa etika Konfusius adalah salah satu faktor yang menghambat tumbuhnya kapitalisme nasional yang tumbuh di China. Atau yang lebih menarik barangkali adalah Studi Wang Gung Wu, dalam bukunya *China and The Chinese Overseas*, yang merupakan revisi terbaik bagi tesisnya Weber yang terakhir.

Menarik untuk dicermati adalah bagaimana dan adakah konsep Hindu yang menawarkan etika bisnis sebagai pendorong bangkitnya ekonomi. Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Hindu adalah bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepsi hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan (Tri Hita Karana). Dengan kata lain bisnis dalam Hindu tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada Sang Pencipta.

Ajaran agama Hindu, sebagaimana diyakini oleh pemeluk-pemeluknya bersumber dari wahyu Tuhan (Brahman) yang disampaikan melalui para Maharsi India ribuan tahun lalu, dan terhimpun dalam Pustaka Suci Veda (Kitab Suci Hindu). Ajaran-ajaran tersebut mencakup seluruh jalan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, baik yang menyangkut kebahagiaan

duniawi (*jagadhita*) maupun kebahagiaan surgawi (*moksa*). Dengan demikian hakekat dan tujuan hidup menurut pandangan Hindu menyangkut dua aspek utama yang ingin dicapai yaitu, *jagadhita* dan *moksa*. Hakekat dan tujuan hidup tersebut merupakan landasan utama bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai seorang anggota atau pemimpin organisasi. Hakekat dan tujuan hidup tersebut akan menjadi pedoman terpenting dalam menetapkan kebijakan yang akan dijadikan landasan atau haluan untuk bertindak (*berkarma*) dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian pula hakekat dan tujuan hidup tersebut akan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan dari beberapa kemungkinan yang ada, misalnya : dalam melaksanakan persembahan (*yajna*), dalam memberi dana punia, dalam pengendalian diri (*tapa brata*), atau didalam menentukan sarana untuk mencapai tujuan hidup atau organisasi.

Disamping itu tujuan dan hakekat hidup tersebut akan menentukan pula luas persembahan, luas kegiatan yang kita lakukan, banyak sedikitnya sarana dan prasarana yang diperlukan dan bentuk organisasi sebagai wadah pencapaian hakekat dan tujuan hidup tersebut. Konsentrasi perhatian Hindu bukan pada hasil kerja seseorang, melainkan pada proses kerja yang diutamakan dan harus didasarkan pada kebenaran (*dharma*). Dalam perspektif Hindu, pelaksanaan bisnis harus didasarkan pada filsafat Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*, yaitu ajaran yang mengutamakan keseimbangan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.

Tujuan kajian disini adalah ; untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan prinsip etika bisnis ditinjau dari perspektif Hindu; dan untuk mengetahui bagaimana etos kerja masyarakat Hindu dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis dalam organisasi

Etika Bisnis dalam Perspektif Hindu

Bisnis yang kita kenal dewasa ini adalah hasil produk Barat yang sifatnya individualistis, kapitalistis dan profanis. Sifat individualistis tercermin dalam usaha pebisnis menempatkan kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri sebagai hal yang paling utama atau paling primer sedangkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama ditempatkan dalam posisi kepentingan sekunder. Sifat kedua dari bisnis Barat adalah bersifat kapitalis yang berarti proses manajemen lebih mengejar dan mengutamakan efisiensi untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya dan bahkan terkadang cenderung menghalalkan segala cara demi efisiensi dan

keuntungan itu sendiri. Kecenderungan ini muncul karena sifat ketiga dari bisnis Barat, adalah profanis yakni sifat yang meninggalkan nilai-nilai religius. Jadi sikap dan perilaku berdasarkan hubungan antara manusia dan Tuhan (*Hyang Widhi*) cenderung diabaikan. Dengan demikian, proses bisnis menurut pandangan Barat hanya mempertimbangkan berbagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat duniawi.

Pada sisi lain bisnis dalam perspektif Hindu, kegiatan bisnis harus didasarkan kepada filsafat Hindu, yaitu Tri Hita Karana yang mengutamakan keseimbangan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan bisnis harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan yang bersifat sorgawi (religius).

Prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab antara manusia dan Tuhan (*Hyang Widhi*), disebut **Prinsip Parahyangan**, yang meliputi: **1) Dharma sebagai dasar aktivitas bisnis.** Dharma merupakan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama maupun dari consensus dan kesepakatan manusia sendiri, dimana *dharma* itu sendiri merupakan dasar bagi seluruh aktivitas bisnis. Dharma dalam hal ini menjamin kepastian dan tertib hukum bagi aktivitas manusia di dalam proses pencapaian tujuan. Tanpa Dharma maka akan terjadi berbagai kekacauan dalam berbagai aktivitas manusia dalam mencapai tujuan organisasi (hidup). Disinilah arti pentingnya strategi Dharma, karena Dharma senantiasa membawa kebahagiaan kepada umat manusia, melindungi dan membebaskan manusia dari kesengsaraan (*samsara*). Kitab Suci *Veda* menegaskan bahwa *Hyang Widhi* akan memberi karunia kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kepada mereka yang senantiasa melaksanakan Dharma (Rgveda, I.125.6; Rgveda, VII.32.8; Rgveda, X.107.2). **2) Kerja adalah pengorbanan dan pengabdian (*Yajna dan Ngayah*).** Ajaran Karma Yoga menekankan bahwa hanya dengan bekerja (*karma*) manusia dapat mencapai tujuan dan hakekat hidup. Selama hidupnya manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja. Berpikir (*manacika*), berbicara/berkomunikasi (*wacika*) dan melakukan kegiatan fisik/teknis (*kayika*), adalah bentuk-bentuk kegiatan atau kerja. Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan hidup kalau menghindari kerja (Bhagawadgita, III.4 dan 5). Dalam pandangan Hindu kerja merupakan sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan manusia. Hanya melalui kerja yang baik (*subhakarma*) manusia dapat menolong dirinya dari penderitaan hidup (*samsara*) dan mencapai kebahagiaan abadi (*moksa*) yang

merupakan insentif moral bagi umat Hindu kearah ketekunan, kegigihan dan produktivitas. Jika Descrates mengatakan “ **Aku berpikir maka aku ada**, maka ajaran Hindu menambahkan dengan unsur “ **Aku bekerja maka aku ada**”, atau dalam konteks ini manusia adalah homo laborans (manusia yang bekerja).

Prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab antar sesama manusia (**Prinsip Pawongan**)

- 1) Inisiatif-kreativitas.** Pikiran menjadi sumber perangsang segala tindakan atau perilaku manusia dalam hidupnya. Seseorang akan memperoleh sukses dalam bisnis, baik dalam dunia maupun akhirat, bila ia mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi). Hal ini akan mampu menghantarkan seseorang atau sekelompok orang kearah peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja di segala bidang dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.
- 2) Kerja keras tanpa mengenal putus asa.** Tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan dan juga tidak akan mencapai kesempurnaan (Bhagawadgita,III.4), ini berarti hanya orang-orang yang giat bekerja, tulus hati dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam hidupnya (Rgveda, IV.4.12). Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja keras dan tidak pernah menolong serta membenci orang yang bermalasan (Rgveda.VII.32.9 dan Atharvaveda, XX.18.3).
- 3) Menghargai waktu.** Doktrin dan etika Hindu terhadap waktu menyatakan bahwa waktu mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia didunia ini karena : (1) hidup manusia sangat singkat , karena itu pergunakan waktu yang singkat itu untuk melakukan kebenaran (2) jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa manfaat, gunakan waktu sebaik-baiknya agar benar-benar mendatangkan faedah bagi kehidupan manusia (3) Jangan menunda pekerjaan yang berdasarkan dharma.
- 4) Kerjasama dan Harmonis.** Pustaka Suci *Veda* menegaskan bahwa setiap orang agar membantu orang lain yang menghadapi kesulitan atau ditimpa kemalangan (*yajurveda*, XXIX.51). Disamping itu Tuhan akan memberi karunia dan anugerahNya kepada orang yang selalu berusaha untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang selaras diantara sesama manusia, baik dengan sesama kerabat, kenalan bahkan dengan orang yang belum dikenal(Rgveda, VII.32.8).
- 5) Kejujuran dan Kesetiaan.** Setiap keputusan yang diambil oleh manusia dalam kehidupannya adalah mempunyai makna sebagai janji dalam hidupnya baik secara individu maupun kelompok yang hukumnya wajib ditaati. Seorang manajer/pimpinan harus terlebih dahulu menunjukkan kejujuran dan kesetiiaannya terhadap segala keputusan yang diambil, jika ingin mengharapkan kejujuran dan kesetiaan dari orang lain/anggota organisasinya. Oleh karena

itu pengendalian diri dalam melaksanakan keputusan organisasi bisnis adalah sangat penting dalam ajaran Hindu, terutama harus jujur dan tidak ingkar janji (Sarasamuccaya, sloka 75). Kejujuran dan kesetiaan terhadap janji itu merupakan kekuatan spiritual religius yang menyebabkan (1) bertambahnya sahabat atau relasi dalam kehidupan individu maupun kehidupan kelompok (2) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang /kelompok (3) Menumbuhkan peluang-peluang kehidupan bagi seseorang/kelompok (4) Hidup seseorang/kelompok akan diwarnai oleh suasana kerjasama dan keselarasan. **6) Efisiensi Yang Etis.** Di dalam ajaran Hindu, ditegaskan tentang pola dan pengendalian perolehan dan pengeluaran pendapatan untuk mencapai suatu tujuan hidup. Untuk memperoleh suatu pendapatan (*artha*), hendaknya berdasarkan dharma. Hal tersebut merupakan pandangan Hindu tentang strategi efisiensi yang etis, artinya perolehan yang berdasarkan dharma tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan diri sendiri/kelompok, untuk kepentingan mengejar keuntungan saja, melainkan juga digunakan untuk kepentingan keagamaan. Dengan kata lain Hindu mengajarkan untuk mengejar efisiensi harus dilandasi oleh semangat etik religius.

Prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab antara manusia dan alam sekitarnya (**Prinsip Palemahan**) **1) Manajemen Berwawasan Lingkungan.** Keberadaan manusia maupun organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungannya (pengaruh alam sekitarnya). Konsep lingkungan alam menurut pandangan Hindu , yakni Panca Maha Bhuta artinya alam terdiri dari lima unsur utama, yaitu : tanah, air, udara, api dan ruang. Kelima unsur tersebut berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku manusia didalam kehidupannya baik secara individu maupun kelompok/organisasi yang harus selalu dijaga kelestariannya, terlebih kegiatan bisnis karena alam jagat raya ini akan terus menjadi sumber kehidupan manusia (Bhagawadgita, III.10). Dalam ajaran Hindu dikenal apa yang disebut Karma Yoga yang merupakan sumber spiritual etos kerja bagi masyarakat Hindu. Mengkaji makna dan hakekat kerja menurut pandangan Hindu dapat diawali dengan menangkap makna dan hakekat nilai-nilai kerja dalam Pustaka Suci Veda, yang intinya bahwa Tuhan (*Hyang Widhi*) memerintahkan manusia untuk bekerja seperti yang telah ditentukan, tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan dan kesempurnaan (*Bhagawadgita, III.4.5.8*). Perintah tersebut mempunyai makna yang dalam tentang etos kerja atau etika bisnis dalam Hindu, yaitu : (1) kerja itu adalah perintah Tuhan dan hukumnya wajib (2) keberadaan manusia terletak pada kerjanya (3) dalam Hindu pembagian kerja dalam kehidupan manusia adalah sangat esensial (4) manusia harus disiplin dan tekun bekerja pada

posisi yang telah ditentukan secara produktif sehingga bermanfaat bagi hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta (5) manusia tidak dibenarkan melakukan kerja asal-asalan, acuh tak acuh, seenaknya tanpa memperdulikan orang lain, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Berdasarkan pandangan Hindu tentang etos kerja atau etika bisnis tersebut, manusia didalam bekerja keras untuk memperoleh harta kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya (*kama*) harus dipedomani oleh norma-norma, aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama (*dharma*), sehingga mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat duniawi dan kebahagiaan abadi atau akhirat (*moksa*). Etos kerja atau etika bisnis yang bersumber dari Veda, berkaitan erat dengan nilai kejiwaan seseorang untuk mengisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*subha-karma*) dan ada rasa kerinduan untuk menunjukkan kepribadian dalam bentuk sikap dan perilaku dalam bekerja yang lebih baik dan lebih bermakna. Harapan mulia tersebut hanya dapat diraih bila kita mengenali dengan cermat dan mengimplementasikan cirri-ciri bekerja secara etis didalam proses kerja. Dalam Veda banyak sekali nilai-nilai yang menjadi semangat yang mendorong seseorang untuk bekerja secara etis.

Terdapat 3 (tiga) kelompok ciri-ciri bekerja secara etis yang sangat penting, yaitu (1) Lima Pengendalian Diri (*Panca Yama Wrata*), (2) Empat Kebajikan Yang Luhur (*Catur Paramita*), (3) Tiga Perbuatan Suci (*Tri Kaya Parisudha*). **2) Lima Pengendalian Diri.** Terdapat 6 (enam) musuh dalam diri manusia (*sad ripu*), yang senantiasa membayangi sikap dan perilaku manusia di dalam proses bekerja, yaitu : hawa nafsu (*kama*), kemarahan (*krodha*), keserakahan (*lobha*), kemabukan (*mada*), kebingungan (*moha*) dan keirihatian (*matsarya*). Didalam upaya pengendalian diri dari ke-enam musuh manusia tersebut, maka seseorang perlu memperhatikan lima elemen pengendalian diri, yaitu : tanpa kekerasan (*ahimsa*), pembelajaran diri (*brahmacari*), Jujur (*satya*), Tidak korupsi (*asteya*), dan tidak suka menerima suap (*aparigraha*). **3) Empat Kebajikan Yang Luhur.** Terdiri atas : cinta kasih (*maitri*), penuh perhatian terhadap yang menderita (*karuna*), mengampuni (*upeksa*), dan bersimpati terhadap yang berprestasi (*mudita*). **4) Tiga Perbuatan Suci.** Terdiri atas: berpikir yang baik (*manacika*), berkata atau berkomunikasi yang baik (*wacika*), dan berlaksana yang baik (*kayika*).

Fenomena Praktik Bisnis di Era Globalisasi.

Kemajuan era globalisasi atau yang akrab disebut sebagai era globalisasi seyogyanya dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan efesiensi global, menjadikan perdagangan secara

global dapat membantu banyak negara untuk berkembang lebih cepat, membuat negara berkembang mendapat akses pengetahuan yang tak dapat diperoleh sebelumnya. Namun bagi kebanyakan orang di negara berkembang globalisasi tidak membawa keuntungan ekonomi yang dijanjikan (Suyanto, 2009).

Globalisasi dalam berbagai bidang akan mengakibatkan semakin banyak hal-hal yang *uncontrollable* bagi perusahaan, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Eksistensi bisnis tertentu di Indonesia yang selama ini karena adanya dukungan orang kuat dan hak-hak istimewa lainnya, nantinya tidak bisa menolak menghadapi tekanan internasional. Interdependensi antar negara menjadi semakin besar. Persaingan bisnis dengan aturan main yang bersifat global seperti ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dan *International Standards Organization* (ISO) tidak bisa lagi diabaikan. Tekanan internasional seperti tentang perburuhan, *human rights* dan keadilan akan menjadi persyaratan dalam berbisnis (Moerdiyanto, 2010).

Gambaran praktik bisnis di era globalisasi dapat dilihat dari dua nilai, nilai positif atau bisnis yang beretika dengan nilai negatif atau bisnis kotor tanpa mengindahkan nilai-nilai moral. Pesatnya persaingan di era globalisasi menyebabkan para aktor ekonomi semakin kreatif dengan menggunakan berbagai keahliannya dalam rangka merebut pangsa pasar. Namun sangat disayangkan jika ada beberapa pelaku bisnis yang tidak mampu mensikapi secara positif kemajuan era globalisasi, sehingga banyak yang menyimpang dari etika bisnis.

Kenyataan tentang praktik bisnis kotor yang diungkap oleh beberapa pakar atau pemerhati dibidang ekonomi menjadikan kuatnya keinginan untuk melangkah bersama-sama mewujudkan sebuah praktik bisnis beretika. Melalui asosiasi pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang Industri) diharapkan menjadi fasilitator sekaligus motivator untuk menciptakan praktik bisnis yang beretika. Diungkap oleh Moerdiyanto (2010), tentang upaya-upaya mengembangkan praktik bisnis yang etis di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara yang elegan. Cara-cara tersebut antara lain meliputi:

1. Mengembangkan lingkungan usaha yang etis. Menurut hasil penelitian di Korea dan Jepang, praktik bisnis yang etis sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga. Pengusaha yang berasal dari lingkungan keluarga yang tidak etis akan menghasilkan usahawan yang tidak etis pula. Etika seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga orang tersebut. Usahawan dari lingkungan yang baik dan moralis akan menjadi usahawan etis inti, yang diharapkan dapat menyebar kepada usahawan lain. Pemerintah

dan asosiasi pengusaha dapat membantu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif menuju peningkatan etika dan moral usaha di Indonesia.

2. Menciptakan credo perusahaan yang etis dan moralis. Peranan credo perusahaan yaitu nilai-nilai falsafah perusahaan yang tercermin dalam visi dan misi bisnis akan selalu mengingatkan pimpinan perusahaan dan seluruh staf terhadap etika dan moral dalam bisnisnya.
3. Mengembangkan etika melalui pendidikan manajemen. Pendidikan dan latihan manajemen dapat menjadi sarana yang baik dalam peningkatan etika usaha di perusahaan. Disini perlu ditekankan bahwa pengusaha yang etis dan moralis akan dapat langgeng dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Hindu bukan hanya sekedar tawaran secara teori untuk mereformasi kesalahan praktik ekonomi modern tanpa mengindahkan etika. Namun mengedepankan nilai-nilai etika yang harus mampu merekonstruksi praktik bisnis secara holistik. Nilai etika yang ditawarkan mampu mengakomodasi kepentingan manusia tanpa menghilangkan ruh spiritualnya. Penanaman nilai-nilai etika dalam praktik bisnis di era globalisasi sangat penting untuk segera diterapkan. Mengingat tantangan keinginan masyarakat untuk hidup sejahtera lahir batin dunia akhirat tidak bisa ditunda lagi.

Dalam perspektif Hindu, pelaksanaan bisnis harus didasarkan pada filsafat Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*, yaitu ajaran yang mengutamakan keseimbangan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam pandangan Hindu kerja merupakan sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan manusia. Hanya melalui kerja yang baik (*subhakarma*) manusia dapat menolong dirinya dari penderitaan hidup (*samsara*) dan mencapai kebahagiaan abadi (*moksa*) yang merupakan insentif moral bagi umat Hindu kearah ketekunan, kegigihan dan produktivitas. (**Aku bekerja maka aku ada**). Etos kerja atau etika bisnis yang bersumber dari Veda, berkaitan erat dengan nilai-nilai yang menjadi semangat yang mendorong seseorang untuk bekerja secara etis. Terdapat 3 (tiga) kelompok ciri-ciri bekerja secara etis yang sangat penting, yaitu (1) Lima Pengendalian Diri (*Panca Yama Wrata*), (2) Empat Kebajikan Yang Luhur (*Catur Paramita*), (3) Tiga Perbuatan Suci (*Tri Kaya Parisudha*).

DAFTAR PUSTAKA

Gorda, I Gusti Ngurah (1996). *Etika Hindu Dan Perilaku Organisasi*, Penerbit STIE Satya Dharma Singaraja dan P.T. Widya Kriya Gematama Denpasar, Bali.

Gorda, I Gusti Ngurah (1999). *Manajemen Dan Kepemimpinan Desa Adat Di Propinsi Bali, Dalam Perspektif Era Globalisasi*, Penerbit STIE Satya Dharma Singaraja dan P.T. Widya Kriya Gematama Denpasar, Bali.

Gorda, I Gusti Ngurah (2004). *Membudayakan Kerja Berdasarkan Dharma*, Penerbit Pusat Kajian Hindu Budaya Dan Perilaku Organisasi, STIE Satya Dharma Singaraja, Bali.

Moerdiyanto, Dr. M.Pd, 2010. *Makalah International Seminar “ Character Education and Public Integrity*. Staff. Uny.ac.id. Diakses tanggal 9 September 2014.

Muhammad, 2008. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Suyanto, M. Prof. Dr. MM, 2009. *Globalisasi Ekonomi Serta Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*. Pidato penguhan Guru Besar STMIK AMIKOM. Yogyakarta.

RPSEP-57

**KAJIAN KRITIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Ratna Nurhayati, S.H, MHum
Seno Wibowo Gumbira, S.H, M.H
Universitas Terbuka
FISIP - Ilmu Hukum
seno@ut.ac.id
anna@ut.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa problematika/permasalahan yang akan timbul kedepannya pasca putusan *Judicial Review* terhadap ketentuan dalam KUHAP khususnya upaya hukum luar biasa pada peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia baik ditinjau dari dasar hukum maupun asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan metode normatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa peninjauan kembali yang dapat diajukan secara berkali-kali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan ketentuan yuridis baik secara vertikal maupun horizontal, bertentangan dengan asas-asas yang berlaku pada sistem beradilan pidana seperti asas *nebis in idem* dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dapat menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI. Solusinya yakni Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri dapat menertibkan pengajuan peninjauan kembali pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut, secara sementara melalui penemuan hukum dengan yurisprudensi konstannya dan peraturan MA untuk mengisi kekosongan hukum. Selain itu DPR selaku lembaga tinggi negara yang berwenang membuat undang-undang juga dapat membentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang Mahkamah Agung RI dan atau undang-undang peradilan pada umumnya dengan merumuskan ketentuan baru mengenai peninjauan kembali.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Putusan Judicial Review, KUHAP, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil atau lazimnya disebut Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau juga dapat disebut juga dengan istilah "Negara Kemakmuran". Oleh karena itu selaras dengan konteks tersebut, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik dari segi spiritual maupun materiil yang berdasarkan Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.

Pemikiran tentang konsep negara hukum telah muncul dan populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum merupakan reaksi kesewenang-wenangan dimasa lampau¹. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mencerminkan konsep pemikiran yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Sri Soemantri suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau perundang-undangan;
- 2) Adanya Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan².

Berkaitan dengan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan diatas khususnya pada butir 2, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu akan ada dan ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara dan hal tersebut tentu pasti ada di setiap negara berdasarkan hukum.

Di dalam konstitusi negara Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ketiga) sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (*rechstaat*). Secara konseptual, teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan

¹ Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta. UII Press. Hal . 1.

² Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni. Hal. 29.

setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Tentang kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 ayat 1 huruf D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam ketentuan tersebut mengindikasikan negara Indonesia melindungi warga negaranya melalui ketentuan hukum yang berwujud undang-undang untuk mendapatkan jaminan mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum.

Dari segi substansi elemen yang terpenting dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah tergantung pada keadaan yakni suatu rezim kekuasaan pemerintahan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu (warga negara) adalah subjek hukum yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu (warga negara) dengan negara senantiasa dalam keseimbangan yang mana kedua-duanya memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama-sama dilindungi oleh hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuannya negara sudah tentu memiliki perangkat untuk mencapai tujuan yang hendak ditujuinya, perangkat tersebut yakni aturan hukum berupa undang-undang beserta peraturan lainnya dan lembaga yang berwenang yang diberikan legitimasi wewenang untuk bertindak dan mencapai tujuan tersebut.

Perkembangan perangkat hukum dan perangkat lembaga di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama pada pasca Orde Baru atau yang dikenal saat ini yakni Era Reformasi. Pada Era Reformasi perkembangan lembaga yang dapat dirasakan dan dilihat yakni lahirnya beberapa lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan lahirnya lembaga-lembaga negara tersebut sudah tentu diikuti dengan pembaharuan produk aturan perundang-undangan, hal tersebut guna sebagai penunjang pelaksanaan wewenang yang melekat pada lembaga-lembaga negara tersebut.

Pada lembaga negara khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga negara lahir pada era reformasi sudah barang tentu merupakan hal yang baru dan memberikan dimensi baru pada dunia peradilan di Indonesia. Mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2014 saat ini mahkamah konstitusi telah memutus perkara yang berkaitan dengan *Judicial Review*, memutus sengketa pemilu, memutus kewenangan sengketa antar lembaga negara. Pada putusan-

putusan *Judicial Review* yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI tersebut sudah tentu memiliki dampak terhadap hukum dan pelaksanaan terhadap hukum di masyarakat, lembaga peradilan maupun lembaga negara sekalipun, hal tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut bersifat *Final And Binding* pada tingkat aturan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi RI yang sifatnya *final and binding* tentu menimbulkan dampak yang signifikan pada suatu ketentuan undang-undang dari segi pelaksanaannya. Dengan adanya putusan seperti itu sudah barang tentu menimbulkan dampak yakni kekosongan hukum dan selain itu berdampak pula pada pelaksanaan penegakan hukumnya, salah satunya dapat dilihat pada putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PPU-XI/2013 yakni mengadili Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, yang mana pada putusan tersebut berdampak bahwa pengajuan Peninjauan Kembali yang semulanya hanya bisa diajukan 1 (satu) kali oleh Pemohon dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekarang menjadi bisa diajukan lebih dari 1 (satu) kali pada praktiknya di Indonesia. Tentu hal tersebut yang tadinya menciptakan kepastian hukum karena peninjauan kembali hanya boleh 1 (satu) kali menjadi timbul ketidakpastian hukum khususnya pada *Justiabelen*³ dikemudian hari dan menimbulkan permasalahan yuridis pada penerapannya, khususnya pada perlindungan Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum pada *Justiabelen* khususnya terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1). Bagaimana dampak putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PPU-XI/2013 Pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Sistem Peradilan Pidana? 2). Bagaimana solusi dalam menjamin kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 34/PPU-XI/2013?

DAMPAK PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 34/PPU-XI/2013 PADA PASAL 268 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

³ Pencari Keadilan seperti tersangka, terdakwa terpidana yang belum mendapatkan putusan *inckract* (berkekuatan hukum pasti) pada proses peradilan yang dijalaninya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”⁴. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua kekuasaan kehakiman tersebut dipisahkan karena meskipun hakikatnya sama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman namun fungsinya berbeda, dimana pada Mahkamah Agung RI lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*).

Pada Pasal 24 huruf C UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Judicial Review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan selain itu juga Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui juga bahwa disamping Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *Judicial Review*, tetapi secara nyata Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan kewenangan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung tetapi berbeda tingkat pengajuannya. Pada *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yakni pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan melihat perbedaan kedua lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut tampaknya jelas bahwa tingkat pengujian *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung, dan hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan undang-undang secara nyata, karena pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Kontitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

⁴ Ni'matul Huda 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. Hal 202.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian Undang-Undang, yang diuji adalah norma Undang-Undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi nomor 34/PPU-XI/2013 pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sudah tentu menimbulkan dampak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni khususnya pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengikat dan berkekuatan hukum, artinya bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan berkali-kali. Maka sebelum menjelaskan lebih lanjut perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan atau rumusan Pasal yang mengatur ketentuan peninjauan kembali dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali yakni diatur pada Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali yakni terpidana atau ahli warisnya. Kemudian hal ini mengalami perkembangan dalam praktik peradilan pidana yaitu yang pada awalnya peninjauan kembali hanya dapat diajukan hanya oleh terpidana dan atau ahli warisnya berkembang secara nyata bahwa Jaksa Penuntut Umum juga dapat mengajukan peninjauan kembali, hal tersebut terjadi dan terbentuk dalam praktik melalui Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi Konstan melalui putusan Mahkamah Agung RI No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996. Menurut majelis hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali, Jaksa/penuntut umum diperkenankan mengajukan peninjauan kembali, karena KUHAP tidak mengaturnya sehingga Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembalinya berkeinginan menciptakan Hukum Acara Sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana dengan menafsirkan beberapa ketentuan undang-undang yakni pada:

- 1) Pasal 244 KUHAP hanya menegaskan “putusan bebas” tidak dapat dimintakan kasasi. Dalam praktik, ketentuan Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan baru berupa putusan

bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi dan dalam hal ini telah menjadi Yurisprudensi Konstan;

2) Pada Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berisi bahwa pihak berkepentingan ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI;

3) Pasal 263 ayat 3 KUHAP ditafsirkan Pasal ini ditujukan kepada Jaksa karena Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak yang berkepentingan agar putusan hakim diubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan dapat diubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa;

4) Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon peninjauan kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak. Atas dasar asas keseimbangan penerapan hak asasi tersebut disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakilkan oleh jaksa/Penuntut Umum dapat dimintakan peninjauan kembali;

5) Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan tinggi bertugas membina dan menjaga agar semua undang-undang diterapkan secara tepat dan adil. Karena terjadi kekosongan hukum dalam KUHAP, Mahkamah Agung akan menciptakan Hukum Acara sendiri (Yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Mahkamah Agung berpendirian secara formal bahwa Kejaksaan dapat melakukan Peninjauan kembali⁵. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana selain dapat diajukan oleh Terdakwa/Terpidana/ahli warisnya juga dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan dapat diajukannya upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali proses pemeriksaan pidana oleh Terpidana/Terdakwa atau beserta ahli warisnya beserta Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 Pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tentu memiliki beberapa masalah yang potensial yakni sebagai berikut:

⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni. Hal 278.

- 1) Potensial masalah pada pemeriksaan peradilan pidana, karena dalam praktiknya (*Das Sein*) pengajuan pemeriksaan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Terpidana/Terdakwa beserta ahli warisnya dan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas selesainya perkara pidana tersebut berlarut-larut sehingga dikemudian harinya juga dapat merugikan terdakwa dan atau terpidana itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan ketika pada pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa/terpidana/ahli warisnya dan pada pengajuan peninjauan pertama ini dikabulkan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan diputus bebas (*vrijspraak*) yang mana pada putusan tersebut juga telah diputus juga mendapatkan rehabilitasi secara hukum tersebut dapat potensial dibatalkan pula oleh pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjadi putusan pembedaan bagi termohon yang notebenanya telah diputus bebas oleh pengajuan peninjauan kembali pertama, maka hal ini juga akan berpotensi pengajuan peninjauan kembali ketiga kalinya dan seterusnya sehingga hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf (D) ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” selain itu juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat **kepastian hukum** dalam semangat di depan hukum”. dilihat dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PPU-XI/2013 tersebut tentunya bertentangan dengan kedua dasar hukum tersebut diatas yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf (D) ayat (1) dan Pasal 3 ayat 2 pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain itu juga tentunya bertentangan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang salah satunya yakni mengawal hak-hak konstitusional warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945. Pada pertimbangan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 menyebutkan bahwa “upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak

dibatasi. Namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan. Sebab keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan lebih mendasar daripada kepastian hukum. “Kebenaran materil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan” mengenai pertimbangan tersebut pada dasarnya juga banyak ahli hukum yang tidak sependapat atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena keadilan terkadang ditemukan dengan adanya kepastian hukum, hal yang sama juga dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro yaitu Nyoman Sarikat Putra Jaya yang menyatakan “Kalau diberikan kesempatan Peninjauan Kembali berkali-kali, tidak terbatas, itu nanti berakibat ketidakpastian hukum dan jangan sampai, karena boleh diajukan berkali-kali maka Peninjauan Kembali digunakan para pihak yang berperkara sebagai permainan. "Itu yang harus dihindari⁶”. Dengan adanya ketidakpastian hukum tentu dapat menimbulkan disparitas hukum pidana yang dapat menimbulkan perasaan terpidana merasa menjadi korban “the judicial caprice”, akan menjadikan terpidana yang tidak menghargai hukum⁷;

- 2) Potensi permasalahan yang kedua adalah permasalahan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI hal tersebut dikarenakan pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana yang dapat diajukan berkali-kali tanpa batas limitatif yang pasti tentunya hal ini menjadi potensi masalah di Mahkamah Agung RI;
- 3) Potensi permasalahan yang ketiga adalah kekosongan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa ada adagium yang menyatakan “*nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale*” artinya Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong. Mengingat sifat pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam Undang-Undang adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0832116/Putusan.PK.Bisa.Berkali-kali.MK.Munculkan.Ketidakpastian.Hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hal 54.

perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu⁸, maka dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 268 ayat 3 KUHP tidak mengikat secara hukum tentu menimbulkan kekosongan hukum dan sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Hukum Acara merupakan kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan keputusan. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses yang berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Tugas Hukum Acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia⁹. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika tanpa undang-undang hukum acara yang jelas dapat dipastikan pelaksanaan hukum substansinya akan terlaksana dengan kacau karena tidak ada aturan yang secara imperatif dan limitatif yang mengaturnya.

- 4) Permasalahan pada berbenturan pada asas sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni pada asas *nebis in idem (exceptie van gewijsde zaak)*¹⁰ dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana di ketahui bahwa secara umum, *nebis in idem* menurut adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *nebis in idem* ini dapat ditemui dalam Pasal 76 ayat 1 (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan

⁸ Muchamad Ali Safa'at. Makalah tanpa tahun berjudul *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Universitas Brawijaya.

⁹ http://rykameliana888.blogspot.sg/2013/03/hukum-acara-pidana-hukum-acara-perdata_4209.html. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

¹⁰ *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) yang sama. Lihat S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHAEM PETEHAEM. hlm 418. Tujuan Asas ini adalah untuk menghindari adanya beberapa putusan terhadap suatu tindak pidana; seseorang terdakwa/terpidana harus diberi ketenangan hati, jangan sampai dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh tuntutan kembali dalam tindak pidana yang telah diputus. Lihat H. Riduan Syahrani. 2009. Bandung. Alumni Hal. 153.

bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pembedanaan (*veroordeling*) pada Pasal 75 ayat 2 KUHP¹¹. Asas *nebis in idem* tersebut juga berkaitan dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan hal tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara agar terlaksana secara sistematis dan cepat selesai, karena jika perkara yang subjek, objek dan kejadiannya yang sama di periksa dan diputus berkali – kali tentunya akan menyebabkan ketidak sesuaian asas –asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keempat permasalahan akibat putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga sama dikemukakan pula oleh Mahfud MD yakni “orang yang sudah selesai menjalani hukuman karena Peninjauan Kembali pertamanya ditolak suatu saat ketika para hakim yang menanganinya sudah pensiun, dia bisa mengajukan Peninjauan Kembali lagi dan Bukan hanya dengan mengajukan novum tetapi dengan alasan hakim yang memeriksanya dulu telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, yang jauh lebih berbahaya adalah jika Peninjauan Kembali di atas Peninjauan Kembali dikabulkan maka secara teoretis yang bersangkutan bisa menuntut ganti rugi kepada negara dengan jumlah yang bisa sangat besar dan selanjutnya beliau mengatakan pula mengenai kepastian hukum, seperti yang dibangun dalam paradigma hukum progresif di Mahkamah Konstitusi, memang harus diletakkan di bawah keadilan namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil karena acap keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum¹²”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 tersebut menimbulkan masalah yuridis maupun teknis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada permasalahan yuridis yakni tidak sinkronnya antara Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf D ayat 1 dan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia dengan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut baik secara vertical maupun horizontal atas jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada masalah teknis akan membebani kinerja Mahkamah Agung RI yakni pengajuan peninjauan kembali secara berkali kali akan menimbulkan tumpukan perkara yang tidak kunjung selesai dan bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam pemeriksaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1193>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2014.

¹² <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/08/kata-mahfud-md-soal-putusan-mk-bisa-timbulkan-ketidakpastian-hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

SOLUSI DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 34/PPU-XI/2013.

Dari berbagai permasalahan yang berpotensi timbul pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PPU-XI/2013 tersebut diatas maka perlu dibahas solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Peraturan perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas itu sebenarnya hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan adalah berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai dengan tingkat dan lingkungannya masing-masing. Jadi, status Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan Undang-Undang, karena Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan produk perundang-undangan yang nantinya akan berlaku setelah dibacakan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terkait revisi atau perubahan Undang-Undang sama sekali tak ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Biasanya, perubahan Undang-Undang dilakukan hanya untuk mensinkronkan dengan Pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi¹³.

Hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari suatu undang-undang yang diuji, namun bagaimana jika pasal tersebut merupakan “jantung” atau menentukan operasionalisasi keseluruhan Undang-Undang, pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian

¹³ Fista Prilia Sambuari. 2013. *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Manado. Universitas Samratuangi. Jurnal *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Hal 19.

hukum. Misalnya, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan? Akibatnya, pelaksanaan Undang-Undang tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945¹⁴. Dengan demikian solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi probematika pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni sebagai berikut:

1) Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara dibidang yudikatif yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membentuk suatu ketentuan baru melalui penemuan hukum maupun Perma terkait pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut tentang peninjauan kembali. Ketentuan yang nantinya dibuat tersebut haruslah ada pembatasan berapa kali peninjauan kembali yang akan diajukan baik oleh Justisabelen maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana ketentuan tersebut sifatnya kasuistik dan imperatif, limitatif serta mengikat dalam pelaksanaannya, hal tersebut untuk mencegah terjadinya *Justice Delay*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali yang mengatakan “dengan PK lebih dari sekali, dimana rasa keadilannya karena putusan yang sudah dieksekusi masih ada PK akan terjadi ketidakadilan, dan kemungkinan ini dapat saja merembet ke perkara perdata dan karena itu menimbulkan `justice delay”¹⁵. Kembali lagi pada ketentuan yang seyogyanya dibentuk oleh mahkamah agung, ketentuan tersebut dapat berupa peraturan Mahkamah Agung atau melakukan penemuan hukum yakni berupa yurisprudensi yang sifatnya konstan guna mentertibkan pengajuan peninjauan kembali dan hal ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut;

2) DPR dengan melibatkan Mahkamah Agung RI bersama-sama merevisi undang-undang Mahkamah Agung RI beserta undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan pada umumnya baik itu RCUHAP dimasa yang akan datang (*Ius constituendum*). Hal tersebut untuk memberi kepastian hukum dan keseimbangan serta tertib hukum pada pelaksanaannya, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Ibid Hal 20.

¹⁵ <https://id.berita.yahoo.com/ma-terkejut-putusan-mk-bolehkan-pk-berkali-kali-101723558.html>. diakses pada tanggal 9 Oktober 2014.

tersebut *final and binding* yang selain itu putusan mahkamah konstitusi tersebut tingkatnya sederajat dengan undang-undang sebagaimana dikemukakan diatas. Pembentukan atau revisi terhadap undang-undang Mahkamah Agung RI dan undang-undang yang berkaitan peradilan tersebut haruslah sinkron dan harmonis, baik dalam susunan hukum dan perundang-undangan di Indonesia secara vertical maupun secara horizontal agar tidak terjadi *overlapping* dan bertentangan antar undang-undang satu dengan lainnya. Selain itu juga revisi terhadap undang-undang Mahkamah Agung dan undang-undang lainnya berkaitan dengan sistem peradilan khususnya pidana juga disesuaikan dan diharmonisasikan dengan asas-asas hukum pidana baik yang berlaku di Indonesia maupun secara universal dengan disesuaikan dengan ciri khas hukum yang ada di Indonesia.

Dengan adanya kedua solusi tersebut diharapkan dapat menanggulangi segala problematika dalam dunia peradilan khususnya peradilan pidana pada pelaksanaan dan penegakan hukum pidana di Indonesia dengan menjunjung tinggi perlindungan HAM pelaku tindak pidana dan masyarakat di satu sisi secara proporsional agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik dalam arti keadilan substansif maupun keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali dalam peradilan pidana tentunya merupakan instrument hukum yang digunakan untuk terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan substansial maupun keadilan prosedural guna mencapai kebenaran materil sebagaimana yang menjadi tujuan KUHAP tersebut. Peninjauan kembali yang dapat dilakukan berkali-kali dalam sistem peradilan tentunya menimbulkan problematika yang sangat berpengaruh pada sistem peradilan dan dampaknya yakni dapat menciptakan adanya ketidakpastian hukum bagi Justisabelen di dalam masyarakat, menimbulkan persoalan yuridis, teknis pada pelaksanaannya dan lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Untuk menanggulangi timbulnya problematika dari segi yuridis, teknis pasca putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi tentunya Mahkamah Agung RI mempunyai peranan yang cukup sentral, mengingat Mahkamah Agung merupakan institusi tertinggi yang mandiri

dalam bidang Yudikatif, maka dengan itu Mahkamah Agung dapat mengatasinya dengan penemuan hukum berupa yurisprudensi konstan maupun dengan membuat peraturan untuk menertibkan pengajuan peninjauan kembali dimasa mendatangnya yakni salah satunya dengan Perma RI. Selain Mahkamah Agung, DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat suatu ketentuan Undang-undang harus bersama-sama dengan Mahkamah Agung membahas untuk menyusun ketentuan baru guna menertibkan peninjauan kembali dalam bentuk ketentuan atau norma baru berupa Undang-undang Hal ini guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku.

H. Riduan Syahrani. 2009. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.

Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta. UII Press.

_____. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni
AHAEM PETEHAEM.

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.

Jurnal/ Makalah

Muchamad Ali Safa'at. Makalah tanpa tahun berjudul *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Universitas Brawijaya.

Fista Prilia Sambuari. 2013. *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Manado. Universitas Samratu langi. Jurnal *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0832116/Putusan.PK.Bisa.Berkali-kali.MK.Munculkan.Ketidakpastian.Hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

http://rykameliana888.blogspot.sg/2013/03/hukum-acara-pidana-hukum-acara-perdata_4209.html. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11193>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2014.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/08/kata-mahfud-md-soal-putusan-mk-bisa-timbulkan-ketidakpastian-hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

<https://id.berita.yahoo.com/ma-terkejut-putusan-mk-bolehkan-pk-berkali-kali-101723558.html>. diakses pada tanggal 9 Oktober 2014.

RPSEP-58

PERAN ORMAS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN

Adil Mubarak, S.Ip, M.Si
Prodi Ian Isp Fis
Universitas Negeri Padang
E-Mail : adilmubarak08@yahoo.co.id

Abstrak

Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan dengan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah seperti kewalahan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya ini, bingung mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teoritik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering keteteran. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan peran Ormas dalam menjadi agen pemerintah yang banyak melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah terutama dalam bidang pemberdayaan, peran dalam bidang pemberdayaan yang dimainkan oleh ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Artikel ini merupakan sebuah telaah kepustakaan dan dipotong dengan hasil penelitian tentang peran Ormas Muhammadiyah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di Kota Padang Panjang.

Kata kunci : *Fungsi Pemerintah, Peran Ormas, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Fungsi pemberdayaan oleh Pemerintah menjadi marak kembali di perdebatkan oleh banyak kalangan seiring semakin banyak fenomena melemahnya tingkat keberdayaan masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Jika makna pemberdayaan itu *empowering* yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, dalam artian bersifat politis maka UU Pilkada yang baru di sahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu membuktikan telah lemahnya nilai tawar masyarakat dalam konteks politik. Jika pemberdayaan itu dimaknai sebagai *enabling*,

yaitu proses belajar untuk meningkatkan kemampuan (*ability*), Kapasitas (*capacity*) dan kapabilitas (*capability*) masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kelangsungan kehidupan mereka maka banyak data membuktikan betapa masyarakat kita tidak berdaya terutama dalam konteks keberdayaan ekonomi.

Asumsi ini bukan berarti menafikan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemberdayaannya, namun tidak dapat pula kita pungkiri bahwa pemerintah belum maksimal bahkan cenderung banyak mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program pemberdayaan kepada masyarakat. Betapa banyak program pemberdayaan yang sudah di realisasikan oleh pemerintah misalnya program-program pembinaan usaha kecil dan menengah, kredit usaha rakyat dan program-program lainnya dianggap tidak mencapai target yang sebelumnya telah dirumuskan apalagi akan berdampak pada keberdayaan masyarakat.

Ada begitu banyak agenda pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan bidang kesehatan, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan bidang pendidikan dan lain sebagainya. Rasanya mustahil jika semua agenda atau program pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Selain alasan kompleksitas program, alasan utama lainnya adalah karena ada dua fungsi pokok pemerintah lainnya yang mesti diprioritaskan yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan.

Oleh karena itu menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk dapat berbagi fungsi agar program-program pemerintah yang volumenya cukup besar tersebut menjadi berkurang. Kondisi seperti inilah dibutuhkan sebuah badan selain pemerintah yang dapat mencurahkan segala perhatian dan dayanya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maka, keberadaan organisasi kemasyarakatan yang nota bene sebuah organisasi yang bekerja untuk masyarakat dianggap paling relevan untuk menjadi agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah bidang pemberdayaan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran ormas dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ?

Tinjauan Literatur

Fungsi Pemerintah

Kata *function* berarti “*the kind of action or activity proper to any person or thing; the purpose for which something is designed or exist; role.*” (Ndraha, 2003). Fungsi menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, artinya fungsi merupakan sebuah kondisi yang dinamis karena diwujudkan dengan berbagai macam program-program yang menunjang pencapaian target tertentu.

Tujuan dan fungsi sangat erat sekali hubungannya sebab tujuan tanpa fungsi adalah mustahil, tujuan hanya akan menjadi *utopi* yaitu impian yang hanya berada pada level yang idealis dan abstrak karena tidak dapat diwujudkan. Salah satu alat untuk mewujudkan tujuan adalah dengan membuat berbagai kegiatan dan aktifitas yang menunjang pencapaian tujuan yaitu dengan membaginya kedalam berbagai macam fungsi yang jelas.

Maka, fungsi pada hakekatnya merupakan transformasi dari yang mulanya abstrak menjadi riil dan kongrit. Contohnya sebuah perusahaan tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang besar tersebut mestinya direalisasikan dengan aktivitas dan kegiatan atau program yang nyata seperti memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, promosi yang intensif, pelayanan yang prima dan lain sebagainya.

Begitu juga Negara, sebagai sebuah organisasi besar Negara tentu punya tujuan yang hendak dicapai. Indonesia misalnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia ke empat mendeklarikan tujuan Negara yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan Negara yang mulia dan sangat berat ini akan bisa dicapai jika Negara merancang fungsi-fungsi yang kongrit dengan segala program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian tujuan Negara tersebut.

Pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah Negara dalam rangka pemcaipaan tujuan Negara. Pada awalnya pemerintahan dibentuk untuk menghindari keadaan kekacauan artinya pemerintah bertugas untuk mengatur hilir mudik kepentingan kelompok masyarakat, pemerintah diberikan otoritas yang penuh bertindak atas nama mayoritas demi terciptanya kenyamanan dan kedamaian masyarakat. (Varma : 2001).

Seiring perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta usaha untuk merealisasikan tujuan Negara maka, pemerintah juga mengalami perkembangan fungsi dan peran agar tidak terjadi distorsi antara tujuan dan fungsi serta kebutuhan dan program-program pemerintah. Proses di mana pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya banyak dirumuskan oleh para sarjana pemerintahan, dari aspek manajemen misalnya pemerintah berfungsi dalam segala aspek manajemen yaitu member petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi serta menjaga hubungan pemerintahan yang harmonis. (Syaukani : 2002).

Pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dari tiga fungsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi masyarakat, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai penyedia kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dalam konteks pelayanan publik. Sedangkan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, artinya semakin baik kondisi ekonomi, politik, sosial masyarakat maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah, hal ini berkaitan dengan fungsi pemberdayaan dan pembangunan pemerintah.

Pemberdayaan Masyarakat

Ada banyak defenisi yang telah dirumuskan terkait dengan pemberdayaan masyarakat antara lain pertama, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata tetapi juga kolektif (Harry Hikmat:2001 dalam Eko Prasajo : 2004)

Kedua, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai sebuah proses merupakan salah satu proses yang berkesinambungan (Rukminto adi :2002 dalam Prasajo:2004)

Dari dua defenisi ini maka makna pemberdayaan masyarakat dapat di artikan sebagai *empowering*, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Makna yang kedua adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu diartikan sebagai *enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. (Draha:2003)

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan yang diemban oleh pemerintah setidaknya ada empat kategori pemberdayaan yang menjadi agenda utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yaitu, (1) Pemberdayaan politik, bertujuan meningkatkan *bargaining position* masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang berdaya dalam bidang politik akan mempunyai nilai tawar yang kuat dalam setiap proses politik terutama dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan menuntut hak nya akan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bernegara. (2) Pemberdayaan politik ekonomi, yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang punya daya saing, daya beli dan memiliki penghasilan yang cukup untuk menunjang kebutuhan ekonomi mereka. (3) Pemberdayaan politik sosial budaya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sehingga akan tercipta manusia yang siap pakai dan mampu bersaing dalam kehidupan global. (4). Pemberdayaan politik lingkungan yaitu, program pelestarian lingkungan ditengah semakin maraknya persoalan lingkungan hidup dewasa ini.

Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.

Ormas dibentuk dengan beberapa tujuan, pada pasal 5 UU No.17 Tahun 2013 juga di paparkan secara rinci tujuan dari ormas yaitu (1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat (3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME (4) Melestarikan dan memelihara norma, etika, dan budaya

yang hidup dalam masyarakat (5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup (6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (8) mewujudkan tujuan Negara.

Pada pasal 6 nya Undang-undang ini juga menegaskan beberapa fungsi dari Ormas yaitu (1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota/atau tujuan organisasi (2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi (3) penyalur aspirasi masyarakat (4) Pemberdayaan masyarakat (5) Pemenuhan pelayanan sosial (6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat bersatuan dan kesatuan bangsa (7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan dan fungsi Ormas menurut UU ini mempertegas bahwa Ormas menjadi sangat penting dalam mempermudah kerja pemerintah dalam pencapaian tujuan Negara. Ormas dapat menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam berbagai hal terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif politik Ormas merupakan kelompok kepentingan, kelompok kepentingan menjadi bersifat politis jika melakukan tuntutan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Individu menjadi penting secara politik jika dia menjadi bagian dari suatu kelompok kepentingan. Kelompok ini akan menjadi jembatan penting antara individu dengan pemerintah. (Kusumanegara S :2010).

Haryanto (1982) menjelaskan bahwa kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan kepentingan, keinginan, sifat, dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan tersebut. Adapun jenis-jenis kelompok kepentingan yaitu, (1) Kelompok kepentingan anomik yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan, (2) kelompok kepentingan non-assosiasional dimana kelompok ini jarang terorganisir dengan rapid an kegiatannya bersifat kadangkala, (3) kelompok kepentingan institusional yaitu kelompok yang bersifat formal dan memilki fungsi-fungsi politik dan sosial lain disamping atikulasi kepentingan, (4) kelompok kepentingan assosiasional yaitu kelompok kepentingan yang terasosiasi dengan baik dan rapid an punya program-program yang jelas sesuai dengan kepentingan kelompok. (Masoed dan Andrews : 1993)

Mengacu pada pembagian kelompok kepentingan diatas maka Ormas masuk pada kategori ke empat yaitu kelompok kepentingan assosiasional, kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrilis, kelompok-kelompok agama dan lainnya. Ormas di Indonesia memiliki basis yang berbeda-beda, maka dalam kategori ini ada dua kelompok Ormas yaitu Ormas yang berbasis keagamaan dan Ormas berbasis Nasionalis. Ormas keagamaan yang cukup berpengaruh besar di Indonesia adalah Muhammadiyah dan Nahnatul Ulama (NU), sementara yang berbasis nasionalis banyak sesuai dengan profesi, kelompok dan lainnya.

Dalam artikel ini penulis akan lebih banyak melihat peran Ormas berbasis keagamaan dalam menjalankan peran pemberdayaan masyarakat dalam membantu kerja pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Ormas keagamaan tersebut adalah Muhammadiyah yang secara historis, politis dan gerakan memang memiliki peran yang cukup banyak dalam pemberyaan, ini terbukti dengan banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang berhubungan langsung dengan masyarakat mulai dari bidang pendidikan, sosial dan ekonomi.

PEMBAHASAN

Peran Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Civil society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang didambakan oleh Negara apalagi bagi Negara yang meniscayaakan sebuah sistem demokrasi. Civil society digambar sebagai sebuah konsep dimana adanya ruang yang cukup luas untuk individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan sangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dalam suatu Negara

Pendapat lain menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Di samping itu, ada pula pandangan yang member makna pada *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab. (Gaffar : 2002)

Ini adalah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan

diatas agak berbeda secara empirik. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program-program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut.

Kegagalan program pemerintah bidang pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul satu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Dalam konteks inilah Peran Ormas menjadi penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan punya agenda sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan fungsi pemberdayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ormas dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat.

Mengacu pada tujuan dan fungsi Ormas menurut UU No. 17 Tahun 2013 dalam pemberdayaan mestinya ormas memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. Afan Gaffar (2002) mengutip Heyzer, Ryker, and Quizon (1995) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan, yaitu :

- a. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat 'grassroots', yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya
- c. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pemerintah.

Selain peranan diatas ada juga peran lain yang dirumuskan oleh Tadashi Yamamoto (1995) di kutip juga oleh afan Gaffar 2002 yaitu (1) katalisasi perubahan sistem (2) memonitor pelaksanaan program Negara (3) memfasilitasi rekonsiliasi warga Negara dengan lembaga Negara (4) Implementasi program Negara.

Dari beberapa rumusan diatas maka, dapat dibuktikan bahwa peran ormas dalam masyarakat cukup penting. Keberadaan Ormas dalam sebuah Negara demokrasi juga dijadikan

tolak ukur bagi sebuah proses demokrasi. Kuatnya nilai tawar satu Ormas terhadap Negara sebenarnya telah menunjukkan kuatnya masyarakat dan itu artinya telah terjadi peningkatan pemberdayaan politik dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Ormas mestinya memperkuat pengaruhnya dalam Negara, sehingga ormas akan dapat menjadi cerminan masyarakat dalam setiap proses kebijakan pemerintah, adapun Ormas yang dapat secara efektif mampu menjadi mitra dan punya pengaruh dalam proses kebijakan pemerintah adalah yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut ; (1) Ormas yang Jumlah anggotanya atau massa organisasinya secara jumlah sangat banyak (2) Memiliki Sumber keuangan atau kekayaan atau amal usaha yang banyak (3) Punya aturan main yang jelas, disiplin dan konsisten (4) Kepemimpinan yang kuat (5) Memiliki akses ke pembuat keputusan.

Hasil penelitian penulis tentang perilaku politik elit pimpinan Muhammadiyah di Kota Padang Panjang pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai Ormas besar di Kota tersebut dan telah memenuhi kriteria Ormas yang kuat seperti telah dipaparkan diatas dapat menjadi Ormas yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu nya dengan membuat usulan-usulan program untuk masyarakat kepada pemerintah sekaligus menjadi implementor program-program tersebut, baik bidang pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial budaya, bahkan pemerintah dalam membuat kebijakan selalu menjadikan Ormas Muhammadiyah ini sebagai Aktor utama yang menjadi mitra dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam bidang pemberdayaan.

KESIMPULAN

Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam bidang pemberdayaan. Sebagai agen pemerintahan Ormas memiliki peran yang cukup banyak, keberadaan Ormas dalam Negara juga menjadi bukti keberdayaan Masyarakat. Ormas yang kuat dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah diyakini dapat menjadi agen pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan khususnya bidang pemberdayaan.

Daftar Pustaka

Buku

Gaffar, A, 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Haryanto, 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Kusumanegara, S. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media

Mas`oed, M dan Colin M.A. 1993. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Ndraha, T, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Prosodjo, E. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Parisipasi Publik*. Depok. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik UI.

Syaukani dkk, 2002. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan RI*.

Varma, SP, 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Penelitian

Mubarak,A. 2012. *Perilaku Politik Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta*. Penelitian di biyai oleh DIPA UNP

Peraturan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

RPSEP-59

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PENDORONG KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Purwaningdyah Murti Wahyuni
Siswandar K
UPBJJ UT Semarang
purwaningdyah@ut.ac.id
siswandar@ut.ac.id

Abstrak

Agenda pembangunan nasional masih menyisakan sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Disamping itu tantangan yang harus diperhatikan adalah menjaga kedisiplinan fiskal, karena itu pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi. Sangat perlu menjaga kesinambungan fiskal agar ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas antara lain dengan lebih memperhatikan pentingnya pengalokasian dan penggunaan anggaran secara efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Sinkronisasi regulasi lintas sektoral masih menjadi kendala bagi pembangunan sektoral. Begitu pula Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu terus didorong sebagai moda bagi proses penyederhanaan regulasi.

Kata kunci : Reformasi Birokrasi, kinerja, penyelenggaraan pemerintahan

PENDAHULUAN

Dewasa ini pembangunan di Indonesia mengalami kemerosotan yang amat drastis dari berbagai aspek. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia antara lain korupsi, yang merupakan salah satu contoh kemerosotan pada aspek humanisasi; melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang dollar pada aspek emansipasi; dan kemiskinan yang tidak teratasi. Dalam hal ini Pancasila merupakan sebuah tameng sekaligus pedang emas milik bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat bertahan dari serangan arus perkembangan zaman tersebut. Ketangguhan Pancasila tidak diragukan lagi.

Presiden baru Indonesia itu sudah ditunggu banyak pekerjaan dan agenda demi melanjutkan pembangunan nasional yang tengah berjalan. Menurut Firmanzah (staf Ahli Presiden SBY), tantangan lainnya terkait menjaga kedisiplinan fiskal, sehingga pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal sehingga ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Disamping tantangan ekonomi tersebut, persoalan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan upaya perluasan pasar lapangan kerja juga sangat dibutuhkan (Metronews.com, Jakarta, 14/7/2014).

METODOLOGI

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis sederhana dengan literatur yang ada, sehingga diharapkan mampu mengupas kajian tentang Reformasi Birokrasi Sebagai Pendorong Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ramlan Surbakti dalam Buku Hukum Tata Pemerintahan (Universitas Terbuka: 2012) menjelaskan bahwa pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Segi kegiatan (dinamika), dalam hal ini pemerintahan memiliki pengertian yaitu kegiatan atas usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara.
2. Segi struktural fungsional, dari segi ini pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Segi tugas dan kewenangan, sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas berarti berarti seluruh

fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.

Setiap negara sebagai suatu organisasi manusia yang hidup dan bekerja sama (organisasi) untuk mewujudkan beberapa tujuan bersama, yang akhirnya pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Miriam Budihardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik (1972) menyimpulkan bahwa setiap negara, terlepas dari ideologinya, mempunyai beberapa minimum fungsi yang bersifat esensial, yaitu :

1. Pengaturan ketertiban
2. Pertahanan
3. Kesejahteraan atau kemakmuran
4. Keadilan

Charles E. Meriam dalam *Systematics Politics*; 1947 menyebutkan ada lima fungsi negara, yaitu :

1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan

Sedangkan menurut Ramlan Subakti yang tepat adalah pembagian fungsi negara yang diberikan oleh Almond (Ramlan Surbakti; 1995 ; h.173) dimana menurut Almond ada tiga fungsi negara (pemerintah) , yaitu :

1. Pembuatan peraturan (*rule making*)
2. Penerapan peraturan (*rulling application*)
3. Penghakiman peraturan (*rule adjudication*)

Menurut Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 27 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tujuan strategis dari kementerian tersebut adalah ;

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;
3. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
4. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel;
5. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN dan RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Adapun strategi percepatan Reformasi Birokrasi menurut Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 58 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah :

1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*E-Government*)
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS

Sondang P. Siagian (1995) dalam Buku Pengembangan Organisasi (Universitas Terbuka ; 2011) menyatakan bahwa perkembangan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada organisasi disebabkan oleh adanya hal-hal berikut :

1. Tantangan utama dimasa depan
2. Perubahan dalam konfigurasi ketenagakerjaan
3. Peningkatan di bidang tingkat pendidikan para pekerja
4. Revolusi dibidang teknologi
5. Perkembangan perekonomian dunia
6. Berbagai kecenderungan dsosial
7. Faktor geopolitik
8. Persaingan
9. Pelestarian lingkungan

Selain itu Margulies dan Raia (1978) dalam Buku Pengembangan Organisasi yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka juga mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan dan kehidupan organisasi, yaitu terjadinya hal-hal berikut :

1. Perubahan peranan dan tujuan organisasi, hal ini terlihat dalam renstra yang dibuat oleh Kementerian Penadayagunaan Aparatur negara tentang Reformasi Birokrasi, dimana perubahannya dilakukan secara periodik.

2. Membesarnya ukuran dan kompleksitas organisasi, hal ini dapat kita lihat dari semakin bertambahnya jumlah Kementerian yang menangani berbagai masalah dalam Kepemimpinan Presiden dan bertambahnya jumlah personil yang menjabat.
3. Tujuan organisasi menjadi lebih kompleks dan sukar, hal ini dapat kita lihat dari semakin banyak, luas dan kompleksnya masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam setiap tahunnya.

Faktor internal lain yang mempengaruhi kehidupan organisasi, menurut Glen H. Varney (1977) dalam Buku Pengembangan Organisasi (Universitas Terbuka) adalah sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari organisasi secara keseluruhan, perubahan terjadi karena :
 - 1) Iklim dan kultur organisasi
 - 2) Gaya dan strategi kepemimpinan
 - 3) Hubungan dengan lingkungan
 - 4) Pola komunikasi atau proses saling mempengaruhi
 - 5) Struktur organisasi
 - 6) Cara pengorganisasian pekerjaan
 - 7) Mekanisme pengendalian
- b. Ditinjau dari subsistem organisasi, perubahan terjadi karena :
 - 1) Norma yang berlaku
 - 2) Struktur kelompok
 - 3) Struktur kekuasaan dan wewenang
- c. Ditinjau dari pekerjaan dalam kelompok, perubahan terjadi karena :
 - 1) Prosedur pengambilan keputusan
 - 2) Norma kerja
 - 3) Norma dan prosedur komunikasi
 - 4) Peranan-peranan dalam kelompok
 - 5) Kekuasaan dan wewenang
- d. Ditinjau dari tingkat-tingkat penjurangan, perubahan terjadi karena :
 - 1) Pola saling mempengaruhi yang terjadi antar berbagai tingkatan penjurangan
 - 2) Lokasi pekerjaan atau tanggungjawab
 - 3) Kekuasaan dan wewenang
 - 4) Praktek dan prosedur komunikasi

- 5) Tingkat saling percaya
- 6) Citra diri sendiri dan citra orang lain terhadap citra sendiri
- 7) Pengendalian

Ada 3 pendekatan yang seringdigunakan untuk melakukan pengembangan organisasi, yaitu :

1. *Unilateral Power*, ada 3 pendekatan yaitu :
 - a. Dengan mempergunakan dekrit
 - b. Penggantian pejabat
 - c. Pendekatan struktural
2. *Shared Power* atau Kekuasaan Berbagi, ada dua pendekatan yaitu :
 - a. Pendekatan keputusan kelompok
 - b. Pendekatan pemecahan persoalan
3. *Delegated Power* atau Kekuasaan yang di delegasikan, ada dua pendekatan yaitu :
 - a. Pendekatan pembahasan data
 - b. Pendekatan pelatihan kepekaan

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sangat menarik mendiskusikan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari uang masyarakat. Terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi. Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.Reformasi bertujuan mengoreksi dan memperbaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi.

Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa Indonesia tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi harus dilakukan mulai dari pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama diikuti oleh seluruh aparatur dibawahnya. Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Hal itu Nampak dari buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Reformasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka. Penyelenggaraan negara yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SAKIP)

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Menurut Rewansyah (2010:151) dalam Delly Mustafa (2014), reformasi birokrasi minimal harus mencakup lima sasaran utama yaitu:

- a. Restrukturisasi organisasi lembaga pemerintahan.

- b. Simplifikasi dan otomatisasi.
- c. Rasionalisasi dan realisasi.
- d. Regulasi dan deregulasi.
- e. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai.

Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan *good governance* karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi dengan semangat yang tinggi dan kesungguhan dari semua pihak merupakan point utama untuk menciptakannya. Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab merupakan pengejawantahan terbebas dari segala macam bentuk korupsi, yang dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang untuk tujuan pribadi.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2002,177-179) dalam Buku Hukum Tata Pemerintahan (Universitas Terbuka, 2014) ada sejumlah unsur yang dominan yang melekat pada tindakan korupsi yaitu :

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Orang-orang yang mempraktekkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Birokrasi juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Sebagai contoh dalam Suara Merdeka sabtu 30 Agustus 2014 halaman 12 disinyalir banyak pejabat di sejumlah instansi yang menggunakan mobil dinas tanpa dilengkapi stiker

BBM Non subsidi bahkan mobil dinas berpelat merah diganti dengan pelat hitam hanya untuk menghindari pembelian pertamax ke premium. Hal ini masih nampak kesadaran hukum aparat masih sangat rendah sehingga diperlukan peraturan yang tegas dan terukur. Peraturan yang ditujukan meringankan beban Negara dilaksanakan oleh penyelenggara Negara.

Kasus yang lain terkait dengan mental pejabat publik adalah yang baru-baru ini perihal pungutan liar oleh petugas polisi, pungutan liar terhadap tunjangan guru. Praktik suap atau pungutan liar pada dasarnya terjadi karena kedua belah pihak sama-sama sepakat melakukan baik dalam keadaan terpaksa atau kemauan sendiri. UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyatakan definisi praktik korupsi kedalam 30 jenis yang salah satunya adalah praktik suap memyuap. Keberanian menolak pemberian pungutan belum membudaya dalam perilaku masyarakat sehingga masih menjadi pokok penyebab sulitnya memberantas praktik korupsi.

Masyarakat luas tetap mendambakan tiga hal yaitu:

1. pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pilkada langsung), PNS harus netral dan hanya loyal kepada kepentingan negara.
2. perlindungan melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
3. memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan mereka dengan pemberian pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas.

Dalam Kompas.com, Senin, 6 Oktober 2014, dikatakan bahwa adanya program reformasi birokrasi sudah barang tentu akan menambah besar Anggaran belanja pegawai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 dimana anggaran tersebut melejit menjadi Rp 276,7 triliun. Dibandingkan pagu anggaran belanja pegawai 2013, kenaikannya mencapai Rp 43,7 triliun atau kenaikan terbesar dibandingkan dengan jenis belanja lainnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Selasa (20/8/2013), menyatakan, kenaikan belanja pegawai tahun 2014 guna mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dan sebagai konsekuensi rencana kenaikan gaji pokok aparatur negara dan

pensiun pokok. Menurut rencana, akan ada 14 kementerian dan lembaga negara yang melakukan reformasi birokrasi mulai tahun 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, anggaran belanja pegawai dianggarkan Rp 276,7 triliun atau 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 adalah Rp 233 triliun atau 2,5 persen dari PDB. Artinya, ada tambahan anggaran untuk tahun 2014 senilai Rp 43,7 triliun atau naik 18,8 persen. Ini adalah yang terbesar dibandingkan jenis belanja lainnya. Bahkan jika seluruh tambahan anggaran di luar belanja pegawai dijumlah, hasilnya adalah Rp 27,1 triliun atau 60 persen dari tambahan anggaran belanja pegawai.

PENUTUP

Dari materi yang tersaji ada beberapa kesimpulan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan kinerja birokrasi adalah:

1. Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi harus memahami terlebih dahulu apa itu hakikat reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal dan tidak justru melenceng dari yang diagendakan.
2. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.
3. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.
4. Mengingat besarnya anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk proses Reformasi Birokrasi Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini harus benar-benar menghitung dengan baik, untuk setiap pos-pos yang ada dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Kumorotomo, Wahyudi (2002, 177-179), dalam Buku : “Hukum Tata Pemerintahan” , Penerbit ; Universitas Terbuka: 2014

Margulies dan Raia (1978), dalam Buku : “Pengembangan Organisasi” , Penerbit : Universitas Terbuka, Edisi/cetakan Keenam , 2011

Metronews.com, Jakarta : 14/7/2014

Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 27 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , <http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/tujuan-strategis>

Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 58 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, <http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/strategi-percepatan-rb>

Rewansyah (2010:151), dalam Mustafa, Delly, Birokrasi Pemerintahan, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013

Siagian, Sondang P. (1995), dalam Buku : “Pengembangan Organisasi” , Penerbit : Universitas Terbuka, Edisi/cetakan Keenam , 2011

Surbakti, Ramlan, “Hukum Tata Pemerintahan” , Penerbit ; Universitas Terbuka: 2014

Susanto, Heri, “Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran”, diakses dari situs <http://heri.susanto@vivanews.com>

Suara Merdeka, Surat Kabar Cetak, Sabtu 30 Agustus 2014

Varney, Glen H. (1977), dalam Buku : “Pengembangan Organisasi” , Penerbit : Universitas Terbuka, Edisi/cetakan Keenam , 2011

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/21/0726171/14.Kementerian/Lembaga.Mendapat.Remunerasi.Belanja.Pegawai.Melejit?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kekowp ; Kompas.com, Senin, 6 Oktober 2014

<http://po-box2000.blogspot.com/2010/11/>

RPSEP-60

OPTIMALISASI PENGAWASAN INTERN BUMD SEBAGAI WUJUD PENYELAMATAN ASET

Megafury Apriandhini
Universitas Terbuka
megafury@ut.ac.id

Abstrak

Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang dengan segala cerminan keburukan melalui warta berita. Krisis individu dan birokrasi yang terus merosot membawa Indonesia semakin jauh dari cita-cita kesejahteraan yang merata. Birokrasi sebagai sarana untuk pengelolaan lembaga dan aset negara masih menjadi hambatan utama selain pelaku negara yang menyimpang. BUMN/BUMD sebagai badan milik negara yang berwajah dua dengan fungsinya sebagai pelayanan publik dan swasta untuk mencari laba untuk negara. BUMD sebagai badan usaha yang dimiliki setiap daerah dirasa kurang maksimal. Menurut hasil pemeriksaan BPK pada BUMD terdapat beberapa temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berupa kerugian negara belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, potensi kerugian daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, kekurangan penerimaan berupa penerimaan daerah. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan lahan korupsi yang sering ditemui. Pemerintah daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan daerah. Berbagai pembenahan yang dilakukan antara lain dengan intensifikasi penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan, kecermatan menghitung potensi pajak dan memungut pajak daerah, serta optimalisasi penerimaan dari BUMD. Di sisi pengeluaran negara, BUMD harus mengelola setiap kegiatan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menekan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara/daerah. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, penyediaan fasilitas publik, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kata kunci: BUMD, pengawasan, aset negara.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan pembangunan Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah bukan menjadi jaminan masyarakat makmur dan sejahtera. Hal ini tentu harus disegerakan sesuai dengan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia adalah tujuan luhur bangsa Indonesia. Segala usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan menyelamatkan perekonomian negara masih terus dilakukan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional perekonomian bangsa, sehingga dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat semaksimal dan seefektif mungkin dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam rangka perwujudannya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu yang sumber penerimaan daerah dari bentuknya sebagai hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

BUMD dalam perkembangannya dewasa ini belum semuanya berjalan dengan maksimal. Masih banyak pelanggaran peraturan dan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meskipun sudah terdapat Satuan Pengawas Internal dalam BUMD. Ketidakpatuhan

peraturan tersebut meliputi belanja yang tidak sesuai, kekurangan penerimaan, penginventarisan aset, dan Akibat dari pelanggaran tersebut tentu merugikan negara yang tidak sedikit jumlahnya.

BPK sebagai badan pemeriksa memiliki wewenang untuk melaksanakan audit BUMD yang mempunyai kewajiban untuk melindungi segala urusan rumah tangganya dengan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian hukum. BPK dalam pemeriksaannya memiliki risalah dengan penjabaran beserta rekomendasi dari temuannya yang untuk selanjutnya digunakan dasar BUMD atau instansi lain untuk membenahi kebocoran yang tidak diharapkan. Berdasarkan hal tersebut kajian dalam artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan aset negara melalui pengelolaan BUMD. Sebagai sumber pemasukan untuk negara, perlu memperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang di antaranya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Berikut adalah salah satu hasil ikhtisar pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa masih terdapat banyak temuan pelanggaran dan ketidakpatuhan BUMD terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara.

No	Sub Kelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	572	
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	76	114.884,15
2	Potensi Kerugian daerah/perusahaan	55	85.759,88
3	Kekurangan Penerimaan	81	80.885,36
Sub Total I		212	281.529,39
4	Kelemahan Administrasi	247	-

5	Ketidakhematan	35	34.808,18
6	Ketidakefisienan	3	490,18
7	Ketidakefektifan	93	195.751,69
Sub Total II		378	231.050,05
Total		590	512.579,44

Kelompok temuan PDTT pada BUMD pada Semester II Tahun 2013

Sumber: <http://www.bpk.go.id/>

Hasil dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tersebut menguraikan berbagai temuan dan bentuk tindak lanjut yang disarankan dari keputusan BPK sebagai berikut.

Temuan Kerugian daerah/perusahaan

Berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang umumnya disebabkan direksi kurang cermat dalam menyusun kebijakan dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

- BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan yang terjadi dengan cara menyeteror uang ke kas daerah/perusahaan.

Perusahaan daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya bersal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Anggaran pengelolaan barang daerah dibebankan kepada anggaran PD atau BUMD yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan kepala daerah (gubernur) melalui badan atau dewan pengawas. Sehingga dalam hal pembuatan anggaran setiap tahunnya, tidak dapat ditetapkan sendiri melainkan persetujuan kepala daerah terlebih dahulu.

Dalam hal ini BUMD sebagai bagian dari daerah maka pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah (gubernur) yang mewakili pemerintah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga kepala daerah dalam menyusun harus lebih cermat dengan berbagai kewenangan yang terdapat dalam Pasal 5 PP Nomor 58 Tahun 2005;

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen, namun bukan berarti hanya dilakukan setelah perencanaan dan pengawasan dilakukan, melainkan sejak tahap perencanaan maupun pelaksanaan karena pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan atas pelaksanaan sebuah rencana kerja. Sehingga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perencanaan di mana pelaksanaan pengawasan dimulai dari perencanaan, penetapan tujuan dan sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan menjadi sangat penting untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyelewengan ataupun kekeliruan. BPK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melakukan audit setiap tahun.

Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan

Berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih yang pada umumnya disebabkan Pejabat pelaksana tidak melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan tidak tegas dalam mengambil tindak optimal menjalankan fungsi pengawasan kepada direksi atas kebijakan dan pelaksanaan penyaluran kredit berlandaskan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan. Pejabat pelaksana juga kurang cermat dalam melakukan penatausahaan piutang dan kurang optimal melakukan penagihan angsuran piutang.

- BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar memerintahkan Pejabat pelaksana untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan melakukan usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan. Selain itu dewan pengawas menginventarisir dan memastikan bahwa seluruh kebijakan kredit yang telah ditetapkan direksi tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sesuai

ketentuan serta lebih optimal melaksanakan upaya penagihan, restrukturisasi, dan pengambilan agunan sesuai ketentuan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang. Inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dilakukan agar pelanggan dapat tertib dalam melakukan perjanjian. Mengingat dalam tenggang waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang (pembayaran) akan mengakibatkan nilai mata uang yang menurun. Sehingga hal ini perlu untuk diperhitungkan.

Dalam BUMD direktur yang membidangi pengelolaan barang daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi barang. Sedangkan yang bertanggung jawab atas inventarisasi barang di lingkungan tanggungjawabnya adalah Kepala Unit. Daftar inventaris dibuat untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Administrasi pengelolaan barang daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. Sehingga tercatat semua untuk pelanggan yang menunggak.

Temuan kekurangan penerimaan

Berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan yang pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta penganggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

- BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Hasil pemeriksaan dan rekomendasi terhadap temuan BPK pada BUMD tersebut menggambarkan bahwa masih lemahnya fungsi dari SPI dalam BUMD. Sehingga masih banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Pentingnya pengawasan dari tahap perencanaan dan pelaksanaan dibutuhkan untuk menanggulangi dan mencegah adanya pelanggaran.

Selain hal yang direkomendasikan oleh BPK, pengoptimalisasian BUMD dapat dilakukan membenahan dari berbagai hal yang juga tidak kalah pentingnya.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing. Dengan adanya dasar di antara keduanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama serta memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak Perusahaan yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan, dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 43 Tahun 2000. Sedangkan untuk pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah.

Litigasi

Litigasi sangat penting dan riskan apabila tidak disegerakan, kepastian hukum sangat diperlukan. Dalam melakukan mencari laba, BUMD memungkinkan untuk membeli tanah hasil pengembangan atau dari hibahan oleh daerah, sehingga perlu untuk sertifikasi dan updating sertifikasi tanah aset. Dalam hal ini untuk mengurangi resiko adanya sertifikat bertumpuk yang biasa kita temui dalam masyarakat yang tidak menutup kemungkinan dengan tanah milik instansi negara.

PENUTUP

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu yang sumber penerimaan daerah dari bentuknya sebagai hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Dalam perkembangannya masih belum maksimal kinerjanya dengan adanya temuan BPK semester II tahun 2013 yaitu masih terdapat banyak penemuan-penemuan tidak patuh hukum. Oleh karena hal tersebut BPK memberikan rekomendasi untuk lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian, elakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan melakukan

usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku. Dengan adanya rekomendasi tersebut dan kemudian dapat dilaksanakan oleh BUMD bersangkutan, maka akan menambah penerimaan negara dan menyelamatkan aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perjanjian* . Bandung: Citra Aditya Bakti
- Astuti, Puji dkk. 2011. *Hukum tata pemerintahan Edisi 2*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.
- Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 Buku I. 2013. Jakarta: BPK.
- Kepmendagri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

RPSEP-61

PENGUKURAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Enceng dan Yuli Tirtariandi EA
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
E-mail: enceng@ut.ac.id

Abstrak

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara lain dipengaruhi oleh faktor keuangan daerah. Keuangan daerah menempati posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah dan bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dalam persentase.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dasril Munir ,2004 : 96). Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Manullang dalam Munir (2004:92) menyatakan bahwa bagi suatu pemerintahan daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal senada diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (2005 :138) bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Faktor keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Faktor keuangan sangat penting dalam agenda penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keuangan daerah menempati posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak, mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah dan kemampuan daerah berotonomi memerlukan kemampuan dukungan keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kaho (2005:138) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal senada diungkapkan Sedarmayanti (2003:22) yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Rasyid (1998: 48) mengartikan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memenuhi fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional

secara keseluruhan. Jika dilihat sebagai hak, otonomi daerah berfungsi sebagai alat dan cara untuk membuat daerah atau masyarakat mandiri (Ndraha, 2002 : 186-187).

Pelaksanaan otonomi daerah menurut Kaho (2005 : 60) dipengaruhi oleh faktor manusia pelaksanaanya, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemennya. Sementara itu, Suwandi (2003 : 3) mengemukakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Lebih lanjut, Fernandez (1992 :26-36) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi adalah institusi, keuangan dan aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam hal keuangan daerah.. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan Aldeefer dalam Lains (1995 : 39) dan Munir (2004 :2).

Desentralisasi Fiskal

Litvack dan Seddon (1999 : 2) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintahan semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Cheema dan Rondinelli (1983). Litvack dan Seddon membagi desentralisasi menjadi empat tipe, yaitu :

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik bertujuan agar semangat demokratisasi yang berkembang di masyarakat dapat tersalur secara positif. Melalui desentralisasi, masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, pembuatan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, serta memanfaatkan hasilnya. Melalui desentralisasi politik dibentuk badan-badan perwakilan yang dipilih oleh masyarakat yang berfungsi menjalankan fungsi perwakilan, pembuatan kebijakan, serta fungsi pengawasan politik terhadap badan penyelenggara pemerintahan.

2. Desentralisasi Administratif

Desentralisasi administrasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Melalui cara ini dapat dipilah dan dipilih aktivitas-aktivitas pemerintahan

yang dapat ditransfer kepada pejabat-pejabat lain di luar pejabat pemerintah pusat yang ada di ibukota negara.

3. Desentralisasi Ekonomi atau Pasar

Desentralisasi ekonomi pasar atau pasar dilakukan dalam bentuk privatisasi atau deregulasi dengan mengalihkan tanggung jawab berbagai fungsi dari sektor publik ke sektor privat.

4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Bentuknya dapat berupa pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan mengadakan pungutan, pembiayaan bersama, perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar pemerintahan, serta pinjaman atau bantuan.

Secara harfiah, istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *Tax Policy*. Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan. Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. Desentralisasi Fiskal menurut Elmi (2005 : 26) adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya.

Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi Fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah.

Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal antara lain:

- (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah;
- (2) dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
- (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah;
- (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah;
- (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*;
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Desentralisasi Fiskal dapat dikelompokkan menjadi

- a. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan dan pemerataan serta memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam;
- b. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah intinya menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perwujudan asas Desentralisasi. PAD sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya maka dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas Daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Di samping itu, bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan dana reboisasi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh

alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah pusat dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dalam lain-lain pendapatan adalah hibah. Hibah dapat berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Di samping itu, pemerintah juga memberikan dana darurat. Pemberian Dana Darurat kepada daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

- (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Lebih lanjut, Syamsi (1986:199) menyatakan bahwa ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) adalah:

a. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

b. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparatur pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan

d. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber dananya antara lain PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kemampuan keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal menurut Reksohadiprojo (2000: 201) menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dalam persentase. Ukuran-ukuran derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. PAD

$$\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

b. BHPBP

$$\frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

c. Sumbangan Daerah (SB)

$$\frac{\text{SB}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{TPD} = \text{PAD} + \text{BHPBP} + \text{SB}$$

Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang

20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Di samping itu, menurut Radianto (1997 : 42) untuk menilai derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan Indeks Kemampuan Rutin (IKR). IKR adalah proporsi (rasio) antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Pengeluaran rutin adalah anggaran belanja aparatur daerah di luar gaji dan tunjangan PNS.

Pada sisi lain, Musgrave dan Musgrave (1991) menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan formula sebagai berikut :

- 1) $\frac{PAD}{TPD}$
- 2) $\frac{BHPBP}{TPD}$
- 3) $\frac{Sum}{TPD}$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2002), dengan formula sebagai berikut:

- 4) $\frac{PAD}{TKD}$
- 5) $\frac{PAD}{KR}$
- 6) $\frac{PAD + BHPBP}{TKD}$
- 7) $\frac{PAD + BHPBP}{TKD}$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total penerimaan Daerah

TKD = Total Pengeluaran Daerah

KR = Pengeluaran Rutin

Sum = Sumbangan dari Pusat

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kemampuan suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri perlu dinilai agar daerah dapat meningkatkan kemampuan otonominya. Penilaian kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dilihat antara lain dari kemampuan keuangan daerah, efektivitas organisasinya, kemampuan aparturnya. Penilaian otonomi daerah dari segi kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal.

Saran

- a. Pemerintah perlu menetapkan standar yang baku untuk mengevaluasi implementasi otonomi daerah
- b. Sistem desentralisasi fiskal harus ditinjau secara teratur untuk menjamin kepekaannya terhadap perubahan-perubahan baik yang menyangkut aspek sosial, politik,

- ketatanegaraan, ekonomi dalam negeri, maupun pengaruh globalisasi politik dan ekonomi dunia.
- c. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal diperlukan keberadaan Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*. Prinsip *money follows function* harus dilaksanakan secara konsisten. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah .
 - d. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD sehingga PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal.

Daftar Pustaka

- Elmi, Bachrul.2005. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Fernandez, Johanes.1992. *Mencari Bentuk Otonomi daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa Depan*. Jakarta : Gramedia
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lains.1995. *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*. Prisma Nomor 4 : 40-57
- Litvack & Seddon.1999. *Decentralization Briefing Noefing Notes*. World Bank Institute
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Munir, Dasril.2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI
- Musgrave & Musgrave.1991. *Public Finance : Theory and Practice*. Mc Graw Hill,Inc
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta : IIP
- Reksohadiprojo.2000. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rasyid,Ryas.1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta : Bina Pariwisata
- Sedarmayanti.2003. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju

Syamsi.1986. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

Makalah

Suwandi.2003. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang *Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*.

RPSEP-62

AKSES INFORMASI YANG AKURAT CEPAT MUDAH DAN MERATA MENDORONG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Herwati Dwi Utami
Ilmu Administrasi FISIP UT
herwati@ut.ac.id

Abstrak

Semakin maju suatu negara/daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. Di samping itu untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan informasi publik pada batas tertentu menjadi salah satu kekuatan pemaksa perubahan paradigma dan cara pelayanan publik yang disediakan pemerintah/lembaga publik. Namun teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa sepenuhnya menggantikan pelayanan dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh birokrat pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan sarana bantu dalam pembuatan keputusan dan penyajian informasi kepada publik tentang berbagai aspek layanan.

Kata kunci: Akses Informasi, Layanan Publik, Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Informasi merupakan hal penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang dapat diperoleh dengan cara konvensional hingga menggunakan peralatan komputer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Informasi ini apabila dikemas sedemikian rupa akan dapat mendukung berkembangnya partisipasi publik dan hubungan yang ideal antara masyarakat dengan aparatur pemerintah (Suprawoto,2008)

Hak untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, seperti tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal ini menjamin hak untuk “mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan”. Hak ini berlaku bagi setiap orang dengan tidak memandang batas-batas. Hak atas informasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyebarluasan berbagai nilai-nilai sosial. Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus piranti penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal satu menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan mengapa [negara](#) ini terbentuk. Kesejahteraan masyarakat akan berimbas pada politik, [hukum](#), ekonomi, dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat bisa diartikan sebagai pilar utama dalam bangunan yang bernama negara. Tanpa kesejahteraan masyarakat sebuah negara akan jalan di tempat.

Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat madani harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun negara. Demikian pula halnya akses informasi, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dan swasta dalam penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan perwujudan *good governance*.

Pentingnya Akses Informasi Bagi Masyarakat

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber terbentuknya iklim yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui peranannya yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Secara umum, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup nasional mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut (<http://www.ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2006/10/ristek-bukuputihik.pdf>):

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Meningkatkan daya saing bangsa.
- c) Memperkuat kesatuan dan persatuan nasional.
- d) Mewujudkan pemerintahan yang transparan.
- e) Meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional.

Di semua negara, pemerintah adalah organisasi pengolah data yang terbesar. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tugas pemerintah dalam pengumpulan, penyimpanan, perhitungan, analisis, dan penyebaran data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat pemerintah dan negara secara keseluruhan menjadi lebih produktif, lebih efektif, dan lebih efisien.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan untuk menghasilkan rekaman data yang lebih rapi dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Rekaman data semacam ini akan memudahkan pemantauan dan pemeriksaan. Dengan demikian akan memudahkan untuk menilai apakah pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi akan dapat ditingkatkan sehingga memungkinkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, adalah sangat tepat apabila usaha-usaha peningkatan produktivitas, akuntabilitas dan transparansi pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Sebagai Penyedia Informasi dan Pengetahuan

Sebagai produsen dan pengguna informasi yang terbesar, pemerintah adalah pemilik informasi publik terbesar, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada yang membutuhkan. Membuat informasi menjadi terjangkau adalah suatu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan unit organisasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menyediakan akses langsung secara efisien terhadap informasi publik adalah merupakan unsur penentu dalam meningkatkan kemampuan inovasi semua elemen bangsa dan negara. Akses terhadap informasi tersebut secara efisien memerlukan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Apa dan bagaimana mengatur akses informasi? Hal ini biasanya diasumsikan (McQuail dalam Burgelman, 2000) secara umum sebagai sistem komunikasi seimbang, melibatkan kebijakan yang efektif berkenaan dengan akses, harus menawarkan:

- Refleksi, seluruh sistem komunikasi keanekaragaman suatu masyarakat;
- kemungkinan bagi masyarakat sebuah negara untuk mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinan;
- dan keragaman pilihan media informasi serta sistem secara keseluruhan (surat kabar, sistem perpustakaan, televisi dan sebagainya) harus ada dan tersedia.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan untuk menyiapkan informasi publik dalam bentuk elektronik yang memungkinkan untuk dicari, dilihat, dan di-*download* oleh yang membutuhkannya melalui media komunikasi dan sistem informasi yang disiapkan untuk keperluan itu. Dalam sistem perekonomian global yang semakin intensif informasi seperti saat ini, fasilitas akses ke *database* dan dokumen yang tertata rapi sehingga menghasilkan pengetahuan atas kondisi dan potensi lokal (*local genius*) yang sangat khas dapat dijadikan unsur penting dalam peningkatan daya saing bangsa dan negara. Pengetahuan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku bisnis untuk berinovasi dan berkreasi menghasilkan usaha-usaha baru yang sangat penting dan merupakan tumpuan pertumbuhan ekonomi (*knowledge based economy*).

O'Brien (1998:25-26) mengidentifikasi beberapa atribut kualitas informasi yang akan membuat informasi publik lebih bernilai dan bermanfaat bagi publik penggunaannya. Secara lengkap, O'Brien membuat karakteristik kualitas informasi seperti tabel berikut ini :

Tabel 1. Atribut Kualitas Informasi

Dimensi Waktu	
Tak Terbatas Waktu	Informasi harus disediakan ketika diperlukan
Terkini	Informasi harus termutakhirkan saat disediakan
Frekuensi	Informasi harus disediakan sesering mungkin
Periode waktu	Informasi dapat disediakan dalam situasi yang lalu, terkini dan waktu yang akan datang
Dimensi Isi	
Akurasi	Informasi harus bebas dari salah
Relevansi	Informasi harus terkait dengan kebutuhan publik
Kelengkapan	Semua informasi yang diperlukan harus disediakan
Singkat	Hanya informasi yang diperlukan yang harus disediakan
Dimensi bentuk	
Kejelasan	Informasi harus disediakan dalam bentuk yang mudah dimengerti
Detil	Informasi disediakan secara lengkap atau dalam bentuk ringkas
Urutan	Informasi dapat disusun dalam urutan yang jelas/tertentu
Tampilan	Informasi dapat disajikan dalam bentuk narasi, angka, grafis atau bentuk lain.
Media	Informasi dapat disediakan dalam bentuk dokumen tercetak, tampilan video atau media lain

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintah akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.

Beberapa contoh dari Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah yang sudah ada antara lain : SIMTAP merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Satu Atap, yaitu sistem layanan yang mengintegrasikan beberapa layanan kepada masyarakat. Layanan-layanan yang terdapat dalam SIMTAP ini antara lain : Layanan IMB, Layanan Izin Lokasi, layanan Izin Gangguan , Layanan Izin Reklame, Layanan Surat Izin Usaha, Perdagangan (SIUP)

SIMPEG merupakan sistem informasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kepegawaian di pemerintah daerah

SIMDUK merupakan sistem informasi manajemen kependudukan yang efektif dan efisien

Pemerintah Sebagai Penggerak Pemanfaatan Informasi

Pemerintah harus memetakan suatu gambaran kebijakan dan strategi untuk mengeksploitasi aset informasi miliknya serta mengembangkan infrastruktur informasi yang diperlukan untuk mempromosikan penggunaan aset informasi tersebut secara optimal. Di negara berkembang, peran pemerintah dalam mempromosikan pemanfaatan aset informasi oleh dunia usaha adalah sangat dominan dan penting. Dengan menyediakan prasarana yang terjangkau, memberikan insentif, bimbingan, bantuan teknis, operasional dan finansial kepada pelaku bisnis dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dari pengelolaan aset informasi. Harapannya, UMKM menjadi lebih inovatif dan produktif sehingga daya saingnya meningkat. Dengan demikian perekonomian nasional secara keseluruhan ikut terangkat.

Gerakan pemanfaatan informasi tersebut sangat tergantung pada ketersediaan produk-produk dan layanan-layanan teknologi. Dengan demikian akan mendorong munculnya kebutuhan akan produk-produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti diuraikan di atas, kebutuhan tersebut sepatutnya dipasok oleh kemampuan dalam negeri supaya tidak menimbulkan ketergantungan yang lebih besar kepada negara lain. Tanpa dukungan kapasitas industri teknologi yang memadai, usaha pemanfaatan teknologi dan penggerakan UMKM akan sangat terbatas. Pengembangan kapasitas industri teknologi informasi dan komunikasi adalah usaha pendukung yang mutlak diperlukan untuk mengurangi keterbatasan tersebut. Untuk itu diperlukan promosi potensi negara sebagai suatu tempat yang subur bagi bersemainya industri teknologi seperti industri produk perangkat keras, industri perangkat lunak, industri layanan, industri dan penciptaan kandungan (*content*) teknologi. Pemerintah sebagai salah satu pembelanja produk, layanan, isi dan sistem teknologi informasi dan komunikasi terbesar dapat menekankan dan memprioritaskan penggunaan produk dan layanan lokal atau penyertaan perusahaan lokal dalam proyek-proyek pemerintah. Untuk itu rangsangan melakukan riset dan pengembangan yang ditujukan untuk menghasilkan produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terjangkau adalah mutlak diperlukan.

Pemerintah sebagai Pemerata Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat yang membutuhkan kemampuan untuk memiliki dan menggunakannya. Tiap negara memiliki kemampuan yang berbeda untuk memiliki dan menggunakannya sehingga memunculkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang membagi negara-negara di dunia menjadi kelompok negara yang kaya informasi (*information rich*) dan kelompok negara yang miskin informasi (*information poor*). Kemajuan dan sifat teknologinya serta harga perangkatnya menyebabkan tingkat perbedaan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan informasi antar negara makin lama makin mengecil. Kekuatan intelektual dan komitmen pemerintah merupakan bekal yang lebih menentukan kemampuan suatu negara untuk memperkecil kesenjangan digitalnya dengan negara lain. Di dalam negeri sendiri, masyarakat atau badan usaha memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan informasi. Dengan demikian kesenjangan digital di dalam negeri menjadi lebih penting untuk diperhatikan apabila pemerintah berniat memanfaatkan teknologi dalam pemberdayaan informasi untuk menggerakkan perekonomian. Akan muncul kelompok yang diuntungkan karena memiliki kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih tinggi dari kelompok lain.

Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi ini mencakup kemampuan teknis untuk mengoperasikan peralatan teknologi informasi dengan mahir dalam berkomunikasi dengan sumber layanan informasi dan kemampuan finansial dalam penyediaan peralatan teknologi dan membayar biaya pengoperasiannya. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu alat perlu direncanakan dengan menjanjikan kemudahan pemanfaatannya bagi semua warga negara dan badan usaha dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat bervariasi. Dengan demikian diperlukan suatu rencana pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan keterbatasan finansial dan teknis. Perlu disiapkan fasilitas penghubung teknologi informasi dan komunikasi lengkap dengan personalnya untuk dapat mengeliminasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan digital tersebut dalam jangka pendek. Perlu disiapkan teknologi supaya informasi yang dibutuhkan warga dan badan usaha kelas UMKM dapat didorong ke mereka secara teratur sehingga mereka bisa mendapatkannya tanpa harus mencari. Kebutuhan akan produk dan layanan teknologi semacam ini perlu direncanakan untuk dipenuhi oleh potensi dalam negeri melalui program-program riset dan pengembangan yang disusun secara terencana dalam tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Disamping itu

kebutuhan infrastruktur yang menjangkau semua tempat di Indonesia dengan biaya investasi dan pengoperasian yang terjangkau adalah program riset dan pengembangan yang mutlak diperlukan.

Pemerintah Sebagai Penyedia Akses dan Mengorganisir Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang memiliki kemampuan menakjubkan dalam mengorganisir data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar secara cepat dan aman. Data yang telah diorganisir ini dapat diakses juga secara cepat dan aman. Data yang dikumpulkan dapat disebarkan kepada semua yang membutuhkan dengan menyediakan kemampuan akses yang cepat dan aman ke pusat-pusat data, informasi, dan pengetahuan yang telah tersedia sebagai hasil dari pengorganisasian data, informasi dan pengetahuan yang telah dilakukan dengan bantuan teknologi. Dengan memanfaatkan peran fundamental teknologi informasi dan komunikasi ini secara optimal akan sangat membantu dalam mempercepat pembelajaran, inovasi, serta penciptaan dan penyebaran pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Pembelajaran, inovasi, serta penciptaan pengetahuan adalah unsur-unsur pokok yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.

Pentingnya Literasi Informasi Bagi Masyarakat

Teknologi Informasi dan komunikasi tidak akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan literasi informasi. Banyak definisi tentang literasi informasi/melek informasi yang terus berkembang saat ini. Namun pada hakekatnya literasi informasi adalah seperangkat ketrampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusur, menganalisa dan memanfaatkan informasi (Bundy, 2001).

Literasi informasi merupakan proses pembelajaran seumur hidup yang akan menjadi bekal seseorang dalam mencari informasi, bukan hanya dalam pendidikan. seseorang yang memiliki kemampuan informasi memiliki pemahaman terhadap : (1) kebutuhan informasi, (2) sumber referensi yang tersedia, (3) bagaimana mendapatkan informasi, (3) bagaimana mengolah informasi, (4) bagaimana mengomunikasikan informasi/ hasil temuan orang lain, (5) bagaimana menyimpan informasi (Septiyantono, 2014)

Literasi dibutuhkan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan menyaring informasi yang bermanfaat. Tujuan literasi adalah untuk memanfaatkan informasi dengan tepat dan bermanfaat, kemampuan ini sangat penting ditengah terpaan arus informasi yang ada saat ini, dimana banyak sekali informasi dan seringkali kita kesulitan untuk menemukan informasi

yang diinginkan. Dengan literasi informasi seseorang akan mudah dalam mencari informasi, melalui media audio visual maupun yang lain. Oleh sebab itu ketrampilan ini perlu diberikan kepada masyarakat.

PENUTUP

Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan informasi publik pada batas tertentu menjadi salah satu kekuatan pemaksa perubahan paradigma dan cara pelayanan publik yang disediakan pemerintah/lembaga publik. Namun teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa sepenuhnya menggantikan pelayanan dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh birokrat pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan sarana bantu dalam pembuatan keputusan dan penyajian informasi kepada publik tentang berbagai aspek layanan.

Hak untuk mengakses informasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Informasi adalah landasan utama bagi partisipasi yang bermakna, sekaligus piranti penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih terlalu terpusat di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar pulau Jawa, berjalan lambat dan tertinggal sehingga kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi menjadi terbatas.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber terbentuknya iklim yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui peranannya yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh pelosok Indonesia adalah penting karena merupakan sumber terbentuknya iklim bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui

peranannya dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi ini secara optimal akan sangat membantu dalam mempercepat pembelajaran, inovasi, serta penciptaan dan penyebaran pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai produsen dan pengguna informasi yang terbesar, pemerintah adalah pemilik informasi publik terbesar, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada yang membutuhkan. Membuat informasi menjadi terjangkau adalah suatu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan unit organisasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menyediakan akses langsung secara efisien terhadap informasi publik adalah merupakan unsur penentu dalam meningkatkan kemampuan inovasi semua elemen bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Burgelman, Jean-Claude. 2000. "Regulating access in the information society: The need for rethinking public and universal service". *New Media & Society*. London: Sage.

Gunawan, Agustin Wydia. 2008. *Tujuh Langkah Literasi Informasi: knowledge management*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan: pola kesejahteraan antardaerah. http://bappeda.jabarprov.go.id/docs/perencanaan/20070620_065405.pdf. Tanggal akses 2 Oktober 2014.

Program warga madani: Program Pemberdayaan Masyarakat. <http://www1.menlh.go.id/i/Warga%20Madani.pdf>. Tanggal akses 2 Oktober 2014.

Septiyantono, Tri (2014). *Literasi informasi : buku materi pokok*. Jakarta : Universitas Terbuka

Ibid. Menyambut RUU Kesejahteraan Sosial : Pendapat dan Masukan. Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Ad Hoc III DPD RI. Jakarta: 2008.

Uddin, Mohammad Nasir, Mohammed Quaddus, Md Shamsul Islam. Socio-economic-cultural aspects and mass information need: the case of public library uses in Bangladesh. *Library Management*. Vol. 27 No. 9. 2006.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. (2010, Desember 18). Diakses September 12 September ,2014, from <http://id.wikipedia.org>.

<http://www.ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2006/10/ristek-bukuputihik.pdf>.

(n.d.). Retrieved Desember 8, 2010, from <http://www.ilmukomputer.org>.

<http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=1&catid=5&>. (n.d.). Retrieved Desember 12, 2012, from <http://www.p2kp.org>.

<http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/learning/information-literacy/pages/definition.aspx>. (2010). Retrieved November 25, 2012, from <http://www.cilip.org.uk>.

Indonesia, A. P. (n.d.).

<http://www.apjii.or.id/DOC/Laporan/Laporan%20Tahunan%202006%20-%202007%20revisi.pdf>. Retrieved Desember 8, 2012, from <http://www.apjii.or.id>.

RPSEP-63

KOMUNIKASI ANGGOTA DPR DAN KONSTITUEN; MENJALIN RELASI BUKAN TRANSAKSI

Yanti Hermawati
FISIP-Universitas Terbuka
herma@ut.ac.id

Abstract

The working members of parliament in a democracy is to serve constituents, namely by representing the interests of constituents in the legislature. Constituents elect members of parliament as deputy with great hope that members of parliament can provide solutions to the problems of constituents. To realize this was required effective and sustainable communication between members of parliament and their constituents. As an institution, the parliament has provided a budget that does little for members of parliament and constituent communications. But in fact, 75,8 percent constituent claimed to have never visited by members of parliament. In fact, participation in determining the constituents of public policies in the house of representatives is necessary. A member of parliament as the representative of the people who having the function of legislation, the determination of the state budget, and function of supervision, have a duty to select the aspiration and the participation of a constituent in his political activity in the house of representatives. Effective communication and continuous between members of parliament and a constituent indispensable to bring democracy actually, of the people, for the people, and by the people. This article will explain his about communication members of parliament and constituents to connect relational as an effort to embody democracy in Indonesia

Keywords: democracy, communication, members of parliament, constituents, relational

Abstrak

Kerja anggota DPR dalam demokrasi adalah melayani konstituen, yaitu dengan mewakili kepentingan konstituen di lembaga legislatif. Konstituen memilih Anggota DPR sebagai wakilnya dengan harapan besar bahwa Anggota DPR dapat memberikan solusi atas berbagai masalah konstituen. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituennya. Secara institusional, DPR telah menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk komunikasi anggota DPR dan konstituen. Namun pada kenyataannya, 75,8 persen konstituen merasa tidak pernah dikunjungi oleh anggota DPR. Padahal, partisipasi konstituen dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik di DPR sangat diperlukan. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penetapan APBN, dan fungsi pengawasan, memiliki tugas untuk menjangkau aspirasi dan melibatkan partisipasi konstituen dalam aktivitas politiknya di DPR. Komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituen sangat diperlukan guna

mewujudkan demokrasi yang sebenarnya, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artikel ini akan memaparkan tentang komunikasi anggota DPR dan konstituen untuk menjalin hubungan relasional sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia

Kata Kunci: demokrasi, komunikasi, anggota DPR, konstituen, relasional

PENDAHULUAN

Anggota DPR yang memiliki fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan fungsi pengawasan berkewajiban untuk melibatkan aspirasi dan partisipasi konstituen dalam aktivitas politiknya di DPR. Upaya yang dapat dilakukan anggota DPR untuk mendorong partisipasi politik tersebut diantaranya adalah melalui komunikasi yang baik antara anggota DPR dan konstituennya. Berbagai media yang dapat menjangkau konstituen perlu dipilih oleh anggota DPR untuk memaksimalkan komunikasinya dengan konstituen.

Laksono (2009) menjelaskan beberapa poin yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja anggota DPR, diantaranya adalah aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) sering kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Karena itu, diperlukan adanya komunikasi yang lebih intensif antara anggota DPR dan konstituen, dimana konstituen memiliki peluang yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR.

Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte (tribunnews.com) menyatakan bahwa dari hasil survei CSIS dapat diketahui bahwa 80 persen konstituen tidak mengenal anggota DPR dari daerah pemilihannya. Vermonte (tribunnews.com) menambahkan bahwa lebih dari tiga perempat warga (75,8 persen) konstituen tidak pernah dikunjungi wakil rakyatnya. Hal ini didukung oleh data dari Bapenas (www.bappenas.go.id) yang menunjukkan bahwa konstituen lebih banyak menyatakan tidak dihubungi oleh anggota DPR ketika ada kunjungan kerja ke daerahnya.

Tabel 1
Kunjungan ke Konstituen

Pernah dihubungi DPR/D	2001	2002	2003
Dihubungi	7%	4%	2%
Tidak Dihubungi	85%	87%	95%
Tidak Tahu	8%	8%	2%
Tidak Menjawab	1%	1%	1%

Sumber: *Media Indonesia* 6 Februari 2004; *IFES* 2001, 2002, 2003 (www.bappenas.go.id)

AMANAH KONSTITUEN UNTUK ANGGOTA DPR

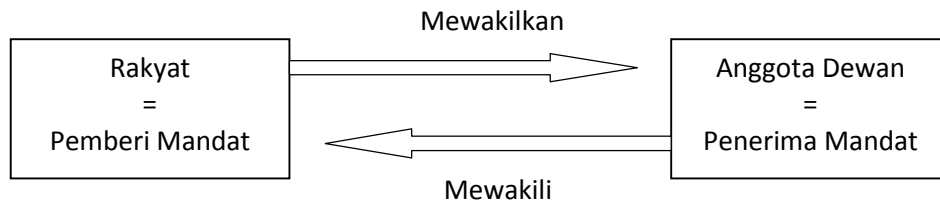
Anggota DPR adalah wakil rakyat dan pemegang amanah konstituen. Konstituen adalah (Arinanto dan Fatmawati, 2009) pemilih pada daerah pemilihan anggota DPR, baik itu pemilih dari masyarakat umum, simpatisan, maupun anggota partai dengan tingkat keutamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun berdasarkan nomenklatur anggota DPR, yang dimaksud konstituen adalah seluruh warga di daerah pemilihan baik yang memilihnya, maupun tidak. Hal ini sesuai dengan pandangan Rozaki (2006) yang menyatakan bahwa konstituen merupakan seluruh warga di daerah pemilihan darimana dia dipilih dalam proses pemilihan umum, tanpa lagi mengidentifikasi siapa pendukung dan penolaknya.

Sebagai pengemban amanah konstituen, Anggota DPR sudah selayaknya menjalin hubungan dengan konstituen secara intensif, bukan hanya pada masa kampanye saja. Berbagai media yang dapat menjangkau konstituen seharusnya dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR. Selain kunjungan kerja (kunker) ke dapil (daerah pemilihan), anggota DPR pun perlu memaksimalkan media cetak maupun elektronik yang mampu menjangkau konstituen.

Anggota DPR menjalankan fungsinya dalam kerangka representasi rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal 71 huruf s disebutkan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam Tata Tertib DPR RI 2009-2014 (www.dpr.go.id) dijelaskan bahwa aspirasi merupakan keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI.

Anggota DPR dan konstituen memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia. Anggota DPR sebagai penerima mandat dan rakyat sebagai pemberi mandat, keduanya sama-sama berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Bagan 1
Representasi Anggota DPR



Sumber: Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP

Menurut Arinanto dan Fatmawati (2009), yang dimaksud keterwakilan adalah keterwakilan secara formal maupun keterwakilan secara substantif. Keterwakilan secara formal yaitu keterwakilan yang dimandangi dari segi kehadiran fisik di DPR. Adapun keterwakilan substantif adalah perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Arinanto dan Fatmawati (2009) pun menjelaskan bahwa secara substansial keterwakilan rakyat dapat tersalurkan apabila nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan atau bahkan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh DPR.

KOMUNIKASI ANGGOTA DPR DAN KONSTITUEN

Seseorang tidak dapat menjadi anggota DPR apabila tidak dipilih oleh konstituen. *"Anggota DPR dipilih, bukan dilotre"* demikian salah satu penggalan lirik lagu dari Iwan Fals yang barangkali perlu ditanamkan dalam ingatan para anggota DPR. Setelah duduk di kursi DPR, seharusnya anggota DPR tidak lupa untuk terus menjalin komunikasi dengan konstituennya. Komunikasi yang dibangun pun perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Komunikasi yang hanya dilakukan pada momentum politik, dapat menghadirkan pandangan negatif dari konstituen kepada anggota DPR. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik pun, dapat menjadi kendala dalam menyerap aspirasi dan kesadaran konstituen terhadap pentingnya terlibat dalam berbagai kebijakan politik di DPR. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte (tribunnews.com) bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat pula menghadirkan persepsi negatif dari konstituen terhadap wakilnya di DPR.

National Democratic Institute (NDI) (www.ndi.org) menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin antara anggota DPR dan konstituen dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi politik konstituen, diantaranya;

Pertama, anggota DPR yang secara aktif melibatkan konstituennya dapat membantu menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah mereka. Dengan terlibat dan mendengarkan apa yang menjadi masalah publik, anggota DPR lebih terbekali untuk merancang atau mengubah kebijakan-kebijakan yang merespon kebutuhan manusia yang nyata.

Kedua, keterlibatan yang aktif dengan konstituen memberi sebuah wajah yang lebih jelas kepada anggota DPR. Meskipun anggota DPR tidak selalu dapat memberikan solusi atas permasalahan konstituen, setidaknya komunikasi yang terjalin menunjukkan adanya upaya anggota DPR untuk membantu konstituen dalam memecahkan permasalahannya. Hal ini dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada anggota DPR dan lembaga legislatif yang sepertinya sudah mulai luntur.

Ketiga, komunikasi yang terjalin baik antara anggota DPR dan konstituen, dapat membantu memobilisasi partisipasi konstituen dalam urusan-urusan publik. Dengan memperluas lingkaran warga yang melibatkan diri dalam kebijakan-kebijakan publik dan keputusan-keputusan publik, anggota DPR dapat memerangi sikap apatis dan membantu membuat demokrasi berjalan melalui pemecahan masalah yang praktis.

Adapun komunikasi dengan konstituen dapat dilakukan dengan beberapa cara (Arinanti dan Fatmawati, 2009), yaitu; 1) *person to person*, 2) *person to many persons*, 3) *many persons to many persons*.

a. *Person to Person*

Komunikasi dengan cara *person to person*, dilakukan secara individual. Individu ke Individu. Anggota DPR dapat berkomunikasi dengan konstituen tertentu, terutama yang dianggap representatif secara individual di masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui telepon, pesan pendek, surat menyurat, *e-mail*, atau dengan cara mengirimkan selebaran ke rumah-rumah yang memuat tentang beragam informasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dibahas oleh anggota DPR.

Selain itu, komunikasi pun dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan konstituen. Komunikasi tatap muka dapat dilakukan pada saat kunjungan kerja kepada konstituen, maupun dengan cara konstituen mendatangi anggota di gedung DPR, rumah aspirasi,

atau pun pada momentum tertentu yang memungkinkan konstituen bertemu dengan anggota DPR. Terkait dengan rumah aspirasi, beberapa anggota DPR periode 2009-2014 sudah mewujudkannya, diantaranya adalah Budiman Sujatmiko, Aria Bima, Mahfudz Shiddiq, Aziz Syamsuddin, Roestanto Wahidi, dan lain sebagainya.

Dalam tata tertib DPR 2009-2014 (www.dpr.go.id), dijelaskan bahwa anggota DPR dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari, yang dilaksanakan di luar masa reses dan di luar sidang-sidang DPR. Pada saat kunjungan, anggota DPR harus dapat memanfaatkan pertemuannya dengan konstituen sebagai ajang untuk menjaring aspirasi rakyat sebagai pemberi mandat atas dirinya di DPR.

Marlinawati (renimarlinawati.com), anggota DPR RI 2009-2019, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke konstituen, bukanlah ajang menabur janji. Menurutnya, kunjungan kerja merupakan ajang silaturahmi dan melakukan pendidikan politik kepada konstituen. Konstituen perlu memahami pentingnya berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik di DPR. Ia pun menambahkan bahwa segala aspirasi yang didapatkan pada kunjungan tersebut selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh anggota DPR. Apalagi selama ini menurut Laksono (2009) aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) sering kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

b. *Person To Many Persons*

Komunikasi *person to many persons* adalah komunikasi yang dilakukan kepada konstituen dalam jumlah yang banyak. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat laporan hasil kerja secara periodik, melakukan sosialisasi RUU di dapilnya, rapat umum dengan konstituen saat kunjungan kerja, diskusi publik, atau dengan memberikan berbagai informasi kepada konstituennya melalui media massa. Selain itu, media komunikasi yang dapat dimanfaatkan adalah media sosial. Anggota DPR dapat memublikasikan berbagai informasi yang terkait dengan aktivitas politiknya melalui majalah khusus bagi konstituennya, website miliknya, twitter, facebook, dan media sosial lainnya yang mudah diakses oleh konstituen.

Berikut ini adalah contoh majalah milik anggota DPR yang secara rutin dibagikan kepada konstituennya.

Gambar 1
Majalah Aspirasi Milik Ramadhan Pohan (Anggota DPR 2009-2014)



<http://www.ramadhanpohan.com/majalah/tabloid-aspirasi>

Beberapa anggota DPR periode 2009-2014 pun memiliki website pribadi anggota DPR RI yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk konstituennya seperti berikut ini.

Tabel 2
Daftar Alamat Website Milik Beberapa Anggota DPR RI periode 2009-2014

No.	Nama Anggota DPR	Alamat web	Keterangan
1	Aria Bima	ariabima.com	Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
2	Arif Budimanta	budimanta.com	Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan
3	Budiman Sudjatmiko	budimansudjatmiko.net	Anggota DPR Fraksi PDIP
4	Fahri Hamzah	fahrihamzah.com	Anggota DPR RI Fraksi PKS
5	Fayakhun Andriadi	fayakhun.com	Anggota DPR RI Fraksi Golkar
6	Ganjar Pranowo	masganjar.com	Anggota DPR Fraksi PDIP
7	Mahfudz Sidiq	mahfudziddiq.com	Anggota DPR RI Fraksi PKS
8	Mohammad Ichlas El Qudsi	michel-elqudsi.com	Anggota DPR RI Fraksi PAN
9	Nurul Arifin	nurularifin.com	Anggota DPR RI Fraksi Golkar
10	Priyo Budi Santoso	priyobudisantoso.com	Wakil Ketua DPR RI
11	Ramadhan Pohan	ramadhanpohan.com	Anggota DPR RI Fraksi Demokrat
12	Reni Marlinawati	renimarlinawati.com	Anggota DPR RI Fraksi PPP
13	Teguh Juarno	teguhjuwarno.com	Anggota DPR RI Fraksi PAN

Sumber: Hasil Pengamatan 2014

Beragam media komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk berkomunikasi dengan konstituennya. Demikian pula sebaliknya, untuk meningkatkan kinerja

anggota DPR, sebaiknya konstituen memanfaatkan pula media komunikasi yang disediakan oleh anggota DPR sebagai wakilnya di DPR.

c. *Many Persons To Many Persons.*

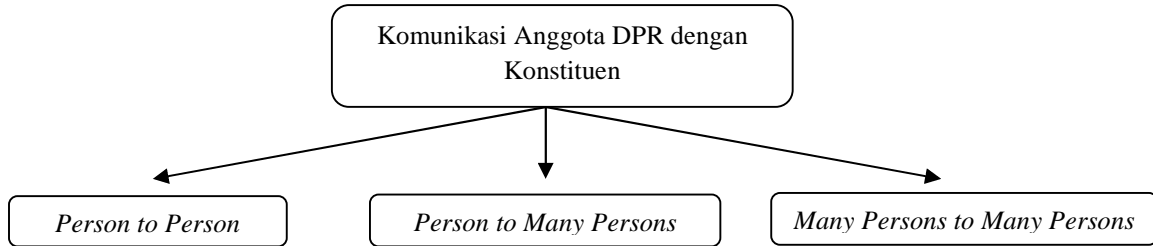
Komunikasi *many persons to many persons*, merupakan komunikasi antara anggota-anggota DPR dengan konstituen dalam jumlah banyak. Komunikasi ini dilakukan terkait dengan hubungan kerja antara sesama anggota DPR dalam melaksanakan fungsinya di DPR.

Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan anggota DPR lainnya. Kerja sama antara sesama anggota DPR di alat kelengkapan DPR, maupun dengan sesama anggota DPR dari dapil yang sama, meskipun fraksinya berbeda. Anggota DPR tersebut dapat bersama-sama menemui konstituen atau melalui media massa untuk menyampaikan informasi yang sedang hangat dibicarakan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, memberikan keterangan kepada konstituen tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang sudah dilakukan kepada pemerintah melalui media massa.

Selain itu, DPR pun memiliki media komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR, diantaranya yaitu: 1) *majalah Parlementaria*, menyajikan berbagai aktivitas anggota DPR yang dapat diperoleh di gedung DPR, di terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta, atau diakses majalah tersebut secara digital di website DPR RI (www.dpr.go.id/id/serba-serbi/majalah-parlementaria). Melalui majalah ini, konstituen pun dapat menyampaikan aspirasinya, yaitu dengan mengirimkan surat ke alamat redaksi Majalah Parlementaria. 2) *TV Parlemen*, menyajikan siaran langsung rapat paripurna, peliputan kegiatan rapat-rapat komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya, serta memproduksi program acara dialog/*talkshow*. Siaran TV Parlemen dapat dinikmati melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan *live streaming* melalui situs www.dpr.go.id dan www.mpr.go.id khusus untuk acara siaran langsung sidang MPR RI, juga jaringan televisi nasional yang *me-relay* siaran TV Parlemen (<http://www.dpr.go.id/id/serba-serbi/tv-parlemen>). 3) *Website* milik DPR RI (www.dpr.go.id). Dalam website DPR RI terdapat kolom layanan masyarakat yang berisi kolom “pengaduan masyarakat” dan kolom “sms aspirasi” yang disediakan untuk konstituen dan masyarakat umum. Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan ke DPR dapat dilakukan secara online, melalui surat, atau secara langsung dengan mendatangi gedung DPR.

Bagan 2

Cara Komunikasi Anggota DPR dengan Konstituen



Sumber: Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP

MENJALIN RELASI BUKAN TRANSAKSI

Transaksi yang dimaksud dalam artikel ini adalah hubungan yang didasarkan pada proses transaksi dagang (jual beli). Menurut Ali (2013) hubungan transaksional adalah hubungan dengan proses transaksi dan pertukaran (*exchanges process*) yang mendasarkan diri pada pertimbangan ekonomis-rasional. Ali (2013) menjelaskan bahwa kata transaksional sejatinya memang netral dan tidak bias nilai-nilai tertentu, namun kata transaksional cenderung dipersepsi 'negatif' terutama jika dikaitkan dengan aktivitas politik. Konstituen bersedia bertemu anggota DPR jika dibayar atau ada imbalan, seolah-olah tidak ada kepentingan konstituen dalam pertemuan dengan anggota DPR. Padahal, sejatinya anggota DPR dan konstituen sama-sama menyadari bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Rakyat sebagai pemberi mandat dan anggota dewan sebagai penerima mandat. Keduanya harus bekerja sama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Komunikasi yang terjalin secara transaksional, sepertinya memang mudah untuk dilakukan, cukup dengan memberikan bantuan materi kepada masyarakat atau konstituen, anggota DPR dapat dengan mudah mengumpulkan konstituen dalam suatu pertemuan. Komunikasi memang terjalin saat itu, namun hubungan yang terjalin dengan konstituen menjadi kurang kokoh. Masyarakat akan memiliki penilaian yang berbeda kepada anggota DPR yang

tidak melakukan hal serupa sehingga akhirnya materilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan komunikasi yang terjadi antara anggota DPR dan konstituen.

Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte (tribunnews.com) menjelaskan bahwa biaya komunikasi antara anggota DPR dan konstituen menjadi mahal ketika komunikasi yang dibangun lebih bersifat transaksional. Konstituen bersedia menemui anggota DPR ketika mendapat bayaran untuk ini. Padahal, selain bayaran materi, atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, ada unsur lain yang lebih penting dalam komunikasi antara anggota DPR dan konstituen, yaitu terbentuknya kesadaran politik dari konstituen untuk bersama-sama dengan anggota DPR dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Anggota DPR adalah wakil rakyat, dan konstituen sebagai rakyat yang kepentingannya diwakili oleh anggota DPR tentunya perlu melakukan pengawasan atas kinerja anggota DPR tersebut. Adnan Pandu Praja, salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 (nasional.kompas.com) menyatakan bahwa hubungan dialogis yang semakin intensif antara konstituen dan para anggota DPR diyakini dapat mempersempit peluang partai politik dalam mengooptasi anggota DPR, sehingga anggota DPR dapat benar-benar menjadi wakil rakyat bukan sekedar wakil partai.

Hubungan yang terjalin antara anggota DPR dan konstituen hendaknya bersifat jangka panjang, bukan hanya pada momentum pemilihan umum saja. Dalam pola relasional, Anggota DPR menyadari bahwa konstituen memiliki peran penting dalam berbagai aktivitasnya di DPR. Demikian pula sebaliknya, konstituen pun menyadari pentingnya berperan serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik di DPR melalui anggota DPR. Relasi seperti inilah yang selayaknya dibangun dalam komunikasi anggota DPR dan konstituen, Bukan komunikasi bermuatan transaksi “dagang”.

KESIMPULAN

Komunikasi anggota DPR dan konstituen dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya dapat menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah mereka serta dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada anggota DPR dan lembaga legislatif yang sepertinya sudah mulai luntur. Melalui komunikasi yang intensif, anggota DPR pun dapat membantu memobilisasi partisipasi konstituen dalam urusan-urusan publik. Komunikasi antara

anggota DPR dan konstituen dapat dilakukan dengan cara *person to person, person to many persons, many persons to many persons*. Beragam media pun dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keterjangkauan akses bagi konstituen, misalnya melalui tatap muka saat kunjungan kerja ke dapil, melalui majalah untuk konstituen, website, akun anggota DPR di media sosial, atau melalui website resmi milik DPR.

Komunikasi yang dilakukan antara anggota DPR dan konstituen hendaknya bertujuan untuk membangun relasi antara rakyat dan wakil rakyat selaku pemberi mandat dan penerima mandat. Keduanya saling membutuhkan dan menyadari pentingnya peran masing-masing. Komunikasi hendaknya tidak hanya terjalin di momentum pemilihan umum saja dan bersifat transaksional. Namun komunikasi hendaknya terus terjalin sepanjang perjalanan anggota DPR mengemban amanah konstituen. Komunikasi terus dilakukan untuk membangun relasi antara anggota DPR dan konstituen sehingga tidak ada jarak yang dapat menghambat penyerapan aspirasi dari konstituen untuk wakilnya di DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Eko Maulana. 2013. *Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance*. Jakarta: Multicerdas Publishing.

Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. *Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP

Laksono, Agung. 2009. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Majelis. ISSN 2085-4862. Volume 1. Nomor 1. Agustus 2009. Sekretariat Jenderal MPR RI

Rozaki, Abdur., dkk. 2006. *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY

Sumber Online:

Adnan Pandu Praja. Indeks Kinerja Anggota DPR. <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/15501731/Indeks.Kinerja.Anggota.DPR> diakses tanggal 14 Oktober 2014

DPR RI. Tata Tertib. <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-14> diakses tanggal 2 Oktober 2014

Bappenas. *Akuntabilitas Wakil Rakyat Masih Rendah: Perlu Penyusunan Indikator Demokrasi dan Perbaikan Perundang-Undangan.*

http://www.bappenas.go.id/files/1413/5228/2735/1akuntabilitas-wakil-rakyat-masih-rendah-perlu-penyusunan-indikator-demokrasi-dan-perbaikan-perundang-undangan_20081123185136_1261_0.pdf diakses tanggal 2 Oktober 2014

National Democratic Institut, *Hubungan Dengan Konstituen,*
[https://www.ndi.org/files/Hubungan Dengan Konstituen BAH.pdf](https://www.ndi.org/files/Hubungan_Dengan_Konstituen_BAH.pdf) diakses tanggal 30 September 2014

Tribunnews.com, *Komunikasi Anggota DPR dan Konstituen Bersifat Transaksional*
<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/19/komunikasi-anggota-dpr-dan-konstituen-bersifat-transaksional> diakses tanggal 30 September 2014

Gardu Aspirasi Ramadhan Pohan. <http://www.ramadhanpohan.com/majalah/tabloid-aspirasi> diakses tanggal 09 Oktober 2014

Reni Marlinawati, <http://www.renimarlinawati.com/index.php/kabar-dapil/876-reni-reses-adalah-sarana-pendidikan-politik-masyarakat> diakses tanggal 2 Oktober 2014

RPSEP-64

KAJIAN EFEK MULTIPLIER PRODUK UNGGULAN BERBASIS KLUSTER UKM PENGOLAHAN IKAN ASAP

Yusmar Ardhi Hidayat
Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Semarang.
Jl. Prof. H. Soedharto SH Tembalang Semarang
Email : yusmardhi@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian penentuan produk unggulan daerah sebagian besar didekati dengan konsep makroekonomi tetapi identifikasi produk unggulan bisa juga dilakukan dengan konsep mikroekonomi dengan melakukan survei di wilayah guna mendapatkan data dan kondisi riil di daerah. Pendekatan berbeda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengkajian sektor unggulan berdasarkan kondisi sektor riil di wilayah sub wilayah pedesaan di Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah 1). Menganalisis tingkat produksi produk unggulan budidaya dan pengasapan ikan di Desa Wonosari, Bonang Kabupaten Demak. 2). Menganalisis efek multiplier pendapatan budidaya dan pengasapan lele di wilayah yang sama. Penelitian menggunakan metode sensus dengan mencari data dari semua unit usaha yang merupakan produk unggulan di Desa Wirosari, Bonang Kecamatan Demak. Responden yang diperoleh sejumlah 18 pembudidaya ikan dan 49 usaha pengasapan ikan. Data primer yang akan digunakan yaitu data jumlah produksi komoditas unggulan, luas lahan, jumlah modal, bahan baku, tenaga kerja, dan multiplier pendapatan. Sedangkan, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, dan Indeks Multiplier Pendapatan. Hasil penelitian bahwa komoditas unggulan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah Ikan Asap dan Budidaya Ikan Lele. Total produksi harian ikan asap rata-rata mencapai 6,4 Ton ikan dengan jenis yaitu Manyung, Tongkol, Pari, Lele, dan Ikan Air Tawar lainnya. Potensi produksi lele yang dihasilkan Pokdakan Sari Mino responden yang diperoleh mencapai total 105 Ton Ikan Lele saat panen dalam jangka waktu 2-3 bulan. Angka pengganda pendapatan pengasapan memiliki nilai 0,486 lebih besar dibandingkan multiplier pendapatan budidaya ikan sebesar 0,263. Multiplier pendapatan pengasapan ikan 0,486 berarti setiap modal dikeluarkan Rp. 1.000.000,- maka akan menimbulkan potensi keuntungan Rp. 486.000,-. Nilai multiplier budidaya ikan 0,263 berarti setiap modal yang dimiliki Rp. 1.000.000,- akan memunculkan potensi laba Rp. 263.000,-. Berdasarkan multiplier pendapatan, usaha pengasapan ikan lebih memberikan keuntungan dibandingkan dengan budidaya lele.

Kata Kunci : Komoditas Unggulan, Produksi, Statistik Deskriptif, Budidaya Lele, Pengasapan Ikan dan Multiplier Pendapatan.

ABSTRACT

Most of significant research identifying basic commodities in a region are commonly approached from macroeconomic perspective meanwhile other research in locating leading goods are used to analyze based on microeconomic view by conducting survey in a region to get data and real condition in a region. Different approach in this research performs in exploring prime commodities located in rural area based on microeconomic side. Purposes of this research are 1). To analyze scale of production of leading commodities in catfish breeding and smoked fish at Wonosari Village, Bonang, Demak Regency., 2). To examine multiplier effect of income in catfish breeding and smoked fish in those area. This research applies census method in collecting data from all business unit which identified as leading commodities in Wonosari Village, Bonang, Demak Regency. Regarding survey conducted, there are 18 catfish breeders and 49 smoked fish small business used as respondent. Primary data used in this research are rate of production in basis goods, land area, capital, raw materials, manpower, and income multiplier. To support empirical discussion, tools of analysis used in this research are descriptive statistics and income multiplier. Results of this research are primary commodities in Wonosari Village are smoked fish and fresh cat fish. Total production of smoked fish reaches 6.4 Ton each day for with type of smoked fish such as river cat fish, tongkol, sting-ray, cat fish, and other river fish. Meanwhile total production of catfish breeding reaches 105 Ton in first harvest after 2 – 3 months. Income Multiplier Index of smoked fish business which is 0.486 exceeds than income multiplier of catfish breeding that is 0.263. Income multiplier of smoked fish which is 0.486 means each capital invested in one million rupiah will generate profit forty hundred and eighty six thousand rupiah. However, income multiplier of catfish breeding that is 0.263 refers each money spent one million rupiah will make profit two hundred and sixty three thousand rupiah. Based on that number, smoked fish business promise higher profit than profit's catfish breeding.

Keywords : Basis Commodities, Production, Descriptive Statistics, Catfish Breeding, Smoked Fish, and Income Multiplier.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan komoditas unggulan setiap daerah. Dari perspektif teori pertumbuhan *trickledown effect*, daerah yang memiliki industri unggulan mampu memberikan efek pengembangan industri pendukungnya dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kajian potensi unggulan selalu menekankan hasil akhir berupa kemampuan daerah yang memiliki komoditas unggulan dari aspek makroekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian secara makroekonomi di kabupaten Demak, Pujiati (2009) menyatakan bahwa Kabupaten Demak merupakan salah satu Daerah relatif tertinggal karena pertumbuhan ekonomi dan PDRB di bawah rata-rata di wilayah Jawa Tengah. Kondisi tersebut didasarkan pada perbandingan PDRB dan analisis secara makro. Tetapi, daerah yang tertinggal ini belum tentu tidak memiliki sektor unggulan. Berdasarkan fakta empiris, Kabupaten Demak memiliki sektor pertanian yang memiliki nilai multiplier efek yang tinggi (Hastarini, 2010). Hal tersebut mengindikasikan sektor pertanian di Kabupaten Demak memiliki kemampuan produksi yang tinggi dan mampu memberikan efek peningkatan pendapatan bagi petani di Kabupaten Demak.

Dalam pengembangan wilayah, analisis ekonomi wilayah dan karakteristik fisik sangat diperlukan sebagai dasar arah perencanaan pembangunan daerah. Salah satu masalah yang sering muncul dalam kebijakan ekonomi wilayah adalah apakah ada usaha untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan wilayah dengan mengembangkan potensi unggulan daerah dengan pendekatan spasial. Pendekatan spasial dengan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya lokal guna mencapai keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah untuk mendorong berkembangnya industri utama dan pendukungnya.

Jika perekonomian daerah tumbuh dan berkembang maka akan menciptakan efek penyerapan tenaga kerja, kesempatan investasi dan muncul keterkaitan industri di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berupaya merubah konsep pembangunan sentralisasi menjadi desentralisasi guna mengembangkan kemajuan Desa dengan memberi kesempatan otonomi mengembangkan potensi Desa untuk mengolah sumber daya alam dan kompetensi dimiliki masyarakat Desa. Dengan perspektif tersebut, Desa memiliki peran

signifikan untuk mengembangkan potensi dengan motor penggerak utama perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Demak memiliki sektor unggulan di sektor Pertanian di tingkat Desa. Kajian empiris Dewan Riset Daerah Jateng (2010) menyatakan Desa Wonosari Bonang Kabupaten Demak memiliki potensi unggulan *mix farming* Jambu dan budidaya Ikan Lele. Produksi Jambu dan Ikan Lele ini mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian, industri pengasapan ikan juga muncul memanfaatkan produksi ikan lele yang berlimpah. Panen buah jambu Delima dan Citra juga berlimpah dari bulan ke-4 sampai bulan ke-11. Keunggulan produk buah jambu, ikan, dan produk olahan ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

Berdasarkan konsep teori, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, tenaga kerja, dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan pendapatan daerah dan menciptakan peluang kerja. Teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan Perroux (Lincoln Arsyad,1999) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Lincoln Arsyad,1999).

Penelitian guna menentukan produk unggulan daerah sebagian besar didekati dengan konsep makroekonomi tetapi penentuan produk unggulan bisa juga dilakukan dengan konsep mikroekonomi dengan melakukan survei di wilayah guna mendapatkan data dan kondisi riil potensi produk unggulan. Survei ini jarang dilakukan secara langsung karena memerlukan biaya yang besar dan cakupan wilayah yang luas sehingga memerlukan waktu yang lama. Maka penelitian ini akan mengkaji penentuan sektor unggulan di daerah dengan wilayah yang lebih spesifik yaitu tingkat desa. Pertimbangan ini dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian Dewan Riset Daerah (2010) Kabupaten Demak memiliki potensi unggulan produk Jambu dan Lele tetapi belum diperkuat data-data empiris.

Rumusan Masalah

Hasil penelitian Hastarini (2010) merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu mengoptimalkan pembangunan pada sektor unggulan dan memiliki rasio pertumbuhan yang dominan dengan nilai multiplier yang tinggi. Rekomendasi tersebut masih bersifat teoritis dan

memerlukan kajian berdasarkan kondisi lapangan dari masing-masing daerah. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Pemerintah telah mengubah konsep pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk menciptakan sektor unggulan. Penelitian Dewan Riset Daerah (2010) menyatakan Pemerintah Kabupaten Demak memiliki komoditas unggulan Jambu dan Ikan Lele di Desa Wirosari, Bonang, Kabupaten Demak.

Penelitian penentuan sektor unggulan selalu didekati dengan analisis makro seperti Analisis *Location/Quotient*, *Shift-Share*, Tipologi Klassen hanya bisa diterapkan pada Daerah bersifat makro. Sehingga, data yang digunakan harus tersedia dalam bentuk PDRB. Tetapi , jika wilayah menjadi mikro maka alat analisis yang digunakan untuk menentukan sektor unggulan juga berbasis analisis mikro. Maka, penelitian ini akan mengkaji penentuan sektor unggulan berdasarkan fakta di lapangan dengan pendekatan secara mikro ekonomi untuk menentukan sektor unggulan pada wilayah Desa dengan pendekatan mikro.

Pendekatan mikro untuk menentukan produk unggulan ini dilakukan dengan analisis tingkat produksi, sumber modal, bahan baku, penyerapan tenaga kerja, permintaan produk, keterkaitan industri, dan multiplier pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang muncul adalah :

1. Bagaimana tingkat produksi dan keterkaitan industri dari Budidaya dan Pengasapan Ikan di Desa Wonosari, Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana efek multiplier produk unggulan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Wonosari, Bonang Kabupaten Demak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah;

1. Menganalisis tingkat produksi komoditas unggulan budidaya ikan dan pengasapan Ikan Lele di Desa Wonosari, Bonang Kabupaten Demak.
2. Menganalisis efek multiplier peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Wonosari, Bonang Kabupaten Demak.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi	Satuan
1	Produksi komoditas	Jumlah produksi komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat pembudidaya	Unit Satuan Hitung
2	Lahan	Luas lahan yang digunakan untuk memproduksi komoditas unggulan	m ²
3	Modal	Jumlah uang yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan produksi komoditas unggulan	Rupiah
4	Bahan Baku	Jumlah kebutuhan bahan baku seperti bibit dan ikan yang diperlukan untuk proses produksi	Unit Satuan Hitung
5	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi	Orang
6	Keterkaitan Industri	Industri/Usaha yang mendukung kegiatan produksi sektor unggulan. Industri ini terdiri atas industri/usaha yang memasok bahan baku dan industri/usaha yang menggunakan komoditas unggulan.	Satuan unit industri/usaha
7	Efek Multiplier	Angka Pengganda Pendapatan yang diperoleh dari hasil keuntungan/laba yang diperoleh dari produksi komoditas unggulan	Rasio
8	Pendapatan	Laba yang diperoleh dari produksi sektor unggulan dari sisi pemilik.	Rupiah
9	Upah	Upah yang diterima oleh tenaga kerja digunakan usaha produksi sektor unggulan	Rupiah

Sumber :

Data dan Jenis Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang akan digunakan yaitu data jumlah produksi komoditas unggulan, luas lahan, jumlah modal, bahan baku, tenaga kerja, bahan penolong, teknologi, keterkaitan industri, efek multiplier. Periode pengumpulan data dilakukan saat terjadi puncak panen komoditas unggulan.

Data sekunder yang digunakan berasal dari Data Instansi Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian UKM dan Koperasi, dan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan).

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi, metode dokumentasi dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur, informasi-informasi dan data tertulis baik yang berasal dari instansi Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Sari Mino dan Ketua Kluster Pengasapan Ikan.
2. Wawancara, wawancara dilakukan dengan bertanya langsung ke Ketua Pokdakan Sari Mino Bapak Heru Eko Catur dan Ketua Kluster Pengasapan Bapak Juyamin yang mengurus usaha/produksi komoditas unggulan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, dan Kabupaten Demak.
3. Observasi, dalam penelitian ini adalah observasi langsung dengan cara pengamatan langsung dan menyebar kuesioner kepada pemilik usaha unggulan seperti pembudidaya ikan dan pemilik usaha kluster pengasapan ikan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonanga, Kabupaten Demak.

Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu mencari data dari semua unit usaha yang merupakan sektor unggulan yaitu Budidaya Ikan dan Pengasapan Lele dengan melakukan observasi langsung di Desa Wirosari, Bonang Kecamatan Demak kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) dan . Responden yang akan digunakan adalah pembudidaya ikan dan pengasap ikan ditampilkan berikut.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Usaha Unggulan	Populasi	Penyebaran Kuesioner	Sampel yang layak diolah
Budidaya Ikan Lele	35	35	18
Pengolahan Ikan Asap	64	70	49

Sumber : Data Primer diolah, September 2014.

Wawancara dengan Ketua Pokdakan Sari Mino Bapak Heru Eko Catur dan Ketua Kluster Pengasapan Bapak Juyamin.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, dan Indeks Multiplier Pendapatan. Statistik Deskriptif ini digunakan untuk menganalisis tingkat produksi usaha sektor unggulan.

Efek multiplier pendapatan dianalisis dengan Indeks Pendapatan Masyarakat.

Indeks pendapatan masyarakat digunakan untuk melihat besarnya kenaikan total pendapatan masyarakat untuk setiap kenaikan satu output yang dihasilkan suatu sektor. Sebuah sektor memiliki peran yang tinggi dalam menarik dalam pendapatan masyarakat jika nilai indeks lebih besar dari satu. (Djoni Hartono,2001)

Rumus :

$$H_j = \frac{n \sum_{i=1}^n \frac{v_i}{X_i} \cdot \alpha_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{v_i}{X_i} \cdot \alpha_{ij}}$$

Keterangan :

H_j = Indeks pendapatan sektor j

V_i = upah atau gaji sektor i

X_i = output sektor i

α_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden Kelompok Pengasap Ikan

Responden yang diperoleh dalam kegiatan penelitian ini berasal dari dua jenis kelompok UKM yaitu Pokdakan sari Mino dan Kelompok Pengasap Ikan yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Profil Kelompok Pengasap Ikan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Profil Responden Pengasap Ikan

Keterangan	Rata- Rata	Minimal	Maksimal	Std. Deviation
Umur	42.29	25	69	8.961
Lama Usaha	7.59	1	30	7.552
Jumlah Keluarga Ditanggung	4.18	2	6	0.882
Anggota Keluarga bekerja	1.88	0	5	1.218
Anggota Keluarga Bersekolah	1.45	0	3	0.914

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=49.

Rata-rata umur responden Kelompok Pengrajin Ikan Asap 42 tahun yang berarti berada pada usia produktif dengan interval usia 25 sampai dengan 69 tahun. Responden melakukan usaha pengasapan ikan asap kurang lebih 7 tahun 6 bulan dengan rentang minimal 1 tahun sampai dengan maksimal 30 tahun. Responden sudah menikah dengan jumlah keluarga yang dihidupi rata-rata berjumlah 4 orang. Anggota keluarga yang bekerja berjumlah rata-rata 2 orang dengan anggota keluarga yang masih bersekolah rata-rata 1 orang.

Responden berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pengrajin Ikan Asap

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	36	73.5
Tidak Sekolah	8	16.3
SMA	3	6.1
SMP	2	4.1

Total	49	100.0
-------	----	-------

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=49.

Sejumlah 73,5 persen pengolah ikan asap berpendidikan SD dengan jumlah 36 orang. Selanjutnya, terdapat 8 orang pengrajin ikan asap yang tidak bersekolah sebesar 16,3 persen. Sisanya berturut-turut, pengrajin ikan asap berpendidikan SMP dan SMA sejumlah 3 dan 2 orang.

Tabel 5. Pekerjaan Tambahan

Pekerjaan	Jumlah	Frekuensi
Petani	9	18.4
Peternak	2	4.1
PNS	1	2.0
Pekerjaan Utama	37	75.5
Total	49	100.0

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=49.

Pengolahan ikan asap merupakan pekerjaan utama responden di kluster pengasapan ikan di Desa Wonosari. Sejumlah 37 responden menyatakan pengasapan ikan merupakan pekerjaan utama dengan 75,5 persen. Pekerjaan sampingan sebagai petani merupakan profesi sampingan selain pengasapan, sejumlah 9 orang merupakan petani (18,4 persen), peternak (4,1 persen), dan sisanya Pegawai Pemerintah (2 persen).

Tabel 6. Alasan Eksis Usaha Ikan Asap

Keterangan	Jumlah	Frekuensi
Sumber Pendapatan Keluarga	29	59.2
Usaha Turun Temurun	8	16.3
Pendapatan Tambahan	5	11.2
Daerah Penghasil Ikan Asap	2	4.1
Menguntungkan	2	4.1
Permintaan Ikan Asap Tinggi	2	4.1
Bantuan Pemerintah	1	2.0
Total	49	100.0

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=49.

Pengrajin ikan asap merupakan sumber pendapatan utama keluarga dengan jumlah 29 orang (59,2 persen). Pengolahan ikan asap merupakan usaha turun temurun dengan sejumlah 8 orang (16,3 persen). Sebanyak 5 orang (11,2 persen) menyatakan pengasapan ikan merupakan pekerjaan sampingan. Kemudian berturut turut dengan nilai persentase yang sama sebesar 2 orang (4,1 persen) responden menjadi pengasap ikan karena daerah penghasil ikan, menguntungkan, dan permintaan ikan asap tinggi.

Profil Responden Pokdakan Sari Mino

Tabel 7. Profil Umum Responden Pokdakan

Keterangan	Mean	Minimal	Maksimal	Std. Deviation
Umur	46.61	34	65	7.047
Lama usaha	13.89	3	26	6.747
Jumlah keluarga tanggungan	4.44	2	6	.922
Anggota keluarga bekerja	2.11	0	4	1.023
Anggota keluarga bersekolah	1.78	0	3	.943

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=18.

Rata-rata umur responden Pokdakan Sari Mino berumur 46 tahun yang berarti berada pada usia produktif dengan interval usia 34 sampai dengan 65 tahun. Responden melakukan usaha budidaya ikan asap lebih 13 tahun dengan rentang minimal 3 tahun sampai dengan maksimal 26 tahun. Responden sudah menikah dengan jumlah anggota keluarga yang dihidupi rata-rata berjumlah 4 orang. Anggota keluarga yang bekerja berjumlah rata-rata 2 orang dengan anggota keluarga yang masih bersekolah rata-rata 1 orang.

Responden berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 8. Tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	9	50.0
SMA	3	16.7
SMP	4	22.2
S1	2	11.1
Total	18	100.0

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=18.

Sejumlah 9 orang (50 persen) anggota pokdakan berpendidikan SD. Selanjutnya, terdapat 3 orang responden yang tidak bersekolah sebesar 16,7 persen. Sisanya berturut-turut, pengrajin ikan asap berpendidikan SMP dan SMA sejumlah 4 (22,1 persen) dan 2 orang (11,1 persen).

Tabel 9. Sumber Pendapatan Utama

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Tidak	4	22.2
Ya	14	77.8
Total	18	100.0

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=18.

Budidaya ikan menurut responden Pokdakan merupakan pekerja utama dengan sejumlah 14 orang (77,8 persen) dan sisanya 4 orang (22,8 persen) menyatakan bukan pendapatan utama. Secara rinci pada tabel berikut, responden pokdakan menyatakan bahwa selain budidaya ikan ternyata mereka juga memiliki pendapatan sampingan yaitu :

Tabel 10. Pekerjaan Sampingan

Pekerjaan Sampingan	Jumlah	Persentase
Petani	7	38.9
Budidaya Jambu	4	22.2
Pedagang	3	16.7
Guru	1	5.6
Pengepul Kertas Bekas	1	5.6
Penjual Pakan, Jambu	1	5.6
Perajin Grabag	1	5.6
Total	18	100.0

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=18.

Anggota Pokdakan Sari Mino memiliki pekerjaan tambahan yaitu sebagai petani sejumlah 7 orang (38,9 persen) kemudian budidaya jambu 4 orang (22,2 persen) dan pedagang 3 orang (16,7 persen). Sisanya dengan total 4 orang memiliki pekerjaan berturut-turut Guru, Pengepul Kertas, Penjual Pakan, dan Perajin Grabag, masing-masing 1 orang (5,6 persen).

Pembahasan Tingkat Produksi

1. Produksi Pengasapan Ikan

Produk unggulan yang menjadi ciri khas di Desa Wonosari, Bonang Kabupaten Demak adalah Ikan Asap dan Lele.

Berikut ini data produksi ikan asap yang diperoleh dari hasil survei terhadap 49 orang pengrajin Ikan asap yang berlokasi di Kluster Pengasapan Ikan Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Total pengrajin yang berada di kluster ini sejumlah 64 orang, sedangkan data responden penelitian ini digunakan 49 orang pengrajin. Tim peneliti telah berusaha menyebarkan total 65 kuesioner dengan dua tahap survei yang dilakukan di Bulan September 2014. Hasilnya diperoleh responden 30 orang dari percobaan penyebaran 35 kuesioner pada tahap 1 tanggal 5 September 2014. Kemudian tahap 2 tanggal 9 September 2014, hasilnya diperoleh 19 responden dari penyebaran 30 kuesioner.

Tabel 11. Hasil Ikan Asap Berdasarkan Jenisnya

Jenis Ikan Asap	Produksi/Hari (Kg)	Persentase
Manyung	2505	38.89
Tongkol	1085	16.84
Pari	975	15.14
Salem, Semar	770	11.95
Petek	437	6.78
Lele	400	6.21
Pindang, Banyar dan Lainnya	270	4.19
Total	6442	100.0

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=49.

Total produksi/hari ikan asap sejumlah 6.442 Kg dengan jenis ikan yang diproduksi Manyung, Tongkol, Pari, Salem, Semar, Petek, Lele, Pindang, Banyar. Ikan Manyung seringkali diproduksi dengan jumlah total 2.505 Kg (38.89 persen) disusul ikan Tongkol dihasilkan mencapai angka 1085 Kg (16.84 persen). Kemudian, ikan pari yang diasapi

sejumlah 975 Kg (15,14 persen), disusul ikan Petek diproduksi sejumlah 770 Kg dan selanjutnya berturut turut pada nilai sekitar 400 Kg adalah ikan Petek dan Lele. Ikan asap yang paling sedikit diasapi adalah Pindang dan Banyar dengan nilai 270 Kg (4,19 persen). Tenaga Kerja yang digunakan pengolah ikan asap ditampilkan berikut ini.

Tabel 12. Tenaga Kerja dan Efek Multiplier Tenaga Kerja

Jenis Tenaga Kerja	Jumlah	Efek	Artinya
Pencuci dan Pengolah Ikan	70	3.18	Setiap 1 usaha pengasapan rata-rata membutuhkan 3 orang tenaga kerja.
Pengasap Ikan	86		
Total	156		

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=49.

Tenaga kerja yang digunakan total mencapai 156 orang dengan pembagian tenaga pencuci dan pengolah sejumlah 70 orang dan tenaga pengasap ikan sebanyak 86 orang.

Efek multiplier dari 49 unit usaha pengasapan ikan yang diteliti memiliki nilai 3,18 yang berarti setiap satu unit usaha pengasapan rata-rata membutuhkan 3 orang tenaga kerja untuk pencuci, pengolah, dan pengasap.

2. Budidaya Ikan

Selain pengasapan ikan, Desa Wonosari juga memiliki komoditas unggulan budidaya ikan Lele. Rincian produksi ikan lele responden ditampilkan berikut ini.

Tabel 13. Potensi Budidaya Lele Pokdakan Sari Mino

No Res.	Jenis Ikan Dibudidaya	Panen (Ton)	Bibit 3-5 Harga	Bibit 3-5 Harga	Jumlah Petak	Luas	
1	Lele	20	14800	700000	200	20	12000
	Gurame	2	25000	70000	1000		
2	Lele	20		700000	200	13	7000
3	Lele	3	15000	100000	200	4	1000
4	Lele	13	15000	450000	200	9	2000
5	Lele	3	15000	100000	200	3	250
6	Lele	3	14000	100000	200	4	1000
7	Lele	1	15000	50000	200	3	750
8	Lele	0.6	15000	20000	200	2	500
9	Lele	2	15000	80000	200	3	1000

10	Lele	2	15000	80000	200	16	1000
11	Lele	2	15000	80000	200	3	600
12	Lele	3	15000	100000	200	5	1500
13	Lele	10	15000	350000	200	12	10000
14	Lele	6	15000	200000	200	8	3500
15	Lele	3	15000	100000	200	4	1000
16	Lele	6	15000	200000	200	5	1000
17	Lele	3	15000	100000	200	4	1000
18	Lele	3	15000	100000	200	4	1000
Total		105				122	46100

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n=18.

Potensi produksi lele yang dihasilkan Pokdakan Sari Mino dari responden yang diperoleh mencapai total 105 Ton Ikan Lele saat panen. Jumlah luas petak lahan sejumlah 122 petak dengan luas 46.100 m persegi.

Tenaga Kerja yang digunakan saat panen 58 orang dari 18 responden yang diperoleh. Nilai efek multiplier adalah 3,22 yang berarti setiap satu usaha budidaya ikan lele membutuhkan rata-rata 3 orang untuk membantu aktivitas panen. Upah untuk tenaga kerja pemanen ikan dengan sistem borongan rata-rata Rp. 100.000,- per hari. Tenaga pemberi makan dan pemeliharaan sepenuhnya dilakukan sendiri oleh pemilik usaha.

Analisis Multiplier Pendapatan Masyarakat

Efek multiplier pendapatan menggambarkan nilai tambah yang diperoleh dari usaha pengasapan dan budidaya ikan di Desa Wonosari, Bonang Demak.

Hasil perhitungan analisis ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 14. Multiplier Pendapatan Pengasapan dan Budidaya Ikan

Keterangan	Pendapatan		Potensi laba	Multiplier
	(Rp)	Biaya (Rp)	Kotor (Rp)	Pendapatan
Pengasapan Ikan	169186000	55380500	113805500	0,486
Budidaya Ikan	1597000000	2514800000	679200000	0,263

Sumber : Data Primer, diolah September 2014. n1=49 dan n2=18.

Potensi laba kotor pengasapan ikan lebih kecil dengan jumlah Rp. 113.805.500,- per satuan hari produksi sedangkan potensi laba budidaya ikan nilainya lebih besar Rp. 679.200.000,- dengan masa tunggu panen 2-3 bulan.

Angka pengganda pendapatan pengasapan memiliki nilai 0,486 lebih besar dari budidaya ikan senilai 0,263.

Multiplier pengganda pendapatan pengasapan ikan 0,486 berarti setiap modal yang dimiliki Rp. 1000,- dikeluarkan maka akan menimbulkan potensi keuntungan Rp. 486,-. Nilai multiplier budidaya ikan 0,263 berarti setiap modal yang dimiliki Rp. 1000,- akan memunculkan potensi laba Rp. 263,-.

Implikasi Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan konsep teori kutub pertumbuhan, pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, tenaga kerja, dan bahan baku untuk dijual ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan daerah dan menciptakan peluang kerja. Hal tersebut terbukti pada hasil penelitian ini dilihat dari perspektif mikroekonomi. Sebagian besar hasil olahan ikan asap ini diambil oleh Pedagang yang kemudian dijual ke berbagai Pasar yang ada di Demak, Kudus, Jepara, Gubug, dan Semarang. Hal tersebut meningkatkan pendapatan pengasap ikan yang merupakan penduduk lokal masyarakat Desa Wirosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Pengolahan ikan asap juga memberikan nilai tambah pengganda pendapatan yang sebesar 0,486 lebih besar nilai multiplier pendapatan budidaya ikan lele sebesar 0,263.

UKM pengasap ikan ini merupakan usaha turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa Wirosari yang diwariskan dari orang tua. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Demak memfasilitasi penduduk Desa Wirosari dengan membangun kluster tempat pengasapan higienis dan modern. Tempat pengasapan higienis ini disediakan gratis kepada warga yang berprofesi sebagai pengasap ikan. Pengasap ikan hanya membayar biaya listrik dan air. Tempat pengasapan dibangun dengan dinding permanen berkeramik lantai dengan ukuran 3m x 3m yang dilengkapi dengan instalasi air, sarana pembuangan limbah, dan cerobong asap. Tempat pengasapan ini ditempati oleh 64 pengasap ikan dari wilayah Desa Wirosari, Demak. Pembantuan kluster ini juga berperan untuk memudahkan pedagang membeli ikan asap yang dihasilkan oleh Kluster Pengasapan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan kluster UKM dapat memudahkan koordinasi pelaksanaan penyampaian kebijakan dan pembinaan Pemerintah. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah yang melibatkan pembangunan dengan memberikan kesempatan Masyarakat untuk memberdayakan dan mengoptimalkan keahlian lokal yang dimiliki akan

semakin meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

1. Komoditas unggulan Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah Ikan Asap dan Budidaya Ikan Lele.
2. Total produksi/hari ikan asap sejumlah 6.442 Kg dengan jenis ikan yang diproduksi dari ikan air tawar dan air laut seperti Manyung, Tongkol, Pari, Salem, Semar, Petek, Lele, Pindang, dan Banyar.
3. Potensi produksi lele yang dihasilkan Pokdakan Sari Mino responden yang diperoleh mencapai total 105 Ton Ikan Lele saat panen pertama kali. Panen bisa dilakukan 2-3 kali. Jumlah luas petak lahan sejumlah 122 petak dengan luas 46.100 m persegi.
4. Angka pengganda pendapatan pengasapan memiliki nilai 0,486 lebih besar dari budidaya ikan senilai 0,263. Multiplier pengganda pendapatan pengasapan ikan 0,486 berarti setiap modal yang dimiliki Rp. 1000,- dikeluarkan maka akan menimbulkan potensi keuntungan Rp. 486,-. Nilai multiplier budidaya ikan 0,263 berarti setiap modal yang dimiliki Rp. 1000,- akan memunculkan potensi laba Rp. 263,-.
5. Pembentukan kluster pengasapan ikan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, nilai tambah produksi, dan pendapatan masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Pujiati, 2009. *Analisis Kawasan Andalan di Jateng*. Aset September 2009. Vol 11 No.2 117-128.
- Besanko, David A. and Ronald R. Braeutigam. 2006. *Microeconomics: An Integrated Approach*. New York. United State of America : John Wiley & Sons Inc.
- Dewan Riset Daerah, 2010. *Pengembangan Model ELKAT Untuk Penciptaan Kawasan Wisata Agroindustri Berbasis Pengetahuan Lokal di Jateng*. DRD Jateng.
- Djoni Hartono, 2003, *Peran Sektor Jasa Terhadap Perekonomian DKI Jakarta : Analisis Input – Ouput*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia Vol. 4 No. 1 Juli 2003 hal. 39-58, Jakarta
- Hastarini, Dwi Atmanti. 2010. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Studi Sektor Unggulan di Kab/Kota di Jawa Tengah*. Prestasi Vol.6 No.1 2010. STIE BPD Jateng.

Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Nicholson, W. 2005. *Microeconomics Theory Principals and Extension Ninth Edition*. South-Western: Thomson Corporation

Nugroho SBM, 2004, *Model Basis Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah*, Dinamika Pembangunan Vol.1 No.1/Juli 2004 : 23-30, FE Undip, Semarang.

Nurimansjah Hasibuan, 1993, *Ekonomi Industri Persaingan, Monopoli, Dan Regulasi*. LP3ES. Jakarta

Robinson Tarigan, 2004, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sadono Sukirno, 1976, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE-UI, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2000, *Makroekonomi Modern*, Grafindo Persada, Jakarta

Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C., 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta. Terjemahan : Haris Munandar.

RPSEP-65

Implementasi Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Di Kabupaten Rejang Lebong

Eha Saleha
Yuli Tirtariandi El Anshori
FISIP-UT
e-mail: ehasaleha@ut.ac.id

ABSTRAK

Kesenjangan pengetahuan digital antara masyarakat perkotaan dan masyarakat yang terjadi di desa terpencil di Indonesia, mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKomInfo) membuat program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Program ini bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatan internet untuk peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Hal ini menarik untuk dikaji dengan tujuan memberikan deskripsi khususnya tentang kendala implementasi program PLIK dan MPLIK di Rejang Lebong. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dari implementasi PLIK/MPLIK yaitu: *pertama*; dukungan sumberdaya berupa dana operasional yang rendah dan peralatan yang di bawah standar, serta operator yang tidak memiliki keahlian. *Kedua*; tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang intens antar operator PLIK/MPLIK, PT Jastrindo Dinamika dan PT WIN juga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. *Ketiga*; rendahnya partisipasi masyarakat. *Keempat*; kondisi peralatan yang rusak dan di bawah standar, besarnya biaya operasional dibandingkan pendapatan, operator yang tidak memiliki pendidikan di bidang teknologi informasi, rendahnya koordinasi dan sosialisasi serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program PLIK/MPLIK.

Kata Kunci : Kendala, Implementasi program, PLIK/MPLIK.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan digital informasi dan komunikasi agar setiap orang memiliki hak yang sama terhadap akses informasi publik. Pengembangan program internet murah melalui program MPLIK merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat. Menurut Nupikso (dalam Abrar dkk, 2013:139) bahwa dalam mengembangkan masyarakat informasi di Indonesia, peran pemerintah masih sangat dominan. Pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sekaligus sebagai operator. Upaya pemerintah ini tidak

terlepas dari proses globalisasi yang sedang berlangsung, yang oleh berbagai pihak dinilai telah menciptakan ketidakadilan di bidang teknologi informasi.

Pemerintah Indonesia merespon perkembangan tersebut melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKomInfo) dengan membuat program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Program ini bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Program ini dimulai dari tahun 2010 dan pembiayaannya bersumber dari dana *Universal Service Obligation (USO)* yang berasal dari kontribusi para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen/tahun dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (Kominfo, 2013).

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Provinsi Bengkulu, PLIK sudah terpasang sebanyak 118 unit dan MPLIK sebanyak 45 unit tersebar di seluruh kecamatan di provinsi tersebut, dan pemasangan ini dilakukan oleh pemenang tender yaitu PT Jastrindo Dinamika (Muhktar, Riaubisnis.com:2010). Khusus untuk Kabupaten Rejang Lebong telah ditempatkan sembilan unit fasilitas PLIK dan tujuh mobil PLIK di beberapa kecamatan bersama mitra terpilih dari masyarakat seperti tertera di bawah ini:

Tabel 1.1 PLIK Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Mitra	Alamat Warnet PLIK
1	Rejang Lebong	Curup	Herliardo, S.Ag	Jln. Panjaitan Gang Dharma Bakti RT.03,RW.02 Kec. Curup
2	Rejang Lebong	Bermani Ulu	Juli Haryanto	Desa Sentral Baru
3	Rejang Lebong	Selupu Rejang	Amrullah Zuhdi, S.Pd.I	Jln. Air Dukuh No.20 Kec. Selupu Rejang
4	Rejang Lebong	Curup Utara	Hendrik Kismono	Ds. Sangun Ratu, Jln. Dr.Akagani Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara
5	Rejang Lebong	Curup Utara	Pita Permata Sari	Desa Batu Panco No.20 Kel. Curup Utara
6	Rejang Lebong	Curup Timur	Maskos Pahlevi	Jl. Ahmad Yani no.170

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama Mitra	Alamat Warnet PLIK
7	Rejang Lebong	Curup	Sanusi Pane	Curup Timur Kel. Sukaraja no. 148
8	Rejang Lebong	Curup Tengah	Mega Wati	Jl. KH. Azim Azkhari Kel. SukarajaNo. 148
9	Rejang Lebong	Curup Selatan	Yosua A Habeakan	Jl. KH. Agus Salim RT 3 RW 3 no. 2 Kel. Air putih (samping Ism perhutani)

Sumber : data olahan peneliti, 2014

Tabel 1.2 Daftar MPLIK Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Kecamatan	Nomor Polisi Kendaraan
1	Rejang Lebong	Air Putih Lama	B 9401 PCC
2	Rejang Lebong	Bermani Ulu	B 9394 PCC
3	Rejang Lebong	Curup Utara	B 9365 PCC
4	Rejang Lebong	Curup Utara	B 9399 PCC
5	Rejang Lebong	Curup Utara	B 9479 PCC
6	Rejang Lebong	Pasar tengah	B 9386 PCC
7	Rejang Lebong	Curup	B 9464 PCC

Sumber : data olahan peneliti, 2014

Pada beberapa tahun pelaksanaannya, menurut BP3TI KemKominfo (dalam Majalahitc.com, 2013), terdapat beberapa masalah seperti faktor kinerja penyedia jasa dan faktor fungsi sarana serta sosialisasi masyarakat melahirkan kendala yaitu KemKominfo mencatat bahwa per 7 Desember 2011 sisa PLIK yang harus dibangun yakni 418 setara 7,27% dari target 5.748 serta sisa MPLIK yang belum terealisasi 1.061 setara 55,64% dari total target 1.907.

Menurut harian online Tempo. Com (16 Juli 2013), Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Modus tindak pidana ini adalah pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan operasional yang tak sesuai dengan dokumen kontrak.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah “kendala apakah yang menghambat implementasi program PLIK dan MPLIK di Kabupaten

Rejang Lebong setelah kejaksanaan agung menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)?”.

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kajian tentang implementasi kebijakan adalah pendapat Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2012:135) yang mengatakan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:24) juga menjelaskan bahwa ada enam variabel yang membentuk kinerja kebijakan publik, yaitu: (1) standar kebijakan dapat diartikan sebagai tujuan dan standard pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik; (2) sumber daya dan insentif implementasi kebijakan publik; (3) kualitas hubungan antar instansi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik; (4) karakteristik instansi pelaksana kebijakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kedudukan, wewenang dan fungsi masing-masing instansi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan publik; (5) kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah implementasi kebijakan publik; dan (6) kecenderungan tanggungjawab pelaksana kebijakan yang meliputi kesadaran, arahan dan intensitas.

Meski model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:25) menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka terkategori pendekatan *top-down*, standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan pada implementor melalui jaringan interorganisasional, atau dengan perkataan lain, yang terpenting adalah para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2012:679), program merupakan pelaksanaan keputusan (*decession working*) yang terkait dengan anggaran. Program didetailkan dalam bentuk proyek-proyek dan implementasinya dalam bentuk produk baik berupa pelayanan maupun barang. Istilah produk dapat diganti dengan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

Kendala-kendala dalam implementasi PLIK/MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong

A. Ketersediaan sumberdaya yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi

PLIK dan MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil , masalah sumber daya ini dapat dikategorikan lagi menjadi beberapa aspek, yaitu :

1. Insentif atau dana untuk operasional implementasi program PLIK/MPLIK di kabupaten Rejang Lebong.

Hasil temuan di lapangan diketahui bahwa sejak menerima fasilitas internet program PLIK/MPLIK, BP3TI ataupun pihak PT Jastrindo/PT Wahana Inovasi Nusantara belum memberikan insentif untuk dana operasional ataupun honor operator, seperti yang dijanjikan Rp 3.125/jam. Operator MPLIK Desa Seguring Kecamatan Curup Utara, menceritakan bahwa masalah BBM mobil, biaya operasional, dan biaya listrik PT Wahana Inovasi Nusantara tidak bertanggungjawab, tetapi ditanggung dari hasil usaha MPLIK. Jika mobil PLIK berkeliling untuk mendapatkan gaji operator, biaya solar mobil, biaya bensin untuk genset dengan total pengeluaran minimum Rp 150.000,- sedangkan pendapatan jika dihitung-hitung 8 jam dikalikan dua laptop dengan sewa Rp 2.000/jam sekitar Rp 32.000 tidak cukup untuk biaya operasional operator sehari-hari. Jika dikaji secara teoretis maka bisa mengacu kepada pendapat Daru Nupikso (dalam Abrar dkk, 2013:131) bahwa pada dasarnya kegagalan implementasi kebijakan publik lainnya faktor penyebabnya tidak jauh berbeda. KKN merupakan problem serius yang terjadi di hampir seluruh bidang dan aktivitas di Indonesia. Segala sesuatu dapat diselewengkan dan direkayasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berawal dari praktik KKN inilah berbagai penyimpangan lain muncul ketika kebijakan publik diimplementasikan.

2. Staf/operator PLIK/MPLIK yang memiliki keahlian dan keterampilan

Kementerian Koinfo mendelegasikan wewenang pelaksanaan PLIK/MPLIK di Indonesia kepada BP3TI sekaligus sebagai aktor pelaksana. Sebagai penerima mandat, BP3TI merumuskan berbagai kebijakan tentang PLIK/MPLIK kemudian mengimplementasikan dengan melibatkan swasta sebagai eksekutor di lapangan. Sampai di sini nampak bahwa pelaksanaan PLIK/MPLIK hanya dimaknai sebagai kebijakan teknis, sebab tugas tugas yang diemban oleh BP3TI bersifat teknis dan tidak menyentuh kelompok sasaran sebagai penerima

manfaat (pasal. 2 dan 3 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3TI).

Pelaksana lapangan (eksekutor) PLIK/MPLIK PT Jastrindo Dinamika dan PT Wahana Inovasi Nusantara (WIN) adalah penyelenggara bisnis telekomunikasi, yang dapat diasumsikan untuk penguasaan teknologi bukan menjadi kendala termasuk pemasangan infrastruktur telekomunikasi secara fisik seharusnya dapat berjalan lancar, sehingga hambatan teknologi selalu dapat diatasi dengan teknologi yang tersedia kemudian atau dengan rekayasa. Namun karena rekayasa bisnis atau semacamnya, maka teknologi yang diturunkan di lapangan tidak cukup memadai dan tidak banyak berfungsi sesuai dengan kebutuhan PLIK/MPLIK.

Begitu pula dengan mitra yang bekerja sebagai operator MPLIK merupakan lulusan sekolah menengah pertama yang tidak memiliki keterampilan yang memadai di bidang informasi teknologi dan tidak mampu menjadi teknisi untuk peralatan yang diberikan oleh PT WIN/PT Jastrindo sehingga apabila terdapat kerusakan akan sangat sulit sekali untuk diselesaikan. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu informan PLIK di Kelurahan Talang Benih, bahwa di saat dibuka satu bulan, satu laptop bisa beroperasi sedangkan 5 laptop lainnya rusak. Sepinya peminat menjadikan warnet akhirnya ditutup karena pendapatan tidak ada. Kemudian MPLIK di Desa Seguring berhenti sejak dua bulan terakhir sejak *server* meledak terkena petir. Jika merujuk kepada pendapat Purwanto, dkk (2012:87), implementor yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya ikut andil menjadi penyebab kegagalan pencapaian tujuan kebijakan/program yang diimplementasikan. Peneliti setuju dengan pendapat di atas, operator MPLIK /PLIK harus dipilih karena kemampuannya memahami tujuan dan pedoman pelaksanaan dan teknis PLIK/MPLIK serta memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi sehingga bila terjadi kerusakan alat dan lemahnya jaringan, operator mampu mengatasinya segera dan tidak menghambat kegiatan pelaksanaan PLIK/MPLIK

3. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi program PLIK/MPLIK

Informasi yang jelas dan akurat merupakan modal bagi implementator untuk melaksanakan secara maksimal program PLIK dan MPLIK. Dari hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa operator PLIK/MPLIK tidak berkomunikasi secara rutin dan berkoordinasi dengan pemerintah dan PT WIN/PT Jastrindo. Maka dapat dipastikan bahwa operator

PLIK/MPLIK di lapangan menjalankan prosedur sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Diketahui bahwa operator MPLIK bukan teknisi, sehingga ketika beberapa kali PT Jastrindo Dinamika ditelepon mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan.

Merujuk pada temuan penelitian Radesa (2013:13), panduan sistem tata kelola PLIK/MPLIK secara umum termuat dalam buku Penyediaan KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemkominfo tahun 2012, tetapi secara khusus belum ada dan sedang dalam penggodokan. Setiap program layanan yang diluncurkan oleh pemerintah harus ada buku panduan atau petunjuk, sehingga informasi bisa didapatkan dan isu-isu yang kurang sedap tentang sebuah program layanan dapat diminimalisir.

Keberadaan Buku penyediaan KPU/USO sangatlah penting sebagai petunjuk bagi operator PLIK/MPLIK mitra yang berada di pelosok desa dan sudah bisa dipastikan bahwa dengan informasi yang terbatas (buku pedoman tidak ada) maka prosedur dan standar pelayanan tidak dapat dijalankan di daerah. Begitu pula tujuan program PLIK/MPLIK yang sulit dicapai di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Dukungan dari Pendidikan untuk mensukseskan implementasi Kebijakan

Pendidikan bisa menunjukkan peningkatan dinamika berpikir dan keahlian. Dapat dipersepsikan bahwa pendidikan dijadikan sebagai indikator tingkat kehidupan sosial. Dengan terdapatnya beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta serta sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMU di Kabupaten Rejang Lebong memberikan peluang besar bagi pemerintah pusat dan operator PLIK/MPLIK untuk menjangkau mereka yang membutuhkan akses internet untuk menunjang belajar dan studinya.

Kalangan pelajar adalah kalangan mayoritas pengguna internet seperti hasil penelitian Inasari Widyastuti (dalam Abrar, 2013:31) yang mengatakan bahwa PLIK/MPLIK dapat menjadi wahana membangun kapasitas pelajar perdesaan sehingga memiliki kemampuan setara bahkan lebih dari pelajar di perkotaan. Terlihat dari tingginya minat pelajar menggunakan layanan PLIK untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah, mencari informasi dan memperkuat pengetahuan. Walaupun tak dapat dipungkiri, aktivitas *online* yang dilakukan pelajar didominasi dengan kegiatan hiburan seperti untuk *game online* dan jejaring sosial. Namun masyarakat umum yang berada di desa terpencil di Kabupaten Rejang Lebong merupakan petani lulusan SD dan SMP yang tidak mampu mengoperasikan komputer dan mengakses internet.

B. Kualitas hubungan inter-organisasional antara Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Operator PLIK/MPLIK serta Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai pendapat operator PLIK/MPLIK.

Kualitas hubungan inter-organisasional antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Rejang Lebong dengan Operator PLIK/MPLIK serta dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditandai dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Tidak adanya koordinasi antara antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Rejang Lebong dengan Operator PLIK/MPLIK serta dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang Komunikasi dan Informatika DinHubKomInfo Rejang Lebong, dalam kutipan wawancara menyebutkan bahwa karena dari pusat, mereka hanya mengikuti saja sebab bukan wewenangnya. Bahkan tidak ada koordinasi. Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan dari operator PLIK Desa Seguring bahwa Dinas Perhubkominfo tidak mengerti. Menurutnya itu adalah dana pusat yang digunakan untuk kecamatan tertinggal sehingga kadang-kadang pihak Pemkab juga tidak tahu.

2. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari komunikator ke komunikan atau dari pemerintah pusat maupun ke daerah.

Misalnya antara operator PLIK/MPLIK dengan PT WIN/PT Jastrindo Dinamika lebih sering dilakukan satu arah seperti yang diceritakan oleh salah satu informan, Ji. Menurutnya, seringkali jika ada masalah operator memecahkan sendiri karena komunikasi dengan PT WIN sering terputus. Jika dibandingkan dengan pendapat Edward III (dalam Nugroho, 2012:693), untuk menghindari distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan perlu adanya ketetapan waktu dalam menyampaikan informasi seperti jadwal rutin untuk sosialisasi dan monitoring, harus jelas informasi yang disampaikan (sesuai SOP dan Pedoman pelaksanaan program) serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi (komunikasi efektif).

C. Partisipasi masyarakat dalam implementasi PLIK dan MPLIK

Keikutsertaan masyarakat dalam program PLIK/MPLIK tidak dapat dilihat secara langsung oleh peneliti karena kondisi warung internet PLIK maupun Mobil PLIK sudah tidak lagi beroperasi sehingga peneliti tidak dapat mengukur langsung seberapa tinggi partisipasi masyarakat terhadap program ini. Namun informan dari Desa Seguring menyatakan bahwa anak-anak, masyarakat biasa juga ada yang mengakses internet, masyarakat pengguna, juga para ibu yang mencari resep masakan untuk pertanian. Anak-anak juga sudah bisa membuka internet.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kendala dalam implementasi PLIK/MPLIK adalah dukungan sumberdaya baik dana atau berbagai insentif yang rendah sehingga tidak dapat memfasilitasi keefektifan implementasi PLIK dan MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu keterbatasan dana operasional dan tidak adanya subsidi biaya operasional dari pemerintah, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh operator PLIK/MPLIK di Kabupaten Rejang Lebong menjadi sumber kegagalan implementasi program PLIK/MPLIK. Kemudian kendala lainnya adalah tidak adanya hubungan inter-organisasional antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Jastrindo Dinamika/PT WIN dengan dinas PerhubKomInfo Kabupaten Rejang Lebong dan operator PLIK/MPLIK serta pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, baik dalam bentuk koordinasi dan komunikasi selama operator menerima fasilitas dan peralatan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Keikutsertaan masyarakat dalam program PLIK/MPLIK tidak dapat dilihat secara langsung karena kondisi warung internet PLIK maupun Mobil PLIK sudah tidak lagi beroperasi. Sulit mengukur langsung seberapa tinggi/rendah partisipasi masyarakat terhadap program ini. Namun dari hasil wawancara dengan operator PLIK/MPLIK dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dalam implementasi PLIK dan MPLIK sangat kurang disebabkan karena rendahnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap internet, sosialisasi yang tidak rutin dan terjadwal, serta proses monitoring yang tidak berjalan dengan baik. Partisipasi yang rendah itu didominasi oleh kalangan pelajar dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadyha, dkk (2013), *Implementasi Program SUO*, Yogyakarta: Tiara Wacana Lokus
- Bungin, Burhan (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana
- BP3TI (2012). *Penyediaan KPU/ USO: Melalui USO, Kita Buka Kemudahan Akses Informasi Hingga Pelosok Negeri*. Jakarta: Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI). Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Dyah, Sulistyastuti R dan Erwan, Purwanto A (2002). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Ibrahim, Erwin. (2012), *Mengapa MPLIK? Didalam Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi Di Banyuasin*. Sumatera Selatan. Pemkab Banyuasin
- Ibrahim, Idi Subandy, (2011). *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2009.
----- Dalam Angka Tahun 2012
- Moleong, Lexy (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Rosdakarya
- Nugroho, Riant (2012). *Public Policy*. Jakarta. Gramedia
----- (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/ M.KOMINFO/ 11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 48/Per/M.Kominfo/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.
- Radesa, Dodi. (2013). *Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Subarsono, AG, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono (2008). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Solichin, Wahab Abdul (2012). *Analisis kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara

Sopia, Hanni dan Prianto, Budhi (2010). *Akses Internet*. Yogyakarta. Kriya Pustaka

Tachjan (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Winarno, Budi (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Media Persindo

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/24/1219472/DPR.Ada.4.Temuan.Bobroknnya.Proyek.Melek.Internet.Kemenkominfo> diakses 20 November 2013 pukul 10. 25 Wib

<http://riaubisnis.com/insidex.php/tech-mainmenu-30/telekomunikasi> diakses 20 desember 2013 pukul 10.00Wib

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-13-I-P3DI-Juli-2013-20 diakses tanggal 29 Nopember 2013 pukul 21.45Wib

<http://id2.dishubkominfo.banjarkab.go.id/?p=234> diakses tanggal 02 Oktober 2013 pukul 09.33 Wib

www.merdeka.com/teknologi/tifatul-curhat-soal-tujuan-awal-plikmplik.html diakses tanggal 29 Desember 2013 pukul 22.00 Wib

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/09/02/msi5ye-kominfo-percepat-distribusi-mobil-internet-kecamatan> diakses tanggal 29 Desember 2013 pukul 10. 01 Wib

<http://techno.okezone.com/read/2013/12/29/54/918816/evaluasi-proyek-mplik-kemenkominfo-bentuk-tim-investigasi> diakses tanggal 05 Januari 2014 pukul 19.05 Wib

http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_2097.htm diakses tanggal 31 Januari 2014 pukul 21.09 Wib

<http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.com> diakses tanggal 31 Januari 2014 pukul 22.07 Wib

<http://budinugroho24.wordpress.com> diakses tanggal 31 Januari 2014 pukul 20.40 Wib

www. Antaranews.com.national summit 2009 diakses 31 januari 2014 pukul 19.55 Wib

<http://utariangraini.blog> diakses 25 April 2014 pukul 22.30 Wib

<http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Rekap> diakses tanggal 27 April 2014 pukul 09.00 Wib.

[http://www.kominfo.go.id/sebaran kpu-uso](http://www.kominfo.go.id/sebaran-kpu-uso) diakses tanggal 20 Februari 2014 pukul 11.00 Wib

<http://media.kompasiana.com>, diakses tanggal 26 Januari 2014 22.01 Wib

<http://azhariah-rachman.blogspot>. diakses tanggal 20 Maret 2014 pukul 20.07 Wib

<http://kesenjangan-digital-bppn.blogspot>, di akses tanggal 22 Mei 2014
pukul 00.00Wib

RPSEP-66

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Nuraini, Rifzaldi Nasri
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl KHA Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan 15419
Email : bunda_aini27@yahoo.com
rifzaldinasri@yahoo.co.id
jamilah.feumj@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan mengidentifikasi lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang memberikan pembiayaan/pinjaman khususnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Tangerang Selatan, Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Mengidentifikasi jenis dan kriteria pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Design/metodologi/pendekatan: metode yang dipakai adalah metode survei, dengan melakukan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan terbuka ke nara sumber Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum semua LKMS yang diteliti mempunyai jenis pembiayaan yang sama dengan berbagai masalah baik yang ada pada LKMS maupun UMKM

Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jenis pembiayaan

PENDAHULUAN

Latar Masalah

Ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah serta orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan potensi masalah terbesar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan antara lain melalui program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Tunai Langsung (BLT), Asuransi Kesehatan untuk Orang Miskin (Askesin) dan lain-lain. Di sisi lain gelombang ketidakpuasan kaum miskin dan para penganggur tetap adaterhadap ketidakmampuan pemerintah dalam

menyediakan peluang kerja, walaupun dapat diredam karena tersedianya peluang kerja di sektor informal.

Menurut Andre Bayo Ala (1981) Ada kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu

1. Kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara seragam (general) tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah (komunitas).
2. Pengukuran kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh pihak eksternal dan memakai parameter yang terlalu ekonomis. Implikasinya adalah konsep penanganan kemiskinan mengalami bias sasaran dan mereduksi hakikat kemiskinan tersebut.
3. Penanganan program pengentasan kemiskinan mengalami birokratisasi yang dalam, sehingga banyak gagal akibat belitan prosedur yang panjang.
4. Penanganan kemiskinn sering ditumpangi oleh kepentingan politik yang amat kental sehingga tidak mempunyai muatan atau makna dalam penguatan perekonomian masyarakat miskin

TELAAH LITERATUR

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh suatu negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dari ukurannya. Hal ini disebabkan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam.

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan. Sedangkan menurut ketentuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagaimana dikutip oleh Schelzig (2005) bahwa ada lima kategori non-moneter tentang kemiskinan yaitu kekurangan makanan, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal.

Sedangkan Suparlan (1993) berpendapat kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lain halnya dengan Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuatan sosial, yang meliputi : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keberadaan UMKM dapat ditinjau dari berbagai perspektif, antara lain perspektif kebijakan, perspektif sosial maupun perspektif ekonomi. Dari ketiga perspektif tersebut, perspektif ekonomi merupakan cara pandang pertama yang terbangun dalam literatur kluster. Secara sederhana perspektif ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah cara pandang terhadap fenomena kluster UMKM yang dibangun dari teori ekonomi

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain: Menurut Bolton (1971), UMKM Secara kualitatif, dapat didefinisikan sebagai usaha mandiri, dikelola oleh pemiliknya atau bagian - pemilik dan memiliki porsi kecil dari pasar. Usaha kecil diperlakukan sebagai perusahaan kecil dan menengah (UKM) dan diambil untuk menjadi sebuah organisasi yang mempekerjakan kurang dari 250 karyawan, seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa (CEC, 1996), Departemen Perdagangan dan Industri, Inggris (DTI, 1999) dan Dinas Usaha Kecil, UK (SBS, 2000). Definisi lain telah digunakan di Amerika Serikat (SBA, 2003) dan di Jepang (SMEA - METI, 2003). Misalnya, AS menganggap perusahaan kecil untuk memasukkan mereka yang kurang dari 500 karyawan.

C. Permasalahan UMKM

UMKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen).

Masalah finansial

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM;
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM;
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil;

4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi;
6. Banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Masalah non finansial

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan;
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar;
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM;
4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Penelitian Terdahulu

Sukron, dalam penelitiannya yang berjudul strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah menyimpulkan bahwa (1) strategi yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain : (a) datang langsung ke tempat calon nasabah, strategi ini digunakan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai promosi BMT Al-Munawwarah kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. (b) rekomendasi mitra lama, yaitu dengan cara melihat data-data mitra yang memang sudah dikenal lebih dahulu atau melalui mitra yang lain dan saling memberi informasi jika ada mitra yang lain membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. (c) Jenis usaha yang dibiayai, strategi ini digunakan untuk menyaring jenis usaha apa saja yang boleh dibiayai oleh BMT Al-Munawwarah tentunya berdasarkan syariat Islam. (d) Promosi, dalam melakukan promosi BMT menggunakan brosur, surat kabar, internet, stasiun radio, banner dan lain-lain. (2)

Perkembangan pembiayaan BMT Al-Munawwarah terhadap UKM dengan strategi-strategi yang telah dilakukan dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM terbukti berhasil karena rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Muhammad Hafidz Lidinillah, dalam penelitiannya yang berjudul persepsi pengusaha kecil terhadap pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil menyimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil memiliki persepsi yang positif terhadap produk BMT yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. BMT melalui produk pembiayaannya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM dengan didukung pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala oleh pihak BMT.

Febrinol, Tisna Surya Adi Prenanto dan Riyadian Dwi Cahyo dalam penelitiannya yang di publikasikan di situs harian Kompas Pada tanggal 25 September 2012, dengan judul "*Peran Perbankan Syariah dalam Usaha Kecil dan Menengah*" mengatakan bahwa "Ketika kita menelaah lebih jauh dari kondisi perkembangan perekonomian masyarakat kita, bahwasanya ekonomi rakyatlah yang akan menjadi benih awal yang akan mewujudkan perekonomian nasional yang akan memberikan kontribusi bagi masyarakat kita sendiri dalam usaha pengembangan kearifan lokal. Ujud kongkrit dari berkembangnya ekonomi rakyat yang diwujudkan dalam bentuk Usaha Kecil Menengah ini kalau kita mencoba menelaah lebih jauh, ternyata yang berperan dibalik itu semua selama ini salah satunya adalah peranan bank syariah yang selalu memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan perekonomian rakyat itu sendiri.

Selama ini langkah dari bank syariah telah memberikan semangat dan dorongan terhadap terwujud dan terbangunnya semangat para masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan menengah kebawah yang ingin mencoba ikut serta dalam upaya mewujudkan perekonomian bangsa yang berorientasi kedepan dan bermasa depan yang jelas yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil pada umumnya. Itu semua telah diwujudkan dengan upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah yang benar- benar mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

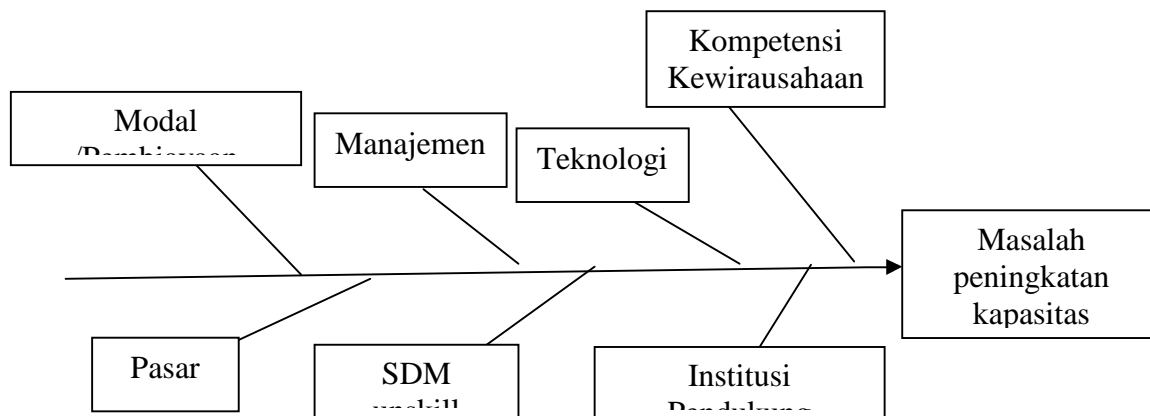
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan

berbagai data, dokumen dan informasi yang aktual. Materi yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk analisis sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Menurut Sugiyono (2012:9) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat *interaktif (reciprocal)*.

Sesuai dengan masalah penelitian yang akan di analisis, maka metode yang dipakai adalah metode naturalistik dan deskriptif, karena dengan metode ini dapat membedah, membahas, dan mengenali masalah-masalah



HASIL PENELITIAN

Di Tangerang Selatan ada sekitar 30 BMT yang membantu permodalan UMKM dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Sebagai contoh BMT Al Munawarrah yang memberikan pembiayaan hingga Rp 20.000.000.000 kepada UMKM pada tahun 2013, jumlah ini hampir 90% dari seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Al Munawarrah, 2013).

Kiat-kiat lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dalam memberikan pembiayaan/pinjaman khususnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari Dinas KUKM dan Dinas Industri & Perdagangan Tangerang Selatan juga cukup baik melalui pelatihan-pelatihan, pameran & bazaar, bantuan peralatan, program pendaftaran merek, sertifikasi Halal, uji dinas kesehatan (Nomer PIRT) bagi pelaku UMKM secara gratis. Semua kegiatan tersebut membantu UMKM dan BMT terkait

dengan pemberkasan legal formal.

- b. BMT mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya, hal yang tidak pernah dilakukan oleh pihak perbankan baik konvensional maupun syariah.
- c. BMT mampu melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan karena pengelola BMT cukup terlatih untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dengan metode yang berbeda.
- d. BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada UMKM untuk mendorong kemajuan usaha mereka, hal ini merupakan wujud tanggungjawab BMT untuk berperan dalam mensejahterakan masyarakat
- e. BMT bersedia melayani transaksi pembiayaan dibawah Rp 1.000.000, yang tidak pernah bisa dilayani oleh pihak perbankan maupun BPR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang beragam. Dari beragam permasalahan yang dihadapi UMKM, dapat dibagi menjadi masalah internal dan masalah eksternal

Masalah Internal

- a. Kebanyakan bentuk usaha biasanya masih perorangan dan belum berbadan hukum, aspek legalitas usaha lemah, struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang kurang jelas;
- b. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak *up to date*. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-*aspek entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar;
- d. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat;
- e. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas;
- f. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi;
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena

keterbatasan sistem administrasi;

- h. Sebagian besar Pelaku UMKM belum bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan modal usaha;
- i. Sebagian besar belum mampu membuat perencanaan usaha yang akan dilakukannya sehingga sulit untuk berkembang.

Sedangkan permasalahan eksternalnya adalah :

- a. Kesulitan dalam pemasaran karena sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor;
- b. Keterbatasan dalam finansial UMKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial yaitu : mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi;
- c. Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi;
- d. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi;
- e. Kebijakan pemangku kepentingan yang kontraproduktif terhadap pengembangan UMKM, antara lain peraturan perbankan yang menyulitkan pinjaman permodalan, keamanan dan kenyamanan berusaha, infrastruktur daerah, proses perijinan dan sertifikasi yang rumit, dan yang terbaru adalah kewajiban setor pajak 1% bagi UMKM.

Dari beberapa BMT yang menjadi objek penelitian ini, umumnya mempunyai jenis pembiayaan yang sama antara lain :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan bagi UMKM yang mempunyai usaha yang layak, tetapi mengalami kesulitan dana, dapat mengajukan permohonan pembiayaan Mudharabah. BMT akan memberikan pinjaman modal usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan untuk UMKM yang mempunyai usaha yang layak, tetapi mengalami kesulitan dana dan pengelolaan usaha, dapat mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. UMKM dan BMT akan bersama-sama membiayai dan mengelola usaha UMKM dengan sistem bagi hasil sesuai penyertaan modal masing-masing pihak.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan suatu barang atau alat kerja, tetapi mengalami kesulitan dalam pengadaan dana tunai. UMKM dapat mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah. BMT akan memberikan dana pinjaman yang akan dikembalikan sekaligus pada saat jatuh tempo dengan mark up (pertambahan nilai).

Gambar 4.1 Skema Peningkatan Kapasitas UMKM



IDENTIFIKASI MASALAH GUNA PENINGKATAN KAPASITAS UMKM

1. Usaha BMT untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM
 - a. Bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya.
 - b. Melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan.
 - c. Melakukan pendekatan dan bantuan kepada UMKM untuk mendorong kemajuan usaha mereka
 - d. Melayani transaksi pembiayaan dibawah Rp 1.000.000, yang tidak pernah bisa dilayani oleh pihak perbankan maupun BPR.
2. Permasalahan UMKM
 - a. Internal : Struktur organisasi lemah, legalitas tidak ada, pembukuan sederhana, SDM terbatas, margin usaha kecil, sumber dana terbatas, tidak ada perencanaan usaha,
 - b. Eksternal : Kesulitan pemasaran, Keterbatasan Financial, Keterbatasan Bahan baku, keterbatasan, Teknologi, Kebijakan pemangku kepentingan khususnya perbankan
3. Jenis Pembiayaan yang diminati UMKM
 4. Pembiayaan Mudharabah
 5. Pembiayaan Musyarakah
 6. Pembiayaan Murabahah

DAFTAR PUSTAKA

Andre Bayo Ala.(1981), “Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan”, Liberty, Yogyakarta.

Andang Setyobudi.(2007), “Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Agustus Volume 5, No. 2.

Adenan Djamasri, dkk. (2001), “Ekonomi Pembangunan I”, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

Adiwarman Karim.(2004), “Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo, Jakarta.

Dahlan Siamat.(1995), “Manajemen Lembaga Keuangan”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Davis Horward and Associates. (1996), “Enabling or Disabling Local Government: Choices for the future Buckingham Philadelphia: Open University Press.

Genjot Sektor UKM dengan Kredit Usaha Rakyat, (2007), Jurnal UKM, edisi November.

Hertanto Widodo, Ak, et al.(1999), “Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)”, Mizan, Bandung.

Ismail. (2011), “Perbankan Syariah”, Prenada Group, Jakarta.

Kuncoro Mudrajat.(2000), “Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Kasmir. (2005), “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Syafi’i Antonio.(2001), “Bank Syariah Dari Teori ke Praktik”, Gema Insani, Jakarta.

Mervyn K Lewis, Ltifa M Al-Gaod.(2007), “Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek”, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Muhammad.(2002), “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
_____ (2006), “Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah”, UII Press, Yogyakarta.

Meier, Gerald M. (1995). “Leading Issues in Economic Development”, University Press, Oxford.

Muhammad Ridwan. (2005), “Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, UII Press, Yogyakarta.

- _____ (2006), “Sistem dan Prosedur Pendirian BMT”, Citra Media, Yogyakarta.
- Suparlan Parsuadi. (1993), “Kemiskinan Di Perkotaan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Schelzig, K. (2005), “Poverty in the Philippines: Income, assets, and access”, Manila: Asian Development Bank. Retrieved from <http://www.adb.org/documents/books/Poverty-in-the-Philippines/Poverty-in-the-Philippines.pdf>.
- Soerjani, Moh. dkk. (1987), “Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan”, UI-Press, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. (2003), “Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan”, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung.
- Todaro, M. P. & S.C. Smith. (2006), “Economic development 8th edition. Manila, Philippines: Pearson South Asia Pte. Ltd.
- _____ (2000), “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, M.A. Jakarta: Erlangga. Future Buckingham Philadelphia: Open University Press.
- Mar Chapra. (2001), “Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam”, Gema Insani Press, Jakarta.
- Veithzal Rivaidan Arviyan Arifin. (2010), “Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi”, Bumi Aksara, Jakarta. www.depkop.go.id, 15 Januari 2013
- Rizkywahyudin.wordpress.com/2011/01/03/permodalan-ukm/ , 15 Januari 2013
- Azrafikriansyah.blogspot.com/ , 15 Januari 2013
- Lensa Indonesia.com
- Berita Resmi Statistik N 2 o. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013
- Sumber: <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2157676-pengertian-pembiayaan/#ixzz2QF5tEbHW>
- Sumber: <http://www.apkasi.or.id/>

RPSEP-67

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI KOMUNIKASI PENYADARAN KRITIS (Kasus Pemberdayaan Petani Padi Organik Paguyuban Petani Al-Barakah Kabupaten Semarang)

Wijanarko
UPBJJ-UT Pontianak

Email: wijanarko@ut.ac.id

Abstrak

Komunikasi pembangkitan kesadaran (*consciousness raising*) pada organisasi gerakan petani sangat dibutuhkan untuk menyadarkan anggota kelompok tani akan situasi ketidakadilan yang mereka rasakan. Tujuan *consciousness raising* adalah partisipasi anggota pada proses pemberdayaan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ruang publik negara yang memarginalkan ruang-ruang komunikasi petani pada aras lokal, maka proses pembangkitan kesadaran sebagai strategi organisasi gerakan petani untuk melawan bentuk-bentuk penindasan dan penaklukan. Paguyuban Petani Al-Barakah yang terletak di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Jawa Tengah sebagai gerakan petani memiliki beragam bentuk kegiatan pembangkitan kesadaran di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kontestasi wacana yang mempengaruhi latar belakang isu ketidakadilan dalam proses pemberdayaan petani organik, melihat saluran komunikasi dan bentuk komunikasi penyadaran kritis yang digunakan mempengaruhi konstruksi akan ketidakadilan, identitas, kesadaran dan motivasi partisipan dalam proses pemberdayaan serta melihat teknik dan tahapan penyadaran kritis yang dilakukan turut mempengaruhi partisipasi anggota paguyuban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma *konstruktivisme*. Penelitian ini menggunakan studi kasus intrumental untuk memahami fenomena komunikasi pembangkitan kesadaran (*consciousness raising*) pada kelompok tani yang berbasis gerakan sosial. Fenomena komunikasi ini berhubungan dengan pelibatan aktif anggota petani dalam suatu aksi sosial yang bersifat kolektif. Temuan penelitian adalah isu yang berkembang merupakan hasil kontestasi wacana dominan (*cultural thema*) berupa dominasi pembangunan oleh Negara dan wacana tandingan (*counter thema*) berupa pemberdayaan petani organik. Program pertanian organik lahir untuk mengusung pertanian ramah lingkungan. Komunikasi penyadaran kritis gerakan petani menggunakan saluran atau media komunikasi yang *mixture*. Media komunikasi penyadaran kritis yang digunakan meliputi pertemuan kelompok yang dikombinasikan dengan saluran *face to face* antar partisipan dan media tradisional/rakyat (pengajian atau arisan), seminar dan festival. Bentuk komunikasi pada saluran penyadaran yang digunakan bersifat *multy track communication* melalui kombinasi dialog dan monolog. Isyu pertanian organik membentuk kesadaran kritis dengan motivasi intrumental-ideologi.

Kata Kunci : Pembangkitan kesadaran, pemberdayaan petani, saluran komunikasi, aksi kolektif

PENDAHULUAN

Latar Balakang

Pemberdayaan petani merupakan sebuah pendekatan yang berorientasi pada *people centered development*, yaitu pembangunan berpusat pada masyarakat (Korten 1984). Lawan dari pendekatan pemberdayaan adalah pendekatan pembangunan top-down atau *production centered development* (pembangunan berfokus pada produksi). Dalam model pemberdayaan inisiasi dan kemandirian warga menjadi modal utama sebaliknya pada model pembangunan produksi dominasi negara sangat besar. Hal ini berimplikasi pada model komunikasi yang digunakan. Jika model pembangunan produksi melahirkan komunikasi linier dan mekanistik, maka model pembangunan pemberdayaan melahirkan komunikasi partisipatif dan organik (Mefalopulos, 2008; Servaes, 2008).

Sebagai sebuah Gerakan masyarakat sipil, maka gerakan petani selalu melahirkan gerakan pemberdayaan akar rumput. Gerakan pemberdayaan di level basis menggunakan komunikasi penyadaran kritis melalui dialog dengan tujuan petani dapat memahami realitas penindasan dan kemiskinan yang mereka alami untuk kemudian diwujudkan dalam sebuah aksi yang bersifat kolektif dan berkelanjutan (Bancin, 2012). Penelitian Sarwoprasodjo (2007) membuktikan bahwa komunikasi penyadaran kritis atau komunikasi pembangkitan kesadaran (*consciousness raising*) digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pembangunan oleh Negara. Saluran komunikasi penyadaran kritis yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, pertemuan, sharing, diskusi publik hingga bentuk-bentuk aksi sosial penolakan program pembangunan. Aksi kolektif dalam gerakan petani dapat dilihat dengan mengetahui isu ketidakadilan, identitas kolektif dan kesadaran (Klandermans, Goslinga 1996) serta elemen tambahan yaitu motivasi (Stekelemburg, Klandermans 2007).

Komunikasi *Consciousness raising* (CR) dilakukan untuk membuka bentuk ketidakadilan dan mengkonstruksi identitas kolektif para aktor. Media komunikasi penyadaran kritis berupa pertemuan kelompok (Soward, Renegar 2004) dan tatap muka (Ostrom 1998); media audio, video, *mobile*, dan *social software* (Chock 2006) dan media alternatif seperti drama (Torre 1990). Teknik komunikasi penyadaran meliputi diskusi kelompok, berbagi cerita pribadi di depan umum, membaca buku dan majalah, berbagi pengalaman, konsumsi budaya populer, mengeksplorasi isu-isu keragaman dan audiens baru, dan membuat pilihan untuk ekspresi diri (Soward, Renegar 2004). Pesan komunikasi penyadaran kritis berupa

informasi, persuasi, promosi dan advokasi dengan daya tarik pesan rasional atau emosional (Mefalopulos, Kamlongera 2004). Bentuk komunikasi penyadaran kritis berupa *multy track communication* antara monolog atau dialog (Mefalopulos 2008). Proses penyadaran kritis tergantung dari disposisi personal aktor (usia, pengalaman dan pendidikan) dan kontestasi wacana isu yang berkembang (Klandermans, Goslinga 1996). Proses framing aktor digunakan untuk melihat empat elemen ini menggunakan diagnostik framing (situasi permasalahan), prognostik framing (solusi permasalahan) dan motivasional framing (Benford, Snow 2000).

Sebagai sebuah penyadaran kritis, gerakan pertanian organik sendiri merupakan bentuk perlawanan petani terhadap pola pertanian yang revolusi hijau yang menekankan pada asupan bahan kimia pabrikan (Suhardjono, 2006). Menurut International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) bahwa gerakan pertanian organik menggunakan prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan (IFOAM, 2013). Melalui prinsip ini, gerakan pertanian organik secara langsung bersentuhan dengan komunikasi penyadaran kritis dengan tujuan menyadarkan kepada petani tentang dampak penggunaan bahan kimia, keseimbangan ekosistem, kearifan lokal dan peningkatan ekonomi petani. Penelitian Widiarta dkk (2011) terhadap petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Organik Al-Barakah terbukti bahwa praktik budidaya padi dengan sistem organik mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Aksi kolektif dalam gerakan pertanian organik sebagai hasil dari proses komunikasi penyadaran dilihat melalui tujuh tahapan penyadaran meliputi; kesadaran, respek, konteks, integrasi, pemberdayaan, praksis dan transformasi (Goodman, Olatunji 2009). Oleh karenanya, dalam makalah ini akan dikupas lebih lanjut bagaimana proses komunikasi penyadaran kritis (*consciousness raising*) yang terjadi dalam pemberdayaan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Al-Barakah meliputi latar belakang pertanian organik, saluran komunikasi penyadaran kritis dan teknik serta tahapan penyadarannya.

Perumusan Masalah

Masalah utama yang hendak dikaji dalam makalah ini adalah melihat bagaimana komunikasi pembangkitan kesadaran (*consciousness raising*) yang terjadi dalam gerakan petani Paguyuban Petani Al-Barakah dapat berujung pada aksi kolektif para anggotanya. Berdasarkan hal ini maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana kontestasi wacana yang mempengaruhi latar belakang isu pertanian organik.

2. Sejauhmana saluran komunikasi, bentuk komunikasi dan pesan penyadaran kritis yang digunakan mempengaruhi konstruksi akan ketidakadilan, identitas, kesadaran dan motivasi partisipan dalam pemberdayaan petani organik.
3. Sejauhmana teknik dan tahapan penyadaran kritis yang dilakukan dalam pemberdayaan petani organik.

Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan makalah ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi pembangkitan kesadaran berdampak pada aksi kolektif yang terjadi di dalam kelompok tani Paguyuban Petani Al-Barakah. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kontestasi wacana yang mempengaruhi latar belakang isu pertanian organik.
2. Mengetahui saluran komunikasi, bentuk komunikasi dan pesan penyadaran kritis yang digunakan mempengaruhi konstruksi akan ketidakadilan, identitas, kesadaran dan motivasi partisipan dalam pemberdayaan petani organik.
3. Mengetahui teknik dan tahapan penyadaran kritis yang dilakukan dalam pemberdayaan petani organik.

Manfaat Penulisan

Penulisan makalah ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain dapat memberikan informasi tentang proses komunikasi pembangkitan kesadaran khususnya kelompok tani dan partisipasinya dalam aksi kolektif. Informasi ini dapat digunakan oleh para *stakeholder*, termasuk para aktivis gerakan sosial sebagai agen perubahan, yang senantiasa berupaya untuk mencari teknik yang tepat dalam peningkatan kesadaran yang berguna bagi partisipan di wilayah binaannya. Secara akademis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi pembangunan pertanian dan pedesaan.

METODOLOGI

Penulisan makalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dengan melihat keterkaitan isu dengan proses komunikasi penyadaran kritis di tingkat basis kelompok petani dan fenomena aksi kolektif yang dilakukan (MacQuarrie 2013). Studi kasus dalam penelitian dilaksanakan di Paguyuban Petani Al-Barakah di desa Ketapang,

Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Alasan pemilihan lokasi didasarkan isu di tingkat basis dan kaitannya dengan peristiwa dan kegiatan Hari Tani Nasional dan Hari Pangan Sedunia. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh dan anggota kelompok tani Paguyuban Al-Barakah. Subyek kasus didapat melalui proses *snow ball* (bola salju). Kriteria penentuan subyek kasus adalah anggota aktif dalam kelompok tani, pemahaman akan isu, keterlibatan dalam proses komunikasi penyadaran dan aksi kolektif.

Pengumpulan data dalam proses penyadaran kritis menggunakan metode triangulasi data yaitu wawancara mendalam, kajian literatur FGD (Fokus Grup Diskusi) (MacQuarrie 2013) dan pengamatan berpartisipasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap subyek kasus dan informan perorangan dengan menggunakan suatu pedoman pertanyaan sebagai proses framing. Sementara diskusi kelompok dilakukan dengan mengundang anggota kelompok, dan pengurus kelompok untuk mendapatkan informasi yang bersifat konsensus dan diametral. Kajian literatur menghasilkan data berupa laporan-laporan, makalah-makalah dan surat-surat resmi yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bagi data hasil wawancara perorangan dan diskusi kelompok. Pengamatan berpartisipasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelibatan subyek kasus dalam setiap proses penyadaran kritis dan aksi kolektif. Hasil pengumpulan data direkam oleh peneliti dalam bentuk catatan harian.

Analisa data kualitatif berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dimulai sejak proses pengumpulan data dimulai hingga semua data selesai terkumpul semua. Menurut Miles dan Huberman (2007) terdapat tiga proses teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Singkat Paguyuban Petani Al-Barakah

Pendirian Paguyuban Petani Al-Barakah tidak dapat dilepaskan dari gerakan petani yang dimotori oleh SPPQT (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah). SPPQT sendiri merupakan organisasi massa yang fokus pada kaum tani di pedesaan. SPPQT didirikan pada tanggal 14 Agustus 1999 bertempat di Salatiga Jawa Tengah, dengan jumlah anggota 16.348 petani yang berada di 660 kelompok tani, 120 paguyuban di 11 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Paguyuban Petani Al-Barakah termasuk dari kelompok paguyuban pertama yang melahirkan SPPQT. Oleh karenanya, SPPQT lahir dari, oleh dan untuk petani

dengan tujuan membebaskan kaum tani dari bentuk penindasan yang berasal dari ideologi kapitalisme dan feodalisme.

Struktur SPPQT mencerminkan area perjuangan gerakan petani di tingkat regional hingga lokal. Perjuangan SPPQT pada area Propinsi Jawa Tengah, Jaringan Kerja Petani di area Kabupaten/Kota, Organisasi Tani Kawasan di area Kecamatan, Paguyuban di area desa dan kelompok tani di area dusun atau di bawahnya. Berdasarkan struktur ini, maka arena kontestasi perjuangan Paguyuban Petani Al-Barakah berada di Desa Susukan Kecamatan Ketapang Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

Kecamatan Susukan sendiri merupakan salah satu kecamatan yang merupakan sentra padi di Kabupaten Semarang. Di Kecamatan Susukan terdapat banyak Kelompok Tani dan Gapoktan. Salah satu dari sekian banyak Paguyuban Petani yang ada di Kecamatan Susukan adalah Paguyuban Petani Al Barokah. Paguyuban Petani Al Barokah terbentuk pada tahun 1998, dinamai Al Barokah karena dibentuk di Mushola Al Barokah dengan jumlah anggota Paguyuban Petani sebanyak 20 orang. Pada mulanya petani / anggota Paguyuban Petani Al Barokah tidak membudidayakan padi organik, namun seiring berjalannya waktu dengan keinginan para anggota untuk melestarikan lingkungan/alam sehingga mendorong para petani berusaha untuk mengembangkan budidaya padi organik.

Keinginan untuk membudidayakan padi secara organik mulai bangkit sejak tahun 2002, keinginan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan study training untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan guna menunjang sumber daya petani yang kurang sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Paguyuban Petani Al Barokah. Pada awalnya dilakukan upaya budidaya organik sekitar 3-4 ha dari luas hamparan 15 Ha, yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Dari beberapa petani yang telah melakukan budidaya secara organik merasa memperoleh banyak keuntungan oleh karena itu dirasa perlu Paguyuban Petani Al Barokah mengajak anggota yang lain untuk bertani organik. Sehingga luasan yang dibudidayakan secara organik tiap tahun makin bertambah, hingga saat ini mencapai sekitar 20 ha.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian khususnya tanaman pangan organik padi maka Paguyuban Petani Al Barokah telah mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Kecamatan Susukan melalui PPL. Untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas, dimana produk organik harus memiliki legalitas. Oleh karena itu

Paguyuban Petani Al Barokah berinisiatif untuk memproses sertifikasi pangan organik melalui dinas terkait.

2. Wacana dan Konstruksi Isu di Tingkat Basis

Isu yang berkembang di tingkat paguyuban tergantung dari permasalahan yang digali oleh serikat bersama-sama kelompok di tingkat basis. Perbedaan isu juga disebabkan oleh tipologi daerah di mana paguyuban itu berada. Dalam penelitian ini tiap isu dikaji untuk satu paguyuban. Isu pertanian organik yang terdapat di Paguyuban Al-Barakah mewakili masalah pertanian dan ekonomi. Pertanian organik menjadi *entry point* Paguyuban Al-Barakah untuk memberdayakan petani di Desa Ketapang. Isu pertanian organik adalah isu politik lingkungan, di mana serikat melihat bahwa kerusakan ekosistem pertanian disebabkan oleh maraknya pola pertanian yang tidak ramah lingkungan dengan senantiasa memasukkan bahan kimia pabrikan dalam setiap budidaya dan penyingkiran bibit lokal yang telah menjadi kearifan lokal. Serikat berpandangan bahwa modernisasi dan kapitalisme sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Cara melawan bentuk penindasan lingkungan ini melalui pola pertanian organik yang mengembalikan keselarasan antara manusia dengan alam melalui pola pertanian tanpa kimia dan penggunaan bibit lokal. Isu pertanian organik mudah diterima oleh petani karena pola pertanian organik memiliki nilai tambah ekonomi. Beras organik lebih mahal ketimbang beras non-organik.

3. Proses Komunikasi Penyadaran Kritis

Pada kasus pertanian organik, media *consciousness raising* (CR) menggunakan media rakyat yang sudah ada dalam masyarakat petani yaitu pengajian yang dikolaborasikan dengan acara pertemuan kelompok. Pesan untuk menjaga lingkungan dan menjaga keharmonisan kehidupan antara manusia dengan alam menjadi pesan kesadaran dimana masyarakat petanipun meyakini kebenarannya. Bentuk komunikasi dalam media pengajian-pertemuan kelompok ini menggunakan campuran antara monolog-dialog.

Penggunaan media internet juga dilakukan dalam proses CR namun rendah aksesibilitasnya. Media seminar untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS). Meski isu yang dibawa dalam seminar HPS adalah menyikapi isu pangan import, namun di dalamnya terdapat isu kemandirian pangan salah satunya melalui pertanian organik. Bentuk komunikasi dalam seminar HPS adalah dialog, di mana terjadi adu argumen antara petani dan serikat

dalam satu kubu dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Wakil Gubernur Jateng perihal isu ketahanan pangan dan stop pangan import. Dalam seminar ini pula, terdapat media penyadaran lainnya yaitu teater rakyat dalam bentuk pagelaran topeng ireng dan atraksi teatrikal yang isinya sebagai bentuk perlawanan petani terhadap pangan import yang disimbolkan dengan paku dan batu. Media populer ini digunakan untuk memperkuat CR yang sudah dilakukan oleh media lainnya namun dalam bentuk realitas yang berbeda. Aksi kolektif sudah pada tahapan transformasi ditandai oleh keadaan dimana petani sudah menyatukan pengalaman berorganik dalam kehidupan keseharian mereka dari mulai persepsi, sikap dan perilaku berorganik yang tidak hanya berorientasi kepada kesehatan, namun sudah berorientasi pasar (*market oriented*). Petani enggan untuk kembali kepada pertanian konvensional yang sarat akan bahan dan asupan kimiawi.

4. Kontruksi Identitas, Motivasi dan Kesadaran

Framing identitas kolektif menunjukkan bahwa transformasi identitas kolektif berupa perasaan bangga menjadi anggota kelompok tani. Motivasi instrumental-ideologi terdapat pada anggota kelompok tani Paguyuban Al-Barakah dalam isu pertanian organik. Motivasi ideologis dilandasi oleh pelanggaran nilai-nilai lingkungan untuk isu organik. Motif instrumental pada isu pertanian organik dengan iming-iming harga pasar yang baik untuk kualitas organik, Merujuk pada bentuk kesadaran (Freire 2000), maka bentuk kesadaran kritis terjadi pada isu pertanian organik.

5. Bentuk Komunikasi dan Tahapan Penyadaran Kritis

Keberhasilan gerakan sosial dipengaruhi sejauhmana strategi komunikasi penyadaran kritis dilakukan. Apabila dikaitkan dengan kubus kekuasaan Gaventa (2006), strategi komunikasi penyadaran kritis dipengaruhi oleh tingkatan kekuasaan (lokal, nasional, global), bentuk kekuasaan (tidak tampak, tersembunyi dan terlihat) dan ruang kekuasaan (tertutup, diundang, dan diciptakan). Kubus kekuasaan ini berkaitan dengan isu, media dan pesan penyadaran yang dilakukan di gerakan petani Paguyuban Petani Al-Barakah. Pesan penyadaran menggunakan bentuk pesan dan daya tarik pesan. Bentuk pesan meliputi persuasi, informasi, promosi dan advokasi (Mefapolus, Kamonegara 2004). Sedangkan daya tarik pesan menggunakan daya tarik rasional, emosional (Mefapolus, Kamonegara 2004) dan moral (Kotler, Amstrong 2012).

Kontestasi isu pertanian organik terjadi di level lokal dan regional serta belum sampai level nasional. Hal ini disebabkan karena pengorganisasian gerakan petani SPPQT baru sampai level provinsi. Di level lokal arena kontestasi isu organik terjadi di dusun menggunakan media pengajian dan pertemuan kelompok. Sedangkan di level regional media yang digunakan adalah seminar, teater dan internet. Ruang kontestasi secara umum menggunakan *claim space* yaitu ruang partisipasi yang diciptakan sendiri oleh gerakan petani dan *claim- invited space* yaitu ruang yang diciptakan oleh serikat namun mengundang pihak di luar serikat. Konstruksi lawan dalam framing aktor gerakan berbentuk *invisible, visible dan hidden*. Secara umum konstruksi lawan dalam gerakan petani SPPQT adalah yang tidak terlihat (*invisible*) namun memiliki efek dahsyat bagi isu gerakan yaitu ideologi kapitalisme dan modernisasi pertanian.

Bentuk pesan penyadaran dalam isu organik beragam yaitu persuasi berupa ajakan untuk berorganik, informatif berupa keuntungan dan kelebihan organik, dan advokasi berupa kesadaran akan kebijakan pro organik dan kedaulatan pangan. Daya tarik pesan isu organik lebih banyak ke arah moral yaitu ajakan untuk memelihara lingkungan.

Pada saluran pengajian, wujud lawan dikonstruksi dalam bentuk *invisible* yaitu lawan gerakan organik adalah ideologi yang merusak lingkungan. Ruang kontestasi pengajian adalah *claim space* yang memang diciptakan sendiri oleh komunitas dan berada di level dusun. Bentuk pesan media pengajian adalah persuasi yaitu ajakan kepada petani sebagai ummat Islam untuk tidak merusak lingkungan sesuai dengan Al-Quran Surat Ar Rum : 41-42 dan Al-Baqarah: 30 dan hal ini dimaknai sebagai bentuk jihad lingkungan. Daya tarik pesan pengajian adalah moral yaitu mengedepankan ajakan untuk melakukan kegiatan yang benar dan tepat yaitu menjaga lingkungan.

Arena konstestasi saluran pertemuan kelompok menggunakan *ruang claim space* yang dirancang sendiri oleh anggota kelompok tani dan paguyuban Al-Barakah. Karena dibentuk oleh kelompok, maka level konstestasi berada di level kelompok dan paguyuban. Konstruksi lawan dalam isu pertanian organik berupa *visible* yaitu Pemerintah, Dinas Pertanian, Pengusaha pupuk dan bibit. Identifikasi wujud lawan yang tampak ini didasarkan pada sumber atau pelaku modernisasi pertanian dan kapitalisme berasal dari mereka melalui program dan kebijakan pertanian modern. Wujud lawan yang tidak tampak namun tersembunyi (*hidden*) dibalik modernisasi pertanian adalah pihak desa, para tengkulak dan preman desa. Ketiga pihak ini tidak bersebrangan secara langsung namun cukup dirasakan

keberadaannya oleh gerakan petani dalam mendukung modernisasi pertanian dan menindas kaum tani. Wujud lawan yang paling mendasar adalah keberadaan ideologi kapitalisme dan modernisasi pertanian. Bentuk pesan penyadaran kritis dalam pertemuan kelompok adalah persuasi ajakan untuk bertani organik, informasi yaitu pertanian organik menguntungkan secara ekonomi dan menyehatkan dan advokasi yaitu pertanian organik sebagai perjuangan melawan kapitalisme dan modernisasi pertanian. Sedangkan daya tarik pesan dalam pertemuan kelompok menggunakan rasionalitas bahwa bertani organik menguntungkan secara ekonomi dan tidak merusak lingkungan. Dari sisi rasa beras organik lebih harum, lembut dan nikmat (partisipan mencicipi beras organik).

Arena kontestasi saluran internet menggunakan ruang yang bersifat *claim space* yang diciptakan dalam bentuk situs website serikat dan paguyuban. Internet ini sendiri berada di level regional atau wilayah kerja anggota basis. Konstruksi wujud lawan yang ada dalam situs serikat dan paguyuban berbentuk *visible* yaitu negara yang turut memelihara kerusakan lingkungan dalam bentuk modernisasi pertanian dan *invisible* itu sendiri yaitu ideologi kapitalisme dan modernisasi pertanian. Bentuk pesan penyadaran kritis dalam media internet adalah advokasi yaitu beras organik sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep ketahanan pangan dan import pangan. Pesan informasi dan sekaligus promosi bahwa beras organik memiliki keunggulan dibandingkan dengan beras non-organik dari segi rasa, fisik dan kesehatan. Penggunaan saluran internet juga digunakan sebagai iklan penjualan beras organik Al-Barakah (promosi). Daya tarik pesan berupa rasionalitas yaitu keunggulan beras organik sebagai pangan sehat dan sebagai bentuk kedaulatan petani atas nilai-nilai kearifan lokal dan moral yaitu ajakan untuk menanam dan mengkonsumsi beras organik untuk menjaga lingkungan.

Arena konstestasi dalam bentuk seminar memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) berada pada ruang *claim-invited space* yaitu ruang yang diciptakan oleh serikat namun mengundang pihak eksternal sebagai pembicara yaitu Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten Boyolali dan Magelang. Meski ruang komunikasi diciptakan oleh serikat namun keberadaan pembicara dari luar cukup mendominasi acara seminar. Konstruksi lawan oleh serikat dalam seminar ini secara terbuka mengarah pada keberadaan pihak *visible* yaitu Negara baik Pemerintahan Pusat dan Daerah. Negara turut serta dalam membuat kebijakan import pangan khususnya produk pertanian. Selain itu, wujud lawan yang sengaja diserang dalam acara seminar HPS adalah ideologi

pengusung kebijakan pangan import yaitu kapitalisme dan liberalisme sebagai lawan yang *invisible*. Level kontestasi berada pada regional kawasan Merbabu Merapi yang meliputi Kab. Semarang, Kab. Boyolali dan Kab. Magelang. Bentuk pesan dalam acara seminar HPS adalah Informatif yang didominasi oleh pembicara luar serikat perihal pemasaran hasil pertanian, pendampingan kelompok dan pengakuan kelompok secara legal formal oleh Negara. Sedangkan pesan yang disampaikan serikat lebih bersifat advokasi yaitu perlunya kebijakan kedaulatan pangan dan stop pangan import. Karena terjadi pertentangan konseptual antara kedua belah pihak maka daya tarik pesan berupa rasional yaitu fakta dikotomi antara konsep kemandirian pangan versi pemerintah versus kedaulatan pangan versi serikat. Daya tarik emosional muncul ketika pembicara serikat memperlihatkan ekspresi penolakan dan sikap menantang terhadap konsep yang diajukan oleh pihak pembicara luar, sedangkan pihak pembicara luar lebih bersifat kooperatif serta tidak menyalahkan. Daya tarik moral muncul ketika serikat mengajak kaum tani untuk menolak pangan import dan mendayagunakan kemampuan pangan lokal sebagai bentuk kedaulatan pangan.

Sebagai bagian dari acara seminar HPS, media teater rakyat digunakan sebagai sarana memperkuat proses penyadaran kritis. Teater rakyat sendiri berada di ruang yang dibentuk oleh serikat untuk mendukung pembukaan acara seminar. Awalnya teater rakyat akan dipertontonkan di depan Wakil Gubernur Jawa Tengah, namun karena yang bersangkutan tidak kunjung tiba maka Wakil Gubernur tidak sempat melihat pertunjukannya. Konstruksi lawan dalam teater rakyat adalah berupa simbol ideologi kapitalisme yang merusak pangan lokal (*invisible*). Bentuk pesan teater rakyat menggunakan simbol paku dan batu sebagai pangan. Karena sifatnya drama, maka pesan simbolik ini mengarah pada bentuk pesan advokasi yaitu ajakan menolak pangan import dan mempertahankan pangan lokal. Daya tarik pesan yang muncul adalah emosional berupa kegelisahan, kegalauan dan penderitaan, kesakitan akibat makan batu dan paku dan Moral dalam bentuk penyelamatan lingkungan dan kembali ke pangan lokal.

Proses pembangkitan kesadaran pertanian organik pada kelompok tani paguyuban Al-Barakah dilakukan setelah berdirinya Paguyuban. Apabila melihat fakta pengelolaan pertanian organik yang dilakukan oleh anggota kelompok tani Al-Barakah saat ini, maka tahapan kesadaran kaum tani sudah mencapai tahap transformasi. Tahap transformasi dalam kesadaran kritis pertanian organik ditandai dengan keberadaan partisipan (petani) yang telah menyatukan pengalaman keseharian mereka dalam bertani organik dan secara identitas

mengalami transformasi dari identitas kelompok menjadi identitas sosial. Pengelolaan pertanian organik saat ini tidak hanya untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani, melainkan sudah mencapai taraf pemasaran (orientasi pasar). Petani sudah merasakan harga beras organik yang tinggi ketimbang beras anorganik. Transformasi identitas pun telah terjadi dari seorang petani (individual) menjadi anggota kelompok tani (kelompok) dan saat ini dikenal sebagai petani organik oleh masyarakatnya (sosial). Satu bukti bahwa kelompok tani Paguyuban Al-Barakah telah mencapai taraf kesadaran kritis transformatif adalah penentangan terhadap kelompok lawan mereka yang anti terhadap pertanian organik.

Bentuk perlawanan kaum tani terhadap pihak penentang pertanian organik adalah dengan menolak setiap barang yang diberikan meski dilakukan di ruang publik seperti saat acara sosialisasi pertanian oleh Dirjen Pertanian dan Perusahaan Petrokimia. Sikap menentang ini membuktikan bahwa kaum tani sudah mengalami kesadaran kritis pada taraf transformatif. Kaum tani sadar bahwa kerusakan ekosistem salah satunya disebabkan oleh racun kimia yang diproduksi oleh perusahaan pupuk dan pestisida.

Tahapan kesadaran kritis transformatif juga dapat dilihat dengan keberadaan penilaian dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pertanian organik yang mereka lakukan. Aksi dan refleksi selalu bertautan satu sama lainnya, proses pembelajaran dalam kelompok selalu didiskusikan dalam pertemuan rutin kelompok. Semua permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pertanian organik *dirembugkan* dalam pertemuan rutin bulanan.

PENUTUP

Isyu yang berkembang merupakan hasil kontestasi wacana dominan pembangunan oleh Negara dan wacana tandingan berupa pemberdayaan kaum petani. Komunikasi penyadaran kritis gerakan petani menggunakan saluran atau media komunikasi yang *mixture*. Bentuk komunikasi yang digunakan oleh Paguyuban Petani Al-Barakah secara umum bersifat *multy track communication* melalui kombinasi dialog dan monolog. Teknik penyadaran dalam *consciousness raising* yang digunakan oleh Paguyuban Petani Al-Barakah memiliki keberagaman dan berhubungan dengan saluran dan media komunikasi yang digunakan. Aksi kolektif sebagai hasil komunikasi *consciousness raising* berhubungan dengan hasil framing partisipan terhadap isu, identitas, motivasi dan kesadaran. Untuk itu, saran yang perlu disampaikan adalah penggunaan saluran komunikasi tidak hanya melalui *single media* saja dan perlu mengkolaborasikan dengan media alternatif. Proses komunikasi penyadaran kritis

juga perlu menggunakan teknik campuran antara diskusi dan berbagi cerita serta pengalaman penindasan yang dialami partisipan dalam bentuk dialog. Komunikasi monolog diperlukan dalam ruang yang *invited place*.

DAFTAR PUSTAKA

Bancin FA. 2012. Kesadaran Kritis Dalam Proses Pemberdayaan [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Benford RD, Snow DA. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology* [Internet]. [diunduh 2013 Sep 11]; 26: 611-639. Tersedia pada <http://www.jstor.org/>

Chock, SC. 2006. *Analytical Note for Manuel Castells' Research on Communication, Power and Counterpower in The Network Society: Horizontal Communication and Social Movements* [Internet]. [Waktu dan lokasi tidak diketahui]. Los Angeles (US) : 1-16; [diunduh 2013 Sep 14]. Tersedia pada <http://web.mit.edu/chock/horizontal%20communication%20and%20social%20movements.pdf>

Cox L, Fomiya CF. 2009. Movement Knowledge: What Do We Know, How Do We Create Knowledge and What Do We Do With It?. *Interface : a journal for and about social movements* [Internet]. [diunduh 2013 Sep 14]; 1 (1): 1 – 20. Tersedia pada <http://interfacejournal.nuim.ie/wordpresswp>

Freire P. 2000. *Pedagogy of the Oppressed*. New York (US): The Continuum IPG Inc
Goodman, Olatunji. 2009. Applying Critical Consciousness: Culturally Competent Disaster Response Outcomes. *Journal of Counseling and Development* [internet]. [diunduh 2012 Mei 24]; 87(4):458-465. Tersedia pada <http://ed660a.weebly.com/>

IFOAM. 2012. *Prinsip-Prinsip Pertanian Organik* [internet].[diunduh 2013 Apr 3]. Tersedia pada <http://ifoam.org>.

Klandermans B, Goslinga S. 1996. Comparative Perspectives on Social Movement : Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing in : McAdam Editor. *Comparative Perspective on Social Movement*. USA (US): Cambridge University

Korten DC. 1984. *People-Centered Development: Toward a Framework* in Korten DC,

Klauss R editors. *People Centered Development : Contribution Toward Theory and Planning Frameworks*. Washington DC (US): Kumarian Press

MacQuarrie C. 2013. *Encyclopedia of Case Study Research Consciousness Raising* [Internet]. [Waktu dan lokasi tidak diketahui]. [diunduh 2013 Jan 13]. Tersedia pada <https://rmo.sagepub.com>

Mefalopulos P. 2008. *Development Communication Sourcebook: Broadening the Boundaries of Communication*. Washington (US):World Bank

- Mefalopulos, Kamlongera. 2004. *Participatory Communication Strategy Design: A Handbook*. Second Edition. Rome (IT): FAO
- Miles, Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta (ID): Universitas Indonesia
- Ostrom E. 1998. A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action. *The American Political Science Review* [Internet]. [diunduh 2012 Okt 19]; 92 (1) : 1-22. Tersedia pada <http://links.jstor.org/>
- Sarwoprasodjo S. 2007. Penggunaan Ruang Publik Untuk Pemecahan Masalah Sosial Di Pedesaan [Disertasi]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia
- Servaes J. 2008. *Communication for Development and Social Change*. California (US): Sage Publication Inc
- Soward, Renegar. (2004). The Rhetorical Functions of Consciousness Raising In Third Wave Feminism. *Journal Communication Studies* [Internet]. [diunduh 2012 Mei 24]; 55(4): 535-552. Tersedia pada <http://digitalcommons.utep.edu/>
- Stekelemburg, Klandermans. 2007. Individual in Movement: A Social Psychology of Contention in Klandermans, Roggeband editors. *Handbook of Social Movement Across Discipline*. USA (US): Springer
- Suhardjono. 2006. Gerakan Pertanian Organik Sebagai Bentuk Gerakan Moral dalam : Seputra AW dkk (Editor). *Bunga Rampai XIV: Pangan Dan Pemberdayaan Petani*. Jakarta (ID): LDD-KAJ dan Komisi PSE/KWI
- Torre E. 1990. Drama as a Consciousness-Raising Strategy for the Self-Empowerment of Working Women. *Affilia* [Internet]. [diunduh 2010 Okt 30]; 5(1): 49-65. Tersedia pada <http://aff.sagepub.com/content/5/1/49>
- Widiarta dkk. 2011. Analisis Keberlanjutan Praktik Pertanian Organik di Kalangan Petani. *Jurnal Sodality*. Vol 05 (04) No. 01: 71-89

RPSEP-68

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PT. NUSA PERKASA JAYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PEJUKUTAN KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG

Heri Wahyudi (heriw@ut.ac.id)
UPBJJ-UT Denpasar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan kemudian mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai wakil populasi. populasi penelitian ini sebanyak 825 orang, maka dilakukan dengan teknik sampling menggunakan rumus Solvin dengan batas kesalahan 15%. Dengan menggunakan rumus Slovin: $n = N / (1 + Ne^2) = 825 / (1 + 825(0,15)^2) = 42,17$ dibulatkan menjadi 42. Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 42 orang. Berdasarkan hasil penelitian dengan koesioner diperoleh kesimpulan bahwa “Cooperate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung . Hal ini berarti Cooperate Social Responsibility (CSR) mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Implementasikan program CSR dalam upaya pengembangan masyarakat PT Nusa Perkasa Jaya yang berfokus pada program pemberdayaan bidang pendidikan dan ekonomi dirasakan telah membantu masyarakat sekitar serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan saat ini telah berjalan efektif.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibilities (CSR), Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Bali adalah salah satu provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Menurut pemerintah provinsi Bali, keberhasilan dalam

pengentasan kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan lembaga *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ada di Bali. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Bali mengalami penurunan sebanyak 0,25% jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2009. Angka kemiskinan pada tahun 2009 sebanyak 181,7 ribu jiwa (5,13 persen) dan turun menjadi 174,93 ribu jiwa (4,88 persen) pada tahun 2010.

Menurunnya jumlah angka kemiskinan ini, menurut pemerintah propinsi Bali tidak lepas dari upaya pemerintah dan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang responsif terhadap masalah kemiskinan. Namun kondisi kemiskinan yang pada tahun 2010 –awal 2011 ini mengalami penurunan, malah justru diperumit dengan meningkatnya kembali angka kemiskinan pada periode Maret-September 2011. Hal ini berdasarkan dari data hasil Susenas pada September 2011 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Bali (Maret 2011 – September 2011) meningkat 16,9 ribu yakni berjumlah 183,1 ribu.(BPS Bali,2014)

Nusa Penida adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Klungkung yang wilayahnya terpisah dari wilayah Klungkung daratan. Nusa Penida adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung. Di dekat pulau ini terdapat juga pulau-pulau kecil lainnya yaitu Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Wilayah Nusa Penida tergolong wilayah tandus, daerah kering dengan tekstur tanah berkapur.

Dari hasil survei (studi kelayakan) dan permasalahan yang dihadapi kelompok masyarakat Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat Dusun Pelilit kiranya perlu dilaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* melalui PT Nusa Perkasa Jaya yang berfokus pada program pemberdayaan bidang pendidikan dan ekonomi.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development (WS-SD)* di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*, *good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan *shareholder* (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana laba (*profit centre*). Konsep ini menurut merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Di lain sisi masyarakat mempertanyakan apakah sektor swasta atau perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk redistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal. Memang sangat sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukan kegiatan nirlaba sebagai manifestasi tanggung jawab moralnya pada masyarakat lokal yang hidupnya di sekitar perusahaan (Zaleha, 2008). *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap lingkungannya, minimal di tempat mereka melakukan kegiatan usahanya dan hal ini sudah merupakan misi perusahaan, sehingga sebuah Perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usahanya secara berkesinambungan, harus mau dan mampu melakukan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan sebaik-baiknya.

PT. Nusa Perkasa Jaya merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Nusa Penida, bergerak di bidang Kontraktor dan Properti dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2000, Jenis Pekerjaan umumnya adalah pembangunan gedung dan rehabilitasi jalan serta perumahan. Keberadaan perusahaan tersebut telah mampu menyerap lapangan kerja domestik kurang lebih 50 tenaga kerja. Sedangkan manajemen PT. Nusa Perkasa Jaya sendiri memiliki tenaga kerja sekitar 20 orang. Sadar akan tugas dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang, PT. Nusa Perkasa Jaya secara kontinyu dan terprogram telah menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam implementasi manajemen usahanya. Secara garis besar, strategi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Nusa Perkasa Jaya mencakup beberapa wilayah yang ada di sekitar perusahaan. Namun demikian disadari bahwa dinamika perkembangan lingkungan perusahaan berjalan sedemikian cepat, sehingga membutuhkan berbagai inovasi dan kreasi kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang mampu dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam kesejahteraan hidup adalah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini peran manajemen sangat penting dalam upaya untuk memformulasikan berbagai program dan kegiatan dalam *Corporate Social*

Responsibility (CSR) PT. Nusa Perkasa Jaya, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat luas. Pada akhirnya berbagai program kegiatan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Nusa Perkasa Jaya diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

PT Nusa Perkasa Jaya bersama dengan LPM Desa Pejukutan memberikan modal usaha dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil di desa Pejukutan, memberikan program pendidikan berupa beasiswa bagi anak berprestasi dan pemberian perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis di desa Pejukutan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Nusa Perkasa Jaya telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

Apa itu *Corporate Social Responsibility* (CSR)? terdapat beberapa definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu yang cukup menarik adalah yang dibuat oleh lingkaran studi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Indonesia yakni “Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan”. Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang (Nurkimah,2012)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan berada. Kemunculan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak bisa dilepaskan dari konteks *good corporate governance*. Seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan, muncul beberapa pemikiran mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu point dari tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya pada penegakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi oleh perusahaan, tapi juga pertanggungjawaban perusahaan juga diwujudkan dalam kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial (Priyanto. 2008)

Tanggung jawab perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan (*community wellbieng*) melalui diskresi-diskresi praktek-praktek bisnis dan kontribusi-kontribusi sumber-sumber perusahaan bagi masyarakat. Konsep “diskresi” disini merujuk pada komitmen sukarela (*voluntary commitment*) bisnis yang dapat memberikan kontribusi-kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kepedulian organisasi bisnis dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Substansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan dalam rangka memperkuat keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan dengan melakukan kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan melalui program pengembangan masyarakat (*community development*). Oleh karena itu, laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan cermin dari tingkat keberlangsungan dan bagaimana cara perusahaan menjawab perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesungguhnya merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menunjukkan etika sosialnya dalam membangun kinerja jangka panjang (Kurniawan. 2013)

Pengembangan Masyarakat

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tuntutan tak terelakkan seiring munculnya komunitas disekitar perusahaan. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya tidak hanya didukung oleh faktor internal, melainkan juga karena adanya pengaruh dari komunitas sekitar perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menjalin hubungan yang baik dengan komunitas sekitarnya adalah dengan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berbasis pengembangan masyarakat atau *community development* (CD). *Community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Erni (2011) mengungkapkan ada 3 kategori ruang lingkup program CD, yaitu:

1. *Community Relation*; yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (*charity*) perusahaan. Dari hubungan ini, dapat dirancang pengembangan hubungan yang lebih mendalam dan terkait dengan bagaimana mengetahui kebutuhan-kebutuhan

dan masalah-masalah yang ada di komunitas lokal sehingga perusahaan dapat menerapkan program selanjutnya.

2. *Community Services*; merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan komunitas ataupun kepentingan umum. Dalam kategori ini, program-program dilakukan dengan adanya pembangunan secara fisik, seperti sektor kesehatan, keagamaan, pendidikan, transportasi dan sebagainya yang berupa puskesmas, sekolah, rumah ibadah, jalan raya, dan sumber air minum. Inti dari kategori ini adalah kebutuhan yang ada di komunitas dan pemecahan tentang masalah yang ada di komunitas, dilakukan oleh komunitas sendiri dan perusahaan hanya sebagai fasilitator dari pemecahan masalah yang ada di komunitas. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di komunitas dianalisis oleh para *community development officer*.
3. *Community Empowering*; merupakan program-program yang berkaitan dengan pemberian akses yang lebih luas kepada komunitas untuk menunjang kemandiriannya, misalnya pembentukan koperasi. Pada dasarnya, kategori ini melalui tahapan-tahapan lain seperti melakukan *community relation* pada awalnya, yang kemudian berkembang pada *community service* dengan segala metodologi panggilan data dan kemudian diperdalam melalui ketersediaan pranata sosial yang sudah lahir dan muncul di komunitas melalui program kategori ini.

Erni (2011) juga mengemukakan bahwa *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) sebagai salah satu dari tujuh isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sarana aktualisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang paling baik jika dibandingkan dengan implementasi yang hanya berupa *charity*, *philantrophy*, atau dimensi-dimensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lain, karena dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat terdapat prinsip-prinsip kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas, keberlanjutan, dan mampu meningkatkan perasaan solidaritas.

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemandirian, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian

dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja.

Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik, kebahagiaan dan kemakmuran, banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan pemerintah bagi keluarga miskin dan anak-anak mereka. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat (Midgaey,2005)

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa “lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit), dan lain-lain ” (Edi,2004)

Dalam pola dasar kesejahteraan sosial bahwa hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Pada dasarnya semua manusia, keluarga, komunitas dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai yang dimaksud dengan kebahagiaan sosial. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan, kesehatan yang layak dan juga interaksi sosial yang harmonis. Akhirnya kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada.

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard an norm-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual. Terkait dengan hal ini spicker yang dikutip isbandi menggambarkan kaitan dengan kebijakan sosial sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan Big Five Yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, bidang pekerjaan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

karakteristik Jawaban responden yang diukur dalam penelitian ini adalah umur. Berdasarkan umur, Responden terbanyak berusia 30-40 tahun (61,90%), sedangkan responden yang berusia diatas 50 tahun adalah (38,09%). Jumlah sampel penelitian sebanyak 42 orang di wilayah desa Pelilit Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tabel analisis deskriptif berisikan mengenai karakteristik dari responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Keterangan Umur	Total	Persentase
30 – 40	26	61,90%
> 50	16	38,09 %.
Total	42	100 %

(Sumber: responden masyarakat desa Pelilit)

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa mayoritas usia responden adalah 30-40 tahun sebesar 61,90 % dan >50 tahun sebesar 38,09%.

karakteristik Jawaban responden Tentang Cooperate Social Responsibility variable (X) dapat dijelaskan pada table 3.2

Tabel 3.2. Jawaban Responden Tentang Cooperate Social Responsibility (CSR) (X)

No	Pertanyaan	Frekuensi									
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%
1	Pertanyaan_1	12	28,57	24	57,14	5	11,9	1	2,38	0	0
2	Pertanyaan_2	8	19,04	19	45,23	11	26,19	4	9,52	0	0
3	Pertanyaan_3	1	2,38	24	57,14	16	38,09	1	2,38	0	0

4	Pertanyaan_4	7	16,67	25	59,52	6	14,28	1	2,38	0	0
5	Pertanyaan_5	3	7,14	22	52,38	16	38,09	1	2,38	0	0
6	Pertanyaan_6	5	11,9	17	40,47	19	45,23	1	2,38	0	0
7	Pertanyaan_7	1	2,38	25	59,52	14	33,33	2	4,76	0	0
8	Pertanyaan_8	9	21,42	22	52,38	11	26,19	0	0	0	0
9	Pertanyaan_9	5	11,9	25	59,52	11	26,19	1	2,38	0	0
10	Pertanyaan_10	10	23,8	21	50	10	23,8	1	2,38	0	0
11	Pertanyaan_11	0	0	15	35,71	16	38,09	11	26,19	0	0
12	Pertanyaan_12	0	0	29	69,04	11	26,19	2	4,76	0	0

(Sumber: Hasil Jawaban responden masyarakat desa Pelilit)

Hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari 42 orang responden untuk variabel Cooperate Social Responsibility (CSR) pada Tabel 3.2. yaitu:

1. Pada butir 1 (Program CSR yang diberikan oleh PT. Nusa Jaya Perkasa sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat) 28,57% responden menjawab sangat setuju, 57,14% responden menjawab setuju, 11,9% responden kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden menyatakan setuju, hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui pentingnya peranan CSR untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pada butir 2 (Program CSR yang diadakan oleh PT. Nusa Jaya Perkasa sesuai dengan harapan saya) 19,04% responden menjawab sangat setuju, 45,23% responden menjawab setuju, 26,19% responden menjawab kurang setuju, 9,52% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
3. Pada butir 3 (Program CSR yang dilaksanakan murni bertujuan baik) 2,38% responden menjawab sangat setuju, 57,14% responden menjawab setuju, 38,09% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
4. Pada butir 4 (Kegiatan yang dilaksanakan dalam CSR membantu saya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari) 16,67% responden menjawab sangat setuju, 59,52% responden menjawab setuju, 14,28% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
5. Pada butir 5 (Metode pelaksanaan yang dilakukan sangat mudah untuk dipahami) 7,14% responden menjawab sangat setuju, 52,38% responden menjawab setuju,

38,09% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

6. Pada butir 6 (Penyampaian informasi yang digunakan sesuai dengan harapan masyarakat) 11,9% responden menjawab sangat setuju, 40,47% kepala sekolah menjawab setuju, 45,23% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
7. Pada butir 7 (Program CSR yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat) 2,38% responden menjawab sangat setuju, 59,52% responden menjawab setuju, 33,33% responden menjawab kurang setuju, 4,76% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
8. Pada butir 8 (Program CSR yang diberikan tepat sasaran) 21,42% responden menjawab sangat setuju, 52,38% responden menjawab setuju, 26,19% responden menjawab kurang setuju, 0% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
9. Pada butir 9 (Peruntukan bantuan yang diberikan sangat jelas) 11,9% responden menjawab sangat setuju, 59,52% responden menjawab setuju, 26,19% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
10. Pada butir 10 (Program CSR yang dilakukan meningkatkan hubungan sosial dengan masyarakat) 23,8% responden menjawab sangat setuju, 50% responden menjawab setuju, 23,8% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
11. Pada butir 11 (Adanya tindak lanjut dalam dalam setiap pelaksanaan kegiatan) 0% responden menjawab sangat setuju, 35,71% responden menjawab setuju, 38,09% responden menjawab kurang setuju, 26,19% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada butir 12 (Hasil yang didapat dari kegiatan CSR tersebut sangat bagus) 0% responden menjawab sangat setuju, 69,04% responden menjawab setuju, 26,19% responden menjawab kurang setuju, 4,76% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

karakteristik Jawaban responden Tentang kesejahteraan masyarakat variable (Y) dapat dijelaskan pada table 3.3

Tabel 3.3. Jawaban Responden Tentang Kesejahteraan Masyarakat (Y)

No	Pertanyaan	Frekuensi									
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%
1	Pertanyaan_13	4	9,52	24	57,14	13	30,95	1	2,38	0	0
2	Pertanyaan_14	0	0	22	52,38	18	42,85	2	4,76	0	0
3	Pertanyaan_15	7	16,66	19	45,23	23	54,76	3	7,14	0	0
4	Pertanyaan_16	0	0	0	0	27	64,28	15	35,71	0	0
5	Pertanyaan_17	5	11,9	16	38,09	20	47,61	1	2,38	0	0

(Sumber: Hasil Jawaban responden masyarakat desa Pelilit)

Hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari 42 orang responden untuk variabel Kinerja Kepala Sekolah pada Tabel 4.3. yaitu:

1. Pada butir 13 (Dengan CSR ini, saya memiliki kesempatan untuk membangun desa sesuai keahlian saya) 9,52% responden menjawab sangat setuju, 57,14% responden menjawab setuju, 30,95% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
2. Pada butir 14 (Saya merasa PT. Nusa Jaya Perkasa dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab sosial) 0% responden menjawab sangat setuju, 52,38% responden menjawab setuju, 42,85% responden menjawab kurang setuju, 4,76% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
3. Pada butir 15 (Program CSR PT. Nusa Jaya Perkasa dapat menggali potensi-potensi yang ada di pedesaan) 16,66% responden menjawab sangat setuju, 45,23% responden menjawab setuju, 54,76% responden menjawab kurang setuju, 7,14% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
4. Pada butir 16 (Dengan program CSR PT. Nusa Jaya Perkasa saya tidak lagi bergantung kepada orang lain) 0% responden menjawab sangat setuju, 0% responden menjawab setuju, 64,28% responden menjawab kurang setuju, 35,71% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju.
5. Pada butir 17 (Saya terpacu untuk membangun desa saya) 11,59% responden menjawab sangat setuju, 38,09% responden menjawab setuju, 47,61% responden menjawab kurang setuju, 2,38% responden menjawab tidak setuju dan 0% responden menjawab sangat tidak setuju

PENUTUP

1. Kesimpulan

Data penelitian yang diperoleh dari responden diolah dan dianalisis, kemudian dilakukan pembahasan hasil analisis data tersebut. Berdasarkan pembahasan hasil analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan koefisien diperoleh kesimpulan bahwa “Cooperate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pejukutan dengan koefisien regresi sebesar 0.326. Hal ini berarti Cooperate Social Responsibility (CSR) mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa Pejukutan Identifikasi determinasi 0.552 atau sama dengan 55,2% berarti bahwa sebesar 55,2% kesejahteraan masyarakat di desa Pejukutan (Y) dapat dijelaskan oleh Cooperate Social Responsibility (CSR). Serta sisanya 44,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Implementasikan program CSR dalam upaya pengembangan masyarakat PT Nusa Jaya Perkasa yang berfokus pada program pemberdayaan bidang pendidikan dan ekonomi dirasakan telah membantu masyarakat sekitar serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan saat ini telah berjalan efektif.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini untuk pengambil kebijakan dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan bantuan dana modal, sebaiknya perusahaan melakukan pengawasan dan rutin melakukan peninjauan, agar dana yang diberikan oleh perusahaan, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,
2. Adanya forum di setiap desa dan konsultan dari pihak perusahaan, sangat berperan penting dalam keberhasilan program CSR, sebaiknya perusahaan turun tangan secara langsung dalam mengevaluasi kegiatan CSR serta menampung aspirasi masyarakat mengenai program CSR, sehingga terdapat *feedback* dari kegiatan CSR dan hasilnya lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Kotler, Philip, and Nancy Lee. 2005. *Corporate social responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. USA: Wiley.

Midgley, James (2005), *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Deperta Depag RI, Jakarta.

Pirac.2002. *Investing in Our Selves; Giving and Fund Raising In Indonesia*. Phillipine : Asian Development Bank.

Priyanto, Susiloadi, 2008, *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Spirit Publik Volume 4, Nomor 2.

Rahman, Reza. *Corporate Social Responsibility*. 2009. PT Buku Kita: Jakarta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi (2007a), *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama

Tjokrowinoto, M. 2005. *Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik*. Dalam Damanik, J., H.A. dan Raharjana, D.T (Ed). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press:53.

Wikipedia (2008), *Corporate Social Responsibility*, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility.

Zaleha, S. 2008. *Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Inalum Divisi PLTA. Siguragura terhadap Pengembangan Sosio Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir*. Tesis. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD). Medan: Universitas Sumatra Utara.

Sumber dari website

http://www.bali.bps.go.id/pressrelease/BRS_Kemiskinan_07_2010.pdf, diakses pada tgl 25/2/2011

http://bali.bps.go.id/index.php?reg=pdf_read&file=brs/miskin/brs_miskin_01_2012.pdf, diakses 17/4/2012

<http://www.dictionary.com>

RPSEP-69

HOW CAN SMALL MEDIUM ENTERPRISES/SME'S BECOME SUSTAINABLE AND RESPOND TO GLOBAL DEMAND CORPORATE CITIZEN? (*Approach To Business Responsibility Movement*)

GintaGinting

FakultasEkonomi- JurusanManajemenUniversitas Terbuka.

e-mail: ginta@ut.ac.id ; gintaginting3@gmail.com

Abstrak:

Tanggungjawab sosial yang diemban pelaku bisnis untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan stakeholder menjadi suatu kewajiban bersama secara global. Social responsibility tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar saja, peran SME's sangat potensial karena jumlahnya yang sangat besar dan sifatnya grass root langsung menyentuh kehidupan masyarakat menengah dan bawah. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan pro dan kontra mengenai fenomena CSR-SMEs terkait dengan kemanfaatannya karena lingkup usaha kecil-menengah, bergerak di pasar lokal dan baru sebagian beraktivitas di pasar internasional, jumlah tenaga kerja sedikit, dan modal kecil. Beberapa studi empiris masih mengindikasikan adanya gap penelitian mengenai perdebatan pro dan kontra penerapan social responsibility pada SMEs. Paper ini mencoba memberikan permodelan konseptual mengenai social responsibility pada IKM di Indonesia untuk dapat dijadikan acuan pengembangan studi empiris mendatang.

Kata kunci: CSR, SME, Social responsibility

Latar Belakang

Konsep mengenai pergerakan tanggungjawab bisnis (*business responsibility movements*) sudah dimulai sejak tahun 1970 dengan dikemukakannya *Corporate Social Responsibility/CSR* (Elkington,1998), yang kemudian diikuti oleh *Corporate Sustainability (CS)* (Katsoulakos et al 2007; Munkelien et al 2010) dan pada saat ini sudah masuk ke ranah yang lebih luas yaitu *Global Corporate Citizen (GCC)* (Hoivik dan Shankar 2011). Berkembangnya konsep *business responsibility movement* bertujuan untuk menciptakan situasi *win-win solution* antara perusahaan, *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Seiring dengan perkembangan globalisasi maka konsep *business responsibility* memasuki skope penerapan yang bersifat global, artinya semua pelaku usaha mempunyai

peluang yang sama untuk dapat mengembangkan usahanya sampai pada tingkat global menjadi *Global Corporate Citizen*.

Di era Globalisasi dan liberalisasi perdagangan, maka *mindset* pelaku usaha harus lebih diarahkan pada skope yang lebih luas yaitu bagaimana pengaruh perusahaan terhadap masyarakat dan *stakeholder* lain yang menjadi inti operasional perusahaan pada skope yang bersifat global. Inti dari GCC adalah untuk mendukung “*fair globalization*” dan partipasi aktif dalam pengembangan suatu daerah dimana perusahaan beroperasi. *Fair globalisation* memerlukan pasar produktif dan *equitable* serta cara bermain yang fair dimana semua negara mempunyai akses yang sama. Prinsip *share responsibility* muncul antara negara dan korporasi untuk membantu negara dan masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dan menikmati keuntungan dari globalisasi. Pada tingkat lokal perusahaan dapat berpartisipasi dengan merespon isu–isu sosial kritis seperti pengembangan regional, pendidikan, kesehatan, produk, pelayanan dan pengetahuan.

Ketiga konsep tersebut terutama CSR dan CS dalam konteks perusahaan besar sudah mulai diterapkan walaupun masih ada berbagai kendala yang dihadapi yaitu pada aspek benefit. Kunci keberhasilan dalam menerapkan *responsibility movement* adalah membangun dan mempertahankan *relationship* dengan *multi-stakeholder*. Rolof (2008) mengungkapkan *stakeholder management* sangat fundamental sebagai sebuah konsep yang pragmatis. Jika organisasi ingin efektif maka kunci utamanya adalah membangun *good relationship* dengan *stakeholder* dalam rangka mencapai tujuan organisasi. *Stakeholder management* merupakan pendekatan sistimatis untuk mengorganisasi hubungan antara pelaku bisnis dan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, perusahaan cenderung berinteraksi dengan pihak-pihak yang heterogen, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan seringkali muncul perbedaan harapan antara perusahaan dan *stakeholder*. Studi empiris dari Perrine, Russo dan Tencati terhadap 3.680 perusahaan di Italia dapat membuktikan “*that large firms are more likely to identify relevant stakeholder and meet their requirements through specific and formal strategies*” (Perrini et al, 2007:285).

Dalam konteks SME’s, maka konsep mengenai *business responsibility movement* belum dapat diterapkan secara optimal. Perdebatan pro and kontra mengenai tingkat kepentingannya masih berlangsung sampai saat ini, terutama berkenaan dengan kemanfaatannya bagi SME’s yang umumnya hanya punya lingkup usaha kecil, bergerak di pasar lokal, jumlah yang sedikit, dan modal kecil. Beberapa studi empiris (Kechiche dan

Soparnot, 2012; Morillo dan Lozano, 2006; Perrine et al, 2007) mengungkapkan bagaimana SME memberikan penilaian mengenai penerapan *social responsibility* (CSR) dari beberapa aspek yaitu: *benefit*, *commitment*, perbedaan *perception*, *behavior* dan *long way to go*. Walaupun masih perlu waktu penerapan *social responsibility* pada SME's namun perlu terus didorong. SME's merupakan sektor penting dalam meningkatkan ekonomi dunia dan berperan besar dalam perekonomian nasional suatu negara. Dalam "*Report on Support To SMEs in the Global Economy*" (Dalberg 2011:7), perusahaan kecil menengah merupakan tulang punggung perekonomian global, yaitu lebih dari 95% tergabung dalam OECD (*The Organization Economic and Cooperation*) dan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan konsep *business responsibility movement*, maka SME's dapat berperan lebih kuat dalam mensejahterakan masyarakat tingkat *across border nation* berskala global sehingga dapat menciptakan *sustainability community*.

Dari berbagai kajian literatur dapat diidentifikasi fenomena mengenai pentingnya SME's untuk dapat menjadi bagian dari *global corporate citizen* dengan menerapkan praktek bisnis yang bertanggungjawab secara sosial melalui program-program yang memperhitungkan *benefit* yang dapat dirasakan bersama dengan masyarakat dan *stakeholder*. Gap-gap penelitian yang diangkat dalam pembahasan dari paper ini adalah : 1) implementasi CSR pada SMEs apakah harus sama dengan *large business* (Kechiche dan Soparnot, 2012:97); 2) beberapa kajian empiris menunjukkan adanya respon positif dari pihak manager yang peduli terhadap *social responsibility* terkait "*environmental demand of society*" dan dampak adanya CSR proaktif terhadap *financial performance* dari SMEs (Vasquez dan Hernandez, 2012:133; Torugsa et al, 2012:493; Wiliamson et al, 2006:326) serta pentingnya kolaborasi pemerintah dan korporasi untuk mendorong CSR di negara-negara dengan tingkat kerusakan lingkungan yang besar dan populasi tinggi seperti India dan menjadi *poverty allevation tools* (Yadav, 2013:119; Gupta et al, 2012:267, Srinivasan, 2009:35; Demuijnck dan Ngnodjom, 2013:663), serta pentingnya mempertahankan penerapan CSR dari perspektif *stakeholder* (Sangeetha dan Pria, 2011: 2). Namun ada beberapa studi (Perrini, 2006:313; Murillo dan Lozano, 2006:227; Cochet dan Vo, 2012:54) menemukan adanya beberapa aspek yang menjadi permasalahan penerapan *responsibility movement* yaitu: isu CSR-SME's apakah dapat diterapkan pada tingkat mikro?, bagaimana CSR-SMEs yang diterapkan secara nasional

dapat diperluas sampai pada tingkat internasional/global?, SMEs kesulitan memahami CSR untuk dapat diterapkan SME's dengan keterbatasan *resource*.

Paper ini melakukan analisis bagaimana penerapan konsep *business responsibility movements* SME's dapat menjadi pendorong bagi terciptanya keberlangsungan perusahaan (*Corporate Sustainability*) untuk menuju *Global Corporate Citizen*. Pembahasan dalam paper ini dimulai dengan penjelasan mengenai mengenai konsep *business responsibility movement* dan bagaimana penerapannya pada SME's di beberapa negara. Paper ini mengemukakan *conceptual model* untuk dijadikan sebagai suatu pemikiran awal CSR pada UKM yang sekaligus dapat menjawab adanya fenomena dan gap-gap penelitian.

Kajian Literatur

Business Responsibility Movement

Konsep *business responsibility movement* merupakan konsep-konsep bisnis yang bertujuan untuk menciptakan situasi *win-win solution* antara perusahaan dan *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Dua konsep yang penting dan pada saat ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan besar adalah CSR dan CS. Seiring dengan perkembangan globalisasi maka konsep *business responsibility* memasuki skope penerapan yang bersifat global, artinya semua pelaku usaha mempunyai peluang yang sama untuk dapat mengembangkan usahanya sampai pada tingkat global. Konsep yang mengacu pada prinsip *Global state* dikenal dengan *Global Corporate Citizen*.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep CSR sudah dikembangkan dalam waktu yang lama. Berbagai definisi mengenai konsep CSR dikemukakan oleh para ahli, hanya saja masih ada perbedaan esensi dari CSR, sehingga menimbulkan perdebatan dalam memahami CSR. Dalam konteks global istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks :The Triple Buttom Line in 21st Century Business* (Elkington, 1998). Elkington (1998) mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang dikenal *triple bottom line* (*profit, planet dan people*). Dari segi *profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan terus beroperasi dan berkembang. Dari segi *people*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian bea siswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas

ekonomi lokal dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Selanjutnya dari segi *planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan terjaganya keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman dan pengembangan pariwisata. Menurut Suharto (2008) perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi belaka (*profit*) juga memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan (*planet*) dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Caroll (2006) menjelaskan konsep CSR meliputi tiga tanggungjawab yaitu ekonomi (*make profit*), tanggungjawab legal (*obey the law*) dan tanggungjawab etis (*be ethical*) serta tanggungjawab filantropis (*be a good citizen*). Menurut Suharto (2008) definisi atau batasan CSR sangat menentukan pendekatan program CSR. Sayangnya belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Definisi dari CSR menunjukkan keragaman, terkait dengan paper ini definisi yang digunakan adalah: 1) Definisi CSR menurut *World Business Council For Sustainable Development* adalah “Komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya” (Asongu, 2007; CSR Seminar, 2005). 2) Definisi CSR menurut *European Commission* adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian ekonomi, terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan (Maten dan Moon, 2005; Welford, 2005). 3) Definisi CSR menurut *Canadian Government* adalah kegiatan usaha yang mengintegrasikan ke dalam nilai, budaya pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang (Ketola, 2008). Dari ketiga definisi tersebut pada intinya menekankan pada aspek bahwa pengelolaan bisnis perlu mengkonsiderasi kepentingan *stakeholder* secara lebih luas tidak hanya sekedar aspek ekonomi.

Dalam implementasinya CSR tidak hanya dilihat dari sisi *reactive defensive strategy*, CSR perlu dilihat sebagai peluang bagi pelaku usaha daripada hanya sekedar “*cost to the company*”. Seperti yang dinyatakan Hoivik dan Shankar (2011:180) “*Company should moving from doing CSR to being socially responsible by implementing activities such as: a)*

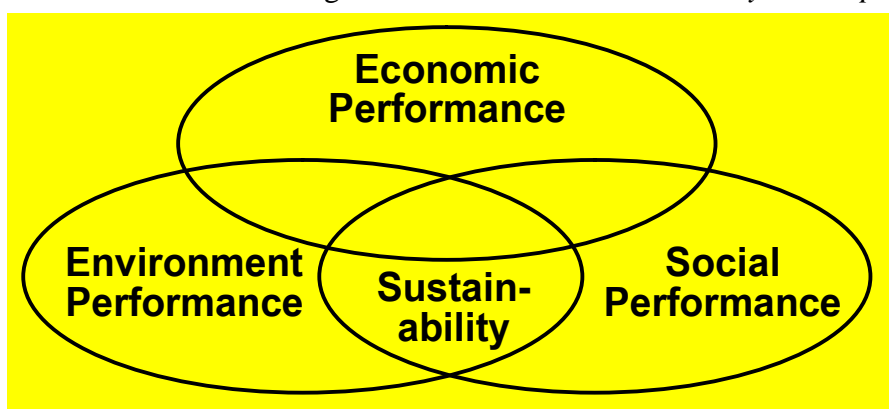
increased access to talent and better employer-employee relationship. b) increasing innovation and seizing opportunities. c) supplier-buyer relationship, d) increased brand equity, e) increased brand equity (positive publication), f) long-term cost saving , g) sustainable leadership". Intinya kegiatan CSR yang dilakukan atas dasar kepedulian dan tanggung jawab akan memberikan rasa percaya dari masyarakat terhadap perusahaan dan produk. Apresiasi masyarakat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan melalui omset yang tinggi sebagai hasil preferensi masyarakat membeli produk dari perusahaan yang memiliki nilai kepedulian.

Corporate Sustainability

Konsep *Corporate Sustainability (CS)* merupakan aktifitas perusahaan yang dikaitkan dengan berbagai cara untuk menjamin kelangsungan hubungan dengan para *stakeholder* dan terus mendorong perusahaan dapat menjalankan operasi bisnisnya. CS merupakan bentuk dukungan untuk pengembangan berkelanjutan dan mempertahankan stabilitas kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Katsoulakos et al (2007) *Corporate sustainability* menjawab kebutuhan *stakeholder* untuk menjaga, mendukung dan meningkatkan sumber daya. Katsoulakos et al (2007) menyatakan bahwa kinerja keberlanjutan perusahaan dapat diukur melalui tiga ukuran yaitu *economic impact*, *social impact* dan *environment impact*. *Economic impact*, artinya keberlanjutan bisnis dan "human capital" berkaitan dengan proses peningkatan kesejahteraan pada tingkat global, nasional dan lokal. *Social impact*, pengaruh produk dan operasi perusahaan terhadap hak asasi manusia, buruh, kesehatan, keamanan, pengembangan regional dan hal-hal yang berkaitan dengan komunitas. *Environment impact*, pengaruh produk atau aktifitas operasional perusahaan terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembuangan limbah kimia perusahaan.

Munkelien et al (2010), menjelaskan hubungan antara CSR dan *Sustainability Development* dengan melihat bagaimana economic performance, environment performance dan social performance bertemu dalam satu area yang menunjukkan tingkat sustainability.

Gambar.1: Hubungan antara CSR dan *Sustainability Development*.



Sumber : Munkelien, Eli Bleie and Petter Vilka (2010)

Global Corporate Citizen

Konsep *Global Corporate Citizenship* (GCC) pada intinya melebihi dari CSR dan *Corporate sustainability*, lebih berfokus pada skope yang lebih luas yaitu “*the global space*” (Hoivik dan Mele, 2009). Lebih lanjut konsep ini menekankan bahwa *business leadership process* memfokuskan pada bagaimana pengaruh perusahaan terhadap masyarakat dan *stakeholder* lain yang menjadi inti operasional perusahaan pada skope yang bersifat global.

Konsep GCC diperkenalkan pertamakali tahun 2002 pada “The World Economic Forum” yang diikuti oleh 46 CEO perusahaan multinational terkemuka didunia. Mereka sepakat menandatangani traktat ” *Global Corporate Citizenship*”. Konsep ini kemudian menjadi sangat populer diaplikasikan pada berbagai perusahaan besar. GCC yang merupakan pengembangan secara luas CSR dan SC dilatarbelakangi oleh inisiatif dari UN (Katsoulukos et all, 2007) yaitu pengaruh global dan tujuan pengembangan millenium Tujuan dan prinsip bagi korporasi untuk berperilaku secara bertanggungjawab dalam bidang: hak asasi manusia, standar perburuhan, lingkungan, anti korupsi dan tanggung jawab ekonomi.

Dimensi penting dari GCC adalah untuk mendukung “*fair globalization*” dan partipasi aktif dalam pengembangan suatu daerah yang mana perusahaan beroperasi. *Fair globalisastion* memerlukan pasar produktif dan *equitable* serta cara bermain yang fair dimana semua negara mempunyai akses yang sama. Prinsip *share responsibility* muncul antara negara dan korporasi untuk membantu negara dan masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dan menikmati keuntungan dari globalisasi. Pada tingkat lokal perusahaan dapat berpartisipasi dalam masyarakat dimana perusahaan beroperasi dengan merespon isu–isu sosial kritis seperti pengembangan regional, pendidikan, kesehatan, produk, pelayanan, pengetahuan dll.

Motivasi perusahaan untuk menerapkan GCC menurut Hoivik and Mele (2009) pada umumnya didorong oleh hal-hal berikut: a) membangun reputasi dan *brand image* positif; b) menjadi pemimpin perusahaan yang terpandang; c) mempertahankan dan meningkatkan posisi pasar, d) menciptakan kepercayaan di pasar keuangan dan meningkatkan nilai saham perusahaan, e) Menjadi perusahaan inovatif dalam pengemngan produk, pelayanan dan menciptakan pasar baru.

Managing Relationship With Stakeholder

Stakeholder management merupakan pendekatan sistimatis untuk mengorganisasi hubungan antara pelaku bisnis dan masyarakat. Dalam proses globalisasi perusahaan cenderung berinteraksi dengan pihak-pihak yang heterogen. Sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan seringkali muncul perbedaan harapan antara perusahaan dan *stakeholder*. Dalam situasi yang demikian *stakeholder manajemen* penting untuk mencari tahu adanya perubahan harapan *stakeholder* terhadap perusahaan dan mendeteksi lebih dini munculnya konflik yang sulit dipecahkan oleh perusahaan. *Stakeholder management* sangat fundamental sebagai sebuah konsep yang pragmatis. Jika organisasi ingin efektif maka kunci utamanya adalah membangun *good relationship* dengan *stakeholder* dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Peran manajer dalam menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* menjadi penting, karena manajer sebagai figur sentral dari pendekatan *stakeholder*. Menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* bukan merupakan hal yang mudah apalagi dengan munculnya *stakeholder network* (Rowley, 1997) dan *multi-stakeholder networks* (Roloff, 2008). Rowley (1997) menyatakan bahwa kesediaan perusahaan untuk memenuhi tuntutan *stakeholder* tergantung pada dua faktor yaitu *density* dan *centrality* dari *network*. Rowley (1997) menyatakan “*companies would not engage with single stakeholder groups in symmetric communication process, but simply adjust their public relation approach to what the manager perceive as the most common stakeholder demand*”. Jadi kolaborasi dan *partnership* merupakan kunci sukses dalam *stakeholder networks*. Menurut Roloff (2008) keadaan ini juga berlaku pada *multi-stakeholder networks*.

Mengelola *relationship* dengan *stakeholder* harus mengetahui posisi dan peran terhadap perusahaan. Perusahaan perlu mengidentifikasi *stakeholder* yang relevan terhadap perusahaan. Mitchell et al (1997) mendefinisikan prinsip “*Who and What Really Count*” dengan melihat *stakeholder* melalui tiga atribut yaitu *power*, *legitimacy* dan *urgency*. Secara garis besar teori *stakeholder* menyatakan organisasi mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang berpengaruh pada kelangsungan perusahaan. Memelihara hubungan dengan *stakeholder* dan menyeimbangkan kepentingan kelompok tersebut merupakan faktor penting. Teori *stakeholder* (Donalson dan Peterson 1995; Freeman 2004) menekankan pada “*stakeholder teori is managerial in the broad sense of that term*”. Maka pihak manajer sebagai figur sentral perlu untuk mengambil keputusan dalam membangun *good relationship* dengan *stakeholder*. Sejak keputusan dibuat manajer, maka *stakeholder*

dapat mengetahui bagaimana manager mendistribusikan *resource* yang terbatas kepada *stakeholder*, proses ini dikenal dengan *balancing stakeholder interest*. Menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* bukan merupakan hal mudah

Reynolds (2006) menyatakan “*Balancing stakeholder interest is a process of assessing, weighing and addressing the competing claim of those have a stake in the action of the organization*”. Selanjutnya Reynolds (2006) berpendapat hambatan untuk menyeimbangkan *stakeholder interest* adalah *resource divisibility* dan *relative stakeholder saliency*. *Resource divisibility*, secara teoritis dikatakan bahwa *balancing stakeholder interest* merupakan refleksi suatu fakta bahwa *stakeholder* berkompetisi terhadap *resources* perusahaan. Apakah itu berkaitan dengan modal, laba, waktu dan usaha. *Stakeholder* dapat setuju dan tidak mengenai bagaimana dan dimana *resource* perusahaan harus didayagunakan, sehingga manager harus memutuskan bagaimana mengalokasikan *resources* secara tepat. *Resource* yang “*divisibility*” dapat mempengaruhi perilaku dalam mengalokasikan *resources*. Semakin mudah *resource* dibagikan, maka manager semakin mudah mendistribusikan kepada *stakeholder* yang relevan, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan mereka. *Relative stakeholder saliency* pada intinya menyatakan bahwa *stakeholder* mempunyai tiga atribut penting yaitu *power*, *legitimate*, dan *the claim is urgent* (Mitchell, 1997). *Stakeholder saliency* membantu manager untuk mengidentifikasi siapa dan apa yang harus diperhitungkan dalam hubungannya dengan *stakeholder*. Hal ini penting untuk mengambil keputusan

SME and Business Responsibility Movement (Success Story)

Penerapan konsep CSR pada saat ini selalu dikaitkan dalam konteks perusahaan besar, tetapi CSR juga merupakan alat strategis untuk meningkatkan daya saing SME's (Vilanova et al, 2009). Walaupun secara spesifik belum dapat dijelaskan dengan fakta-fakta dan angka-angka pasti, karena memakan waktu untuk dapat diwujudkan, paling tidak SME's sudah mulai diperkenalkan akan pentingnya menerapkan CSR untuk dapat meningkatkan bisnisnya tidak hanya pada skala nasional tetapi juga pada tingkat internasional/*global*, sehingga menjadi bagian dari *global corporate citizen*. CSR dapat mempengaruhi daya saing SME's melalui: peningkatan produk, menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih baik dan loyalitas; tingginya motivasi dan loyalitas karyawan, mendorong inovasi; publisitas; meningkatkan *word of mouth*; posisi yang lebih baik di pasar tenaga kerja; jaringan yang lebih baik dengan mitra bisnis, meningkatkan keuntungan karena penyebaran yang lebih efisien

dari penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya produksi; dan peningkatan omset penjualan karena memiliki keunggulan kompetitif (Kechiche dan Soparnot, 2012; Morillo dan Lozano, 2006; Torugsa et al, 2012; Williamson et al, 2006).

CSR pada SME's sudah diterapkan di berbagai Negara, seperti Austria, Jerman, Norwegia dan Rumania. Adapun praktik pelaksanaan kegiatan CSR adalah sebagai berikut (Munkelien dan Vilsted, 2010):

Austria: Salah satu perusahaan pengecer terkemuka mendistribusikan mainan yang terbuat dari bahan alam dan sumber daya terbarukan yang tumbuh tanpa pupuk dan pestisida. Dengan demikian anak-anak terbiasa dengan produk alami dan didorong untuk mengembangkan kreativitas.

Jerman: Perusahaan berukuran menengah "**Paravan**" yang mengkhususkan diri pada bidang teknologi kendaraan bagi orang cacat, merekrut penyandang cacat, sponsor asosiasi untuk orang cacat dan menyediakan sekolah dengan materi pelatihan cacat. Selain itu, pemilik perusahaan adalah presiden kehormatan asosiasi penyandang cacat dan mendukung kampanye kesadaran yang dibiayai oleh Komisi Eropa, serta memberikan saran tentang cara bagaimana penyandang cacat dapat meningkatkan mobilitasnya.

Norwegia: Perusahaan manufaktur berukuran menengah "Marex", setiap tahunnya menyumbangkan ke berbagai lembaga amal untuk menjaga lingkungan (misalnya pemilahan dan daur ulang limbah), jaminan pekerjaan berkelanjutan, menyediakan perawatan kesehatan dan pelatihan kepada karyawan dan memberikan pekerjaan kepada orang yang menganggur.

Rumania: Salah satu perusahaan berskala mikro di Rumania melakukan aktivitas CSR yaitu pertama, menawarkan pelatihan, perbaikan lingkungan kerja, misalnya penggunaan komputer, penerapan jam kerja fleksibel, keselamatan kerja dan membangun komunikasi dengan karyawan. Kedua, banyak perhatian yang ditujukan untuk pelanggan berupa umpan balik, dan jasa perusahaan diadaptasikan sesuai standar mutu. Ketiga, berkolaborasi dengan mitra bisnis yang terlibat dalam rencana pelatihan perusahaan dan mengorganisir kursus pelatihan tentang isu-isu lingkungan.

Penerapan CSR pada SME's tidak hanya sampai pada menciptakan *sustainability corporation*, tetapi pada saat ini muncul dorongan bagaimana SME's dapat menjadi *Global Corporate Citizen* melalui CSR. Kasus perusahaan pakaian di Norwegia "Stormberg A/S" merupakan contoh menarik bahwa konsep GCC tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan besar, tetapi juga diterapkan pada SME's (Hoivik dan Mele, 2009). Kasus ini menunjukkan bahwa SME's menjadi sangat inovatif dalam menerapkan "*corporate citizenship*" tanpa perlu mengikuti praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan besar.

Perusahaan Stormberg A/S ini didirikan oleh Steiner J. Olsen 1998 bergerak dibidang usaha "mendesain dan menjual baju-baju olahraga. Produk Stormberg A/S diminati kelompok usia muda dan pada saat ini merupakan *brand* nomor 3 di Norwegia untuk kelompok produk pakaian olahraga. Beberapa praktek CSR yang telah dilakukan perusahaan ini membuat image dan reputasi perusahaan meningkat dan memperoleh penghargaan sebagai perusahaan "*leading the way- job for life*" atas usahanya yang spesial untuk memberikan peluang pekerja bagi kelompok masyarakat yang "*unemployable*". Beberapa praktik CSR yang dilakukan oleh Stormberg A/S adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan kondisi kerja yang aman dan memberikan proteksi sosial kepada pekerja.**

Dalam usahanya memenuhi "*Norwegian Labor Legislation*", Stormberg telah menerapkan kondisi kerja yang aman dan melakukan usaha-usaha proteksi sosial. Bersama-sama dengan organisasi buruh bersepakat untuk menerapkan "*Inclusive Workplace Agreement/IWA*" "dengan tujuan untuk mengurangi tingkat absen karena sakit sebesar 20%. Jika karyawan mendapatkan masalah dalam pekerjaan sehingga sakit, maka dalam IWA perusahaan berkewajiban untuk memberikan training dan pendidikan lagi pada karyawan tersebut sehingga mempunyai kualifikasi untuk dipindahkan pada job yang lain.

- 2. Mempekerjakan "marjinal people"**

Perusahaan ini menerima pekerja yang kesulitan masuk dunia kerja karena pernah mengalami kasus seperti napi, bekas pecandu narkoba, drop-out sekolah. Jumlah kelompok ini mencapai 25% dari total karyawan yang bekerja di Stormberg A/S. Selain itu Stormberg juga mendorong karyawannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Cara ini dapat meningkatkan kepuasan, rasa tanggungjawab dan loyalitas karyawan kepada perusahaan.

3. Menerapkan *Code of Conduct Compulsary pada Supply Chain*

Perusahaan ini menerapkan “code of conduct compulsory” untuk pabrik-pabrik tekstil di China yang menjadi rantai kegiatan bisnisnya. Bersama-sama dengan IET (Initiative For Ethical Trade) di Norwegia yang merupakan organisasi yang mengoperasikan “*fair working condition*”, telah berhasil mengembangkan pendekatan audit untuk menginspeksi pabrik-pabrik di Cina yang menjadi chain dari Stormberg. Audit berkaitan dengan biaya buruh, gaji, dan kompensasi bagi yang lembur. Pemilik pabrik di Cina pada awalnya berkeberatan dengan cara ini, namun lambat laun setuju dan kondisi pada saat ini semakin membaik. Stormberg mempublikasikan nama-nama “*associate factories*” di China dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kondisi kerja di China. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini merupakan implementasi proses transparansi bisnis terutama berkaitan dengan kondisi buruh di pabrik China. Sampai saat ini Stormberg mempekerjakan 200 orang karyawan musiman.

4. Komitmen Terhadap *Environment Protection*

Perusahaan ini mempunyai komitmen kuat terhadap usaha-usaha untuk memelihara lingkungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengurangan *green house emission* pada seluruh *business chain*-nya. Perusahaan secara teratur mempublikasikan laporan yang disebut “*Stormberg’s Carbon Footprint*” dan telah menandatangani kerjasama dengan UN dan Kyoto Protocol untuk mengurangi *green house emission* dan menjadi perusahaan yang menerapkan pertumbuhan berkelanjutan pada Negara maju.

5. Terlibat dalam aksi solidaritas

Stormberg juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan solidaritas sosial dan etikal, dengan menyisihkan 10% dari *pre-tax income* untuk membiayai proyek kemanusiaan seperti :*SOS children village, local Norwegian shelters* dan juga mendukung kegiatan NGO “*European In Focus*” untuk menolong anak jalanan di Rumania serta membantu korban bencana alam

6. Terlibat dalam kegiatan bersifat sosial and ethical

Stormberg mengeluarkan kebijakan dengan cara menuliskan pada label produknya keterangan 10% *pre-tax income* untuk membiayai proyek kemanusiaan. Perusahaan ini juga mengumpulkan baju-baju bekas pakai produksi Stormberg dan memberikan

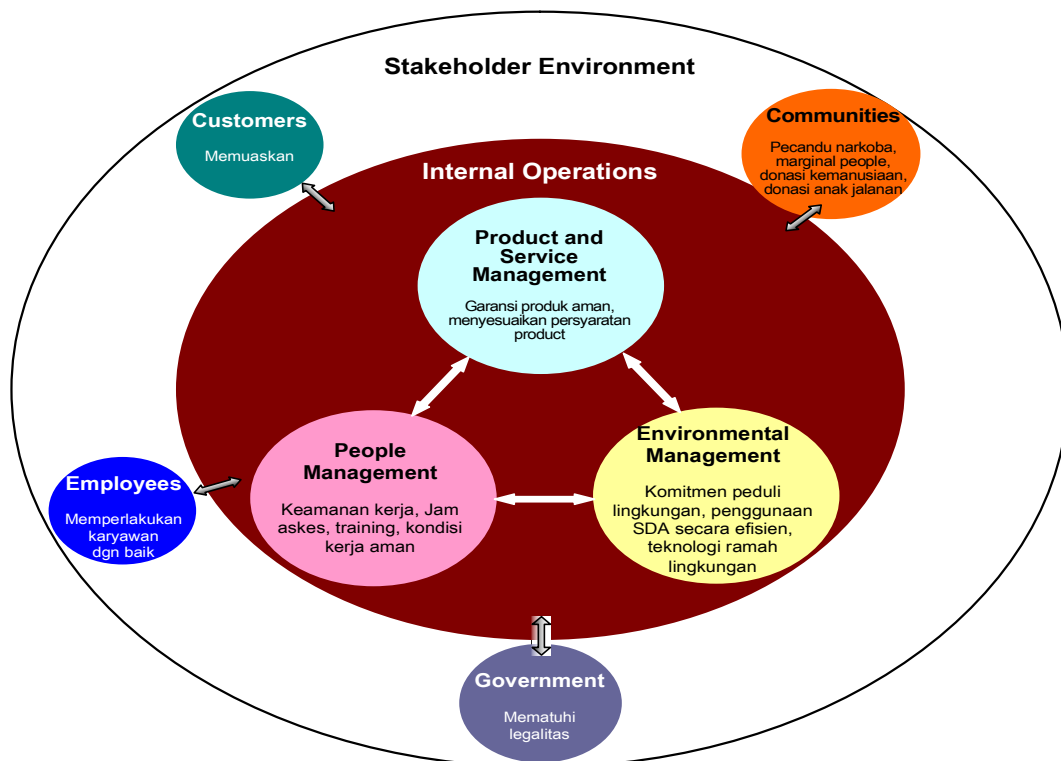
refund. Kemudian baju-baju tersebut disumbangkan kepada masyarakat miskin di Rumania dan Moldova dengan melibatkan jaringan NGO.

A. Metode

Proposed The Conceptual Model For SME's

Untuk merespon perkembangan kegiatan bisnis yang bertanggungjawab sosial, maka konsep pendekatan *stakeholder* penting untuk diterapkan karena telah memasuki skope global dimana yang mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan merupakan *multi-stakeholder* yang mempunyai networking luas. Untuk itu model CSR dari Pedersen (2010) merupakan model yang tepat untuk dapat dijadikan acuan dalam menyeimbangkan kepentingan stakeholder (Gambar 2). Model ini dapat menjelaskan bahwa manager yang menerapkan tanggungjawab sosial jika sudah mengembangkan dan memasarkan produk yang berkualitas tinggi, menjamin lingkungan kerja yang nyaman, mengurangi dampak negatif lingkungan. Dengan melakukan hal-hal tersebut dapat meyakinkan manager bahwa perusahaan akan menjadi *good corporate citizen* dalam skope yang luas menjadi *global corporate citizen* yang menciptakan *value* untuk perusahaan, komunitas dan masyarakat secara luas.

Gambar 2: Model CSR yang diusulkan untuk digunakan oleh SME's.



Pembahasan

Penerapan *responsibility movement* (CSR) pada IKM/UKM di Indonesia: Suatu Pemikiran awal

Praktek penerapan CSR pada SME's di berbagai Negara, merupakan pelajaran penting bagi pengembangan UKM di Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya naik kelas menjadi perusahaan yang mampu bersaing dan berkiprah tidak hanya pada tingkat lokal, nasional tetapi juga global. Melalui penerapan CSR pada UKM diharapkan dapat memberikan manfaat besar mengingat potensinya yang sangat besar mencapai 48,92 juta (BPS, 2007), merupakan 99,98% dari total pelaku usaha di Indonesia. UKM memiliki kontribusi besar utamanya yang bergerak di sektor industri (IKM) jumlahnya mencapai 189.732 unit atau 16,1% dari total UMKM (Kuncoro, 2010:6). IKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 s/d 99 orang dan omzet penjualan antara Rp. 200 Juta s/d Rp. 50 milyar yang dimiliki oleh orang Indonesia independen (Dirjen IKM-Departemen Perindustrian "Profil IKM",2009:1).

Kondisi UKM/IKM di Indonesia, tentunya sangat berbeda dengan negara lain terutama berkaitan dengan lingkup besarnya bidang usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, serta skala usaha. Sehingga jika UKM/IKM menerapkan program CSR mensyaratkan hal-hal penting agar praktik-praktik CSR dapat mengadopsi praktik yang sudah dilakukan oleh perusahaan besar dalam bentuk sederhana. Seperti dalam kasus SME's (Stormberg A/S) telah berhasil melakukan praktik CSR yang tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan perusahaan besar.

Bagaimana dengan penerapan CSR pada UKM/IKM di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah sampai sejauh mana pentingnya melibatkan UKM/IKM untuk menerapkan praktik CSR. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar UKM/IKM masih belum terorganisasi dengan baik, bersifat lokal serta modal yang masih kecil. Selain itu perusahaan besar memang berkepentingan dalam menerapkan CSR antara lain untuk membangun image positif dimata *stakeholder* dan untuk mempertahankan *survival* ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Sedangkan jika ditinjau dari sisi UKM/IKM membangun image masih belum terlalu dirasakan kepentingannya mengingat bisnis yang masih kecil.

Tetapi ada pendapat lain menyatakan bahwa program kepedulian sosial (CSR) di kalangan dunia usaha dinilai perlu diterapkan mulai skala usaha kecil menengah

(UKM/IKM), guna membentuk praktek bisnis yang beretika, bertanggung jawab dan profesional. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sesungguhnya tidak hanya berkisar pada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Ketika perusahaan melakukan praktek bisnis beretika, memenuhi kebutuhan konsumen secara bertanggung jawab, memperlakukan karyawannya secara layak, memberdayakan masyarakat sekitar serta berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, maka perusahaan telah melakukan investasi sosial demi keberlangsungan bisnis. Penerapan CSR bukanlah semata-mata mengenai berapa besar jumlah dana yang harus dikeluarkan perusahaan. Penerapan CSR dimana termasuk di dalamnya tata kelola perusahaan yang beretika, seyogyanya bisa dimulai sejak bisnis pada skala Usaha belum besar atau UKM/IKM. Sehingga saat usaha bisnis berkembang besar, perusahaan tinggal meneruskan atmosfer praktek bisnis yang berorientasi CSR sebagai salah satu strategi bisnisnya". (CSR Seminar, 2005).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran awal yaitu:

1. CSR memungkinkan untuk diterapkan pada UKM/IKM tetapi pada skala menengah. CSR dalam konteks penerapan bisnis beretika sebaiknya dimulai dari sejak usaha belum besar. Adanya UU PT Pasal 74 yang mewajibkan Perseroan mengalokasikan sebagian laba bersih tahunan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU ini mengikat UKM yang telah berbadan hukum untuk melakukan CSR.
2. Membangun jaringan dengan *stakeholder* atas dasar prinsip *relationship* yang memerlukan pengelolaan agar berhasil. *Stakeholder* utama yang dapat menjadi partner bisnis seperti pemerintah, asosiasi perdagangan, perusahaan besar, agen, *supplier*, *buyer*, pemasok, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pengembangan usaha.

KESIMPULAN

Berkembangnya *business responsibility movement* yang mengetengahkan konsep CSR, CS dan GCC telah mendorong pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya secara lebih beretika dan memiliki moralitas tinggi. Esensi penting dari konsep-konsep tersebut adalah: *sustainable empowerment*, *strategic alliance dengan organisasi nirlaba*, *employee participation*, CSR harus mampu membangun hubungan yang baik dengan aktifis lingkungan dan pembuat kebijakan di bidang *enviromental management*. Program CSR yang kuat adalah yang mudah dilihat dan di ingat oleh *community*.

Pada saat ini implementasi dari konsep *business responsibility* sudah banyak diterapkan oleh perusahaan besar. Di Indonesia pelaksanaan CSR sudah ada payung hukum dengan UU no 40 2007 tentang kewajiban PT untuk menyisihkan 2,5% laba perusahaan untuk melaksanakan program *community development*. Keuntungan perusahaan dengan menerapkan konsep ini adalah untuk membangun *image positif* dimata *stakeholder*, sehingga apapun kebijakan perusahaan akan didukung secara penuh oleh *stakeholder*, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan jangka panjang.

Tantangan kedepan adalah bagaimana melibatkan SME's untuk terlibat menerapkan konsep *business responsibility*. Pentingnya SME's menerapkan konsep ini adalah untuk memperkuat *sustainability* bisnis sehingga bisa naik kelas menjadi perusahaan besar dan bisa berkiprah secara global. Melalui penerapan konsep *business responsibility* SME's dapat menjadi penyangga perekonomian suatu negara pada *level grassroot* seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan *entrepreneurship*, mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Untuk dapat mengembangkan SME's yang *concern* dengan *business responsibility* perlu dikembangkan suatu model yang dapat dijadikan acuan menerapkan program secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Asongu, JJ (2007) *The History Of Corporate Social Responsibility Journal Of Business And Public Services Volume I*, Number 2 (Spring 2007) .
- Bonneveux.E, I. Calme and R. Soparnot. 2012. Strategic CSR Assets within SMEs: A Comparative Case Study. *International Business Research*, Vol 5 No 7.
- Cochet.K.D and L.C Vo. 2012.Impact of CSR Tools on SMEs: The Case of Global Performance in France. *International Business Research*; Vol. 5 No. 7.
- CSR Seminar (2005). *A New Business Mainstream To Ward Sustainable Development*, Jakarta, 15 Maret 2003.
- Dalberg. 2011. "Report on Support to SMEs in the Global Economy".www.eib.org.diunduh 5 April 2012. Pg.5-15
- Demuijnck.Geert and H. Ngnodjom. 2013. Responsibility and Informal CSR in Formal Cameroonian SMEs. *Journal Business Ethics*. No 112:653-665.
- Dirjen-IKM. 2009. *Profil IKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI.Hal.1-10.
- Donaldson. Thomas, Lee E. Preston, (1995), *The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, and Implications*, *Academy of Management Review*, Vo. 20, No 1, P 65-91

- Elkington. J. 1998. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (New Society Publisher)
- Freeman R. Edward, (2004), *The Stakeholder Approach Revisited*, *Zeithschrift fur wirtschafts*, Vol.5, Iss.3, p 228.
- Gupta.S, Sukhmani and N.Kalra. 2012. CSR: Relevance in Indian SMEs. *Productivity* Vol. 52, No. 4 Jan-march.
- Hoivik, H. and D. Shankar. 2011. How can SMEs in Cluster Respond to Global Demands for Corporate Responsibility? . *Journal Business Ethics*. 101:175-195.
- Hoivik, H V.Weltzein and D. mele. 2009. Can SMEs Become a Global Corporate Citizen? Evidence from Case Study.*Journal Business Ethics*.88:551-563.
- Katsoulakos. Takis, Yannis Katsoulakos, (2007), *Strategic Management, Corporate Responsibility and Stakeholder Management Integrating Corporate Responsibility Principles And Stakeholder Approaches Into Mainstream Strategy: A Stakeholder-Oriented and Integrative Strategic Management Framework, Corporate Governance*, Vol.7 No 4, p 355-369.
- Kechiche.A and R. Soparnot. 2012. CSR Within SMEs : Literature Reviews. *International Business Research*.Vol. 5 No.7.
- Ketola, R (2008) *A Holistic Corporate Responsibility Model: Integrating Value, Dis Course and Achoi*, *Journal Of Business, Ethics*, 80: 419-435.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. How To integrate Small Mediun Industry (SMI) Development Policies In Decentralized Indonesia. *Delhi Business Review* Vol. 10, No 20. Pg.6-9.
- Matten. Dirk And Moon, Jeremy (2005). *Implicit And Explicit CSR: A Concept For Understanding CSR In Europe*.
- Mitchell. Ronald K, Bradley. R. Agle, (1997), *Toward Theory Of Stakeholder Identification And Salienc: Defining The Principle Of Who And What Really Counts*, *Academy Of Management Review*, Vo. 22, No 4, P 853-886.
- Munkelien,Eli Bleie and Petter Vilka (2010). SME and CSR Trend And Chalengger
- Murillo. D and J.M. Lozano. 2006. SMEs and CSR : An Approach to CSR in their Own World. *Journal Of Business, Ethics*67:227-240.
- Pederson, Esben Rahbek.2010.Modelling CSR:How Manager Understand The Responsibility of Business Toward Society,*Journal Of Business Ethics*.91:155-166
- Perrini, Fransesco. 2006. SMEs and CSR Theory: Evidence and Implication from an Italian Perpectives. *Journal Of Business Ethics*. 67:305-316.
- Perrini.F, A. Russo and A. Tencati. 2007. CSR Strategies of SMEs and Large Firms, Evidence from Italy. *Journal of Business Ethics*, 74: 285-300.
- Reynolds. Scott J, Frank C.Schultz. David R Hekman, (2006), *Stakeholder Theory and Managerial Decision-Making: Constraints and Implications of Balancing Stakeholder Interests*, *Journal of Business Ethics*, 64: P285-301.

- Roloff. Julia, (2008), *Learning From Multi-Stakeholder Networks: Issue Focused Stakeholder Management*, Journal of Business Ethics, 82, P 223-250.
- Rowley. Timothy J, (1997), *Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences*, Journal of Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4.887-910.
- Sangeetha.k and S. Pria. 2011. Factors influencing CSR Initiatives of the Banks in Oman: A study based on Stakeholders Perspective. *Journal of Management Research*. Vol. 3, No 2:E5.
- Srinivasan.Vasanthi. 2009. CSR and Ethics in MSMEs in India .*African Journal of Business Ethics*, Vol. 4, No. 2, 32-36.
- Suharto E (2008), *CSR: What Is And Benefit For Corporate Makalah Disajikan Pada Seminar Dua Hari, CSR Strategy Management And Leadership, Intiperson; Hotel Aryaduta, Jakarta, 13-14 Februari 2008*
- Torugsa, N.A, W. O. Donohue and R. Hecker. 2012. Capabilities, Proactive CSR and Financial Performance in SMEs: Empirical Evidence from an Australian manufacturing Industry Sector.*Journal of Business Ethics*. 109; 483-500.
- Undang-UndangRepublik Indonesia, *Tentang Perseroan Terbatas*, (Nomor 40 Tahun 2007).
- Vazquez. D. G and I.S. Hernandez. 2012. Information on CSR and SMEs Enviromental Responsiveness: A Regional Study. *Economic and Sociology*, Vol. 5, No.2 .
- Vilanova.M; J.M. Lozano and D. arena. 2009. Exploring the Nature of the Relationship between C SR and competitiveness. *Journal of Business Ethics*. 87:57-69.
- Welford, R,J (2005), *CSR In Europe, North Amerce And Asia 2004 Survey Result*, Journal Of Business Ethics.
- Weltzien,Heidi Vo. And Mele Domenec.2009.Can An SME Become a Global Corporate Citizen? Evidence from a Case Studi. *Journal of Business* (2009) 88:551-563
- Williamsom, D; G. L. Wood and J. Ramsay. 2006. Drivers EnvironementalBehaviour In Manufacturing SMEs and the Implications for CSR. *Journal of Business Ethics*. 67: 317-330.
- Yadav.V Sopan. 2013. Critical Analysis of CSR - Jurisprudential Perspective. *Asia Pacific Journal of Management and Entrepreneurship Research*. Vol. 2 Issue 4 September 2013.

RPSEP-70

Kepuasan Klien Dan Kegunaan Laporan Audit Eksternal Stake Holder (Perspektif Klien Audit)

Tubagus Ismail
universitas sultan ageng tirtayasa
adeismail73@gmail.com

Abstrak

The purpose of the paper is to test a structural equation model (SEM) of client satisfaction with the audit, and of client perception of the usefulness of the audit to external stakeholders. A questionnaire was mailed to audit clients, i.e. of manufacturing go public companies in the province of Banten; 57 useable questionnaires were returned. Data were processed using the SEM software Partial Least Square (PLS). The data suggest that auditors face difficulties in handling divided loyalties, as audit clients perceive a strong relationship between client satisfaction and usefulness to external stakeholders. The higher auditor's competence is perceived to be by the clients, the more satisfied they are with the audit and the more useful they believe the audit is to external stakeholders. The more skeptical the auditor is perceived to be by the clients, the less satisfied they are with the audit and the more useful they believe the audit is to external stakeholders. The findings extend previous results, the better the relationship with the auditor is perceived to be by the clients, the more satisfied they are with the audit and the less useful they believe the audit is to external stakeholders. The study addresses an issue most auditing research has not explicitly considered: the distinction between client satisfaction with the audit and client perceptions of the usefulness of the audit to external stakeholders.

Keywords: Kepuasan klien audit, kegunaan bagi external stakeholders dan Auditing

PENDAHULUAN

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan masing – masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Guna menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan dan untuk mengetahui kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang independen.

Auditor loyalitasnya telah terbagi (Ohman *et al*, 2006). Mereka harus melayani pemilik dan stakeholder eksternal lainnya, sementara secara bersamaan harus memuaskan manajer perusahaan (selanjutnya "klien audit"). Menurut Jenkins dan Lowe (1999), auditor sendiri melihat loyalitas mereka dibagi dengan cara yang berbeda. Beberapa auditor terutama

menganggap diri mereka sebagai "pengawas" dalam melayani stakeholder eksternal, sementara orang lain menganggap diri mereka sebagai klien "pendukung".

Menurut Lee (1993) terdapat ketegangan hubungan antara stakeholders eksternal dan klien audit. Untuk mengurangi ketegangan ini, auditor independen harus mengontrol informasi akuntansi perusahaan. Namun, posisi auditor menjadi rumit karena hubungan auditor dengan kedua belah pihak sangat erat. Makalah ini berfokus pada sudut pandang klien audit dan mengakui bahwa hal itu mungkin tidak cukup untuk mempertimbangkan persepsi klien dengan hanya kepuasan mereka sendiri. Cameran *et al.* (2010) berpendapat bahwa klien dapat puas dengan audit tanpa mempertimbangkan apa yang berguna bagi pemilik dan stakeholder eksternal lainnya. Penelitian audit yang paling memfokuskan secara eksklusif pada sudut pandang klien audit dengan mempertimbangkan perbedaan antara kepuasan klien dan kegunaan untuk stakeholder eksternal masih sangat terbatas.

Penelitian ini menempatkan kepuasan klien dan kegunaan bagi para stakeholder eksternal sebagai variabel dependen secara terpisah dan faktor-faktor penentu sebagai variabel independen (Libby dan Tan, 1994), model persamaan struktural awal (SEM) dikembangkan untuk memecahkan masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Agensi

Berdasarkan teori keagenan prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut prinsipal menilai kinerja manajemen. Tetapi yang acap kali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih *reliable* (dapat dipercaya) diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen. Teori keagenan untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk menengahi konflik kepentingan yang dapat muncul antara prinsipal dan agen. Prinsipal selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk berinvestasi.

Klien audit dapat melihat tingkat kepuasan berdasarkan keinginan klien audit sendiri. Misalnya, mekanisme sistem insentif dapat menggoda manajer perusahaan untuk mencari peningkatan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan yang jangka panjang (DeAngelo, 1988), dalam situasi seperti ini, itu akan menguntungkan manajer jika auditor setuju untuk membuktikan satu pilihan akuntansi yang dibuat. Tidak mengherankan, auditor menurut laporan menghadapi tekanan seperti ini dari para klien (Umar dan Anandarajam, 2004). Ini juga telah dilaporkan bahwa auditor kadang-kadang dapat mengajukan pendapat klien tentang pilihan akuntansi (McCracken *et. al.*, 2008) dan menerima pelanggaran laporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum atau bahkan hukum (Ohman *et. al.*, 2012).

b. Kepuasan Klien

Kepuasan klien adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kinerja untuk jasa dapat didefinisikan lebih jauh sebagai atribut daya tanggap, kepastian dan empati. Daya tanggap adalah keinginan untuk membantu klien dan menyediakan pelayanan yang konsisten dan bersifat segera. Kepastian, mengacu pada pengetahuan dan keramahan karyawan serta kemampuan dalam membangun kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Empati berarti peduli dan memberikan perhatian individual terhadap pelanggan, Ohman *et al.*, (2012). Apabila kinerja sesuai harapan, klien akan merasa puas.

Klien menginginkan auditor yang memiliki kualitas tinggi. Ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan oleh klien sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja kantor akuntan public (KAP). Penyedia jasa akuntan profesional (KAP) harus bekerja keras untuk mendapatkan posisi kuat dalam persaingan. KAP harus memahami bagaimana klien mempersepsikan jasa yang dibeli. Perlunya melihat persepsi klien, selain dapat menciptakan keunggulan bersaing, juga dikarenakan kualitas jasa merupakan keseluruhan kesan klien terhadap jasa yang ditawarkan. Ukuran kualitas jasa yang diterima konsumen adalah tingkat perbandingan antara apa yang konsumen harapkan dan yang konsumen terima Parasuraman *et.al.*,(1985).

c. Kegunaan Audit untuk *Stakeholder* Eksternal

Pengertian teori *stakeholder* adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Sementara itu *stakeholder* eksternal merupakan kelompok- kelompok atau individu di luar perusahaan yang dapat memberikan pengaruh untuk perusahaan. Pengaruh tersebut dapat dianggap sebagai keuntungan atau kerugian untuk perusahaan. Para pihak

stakeholder menilai laporan keuangan berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan. Laporan keuangan diperlukan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan, pengguna laporan keuangan mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

Konsep kegunaan untuk *stakeholder* eksternal mengakui peran *controller* auditor, mengenai baik pilihan akuntansi maupun kelangsungan hidup perusahaan (Ohman *et. al.*, 2012). Ini mengisyaratkan bahwa auditor dipersepsikan bertindak secara independen dalam hubungannya dengan klien audit (Ohman *et. al.*, 2012). Apabila kinerja auditor sesuai harapan *stakeholder* eksternal, maka *stakeholder* menganggap audit tersebut berguna untuk menilai manajemen perusahaan.

d. **Kompetensi Auditor**

Kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya: dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif.

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dalam penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat dan mencari penyebab kesalahan. Keunggulan-keunggulan tersebut sangat bermanfaat bagi klien untuk melakukan tindakan perbaikan-perbaikan sehingga akan terpenuhinya kepuasan klien.

e. **Skeptisme Auditor**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *skep-tis* yaitu kurang percaya, ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dsb). Sedangkan *skeptis-isme* adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan). Jadi secara umum *skeptisme* adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu

kebenarannya. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2001).

Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisme profesional dalam melakukan proses audit. Seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Sikap skeptisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat. Skeptisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keahlian, pengalaman, situasi audit yang dihadapi, dan etika.

f. Hubungan Klien dengan Auditor

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu: 1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, 2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan 3) lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien.

Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik memperoleh kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi attestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Wajar adanya jika pengguna laporan keuangan, regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini auditor. Selain itu, hubungan kedekatan dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien audit, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. Auditor bila mempunyai hubungan kedekatan dengan

klien mungkin akan mempengaruhi hasil audit dan pada akhirnya audit tersebut bisa mempengaruhi pula perspektif *stakeholder* eksternal terhadap audit (Ohman *et. al.*, 2012).

g. Hubungan Klien dengan Asisten Auditor

Supervisi mencakup pengarahannya usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan menentukan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah yang penting yang dijumpai dalam audit, mereview pekerjaan dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit kantor akuntan. Luasnya supervise yang memadai bagi suatu keadaan tergantung atas banyak factor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit. Memahami tanggung jawabnya dan tujuan prosedur audit mengetahui hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, luas dan saat prosedur tersebut dilaksanakan (sifat bisnis klien, masalah akuntansi dan audit).

h. Hubungan Kompetensi Auditor terhadap Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk *Stakeholder* Eksternal

Pengetahuan mengenai akuntansi dan prosedur audit para auditor sangat penting untuk kualitas audit (Beattie *et. al.*, 1999). Alasan berfokus pada kompetensi auditor dalam penelitian ini adalah bahwa kompetensi sangat penting atau bahkan menentukan dari perspektif klien (Ohman *et. al.*, 2012). Sejak auditor menawarkan jasanya kepada klien, tidaklah cukup bahwa auditor memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan serta standar akuntansi dan auditing, tetapi juga penting bahwa auditor diakui oleh klien telah berkinerja baik (de Ruyter dan Wetzels, 1999). Beberapa argumen mendukung hubungan positif antara kompetensi auditor dan kepuasan klien (Ohman *et. al.*, 2012). Telah ditemukan bahwa kemampuan auditor untuk memahami bisnis klien dan kondisi sektor industri secara signifikan mempengaruhi persepsi klien audit yang dilakukan (Pandit, 1999). Dan juga telah ditemukan bahwa isi dan ketelitian prosedur audit (Ohman *et. al.*, 2012) dan kemampuan auditor dalam pemecahan masalah (Ohman *et. al.*, 2012) dapat mempengaruhi bagaimana klien menilai kinerja auditor. Argumen di atas juga berlaku pada kegunaan para *stakeholder* eksternal. Dalam penelitian Ohman *et. al.*, (2012) kompetensi yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan untuk *stakeholder* eksternal. Berdasarkan literatur tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1a. Klien menganggap semakin tinggi kompetensi auditor, maka klien puas dengan audit.

H1b. Klien menganggap semakin tinggi kompetensi auditor, maka audit berguna untuk *stakeholder* eksternal.

i. Pengaruh Skeptisme Auditor terhadap Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk Stakeholder Eksternal

Seperti halnya kompetensi auditor, skeptisme auditor juga menentukan kinerja audit (Carcello *et. al.*, 1992.). auditor mengambil keputusan mengenai kelangsungan hidup perusahaan melalui proses dua tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi masalah, berkaitan dengan kompetensi auditor. Tahap kedua, memutuskan apa yang harus dilakukan, berkaitan dengan sikap auditor terhadap skeptisme profesional.

Para auditor menurut laporan mungkin memiliki masalah dalam memelihara sikap skeptis selama negosiasi dengan klien (Ohman *et. al.*, 2012). Oleh karena itu, mungkin sulit bagi auditor untuk mempertahankan sikap skeptis sekaligus memuaskan klien. Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa skeptisme auditor merupakan penentu negatif berhubungan dengan kepuasan klien (Ohman *et. al.*, 2012). Sejalan dengan ini.

Agaraudit dapat bermanfaat bagi pemilik dan para *stakeholder* eksternal lainnya, tindakan klien harus diteliti secara kritis (Rezaee, 2004). Gometz (2005) berpendapat bahwa skeptisme profesional merupakan prasyarat bagi auditor untuk melakukan pekerjaan yang tepat untuk kepentingan umum. Namun, dalam penelitian Ohman *et. al.*, (2012) sikap skeptisme auditor memiliki pengaruh negatif terhadap kegunaan untuk *stakeholder* eksternal. Kredibilitas *stakeholder* informasi akuntansi perusahaan yang diaudit tergantung pada keandalan auditor dan kredibilitas dirasakan bahwa pemilik dan para *stakeholder* eksternal lainnya menghubungkan pada laporan keuangan yang dibuktikan (Pandit, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa klien audit dapat menyadari tugas auditor untuk bertindak dengan sikap skeptis untuk menghasilkan audit independen (Carcello *et. al.*, 1992; Hellman, 2006). Berdasarkan literatur tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2a. Klien menganggap semakin skeptis auditor, maka klien kurang puas dengan audit.

H2b. Klien menganggap semakin skeptis auditor, maka audit berguna untuk *stakeholder* eksternal.

j. Pengaruh Hubungan Klien dengan Auditor terhadap Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk Stakeholder Eksternal

Dalam konteks audit, penting untuk menjaga hubungan klien dengan auditor yang sedang berlangsung dan interaktif sehingga begitu timbul masalah dapat diselesaikan (Beattie *et. al.*,

2001). Interaksi ini formal dan informal mungkin melibatkan berbagai macam negosiasi, tawar-menawar, dan konflik pada tahapan yang berbeda dalam proses audit (McCracken *et. al.*, 2008). Sifat yang signifikan dari hubungan klien dengan auditor adalah stabilitas dan durasi (Ohman *et. al.*, 2012), tingkat kerjasama dan konflik (Ohman *et. al.*, 2012), dan apakah hubungan ini "hangat" atau "dingin" (Ohman *et. al.*, 2012).

Menurut Hellman (2006), penting untuk kepuasan klien bahwa semua auditor dalam tim audit memiliki hubungan baik dengan klien. Beberapa faktor ditemukan berkorelasi dengan kepuasan klien dalam penelitian sebelumnya berkaitan dengan sifat interaksi klien dengan auditor dan keterampilan sosial auditor (Ismail *et. al.*, 2006). Satu faktor yang paling penting dari kepuasan klien adalah respon auditor terhadap kebutuhan klien, dan Ismail *et. al.*, (2006) menemukan bahwa auditor peduli secara positif berhubungan dengan kepuasan klien. Selain itu, konsep komitmen hubungan yang disorot oleh de Ruyter dan Wetzels (1999) ketika menguji beberapa hipotesis mengenai interaksi klien dengan auditor.

Klien audit juga menganggap hubungan baik dengan auditor penting untuk kepuasan klien dengan audit, walaupun belum tentu untuk kegunaan *stakeholder* eksternal. Di satu sisi, jenis interaksi secara teratur biasanya terjadi antara klien dengan auditor dapat memperkuat hubungan (Ohman *et. al.*, 2012) dan membuatnya berhubungan positif dengan kepuasan klien. Di sisi lain, hubungan klien dengan auditor kemungkinan akan mempengaruhi kegunaan audit kepada para *stakeholder* eksternal dalam arah yang sama seperti hubungan yang baik antara klien dengan auditor. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dirumuskan:

H3a. Klien menganggap semakin baik hubungannya dengan auditor, maka klien puas dengan audit.

H3b. Klien menganggap semakin baik hubungannya dengan auditor, maka audit kurang berguna untuk *stakeholder* eksternal.

k. Pengaruh Klien dengan Asisten Auditor terhadap Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk *Stakeholder* Eksternal

Audit perusahaan dari ukuran diselidiki di sini biasanya melibatkan beberapa orang di berbagai tingkatan baik klien audit dan organisasi Kantor Akuntan Publik (Beattie *et al.*, 2004). Meskipun kantor akuntan menanamkan pada diri norma-norma profesional mereka diterima staf tertentu dari perilaku, diketahui bahwa hubungan antara klien dan anggota tim audit yang beragam dapat berbeda tergantung pada tugas khusus mereka kerja dan posisi dalam tim (Hellman, 2006).

Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa klien audit juga menganggap hubungan baik dengan asisten audit penting untuk kepuasan mereka dengan pekerjaan audit, walaupun belum tentu untuk kegunaan pekerjaan untuk stakeholder eksternal. Di satu sisi, jenis interaksi secara teratur biasanya terjadi antara klien dan asisten audit dapat memperkuat hubungan (Westerdahl, 2005; Hellman, 2006) dan membuatnya positif berhubungan dengan kepuasan klien. Di sisi lain, sebagai asisten audit anggota tim audit yang sama sebagai auditor signing, baik klien-audit hubungan asisten kemungkinan akan mempengaruhi kegunaan kepada para stakeholder eksternal dalam arah yang sama seperti klien yang baik akan signing hubungan auditor. Westerdahl (2005) melaporkan bahwa asisten Audit mungkin bahkan lebih peduli dari signing auditor adalah dengan mengikuti pedoman audit dan dengan demikian memenuhi persyaratan peraturan dari audit independen.

H4A. Semakin baik hubungan dengan asisten audit dianggap oleh klien, semakin puas mereka dengan audit.

H4B. Semakin baik hubungan dengan asisten audit dianggap oleh klien, itu kurang berguna mereka percaya audit adalah untuk stakeholder eksternal.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data menggunakan mail survai dan diantar langsung kepada responden yang wilayahnya dapat dijangkau oleh peneliti, sedangkan instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Propinsi Banten. Responden dalam penelitian ini adalah para manajer keuangan.

Instrumen-instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu (Ohman *et al.*, 2012). masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima kategori yaitu: 1. STS: Sangat Tidak setuju 2. TS: Tidak Setuju 3. N: Netral 4. S: Setuju 5. SS: Sangat Setuju. Variable dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin (5-poin likert scale). Data di olah dengan software *Partial LeastSquare* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian.

HASIL

Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 150 kuesioner pada perusahaan manufaktur di Provinsi Banten yang dijadikan sampel. Dari jumlah tersebut kuesioner yang tidak

kembali berjumlah 90 kuesioner atau 60%. Sementara itu, kuesioner yang kembali berjumlah 60 kuesioner atau hanya 40% responden yang mengembalikan, namun ada 3 kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga, kuesioner yang bisa diolah dalam penelitian ini berjumlah 57 atau 38% dari total kuesioner yang dikirim.

a. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Convergent validity* yang dilihat dengan nilai *average variance extracted* (AVE) masing-masing konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,5. Cara lain yaitu dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (\sqrt{AVE}) setiap konstruk (variabel laten) dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

Tabel 1 menjelaskan nilai dari AVE dan akar AVE dari variabel Kompetensi Auditor, Skeptisme Auditor, Hubungan Klien dengan Auditor, Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk *Stakeholder* Eksternal. Dapat dilihat bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk tersebut memiliki nilai validitas yang baik dari setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor, Skeptisme Auditor, Hubungan Klien dengan Auditor, Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk *Stakeholder* Eksternal dapat dikatakan valid.

Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average variance extracted (AVE)</i>	\sqrt{AVE}
CS	0.581	0.762
US	0.532	0.729
SAC	0.595	0.771
AS	0.635	0.796
CSAR	0.568	0.753
CAAR	0.827	0.909

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas menggunakan *Composite Reliability*. Suatu data dikatakan reliabel jika, *composite reliability* lebih dari 0,7

Tabel 2 Composite Reliability

	Composite Reliability
SAC	0.850
AS	0.874
CSAR	0.866
CAAR	0.906
CS	0.846
US	0.818

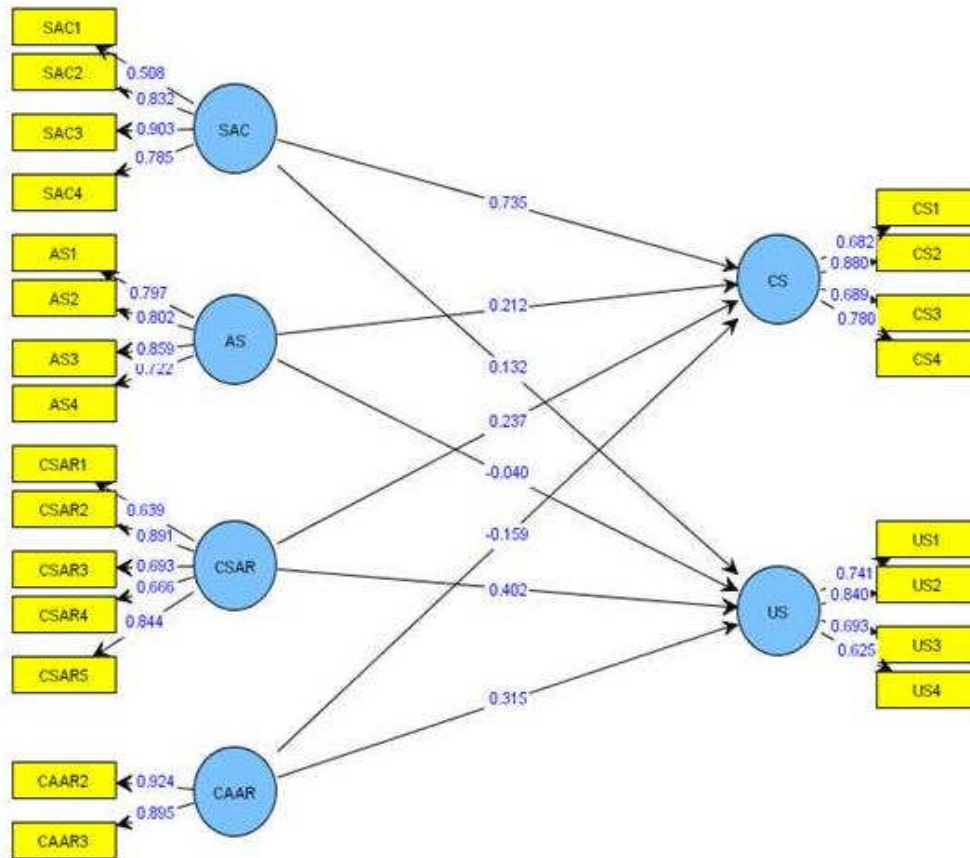
Sumber : Output Smart PLS (2014)

Dari tabel 2 dapat dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7 yang menandakan bahwa *internal consistency* dari antar variabel memiliki reliabilitas yang baik.

c. Pengujian Hipotesis Melalui *Outer Model*

Berikut dapat dilihat secara keseluruhan korelasi setiap variabel pada gambar 1 yaitu gambar yang menyatakan hubungan antara Kompetensi Auditor, Skeptisme Auditor, Hubungan Klien dengan Auditor, Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk *Stakeholder* Eksternal. Dimana model pada gambar 1 tidak dilakukan eliminasi hal ini disebabkan tidak terdapat korelasi konstruk yang kurang dari 0,5 sehingga setiap variabel memenuhi kriteria *convergent validity*. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan korelasi dari setiap variabel eksogen dan variabel endogen.

Gambar 1 Full Model Structural Partial Least Square



Keterangan:

- SAC : Singing Auditor Competence
- AS : Auditor Skeptisisme
- CSAR : The client–signing auditor relationship
- CAAR : The client–audit assistant relationship
- CS : Client satisfaction
- US : Usefulness to external stakeholders

d. Pembahasan *Full Model Structural*

Uji terhadap *outer loading* bertujuan untuk melihat korelasi antara *score item* atau indikator dengan *score* konstraknya. Indikator dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7. Namun dalam tahap pengembangan korelasi 0,5 masih dapat diterima. Berdasarkan hasil pengolahan, nilai *outer loadings* indikator seluruh variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan nilai *outer model* atau korelasi dengan variabel secara keseluruhan sudah memenuhi *Convergent Validity*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau *discriminant validity*.

e. Pengujian Hipotesis Menurut *Inner Model*

Inner model merupakan gambaran hubungan antar variabel laten yang berdasarkan pada *substantive theory Inner model* yang kadang disebut juga dengan *inner relation*, *structural model* dan *substantive theory*. Dalam model hasil output terlihat nilai *inner weight* dari setiap hubungan langsung maupun tidak langsung menunjukkan nilai yang lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance* (lihat table 3).

Variabel kepuasan klien memiliki nilai *R-square* sebesar 0,765 yang berarti variabilitas konstruk kepuasan klien yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Kompetensi Auditor, Skeptisme Auditor, Hubungan klien dengan Asisten Auditor dan Hubungan Klien dengan Auditor sebesar 76,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Variabel kegunaan untuk *stakeholder* eksternal memiliki nilai *R-square* sebesar 0,526 yang berarti variabilitas konstruk kegunaan untuk *stakeholder* eksternal yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Kompetensi Auditor, Skeptisme Auditor, dan Hubungan Klien dengan Auditor sebesar 52,6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini (Ghozali, 2008).

Hipotesis 1a yaitu klien menganggap semakin tinggi kompetensi auditor, maka semakin puas klien dengan audit dapat diterima. Mengenai kegunaan untuk *stakeholders* eksternal, hipotesis 1b ditolak karena menunjukkan nilai *original sampel estimate* sebesar 0,132 dan T-statistik sebesar 0.538 (kurang dari t-tabel, 1,96). Sehingga hipotesis klien menganggap semakin tinggi kompetensi auditor, maka audit berguna untuk *stakeholder* eksternal juga ditolak.

Tabel 3. Result for inner weight

Hipotesis	Uraian	<i>Original sample estimate</i>	<i>Mean of subsamples</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Kesimpulan
H1a	SAC -> CS	0.735	0.728	0.169	4.362	Diterima
H1b	SAC -> US	0.132	0.144	0.245	0.538	Ditolak
H2a	AS -> CS	0.212	0.210	0.070	3.020	Diterima
H2b	AS -> US	-0.040	-0.001	0.130	0.309	Ditolak
H3a	CSAR -> CS	0.237	0.239	0.082	2.877	Diterima
H3b	CSAR -> US	0.402	0.393	0.164	2.453	Diterima
H4a	CAAR -> CS	-0.159	-0.152	0.188	0.843	Ditolak
H4b	CAAR -> US	0.315	0.293	0.270	1.164	Diterima

Sumber : Output Smart PLS (2013)

Temuan hipotesis 1a konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ohman *et. al.*, (2012) menemukan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. Hal tersebut jg diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa responsif atas kebutuhan klien berpengaruh positif terhadap kepuasan klien (Takiah *et. al.*). Sementara temuan hipotesis 1b bertentangan dengan hasil penelitian Ohman *et. al.*, (2012), yang menolak bahwa semakin rendah kompetensi auditor berpengaruh negatif terhadap kegunaan untuk *stakeholder* eksternal.

Hipotesis 2a yaitu klien menganggap semakin skeptis seorang auditor maka klien merasa kurang puas dengan audit dapat diterima. Mengenai kegunaan untuk *stakeholders* eksternal, hipotesis 2b tidak didukung karena nilai *original sampel estimate* sebesar -0,040 dan T-statistik sebesar 0,309 (lebih kecil dari t-tabel, 1,96). Sehingga hipotesis klien menganggap semakin skeptis auditor, maka audit kurang berguna untuk *stakeholder* eksternal ditolak.

Hasil tersebut bertentangan dengan pernyataan bahwa skeptisisme merupakan karakteristik khas dari auditor dalam melayani pemilik dan *stakeholders* eksternal lainnya (Gometz, 2005). Hubungan berbasis empiris antara kepuasan klien dan kegunaan audit yang dirasakan para *stakeholder* eksternal menunjukkan bahwa klien audit auditor merasa bahwa sikap skeptisisme profesional mempengaruhi kegunaan untuk *stakeholder* eksternal dengan cara

yang sama seperti yang mempengaruhi kepuasan dengan audit. Dengan kata lain, tampaknya seolah-olah klien audit mempersepsikan pandangannya ke pemilik dan *stakeholder* eksternal lainnya, daripada melihatnya sebagai tugas auditor untuk bertindak dengan sikap skeptis agar menghasilkan audit independen untuk kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa klien audit mungkin memiliki kesulitan melihat pertentangan antara kepentingan klien dan kepentingan *stakeholders* eksternal. Kedua temuan tersebut, konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ohman *et. al.*, (2012) yang menyebutkan skeptisme memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan klien dan kegunaan untuk *stakeholder* eksternal. Hasil penelitian hipotesis 2a juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya, sikap tidak mudah percaya atau hati-hati tidak berpengaruh terhadap kepuasan klien (Behn *et. al.*, 1997).

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, menunjukkan nilai *original sampel estimate* sebesar 0,237 dan T-statistik sebesar 2,877 (lebih besar dari t-tabel, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 3a yaitu klien menganggap semakin baik hubungan klien dengan auditor maka klien merasa puas dengan audit dapat diterima.

Mengenai kegunaan untuk *stakeholders* eksternal, hipotesis 3b juga didukung karena menunjukkan nilai *original sampel estimate* sebesar 0.402 dan T-statistik sebesar 2.453 (lebih besar dari t-tabel, 1,96). Sehingga hipotesis klien menganggap semakin baik hubungan klien dengan auditor, maka audit kurang berguna untuk *stakeholder* eksternal juga diterima.

Temuan hipotesis 3a konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ohman *et. al.*, (2012) menemukan bahwa hubungan yang baik antara klien dan auditor berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. Hal tersebut jg diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa responsif atas kebutuhan klien berpengaruh positif terhadap kepuasan klien (Behn *et. al.*, 1997). Sementara temuan hipotesis 3b bertentangan dengan hasil penelitian Ohman *et. al.*, (2012), yang menolak bahwa hubungan klien dengan asisten auditor maupun *signing* auditor berpengaruh negatif terhadap kegunaan untuk *stakeholder* eksternal. Namun, independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena dapat mempengaruhi sikap mental dan opini auditor.

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam tabel 4.17 menunjukkan nilai *original sampel estimate* sebesar -0.159 dan T-statistik sebesar 0.843 (kurang dari t-tabel, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 4a yaitu Semakin baik hubungan dengan asisten audit dianggap oleh klien, semakin puas mereka dengan audit. Jadi ditolak. Pada hipotesis H4b bertentangan dengan hasil penelitian Ohman *et. al.*, (2012), yang

menerima bahwa Semakin baik hubungan dengan asisten audit dianggap oleh klien, itu kurang berguna mereka percaya audit adalah untuk stakeholder eksternal. Jadi H4a dan H4b bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya menurut Ohman *et. al.*, (2012) dan Takiah *et. al.*, 2010.

Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa klien audit juga menganggap hubungan baik dengan asisten audit penting untuk kepuasan mereka dengan pekerjaan audit, walaupun belum tentu untuk kegunaan pekerjaan untuk stakeholder eksternal. Di satu sisi, jenis interaksi secara teratur biasanya terjadi antara klien dan asisten audit dapat memperkuat hubungan (Hellman, 2006) dan membuatnya positif berhubungan dengan kepuasan klien. Di sisi lain, sebagai asisten audit anggota tim audit yang sama sebagai auditor signing, baik klien-audit hubungan asisten kemungkinan akan mempengaruhi kegunaan kepada para stakeholder eksternal dalam arah yang sama seperti klien yang baik akan signing hubungan auditor. Westerdahl (2005) melaporkan bahwa asisten Audit mungkin bahkan lebih peduli dari signing auditor adalah dengan mengikuti pedoman audit dan dengan demikian memenuhi persyaratan peraturan dari audit independen.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas tentang suatu model yang menguji pengaruh Kompetensi Auditor, Skeptisme Auditor, Hubungan Klien dengan Auditor, Ukuran KAP terhadap Kepuasan Klien dan Kegunaan untuk *Stakeholder* Eksternal dalam perspektif klien. Berikut kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini:

Klien menganggap seorang auditor memiliki kompetensi tinggi membuat klien audit merasa puas dan juga audit berguna untuk *stakeholder* eksternal. Klien menganggap seorang auditor memiliki sikap skeptisme membuat klien audit merasa kurang puas dan juga kurang berguna untuk *stakeholder* eksternal. Klien menganggap semakin baik hubungannya dengan auditor membuat klien audit merasa puas dan audit kurang berguna untuk *stakeholder* eksternal. Klien Semakin baik hubungan dengan asisten audit dianggap oleh klien, semakin puas mereka dengan audit dan kurang berguna bagi *stakeholder* eksternal.

a. Implikasi

Penelitian ini memperluas hasil sebelumnya., bahwa kompetensi auditor yang tinggi dianggap dapat meningkatkan kepuasan klien dan kegunaan audit untuk *stakeholder* eksternal. Sebuah hasil yang tampaknya penting untuk perwakilan dari profesi audit adalah untuk

mengkomunikasikan auditor membagi loyalitas kepada klien audit, karena klien menganggap negatif sifat skeptis seorang auditor terhadap kepuasan klien,. Hal ini menunjukkan kesalahpahaman terhadap klien, skeptisme auditor dapat dianggap sebagai prasyarat untuk melakukan kerja audit yang tepat demi kepentingan publik atau *stakeholder* eksternal.

Temuan kami menunjukkan bahwa auditor dan kantor akuntan melakukan manfaat dari fokus hubungan pada klien-auditor. Hubungan dengan signing auditor dan asisten audit yang dirasakan oleh klien diteliti sebagai positif mempengaruhi kepuasan klien, sementara tidak secara signifikan mempengaruhi kegunaan untuk *stakeholder* eksternal. Namun, sifat yang berbeda dari auditor signing 'dan audit asisten' tugas dapat membantu auditor dan kantor akuntan untuk menangani loyalitas yang terpecah. Sebuah hubungan klien-auditor yang baik difasilitasi oleh sifat khusus dari hubungan oleh klien harus ramah dalam perilaku. Para asisten audit dapat menjalin hubungan baik dengan klien mereka dengan mengambil beban kerja perusahaan yang telah diaudit ke dalam pertimbangan dan menjalin hubungan informal dan kerjasama dengan perwakilan dari perusahaan yang diaudit. Sebuah isu yang tampaknya penting untuk perwakilan dari profesi audit adalah untuk mengkomunikasikan auditor membagi loyalitas kepada klien audit, karena mereka menganggap skeptisisme auditor sebagai negatif untuk kedua kepuasan klien dan kegunaan bagi pemilik dan para pemangku kepentingan eksternal lainnya. Hal ini menunjukkan kesalahpahaman klien, seperti skeptisisme auditor dapat dianggap sebagai prasyarat untuk melakukan kerja audit yang tepat demi kepentingan publik (Gometz, 2005).

b. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan persepsi berdasarkan sudut pandang dari klien audit, yang tentu saja persepinya akan sangat berbeda dengan para *external stake holder*. Penelitian di masa depan bisa menggunakan perspektif pemilik dan *stakeholder* eksternal lainnya, dengan mengacu pada kepuasan klien dan kegunaan untuk *stakeholder* eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Beattie, V., Brandt, R. and Fearnley, S. (1999), "Perceptions of auditor independence: UK evidence", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 8 No. 1, pp. 67-107.

Beattie, V., Fearnley, S. and Brandt, R. (2001), *Behind Closed Doors: What Company Audit Is Really About*, Palgrave, Basingstoke.

Beattie, V., Fearnley, S. and Brandt, R. (2004), "A grounded theory model of auditor-client negotiations", *International Journal of Auditing*, Vol. 8 No. 1, pp. 1-19.

Behn, B.K., Carcello, J.V., Hermanson, D.R. and Hermanson, R.H. (1997), "The determinants of audit client satisfaction among clients of big 6 firms", *Accounting Horizons*, Vol. 11 No. 1, pp. 7-24.

Cameran, M., Moizer, P. and Pettinicchio, A. (2010), "Customer satisfaction, corporate image, and service quality in professional services", *The Service Industries Journal*, Vol. 30 No. 3, pp. 421-35.

Carcello, J.V., Hermanson, R.H. and McGrath, N.T. (1992), "Audit quality attributes the perceptions of audit partners, preparers and financial statement users", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 11 No. 1, pp. 45-67.

de Ruyter, K. and Wetzels, M. (1999), "Commitment in auditor-client relationships: antecedents and consequences", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 24 No. 1, pp. 57-75.

DeAngelo, L. (1988), "Managerial competition, information cost, and corporate governance: the use of accounting performance measures in proxy contests", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 10 No. 1, pp. 3-42.

Gometz, U. (2005), "Va`rden och penningbega`r—ett revisorsdilemma" ("Values and craving for money: an auditor's dilemma"), in Nord, G. and Thorell, P. (Eds), *Intressekonflikter och finansiella marknader (Conflicts of Interests and Financial Markets)*, Iustus Fo`rlag, Stockholm, pp. 162-83.

Hellman, N. (2006), "Auditor-client interaction and client usefulness: a Swedish case study", *International Journal of Auditing*, Vol. 10 No. 2, pp. 99-121.

Ismail, I., Haron, H., Ibrahim, D.N. and Isa, S.A. (2006), "Service quality, client satisfaction and loyalty towards audit firms: perceptions of Malaysian public listed companies", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 7, pp. 738-56.

Jenkins, J.G. and Lowe, D.J. (1999), "Auditors as advocates for their clients: perceptions of the auditor-client relationship", *Journal of Applied Business Research*, Vol. 15 No. 2, pp. 73-8.

Lee, T.A. (1993), *Corporate Audit Theory*, Chapman & Hall, London.

Libby, R. and Tan, H.T. (1994), "Modelling the determinants of audit expertise", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 19 No. 8, pp. 701-16.

McCracken, S., Salterio, S.E. and Gibbins, M. (2008), "Auditor-client management relationship and roles in negotiating financial reporting", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 33 Nos 4/5, pp. 362-83.

Öhman, P, Häckner, E and Sörbom, Dag. (2012), "Client satisfaction and usefulness to external stakeholders from an audit client perspective", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 27 Iss: 5 pp. 477 – 499.

Ohman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M. and Tschudi, F. (2006), "Swedish auditors' view of auditing: doing things right versus doing the right thing", *European Accounting Review*, Vol. 15 No. 1, pp. 89-114.

Pandit, G.M. (1999), "Clients' perceptions of their incumbent auditors and their loyalty to the audit firms: an empirical study", *Mid-Atlantic Journal of Business*, Vol. 35 No. 4, pp. 171-88.

Parasuraman, A., Berry, L.L. and Zeithaml, V.A. (1988), "SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality", *Journal of Retailing*, Vol. 64. No. 1, pp. 12-40.

Umar, A. and Anandarajan, A. (2004), "Dimensions of pressures faced by auditors and its impact on auditors' independence: a comparative study of the USA and Australia", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 19 No. 1, pp. 99-116.

Westerdahl, S. (2005), "Vad har de för sig? Om revisorers vardag och vad den betyder för etik och lärande" ("What do they do? About auditors' weekdays and what they mean for ethics and learning"), in Johansson, S.-E., Häckner, E. and Wallerstedt, E. (Eds), *Uppdrag revision: Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna? (The Task of Auditing: A Profession That Lives up to Expectations?)*, SNS Förlag, Stockholm, pp. 45-60.

RPSEP-71

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK *INCOME SMOOTHING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Adhi Irawan

Halim Dedy Perdana

Hanung Triatmoko

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret)

perdana.hlm@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the factors that influenced toward income smoothing practice among listed companies at Indonesia Stock Exchange. Income smoothing practice used by the management to diminish the variability of a stream of reported income numbers related to some perceived target stream by manipulating artificial (accounting) and real (transactional). The factors being examined are debt to equity ratio, return on asset ratio, operating leverage ratio and net profit margin. Eckel Index is used to determine the income smoothing practice. The object of income smoothing in this research is the net profit of the company. The research is using 52 manufacture companies and 55 non manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange, with a period 2008-2010. The hypothesis is tested using binary logistic regression. The result of this research shows that some of the listed companies at Indonesia Stock Exchange are committed to income smoothing practice. Binary logistic regression shows that debt to equity ratio, return on assets ratio, operating leverage and net profit margin do not have significant influence to income smoothing. But return on assets ratio of manufacture companies has significant influence to income smoothing.

Keywords: debt to equity ratio, return on asset ratio, operating leverage ratio, net profit margin, income smoothing.

PENDAHULUAN

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan keuangan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal. Informasi laba adalah salah satu komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir resiko investasi atau meminjamkan dana Kirschenheiter dan Melumad (2002). Pernyataan tersebut senada dengan definisi yang tertuang dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 1 juga menyebutkan bahwa informasi laba pada umumnya

merupakan faktor penting dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba tersebut membantu pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas “*earning power*” perusahaan dimasa yang akan datang.

Laba bersih perusahaan dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan nilai dari perusahaan. Hal ini menjadikan perhatian investor dan calon investor terpusat pada laba suatu perusahaan. Seorang investor yang rasional akan membuat prediksi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dengan mengamati sinyal yang diberikan perusahaan. Investor sering memusatkan perhatiannya hanya pada informasi laba, tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan manajemen atas laba (*earning management*).

Salah satu tindakan manajemen atas laba yang dapat dilakukan adalah tindakan perataan laba (*income smoothing*). Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi *abnormal* laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar.

Menurut Barnea, Ronen dan Sadan (1975) manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas di masa depan. Beidleman (1973), mengemukakan bahwa tindakan manajer meratakan laba adalah untuk membuat arus penghasilan stabil dan mengurangi *covariance return* dengan pasar.

Menurut Beidleman (1973) bahwa usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan target yang terlihat, karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu atau transaksi riil (Koch, 1981).

Ashari *et al* (1994) menemukan bahwa terdapat indikasi tindakan perataan laba dan laba operasi merupakan sasaran umum yang digunakan untuk melakukan perataan laba. Tindakan perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya rendah, dan perusahaan dalam industri yang berisiko.

Penelitian lain oleh Illmainir (1993), Zuhroh (1997) serta Jin dan Machfoedz (1998), memperoleh bukti bahwa praktek perataan laba telah terdapat pada perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Jakarta dan mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong praktek perataan laba diantaranya adalah ukuran perusahaan, *leverage* operasi, keberadaan perencanaan bonus dan sektor industri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Return on Asset*, *Leverage Operasi*, dan *Net Profit Margin* perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di ICMD.

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Definisi perataan laba menurut Beidleman (1973) adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada tingkat laba yang dianggap normal bagi suatu perusahaan. Dalam pengertian ini perataan laba merepresentasikan suatu upaya manajemen untuk mengurangi variasi tidak normal dalam laba sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Perataan laba sebagai suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas aliran angka laba yang dilaporkan relatif terhadap aliran yang merupakan target manajemen dengan memanipulasi variabel artifisial melalui metode akuntansi maupun variabel riil melalui transaksi (Koch, 1981). Usaha perataan laba yang dilakukan oleh manajemen dengan sengaja mempunyai tujuan agar memberikan persepsi pada investor tentang kestabilan laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang stabil memberikan persepsi pada investor bahwa tingkat *return* saham yang diharapkan tinggi dan tingkat risiko dari portfolio saham rendah, sehingga tingkat kinerja dari perusahaan tersebut kelihatannya baik.

Menurut Koch (1981), tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu (*artificial smoothing*) atau transaksi riil (*real smoothing*). Sedangkan definisi dari Poll (2004), *smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by leveling off the earnings peaks and raising the valleys*. Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau tingkat yang diinginkan dan proses manipulasi waktu *earning* atau pelaporan *earning* agar aliran laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit.

Beidleman (1973) mempertimbangkan dua alasan manajemen meratakan laporan laba. Pendapat pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung deviden dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba yang variabel sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan. Argumen kedua berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian portofolio pasar. Hal tersebut merupakan hasil dari kebutuhan manajemen untuk menetralkan ketidakpastian lingkungan dan menurunkan fluktuasi yang luas dalam kinerja operasi perusahaan terhadap siklus waktu.

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

Faktor-faktor pendorong perataan laba merupakan cerminan dari berbagai upaya manajemen untuk menghindari konflik dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Perataan laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong manajer untuk melakukan perataan laba. Banyak penelitian empiris terdahulu telah menguji faktor-faktor tersebut dan temuan empiris yang didapat menunjukkan simpulan yang belum sepakat, karena untuk beberapa faktor masih disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba antara lain:

a. Debt to Equity Ratio

DER menggambarkan komposisi/ struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin tinggi komposisi utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri sehingga berdampak besar pada beban perusahaan terhadap pihak luar, karena akan menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan.

b. Return On Asset

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA berfungsi untuk

mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba.

c. Leverage Operasi

Leverage operasi memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang diperoleh. Leverage Operasi bersangkutan dengan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap dengan harapan, bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel.

Jin dan Machfoedz (1998) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan praktik perataan laba biasanya memiliki leverage operasi yang rendah. Leverage operasi yang rendah menunjukkan bahwa proporsi biaya tetap lebih rendah, sedangkan proporsi biaya variabel lebih tinggi.

d. Net Profit Margin

Net Profit Margin digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Perumusan Hipotesis

a. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio merupakan proporsi penggunaan hutang yang diberikan kreditur pada perusahaan terhadap modal yang dimiliki. Semakin tinggi rasionya makin besar resiko yang ditanggung perusahaan karena akan mempengaruhi kebijakan keuangan perusahaan.

Laba merupakan pertimbangan bagi kreditur sebelum memberikan pinjaman pada perusahaan. Kreditur akan cenderung memberikan kredit pada perusahaan yang labanya stabil dibanding perusahaan dengan laba yang fluktuatif. Dengan adanya laba yang stabil maka kreditur akan merasa aman untuk memberikan kredit karena mereka percaya perusahaan akan mampu membayar dengan lancar. Sehingga semakin tinggi DER maka makin terindikasi perusahaan melakukan perataan laba.

H_{A1}: Terdapat pengaruh yang signifikan dari DER perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Return on Asset (ROA)

Perusahaan yang tingkat ROA-nya rendah mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk meratakan labanya, sedangkan White (1970) menemukan bukti bahwa perusahaan yang ROA menurun cenderung pula untuk melakukan tindakan yang sama. Hasil yang lain ditemukan oleh Purwanto (2004), dalam penelitiannya profitabilitas berpengaruh pada praktik perataan laba. Dapat diduga bahwa fluktuasi laba yang akan memberi dampak pada makin rendah atau menurunnya profitabilitas akan mendorong manajer untuk meratakan labanya.

H_{A2}: Terdapat pengaruh yang signifikan dari ROA perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Leverage Operasi (LO)

Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan. Ashari et. Al (1994) berhasil membuktikan bahwa leverage operasi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perataan laba. Zuhroh (1996) meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan terjadinya praktik perataan laba dengan kesimpulan bahwa hanya leverage operasi perusahaan saja yang memiliki pengaruh terhadap praktek perataan laba yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

H_{A3}: Terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio LO perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.

d. Net Profit Margin (NPM)

Net profit margin ini diduga juga mempengaruhi perataan laba, karena secara logis margin ini terkait langsung dengan obyek perataan laba. Pemilihan net profit margin sebagai variabel independen juga didukung oleh hasil penelitian Bornea, Ronen dan Sadan (1975) yang menginvestigasi penggunaan berbagai instrumen laporan keuangan, seperti metode depresiasi, perubahan kebijakan akuntansi, dan *extraordinary item* untuk meratakan penghasilan. Secara logis, net profit margin dapat merefleksikan motivasi manajer untuk meratakan penghasilan.

H_{A4}: Terdapat pengaruh yang signifikan dari NPM perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor (DER, ROA, LO, dan NPM) secara signifikan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Penelitian ini adalah penelitian *time series* yaitu penelitian yang dilakukan dari waktu ke waktu pada satu obyek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2008-2010. Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh (DER, ROA, LO, dan NPM) sedangkan variabel dependen yang diuji adalah tindakan perataan laba.

2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam *Indonesian Capital Market Directory* pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Dipilihnya BEI (IDX) dan ICMD sebagai tempat penelitian karena BEI (IDX) dan ICMD merupakan bursa di Indonesia yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik.

Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive random sampling* yaitu sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan non-manufaktur yang terdaftar di BEI (IDX) dan ICMD, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur dan non-manufaktur yang terdaftar di BEI (IDX) dan ICMD dari tahun 2008-2010.
- b. Perusahaan yang *delisting* dan melakukan merger selama kurun waktu tahun 2008-2010.
- c. Selama periode peristiwa, perusahaan melaporkan adanya laba mulai tahun 2008-2010.
- d. Perusahaan tidak memiliki data laporan keuangan yang lengkap (DER).

3. Data dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data tersebut adalah data seluruh perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia khususnya dari *Indonesian Capital Market Directory 2011* yang memuat laporan keuangan perusahaan tahun 2008-2010.

Data diperoleh dari berbagai referensi sumber-sumber informasi yang dipublikasikan seperti data ICMD, IDX, jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas tentang praktik perataan laba.

4. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

a. Variabel Dependen

Variable dependen dalam penelitian ini adalah tindakan perataan laba. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal. Kelompok perusahaan yang melakukan perataan laba diberi nilai 1, sedangkan yang tidak melakukan perataan laba diberi nilai 0.

Tindakan perataan laba diuji dengan indeks Eckel (1981). Eckel menggunakan *coefficient variation* (CV) variabel laba dan penjualan. Indeks Perataan Laba = $\frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$

Keterangan :

ΔS : perubahan penjualan dalam satu periode

ΔI : perubahan penghasilan bersih/laba dalam satu periode

CV ΔI : koefisien variasi untuk perubahan laba

CV ΔS : koefisien variasi untuk perubahan penjualan

Apabila CV $\Delta I > CV \Delta S$ maka perusahaan tidak digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan perataan laba.

CV ΔS dan CV ΔI dapat dihitung sebagai berikut:

$$CV \Delta S \text{ dan } CV \Delta I = \sqrt{\frac{\sum (\Delta x - \Delta X)^2}{n - 1}} : \Delta X$$

Keterangan:

Δx : perubahan penghasilan bersih laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n-1

ΔX : rata-rata perubahan penghasilan bersih laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n-1

n : banyaknya tahun yang diamati

b. Variabel Independen

1. Debt to Equity Ratio

Variabel ini diukur dengan rasio antara total hutang dengan total modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah modal sendiri yang dijaminakan atas hutang. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

2. Return On Asset

Variabel ini diukur dengan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya (Prastowo dan Julianti, 2005). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Leverage Operasi

Leverage Operasi perusahaan diukur dengan menggunakan *degree of operating leverage* (DOL) (Harjito dan Martono, 2008). Variabel ini diukur dengan rasio antara persentase perubahan laba operasional perusahaan (EBIT) akibat dari 1% perubahan dalam output penjualan. Skala pengukurannya adalah skala rasio dengan rumus:

$$\text{LO} = \frac{\% \text{ perubahan EBIT}}{\% \text{ perubahan penjualan}}$$

4. Net Profit Margin

Variabel ini diukur dengan rata-rata rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total penjualan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan rumus :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Penjualan}}$$

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan dari *software* IBM SPSS Statistics 20. Pengujian-pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengujian *Binary Logistic Regression*

Metode analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya (Ghozali, 2005).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan jenis regresi logistik binominal, karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan jenis data berskala nominal. Skala nominal adalah jenis data yang mensyaratkan kategori (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini berupa *dummy* yang diberikan angka 0 dan 1.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln [P/(1-P)]} = \alpha + \beta_1 \text{ DER} + \beta_2 \text{ ROA} + \beta_3 \text{ LO} + \beta_4 \text{ NPM} + \epsilon$$

- Ln : Log natural
- P : Probabilitas
- DER : Debt to equity ratio
- ROA : Rasio return on asset
- LO : Rasio leverage operasi (DOL)
- NPM : Net profit margin perusahaan

Selanjutnya dalam penelitian ini koefisien regresi logistik ditransformasikan dengan menggunakan pendekatan logit. Pendekatan logit merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Model log dari *odds* merupakan fungsi linear dari variabel bebas dan ekuivalen dengan persamaan *multiple regression* dengan log dari *odds* sebagai variabel dependen (Ghozali, 2005). Log dari *odds* sering disebut logit, maka persamaan regresinya disebut *multiple logistic regression* (Ghozali, 2005). Tanda matematik koefisien regresi tidak ikut berubah pada saat ditransformaikan. Persamaan regresi menjadi sebagai berikut:

$$[\text{P}/(\mathbf{1-P})] = e^{\alpha + \beta_1 \text{ DER} + \beta_2 \text{ ROA} + \beta_3 \text{ LO} + \beta_4 \text{ NPM} + \epsilon}$$

$$[\text{P}/(\mathbf{1-P})] = e^{\alpha} \times e^{\beta_1 \text{ DER}} \times e^{\beta_2 \text{ ROA}} \times e^{\beta_3 \text{ LO}} \times e^{\beta_4 \text{ NPM}} \times e^{\epsilon}$$

b. Pengujian Model

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai *Nagelkerke' R²* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R²* pada *multiple regression*. Dalam penelitian dinilai dengan *Nagelkerke' R²*.

b. Pengujian Model Fit

Pengujian model *fit* bertujuan untuk menilai *overall fit* model dengan data (Ghozali, 2005). Pengujian ini dapat menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka model yang digunakan dapat diterima.

c. Pengujian Hipotesis

Dengan menggunakan *level of significance* sebesar 5% maka kriteria yang digunakan untuk menerima hipotesis dalam penelitian ini adalah nilai signifikansi < 0,05.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat bagaimana karakteristik sampel yang diteliti dalam penelitian. Secara ringkas statistik deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif Perusahaan Manufaktur

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean
Indeks IS	52	7.80	.07	7.87	48.44	.9316
DER	52	10.86	.12	10.98	64.77	1.2455
ROA	52	51.62	.68	52.30	486.10	9.3480
LO	52	1331.02	-1093.20	237.81	-691.14	-13.2912
NPM	52	30.79	.01	30.80	44.95	.8644

Tabel IV.2
Statistik Deskriptif Perusahaan Non-Manufaktur

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean
Indeks IS	55	4.67	.14	4.82	48.35	.8790
DER	55	8.31	.00	8.31	53.11	.9656
ROA	55	28.33	.08	28.41	358.90	6.5255
LO	55	346.20	-241.46	104.75	101.40	1.8437
NPM	55	19.05	.00	19.05	33.67	.6122

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa sampel yang diteliti sebanyak 52 perusahaan. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai range, minimum, maksimum, sum dan rata-rata (mean). Variabel yang digunakan Indeks IS, Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Leverage Operasi (LO) dan Net Profit Margin (NPM).

Nilai minimum Indeks IS adalah 0,07 dan nilai maksimum Indeks IS adalah 7,87. Nilai rata-rata Indeks IS sebesar 0,9316. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 7,80 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 55 sampel Indeks IS yaitu sebesar 48,44.

Nilai minimum DER adalah 0,12 dan nilai maksimum DER adalah 10,98. Nilai rata-rata DER sebesar 1,2455. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 10,86 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 52 sampel DER yaitu sebesar 64,77.

Nilai minimum ROA adalah 0,68 dan nilai maksimum ROA adalah 52,30. Nilai rata-rata ROA sebesar 9,3480. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 51,62 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 52 sampel ROA yaitu sebesar 486,1.

Nilai minimum LO adalah -1093,20 dan nilai maksimum LO adalah 237,81. Nilai rata-rata LO sebesar -13,2912. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 1331,02 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 52 sampel LO yaitu sebesar -691,14.

Nilai minimum NPM adalah 0,01 dan nilai maksimum NPM adalah 30,80. Nilai rata-rata NPM sebesar 0,8644. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 30,79 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 52 sampel NPM yaitu sebesar 44,95.

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa sampel yang diteliti sebanyak 55 perusahaan. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai range, minimum, maksimum, sum dan rata-rata (mean). Variabel yang digunakan Indeks IS, Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Leverage Operasi (LO) dan Net Profit Margin (NPM).

Nilai minimum Indeks IS adalah 0,14 dan nilai maksimum Indeks IS adalah 4,82. Nilai rata-rata Indeks IS sebesar 0,8790. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 4,67 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 55 sampel Indeks IS yaitu sebesar 48,35.

Nilai minimum DER adalah 0,00 dan nilai maksimum DER adalah 8,31. Nilai rata-rata DER sebesar 0,9656. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 8,31 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 55 sampel DER yaitu sebesar 53,11.

Nilai minimum ROA adalah 0,08 dan nilai maksimum ROA adalah 28,41. Nilai rata-rata ROA sebesar 6,5255. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 28,33 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 55 sampel ROA yaitu sebesar 358,9.

Nilai minimum LO adalah -241,46 dan nilai maksimum LO adalah 104,75. Nilai rata-rata LO sebesar 1,8437. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 346,20 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 55 sampel LO yaitu sebesar 101,40.

Nilai minimum NPM adalah 0,00 dan nilai maksimum NPM adalah 19,05. Nilai rata-rata NPM sebesar 0,6122. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum

yaitu sebesar 19,05 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 55 sampel NPM yaitu sebesar 33,67.

2. Pengujian *Binary Logistic Regression*

Penelitian ini diuji menggunakan *binary logistic regression* yang bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut.

Tabel IV.3
Regresi Logistik Perusahaan Manufaktur

Variabel	B	df	Sig.	Exp(B)
DER	-.019	1	.960	.982
ROA	-.145	1	.030	.865
LO	-.003	1	.648	.997
NPM	.004	1	.987	1.004
Constan t	3.420	1	.002	30.564

Dari hasil pengujian regresi di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln \frac{p}{1-p} &= 3,420 - 0,19DER - 0,145ROA - 0,003LO + 0,004NPM \\ \frac{p}{1-p} &= e^{3,420-0,19DER-0,145ROA-0,003LO+0,004NPM} \\ &= e^{3,420} \times e^{-0,19DER} \times e^{-0,145ROA} \times e^{-0,003LO} \times e^{+0,004NPM} \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa *log of odds* perusahaan yang melakukan perataan laba secara positif berhubungan dengan NPM dan secara negatif berhubungan dengan DER, ROA, dan LO. Jika ROA, LO, dan NPM dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun dengan faktor 0,982 ($e^{-0,19}$) untuk setiap unit penurunan DER. Jika DER, LO, dan NPM dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun dengan faktor 0,865 ($e^{-0,145}$) untuk setiap unit penurunan

ROA. Jika DER, ROA, dan NPM dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun dengan faktor 0,997 ($e^{-0,003}$) untuk setiap unit penurunan LO. Sedangkan DER, ROA, dan LO dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba naik dengan faktor 1,004 ($e^{0,004}$) untuk setiap unit kenaikan NPM. Dilihat dari matrikulasi *cut off* 50% hasil *overall classification rate* sebesar 86,5%.

Tabel IV.4

Regresi Logistik Perusahaan Non-Manufaktur

Variabel	B	df	Sig.	Exp(B)
DER	.608	1	.238	1.837
ROA	-.032	1	.467	.968
LO	-.032	1	.291	.969
NPM	.003	1	.979	1.003
Constant	1.508	1	.008	4.520

Dari hasil pengujian regresi di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln } \frac{p}{1-p} &= 1,508 + 0,608\text{DER} - 0,032\text{ROA} - 0,032\text{LO} + 0,003\text{NPM} \\ \frac{p}{1-p} &= e^{1,508+0,608\text{DER}-0,032\text{ROA}-0,032\text{LO}+0,003\text{NPM}} \\ &= e^{1,508} \times e^{0,608\text{DER}} \times e^{-0,032\text{ROA}} \times e^{-0,032\text{LO}} \times e^{0,003\text{NPM}} \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa *log of odds* perusahaan yang melakukan perataan laba secara positif berhubungan dengan DER dan NPM, secara negatif berhubungan dengan ROA dan LO. Jika ROA, LO, dan NPM dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba naik dengan faktor 1,837 ($e^{0,608}$) untuk setiap unit kenaikan DER. Jika DER, LO, dan NPM dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun dengan faktor 0,968 ($e^{-0,032}$) untuk setiap unit penurunan ROA. Jika DER, ROA, dan NPM dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun dengan faktor 0,969 ($e^{-0,032}$) untuk setiap unit penurunan LO. Sedangkan DER, ROA, dan LO dianggap konstan, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba naik dengan faktor 1,003 ($e^{0,003}$) untuk setiap unit kenaikan NPM. Dilihat dari matrikulasi *cut off* 50% hasil *overall classification rate* sebesar 81,8%.

3. Pengujian Model

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini koefisien determinasi dinilai dengan Nagelkerke' R².

Tabel IV.5

Koefisien Determinasi Perusahaan Manufaktur

Step	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	.174	.301

Tabel IV.6

Koefisien Determinasi Perusahaan Non-Manufaktur

Step	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	.060	.098

Tabel IV.5 menunjukkan nilai Cox Snell's R Square sebesar 0,174 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,301 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 30,1%.

Tabel IV.6 menunjukkan nilai Cox Snell's R Square sebesar 0,060 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,098 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 9,8%.

b. Pengujian Model Fit

Hosmer and Lemeshow Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and Lemeshow Test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow Test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti model mampu memprediksi

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tabel IV.7
Pengujian Model Fit Perusahaan Manufaktur
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7.607	8	.473

Tabel IV.8
Pengujian Model Fit Perusahaan Non-Manufaktur
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	1.802	7	.970

Tabel IV.7 menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemeshow Test sebesar 7,607 dengan probabilitas signifikansi pada 0.473 yang nilainya di atas 0.05, maka model dikatakan fit dan model dapat diterima.

Tabel IV.8 menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemeshow Test sebesar 1,802 dengan probabilitas signifikansi pada 0.970 yang nilainya di atas 0.05, maka model dikatakan fit dan model dapat diterima.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Pengujian ini menggunakan *level of significance* sebesar 0,05 dalam membandingkan dengan hasil yang diperoleh. Berikut ini

adalah tabel IV.9 hasil dari pengujian hipotesis perusahaan manufaktur dan tabel IV.10 hasil dari pengujian hipotesis perusahaan non-manufaktur yang dilakukan dalam penelitian.

Tabel IV.9

Pengujian Hipotesis Perusahaan Manufaktur

Hipotesis	Variabel	S.E.	df	Sig.
H_{A1}	DER	.377	1	.960
H_{A2}	ROA	.067	1	.030
H_{A3}	LO	.007	1	.648
H_{A4}	NPM	.255	1	.987

Tabel IV.10

Pengujian Hipotesis Perusahaan Non-Manufaktur

Hipotesis	Variabel	S.E.	df	Sig.
H_{A1}	DER	.515	1	.238
H_{A2}	ROA	.044	1	.467
H_{A3}	LO	.030	1	.291
H_{A4}	NPM	.119	1	.979

Tabel IV.9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis perusahaan manufaktur bahwa variabel independen DER tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena DER perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,960. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurianto dan Gudono (2002) yang menemukan bahwa DER perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Variabel independen ROA perusahaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.030 yang menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan

bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Budhijono (2006), Sucipto dan Purwaningsih (2007), serta Herni dan Susanto (2008).

Variabel independen LO tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena LO perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,648. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Budhijono (2006), Sucipto dan Purwaningsih (2007) yang menyatakan bahwa LO perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Variabel independen NPM tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena NPM perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,987. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salno dan Baridwan (2000) yang menyatakan bahwa NPM perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Tabel IV.10 menunjukkan hasil pengujian hipotesis perusahaan non-manufaktur bahwa variabel independen DER tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena DER perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,238. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurianto dan Gudono (2002) yang menemukan bahwa DER perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Variabel independen ROA tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena ROA perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,467. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhroh (1996), Jin dan Mahfoedz (1998) serta Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005) yang menyatakan bahwa ROA perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Variabel independen LO tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena LO perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,291. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi

0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Budhijono (2006), Sucipto dan Purwaningsih (2007) yang menyatakan bahwa LO perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Variabel independen NPM tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena NPM perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,979. Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salno dan Baridwan (2000) yang menyatakan bahwa NPM perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemisahan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang tidak melakukan perataan laba dilakukan dengan menggunakan Indeks Eckel. Berdasarkan analisis *logistic regression* yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik perataan laba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. DER tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena DER perusahaan manufaktur dan non-manufaktur memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,960 dan 0,238. DER perusahaan manufaktur memiliki koefisien regresi sebesar -0,19 yang menyatakan bahwa setiap 1% penurunan DER, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun sebesar 0,982%. DER perusahaan non-manufaktur memiliki koefisien regresi sebesar 0,608 yang menyatakan bahwa setiap 1% kenaikan DER, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba naik sebesar 1,837%. Artinya semakin besar nilai DER, maka perusahaan semakin terindikasi melakukan perataan laba.
- b. ROA perusahaan manufaktur mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.030 yang menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Sebaliknya, ROA perusahaan non-manufaktur tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba karena memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,467 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhroh (1996), Jin dan Mahfoedz (1998) serta Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005). ROA perusahaan manufaktur dan non-manufaktur memiliki koefisien regresi sebesar -0,145 dan -0,032 yang menyatakan

bahwa setiap 1% penurunan ROA, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun sebesar 0,865% dan 0,968%. Koefisien regresi ROA yang negative, dapat diartikan bahwa semakin rendah ROA perusahaan maka semakin besar kemungkinan terjadinya praktek perataan laba.

- c. LO tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena LO perusahaan manufaktur dan non-manufaktur memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,648 dan 0,291. LO perusahaan manufaktur dan non-manufaktur memiliki koefisien regresi sebesar -0,003 dan -0,032 yang menyatakan bahwa setiap 1% penurunan LO, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun sebesar 0,997% dan 0,969%.
- d. NPM tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada signifikansi 0,05, karena NPM perusahaan manufaktur dan non-manufaktur memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,987 dan 0,979. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salno dan Baridwan (2000) dan Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005). NPM perusahaan manufaktur dan non-manufaktur memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 dan 0,003 yang menyatakan bahwa setiap 1% Kenaikan NPM, maka *odds* perusahaan melakukan perataan laba turun sebesar 1,004% dan 1,003%. Artinya semakin besar nilai NPM, maka perusahaan semakin terindikasi melakukan perataan laba.

2. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan perhatian untuk penelitian mendatang.

- a. Sampel yang digunakan hanya sebanyak 107 perusahaan dengan fokus pada BEI (IDX) dan ICMD sebagai populasi dan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu 2008-2010.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan variabel DER, ROA, LO dan NPM.

3. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka pada penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ini:

- a. Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar diperoleh hasil pengujian yang lebih akurat.
- b. Untuk penelitian yang akan datang, dapat menggunakan variabel lain seperti harga saham, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan resiko industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanza, Arya Hagaganta. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba (Income Smoothing)*. Skripsi, Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Ashari, N., Koh H.C., Tan S.L., dan Wong W.H. 1994. *Factors Affecting Income Smoothing Among Listed Companies in Singapore*, Journal of Accounting and Business Research. Autumn, 291-304.
- Assih, P. dan M. Gudono. 24-25 September 1999. *“Hubungan Tindakan Perataan Laba Dengan Reaksi Pasar Atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”*. Simposium Nasional Akuntansi II, Malang: Universitas Brawijaya.
- Barnea, A.J. Ronen, and S. Sadan, (1975), *“Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items”*. The Accounting Review, pp.110-122.
- Beidleman C.R., October. 1973. *Income Smoothing: The Role of Management*. The Accounting Review, Vol. 48, No. 4, pp. 653-667.
- Brayshaw, R.E., dan Ahmed E. K. Eldin. 1989. *“The Smoothing Hypothesis and The Role Of Exchange Differences”*. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 16, No. 5, Page 621-633.
- Budiasih, Igan. Januari. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba*. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 4, No. 1, Hal. 44-50.
- Dye, R. 1988. *“Earnings Management in an Overlapping Generations Model”*. Journal of Accounting Research, Autumn.
- Eckel, N., Juny. 1981. *The Income Smoothing Hypothesis Rensited*. Abacus, Vol. 17, No. 1, pp. 28-40.
- Foster. 1986. *Financial Statement Analysis*. Englewood, New Jersey: Prentice Hall International.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Healy, P.M. 1985. *"The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions"*. Journal of Accounting and Economics, pp. 85-107.
- Hector, G. (1989). *Cute Tricks on The Bottom Line*. Fortune: pp. 195,196 and 200.
- Hepworth , S.R. 1953. *"Smoothing Periodic Income"*. The Accounting Review, Vol. 28 (1), Hal. 32-39.
- Ilmainir. 1993. *Perataan Laba Dan Faktor-Faktor Pendorongnya Pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Tesis S2, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Jensen, Michael C. dan Willian H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs an Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, Vol.3, No.4, pp. 305-360.
- Jin, Liauw She dan Mas'ud Machfoedz. 1998. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 1, No. 2, Hal. 174-191.
- Juniarti dan Corolina. 2005. *Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan-Perusahaan Go Public*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No. 2, Hal. 148-162.
- Kirschenheither, M. & N. Melumad. 2002. *"Can "Big Bath" dan Earnings Smoothing Co-exist as Equilibrium Financial Reporting Strategies"*. Journal of Accounting Research. 40 (3).
- Koch S. Cruce. 1981. *"Income Smoothing: An Experimnet"*. The Accounting Review, Vol. 56 (3). Hal 574-586.
- Poll, V. D. (2004). *The Role of Book Entries in Income Smoothing and Big Bath*. <http://www.unpetd.up.ac.za/thesis/available/etd03032004115957/unrestricted/04chapter.pdf>.
- Ratnasari, Dhiar. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2010*. Skripsi, Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, Yacob Suparno dan Nurul Qomariyah. 2006. *Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di BEJ*. SNA IX, Padang.
- Salno, Hanna Meilani dan Zaki Baridwan. Januari. 2000. *Analisis Perataan Penghasilan (Income Smoothing): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 3, No. 1, Hal. 17-34.
- Scott, Wiliam R. (2000). *Financial Accounting Theory Edisi 3*. Toronto, Ontario: Prentice Hall USA.

- Smith, E. 1976. *The Effect of The Separation of Ownership from Control on Accounting Policy Decisions*. The Accounting Review, Vol. 51 (4), Hal. 707-723.
- Sumtaky, Olivia M. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. Skripsi, Malang: FE Universitas Brawijaya.
- Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Perusahaan Yang Terdaftar Di BEJ*. SNA VIII, Solo.
- Syahriana, Nani. 2006. **Analisis Perataan Laba Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEJ (2000 – 2004)**. Skripsi, Yogyakarta: UII
- Trueman, B. dan Tritman, S. “*An Explanation for Accounting Income Smoothing*”. Journal of Accounting Research, Supplement, 127-143.
- Weston dan E. Copeland. 1996. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Yusuf, Muhammad dan Soraya. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Asing dan Non Asing di Indonesia*. JAAI, Vol. 8, No. 1, Hal. 99-125.
- Zuhroh, Diana. (1997). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Tindakan Perataan Laba pada Perusahaan Go Publik di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi I.
- Zulaikha dan Ratih Kartika Dewi. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan Manufaktur dan Keuangan Yang Terdaftar di BEI (2006-2009)*. Artikel, Semarang: Universitas Diponegoro.

RPSEP-72

PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP ANGGARAN KINERJA DI PROVINSI BANTEN

Rakhmini Juwita, SE,M.Si
Universitas terbuka
Galuh Tresna Murti, SE, M.Si
Politeknik LP3i Bandung
rakhmini@ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran kinerja terhadap audit internal di Propinsi Banten. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatory merupakan survey terhadap 8 kabupaten/ kota dan 1 propinsi di Provinsi Banten. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey menggunakan instrument. Analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja memiliki pengaruh yang moderat dan positif terhadap audit internal.

Kata Kunci: audit internal dan anggaran kinerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memiliki program dan tujuan kerja yang telah ditentukan pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut disusunlah berbagai program kerja yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah dan melibatkan seluruh sumber daya dalam pemerintah daerah termasuk sumber daya keuangan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009:61). Pelaksanaan anggaran sektor publik di Negara Indonesia menggunakan sistem anggaran kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan prosedur dan mekanisme yang ditujukan untuk peningkatan efisiensi pengalokasian dan produktivitas dalam pembiayaan sektor publik dengan memperkuat hubungan antara anggaran/dana (yang tersedia untuk berbagai kepentingan/urusan sektor publik) dengan hasil dan/atau keluaran melalui penggunaan informasi kinerja (pengukuran kinerja) dalam pembuatan keputusan alokasi sumber daya yang ada.

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan dan memastikan semua program atau kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu fungsi audit internal atas pelaksanaan anggaran. Audit internal merupakan operasional kebijakan dan prosedur yang diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja pada unit pemerintahan. Kesuksesan implementasi audit internal akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Audit internal memiliki tugas untuk menilai apakah sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan berjalan dengan baik serta setiap bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Anggaran Kinerja di Propinsi Banten”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pelaksanaan Audit Internal terhadap Anggaran Kinerja di Provinsi Banten.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap anggaran kinerja di Propinsi Banten.

KAJIAN LITERATUR

Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (2004) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan Lembaga Negara dan BUMN/BUMD , Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah

Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Mardiasmo, 2009:193)

Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses *governance* (SPAI, 2004:9)

Menurut Soekrisno Agus (2004:222) berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, yang tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen maka tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Menurut *The Institute Of Internal Auditor* (2012) kegiatan audit internal harus dilakukan secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan *stakeholder*. Kegiatan audit internal dilakukan sebagai berikut:

1. *Planning/* Perencanaan.

Pimpinan audit harus menetapkan rencana audit berdasarkan risiko untuk menentukan prioritas kegiatan audit internal, sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan audit internal harus berdasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi, yang dilakukan setiap tahun. Masukan dari manajemen dan dewan harus dipertimbangkan

2. *Communication and Approval/* Komunikasi dan Persetujuan

Pimpinan audit harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan sementara yang signifikan, kepada pimpinan organisasi dan Dewan untuk diperiksa dan disetujui. Pimpinan audit harus mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya.

3. *Resource Management/* Pengelolaan Sumber Daya

Pimpinan audit harus memastikan bahwa sumber daya audit internal adalah tepat, cukup, dan secara efektif dikerahkan untuk mencapai rencana yang telah disetujui. Kesesuaian sumber daya berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sumber daya digunakan secara efektif dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan rencana

4. *Policies and Procedures/ Kebijakan dan Prosedur*

Pimpinan audit harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan aktivitas audit internal.

5. *Coordination/ Koordinasi*

Pimpinan audit harus berbagi informasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan auditor untuk memastikan kegiatan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan

6. *Reporting to Senior management and the board/ Pelaporan ke Pimpinan Manajemen dan Dewan*

Pimpinan audit harus melaporkan secara berkala kepada pimpinan manajemen dan dewan sesuai tujuan kegiatan audit internal, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja sesuai rencana. Pelaporan juga harus mencakup pengungkapan risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko penipuan, isu-isu pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh pimpinan manajemen dan dewan

Anggaran Kinerja

Pendekatan anggaran kinerja merupakan perbaikan dari sistem anggaran tradisional yang memiliki kelemahan yaitu berorientasi pada input saja, kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi, tidak memberikan informasi kinerja sehingga pengendalian kinerja menjadi sulit (Indra Bastian, 2010: 195)

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:84)

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur anggaran kinerja menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber; dana, sumber daya manusia, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- 2) Keluaran (*output*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan
- 3) Hasil (*outcome*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil
- 5) Dampak (*impact*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan sangat berkaitan erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur ini diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran sebagai alat manajemen (Indra Bastian, 2010:202).

Menurut Robinson (2007) ada 4 mekanisme mendasar dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu:

- 1) Program penganggaran, menggunakan informasi biaya dan manfaat yang bertujuan untuk prioritas pengeluaran
- 2) Pendanaan yang terkait dengan hasil kinerja yang menghubungkan tingkat hasil target yaitu dari output dan/ atau hasil yang diharapkan dari lembaga
- 3) Insentif anggaran kinerja di lembaga dapat memotivasi lembaga untuk melakukan lebih baik dengan memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki kinerja baik secara finansial (juga memberikan sanksi finansial dengan kinerja yang tidak memuaskan).
- 4) Rumus pendanaan yaitu dari input dana yang ada mendapat hasil yang diharapkan dan/ atau nyata (output atau hasil).

Siklus anggaran kinerja menurut Shah dan Cullin (2007) adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan anggaran, anggaran mencakup indikator-indikator kinerja untuk memperlihatkan tingkat kinerja yang diinginkan; individu/ lembaga pelayanan dapat

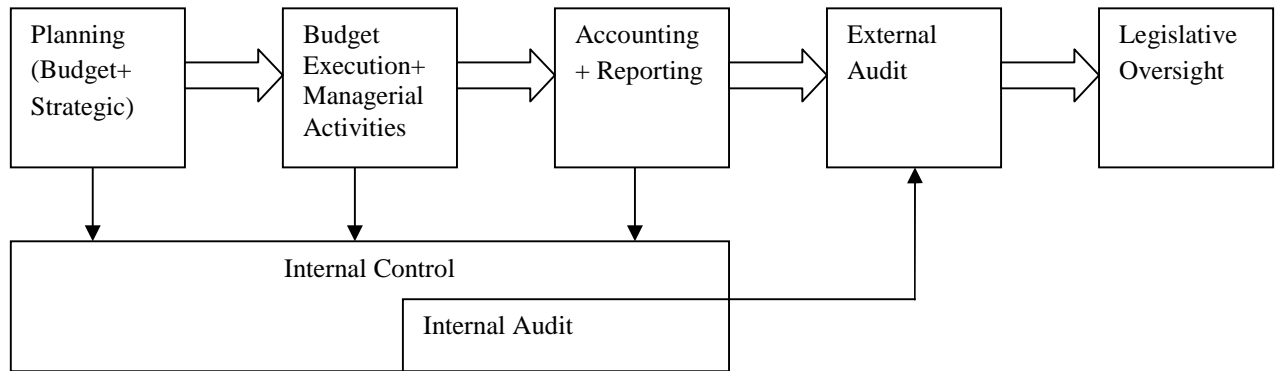
- menggunakan indikator tersebut untuk menunjukkan prestasi lembaga di masa lalu dan membantu estimasi pengajuan anggaran lembaga
2. Pada tahap pelaksanaan anggaran, pimpinan dapat menggunakan indikator kinerja untuk memperjelas tujuan organisasi, pengawasan terhadap pencapaian tujuan, dan menemukan masalah operasional. Saat informasi kinerja yang tersedia sudah merata, maka akan memberikan standar bagi pimpinan organisasi untuk membandingkan kinerja dari waktu ke waktu
 3. Dalam evaluasi anggaran dan audit, adanya informasi indikator kinerja tentang dana yang dianggarkan untuk membantu para pembuat kebijakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program pemerintah

Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi utama internal audit adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sektor publik meliputi seluruh kebijakan dan prosedur pemerintah dan manajemen entitas sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sumber daya. Pengendalian utama pada sektor publik yaitu pengendalian dalam sistem pengelolaan keuangan Negara yang meliputi strategi perencanaan anggaran, kegiatan manajerial (pengadaan, utang publik dan asset manajemen), akuntansi dan pelaporan, audit internal dan eksternal, dan pengawasan legislatif (Asere,2009:21).

Menurut Baltaci & Yilmaz (2006:15) Pengendalian internal dan audit merupakan komponen utama dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pemerintah daerah. Fungsi pengendalian internal dan audit mendukung proses desentralisasi fiskal dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, memastikan alokasi sumber daya publik sesuai dengan prioritas rakyat dan mendukung *fiscal agregat*. Tujuan dari audit internal yaitu untuk menambah nilai kegiatan dan meningkatkan struktur pengendalian organisasi. Audit internal juga sebagai alat untuk menilai sejauhmana pemerintah dalam melaksanakan anggaran untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Pelaksanaan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui sistem anggaran kinerja yang memiliki tolok ukur dalam pengukuran *input, output dan outcome*.

Gambar Siklus Manajemen Keuangan Publik



Sumber : Baltaci & Yilmaz (2006)

Fungsi audit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan pemerintah dan alat untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Pentingnya *good governance* dan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dalam penggunaan dana publik dan efisiensi dalam penyampaian layanan sehingga membutuhkan audit internal untuk membantu pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, digunakan lebih efisien dan juga efektif dalam menangani risiko manajemen (Asere, 2009:23).

Menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- 1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 2) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- 3) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme.
- 5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

Hal tersebut jelas bahwa Audit internal mempengaruhi keberhasilan atas implementasi anggaran berbasis kinerja, karena audit internal menilai atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam anggaran kinerja. Dengan adanya audit internal dalam pemerintah maka implementasi anggaran kinerja berjalan secara maksimal dan dapat meningkatkan *good governance*.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan audit internal dan anggaran kinerja

Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pelaksanaan audit internal dan anggaran kinerja. Dalam penelitian ini pelaksanaan audit internal merupakan variabel independen sedangkan anggaran kinerja merupakan variabel dependen

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka operasional variabel penelitian perlu ini didefinisikan terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan kuisisioner. Definisi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel *Independen* (X)

Implementasi Audit Internal (X2). Untuk mengukur variabel implementasi audit internal dalam penelitian ini menggunakan standar pelaksanaan kegiatan audit internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (2012) dan disesuaikan dengan standar Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) yaitu sebagai berikut:

- (1) Perencanaan. Dengan indikator sebagai berikut: (a) adanya penetapan rencana audit berdasarkan resiko setiap tahun, (b) penentuan tujuan dan lingkup audit, (c) menyusun program kerja untuk mencapai sasaran penugasan.
- (2) Komunikasi dan Persetujuan, dengan indikator sebagai berikut: (a) komunikasikan rencana kegiatan audit internal dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan manajemen, (b) adanya persetujuan program kerja audit dari pimpinan manajemen
- (3) Pengelolaan Sumber Daya, dengan indikator sebagai berikut: (a) menentukan sumberdaya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, (b) sumber daya digunakan secara efektif dan mendapatkan hasil yang optimal
- (4) Kebijakan dan Prosedur. Pimpinan audit harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan aktivitas audit internal.
- (5) Koordinasi. Pimpinan audit harus berbagi informasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan auditor untuk memastikan kegiatan yang tepat dan meminimalkan duplikasi kegiatan
- (6) Pelaporan ke Pimpinan Manajemen dan Dewan, Dengan indikator sebagai berikut: (a) melaporkan kegiatan audit secara berkala kepada pimpinan manajemen, (b) pelaporan juga

harus mencakup pengungkapan risiko dan masalah pengendalian, (c) laporan berisi penjelasan tentang tujuan audit, ruang lingkup, pertanyaan, prosedur umum, temuan, dan rekomendasi

(7) Pemantauan tindak lanjut, dengan indikator sebagai berikut: (a) adanya tindak lanjut manajemen terhadap tanggapan audit, (b) penanggungjawab fungsi audit internal memeriksa kembali auditi untuk melihat apakah tindakan korektif telah dilakukan dan hasil yang diharapkan tercapai, atau manajemen telah menerima tanggung jawab tidak mengambil tindakan korektif.

2. Variabel Dependen (Y)

Sering disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008: 59). Dalam kaitannya dengan masalah ini maka yang menjadi variabel dependennya yaitu pelaksanaan anggaran kinerja. Untuk mengukur variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini menggunakan teori tahapan dalam anggaran kinerja yang baik menurut Shah dan Cullin (2007) dan disesuaikan dengan teori dari karakteristik anggaran kinerja oleh Robinson (2007) dan Young Richard (2003) yaitu sebagai berikut:

- (1) Perencanaan Anggaran, dengan indikator: (a) anggaran dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuan unit kerja, (b) anggaran dibuat berdasarkan informasi biaya dan manfaat yang bertujuan untuk prioritas pengeluaran, (c) adanya Penetapan indikator kinerja dalam anggaran, (d) adanya penyesuaian program/ kegiatan untuk mengurangi kesenjangan kinerja, (e) anggaran dibuat berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia
- (2) Pelaksanaan Anggaran, dengan indikator: (a) adanya pengukuran *input*, (b) adanya pengukuran *output*, (c) adanya pengukuran *outcome*, (d) adanya pengawasan terhadap pencapaian tujuan
- (3) Evaluasi dan Pelaporan Anggaran, dengan indikator: (a) adanya informasi indikator kinerja dan tentang dana yang dianggarkan, (b) adanya evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program

Sumber dan Teknik pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada Bappeda dan DPPKD dan Inspektorat pemerintah daerah di lingkungan Propinsi Banten.

Analisis Regresi Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal.

PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh angka koefisien jalur = 0,558 dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik Implementasi Audit Internal (X) maka akan semakin baik pula Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y).

Dari nilai R implementasi audit internal terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,558, didapat besarnya pengaruh langsung adalah 31,1% yang artinya menurut kategori Guilford pengaruh tersebut moderat. Masih ada 68.9% atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X yang tidak diteliti. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan statistika dengan menggunakan SPSS.

Tabel Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 ^a	.311	.268	2.42435

a. Predictors: (Constant), X

Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa implementasi audit internal yang lebih baik mampu mendorong Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik. Berdasarkan kontribusi pengaruhnya terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, implementasi audit internal menyumbangkan pengaruh sebesar 31.1%, (arah pengaruh positif), yang diperoleh sebagai nilai kuadrat dari nilai $R = 0,558$. Maknanya bahwa sumbangan 31.1% variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dijelaskan oleh variabel implementasi audit internal dan sisanya (epsilon) sebesar 68.9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Menurut kategori Guilford pengaruh yang diberikan implementasi audit internal ini masuk dalam kategori moderat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja selain implementasi audit internal menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ BPKP

(2005:29) adalah (1) kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, (2) fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, (3) sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang), (4) penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas, (5) keinginan yang kuat untuk berhasil. Kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi sehingga apabila kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi baik maka implementasi anggaran berbasis kinerja dapat dijalankan dengan baik. Penyempurnaan administrasi secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran kinerja. Sumberdaya yang cukup juga merupakan hal utama dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran kinerja, apabila sumberdaya yang tersedia tidak mencukupi maka anggaran kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik. *Reward* dan *Punishment* merupakan metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan yang terbaik, sehingga apabila anggaran kinerja dilakukan organisasi dengan baik maka akan mendapatkan *reward*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka pengujian yang dilakukan oleh penulis mendukung teori yang telah dikemukakan oleh Asere (2009) yang menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama internal audit adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sektor publik meliputi seluruh kebijakan dan prosedur pemerintah dan manajemen entitas sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sumber daya. Pengendalian manajemen dapat dikatakan sebagai pengendalian internal. Pengendalian internal utama pada sektor publik yaitu pengendalian dalam sistem pengelolaan keuangan Negara meliputi strategi perencanaan anggaran”, perencanaan anggaran tersebut salah satunya menggunakan sistem anggaran kinerja. Sehingga dengan adanya audit internal akan meningkatkan pelaksanaan anggaran kinerja yang semakin baik dalam organisasi, karena audit internal merupakan alat pengendalian internal dalam operasional organisasi. Sejalan yang dikatakan oleh Baltaci & Yilmaz (2006:11) yang menyatakan tujuan dari audit internal untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan dan struktur pengendalian organisasi. Audit internal merupakan alat untuk menilai sejauhmana pemerintah dan pihak yang terkait dalam melaksanakan anggaran dan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Semua unsur dalam dimensi implementasi audit internal akan mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh instansi. Sehingga jika semua permasalahan dalam seluruh dimensi pelaksanaan audit internal telah dibenahi, maka akan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang semakin baik pula.

Oleh karena itu peran auditor sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan audit internal tersebut, karena audit internal dilakukan untuk menilai keberhasilan dalam program/kegiatan yang tertuang dalam anggaran suatu organisasi.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi audit internal masih belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang baik dan harus ditingkatkan lagi dalam berbagai aspeknya, moderat bukan berarti bahwa pelaksanaan audit internal yang telah dimiliki selama ini tidak baik, namun untuk mendukung kegiatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang baik memang harus ada beberapa dimensi yang harus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Implementasi Audit Internal mempunyai pengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja di Propinsi Banten. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa implementasi audit internal yang lebih baik mampu meningkatkan pelaksanaan prinsip anggaran kinerja yang lebih baik. Sedangkan faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja antara lain kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang), penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas, keinginan yang kuat untuk berhasil

DAFTAR PUSTAKA

Asere Thomas, 2009. *Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good Governance and Performance Improvement*. The International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM) Volume IX number 1

- Baltaci, M. & Yilmaz, S. (2006), *Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and Audit at Local Levels*, World Bank Publications
- Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga, Jakarta
- Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal, 2004. *Standar Profesi Auditor Internal (SPAI)*. Jakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik –Ed IV.- (2009)*, ANDI, Yogyakarta
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan Dan Perhitungan APBD.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Robinson M. (ed.), 2007, *Performance Budgeting. Linking Funding and Results*, IMF, Washington D.C.
- Shah Anwar, Cunli Shen, 2007. Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Dalam Anwar Shah (penyunting). *PUBLIC SECTOR GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY SERIES LOCAL BUDGETING*. Hal 151-178. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC
- Soekrisno Agoes, 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga*. Jilid II (cetakan Ke 5 2009). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2004. *THE PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK*. Florida. ISBN 0-89413-544-9 04314 04/04
- The Institute Of Internal Auditor, 2012. *THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS)*.
- Young, Richard. D. *Performance Based Budget System*. Public Policy & Practices January 2003. USC INSTITUTE FOR PUBLIC SERVICE AND POLICY RESEARCH

RPSEP-73

PENGARUH KINERJA ZAKAT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Amelia Rizky Alamanda S.E, M.Ak, BKP
rizky.khansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja zakat terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* pada bank umum syariah periode 2007-2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan, laporan zakat, dan laporan pelaksanaan GCG yang dipublikasikan melalui website masing-masing bank syariah yang menjadi sampel selama tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga bank umum syariah. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*.

Kata kunci : Kinerja Zakat, Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of zakah performance on Corporate Governance Disclosure of Islamic Banks in Indonesia in the 2007-2013 periode. The research was conducted using secondary data from annual reports, charity reports, and report on the implementation of Corporate Governance, published through the website of each Islamic bank to be sampled during 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, and 2013. Samples used in this study only eight Islamic banks. Sampling was done by purposive sampling method. Secondary data were then analyzed using multiple regression. The results showed that zakah performance influence negatively on corporate governance disclosure.

Key words: zakah performance, corporate governance disclosure

PENDAHULUAN

Di tengah fenomena tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah (*Islamic Bank*) terdapat upaya mewujudkan *good corporate governance* pada bank syariah. Beberapa pakar berpendapat bahwa tanpa sebuah mekanisme *good corporate governance* yang efektif perbankan syariah tidak akan tumbuh dan berkembang secara sehat. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang

melibatkan spektrum *stakeholders* yang sedemikian luas, perbankan syariah dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan tingkat pengungkapan (*level of disclosure*) yang tinggi atas kinerja operasinya. Dengan demikian, terjadinya kesenjangan informasi (*information asymmetry*) dapat diminimalisasi (Ilyas, 2004).

Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. UU no. 10 Tahun 1998 merupakan regulasi pertama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini bertambah pesat dengan hadirnya Bank Syariah Mandiri sebagai bank umum syariah kedua setelah Bank Muamalat Indonesia dan disusul dengan berdirinya Bank Mega Syariah Indonesia. Undang-undang perbankan syariah juga telah resmi mengatur seluruh operasional perbankan syariah yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008.

Perkembangan bank syariah juga diikuti dengan tuntutan pelaksanaan *good corporate governance* dan pengungkapannya bagi pengguna laporan tahunan. Perlunya pengungkapan *good corporate governance* bank syariah tidak lain karena beberapa alasan para ahli yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut untuk tujuan transparansi. Camfferman dan Cooke (2002) meneliti pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Inggris dan Belanda. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui perbedaan sistem pengaturan pasar modal, regulasi perusahaan, mekanisme *good corporate governance* pada masing-masing negara. Ditemukan oleh keduanya bahwa Belanda memiliki pendekatan yang lebih tidak ketat dibandingkan Inggris. Penelitian mengindikasikan bahwa pengungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme *good corporate governance* dan kualitas ataupun tingkatan *good corporate governance* suatu negara secara umum.

Wacana *good corporate governance* telah banyak diteliti di berbagai negara. Namun, penelitian tentang pengungkapan *good corporate governance* pada perbankan syariah belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan industri perbankan syariah masih sangat hijau dan belum memiliki permasalahan yang terlalu kompleks. Namun, agar perbankan syariah semakin memiliki daya tawar di dalam industri keuangan global, penulis merasa perlu adanya upaya lebih bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan *good corporate governance* dengan keunikan perbankan syariah yang harus patuh pada aturan syariah. Pendapat ini mendukung pernyataan Algoud dan Lewis (1999) bahwa bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang selanjutnya diikuti oleh mekanisme *good corporate governance* pada lembaga tersebut.

Salah satu keunikan dari perbankan syariah adalah bagaimana sebuah bank syariah dapat berpengaruh kepada sektor sosial. Bank syariah tidak hidup dan berkembang hanya untuk *profit*, tapi untuk membangun kemaslahatan umat. Dan zakat merupakan salah satu alat yang digunakan perbankan syariah untuk melakukan hal itu. Walaupun masih ada perbedaan pendapat, apakah sebuah lembaga wajib untuk membayar zakat. Namun zakat merupakan bentuk kontrol sosial terhadap perilaku manusia untuk lebih peka kepada sesamanya. Bank syariah, sebagai lembaga formal dan legal memiliki peran sosial yang sangat besar melalui mekanisme zakat. Sebuah studi mengatakan bahwa melalui mekanisme zakat inilah yang menjadi pertimbangan investor untuk menginvestasikan dananya. Karena zakat, dalam perbankan syariah merupakan metafora amanah. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (*profit-oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stakeholder-oriented*), tetap berorientasi pada zakat (*zakah-oriented*). Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai ‘angka’ pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja perusahaan, tapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan (Triyuwono).

METODOLOGI

Metode Pemilihan Sampel

Penulis menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini yang merupakan metode pengambilan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria bank yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang tergolong dalam Bank Umum Syariah
2. Melaporkan pelaksanaan *good corporate governance* sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan dipublikasikan selama tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013
3. Membuat laporan keuangan dan laporan zakat yang dipublikasikan selama tahun 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel Luas Pengungkapan *Good*

Corporate Governance. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan standar pengungkapan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tentang pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah.

Model pengisian indeks pengungkapan GCG untuk setiap bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Metode Pengisian Indeks Pengungkapan GCG

Bank Syariah A Tahun xxx	
Disclosure Items	Disclosure Scores (0=tidak diungkap)
	1=Pengungkapan informasi sekilas
	2=Pengungkapan terperinci (Gambar, tabel, diagram/penjelasan kuantitatif dan kualitatif)
1. Kesimpulan dari hasil self assessment atas pelaksanaan corporate governance Bank Umum Syariah	
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan lembar saham pada BUS yang bersangkutan.	
3. Kepemilikan saham anggota direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan lembar saham pada BUS yang bersangkutan, bank	

lain atau perusahaan yang lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.	
4. Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi BUS.	
5. Hubungan keuangan anggota anggota direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi lain.	
6. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi BUS	
7. Hubungan keluarga anggota anggota direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi lain.	
8. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain atau lembaga lain.	

<p>9. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.</p>	
<p>10. Struktur komite, keanggotaan, dan keahlian anggota.</p>	
<p>11. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS. Pengungkapan mengenai konsultan paling kurang mencakup nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerja.</p>	
<p>12. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah</p>	
<p>13. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah</p>	
<p>14. Frekuensi rapat Dewan Komisaris Pengungkapan mengenai frekuensi rapat dewan komisaris paling kurang mencakup :</p>	

<p>1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2) Tingkat kehadiran masing-masing anggota yang diselenggarakan masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.</p>	
<p>15. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>Pengungkapan mengenai rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, paling kurang :</p> <p>1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2) Tingkat kehadiran masing-masing anggota yang diselenggarakan masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.</p>	
<p>16. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian</p>	

<p>oleh BUS.</p> <p>Pengungkapan mengenai internal fraud paling kurang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan 2) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank 3) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya 4) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum 	
<p>17. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya oleh BUS. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 2) Jumlah permasalahan hukum 	
<p>18. Transaksi yang</p>	

mengandung benturan kepentingan	
19. Buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS	
20. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana.	
21. Pendapatan non halal dan penggunaannya. Pengungkapan mengenai non halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nilai, dan penggunaannya.	

Sumber : Diolah dari Botosan (1997)

Adapun untuk indeks Luas Pengungkapan *Good Corporate Governance* masing-masing bank syariah dihitung dengan cara membandingkan jumlah rata-rata skor aktual perusahaan dengan jumlah skor maksimal yang dapat diperoleh perusahaan (Haniffa dan Hudaib, 2004).

$$ILP = \frac{\text{Total skor yang diungkapkan bank syariah}}{\text{skor maksimum yang dapat diperoleh}}$$

Variabel Independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa kinerja zakat. Karena zakat merupakan tujuan dari akuntansi Islam dan salah satu ukuran kinerja perbankan syariah. Dalam penelitian ini, kinerja zakat diproksikan dengan perbandingan zakat terhadap total aset yang dirumuskan sebagai berikut (Shahul Hameed) :

$$ZKTA = \frac{\text{Zakat}}{\text{Total Aset}}$$

Teknik Analisis Data

Metode statistik yang digunakan adalah statistik parametrik, yang meliputi statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F, dan uji t dengan asumsi bahwa data terdistribusi normal. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) Versi 22*.

Berikut diuraikan metode statistik parametrik yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006:19)

Uji Hipotesis. Parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal. Sedangkan non parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan tidak normal. Salah satu jenis dari uji parametrik adalah uji regresi. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji pengaruh simultan (F test), dan uji parsial (t test).

Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Adapun model dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana :

Y : Luas Pengungkapan Corporate Governance

a : konstanta persamaan regresi

β_1 : Kinerja Zakat (Variabel Independen)

Hipotesis. Hipotesis mayor penelitian ini adalah : “Kinerja Zakat mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia ”. Adapun hipotesis minor dalam penelitian ini adalah : artinya dinyatakan “cocok” atau ‘fit” jika hipotesis nol diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LPn	53	.380952	.909524	.69478311	.158117472
ZKTA	53	.000000	.005667	.00063328	.001295111
Valid N (listwise)	53				

Variabel kinerja zakat yang diproksikan dengan ZKTA menunjukkan nilai maksimum 0.005667 dan nilai minimumnya sebesar 0.0000 dari jumlah data yang digunakan (N) sebanyak 53. Dari N= 53 tersebut diperoleh rata-rata untuk variabel ini sebesar 0.000633328 dengan standar deviasi 0.001295111. Sementara variabel Luas Pengungkapan *Corporate Governance* yang diproksikan dengan LPn menunjukkan nilai maksimum 0.909524 dan nilai minimumnya sebesar 0.380952 dari jumlah data yang digunakan (N) sebanyak 53. Dari N=53 tersebut diperoleh rata-rata untuk variabel ini sebesar 0.69478311 dengan standar deviasi 0.158117472.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beta *standardized coefficient*. Keuntungan menggunakan nilai *beta standardized coefficient* adalah mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen (Ghazali, 2006:92). Karena pada penelitian ini terdapat perbedaan satuan ukuran pada variabel independen yang digunakan dalam model regresi, maka pada penelitian ini nilai beta *Standardized Coefficient* digunakan dalam menentukan persamaan regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.596	.293		2.034	.0001
ZKTA	-39.973	28.649	-.336	-1.395	.0001

a. Dependent Variable: LPn

Dari hasil perhitungan dan regresi linear berganda pada tabel di atas, dapat diketahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$LPn = -0.336ZKTA + e$$

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel luas pengungkapan *Good Corporate Governance*. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Luas Pengungkapan GCG (LPn). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.716 ^a	.672	.520	.132719946	1.834

a. Predictors: (Constant), ZKTA,

b. Dependent Variable: LPn

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2006:87). Dari tabel koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,716. Hal ini berarti bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 71,6%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat.

Besarnya adjusted R^2 adalah 0,52. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 52%, sedangkan sisanya 48% diterangkan oleh faktor-faktor di luar model regresi yang dianalisis.

Pembahasan

Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara. Menurut Qardhawi ditegaskan : “.....bagian ibadah Islam yang pokok itu, adalah salah satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam”. Ibadah zakat, itulah yang dimaksud Yusuf Qardhawi. Dengan demikian jelas, bahwa upaya menemukan teori atau melakukan penelitian harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Kemudian diturunkan sampai pada bagian yang operasional, salah satunya adalah pengaturan zakat. Artinya, perkembangan perbankan syariah, khususnya di Indonesia haruslah diikuti dengan mekanisme aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia sendiri, perkembangan bank syariah sendiri bak jamur di musim hujan. Masing-masing bank berlomba-lomba untuk mendirikan unit-unit usaha syariah, yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi bank umum syariah. Penulis berpendapat, bahwa bank-bank yang ada hanya sekedar menjawab kebutuhan pasar untuk meraih profit sebesar-besarnya, tapi

belum menjawab kebutuhan pasar untuk memenuhi aturan syariah. Karena, ketika bicara tentang kinerja zakat, maka ini akan berbanding lurus dengan harta yang dimiliki sebuah bank. Artinya, semakin besar harta yang dimiliki bank, maka semakin besar kinerja zakat atau kemampuan bank untuk membayar zakat, karena zakat merupakan sesuatu yang bersifat *compulsory* bagi bank syariah, baik pelaksanaan maupun pengungkapan. Namun, realitanya, saat penulis melakukan olah data dengan membandingkan jumlah zakat terhadap total aset, betapa banyak bank syariah yang bahkan sudah *shuttle* belum memenuhi kriteria presentase zakat sebesar 2.5%. Bagi penulis, ini merupakan sebuah anomali, karena idealnya sebuah perbankan syariah, yang menggunakan ‘nama’ syariah seharusnya taat pada aturan syariah. Begitu pula saat penulis melakukan pengukuran luas pengungkapan *Good Corporate Governance*, dimana salah satunya adalah pengungkapan informasi distribusi zakat dari bank syariah, ternyata tidak sedikit bank umum syariah yang ‘tidak serius’ dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja zakatnya dalam Laporan Pelaksanaan GCG.

Fakta tersebut melahirkan pertanyaan besar dalam benak penulis, benarkah bank umum syariah telah ‘murni’ syariah? Atau hanya sekedar label untuk membuat pasar tertarik? Karena, selain penulis berpendapat seperti di atas, berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa kinerja zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan GCG. Hal ini berarti semakin buruk kinerja zakat bank umum syariah atau semakin kecil presentase zakat bank umum syariah, maka bank akan melakukan pengungkapan informasi GCG yang lebih baik. Menurut penulis, bank syariah akan membuat laporan pelaksanaan GCG yang lebih ‘cantik’ untuk menutupi ketidakpatuhannya dalam syariah, yang dalam penelitian penulis menggunakan kinerja zakat terhadap total aset sebagai ukuran. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa bank akan mengungkapkan informasi yang baik untuk memperoleh legitimasi telah memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena, salah satu item pengungkapan GCG dalam Laporan Pelaksanaan GCG adalah pengungkapan tentang distribusi zakat. Menurut penulis, ketika bank umum syariah melaporkan distribusi yang baik, pengungkapan dengan kelengkapan grafik, informasi kuantitatif, dan kualitatif seperti yang telah penulis lakukan dengan metode skoring keluasan menggunakan 0, 1 dan 2, maka *stakeholder* akan melihat bahwa bank umum syariah telah memiliki kinerja zakat yang baik. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena bank umum syariah saat ini, masih berorientasi pada keuntungan, bukan pada zakat. Sehingga dalam hal pengelolaannya pun belum optimal. Seperti yang telah penulis rumuskan di kerangka pemikiran,

bahwa ketika bank umum syariah memiliki kinerja zakat yang baik, ia akan mengungkapkannya dalam Laporan Pelaksanaan GCG pun dengan sempurna, karena bank umum syariah harus meyakini bahwa pertanggungjawaban yang sesungguhnya adalah kepada Allah SWT. Begitu pula sebaliknya, saat kinerja zakat bank umum syariah buruk maka, ia akan mengungkapkannya sesuai dengan apa yang terjadi, karena inilah bentuk transparansi horizontal sekaligus transparansi vertikal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, analisis data, dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis, maka disimpulkan bahwa kinerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah pihak manajemen dan regulator harus bekerjasama demi tercapainya sebuah pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, bukan hanya semata-mata memenuhi formalitas tapi juga memenuhi kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abdul Rahman, Abdul Rahim. 2007. "Pre-Requisites For Effective Integration of Zakah Into Mainstream Islamic Financial System in Malaysia". *Islamic Economic Studies*, Vol. 14 No.1&2 : 91-107.

Ali Shah, Syed Zulfiqar., Butt, Safdar Ali., Hasan, Arshad. 2009. "Corporate Governance and Earning Management an Empirical Evidence Form Pakistani Listed Companies". *European Journal of Scientific Research*, Vol. 26 No. 4.

Ariffin, Noraini Mohd., Archer, Simon., Abdel Karim, Rifaat Ahmed. 2009. "Issues of Transparency in Islamic Banks". *Review of Islamic Economics*, Vol. 13 No.1

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang. Azkia Publisher.

Chapra, M.Umer dan Ahmed, Habib. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Bank Indonesia, 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Indonesia, 2010. Surat Edaran No.12/13/DPbS kepada Semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Botosan A, Christine. 1997. "Disclosure Level and The Cost of Equity Capital". *The Accounting Review*, Vol.72 No.3.

Chapra, M.Umer dan Ahmed, Habib. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Darmadi, Salim. 2011. "Corporate Governance Disclosure in The Annual Report : An Exploratory Study on Indonesia in Islamic Banking Damayanti, Tri. 2008. "Corporate Governance Bank Syariah dan Pengungkapannya dalam Laporan Tahunan". *Jurnal Ekonomi Islam FOSSEI* : 15-22.

Grais, Wafik dan Pellegrini, Matteo. 2006. "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services". *World Bank Policy Research Working Paper* 4054.

Haniffa, Roszaini dan Hudaib, Mohammad. 2007. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports". *Journal of Bussiness Ethics* : 97-116.

Haniffa, Roszaini dan Hudaib, Mohammad. 2004. "Disclosure Practices of Islamic Financial Institution". *Working Paper Series No.04/32*

Haniffa, Ros dan Cooke, Terry. 2000. "Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysia Corporations". Presented at The Asian AAA World Conference in Singapore, 28-30 Agustus 2000).

Hameed,Shahul., Wirman, Ade., Alrazi, Bakhtiar., Nazli, Mohd., Pramono, Sigit. "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks". Department of Accounting, International Islamic University Malaysia.

Hidayah, Erna. 2008. " Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta". *JAAI Volume* 12 No.1, Juni 2008

Hossain, Mohammed. 2008. "The Extent Disclosure in Annual Reports of Banking Companies : The Case of India". *European Journal of Scientific Research*, Vol. 3 No. 4.

Klapper, Leora F dan Love, Inessa. 2002. "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets". *World Bank Policy Research Working Paper* 2818.

- Kuppusamy, Mudiarasan., Saleh, Ali Salman., Samudhram, Ananda. 2010. "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Kusumo, Yunanto Adi Kusumo. 2008.
- Maali, Bassam., Casson, Peter., Napier Christopher. 2006. "Social Reporting in Islamic Banking". ABACUS, Vol. 42 No.2, 2008.
- Muhammad. 2002. Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah : Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban.
- Permasih, Dian. 2008. " Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia".
- Rehman, Ramiz ur dan Mangfa, Inayat Ullah. 2010."Corporate Governance and Performance of Financial Institution in Pakistan". <http://ssrn.com>
- Sihite, Adelina. 2010. "Analysis of The Influence of Company Characteristics to Mandatory Disclosure on Index LQ 45 Companies". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud Abu. 2007. "Corporate Governance from The Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principles". Critical Perspective on Accounting.
- Wan Ibrahim, Wan Hakimah., Ismail, Abdul Ghafar., Wan Mohd Zaharia, Wan Najihah. 2011. "Disclosure, Risk and Performance in Islamic Banking : A Panel Data Analysis". International Research Journal of Finance and Economics, Issue 72 : 100- 113.

RPSEP-74

PENGARUH RASIO KINERJA BANK TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

Rini Dwiyani Hadiwidjaja
Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
E-mail: rini@ut.ac.id

ABSTRACT

This research is aimed at identifying the influence of performance bank ratio which consist of Capital ratio, Asset quality ratio, Earnings ratio, and Liquidity ratio to Profit Growth either simultaneously and partially, on national commercial banks in Indonesia. Secondary data is used and collected based on time series and cross section from 2010 -2012, among 32 Banking Companies in Indonesia. This study uses panel data regression model with Generalized Least Square (GLS). Hausman test uses in this study show fixed effect model as data estimate technique and come to the conclusion that simulatneously, dependent variable (Capital, Asset Quality, Earnings, and Liquidity Ratio) have significant influence toward dependent variable (Profit Growth). Partially, Only Liquidity (LDR) have significant positive influence toward Profit Growth.

Keyword : *Capital Ratio, Asset Quality Ratio, Earnings Ratio, Liquidity ratio, Sensitivity Ratio, and Profit Growth*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terus meningkat yang ditunjang oleh kondisi makroekonomi yang tetap stabil, infrastruktur perbankan yang lebih kuat, serta pasar domestik yang besar. Kinerja sektor perbankan relatif meningkat sejalan dengan trend global dimana terdapat pergeseran keseimbangan dari negara maju ke negara berkembang (*emerging market*), hal ini didukung dengan 15 bank terbaik di dunia saat ini, sebagian besar laba berasal dari negara berkembang.

Berdasarkan Forbes Global 2000 list, yang merupakan daftar 2000 perusahaan paling besar di dunia yang dirilis secara tahunan oleh majalah Forbes, mencatat 10 perusahaan Indonesia ke dalam list perusahaan paling sukses di dunia pada Tahun 2011. Dari 10 perusahaan tersebut, 5 diantaranya merupakan perusahaan dari sektor perbankan, dan 3 diantaranya merupakan BUMN (terdapat 4 bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (Prihatiningtyas, 2012).

Tabel I: 10 Perusahaan Indonesia yang masuk Forbes 2000

Rank	Company	Market Value
479	 Bank Rakyat Indonesia	\$18.4 B
488	 Bank Mandiri	\$17.6 B
700	 Bank Central Asia	\$21.1 B
726	 Telekom Indonesia	\$14.9 B
969	 Bank Negara Indonesia	\$7.8 B
1351	 PGN	\$10.3 B
1399	 Gudang Garam	\$11.5 B
1636	 Bank Danamon Indonesia	\$4.6 B
1674	 Semen Gresik	\$8.1 B
1898	 Bumi Resources	\$5.4 B

Sumber : Prihatiningtyas, 2012

Bank yang merupakan suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi masyarakat dan nasabahnya untuk menyimpan dananya harus menjaga dan memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan tentang kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, ketentuan ini tertulis dalam Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat 2. Selain

itu bank juga wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*).

Menurut SAK No. 31 menerangkan bahwa Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatannya perlu dijaga. Oleh karena itu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kinerja bank secara berkesinambungan. Kinerja yang baik suatu bank diharapkan mampu meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri atau sistem perbankan secara keseluruhan. Pada sisi lain kinerja bank dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan bank tersebut. Secara intuitif dapat dikatakan bahwa bank yang sehat akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat serta mampu menghasilkan laba yang optimal.

Untuk menilai kinerja perbankan memerlukan suatu tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio atau indeks. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi kinerja perusahaan dalam hal ini perbankan. Pada umumnya untuk menilai kinerja perbankan digunakan enam aspek penilaian yaitu *Capital, Assets quality, Management, Earnings, Liquidity*, dan *sensitivity (CAMELS)*. Enam aspek *CAMELS* tersebut dinilai dengan menggunakan rasio keuangan (Veitzhal, 2007:698).

Di Indonesia penggunaan *CAMELS* sebagai indikator kesehatan bank tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Bagi kegiatan usaha bank umum penilaian kinerja bank dengan Rasio *CAMELS* tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hasil pengukuran berdasarkan *CAMELS*, diterapkan untuk menentukan predikat bank, yang dikategorikan sebagai berikut : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Penelitian dari Ni Ketut Leli Aryani Merkusiwati (2003) menyatakan bahwa penilaian kinerja bank dengan analisis rasio *Capital, Asset, Management, Earning*, dan *Liquidity* bermanfaat untuk memprediksi *Return On asset* yang diperoleh bank pada periode berikutnya. Penelitian terhadap 17 Bank Umum Pemerintah maupun Bank Umum Swasta diperoleh kesimpulan bahwa rasio *CAMEL* berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* bank terbukti untuk tahun 1997, tahun 1999, dan tahun 2000 sedangkan untuk tahun 1998 tidak terbukti bahwa Rasio *CAMEL* berpengaruh terhadap *ROA* tahun berikutnya (tahun 1999).

Sri Isworo Ediningsih (2004) melakukan penelitian dengan analisis rasio keuangan dan memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prediksi pertumbuhan laba satu tahun dan dua tahun kedepan. Altman (1968) melakukan penelitian dengan topik manfaat rasio keuangan untuk memprediksi kepailitan suatu usaha. Analisis dilakukan dengan *Multivariate Discriminant* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio *profitability, Liquidity, dan solvency* bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan (pailit).

Whalen dan Thomson (1998) melakukan penelitian tentang manfaat rasio keuangan untuk memprediksi laba beberapa periode kedepan dengan menggunakan rasio perbankan yaitu *Capital, Asset, Management, Earnings, dan Liquidity*. Penelitian menggunakan sampel bank di Amerika Serikat pada tahun 1990-an dengan menggunakan alat statistik regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan *CAMEL* cukup akurat dalam menyusun rating bank dan berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi laba di masa yang akan datang.

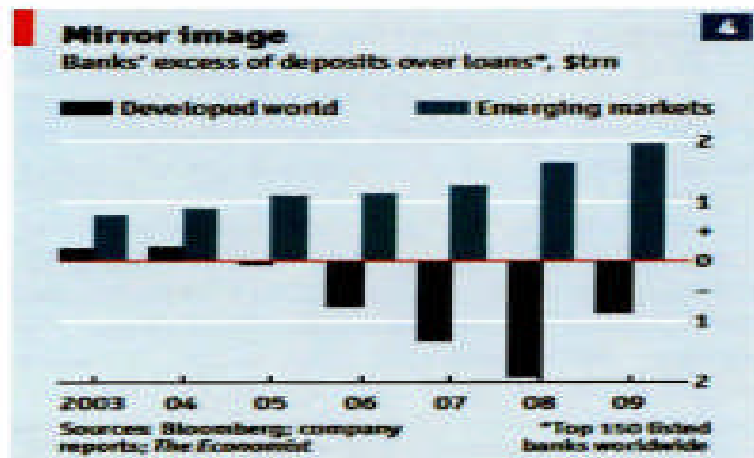
Yuniasih (2001) meneliti tentang kinerja keuangan Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli periode tahun 1996-2000 dengan alat analisis rasio *CAMEL* menunjukkan bahwa PD BPR Bank Pasar kabupaten Bangli dengan penilaian secara gabungan berpredikat sehat ditinjau dari kesehatan bank namun masih ada komponen-komponen dari faktor-faktor yang dinilai tidak termasuk dalam kategori sehat dan perlu perbaikan, terutama berkaitan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif masih terlalu kecil, pelaksanaan manajemen yang terlalu berlebihan. Luciana Spica Almilia (2005) melakukan penelitian dengan menganalisis rasio *CAMEL* dan pengaruhnya terhadap kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002. Penelitian ini menggunakan variabel penelitian CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM dan BOPO. Metode statistik yang digunakan adalah regresi logistik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan *CAMEL* memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan (rugi) dan bank yang mengalami kebangkrutan.

Banyak penelitian terdahulu yang telah dikemukakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan perlu melakukan analisis kinerja melalui rasio keuangan yaitu dalam rangka mengembangkan usaha dengan salah satu indikatornya adalah peningkatan keuntungan atau laba. Dengan berkembangnya usaha diharapkan setiap perusahaan bisa lebih survive dalam menjalankan kegiatan usahanya

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan laba, menurut Veithzal (2007:697) sebagaimana layaknya suatu perusahaan, setiap saat atau secara berkala perlu melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan tersebut. Demikian pula halnya dengan bank analisis kinerja ini ditujukan untuk kepentingan manajemen, pemilik atau pemerintah (Bank Indonesia). Selain itu analisis kinerja bank ini sebagai upaya untuk mengetahui kondisi usaha saat ini, penetapan kebijakan bisnis sekaligus dapat memprediksi keuntungan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Hasil penilaian kinerja terhadap sebuah bank yang diukur dengan menggunakan alat analisis *CAMELS*, dapat dimanfaatkan secara langsung baik oleh pemilik modal, pengelola ataupun masyarakat. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemilik modal dalam menanamkan modalnya dan dapat dijadikan informasi penting bagi pengelola dalam menyusun langkah-langkah operasional pengembangan usahanya. Bagi masyarakat, informasi tentang kinerja bank dapat menjadi acuan dalam memilih perusahaan perbankan yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan akan jasa keuangan. Sebaliknya jika kinerja bank dinilai oleh masyarakat kurang baik maka masyarakat enggan untuk melakukan investasi di bank sehingga bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan sebagian dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penilaian kinerja bank yang dilihat dari tingkat laba dengan menganalisis secara empiris data tentang kinerja bank melalui rasio keuangannya. Sektor perbankan merupakan salah satu indikator ekonomi secara umum, dimana Neraca perbankan saat ini mencerminkan bahwa sebagian besar orang pada negara maju mempunyai kecenderungan untuk meminjam dan sebaliknya sebagian besar masyarakat di Asia mempunyai kecenderungan menyimpan. Kemudian didukung dengan fakta bahwa sebagian besar bank pada negara berkembang (yang pada umumnya BUMN) memiliki cabang yang luas, maka bank tersebut mempunyai kapabilitas penggalangan dana dari perorangan maupun perusahaan yang lebih besar dari pada bank pada negara maju saat ini. Oleh karena itu, *loan to deposits rate* (LDR) pada bank di negara berkembang relatif jauh lebih rendah dibanding pada bank di negara maju dan bahkan mempunyai kecenderungan hubungan yang berlawanan. Sektor perbankan Indonesia juga mengalami kecenderungan ini, dimana LDR bank umum dalam 7 tahun terakhir ini menunjukkan rata-rata skitar 69.85%, masih di bawah LDR target BI sebesar 78%⁹. Dengan angka LDR yang cukup rendah tersebut dapat terlihat bahwa dana pihak ketiga yang masuk ke dalam bank umum nasional masih lebih besar daripada kredit yang disalurkan (Prihatiningtyas, 2012).



Gambar 1: Bank-bank di negara berkembang cenderung memiliki tingkat pemberian pinjaman yang lebih rendah dibanding bank-bank di negara maju (relatif terhadap besaran simpanan)

Meskipun dari faktor likuiditas hal ini merupakan sesuatu yang baik artinya sektor perbankan nasional mempunyai likuiditas yang cukup tinggi untuk menutup kebutuhan pencairan dana yang tidak diduga sebelumnya, namun dari sisi pelaksanaan fungsi intermediasi bank hal ini justru sebaliknya. Rendahnya LDR berarti terdapat eksekusi dana dalam perbankan dan bank tidak dapat mengoptimalkan dana yang telah dihimpunnya untuk mendapatkan *earning* yang seharusnya bisa diterima dari pemanfaatan eksekusi dana tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini juga berarti bahwa kinerja penyaluran kredit sektor perbankan nasional masih belum efisien padahal kredit dari perbankan diharapkan akan dapat mendorong pembangunan sektor riil dan dengan demikian mempercepat pertumbuhan nasional. Perbaikan kinerja penyaluran kredit perbankan tersebut tentunya tidak terlepas dari perbaikan kinerja perbankan secara keseluruhan serta membaiknya stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai rasio keuangan yang dapat mempengaruhi laba perusahaan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai analisis rasio keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba tersebut, maka penulis mencoba menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan judul : **"Pengaruh Rasio Kinerja Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia"**

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan sebagian dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penilaian kinerja bank yang dilihat dari pertumbuhan laba dengan

menganalisis secara empiris data tentang kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia melalui rasio keuangannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis pengaruh dari rasio kinerja bank yaitu *Capital, Asset Quality, Earnings*, dan *Liquidity* secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Perbankan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Rasio Keuangan

Rasio keuangan membantu kita dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Menurut Van Horne dan Wachowicz, Jr (2005:202) “Rasio Keuangan Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya”.

Angka-angka akuntansi terdapat dalam Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut. Untuk dapat menafsirkan dan memahami laporan keuangan dapat melalui analisis rasio keuangan yang dihitung berdasarkan angka-angka akuntansi yang ada dalam neraca atau laporan laba rugi.

Penilaian Kinerja Bank

Analisis kinerja bank dilakukan meliputi seluruh aspek baik operasional maupun non operasional bank tersebut. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank yang juga lazim dianut oleh bank-bank di dunia, selain yang umum berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dikenal dengan “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank”. Penilaian tingkat kesehatan bank ini meliputi *financial aspect* maupun *non financial aspect*. Metode atau cara penilaian kinerja atau tingkat kesehatan bank tersebut kemudian di kenal dengan Metode *CAMELS*. Madura (2006:544).

Rasio Keuangan *CAMELS* merupakan rasio keuangan perbankan yang digunakan sebagai pengukur kesehatan bank, dimana Rasio Keuangan *CAMELS* berunsurkan *Capital adequacy, Assets quality, Management, Earnings, Liquidity*, dan *Sensitivity*. Sofyan Safri (2001:167)

Di Indonesia sendiri, Direksi Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/110/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat

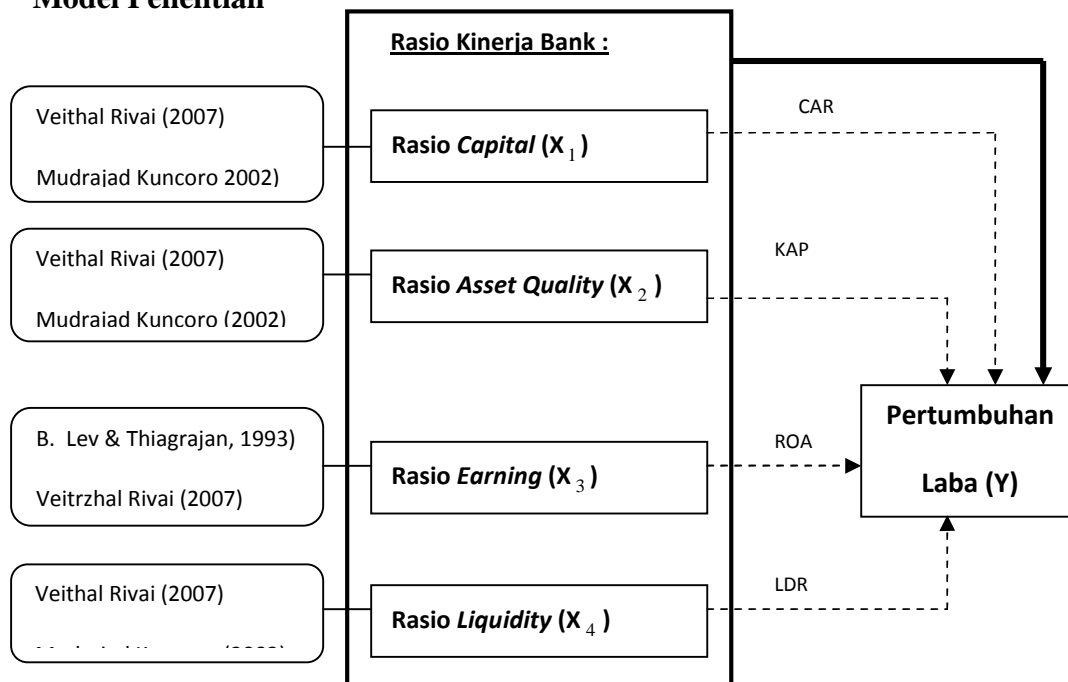
Kesehatan Bank Umum, yang dikenal dengan metode Rasio Keuangan *CAMELS* (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity*).

Pertumbuhan Laba

Bagi perusahaan yang berorientasi pada *profit oriented*, tentunya laba merupakan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu jumlah laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah satu alat ukur kinerja perusahaan.

Laba merupakan keuntungan yang diterima perusahaan, karena perusahaan telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain. Pertumbuhan laba dalam akuntansi adalah perbandingan yang memiliki dua tahap proses pengukuran secara fundamental yaitu pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip realisasi dan pengakuan biaya serta perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya dilakukan dalam laporan laba rugi. Penyajian informasi laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan. Dari sudut pandang investor, laba merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang sedangkan bagi nasabah, laba merupakan salah satu dasar kepercayaan untuk tetap bekerja sama dengan bank (Mudrajad Kuncoro, 2004: 546).

Model Penelitian



Keterangan :

————→ = Pengaruh variabel secara simultan

-----→ = Pengaruh variabel secara parsial

Pengaruh Rasio Kinerja Bank Terhadap Pertumbuhan Laba

Ni Ketut Leli Aryani Merkusiwati (2003) menyatakan bahwa penilaian kinerja bank dengan analisis rasio *Capital, Asset, Management, Earning*, dan *Liquidity* bermanfaat untuk memprediksi *Return On asset* yang diperoleh bank pada periode berikutnya. Penelitian terhadap 17 Bank Umum Pemerintah maupun Bank Umum Swasta diperoleh kesimpulan bahwa rasio *CAMEL* berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* bank terbukti untuk tahun 1997, tahun 1999, dan tahun 2000 sedangkan untuk tahun 1998 tidak terbukti bahwa Rasio *CAMEL* berpengaruh terhadap *ROA* tahun berikutnya (tahun 1999).

Sri Isworo Ediningsih (2004) melakukan penelitian dengan analisis rasio keuangan dan memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prediksi pertumbuhan laba satu tahun dan dua tahun kedepan. Sedangkan secara parsial hanya beberapa rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba satu tahun dan dua tahun kedepan, sementara rasio keuangan yang lain tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba satu tahun dan dua tahun kedepan.

Zainudin dan Hartono (2000) melakukan penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba. Penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan analisis rasio keuangan, usaha perbankan dapat memperkirakan laba yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.

Asyik dan Soelistyo (2000) dalam penelitiannya juga menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi laba masa mendatang . Untuk itu digunakan 21 rasio keuangan dengan teknis analisis menggunakan metode *Discriminant Analysis*. Adapun sampel penelitiannya adalah perusahaan manufaktur dengan periode penelitian tahun 1995-1996. Hasil penelitiannya adalah lima rasio keuangan (*DIV/NI, S/TA, LTD/NA, NI/S* dan *INPPE/TU*) merupakan *discriminator* yang signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang.

Whalen dan Thomson (1998) melakukan penelitian tentang manfaat rasio keuangan untuk memprediksi laba beberapa periode kedepan dengan menggunakan rasio perbankan yaitu *Capital, Asset, Management, Earnings*, dan *Liquidity*. Penelitian menggunakan sampel bank di Amerika Serikat pada tahun 1990-an dengan menggunakan alat statistik regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan *CAMEL* cukup akurat dalam menyusun rating bank dan berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi laba di masa yang akan datang.

Luciana Spica Almilia (2005) melakukan penelitian dengan menganalisis rasio *CAMEL* dan pengaruhnya terhadap kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002. Penelitian ini menggunakan variabel penelitian CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM dan BOPO. Metode statistik yang digunakan adalah regresi logistik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan *CAMEL* memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan (rugi) dan bank yang mengalami kebangkrutan.

Banyak penelitian terdahulu yang telah dikemukakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan perlu melakukan analisis kinerja melalui rasio keuangan yaitu dalam rangka mengembangkan usaha dengan salah satu indikatornya adalah pertumbuhan laba. Dengan berkembangnya usaha diharapkan setiap perusahaan bisa lebih survive dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : berarti tidak ada pengaruh positif yang signifikan dari variabel rasio keuangan *Capital, Asset Quality Earnings, Liquidity* terhadap pertumbuhan Laba.

H_1 : berarti ada pengaruh positif yang signifikan dari variabel rasio keuangan *Capital, Asset Quality, Earnings, Liquidity* terhadap pertumbuhan Laba.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia periode tahun 2010 -2012 serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari 32 bank. Adapun sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar (*listed*) di BEI
2. Perusahaan Perbankan yang terdaftar (*listed*) di BEI berturut-turut selama periode penelitian tahun 2010-2012.
3. Bank yang menyajikan laporan keuangan dan memiliki data lengkap tentang rasio *Capital, Asset Quality, Earnings, Liquidity* dan pertumbuhan laba.

Teknik dan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) yaitu gabungan data *time series* dan *cross section*. Dalam hal ini data yang diambil mencakup *n* perusahaan/ bank selama *t* periode.

Metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model regresi panel data. Adapun perumusan model tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = \text{Pertumbuhan Laba (PLABA)}$$

$$X_1 = \text{Rasio Capital (CAR)}$$

$$X_2 = \text{Rasio Asset Quality (AQ)}$$

$$X_3 = \text{Rasio Earnings (ROA)}$$

X_4 = Rasio *Liquidity* (*LDR*)

β_0 = Konstanta

β_i = Koefisien masing-masing variabel

($i = 1, 2, 3, 4$)

e = Tingkat kesalahan (*error term*)

Untuk mengestimasi model regresi dengan data panel digunakan pendekatan *fixed effect* atau pendekatan *random effect* melalui Hausman test (Gujarati, 2003:651). Sebelum uji hipotesis regresi panel data digunakan, maka dilakukan uji asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan persamaan regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis regresi

Pada bagian ini akan diungkapkan mengenai pengaruh rasio *capital*, *asset quality*, *earnings*, dan *liquidity* dengan menggunakan analisis panel data untuk bank umum nasional pada periode tahun 2010 -2012.

Hasil pengujian *Hausman test* menunjukkan bahwa *fixxed effect* merupakan pilihan yang tepat untuk model, karena $X^2_{\text{-hitung}}$ dari model $> X^2_{\text{-tabel}}$. Untuk pengolahan data digunakan alat bantu berupa *software* Eviews 6.

Model persamaan regresinya:

$$Y = 0.641 - 0.206CAR - 0.081QA + 0.037ROA + 1.063LDR$$

Nilai konstanta 0.641 menunjukkan bahwa jika tidak ada CAR, QA, dan LDR maka nilai LABA hanya sebesar 0.641.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.859	.833	.22447

a. Predictors: (Constant), LDR, QA, CAR, ROA

b. Dependent Variable: PRF

Nilai korelasi (R) hubungan kelima variabel tersebut sebesar 0.927, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara CAR, QA, ROA, dan LDR terhadap LABA.

Sedangkan pada koefisien determinasi (R square) sebesar 0.859. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel CAR, QA, ROA, dan LDR mempengaruhi naik turunnya nilai LABA sebesar 85.9% dan masih terdapat 14.1% variabel lain selain keempat variabel tersebut yang mempengaruhi variabel LABA.

Pengujian Hipotesis

Uji Model Regresi Secara Simultan

Uji model regresi secara simultan ini dianalisis dengan Uji-F, Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan secara serempak atau bersama-sama antara variabel independent (bebas) dengan variabel dependen (terikat).

Hasil uji F/ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 33.387. Nilai ini lebih besar dari nilai F tabel ($33.387 > F \text{ tabel}$), begitu juga dengan Sig yang lebih kecil dari Alpha 5% ($0.000 < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa dari keempat variabel bebas yang diuji (CAR, QA, ROA, dan LDR), minimal terdapat 1 variabel bebas yang mempengaruhi LABA (Y). Atau, keempat variabel CAR, QA, ROA, dan LDR secara bersama-sama mempengaruhi LABA.

Semakin besar nilai R Square yaitu perbandingan antara *Explained Sum of Squares* terhadap *Total Sum of Squares*, maka berarti semakin besar variasi dari variabel terikat (*dependentvariable*) dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas (*independent variable*).

Uji Model Regresi Secara Parsial

Untuk menyimpulkan lebih jauh mengenai model Rasio Kinerja Bank (rasio *Capital*, rasio *Asset*, rasio *Earnings*, rasio *Liquidity*) terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Perbankan di Indonesia selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis kebermaknaan pengaruh dari masing-masing variabel bebas dengan uji t. Uji t statistik dimaksudkan untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independent dalam menentukan arah gerakan variabel dependen.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.641	.270		2.368	.027
CAR	-.206	.146	-.198	1.414	.171
QA	-.081	.109	-.098	-.744	.465
ROA	.037	.135	.040	.277	.784
LDR	1.063	.169	1.075	6.307	.000

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 variabel yang diuji, ternyata hanya LDR (X4) yang mempengaruhi LABA (Y). Kesimpulan ini didapatkan dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel. Dimana t hitung untuk variabel LDR sebesar 6.307 dengan nilai $\text{sig} < \alpha 5\%$ ($0.000 < 0.05$).

Hal sebaliknya terjadi untuk variabel CAR, QA, dan ROA, dimana nilai t hitungnya (-1.414, -0.744, dan 0.277) lebih kecil dari t tabel dengan sig > alpha 5% (0.171, 0.465, dan 0.784 >0.05). hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR, QA, dan ROA tidak mempengaruhi LABA. Artinya, CAR, QA, dan ROA tidak efektif untuk meningkatkan LABA.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung (33.387) lebih besar dari nilai F tabel (33.387 > F tabel), dengan Sig yang lebih kecil dari Alpha 5% (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa dari keempat variabel bebas yang diuji (CAR, QA, ROA, dan LDR), minimal terdapat 1 variabel bebas yang mempengaruhi LABA (Y). Atau keempat variabel CAR, QA, ROA, dan LDR secara bersama-sama mempengaruhi LABA.
2. Hasil Uji t menunjukkan bahwa hanya LDR (X4) yang mempengaruhi LABA (Y), karena nilai t hitung yang lebih besar dari t table sebesar 6.307 dengan nilai sig < alpha 5% (0.000 < 0.05).

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat dimanfaatkan oleh.

1. Pemiliki modal, sebagai indikator untuk menilai prestasi manajemen, keuangan atau kerugian, dan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan.
2. Manajemen, sebagai alat ukur efisiensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan operasional dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
3. Masyarakat luas, sebagai alat penilaian kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas konsidi bank yang bersangkutan dan dasar pertimbangan keputusan untuk menjadi nasabah serta jaminan terhadap sejumlah dana yang disimpannya.
4. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dan waktu pengamatan yang lebih banyak sehingga hasilnya diharapkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E.I. 1968. *Financial Ratio, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy*, *Journal of Finance*, September : 589-609.
- Asyik, Nur Fadjrih & Soelistyo. 2000. *Kemampuan rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba (Penetapan Rasio Keuangan Sebagai Discriminator)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Volume 15 : 313-331.
- Bank Indonesia .2004. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta..
- Demirguc-Kunt, Asli & Enrica Detragiache. 1997. *The determinants of Banking Crises: Evidence From Developing and Developed Countries*, *I.M.F. Working Paper*.
- Etty M. Nasser & Titik Aryati. 2000. *Model Analisis CAMEL Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Sektor Perbankan Yang Go Publik*, *Jurnal Auditing dan Akuntansi Indonesia* Vol 4. No. 2 : 11-18.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Singapore: Mc. Graw-Hill International Edition
- Keown, Arthur J., John D. Martin, William J. Petty & David F. Scot., Jr. 2005. *Financial Management, Principal and Applications*. Prentice hall.
- Madura, Jeff. 2006. *Finacial Institutions and Markets*. Thomson South-Western
- Mas'ud Mahfoedz. 1994. *Financial Ratio Analysis and The Predictions of Earning Changes in Indonesia*, *Kelola* No. 7 : 114-137
- Mudrajad Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit, UPP AMP YKPN.
- Mudrajad Kuncoro & Suhardjono. 2002. *Manajemen perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Ni Ketut Leli Aryani. 2003. *Evaluasi Pengaruh CAMEL Terhadap Kinerja Perusahaan*, *Buletin Studi Ekonomi* vol. 12 No. 1. tahun 2007 : 1-6
- Payamta & Mas'ud Mahfoedz. 1994. *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan sesudah Menjadi Perusahaan Publik Di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*, *Kelola* No. 20 : 54-69
- Sri Isworo Ediningsih. 2004. *Rasio keuangan dan Prediksi Pertumbuhan Laba : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEJ*, *Wahana* Vol 7 No.1 : 29-42

Sofyan Syafri Harahap.2004. *Analisis Kritis Atas laporan Keuangan*.Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.

Sumarta. 2000. *Evaluasi Kinerja Perbankan : Studi Banding Kinerja perbankan di Indonesia dan Perbankan Thailand*, Jurnal UGM : 7-16

Warsidi & Bambang Agus Pramuka. 2000. *Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi, Vol 2. No 1. 2000 : 1-22

Whalen, Gary & James B. Thomson. 1988. *Using Financial Data to Identify Changes in Bank Condition*, *Economic Review*, *Second Quarter* : 17-26

Yuniasih. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli*: 1-17

Zainudin & Jogiyanto Hartono. 1999. *Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba : Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEJ*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia vol. 2 No. 1 : 66-90

**STRATEGI KOPERASI SYARIAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

Arif Pujiyono, SE, MSi dan Siti Mutmainah, SE, MSi, Akt
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang
Email: arifpujiyono@undip.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai potensi produk pertanian unggulan baik hayati maupun heani. Meskipun pertanian memiliki kontribusi besar bagi industri, menyerap banyak tenaga kerja dan penyumbang devisa, ternyata pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB masih rendah. Hal ini disebabkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih difokuskan pada sektor industri dan lemahnya institusi pendukung pertumbuhan sektor pertanian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menetapkan strategi Koperasi Syariah (Kopsyah) dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT). Berdasarkan hasil penelitian kekuatan utama Kopsyah adalah sumberdaya manusia yang memadai dan militan, pelayanan yang baik, mampu menjangkau pelosok desa, produk pembiayaan syariah untuk pertanian yang bervariasi. Kelemahan Kopsyah adalah anggota banyak yang tidak memahami produk pembiayaan syariah, modal Kopsyah yang masih sedikit, infrastruktur Kopsyah yang masih lemah. Peluang Kopsyah adalah banyak peraturan yang mendukung Kopsyah, banyak lembaga keuangan lain untuk sinergi dalam permodalan, sistem keuangan yang berbasis bagi hasil dan margin keuntungan yang lebih adil, perkembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem online. Ancaman Kopsyah adalah belum adanya Undang-Undang Koperasi Syariah, banyak masyarakat petani yang belum mengenal konsep keuangan syariah, dan banyak Lembaga Keuangan besar yang memasuki sektor pertanian. Strategi untuk meningkatkan peran Kopsyah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian adalah: merevitalisasi koperasi petani menjadi koperasi syariah yang modern termasuk di luar jawa; meningkatkan program kerja sama dan magang dengan institusi pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM; menganekaragamkan produk keuangan untuk sektor pertanian; menerbitkan UU dan peraturan pendukung lain yang spesifik untuk eksistensi Kopsyah; memanfaatkan kekuatan tawar produk pertanian unggulan untuk pasar ekspor; bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk meningkatkan modal, sistem informasi (IT) dan keuangan

Kata kunci: pertanian, koperasi syariah, SWOT.

Latar Belakang

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting. Ukuran sektor pertanian memiliki kedudukan strategis dalam menyediakan

tenaga kerja, input di sektor industri dan sektor-sektor moderen lainnya. Jika mengikuti model pertumbuhan ekonomi Klasik Kuznets, maka pertanian di negara berkembang memiliki kontribusi dalam empat hal: (1) ekspansi sektor ekonomi lainnya banyak tergantung pada sektor pertanian; (2) kontribusi pasar sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan sektor domestik lainnya; (3) sumber modal bagi sektor ekonomi lainnya; dan (4) kontribusi devisa terhadap perdagangan internasional melalui ekspor hasil pertanian (Tambunan, 2009)

Kebijakan makro ekonomi di Indonesia selama ini kurang berpihak pada sektor pertanian baik dari sisi pola pikir (*mind of sets change*), perilaku (*behavior change*), maupun praktik (*practical change*). Pendekatan pembangunan pertanian sebagai pembangunan multisektor kurang didukung oleh institusi terkait dengan pendekatan yang bersifat parsial/departemen. Birokasi masih memiliki pandangan bahwa sektor pertanian hanya sebagai sektor penunjang/pendukung sektor industri, bukan dikembangkan sebagai agribisnis dalam pengertian pertanian secara luas. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian relatif kurang memadai terutama di daerah pedesaan. Luas kepemilikan lahan di pedesaan yang relatif sempit (kurang 0,5 Ha) mengakibatkan petani di pedesaan kesulitan untuk mengembangkan pertanian sebagai suatu bisnis modern. Pada sisi lain, penggunaan sumberdaya daya pertanian terjadi ketimpangan, di mana di Jawa banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian sementara perluasan dan pemanfaatan lahan di luar Jawa belum optimal.

Sejarah panjang pembangunan pertanian di Indonesia mengalami masa pasang surut seiring dengan perjalanan politik. Institusi terkait pertanian belum memberikan hasil pembangunan pertanian yang stabil dan berkesinambungan. Salah satu institusi pertanian yang relatif berhasil mendorong pertumbuhan pertanian khususnya pangan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Keberhasilan swasembada pangan pada tahun 1984, setidaknya merupakan peran KUD. Sejatinya KUD memang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan. Dalam dinamikanya peran KUD semakin redup seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada industri. Pada sisi lain citra koperasi semakin buruk terkait dengan berbagai kasus yang menimpa. Upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi oleh berbagai pihak harus kembali digiatkan agar khususnya untuk mendorong sektor pertanian.

Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, Koperasi Syariah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, telah

memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun belum ada jumlah akurat BMT karena banyak tersebar dan memiliki badan hukum yang berbeda-beda, Indonesia merupakan pusat keuangan mikro syariah (Beik, 2008) yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil termasuk di sektor pertanian. Sebagai bentuk Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Syariah, memiliki tantangan yang berat untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana strategi Koperasi Syariah dalam mendorong pertumbuhan pertanian di Indonesia?

Telaah Literatur

Pertanian dan Pembangunan Ekonomi

Pertanian dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha (sektor produksi) adalah pertanian dalam arti luas, yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan/kelautan. Subsektor tanaman pangan sering disebut dengan subsektor pertanian rakyat, karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat. Subsektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Subsektor kehutanan terdiri dari kegiatan penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain dan perburuan. Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah dan keramba serta pengolahan atas produk perikanan (Dumairy, 1996).

Permasalahan pertanian di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan serius dengan melibatkan berbagai pihak. Permasalahan pertanian di Indonesia setidaknya adalah: (1) penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya lahan pertanian; (2) rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pertanian; (3) Rendahnya produktifitas, daya saing, efisiensi dan kontinuitas produk pertanian; (4) Lemahnya kelembagaan dan mata rantai input dan output produk pertanian, dan (5) Lemahnya akses layanan permodalan untuk meningkatkan skala usaha pertanian. Permasalahan yang ada ini tentunya tidak mudah diselesaikan apalagi dengan cara instan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang strategis dan berkesinambungan agar

pertanian di Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan, stabil dan berkesinambungan.

Dalam dinamika pembangunan ekonomi modern, pertanian tidak harus diidentikkan dengan keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan. Perkembangan teknologi pertanian semakin maju, tidak hanya pengolah hasil-hasil pertanian, tetapi juga produksi pertanian mulai alat pengolah lahan pertanian, alat produksi pertanian, sampai pada bioteknologi pertanian. Meskipun perubahan struktural perekonomian mengarah pada industri dan jasa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pertanian akan kembali menjadi titik sentral pembangunan ekonomi di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terhentikan sementara kebutuhan pangan juga semakin sulit, sudah seharusnya strategi pembangunan kembali diarahkan untuk mendukung sektor pertanian. Adanya perubahan iklim dan krisis pangan mengindikasikan bahwa pertanian kembali menjadi isu pembangunan berkelanjutan.

B.2. Koperasi Syariah dan Pembangunan Pertanian

Koperasi di Indonesia telah memiliki sejarah tersendiri dalam dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara yuridis formal, Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam ideologi ekonomi, koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Koperasi di Indonesia memiliki keunggulan terkait dengan nilai-nilai sosiobudaya bangsa Indonesia yang penuh dengan sifat kekeluargaan, saling menolong, kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Atas dasar inilah koperasi di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia yang memiliki keunggulan posisi strategis dan iklim.

Koperasi petani memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagai satu kesatuan yang utuh, koperasi petani harus mampu menyediakan alat dan input proses produksi pertanian sampai pada pemasaran produk pertanian. Di banyak negara, koperasi petani terbukti sebagai model penting kewirausahaan petani kecil yang dapat mengatur dan mengoptimalkan sumber daya pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Di Amerika Serikat, meskipun merupakan basis sistem ekonomi kapital dan liberal, ternyata koperasi pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sekitar sepertiga dari input produksi dan kredit petani, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Koperasi bertanggung jawab untuk memasarkan lebih dari 70 persen susu dan hampir 30 persen dari semua

komoditi lainnya. Kewirausahaan koperasi merupakan instrumen penting untuk membantu penduduk pedesaan menciptakan lapangan kerja dan melakukan diversifikasi sumber-sumber pendapatannya (United Nations, 2007). Sejarah lembaga keuangan mikro (termasuk koperasi) di Indonesia pada dasarnya memiliki keberhasilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Berry dkk, 2001).

Sering dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, di Indonesia memiliki satu lembaga keuangan mikro syariah spesifik, yang dikenal dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT ini memiliki peran sebagai lembaga sosial (*Baitul Maal*) untuk menyalurkan dana zakat infak, sedekah, wakaf dan hadiah khususnya untuk masyarakat miskin dan peran lembaga bisnis (*Baitul Tamwil*) untuk menyalurkan dana masyarakat untuk kepentingan usaha. Secara legalisasi, BMT ini lebih sesuai berbadan hukum koperasi (Bukhory, 2009). Sesuai dengan bentuk lembaga keuangan syariah lainnya, Kopsyah juga memiliki produk keuangan syariah termasuk untuk mendukung sektor pertanian. Meskipun bukan suatu keharusan, Kopsyah ini merupakan bentuk badan hukum paling ideal untuk BMT dengan alasan (Sumiyanto, 2008): (1) sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945, koperasi merupakan soko guru perekonomian dengan berbagai nilai luhur dan berbagai keunggulannya; (2) BMT paling banyak diakomodasi oleh badan hukum koperasi melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) serta sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM); dan (3) Koperasi Syariah banyak dibentuk oleh anggota masyarakat (sistem ekonomi kerakyatan) yang memiliki semangat dan militansi tinggi untuk menyejahterakan anggotanya.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data statistik nonparametrik, sehingga yang menjadi sampel adalah *key persons* sesuai tujuan penelitian. *Key persons* ini adalah orang-orang yang memahami tentang koperasi syariah dan pembangunan pertanian, yaitu: Pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM, Pimpinan Dinas Pertanian, Pimpinan Asosiasi Koperasi Umum/Syariah/BMT, Akademisi dan Petani Potensial. Metode pengumpulan informasi/data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *focus group discussion* (FGD). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan analisis *Stregth*,

Weakness, Opportunity and Threat (SWOT). Analisis SWOT merupakan suatu analisis bukan dalam bentuk angka, akan tetapi berupa keterangan, uraian pendapat maupun kesimpulan (Rangkuti, 2005). Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan Koperasi Syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan *strenght-opportunity*, yang sekaligus secara bersamaan dapat meminimalkan *weakness-threat*. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang akan diambil dalam kondisi saat ini. Analisis ini merupakan strategi dalam membantu para pengambil keputusan melalui empat strategi yaitu strategi *strenght-opportunity* (SO), *weakness-opportunity* (WO), *strenght-threats* (ST), *weakness-threat* (WT).

Dalam mengadakan analisis SWOT terlebih dulu mengetahui faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mencakup dalam matrik *external factor evaluation* (EFE) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang mencakup ke dalam bentuk *internal factor evaluation* (IFE). Matrik *external factor evaluation* (EFE) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal Koperasi Syariah yang berkaitan dengan peluang dan ancaman. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan persaingan pasar. *Matrik internal factor evaluation* (IFE) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal Koperasi Syariah yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Data aspek internal Koperasi Syariah dapat dikumpulkan dari beberapa fungsional Koperasi Syariah, yaitu aspek sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek infrastruktur, aspek sistem informasi dan manajemen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil indepth interview dan FGD dengan Key person, maka disusunlah Matriks analisis SWOT berikut ini.

Tabel 1

Matrik Analisis SWOT Strategi Koperasi Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pertanian di Indonesia

	<p>Kekuatan (Streng):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Filosofi sesuai sosio kultur masyarakat indonesia dan idelologi ekonomi negara b. Kualifikasi SDM banyak sarjana dan militan c. Kantor dan jaringan yang tersebar dengan pelayanan yang baik d. Produk keuangan untuk sektor pertanian yang beraneka ragam 	<p>Kelemahan (Weakness):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SDM sedikit dan belum memiliki standar kualifikasi ideal dan pemahaman terkait pertanian dan produk keuangan syariah b. Modal Kopsyah yang sedikit c. Infrastruktur belum memadai dan belum terintegrasi dengan IT d. Produk keuangan untuk sektor pertanian masih sedikit
<p>Peluang (Opportunity):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan aktifitas pertanian di luar Jawa b. Masyarakat mulai sadar dengan produk keuangan syariah c. Semakin banyak perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana ekonomi syariah d. Mekanisme bagi hasil yang lebih adil e. Perkembangan IT untuk mendukung sistem operasional online f. Banyak pelatihan dan permodalan dari instansi 	<p>Strategi SO :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi koperasi petani menjadi koperasi syariah yang modern termasuk di luar jawa 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program kerja sama dan magang dengan institusi pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM 2. Menganekaragamkan produk keuangan untuk sektor pertanian

pemerintah untuk pengembangan koperasi		
Ancaman (Threat): a. Belum ada regulasi yang secara spesifik dan penuh mendukung pengembangan Koperasi Syariah b. Persaingan lembaga keuangan besar dengan dukungan modal besar c. Sektor pertanian yang berisiko dan sulit diprediksi akibat perubahan iklim	Strategi ST 1. Menerbitkan UU dan peraturan pendukung lain yang spesifik untuk eksistensi Kopsyah 2. Memanfaatkan kekuatan tawar produk pertanian unggulan untuk pasar ekspor	Strategi WT 1. Sinergi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk meningkatkan modal, sistem informasi (IT) dan keuangan

Sumber: data primer, 2014 (diolah)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka strategi utama Koperasi Syariah untuk mendorong pertumbuhan kesimpulan di Indonesia ini adalah:

1. Merevitalisasi koperasi petani menjadi koperasi syariah yang modern termasuk di luar Jawa
2. Meningkatkan program kerja sama dan magang dengan institusi pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM
3. Mengembangkan produk keuangan untuk sektor pertanian
4. Menerbitkan UU dan peraturan pendukung lain yang spesifik untuk eksistensi Kopsyah
5. Memanfaatkan kekuatan tawar produk pertanian unggulan untuk pasar ekspor
6. Bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk meningkatkan modal, sistem informasi (IT) dan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Beik, Irfan Sauqi, 2008, Snapshot Ekonomi Islam Dunia, *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, Vol V, No. 1, Pebruari 2008, p.13-46.

Berry, Albert, Edgard Rodriguez & Henry Sandee, 2001, Small and Medium Enterprice Dynamics in Indonesia. *Buletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (3), p. 63-84
Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Buchori, Nur S, 2009, *Koperasi Syariah*, Sidoharjo: Mashury Kelompok Masmedia Buana Pustaka

Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Sumiyanto, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*, Yogyakarta: Penerbit ISES Publising.

Tambunan, Tulus (2009) *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*, Jakarta: Pustaka Kuantum.

RPSEP-76

**KOPERASI SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DI TAWANGMANGUKABUPATEN KARANGANYAR**

Harini
Bambang Mursito

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

Abstrak

Makalah ini mengkaji peran Koperasi Bina Wisata dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang adadi Kabupaten Karanganyar, khususnya di daerah wisata Tawangmangu. Pendekatan penelitian dengan menggunakankualitatif, dengan obyek pada Koperasi Bina Wisata, dengan alasan koperasi masih aktif sampai saat ini melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.Koperasi Bina Wisata didirikan oleh para pelaku bisnis/pedagangyang berdagang di obyek wisata. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, sampel diambil dengan metode *snowball*, analisis data interaktif, meliputi: pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian adalah pertama: terdapat berbagai potensi industri kreatif di daerah obyek wisata Tawangmangu. Potensi tersebut, antara lain: industri makanan ringan, rumah/warung makan, dan kerajinan tangan. Kedua: terdapat sejumlah bidang industri dengan sumber daya pendukungnya yang dapat dikembangkan sebagai industri kreatif di sekitar Kabupaten Karanganyar. Tersedia bahan baku, objek-objek dan tempat yang dapat diberi sentuhan teknologi dan keterampilan SDM untuk memperoleh nilai tambah (*value added*). Ketiga: Koperasi Bina Wisata telah berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar dalam mengkoordinasikan para pedagang di obyek wisata Grojogan Sewu, penataan lingkungan usaha sehingga lebih rapi, menyeragamkan harga produk sejenis sehingga tidak terjadi persaingan yang saling merugikan, memberikan pelatihan keterampilan pengemasan industri makanan ringan, memberi pelatihan pemasaran pelaku bisnis/pedagang kecil yang tergabung dalam Koperasi Bina Wisata, menjalin jaringan dengan berbagai pihak sebagai mitra bisnis pelaku usaha di obyek wisata.

Kata Kunci: Koperasi, Obyek wisata, Ekonomi kreatif.

COOPERATIVES AS THE BASIS OF CREATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN TAWANGMANGU OF KARANGANYAR REGENCY

Harini and Bambang Mursito

ABSTRACT

This article studied the role of *Koperasi Bina Wisata* (Tourist Building Cooperative) in developing the creative economy in Karanganyar, particularly in Tawangmangu tourist area.

The research was conducted using qualitative approach, with *Koperasi Bina Wisata* as the object of research considering that the cooperatives still undertake economic activity actively up to now. *Koperasi Bina Wisata* was established by businesspersons/sellers trading in tourist object. The data was collected using in-depth interview, the sample was taken using snowball sampling, and the data analysis was conducted using interactive data of analysis, including: collection, reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of research were firstly: there was a variety of potential creative industries in Tawangmangu tourist object area. They were: snack industry, food stall, and handicraft. Secondly, there were a number of industries with their supporting resource that could be developed into creative industries surrounding Karanganyar Regency. The availability of raw materials, objects and places could be given technology touch and with human resource skill could give value added. Thirdly, *Koperasi Bina Wisata* had contributed to developing the creative economy in Karanganyar Regency in coordinating the traders in Grojogansewu tourist object, in arranging the business environment more tidily, in making the price of similar products uniform to prevent the harmful competition from occurring, in giving marketing training to the businesspersons/small seller belonging to *Koperasi Bina Wisata*, and in establishing network with a variety of parties as the partners of businesspersons in tourist object.

Keywords: Cooperative, Tourist Object, Creative Economy.

PENDAHULUAN

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.130,32 ha dan luas tanah kering 55.248,32 ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 14.361,57 ha, non teknis 6.229,28 ha, dan tidak berpengairan 1.542,52 ha. Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2012 sebanyak 838.762 jiwa, terdiri dari laki-laki 414.715 jiwa dan perempuan 424.047 jiwa.

Secara administratif Kecamatan Tawangmangu terdiri dari 5 (lima) desa. Berdasarkan data monografi tahun 2012, desa Tawangmangu, luas desa ini adalah 3.378.880 ha. PDRB dalam jutaan rupiah, sektor pertanian 193.431,60, pertambangan

dan penggalan 41.517,24. Industri pengolahan 59.960,10, perdagangan 88.526,77, dan jasa-jasa 44.299,36. Secara keseluruhan PDRB Kecamatan Tawangmangu 473.326,23.

Berdasarkan topografi wilayah Tawangmangu tersebut, masuk akal bila sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan sektor ekonomi, khususnya di daerah Tawangmangu.

Ekonomi kreatif merupakan pilihan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun pengurangan penduduk miskin. Ekonomi kreatif menitik beratkan perhatiannya pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual, merupakan bidang yang diharapkan untuk mengatasi berbagai persoalan pengangguran maupun pengembangan usaha yang berdasarkan potensi ekonomi suatu daerah.

Menurut Departemen Perdagangan RI, ekonomi kreatif juga dapat menjawab tantangan permasalahan dalam jangka pendek dan menengah, yaitu: (1) relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis (4,5% per tahun); (2) masih tingginya pengangguran (9-10%); (3) tingginya tingkat kemiskinan (16-17%); dan (4) rendahnya daya saing industri di Indonesia. Diharapkan ekonomi kreatif juga dapat menjawab tantangan seperti isu *global warming*, pemanfaatan energi terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon, karena arah pengembangan industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk yang berasal dari intelektualitas sumber daya insani Indonesia (Depdag RI, 2009).

Melihat ekonomi kreatif banyak mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual, maka untuk mengembangkan, idealnya berbasis koperasi maupun UMKM. Secara umum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kondisinya memiliki potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu koperasi yang di dalamnya terdapat ratusan anggota dapat digunakan sebagai basis pengembangan anggota koperasi, yang notabene para pelaku usaha di kawasan Tawangmangu.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang ada obyek wisata Tawangmangu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi obyek wisata di Tawangmangu yang dapat dikembangkan dalam rangka menunjang ekonomi kreatif ?
2. Faktor apa saja yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif oleh Koperasi Bina Wisata Tawangmangu ?.

3. Bagaimana peran Koperasi Bina Wisata dalam pengembangan ekonomi kreatif di Tawangmangu ?

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian dengan menggunakan kualitatif, sebagai obyek penelitian pada Koperasi Bina Wisata, dengan alasan koperasi sampai saat ini masih aktif melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Koperasi Bina Wisata didirikan oleh para pelaku bisnis/pedagang yang berdagang di obyek wisata. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, sampel diambil dengan metode *snowball*, analisis data interaktif, meliputi: pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Obyek wisata yang berada di Kecamatan Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar memiliki banyak obyek wisata yang tersebar dan beraneka ragam. Dalam hal ini peneliti akan membahas obyek wisata khususnya yang berada di Kecamatan Tawangmangu. Beberapa obyek wisata yang berada di Kecamatan Tawangmangu:

1. Taman Wisata Alam (TWA) Air Terjun Grojogan Sewu

Grojogan Sewu terletak di desa Beji di Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Air terjun Grojogan Sewu merupakan bagian dari Hutan Wisata Grojogan Sewu. Air terjun ini merupakan air terjun tertinggi, yang tingginya sekitar 81 meter. Hutan Wisata Grojogan Sewu memiliki luas 20 ha. Kawasan hutan ini banyak ditumbuhi berbagai jenis pohon hutan dan dihuni oleh sekelompok binatang.

2. Taman Rekreasi Balekambang

Merupakan pusat bermain dan rekreasi bagi anak-anak dan keluarga yang terletak di desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu. Taman Ria Balekambang tepatnya berada di atas pintu utama masuk obyek wisata Grojogan Sewu. Taman Ria Balekambang Karanganyar ramai dikunjungi keluarga untuk berpiknik. Fasilitas yang disediakan antara lain: kolam renang, lapangan tenis, gedung pertemuan, penjualan tanaman hias, arena permainan anak, arena sepeda mini, gardu pandang, sanggar lukis, dan lain-lain. Arena permainan anak-anak antara lain ayunan, timbangan, papan luncur, komidi putar, sepeda santai dan lain-lainnya.

3. Cemara Kandang

Cemara Kandang terletak di desa Gondosuli. Cemara Kandang merupakan area pendakian yang terkenal, di samping karena memiliki banyak tantangan alam, objek wisata ini juga dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai tempat untuk bermeditasi. Pada bulan Suro banyak masyarakat yang pergi ke Puncak Lawu untuk mengikuti jalanya upacara ritual “Labuhan” yang dilakukan oleh kerabat Keraton-keraton Jawa yang bertujuan untuk memperingati moksanya (bahasa sansekerta: dalam konsep agama Hindu dan Budha berarti lepas dari kehidupan duniawi). Untuk menuju Puncak Lawu pengelola Objek menyediakan rute atau jalur khusus untuk *trekking*. Untuk berwisata ke Puncak Lawu para wisatawan biasa ditempuh melalui jalan setapak melalui perbukitan Gunung Lawu di areal hutan yang sangat luas dengan pemandangan dan panorama alam yang sangat indah dan menarik.

4. Hutan Wisata Pringgodani

Merupakan obyek wisata sejarah yang terletak di sebelah barat Gunung Lawu, terletak di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. Di kawasan situs pertapaan Pringgodani ada beberapa tempat yang menarik untuk dikaji dan dicoba, antara lain Sendang “Gedang“, Sendang “Temanten“, Sendang “Panguripan“, Pringgosepi, Pringgosari dan Telaga Wali. Situs budaya peninggalan Majapahit ini, di bangun dan ditemukan oleh Prabu Brawijaya V. Di tempat ini pula Sang Prabu Brawijaya melakukan refleksi diri dan meningkatkan spiritualitasnya.

5. Wana Wisata Sekipan

Merupakan tempat wisata dan perkemahan yang terletak di desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu. Dahulu Sekipan bernama Sekar Jinggo, tapi pada saat sekarang nama Sekipan memiliki arti tembak yang berasal dari bahasa Belanda. Hal ini dikarenakan pada dahulu kala kawasan ini sering dipakai untuk latihan menembak para tentara. Fungsi sebagai arena *Camping Ground*, Sekipan juga menjadi ajang penelitian jenis tanaman hutan dan pendidikan alam juga dapat digunakan untuk kegiatan *outbond training*.

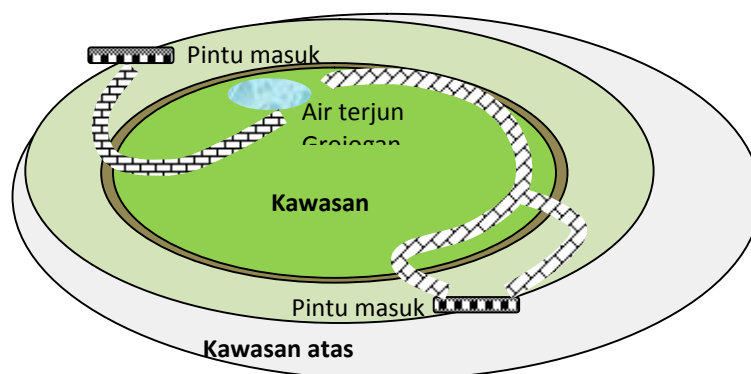
C.2 Potensi Obyek Wisata Grojogab Sewu

Taman Wisata Alam Grojogan Sewu memiliki farmasi geologi yang terbentuk dari batuan vulkanik muda (*young volcanic rock*). Keadaan topografi pada

umumnya bergelombang berat dan curam dengan derajat kemiringan 5°-70° khususnya pada lokasi air terjun kemiringan mencapai 90°, pada bagian utara kawasan tanahnya relatif miring, pada bagian timur kawasan topografinya bergelombang, dan pada bagian barat permukaan tanah turun dan bergelombang. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu memiliki jenis tanah andosol coklat yang berasal dari bahan induk alur/pasir dan top Vulcan. Bagian tengah kawasan yang terletak di jurang yang sangat terjal terdapat air terjun dengan ketinggian 81 meter. Air dari air terjun ini berasal dari Sungai Samin yang mata airnya berada di lereng Gunung Lawu. Sungai Samin ini bermuara di Sungai Mungking dan Sungai Mungking bermuara di Sungai Bengawan Solo, kira-kira 100 km dari Sragen.

Potensi yang merupakan daya tarik obyek wisata ini adalah air terjun setinggi ± 81 meter, Terdapat jalan setapak dengan lebar 1 meter yang menghubungkan pintu masuk ke lokasi air terjun sebanyak 549 trap serta dari lokasi air terjun ke pintu keluar sebanyak 664 trap. Kegiatan yang dilakukan pengunjung pada umumnya adalah menikmati air terjun, panorama alam pegunungan, hutan pinus, dan melihat tingkah laku monyet ekor panjang yang tidak takut pada pengunjung. Pada umumnya para pengunjung mengabadikan momen indah seperti ini, baik dengan memanggil tukang photo (yang berada di sekitar TWA Grojogan Sewu) maupun dengan kamera sendiri atau sementara anak-anak muda dengan camera *handphone*-nya.

Untuk para pedagang yang berjualan di obyek wisata ini juga dibedakan menjadi 2 kawasan. Yaitu kawasan atas obyek wisata dan kawasan bawah obyek wisata (berada di area dalam Grojogan Sewu). Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1: Pembagian kawasan pedagang di Grojogan Sewu

C.3 Sumberdaya Pendukung dalam Pengembangan Obyek Wisata

1. Faktor Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kegiatan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata, transportasi mempunyai peranan yang besar. Faktor aksesibilitas dapat dilihat jarak dari jalan raya, kendaraan menuju obyek, jalan menuju obyek, jumlah dan frekuensi kendaraan umum yang lewat. Kendaraan tersebut meliputi kendaraan umum maupun pribadi sangat lancar menuju obyek. Obyek tersebut berada di tepi jalan raya, dengan keadaan jalan yang sudah beraspal baik bisa dilalui kendaraan roda empat, dan setiap hari obyek-obyek tersebut selalu dilalui kendaraan umum.

2. Faktor Amenitas atau Sarana dan Prasarana Pendukung

Amenitas atau sarana dan prasarana pendukung merupakan faktor yang penting pada pengembangan pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang baik akan sangat berpengaruh pada kemajuan pariwisata. Untuk mengukur sarana dan prasarana digunakan beberapa dimensi yaitu sarana air bersih, sarana ibadah, listrik, tempat parkir, akomodasi berupa penginapan atau hotel, fasilitas MCK, dan warung makan. Dalam hal ini obyek wisata di Tawangmangu dapat dikatakan cukup mendukung.

Obyek wisata Grojogan Sewu termasuk dalam kategori obyek wisata yang memiliki sarana dan prasarana sangat mendukung. Adanya sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan wisata alam seperti *shelter* yang diberikan kenyamanan untuk menikmati abstraksi alam, kolam renang yang menambah daya tarik wisata obyek ini.

3. Peran Koperasi Bina Wisata dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Tawangmangu

Menurut Munkner (1997), pendirian koperasi untuk penggalangan potensi guna memecahkan masalah anggota secara bersama-sama, maka hakekat koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota. Dari artinya inisiatif mendirikan koperasi berasal dari kalangan anggota sebagai pemilik. Oleh artinya jalannya kelangsungan kehidupan koperasi dikontrol oleh anggota sebagai pengendali. Untuk artinya usaha koperasi diperuntukkan bagi anggota sebagai pengguna. Tiga fungsi anggota sebagai pemilik, pengendali, dan pengguna adalah

merupakan jatidiri koperasi, dan yang membedakannya dengan badan usaha yang lain (Soedjono, 2001). Pada dasarnya koperasi menegakkan tiga prinsip utama terkait dengan peran penting anggota: (1) sebagai pengguna-pemilik, (2) sebagai pengguna-pengendali, dan (3) sebagai pengguna-penikmat (Gray & Butler, 1991). Dengan demikian jelas-lah bahwa visi koperasi bertumpu pada kekuatan anggota dan pengawasan oleh anggota, yang menjadi acuan masa depan koperasi (Munkner, 1997).

Koperasi BinaWisata Tawangmangu telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan anggotanya dengan berbagai kegiatan berupa: pendampingan, pemberian pelatihan, bantuan modal, pelatihan dan lain-lain. Anggota-anggota koperasi Bina Wisata adalah para pelaku industri kreatif di Kabupaten Karanganyar yang jangkauan usahanya di obyek wisata. Aktivitas koperasi dalam pengembangan anggota dapat dikategorikan sebagai pengembangan ekonomi kreatif, sebab secara konseptual ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang bertumpu pada aktivitas berpikir dan daya kreasi manusia. Dalam ekonomi kreatif terdapat usaha industri kreatif, yaitu industri baru yang berlandaskan inovasi dan kreativitas, sehingga pelaku dalam industri kreatif harus terus berinovasi dan mengembangkan produk ataupun jasanya.

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia industri kreatif dikelompokkan dalam: (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar seni dan barang antik, (4) kerajinan, (5) desain, (6) fesyen, (7) video, film dan fotografi, (8) permainan interaktif, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11) penerbitan dan percetakan, (12) layanan komputer dan piranti lunak, (13) televisi dan radio, (14) riset dan pengembangan .

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif diperlukan kreativitas sebagai landasan dasar pengembangan usaha kreatif. Terdapat 5 pola pikir utama yang diperlukan untuk menjadikan diri kreatif (Asia, 2011), yaitu: 1) pola pikir disipliner, ilmu seni yang artistik yang bernilai keindahan, 2) pola pikir mensintesa, menuangkan ide-ide baru yang dapat diterima oleh konsumen yang akan meningkatkan nilai jual pemasaran, 3) pola pikir kreasi, kemampuan berkreasi yang menghasilkan desain-desain baru dan menciptakan trend, 4) pola pikir penghargaan yaitu sikap menghargai karya orang lain dan toleransi yang tinggi diantara sesama anggota komunitas yang menghargai perbedaan, 5) pola

pikir etis, memiliki tanggung jawab moral yang tinggi tidak meniru karya produk orang lain, tapi menjadi produktif dalam menghasilkan terobosan baru.

Masih menurut Asia (2011), lingkup ekonomi kreatif sektor pertanian: 1) desain produk, 2) desain kemasan, 3) pengembangan produk; 4) pemanfaatan hasil samping dan limbah pertanian; 5) kerajinan dari hasil pertanian; 6) agrowisata; 7) Taman dan olah bentuk tanaman; 8) pengembangan pupuk organik (padat dan cair); 9) Pengembangan pestisida hayati (bio pestisida); 10) Pengembangan alat/ mesin tepat guna bagi usaha *on farm* dan *off farm*; 11) Pengembangan energi terbarukan (biofuel, biogas, dan biomass); 12) wisata budaya terkait dengan pertanian.

Adapun peran Koperasi Bina Wisata daalam pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan:

- a. Berperan dalam pemberian insentif usaha, dengan pemberian bantuan teknologi dan permodalan, pembinaan dan akses pasar bagi produk-produk kreatif;
- b. Pemberian pelatihan manajemen usaha serta peningkatan semangat kewirausahaan berbasis kelompok melalui pelatihan, bimbingan teknis, magang dan pendampingan;
- c. Pengembangan usaha berbasis pengolahan hasil pertanian;
- d. Pengembangan produk, desain produk, desain kemasan dan kerajinan dari hasil pertanian;
- e. Pengembangan sarana produksi teknologi tepat guna serta mendukung pertanian organik dan pengembangan energi terbarukan.

Berbagai kreatifitas produk yang sudah dikembangkan dengan peran serta koperasi Bina Wisata di Tawangmangu:Kreatifitas produk bidang pangan antara lain: abon jantung pisang,telur asin berbagai rasa, permen pepaya, tomat rasa kurma. Produk olahan lidah buaya, kripik pisang aneka rasa, bahan campuran untuk pakan ternak: tepung kulit kacang tanah, tepung tulang, tepung bekicot, tepung cacing tanah. Berbagai produk tempat-tempat obyek wisata.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam terhadap para anggota Koperasi Bina Wisata, dimana anggota tersebut merupakan para pelaku usaha di obyek wisata di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, menyatakan bahwa

koperasi berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar dalam hal:

1. Mengkoordinasikan para pedagang di obyek wisata Grojogansewu, penataan lingkungan usaha sehingga lebih rapi. Dalam koordinasi tersebut termasuk mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam usaha di obyek wisata, bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan sponsor membangun warung-warung berdasarkan kelompok usaha.
2. Menyeragamkan harga produk sejenis sehingga tidak terjadi persaingan yang saling merugikan. Untuk menghindarkan perang harga yang tidak sehat, atau untuk membuat pengunjung tidak tertipu, koperasi menyeragamkan harga terhadap produk yang sama. Dengan adanya harga yang sama transaksi yang terjadi tidak perlu dengan tawar menawar yang panjang, karena membeli kepada siapapun dengan harga yang sama.
3. Memberikan pelatihan keterampilan pengemasan industri makanan ringan. Koperasi Bina Wisata telah memberi pelatihan dalam pengembangan usaha kepada para pelaku industri rumah tangga yang menjual produknya di obyek wisata berupa: ketrampilan membuat kemasan, pelatihan penggunaan bahan-bahan yang higienis.
4. Memberi pelatihan pemasaran pelaku bisnis/pedagang kecil yang tergabung dalam Koperasi Bina Wisata. Mengingat pentingnya peningkatan volume penjualan, juga diberi pelatihan penggunaan berbagai sarana promosi, dan pelayanan konsumen untuk menjamin kepuasan pembeli.
5. Menjalin jaringan dengan berbagai pihak sebagai mitra bisnis pelaku usaha di obyek wisata. Koperasi menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berguna untuk mengembangkan usaha pelaku usaha. Pihak yang dijalin adalah: PT Duta Indonesia Jaya, yang mensuplai soft drink, dan membangun tempat usaha. Bagi yang kekurangan permodalan Koperasi Bina Wisata menjembatani antara pelaku usaha dengan berbagai lembaga keuangan (Bank Jateng, BPR, dan perusahaan besar dengan program CSR-nya)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Obyek wisata di Tawangmangu memiliki potensi untuk dikembangkan dengan peran sertakoperasi berupa: obyek wisata yang cukup banyak pengunjungnya sehingga potensial untuk pengembangan industri makanan ringan, rumah/warung makan, dan kerajinan tangan.
2. Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif oleh Koperasi Bina Wisata memiliki daya dukung berupa:terdapat sejumlah bidang industri dengan sumber daya pendukungnya yang dapat dikembangkan sebagai industri kreatif di sekitar Kabupaten Karanganyar. Tersedia bahan baku, objek-objek dan tempat yang dapat diberi sentuhan teknologi dan keterampilan SDM untuk memperoleh nilai tambah (*value added*)
3. PeranKoperasi Bina Wisata dalam pengembangan ekonomi kreatif di Tawangmangu berupa: mengkoordinasikan para pedagang di obyek wisata Grojogan Sewu, penataan lingkungan usaha sehingga lebih rapi, menyeragamkan harga produk, memberikan pelatihan keterampilan pengemasan industri makanan ringan, memberi pelatihan pemasaran pelaku bisnis/pedagang kecil yang tergabung dalam Koperasi Bina Wisata, menjalin jaringan dengan berbagai pihak sebagai mitra bisnis pelaku usaha di obyek wisata.

A. Saran-saran

1. Potensi ekonomi kreatif di Tawangmangu cukup besar untuk dikembangkan, karena pengunjung obyek wisata dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kebanyakan pengunjung selama di obyek wisata memerlukan belanja makanan dan minuman. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan membina pelaku usaha supaya berusaha dengan lebih baik.
2. Dalam rangka peningkatan kepuasan pengunjung perlu penganekaragaman produk khas Karanganyar, sebagai souvenir maupun oleh-oleh dari obyek wisata di Tawangmangu. Dalam hal ini Koperasi Bina Wisata Tawangmangu dapat mensponsorinya.

DAFTAR PUSTAKA

Asia (Penyuluh BPSDMP). *Sumber informasi: Pedoman ekonomi kreatif sektor pertanian*. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi. Direktorat jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2011.

Data Demografi Desa Tawangmangu Tahun.2012. *Jumlah Penduduk Menurut Lulusan Tingkat Pendidikan di Kalurahan Tawangmangu 2012*.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2009: “*Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*,” Deperdag RI.

Gray, and Butler. 1991. Charting from Within a Grounded Concept of Member Control. *Journal of Agricultural Cooperation*, Vol. 6, pp. 82-93.

Miles, M. B. and Huberman M. 1992. *Analisis data kualitatif*.(Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.

Munkner, H. 1997. *Masa Depan Koperasi* (Terjemahan). Jakarta: Dekopin.

Soedjono. 2001. *Jatidiri Koperasi dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: LSP21.

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Kecil di Indonesia*, Jakarta.

Efektifitas Pola Pembiayaan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Umkm Klaster Agribisnis Di Propinsi Banten

Meutia

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tirtayasa Banten

e-mail: tia_almer@yahoo.co.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Peran tersebut mendorong Pemerintah dan pihak-pihak yang *concern* terhadap UMKM untuk terus berupaya memberdayakan UMKM agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Salah satu lembaga yang sangat *concern* dalam pengembangan UMKM adalah Bank Indonesia. Banyak kendala dalam pengembangan UMKM terutama masalah permodalan. Bank Indonesia melalui program pembiayaan petani melalui kelompok UMKM klaster agribisnis. Tujuan Kajian ini adalah untuk mengetahui pola pembiayaan dan efektifitas kemitraan pembiayaan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada kelompok klaster UMKM bawang merah di Kabupaten Serang dan kelompok klaster UMKK cabe di Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu melalui FGD dengan fasilitator Bank Indonesia dan kelompok klaster UMKM bawang merah dan cabe merah sedangkan data sekunder diperoleh dari data Bank Indonesia, artikel hasil penelitian Bank Indonesia dan data dari dinas pertanian Propinsi Banten. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas kemitraan pembiayaan terhadap pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten. Hasil kajian pola kemitraan Bank Indonesia melalui sistem pemberdayaan kelompok tani dan pembiayaan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis sangat efektif dalam pengembangan klaster UMKM agribisnis yang ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan dan keahlian dalam berusahatani anggota kelompok klaster agribisnis bawang merah dan cabe merah di Propinsi Banten. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas serta penguatan klaster sehingga kelompok klaster bisa mandiri jika program Bank Indonesia sudah berakhir. Perlu penelitian lanjutan secara kuantitatif untuk membuktikan efektifitas pembiayaan dalam pengembangan klaster UMKM agribisnis.

Kata Kunci : Kemitraan, Pembiayaan BI , Klaster UMKM Agribisnis.

Pendahuluan

Sektor riil yang sebagian besar terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peranan penting yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM telah mampu membuktikan pada saat terjadi krisis di Indonesia dimana UMKM tidak terpengaruh dengan adanya krisis bahkan lebih eksis dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. UMKM memiliki peranan dalam penyerapan tenaga kerja, pengolahan sumber daya lokal, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Sebagian besar UMKM bergerak

dalam sektor usaha pengolahan sumber daya lokal sehingga mempunyai nilai jual sehingga UMKM mapu menambah nilai ekonomi produk. Hal ini akan berdampak pada perekonomian disekitar lingkungan industry sehingga akan membawa *multiplier effect* bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan peranannya yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan maka pengembangan dan penguatan UMKM perlu menjadi perhatian dan kebijakan pemerintah sekarang ini.

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan UMKM baik melalui dinas terkait maupun program-program lain yang dibuat seperti program kewirausahaan pada mahasiswa untuk mendorong munculnya entrepreneur-entrepreneur muda yang lebih kreatif. Peran lembaga swasta seperti perusahaan dan industry untuk mendukung program pengembangan kewirausahaan melalui *Cooperate Social Responsibility* banyak dilakukan. Namun sampai saat ini hasilnya belum maksimal karena kegiatan yang dilakukan lebih individual dan sektoral. Selain itu juga kegiatan tidak dilakukan secara terus menerus melainkan berkala jika ada program saja sehingga kesinambungan kegiatan tidak tercapai. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka perlu pengembangan UMKM yang lebih terpadu dan terarah sehingga UMKM bisa berkembang mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendekatan klaster UMKM merupakan salah satu alternatif yang sudah berhasil dilakukan di negara maju dan beberapa Negara berkembang. Pendekatan klaster dianggap sangat efektif karena dalam pengembangan klaster mensyaratkan keterlibatan seluruh stakeholders sehingga mampu mengembangkan unit-unit usaha lebih efisien dan mampu menstimulasi munculnya UMKM pendukung klaster.

Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sangat peduli dalam kegiatan pengembangan UMKM membuat *pilot project* dalam program pengembangan klaster yang dilakukan di seluruh Propinsi di Indonesia. Ada 6 propinsi yang menjadi sasaran pengembangan klaster UMKM di Indonesia, salah satunya adalah Propinsi Banten. Letak Propinsi Banten yang sangat strategis karena terletak pada lalu lintas nasional antar pulau Sumatra dan Pulau Jawa dan lalu lintas perdagangan internasional karena memiliki bandara internasional Sukarno Hatta. Ada beberapa klaster yang menjadi sasaran Bank Indonesia untuk dikembangkan. Hal itu dilihat dari sumber daya lokal yang dimiliki oleh Propinsi Banten. Kabupaten Pandeglang pengembangan klaster emping melinjo, gula aren dan cabai merah. Kabupaten Serang pengembangan klaster bawang merah yang berada di Kecamatan Kramatwatu. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan klaster agribisnis di Propinsi Banten tidak hanya

sebatas pada pembiayaan tetapi pelatihan dan pendampingan yang langsung di lakukan oleh petani yang sudah berpengalaman. Contohnya studi banding untuk petani bawang merah dan cabai ke Brebes. Kemudian studi banding pengrajin emping melinjo ke Kabupaten Batang dan Bnatul di Jawa Tengah. Berdasarkan fenomena diatas maka kajian penelitian ini ingin menganalisis efektifitas kemitraan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM klaster agribisnis di Propinsi Banten.

Tinjauan pustaka

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimiliki adalah (a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau; (b). Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Sedangkan untuk usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut : (a). Untuk sektor industri, memiliki aset paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) (b). Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per tahun.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan UKM sebagai industri yang memiliki kurang dari 100 karyawan. BPS mengelompokkan industri kedalam 4 golongan yaitu: (1). Industri kerajinan dengan jumlah karyawan 1-4 karyawan. (2). Industri kecil dengan jumlah karyawan 5-19 karyawan. (3). Industri sedang dengan jumlah karyawan 20-99 orang. (4). Industri besar dengan jumlah karyawan lebih besar dari 100 orang

Menurut Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Dinkop PKM), unit usaha yang mempunyai omset kurang dari Rp. 50.000.000,- dan maksimal Rp. 2.000.000.000,-. Dari semua pengertian mengenai UKM, pada dasarnya definisi UKM hanya berhubungan dengan 3 hal (Dinkop PKM, 2005) yaitu : (a) Volume tenaga kerja, (b) Volume penjualan per tahun, (c) Nilai aset di luar tanah dan bangunan.

2. Pembiayaan Bank Indonesia

Peranan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM menurut UU No. 13 Tahun 1968 Bank Indonesia memberikan kredit dengan subsidi bunga (KLBI) dan pemberian bantuan teknis. Terjadi perubahan UU No. 23 tahun 1999 bahwa Bank

Indonesia hanya memberikan bantuan teknis. Pemberdayaan UMKM di Bank Indonesia dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, melakukan penelitian atau survai, memfasilitasi para pihak terkait dalam bentuk kordinasi, dan diseminasi informasi. Salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Kegiatan penelitian dan penyediaan informasi merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka bantuan teknis, sehingga diharapkan akan dapat memberikandata dan informasi yang bermanfaat baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luar yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM.

3. Cluster UMKM Agribisnis

Menurut Porter (1998) klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi. Sedangkan menurut Schmitz (1997) klaster didefinisikan sebagai grup kegiatan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara Enright, M,J, (1996) mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang sejenis/sama atau yang saling berkaitan, berkumpul dalam suatu batasan geografis tertentu (Laporan Akhir Kajian Efektifitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis, UKM Berbasis Agribisnis, 2012).

Pembentukan klaster menjadi sesuatu yang penting karena secara individual UKM seringkali tidak sanggup menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah volume produksi yang besar, standar yang homogen dan penyerahan yang teratur. UKM seringkali mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam pembelian input dan akses jasa-jasa keuangan dan konsultasi. Beberapa contoh keuntungan klaster adalah: (1). Melalui kerjasama horisontal, misalnya bersama UKM lain menempati posisi yang sama dalam mata rantai nilai (*value chain*) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil secara individual, dan dapat memperoleh input pembelian curah, mencapai skala optimal dalam penggunaan peralatan dan menggabungkan kapasitas produksi untuk memenuhi order skala besar. (2). Melalui integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata rantai pasokan), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan diri ke bisnis intinya dan memberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal.

PEMBAHASAN

1. Potensi Propinsi Banten

Banten merupakan provinsi baru di Indonesia yang memiliki banyak potensi bisnis daerah, seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pertambangan. Dengan jumlah penduduk mencapai 10.632.166 sesuai data sensus penduduk tahun 2010, Banten merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan UU No. 23 tahun 2000. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Selat Sunda di sebelah barat; Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di bagian timur; serta Samudera Hindia di sebelah selatan, wilayah Banten menjadi jalur lalu lintas laut yang cukup strategis, yakni menghubungkan antara Australia dengan kawasan Asia, serta menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Peluang investasi di Banten sangat besar dengan dukungan infrastruktur yang sangat baik, yaitu tersedianya Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Merak, Jaringan Jalan Kereta Api Jakarta - Rankasbitung - Merak dan yang terbaru dan sedang dibangun adalah Pelabuhan Bojonegara. Untuk pasokan tenaga listrik, Banten didukung oleh jaringan distribusi interkoneksi Jawa - Bali dengan salah satu pembangkit utamanya yaitu yang berada di Suralaya yang berada di Cilegon. Selain itu juga terdapat pembangkit yang juga dijual untuk publik yang dimiliki oleh PT. Krakatau Daya Listrik (KDL), anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel (KS). Sedangkan untuk sektor industri telah tersedia 17 (tujuh belas) Kawasan Industri yang tersebar di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon (Profil Potensi Investasi Ekonomi Propinsi Banten, 2009)

Sejak tahun 2002 silam, tingkat produksi pertanian di Daerah Banten mengalami peningkatan yang cukup positif meskipun kecenderungannya masih terbilang lamban. Seperti pada tahun 2005, potensi pertanian Banten mulai berkembang menjadi 364.721 ha dan 1.812.495 ton dengan tingkat produksi per hektar sekitar 49,6 ton/ha. Selain itu, produksi tanaman palawija juga mengalami peningkatan sebesar 4,08% setiap tahunnya dengan tingkat rasio mencapai 1,64. Dua tanaman palawija yang cukup diandalkan masyarakat Banten sebagai potensi unggulan yaitu ubi kayu dan kacang kedelai (Potensi Bisnis Propinsi Banten, 2012)

2. Karakteristik Cluster Cabe Merah di Propinsi Banten

Berdasarkan data tahun 2010, Provinsi Banten mengalami kekurangan pasokan cabe sebesar 47.858 ton atau 86,56% dari kebutuhan konsumsinya. Kekurangan pasokan tersebut selama ini dipenuhi dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari luar Jawa. Dengan demikian, klaster cabe di Provinsi Banten memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Dengan letak sentra produksi cabe di Provinsi Banten yang cukup dekat dengan pasar, cabe asal Banten memiliki daya saing yang lebih tinggi karena: 1) Biaya distribusi cabe asal Banten jauh lebih murah dibandingkan cabe asal Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2) Cabe asal Banten lebih segar ketika sampai ke konsumen. Dalam tahun 2009, produksi cabe besar di Provinsi Banten terutama dihasilkan oleh Kabupaten Serang sebanyak 26.649 kuintal atau 65.38% dan Kabupaten Pandeglang 5.947 kuintal atau 14.59% dari total produksi cabe besar Provinsi Banten. Dengan memperhatikan data tersebut maka pengembangan klaster cabe di Provinsi Banten dilaksanakan di daerah produsen utama yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang (Bank Indonesia, 2013).

Salah satu Kabupaten yang dekat dengan Provinsi Banten adalah Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang berpotensi untuk budidaya cabai. Dengan pola sinergi dan kemitraan program pengembangan klaster cabai Kabupaten Pandeglang bisa tercipta menjadi komoditas unggulan. Program klaster cabai BI mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini dinas pertanian dan peternakan baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten, ternyata sangat membantu para petani setempat untuk lebih meningkatkan produksi cabai. Luas panen, produksi dan produktivitas cabai binaan Bank Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai Binaan Bank Indonesia

Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)	Jumlah Luas Panen (Ha)	Produktivitas
Panimbang	465	23	20
Jiput	1180	52	23
Pandeglang	490	46	11

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012

3. Karakteristik Cluster Gula Aren di Propinsi Banten

Gula aren sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir (gula tebu). Gula aren diperoleh dari proses penyadapan nira aren yang kemudian dikurangi kadar airnya

hingga menjadi padat. Produk gula aren ini adalah berupa gula cetak dan gula semut. Gula cetak diperoleh dengan memasak nira aren hingga menjadi kental seperti gulali kemudian mencetaknya dalam cetakan berbentuk setengah lingkaran. Untuk gula semut, proses memasaknya lebih panjang yaitu hingga gula aren mengkristal, kemudian dikeringkan (dijemur atau dioven) hingga kadar airnya di bawah 3%. Jenis yang terakhir ini memiliki keunggulan yaitu berdaya tahan yang lebih lama, lebih higienis dan praktis dalam penggunaannya.

Gula aren selama ini menjadi sumber mata pencaharian penting bagi para petani di sentra-sentra produksinya. Salah satu sentra produksi gula aren di Indonesia adalah di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten yaitu tepatnya di desa Hariang, Kecamatan Sobang. Kabupaten Lebak dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gula aren terbesar di Indonesia. Industri gula aren di kabupaten ini menyerap 5.406 tenaga kerja melalui 2.982 unit usaha mikro dan kecil, belum termasuk tenaga kerja di saluran distribusinya. Kapasitas produksi per tahun mencapai 2.249,4 ton yang tersebar di 44 sentra produksi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lebak, 2005)

Lokasi usaha produksi gula aren sebaiknya berada di dekat sumber bahan baku yaitu nira aren. Hal ini disebabkan daya tahan nira aren hanya tiga jam sebelum menjadi asam akibat proses fermentasi. Oleh karena itu, bahan baku perlu penanganan yang cepat dan nira hasil sadapan harus segera diolah menjadi gula cetak.

Daerah yang memiliki banyak pohon aren, umumnya menjadi lokasi sentra produksi gula aren baik gula aren cetak maupun gula aren semut. Salah satu sentra produksi yang relatif berkembang ada di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Di wilayah tersebut terdapat 44 sentra produksi yang mampu menghasilkan ± 2.249 ton gula aren per tahun (Bank Indonesia, 2009).

Industri gula aren dilakukan secara padat karya sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja dimulai dari penyadapan nira, pembuatan nira, pencetakan, pengemasan dan penjualan nira. Bahan baku diperoleh dari enam kecamatan yaitu, Sobang, Muncang, Malimping, Cijaku, Penggarangan, dan Cibeber di Kabupaten Lebak. Sampai saat ini pemasaran gula aren masih sebatas Kabupaten Pandeglang dan Propinsi Banten.

4. Karakteristik Cluster Emping Melinjo di Propinsi Banten

Emping melinjo merupakan salah satu produk UMKM khas Banten. Hampir seluruh wilayah Banten merupakan daerah yang cocok untuk tanaman melinjo seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Buah melinjo bisa di olah menjadi sayuran dan produk olahan makanan lainnya. Salah satunya adalah olahan emping melinjo. Setiap tahun produksi tanaman melinjo adalah sekitar 200 ribu ton/tahun. Pemasaran emping melinjo sudah tersebar ke seluruh Kota di Indonesia bahkan ke luar negeri. Namun sampai saat ini Pengusaha emping melinjo asal Banten belum berani melakukan ekspor sendiri tetapi masih tergantung pada pengusaha emping melinjo dari Jakarta. Pengusaha emping melinjo menyediakan bahan baku emping melinjo selanjutnya proses grading, pengemasan dilakukan oleh pengusaha Jakarta kemudian emping melinjo di ekspor. Penawaran ekspor emping ke luar negeri sampai saat ini sering terhambat karena terbatasnya kapasitas dan kontinuitas produksi. Padahal pasar luar negeri merupakan pasar yang cukup potensial seperti Arab Saudi, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Taiwan bahkan Belanda. Padahal ketersediaan bahan baku emping melinjo di Propinsi Banten sangat berlimpah.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kerupuk tangkil (emping) di Banten menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Setidaknya, industri rakyat ini, kapasitas produksinya semakin meningkat, dan 500 ton per tahun beredar dan dikonsumsi masyarakat internasional karena sudah berhasil menembus pasar ekspor. Pasar yang sudah ditembus antaranya Singapura, Malaysia, Jepang, dan Amerika. Emping menjadi selingan minum teh oleh sejumlah warga di luar negeri. dari kebutuhan ekspor emping sekitar 1.700 ton per tahun, ke berbagai negara, ternyata pihak ekportir hanya sanggup menyediakan 500 ton saja. Artinya dari kekurangan itu, bisnis ini masih sangat memberi peluang (Harian Umum Pelita, 3 Agustus 2014)

Industri emping elinjo banyak membutuhkan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja dibutuhkan mulai panen melinjo, pengupasan, proses pembuatan emping, penjemuran, penyortiran, pengemasan dan pemasaran emping melinjo. Bahan baku untuk pembuatan emping melinjo di peroleh dari Kabupaten Pandeglang seperti Jiput, Menes, Labuan, Pagelaran dan Saketi. Untuk Kabupaten Serang bahan baku emping melinjo di peroleh dari Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Anyer, Waringin Kurung, Pabuaran dan Padarincang. Sehingga klaster untuk emping melinjo di pusatkan di Kabupaten Pandeglang karena sangat potensial jika dilihat dari jumlah bahan baku dan sebaran pengusaha dan pengrajin emping melinjo (Bank Indonesia, 2009).

5. Pola Pembiayaan Bank Indonesia Pada Cluster UMKM Agribisnis

Kebijakan BI Sejak berlakunya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (sebagaimana di amandemen dengan UU No. 3/2004), maka kebijakan Bank Indonesia

dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor riil telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan tersebut adalah bahwa Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran-peran strategis. Dengan kata lain, Bank Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan (Ashari, 2009).

Pengembangan klaster secara umum yang dilakukan adalah dengan menentukan kriteria dari program/sektor/komoditas yang akan difasilitasi bersama. Sumber informasi yang diperoleh berasal dari *Baseline Economic Survey (BES)*, yaitu survey yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengidentifikasi komoditas unggulan wilayah. Dari data tersebut dilakukan diskusi dengan stakeholder untuk menentukan komoditas terpilih dengan tetap mempertahankan komoditas yang akan dikembangkan pemerintah daerah atau komoditas yang mempunyai daya saing tinggi. Langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi lapangan untuk melihat rantai nilai (*value chain*) dari pelaku yang terlibat sekaligus mengidentifikasi potensi, hambatan, serta daya saing komoditas, dan lain-lain. Hasil identifikasi selanjutnya diklarifikasi dengan pelaku melalui *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menentukan hambatan dan solusi yang akan dilakukan sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dilibatkan. Selanjutnya, intervensi dapat dilakukan berdasarkan tujuan pengembangan yang telah disepakati bersama stakeholders dan pelaku/UMKM. Dalam implementasinya, evaluasi dan monitoring dilakukan pula untuk perbaikan rencana kerja sekaligus mengidentifikasi *lesson learned* yang dapat dibangun bersama *stakeholders*. (Bank Indonesia, 2011).

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BI untuk mendukung program ini adalah

1. Pola pembiayaan UMKM terutama sektor agribisnis saat ini ada 88 pola pembiayaan konvensional dan 21 pola pembiayaan syariah.
2. Pengembangan klaster melalui pengembangan UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan pengembangan klaster komoditas unggulan di 6 wilayah kantor BI antara lain untuk komoditas rumput laut, emping melinjo, paprika dan opak. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah baik pemda, perbankan dan instansi terkait. Sampai sekarang sudah banyak sekali komoditas unggulan yang menjadi objek penelitian BI dalam rangka pengklasteran produk agribisnis.
3. Pola Kemitraan bertujuan melihat berbagai pola kemitraan antara usaha menengah/besar dengan UMKM dalam rangka potensi peningkatan akses kredit ke

bank. Dalam kemitraan tersebut, usaha menengah/besar dapat berperan sebagai pemberi rekomendasi, avalis, dan juga memberikan *cash collateral* bagi UMKM yang menjadi mitra dalam hubungan usaha kemitraan. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang banyak terlibat dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah dan besar (Ashari, 2009)

Pola pembiayaan yang dilakukan untuk pengembangan kluster agribisnis di Propinsi Banten adalah dengan pola kemitraan dan pengembangan kluster. Sampai saat ini banyak pembiayaan yang sedang dilakukan oleh BI untuk komoditas lainnya seperti komoditas bawang merah yang dikembangkan di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dapat dikatakan kegiatan ini sangat efektif karena selain meningkatkan pengetahuan, produksi dan kualitas hasil produksi juga semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan harga jual di pasaran

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan nasional merupakan salah satu lembaga yang sangat berperan dalam melakukan pengembangan UMKM di Indonesia dan pembiayaan untuk sektor agribisnis. Bank Indonesia bekerjasama dengan dinas terkait telah banyak melakukan kajian untuk produk-produk unggulan agribisnis di setiap propinsi yang ada di Indonesia. Hal ini sangat memudahkan para pengusaha, akademisi dan pihak *stakeholder* untuk memperoleh data ataupun informasi pengembangan usaha. Sampai saat ini proporsi kredit untuk sektor pertanian masih sangat rendah yaitu hanya 6 % jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor perdagangan maupun industry. Hal ini disebabkan adanya faktor resiko yang di alami oleh produk-produk pertanian. Rendahnya alokasi kredit disebabkan karena resiko sektor pertanian, tidak ada pengalaman menyalurkan kredit di sektor pertanian, banyak kredit macet seperti KUT, resiko bencana dan resiko admistrasi atau jaminan. Dari sisi petani meminjam uang dengan bank selalu identik dengan administrasi yang rumit, tidak ada jaminan, faktor pelayanan yang tidak baik, tidak adanya jaminan dan kurangnya pengetahuan petani tentang pembiayaan di bank sehingga petani enggan meminjam ke bank melainkan memilih pinjam kepada rentenir. Program yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan solusi bagi petani yang tidak bisa mengakses ke bank komersial. Bank Indonesia memberikan pembiayaan, pelatihan produksi, pendampingan oleh petani yang sudah berhasil bahkan pendampingan pemasaran hasil-hasil pertanian. Ada 3 komoditas utama yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu klusteremping melinjo, gula

aren dan cabai merah. Petani sangat merasakan adanya peningkatan pengetahuandalam mengelola usahatannya sehingga semakin semangat untuk mengembangkan produk tersebut. Perlu ada penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi komoditas unggul lain di Propinsi Banten yang bisa di kembangkan dengan proses kemitraan dari Bank Indonesia. Kajian ini juga bisa dilanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam dan bisa dianalisis secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Akhir Kajian Efektifitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis, UKM Berbasis Agribisnis. 2012

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Lebak. 2005

Biro Pusat Statistik (BPS) .2009

Profil Potensi Ekonomi Propinsi Banten 2009

Laporan Bank Indonesia.2011

Potensi Propinsi Banten. 2012

Pengembangan Agribisnis di Provinsi Banten.2013

Ashari, 2009. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia.

Forum Penelitian Agroekonomi vol.27 No.1 Tahun 2009.

Bank Indonesia, 2009, Pola Pembiayaan Emping Melinjo.

Bank Indonesia, 2009. Pola Pembiayaan Gula Aren

Bank Indonesia, 2013. Pola Pembiayaan Cabe Merah

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Dinkop PKM), 2005. Kriteria UKM dan UMKM

Enright, M. 1996. Regional klusters and firm strategy', in *Business Networks: Prospects for*

Regional Development, Eds. U. Staber, N. Schaefer & B. Sharma, de Gruyter, Berlin and New

Harian Umum Pelita, 3 Agustus 2014, Potensi Emping Melinjo Di Propinsi Banten
<http://investment.banten.go.id>.

Porter, M. 1998a. Kluster and the new economics of competition, *Harvard Business Review*, vol.7, no.6, pp. 6-15.

Schmitz, 1995. Collective efficiency: Growth path for small scale industry *Journal of Development Studies*, vol.31, no.4, pp. 529-566.

RPSEP-78

MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SEBAGAI SARANA INTERAKSI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU

Dr. Tuti Khairani Harahap.S.Sos.,M.Si

Dr. Welly Wirman SIP.,M.Si

Hery Suryadi. S.Sos., M.Si

Auradian Marta.S.IP.,MA

Abstrak

Ruang terbuka hijau merupakan sarana yang di sediakan oleh pemerintah kota untuk kepentingan umum dan milik umum. Selain sebagai penghijauan kota serta sebagai lahan resapan air hujan, ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang spesifik serta sangat penting, yaitu sebagai sarana interaksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan. Bentuk interaksi tersebut bisa berupa jalan-jalan keluarga, olahraga, pertemuan rekan sejawat, dan lain-lain, bahkan ruang terbuka hijau mampu menghidupkan perekonomian kecil masyarakat yaitu berupa perdagangan skala kecil. Dari segi sosial dan budaya, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai sarana pertemuan warga dari berbagai etnis yang berbeda. Menyatukan beragam macam etnis dalam suatu wadah/tempat, dimana isu kesatuan dan kebersamaan antar etnis dalam suatu perkotaan saat ini mulai memudar. Ruang terbuka hijau merupakan ruang ruang publik, tempat para warga melakukan kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia dalam berbagai arah. Mulai dari perkarangan komunal, lapangan desa, lapangan di lingkungan rukun tetangga, sampai ke alun-alun yang berskala kota (Budiharjo, 2005). Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari Propinsi Riau, yang menurut catatan BPS Kota Pekanbaru pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebesar 897.768 jiwa. Pemanfaatan RTH di Kota Pekanbaru saat ini lebih bersifat pengisian hijau tanaman dan tumbuh-tumbuhan secara alamiah. Baru 9% saja yang sudah dimanfaatkan sebagai sarana publik seperti taman kota, tempat rekreasi dan sebagainya. Hasil pengamatan terhadap 4 (empat) lokasi RTH yang ada di Kota Pekanbaru dari aspek kualitas dan kuantitas, dan sebagai tempat interaksi sosial dan budaya masyarakat, di dapatkan temuan bahwa RTH yang sudah memanfaatkan ruangnya sebagai penghijauan kota dan ruang publik adalah Kawasan RTH Universitas Riau di Kecamatan Tampan menempati urutan teratas, di ikuti oleh RTH Kawasan rekreasi Alam Mayang di Kecamatan Bukit Raya, selanjutnya adalah RTH Kawasan Olahraga Caltex Kecamatan Rumbai, dan yang terakhir adalah RTH yang terletak di Jalan Diponegoro Kecamatan Pekanbaru Kota.

Kata Kunci: RTH, Ruang Publik

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang Masalah

Ruang terbuka hijau merupakan sarana yang di sediakan oleh pemerintah kota untuk kepentingan umum dan milik umum. Selain sebagai penghijauan kota serta sebagai lahan resapan air hujan, ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang spesifik serta sangat penting, yaitu sebagai sarana interaksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan. Bentuk interaksi tersebut bisa berupa jalan-jalan keluarga, olahraga, pertemuan rekan sejawat, dan lain-lain, bahkan ruang terbuka hijau mampu menghidupkan perekonomian kecil masyarakat yaitu berupa perdagangan skala kecil. Dari segi sosial dan budaya, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai sarana pertemuan warga dari berbagai etnis yang berbeda. Menyatukan beragam macam etnis dalam suatu wadah/tempat, dimana isu kesatuan dan kebersamaan antar etnis dalam suatu perkotaan saat ini mulai memudar. Ruang terbuka hijau merupakan ruang ruang publik, tempat para warga melakukan kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia dalam berbagai arah. Mulai dari perkarangan komunal, lapangan desa, lapangan di lingkungan rukun tetangga, sampai ke alun-alun yang berskala kota (Budiharjo, 2005).

Budiharjo (2005), menyatakan kota dan daerah pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya, diistilahkan oleh Rapoport sebagai “*cultural landscape*”, dengan beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan, kepribadian. Oleh karena itu yang pertama-tama harus dipahami adalah budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan pengaruh dari tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang mereka anut. Di harapkan adanya ruang terbuka hijau (RTH) dapat mengembalikan kebersamaan dan kesatuan antar umat manusia dari berbagai macam etnis di suatu kota, khususnya kota Pekanbaru.

Budiharjo (1993), ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka untuk tempat bermain, olahraga dan rekreasi, melembutkan kekerasan bangunan, dan memanusiawikan kota. Suatu kota yang hanya sarat dijejali dengan beton, besi, baja, batu dan bata yang serba keras, tidak dilengkapi dengan ruang terbuka dari penghijauan yang mencerminkan kelembutan, berarti sudah dekat dengan ambang kematian. Sebaliknya kota yang kaya dengan taman dan ruang terbuka, apalagi memiliki hutan kota, berarti kota yang menjanjikan kehidupan.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari Propinsi Riau, yang menurut catatan BPS Kota Pekanbaru pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebesar 897.768 jiwa. Perkembangan penduduk tersebut tidak di sertai dengan penyediaan sarana interaksi sosial masyarakat yang memadai seperti RTH. Iklim dan suhu udara Kota Pekanbaru apabila pada musim kemarau rata-rata mencapai 34°C menyebabkan masyarakat Kota Pekanbaru enggan untuk keluar atau berinteraksi antar tetangganya khususnya di siang hari. Belum lagi, tidak adanya kepatuhan para pengembang perumahan terhadap

kebijakan pemerintah kota atas penyediaan RTH di dalam kawasan perumahan yang mereka bangun. Karyono (2010), taman dan jalur hijau kota umumnya diinterpretasikan sebagai lahan kota di mana tumbuhan berada. Meskipun wujud fisik dari taman atau jalur hijau kota tidak seluruhnya berupa tumbuhan, namun peran tumbuhan pada taman dan jalur hijau terhadap kota sangat penting. Bagi kota tropis seperti di Kota Pekanbaru tumbuhan atau pohon yang ditanam pada taman dan jalur hijau berfungsi paling tidak untuk mengurangi pencemaran dan pemanasan udara kota. Manajemen pengelolaan RTH di Kota Pekanbaru yang ditangani oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Pekanbaru saat ini di nilai kurang baik. Hal ini di buktikan dengan banyaknya sampah bertebaran di sekitar RTH. Secara kuantitas, penyediaan RTH di Kota Pekanbaru belum menyeluruh dan tidak merata. Hanya di pusat kota saja yang memiliki sarana RTH yang cukup memadai, belum menjangkau wilayah pinggiran secara maksimal. Umumnya wilayah pinggiran hanya memiliki hutan kota yang tidak tertata dengan baik.

1.2 Rumusan Solusi Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru baik dari kualitas dan kuantitasnya?
2. Apakah Ruang Terbuka Hijau (RTH) mampu meningkatkan interaksi sosial dan budaya masyarakat di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik dari segi Manajemen Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Teridentifikasinya kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru baik dari kualitas dan kuantitasnya?
2. Terbuktinya bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) mampu meningkatkan interaksi sosial dan budaya masyarakat di Kota Pekanbaru?
4. Tersusunnya strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik dari segi Manajemen Publik?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep RTH

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang Terbuka Non-Hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras maupun ruang terbuka biru yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukan sebagai genangan retensi. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang berupa taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga.

Dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya, TPU dan sebagainya.

Irwan dan Djamal (2005), Penghijauan perkotaan merupakan salah satu usaha pengisian Ruang Terbuka Hijau (RTH), perlu ditingkatkan bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Pertimbangannya berdasarkan potensi alam Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan iklim tropis, masyarakatnya mempunyai kebiasaan menanam, adanya kesadaran masyarakat serta rencana pemerintah. Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis. Hutan kota sebagai unsur RTH merupakan subsistem kota, sebuah ekosistem dengan sistem terbuka. Hutan kota diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaan, menyerap hasil negatif yang disebabkan karena aktivitas kota. Aktivitas kota dipicu oleh pertumbuhan penduduk kota, sedangkan pertumbuhan penduduk kota selalu meningkat setiap tahun. Hasil negatif kota antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, menurunnya kelembaban, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung karena hilangnya berbagai vegetasi dan RTH. Dalam hal ini diharapkan hutan kota dapat menyerap panas, meredam suara bising di kota, mengurangi debu, memberikan estetika, membentuk habitat untuk berbagai jenis burung atau satwa lainnya.

Undang Undang Tata Ruang No 26 Tahun 2007, penataan ruang wilayah kota secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dengan proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (menurut Inmendagri No. 14 Tahun 1988 tentang RTH perkotaan) antara lain:

- a. Kawasan hijau pertamanan kota;
- b. Kawasan hijau hutan kota;
- c. Kawasan hijau kegiatan olahraga;
- d. Kawasan hijau pemakaman;
- e. Kawasan hijau pertanian;
- f. Kawasan jalur hijau; dan
- g. Kawasan hijau perkarangan.

Danoedjo (1990) dalam Anonim (1993) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, dimana di

dominasi oleh tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami. Ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan berdasarkan letak dan fungsinya, sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka kawasan pantai;
- b. Ruang terbuka di pinggir sungai;
- c. Ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan; dan
- d. Ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan Bandar Udara.

Berdasarkan fungsi dan luasan, ruang terbuka hijau dibedakan atas:

- a. Ruang terbuka makro, mencakup daerah pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan pengaman di ujung landasan Bandar Udara;
- b. Ruang terbuka medium, mencakup pertamanan kota, lapangan olahraga, dan Tempat Pemakaman Umum (TPU); dan
- c. Ruang terbuka mikro, mencakup taman bermain (*playground*) dan taman lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. *Ameliorasi* iklim, artinya dapat mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
- b. Memberikan perlindungan terhadap terpaan angin kencang dan peredam suara;
- c. Memberikan perlindungan terhadap radiasi sinar matahari;
- d. Memberikan perlindungan terhadap asap dan gas beracun, serta menyaring udara kotor dan debu;
- e. Mencegah erosi;
- f. Merupakan sarana penyumbang keindahan dan keserasian antara struktur buatan manusia secara alami;
- g. Secara tidak langsung dapat memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat;
- h. Membantu peresapan air hujan sehingga memperkecil erosi dan banjir serta membantu penanggulangan intrusi air laut;
- i. Tempat hidup dan berlindung bagi hewan dan pakan micro organisme;
- j. Sebagai tempat konservasi satwa dan tanaman;
- k. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan;
- l. Sebagai pelembut, pengikat dan pemersatu bangunan;
- m. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, apabila jenis tanaman yang ditanam memiliki nilai ekonomis;
- n. Sebagai sarana bersosialisasi antar warga masyarakat; dan
- o. Sebagai media pengaman antar jalur jalan.

2.2 Konsep Sistem Sosial dan Budaya

Sistem sosial merupakan pola-pola tingkah laku manusia, semua gerak-gerik yang dilakukan dari saat ke saat, dari hari ke hari dan dari masa ke masa (Koentjaraningrat; 63). Sistem Sosial merupakan bagian dari sistem budaya dengan pranata universal berupa bahasa, teknologi, pengetahuan, ekonomi, organisasi sosial, keagamaan, dan kesenian.

Budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia (Koentjaraningrat;74). Berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga komponen utama dari kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya (*idea*).
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan atau perilaku berpola dari manusia dan masyarakat (*actifities*).
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*).

Budiharjo (2005:4) kota dan daerah pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya, diistilahkan oleh Rapoport sebagai “*cultural landscape*”, dengan beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan, kepribadian. Oleh karena itu yang pertama-tama harus dipahami adalah budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan pengaruh dari tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang mereka anut terhadap penataan dan bentuk kota maupun daerah. Yang paling rumit dan kompleks adalah perkotaan.

Soemarwoto (2007:15) lingkungan sosial budaya merupakan komponen penting yang ikut menentukan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah kesenjangan. Tergusurnya permukiman rakyat kecil oleh pembangunan dan hilangnya hak adat dan hak mengelola atas tanah mereka, sedangkan mereka tidak dapat banyak menikmati hasil pembangunan, merupakan salah satu sebab penting terjadinya kesenjangan yang makin lebar dan kecemburuan sosial yang semakin meningkat sehingga perlu diwaspadai dalam proses pembangunan.

2.3 Ruang Publik Sebagai Arena yang Menyatukan Kepentingan Bersama

Yang di maksud dengan ruang publik dalam penelitian ini tidak lain adalah suatu tempat yang digunakan secara komunal untuk berbagai kepentingan. Sifatnya khusus jika digunakan untuk kepentingan eksklusif kelompok tertentu, dan bersifat umum apabila menjadi arena berbagai aspek kemasyarakatan (Kusumah, 2007).

Menurut Kusumah (2007) terdapat beberapa macam ruang publik yang dapat menyatukan kepentingan masyarakat bersama, yaitu:

- a. Lapangan Olahraga, ruang terbuka umum yang paling banyak di jumpai di perkotaan dan pedesaan adalah lapangan olahraga, khususnya lapangan sepak bola, voli atau badminton. Lapangan ini bisa dijumpai pada setiap unit-unit perkotaan terkecil yaitu kawasan permukiman. Melalui tampilannya dapat diketahui para pemuda yang berasal dari bermacam-macam etnis, dan satu dengan lainnya mampu menciptakan suasana akrab, berlatih dan sesekali bercanda.
- b. Balai Desa, sebuah bangunan yang di buat khusus untuk pertemuan warga. Balai desa umumnya terletak bersebelahan dengan Kantor Kecamatan. Fungsi dari balai desa adalah tempat interaksi sosial dan pertukaran budaya melalui diskusi bersama untuk menyelenggarakan suatu acara atau event. Salah satu contohnya adalah diskusi penyelenggaraan HUT RI. Selain itu balai desa juga digunakan oleh ibu-ibu dharma wanita untuk menyelenggarakan acara-acara sosial.
- c. Taman dan Ruang Terbuka Hijau
Salah satu dari ruang publik yang paling banyak di jumpai di perkotaan maupun pedesaan. Taman dan RTH selain berfungsi untuk penyegaran dan memperindah kota, juga memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya/interaksi masyarakat. Dengan adanya taman atau RTH dengan ditanami pohon-pohon yang rindang,

seringkali digunakan oleh manusia untuk berteduh dan istirahat tanpa memandang suku maupun etnis.

d. Pasar Tradisional

Sekalipun hanya berwujud sampah tumpah, pasar tradisional telah menjadi arena pertemuan sosial, khususnya kaum ibu yang setiap pagi berbelanja. Secara tradisional, pasar tidak semata-mata menjadi arena jual beli berbagai kebutuhan hidup, namun bisa menjadi ajang yang mempertemukan berbagai hal termasuk sosialisasi nilai antar suku. Di pasar juga, berbagai informasi cepat tersebar, sehingga banyak warga memperoleh pengetahuan justru dari lingkungan pasar.

3. Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan 4 (empat) Kecamatan mewakili 1 (satu) yang memiliki fasilitas umum dan Ruang Terbuka Hijau.

- a. Kecamatan Tampan diwakili oleh RTH Kawasan Universitas Riau;
- b. Kecamatan Bukit Raya diwakili oleh Taman Rekreasi Alam Mayang;
- c. Kecamatan Sail diwakili oleh RTH Jalan Diponegoro.
- d. Kecamatan Rumbai diwakili oleh Lapangan Olahraga Caltex dan Kawasan GOR Rumbai.
- e. Kecamatan Pekanbaru Kota di lokasi Mesjid Agung Annur.

3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Peralatan dan Variabel

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat tulis, alat perekam (*tape recorder*), digital kamera dan berkas-berkas pertanyaan untuk wawancara.

Sedangkan variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

- Lingkungan Fisik
Meliputi: Vegetasi/jenis tanaman, kehadiran burung, kebisingan dan kolam/danau.
- Lingkungan Sosial budaya
Meliputi: fasilitas pendukung (arena bermain anak-anak, sarana olahraga, dan sarana ibadah) dan kehadiran PKL.

b. Teknik Pengumpulan Data

- Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui kepustakaan, data-data instansi, dan wawancara dengan pejabat Pemda, Dinas Kehutanan, tata kota, Dinas

Pertamanan, Kawil Kehutanan, maupun instansi lain yang ada di kota Pekanbaru yang relevan.

- Data Primer
- Data primer di dapatkan melalui melakukan pengukuran di lapangan. Pengukuran dilakukan pada setiap RTH yang terpilih. Pengamatan pada setiap RTH dilakukan selama 30 hari. Peralatan yang digunakan untuk pengumpulan data primer antara lain: kamera digital, tape recorder dan berkas wawancara. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat Kota Pekanbaru yang datang mengunjungi setiap RTH yang di teliti.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006 : 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan melibatkan metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006 : 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Analisis data kualitatif ini terdiri dari:

- Data fisik yang meliputi vegetasi atau jenis tanaman, mengukur jenis tanaman apa yang di tanam di setiap RTH yang dipilih.
- Kehadiran burung, mengamati ada atau tidaknya kehadiran burung pada masing-masing RTH, yaitu pada pagi hari jam 06.00-09.00, dan sore pada jam 16.00-19.00 selama 30 hari.
- Kebisingan diukur dengan menggunakan data skunder, yaitu kepustakaan. Mengidentifikasi jenis tanaman apa saja yang dapat mengurangi kebisingan. Hasil yang diharapkan adalah rekomendasi penanaman tanaman yang dapat mereduksi kebisingan di sepanjang tepian Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Pengamatan pada setiap RTH yang dipilih apakah memiliki kolam/genangan air yang berfungsi sebagai drainase kota untuk mengurangi dampak banjir. Fungsi kolam juga bisa sebagai area resapan air dan juga sebagai sarana rekreasi keluarga yaitu berupa kolam pancing.
- Fasilitas sosial pada RTH yang meliputi area bermain anak-anak. Pengamatan ini dilakukan pada pagi hari di hari libur mulai pukul 7.00 s/d 9.00 dan sore hari mulai pukul 15.00 s/d 17.00 selama 30 hari pada setiap RTH yang dipilih. Pengamatan juga dilakukan terhadap daya tarik ekonomi dengan mengidentifikasi jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang datang berjualan di RTH.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pekanbaru

4.1.1 RTH Universitas Riau (UR)

Beberapa kategori Ruang Terbuka Hijau yang di miliki oleh Universitas Riau antara lain:

1. Kawasan lindung terdapat di Arboretum Universitas Riau.

Kawasan ini merupakan sebagai kawasan hutan lindung binaan. Di dalam kawasan ini terdapat berbagai macam jenis dan spesies tanaman dan hewan. Kawasan ini bersifat tertutup dan dapat di kunjungi apabila memiliki ijin dari yang mengelolah. Kawasan ini difungsikan sebagai laboratorium mahasiswa Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan. Di kawasan ini terdapat waduk buatan yang berfungsi sebagai pengendalian banjir di waktu musim hujan.

2. Kawasan hijau perkarangan terletak di seluruh masing-masing fakultas di Universitas Riau.
3. Kawasan hijau pertanian, terletak di Fakultas Pertanian dan kebun buah di perkarangan Stadion Mini Universitas Riau.
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga, terdapat di Stadion Mini, lapangan olahraga di depan Lembaga Penelitian UR dan sebagian lagi terdapat di setiap fakultas masing-masing UR.
5. Kawasan jalur hijau, terdapat di setiap jalanan yang ada di dalam kawasan UR.

Selain kategori ruang hijau yang disebutkan diatas, terdapat juga ruang hijau publik yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan taman bermain anak-anak yang terbuka untuk publik. Kawasan ini terletak di pintu masuk utama dari Jalan HR Soebrantas.

4.1.2 RTH Taman Alamayang

RTH Kawasan Wisata Alamayang merupakan salah satu kawasan wisata komersial yang menawarkan alam dan nuansa hutan kota sebagai obyek wisatanya. Beberapa obyek lain yang dapat ditawarkan di kawasan ini antara lain adalah kolam wisata, arena permainan anak-anak, outbond, camping area dan sebagainya. Kawasan ini seringkali menjadi lokasi untuk wisata bersama (family gathering) bagi perusahaan-perusahaan, para even organizer yang ada di Propinsi Riau dan acara khusus pendidikan bagi sekolah-sekolah, bahkan pemerintah kerap pula membuat acara di kawasan ini.

kelebihan dari kawasan ini adalah memiliki luas hutan kota yang relatif cukup luas (± 5 Ha) dan cukup terawat serta di dominasi oleh jenis tanaman pohon besar sehingga merupakan tempat yang ideal untuk berekreasi yang sejuk mengingat bahwa Kota Pekanbaru memiliki iklim yang sangat panas.

4.1.3 RTH Jalan Diponegoro

Lokasi RTH Diponegoro terletak di Jalan Diponegoro di samping Hotel Aryaduta Pekanbaru dan di depan Gedung Adat Melayu serta kediaman Gubernur Riau.

RTH Diponegoro merupakan salah satu RTH yang tingkat kunjungannya cukup tinggi, terutama pada hari minggu setelah dikeluarkannya Perda Kota Pekanbaru tentang penetapan kawasan car free day antara jam 6.00 s/d 9.00 minggu pagi hari. Pemberlakuan kawasan car free day dilakukan sepanjang Jalan Diponegoro, sehingga setiap hari minggu pagi kawasan ini padat di kunjungi oleh masyarakat dan pedagang.

4.1.4 RTH Lapangan Olahraga Caltex

Kawasan RTH Lapangan Caltex dan GOR Rumbai terletak di Kecamatan Rumbai di perempatan Jalan Yosudarso dan jalan menuju Komplek Chevron. Kawasan RTH Lapangan Caltex adalah kawasan hijau olahraga yang di bangun dan di bina oleh Perusahaan Minyak Asing Chevron Pasifik Indonesia.

Tingkat interaksi sosial di RTH Lapangan Olahraga Caltex ini cukup tinggi hal ini dikarenakan aktivitas manusia cukup tinggi setiap harinya. Penempatan ruas pedagang kaki lima sepanjang jalur batas kawasan secara permanen merupakan salah satu penyebab banyaknya kunjungan masyarakat di RTH ini. Puncak kunjungan masyarakat terjadi pada hari minggu sore dan setiap harinya (selain hari minggu) pada sore hari, kawasan RTH ini juga ramai di kunjungi masyarakat terutama dengan tujuan olahraga. Kunjungan masyarakat ke arena permainan anak-anak juga cukup tinggi dengan alasan biaya pengeluaran lebih murah daripada membawa anak-anak ke arena permainan yang ada di Mall atau Plaza.

Pembauran antar etnis dan antar kebudayaan juga terjadi di RTH ini. perasaan akan diskriminasi tidak terjadi, karena hampir setiap pengunjung memiliki maksud dan tujuan yang sama. Untuk tingkat keamanan, kawasan RTH Lapangan Caltex ini sama dengan kawasan RTH lainnya yaitu aman dan terkendali.

4.1.5 RTH Mesjid Annur

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Mesjid Annur masuk sebagai kategori Kawasan Ruang Hijau Pertamanan Kota (RTRW, 2006). Kawasan RTH ini merupakan fasilitas dari Mesjid Annur Kota Pekanbaru, yaitu berupa taman perkarangan kawasan mesjid.

Pada setiap harinya, interaksi sosial dan budaya lebih terjadi kepada antar pengunjung RTH. Sedangkan kehadiran pedagang hanya di perbolehkan berada di luar kawasan, umumnya berada pada pintu masuk RTH. Meskipun tidak memiliki fasilitas RTH pada umumnya, interaksi antar tingkat sosial dan kebudayaan terasa hangat di sini, di mana keceriaan dan kegembiraan terasa terlihat dengan jelas. Puncak kunjungan masyarakat terjadi pada setiap hari minggu pagi dimana fasilitas tempat parkir penuh akan kendaraan pengunjung, bahkan kalau sudah melewati jam 7.00 pagi akan sulit untuk mencari tempat parkir. Hal ini terjadi karena RTH Mesjid Annur merupakan

perpanjangan aktivitas dari car free day karena RTH ini berada di ujung Jalan Diponegoro.

Untuk keamanan, kawasan ini aman dari tindak kejahatan sebab kawasan ini di lengkapi dengan keamanan yang di kelolah oleh manajemen masjid.

Tabel 4.1 Identifikasi Terhadap Jenis Tanaman, Kehadiran Burung, Kebisingan, Kolam/Genangan Air, Fasilitas dan Sosial Budaya

	Universitas Riau	Alamayang Diponegoro	Lapangan Caltex	Mesjid Annur	
Tanaman	Rapat	Rapat	Kurang Rapat	Tidak Rapat	Tidak Rapat
K. Burung	Ada	Ada	Sedikit	Sedikit	Sedikit
Kolam	Ada	Ada	Ada	-	-
Fasilitas	Ada	Lengkap	Ada	Ada	Kurang
Sosial Budaya	Sedikit	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber. Hasil Analisis, 2014

4.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat Meningkatkan Interaksi Sosial dan Budaya Masyarakat

Untuk mengukur tingkat interaksi sosial dan budaya dapat menggunakan daftar wawancara langsung secara terstruktur. Gunanya untuk mengukur persepsi masyarakat tentang apa yang mereka rasakan dan apa manfaatnya. Selain itu, pengukuran juga di lakukan terhadap kualitas masing-masing RTH dimana RTH yang memiliki kualitas yang baik di perkirakan dapat menarik pengunjung yang besar sehingga tingkat terjadinya interaksi sosial dan budaya diperkirakan akan tinggi juga. Pengukuran atas kualitas RTH di 5 (lima) sampel Kota Pekanbaru terdiri atas:

4.2.1 Kualitas Jenis Tanaman

Penilaian kualitas jenis tanaman yang di tanam pada setiap sampel RTH di 5 (lima) lokasi pada Kota Pekanbaru pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Pengukuran Kualitas Jenis Tanaman Pada 5 (lima) Sampel RTH Kota Pekanbaru

RTH	Jenis Tanaman				
	UR	Taman Alamayang	Diponegoro	Lapangan Caltex	Mesjid Annur
Jalur Hijau	3	3	2	3	3
T. Pelindung	3	3	2	1	1
Penyangga	3	3	1	1	1
Resapan Air	3	3	1	1	1
Peredam Kebisingan	3	3	1	1	1
Jumlah	15	15	7	7	7

Sumber.: Hasil Analisis, 2014

Dari analisis penilaian kualitas jenis tanaman terhadap 5 (lima) sampel Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Pekanbaru yang berpengaruh secara signifikan terhadap daya tarik masyarakat untuk berkunjung menunjukkan bahwa RTH yang di miliki Universitas Riau (UR) dan RTH Taman Alamayang memperoleh nilai tertinggi yang kemudian masing-masing di ikuti oleh RTH Taman Diponegoro, RTH Lapangan Caltex dan RTH Mesjid Annur.

4.2.2 Kehadiran Burung

Kehadiran hewan unggas jenis burung ternyata memiliki nilai tersendiri dalam mengukur kualitas suatu Ruang Terbuka Hijau (RTH). Umumnya pengunjung RTH dengan tujuan untuk berjalan-jalan dan santai seringkali menyukai RTH yang sering di kunjungi hewan ini. Karena menurut mereka kehadiran burung ternyata dapat mengurangi stress dan merasakan jiwa menyatu dengan alam. Demikian pula dengan pengunjung RTH yang bertujuan untuk mengabadikan sebuah gambar/foto (fotografer), bahwa hewan unggas ini sering dijadikan obyek untuk di shooting melalui kameranya.

Berdasarkan analisis sebelumnya bahwa tingkat kehadiran burung tertinggi ada pada RTH UR dan RTH Taman Alamayang. Hal ini dikarenakan kedua RTH tersebut masih memiliki tanaman/pohon yang besar dengan tingkat kerapatan yang tinggi. Untuk RTH lainnya (Diponegoro, Lapangan Caltex dan Mesjid Annur) juga terdapat kehadiran burung pada saat sepi pengunjung.

Variabel kehadiran burung ternyata memiliki daya tarik tersendiri untuk meningkatkan minat pengunjung, sehingga proses terjadinya interaksi sosial antar masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya baik dari berbagai suku, etnis dan agama.

4.2.3 Kolam Genangan Air

Umumnya kolam genangan air berfungsi sebagai penampungan pada saat hari hujan (*run off*) dan pengendalian banjir. Namun pada RTH kolam genangan air selain

memiliki fungsi diatas, juga memiliki nilai daya tarik tersendiri apabila di kelolah dengan baik. Umumnya kolam genangan air di dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan seperti:

1. Memancing

Kota Pekanbaru memiliki suatu komunitas hobi memancing yang cukup besar di minati masyarakat. Eksistensi mereka cukup luas mulai memancing sekedar di saluran riol kota hingga Sungai Siak/Kampar. Mereka memiliki perkumpulan dengan sebutan KOPER (Komunitas Pemancing Riau). Dari pengamatan di lapangan, hampir setiap harinya ada masyarakat yang memancing di kolam RTH, terutama RTH Diponegoro. Hal ini dikarenakan RTH Diponegoro terbuka untuk umum. Sedangkan RTH lainnya seperti Universitas Riau sebelum tertutup untuk umum, RTH ini banyak di kunjungi oleh komunitas ini. Namun sekarang berkurang setelah tertutup untuk umum. Sedangkan Kolam Genangan di RTH Taman Alamayang juga tidak sepi dari masyarakat pemancing, mereka rela masuk membayar hanya untuk melakukan hobinya terutama pada hari minggu.

2. Rekreasi Air

RTH yang sudah mengelolah kolam genangannya untuk kegiatan rekreasi adalah Taman Alamayang. Berbagai macam permainan air ada di sini, mulai wisata perahu, bola air dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa RTH yang sudah mengelolah kolam genangan airnya akan mendapatkan kunjungan masyarakat yang tinggi.

3. Riset dan Penelitian

Satu-satunya kolam genangan air pada suatu RTH yang digunakan untuk kegiatan keilmuan dan akademik adalah RTH Universitas Riau. Umumnya mahasiswa yang memanfaatkan kolam ini untuk penelitian adalah berasal dari Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Fakultas Teknik. Selain untuk penelitian, kolam genangan air di depan gedung Rektorat UR hampir setiap harinya ada aktivitas masyarakat seperti berfoto bersama, duduk-duduk santai dan bahkan ada yang bermain dan bercanda di jalur titian air.

Dari analisis diatas membuktikan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki kolam genangan air dapat meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan bahwa RTH tersebut ramai di kunjungi masyarakat setiap harinya terutama pada sore hari.

4.2.4 Fasilitas Penunjang

Beberapa fasilitas penunjang RTH yang dianggap perlu dan penting untuk melengkapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tempat sampah, toilet umum, pedestrian/joging track, ruang serba guna, arena bermain anak dan tempat pedagang kaki lima.

1. Kebersihan/Tempat Sampah

Hampir seluruh RTH yang di amati peneliti di lengkapi dengan sarana tempat sampah. Namun demikian tetap saja masih ada terlihat sampah berserakan. Namun

demikian sarana tempat sampah sudah di sediakan hanya perlu kesadaran masyarakat pribadi saja yang perlu di benahi.

2. Toilet Umum

Dari ke-5 (lima) sampel RTH Kota Pekanbaru yang sudah dilengkapi dengan toilet umum adalah RTH Diponegoro, RTH Mesjid Annur dan RTH Taman Alamayang. Tersedianya sarana ini merupakan faktor penting bagi RTH untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.

3. Pedestrian/Joging Track

Umumnya sarana yang satu ini di miliki oleh RTH yang tujuan kunjungan masyarakatnya adalah berolahraga. RTH yang memiliki sarana ini antara lain adalah RTH Diponegoro, RTH Lapangan Caltex dan RTH Mesjid Annur. Tersedianya pedestrian atau jogong track ini merupakan faktor penting bagi kunjungan masyarakat dengan tujuan olahraga.

4. Ruang Serba Guna

Yang dimaksud dengan ruang serba guna ini adalah ruang terbuka bukan hijau yang berfungsi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan bersama-sama. Umumnya di lengkapi oleh bangunan beratap gazebo tanpa dinding pemisah. RTH yang memiliki fasilitas ini adalah RTH Universitas Riau, RTH Diponegoro dan RTH Taman Alamayang. Dari ketiga RTH tersebut hanya RTH Taman Alamayang yang bersifat komersil namun seringkali di sewa/digunakan masyarakat untuk kegiatan sosial budaya terutama pada hari libur.

5. Arena Bermain Anak

Hampir seluruh RTH yang diamati peneliti memiliki arena bermain anak, kecuali RTH Mesjid Annur. Hal ini dikarenakan RTH Mesjid Annur masuk sebagai kategori taman kota dan fungsi utamanya adalah tempat beribadah umat islam. Keberadaan arena bermain anak sudah tentu akan mengganggu aktivitas utama kawasan ini.

6. Tempat Pedagang

Seluruh kawasan RTH dalam penelitian ini memiliki lokasi/tempat untuk pedagang kaki lima, kecuali RTH Mesjid Annur. Kehadiran pedagang dianggap perlu karena mereka melengkapi kebutuhan para pengunjung RTH baik untuk segala aktivitas. Selain itu kehadiran pedagang merupakan bukti bahwa telah terjadinya interkasi dari seluruh kelas sosial masyarakat yang berkumpul dalam satu titik tujuan yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan maksud dan tujuan bermacam-macam.

4.2.5 Tempat Ajangsana Sosial dan Budaya

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang publik yang melengkapi suatu struktur kota dan juga sebagai identitas atau estetika suatu kota. Masyarakat kota yang umumnya masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam ras, suku dan agama yang mencoba memperoleh keberuntungan melalui suatu perkerjaan di kota. Sebagai masyarakat urban yang kesehariannya sibuk dengan berbagai macam aktivitas, maka ruang terbuka publik kota sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan oleh

masyarakat untuk melepas kepenatan, stres, dan juga sebagai tempat untuk berkumpul serta beraktivitas bersama.

Untuk itu supaya ruang terbuka publik tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh penduduk suatu kota, maka ruang terbuka tersebut harus dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang sudah di bahas di atas, sehingga ruang terbuka publik tersebut dapat meningkat kualitasnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi berbagai macam jenis varietas tanaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota, stabilitas lingkungan hidup serta tempat masyarakat mencurahkan/melepaskan beban hidup baik secara jasmani dan rohani di dalamnya.

Berbagai macam kegiatan sosial terjadi di RTH. Terutama di Kota Pekanbaru, ajansana sosial antar masyarakat ini terjadi pada setiap harinya terutama RTH yang memiliki fasilitas penampung ruang publik seperti RTH UR yang hampir setiap harinya digunakan mahasiswa untuk berdiskusi dan belajar. Sedangkan RTH Diponegoro sering digunakan oleh suatu komunitas tertentu untuk beraktivitas, seperti komunitas musik, pantomim dan lain-lain. Sedangkan ruang publik RTH Lapangan Caltex lebih di manfaatkan oleh para pedagang dan jasa. RTH Taman Alamayang lebih bersifat komersial dan sudah diatur oleh manajemen pengelolah atas ruang publiknya untuk kegiatan tertentu. Sedangkan ruang publik RTH Masjid Annur lebih diprioritaskan kepada kegiatan keagamaan, seperti manasik haji, bazar buku keagamaan islam dan lain-lain.

Tabel 4.3 Berbagai Kegiatan Ajansana Sosial Yang Terjadi di Lima Lokasi RTH Kota Pekanbaru

NO	Lokasi	Jenis Ruang Publik	Aktivitas
1	Kampus UR	Bangunan gazebo	Berdiskusi, belajar antar sesama mahasiswa
		Lapangan rumput	Acara kemahasiswaan, promosi stakeholder dll
2	Diponegoro	Bang. Gazebo	Latihan kesenian, pencinta hewan, diskusi dan latihan pelajar
3	Lapangan	Ruang terbuka	Bermain anak dan keluarga,

NO	Lokasi	Jenis Ruang Publik	Aktivitas
	Caltex	perkerasan	menjajakan jasa permainan anak, berdagang mainan, panggung acara kemerdekaan, pagelaran musik dll
4	Taman Alamayang	Gazebo Panggung permanen Lapangan rumput	Acara kekeluargaan, gathering perusahaan, perayaan ultah dll Pegelaran kesenian dan budaya, konser musik dll Acara sosial masyarakat, kegiatan sekolah/pendidikan, acara pemerintahan dll
5	Mesjid Annur	Ruang terbuka perkerasan	Acara panggung keagamaan, bazar-bazar, manasik haji, acara pemerintahan dll

Sumber.: Hasil Analisis, 2014

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki kualitas lingkungan yang terbaik terdapat pada lokasi Universitas Riau (UR) dan Taman Alamayang.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki daya tarik untuk berinteraksi sosial dan budaya yang tinggi terdapat pada lokasi Jalan Diponegoro, Kawasan Mesjid Annur dan Lapangan Olahraga Caltex.

Pada RTH Universitas Riau dan Taman Alamayang tingkat interaksi sosialnya rendah karena kawasan ini tertutup untuk umum dan terbatas, serta bersifat komersil pada Taman Alamayang.

Daftar Pustaka

Anonim, 2013. *Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Permukiman Kota*. Fakultas Teknik Sipil Program Studi Arsitektur UR.

BPS Kota Pekanbaru. 2011. *Pekanbaru Dalam Angka*.

Budiharjo, 2005. *Tata Ruang Perkotaan*. PT. Alumni Bandung.

Budiharjo, 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. PT. Alumni Bandung.

Irwan & Djamal, 2005. *Peranan Bentuk dan Struktur Hutan Kota Terhadap Kualitas Lingkungan Kota (Studi Kasus Lingkungan Permukiman Kota di Jakarta)*. LPPM UMS 2007.

Koentjaraningrat. 1974. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jambatan Jakarta.

Kusumah, Dloyanah. 2007. *Pengelolaan Keragaman Budaya "Strategi Adaptasi"*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Jakarta.

Bappeda Kota Pekanbaru. 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru*.

Soebagio, 2010. *Penataan Pola Ruang Permukiman Tepian Sungai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Berdasarkan Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat* Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang

Soemarwoto, 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press Yogyakarta.

RPSEP-79

Sukuk Negara Ritel, Potensi, Peluang, Tantangan dan Prospek dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Setyo Kuncoro,SS.M.A
FISIP-UT

Abstrak

Indonesia as an archipelago country which desperately needs a great big budget to build all the infrastructures. To meet the budget of the government of Indonesia has a lot of debt to foreign countries. Foreign debt has become a burden of the people of Indonesia in the years ahead. One way to reduce dependence on foreign debt is to collect funds from the people themselves or invite investors to invest in our country. Sukuk is an investment in the form of Islamic bonds which have been issued since 2008. Sukuk issuance is to finance the state budget including project financing. In addition to providing an alternative instrument for sharia-based retail investors, retail state sukuk issuance also strengthens the Indonesian capital market. In the development of the sukuk market is very broad. This provides an opportunity as well as challenges and prospects for the development of Sukuk issuance in the next years. Sukuk issuance is intended to financing National Budgeting (APBN) and reduce the burden of Indonesian foreign debt. Through the issuance of sukuk, it is expected to participate in building the economy of Indonesia.

Keywords : Sukuk, Investment, issuance

PENDAHULUAN

Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No 19/2008 tentang surat berharga syariah Negara). Adapun Tujuannya yakni untuk diversifikasi instrumen dalam pembiayaan APBN, selain itu bisa juga sebagai instrumen investasi dan untuk mengembangkan pasar keuangan syariah. Keunggulan Sukuk Negara yakni antara lain sesuai dengan prinsip syariah, memiliki dasar hukum yang kuat, dapat diperdagangkan melalui pasar saham dan memiliki basis investor yang luas.

Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara Ritel pertama kali tahun 2009 dan kemudian pemerintah melakukan lelang sukuk Negara secara regular tahun 2010 sampai sekarang. Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara secara reguler di pasar domestik dan pasar global sebagai komitmen dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Penerbitan ini memberikan alternatif instrumen yang memenuhi prinsip-prinsip syariah untuk mendukung percepatan peningkatan pertumbuhan institusi keuangan syariah di Indonesia.

1. Dasar Hukum penerbitan SUKUK

Dasar penerbitan SUKUK Negara didasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan fatwa dewan Syariah Nasional

- Undang Undang no 19/2008 tentang SBSN
- Undang-Undang tentang APBN
- Peraturan pemerintah no 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2008 tentang Pendirian PP SBSN Indonesia
- Peraturan menteri keuangan P218/2008 tentang Penerbitan dan penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK 187/2011
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.69/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.70/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.71/2008 tentang Sale and Lease Back
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.72/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.76/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset to be Lease.

2. Teori Keuangan Syariah

Sukuk berasal dari Bahasa Arab صكوك yang berarti dokumen atau sertifikat. Istilah sukuk merupakan bentuk jamak (plural) jamak dari صك Sakk, “ instrument hukum, akta, cek” adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk *obligasi* yang berdasarkan prinsip *syariah*. Kata *Syariah* sendiri adalah aturan atau hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist. Sementara keuangan

syariah (Islamic Finance) adalah suatu sistem keuangan yang diatur dan dikelola berdasarkan syariah Islam.

Berdasarkan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AA)IFI no 17 tentang investmen Sukuk, sukuk didefinisikan :

“Investment Sukuk are certificate of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”.

Yakni sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM-LK), Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas:

1. Kepemilikan asset berwujud tertentu
2. Nilai manfaat dan jasa atau asset proyek
3. Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

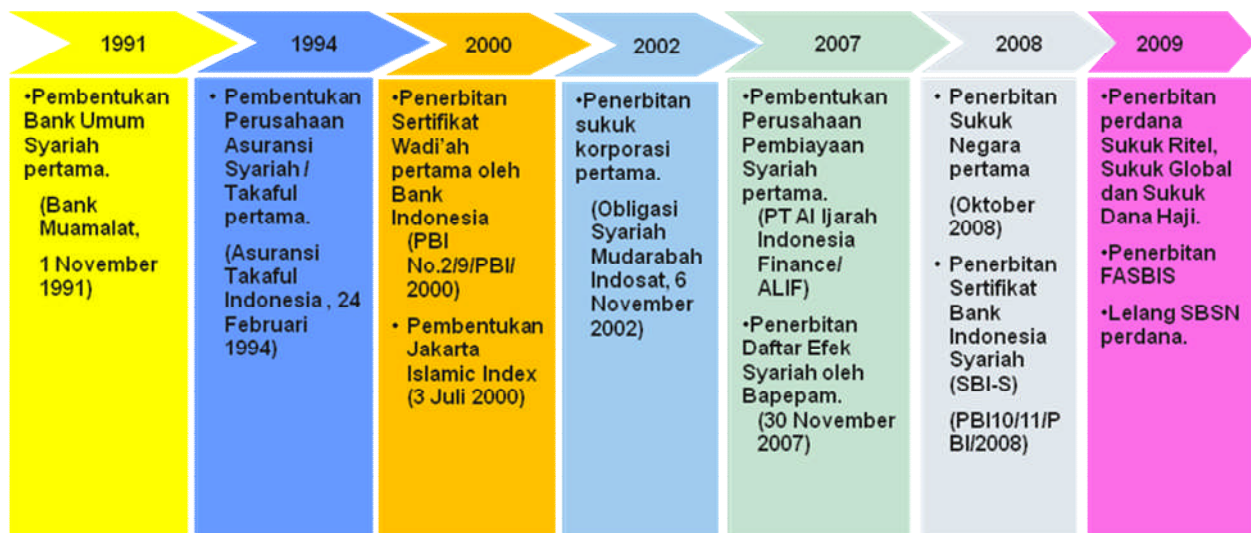
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, sukuk (obligasi syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Mengacu pada AAOIFI, terdapat 14 jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk antara lain sukuk ijarah, sukuk mirabahah, sukuk salam, sukuk istisha, sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk wakalah, sukuk mugharashah, sukuk Muzara'ah dan sukuk musaqah.

PEMBAHASAN

Keuangan syariah berkembang dengan pesat di Indonesia, hal ini dimulai dengan munculnya Bank Syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat tahun 1991 tepatnya bulan November yang diikuti dengan pembentukan perusahaan asuransi 4 tahun kemudian yakni Asuransi Tafakul pertama. Penerbitan Sukuk sendiri baru dimulai tahun 2002 namun masih berupa sukuk korporasi. Tahun 2008 barulah terbit sukuk negara pertama yang kemudian diikuti setahun kemudian dengan varian lain yakni penerbitan sukuk global dan sukuk dana haji. Penerbitan sukuk tersebut sampai tahun 2014 masih terus dipasarkan. Berikut adalah ilustrasi perkembangan keuangan syariah di Indonesia dari tahun 1990an sampai 2009.

Evolusi Industri Keuangan Syariah di Indonesia



- Industri keuangan syariah Indonesia mulai tumbuh dan berkembang pada awal 1990-an di bidang perbankan syariah yang dilanjutkan dengan kemunculan berbagai institusi keuangan syariah seperti asuransi syariah/takaful, perusahaan pembiayaan syariah, dan reksadana syariah.
- Pesatnya perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia antara lain didorong oleh pesatnya pertumbuhan institusi keuangan syariah dan kebutuhan masyarakat akan alternatif investasi.
- Pemerintah Indonesia, melalui penerbitan SBSN (Sukuk Negara), telah menyediakan alternatif investasi berbasis syariah yang banyak dibutuhkan oleh investor, baik syariah maupun konvensional.

Data diambil tahun per Oktober 2013 di Direktorat Pembiayaan Syariah DJPU DEPKEU

Berikut adalah data proyek yang dibiayai oleh sukuk dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dimana total pembiayaannya sudah mencapai 1,52 trilyun.

Proyek/Kegiatan untuk SBSN PBS Tahun 2013

NO	Uraian kegiatan	Keterangan
----	-----------------	------------

1.	Nama Kegiatan	Pembangunanan Jalur Ganda Lintas Cirebon-Kroya Segmen 1
2.	Instansi Pemrakarsa Proyek	Kementrian Perhubungan
3.	Nilai Pembiayaan	Total pembiayaan Rp. 1,5 Triliun <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2013 : Rp. 800 Milyar • Tahun 2014 : Rp. 702 Milyar
4.	Rincian Aktivitas Proyek	Pekerjaan jalan Rel Pengadaan jembatan KA Persinyalan dan telekomunikasi KA Manajemen Konstruksi
5.	Urgensi pelaksanaan Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan salah satu sasaran RPJMN 2010-2014 bidang pembangunan sarana dan prasarana • Prioritas kegiatan untuk menjamin kelancaran distribusi barang, jasa dan informasi • Fokus prioritas untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil

(Data ini diambil dari DEPKEU Direktorat Jenderal DJPU per Agustus 2014)

Dari data tersebut tercatat pada tahun 2013 terdapat satu proyek besar yakni Jalur Ganda kereta api di jalu utara pulau Jawa yang dibiayai oleh sukuk. Pemrakarsa pembangunan tersebut yakni departemen kementrian perhubungan dengan nilai pembiayaan 800 miliar. Pembiayaan jalur ganda ini diterukan pada tahun berikutnya dengan pembiayaan 702 Milyar. Pembiayaan ini adalah bukti nyata pembiayaan oleh sukuk pada sektor riil.

Proyek/Kegiatan untuk SBSN PBS Tahun 2014

NO	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Jalur Ganda (Double Track) kereta api lintas Cirebon-kroya segmen 2	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pmrakarsa : Kementrian Perhubungan • Nilai pembiayaan Tahun 2014 : Rp.745 Milyar
2.	Proyek revitalisasi Asrama Haji/peningkatan sarana	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pemrakarsa: kementrian Agama • Nilai pembiayaan tahun 2014 : Rp. 200 Milyar

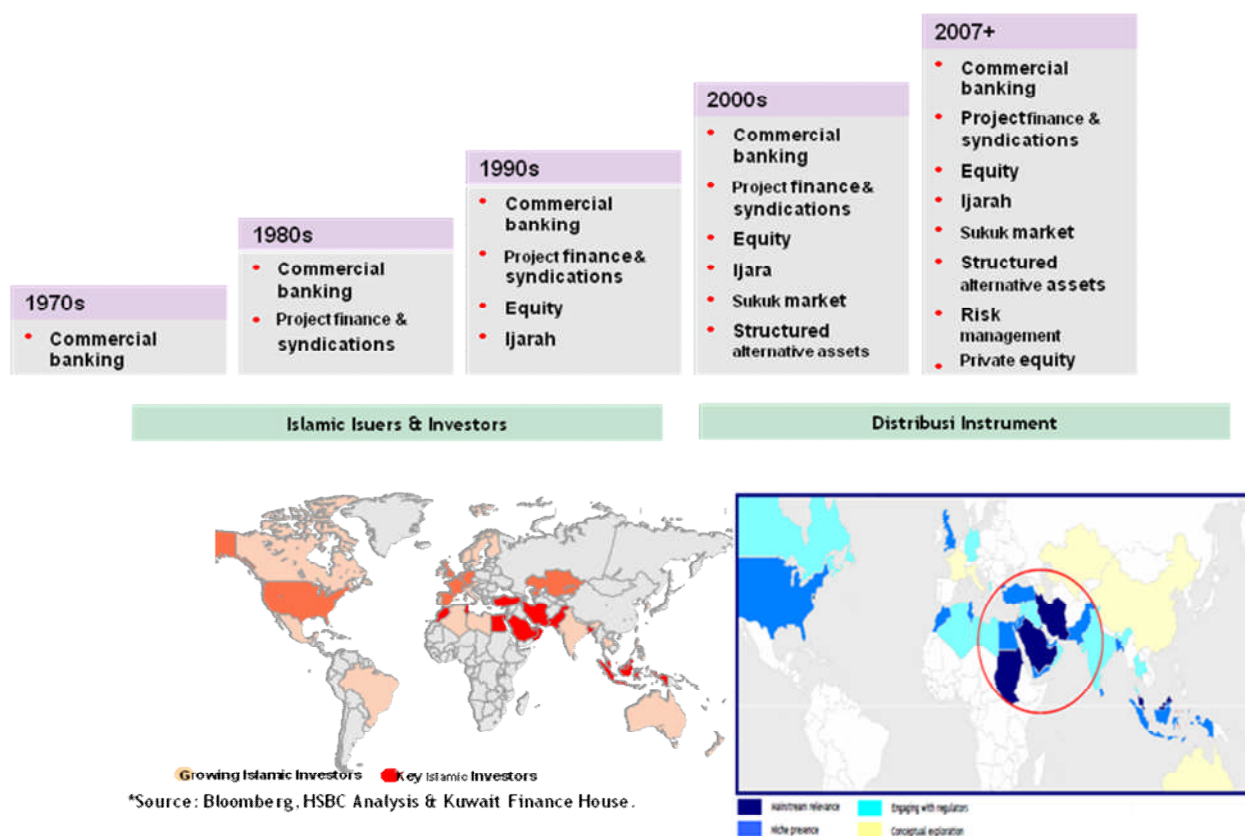
	dan prasaran embarkasi haji	
3.	Pembangunan double – double track kereta api lintas Manggarai-bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi pemrakarsa : Kementerian Perhubungan • Nilai Pembiayaan Tahun 2014 : Rp 626 Milyar, daritotal rencana pembiayaan Rp. 2,7 Triliun untuk pelaksanaan selama 3 tahun

(Data ini diambil dari DEPKEU Direktorat Jenderal DJPU per Agustus 2014)

Pada tahun 2014 selain meneruskan pembiayaan jalur ganda pantura jawa, sukuk juga dipakai untuk membiayai proyek pembangunan revitalisasi asrama haji yang total pembiayaan mencapai Rp.626 Milyar. Rencana pembiayaan ini tiga tahun yang pembiayaannya dilakukan secara bertahap.

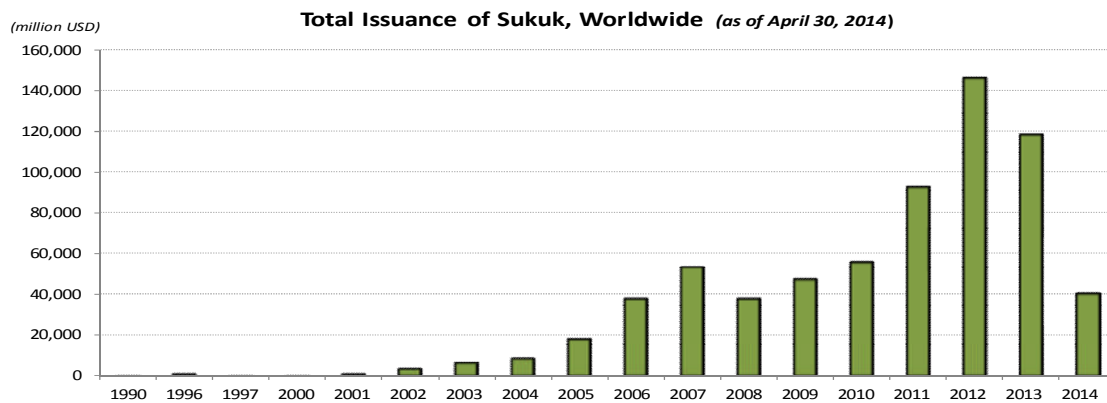
Berikut adalah gambaran evolusi keuangan syariah global mulai dari tahun 1970an sampai 2007an.

Evolusi Industri Keuangan Syariah Global



Dari data diatas bisa dilihat bahwa baru pada tahun 1990an Produk bank Syariah mulai muncul dan pada tahun 2007 varian produk keuangan syariah sudah banyak varian.

Data per 30 April 2014 (DJPU Direktorat Pembiayaan Syariah), memberikan gambaran bahwa tahun 2012 penerbitan sukuk mencapai puncaknya yakni mencapai lebih dari 140 ribu milyar dolar. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 dari triwulan pertama sudah mencapai 40.000 milyar dolar. Melihat fenomena ini dapat dikatakan bahwa prospek penjualan sukuk pada tahun 2014 ini prospeknya sangat menjanjikan melihat pada tiga tahun terakhir ini penjualan sukuk sudah diatas 80.000 milyar dolar.



Negara-negara non-muslim yang telah menerbitkan sukuk

- Jerman : Sachsen-Anhalt [2004]
- USA : East Cameron [2006]
- Jepang : Nomura [2010]
- China : Chinese Power [2006]
- UK : Aston Martin [2007]
British Health Care Unit (2010)
- Kanada : Trustee Societe Montagne (2010)
- Russia : VTB Bank (2010)
- Singapura : Singapore Sukuk Pte Ltd (2011)
- Hongkong : Noble Group Limited (2012 & 2013)
- Gambia : Central Bank of Gambia (2013)

Data diambil dari, Direktorat pembiayaan Syariah-DJPU, Kementerian Keuangan RI

Sukuk pada dasawarsa terakhir ini bukan saja milik negara-negara muslim, data tahun 2013 membuktikan bahwa sudah ada 10 negara non muslim yang telah menerbitkan sukuk. Nilai emisi sukuk internasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total penerbitan sukuk internasional dalam berbagai mata uang sampai bulan April 2014 mencapai US\$ 668,36 Miliar. Negara-negara yang telah menerbitkan sukuk secara reguler baik domestik maupun internasional yakni Indonesia, Malaysia, Bahrain, UAE, Iran, Gambia, dan Saudi Arabia.

Dari data diatas pembiayaan dalam sektor riil masih banyak yang perlu dibiayai. Oleh karena itu pada tahun kedepannya Sukuk memiliki peluang dan tantangan sekaligus prospek untuk pengembangan pembiayaannya.

3. Peluang

Pada tahun 2014 ini institusi keuangan syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat, hal ini memicu tingginya *demand* atas instrumen keuangan syariah. Banyaknya bank konvensional yang membuka bank syariah membuka banyak peluang untuk menjadi agen penjual sukuk negara, artinya semakin banyak pilihan agen bagi investor untuk membeli sukuk negara. *Market Share* sukuk negara yang masih kecil memberikan peluang untuk mengembangkan produk sukuk negara. Pada dasawarsa terakhir banyak negara-negara minoritas muslim seperti Inggris yang telah mengadopsi konsep keuangan syariah. Pemerintah dalam hal ini Kementrian keuangan melalui direktorat pembiayaan Syariah sangat *concern* dengan mengembangkan insustri keuangan syariah domestik.

4. Tantangan

Peluang penjualan sukuk negara yang begitu besar ternyata memberikan tantangan sendiri yakni belum adanya harmominasi regulasi perpajakan yang mengatur berapa nilai pajak yang dikenakan pada sukuk engara ritel. Tantangan lain yakni produk sukuk perlu lebih inovatif lagi sehingga bisa menarik investor. Sukuk negara Ritel ini ternyata juga belum begitu tenar dimasyarakat Indonesia sehingga ini juga menjadi tantangan juga bagaimana mensosialisasikan sukuk kepada masyarakat. Masyarakat masih sangat awam pengetahuannya terhadap sukuk sehingga perlu kerja keras untuk meyakinkan mereka bahwa ini merupakan investasi yang menjanjikan dan aman.

Jika proyek-proyek negara yang diprakarsai oleh masing-masing departemen bisa dibiayai oleh sukuk maka niscaya pembangunan perekonomian di Indonesia akan tumbuh dengan baik karena pemerintah Indonesia tidak perlu lagi berhutang ke luar negeri. Utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 tercatat USD269,3Milyar meningkat 7,1% dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2013 sebesar 4,6%. Utang luar negeri ini biasanya bersifat jangka panjang yang berarti masyarakat Indonesia bertahun tahun akan menanggung beban utang luar negeri bertahun.

5. Prospek

Sukuk pada tahun-tahun ke depan mempunyai prospek yang bagus. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa pemerintah mendukung penuh penerbitan sukuk dengan menerbitkan

banyak varian seri sukuk secara berkelanjutan. Bukti dukungan pemerintah yang lain yakni ditetapkannya proyek di 10 kementerian sebagai *underlying* penerbitan SBSN. Selain dukungan dari pemerintah permintaan atas sukuk meningkat seiring dengan berkembangnya keuangan syariah di Indonesia. Hampir di semua bank di Indonesia membuka bank syariah yang sangat berpotensi sebagai agent penjual sukuk. Banyaknya agent penjual sukuk akan mempermudah investor karena banyak pilihan

PENUTUP

Pada tahun 2014 ini sudah ada sepuluh (10) kementerian yang proyeknya didanai dari hasil penerbitan sukuk, ini berarti bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia sudah mulai bergeser bahwa tidak semua proyek proyek di kementerian itu dananya berasal dari pajak dan utang luar negeri semata. Sukuk bisa menjadi alternatif yang menjanjikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dari rakyat dan pembangunannya pun untuk kemakmuran rakyat pula. Melihat tren penjualan sukuk pada tiga tahun terakhir ini maka pada tahun kedepannya Sukuk memiliki peluang dan tantangan sekaligus prospek untuk pengembangan pembiayaannya. Semakin banyak proyek yang didanai oleh SUKUK maka semakin berkurang pula ketergantungan pada utang luar negeri dan semakin mandiri pulalah pembangunan perekonomian Indonesia karena semua investasi bisa diambil dari rakyat Indonesia sendiri tanpa campurtangan pihak asing dalam pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Nathif.J &Abdulkader Thomas, Islamic Bonds; Your Guide to issuing, Structuring and Inventing in Sukuk, London, Euromoney Books. 2004

Ali, AM.Hasan & M.Nadrattuzaman Hosen, Tanya Jawab Ekonomi Syariah, Jakarta. Komuniaksi Ekonomi Syariah, 2007

Al-kaaf, Abdullah Zaky, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung, CV Pustaka Setia 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Jones, C.O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamidi, M.Luthfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2003. Hoogerwerf. (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.

O'Neill, Sian Sukuk and Islamic Capital Markets: A pRactical Guide. Blobe Publishing Ltd. 2011

Taqi, Usmani Muhammad. An Introduction to Islamic Finance, Mehran Printers, Karachi, Pakistan. 2005
Undang-Undang Syariah Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara

RPSEP-80

Evaluasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi Kota Bandung

Yosef Anton Layanan
Program Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana
Universitas Katholik Parahyangan
josefanton@me.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Tujuan dari Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan serta menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan teori dari Kenneth M. Dolbeare untuk melihat pelaksanaan program, keefektifan program serta dampak yang dihasilkan melalui lima variable yaitu program, tujuan, kegiatan, kriteria efektif dan dampak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik – teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan yaitu wawancara dengan Staff PU PKBL PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dan mitra binaan. Observasi terhadap usaha – usaha mitra binaan serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan program tersebut. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Program BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi efektif. Keefektifan tersebut dapat dilihat dari pengembalian pinjaman yang dikategorikan lancar serta menghasilkan dampak yang positif yaitu semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya hasil penelitian mengenai Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci:Program, Tujuan, kegiatan, Efektivitas, Kemitraan, BumN, Ukm

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia belum dapat dikatakan merata, hal ini dapat diindikasikan dengan tingginya tingkat angkatan kerja akan tetapi tidak berbanding dengan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan taraf hidup masyarakat yang rendah yang akhirnya berujung pada kesenjangan sosial ekonomi

masyarakat. Keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai bagian dari entitas usaha nasional memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Usaha Kecil Menengah merupakan sebuah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.¹

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif. Namun pada kenyataannya, persoalan umum masih melekat pada usaha kecil menengah yaitu² :

1. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dalam mengelola organisasi manajemen baik dalam hal pemasaran, pengetahuan teknologi dan ketidakpahaman dalam membuat laporan. Wawasan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya masih kurang dalam mengembangkan usahanya.

¹ Yudhislibra. "Usaha Kecil Menengah di Indonesia". Diakses di <http://yudhislibra.wordpress.com> pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.10 WIB.

² Komunitas Perbankan. 2011. "Artikel tentang Usaha Kecil Menengah". Diakses di <http://banking.blog.gunadarma.ac.id> Pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.05 WIB.

Tabel 1 Beberapa masalah utama yang terjadi pada Usaha Kecil Menengah (UKM)³

Tipe Masalah	Usaha Kecil Menengah
Kurangnya Modal	40,48%
Bahan Baku	23,75%
Marketing	16,96%
Manajemen & Produksi	3,07%
Persaingan	15,74%
Jumlah	100,00%

Dari tabel di atas, penyebab masalah yang terjadi pada Usaha Kecil dan Menengah yang paling utama dari survey di Jabotabek adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha UKM tersebut. Bahan baku tidak dapat dibeli karena kekurangan modal. Jika barang – barang modal usaha saja tidak dibeli, maka UKM belum dapat memikirkan untuk melakukan pemasaran terhadap usahanya, dia tidak dapat melakukan promosi agar tempat usahanya dikenal. Apalagi ditambah dengan banyaknya persaingan di satu bidang yang sama karena sama – sama ingin usaha dan usahanya itu berkembang.

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) diperlukan suatu badan yang berfungsi sebagai pembantu dan bersifat sebagai pembina. Dimana badan tersebut dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah maju dan berkembang pesat serta dapat melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) masing-masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah

³ Wardoyo dan Hendro Prabowo. “Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek”. Diakses di <http://docs.google.com> pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.15 WIB

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Bahwasannya kepedulian pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) telah ada sejak lama. Pada tahun 1989 Pemerintah RI melalui Departemen Keuangan, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1 – 5 % keuntungannya untuk Pembinaan Usaha Kecil Menengah, sedangkan Pemegang Saham BUMN akan tetap melanjutkan kebijakan penyisihan bagian laba Pemerintah sebesar 1 – 3 % yang digunakan untuk pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi serta bagi pengembangan masyarakat (*community development*). Operasional Pelaksanaannya oleh Kementrian BUMN serta dilaksanakan secara transparan meliputi sistem dan prosedur pengalokasian, penyaluran dan pengembaliannya. Saat ini kegiatan operasional itu dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diatur dalam SK Kementrian BUMN No.Kep_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1-3% dari laba bersihnya untuk membantu masyarakat dimana mereka beroperasi dalam bentuk pinjaman modal kerja dan bantuan lingkungan.⁴

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah yaitu PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Cabang Purbaleunyi. Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM pada PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi mengacu pada Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Nomor : 230/KPTS/2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang di adopsi dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per – 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program penyaluran bantuan lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta investasi saham. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi berupaya memberdayakan ekonomi rakyat melalui perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dengan mengandeng usaha berskala mikro dan menengah sebagai mitra binaan melalui Program Kemitraan BUMN dengan UKM. Program tersebut diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi rakyat dalam kerangka pemerataan pembangunan.

⁴Rachmat Winardi. 2006. “*Evaluasi Efektivitas dan Strategi Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil di Perum Perhutani*”. Diakses di <http://elibrary.mb.ipb.ac.id> pada tanggal 1 Maret 2011 pk 18.30 WIB.

Adapun tujuan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah⁵, yaitu :

1. Mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
2. Menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

STUDI LITERATUR

Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam bukunya Yeremias Keban (2004 : 3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk mengformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan tugas yang telah ditentukan⁶.

McCurdy (1986) dalam bukunya Yeremias keban (2008 : 3), dalam studi literturnya mengemukakan bahwa Administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik⁷.

Nicholas Henry (1988) dalam bukunya Harbani Pasolong, mendefinisikan Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial⁸.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, bahwa administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat proses pembuatan kebijakan oleh aktor pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat yang dilihat dari berbagai dimensi. Salah satu dimensi dalam administrasi publik yang mengkaji permasalahan

⁵ PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk. 2008. "*Panduan Corporate Social Responsibility*". Hal 4

⁶ Harbani Pasolong. 2007. "*Teori Administrasi Publik*". Bandung, Alfabeta. Hal 7

⁷ Yeremias T. Keban. 2008. "Enam Dimensi Strategis Adiministrasi Publik Konsep, Teori dan Isu". Yogyakarta, Gava Media. Hal 3

⁸ Harbani Pasolong. *Op. Cit.* Hal 8

di masyarakat yaitu dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan apa yang harus dikerjakan.

Seperti dalam penelitian ini yang mengevaluasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah, merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu BUMN atau PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada usaha kecil menengah seperti, kurangnya permodalan serta minimnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Kebijakan Publik

Michael Howlett dan M. Ramesh (1995, 7) dalam bukunya Riant Nugroho mengemukakan bahwa "*Public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations*". Kebijakan publik merupakan sebuah fenomena yang kompleks terdiri dari beberapa keputusan yang dibuat oleh berbagai individu dan organisasi.⁹

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) dalam bukunya Riant Nugroho¹⁰, mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

James Anderson (1984 : 3), *Public Policy Making* yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut : "Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".¹¹

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah fenomena yang kompleks dimana terjadi pengambilan beberapa keputusan mengenai suatu permasalahan atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh individu atau suatu organisasi. Kebijakan ini diproyeksikan dengan suatu program yang memiliki tujuan-tujuan tertentu,

⁹*Ibid.*

¹⁰ Riant Nugroho. 2009. "*Public Policy*". Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Hal 83

¹¹ Leo Agustino. 2008. "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*". Bandung, Alfabeta CV. Hal 7

maksud-maksud tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu, kemudian dilakukan sebuah kegiatan untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut yang dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor.

William N. Dunn (1994) dalam bukunya Pasolong "Teori Administrasi Publik", menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.¹²

Chandler dan Plano (1982) dalam *The Public Administration Dictionary*, menyatakan bahwa "*Public Policy is strategic use of resources to alleviate national problems or governmental concerns*". Secara sederhana dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.¹³

Thomas R. Dye (1995 : 2) yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* mendefinisikan kebijakan publik sebagai "segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda".¹⁴

Carl I. Friedrich yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* memberikan sebuah definisi kebijakan publik sebagai "Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada". Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Peterson (2003: 1030) dalam bukunya Yeremias T Keban, berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana".¹⁶

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada". Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada

¹² Harbani Pasolong. *Op Cit.* Hal 39

¹³ Rosyadi. 2009. "*Definisi Kebijakan Publik*". Diakses di <http://arrosyadi.wordpress.com> pada tanggal 22 Maret 2010 pukul 13.55 WIB.

¹⁴ Riant Nugroho. *Op Cit.* Hal 84

¹⁵ *Ibid.* Hal 83

¹⁶ Yeremias T. Keban. *Op Cit.* Hal 61

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana

Dari beberapa definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan keberagaman masalah yang terjadi di dalam masyarakat, maka sebuah kebijakan publik diharapkan dapat merespon secara baik aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kebutuhan yang beragam dan semakin besar, pemerintah pun harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada seperti manusia, akal, dana pembuatan kebijakan dan lain-lain agar menghasilkan bentuk kebijakan yang ideal untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan kebijakan publik yang nantinya diimplementasikan kepada masyarakat, dapat tepat guna siapa sasarannya, kapan dilaksanakannya kebijakan tersebut dan bagaimana cara melaksanakan kebijakan dengan baik dan tepat.

Peneliti mengangkat sebuah kebijakan publik yaitu SK Kementerian BUMN No.Kep_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Tbk Cabang Purbaleunyi. Jasa Marga melaksakan sebuah program kemitraan yaitu penyaluran bantuan lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta investasi usaha. Jadi, Jasa Marga memberikan pinjaman modal usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) dimana UKM tersebut memiliki modal yang terbatas untuk mengembangkan usahanya.

Evaluasi Kebijakan Publik

William M.K Trochim mendefinisikan evaluasi¹⁷ yaitu “*Evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object*”. Artinya penilaian secara sistematis atas nilai atau manfaat dari suatu objek.

Rossi dan Freeman menyatakan evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk menjustifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan tetapi juga

¹⁷William M.K Trochim. 2006. “*Introduction To Evaluation*”. Diakses di <http://www.socialresearchmethods.net>

untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program serta mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut.¹⁸

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999 : 608) dalam bukunya Leo Agustino Dasar-Dasar Kebijakan, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil kebijakan.¹⁹

Definisi lain mengenai evaluasi kebijakan diantaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Joseph S. Wholey, yaitu “*Policy evaluation is the assessment of overall effectiveness of national program in meeting its objectives, or an assessment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives*”²⁰. Evaluasi kebijakan adalah pengukuran dari keseluruhan efektivitas program nasional dalam menemukan sasaran, dan pengukuran dari efektivitas yang relative dua atau lebih program dalam menemukan sasaran bersama.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat – akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program – program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara *policy impact/outcome* dan *policy output*. *Policy Impact/outcome* adalah akibat – akibat dan konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. *Policy output* ialah dari apapun yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah.²¹

James P.Lester dan Joseph Stewart,JR menyatakan “*Policy Evaluation is concerned with learning about the consequence of public policy*”. Evaluasi kebijakan difokuskan pada pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik.

Dari beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian keseluruhan dari aktivitas program nasional untuk menilai sejauh mana sasaran dapat tercapai, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik. Dengan adanya evaluasi, tidak hanya untuk menilai kegiatan yang sedang berjalan tersebut sesuai harapan atau tidak, tetapi juga dapat menghasilkan inisiatif-inisiatif baru untuk memodifikasi kebijakan awal agar menghasilkan peningkatan efektivitas

¹⁸ Prof.Dr.Yeremias T.Keban. *Op Cit.* Hal 79

¹⁹ Leo Agustino. *Op Cit.* Hal 187

²⁰ William Dunn. 1981. “*Public Policy Analysis*” an Introduction, London : Practice Hall International, inc. Hal 340

²¹ *Ibid.* Hal 45

manajemen dan administrasi program serta bentuk pertanggungjawaban hasil kepada pihak yang mensponsori kebijakan tersebut. Evaluasi juga sebagai penilaian akibat-akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas program tersebut karena suatu kebijakan akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik yang berdampak positif dan/atau negatif. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk menilai pelaksanaan dan hasil akhir dari suatu kebijakan dan program publik apakah sesuai dengan tujuan, sasaran dan nilai yang ingin dicapai serta penilaian akibat-akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas program apakah menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik yang berdampak positif dan/atau negatif.

Peneliti akan melaksanakan penelitian evaluasi kebijakan terhadap SK Kementerian BUMN No.Kep_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Tbk Cabang Purbaleunyi yang fokus terhadap program kemitraan BUMN yaitu PT Jasa Marga dengan usaha kecil dan menengah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program kemitraan dan dampak-dampak apa saja yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut.

Menurut Kenneth M.Dolbeare, pada dasarnya *Public Policy Evaluation* ditekankan pada analisis dampak yang menilai proses/cara pencapaian suatu tujuan dimana hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk mengetahuinya maka digunakan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian tujuan/sasaran.²²

Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis yaitu²³ :

1. Program

“program is the basic unit of analysis for assessing policy impacts”. Program adalah unit dasar dari analisis untuk menilai dampak dari kebijakan.

2. Objectives (tujuan)

“Program objective maybe distinguished in term of procedural and outcome objectives”. Tujuan dari program dapat dibedakan dari segi tujuan prosedural dan tujuan dari hasil yang diharapkan.

Tujuan prosedural memperhatikan kinerja dari fungsi administrasi oleh agensi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keseluruhan program. Pada dasarnya tujuan prosedural mengenai sasaran yang relevan pada administrasi internal program

²² Thomas J.Cook dan Frank P.Scioli, *Public Policy Evaluation volume II* (Sage yearbooks in Politics and Public Policy,1975). Hal 97

²³*Ibid.* Hal 96

(implementasi program dan pelayanan). Sedangkan tujuan dari hasil yang diharapkan adalah mengatur target eksternal pada operasi program dimana kinerja program dapat dievaluasi.

3. Activities (kegiatan)

“Program activities refers to the spesific content of program implementation”.

Aktivitas/kegiatan program berkenaan dengan isi yang spesifik dari implementasi program.

4. Effectiveness Criteria

“Program effectiveness criteria refers to the spesific performance measures associated with each outcome objective”. Penilaian hasil yang dihubungkan dengan keluaran dari tujuan.

5. Impact (dampak)

Akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Suatu keadaan yang ingin/tidak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Impact (dampak) terbagi atas primary impact (hasil yang harus segera dicapai) dan secondary impact (konsekuensi jangka panjang).

Adapun alasan penulis menggunakan konsep teori evaluasi menurut Kenneth M. Dolbear terhadap Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi untuk melihat keefektifan dari sebuah pelaksanaan kebijakan dengan mendeskripsikan hasil yang dicapai serta dampak-dampak yang terjadi setelah program tersebut dilaksanakan.

Evaluasi Program

Untuk menilai sebuah keberhasilan kebijakan ataupun program, perlu dilakukannya evaluasi terhadap program secara berkala. Ellen Taylor mendeskripsikan Evaluasi Program adalah *“Program evaluation refers to the thoughtful process to focusing on questions and topics of concern, collecting appropriate information, and then analyzing and interpreting the information for a specific use purpose”*²⁴. Artinya Program evaluasi mengacu pada proses berpikir untuk memfokuskan pertanyaan-pertanyaan dan topik-topik, mengumpulkan informasi yang tersedia, dan setelah itu menganalisa dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk sebuah penggunaan tujuan yg spesifik.

²⁴ University Of Wisconsin Extension. 1996. *“Planning A Program Evaluation”*. Diakses di <http://www.portal.mohe.gov.my> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 20.50 WIB.

Environmental Protection Agency (EPA) mengungkapkan definisi yang berbeda yaitu “*Program Evaluation is a systematic way to learn from past experience by assessing how well a program is working. A focused program evaluation will examine specifically identified factors of a program in a more comprehensive way than from experience that occurs day-to-day*”²⁵. Evaluasi Program merupakan sebuah cara pembelajaran yang sistematis berdasarkan pengalaman masa lalu dengan menilai bagaimana suatu program dilaksanakan dengan baik. Fokus evaluasi program yaitu akan menguji factor-faktor identitas khusus dari sebuah program dengan cara yang lebih komprehensif dibandingkan dengan menguji pengalaman sehari-hari.

“*Program evaluation is the systematic assessment of the operation and/or outcomes of a program or policy, compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program or policy*”. Evaluasi Program adalah penilaian secara sistematis pada sebuah operasi atau hasil dari sebuah program / kebijakan, dengan membandingkan seperangkat standar eksplisit atau implisit sebagai sarana dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan program atau kebijakan.²⁶

Menurut Pemerintah Federal Amerika Serikat yang di kutip oleh Mu'man Nuryana dalam Karya Tulisnya yaitu “*Program Evaluation*” terdapat pengertian evaluasi program yaitu “*A systematic study conducted to assess how well a program is working...typically focused on achievement of program objectives*”²⁷. Artinya sebuah studi sistematis yang dilakukan untuk menguji bagaimana sebuah program berkerja dengan baik....yang secara tipikal focus pada pencapaian tujuan program.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa Evaluasi Program merupakan sebuah studi yang sistematis dalam melakukan penilaian terhadap sebuah program atau kebijakan yang telah diimplementasikan.

Efektivitas

²⁵ US. Environmental Protection Agency. 2009. “*What Is Program Evaluation and Performance Measurement*”. Diakses di <http://www.epa.gov> pada tanggal 2 Maret 2010 pkl 21.05 WIB.

²⁶ Carol Weiss, quoted in. “*Introduction to Program Evaluation*”. Diakses di <http://www.cdc.gov> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 21.10 WIB.

²⁷ Mu'man Nuryana, Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial R.I. “*Program Evaluation*”. Diakses di <http://www.depsos.go.id> pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.15 WIB.

Keefektifan selalu dikaitkan dengan sebuah organisasi, bahwasannya organisasi yang efektif apabila menjalankan sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam program atau kebijakan tersebut.

Menurut Michael C. Lemay, dalam mengevaluasi program terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan, salah satunya adalah efektivitas. "*Effectiveness, which determines the relationship of an organization's outputs to what an organization is intended to accomplish.*"

Efektivitas menjelaskan hubungan antara keluaran organisasi dengan yang seharusnya tercapai. Dalam pengukurannya dapat dihitung dengan nilai persentase atas pencapaian dengan sasaran yang telah ditetapkan.²⁸

Efektivitas menurut Hadayaningrat dalam buku *Azas-azas Organisasi Manajemen* adalah sebagai berikut "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya" (Handayaningrat, 1995:16).²⁹

Sondang P. Siagian (1981:151) yang dikutip oleh Ruswati dalam tugas akhirnya Efektivitas Pelayanan Publik berpendapat bahwa efektivitas³⁰ terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Fremons E yang dikutip oleh Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Organisasi* bahwa efektivitas³¹ berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implicit, yaitu seberapa jauh dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian di bidang sosial dengan menggunakan teknik kualitatif dengan cara atau teknik untuk menggali suatu fenomena sosial secara mendalam.

²⁸ Michael C. Lemay, "*Public Administration: Clashing values in the Administration of Public Policy, 2nd edition*". (USA : Cengage Advertisement). sHal 212.

²⁹ "Pengertian Efektivitas Program". Diakses di <http://docs.google.com> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 19.30 WIB.

³⁰ Ruswati. 2005. "*Efektivitas Pelayanan Publik*". Universitas Jenderal Soedirman. Diakses di <http://www.freewebs.com> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 19.35 WIB.

³¹ Sugiono. 2004. "*Metode Penelitian Organisasi*". Bandung, Alfabeta. Hal 23

Menurut Bagdan dan Taylor (dalam bukunya Lexy. J. Moleong) penelitian kualitatif³² adalah, Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Creswell, (1998:15) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.³³

Penelitian kualitatif dapat dikonstruksi sebagai suatu strategi yang didalamnya lebih menekankan kata-kata dari pada kuantifikasi dalam pengumpulan data, analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (*generate of theory*). Menurut Creswell yang dikutip oleh Ulber Silalahi dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* mendefinisikan penelitian kualitatif “sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pada informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.³⁴

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian metode penelitian kualitatif menurut para ahli, peneliti mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai sebuah teknik untuk menggali dan menyelidiki suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang di deskripsikan dengan kata-kata dan melaporkan pada informan secara terperinci.

Teknik Pengumpulan Data

³² Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung. Hal 49

³³ Iyan Afriani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses di <http://www.penalaran-unm.org> pada tanggal 28 maret 2010 pkl 17.15 WIB

³⁴ Ulber Silalahi. 2006. “*Metode Penelitian Sosial*”. Bandung, Unpar Press. Hal 70

³⁵ Sugiyono. *Op Cit*. Hal 9

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan beberapa macam teknik dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁶

Definisi wawancara menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; 2009, bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁷

Wawancara dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dan pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta ide dan pendapatnya.³⁸

Di dalam proses wawancara mendalam, peneliti mewawancarai beberapa responden yaitu :

- a. Staff Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia Sub Bag PU dan PKBL

³⁶ DR. Deddy Mulyana, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2001). Hal 180.

³⁷ Sugiyono. *Op. Cit.* Hal 231

³⁸ *Ibid.* Hal 233

b. Usaha Kecil Menengah sebagai mitra binaan dari PT Jasa Marga, Tbk

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan jarak jauh, artinya penulis atau peneliti tidak terlibat secara langsung ke dalam aktifitas objek dari penelitian tersebut.³⁹ Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi tidak berstruktur, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan serta peneliti harus mengembangkan daya pengamatannya dikarenakan observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi usaha kecil menengah yang telah menjadi mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2008 untuk melakukan peninjauan terhadap usahanya.

Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Guba dan Lincoln, dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁴¹

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen terbagi menjadi tiga, berbentuk tulisan, gambar serta karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

³⁹ *Ibid.* hal 227

⁴⁰ Iyan Afriani. 2009. "Metode Penelitian Kualitatif". Diakses di <http://www.penalaran-unm.org> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 19.40 WIB.

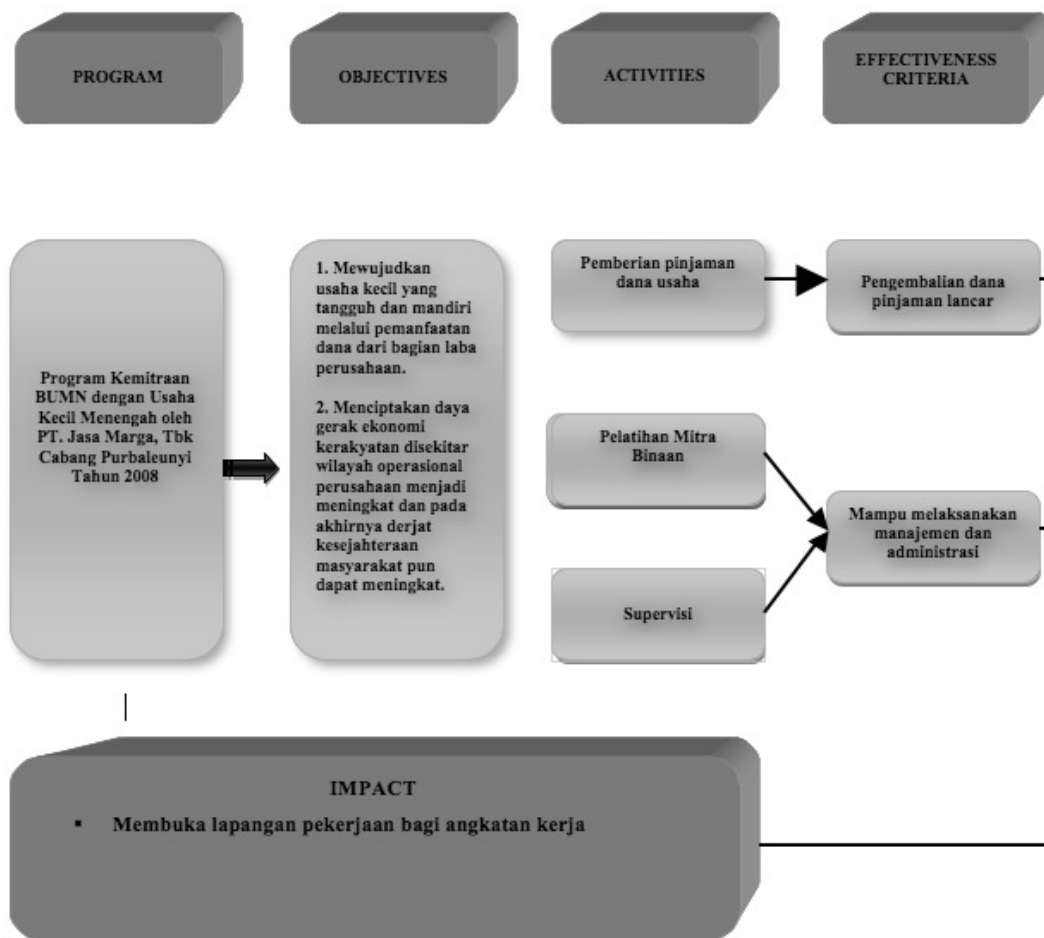
⁴¹ Lexy J Moleong. *Op. Cit.* Hal 216

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya, jika didukung dengan dokumen-dokumen terdahulu yang dapat memperkuat hasil penelitian.⁴²

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen – dokumen yang berhubungan dengan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Dokumen – dokumen tersebut yaitu Modul PT Jasa Marga, Tbk, Panduan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Data mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2008, Modul Panduan Supervisi serta Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Nomor 230/KPTS/2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dokumen – dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu alat pembantu dalam melakukan analisis evaluasi program tersebut.

⁴² Sugiyono. *Op. Cit.* Hal 240



Gambar 1 Model Penelitian

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kemitraan Jasa Marga diimplementasikan ke dalam dua bentuk yaitu bentuk bantuan pinjaman usaha dan dalam bentuk hibah. Bantuan pinjaman ini ditujukan kepada usaha mikro dan mitra binaan lainnya agar mereka terbantu dari segi permodalan dan investasi dalam upaya meningkatkan kinerja dan skala usaha. Pengguliran dana ini diharapkan mampu memberi dampak bagi perluasan kesempatan usaha serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungannya.

Oleh sebab itu, tujuan akhir program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas dan tidak semata untuk pengembangan usaha mitra binaan Jasa Marga itu sendiri. Dari situlah keberhasilan pembinaan Jasa Marga dapat diukur yaitu bagaimana mitra binaan tersebut mampu memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi dirinya maupun masyarakat di lingkungannya.

Dana pelaksanaan program kemitraan berasal dari laba bersih perseroan yang disisihkan sebesar maksimal 2% untuk pendanaan program kemitraan tersebut. Selain menyalurkan bantuan dalam bentuk uang, Jasa Marga menyelenggarakan program pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi kinerja dan produktivitas UKM. Program ini diberikan secara hibah artinya difasilitasi sepenuhnya oleh Jasa Marga. Program ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dan latihan di bidang manajemen usaha kecil serta melibatkan mitra binaan dalam ajang pameran dan promosi di dalam dan luar negeri. Melalui diklat ini, diharapkan UKM memperoleh pengetahuan dan inspirasi tentang pengelolaan usaha secara modern.

Program

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) diperlukan suatu badan yang berfungsi sebagai pembantu dan bersifat sebagai pembina. Dimana badan tersebut dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah maju dan berkembang pesat serta dapat melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) masing-masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Bahwasannya kepedulian pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) telah ada sejak lama. Pada tahun 1989 Pemerintah RI melalui Departemen Keuangan, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1 – 5 % keuntungannya untuk Pembinaan Usaha Kecil Menengah, sedangkan Pemegang Saham BUMN akan tetap melanjutkan kebijakan penyisihan bagian laba Pemerintah sebesar 1 – 3 % yang digunakan untuk pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi serta bagi pengembangan masyarakat (*community development*). Operasional Pelaksanaannya oleh Kementrian BUMN serta dilaksanakan secara transparan

meliputi sistem dan prosedur pengalokasian, penyaluran dan pengembaliannya. Saat ini kegiatan operasional itu dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diatur dalam SK Kementerian BUMN No.Kep_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1-3% dari laba bersihnya untuk membantu masyarakat dimana mereka beroperasi dalam bentuk pinjaman modal kerja dan bantuan lingkungan.⁴³

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah yaitu PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Cabang Purbaleunyi. Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM pada PT Jasa Marg, Tbk Cabang Purbaleunyi mengacu pada Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Nomor : 230/KPTS/2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program penyaluran bantuan lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta investasi usaha. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi berupaya memberdayakan ekonomi rakyat melalui perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dengan mengandeng usaha berskala mikro dan menengah sebagai mitra binaan melalui Program Kemitraan BUMN dengan UKM. Program tersebut diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi rakyat dalam kerangka pemerataan pembangunan.

Tujuan

Tujuan dari Program Kemitraan BUMN dengan UKM terbagi menjadi dua bagian, yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan serta menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa dalam kurun waktu yang singkat, melainkan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pencapaian tujuan secara bertahap dapat terlihat dari kemajuan manajemen usaha mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dalam hal sumber daya manusia dan keuangan.

Kegiatan

⁴³ Rachmat Winardi. 2006. "Evaluasi Efektivitas dan Strategi Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil di Perum Perhutani". Diakses di <http://elibrary.mb.ipb.ac.id> pada tanggal 1 Maret 2011 pk 18.30 WIB.

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi memiliki kegiatan – kegiatan sebagai upaya untuk tercapainya tujuan. Terdapat tiga kegiatan, yaitu pemberian pinjaman dana usaha, pelatihan mitra binaan dan supervisi. Pemberian pinjaman dana usaha merupakan inti kegiatan dari Program Kemitraan. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi harus mampu memilih calon mitra binaan secara tepat. Ketepatan memilih calon mitra binaan merupakan sesuatu yang penting, peminjaman modal usaha harus diberikan kepada UKM yang benar – benar membutuhkan dana untuk tambahan modal usahanya. Selain itu, persyaratanpun menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi oleh masing – masing UKM yang akan menjadi mitra binaan dan akan mendapatkan pinjaman modal usaha.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh UKM atau calon mitra binaan, yaitu :

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
6. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan.
7. Tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN lain.
8. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable)
9. Mengisi formulir dari PT.Jasa Marga.

Pelatihan, Dalam program mitra binaan ini, PT. Jasa Marga, Tbk tidak hanya sekedar memberikan sebatas bantuan peminjaman modal saja, tetapi Jasa Marga juga memberikan sejenis pelatihan mitra binaan bagi mitra binaan yang dikategorikan lancar dalam melunasi pembayaran pinjaman modal dan mitra binaan yang dapat dikatakan berhasil dalam usahanya. Beberapa kategori kualitas pinjaman mitra binaan adalah :

Pinjaman lancar, Pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman kurang lancar

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman diragukan

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 90 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman macet

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Supervisi, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi yaitu melalui supervisi, yang biasanya dilaksanakan setelah diadakannya pelatihan. Dalam pelatihan, mitra binaan dibekali materi yang cukup banyak mengenai usahanya yaitu seperti rekrutmen, pembuatan laporan keuangan, mengatasi masalah, promosi, produksi dan lainnya. Untuk mengetahui hasil dari pelatihan mitra binaan, staff PU dan PKBL melaksanakan supervisi, yang bertujuan untuk:

Mengetahui pemahaman mitra binaan terhadap materi pelatihan yang telah diberikan.

Mengetahui sejauhmana materi pelatihan dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha mitra binaan.

Memberikan bantuan bimbingan konsultasi usaha terhadap kekurangan dalam pelaksanaan usaha mitra binaan.

Membina hubungan yang lebih erat antara pembina dan mitra binaan sehingga pembina dapat melakukan monitoring secara efektif terhadap mitra binaan. Tahapan dalam supervisi ada 3 tahap, yang terdiri dari :

1. Identitas kelembagaan : bidang organisasi, nama perusahaan, badan hukum perusahaan dan status kepemilikan.

2. Materi pendukung supervisi : bidang manajemen produksi, lay out tempat produksi, manajemen pemasaran dan keuangan.
3. Materi pokok supervisi : target market, penerapan strategi produk dan harga, penerapan strategi promosi dan distribusi.

Supervisi yang seperti dijelaskan oleh staf program kemitraan, benar – benar dilakukan oleh Jasa Marga kepada UKM yang diberi tanggung jawab pinjaman modal. Jasa Marga masih bertanggung jawab kepada mitra binaannya demi tujuan program kemitraan ini yaitu kemajuan usaha UKM, UKM tidak hanya memperkaya usahanya tetapi juga dapat membina dan memberdayakan lingkungan sekitarnya seperti membuka lapangan kerja dengan orang lain.

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh staff PU dan PKBL sebanyak 3 kali menggunakan metode yang berbeda – beda. beberapa metode yang berbeda. Beberapa metode yang digunakan dalam melakukan supervisi yaitu :

1. Kunjungan langsung berupa observasi dan wawancara
2. Analisis dari data dan informasi
3. Penilaian
4. Konsultasi usaha
5. Rekomendasi

Kriteria Efektivitas

Program kemitraan ini memang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp. 200.000.000,-. Beberapa UKM sangat merasakan keuntungan dan manfaat yang besar dari program ini, namun ada juga yang tidak merasakan manfaat yang optimal dari program ini. Jasa Marga tentu tidak bisa melarang penggunaan pinjaman modal untuk membiayai kebutuhan pribadi. Walaupun digunakan untuk kebutuhan dan biaya rumah tangga pribadi, Jasa Marga menganggap bahwa pada akhirnya UKM tersebut dapat melunasi pinjaman modal beserta bunganya. Pengembalian pinjaman Jasa Marga dapat dikatakan lancar karena menurut hasil wawancara dengan staf PU dan PKBL, setiap bulannya pasti ada yang membayar cicilan pinjaman modal tetapi ada yang membayar setengah dari kewajiban bulanannya, ada yang sepenuhnya, ada juga yang membayar dalam 1 bulan dengan kewajiban 3 bulan. Namun, sebaiknya setiap UKM harus membayar cicilan sesuai dengankewajibannya yang harus dibayarkan setiap bulan karena Jasa Marga memiliki target pembayaran cicilan pinjaman modal setiap bulannya.

Dampak

Membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, tujuan program mitra binaan PT. Jasa Marga, Tbk dengan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah :

1. Mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
2. Menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan di sekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

Jasa Marga adalah salah satu badan yang berfungsi juga sebagai pembantu yang bersifat pembina yang melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) masing – masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, Jasa Marga melaksanakan sebuah program kemitraan yaitu memberikan pinjaman modal kepada UKM yang dinilai memiliki kesulitan dalam pengadaan modal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti menilai bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki banyak aspek pendukung untuk mengukur hal tersebut. Salah satunya adalah terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Dengan program mitra binaan ini, UKM terbantu dalam hal pengadaan modal usaha. Peningkatan usaha tidak hanya dinilai dengan meningkatnya keuangan perusahaan, namun perusahaan dalam bentuk apapun akan melakukan ekspansi seluas – luasnya dalam hal pemasaran, penjualan, promosi, dan tentunya saat perusahaan melakukan kegiatan tersebut, dia akan sangat membutuhkan sumber daya – sumber daya untuk menggerakannya, salah satunya manusia.

B. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sudah berjalan efektif. Keefektifan pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah dapat dilihat melalui beberapa variable, yaitu :

1. Program

Program Kemitraan BUMN dengan UKM merupakan sebuah wujud kepedulian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi merupakan salah satu BUMN yang telah melaksanakan program tersebut, dengan menyisihkan laba perusahaannya 1 – 3 % yang akan disalurkan kepada UKM dalam bentuk pinjaman modal usaha. Program Kemitraan BUMN dengan UKM yang dilakukan oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sangat membantu para UKM yang memiliki kelemahan dalam hal permodalan.

2. Tujuan

Tujuan dari Program Kemitraan BUMN dengan UKM terbagi menjadi dua bagian, yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan serta menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa dalam kurun waktu yang singkat, melainkan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pencapaian tujuan secara bertahap dapat terlihat dari kemajuan manajemen usaha mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dalam hal sumber daya manusia dan keuangan.

3. Kegiatan

Dalam Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi memiliki tiga kegiatan yaitu pemberian pinjaman dana usaha, pelatihan mitra binaan dan supervisi.

- Pemberian pinjaman dana usaha kepada UKM merupakan kegiatan utama dalam Program Kemitraan. Prosedur dalam mengikuti Program Kemitraan tidak sulit, UKM hanya memenuhi syarat yang telah ditentukan, mengisi proposal yang diberikan oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Bunga pinjaman modal usaha tidak terlalu besar, sehingga tidak memberatkan mitra binaan dalam membayar angsuran cicilan yang dilakukan setiap bulan.
- Pelatihan mitra binaan hanya ditujukan untuk mitra binaan yang dikategorikan lancar dalam pengembalian cicilan angsuran. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para mitra binaan (UKM), khususnya untuk usahanya karena materi yang diberikan dalam

pelatihan mengenai manajemen usaha dalam hal sumber daya manusia, keuangan, promosi serta daya saing.

- Supervisi merupakan bentuk pengawasan dari PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi terhadap mitra binaannya atas pelatihan yang telah diberikan. Supervisi dilakukan dalam tiga tahap yaitu organisasi, manajemen usaha dan distribusi. Metode yang digunakan kunjungan, data atau informasi dan konsultasi.

4. Kriteria Efektif

Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sudah efektif. Kefektifan tersebut dilihat dari adanya pengembalian pinjaman cicilan yang lancar. Tidak hanya itu, pelaksanaan pelatihan mitra binaan yang efektif juga memberikan kemajuan pada UKM secara bertahap melalui pengelolaan usaha yang semakin baik dari segi sumber daya manusia, pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan cara promosi serta memiliki daya saing yang kuat.

5. Dampak

Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM memunculkan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Dampak yang terjadi dengan adanya program tersebut yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Seiring dengan peningkatan dan kemajuan usaha tentunya kebutuhan karyawanpun semakin meningkat. Dengan adanya hal tersebut dapat memunculkan lapangan pekerjaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada Staff PU dan PKBL PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dalam melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah. Beberapa saran tersebut, yaitu :

- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah, karena usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat lemah dalam hal permodalan serta sumber daya manusia.
- Demi terbentuknya usaha kecil menengah yang tangguh dan mandiri, perlu adanya pelatihan bagi mitra binaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Khususnya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sederhana.

- Ketepatan dalam menyaring calon mitra binaan dalam proses penyaluran dana program kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta CV.

Carol Weiss, quoted in. "Introduction to Program Evaluation". Diakses di <http://www.cdc.gov>

Cook, Thomas J dan Scioli, Frank P, 1975, *Public Policy Evaluation volume II*. (Sage yearbooks in Politics and Public Policy).

Dunn, William, 1981, *Public Policy Analysis. an Introduction*, London : Practice Hall International, inc.

Keban, Yeremias. T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Adiministrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Lemay. Michael C. *Public Administration : Clashing values in the Administration of Public Policy, 2nd edition*. USA : Cengage Advertisement.

Mulyana.Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja RosdaKarya.

Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press.

Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Ghalin Indonesia.

Sugiono, 2004, *Metode Penelitian Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk. Nomor : 230/KPTS/2007 Tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Modul PT Jasa Marga, Tbk. *Profil dan Laporan Perusahaan*.

PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk. *Panduan Corporate Social Responsibility*.

Iyan Afriani. 2009. *Metode Peneltian Kualitatif*. Diakses di <http://www.penalaran-unm.org>
Komunitas Perbankan. 2011. "Artikel tentang Usaha Kecil Menengah". Diakses di <http://banking.blog.gunadarma.ac.id>

- Mu'man Nuryana, Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial R.I. "*Program Evaluation*". Diakses di <http://www.depsos.go.id>
- PT Jasa Marga, Tbk. 2011. "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*". Diakses di <http://www.jasamarga.com>
- Rachmat Winardi. 2006. "*Evaluasi Efektivitas dan Strategi Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil di Perum Perhutani*". Diakses di <http://elibrary.mb.ipb.ac.id>
- Ruswati. 2005. "*Efektivitas Pelayanan Publik*". Universitas Jenderal Soedirman. Diakses di <http://www.freewebs.com>
- University Of Wisconsin Extension. 1996. "*Planning A Program Evaluation*". Diakses di <http://www.portal.mohe.gov.my>
- US. Environmental Protection Agency. 2009. "*What Is Program Evaluation and Performance Measurement*". Diakses di <http://www.epa.gov>
- Wardoyo dan Hendro Prabowo. "*Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek*". Diakses di <http://docs.google.com>
- William M.K Trochim. 2006. "*Introduction To Evaluation*". Diakses di <http://www.socialresearchmethods.net>
- Yudhislibra. "Usaha Kecil Menengah di Indonesia". Diakses di <http://yudhislibra.wordpress.com>

RPSEP-81

WOMENPRENEURSHIP DI INDONESIA

Helmiatin

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
E-mail:helmi@ut.c.id

Abstract

Entrepreneurship has become more increasing these recent years. We can see more employees are getting to be being self-employed nowadays. On a larger scale, we know several successful entrepreneurial figures in Indonesia. Their success is not a coincidence, but equipped with hard work, tough, and responsibility in the process leading to success. The process needs training to develop themselves and the company. Nowadays women have overtaken men in the business world. Women entrepreneurs' have a dual role, as well as family support also a leader for their company. Women entrepreneurs have proven their good work in these fields of business by creating more job opportunities to others, and help them become more self-independent woman. They are not involved in small business only, but also in big business. Some of them have become successful businessperson who is able to get into the list of wealthy executives. The following paper tries to see the role and challenges of womenpreneurs in Indonesia.

Keyword: entrepreneurship, womanpreneur

PENDAHULUAN

Bila berbicara mengenai kewirausahaan yang pertama terlintas dalam benak sebagian orang adalah usaha mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Lalu seorang usahawan atau *entrepreneur* diidentikkan dengan seorang bisnismen yang sukses dan memiliki jiwa ulet dan rasa percaya diri tinggi dalam menjalankan usahanya.

Kewirausahaan dan wirausaha merupakan satu istilah yang sangat penting akhir-akhir ini. Sepertinya baru saat ini banyak pihak yang menyadari peran *entrepreneur* di dunia kerja. Bila kita mengingat pada masa lalu ketika pilihan untuk menjadi seorang wirausaha belum menjadi pilihan yang populer bagi lulusan sarjana atau sekolah menengah. Menjadi karyawan baik sebagai Pegawai negere Sipil (PNS) seakan masih melekat dalam benak mereka karena menjanjikan keamanan dan kerja dan kepastian pensiun. Bahkan mata kuliah kewirausahaan dirasakan hanya sebagai “pelengkap” di dalam perkuliahan. Karena hanya mempelajari teori

tanpa ada praktek nyata bagaimana caranya untuk memahami kewirausahaan itu.

Baru ketika Ciputra, seorang pengusaha sukses memiliki ambisi untuk menularkan jiwa bisnisnya ke masyarakat Indonesia, istilah *entrepreneurship* atau kewirausahaan menjadi lebih dikenal. Seorang *enterpreneur* bukanlah seorang “pengusaha biasa”. Wirausahawan adalah seorang yang mengupayakan dirinya menjadi pengusaha yang mandiri, yang merintis usaha bisnisnya dari bawah (Marzuki, 2011). Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia masih sedikit memiliki *entrepreneur*. Untuk itulah, Ciputra masih memiliki ambisi untuk menularkan jiwa wirausaha dari Sabang hingga Merauke.

Ketika topik tentang *entrepreneurship* menjadi satu hal yang banyak diangkat di berbagai media, keberadaan *womenpreneur* atau pengusaha wanita menjadi satu hal yang berbeda. Berbeda dalam arti masih belum banyak orang yang menyadari keberadaannya di Indonesia

Bila berbicara tentang pengusaha wanita jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Karena dunia usaha kerap bersinggungan dengan hal-hal yang ‘keras’ seperti persaingan dan dibutuhkan mental kuat, maka seorang wirausaha masih didominasi oleh kaum pria. Sebagaimana diungkapkan oleh IWAPI bahwa pengusaha wania di Indonesia belum mencapai satu juta pengusaha. Baru sekitar 0,25 persen pengusaha perempuan yang eksis dan aktif melakukan jiwa wirausahanya di Indonesia (<http://batam.tribunnews.com/2012/12/22/>).

Walaupun sebenarnya banyak tokoh wanita yang ketika menjadi pengusaha mampu memberikan sumbangan terhadap kemajuan bangsa seperti menggerakkan perekonomian. Pada dasarnya wanita dengan sifatnya yang lembut dan telaten serta dianggap lebih sabar akan mampu menggerakkan usaha dengan baik. Makalah ini ingin melihat bagaimana peranan wanita pengusaha (*womanpreneur*) dalam dunia kewirausahaan di Indonesia. Serta apa saja hambatan dan tantangan dalam dunia usaha yang dihadapi oleh pengusaha wanita tersebut?

Entrepreneurship

Istilah *entrepreneurs* dan *entrepreneurship* menjadi topik yang populer di berbagai bidang ilmu, mulai dari antropologi, sejarah, manajemen, psikology, manajemen, ekonomi dan sosiologi. Pada konteks pengambil resiko atau *risk taker*, Steve Jobs adalah seorang entrepreneur sejati. Lalu apakah yang dimaksud dengan entrepreneur itu?

Istilah *entrepreneur* dapat didefinisikan sebagai orang yang menciptakan pekerjaan yang berguna bagi diri sendiri. Entrepreneur berasal dari kata *entrependere* (bahasa Perancis)

yang artinya sebuah usaha yang berani dan penuh resiko atau sulit. atau dapat pula diartikan bahwa seorang *entrepreneur* sebagai orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah serta dapat mencari peluang dari orang lain.

Menurut Schumpeter, seorang *entrepreneur* tidak selalu seorang pedagang (*businessman*) atau seorang manager; ia adalah orang yang unik yang dan seorang pengambil resiko (*risk taker*) serta memperkenalkan produk-produk inovatif dan teknologi baru ke dalam perekonomian.

Mindset atau pola pikir masyarakat Indonesia tentang wirausaha masih belum banyak berubah. Seorang pengusaha (*entrepreneurship*) dianggap lebih beresiko daripada menjadi pegawai yang memiliki pendapatan teratur tiap bulannya.

Pemilik Ciputra Group, Ciputra, mengungkapkan, pemerintah diminta mengalokasikan anggaran minimal satu persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kapasitas dunia usaha. Anggaran APBN yang cukup besar, hanya satu persen yang bisa digunakan untuk *entrepreneurship* dan bisa dikembalikan menjadi 100% bila dimanfaatkan sebagai fasilitator sekolah kewirausahaan yang akan mencetak para wirausahawan muda.

Ciputra mengatakan, saat ini tingkat kewirausahaan di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut diperparah dengan permasalahan dasar yang dialami, misalnya dari birokrasi hingga tindak korupsi yang masih terjadi.

Saat ini dia menjelaskan bangsa Indonesia telah merdeka dan sudah saatnya mengubah *mindset* masyarakat untuk memiliki mental mandiri dan berjiwa wirausaha. Harapannya, bila menjadi pengusaha, maka seseorang akan mampu menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat lain.

Pengusaha wanita (*womanpreneur*)

Kesenjangan gender dalam dunia wirausaha dirasakan tidak saja di Indonesia, namun juga di negara maju seperti tertulis dalam makalah Thébaud, Sarah (2010). Menurut hasil penelitian tersebut, dikatakan bahwa gender masih menjadi halangan bagi sebagian wanita untuk memulai sebuah usaha karena wanita masih diragukan kemampuannya untuk memiliki usaha sendiri. Di Indonesia sepertinya tidak jauh berbeda, karena isu gender masih tetap menjadi satu permasalahan sendiri.

Wanita telah memulai usaha mandiri atau bisnisnya ketika mereka dalam usaha membantu perekonomian keluarga. Disaat mereka mampu menjual dan mendapatkan

keuntungan, sebenarnya telah dimulai satu langkah menjadi seorang pengusaha wanita.

Walaupun kegiatan menjual atau berdagang yang dilakukan secara mandiri masih sulit dilakukan wanita karena ada persepsi bahwa wanita hanya sebagai pengurus rumah tangga saja. Tentunya dibutuhkan keuletan dan kesabaran bagi wanita untuk membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar.

Wanita saat ini tidak lagi hanya sebagai penonton di dunia bisnis, namun turut berperan memajukan perekonomian negara. Wanita dengan peran gandanya selain menjadi ibu rumah tangga juga mampu menjadi penggerak perekonomian rumah tangga. Wanita-wanita pengusaha terbukti mampu bersaing dengan kolega prianya mengembangkan diri dan perusahaannya. Banyak pengusaha wanita tangguh yang mampu berbicara dalam pentas global. Pengusaha wanita tidak saja berada pada usaha skala besar, namun banyak pula yang berkecimpung pada usaha kecil dan menengah.

Para wanita dengan semangat kemandiriannya memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Dengan kreatifitas dan inovasi para wanita pengusaha dapat menjadi pengusaha yang tidak kalah dalam persaingan bisnis. Makalah ini mencoba memaparkan bagaimana peranan wanita dalam kewirausahaan dan bagaimana perjalanan wanita menjadi wanita pengusaha mandiri. Bentuk inovasi apa saja yang telah dilakukan pengusaha wanita agar *survive* bahkan menjadi pengusaha hebat yang tidak kalah dengan pengusaha pria.

Banyak pengusaha wanita yang awalnya hanya membantu kepala keluarga atau suami tetapi dapat ikut berperan dalam menopang usaha keluarga. Seperti Melinda Gates. Berdasarkan data dari Forbes tahun 2014, istri Bill Gates berhasil masuk ke dalam daftar *The World's Most Powerful Female Entrepreneurs of 2014*.

Melinda Gates telah menginspirasi orang lain dengan donasi terutama dari Bill & Melinda Gates Foundation. Banyak pengusaha yang merubah pola pikir mereka tentang efektifitas philanthropy. Berbagai donasi sebesar jutaan dollar ditujukan bagi kesehatan reproduksi wanita di Negara berkembang. Salah satu kekuatan wanita adalah dari segi keuletannya. Sebagai contoh pendiri The Body Shop, Anita Roddick membuka toko The Body Shop dengan uang hasil pinjaman. Toko pertama didirikannya di Brighton pada tahun 1976, dan belum banyak mempunyai barang. Ketika baru dibuka, tokonya hanya menjual sejumlah krim dan produk perawatan rambut

Pada tahun 1990, Roddick membantu pendirian majalah The Big Issue yang keuntungan penjualannya digunakan untuk membantu tunawisma. Selain itu, Roddick

mendirikan yayasan amal Children On The Edge untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung di Eropa Timur dan Asia. Roddick juga banyak membantu sejumlah organisasi amal termasuk Greenpeace.

Menurut sebuah survey dari *National Association of Women Business Owners*, mereka percaya bahwa mulai tahun 2013 lebih banyak wanita menjadi pemilik bisnis daripada sebelumnya. Hasil temuan lain dari lembaga survey ini bahwa 81% pengusaha wanita merasa optimis tentang kinerja bisnis mereka saat ini.

Bersamaan dengan pertumbuhan internet dan kewirausahaan, ada dorongan yang semakin kuat bagi wanita untuk mendobrak dominasi pria di industri dan membuka kesempatan bagi wanita untuk mendapat kesempatan membuka usaha sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengusaha wanita (*womanpreneur*) di Indonesia

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menilai saat ini akses keuangan bagi wirausaha perempuan telah berkembang. Setiap tahunnya akses keuangan di Indonesia, secara total, terus meningkat dan mampu melampaui nilai Rp 177 triliun. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang menjadi wirausahawan sebenarnya berkembang dengan pesat. Bahkan, jumlah wirausahawan baru hingga 2025 ditargetkan bertambah lima juta orang (Bank Indonesia). Salah seorang entrepreneur Indonesia, Ciputra mendirikan Ciputra Center untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di Indonesia. Selain itu juga membangun 15 sekolah dan empat universitas yang menanamkan jiwa kewirausahaan. Namun, hal itu dirasa tidak cukup, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Untuk itu, dirinya mengajak bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi ujung tombak pelatihan kewirausahaan.

Bank Indonesia dan bank BUMN diajak berpartisipasi dengan mendirikan *incubator center* di seluruh daerah Indonesia hingga tingkat kecamatan. Dengan menggandeng bank BUMN, menurut dia, para manajer bank di tingkat kecamatan dapat menjadi mentor dan membina para wirausaha di daerah-daerah. Ia yakin, untuk menjadi wirausaha tidak dibutuhkan lulusan sarjana, tapi yang terpenting adalah semangat dan jiwa wirausaha.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pengusaha wanita di beberapa Negara Asia dan Australia.

Tabel 1. Judul Tabel Judul Tabel

	Negara	Jumlah
	China	16
	Hong Kong	8
	India	8
	Singapura	4
	Korsel	2
	Jepang	2
	Indonesia	2
	Australia	2
	Vietnam	2
	Filipina	2
	Malaysia	1
	Thailand	1

Sumber: <http://entrepreneur.bisnis.com>

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indonesia hanya mencatatkan 2 nama pengusaha wanita, yaitu Shinta Widjaja Kamdani, dalam kapasitasnya sebagai Managing Director Grup Sintesa dan Bernadette Ruth Irawati, Presdir PT Kalbe Farma. Dibandingkan dengan Singapura yang jumlah penduduknya lebih kecil, Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak entrepreneur wanita.

Namun, yang patut dibanggakan adalah bahwa kedua wanita tersebut adalah wanita eksekutif yang paling berpengaruh dalam dunia bisnis di Indonesia. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) berkomitmen untuk menciptakan satu juta perempuan pengusaha di Indonesia. Satu hal yang harus diapresiasi banyak pihak.

Pada tahun 2013 lalu, IWAPI mencanangkan gerakan 1 juta pengusaha wanita di Indonesia. Melalui gerakan ini diharapkan para wanita tergerak untuk bisa mandiri secara ekonomi dengan menjadi womanpreneur atau pengusaha wanita.

Pemberdayaan perempuan untuk keluarga yang dapat hidup mandiri secara ekonomi merupakan target Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dalam jangka panjang. IWAPI sendiri sebagai organisasi pengusaha wanita yang ada di Indonesia mengalami peningkatan jumlah anggota baru seiring dengan berbagai pelatihan dan rekrutmen, termasuk merealisasikan program kewirausahaan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja yang sasarannya adalah CTKI/TKI dan keluarganya, maupun dengan lembaga lainnya.

Kualitas para anggota IWAPI pun semakin meningkat, hal ini ditandai dengan makin banyak program kegiatan dijalankan. Dan terjadi peningkatan kapasitas anggota dalam menjalankan usaha setelah mengikuti berbagai program pelatihan, kerjasama antar lembaga yang semakin luas, akses permodalan yang semakin mudah seiring kepercayaan lembaga keuangan dan semakin gencarnya promosi melalui media massa maupun event. (Iwapipusat.org). Menurut Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menilai saat ini akses keuangan bagi wirausaha perempuan telah berkembang. Setiap tahunnya akses keuangan di Indonesia, secara total, terus meningkat dan mampu melampaui nilai Rp 177 triliun

Bahkan tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) wirausaha perempuan terpantau cukup rendah. Fakta ini menunjukkan betapa lihaihnya perempuan mengelola keuangan sembari mengembangkan usahanya. Akses keuangan telah diimplementasikan oleh wirausaha. NPL paling tinggi 3 persen. Namun, tunggakan untuk wirausaha perempuan bahkan 0 persen. Ini artinya pahlawan ekonomi Indonesia ditopang dari wirausaha perempuan.

Hambatan

Seorang entrepreneur sejati pasti tidak akan langsung memperoleh hasil yang maksimal dalam waktu sebentar. Dibutuhkan proses panjang bila seseorang merasa gagal berusaha. Karena banyak hambatan yang harus dihadapi oleh entrepreneur sejati. Terutama bagi wanita pengusaha yang notabene masih dianggap “kecil” perannya dalam dunia usaha.

Berikut ini beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh pengusaha wanita, diantaranya yaitu:

1. Akses ke permodalan, masalah yang sering dihadapi para wanita dalam memulai usaha adalah sulit mendapat modal, karena kaum wanita cenderung memilih sektor jasa untuk dimasuki yang pertumbuhannya lambat, atau berisiko tinggi seperti warugn makan dan penginapan. Namun saat ini dengan internet, memudahkan wanita untuk memulai usaha secara online yang dapat mengurangi biaya toko misalnya. Sehingga modal yang dibutuhkan dapat dikurangi.
2. Akses ke pasar. Bagi pengusaha wanita yang terlibat dalam misi perdagangan, masih ada anggapan bahwa tidak mudah memperoleh dukungan dari pemerintah, sehingga harus bekerja sendiri dalam mendapatkan akses ke pasar.
3. Akses ke informasi. Pada masa sebelum internet berkembang, akses ke informasi sulit

dilakukan. Namun saat ini, era internet terbuka lebar, berbagai informasi yang berkaitan dengan pasar, konsumen atau pemasok produk dapat dengan mudah dilakukan. Tetapi tentunya hal ini akan sulit bagi wanita yang tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut.

4. Akses ke pelatihan. Akses ini diantaranya adalah terhadap pelatihan yang dapat mengembangkan usaha namun masih agak sulit untuk mendapat pelatihan yang baik. Pelatihan yang dibutuhkan seperti mengelola keuangan, mengelola hubungan dengan orang lain.

Selain hambatan-hambatan di atas, ada beberapa hal yang biasanya melekat pada diri wanita. Sifat-sifat wanita yang **terlalu detail** dalam melihat hal-hal yang kecil menyebabkan pengusaha wanita tidak terbiasa melihat dalam persepektif global. **Kurang berani mengambil resiko** menjadi satu sifat wanita yang sering merugikan bila menjadi pengusaha wanita. Wanita juga dianggap sering **emosional** dan bila terjadi dalam situasi yang tidak tepat dan berkepanjangan dapat merugikan diri sendiri dan karyawan. Ada anggapan juga bahwa wanita **lebih berorientasi pada tugas daripada tujuan**.

Pengusaha Wanita Indonesia

Banyak wanita yang tidak sekedar menjadi pengusaha kecil, diantaranya telah sukses dan berhasil menjadi pemilik atau pemimpin perusahaan besar. Berikut ini beberapa nama pengusaha wanita Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing.

Kartini Muljadi

Kartini Muljadi adalah salah satu contoh pengusaha perempuan sukses asal Indonesia. Perempuan ini menjadi salah seorang yang terkaya di Tanah Air, dengan nilai aset jika digabungkan mencapai USD 1,1 miliar atau setara Rp 13,2 triliun. Kartini memang awalnya seorang sarjana hukum, tetapi akhirnya mampu mengembangkan lini usaha Grup Tempo Scan Pacific. Perusahaannya bergerak mayoritas di bidang farmasi. Forbes menempatkannya sebagai pengusaha terkaya urutan ke-23 di Indonesia.

Dewi Andriani

Seorang wanita yang tidak mengenal kata terlambat untuk memulai menjadi pengusaha wanita. Walaupun awalnya hanya mencoba menjadi penjual sepatu, namun berkat kejeliannya menangkap peluang yang ada sekarang menjadi pengusaha wanita yang berhasil. Usaha yang dilirikinya adalah sepatu dengan sentuhan kain tradisional.

Dengan ide yang kreatif tersebut, Dewi mampu meraih keuntungan yang signifikan. Selain itu Dewi tidak membuat sendiri, melainkan melalui pemanfaatan jasa pembuatan produk oleh orang lain sehingga memangkas dana untuk investasi perajin dan alat mesin.

Fahira Idris

Siapa tidak kenal dengan pengusaha florist ini. bisnis florist dan parcel beromzet jutaan rupiah per bulan, yang ditekuni Fahira Idris sejak tahun 1988. Bisnis ini memang sangat bagus. Bisnis yang kelihatannya mudah, namun ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan kebijakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menerima parcel, bisnis Fahira sempat goyah.

Regulasi pemerintah dirasa berat, apalagi bagi Fahira yang menjadi ketua Asosiasi Florist dan parcel. Selain membari semangat kepada anggotanya, usahanya harus tetap berjalan. namun tidak ada kata menyerah, sebaliknya disiasati dengan hal lain. Usaha lain terus berjalan dengan menekuni hobi baru yang mendatangkan keuntungan.

Bisnis barunya adalah bisnis penunjang industri migas. Bisnis yang membidik sasaran utamanya beberapa pengeboran minyak di Palembang tersebut akan menyisir perusahaan-perusahaan minyak yang membutuhkan banyak pelayanan, mulai dari alat transportasi hingga rumah dan kantor huni portable. Selain menjajal bisnis baru tersebut, Fahira juga berkeinginan untuk membuat sekolah khusus untuk merangkai bunga. Ide ini berawal dari kecintaannya pada dunia florist dan ia melihat hingga saat ini belum ada sekolah khusus untuk mendalami bidang tersebut. Tidak ada subbab dalam pendahuluan.

Khoe Ribka

Semakin banyak pengusaha wanita yang muncul di Indonesia. Salah satunya adalah Khoe Ribka, CEO & President Director Amos Cozy Hotel. Dunia bisnis yang digeluti identik dengan dunia laki-laki. Kesuksesan yang diraih tidak lepas dari sikap disiplin yang dimilikinya. Dan berkat filosofi dari orang tua yaitu percaya kepada Tuhan, kejujuran, kesetiaan, antusiasme, pantang menyerah, disiplin, kepedulian yang tulus dan management kemanusiaan.

Dia telah berhasil membawa Cozy Hotel menjadi merek hotel ternama di Indonesia. Selain itu masih banyak lagi perusahaan yang berada di bawah kepemimpinan Khoe Ribka. Tetapi selain menggeluti bisnis, pengusaha ini juga banyak aktif dalam berbagai organisasi

sosial. Saat ini Ribka tercatat sebagai Presiden Club di Lions Club Magnolia dan menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Pribumi di Jakarta.

Peran IWAPI bagi Pengusaha Wanita

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) selalu berupaya mengembangkan kemampuan dan memberdayakan para anggotanya. Salah satu pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan anggota dalam mengelola usaha, serta mendapatkan akses teknologi baru, pemasaran dan pembiayaan.

Anggota IWAPI sebagian besar adalah para pengusaha kecil, yaitu sebesar 85%. Maka langkah strategis yang dilakukan IWAPI adalah memberdayakan dan memperkuat anggotanya dalam mengelola usaha, memberikan pelatihan ketrampilan teknis, manajemen sumber daya manusia dan networking. Khusus UMKM, IWAPI memberikan pelatihan manajemen keuangan, karena UMKM biasanya dikelola secara rumahan, artinya belum secara profesional dikelola.

IWAPI Jateng bekerja sama dengan Bank Jateng sejak tahun 2010 melakukan penandatanganan KUR untuk anggota Iwapi. Sektor UMKM beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, koperasi, toko kelontong hingga distribusi.

Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Setyo mengatakan dari total kegiatan UMKM di Indonesia mayoritas dikuasai oleh kaum pengusaha perempuan. 60 Persen bahkan dari wanita. Sehingga wanita pengusaha mempunyai peranan penting dalam ekonomi nasional.

Beberapa Saran bagi pengusaha wanita

Seringkali sulit bagi pengusaha wanita ketika memasuki bisnis yang didominasi pria. Berikut ini beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pengusaha wanita, antara lain;

1. Menerima saran penyelesaian pekerjaan dengan baik. Kesuksesan seorang wanita pada industri yang dikuasai kaum pria masih dikaitkan dengan faktor keberuntungan semata. Saran yang dapat diambil adalah berusaha secara maksimal untuk mendapatkan hasil baik yang pada akhirnya dapat memberi pemahaman kepada konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat.
2. Bersikap tegas dan tepat. Dalam hal ini sikap tubuh yang baik dan menunjukkan ketegasan dalam berkata dan bersikap akan memberikan kesan yang baik di mata

konsumen.

3. Lebih banyak mendengar. Wanita biasanya adalah seorang pendengar yang baik. Mendengar lebih banyak akan lebih bagus daripada berbicara terlalu banyak tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan. Mendengar masukan atau kritik membangun dari konsumen dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja perusahaan di masa mendatang.
4. Memandang diri sendiri sebagai seorang pemimpin. Sebagian wanita merasa bahwa mereka tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik yang memiliki kekuasaan besar. Atau menganggap bahwa mereka terlahir bukan sebagai pemimpin. Namun bersikap hati-hati, adil dan tidak aggressive akan lebih baik bagi pemimpin wanita.

Pengusaha wanita semakin menyadari peran penting mereka dalam dunia industri. Dan ketika era internet berkembang saat ini, bisnis yang dijalankan juga semakin beragam. Saat ini dapat dengan mudah kita melihat wanita berbisnis melalui internet, dengan beragam usaha. Namun satu hal yang harus selalu dijaga bila berbisnis melalui internet adalah faktor keamanannya

Kejahatan dunia maya, hacking dan resiko kehilangan pelanggan merupakan masalah yang sering dihadapi. Untuk itu para pengusaha wanita perlu sepenuhnya menyadari masalah yang berkembang tentang kejahatan dunia maya, dan secara bijaksana mengadopsi produk dan solusi IT seperti *cloud computing* atau komputasi awan yang menyediakan perlindungan data yang komprehensif, keamanan dunia maya, privasi dan langkah-langkah pencegahan kejahatan dunia maya.

IWAPI menyadari bahwa pengguna IT menjadi hal yang penting dalam pengembangan bisnis baik bisnis secara maya atau nyata. Karena alasan produktivitas dan efisiensi menjadi faktor penentu keberhasilan bisnisnya. Untuk itu IWAPI bekerja sama dengan Microsoft memperkuat pengusaha wanita dari berbagai masalah kejahatan dunia internet. perangkat lunak mereka asli dan secara teratur diperbarui dan ditambah.

Dari pemaparan makalah, terlihat peran dari pengusaha wanita yang tidak kecil dan turut menyumbang pemberdayaan wanita melalui perekrutan karyawan.

KESIMPULAN

Menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur tentunya tidak langsung dapat memperoleh

hasil yang besar atau maksimal dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan kesabaran dan keuletan serta kemauan untuk terus mencoba dan berhasil. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi wanita Indonesia yang ingin mendalami usaha sebagai pengusaha wanita. Sebagai pemimpin perusahaan, wanita harus dapat bersikap mandiri dan tegas serta proaktif dalam mencari pasar baru. Salah satu hal itu dapat dilihat dari semakin maraknya usaha berbasis internet, yang sebagian besar dilakukan wanita. Pengusaha wanita tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari keluarga dan organisasi seperti IWAPI. Dukungan itu bisa berbentuk pelatihan atau training bagi pengusaha dan karyawannya. Di masa mendatang pengusaha wanita atau womanpreneur akan semakin dibutuhkan untuk menyokong pembangunan dan industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa)*. The 2nd National Conference Faculty of Economics Widya Mandala Catholic University. <http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/IE7.pdf>. Diakses 3 Oktober 2014

Feriawan Hidayat , dalam <http://www.beritasatu.com/digital-life/185783-perkuat-wanita-pengusaha-iwapi-gandeng-microsoft.html>, diakses 4 Oktober 2014

Gina-Lynne Smith. 2011. dalam <http://www.businessnewsdaily.com/1423-women-entrepreneurs-advice.html> diakses 2 Oktober 2014

Tyahya Whisnu Hendratni dan Ermalina dalam Jurnal Liquidity Vol 2, No.2, Juli –Desember 2013 , hlm. 170 - 178 <https://www.youtube.com/watch?v=I9WK29WWN54> diakses 2 Oktober 2014

Siswanto, Victorianus Aries. **Studi Peran Perempuan dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Melalui Teknologi Informasi di Kota Pekalongan**. Maret 2009. Dinamika Informatika Vol 1 No 1.

Thébaud, Sarah (2010). <http://faculty.chicagobooth.edu/workshops/orgs-markets/past/pdf/thebaud.pdf>, diakses 2 Oktober 2014

Entrepreneurship Menuju Kemandirian Bangsa. Palembang, 7 Agustus 2010. Dalam www.marzukialie.com/ diakses 4 Oktober 2014

<http://www.berita8.com/m8/berita/2012/11/>

28-11-2012

Bank

Indonesia

dalam

<http://www.forbes.com/sites/meghancasserly/2013/02/12/10-real-reasons-why-2013-will-be-the-year-of-the-woman-entrepreneur/>

<http://entrepreneur.bisnis.com/read/20130228/266/138244/wanita-eksekutif-asia-shinta-kamdani-paling-perkasa-di-indonesia>

<http://iwapi-pusat.org/berita-177-iwapi-berdayakan-perempuan-lewat-ukm.html>

<http://www.businessnewsdaily.com/5268-women-entrepreneur-challenges.html>

<http://swa.co.id/>

<http://suarapengusaha.com/2014/06/01/kisah-sukses-dewi-andriani-mengembangkan-bisnis-sepatu/#sthash.a5WZlap9.dpuf>

<http://www.merdeka.com>

<http://suarapengusaha.com/category/womenpreneur/>

http://ijbssnet.com/journals/Vol_2_No_16_September_2011/16.pd

<http://www.ciputraentrepreneurship.com/entrepreneurship/karakter-entrepreneur>

<http://www.forbes.com/sites/emilyinverso/2014/05/28/the-worlds-most-powerful-female-entrepreneurs-of-2014/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Anita_Roddick

<http://batam.tribunnews.com/2012/12/22/iwapi-akan-ciptakan-1-juta-pengusaha-perempuan-di-indonesia>

<http://www.ciputraentrepreneurship.com/entrepreneur/nasional/wanita.html>

http://www.indosat.com/Public_Relations/Press_Release_Photo_Gallery/INDONESIA_WOMENPRENEUR_COMPETITION

<http://suarapengusaha.com/category/womenpreneur/>

www.owllink.co.uk/read/5317ac770f263a2c5bd2c8d8

RPSEP-82

MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI DAN KODE ETIK PUSTAKAWAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME

Yasir Riady

UPBJJ UT Jakarta

yasir@ut.ac.id

Abstrak

Salah satu bagian yang sangat erat dan berhubungan dengan penentuan peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi adalah “budaya organisasi”. Budaya organisasi juga berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan, khususnya pada ranah perpustakaan dan pustakawan, hal ini menjadi pembentuk peningkatan kinerja pustakawan. Perkembangan perpustakaan dan pustakawan tidak terlepas dari budaya yang ada serta organisasi yang menaunginya, pada saat ini eksistensi dan keadaan yang terjadi seperti anggapan tidak berkualitaskannya perpustakaan, tidak ramahnya pelayanan dan kurang profesional pustakawan dalam bekerja serta lainnya dapat ditarik sebagai salah satu refleksi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Kesungguhan pemerintah mulai nampak ketika diterbitkannya UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pembahasan dan mengatur berbagai hal mengenai perpustakaan, untuk selanjutnya UU ini menjadi payung hukum bagi perpustakaan dalam melakukan kegiatannya, Makalah ini membahas mengenai budaya organisasi dan kode etik pustakawan yang setidaknya bisa mengatur dan menjadikan budaya organisasi yang bisa menjadi upaya dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme pustakawan.

Kata kunci :Budaya organisasi, pustakawan, kode etik, profesionalisme

Pendahuluan

Budaya organisasi merupakan salah satu bagian tubuh sebuah instansi, hal ini yang dapat meningkatkan dan membantu perusahaan agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik dan benar, budaya organisasi dapat mengakar dan menularkan hal baik yang positif maupun negatif, karena budaya organisasi juga mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku seseorang. Kegiatan membangun budaya organisasi menjadi relevan untuk mengikat dan memotivasi anggota organisasi yang pada dasarnya berlatar belakang berbeda.

Pada dunia perpustakaan, budaya organisasi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, sebagai bagian yang menginduk ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, budaya dan organisasi dapat menjadikan profesi pustakawan dan perpustakaan semakin lebih baik,. Organisasi profesi yang berjalan juga mempunyai peran penting bagi suatu profesi yang bernaung dibawahnya. Organisasi profesi tersebut mengembangkan, memajukan kualitas, mengusahakan kesejahteraan anggota dalam hal ini pustakawan itu sendiri, dan mengarahkan profesioanalisme anggota organisasi.

Dewasa ini, pustakawan juga memiliki organisasi profesi sebagai salah satu bagian budaya organisasi serta kode etik yang disepakati bersama agar profesionalisme pustakawan menjadi lebih berkualitas dan semakin baik, makalah ini memaparkan beberapa pengertian dan rumusan kode etik pustakawan yang harus dipahami, dijalankan dan juga menjadikan pustakawan sebagai ahli informasi yang berkembang dan membantu kebutuhan informasi pemustaka.

Pengertian Budaya

Menurut Hermawan (2006), budaya dapat diartikan sebagai lingkup yang lebih luas. Bangsa-bangsa di dunia mempunyai budaya sendiri yang menjadi nasional. Pada suatu negara mungkin terdapat berbagai suku yang mempunyai budaya tersendiri, sebagai subkultur berdasarkan kesukuan atau kewilayahan. Hal ini juga berlaku seperti organisasi yang dapat mempunyai budaya sendiri yang berbeda dengan organisasi lainnya. Inilah yang disebut dengan budaya organisasi.

Edgar Schein (2010) memaparkan budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir, dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut.

Budaya dapat disimpulkan sebagai bagian dari suatu keadaan pada kelompok tertentu dan ditularkan kepada bagian yang lain, sehingga dapat berjalan dan disepakati bersama oleh kelompok tertentu.

Pengertian Organisasi

Harold (2009) mendefinisikan organisasi sebagai pengaturan yang tersusun terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu. organisasi juga merupakan sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama.

Darmono (2009), lebih lanjut menjelaskan organisasi merupakan kumpulan manusia yang secara sadar ingin mencapai tujuan bersama, maka organisasi bersifat dinamis dan berkembang. Jika organisasi tidak berkembang, maka lama kelamaan organisasi tersebut akan mati dan tidak menunjukkan aktivitas sama sekali, oleh karena itu organisasi merupakan satu bagian utuh satu sama lain yang harus saling mendukung dan bekerjasama.

Pengertian Budaya Organisasi

Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi umumnya terjadi pada suatu organisasi merupakan dasar dari tumbuhnya budaya organisasi yang dikembangkan oleh pimpinan puncak organisasi. Biasanya dasar tumbuhnya budaya organisasi tersebut dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pimpinan organisasi itu sendiri, hal ini bisa berakibat kepada organisasi tersebut,

Budaya merujuk kepada nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dan kelompok dan akan terus bertahan sepanjang waktu dan mungkin sampai pada anggota kelompok itu sudah berubah. Sementara itu, pada tingkatan yang lebih terlihat budaya menggambarkan pola atau gaya perilaku suatu organisasi.

Budaya organisasi akan mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku seseorang. Budaya organisasi menjadi relevan untuk mengikat dan memotivasi anggota organisasi yang pada dasarnya berlatar belakang berbeda. Sehingga dengan adanya budaya organisasi yang sama perbedaan-perbedaan itu dapat dijumpai. Dalam konteks yang seperti di atas, budaya organisasi mengacu ke suatu sistem bersama yang dianut oleh anggotanya, yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain.

Menurut Zulfikar Zen (2006), budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendiriannya yang kemudian berinteraksi menjadi norma, dimana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Pengertian budaya organisasi menurut Suwarno (2009), adalah norma-norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beragam definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini bersama yang berasal dari falsafah atau prinsip awal pendirian organisasi kemudian, berinteraksi menjadi norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi.

Kode Etik Profesi Pustakawan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan menyadari pentingnya mensosialisasikan profesi Pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun kode etika sebagai pedoman kerja.

Pada era keterbukaan informasi, perlu akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggungjawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Prinsip yang tertuang dalam kode etik ini merupakan kaidah umum Pustakawan Indonesia.

Melalui kode etik profesi pustakawan, menjadikan profesi pustakawan yang profesional dan juga payung hukum agar dapat dipahami, dijalankan dan juga dipatuhi sesuai dengan kesepakatan bersama, kode etik profesi ini juga mendukung jalannya budaya organisasi masing-masing instansi dan dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam melayani pemustaka hingga berperan dalam dunia akademik hingga internasional.

Kewajiban Pustakawan

Ada 5 hal yang menjadi kewajiban pustakawan yang menjelaskan secara rinci terhadap kode etik pustakawan, kewajiban tersebut adalah :

1. Kewajiban kepada bangsa dan negara

Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.

2. Kewajiban kepada masyarakat

a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.

b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.

c. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.

d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

3. Kewajiban kepada profesi

a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.

c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

4. Kewajiban kepada rekan sejawat

Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Kewajiban kepada pribadi

a. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.

b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.

- c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

Pustakawan sebagai suatu profesi mempunyai suatu kriteria tertentu sesuai tuntutan profesi pustakawan. Sulistyono-Basuki (1993) mendefinisikan kriteria suatu profesi ada lima elemen yang mengikat profesi tersebut. Ciri tersebut antara lain :

1. Adanya sebuah Asosiasi atau Organisasi Keahlian,
2. Terdapat pola pendidikan profesi yang jelas,
3. Adanya kode etik,
4. Berorientasi pada jasa,
5. Adanya tingkat kemandirian.

Mengacu pada kriteria-kriteria profesi pustakawan tersebut, kriteria adanya suatu organisasi profesi yang menaungi pustakawan merupakan sesuatu yang penting. Organisasi profesi mempunyai peran penting bagi suatu profesi yang bernaung dibawahnya. Organisasi profesi merupakan media atau alat mengembangkan, memajukan kualitas, mengusahakan kesejahteraan anggota dalam hal ini pustakawan itu sendiri, dan mengarahkan profesionalisme anggota organisasi.

Organisasi Profesi

Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang anggotanya mempunyai suatu profesi tertentu yang menggabungkan diri dalam satu wadah organisasi. Menurut Azrul Azwar (1998), organisasi profesi merupakan organisasi yang para anggotanya berasal dari satu profesi dan telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Pada ranah perpustakaan, organisasi profesi pustakawan yang menaungi pustakawan Indonesia adalah Ikatan Pustakawan Indonesia yang disingkat dengan IPI. IPI sendiri telah berdiri pada tanggal 6 Juli 1973. Organisasi profesi ini bersifat nasional. IPI mempunyai tujuan organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar Ikatan Pustakawan Indonesia pasal 8, antara lain:

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan.
2. Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
3. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan Negara RI.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi profesi, IPI dituntut juga untuk melaksanakan fungsi organisasi profesi bagi anggotanya. Karena organisasi dibentuk untuk

mengembangkan profesi yang dinaungi dalam organisasi profesi tersebut. Redman (1997) menyatakan bahwa fungsi organisasi profesi bagi anggota organisasi antara lain:

1. Memberikan dukungan sosial dan moral.
2. Memperbaiki kondisi kerja pekerjaan professional.
3. Memberikan motivasi peran yang memuaskan.
4. Mengusahakan pendidikan berkelanjutan.
5. Menetapkan standar kemampuan professional.
6. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.
7. Meningkatkan rasa persaudaraan.

Organisasi profesi IPI masih juga bekerja sama dan memayungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dengan adanya organisasi profesi ini, menjadikan profesi pustakawan semakin profesional dan juga memiliki kode etik yang harus dipahami dan dijalankan sebagai suatu kesepakatan bersama oleh organisasi ini dan juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kesimpulan

Bagian yang penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah “budaya organisasi”. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem nilai dan juga kepercayaan yang dianut dan diyakini bersama sebagai bagian dari kebiasaan yang berinteraksi dengan orang-orang pada suatu perusahaan, struktur organisasi dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi di dalam suatu organisasi, yaitu memiliki suatu peran dalam batas-batas penentu, menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.

Budaya organisasi juga berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan, khususnya pada ranah perpustakaan dan pustakawan, hal ini menjadi pembentuk peningkatan kinerja pustakawan.

Perkembangan perpustakaan dan pustakawan tidak terlepas dari budaya yang ada serta organisasi yang menaunginya, pada saat ini eksistensi dan keadaan yang terjadi seperti anggapan tidak berkualitasnya perpustakaan, tidak ramahnya pelayanan dan kurang profesional pustakawan dalam bekerja serta lainnya dapat ditarik sebagai salah satu refleksi

untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Kesungguhan pemerintah mulai nampak ketika diterbitkannya UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pembahasan dan mengatur berbagai hal mengenai perpustakaan, untuk selanjutnya UU ini menjadi payung hukum bagi perpustakaan dalam melakukan kegiatannya, salah satu bagian tersebut adalah organisasi profesi pustakawan yang membuat kode etik pustakawan dalam rangka meregulasi moral dan sikap pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Harold, Leonard Montague (2009). *Harold's librarians glossary and reference Book*. England: Gower Publishing Company Limited.

Hermawan, S Rachman, dan Zen, Zulfikar. (2006). *Etika Kepustakawanan*. Jakarta. Sagung Seto

Horvart dalam Pert, Kornelija (2002). Public perception of role and tasks of library and information science professionals in Croatia: An Overview of Recent Activities, *New Library World*. 103(1181).

Sulistyo-Basuki. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sulistyo-Basuki (2001). Etika profesi. Makalah untuk rapat kerja PB IPI (Jakarta, 5. s.d. 7 November, 2001), 30 Oktober 2008. <<http://www.consal.org.sg/forums/forum.asp?F=165&M=2274>>.

Suwarno, Wiji (2009), *Psikologi Perpustakaan*, Jakarta: Sagung Seto.

_____. 2007. *UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN Nomor 43 Tahun 2007 : Dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

RPSEP-83

SURVEY MOTIVASI KERJA PADA KARYAWAN PT PQR JAKARTA

Gede Umbaran Dipodjoyo

Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta
umbaran13@gmail.com

Abstrak

Di kalangan praktisi SDM diketahui bahwa motivasi bukanlah hal yang mudah dan baik dalam memahaminya maupun dalam mengaplikasikannya. Namun yang perlu diyakini adalah, dengan motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarnya, kepentingan pribadi-pribadi anggota organisasi tersebut akan terpelihara pula. Survey ini dilakukan di PT PQR Jakarta, perusahaan swasta dengan karyawan 25 orang. Staff yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, penyelidikan, dan survey. Sedangkan instrument yang digunakan adalah adaptasi skala motivasi dari Maslow untuk pelatihan Achievement Motivation Training, yaitu terdapat 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi motivasi karyawan dalam indikator fisiologis, rasa aman, rasa memiliki/sosial, harga diri dan aktualisasi diri masing-masing 4 butir pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 karyawan yang mengisi dan mengembalikan kuesionair di dapatkan hasil bahwa urutan tertinggi-terendah adalah motivasi karena kebutuhan fisiologis, Rasa Aman, Penghargaan/Harga Diri, Rasa memiliki/Sosial dan Aktualisasi diri. Hasil ini kemudian menjadi pedoman wawancara ke karyawan dan rata-rata menjawab bahwa kebutuhan pokok masih sangat dibutuhkan (gaji) sehingga karyawan bekerja berharap adanya gaji yang cukup dan rasa aman (dari PHK). Masukan yang dapat diberikan ke perusahaan adalah pemberian rasa aman dan nyaman dalam bekerja sehingga diusahakan tidak adanya pemutusan hubungan kerja, apalagi sebagai perusahaan yang berkembang memerlukan karyawan yang berpengalaman dan memahami perusahaan.

Kata kunci : motivasi kerja, karyawan, survey dan wawancara

Latar belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengelola hubungan antar manusia di dalam perusahaan diperlukan “art” atau seni. Baik itu dalam komunikasi, hubungan industrial, dan tidak kalah pentingnya adalah motivasi.. Motivasi sebagai pendorong manusia untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk diri dan orang lain.

Mengapa penting ? Karena perusahaan menginginkan sebuah hasil yang optimal sehingga tingkat kinerja karyawan menjadi tinggi. Banyak penelitian yang menyebutkan adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja yang signifikan.

Di kalangan praktisi SDM diketahui bahwa motivasi bukanlah hal yang mudah, baik dalam memahaminya maupun dalam mengaplikasikannya. Namun yang perlu diyakini adalah, dengan motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaraannya, kepentingan pribadi-pribadi anggota organisasi tersebut akan terpelihara pula.

Motivasi adalah “sesuatu” yang mendorong karyawan untuk melakukan apapun untuk “goals” dirinya dan perusahaan. Setiap karyawan mempunyai motivasi masing-masing sesuai dengan minat, bakat dan tujuannya masing-masing.

Perusahaan ini adalah penyedia jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia, perbankan, keuangan, penelitian dan penyedia lainnya. Yang berlokasi di Jakarta, dan saat survey dilakukan jumlah karyawan 25 orang. Pengguna perusahaan ini 20 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, penyelidikan, dan survey. Tata kerjanya karena berdasarkan permintaan klien maka terkadang “serabutan”, sehingga tidak ada kejelasan jabatan, jabatan adalah tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan perusahaan.

Adanya permasalahan-permasalahan SDM di perusahaan ini yang terlihat dari tingginya keluar-masuk karyawan (“turn over”), banyaknya pelanggaran disiplin, pasifnya karyawan dalam menjalankan tugas serta masih banyak hal lain yang terlihat bahwa karyawan merasa kurang motivasi untuk berkembang bersama dengan perusahaan. Selain dari hal tersebut juga berdasar wawancara dengan pemilik yang menyatakan karyawan kurang brikiran maju untuk mengembangkan perusahaan, serta keluhan lain seperti promosi dan demosi yang sulit dilakukan.

Dari temuan-temuan tertarik untuk mengetahui motivasi karyawan dan pentingnya mengetahui dan memelihara motivasi karyawan demi terwujudnya tujuan organisasi tanpa mengabaikan tujuan individu masing-masing, karena sumber daya manusia adalah asset perusahaan yang tidak tergantikan.

Sedang hasil survei motivasi yang dilakukan bisa dijadikan sebuah usulan langkah-langkah strategis bagi perusahaan untuk melakukan *improvement* dalam penanganan sumber daya manusia perusahaan ini.

Telaah Pustaka

Menurut *American Society of Personnel Administrators* (Milkovich, & Boudreau, 2003) fungsi penanggung jawab pengelola sumber daya manusia sebagai berikut :

1. **Staffing**: *Screening, interviewing, recruitment, testing, personnel records, job analysis, job description, staffing tables, promotion, transfer, job enlargement, etc.*
2. **Personnel Maintenance** : *Counseling, personnel appraisal inventories, turnover, health services and accident prevention, employee benefits and services etc.*
3. **Labor Relations** : *Group relations with organized or unorganized employees, negotiations, contract administration, grievances, arbitration, third-party involvement, mutual aid pacts, etc.*
4. **Training/Development** : *Job training, supervisor and foremen training, manager and executive development, pre-employment and special purpose training, retraining, etc,*
5. **Compensation** : *Wage and salary surveys, insensitive pay plans, profit sharing, stock ownership, financial no financial rewards, job enlargement, wage and salary controls, etc,*
6. **Employment Communications** : *house organ, employee handbook, rumor control, listening, attitude, morale and expectations surveys, feedback analysis, etc,*
7. **Organization** : *Structural design, planning and evaluation, innovation, utilization of formal and informal reducing conflict, overcoming resistance to organizational change, etc,*
8. **Administrator**: *Explanation and interpretation of options-authoritative, consultative, participative, self management styles, assistance in change, etc,*
9. **Personnel policy and Planning**: *Defining organizational goals, policy guidelines and strategies; identifying, translating, and complying with public manpower policy; forecasting manpower needs, selecting optional courses etc,*
10. **Review, Audit, Research**: *Program reporting recording; evaluation of policies and programs. Theory testing, innovation, experimentation, cost/benefit studies.*

Sepuluh prinsip ini yang dikerjakan dalam bidang sumber daya manusia, dan dari *staffing* hingga *personnel policy and planning* sudah merupakan rutinitas yang ada. Tetapi pada tahap yang terakhir yaitu *review, audit, research* belum banyak yang dilakukan. Oleh

karena itu perusahaan ini juga bergerak dalam bidang manajemen sumber daya manusia mencoba melakukannya, dengan mengadakan *internal survey* mengenai motivasi.

Pengertian motivasi sesuai dengan Munandar (2001) mengatakan bahwa suatu proses dimana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan, atau memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan Eggert (2002) mengutarakan bahwa banyaknya teori mengenai motivasi hal tersebut dikarenakan...

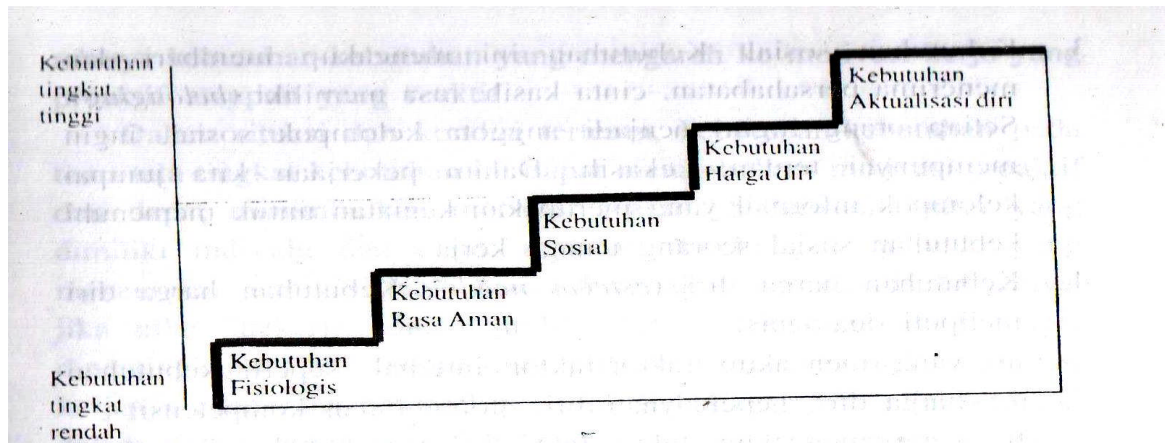
- motivasi adalah suatu konsep buatan sehingga tidak ada cara-cara komprehensif untuk mengujinya
- tujuan seseorang dapat dicapai dengan berbagai macam cara atau motivasi
- satu tujuan dapat memuaskan seluruh kebutuhan yang berbeda-beda – begitu pula dengan motivasi
- setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda begitu pula motivasinya
- setiap orang seringkali mengubah aspirasi dan kebutuhan mereka – dan akibatnya motivasi mereka berbeda-beda tergantung pada situasi yang dihadapi.

Begitu banyaknya teori mengenai motivasi sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi tergantung pada orangnya serta tujuannya.

Salah satunya adalah teori tangga kebutuhan oleh Abraham Maslow (Munandar, 2001), manusia atau individu di motivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi, yang paling rendah, paling dasar dalam tata tingkat. Begitu tingkat kebutuhan ini dipenuhi, ia tidak akan lagi memotivasi perilaku. Lanjut Munandar (2001) Kebutuhan pada tingkat berikutnya yang lebih tinggi menjadi dominan, dua tingkat kebutuhan dapat beroperasi pada waktu yang sama, tetapi kebutuhan yang paling rendah akan menjadi motivator kuat dalam berperilaku..

Tangga Kebutuhan Maslow digambarkan oleh Munandar (2001) sebagai berikut :

Tabel 1



Tabel 1 menunjukkan tangga kebutuhan dari Maslow, kemudian menurut Stott dan Walker (1992) menguraikan seperti dalam Tabel 2

Tabel 2

Kebutuhan	Indikator Fisik dan Psikologik
Tingkat 5 Kebutuhan Aktualisasi Diri	Keinginan mengembangkan diri secara maksimal melalui usaha sendiri, kreativitas dan ekspresi diri
Tingkat 4 Kebutuhan Penghargaan	Menerima keberhasilan diri, kompetensi, keyakinan, rasa diterima orang lain, aspirasi, rekognisi, dan martabat.
Tingkat 3 Kebutuhan akan cinta, memiliki, dan aktivitas sosial	Rasa bahagia berkumpul dan berserikat, perasaan diterima dalam kelompok, rasa bersahabat dan afeksi.
Tingkat 2 Kebutuhan Rasa Aman	Menghindari bahaya, dan bebas dari rasa takut atau terancam, damai dan masyarakat stabil.
Tingkat 1 Kebutuhan Fisiologis	Lapar, Haus, Seks, Rasa Enak, Tidur dan Istirahat.

Dengan demikian Maslow memilah-milah manusia menjadi tangga-tangga kebutuhan dan diuraikan kebutuhan-kebutuhan apa saja dalam masing-masing tingkatan .

A. Metodologi survey :

Skala Motivasi Kerja

Skala ini disusun dengan menggunakan teori dari A.H Maslow dalam Modul Achievement Motivational Training (2001) terdapat 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi motivasi karyawan. Berikut blue print dari skala motivasi kerja,

Tabel 3

Variabel	Indikator	Item	Jumlah
Motivasi Kerja	Fisiologis	5,10,15,20	4
	Rasa aman	4,9,14,19	4
	Rasa memiliki/social	3,8,13,18	4
	Harga diri	2,7,12,17	4
	Aktualisasi diri	1,6,11,16	4
Jumlah			20

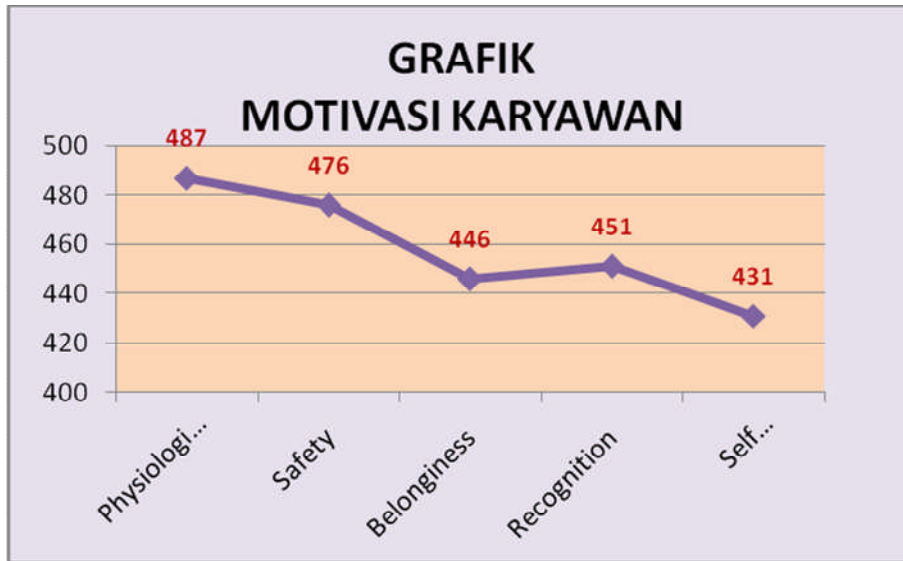
Proses Pemberian Skor (*scoring*)

Setiap pilihan jawaban responden diberi skor nilai atau bobot yang disusun secara bertingkat, untuk skala Motivasi Kerja skor yang diberikan adalah sebagai berikut:

- ✓ Sangat Setuju = 5
- ✓ Agak Setuju = 4
- ✓ Agak Tidak Setuju = 3
- ✓ Tidak Setuju = 2
- ✓ Sangat Tidak Setuju = 1

Dari hasil skala yang disebar kepada 25 responden diperoleh Grafik sebagai berikut :

Tabel 4



B. Pembahasan

Dari hasil skala diatas melakukan wawancara silang kepada 6 subyek yang diambil secara acak guna menggali lebih dalam aspek-aspek motivasi sebagai berikut :

Tabel 6

Motivasi	Aspek
Kebutuhan Fisiologis	Penghasilan, Kompensasi, Kondisi ruangan kerja, Sarana dan prasarana kerja .
Kebutuhan Rasa Aman	Jaminan kesehatan, Jaminan hari tua, Arahan dan supervisi dari atasan.
Kebutuhan Sosial/Rasa Memiliki	Hubungan dengan rekan kerja, bawahan , atasan saat ini serta harapan terhadap kualitas hubungan tersebut, Pertemuan-pertemuan sosial di lingkungan kerja.
Kebutuhan Harga Diri	Apresiasi perusahaan terhadap karyawan berprestasi, Perhatian perusahaan terhadap peningkatan skills karyawan, Feedback perusahaan terhadap hasil kinerja karyawan, Rasa puas karyawan terhadap hasil kinerjanya.

Kebutuhan Aktualisasi Diri	Kreatifitas karyawan dalam mengelola pekerjaannya, Ide-ide karyawan dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan, Cara perusahaan untuk mengembangkan diri potensi karyawan.
----------------------------	---

Setelah dilakukan wawancara untuk menggali informasi tambahan sebagai berikut :

1. Gaji yang mereka terima saat ini tergolong standart dan kurang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari . Selain itu kurangnya insentif yang diberikan kepada karyawan dalam setiap bulannya yang bisa menjadi penambahan pemasukan bagi mereka. Bonus tahunan memang diberikan oleh perusahaan namun hanya diberikan bagi karyawan dengan jabatan leader, sedangkan untuk jabatan staf tidak ada bonus tahunan.
2. Ruang kerja mereka minimalis dan sangat padat, mereka menginginkan adanya meja kerja yang lebih luas, lebih rapi dan adanya penambahan alat pendingin, tidak adanya tempat sholat dan kantin/tempat makan bagi karyawan. Sehingga karyawan harus sholat di sela-sela meja kerja dan makan di meja kerja mereka masing-masing.
3. Jaminan hari tua atau adanya program pensiun karyawan yang disesuaikan dengan masa bakti dan dengan melibatkan JAMSOSTEK
4. Keterbukaaninformasi yaitu dengan diadakannya pertemuan-pertemuan rutin yang lebih intensif di luar jam kerja, karena menurut mereka selama ini pertemuan-pertemuan social yang diadakan oleh perusahaan masih kurang memadai kebutuhan karyawan.
5. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dan tidak adanya penyertaan karyawan dalam seminar-seminar untuk menambah wawasan dan untuk mendukung peningkatan skill mereka dalam bekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem penggajian karyawan termasuk didalamnya rumusan mengenai pemberian insentif dan bonus terhadap karyawan.
2. Melakukan penataan ulang terhadap ruang kerja dan jika memungkinkan perlu ditambahkan ruangan khusus untuk sholat dan makan bagi karyawan.
3. Mengikutsertakan karyawan dalam program jamsostek dan asuransi hari tua yang bisa mengcover keluarga.

4. Mempertahankan dan terus melakukan evaluasi terhadap proses supervisi dan pendelegasian tugas dari atasan kepada bawahan.
5. pertemuan/kegiatan-kegiatan sosial tersebut bisa menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan seluruh karyawan. Pimpinan sebagai wadah aspirasi karyawan
6. program karyawan berprestasi tahunan serta program pemberian penghargaan tentatif bagi karyawan, dimana penghargaan ini bisa berupa penghargaan secara materi maupun non-materi.
7. merumuskan program pelatihan rutin dan berkala sesuai dengan kebutuhan karyawan.
8. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar-seminar yang menunjang pengembangan potensi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya.

Keterbatasan survey

Survey Motivasi kerja pada karyawan PT PQR dilakukan ke semua karyawan dengan level supervisor kebawah atau dengan jabatan staff. Dengan masa kerja dari 3 bulan hingga 5 tahun semenjak PT PQR berdiri., dan juga dikenakan pada karyawan musiman (*on call*). Oleh karena itu apabila hendak dikenakan pada perusahaan lain perlu diperhitungkan metode penelitian yang akan dipergunakan. Kuesionair Motivasi memang sudah baku, tetapi sampai saat ini belum pernah di uji validitas dan realibilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Eggert, M 1999, *Buku pintar motivasi*, PT Qreator Tata Qarakter Jakarta

Milkovich, G .T & Boudreau,J.W , 2003, *Personnel/humar resources management*, Richard D. . Irwin, Inc Homewood, Illiois

Munandar,A.S 2001, *Psikologi industri dan organisasi*, UI Press Jakarta

Modul Pelatihan achievement motivation training, 2001 PT Wiratama Powerindo Jakarta

Stott K & Walker A, 1992, *Making managemebn work, a practrical work*, Prentice Hall, New York

RPSEP-84

DEMOKRASI UBAH HALUAN, POTRET KEMUNDURAN BANGSA?

Khalifah Oktarina

Mahasiswa Program Bidikimisi – Ilmu Komunikasi UPBJJ-UT Semarang

Abstrak

Menyambut hadirnya seorang pemimpin, adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan menjadikan negara ini sebagai komunitas demokratis, sudah terbukti. Prestasi inilah yang diakui oleh dunia internasional. Sebagai sebuah negara muda, Indonesia dinilai mampu mengendalikan masyarakatnya untuk melakukan pemilihan langsung kepala negaranya. Kajian komunikasi politik yang terangkum makalah ini, akan berusaha membongkar paradigma yang terlanjur berkembang di masyarakat, bahwa pemilihan kepala daerah atau kepala negara, memang sudah pantas dilakukan secara langsung. Apabila ada keinginan untuk kembali pada cara pemilihan terwakil, hal itu merupakan kemunduran. Dan bukan lagi prestasi yang diperoleh. Untuk mewujudkan sebuah negara demokratis, pemakalah menilai bahwa rangkaian pekerjaan besar sudah dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. Secara mendasar, kajian komunikasi politik yang mengubah haluan pemilihan tak langsung merupakan wacana baru bagi Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan dampak luar biasa bagi Indonesia. Cakrawala dan kemampuan kebangsaan para negarawan semakin diuji dengan diluluskannya keinginan tersebut. Tonggak komunikasi politik yang harus dilalui oleh negara ini pun menjadi tak lagi tertata rapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan – sebagai bentuk kontribusi pemakalah – yaitu dengan memberikan kesempatan atau model dari satu wilayah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tak langsung. Seluruh komponen bangsa harus menyaksikan proses serta hasil yang diperoleh. Andaikata yang terjadi adalah keruwetan yang tak terkendali, maka akan lebih bijak apabila pola lama ditinggalkan dan digantikan dengan cakrawala komunikasi politik baru yang terbukti sudah diakui dunia.

Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan demokrasi, dalam sistem pemerintahan demokrasi suara rakyat sangat dibutuhkan karena rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam berlangsungnya sistem pemerintahan ini. Indonesia mendapatkan apresiasi yang baik atas penyelenggaraan demokrasi yang damai walaupun memiliki keanekaragaman dalam segala bidangnya. Kekhawatiran mengenai potensi konflik yang

tinggipun mulai terasa, yaitu saat pemilihan Presiden tahun ini dimana masyarakat tersegmentasi dalam dua kubu koalisi partai politik dimana rasa persatuan Indonesia mulai luntur karena mereka hanya mementingkan golongan saja, setelah gagap gembira pemilihan Presiden baru demokrasi Indonesia di guncang lagi permasalahan mengenai perubahan undang-undang pilkada langsung atau tidak langsung. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya diputuskan bahwa pilkada dipilih oleh DPR, namun hal itu memperoleh kritikan dari rakyat karena menurut masyarakat pemilihan tidak langsung membatasi hak pilih rakyat dan menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam makalah ini akan dibahas apakah benar pemilihan langsung merupakan kemunduran demokrasi? Adapun tujuan dari makalah ini yaitu memecahkan suatu hipotesis tersebut apakah benar atau tidak.

PEMBAHASAN

Pengertian demokrasi menurut para ahli : Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut Henry B. Mayo

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Menurut International Commission of Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Menurut C.F. Strong

Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Menurut Samuel Huntington

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Menurut Merriam, Webster Dictionary

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Menurut Abdul Ghani Ar Rahhal

Di dalam bukunya, Al Islamiyyun wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah mendefinisikan demokrasi sebagai “kekuasaan rakyat oleh rakyat”. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Menurut John L Esposito

Pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang

penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Menurut Affan Gaffar
Demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu :
Makna normatif (demokrasi normatif) adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara
Makna empirik (demokrasi empirik) adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

Kelebihan dan Kekurangan Budaya Demokrasi

Kelebihan :

1. Demokrasi memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan.
2. Adanya pemindahan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum.
3. Sistem demokrasi mencegah adanya monopoli kekuasaan.
4. Dalam budaya demokrasi, pemerintah yang terpilih melalui pemilu akan memiliki rasa berutang karena rakyat yang memilihnya, oleh karena itu hal ini akan menimbulkan pemicu untuk bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat.
5. Masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi yang menimbulkan rasa memiliki terhadap negara.

Kekurangan :

1. Masyarakat bisa salah dalam memilih dikarenakan isu-isu politik.
2. Fokus pemerintah akan berkurang ketika menjelang pemilu masa berikutnya.
3. Massa dapat memengaruhi orang.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan

pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachy rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu(demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Setelah era Seoharto berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.Pada tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden.Ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Jenis-jenis Demokrasi dilihat dari penyaluran aspirasi rakyat :

- Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya.

- Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung. Namun, setelah terpilihnya presiden baru tahun ini pemilihan kepala daerah mengalami polemik yaitu mengenai cara pemilihan yang digunakan dalam memilih kepala daerah melalui langsung atau tidak langsung. Hali ini juga mengalami pro dan kontra yang panjang setelah diluluskannya pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Adapun dampak negatif dan positif dari pelaksanaan pilkada langsung maupun tidak langsung.

Dampak Negatif Pilkada Langsung

- Dampak perseteruan sosial politik seperti demonstrasi anarkis dengan membakar kantor pemerintahan atau kantor polisi dan korban jiwa tidak terelakkan dalam perseteruan pilkada langsung itu. Pilkada langsung belakangan hanya menimbulkan dampak kerusuhan.
- Dampak konflik fisik horizontal dan vertikal dengan pihak keamanan sejauh ini mengakibatkan 70 orang tewas dalam sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan usai pilkada langsung sejak 2005. Sejumlah tokoh masyarakat asal Papua menyatakan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah tidak langsung. Mereka meminta pemilihan oleh DPRD bisa dimasukkan ke dalam revisi Undang Undang Otsus Papua yang kini tengah dibahas DPR RI. Para tokoh yang tergabung dalam Tim Perancang Undang Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Papua ini mendatangi kantor Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9) untuk menyampaikan aspirasi tersebut. “Kita ingin sistem pilkada tidak langsung dimasukkan dalam RUU Otsus. Pertimbangannya situasi di Papua kalau pilkada langsung terlalu banyak konflik sampai-sampai merusak tatanan adat dan keluarga di Papua,” kata Ketua Tim, Basir Rohrohmana usai pertemuan. Pilkada langsung di Papua lebih banyak mudharatnya. Pasalnya, bukan cuma menelan biaya besar tapi juga memakan korban jiwa. Di Papua banyak yang mati karena Pilkada langsung. Kemudian rentan dengan perang suku. Mekanisme pilkada tidak langsung merupakan aspirasi mayoritas masyarakat Papua. Beberapa waktu lalu DPRD Papua menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk membahas revisi UU Otsus. Hasilnya, sebagian besar setuju pilkada tidak langsung harus masuk dalam revisi tersebut.
- Dampak besar pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuat banyak pihak prihatin adalah maraknya politik uang. Penggunaan uang yang semakin marak dari waktu ke waktu untuk membeli suara konstituen, tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang dan akibat biaya kampanye yang besar maka hasil pilkada sulit dipisahkan dari perilaku koruptif kepala daerah terpilih. menurut kajian pemerintah sebagian besar pilkada langsung berdampak pada pelaksanaan pemerintahan di daerah.
- Dampak penyelenggaraan pilkada langsung yang biayanya cenderung tinggi, menurut kajian pemerintah, antara lain menyebabkan banyak kepala daerah terpilih tersangkut

kasus hukum, khususnya karena korupsi untuk mengembalikan modal mereka saat kampanye.

- Kadang-kadang politik uang yang terjadi, ongkos politik yang mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popularitas dan kapasitas, dan seterusnya
- Selain itu juga muncul konflik horisontal akibat persaingan antar-calon. Mengakibatkan kontak fisik dan piskis antar pendukung para calon yang kadang mengakibatkan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum
- Dampak besar pilkada langsung itu secara kumulatif akan secara otomatis mematikan ekspektasi publik akan hadirnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Harapan untuk membangun demokrasi dan percepatan kesejahteraan rakyat telah didistorsi oleh sistem pilkada langsung.
- Sebagian besar pilkada langsung berdampak pada pelaksanaan pemerintahan di daerah.
- Dampak penyelenggaraan pilkada langsung yang biayanya cenderung tinggi, menurut kajian pemerintah, antara lain menyebabkan banyak kepala daerah terpilih tersangkut kasus hukum, khususnya karena korupsi untuk mengembalikan modal mereka saat kampanye.
- Dampak besarnya biaya kampanye yang kemudian mengakibatkan kepala daerah sulit lepas dari perilaku koruptif tergambar jelas dalam data terakhir yang dilansir Kementerian Dalam Negeri, bahwa ada 160 kepala daerah yang telah dan akan dibawa ke pengadilan karena korupsi APBD.

Dampak Positif

- Pilkada langsung membuat masyarakat daerah mengenal calon kepala daerahnya. Konstituen akan lebih dekat mengenal calon. Kemudian siapapun yang terpilih berarti mendapatkan mandat dari rakyat yang dipimpinnya

Penanganan

- Hal tersebut bukan berarti menafikan manfaat dari pilkada langsung, dampak negatif negatif itu dapat diatasi.
- Mungkinantisipasi dan penanganan dampak buruk tersebut, tidak perlu mengubah pemilihan langsung dengan pemilihan tidak langsung. Tetapi kita harus mengatasi

ekses, mencegah semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi dan masalah-masalah baru yang tidak perlu terjadi.

Dasar hukum tentang Pilkada langsung sebenarnya tidak diwajibkan dalam UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak mengatur kepala daerah dipilih secara langsung, hanya dipilih secara demokratis. Melihat untung ruginya bagi bangsa dan masyarakat maka perlu dipikirkan kembali apakah tepat jika pilkada dilakukan secara langsung. Karena UUD 1945 menyebutkan hanya pemilihan presiden saja yang diselenggarakan secara langsung.

Adapun dampak negatif dan positif dari pelaksanaan pilkada tidak langsung yaitu :

Dampak negatif menurut Malik, ada beberapa dampak terburuk yang akan terjadi jika pilkada dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan pihak DPRD yaitu :

1. Sistem ini akan memunculkan kekuasaan oligarki yaitu kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat.
2. Rakyat dipastikan tidak mengenal dan mengerti tentang kepala daerah yang akan memimpinya.
3. Mekanisme pilkada di DPRD menumbuhkan praktik politik uang yang lebih besar dan sistematis. Sebab, si calon kepala daerah tidak perlu lagi bersusah payah menemui, berkampanye dan meneriakkan harapan atau janji-janjinya kepada rakyat. Mereka cukup memberikan harapan kepada DPRD. Bahkan, itu tidak perlu, karena cukup dengan uang.
4. Tidak semua pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan menimbulkan kerusuhan.

Menurutnya, adalah tidak benar alasan perlunya pilkada melalui pemilihan di DPRD. Sepengetahuan Malik, tidak ada proses pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan sebelumnya terjadi hingga saling bunuh antar-pendukung. "Kalau alasannya rusuh, dari 34 pilkada gubernur dan 500-an pilkada kabupaten/kota, pilkadanya yang rusuh tidak sampai 10 persen kok. Seperti Palembang. Itu pun rusuhnya karena polisi lelet. Selain itu, nggak ada lagi kan.

Dampak Positif dari pilkada tak langsung :

1. Semua partai politik memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai secara baik sehingga memunculkan figur-figur politik baik sebagai pekerja, kader, aktivis dan simpatisan maupun di luar partai yang

bersangkutan sehingga benar-benar memunculkan figur politik yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat sekaligus sesuai dengan visi, misi dan platform partai yang mengusung atau mendukung figur politik yang bersangkutan untuk menjadi kepala daerah.

2. Kepala daerah yang dipilih dengan sistem ini sudah dipastikan akan mendapatkan dukungan kursi di DPRD legislatif secara mayoritas sehingga akan meningkatkan kelancaran kinerja kepala daerah tersebut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan membangun dengan dukungan partai politik yang solid dan kuat.
3. Institusi, lembaga dan perorangan yang profesional di bidang manajemen kampanye dan politik serta para poolster dan surveyor serta kelompok profesional lain akan tumbuh ke arah yang lebih berkualitas karena tidak lagi berkuat pada soal popularitas dan elektabilitas figur politik dalam bentuk pencitraan politik semata, tetapi akan lebih mendalam pada soal-soal yang menguatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas figur politik sebagai kandidat kepala daerah.
4. Masyarakat pemilih (voters) memiliki proses pembelajaran yang positif agar benar-benar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab ketika memilih anggota legislatif (DPRD) yang tidak sekedar figur-figur yang muncul dan jadi karena memiliki kekuasaan ekonomi dan politik semata, tetapi adalah memilih figur-figur yang benar-benar memiliki integritas dan kepribadian dan karakter yang dapat dipercaya, berkomitmen, bertanggung jawab, memiliki kejujuran, kebenaran dan kesetiaan baik kepada masyarakat maupun partai politik yang mendukungnya.
5. Seluruh proses dan sistem politik semacam ini akan mempercepat demokrasi Indonesia menuju pada demokrasi yang substansial kontraktual bukan demokrasi prosedural transaksional, karena kontrak-kontrak politik para figur politik akan semakin mudah dikontrol dan diawasi. Sehingga kita meyakini di masa depan akan muncul figur-figur politik yang benar-benar siap menang bukan sekedar siap menang tetapi siap menang dengan seperangkat kapasitas untuk mengelola dan melaksanakan kemenangannya itu untuk bekerja sepenuhnya melayani kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa masing- masing cara mempunyai dampak negatif dan positif yang berpengaruh dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun kita harus memahami bahwa sistem demokrasi dengan tata apapun hanya sebagai alat atau kendaraan. Secara lebih filosofis kita akan mengatakan bahwa aturan hukum, kontrak politik, dan kesepakatan yang kita sepakati akan memiliki makna dan arti yang berdaya guna bila semua di dasarkan pada itikad yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, makmur,dan damai walaupun didalam keanekaragaman. Karena sesungguhnya kemajuan dan kemunduran demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan rakyatnya.

Saran

1. Demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat,hal ini harus menjadikan pedoman para elit politik dalam mengemban amanat rakyat agar tidak hanya mementingkan golongan atau partai saja.
2. Masyarakat harus bisa selektif dalam memilih wakilnya kelak agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Saat pesta demokrasi masyarakat diharapkan tidak mudah tersulut emosi karena hal itu memicu konflik anatar kelompok,sehingga tujuan dari demokrasi itu sendiri gagal.
4. Pemerintah demokrasi harus bisa benar- benar mendengarkan suara rakyat.
5. Bentuk pemilihan apapun dapat berlangsung jika masyarakat dan pemerintah bersatu dalam satu tujuan yaitu membangun bangsa ini menjadi bangsa maju yang dapat mensejahterahkan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/24/14261156/Tiga.Dampak.Negatif.Pilkada.Langsung>.
http://www.undip.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2571:pilkada-langsung-tidak-menciptakan-kesejahteraan-rakyat-&catid=78
<http://suaramerdeka.com/harian/0505/13/opi03.htm>

RPSEP-85

SEKOLAH SEBAGAI FILTER KOMUNIKASI BUDAYA

Puspa Kapita

Mahasiswa Program Bidikmisi Ilmu Komunikasi FISIP – UPBJJ-UT Semarang

Abstrak

Media komunikasi sosial berupa facebook, saat ini menjadi pilihan komunikasi utama remaja Indonesia. Remaja Indonesia masih menggemari facebook karena mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan semua mitra, tanpa kendala waktu dan ruang. Sebagai bagian dari remaja di dunia, remaja Indonesia sudah memanfaatkan facebook sebagai sarana ampuh untuk memasarkan produk tertentu. Akan tetapi, kenyataan sebaliknya justru dialami oleh sebagian remaja Indonesia yang justru mendapatkan pengaruh buruk. Bentuk pengaruh buruk inilah yang menjadi fenomena kontraproduktif sebuah layanan komunikasi sosial. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk memfilter deras arus komunikasi sosial di facebook. Salah satunya yaitu melalui penggalakan dan penanggulangan informasi facebook untuk kepentingan nonedukasi. Sekolah mengambil peran sangat sentral dalam penentuan dan pengambilalihan informasi dari facebook, sehingga mereka pun dapat menjadi pagar pembatas sekaligus penghubung komunikasi sosial siswanya. Akan tetapi, belum seluruh sekolah menggunakan kesempatan tersebut untuk menjaga privasi siswanya dalam berinteraksi dengan komunitas luar sekolah. Kajian ini akan mengetengahkan solusi yang diyakini dapat memagari siswa sekolah ketika mereka memanfaatkan facebook. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan satu komunitas yang terintegrasi dalam akun email pribadi siswa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Media Sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet telah menjadi alat komunikasi digital. Media sosial merupakan hal yang sudah sering didengar oleh kalangan masyarakat dari mulai anak-anak, remaja sampai orang dewasa dimasa sekarang. Banyak orang-orang menyebutnya dengan media sosial. Yang mana sudah banyak digunakan oleh semua kalangan dari masyarakat yang berada dikalangan bawah sampai masyarakat yang berada dikalangan atas yang mana sangat dibutuhkan oleh semua orang dimasa sekarang ini. Perkembangan media sosial dimasa sekarang sangatlah pesat karena banyak orang yang memakai media sosial namun mereka kurang memahami media sosial itu sendiri. Media sosial merupakan tempat untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain secara tidak langsung yang berada ditempat yang jauh sampai tempat yang terdekat. Orang-orang jika mendengar media sosial langsung tertuju kepada internet, google, facebook, twitter, youtube dan semua fasilitas lainnya yang menghubungkan dan interaksi antar manusia.

Facebook, twitter dan situs media sosial yang lainnya saat ini merupakan aplikasi teknologi yang sedang digemari kalangan remaja termasuk juga anak-anak. Dengan situs media ini kita dapat memperluas pertemanan baik secara kekerabatan maupun dengan masyarakat luas, bukan hanya dalam ruang lingkup lingkungan tempat tinggal saja tetapi dari berbagai macam kalangan, lingkungan maupun status sosial. Hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi remaja untuk memilikinya. Media sosial memiliki dampak yang besar dalam kehidupan manusia saat ini. Zaman semakin canggih karena teknologi yang selalu diperbaharui, segala sesuatu saat ini lebih mudah dilakukan. Selain dampak positif banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Media sosial apabila dimanfaatkan secara positif dapat menjadi manfaat yang sangat besar dan apabila dimanfaatkan secara negatif akan berakibat pengikisan moral penggunanya. Oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatif nya dapat di hindari dan dampak positif nya semakin di rasakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah itu media sosial ?
2. Apakah fungsi media sosial ?
3. Apa dampak positif penggunaan media sosial ?
4. Apa dampak negatif media sosial ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah, maka Tujuan penulisan makalah ini yaitu :

1. Untuk menambah wawasan tentang penggunaan media sosial
2. Agar pengguna tidak salah dalam penggunaan media sosial
3. Dapat menumbuhkan rasa persaudaraan diantara pengguna media sosial
4. Agar pengguna sosial media dapat mengetahui dampak penggunaan media sosial

PEMBAHASAN

Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, media sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, media sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Biasanya masyarakat mengatakan bahwa media sosial adalah media yang dapat mendukung interaksi dan menggunakan teknologi yang berbasis web yang dapat mengubah menjadi media dialog secara tidak langsung. Professor J.A Barnes pada tahun 1954 mengungkapkan media sosial merupakan sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. media sosial ini akan membuat mereka yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga bisa saling berhubungan. Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*

3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
4. Penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010:53) mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Teknologi media sosial mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial, dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-presentasi, self-disclosure). Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel di Horizons Bisnis mereka diterbitkan tahun 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial.

1. Proyek Kolaborasi

Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di website ini. Contohnya Wikipedia.

2. Blog dan microblog

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya twitter.

3. Konten

Para *user* dari pengguna website ini saling membagi konten-konten media, baik seperti video, *ebook*, gambar, dan lain-lain. Contohnya YouTube.

4. Situs jejaring sosial

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contohnya facebook.

5. Game world

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana *user* bisa muncul dalam bentuk avatar–avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya *game online*.

6. Virtual social world

Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti *virtual game world*, berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Social World* lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, Contohnya *second life*.

Media sosial merupakan sebuah situs yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat gambar pribadi kemudian berhubungan dengan teman-teman untuk melakukan interaksi dan mencari informasi. Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan sekarang manusia dapat memiliki media sendiri. Pengguna media sosial dapat mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. sebagai pengguna sosial media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

A. Fungsi Media Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.

1. Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain :

a. Kesederhanaan

Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet

b. Membangun Hubungan

Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.

c. Jangkauan Global

Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten kita untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna

d. Terukur

Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

2. Definisi media sosial sebagai fungsi sistem komunikasi, yaitu :

a. Administrasi

Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif dimana posisi pasar kita sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi konten dalam masyarakat yang relevan. Riset pasar untuk menemukan dimana pasar kita.

b. Mendengarkan dan Belajar

Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar kita inginkan, apa yang relevan dengan mereka.

c. Berpikir dan Perencanaan

Dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaimana kita akan tetap didepan pasar dan bagaimana kita berkomunikasi ke pasar. Bagaimana teknologi sosial meningkatkan efisiensi operasional hubungan pasar.

d. Pengukuran

Menetapkan langkah-langkah efektif sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isi dibuat dan alat yang kita gunakan efektif dalam meningkatkan posisi dan hubungan pasar kita.

Dampak penggunaan Media Sosial

Teknologi informasi yang berbasis internet telah berkembang pesat di dunia, produk berbasis internet yang paling di gemari saat ini adalah situs media sosial berupa skype, facebook dan twitter. Dengan layanan situs media sosial ini kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman baru maupun lama dari belahan dunia manapun. Arus perkembangan teknologi ini bagaimanapun tak akan bisa kita bendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah familiar dengan berbagai situs media sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan media sosial tersebut. Berkembang pesatnya situs media sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat di hindari dan dampak positif nya semakin di rasakan.

Teknologi merupakan hal wajib untuk dipelajari yang akan memberikan manfaat jika dipergunakan untuk hal-hal positif dan membangun namun teknologi akan membuat kerusakan jika dipergunakan sebagai media dalam melakukan tindakan yang melanggar aturan. Orang tua, guru dan para pendidik generasi menjadi sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan terhadap efek negatif internet terutama situs media sosial yang sedang digemari jutaan bahkan milyaran umat manusia. Jangan sampai generasi yang akan menjadi generasi penerus ini justru menjadi generasi yang merugi karena keengganan kita dalam mendidik mereka dan memberikan pemahaman tentang efek negatif jejering sosial sehingga mereka terperosok dan menjadi korban kejahatan dunia maya.

1. Dampak positif penggunaan media sosial

a. Media penyebaran informasi

Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs media sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia serasa berada dalam sentuhan jari kita.

b. Sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial

Mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Hal ini sangatlah penting, tidak ada batasan usia, semua orang butuh untuk berkembang. Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan

teknis dan social dengan cara beradaptasi, bersosialisai dengan public dan mengelola jaringan pertemanan.

c. Memperluas jaringan pertemanan

Dengan menggunakan media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing, dll. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang. Misalnya, belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs media sosial.

d. Sarana belajar untuk mengembangkan diri melalui pertemanan

Mereka pengguna sosila media akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena di sini mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain.

e. Internet sebagai media komunikasi

Dengan internet kita dapat melakukan interaksi dan komunikasi dengan siapa saja dan dimana saja. Melalui komunikasi kita dapat memperoleh beberapa informasi yang dibutuhkan.

f. Mencari koneksi

Melalui media sosial dapat mencari koneksi kerja dimana saja diseluruh pelosok dunia untuk acara bisnis dan pengembangan usahanya melalui saran-saran dari rekan kerjanya dan dapat memperoleh informasi dalam lowongan pekerjaan

g. Media promosi atau pemasaran

Media sosial memudahkan banyak orang untuk melakukan promosi produknya yang akan di jual kepada semua pembeli dan mereka dapat menjualnya keseluruh pelosok dunia dan dalam pembeliannya pun sangatlah muda dengan cara mentransfer uang kepada penghasil produk atau agen yang menyalurkan produk yang akan dibeli oleh si pembeli. Memudahkan pemebeli untuk tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran/penjualan karena dapat di lakukan lewat internet

h. Media pertukaran data

Dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide web : jaringan situs-situs web) para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah

i. Media untuk mencari informasi atau data

perkembangan internet yang pesat, menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat.

2. Dampak negative penggunaan media sosial

a. Kecanduan

Situs media sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasi diri. Meningkatnya pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respons kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental.

b. Sulit bergaul di dunia nyata

Anak-anak dan remaja banyak menggunakan media sosial dalam game online, facebook dll sehingga saat mereka bertemu dan bermain mereka menjadi sulit bergaul dan kurangnya rasa simpati diantara teman-temannya karena mereka asyik sendiri dengan permainan yang mereka sedang mainkan di dunia maya.

c. Menimbulkan kejahatan di dunia nyata

Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan. Di dunia internet, kejahatan dikenal dengan nama cyber crime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya, carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming.

d. Waktu terbuang sia-sia

Sudah beberapa waktu saya mengamati perilaku pengguna media sosial dengan berinteraksi secara intensif dengan beberapa users. Satu pertanyaan yang sering hinggap di benak saya adalah bagaimana user tersebut bisa online terus padahal secara teori mereka seharusnya sedang bekerja, istirahat tidur malam hari, ataupun sedang beribadah. Tidak jarang interaksi saya lakukan dengan mereka yang sudah berkeluarga sehingga tidak jarang saya berpikir bagaimana mereka mengatur interaksi dengan keluarga mereka kalau setiap saat waktunya dihabiskan dengan melototi layar komputer dan keyboard smartphonenya. Saya mengakui jika sebagian orang memang memanfaatkan media sosial sebagai media berbisnis dan mencari referensi. Tapi ada juga yang menggunakan media sosial untuk sekedar chatting dengan teman di facebook atau tweeter yang bila terlalu asyik akan menjadi lupa diri dan tidak tau waktu.

e. Dapat menyebabkan penyakit punggung

Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Bila menggunakan mouse atau memencet keypad ponsel selama berjam-jam setiap hari, seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Penyakit punggung juga merupakan hal yang umum terjadi, pada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu duduk di depan meja komputer.

f. Anak menjadi malas belajar komunikasi di dunia nyata

Bagi anak dan remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di media social. Hal ini akan membuat mereka semakin sulit membedakan antara berkomunikasi di situs media social dan dunia nyata. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keterampilan menulis mereka di sekolah dalam hal ejaan dan tata bahasa.

g. Lebih mementingkan dirinya sendiri

Situs media social akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi kurang berempati di dunia nyata.

h. Pornografi

Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis home page yang dapat di akses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal.

i. Penipuan

Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Kita dapatkan pada penyedia informasi tersebut.

j. Perjudian

Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Kita hanya perlu menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya.

Cara Mengatasi Penyimpangan Penggunaan Media Sosial

Tugas mengawasi dan membimbing itu tentu saja bukan tugas guru di sekolah semata, orang tua lah yang seharusnya berperan dalam pengawasan dan bimbingan bagi anak-anaknya. Untuk pedoman pengawasan tersebut tentu saja para orang tua dan para anak dan remaja itu sendiri mengetahui apa saja dampak positif dan negatif situs jejaring sosial tersebut. Kecanduan media sosial memang sedang mendunia saat ini, tetapi masih ada cara untuk mengobatinya. Kecanduan media sosial juga sudah bisa disebut sebagai penyakit di kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Saat ini banyak fenomena yang menunjukkan jika tidak sedikit pula pengguna Facebook yang menganggap dunia maya khususnya jejaring sosial Facebook lebih mengasyikkan daripada dunia nyata. Kecanduan Media sosial ketika pengguna media sosial telah menganggap jika dunia virtual lebih menyenangkan dibanding dengan kehidupan nyata mereka, maka salah satu gejala yang terlihat adalah tidak terlepasnya komputer, telepon dan jaringan internet disetiap waktu dengan cara mengecek akun media sosial yang dimiliki terlebih halaman dinding dan kolom notifikasi sesering mungkin bahkan tiap menitnya.

Dilansir CNN, sebuah penelitian dilakukan oleh IDC pada tanggal 27 Mei 2013 untuk menghitung seberapa sering pengguna Facebook mengecek akun mereka dalam satu hari. Dari hasil penelitian tersebut, terkuak fakta bahwa rata-rata para pengguna smartphone tersebut memeriksa akun Facebook mereka sebanyak 14 kali setiap harinya. Setiap kali memeriksa akun Facebook tersebut, tiap orang rata-rata menghabiskan waktu sekitar 2 menit. Kecanduan akan jejaring sosial Facebook ini bukan tidak menimbulkan efek apa-apa. Menurut penelitian beberapa psikolog, kecanduan Facebook ternyata dapat membuat psikologis penggunanya sedikit terganggu.

Data dari Mashable pada tanggal 3 November 2013 melaporkan jika pengguna Facebook yang mengakses akun Facebooknya secara rutin sampai timbul rasa kecanduan, memiliki risiko jika kemungkinan di kemudian hari sisi psikologis pengguna tersebut akan terganggu. Dalam data tersebut, terganggunya sisi psikologis pecandu Facebook ini terkait dengan reaksi hormon Dopamine. Dopamine ini adalah senyawa kimia dalam tubuh yang dapat merangsang rasa suka, gembira, tenang seperti halnya ketika pecandu obat atau morfin mengonsumsi barang tersebut. Untuk masalah sosial atau pribadi saja, bagi seorang yang sudah menjadi seorang pecandu Facebook, ketika dia mendapatkan banyak notifikasi, maka secara otomatis dopamine dalam tubuhnya akan bereaksi. Sebagai contoh, apabila dalam satu

hari dia tidak mendapatkan notifikasi dari seorang pun dalam friendlist di kolom atas Facebooknya, maka perasaan resah dari si pengguna Facebook yang sudah kepalang kecanduan akan bereaksi.

Apabila tingkatan penggunaannya sudah mencapai tahap addict maka sulit untuk menghilangkan tingkat kecanduan tersebut. Dibutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya. Selain itu, dampak lain dari kecanduan Facebook oleh penggunaannya adalah kurangnya interaksi pengguna tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika dihadapkan ke dunia nyata, maka beberapa bagian dari otaknya tidak dapat berjalan seperti sebelum dia mempunyai account Facebook. Kebanyakan mereka akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, kurang biasa mengeluarkan pendapat atau ngobrol dengan orang lain, kesulitan mengontrol emosi dan beberapa lainnya. Untuk mengatasi kecanduan media sosial kita harus berusaha dengan cara

1. Mengatur waktu online

Seharusnya mengukur waktu online. Seperti menggunakan alarm, ataupun stopwatch untuk mengukur seberapa lama kita online di dunia maya

2. Membatasi penggunaan media sosial

Seperti mengurangi penggunaan twitter, facebook, BBM, whatsapp, dll.

3. Lebih baik kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga maupun sahabat.

4. Melakukan sosialisasi di dunia nyata, tidak hanya di twitter, fb dll

5. Meningkatkan olahraga agar badan tetap segar

PENUTUP

Kesimpulan

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, media sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, media sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Professor J.A Barnes pada tahun 1954 mengungkapkan media sosial merupakan sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. media sosial ini akan membuat mereka yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga bisa saling berhubungan. Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
4. Penerimaan pesan yang menentukan waktu interaksi

Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel di Horizons Bisnis mereka diterbitkan tahun 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial.

1. Proyek Kolaborasi
2. Blog dan microblog
3. Konten
4. Situs jejaring sosial
5. *Game world*
6. *Virtual social world*

Media sosial merupakan sebuah situs yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat gambar pribadi kemudian berhubungan dengan teman-teman untuk melakukan interaksi dan mencari informasi.

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien.

Saran

Sebaiknya anak-anak dalam menggunakan media sosial di bimbing dan didampingi oleh orang tua agar tidak beraakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dalam penggunaan media sosial juga memiliki batasan-batasan janganlah terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial, bagi setiap orang dari anak-anak sampai orang tua karena media sosial jika digunakan secara berlebihan juga akan menimbulkan penyakit, kecanduan, dll. Dengan adanya media sosial itu seharusnya membantu dalam kehidupan sehari-hari apabila digunakan secara positif dapat menguntungkan bagi pihak penggunanya. Dalam penggunaan media sosial kita dapat melakukan interaksi dengan berbagai orang, orang yang baru dan juga bisa mencari teman lama. Jadi didalam pemakaian media sosial harus pintar-pintar agar tidak mendapatkan masalah, juga tidak mudah tergoda dalam situs-situs yang menggurikan. Dianjurkan dalam menggunakan media sosial agar tidak melakukan hal-hal yang berbentuk kriminalisme dan jangan percaya informasi yang belum terbukti. Maka dari itu gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Christian Alfian, 2000, *Pengaruh Situs Jejaring Sosial Bagi Pertumbuhan Dan Perkembangan Remaja Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media:

<http://www.merdeka.com/teknologi/kecanduan-facebook-fenomena-lain-jejaring-sosial-sisi-hitam-jejaring-sosial.html> (Reporter : [Dwi Zain Musofa](#) | Rabu, 12 Juni 2013 13:47) diakses pada hari Jumat, 17 Oktober 2014

[http://www.kompas.com/Berjejaring Sosial Itu Butuh Kedewasaan](http://www.kompas.com/Berjejaring_Sosial_Itu_Butuh_Kedewasaan). diakses pada hari Jumat, 17 Oktober 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi Digital](http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital) diakses pada hari Jumat, 17 Oktober 2014

<http://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/> diakses pada hari Jumat, 17 Oktober 2014

<http://hendrawan1.blogspot.com/2011/04/dampak-jejaring-sosial-bagi-masyarakat.html> diakses pada hari Jumat, 17 Oktober 2014

RPSEP-86

IMPLEMENTASI STRATEGI PROMOSI DALAM BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH MAHASISWAPADA UPBJJ-UT PEKANBARU

Radeswandri

Universitas Terbuka UPBJJ-UT Pekanbaru)

Email : rades@ut.ac.id

Abstrak

Dalam menghadapi era globalisasi serta persaingan usaha yang semakin ketat, dalam hal ini persaingan dalam bidang jasa pendidikan, setiap perusahaan perlu menentukan strategi promosi yang tepat dan efektif. Strategi promosi merupakan salah satu factor penting bagi perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan yaitujumlah mahasiswa.UPBJJ-UT Pekanbaru berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik yaitu pelayanan prima kepada mahasiswa agar mahasiswa merasa puas sehingga mahasiswa tersebut dapat pula memberikan informasi kepada maysarakat atau calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya.Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi promosi dalam bauran pemasaran terhadap peningkatan jumlah mahasiswa pada UPBJJ-UT Pekanbaru. Strategi promosi yang dilaksanakan oleh UPBJJ-UT Pekanbaru dalam meningkatkan jumlah mahasiswa adalah periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan dan hubungan masyarakat. Periklanan berupaya memberitahu dan mempengaruhi pelanggan yang meliputi spanduk, brosur, media elektronik, media cetak.Promosi penjualanberupaya mendorong pembelian dengan memberikan insentif kepada konsumen agar membeli produk berupa tas, kaos, topi, buku. Penjualan perorangan berhadapan dengan konsumen secara langsung. Sedangkan hubungan masyarakat membangundan memelihara citra perusahaan di depan publik.Beberapa hambatan yang ada dalam pelaksanaan strategi promosi ini adalah masih kurangnya perencanaan yang matang terhadap kegiatan promosi yang akan dilakukan, keterbatasan dana untuk promosi, kurangnya variasi dalam promosi.

Kata kunci : Strategi Promosi, Bauran Pemasaran dan Jumlah Mahasiswa

PENDAHULUAN

Dalam memasarkan suatu produk dibutuhkan usaha yang dapat memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Promosi merupakan alat yang tepat untuk memperkenalkan suatu produk. Promosi merupakan kegiatan yang sangat berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut. Promosi menjadi salah satukomponen dari bauran pemasaran (*Marketing Mix*) yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi.Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi, sehingga menjadi

satu kesatuan strategi, yang memiliki peranan penting dalam pemasaran. Promosi sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk menciptakan transaksi antara pembeli dan penjual.

Salah satu usaha yang dibutuhkan agar mampu bersaing dan sekaligus mendapatkan konsumen serta mencapai tujuannya yaitu dengan mengkomunikasikan produk perusahaan kepada masyarakat agar dikenal dan akhirnya dibeli. Untuk mengkomunikasikan produk tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan promosi. Dalam melaksanakan kegiatan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat pilihan promosi mana yang akan digunakan agar dapat mencapai penjualan yang maksimal, dapat mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan mendapatkan laba seperti yang diharapkan oleh perusahaan.

Jadi banyak keuntungan yang diperoleh dengan melaksanakan kegiatan promosi. Dengan kegiatan promosi kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu produk, dapat meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, membedakan produk kita dengan produk pesaing bahkan membantu mengubah tingkah laku, menumbuhkan kesadaran dan pendapat konsumen, yang pada akhirnya konsumen menggunakan jasa tersebut dan dapat pula mengajak orang lain.

Unit Program Belajar Jarak Jauh –Universitas Terbuka Pekanbaru (UPBJJ-UT Pekanbaru) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di daerah. Fungsi pokok UPBJJ-UT Pekanbaru diantaranya adalah melaksanakan kegiatan administrasi dan humas serta promosi yang dikoordinasi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kemudian mengembangkan, membina dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai instansi yang merupakan wewenang Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru untuk melaksanakannya. Dengan persaingan yang semakin tinggi, dimana setiap perguruan tinggi dalam meningkatkan jumlah mahasiswanya berusaha menciptakan suatu cara bagaimana menarik calon mahasiswa. Begitu juga dengan UPBJJ-UT Pekanbaru dalam mengembangkan usahanya, mempertahankan kelangsungan hidup, agar dikenal oleh masyarakat, dan dapat meningkatkan jumlah mahasiswanya, salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan promosi.

Keberhasilan UPBJJ-UT Pekanbaru dalam meningkatkan jumlah mahasiswa perlu usaha yang sungguh-sungguh dalam bidang pemasaran terutama strategi promosi yang dilaksanakan dengan penyebaran informasi yang disampaikan kepada konsumen serta

kemampuannya membaca keinginan konsumen dan menawarkan produk ke pasar atau konsumen. Dengan strategi promosi yang tepat dan efektif diharapkan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi promosi dalam bauran pemasaran terhadap peningkatan jumlah mahasiswa pada UPBJJ-UT Pekanbaru. Sehubungan dengan peningkatan Jumlah mahasiswa pada UPBJJ-UT Pekanbaru dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) pada tabel berikut ini.

Tabel 1

**Jumlah Mahasiswa Registrasi UPBJJ-UT Pekanbaru Per Program Studi
Tahun 2011 – 2013**

No	Program Studi	Jenjang	Jml 2011	Jml 2012	Jml 2013	Rata-rata Jumlah Mahasiswa per Tahun
1	LINGKUNGAN	G / D- 1	1	-	-	0
2	PENDIDIKAN OLAHRAGA	F / D- 2	26	-	-	9
3	PERPUSTAKAAN	F / D- 2	11	8	6	8
4	PERPAJAKAN	E / D- 3	8	6	6	7
5	BAHASA INGGRIS	E / D- 3	7	6	3	5
6	KEARSIPAN	D-4	-	-	1	0
7	PENDIDIKAN MATEMATIKA	C / S- 1	34	38	32	35

No	Program Studi	Jenjang	Jml 2011	Jml 2012	Jml 2013	Rata-rata Jumlah Mahasiswa per Tahun
8	PENDIDIKAN FISIKA	C / S- 1	9	10	11	10
9	PENDIDIKAN KIMIA	C / S- 1	2	3	3	3
10	PENDIDIKAN BIOLOGI	C / S- 1	26	21	14	20
11	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	C / S- 1	11.3 79	10.1 38	8.50 5	10.007
12	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	C / S- 1	2.79 2	2.20 6	1.77 4	2.257
14	PENDIDIKAN EKONOMI	C / S- 1	38	41	30	36
15	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	C / S- 1	31	44	41	39
16	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	C / S- 1	77	67	62	69
17	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	C / S- 1	28	28	27	28
18	MATEMATIKA	C / S- 1	7	9	6	7
19	STATISTIKA	C / S-	5	15	5	8

No	Program Studi	Jenjang	Jml 2011	Jml 2012	Jml 2013	Rata-rata Jumlah Mahasiswa per Tahun
		1				
20	AGRIBISNIS	C / S- 1	51	27	31	36
21	ILMU HUKUM	C / S- 1	-	-	36	12
22	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	C / S- 1	1.56 3	1.66 6	1.58 7	1.605
23	ILMU ADMINISTRASI NIAGA	C / S- 1	10	14	18	14
25	ILMU PEMERINTAHAN	C / S- 1	708	1.00 2	1.20 6	972
26	SOSIOLOGI	C / S- 1	98	98	94	97
27	ILMU KOMUNIKASI	C / S- 1	45	51	65	54
28	SASTRA INGGRIS BIDANG MINAT PENERJEMAHAN	C / S- 1	23	23	29	25
29	EKONOMI PEMBANGUNAN	C / S- 1	14	13	16	14
30	MANAJEMEN	C / S- 1	378	451	518	449

No	Program Studi	Jenjang	Jml 2011	Jml 2012	Jml 2013	Rata-rata Jumlah Mahasiswa per Tahun
31	AKUNTANSI	C / S- 1	59	95	105	86
32	MAGISTER MANAJEMEN	B / S- 2	41	28	42	37
33	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	B / S- 2	76	51	47	58
	JUMLAH		17.5 47	16.1 59	14.3 20	16.009

Sumber Data: BAAPM_UT30 Mei 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah mahasiswa secara keseluruhan terdapat penurunan dari tahun 2011 sampai ke 2013. Tetapi kalau kita lihat ada beberapa program studi yang mengalami peningkatan dalam jumlah mahasiswa. Yang paling menonjol mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir terdapat pada prodi S1 Ilmu Pemerintahan, dan S1 Manajemen. Sedangkan untuk program studi ilmu administrasi negara mengalami penurunan tetapi tetap menjadi yang terbesar dalam jumlah mahasiswa karena rata-rata pertahun dalam tiga tahun terakhir ini mempunyai mahasiswa dengan jumlah yang besar. Jumlah mahasiswa untuk prodi Non Pendas (pendidikan dasar) ini dinilai cukup berarti karena untuk ke depan UT akan memprioritaskan pada peningkatan prodi Non Pendas.

Seperti kita ketahui bahwa jumlah mahasiswa pada UPBJJ-UT Pekanbaru didominasi oleh program Pendas yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD). Tetapi beberapa tahun terakhir ini jumlah mahasiswa pada program pendas sudah mengalami penurunan, tetapi masih ada penambahan mahasiswa tiap semesternya. Ada beberapa Program Diplomayang telah ditutup juga sejak tahun 2010 hingga 2012 karena jumlah mahasiswa UPBJJ-UT Pekanbaru cenderung menurun dari tahun

ke tahun. Penurunan jumlah mahasiswa program diploma tersebut diduga karena berkurangnya minat mahasiswa untuk memilih program diploma.

Peningkatan jumlah mahasiswa yang terdapat pada program non pendas pada UPBJJ-UT Pekanbaru tidak terlepas dari kerjasama UT dengan mitra yang sudah terjalin selama ini dengan baik misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota dan Kecamatan yang dapat terwujud karena kegigihan para pengelola di daerah masing-masing dalam mempromosikan program-program yang UT miliki, dan membentuk pokjar untuk prodi Non Pendas, kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah daerah provinsi Riau serta usaha yang dilakukan oleh UPBJJ-UT Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan promosinya. Dengan melihat beberapa gambaran tersebut, penulis ingin mengetahui implementasi strategi promosi dalam bauran pemasaran terhadap peningkatan jumlah mahasiswa pada UPBJJ-UT Pekanbaru.

KAJIAN LITERATUR

BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX)

Bauran Pemasaran merupakan kombinasi empat variable penting dari konsep pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Bauran pemasaran sebagai salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu yang dijalankan perusahaan berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarnya.

Menurut Lupiyoadi (2006:70) Bauran Pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan terus. Kotler (2005 : 19) menyatakan Bauran Pemasaran adalah “seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Alat-alat pemasaran terdiri dari empat kelompok yang disebut 4 P yaitu produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi (promotion)”. Dalam marketing mix selain membahas 4 P, pada perusahaan jasa ada unsur yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan pada strategi komunikasi pemasaran yang disebut dengan 3 P yaitu proses (process), orang (people) dan bukti fisik (physical evidence), sehingga marketing mix menjadi 7 P.

1. Product (produk)

Product adalah segala sesuatu (barang atau jasa) yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan perhatian, pembelian, atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen, sistem pelayanan yang diberikan dan desain produk yang menarik juga memberikan nilai lebih pada konsumen untuk membeli atau mengonsumsi suatu produk.

2. Price (harga)

Price adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Atau sebagai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang dibutuhkan. Harga suatu produk atau jasa ditentukan pula dari besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba atau keuntungan yang diharapkan. Penentuan harga produk dari suatu perusahaan merupakan masalah yang cukup penting, karena dapat mempengaruhi hidup matinya serta laba dari perusahaan. Harga dapat bersifat fleksibel, maupun stabil dalam beberapa waktu dengan harga tertentu dan bisa tiba-tiba meningkat atau turun tajam disesuaikan dengan kondisi permintaan pasar. Jadi setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang paling tepat, dalam arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

3. Place (tempat)

Place merupakan kegiatan bisnis untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah terjangkau oleh konsumen, dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Tempat atau lokasi yang strategis merupakan salah satu keuntungan bagi perusahaan. Variabel tempat juga meliputi saluran distribusi untuk menjangkau konsumen yang tersebar luas. Sehingga ada beberapa perusahaan yang membuka kantor cabang di daerah – daerah untuk memudahkan konsumen memperoleh barang yang diinginkannya.

4. Promotion (promosi)

Promotion adalah kegiatan memperkenalkan suatu produk atau jasa pada pasar sasaran, untuk membangun persepsi pelanggan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Kegiatan promosi yang biasa digunakan antara lain advertising, public relation, sales promotion, personal selling, serta direct marketing.

5. Process (proses)

Process adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Proses pelayanan yang cepat, mudah dan

ramah akan memberikan nilai lebih kepada konsumen terhadap suatu produk. Mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Proses berhubungan dengan kegiatan menggerakkan aktivitas perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga semua aktivitas kerja merupakan proses yang berisi tentang metode atau prosedur, jadwal, aktivitas dan rutinitas.

6. People (orang)

People adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Orang sangat berperan dalam perusahaan jasa karena terlibat langsung dalam menyampaikan produk ke pelanggan. Bagaimanapun kemajuan teknologi, fungsi orang sebagai bagian dari pelayanan tidak dapat digantikan. Apabila karyawan mempunyai kemampuan pengetahuan, attitude seperti penampilan karyawan, ekspresi wajah, suara dalam bicara, body language dan motivasi karyawan dalam menyampaikan pesan dan jasa yang ditawarkan, maka konsumen akan merasa puas dan loyal.

7. *Physical evidence* (Buktifisik)

Physical evidence adalah perangkat – perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung penampilan suatu produk, sehingga memperlihatkan secara langsung kualitas produk serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Bukti fisik suatu perusahaan sangat mempengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Pelayanan yang baik dari penyedia jasa (*people*) akan membentuk suatu *physical evidence* pada pelanggan, sehingga memungkinkan untuk peningkatan jumlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan yang sama.

BAURAN PROMOSI (PROMOTIONAL MIX)

Pengertian promosi

Promosi adalah aktivitas-aktivitas sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memberikan informasi, mengajak atau mengingatkan konsumen untuk membeli suatu produk (Kotler & Keller, 2008). Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. (Tjiptono, 2002:219).

Menurut Basu Swastha (2001: 253) promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menyebabkan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan Stanton (1989:412), "Promotion is an exercise in information persuasion and communication". Menurutnya promosi merupakan usaha dalam bidang informasi yang berusaha membujuk dan berkomunikasi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang mengajak atau mengingatkan pasar sasaran atau konsumen untuk membeli suatu produk.

Tujuan dan Fungsi Promosi

Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam promosi yaitu:

1. *Category Need*, Menumbuhkn persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan.
2. *Brand Awareness*, Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen.
3. *Brand Attitude*, Mendorong pemilihan terhadap suatu produk.
4. *Brand Purchase Intention*, Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk.
5. *Purchase facilitation*, Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain.
6. *Positioning*, menanamkan citra produk dan perusahaan.

Promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi suatu perusahaan/lembaga (Terence A. Shimp,2000:7) Kelima fungsi tersebut adalah :

1. Informing (Memberikan Informasi)

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa.

2. Persuading (Membujuk)

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan..

3. Reminding (Mengingat)

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan mengandung

atribut-atribut

yang

menguntungkan.

4. Adding Value (Menambah nilai)

Ada tiga cara mendasar perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing.

5. Assisting (Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan)

Promosi membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif.

2.3 Bauran Promosi

Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi. Kegiatan dalam bauran promosi tersebut adalah :

Periklanan (*Advertising*)

Periklanan merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi untuk mempengaruhi konsumen yang sering dilakukan perusahaan melalui komunikasi non individu dengan sejumlah biaya. Periklanan ini dapat dilakukan melalui surat kabar, radio, televisi, majalah, pos langsung, biro iklan ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis.

Penjualan pribadi (*Personal Selling*)

Penjualan pribadi adalah salah satu bentuk kegiatan promosi yang dilakukan antar individu yang sering bertemu muka ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang termasuk dalam penjualan pribadi adalah: door to door selling, mail order, telephone selling, dan direct selling.

Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi penjualan adalah salah satu bentuk kegiatan promosi untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihat dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Promosi penjualan menggunakan alat peraga seperti peragaan, pameran, demonstrasi, hadiah, contoh barang dan sebagainya.

Publisitas(*Publicity*)

Publisitas merupakan kegiatan promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar mereka menjadi tahu, dan menyenangi produk yang dipasarkannya. Informasi yang diberikan tidak dalam bentuk iklan tetapi berupa berita.

PEMBAHASAN

Kegiatan promosi sangat berkaitan dengan penyebaran informasi yang disampaikan kepada konsumen. UPBJJ-UT Pekanbaru menyampaikan informasi tersebut dengan berbagai strategi promosi yang sudah direncanakan. Strategi promosi yang dilakukan adalah periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan dan hubungan masyarakat dengan menggunakan media cetak, elektronik, korespondensi dan melakukan sosialisasi program baru, brosur, leaflet, radio, televisi, web UT, memasang spanduk ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Strategi promosi sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dalam hal ini jumlah mahasiswa. Selain itu kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen. Sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen, mengenai respon produk yang kita tawarkan.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan promosi yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen; mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk; mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen; mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran; mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen; mengetahui kondisi

persaingan pasar dan cara mengatasinya; menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi.

Dengan persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan jasa, UPBJJ-UT Pekanbaru perlu memperhatikan strategi promosi yang efektif dalam memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk/jasa yang dapat bermanfaat dan memuaskan kebutuhan konsumen/mahasiswa.

Pelayanan yang diberikan oleh UPBJJ-UT Pekanbaru akan berdampak terhadap kepuasan yang diperoleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut juga akan menyampaikan pada masyarakat atau calon mahasiswa yang lain agar dapat bergabung dengan UT dan diharapkan jumlah mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan adanya kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh UPBJJ-UT Pekanbaru, sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah mahasiswa, seperti dapat kita lihat pada tabel di atas. Saat ini peningkatan jumlah mahasiswa difokuskan pada program non pendas, karena program pendas sudah mulai mengalami penurunan dalam jumlah mahasiswa. Ada beberapa program studi di UT yang menjadi tren bagi mahasiswa seperti Fisip dan Ekonomi. Terlihat dalam tabel jumlah mahasiswanya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah mahasiswa ini tidak terlepas dari usaha yang dilakukan UPBJJ-UT Pekanbaru melalui kegiatan promosi yang sudah dijalankan. Dengan mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah, dengan merekrut karyawan yang belum menempuh pendidikan untuk program S1. Seperti kita ketahui bahwa UT memberikan kemudahan bagi pegawai yang sedang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka dapat kuliah sambil bekerja. Sebagian besar dari pegawai atau karyawan mengambil program studi Fisip dan manajemen. Walaupun demikian program pendas (PGSD dan PAUD) tetap menjadi penyumbang terbesar dalam jumlah mahasiswa sampai saat ini.

Salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh UPBJJ-UT Pekanbaru untuk dapat meningkatkan jumlah mahasiswa adalah dengan melakukan sosialisasi dan promosi (sosprom) ke beberapa sekolah menengah atas yang terdiri dari siswa kelas XII. Harapan UT, siswa-siswa ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan Universitas Terbuka menjadi salah satu pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikannya. UPBJJ-UT Pekanbaru juga dengan mengadakan kerjasama dan menciptakan hubungan yang baik antara instansi pemerintah, dinas pendidikan kabupaten / kota dan kecamatan melalui pengurus pokjar yang ada.

KESIMPULAN

Salah satu upaya yang dilakukan UPBJJ-UT Pekanbaru untuk meningkatkan jumlah mahasiswa adalah dengan melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan bauran promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan dan hubungan masyarakat. Selain itu dengan adanya kegiatan promosi yang dilakukan secara efektif sesuai dengan bauran promosi akan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Fekon.upb.ac.id/wp-content/uploads/2011/10/Penerapan-Teori-Marketing-7P-dalam-Usaha-Anda.pdf

<http://bisnisukm.com/pentingkah-strategi-promosi-sebuah-produk.html>

<http://jasamarketingproduk.blogspot.it/2014/03/pentingnya-promosi-dalam-pemasaran.html>

<http://munilogo.blogspot.it/2011/06/peran-strategi-promosi-dalam.html>

Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran* . Jilid 1 dan 2. Jakarta : Prenhallindo

Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta : Prenhallindo

Kotler, P., & Keller. (2008). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lupiyoadi , Rambat dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat

Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol.13 No. 1 April 2013, Strategi promosi sebagai dasar Peningkatan Respon Konsumen. Rusmini, Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Semarang

Swastha, Basu. 2001. *Azas-azas Marketing*. Yogyakarta : Liberty

Stanton, J. William. 1989. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid I dan II Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga

RPSEP-87

ANALISIS KESUKSESAN SISTEM *WEB-BASED LEARNING* (Studi Empiris Pada Karyawan Di Universitas X)

Mohamad Nasoha
nasoha@ut.ac.id

ABSTRAK

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa partisipasi pemakai, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kepuasan pemakai dan niat terus menggunakan berpengaruh kuat dan signifikan terhadap kesuksesan sistem informasi. Penelitian ini mengusulkan dan menguji enam komponen tersebut sebagai pengukur kesuksesan sistem *web-based learning*. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan prosedur pengambilan sampel secara *non-probability sampling* dan menggunakan teknik *purposive-judgement sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah 92 orang Karyawan yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem *web-based learning*. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan metode SEM dengan pendekatan metode alternatif PLS dengan bantuan *software* SmartPLS versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi (H1), kualitas sistem (H2) dan kualitas pelayanan (H3) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepuasan pemakai. Hal ini disebabkan Karyawan yang berpartisipasi rendah/kurang dalam mencari hal-hal baru, sehingga mereka tidak/kurang bisa memberikan masukan-masukan baik ide, saran maupun kritiknya. Selain itu juga, dimungkinkan sistemnya berkualitas tetapi sulit untuk digunakan, disebabkan penghubungnya (*interface*) yang tidak/kurang bersahabat. Sehingga menyebabkan mereka sulit berinteraksi dan pada akhirnya mereka akan menolak sistem.

Kata Kunci: Partisipasi pengembangan sistem, kesuksesan sistem *web-based learning*, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kepuasan pemakai, niat terus menggunakan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang pendidikan telah menciptakan berbagai macam bentuk sistem pembelajaran baik menggunakan media cetak maupun media elektronik dalam rangka mewujudkan suatu proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien. Salah satu sistem yang banyak digunakan oleh dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi adalah sistem *e-learning*, yang mana sistem ini merupakan sistem pembelajaran yang banyak dimanfaatkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, video, *video conferencing*, *video streaming*, internet dan sebagainya.

Sedangkan definisi *e-learning* atau *electronic learning* sendiri menurut Darmayanti *et al.* (2007) adalah sebuah konsep dalam proses pembelajaran dengan menggunakan ICT, khususnya menggunakan media yang berbasis internet. Istilah *e-learning* sendiri memiliki kesamaan makna dengan beberapa istilah lain seperti *online learning*, *virtual classroom* dan *virtual learning*. Namun dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada salah satu bagian saja dari sistem *e-learning* yaitu sistem *web-based learning*.

Yang mana sistem *web-based learning* sering disebut *online learning* dan merupakan sub-komponen penting dari bidang *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) (Chiu *et al.*, 2007). Penelitian ini dilakukan pada Karyawan di Universitas X , Banten. Penelitian ini mengusulkan untuk menguji pengaruh komponen-komponen kesuksesan sistem *web-based learning* yaitu partisipasi pemakai, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kepuasan pemakai dan niat terus menggunakan.

Penulis menggunakan model penelitian Medina dan Chaparro (2007) tentang pengaruh partisipasi pemakai sebagai salah satu *human element* pada kesuksesan sistem informasi (*web-based learning*). Model yang diperkenalkan oleh Medina dan Chaparro (2007) merupakan pengembangan model kesuksesan sistem informasi dari penelitiannya DeLone dan McLean (2003) dan penulis juga memasukkan satu komponen penting pada kesuksesan sistem informasi (*web-based learning*) yaitu niat terus menggunakan ke dalam model Medina dan Chaparro (2007).

Kemudian, penulis memasukkan satu komponen yaitu niat terus menggunakan (*continuance intention*) sistem *web-based learning* dari penelitiannya Chiu *et al.* (2007), karena menurut mereka kesuksesan suatu sistem *web-based learning* sangat berhubungan dengan komponen tersebut dan kepuasan (*satisfaction*) berhubungan positif dengan niat terus

menggunakan (*continuance intention*). Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini disebabkan kesuksesan sistem *web-based learning* dengan studi empiris pada Karyawan belum dikembangkan secara komprehensif oleh perguruan tinggi dan masih sedikitnya literatur yang membahas tentang analisis kesuksesan sistem *web-based learning* ini sehingga menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Model Kesuksesan Sistem Informasi

Penelitian ini merupakan pengembangan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (1992) atau lebih dikenal sebagai model kesuksesan sistem informasi D&M. Model tersebut dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992) untuk mempermudah di dalam melakukan pengukuran kesuksesan sistem informasi. Mereka membuat suatu model kesuksesan sistem informasi yang lengkap tapi sederhana (*parsimony*). Mereka mengusulkan model dengan mengukur enam komponen kesuksesan yaitu: kualitas informasi, kualitas sistem, penggunaan, kepuasan pemakai, dampak individual dan dampak organisasional.

Dalam perkembangannya ada beberapa peneliti yang mengkritik model D&M (1992) tersebut salah satunya adalah Seddon (1997) dalam Hartono (2007a), yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan di model D&M (1992) dan kemudian ia menspesifikasi ulang model D&M (1992) dengan mengusulkan dua model yaitu model kesuksesan sistem informasi dan model keperilakuan parsial dari penggunaan sistem informasi.

Berdasarkan kritikan tersebut, kemudian DeLone dan McLean (2003) memperbaiki modelnya dengan menambahkan komponen kualitas pelayanan dan mengganti dampak individual dan dampak organisasional menjadi manfaat-manfaat bersih (gabungan antara dampak individual dan dampak organisasional).

E-Learning

Menurut Tsai dan Machado (2001) pada dasarnya sistem *e-learning* banyak terkait dengan kegiatan yang melibatkan jaringan komputer dan interaktif secara bersamaan. Komputer dan jaringan harus terus tersedia dan terlibat di dalam aktivitas belajar atau menyediakan isi/konten pembelajaran. Pengertian *e-learning* yang sederhana namun mengena dikatakan oleh Maryati (2007) dalam Nugraha (2009), *e-learning* terdiri dari dua bagian yaitu *e-* yang merupakan singkatan dari elektronika dan *learning* yang berarti pembelajaran.

Jadi *e-learning* berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat komputer. Terdapat kata “khususnya komputer” pada akhir kalimat yang memberi pengertian bahwa komputer termasuk alat elektronik disamping alat pembelajaran elektronik yang lain. Istilah *e-learning* sendiri sebenarnya muncul karena adanya istilah *e-mail* (Tsai & Machado, 2001; Nugraha, 2009).

Di pihak lain, Wahono (2005) mengatakan *e-learning* sebagai sistem pembelajaran yang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan jaman dengan dukungan teknologi informasi dimana semua menuju ke era digital, baik mekanisme maupun konten. Sehingga dalam pengembangan sistem *e-learning*, sistem harus diutamakan terlebih dahulu yaitu dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan-kebutuhan dari pemakai (*user needs*).

Sehingga pembelajaran dengan bentuk *e-learning* diharapkan dapat menembus batas ruang dan waktu. Pendapat lain dikemukakan oleh Rosenberg (2001) dalam Suyanto (2005) yang menekankan bahwa *e-learning* merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemakai sistemnya. Namun, menurut Basori (2008) belum adanya standar baku dalam pendefinisian dan pengimplementasian *e-learning*, sehingga menjadikan banyak orang mempunyai konsep yang bermacam-macam (Basori, 2008).

Web-Based Learning

Sistem *web-based learning (tutorial online)* di UT sudah dilakukan sejak tahun 1999, bermaksud untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat (Meilani, 2006). Sedangkan definisi *web-based learning* sendiri masih belum jelas karena adanya kesamaan makna dengan definisi *e-learning* dan *online learning*. Menurut Tsai dan Machado, 2001; Gunawan, 2001; masih terjadinya ambiguitas/kerancuan di antara ketiga istilah tersebut.

Penelitian lain telah dilakukan oleh McKimm *et al.* (2003) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis *web* menawarkan peluang yang besar dalam belajar dan mengakses ke sejumlah besar pengetahuan dan informasi. kemudian mereka juga mendefinisikan bahwa *web-based learning* seringkali disebut *online learning*, yang mana di dalamnya terdapat serangkaian konten materi-materi pembelajaran *online* yang bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi, *e-mail*, *video conferencing* dan *video streaming*, yang kesemuanya itu bisa dilakukan di dalam *web*.

Partisipasi Sukarela

Bhattacharjee (2001) mengatakan bahwa seseorang akan berpartisipasi dalam menggunakan sistem informasi (*web-based learning*) jika sistem bisa memberikan kepuasan, kegunaan persepsian dan pengalaman-pengalaman begitupun sebaliknya. Ia berpendapat hal tersebut bisa terjadi karena adanya partisipasi penggunaan sistem informasi yang bersifat sukarela (*voluntary*).

Pendapat di atas didukung oleh Hartwick dan Barki (1994); Chiu *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem (*web-based learning*) yang bersifat sukarela sangat menentukan kesuksesan suatu sistem informasi karena dalam penggunaannya tidak ada paksaan atau tidak diwajibkan. Sehingga dengan penggunaan sistem secara sukarela akan dapat diketahui tingkat variasi penggunaannya yang pada akhirnya dapat menentukan kesuksesan sistem *web-based learning* melalui kepuasan pemakai. Selain itu juga, penggunaan sistem *web-based learning* yang bersifat sukarela bisa menggambarkan apa yang diinginkan oleh individu-individu pemakai sistem (*web-based learning*).

Kualitas Informasi

Chae *et al.* (2001) mengembangkan model kausal dari kualitas informasi pada layanan *mobile internet*, yang studi penelitiannya dilakukan dengan *large-scale survey*. Mereka mengusulkan di model mereka dalam menjelaskan derajat pengaruh kualitas informasi pada kepuasan pemakai yang pada akhirnya pemakai sistem akan loyal. Mereka menemukan bahwa kualitas informasi di dalam layanan *mobile internet* berpengaruh signifikan pada kepuasan pemakai yaitu pada koneksi dan kualitas interaksi yang pengaruhnya lebih substansial dibandingkan isi (*content*) dan kualitas kontekstual (*contextual quality*).

Lebih lanjut, Lin (2007) melakukan penelitian dengan mengukur kesuksesan sistem-sistem *online learning* yang hasilnya menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas informasi dengan kepuasan pemakai dan niat berperilaku untuk menggunakan sistem-sistem *online learning*. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Ada 4 studi yang menguji hubungan antara kualitas informasi dan dampak individu yang hasilnya menemukan adanya hubungan yang signifikan (DeLone & McLean, 2003).

Kualitas informasi telah diukur pada keakuratan, ketepatan waktu, kelengkapan, relevansi dan ketetapan sedangkan dampak individualnya telah diukur pada kinerja

pengambilan keputusan, keefektivan dan kualitas pekerjaan (DeLone & McLean, 2003). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Medina dan Chaparro (2007) yang menemukan kualitas informasi berpengaruh positif pada kepuasan pemakai. Oleh karena itu dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut.

H1: Kualitas informasi berpengaruh positif pada kepuasan pemakai *web-based learning*

Kualitas Sistem

Kualitas sistem di dalam penelitian sebelumnya telah diwakili oleh kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan sistem *web-based learning* persepsian untuk memudahkan penggunaan yang dimungkinkan akan memberikan sikap positif (Rai *et al.*, 2002; Davis, 1989; dalam Chiu *et al.*, 2007).

Ada 5 studi yang menguji hubungan langsung antara kualitas sistem dan dampak individu yang hasilnya menemukan bahwa hubungannya secara statistik signifikan. Kualitas sistem telah diukur pada kemudahan penggunaan, kemampuan, keandalan, fleksibel, kualitas data, portabilitas, terintegrasi dan kepentingan sedangkan dampak individu telah diukur sebagai kualitas lingkungan kerja dan kinerja pekerjaan (DeLone & McLean, 2003). Kemudian DeLone dan McLean (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pemakai.

Penelitian-penelitian dalam kesuksesan sistem informasi sebelumnya telah menemukan bahwa kualitas sistem secara positif mempengaruhi kepuasan pemakai. Lin (2007) menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh secara signifikan pada kepuasan pemakai dan niat berperilaku untuk menggunakan sistem-sistem *online learning*. Medina dan Chaparro (2007) menguji pengaruh kualitas sistem pada kepuasan pemakai sistem pengendalian sekolah, mereka menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif pada kepuasan pemakai. Sehingga penulis menyusun hipotesis sebagai berikut.

H2: Kualitas sistem berpengaruh positif pada kepuasan pemakai *web-based learning*

Kualitas Pelayanan

Kettinger dan Lee (1995) menyatakan bahwa kualitas pelayanan sistem informasi difokuskan pada pemakai yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pada pertengahan tahun 1980-an organisasi-organisasi

sistem informasi berperan ganda yaitu sebagai penyedia informasi (*information provider*) yang menghasilkan produk informasi dan sebagai penyedia layanan/jasa (*service provider*) yang membantu pengembang-pengembang pemakai akhir (*end user developers*) sistem informasi (DeLone & McLean, 2003).

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah SERVQUAL, yang membantu peneliti untuk mengukur kualitas pelayanan di dalam sistem informasi. DeLone dan McLean (2003) juga mengatakan beberapa peneliti telah menambahkan kualitas pelayanan di model kesuksesan sistem informasi dan menguji 22 item instrumen pengukuran SERVQUAL dari bidang pemasaran dan kualitas pelayanan menjadi variabel penting di dalam model kesuksesan.

Kemudian, Lin (2007) telah melakukan penelitian yang menemukan bahwa kualitas pelayanan (misal: alat-alat peraga, ketersediaan bantuan, respon dari sistem *online learning*) berpengaruh positif pada kepuasan pemakai dan niat berperilaku. Chiu *et al.* (2007) juga menemukan hubungan yang positif tapi tidak signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pemakai sistem *web-based learning*. Medina dan Chaparro (2007) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepuasan pemakai sistem pengendalian sekolah. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepuasan pemakai *web-based learning*

Kepuasan Pemakai

Kepuasan pemakai seringkali dihubungkan dengan kinerja individu pemakai sistem informasi yaitu baik pada penggunaannya maupun dampak yang diperoleh oleh individu tersebut. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sanders dan Courtney (1985), mereka menghubungkan kepuasan pemakai dengan dampak individual dan kedua komponen tersebut merupakan prediktor penting pada kesuksesan sistem informasi (*web-based learning*). Di sisi lain, DeLone dan McLean (2003) dalam penelitiannya tentang *e-commerce*, menyatakan bahwa kepuasan pemakai penting untuk diukur di dalam sistem *e-commerce* dan sebaiknya memasukkan pengalaman pelanggan/pemakai untuk mendapatkan kembali informasi melalui pembelian, pembayaran, penerimaan dan pelayanan.

Lebih lanjut, Hartono (2007a) menyatakan bahwa kepuasan pemakai adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem teknologi informasi. Kepuasan pemakai

merupakan hal yang penting di dalam mencapai suatu tujuan sistem teknologi informasi, kualitas pekerjaan dan dalam menggunakan sistem tersebut (Gatian, 1994, dalam Medina dan Chaparro, 2007).

Sementara, Hamilton dan Chervany (1981) menemukan bahwa kepuasan pemakai merupakan salah satu alat pengukur yang baik dan penting, sehingga tepat dalam mengukur kesuksesan sistem informasi. Oliver (1980) menguji hubungan antara harapan, diskonfirmasi dan kepuasan yang akan menentukan sikap dan niat pemakai serta hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepuasan pemakai berpengaruh positif terhadap niat menggunakan di masa yang akan datang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaruhnya pada sikap.

Kemudian, Swan dan Trawick (1981) melakukan penelitian tentang diskonfirmasi harapan, mereka menemukan bahwa konsumen akan menggunakan produk apabila mereka mendapatkan kepuasan atau sesuai dengan harapan-harapan mereka. Tentu saja kepuasan ini juga karena dilatar-belakangi oleh pengalaman-pengalaman mereka mengenai produk tersebut. Sedangkan konsumen akan berniat membeli produk apabila mereka puas dengan produk dan layanan (*service*) yang diberikan, sehingga kepuasan merupakan mediator dari niat-niat konsumen dalam membeli suatu produk. Dengan kata lain bahwa kepuasan pemakai merupakan suatu bentuk respon yang ditunjukkan oleh pemakai-pemakai sistem yang disebabkan produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan harapan-harapan pemakai. Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan Lin (2007); Chiu *et al.* (2007) menunjukkan hasil yang sama bahwa kepuasan pemakai sistem-sistem *online learning* secara signifikan berpengaruh pada niat berperilaku untuk menggunakan sistem-sistem *online learning*. maka penulis mengusulkan hipotesis:

H4: Kepuasan pemakai berpengaruh positif pada niat terus menggunakan sistem *web-based learning*

Niat Terus Menggunakan

Hartwick dan Barki (1994), DeLone dan McLean (2003) menyatakan bahwa niat menggunakan merupakan pengukuran alternatif yang bermanfaat di beberapa konteks dan mereka juga mengatakan bahwa niat menggunakan merupakan suatu sikap, sedangkan

penggunaan merupakan perilaku. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Bhattacharjee (2001) yang mengatakan pemakai-pemakai berniat terus menggunakan sistem *online banking* ditentukan oleh tingkat kepuasan dan kegunaan persepsian.

Sedangkan Implikasi bagi manajerial, Bhattacharjee (2001); Chiu *et al.* (2007); DeLone dan McLean (2003) mengatakan apabila pemakai-pemakai tidak puas dengan sistem yang ada maka mereka tidak akan berniat untuk meneruskan penggunaan sistem karena penggunaan sistem tersebut lebih bersifat sukarela (*voluntary*).

Partisipasi pemakai

Dalam pengembangan sistem *web-based learning*, keterlibatan partisipasi pemakai (Karyawan) sangat penting baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pengimplementasiannya. Partisipasi pemakai (Karyawan) di sini adalah perilaku-perilaku, pernyataan-pernyataan dan aktivitas-aktivitas pemakai atau perwakilannya yang ditunjukkan selama proses pengembangan sistem informasi (*web-based learning*) (Barki & Hartwick, 1994). Pendapat tersebut dipertegas lagi dengan Lubis (2005) yang mengatakan bahwa partisipasi pemakai dapat berupa keterlibatan Karyawan secara langsung dalam tahap perancangan, pembuatan dan pemrograman TI (*web-based learning*). Keterlibatan atau partisipasi pemakai dalam pengembangan sebuah sistem sangat menentukan kualitas sistem tersebut.

Lebih lanjut, Standish Group (1995); McKeen *et al.* (1994); menyatakan bahwa partisipasi pemakai (*user participation*) merupakan aspek penting di dalam perencanaan pengembangan sistem sehingga dapat memberikan kesuksesan sistem informasi (*web-based learning*). Sementara, Guimaraes *et al.* (2003) menyatakan bahwa kesuksesan suatu sistem informasi (*web-based learning*) akan tercapai apabila mengacu pada tiga syarat variabel yaitu kualitas sistem, kegunaan sistem dan kepuasan pemakai. Pendapat ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam pengembangan sistem informasi (*web-based learning*) terkait dengan pemakai ditentukan oleh sampai sejauh mana partisipasi yang ada dapat menyebabkan kepuasan pemakai (Adi, 2006).

Ives dan Olson (1984); Barki dan Hartwick (1994); Suryaningrum (2003); menemukan hubungan yang positif antara partisipasi pemakai dan kesuksesan sistem informasi (*web-based learning*). Medina dan Chaparro (2007); Franz dan Robey (1986) dan Standish group (1995) yang menemukan adanya pengaruh yang positif antara partisipasi

pemakai dengan kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

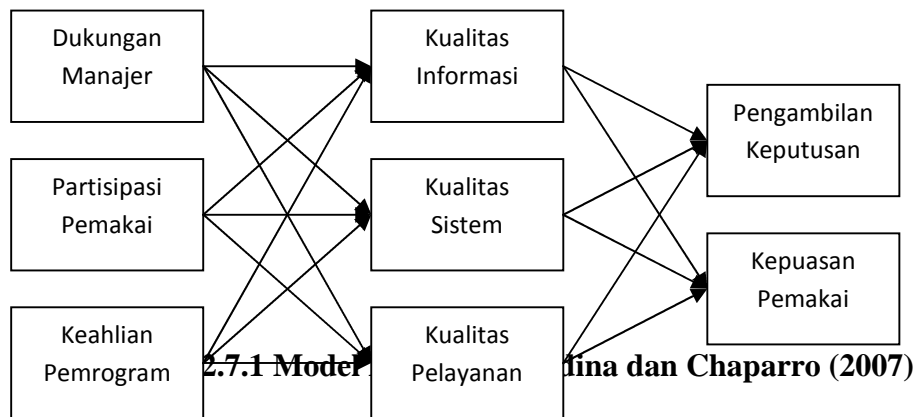
H5: Partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas informasi

H6: Partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas sistem

H7: Partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas pelayanan

Model Penelitian

Berdasarkan penelitian Medina dan Chaparro (2007) hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor manusia (*human element*) secara signifikan berhubungan dengan kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan. Mereka juga mengatakan bahwa kepuasan pemakai menunjukkan lebih penting dibandingkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dimensi-dimensi kualitas (*quality dimensions*). Medina dan Chaparro (2007) mengajukan model sebagai berikut:

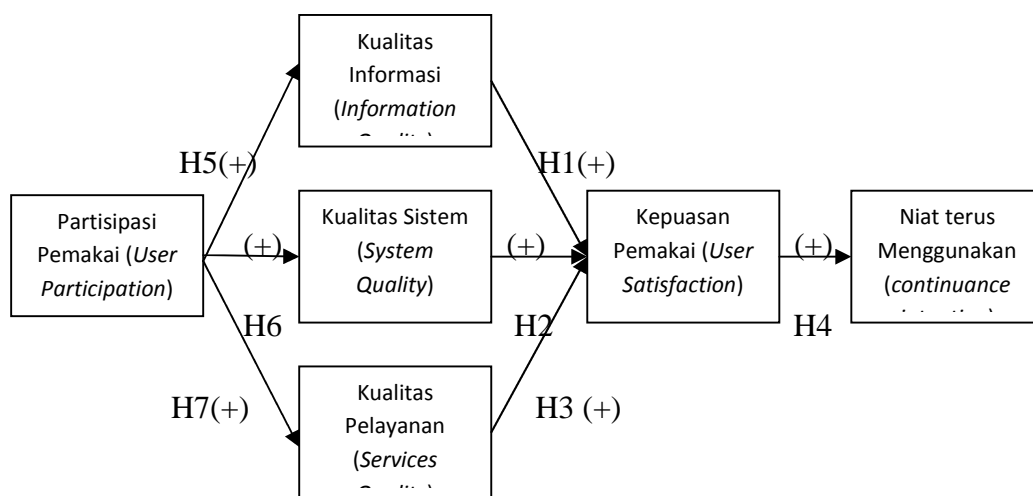


(Sumber: Medina and Chaparro, 2007)

Model yang dikembangkan oleh Medina dan Chaparro (2007) mempertimbangkan *human element* (dukungan manajer, partisipasi pemakai, keahlian pemrogram), karena *human element* dianggap penting karena bisa memberikan kesuksesan sistem informasi (*web-based*

learning) bagi organisasi. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan komponen partisipasi pemakai (Karyawan) dalam pengembangan sistem informasi (*web-based learning*) dan penulis tidak mengikut-sertakan tiga komponen lainnya yaitu komponen dukungan manajer, komponen keahlian pemrogram dan komponen pengambilan keputusan.

Hal tersebut dilakukan karena di model Medina dan Chaparro (2007) terjadi tumpang tindih di antara komponen dukungan manajer, komponen partisipasi pemakai dan komponen keahlian pemrogram. Kemudian, penulis memasukkan satu komponen yaitu niat terus menggunakan (*continuance intention*) dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chiu *et al.* (2007). Oleh sebab itu, penulis mengusulkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.7.2 Model Penelitian

(Sumber: Modifikasi dari model Medina & Chaparro, 2007 dan Chiu *et al.*, 2007)

ANALISIS DATA DAN BAHASAN

Deskripsi Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan survei pada Universitas X , Banten. Kemudian dari hasil survei tersebut ditemukan jumlah responden sebanyak 200 orang, kemudian penulis menyebarkan kuesioner ke 200 responden tersebut, dari seluruh

kuesioner yang disebar diperoleh kuesioner yang valid sebanyak 92 kuesioner, dan semua kuesioner telah memenuhi syarat penelitian dengan *respon rate* sebesar 46%.

Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para Karyawan yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem *web-based learning*. Dari \pm 500 Karyawan di Universitas X , Banten ditemukan sebanyak 330 Karyawan yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem *web-based learning*. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi jumlah responden (Karyawan) sebanyak 200 responden untuk dibagikan kuesioner. Hal ini dilakukan karena sebagian besar Karyawan tidak berada ditempat baik melanjutkan studi maupun aktivitas mengajar.

Tabel 4.2.1

Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	38	41,30%
Wanita	54	58,70%
Total	92	100%

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Tabel 4.2.2

Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	Jumlah	Prosentase
20-30	12	13,04%
31-40	29	31,52%
41-50	35	38,04%
>50	16	17,40%
Total	92	100%

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Tabel 4.2.3

Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Prosentase
0-10	38	41,30%
11-20	26	28,26%
21-30	28	30,44%
Total	92	100%

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Durasi Penyebaran Kuesioner

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, penulis telah melakukan studi pilot pada tanggal 10 Maret 2009. Kemudian penulis memperkirakan jumlah Karyawan yang akan dijadikan sebagai responden.

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hasil Uji Validitas Konvergen

Tabel 4.4.1.1

Validitas Konvergen

Indikator	AVE	Communality
Kualitas Informasi (KI)	0,607346	0,607346
Kualitas Pelayanan (KP)	0,618116	0,618116

Kepuasan Pemakai (KPI)	0,716984	0,716984
Kualitas Sistem (KS)	0,583224	0,583224
Niat Terus Menggunakan (NTM)	0,876223	0,876223
Partisipasi Pemakai (PP)	0,546605	0,546605

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Dari tabel 4.4.1.1 menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model dianalisis dengan menggunakan validitas konvergen masing-masing indikator baik nilai AVE maupun nilai *Communality*-nya. Hasil outputnya menunjukkan bahwa nilai faktor *loading* untuk semua konstruk dalam model semuanya berada di atas yang dipersyaratkan yaitu di atas 0,50. Sehingga berdasarkan nilai *loading* dari AVE dan *Communality*, penulis menyimpulkan bahwa validitas konvergen dapat diterima atau terpenuhi.

Hasil Uji Validitas Diskriminan

Untuk menilai validitas diskriminan, penulis menyajikan tabel 4.4.1.2. yang berisikan nilai-nilai *cross loading* dari beberapa konstruk yang diukur. Untuk mengetahui bahwa konstruk dianggap baik apabila validitas diskriminan suatu hubungan konstruk dengan indikator yang diukur lebih tinggi dibanding dengan hubungan antara konstruk dengan indikator yang tidak diukur. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel tentang nilai *cross loading* konstruk dan indikator yang diukur.

Tabel 4.4.1.2
Cross Loading

	KI	KP	KPI	KS	NTM	PP
KI						
KI1	0,662334	0,376542	0,313074	0,364498	- 0,022055	0,319612
KI2	0,715068	0,536084	0,319272	0,316753	0,015122	0,279489
KI3	0,891320	0,636399	0,492451	0,588853	0,201372	0,411002
KI4	0,849821	0,662027	0,337243	0,429318	0,154263	0,334277
KI5	0,755032	0,689927	0,304892	0,580171	0,085428	0,219572
KP						
KP1	0,609103	0,776714	0,474391	0,639368	0,127973	0,246561
KP2	0,699556	0,871009	0,443674	0,537627	0,183039	0,360280
KP3	0,597149	0,888567	0,433351	0,653408	0,142325	0,302057
KP4	0,547319	0,769784	0,432531	0,441666	0,138152	0,247462
KP5	0,409573	0,588660	0,199831	0,570723	0,149844	0,068386
KPI						
KPI1	0,167952	0,289242	0,796090	0,287982	0,462066	0,163156
KPI2	0,431615	0,493796	0,917947	0,398682	0,454552	0,300137

KPI3	0,510455	0,505487	0,821319	0,430739	0,418825	0,406229
KS						
KS1	0,422995	0,509418	0,293143	0,698028	- 0,053704	0,319609
KS2	0,372965	0,483924	0,113866	0,673046	0,002186	0,124783
KS3	0,536848	0,570794	0,478489	0,834731	0,123077	0,341735
KS4	0,481647	0,607376	0,423709	0,854415	0,073032	0,272914
KS5	0,375770	0,511897	0,189830	0,741005	0,093679	0,171189
NTM						
NTM1	0,148044	0,139534	0,468226	0,059234	0,902674	0,177808
NTM2	0,108443	0,217993	0,474923	0,094183	0,929228	0,206344
NTM3	0,095067	0,160988	0,516965	0,049712	0,974877	0,212805
PP						
PP1	0,328835	0,204156	0,456750	0,161513	0,400367	0,566575
PP2	0,262207	0,235082	0,240037	0,212505	0,108689	0,785973
PP3	0,323213	0,295372	0,156431	0,372361	0,024244	0,837289

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Dari tabel 4.4.1.2 dapat dilihat bahwa nilai *loading* indikator dan konstruk yang diukur hasilnya lebih tinggi dibanding nilai *loading* dari indikator dan konstruk yang tidak diukur. Sehingga bisa dikatakan bahwa indikator dan konstruk yang diukur memiliki hubungan yang

lebih tinggi dibanding dengan indikator dan konstruk yang tidak diukur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan nilai *loading* $\geq 0,50$, hal ini didasarkan oleh pendapat Hair *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa *Rule of thumb* untuk *loading* $\geq 0,50$ sudah memenuhi syarat jika signifikan secara praktikal. Berdasarkan tabel 4.4.1.2 maka penulis berkesimpulan bahwa validitas diskriminan dapat diterima atau terpenuhi.

Untuk mengetahui signifikansi setiap konstruk maka dapat melihat nilai *loading*, AVE dan *communality*. Dalam penelitian ini ada enam konstruk yang diukur yaitu: partisipasi pemakai (3 indikator), kualitas informasi (5 indikator), kualitas sistem (5 indikator), kualitas pelayanan (5 indikator), kepuasan pemakai (3 indikator) dan niat terus menggunakan (3 indikator). Untuk setiap indikatornya diukur dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5.

Tabel 4.4.1.3

Latent Variable Correlations

	KI	KP	KPI	KS	NTM	PP
KI	1,000000					
KP	0,740927	1,000000				
KPI	0,466003	0,526051	1,000000			
KS	0,589833	0,704083	0,450883	1,000000		
NTM	0,124250	0,184283	0,520518	0,071760	1,000000	
PP	0,412547	0,337630	0,360797	0,354839	0,212921	1,000000

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Tabel 4.4.1.3 di atas menunjukkan bahwa nilai masing-masing konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding korelasi antar konstruk yang satu dengan yang lainnya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan.

Hasil Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas suatu konstruk dapat diukur berdasarkan nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan nilai *composite reliability*, karena dengan *composite reliability* konsistensi internal suatu konstruk dapat diestimasi dengan lebih baik (Werts *et al.*, 1974 dalam Salisbury *et al.*, 2002) dan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas dari suatu konstruk (Chin & Gopal, 1995 dalam Salisbury *et al.*, 2002). Yang mana konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability*-nya di atas 0,70. Berikut ini penulis menyajikan tabel 4.4.2.1 tentang nilai *composite reliability* untuk masing-masing konstruk.

Tabel 4.4.2.1

Composite Reliability

Indikator	Composite Reliability
Kualitas Informasi (KI)	0,884295
Kualitas Pelayanan (KP)	0,888197
Kepuasan Pemakai (KPI)	0,883326
Kualitas Sistem (KS)	0,873958
Niat Terus Menggunakan	0,954987

(NTM)	
Partisipasi Pemakai (PP)	0,779032

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Dalam tabel 4.4.2.1 menunjukkan nilai-nilai *composite reliability*-nya masing-masing konstruk nilainya di atas 0,70. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa reliabilitas masing-masing konstruk layak atau terpenuhi. Kemudian penulis juga menyajikan tabel 4.4.2.2 tentang nilai korelasi variabel laten.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau Inner Model, dievaluasi dengan menggunakan *R-Square* untuk konstruk dependen, sedangkan untuk variabel independen dinilai berdasarkan nilai koefisien *path*-nya (β). Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansinya dapat dinilai berdasarkan nilai *t-value* setiap *path*-nya. Penggunaan nilai *R-Square* untuk menguji seberapa besar tingkat signifikansi pengaruh konstruk independen terhadap konstruk dependen. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.

R-Square

Berikut ini penulis menyajikan tabel 4.5.1 tentang nilai-nilai *R-Square* masing-masing konstruk.

Tabel 4.5.1.1

R-Square

Konstruk	R-Square
Kualitas Informasi (KI)	0,170195

Kualitas Pelayanan (KP)	0,113994
Kualitas Sistem (KS)	0,125911
Kepuasan Pemakai (KPI)	0,299249
Niat Terus Menggunakan (NTM)	0,270939
Partisipasi Pemakai (PP)	

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Tabel 4.5.1.1 memberikan informasi bahwa nilai *R-Square* konstruk kualitas informasi (KI) sebesar 0,170195 yang artinya pembentukan konstruk kualitas informasi (KI) dipengaruhi oleh konstruk partisipasi pemakai (PP) sebesar 17 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Nilai *R-Square* untuk kualitas pelayanan (KP) sebesar 0,113994 artinya pembentukan konstruk kualitas pelayanan (KP) dipengaruhi oleh konstruk partisipasi pemakai (PP) sebesar 11 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Kemudian untuk nilai *R-Square* kualitas sistem sebesar 0,125911 artinya pembentukan konstruk kualitas sistem dipengaruhi oleh konstruk partisipasi pemakai (PP) sebesar 13 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Lebih lanjut, untuk konstruk kepuasan pemakai (KPI) sebesar 0,299249 artinya pembentukan konstruk kepuasan pemakai (KPI) dipengaruhi oleh konstruk kualitas informasi (KI), konstruk kualitas sistem (KS) dan konstruk kualitas pelayanan (KP) sebesar 30 persen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini, sedangkan untuk nilai *R-Square* niat terus menggunakan sebesar 0,270939 artinya konstruk niat terus menggunakan dipengaruhi oleh konstruk kepuasan pemakai (KPI) sebesar 27 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Nilai Path Coefficients

Tabel 4.5.2.1

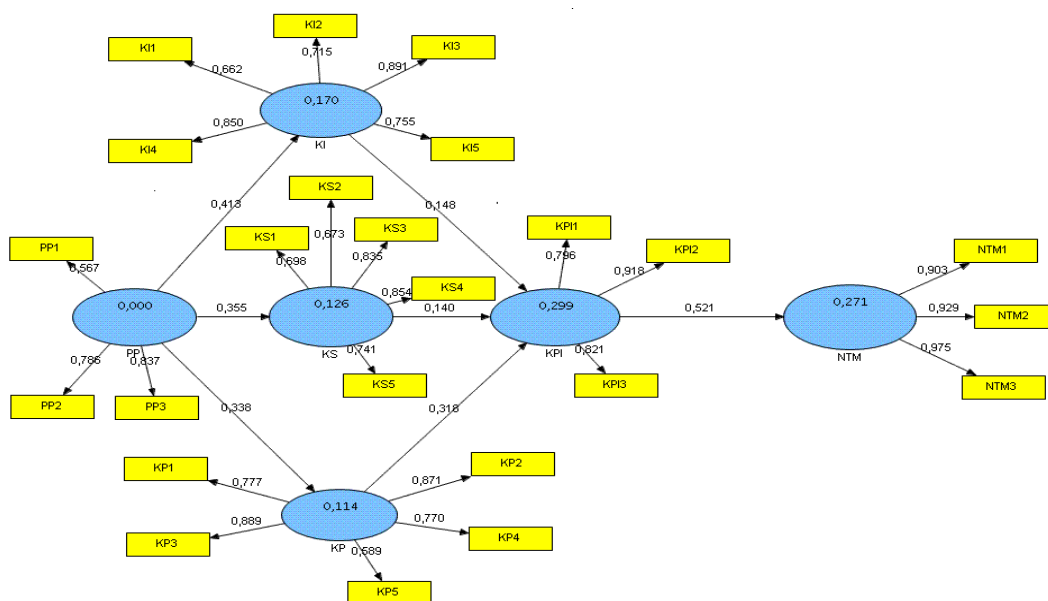
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KI -> KPI	0,150653	0,148547	0,162045	0,162045	0,929699
KP -> KPI	0,316319	0,315707	0,178292	0,178292	1,774157
KS -> KPI	0,134713	0,152843	0,155740	0,155740	0,864990
KPI -> NTM	0,520543	0,515195	0,102683	0,102683	5,069439
PP -> KI	0,339525	0,341754	0,084887	0,084887	3,999711
PP -> KP	0,304739	0,301939	0,094778	0,094778	3,215302
PP -> KS	0,352638	0,353814	0,095535	0,095535	3,691207

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Dari tabel 4.5.2.1 diketahui hasil output *t-value* untuk masing-masing konstruk adalah memiliki nilai signifikansi pada 0,05 yaitu nilai *t-value* di atas 1,96. Namun untuk konstruk kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas sistem nilainya kurang dari 1,96. Sehingga pengaruh ketiga konstruk tersebut sangat rendah atau kurang berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Hal ini terjadi karena pemakai sistem *web-based learning* kurang memperhatikan dan memahami karakteristik sistem bahwa sistem tersebut ramah pengguna, cepat, dan tepat serta masih sedikitnya pimpinan institusi mengimplementasikan strategi-strategi untuk menjamin bahwa kualitas informasi juga penting untuk dipertimbangkan (Medina & Chaparro, 2007). Sehingga pemakai sistem (Karyawan) belum merasa puas dengan kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan masih rendah atau belum sesuai dengan apa yang pemakai persepsikan dan harapkan.

Hal di atas terjadi dimungkinkan pemakai sistem (Karyawan) sendiri pada saat berpartisipasi dalam pengembangan sistem *web-based learning* masih kurang/rendah dalam memberikan masukan-masukan baik ide, saran maupun kritiknya terhadap sistem tersebut. Sehingga mengakibatkan pengaruh ketiga konstruk tersebut tidak signifikan pada kepuasan pemakai dan dimungkinkan sistemnya berkualitas tetapi sulit untuk digunakan, disebabkan penghubungnya (*interface*) yang tidak bersahabat, sehingga mereka sulit berinteraksi dan pada akhirnya mereka akan menolak sistem. Dibawah ini penulis menyajikan gambar model struktural penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 4.5.2.1 Signifikansi Path

Sumber: Data mentah diolah, 2009

Keterangan:

PP = Partisipasi Pemakai

KI = Kualitas Informasi

KS = Kualitas Sistem

KP = Kualitas Pelayanan

KPI = Kepuasan Pemakai

NTM = Niat Terus Menggunakan

Bahasan

Dari hasil uji statistik dapat diketahui bahwa ada tiga hipotesis yang hasilnya tidak signifikan (tidak terdukung) yaitu pengaruh kualitas informasi pada kepuasan pemakai (H1), dapat diketahui dari hasil uji statistik bahwa nilai *t-value* sebesar 0,929699 dengan tingkat signifikansi 0,05 yang artinya nilai untuk *t-value* H1 < 1,96 (tidak terdukung). Hasil pengujian dengan menggunakan metode alternatif PLS software SmartPLS versi 2.0 untuk nilai *t-value* kualitas informasi (H1) sebesar 0,929699 yang artinya lebih tinggi dibanding nilai kualitas sistem (H2) pada kepuasan pemakai yaitu sebesar 0,864990.

Sedangkan untuk nilai *t-value* kualitas pelayanan (H3) pada kepuasan pemakai sebesar 1,774157. Untuk nilai *t-value* kualitas pelayanan (H3) lebih tinggi dibanding nilai *t-value* kualitas informasi (H1) dan kualitas sistem (H2). Namun berdasarkan hasil uji-t untuk ketiga hipotesis ini berindikasi tidak terdukung karena nilai *t-value*-nya < 1,96 (tingkat signifikansi 0,05). Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitiannya Medina dan Chaparro (2007); Chiu *et al.* (2007); Lin (2007); yang menemukan bahwa kualitas informasi (H1), kualitas sistem (H2) dan kualitas pelayanan (H3) berpengaruh signifikan pada kepuasan pemakai.

Hasil temuan di atas dimungkinkan terjadi karena dalam penelitian ini sebagian besar pemakai sistem (Karyawan) yang berusia di atas 40 tahun, sehingga mereka sulit dalam mengukur suatu sistem informasi (*web-based learning*) bahwa kualitas informasi akurat, relevan, sesuai kebutuhan, *up-to-date* dan lengkap. Di sisi lain, mereka dimungkinkan juga karena mereka disibukkan dengan tugas-tugas/pekerjaan yang begitu kompleks menyangkut teori-teori pembelajaran dan kegiatan-kegiatan administratif sehingga pada saat mereka dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi (*web-based learning*), mereka sulit dalam memberikan masukan-masukan baik berupa saran maupun kritik, hal ini dikarenakan juga rendahnya mereka dalam mencari dan menemukan ide-ide, metode-metode atau ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis sistem *web-based learning* ini.

Hal tersebut di atas tentu saja bisa terjadi karena Karyawan di UT selain melakukan aktivitas belajar-mengajar juga melakukan aktivitas-aktivitas administrasi, sehingga dengan adanya aktivitas ganda (kompleksitas tugas) dan terbiasa dengan teori-teori pembelajaran yang bersifat manual sehingga ketika mereka diminta untuk mengaplikasikannya ke dalam sistem informasi (*web-based learning*) mereka menghadapi kesulitan dalam memahami sistem, selain itu dimungkinkan adanya interaksi yang sulit antara pemakai sistem (Karyawan) dengan sistem dan akhirnya mereka menolak untuk menggunakan sistem.

Sedangkan untuk nilai *t-value* kepuasan pemakai pada niat terus menggunakan sistem *web-based learning* (H4) ditemukan signifikan dengan nilai *t-value* sebesar 5,069439 yang artinya lebih besar dari 1,96 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berindikasi bahwa H4 terdukung dan untuk nilai *t-value* H4 paling tinggi dibanding nilai *t-value* hipotesis lainnya. Hal ini terjadi karena kepuasan pemakai sistem akan berdampak pada niat mereka untuk terus menggunakan sistem (*web-based learning*) tersebut. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitiannya Chiu *et al.* (2007) bahwa kepuasan pemakai berpengaruh positif pada niat terus menggunakan sistem *web-based learning*.

Kepuasan pemakai sebagai salah satu prediktor penting bagi niat pemakai untuk terus menggunakan sistem. Sehingga kepuasan pemakai sebagai komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem *web-based learning*. Begitupun untuk H5 yaitu partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas informasi dengan nilai *t-value* sebesar 3,999711 yang artinya nilai tersebut > 1,96 dan berindikasi bahwa H5 terdukung. Hasil ini

konsisten dengan hasil penelitiannya Medina dan Chaparro (2007) bahwa partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas informasi.

Sedangkan untuk H6 yaitu partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas sistem ditemukan nilai *t-value* sebesar 3,691207 dengan tingkat signifikansi 0,05 yang artinya bahwa H6 terdukung dengan nilai *t-value* H6 lebih besar dari 1,96. Hasil temuan ini juga mendukung hasil penelitiannya Medina dan Chaparro (2007). Lebih lanjut, untuk H7 yaitu partisipasi pemakai berpengaruh positif pada kualitas pelayanan, ditemukan nilai *t-value* sebesar 3,215302 dengan tingkat signifikansi 0,05, ini berarti nilai *t-value* H7 > 1,96 dan berdasarkan hasil tersebut maka H7 terdukung yang berarti konsisten dengan hasil penelitiannya Medina dan Chaparro (2007).

Dengan kata lain bahwa dengan partisipasi pemakai maka pemakai sistem dapat lebih mengerti dan memahami proses pengembangan sistem informasi (*web-based learning*) yang diharapkan dapat memberikan kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan yang baik melalui pelatihan-pelatihan, sehingga nantinya bisa memberikan kepuasan dan niat untuk terus menggunakan sistem *web-based learning*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem *web-based learning* akan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penulis dalam penelitian ini mengajukan tujuh hipotesis, namun dari ketujuh hipotesis tersebut tiga di antaranya tidak terdukung yaitu hipotesis 1, 2 dan 3. Sementara empat hipotesis lainnya terdukung yaitu hipotesis 4, 5, 6 dan 7. Ketiga hipotesis yang tidak terdukung adalah kualitas informasi (H1) dengan nilai *t-value* sebesar 0,929699, kualitas sistem (H2) dengan nilai *t-value* sebesar 0,864990 dan kualitas pelayanan (H3) dengan nilai *t-value* sebesar 1,774157. Ketiga konstruk tersebut tidak berpengaruh pada kepuasan pemakai karena mempunyai nilai *t-value* < 0,05 (T-tabel 1,96). Temuan ini terjadi karena

dimungkinkan Karyawan yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem *web-based learning* kurang memahami sistem dan karena mereka menganggap sistem tersebut monoton.

Selain itu, dalam penelitian ini sebagian besar Karyawan yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem *web-based learning* berusia di atas 40 tahun, hal ini mendorong bahwa mereka sulit untuk mendapatkan ide-ide, metode-metode dan ilmu-ilmu baru berkaitan dengan sistem karena mereka terbiasa dengan sistem pembelajaran yang bersifat manual, sehingga ketika mereka dituntut untuk mengaplikasikannya ke dalam sistem *web-based learning* mereka menganggap sistem tersebut sulit/kurang bersahabat. Dengan kata lain, adanya penghubung (*interface*) yang tidak bersahabat antara manusia (sebagai pemakai sistem) dengan sistemnya. Sistem dianggap sudah berkualitas namun sulit untuk berinteraksi dengan pemakai sistemnya.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak bisa digeneralisir untuk penggunaan sistem informasi yang lain, karena penelitian ini hanya untuk penggunaan sistem *web-based learning* di perguruan tinggi yang bersifat sukarela dan subyek penelitian ini tidak bisa digeneralisir untuk subyek penelitian lain.

Saran

Sebaiknya penelitian selanjutnya mempertimbangkan komponen-komponen *human element* lain seperti dukungan manajer dan keahlian pemrogram pada tingkatan individual tidak hanya pada komponen partisipasi pemakai saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2006). Partisipasi Pengguna dalam Pengembangan Sistem Informasi (Telaah Literatur). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.8, No.1, pp.52-62. [Online] <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=AKU>. (tanggal: 16/02/2009).
- Agarwal, R., and Prasad, J. (1997). The Role of Innovation Characteristics and Perceived Voluntariness in The Acceptance of Information Technologies. *Decision Sciences*, Vol.28, No.3, pp.557-580.
- Ajzen, I., and Fishbein, M. (1980) *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.
- Barki, H. and Jon Hartwick. (1994). Measuring User Participation, User Involvement, and User Attitude. *MIS Quarterly*, Vo.18, No.1, pp.59-82.
- Basori. (2008). Mengapresiasi e-Learning Berbasis MOODLE. *PTM FKIP UNS*. [Online] http://semar.fkip.uns.ac.id/file.php/1/moddata/forum/2/5/Mengapresiasi_e-Learning.pdf. (tanggal. 26/01/2009).
- Bharati, P. and A. Chaudhury. (2004) An Empirical Investigation of Decision-Making Satisfaction in Web-Based Decision Support Systems, *Decision Support Systems*, 37, pp. 187–197.
- Bhattacharjee, A. (2001) Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model. *MIS Quarterly*, Vol.25, No.3, pp.351–370.
- Bolton, R. N., and James H. Drew. (1991) "A Multistage Model of Customers' Assessments of Service Quality and Value," *Journal of Consumer Research* (17), pp. 375-384.
- Brown, S.P. & Chin, W.W. (2004) Satisfying and Retaining Customers Through Independent Service Representatives. *Decision Sciences*, 35, 527–550.
- Chae, M., Kim, J., H. Kim, and H. Ryu. (2001). Information Quality for Mobile Internet Services: A Theoretical Model with Empirical Validation. *Electronic Markets*, Vol.12, No.1, pp.38-46.
- Chandrarin, Grahita dan Nur Indriantoro. (1997). Hubungan Antara Partisipasi dan Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Berbasis Komputer, Suatu Tinjauan Dua Faktor Kontijensi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.12, No.2.
- Chiu, C.M., C.S. Chiu., and H.C. Chang. (2007). Examining The Integrated Influence of Fairness and Quality on Learners' Satisfaction and Web-Based Learning Continuance Intention. *Information Systems Journal*, Vol.17, pp.271–287.
- Cook, D.A. (2007). Web-Based Learning: Pros, Cons And Controversies. *Journal Watch*. 7, pp. 37-42.

Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler (2006), *Business Research Methods*, 9th ed., New York, NY: Irwin/McGraw-Hill.

Cronin, J.J.Jr., and Steven A. Taylor. (1992), "Measuring Service Quality: A Re-Examination and Extension", *Journal of Marketing*, Vol. 56, July, pp 55-68.

Darmayanti, T. (2007). *E-learning Pada Pendidikan Jarak Jauh: Konsep Yang Mengubah Metode Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan X dan Jarak Jauh*. Vol.8. No.2, pp.9 9-113.

Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*. pp. 319-335.

Davis, F.D., Bagozzi, R.P. and Warshaw, P.R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: a Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, Vol. 35, No. 8, pp. 982-1003.

DeLone, W.H. and Ephraim R. McLean. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*, Vol.3, No.1, pp. 60-95.

DeLone, W.H. and Ephraim R. McLean. (2003). DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, Vol.19, No.4, pp.9-30.

Doll, W.J. (1985). Avenues for Top Management Involvement in Successful MIS Development. *MIS Quarterly*, Vol.9, No.1, pp.17-35.

Fauziyah. (2005). Analisis Pengaruh Keterlibatan Klien Terhadap Keberhasilan Sistem dalam Pemilihan Sistem Komputer: Perpektif Konsultan dan Klien. *Tesis Program Pasca Sarjana Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Fisk, R.P., Stephen W. Brown., and Marie J. Bitner. (1993). "Tracking the Evolution of the Services Marketing Literature," *Journal of Retailing*, Vol.69, No.1, pp.61-103.

Fornell, C. and David F. Larcker. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1): pp. 39-50.

Ghozali, Imam. (2006). *Structural Equation Modeling. Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi 2, Badan Penerbit UNDIP.

Guimaraes, T., D.S. Staples., and James D. McKeen., (2003). Empirically Testing Some Main User-Related Factors For Systems Development Quality. *The Quality Management Journal*. Vol.10, No.4 pp.39-54.

Gunawan, Firman. (2001). Bagaimana Membangun Sebuah Model Pembelajaran Menggunakan Media Web. [Online] <http://www.SuperSiswa.com>. (tanggal. 18/03/2009).

Gunawan, Firman. (2001). Pemanfaatan YahooGroups Untuk Model Online Learning yang Sederhana. [Online] <http://www.SuperSiswa.com>. (tanggal. 18/03/2009).

Gunawan, Firman. (2001). Web Based Learning : Proses Pembelajaran Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi. [Online] <http://www.RisTINet.com>. (tanggal. 18/03/2009).

Hair, J.F. Jr., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (2006) *Multivariate Data Analysis*, 6th ed., NJ, Pearson Prentice Hall.

Hamilton, S. and Chervany, N.L. (1981). Evaluating Information System Effectiveness Part 1: Comparing Evaluation Approaches. *MIS Quarterly*, Vol.5, No.3, pp. 55-69.

Hartono, J.M. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, BPFE, Yogyakarta.

Hartono, J.M. (2005). *Sistem Teknologi Informasi*. Edisi II, Andi Offset, Yogyakarta.

Hartono, J.M. (2007a). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Edisi I. Andi Offset, Yogyakarta.

Hartono, J.M. (2007b). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi I. Andi Offset. Yogyakarta.

Hartono, J.M. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Edisi I, Andi Offset, Yogyakarta.

Hartwick, J. and Henri Barki. (1994). Explaining the Role of User Participation on Information System Use. *Management Science*, Vol.40, No.4, pp.440-465.

He, Jun., and William R. King (2008). The Role Of User Participation In Information Systems Development: Implications From a Meta-Analysis. *Journal Of Management Information Systems*. vol.25, No.1, pp.301-331.

Hong, W. *et al.* (2002) E-service Environment: Impacts of Web Interface Characteristics on Consumers' On-Line Shopping Behavior, in: R. Rust & P. Kannan (Eds) *E-Service: New Directions in Theory and Practice*, pp. 108–130 (Armonk, NY: M.E. Sharpe).

Igbaria, M., Tor Guimaraes., and Gordon B. Davis. (1995). Testing the Determinants of Microcomputer Usage via a Structural Equation Model," *Journal of Management Information Systems*, Vol.11, No.4, pp. 87-114.

Ives, B., and Margrethe H. Olson,. (1984). User Involvement and MIS Success: a Review of Research. *Management Science*, Vol.30, No.5, pp.586-602.

Janverpaa, S.L. and B. Ives. (1991). Executive Involvement and Participation in the Management of Information Technology. *MIS Quarterly*, pp.205-226.

Kahn. B.K., Diane M. Strong., and Richard Y. Wang. (2002). Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance. *Communications of the ACM*, Vol.45, No.4, pp.184-192.

Karahanna, E., Detmar W. Straub., and Norman L. Chervany. (1999). Information Technology Adoption Across Time: A Cross-Sectional Comparison of Pre-Adoption and Post-Adoption Beliefs. *MIS Quarterly*, Vol.23, No.2, pp.183-213.

Katalog Universitas X. (2006). *Penerbitan Universitas X*. Edisi I. Jakarta.

Kettinger, W.J. and Lee, C. (1995). Exploring a 'Gap' Model of Information Services Quality. *Information Resources Management Journal*, Vol.8, No.3, pp.5-16.

Kim, G.M., and E.S. Kim. (2008). An Exploratory Study of Factors Influencing ASP (Application Service Provider) Success. *Journal of Computer Information Systems*, pp.118-124.

Lawrence, M. and G. Low. (1993). Exploring Individual User Satisfaction Within User-Led Development," *MIS Quarterly*, Vol.17, No.2, pp.195-208.

Lee, Y.W., Strong, D.M., Kahn, B.K., and Wang, R.Y.(2002). AIMQ: A Methodology for Information Quality Assessment. *Information and Management*, Vol.40, No.2, pp.133-146.

Leidner, D.E. and J.J. Elam. (1994). Executive Information Systems: Their Impact on Executive Decision Making. *Journal of Management Information Systems*, 10(3): pp. 139-155.

Lin, H.F, (2007). Measuring Online Learning Systems Success: Applying the Updated DeLone and McLean Model. *CyberPsychology & Behavior*. Vol.10, No.6, pp.817-821.

Lubis, H. (2005). Peran Dukungan Manajemen Sebagai Variabel Pemoderasi Hubungan Antara Partisipasi Pemakai Dengan Keberhasilan Sistem Teknologi Informasi Studi Kasus Pada Bank BII. *Tesis Program Pasca Sarjana Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta).

Mardalis, A. (2005). Meraih Loyalitas Pelanggan. *BENEFIT*. Vol. 9, No. 2. [Online] http://eprints.ums.ac.id/237/1/BENEFIT_V9_N2_DES_2005.pdf (tanggal. 20/06/2009).

McKeen, J.D., T. Guimaraes., and James C. Wetherbe (1994). The Relationship Between User Participation and User Satisfaction: An Investigation of Four Contingency Factors. *MIS Quarterly*, pp.427-451.

McKimm, J., C. Jollie., and P. Cantillon. (2003). *ABC of Learning and Teaching* Web based Learning. *BMJ* Vol.326, pp.870-873.

Medina, M.Q. and Chaparro, J.P. (2007). The Impact of the Human Element in the Information Systems Quality for Decision Making and User Satisfaction. *Journal of Computer Information System*, Winter: pp.44-52.

Meilani, A. (2006). Potret Aktivitas Tutor dan Mahasiswa dalam Tutorial Online Universitas X (Studi Kasus Program Studi Manajemen – FE). [Online] <http://www.teknologipendidikan.net>. (tanggal. 10/02/2009).

- Nugraha, W.A. (2009). E-Learning VS I-Learning. Penyempitan Makna E-Learning dan Penggunaan Istilah "Internet-Learning". [Online] <http://www.ilmukomputer.com>. (tanggal. 02/06/2009).
- Oliver, R.L. (1980) A Cognitive Model For The Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. *Journal of Marketing Research*, Vol.17, pp.460–469.
- Oliver, R.L. & John E. Swan. (1989) Consumer Perceptions of Interpersonal Equity and Satisfaction in Transactions: a field survey approach. *Journal of Marketing*, Vol.53, pp.21–35.
- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry. (1985). Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, Vol. 49, pp.41-50.
- Pitt, L.F., , Richard T. Watson., and C. Bruce Kavan. (1995). Service Quality: A Measure of Information Systems Effectiveness. *MIS Quarterly*, Vol.19, No.2, pp.173-188.
- Pitt, L., Michael H. Morris., and P. Oosthuizen. (1996). Expectations of Service Quality as an Industrial Market Segmentation Variable. *The Service Industries Journal*, Vol.16, No.1, pp.1-9.
- Radityo, D., dan Zulaikha. (2007). Pengujian Model DeLone and McLean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). *Simposium Nasional Akuntansi*. pp. 1-25.
- Restuningdiah, N., dan Nur Indriantoro. (1999). Pengaruh Partisipasi terhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan Pengaruh Pemakai Sebagai Variabel Moderating. *SNA II Malang*.
- Sanders, G.L. dan Courtney, J.F. (1985). A Field Study of Organizational Factors Influencing DSS Success. *MIS Quarterly*, 9(1): pp. 77-93.
- Seddon, P., and S.K Yip. (1992). An Empirical Evaluation of User Information Satisfaction (UIS) Measures for Use with General Ledger Accounting Software. *Journal of Information Systems*, Vol.6, No.1, pp. 75-92.
- Standish Group. (1995) "Extreme Chaos," *The Standish Group International, Inc.* [Online]http://standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf (tanggal. 18/02/2009).
- Surtiawan, D. (2006) Kepuasan Pemakai dan Peningkatan Kualitas Berbasis Pemakai: Pendekatan Manajemen Pemasaran Sebagai Paradigma Baru Perpustakaan. Artikel Peserta Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pustakawan. *Universitas Negeri Yogyakarta*, pp.
- Suryaningrum, Diah Hari. 2003. "The Relationship Between User Participation and System Success: Study of Three Contingency Factors on BUMN in Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi*. Surabaya.

- Suyanto, A. H. (2005). Mengenal E-Learning. [Online]: www.asephs.web.ugm.ac.id. (Hal. 1-5). (tanggal. 27/05/2009).
- Swan, J.E., and I. Frederick Trawick. (1981). Disconfirmation of Expectations and Satisfaction with a Retail Service. *Journal of Retailing*, Vol.57, No.3, pp.49-68.
- Szajna, B. (1996). Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model. *Management Science*, 42 (1), pp. 85-92.
- Tsai, S., and P. Machado. (2001). E-learning, Online Learning, Web-based Learning, or Distance Learning Unveiling the Ambiguity in Current Terminology. *InkiTiki Corporation*. [Online] <http://www.elearnmag.orgsubpage> (tanggal. 26/01/ 2009).
- Wahono, R.S. (2005). Pengantar e-Learning dan Pengembangannya. [Online] <http://www.ilmukomputer.com> (tanggal. 10/02/2009).
- Watson, R.T., Leyland F. Pitt., and C. Bruce Kavan. (1998). Measuring Information Systems Services Quality: Lessons from Two Longitudinal Case Studies. *MIS Quarterly*, Vol.22, No.1, pp.61 -79.
- Widhiartha. (2008). Memahami Lebih Lanjut tentang *e-Learning*. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional IV Surabaya, pp.1-11
- Zsu, F.X., Walter W.Jr., and I. Chen. (2002) IT-based Services and Service Quality in Consumer Banking. *International Journal of Service Industry Management*, Vol.13, pp.69–90.

RPSEP-88

PENDIDIKAN ETIKA MENJADI TARGET KURIKULUM 2013

Deska Manisha

NIM 021606549

Mahasiswa Program Bidikmisi – Ilmu Komunikasi – UPBJJ-UT Semarang

Abstrak

Setengah dari keyakinan seorang makhluk sosial dalam menghadapi kenyataan hidup, didahului oleh adanya keraguan. Termasuk dalam hal ini adalah kemauan untuk bersaing secara etika. Etika yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, utamanya yang baru saja lulus dari jenjang pendidikan SMU, masih sangat memprihatinkan. Hal ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara harfiah, para alumni siswa SMU perlu memperoleh bekal pendidikan etik yang terangkum dalam sebuah mata pelajaran bernuansa muatan lokal. Muatan lokal, yang saat ini dapat terangkum dalam kajian kurikulum 2013, menjadi bagian integral sebuah pendidikan etik. Aspek yang dapat memperkuat pendidikan etik adalah didekatkannya realitas sosial siswa dengan kebutuhan sosial masyarakat. Segala hal yang berlaku, seperti tindak tanduk, kesopanan, dan tutur kata, sudah seharusnya dimaknai dan dijalankan selayaknya aturan normatif yang ada. Begitulah dengan pendidikan saat ini, yang tidak secara nyata menunjukkan hal itu. Melalui kajian ini, penulis mengemukakan kenyataan memprihatinkan bahwa pendidikan etika yang minim telah menurunkan kualitas moral sosial alumni SMU. Oleh karena itu, perlu ada satu treatment yang diharapkan dapat meningkatkan angka keyakinan moral orang tua siswa sehingga mereka pun tidak lagi merasa khawatir tentang pergaulan anaknya. Kontribusi kajian ini lebih ditekankan pada substansi dan penerapan kurikulum 2013, yang dekat dengan realitas sosial kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Saat seseorang menyandang status mahasiswa, maka ia juga menyandang peran sebagai mahasiswa yaitu agent of change, social control, dan iron stock. Bicara mengenai peran mahasiswa secara lebih detail, menjadi mahasiswa haruslah bersikap dan berperilaku lebih

dewasa daripada saat menjadi siswa. Karena sikap dan perilaku menunjukkan jati diri seorang mahasiswa tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat. Sikap dan perilaku tersebut akan mencerminkan etika seorang mahasiswa dan cara pandang terhadap moral yang berlaku.

Mahasiswa yang pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di dalam pergerakan pembaharuan atau subjek yang akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan membangun bangsa dan tanah air ke arah yang lebih baik dituntut untuk memiliki etika. Etika bagi mahasiswa dapat menjadi alat kontrol di dalam melakukan suatu tindakan. Etika dapat menjadi gambaran bagi mahasiswa dalam mengambil suatu keputusan atau dalam melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, makna etika harus lebih dipahami kembali dan diaplikasikan di dalam lingkungan mahasiswa yang realitanya lebih banyak mahasiswa yang tidak sadar dan tidak mengetahui makna etika dan peranan etika itu sendiri, sehingga bermunculanlah mahasiswa-mahasiswi yang tidak memiliki akhlaqul karimah, seperti mahasiswa yang tidak memiliki sopan dan santun kepada para dosen, mahasiswa yang lebih menyukai hidup dengan bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang, pergaulan bebas antara mahasiswa dengan mahasiswi, berdemonstrasi dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku bahkan hal terkecil seperti menyontek disaat ujian dianggap hal biasa padahal menyontek merupakan salah satu hal yang tidak mengindahkan makna dari etika.

Apabila mahasiswa masih belum menyadari betapa pentingnya etika di dalam pembentukan karakter-karakter seorang penerus bangsa dan negara, akankah bangsa Indonesia untuk di masa yang akan datang di isi oleh penerus-penerus bangsa yang beretika?. Akan diletakkan dimanakah wajah Indonesia nanti apabila bangsa Indonesia dibangun oleh jiwa-jiwa yang penuh dengan kecurangan atau dengan akhlaq-akhlaq tercela?.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengertian dari etika dan peranan etika?
2. Apakah peranan etika bagi mahasiswa?
3. Apakah pengertian kurikulum?
4. Apakah tujuan kurikulum?
5. Bagaimana peranan etika pada kurikulum2013?

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, peranan pendidikan etika bagi mahasiswa karya tulis ini bertujuan untuk:

1. Diharapkan mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan nilai-nilai etika di kalangan atau di dalam aktivitas mahasiswa.
2. Dapat mewujudkan dan menumbuhkan etika dan tingkah laku yang positif.

PEMBAHASAN

PENGERTIAN ETIKA

Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan kata moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral kurang lebih sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah:

- Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
- Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak
- Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang pembahasan Etika, sebagai berikut:

- Terminus Techicus, Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
- Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (In herent in human nature) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Menurut K. Bertens: Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Ahmad Amin mengungkapkan bahwa etika memiliki arti ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. (Suseno, 1987). Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. (Kattsoff, 1986).

Etika ialah studi tentang cara penerapan hal yang baik bagi hidup manusia yang menurut Solomon, 1984:2, mencakup dua aspek:

1. Disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya.
2. Nilai-nilai hidup nyata dan hukum tingkah laku manusia yang menopang nilai-nilai tersebut.

Makna atau arti etika lebih mengarah pada tindakan yang sadar dan disengaja. Istilah etika ditinjau dari segi makna atau arti, hampir sama dengan moral, tetapi dalam pemakaian ilmiah, moral biasanya hanya menyangkut kebaikan atau keburukan secara lahiriah atau kelihatan dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi etika adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai hasil yang tegas berdasarkan analisa dan akal budi yang menyangkut pemikiran sistematis tentang kelakuan, motivasi dan keadaan batin yang menyadarinya.

Untuk melihat sikap batin maupun perbuatan lahir dibutuhkan suatu alat, yakni ukuran moral berdasarkan pengalaman dan pengamatan, kiranya dapat kita katakan bahwa sekurang-kurangnya kita mengenal adanya dua ukuran yang berbeda, yakni ukuran yang ada dalam hati kita dan ukuran yang dipakai oleh orang lain waktu mereka menilai diri kita.

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Definisi tentang etika dapat di klasifikasikan menjadi tiga (3) jenis definisi, yaitu sebagai berikut :

- Jenis Pertama, Etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan

tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia

- Jenis Kedua, Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama.
- Jenis Ketiga, Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap tingkah laku manusia.

Etika terbagi atas dua :

1. Etika umum ialah etika yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis. Etika inilah yang dijadikan dasar dan pegangan manusia untuk bertindak dan digunakan sebagai tolok ukur penilaian baik buruknya suatu tindakan.
2. Etika khusus ialah penerapan moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus misalnya ialah raga, bisnis, atau profesi tertentu. Dari sinilah nanti akan lahir etika bisnis dan etika profesi (wartawan, dokter, hakim, pustakawan, dan lainnya).

PERANAN ETIKA

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)

Etika memiliki peranan diantaranya yaitu:

1. Dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia
2. Menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa
3. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang.
4. Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya.
5. Etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa di cap sebagai orang baik di dalam masyarakat.

PERANAN ETIKA BAGI MAHASISWA

Peranan etika bagi aktivitas mahasiswa yaitu menjadi landasan dalam melakukan kegiatan yang tetap mengacu atau melihat nilai-nilai dan norma-norma, sehingga segala perbuatan dan tingkah laku kita dapat diterima masyarakat.

Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Dapat kita nilai bahwa etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain, dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapa pun dan apapun itu.

AKTIVITAS MAHASISWA

Berbicara tentang aktivitas, mahasiswa memiliki banyak aktivitas selain belajar sebagai tujuan utama menjadi mahasiswa. Mahasiswa sebagai subjek dapat memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Relitanya aktivitas mahasiswa ada yang positif dan ada yang negatif, kembali kepada mahasiswa itu sendiri apakah ia menginginkan jalan yang baik atau tidak. Aktivitas positif mahasiswa selain belajar adalah mengikuti atau menyelami dunia organisasi di kampus, disiplin akan waktu, dan mematuhi segala peraturan yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Sedangkan aktivitas negatif mahasiswa adalah bersikap anarkis dalam berdemonstrasi, tidak mematuhi peraturan yang berlaku, berbuat keonaran antar sesama mahasiswa atau mahasiswi, bergaul secara bebas tanpa mengindahkan peraturan yang ada dan melakukan tindakan curang yaitu menyontek disaat ujian.

Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami betul arti dari kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

PENGERTIAN KURIKULUM

Kurikulum menurut Beauchamp (1968) adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Beberapa penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa kurikulum adalah seperangkat dokumen yang sengaja dibuat pendidik sebagai acuan dalam proses pembelajaran peserta didik. Kurikulum sengaja dibuat agar hasil pembelajaran menjadikan peserta didik sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan nasional.

TUJUAN KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud No 68 th 2013).

Lalu bagaimana masalah krisis etika yang kini telah terjadi dalam kehidupan masyarakat? bagaimana semestinya peran pendidikan, khususnya dalam kurikulum 2013? Dan bagaimana konsepsi yang dipandang tepat dalam melaksanakan kurikulum 2013 dalam kaitannya pendidikan etika? Sebagian masyarakat beranggapan terjadinya masalah krisis etika adalah lemahnya sistem pendidikan dalam pembelajaran.

Jawaban dari kolaborasi tujuan kurikulum 2013 terhadap krisis etika adalah menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai untuk membangun kekuatan norma dan moral rakyat Indonesia. Pancasila diharapkan hadir dalam bentuk nilai-nilai disemua mata pelajaran. Penataan kecerdasan masyarakat perlu dimantapkan seiring dengan menurunnya mutu watak bangsa ini. Suwarma Al Muchtar (2014), Pendidikan mengabaikan aspek nilai dan moral sebagai dampak terlalu kuatnya pendekatan “*obyektif model* ketimbang *process models*”. Baiknya penilain atau evaluasi pembelajaran lebih kuat dalam hal proses bukan semata-mata hasil ulangan mata pelajaran

Kesepakatan Pancasila sebagai sumber etika bermasyarakat dan berbangsa berdasarkan atas wawasan kesejarahan yang sangat berharga. Para pendiri bangsa ini memberi tauladan betapa perbedaan, perdebatan, pertentangan dan tukar pikiran telah mengantarkan untuk menemukan dasar Negara Indonesia. *Founding father bangsa* ini bersatu dalam satu identitas kebangsaan. Ini membuktikan betapa kuatnya etika filsafat ketimuran yang diejawantahkan dalam bentuk dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Kenyataan sejarah ini

hendaknya menjadi semangat dan spirit untuk dikembangkan sebagai dasar pendidikan nilai dan moral dalam kurikulum 2013.

APLIKASI KURIKULUM 2013

Krisis secara masif sebenarnya masih terjadi dan melanda negeri kita ini. Krisis yang paling hangat dan menjadi topik diberbagai media baik media cetak, media elektronik bahkan sosial media adalah krisis etika. Masalah etika merupakan masalah krusial yang terjadi di Indonesia. Kejadian baru-baru ini menyentak kita semua, mulai dari usia anak-anak yaitu siswa SD sampai orang dewasa dalam hal ini Politisi di senayan mengalami krisis etika. Kualitas sumber daya manusia semakin tergerus dengan perubahan sosial budaya dalam era globalisasi. Ketertatihan kita dalam mengekor dunia barat yang kita konotasikan sebagai negara maju dan modern perlahan tapi pasti mempengaruhi seluruh sendi kehidupan rakyat Indonesia. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Dalam konteks demikian, penjelasan pola pikir mengaplikasikan kurikulum 2013 dalam pendidikan watak selanjutnya mengkaji bagaimana implikasi kritisnya terhadap pemaknaan dan aktualisasi etika.

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan pendidikan karakter sebagai salah satu komponen penting yang menjadi penekanan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Apakah mungkin pendidikan karakter dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya beretiket tetapi tidak beretika? Beretiket berarti bersopan-santun, sedangkan beretika berarti bertindak benar sesuai dengan tata nilai. Seseroang bisa beretiket (berperilaku santun) namun belum tentu dia beretika.

PENGARUH PENDIDIKAN ETIKA

Menurut pendapat Akhmad Sudrajad, dengan pendidikan etika dapat memungkinkan anak didik:

1. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas.
2. Menghargai keanekaragaman
3. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kredit, inovatif dan bijaksana.
4. Menunjukkan kemampuan menganalisis, memecahkan masalah dalam kehidupan secara bermatabat.

5. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab dan bijaksana.
6. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dengan saling menghargai.
7. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dengan bahasanya dan bakatnya dengan penuh sopan santun.
8. Menguasai pengetahuan yang diperlukan dengan penuh arif dan bijaksana.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan etika besar pengaruhnya terhadap anak didik, termasuk pencapaian keberhasilan dalam hidupnya anak didik.

KESIMPULAN

Dari penjelasan mengenai etika dan moral dalam lingkungan bermasyarakat dapat disimpulkan bahwa:

Etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sebagai seorang mahasiswa, sekarang sudah memasuki suatu fase kehidupan yaitu menjadi manusia dewasa. Sebagai seorang yang telah dewasa yang sekarang sedang menimba ilmu di suatu perguruan tinggi harus sudah mempunyai prinsip hidup yang jelas. Salah satu prinsip hidup sebagai seorang mahasiswa adalah memahami etika kehidupan di dunia kampus

Peranan Etika Peranan etika bagi aktivitas mahasiswa yaitu menjadi landasan dalam melakukan kegiatan yg tetap mengacu atau melihat nilai-nilai & norma-norma, sehingga segala perbuatan & tingkah laku kita dapat diterima masyarakat.

Etika dan moral Mahasiswa dalam hidup di lingkungan bermasyarakat merupakan prioritas yang sangat penting. Menjadi Mahasiswa harus dapat hidup bersosial yang baik, dengan memiliki etika dan moral yang baik pula.

SARAN

Pada saat ini yang diperlukan adalah kurikulum pendidikan yang berkarakter yang didalamnya terdapat point penting yaitu pendidikan etika.

Etika harus lebih dipahami kembali dan diaplikasikan di dalam lingkungan mahasiswa yang realitanya lebih banyak mahasiswa yang tidak sadar dan tidak mengetahui makna etika dan peranan etika itu sendiri.

Pancasila sebagai sumber etika bermasyarakat sejatinya dapat dijadikan pedoman mahasiswa agar bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa.

Himbauan dan harapan supaya semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk serta-merta menjunjung etika.

DAFTAR PUSTAKA

<http://depoknews.com/peran-kurikulum-2013-terhadap-krisis-etika/>

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/pengertian-etika-peranan-dan.html>

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/08/pengertian-filsafat/>

<http://yuli-lian.blogspot.com/2012/04/pengertian-etika.html>

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/08/pengertian-filsafat/>

<http://bagus19.blogspot.com/2012/10/pengertian-filsafat-etika-dan-etika.html>

<http://pendidikanmoraldanetika.blogspot.com/>

<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>

<http://www.kemhan.com/2009/03/pengertian-etika-peranan-hubungannya.html>

<http://wulansabti.wordpress.com/2013/11/16/mahasiswa-memahami-bagaimana-etika-berhubungan-dalam-sistem-informasi/>

John McCain, Mark Salter, "Karakter-Karakter yang Menggugah Dunia" Gramedia Pustaka Utama" Jakarta 2009

Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan, Rajawali Press, Jakarta, 2012

RPSEP-89

**PENGARUH *TALENT MANAGEMENT* TERHADAP PENGEMBANGAN
KARIR PEGAWAI DI UNIVERSITAS TERBUKA**

Irmawaty

Mailani Hamdani

Universitas Terbuka

irmawaty@ut.ac.id

mailani@ut.ac.id

Abstrak

Semakin ketatnya tingkat persaingan Perguruan Tinggi di Indonesia mengakibatkan Perguruan Tinggi dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun salah satu caranya adalah dengan meningkatkan mutu dan kualitas para karyawannya. Para karyawan yang memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas, atau biasa dikenal dengan istilah kompetensi, akan sangat dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuannya. Mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi karena dengan perilakunya mereka dapat membentuk struktur Perguruan Tinggi, memanfaatkan teknologi, mengadakan tanggapan terhadap variasi dan tekanan lingkungan internal juga eksternal organisasi, serta pada akhirnya memberikan sumbangsih bagi tercapainya tujuan Perguruan Tinggi itu sendiri. Dengan kata lain maju atau mundurnya suatu Perguruan Tinggi ada di tangan mereka. *Talent* adalah unsur terbesar yang membentuk kekuatan SDM, unsur lainnya adalah pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dapat diperoleh melalui proses pengembangan SDM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan program pengembangan karir melalui *talent management* di UT, tantangan, strategi atau langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, dan bagaimana penerapan sistem pengembangan karir pegawai melalui talent manajemen saat ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

PENDAHULUAN

Semakin ketatnya tingkat persaingan Perguruan Tinggi di Indonesia mengakibatkan Perguruan Tinggi dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun salah satu caranya adalah dengan meningkatkan mutu dan kualitas para karyawannya. Para karyawan yang memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas, atau biasa dikenal dengan istilah kompetensi, akan sangat dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi untuk mencapai

tujuannya. Mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi karena dengan perilakunya mereka dapat membentuk struktur Perguruan Tinggi, memanfaatkan teknologi, mengadakan tanggapan terhadap variasi dan tekanan lingkungan internal juga eksternal organisasi, serta pada akhirnya memberikan sumbangsih bagi tercapainya tujuan Perguruan Tinggi itu sendiri. Dengan kata lain maju atau mundurnya suatu Perguruan Tinggi ada di tangan mereka.

Universitas Terbuka (UT) adalah perguruan tinggi pelopor yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia. Banyaknya penghargaan dan prestasi yang diraih UT, sehingga membawa UT terpilih sebagai pemimpin organisasi pendidikan tinggi jarak jauh di seluruh Asia (*Asian Association of Open Universities (AAOU)*) periode 2008-2010. Dan UT saat ini tergolong dalam *The Top Ten Mega University of the World* dengan jumlah mahasiswa UT sebesar 579.261 orang (data per januari 2014).

Untuk terus mempertahankan prestasi yang sudah diraih UT, maka UT harus dapat terus mengelola karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan kinerja baik. Salah satu upaya untuk memperoleh, mengembangkan serta mempertahankan pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan kinerja yang baik yaitu melalui *Talent management*. *Talent Management* pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. *Talent Management* tidak hanya berbicara mengenai pengembangan dan pengelolaan karir pegawai, namun juga bagaimana organisasi dapat menarik dan mengelola sumber daya manusia pilihannya. Pada lingkup yang lebih luas, *talent management* juga berarti bagaimana sebuah organisasi mengelola sumber dayanya mulai dari proses rekrutmen, penempatan pegawai, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan karir, sampai pegawai meninggalkan perusahaan (*employee separation*) sehingga pada akhirnya tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai (Lewis, 2006).

Sudut pandang lain mengatakan *talent* adalah orang - orang yang mempunyai kualitas terbaik yang dibangun, dibina oleh sebuah organisasi guna proses jangka panjang. Merekalah yang akan menjadi penerus bisnis perusahaan kelak (Simalongo, 2009). Proses pencarian talenta baru saat ini masih belum mencapai hasil yang maksimal. Mutu dari SDM yang baru direkrut seringkali masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi, sehingga organisasi tersebut harus menambah waktu dan tenaga untuk memperbaiki kinerja dari talenta baru tersebut. Talenta dan professional di sebuah organisasi adalah penggerak utama keberhasilan perusahaan.

Manajemen talenta merupakan hal yang penting dan diperhatikan sungguh-sungguh oleh banyak organisasi dan kelompok eksekutif senior yang memimpin organisasi tersebut (Smilansky, 2008). Pentingnya talenta sebagian besar disebabkan karena berkurangnya stabilitas dari kelompok eksekutif senior. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memahami hubungan antara suatu strategi tertentu dengan jenis pemimpin yang cocok untuk membawa organisasi mencapai tujuannya.

Setiap eksekutif dalam sebuah lembaga atau organisasi pasti memiliki talenta yang dapat terkait dengan setiap orang. Begitupun dengan UT, manajemen talenta yang sistematis diawali dengan kejelasan mengenai standar kepemimpinan yang disyaratkan dalam bidang tersebut. Keberhasilan atau kegagalan setiap upaya manajemen talenta bergantung pada tingkat kepentingan yang ditetapkan untuk memiliki eksekutif-eksekutif terbaik yang ada di lingkungan UT. Namun kini, semakin sulit untuk menemukan dan mempertahankan pegawai bertalenta, sehingga penerapan program pengembangan karir melalui *talent management* di UT sangatlah penting untuk dapat menemukan orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang ditawarkan dimasa mendatang, karena kaderisasi talent management adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memelihara dan menciptakan keunggulan organisasi. Diharapkan dengan mendapatkan pegawai yang bertalenta, maka UT memiliki kader-kader kepemimpinan baru yang dapat dipromosikan kelak untuk memimpin UT.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Dapatkah Sistem Pengembangan Karir pegawai berdasarkan talenta diterapkan di UT?
- B. Tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengembangan karir melalui *talent management*?
- C. Strategi atau langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem pengembangan karir melalui *talent management*?
- D. Perlukan UT menerapkan sistem pengembangan karir melalui *talent management*?
- E. Apakah Saat ini UT sudah menerapkan sistem pengembangan karir melalui *talent management*?

B. METODOLOGI

1. Metode Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Metode penelitian deskriptif merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar – benar berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, metode dapat diartikan pula sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berfikir tentang materinya (Nawawi dan Martini dalam Prastowo, 2011).

Furchan (2007) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”. Sedangkan, Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya

kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

2. Operasional Variabel

Talent management adalah sebagai suatu proses komprehensif dan dinamis untuk mengembangkan sekumpulan manusia berpotensi tertinggi dalam organisasi melalui pengembangan yang searah dan terintegrasi, yang praktiknya dilakukan para pemimpin yang terkait dalam perusahaan, berkaitan dengan aktivitas menarik pegawai yang memiliki talenta, menyeleksi, mengembangkannya dan memeliharanya.

Pengembangan karir diartikan sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi /perusahaan (Nawawi, 2001). Operasional variabel tersusun dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Tabel Operasional Variabel

NO	Variabel	Dimensi	INDIKATOR
1	Talent Management	Tingkah Laku	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu hadir • Disiplin • Target kerja • Inisiatif • Memaksimalkan potensi diri • Menyikapi perubahan • Hubungan personal • Teladan • Hak dan kewajiban

NO	Variabel	Dimensi	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> • Kreatif dan inovatif • Berjiwa besar dan lapang dada
		Pengalaman Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam jejak pekerjaan • Kemampuan membuat kebijakan • Kesesuaian bidang • Pengalaman karir yang sama dibidangnya
		Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan diri • Kemampuan mengambil keputusan • Teliti dan Tekun • Memiliki kecerdasan matematis • Mampu menangkap peluang • Berani menghadapi tantangan • Kepedulian pada bawahan • Kemampuan berhubungan social • Kemampuan mengenali diri • Menciptakan perubahan positif • Memupuk sikap positif • Melaksanakan pengembangan staf

NO	Variabel	Dimensi	INDIKATOR
		Kualitas Karakter Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian • Motivator • Dapat dipercaya • Percaya diri • Berfikir analitis • Kejujuran • Bersikap adil • Berwawasan luas • Keberanian dalam menentukan sikap • Persistent • Konsisten • imajinatif
		Inisiatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi Masalah • Siap mengambil resiko • Memiliki harapan baik • Memiliki ide • Mengubah perilaku • Mendorong diri sendiri • Bertindak dengan orientasi jangka panjang • Bertindak cepat dalam situasi kritis
		Jiwa Pembelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Kemauan belajar • Mengetahui kelemahan diri • Memiliki rasa ingin tahu
		Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bekerja sama dengan bawahan

NO	Variabel	Dimensi	INDIKATOR
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan masukan • Menganggap bawahan sebagai rekan kerja
		Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan berinteraksi secara baik • Memiliki keterampilan teknis • Memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi • kemampuan perencanaan • Keterampilan mengelola konflik
2	Pengembangan Karir	Promosi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan promosi Jabatan yang lebih tinggi • Tidak Mendapatkan Promosi Jabatan yang lebih tinggi

3. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengenai potret *talent management* terhadap pengembangan karir pegawai dilaksanakan di Universitas Terbuka (UT) dengan alamat Jalan Cabe Raya Pondok Cabe Tangerang Selatan 15418.

4. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data sekunder diperoleh dari tinjauan kepustakaan maupun literatur-literatur terkait yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

5.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2008). Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh pegawai yang berada di lingkungan UT. Banyaknya populasi adalah 854 pegawai

5.2 Sampel Penelitian

Sampel yang diambil dalam penelitian ini mengacu kepada pernyataan Gay yang menyatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, maka ukuran sampel minimal sebanyak 10% dari populasi dan untuk populasi yang relatif kecil minimal sebesar 20% dari populasi, sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif korelasional maka ukuran sampel minimal sebanyak 30 subyek (Umar 2008), sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 150 Responden.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang dibagikan kepada responden. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer guna menguji fakta, persepsi dan sikap responden mengenai bagaimana pengembangan karir pegawai melalui *talent management*. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban yang tersedia, juga pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mengetahui persepsi pengembangan karir melalui talent management di UT saat ini.

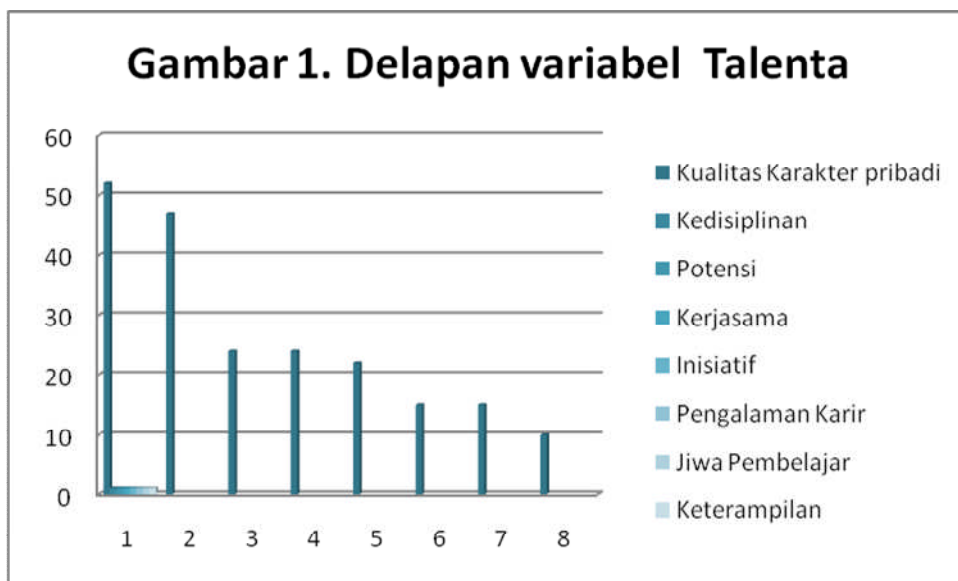
C. Hasil dan Pembahasan

1. Variabel Talenta yang memiliki prioritas yang paling penting.

8 Variabel Talenta yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah Kedisiplinan, pengalaman karir, potensi, kualitas karakter pribadi, inisiatif, jiwa pembelajar, kerjasama,

dan keterampilan. Dan diantara ke 8 variabel ini responden diminta untuk mengurutkan mana variabel yang paling penting diantara 8 variabel.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan, kualitas karakter pribadi terbanyak dipilih sebesar 52 responden, variabel ke dua adalah kedisiplinan sebanyak 47 responden, diikuti oleh potensi dan kerjasama yang memiliki bobot yang sama penting menurut responden yaitu sebesar 24 responden. Variabel penting ke 4 adalah inisiatif dipilih sebanyak 22 responden. Untuk variabel terpenting ke 5 adalah pengalaman karir dan jiwa pembelajar yang dianggap sama pentingnya dan dipilih responden sebanyak 15 responden. Untuk variabel terakhir yang dianggap penting adalah keterampilan, dipilih oleh 10 responden.



2. Penerapan Talent Manajemen di UT

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, “dapatkah sistem pengembangan karir pegawai berdasarkan talenta diterapkan pada Universitas Terbuka?. 25% responden menyatakan bahwa sistem pengembangan karir pegawai berdasarkan talenta tidak bisa diterapkan di UT dan 58 % responden menyatakan bahwa sistem pengembangan karir

pegawai dapat diterapkan di UT. Dan untuk responden yang tidak menjawab (netral) sebesar 17%.

Untuk responden yang menjawab bahwa talent manajemen tidak dapat diterapkan di UT mereka menyatakan bahwa peraturan di UT sudah cukup jelas, mengacu pada DUK, adanya Unit PPSDM yang mewadahi, dan SDM di UT sudah cukup baik dgn latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Responden yang menyatakan bahwa talent manajemen dapat diterapkan di UT dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : sebagai penunjang daftar urutan kepegawaian (BUK), mengelola UT menjadi PTJJ terdepan di Tanah Air dan berkelas dunia sistem pengembangan karir berdasarkan talenta harus diimplementasikan karena komponen talent management telah mewakili unsur-unsur kepatutan untuk menjadi seorang pemimpin, SDM UT secara keseluruhan memiliki potensi yang bagus, dengan talenta yang dimiliki pegawai akan dapat mendukung dan mendorong kemajuan institusi, mempermudah pengembangan peta kompetensi staf. Dan seseorang akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya/bakatnya.



3. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan pengembangan karir pegawai berdasarkan talenta.

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, tantangan apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan pengembangan karir berdasarkan talenta. Adapun tantangan-tantangan yang dikemukakan oleh responden adalah sebagai berikut :

1. Studi lanjut program studinya tidak berdasarkan keahlian yang pada akhirnya tidak relevan
2. Keterbatasan antara keahlian yang dipersyaratkan dengan keahlian yang dimiliki pegawai
3. Kualifikasi keilmuan, potensi diri dan pendidikan
4. Diadakan pelatihan yang tepat
5. Ketidak sesuaian talenta yang ada dengan bidang yang akan menjadi tempat berkarirnya.
6. Pembinaan talenta karyawan secara sistematis dan berkesinambungan
7. Dapat merubah peta penempatan SDM yang ada saat ini
8. Gairah dari para karyawan untuk mengembangkan keahliannya.
9. fokus pimpinan/organisasi terhadap hal tersebut untuk menerapkannya
10. Sarana dan Prasarana

4. Strategi atau langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan karir berdasarkan talenta.

Strategi atau langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan karir berdasarkan talenta, responden menjawab dalam 3 tema besar, yaitu dalam hal kepemimpinan, organisasi dan staf.

Langkah yang dihadapi dalam hal kepemimpinan dipilih responden sebesar 14%, untuk organisasi sebesar 44% dan yang berhubungan dengan staf sebesar 23% dan responden yang tidak menyatakan pendapatnya sebesar 19%.

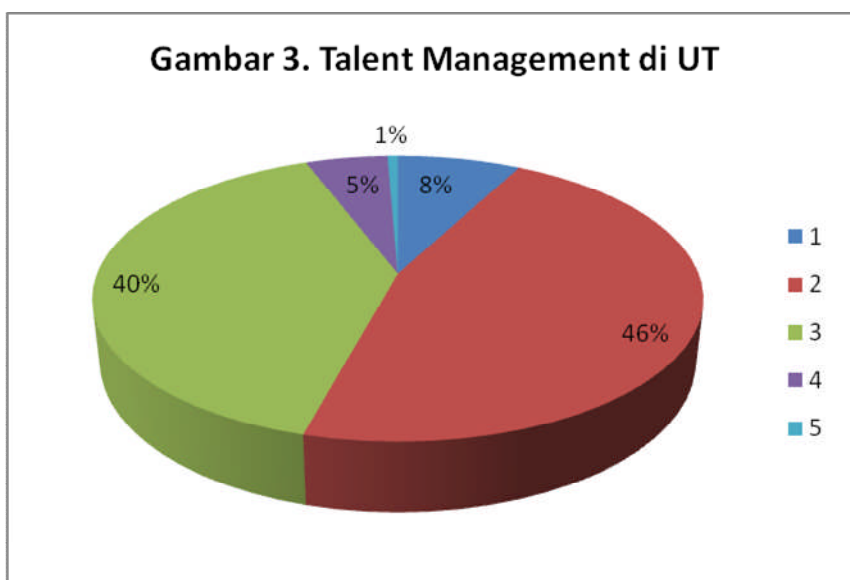
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Jabatan
2. Penempatan berdasar keahlian/mendekati keahlian.
3. Peningkatan keahlian.
4. Membuat lelang jabatan
5. Menjalin kerjasama dengan pihak luar
6. Membuat aturan dan kebijakan mengenai pengembangan karir berdasarkan talenta

7. Membuat grand design SDM UT
8. Melibatkan konsultan/pakar untuk membuat format penilaian yang mampu mengakomodasi kebutuhan untuk mengembangkan karir karyawan.
9. Membuat sistem pelatihan
10. sistem pelatihan yang mengarah pada sistem berbasis talenta , sehingga jumlah dan kualitas SDM nya memadai
11. UT mendorong staf untuk pengembangan SDM, menerapkan sistem tersebut secara komit dan meminta komitmen setiap pimpinan dan staf untuk menerapkannya.

5. Talent Manajemen di Universitas Terbuka saat ini.

Bagaimana menurut Anda mengenai Talent Management di Universitas Terbuka? Jawaban diberikan dalam 4 kelompok. Kelompok responden yang menjawab bahwa talent manajemen sangat perlu diterapkan di UT sebesar 46%, responden yang menjawab bahwa talent manajemen perlu diterapkan di UT sebesar 40%, 5% responden menyatakan bahwa talent manajemen belum perlu diterapkan di UT dan 1% responden menyatakan bahwa talent manajemen tidak perlu diterapkan di UT. kelompok responden yang tidak memberikan jawaban (netral) sebesar 8%.



Jawaban terbesar yang dipilih responden adalah perlu diterapkannya sistem pengembangan karir berdasarkan manajemen talenta. Ada beberapa alasan mengapa hal ini perlu diwujudkan, yaitu sebagai berikut.

1. Dapat digunakan sebagai acuan untuk memilih pemimpin
2. Untuk Perkembangan UT yang akan datang
3. Peningkatan kualitas pegawai
4. Dapat menempatkan seseorang berdasarkan keahlian

6. Manajemen Talenta di UT saat ini

Menurut Pendapat Anda, apakah saat ini UT sudah menerapkan sistem pengembangan karir pegawai berdasarkan talenta/kinerja yang dimiliki pegawai?. 27% responden menyatakan bahwa saat ini UT sudah menerapkan sistem pengembangan karir pegawai berdasarkan manajemen talenta untuk jabatan-jabatan tertentu walaupun belum secara keseluruhan, dan 50% pegawai menyatakan bahwa saat ini UT belum menerapkan sistem pengembangan karir pegawai berdasarkan Talenta hal ini terjadi karena belum adanya dukungan organisasi untuk menerapkannya. 23% responden tidak memberikan jawaban (netral).



D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel Talenta yang dominan berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai adalah variabel kualitas karakter pribadi

2. 58% responden menyatakan bahwa sistem pengembangan karir pegawai berdasarkan talenta dapat diterapkan di UT
3. Terdapat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem pengembangan karir berdasarkan talenta, tantangan terbesar adalah dari organisasi itu sendiri.
4. 44% responden menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi berasal dari organisasi secara umum
5. 86% responden menyatakan perlu dan sangat perlu untuk menerapkan sistem pengembangan karir berdasarkan talenta.

Saran

1. Variabel talenta yang paling berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai adalah variabel kualitas karakter pribadi, yang terdiri dari : perhatian, Motivator, Dapat dipercaya, Percaya diri, Berfikir analitis, Kejujuran, Bersikap adil, Berwawasan luas, Keberanian dalam menentukan sikap, Persistent, Konsisten dan imajinatif. Hal inilah yang harus dimiliki/ diasah oleh calon-calon pemimpin di UT agar talenta yang dimiliki lebih maksimal. Hal pertama yang diperhatikan pegawai adalah mental. mental yang kuat adalah hal yang utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. karena jika dia memiliki mental yang lemah, mana mungkin bisa dia bisa memimpin dengan benar, dan dia akan mampu tergoda pada hal2 yang merugikan baginya dan bagi orang lain. Pemimpin merupakan figure yang dijadikan contoh bagi bawahannya, jd sudah sewajarnya seorang pemimpin memiliki kualitas kepribadian yang baik, agar dapat dicontoh, diteladani dan dihormati.
2. Sistem Manajemen Talenta dapat diterapkan di UT,. hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan karir pegawai itu sendiri dan bagi kemajuan UT, mengapa? Karena dengan manajemen talenta maka UT dapat terus mengelola karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan kinerja baik. Penerapan program pengembangan karir melalui *talent management* di UT sangatlah penting untuk dapat menemukan orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang ditawarkan dimasa mendatang, karena kaderisasi talent management adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memelihara dan menciptakan keunggulan organisasi. Diharapkan dengan mendapatkan pegawai yang bertalenta, maka UT memiliki kader-kader kepemimpinan baru yang dapat dipromosikan kelak untuk memimpin UT.

3. UT sebagai Institusi pendidikan yang cukup besar, sudah sewajarnya dapat mengembangkan terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan karir pegawainya. mengapa hal ini penting? Karena maju mundurnya UT kedepan ada di tangan para pegawainya. UT sudah sewajarnya mendukung program pengembangan karir berbasis talenta ini, Karena program ini dapat memberikan manfaat maupun tujuan yang nyata seperti dibawah ini. Smilansky (2008).
 1. Untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan.
 2. Untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif.
 3. Untuk memungkinkan adanya saling pengisian antareksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis, sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan.
 4. Untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan, yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik.
 5. Untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerjanya di puncak potensinya.
 6. Untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas.
4. Tantangan-tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam mewujudkan manajemen talenta berasal dari organisasi, Menurut Isukapally Jr. (2009), manajemen *talent pool* merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan menemukan, menarik, membangun, dan memelihara *talent* yang baik membutuhkan keterlibatan sebagian besar unit-unit perusahaan dan setelah menemukan *talent* yang baik, hal yang harus dilakukan adalah memeliharanya. UT harus dapat mengambil beberapa tindakan-tindakan untuk mewujudkannya. Hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: melakukan pemetaan jabatan, menempatkan pegawai berdasarkan keahlian, meningkatkan keahlian melalui pelatihan-pelatihan, menjalin kerjasama dengan pihak luar, membuat aturan dan kebijakan mengenai pengembangan karir berdasarkan talenta, membuat grand design SDM UT dan melibatkan konsultan/pakar untuk membuat format penilaian yang mampu mengakomodasi kebutuhan untuk mengembangkan karir karyawan.

5. Universitas terbuka sangat perlu menerapkan sistem pengembangan karir berdasarkan manajemen talenta, karena dapat memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi /perusahaan (nawawi,2001). Dan untuk menerapkan manajemen berbasis talenta, UT perlu memiliki alat-alat untuk mewujudkannya. Berdasarkan Berger & Berger (2008), ada empat langkah untuk menghasilkan alat-alat tersebut, yaitu:

1. Mengembangkan alat dan skala *assessment*
 - a) Menyusun definisi kompetensi dan skala pengukurannya;
 - b) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja dan skala pengukurannya;
 - c) Mengembangkan perkiraan potensi *talent* dan skala pengukurannya;
 - d) Mengaplikasikan skala pengukuran tersebut pada setiap pekerjaan.
2. Mengembangkan alat pelatihan dan pengembangan
 - a) Menyusun petunjuk pelaksanaan pembimbingan (*coaching*);
 - b) Menyusun direktori program pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan kompetensi;
 - c) Menyusun direktori buku yang terkait dengan pengembangan setiap jenis kompetensi
3. Melakukan evaluasi setiap karyawan dengan alat-alat tersebut
4. Menyiapkan rencana tindakan
 - a) Menyusun ikhtisar kekuatan karyawan;
 - b) Menyusun formulir dan rencana pengembangan kompetensi yang merupakan talenta individu.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Furchan. (2007). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* . Malang : Pustaka Pelajar

Berger, Lance A. & Berger, Dorothy R.. (2008). *The Handbook of Best Practice on Talent Management: Mengidentifikasi, Mengembangkan, dan Mempromosikan Orang Terbaik untuk Menciptakan Keunggulan Organisasi*. Diterjemahkan oleh Kumala Insiwi Suryo. Jakarta: Permata Printing

Hadari Nawawi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta

Isukapally Jr., Mythri. (2009). Employee Retention-Talent Management. *Social Science Research Network*, 1.

Lewis, R. E. dan Heckman, R. J. 2006. *Talent management: A critical review Human Resource Management Review*, 16, 139–154

Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta

Prastowo, Andi. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif : dalam perpektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Arruzz Media

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Smilansky, Jonathan. (2008). *Developing Executive Talent. Metode Efektif untuk Mengidentifikasi dan Mengembangkan Pemimpin dalam Perusahaan*. Diterjemahkan oleh Octa Melia Jalal. Jakarta: PPM.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Umar, Husein. 2008. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.